PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

MUBA MAJU
Lebih CEPAT



GAMBO MUBA
Treasure of Musi Banyuasin

PERATURAN DAERAH MUSI BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2026



TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi Anggaran;
   b. laporan perubahan saldo Anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan laporan keuangan APBDesa.

Pasal 2

(1) Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp3.968.164.168.909,51
b.	belanja	Rp3.871.365.389.427,79
	surplus	Rp96.798.779.481,72
c.	pembiayaan	
	- penerimaan	Rp50.002.992.663,01
	- pengeluaran	Rp26.586.109.626,00
	pembiayaan netto	Rp23.416.883.037,01
	sisa lebih perhitungan anggaran	Rp120.215.662.518,73

(2) Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

   a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(322.205.643.866,08) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp4.290.369.812.775,59
2.	realisasi	Rp3.968.164.168.909,51
	selisih kurang	Rp(322.205.643.866,08)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(442.474.685.480,81) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp4.313.840.074.908,60
2.	realisasi	Rp3.871.365.389.427,79
	selisih kurang	Rp(442.474.685.480,81)

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp120.269.041.614,73 dengan rincian sebagai berikut:

1.	defisit setelah perubahan	Rp(23.470.262.133,01)
2.	realisasi	Rp96.798.779.481,72
	selisih lebih	Rp120.269.041.614,73

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(53.379.096,00) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp50.056.371.759,01
2.	realisasi	Rp50.002.992.663,01
	selisih kurang	Rp(53.379.096,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp26.586.109.626,00
2.	realisasi	Rp26.586.109.626,00
	selisih	Rp0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(53.379.096,00) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp23.470.262.133,01
2.	realisasi	Rp23.416.883.037,01
	selisih kurang	Rp(53.379.096,00)

Pasal 3

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp.	Rp40.017.909.259,01
b.	penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	Rp39.964.530.163,01
	selisih	Rp.	Rp53.379.096,00
c.	silpa	Rp.	Rp120.215.662.518,73
	subtotal	Rp.	Rp120.269.041.614,73
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		Rp(53.379.096,00)
e.	lain-lain	Rp.	Rp0,00
f.	saldo anggaran lebih akhir	Rp.	Rp120.215.662.518,73

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp7.951.748.096.657,48
b.	jumlah kewajiban	Rp171.220.559.920,21
c.	jumlah ekuitas	Rp7.780.527.536.737,27

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

pendapatan	Rp4.845.826.836.301,42
beban	Rp3.747.909.748.541,07
surplus dari kegiatan operasional	Rp1.097.917.087.760,35
defisit dari kegiatan non operasional	Rp(63.076.396.198,53)
pos luar biasa	Rp0,00
surplus laporan operasional	Rp1.034.840.691.561,82

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 januari 2025	Rp50.020.804.636,01
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp838.901.184.346,18
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp(768.688.514.490,46)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp37.467.122,00
f.	saldo kas akhir per 31 desember tahun 2025	Rp120.217.562.517,73

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp7.970.883.849.249,46
b.	surplus lo	Rp1.034.840.691.561,82
c.	koreksi ekuitas	Rp(1.225.197.004.074,01)
d.	ekuitas akhir	Rp7.780.527.536.737,27

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.	Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan

			Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
u.	Lampiran XXI	:	Ikhtisar laporan keuangan desa;
v.	Lampiran XXII	:	Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
w.	Lampiran XXIII	:	Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
x.	Lampiran XXIV	:	Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
y.	Lampiran XXV	:	Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
z.	Lampiran XXVI	:	Rekapitulasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
aa.	Lampiran XXVII	:	Rekapitulasi belanja daerah untuk sinkronisasi program provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
ab.	Lampiran XXVIII	:	Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN

M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SYAFARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (2-22/2026)

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025..... 1 - 12

DAFTAR ISI ..... 1 - 5

LAMPIRAN I **LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TERDIRI ATAS :**

LAMPIRAN I.1 **RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ..... 1 - 31**

LAMPIRAN I.2 **RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN..... 1 - 33**

LAMPIRAN I.3 **RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

1.01.2.22.5.02.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN……	1 - 7
1.02.0.00.0.00.02	DINAS KESEHATAN.....	1 - 9
1.03.2.15.0.00.04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 - 7
1.04.1.03.2.10.05	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 - 4
1.05.0.00.0.00.08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 - 4
1.05.1.04.0.00.07	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	1 - 5
1.05.8.01.0.00.06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK……..	1 - 4
1.06.0.00.0.00.09	DINAS SOSIAL	1 - 4
2.07.3.32.5.06.10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 - 4

2.08.0.00.0.00.11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	-	4
2.09.0.00.0.00.12	DINAS KETAHANAN PANGAN.....	1	-	4
2.11.0.00.0.00.13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	-	5
2.12.0.00.0.00.14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	-	4
2.13.4.01.0.00.15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	-	4
2.14.0.00.0.00.16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	-	5
2.15.0.00.0.00.17	DINAS PERHUBUNGAN	1	-	5
2.16.2.20.2.21.18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	-	3
2.17.0.00.0.00.19	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH	1	-	4
2.18.4.01.0.00.20	DINAS PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	-	4
2.19.3.26.0.00.21	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.....	1	-	5
2.23.2.24.0.00.22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH.....	1	-	4
3.25.0.00.0.00.23	DINAS PERIKANAN…….	1	-	5
3.27.2.20.0.00.24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERTERNAKAN ……..	1	-	5
3.27.2.20.0.00.25	DINAS PERKEBUNAN	1	-	5
3.30.3.31.0.00.26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	-	4
4.01.5.02.0.00.27	SEKRETARIAT DAERAH	1	-	7
4.02.0.00.0.00.28	SEKRETARIAT DPRD…….	1	-	5
5.01.5.05.0.00.44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	1	-	5
5.02.0.00.0.00.45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	1	-	6

	5.02.0.00.0.00.46	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1	-	4
	5.03.0.00.0.00.47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	-	4
	6.01.0.00.0.00.44	INSPEKTORAT	1	-	4
	7.01.0.00.0.00.29	KECAMATAN SEKAYU	1	-	8
	7.01.0.00.0.00.30	KECAMATAN LAIS	1	-	3
	7.01.0.00.0.00.31	KECAMATAN BABAT TOMAN	1	-	6
	7.01.0.00.0.00.32	KECAMATAN KELUANG	1	-	5
	7.01.0.00.0.00.33	KECAMATAN SANGA DESA	1	-	6
	7.01.0.00.0.00.34	KECAMATAN PLAKAT TINGGI	1	-	3
	7.01.0.00.0.00.35	KECAMATAN BATANGHARI LEKO	1	-	4
	7.01.0.00.0.00.36	KECAMATAN SUNGAI KERUH	1	-	3
	7.01.0.00.0.00.37	KECAMATAN SUNGAI LILIN	1	-	6
	7.01.0.00.0.00.38	KECAMATAN BAYUNG LENCIR	1	-	6
	7.01.0.00.0.00.39	KECAMATAN LALAN	1	-	3
	7.01.0.00.0.00.40	KECAMATAN TUNGKAL JAYA	1	-	3
	7.01.0.00.0.00.41	KECAMATAN LAWANG WETAN	1	-	3
	7.01.0.00.0.00.42	KECAMATAN BABAT SUPAT	1	-	3
	7.01.0.00.0.00.43	KECAMATAN JIRAK JAYA ……....	1	-	3
LAMPIRAN I.4		**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....**	1	-	63
LAMPIRAN II		**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ....**	1	-	1
LAMPIRAN III		**LAPORAN OPERASIONAL .....……**	1	-	3
LAMPIRAN IV		**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....……**	1	-	1
LAMPIRAN V		**NERACA .....**	1	-	2
LAMPIRAN VI		**LAPORAN ARUS KAS .....**	1	-	2
LAMPIRAN VII		**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....**	1	-	282

LAMPIRAN VIII	**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH .....**	1	-	3
LAMPIRAN IX	**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH .....**	1	-	1
LAMPIRAN X	**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR .....**	1	-	1
LAMPIRAN XI	**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH .....**	1	-	1
LAMPIRAN XII	**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH.....**	1	-	4
LAMPIRAN XIII	**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP .....**	1	-	1
LAMPIRAN XIV	**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN .....**	1	-	1
LAMPIRAN XV	**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA .....**	1	-	4
LAMPIRAN XVI	**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH .....**	1	-	1
LAMPIRAN XVII	**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK .....**	1	-	1
LAMPIRAN XVIII	**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG .....**	1	-	1
LAMPIRAN XIX	**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA .....**	1	-	1
LAMPIRAN XX	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI DARI:**			
LAMPIRAN XX.1	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH .....**	1	-	1
LAMPIRAN XX.2	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH….....**	1	-	1
LAMPIRAN XXI	**LAPORAN KEUANGAN APBDESA .....**	1	-	8
LAMPIRAN XXII	**REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .....**	1	-	1
LAMPIRAN XXIII	**REKAPITULASI REALISASI DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*) .....**	1	-	3
LAMPIRAN XXIV	**REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)…….**	1	-	8
LAMPIRAN XXV	**RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN .....**	1	-	41

LAMPIRAN XXVI	**REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.....**	1	-	23
LAMPIRAN XXVII	**REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA ……...**	1	-	23
LAMPIRAN XXVIII	**REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.....**	1	-	7
LAMPIRAN XXIX	**REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.....**	1	-	5
LAMPIRAN XXX	**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) ……...**	1	-	1
LAMPIRAN XXXI	**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI *E-PURCHASING*…….....**	1	-	6
LAMPIRAN XXXII	**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB…….**	1	-	1
LAMPIRAN XXXIII	**PERNYATAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025 .....**	1	-	10
LAMPIRAN XXXIV	**KEPUTUSAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PERSETUJUAN RAPERDA .....**	1	-	5
LAMPIRAN XXXV	**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 .....**	1	-	67
LAMPIRAN XXXVI	**KEPUTUSAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RAPERDA .....**	1	-	100

Lampiran I : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. MUSI BANYUASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**92,49**	**3.754.947.990.722,66**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**587.378.681.108,99**	**561.951.316.985,08**	**95,67**	**393.331.951.633,26**
4.1.01	Pajak Daerah	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	99,04	113.650.131.384,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.660.787.000,00	9.914.556.645,00	175,14	6.626.027.122,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,31	27.898.190.463,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	327.742.877.358,99	311.812.260.408,11	95,13	245.157.602.663,51
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**587.378.681.108,99**	**561.951.316.985,08**	**95,67**	**393.331.951.633,26**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.702.991.131.666,60**	**3.406.212.851.924,43**	**91,98**	**3.354.108.863.089,40**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	3.233.090.228.896,00	92,23	3.114.853.763.214,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	173.122.623.028,43	87,61	239.255.099.875,40
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**197.590.148.166,60**	**173.122.623.028,43**	**87,61**	**239.255.099.875,40**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**3.702.991.131.666,60**	**3.406.212.851.924,43**	**91,98**	**3.354.108.863.089,40**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.507.176.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	7.507.176.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.507.176.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**92,49**	**3.754.947.990.722,66**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**89,74**	**3.811.670.043.170,23**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**88,77**	**2.507.571.123.568,16**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.605.850.647.744,57	1.459.387.408.621,22	90,87	1.199.348.281.960,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.979.321.942,31	834.930.090.186,19	85,28	1.166.182.290.152,25
5.1.05	Belanja Hibah	262.798.375.249,00	246.484.811.969,92	93,79	136.655.551.455,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	78.068.692.000,00	56.468.348.310,00	72,33	5.385.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**88,77**	**2.507.571.123.568,16**
5.2	**BELANJA MODAL**	**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**88,65**	**814.583.797.586,07**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,61	14.159.821.565,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	94,24	102.795.588.522,20
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	87,79	161.139.070.395,87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	87,42	519.469.106.288,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	99,70	17.020.210.815,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.393.177,00	79.228.870,00	82,19	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**88,65**	**814.583.797.586,07**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.442.284.504,55**	**2.766.488.804,00**	**50,83**	**2.155.951.800,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83	2.155.951.800,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.442.284.504,55**	**2.766.488.804,00**	**50,83**	**2.155.951.800,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**544.652.123.254,00**	**528.350.989.472,00**	**97,00**	**487.359.170.216,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,00	487.359.170.216,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**544.652.123.254,00**	**528.350.989.472,00**	**97,00**	**487.359.170.216,00**
	JUMLAH BELANJA	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**89,74**	**3.811.670.043.170,23**
	SURPLUS/DEFISIT	**(23.470.262.133,01)**	**96.798.779.481,72**	**(412,43)**	**(56.722.052.447,57)**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**23.470.262.133,01**	**23.416.883.037,01**	**99,77**	**106.778.424.206,58**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**50.056.371.759,01**	**50.002.992.663,01**	**99,89**	**131.728.424.206,58**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.056.371.759,01	39.964.530.163,01	79,83	131.728.424.206,58
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.038.462.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50.056.371.759,01**	**50.002.992.663,01**	**99,89**	**131.728.424.206,58**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**26.586.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**100,00**	**24.950.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00	24.950.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**26.586.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**100,00**	**24.950.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**23.470.262.133,01**	**23.416.883.037,01**	**99,77**	**106.778.424.206,58**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**120.215.662.518,73**	**0,00**	**50.056.371.759,01**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran I.1 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. MUSI BANYUASIN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	4.290.369.812.775,59	1.341.275.659.271,23	(2.949.094.153.504,36)	31,26
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	247.022.123.524,00	52.733.463.954,62	(194.288.659.569,38)	21,35
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	244.280.123.524,00	48.859.728.742,62	(195.420.394.781,38)	20,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101		Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	140.000.000.000,00	23.966.819.438,16	(116.033.180.561,84)	17,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	4	PENDAPATAN DAERAH	140.000.000.000,00	23.966.819.438,16	(116.033.180.561,84)	17,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000.000,00	23.966.819.438,16	(116.033.180.561,84)	17,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	140.000.000.000,00	23.966.819.438,16	(116.033.180.561,84)	17,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	29.000.000.000,00	8.094.953.894,06	(20.905.046.105,94)	27,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	29.000.000.000,00	8.094.953.894,06	(20.905.046.105,94)	27,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.000.000.000,00	8.094.953.894,06	(20.905.046.105,94)	27,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.000.000.000,00	8.094.953.894,06	(20.905.046.105,94)	27,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	26.500.000.000,00	7.613.086.347,00	(18.886.913.653,00)	28,73
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	26.500.000.000,00	7.613.086.347,00	(18.886.913.653,00)	28,73
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.500.000.000,00	7.613.086.347,00	(18.886.913.653,00)	28,73
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.500.000.000,00	7.613.086.347,00	(18.886.913.653,00)	28,73
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003		Puskesmas Ngulak	2.632.172.659,00	536.877.800,00	(2.095.294.859,00)	20,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	2.632.172.659,00	536.877.800,00	(2.095.294.859,00)	20,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.632.172.659,00	536.877.800,00	(2.095.294.859,00)	20,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.632.172.659,00	536.877.800,00	(2.095.294.859,00)	20,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		Puskesmas Babat Toman	3.161.128.960,00	693.692.323,00	(2.467.436.637,00)	21,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	3.161.128.960,00	693.692.323,00	(2.467.436.637,00)	21,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.161.128.960,00	693.692.323,00	(2.467.436.637,00)	21,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.161.128.960,00	693.692.323,00	(2.467.436.637,00)	21,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005		Puskesmas Ulak Paceh	1.800.000.000,00	374.744.338,00	(1.425.255.662,00)	20,82

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	1.800.000.000,00	374.744.338,00	(1.425.255.662,00)	20,82
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.800.000.000,00	374.744.338,00	(1.425.255.662,00)	20,82
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.800.000.000,00	374.744.338,00	(1.425.255.662,00)	20,82
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006		Puskesmas Tanah Abang	850.000.000,00	134.927.478,00	(715.072.522,00)	15,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	850.000.000,00	134.927.478,00	(715.072.522,00)	15,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	850.000.000,00	134.927.478,00	(715.072.522,00)	15,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	850.000.000,00	134.927.478,00	(715.072.522,00)	15,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007		Puskesmas Lubuk Bintialo	550.000.000,00	190.170.710,00	(359.829.290,00)	34,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	190.170.710,00	(359.829.290,00)	34,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000,00	190.170.710,00	(359.829.290,00)	34,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	550.000.000,00	190.170.710,00	(359.829.290,00)	34,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008		Puskesmas Bukit Selabu	450.000.000,00	86.397.380,00	(363.602.620,00)	19,20
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	86.397.380,00	(363.602.620,00)	19,20
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.000.000,00	86.397.380,00	(363.602.620,00)	19,20
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	450.000.000,00	86.397.380,00	(363.602.620,00)	19,20
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009		Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.951,00	210.419.595,00	(990.495.356,00)	17,52
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.914.951,00	210.419.595,00	(990.495.356,00)	17,52
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.914.951,00	210.419.595,00	(990.495.356,00)	17,52
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.200.914.951,00	210.419.595,00	(990.495.356,00)	17,52
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010		Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	172.977.668,00	(905.199.332,00)	16,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	1.078.177.000,00	172.977.668,00	(905.199.332,00)	16,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.078.177.000,00	172.977.668,00	(905.199.332,00)	16,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.078.177.000,00	172.977.668,00	(905.199.332,00)	16,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011		Puskesmas Sido Rahayu	929.290.500,00	155.400.370,00	(773.890.130,00)	16,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	929.290.500,00	155.400.370,00	(773.890.130,00)	16,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	929.290.500,00	155.400.370,00	(773.890.130,00)	16,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	929.290.500,00	155.400.370,00	(773.890.130,00)	16,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012		Puskesmas Tebing Bulang	2.060.837.338,00	390.288.883,00	(1.670.548.455,00)	18,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	2.060.837.338,00	390.288.883,00	(1.670.548.455,00)	18,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.060.837.338,00	390.288.883,00	(1.670.548.455,00)	18,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.060.837.338,00	390.288.883,00	(1.670.548.455,00)	18,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013		Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	236.624.185,00	(1.167.638.815,00)	16,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	1.404.263.000,00	236.624.185,00	(1.167.638.815,00)	16,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.404.263.000,00	236.624.185,00	(1.167.638.815,00)	16,85

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.404.263.000,00	236.624.185,00	(1.167.638.815,00)	16,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014		Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	780.930.227,00	(2.953.599.773,00)	20,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	3.734.530.000,00	780.930.227,00	(2.953.599.773,00)	20,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.734.530.000,00	780.930.227,00	(2.953.599.773,00)	20,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.734.530.000,00	780.930.227,00	(2.953.599.773,00)	20,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015		Puskesmas Lumpatan	2.849.318.442,00	485.479.557,00	(2.363.838.885,00)	17,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	2.849.318.442,00	485.479.557,00	(2.363.838.885,00)	17,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.849.318.442,00	485.479.557,00	(2.363.838.885,00)	17,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.849.318.442,00	485.479.557,00	(2.363.838.885,00)	17,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016		Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	413.704.642,00	(2.369.429.858,00)	14,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	4	PENDAPATAN DAERAH	2.783.134.500,00	413.704.642,00	(2.369.429.858,00)	14,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.783.134.500,00	413.704.642,00	(2.369.429.858,00)	14,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.783.134.500,00	413.704.642,00	(2.369.429.858,00)	14,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017		Puskesmas Gardu Harapan	810.650.280,00	137.230.030,00	(673.420.250,00)	16,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	4	PENDAPATAN DAERAH	810.650.280,00	137.230.030,00	(673.420.250,00)	16,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	810.650.280,00	137.230.030,00	(673.420.250,00)	16,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	810.650.280,00	137.230.030,00	(673.420.250,00)	16,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018		Puskesmas Teluk Kijing	800.000.000,00	174.635.526,00	(625.364.474,00)	21,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	4	PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	174.635.526,00	(625.364.474,00)	21,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.000.000,00	174.635.526,00	(625.364.474,00)	21,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	800.000.000,00	174.635.526,00	(625.364.474,00)	21,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019		Puskesmas Tanjung Kerang	1.609.166.800,00	251.379.155,00	(1.357.787.645,00)	15,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	4	PENDAPATAN DAERAH	1.609.166.800,00	251.379.155,00	(1.357.787.645,00)	15,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.609.166.800,00	251.379.155,00	(1.357.787.645,00)	15,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.609.166.800,00	251.379.155,00	(1.357.787.645,00)	15,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020		Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	695.252.668,00	(2.252.683.032,00)	23,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	4	PENDAPATAN DAERAH	2.947.935.700,00	695.252.668,00	(2.252.683.032,00)	23,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.947.935.700,00	695.252.668,00	(2.252.683.032,00)	23,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.947.935.700,00	695.252.668,00	(2.252.683.032,00)	23,58
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021		Puskesmas Sri Gunung	1.339.546.545,00	233.350.836,00	(1.106.195.709,00)	17,42
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	4	PENDAPATAN DAERAH	1.339.546.545,00	233.350.836,00	(1.106.195.709,00)	17,42
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.339.546.545,00	233.350.836,00	(1.106.195.709,00)	17,42
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.339.546.545,00	233.350.836,00	(1.106.195.709,00)	17,42
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022		Puskesmas Karya Maju	1.890.000.000,00	324.322.473,00	(1.565.677.527,00)	17,16

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	4	PENDAPATAN DAERAH	1.890.000.000,00	324.322.473,00	(1.565.677.527,00)	17,16
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.890.000.000,00	324.322.473,00	(1.565.677.527,00)	17,16
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.890.000.000,00	324.322.473,00	(1.565.677.527,00)	17,16
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023		Puskesmas Mekar jaya	1.034.886.000,00	232.245.821,40	(802.640.178,60)	22,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	4	PENDAPATAN DAERAH	1.034.886.000,00	232.245.821,40	(802.640.178,60)	22,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.034.886.000,00	232.245.821,40	(802.640.178,60)	22,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.034.886.000,00	232.245.821,40	(802.640.178,60)	22,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025		Puskesmas Suka Jaya	900.000.000,00	178.761.373,00	(721.238.627,00)	19,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	4	PENDAPATAN DAERAH	900.000.000,00	178.761.373,00	(721.238.627,00)	19,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.000.000,00	178.761.373,00	(721.238.627,00)	19,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	900.000.000,00	178.761.373,00	(721.238.627,00)	19,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026		Puskesmas Peninggalan	1.660.635.753,00	289.530.375,00	(1.371.105.378,00)	17,43
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	4	PENDAPATAN DAERAH	1.660.635.753,00	289.530.375,00	(1.371.105.378,00)	17,43
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.660.635.753,00	289.530.375,00	(1.371.105.378,00)	17,43
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.660.635.753,00	289.530.375,00	(1.371.105.378,00)	17,43
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027		Puskesmas Sumber Harum	950.623.000,00	185.265.612,00	(765.357.388,00)	19,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	4	PENDAPATAN DAERAH	950.623.000,00	185.265.612,00	(765.357.388,00)	19,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	950.623.000,00	185.265.612,00	(765.357.388,00)	19,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	950.623.000,00	185.265.612,00	(765.357.388,00)	19,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028		Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	146.950.451,00	(866.824.549,00)	14,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	4	PENDAPATAN DAERAH	1.013.775.000,00	146.950.451,00	(866.824.549,00)	14,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.013.775.000,00	146.950.451,00	(866.824.549,00)	14,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.013.775.000,00	146.950.451,00	(866.824.549,00)	14,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029		Puskesmas Bandar Agung	1.373.503.251,00	309.847.757,00	(1.063.655.494,00)	22,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	4	PENDAPATAN DAERAH	1.373.503.251,00	309.847.757,00	(1.063.655.494,00)	22,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.373.503.251,00	309.847.757,00	(1.063.655.494,00)	22,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.373.503.251,00	309.847.757,00	(1.063.655.494,00)	22,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030		Puskesmas Karang Mukti	1.872.642.857,00	288.404.156,00	(1.584.238.701,00)	15,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	4	PENDAPATAN DAERAH	1.872.642.857,00	288.404.156,00	(1.584.238.701,00)	15,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.872.642.857,00	288.404.156,00	(1.584.238.701,00)	15,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.872.642.857,00	288.404.156,00	(1.584.238.701,00)	15,40
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024		Puskesmas Bayung Lencir	4.487.727.488,00	787.288.450,00	(3.700.439.038,00)	17,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	4	PENDAPATAN DAERAH	4.487.727.488,00	787.288.450,00	(3.700.439.038,00)	17,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.487.727.488,00	787.288.450,00	(3.700.439.038,00)	17,54

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.487.727.488,00	787.288.450,00	(3.700.439.038,00)	17,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031		Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	87.769.224,00	(517.494.276,00)	14,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	4	PENDAPATAN DAERAH	605.263.500,00	87.769.224,00	(517.494.276,00)	14,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	605.263.500,00	87.769.224,00	(517.494.276,00)	14,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	605.263.500,00	87.769.224,00	(517.494.276,00)	14,50
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.742.000.000,00	3.873.735.212,00	1.131.735.212,00	141,27
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.000.000,00	29.760.000,00	(185.240.000,00)	13,84
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	215.000.000,00	29.760.000,00	(185.240.000,00)	13,84
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215.000.000,00	29.760.000,00	(185.240.000,00)	13,84
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00	29.760.000,00	(185.240.000,00)	13,84
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.527.000.000,00	3.843.975.212,00	1.316.975.212,00	152,12
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.527.000.000,00	3.843.975.212,00	1.316.975.212,00	152,12
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.527.000.000,00	3.843.975.212,00	1.316.975.212,00	152,12
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.527.000.000,00	3.843.975.212,00	1.316.975.212,00	152,12
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.828.927.000,00	1.112.690.000,00	(716.237.000,00)	60,84
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	142.427.000,00	155.159.000,00	12.732.000,00	108,94
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	142.427.000,00	155.159.000,00	12.732.000,00	108,94
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	142.427.000,00	155.159.000,00	12.732.000,00	108,94
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.427.000,00	155.159.000,00	12.732.000,00	108,94
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	142.427.000,00	155.159.000,00	12.732.000,00	108,94
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.630.000.000,00	936.281.000,00	(693.719.000,00)	57,44
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000		Dinas Lingkungan Hidup	1.630.000.000,00	936.281.000,00	(693.719.000,00)	57,44
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.630.000.000,00	936.281.000,00	(693.719.000,00)	57,44
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.630.000.000,00	936.281.000,00	(693.719.000,00)	57,44
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.630.000.000,00	936.281.000,00	(693.719.000,00)	57,44
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	56.500.000,00	21.250.000,00	(35.250.000,00)	37,61
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000		Dinas Perhubungan	56.500.000,00	21.250.000,00	(35.250.000,00)	37,61
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	56.500.000,00	21.250.000,00	(35.250.000,00)	37,61
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.500.000,00	21.250.000,00	(35.250.000,00)	37,61
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	56.500.000,00	21.250.000,00	(35.250.000,00)	37,61
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	874.860.000,00	526.384.810,00	(348.475.190,00)	60,17
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.000.000,00	1.802.000,00	(33.198.000,00)	5,15
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000		Dinas Perikanan	35.000.000,00	1.802.000,00	(33.198.000,00)	5,15
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	1.802.000,00	(33.198.000,00)	5,15

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00	1.802.000,00	(33.198.000,00)	5,15
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.000.000,00	1.802.000,00	(33.198.000,00)	5,15
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	179.860.000,00	219.976.760,00	40.116.760,00	122,30
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	40.000.000,00	15.245.000,00	(24.755.000,00)	38,11
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	15.245.000,00	(24.755.000,00)	38,11
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	15.245.000,00	(24.755.000,00)	38,11
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	15.245.000,00	(24.755.000,00)	38,11
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000		Dinas Perkebunan	139.860.000,00	204.731.760,00	64.871.760,00	146,38
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	139.860.000,00	204.731.760,00	64.871.760,00	146,38
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.860.000,00	204.731.760,00	64.871.760,00	146,38
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	139.860.000,00	204.731.760,00	64.871.760,00	146,38
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	660.000.000,00	304.606.050,00	(355.393.950,00)	46,15
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	660.000.000,00	304.606.050,00	(355.393.950,00)	46,15
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	660.000.000,00	304.606.050,00	(355.393.950,00)	46,15
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	660.000.000,00	304.606.050,00	(355.393.950,00)	46,15
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	660.000.000,00	290.870.900,00	(369.129.100,00)	44,07
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	13.735.150,00	13.735.150,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	250.000.000,00	170.000.000,00	(80.000.000,00)	68,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000,00	170.000.000,00	(80.000.000,00)	68,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000		Sekretariat Daerah	250.000.000,00	170.000.000,00	(80.000.000,00)	68,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	170.000.000,00	(80.000.000,00)	68,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	170.000.000,00	(80.000.000,00)	68,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	250.000.000,00	170.000.000,00	(80.000.000,00)	68,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.040.393.902.251,59	1.286.733.120.506,61	(2.753.660.781.744,98)	31,85
5.02			KEUANGAN	4.040.393.902.251,59	1.286.733.120.506,61	(2.753.660.781.744,98)	31,85
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.757.691.779.441,59	1.145.879.180.837,00	(2.611.812.598.604,59)	30,49
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.757.691.779.441,59	1.145.879.180.837,00	(2.611.812.598.604,59)	30,49
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.700.647.774,99	437.261.200,00	(54.263.386.574,99)	0,80
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.700.647.774,99	437.261.200,00	(54.263.386.574,99)	0,80
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.702.991.131.666,60	1.145.441.919.637,00	(2.557.549.212.029,60)	30,93
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	1.112.214.284.919,00	(2.393.186.698.581,00)	31,73
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	33.227.634.718,00	(164.362.513.448,60)	16,82
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	282.702.122.810,00	140.853.939.669,61	(141.848.183.140,39)	49,82
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	282.702.122.810,00	140.853.939.669,61	(141.848.183.140,39)	49,82

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	282.702.122.810,00	140.853.939.669,61	(141.848.183.140,39)	49,82
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	4.1.01	Pajak Daerah	223.975.016.750,00	84.033.360.072,35	(139.941.656.677,65)	37,52
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.727.106.060,00	56.820.579.597,26	28.093.473.537,26	197,79
		5	Belanja	4.313.840.074.908,60	1.174.437.994.929,83	(3.139.402.079.978,77)	27,22
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.713.988.609.763,20	687.822.897.489,83	(2.026.165.712.273,37)	25,34
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	989.582.029.956,00	246.578.489.961,00	(743.003.539.995,00)	24,92
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	989.582.029.956,00	246.578.489.961,00	(743.003.539.995,00)	24,92
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	989.582.029.956,00	246.578.489.961,00	(743.003.539.995,00)	24,92
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	909.525.627.669,00	237.007.080.261,00	(672.518.547.408,00)	26,06
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	772.564.354.246,00	231.532.157.483,00	(541.032.196.763,00)	29,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.490.594.673,00	4.200.357.278,00	(93.290.237.395,00)	4,31
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	39.470.678.750,00	1.274.565.500,00	(38.196.113.250,00)	3,23
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	80.056.402.287,00	9.571.409.700,00	(70.484.992.587,00)	11,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.627.986.943,00	2.250.391.000,00	(22.377.595.943,00)	9,14
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.207.536.051,00	7.321.018.700,00	(27.886.517.351,00)	20,79
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.220.879.293,00	0,00	(20.220.879.293,00)	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	719.889.042.809,60	181.512.473.243,83	(538.376.569.565,77)	25,21
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	419.816.271.829,00	134.435.973.799,00	(285.380.298.030,00)	32,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	419.816.271.829,00	134.435.973.799,00	(285.380.298.030,00)	32,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	379.501.974.698,00	132.470.915.965,00	(247.031.058.733,00)	34,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	268.274.333.909,00	104.262.560.061,00	(164.011.773.848,00)	38,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.727.640.789,00	27.458.355.904,00	(82.269.284.885,00)	25,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	50,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	40.314.297.131,00	1.965.057.834,00	(38.349.239.297,00)	4,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.813.685.681,00	1.488.093.034,00	(9.325.592.647,00)	13,76
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.500.611.450,00	476.964.800,00	(29.023.646.650,00)	1,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101		Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	151.722.825.896,00	27.066.203.870,44	(124.656.622.025,56)	17,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	5	BELANJA DAERAH	151.722.825.896,00	27.066.203.870,44	(124.656.622.025,56)	17,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	5.1	BELANJA OPERASI	145.486.831.486,00	24.770.541.810,44	(120.716.289.675,56)	17,03
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	5.1.01	Belanja Pegawai	59.374.041.156,00	9.883.950.913,00	(49.490.090.243,00)	16,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.112.790.330,00	14.886.590.897,44	(71.226.199.432,56)	17,29
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	5.2	BELANJA MODAL	6.235.994.410,00	2.295.662.060,00	(3.940.332.350,00)	36,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.940.332.350,00	0,00	(3.940.332.350,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.295.662.060,00	2.295.662.060,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	34.595.209.582,00	5.313.053.102,00	(29.282.156.480,00)	15,36
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	34.595.209.582,00	5.313.053.102,00	(29.282.156.480,00)	15,36
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.080.963.622,00	5.203.120.622,00	(25.877.843.000,00)	16,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.375.000.000,00	3.400.663.111,00	(10.974.336.889,00)	23,66
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.705.963.622,00	1.802.457.511,00	(14.903.506.111,00)	10,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.514.245.960,00	109.932.480,00	(3.404.313.480,00)	3,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.514.245.960,00	109.932.480,00	(3.404.313.480,00)	3,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	43.720.334.423,00	7.755.450.091,00	(35.964.884.332,00)	17,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	43.720.334.423,00	7.755.450.091,00	(35.964.884.332,00)	17,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.163.294.901,00	7.753.844.091,00	(27.409.450.810,00)	22,05
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	16.215.095.945,00	3.815.124.705,00	(12.399.971.240,00)	23,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.948.198.956,00	3.938.719.386,00	(15.009.479.570,00)	20,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.557.039.522,00	1.606.000,00	(8.555.433.522,00)	0,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.055.783.272,00	1.606.000,00	(3.054.177.272,00)	0,05
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.202.250.000,00	0,00	(5.202.250.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299.006.250,00	0,00	(299.006.250,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003		Puskesmas Ngulak	3.823.709.566,00	386.117.521,00	(3.437.592.045,00)	10,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5	BELANJA DAERAH	3.823.709.566,00	386.117.521,00	(3.437.592.045,00)	10,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.292.769.566,00	386.117.521,00	(2.906.652.045,00)	11,73
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	1.861.818.347,00	317.357.930,00	(1.544.460.417,00)	17,05
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.951.219,00	68.759.591,00	(1.362.191.628,00)	4,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	530.940.000,00	0,00	(530.940.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445.940.000,00	0,00	(445.940.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		Puskesmas Babat Toman	4.837.309.682,00	577.931.799,00	(4.259.377.883,00)	11,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5	BELANJA DAERAH	4.837.309.682,00	577.931.799,00	(4.259.377.883,00)	11,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.471.027.882,00	577.931.799,00	(3.893.096.083,00)	12,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	2.429.719.660,00	440.670.159,00	(1.989.049.501,00)	18,14
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.041.308.222,00	137.261.640,00	(1.904.046.582,00)	6,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	366.281.800,00	0,00	(366.281.800,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.481.800,00	0,00	(344.481.800,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.800.000,00	0,00	(21.800.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005		Puskesmas Ulak Paceh	2.447.926.919,00	220.481.518,00	(2.227.445.401,00)	9,01

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5	BELANJA DAERAH	2.447.926.919,00	220.481.518,00	(2.227.445.401,00)	9,01
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.258.577.230,00	220.481.518,00	(2.038.095.712,00)	9,76
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	1.170.000.000,00	169.111.268,00	(1.000.888.732,00)	14,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.088.577.230,00	51.370.250,00	(1.037.206.980,00)	4,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	189.349.689,00	0,00	(189.349.689,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.349.689,00	0,00	(189.349.689,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006		Puskesmas Tanah Abang	1.308.830.388,00	139.435.396,00	(1.169.394.992,00)	10,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5	BELANJA DAERAH	1.308.830.388,00	139.435.396,00	(1.169.394.992,00)	10,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.240.830.388,00	139.435.396,00	(1.101.394.992,00)	11,24
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	501.500.000,00	65.045.082,00	(436.454.918,00)	12,97
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.330.388,00	74.390.314,00	(664.940.074,00)	10,06
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	0,00	(68.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007		Puskesmas Lubuk Bintialo	1.305.040.059,00	202.782.202,00	(1.102.257.857,00)	15,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5	BELANJA DAERAH	1.305.040.059,00	202.782.202,00	(1.102.257.857,00)	15,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.040.059,00	202.782.202,00	(1.047.257.857,00)	16,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	385.000.000,00	179.423.201,00	(205.576.799,00)	46,60
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.040.059,00	23.359.001,00	(841.681.058,00)	2,70
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008		Puskesmas Bukit Selabu	895.813.305,00	98.369.891,00	(797.443.414,00)	10,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5	BELANJA DAERAH	895.813.305,00	98.369.891,00	(797.443.414,00)	10,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	850.813.305,00	98.369.891,00	(752.443.414,00)	11,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	270.000.000,00	57.271.091,00	(212.728.909,00)	21,21
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.813.305,00	41.098.800,00	(539.714.505,00)	7,08
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009		Puskesmas Cinta Karya	1.744.506.035,00	221.721.968,00	(1.522.784.067,00)	12,71
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5	BELANJA DAERAH	1.744.506.035,00	221.721.968,00	(1.522.784.067,00)	12,71
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.568.427.835,00	221.721.968,00	(1.346.705.867,00)	14,14
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	659.251.914,00	186.706.168,00	(472.545.746,00)	28,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.175.921,00	35.015.800,00	(874.160.121,00)	3,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	176.078.200,00	0,00	(176.078.200,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.022.400,00	0,00	(77.022.400,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.055.800,00	0,00	(99.055.800,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010		Puskesmas Suka Damai	1.565.919.541,00	134.879.946,00	(1.431.039.595,00)	8,61
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	5	BELANJA DAERAH	1.565.919.541,00	134.879.946,00	(1.431.039.595,00)	8,61
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.284.141,00	134.879.946,00	(1.215.404.195,00)	9,99
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	539.088.500,00	68.039.136,00	(471.049.364,00)	12,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.195.641,00	66.840.810,00	(744.354.831,00)	8,24
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	215.635.400,00	0,00	(215.635.400,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.635.400,00	0,00	(169.635.400,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011		Puskesmas Sido Rahayu	1.401.820.130,00	122.218.230,00	(1.279.601.900,00)	8,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5	BELANJA DAERAH	1.401.820.130,00	122.218.230,00	(1.279.601.900,00)	8,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.238.286.669,00	122.218.230,00	(1.116.068.439,00)	9,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	501.772.500,00	93.062.910,00	(408.709.590,00)	18,55
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.514.169,00	29.155.320,00	(707.358.849,00)	3,96
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.2	BELANJA MODAL	163.533.461,00	0,00	(163.533.461,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.533.461,00	0,00	(103.533.461,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012		Puskesmas Tebing Bulang	2.618.665.549,00	362.261.719,00	(2.256.403.830,00)	13,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5	BELANJA DAERAH	2.618.665.549,00	362.261.719,00	(2.256.403.830,00)	13,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.536.232.056,00	362.261.719,00	(2.173.970.337,00)	14,28
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	1.236.502.403,00	271.895.419,00	(964.606.984,00)	21,99
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.729.653,00	90.366.300,00	(1.209.363.353,00)	6,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	82.433.493,00	0,00	(82.433.493,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.433.493,00	0,00	(82.433.493,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013		Puskesmas Jirak	2.289.681.026,00	176.518.240,00	(2.113.162.786,00)	7,71
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5	BELANJA DAERAH	2.289.681.026,00	176.518.240,00	(2.113.162.786,00)	7,71
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	2.108.478.584,00	176.518.240,00	(1.931.960.344,00)	8,37
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	938.400.000,00	150.734.140,00	(787.665.860,00)	16,06
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.078.584,00	25.784.100,00	(1.144.294.484,00)	2,20
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.2	BELANJA MODAL	181.202.442,00	0,00	(181.202.442,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.466.200,00	0,00	(81.466.200,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.736.242,00	0,00	(99.736.242,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014		Puskesmas Balai Agung	4.671.730.749,00	483.527.869,00	(4.188.202.880,00)	10,35
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5	BELANJA DAERAH	4.671.730.749,00	483.527.869,00	(4.188.202.880,00)	10,35

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	4.221.730.749,00	483.527.869,00	(3.738.202.880,00)	11,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	1.974.765.000,00	317.808.269,00	(1.656.956.731,00)	16,09
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.246.965.749,00	165.719.600,00	(2.081.246.149,00)	7,38
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015		Puskesmas Lumpatan	3.555.216.929,00	457.126.036,36	(3.098.090.892,64)	12,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5	BELANJA DAERAH	3.555.216.929,00	457.126.036,36	(3.098.090.892,64)	12,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.177.360.469,00	457.126.036,36	(2.720.234.432,64)	14,39
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	1.510.759.000,00	269.665.018,36	(1.241.093.981,64)	17,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.666.601.469,00	187.461.018,00	(1.479.140.451,00)	11,25
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	377.856.460,00	0,00	(377.856.460,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.856.460,00	0,00	(177.856.460,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016		Puskesmas Lais	3.702.692.875,60	250.782.787,00	(3.451.910.088,60)	6,77
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5	BELANJA DAERAH	3.702.692.875,60	250.782.787,00	(3.451.910.088,60)	6,77
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.345.235.390,60	250.782.787,00	(3.094.452.603,60)	7,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.1.01	Belanja Pegawai	1.669.880.700,00	164.783.688,00	(1.505.097.012,00)	9,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.354.690,60	85.999.099,00	(1.589.355.591,60)	5,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	357.457.485,00	0,00	(357.457.485,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	357.457.485,00	0,00	(357.457.485,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017		Puskesmas Gardu Harapan	1.244.732.621,00	90.052.710,00	(1.154.679.911,00)	7,23
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5	BELANJA DAERAH	1.244.732.621,00	90.052.710,00	(1.154.679.911,00)	7,23
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.163.667.621,00	90.052.710,00	(1.073.614.911,00)	7,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	405.325.140,00	36.203.520,00	(369.121.620,00)	8,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.342.481,00	53.849.190,00	(704.493.291,00)	7,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	81.065.000,00	0,00	(81.065.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.065.000,00	0,00	(81.065.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018		Puskesmas Teluk Kijing	1.372.814.148,00	134.642.636,00	(1.238.171.512,00)	9,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	5	BELANJA DAERAH	1.372.814.148,00	134.642.636,00	(1.238.171.512,00)	9,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.291.495.623,00	134.642.636,00	(1.156.852.987,00)	10,43
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	5.1.01	Belanja Pegawai	487.911.148,00	103.854.236,00	(384.056.912,00)	21,29
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	803.584.475,00	30.788.400,00	(772.796.075,00)	3,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	81.318.525,00	0,00	(81.318.525,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.318.525,00	0,00	(81.318.525,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019		Puskesmas Tanjung Kerang	2.342.665.692,00	159.955.556,00	(2.182.710.136,00)	6,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	5	BELANJA DAERAH	2.342.665.692,00	159.955.556,00	(2.182.710.136,00)	6,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.185.860.692,00	158.620.556,00	(2.027.240.136,00)	7,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	5.1.01	Belanja Pegawai	890.273.410,00	90.060.665,00	(800.212.745,00)	10,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.587.282,00	68.559.891,00	(1.227.027.391,00)	5,29
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	5.2	BELANJA MODAL	156.805.000,00	1.335.000,00	(155.470.000,00)	0,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.805.000,00	1.335.000,00	(155.470.000,00)	0,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020		Puskesmas Sungai Lilin	3.722.190.820,00	413.998.605,00	(3.308.192.215,00)	11,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	5	BELANJA DAERAH	3.722.190.820,00	413.998.605,00	(3.308.192.215,00)	11,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	3.422.190.820,00	412.998.605,00	(3.009.192.215,00)	12,07
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	1.473.967.850,00	258.923.255,00	(1.215.044.595,00)	17,57
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.948.222.970,00	154.075.350,00	(1.794.147.620,00)	7,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	1.000.000,00	(299.000.000,00)	0,33
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	1.000.000,00	(299.000.000,00)	0,33
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021		Puskesmas Sri Gunung	1.873.768.829,00	159.988.822,00	(1.713.780.007,00)	8,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	5	BELANJA DAERAH	1.873.768.829,00	159.988.822,00	(1.713.780.007,00)	8,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.743.518.829,00	159.988.822,00	(1.583.530.007,00)	9,18
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	690.853.395,00	125.041.322,00	(565.812.073,00)	18,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.665.434,00	34.947.500,00	(1.017.717.934,00)	3,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	130.250.000,00	0,00	(130.250.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.250.000,00	0,00	(130.250.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022		Puskesmas Karya Maju	2.416.302.647,00	214.216.325,00	(2.202.086.322,00)	8,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	5	BELANJA DAERAH	2.416.302.647,00	214.216.325,00	(2.202.086.322,00)	8,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	2.174.201.804,00	214.216.325,00	(1.959.985.479,00)	9,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	5.1.01	Belanja Pegawai	1.071.308.400,00	159.246.425,00	(912.061.975,00)	14,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.893.404,00	54.969.900,00	(1.047.923.504,00)	4,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	5.2	BELANJA MODAL	242.100.843,00	0,00	(242.100.843,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.300.000,00	0,00	(131.300.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.800.843,00	0,00	(110.800.843,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023		Puskesmas Mekar jaya	1.791.890.699,00	158.906.772,00	(1.632.983.927,00)	8,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	5	BELANJA DAERAH	1.791.890.699,00	158.906.772,00	(1.632.983.927,00)	8,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	1.598.402.099,00	154.206.772,00	(1.444.195.327,00)	9,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	560.931.600,00	99.700.570,00	(461.231.030,00)	17,77

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.470.499,00	54.506.202,00	(982.964.297,00)	5,25
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	5.2	BELANJA MODAL	193.488.600,00	4.700.000,00	(188.788.600,00)	2,43
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.488.600,00	4.700.000,00	(138.788.600,00)	3,28
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025		Puskesmas Suka Jaya	1.621.608.986,00	174.999.884,00	(1.446.609.102,00)	10,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	5	BELANJA DAERAH	1.621.608.986,00	174.999.884,00	(1.446.609.102,00)	10,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.540.758.986,00	174.999.884,00	(1.365.759.102,00)	11,36
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	5.1.01	Belanja Pegawai	571.559.355,00	106.137.773,00	(465.421.582,00)	18,57
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.199.631,00	68.862.111,00	(900.337.520,00)	7,11
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	80.850.000,00	0,00	(80.850.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.850.000,00	0,00	(80.850.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026		Puskesmas Peninggalan	2.329.776.304,00	177.591.079,00	(2.152.185.225,00)	7,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	5	BELANJA DAERAH	2.329.776.304,00	177.591.079,00	(2.152.185.225,00)	7,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.059.281.054,00	177.591.079,00	(1.881.689.975,00)	8,62
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	852.849.266,00	141.795.682,00	(711.053.584,00)	16,63
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.431.788,00	35.795.397,00	(1.170.636.391,00)	2,97
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	270.495.250,00	0,00	(270.495.250,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.095.250,00	0,00	(229.095.250,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027		Puskesmas Sumber Harum	1.496.473.051,00	160.438.472,00	(1.336.034.579,00)	10,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	5	BELANJA DAERAH	1.496.473.051,00	160.438.472,00	(1.336.034.579,00)	10,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	1.371.473.051,00	160.438.472,00	(1.211.034.579,00)	11,70
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	5.1.01	Belanja Pegawai	460.359.000,00	83.276.422,00	(377.082.578,00)	18,09
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.114.051,00	77.162.050,00	(833.952.001,00)	8,47
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028		Puskesmas Berojaya Timur	1.685.915.583,00	96.679.364,00	(1.589.236.219,00)	5,73
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	5	BELANJA DAERAH	1.685.915.583,00	96.679.364,00	(1.589.236.219,00)	5,73
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.401.058.083,00	96.679.364,00	(1.304.378.719,00)	6,90
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	5.1.01	Belanja Pegawai	637.375.893,00	75.235.164,00	(562.140.729,00)	11,80
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.682.190,00	21.444.200,00	(742.237.990,00)	2,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	284.857.500,00	0,00	(284.857.500,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.377.500,00	0,00	(101.377.500,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.480.000,00	0,00	(183.480.000,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029		Puskesmas Bandar Agung	2.034.105.151,00	334.764.618,00	(1.699.340.533,00)	16,46
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	5	BELANJA DAERAH	2.034.105.151,00	334.764.618,00	(1.699.340.533,00)	16,46
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	1.864.718.101,00	334.764.618,00	(1.529.953.483,00)	17,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	5.1.01	Belanja Pegawai	735.185.195,00	297.281.574,00	(437.903.621,00)	40,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.532.906,00	37.483.044,00	(1.092.049.862,00)	3,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	5.2	BELANJA MODAL	169.387.050,00	0,00	(169.387.050,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.387.050,00	0,00	(169.387.050,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030		Puskesmas Karang Mukti	2.798.926.381,00	227.604.500,00	(2.571.321.881,00)	8,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	5	BELANJA DAERAH	2.798.926.381,00	227.604.500,00	(2.571.321.881,00)	8,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	2.498.926.381,00	227.604.500,00	(2.271.321.881,00)	9,11
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	5.1.01	Belanja Pegawai	1.174.003.400,00	185.281.090,00	(988.722.310,00)	15,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.324.922.981,00	42.323.410,00	(1.282.599.571,00)	3,19
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024		Puskesmas Bayung Lencir	5.936.044.738,00	494.547.467,03	(5.441.497.270,97)	8,33
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	5	BELANJA DAERAH	5.936.044.738,00	494.547.467,03	(5.441.497.270,97)	8,33
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	5.275.702.738,00	492.647.467,03	(4.783.055.270,97)	9,34
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	5.1.01	Belanja Pegawai	2.143.042.488,00	363.820.487,03	(1.779.222.000,97)	16,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.132.660.250,00	128.826.980,00	(3.003.833.270,00)	4,11
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	660.342.000,00	1.900.000,00	(658.442.000,00)	0,29
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.342.000,00	1.900.000,00	(338.442.000,00)	0,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	0,00	(320.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031		Puskesmas Air Balui	1.198.322.676,00	109.250.449,00	(1.089.072.227,00)	9,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	5	BELANJA DAERAH	1.198.322.676,00	109.250.449,00	(1.089.072.227,00)	9,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	5.1	BELANJA OPERASI	1.109.696.326,00	109.250.449,00	(1.000.445.877,00)	9,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	5.1.01	Belanja Pegawai	310.431.750,00	48.996.523,00	(261.435.227,00)	15,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.264.576,00	60.253.926,00	(739.010.650,00)	7,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	5.2	BELANJA MODAL	88.626.350,00	0,00	(88.626.350,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.626.350,00	0,00	(88.626.350,00)	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	736.467.692.206,60	198.916.193.129,00	(537.551.499.077,60)	27,01
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	573.184.547.383,60	165.254.780.240,00	(407.929.767.143,60)	28,83
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	573.184.547.383,60	165.254.780.240,00	(407.929.767.143,60)	28,83
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	130.436.637.000,71	35.251.180.030,00	(95.185.456.970,71)	27,03

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.321.623.503,60	5.908.240.689,00	(10.413.382.814,60)	36,20
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.115.013.497,11	29.342.939.341,00	(84.772.074.156,11)	25,71
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	442.747.910.382,89	130.003.600.210,00	(312.744.310.172,89)	29,36
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	890.132.000,00	90.132.000,00	(800.000.000,00)	10,13
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.105.823.868,00	1.728.283.120,00	(377.540.748,00)	82,07
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	439.751.954.514,89	128.185.185.090,00	(311.566.769.424,89)	29,15
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	163.283.144.823,00	33.661.412.889,00	(129.621.731.934,00)	20,62
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5	BELANJA DAERAH	163.283.144.823,00	33.661.412.889,00	(129.621.731.934,00)	20,62
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	115.490.044.563,00	22.727.818.089,00	(92.762.226.474,00)	19,68
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.313.956.788,00	430.728.439,00	(6.883.228.349,00)	5,89
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1.05	Belanja Hibah	108.176.087.775,00	22.297.089.650,00	(85.878.998.125,00)	20,61
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	47.793.100.260,00	10.933.594.800,00	(36.859.505.460,00)	22,88
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.174.885.000,00	1.174.885.000,00	0,00	100,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.451.234.050,00	5.158.738.000,00	(14.292.496.050,00)	26,52
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.166.981.210,00	4.599.971.800,00	(22.567.009.410,00)	16,93
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	126.681.793.622,00	20.711.744.582,00	(105.970.049.040,00)	16,35
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	126.681.793.622,00	20.711.744.582,00	(105.970.049.040,00)	16,35
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5	BELANJA DAERAH	126.681.793.622,00	20.711.744.582,00	(105.970.049.040,00)	16,35
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	44.699.830.923,00	8.324.629.082,00	(36.375.201.841,00)	18,62
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.630.489.745,00	3.154.522.276,00	(6.475.967.469,00)	32,76
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.980.454.845,00	1.698.882.506,00	(5.281.572.339,00)	24,34
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.778.886.333,00	421.224.300,00	(2.357.662.033,00)	15,16
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.310.000.000,00	3.050.000.000,00	(22.260.000.000,00)	12,05
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	81.981.962.699,00	12.387.115.500,00	(69.594.847.199,00)	15,11
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.099.290.000,00	759.290.000,00	(340.000.000,00)	69,07
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.692.387.050,00	2.427.852.150,00	(11.264.534.900,00)	17,73
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.190.285.649,00	9.199.973.350,00	(57.990.312.299,00)	13,69
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	64.168.850.552,00	15.864.672.556,00	(48.304.177.996,00)	24,72
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	38.551.075.727,00	10.878.302.936,00	(27.672.772.791,00)	28,22
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	38.551.075.727,00	10.878.302.936,00	(27.672.772.791,00)	28,22
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.847.056.206,00	10.765.930.976,00	(23.081.125.230,00)	31,81
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	23.399.622.621,00	4.846.388.864,00	(18.553.233.757,00)	20,71
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.447.433.585,00	5.919.542.112,00	(4.527.891.473,00)	56,66
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.704.019.521,00	112.371.960,00	(4.591.647.561,00)	2,39

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.505.940.021,00	112.371.960,00	(4.393.568.061,00)	2,49
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.079.500,00	0,00	(198.079.500,00)	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.617.774.825,00	4.986.369.620,00	(20.631.405.205,00)	19,46
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	25.617.774.825,00	4.986.369.620,00	(20.631.405.205,00)	19,46
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.043.603.975,20	4.788.526.620,00	(12.255.077.355,20)	28,10
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.501.912.693,70	1.842.630.370,00	(5.659.282.323,70)	24,56
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.541.691.281,50	2.945.896.250,00	(6.595.795.031,50)	30,87
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.574.170.849,80	197.843.000,00	(8.376.327.849,80)	2,31
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.354.849,80	0,00	(618.354.849,80)	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.640.000,00	197.843.000,00	(797.000,00)	99,60
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.757.176.000,00	0,00	(7.757.176.000,00)	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	77.199.200.617,00	24.239.324.018,00	(52.959.876.599,00)	31,40
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000		Dinas Sosial	77.199.200.617,00	24.239.324.018,00	(52.959.876.599,00)	31,40
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	77.199.200.617,00	24.239.324.018,00	(52.959.876.599,00)	31,40
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	77.017.300.617,00	24.239.324.018,00	(52.777.976.599,00)	31,47
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.957.740.069,00	2.488.960.849,00	(5.468.779.220,00)	31,28
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.300.868.548,00	9.354.638.169,00	(6.946.230.379,00)	57,39
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.758.692.000,00	12.395.725.000,00	(40.362.967.000,00)	23,50
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	181.900.000,00	0,00	(181.900.000,00)	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.900.000,00	0,00	(181.900.000,00)	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA	406.681.542.396,20	105.331.215.445,00	(301.350.326.951,20)	25,90
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.127.350.304,00	5.246.154.973,00	(9.881.195.331,00)	34,68
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.127.350.304,00	5.246.154.973,00	(9.881.195.331,00)	34,68
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	5	BELANJA DAERAH	15.127.350.304,00	5.246.154.973,00	(9.881.195.331,00)	34,68
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.929.235.508,00	5.246.154.973,00	(9.683.080.535,00)	35,14
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.766.652.740,00	2.341.508.669,00	(5.425.144.071,00)	30,15
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.162.582.768,00	2.904.646.304,00	(4.257.936.464,00)	40,55
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	198.114.796,00	0,00	(198.114.796,00)	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.114.796,00	0,00	(198.114.796,00)	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG	9.351.115.648,00	3.142.687.041,00	(6.208.428.607,00)	33,61
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.351.115.648,00	3.142.687.041,00	(6.208.428.607,00)	33,61
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	9.351.115.648,00	3.142.687.041,00	(6.208.428.607,00)	33,61
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.317.327.679,00	3.142.687.041,00	(6.174.640.638,00)	33,73
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.069.903.639,00	1.970.535.579,00	(4.099.368.060,00)	32,46

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.247.424.040,00	1.172.151.462,00	(2.075.272.578,00)	36,09
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	33.787.969,00	0,00	(33.787.969,00)	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.787.969,00	0,00	(33.787.969,00)	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.613.654.680,00	2.903.203.165,00	(7.710.451.515,00)	27,35
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000		Dinas Ketahanan Pangan	10.613.654.680,00	2.903.203.165,00	(7.710.451.515,00)	27,35
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	10.613.654.680,00	2.903.203.165,00	(7.710.451.515,00)	27,35
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.387.760.824,00	2.899.455.815,00	(7.488.305.009,00)	27,91
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.280.357.133,00	1.976.283.720,00	(4.304.073.413,00)	31,47
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.753.691,00	923.172.095,00	(1.857.581.596,00)	33,20
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.326.650.000,00	0,00	(1.326.650.000,00)	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	225.893.856,00	3.747.350,00	(222.146.506,00)	1,66
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.893.856,00	3.747.350,00	(222.146.506,00)	1,66
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.161.413.750,00	716.143.350,00	(445.270.400,00)	61,66
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.161.413.750,00	716.143.350,00	(445.270.400,00)	61,66
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.161.413.750,00	716.143.350,00	(445.270.400,00)	61,66
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	54.760.000,00	0,00	(54.760.000,00)	0,00
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.760.000,00	0,00	(54.760.000,00)	0,00
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.106.653.750,00	716.143.350,00	(390.510.400,00)	64,71
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.106.653.750,00	716.143.350,00	(390.510.400,00)	64,71
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	57.281.888.783,00	18.307.639.741,00	(38.974.249.042,00)	31,96
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000		Dinas Lingkungan Hidup	57.281.888.783,00	18.307.639.741,00	(38.974.249.042,00)	31,96
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	57.281.888.783,00	18.307.639.741,00	(38.974.249.042,00)	31,96
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.587.897.508,00	17.640.456.616,00	(30.947.440.892,00)	36,31
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.235.623.328,00	3.689.675.257,00	(7.545.948.071,00)	32,84
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.312.274.180,00	13.950.781.359,00	(23.361.492.821,00)	37,39
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.693.991.275,00	667.183.125,00	(8.026.808.150,00)	7,67
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.746.363.150,00	419.555.000,00	(7.326.808.150,00)	5,42
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	947.628.125,00	247.628.125,00	(700.000.000,00)	26,13
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT	22.560.453.778,00	5.390.147.448,00	(17.170.306.330,00)	23,89
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.560.453.778,00	5.390.147.448,00	(17.170.306.330,00)	23,89
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	22.560.453.778,00	5.390.147.448,00	(17.170.306.330,00)	23,89
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.978.015.723,00	5.243.474.441,00	(11.734.541.282,00)	30,88
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.598.617.187,00	3.709.607.057,00	(6.889.010.130,00)	35,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.379.398.536,00	1.533.867.384,00	(4.845.531.152,00)	24,04
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.582.438.055,00	146.673.007,00	(5.435.765.048,00)	2,63
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.973.643.575,00	0,00	(2.973.643.575,00)	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.000.000,00	97.277.938,00	(2.402.722.062,00)	3,89
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.395.069,00	(604.931,00)	98,79
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	58.794.480,00	0,00	(58.794.480,00)	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.707.159.264,00	5.326.545.365,00	(12.380.613.899,00)	30,08
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.707.159.264,00	5.326.545.365,00	(12.380.613.899,00)	30,08
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	17.707.159.264,00	5.326.545.365,00	(12.380.613.899,00)	30,08
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.461.971.919,00	5.184.504.565,00	(12.277.467.354,00)	29,69
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.102.962.376,00	1.860.962.327,00	(4.242.000.049,00)	30,49
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.359.009.543,00	3.323.542.238,00	(8.035.467.305,00)	29,26
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	245.187.345,00	142.040.800,00	(103.146.545,00)	57,93
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.187.345,00	142.040.800,00	(103.146.545,00)	57,93
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BER	22.894.940.858,00	6.163.629.329,00	(16.731.311.529,00)	26,92
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000		Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	22.894.940.858,00	6.163.629.329,00	(16.731.311.529,00)	26,92
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	22.894.940.858,00	6.163.629.329,00	(16.731.311.529,00)	26,92
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.493.738.932,00	6.163.629.329,00	(14.330.109.603,00)	30,08
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.617.299.460,00	3.529.246.331,00	(6.088.053.129,00)	36,70
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.876.439.472,00	2.634.382.998,00	(8.242.056.474,00)	24,22
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.401.201.926,00	0,00	(2.401.201.926,00)	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.314.184.926,00	0,00	(2.314.184.926,00)	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.017.000,00	0,00	(87.017.000,00)	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	44.168.071.890,00	15.404.503.452,00	(28.763.568.438,00)	34,88
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.027.592.200,00	9.674.070.210,00	(16.353.521.990,00)	37,17
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	26.027.592.200,00	9.674.070.210,00	(16.353.521.990,00)	37,17
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.782.455.700,00	3.739.676.710,00	(8.042.778.990,00)	31,74
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.782.455.700,00	3.739.676.710,00	(8.042.778.990,00)	31,74
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.245.136.500,00	5.934.393.500,00	(8.310.743.000,00)	41,66
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.245.136.500,00	5.934.393.500,00	(8.310.743.000,00)	41,66
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000		Dinas Perhubungan	18.140.479.690,00	5.730.433.242,00	(12.410.046.448,00)	31,59
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	18.140.479.690,00	5.730.433.242,00	(12.410.046.448,00)	31,59
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.502.397.612,60	5.714.982.042,00	(10.787.415.570,60)	34,63
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.358.875.877,00	2.660.595.696,00	(5.698.280.181,00)	31,83

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.693.521.735,60	3.054.386.346,00	(4.639.135.389,60)	39,70
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.638.082.077,40	15.451.200,00	(1.622.630.877,40)	0,94
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.638.082.077,40	15.451.200,00	(1.622.630.877,40)	0,94
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.920.577.955,40	8.039.750.210,00	(22.880.827.745,40)	26,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	30.920.577.955,40	8.039.750.210,00	(22.880.827.745,40)	26,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	30.920.577.955,40	8.039.750.210,00	(22.880.827.745,40)	26,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.065.739.879,50	8.039.750.210,00	(22.025.989.669,50)	26,74
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.688.530.587,00	2.457.154.208,00	(5.231.376.379,00)	31,96
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.247.542.242,50	5.582.596.002,00	(15.664.946.240,50)	26,27
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.129.667.050,00	0,00	(1.129.667.050,00)	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	854.838.075,90	0,00	(854.838.075,90)	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	654.838.075,90	0,00	(654.838.075,90)	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.818.749.442,00	5.389.344.835,00	(11.429.404.607,00)	32,04
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.818.749.442,00	5.389.344.835,00	(11.429.404.607,00)	32,04
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	16.818.749.442,00	5.389.344.835,00	(11.429.404.607,00)	32,04
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.551.407.142,00	5.389.344.835,00	(11.162.062.307,00)	32,56
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.473.626.142,00	1.579.270.684,00	(3.894.355.458,00)	28,85
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.286.912.000,00	846.936.651,00	(3.439.975.349,00)	19,76
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.1.05	Belanja Hibah	6.790.869.000,00	2.963.137.500,00	(3.827.731.500,00)	43,63
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	267.342.300,00	0,00	(267.342.300,00)	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.354.900,00	0,00	(217.354.900,00)	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.987.400,00	0,00	(49.987.400,00)	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.893.414.726,50	5.520.947.281,00	(13.372.467.445,50)	29,22
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.893.414.726,50	5.520.947.281,00	(13.372.467.445,50)	29,22
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	18.893.414.726,50	5.520.947.281,00	(13.372.467.445,50)	29,22
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.582.076.395,50	4.665.328.281,00	(10.916.748.114,50)	29,94
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.508.528.008,00	3.733.503.036,00	(6.775.024.972,00)	35,53
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.073.548.387,50	931.825.245,00	(4.141.723.142,50)	18,37
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.311.338.331,00	855.619.000,00	(2.455.719.331,00)	25,84
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.298.259.331,00	842.540.000,00	(2.455.719.331,00)	25,54
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.079.000,00	13.079.000,00	0,00	100,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	118.332.272.052,00	17.157.783.637,00	(101.174.488.415,00)	14,50

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	118.332.272.052,00	17.157.783.637,00	(101.174.488.415,00)	14,50
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	118.332.272.052,00	17.157.783.637,00	(101.174.488.415,00)	14,50
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	92.791.629.644,00	16.544.628.137,00	(76.247.001.507,00)	17,83
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.423.530.076,00	3.209.085.379,00	(6.214.444.697,00)	34,05
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.767.919.668,00	10.107.068.958,00	(27.660.850.710,00)	26,76
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.1.05	Belanja Hibah	45.600.179.900,00	3.228.473.800,00	(42.371.706.100,00)	7,08
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.540.642.408,00	613.155.500,00	(24.927.486.908,00)	2,40
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	638.631.908,00	81.088.000,00	(557.543.908,00)	12,70
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.902.010.500,00	532.067.500,00	(24.369.943.000,00)	2,14
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	766.009.363,30	135.141.474,00	(630.867.889,30)	17,64
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	766.009.363,30	135.141.474,00	(630.867.889,30)	17,64
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	766.009.363,30	135.141.474,00	(630.867.889,30)	17,64
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	594.775.805,30	36.641.474,00	(558.134.331,30)	6,16
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.775.805,30	36.641.474,00	(558.134.331,30)	6,16
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	171.233.558,00	98.500.000,00	(72.733.558,00)	57,52
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.233.558,00	98.500.000,00	(72.733.558,00)	57,52
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.552.730.108,00	573.007.388,00	(979.722.720,00)	36,90
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	1.552.730.108,00	573.007.388,00	(979.722.720,00)	36,90
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	1.552.730.108,00	573.007.388,00	(979.722.720,00)	36,90
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.246.227.661,00	573.007.388,00	(673.220.273,00)	45,98
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.227.661,00	573.007.388,00	(673.220.273,00)	45,98
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	306.502.447,00	0,00	(306.502.447,00)	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.903.750,00	0,00	(268.903.750,00)	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	37.598.697,00	0,00	(37.598.697,00)	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.248.141.325,00	2.291.611.821,00	(3.956.529.504,00)	36,68
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.248.141.325,00	2.291.611.821,00	(3.956.529.504,00)	36,68
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.248.141.325,00	2.291.611.821,00	(3.956.529.504,00)	36,68
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.819.156.325,00	2.191.726.821,00	(3.627.429.504,00)	37,66
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.347.156.775,00	849.727.271,00	(2.497.429.504,00)	25,39
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.471.999.550,00	1.341.999.550,00	(1.130.000.000,00)	54,29
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	428.985.000,00	99.885.000,00	(329.100.000,00)	23,28
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	313.985.000,00	99.885.000,00	(214.100.000,00)	31,81
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.859.796.851,00	3.574.084.535,00	(8.285.712.316,00)	30,14

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.859.796.851,00	3.574.084.535,00	(8.285.712.316,00)	30,14
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	11.859.796.851,00	3.574.084.535,00	(8.285.712.316,00)	30,14
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.023.150.551,00	3.574.084.535,00	(7.449.066.016,00)	32,42
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.476.594.326,00	2.542.488.425,00	(4.934.105.901,00)	34,01
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.332.312,00	1.031.596.110,00	(1.818.736.202,00)	36,19
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.1.05	Belanja Hibah	696.223.913,00	0,00	(696.223.913,00)	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	836.646.300,00	0,00	(836.646.300,00)	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	635.630.740,00	0,00	(635.630.740,00)	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	201.015.560,00	0,00	(201.015.560,00)	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	423.801.618,00	48.890.400,00	(374.911.218,00)	11,54
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	423.801.618,00	48.890.400,00	(374.911.218,00)	11,54
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	423.801.618,00	48.890.400,00	(374.911.218,00)	11,54
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	370.823.593,00	48.890.400,00	(321.933.193,00)	13,18
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.823.593,00	48.890.400,00	(321.933.193,00)	13,18
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	52.978.025,00	0,00	(52.978.025,00)	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.978.025,00	0,00	(52.978.025,00)	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	139.841.509.908,00	32.790.178.321,00	(107.051.331.587,00)	23,45
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.197.107.218,00	4.164.129.288,00	(12.032.977.930,00)	25,71
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000		Dinas Perikanan	16.197.107.218,00	4.164.129.288,00	(12.032.977.930,00)	25,71
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	16.197.107.218,00	4.164.129.288,00	(12.032.977.930,00)	25,71
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.956.557.534,00	4.164.129.288,00	(11.792.428.246,00)	26,10
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.602.201.103,00	2.324.566.010,00	(5.277.635.093,00)	30,58
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.167.552.556,00	1.431.898.278,00	(2.735.654.278,00)	34,36
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.186.803.875,00	407.665.000,00	(3.779.138.875,00)	9,74
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	240.549.684,00	0,00	(240.549.684,00)	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.549.684,00	0,00	(240.549.684,00)	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.579.690.700,00	705.143.978,00	(2.874.546.722,00)	19,70
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	3.579.690.700,00	705.143.978,00	(2.874.546.722,00)	19,70
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	3.579.690.700,00	705.143.978,00	(2.874.546.722,00)	19,70
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.379.690.700,00	705.143.978,00	(2.674.546.722,00)	20,86
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.379.690.700,00	705.143.978,00	(2.674.546.722,00)	20,86
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	97.578.106.944,00	21.447.661.882,00	(76.130.445.062,00)	21,98

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	52.512.743.436,00	13.066.508.707,00	(39.446.234.729,00)	24,88
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	52.512.743.436,00	13.066.508.707,00	(39.446.234.729,00)	24,88
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	52.036.660.957,00	13.066.508.707,00	(38.970.152.250,00)	25,11
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	26.528.357.893,02	8.234.380.858,00	(18.293.977.035,02)	31,04
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.787.172.513,98	4.192.014.349,00	(8.595.158.164,98)	32,78
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5.1.05	Belanja Hibah	12.721.130.550,00	640.113.500,00	(12.081.017.050,00)	5,03
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	476.082.479,00	0,00	(476.082.479,00)	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.082.479,00	0,00	(276.082.479,00)	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000		Dinas Perkebunan	45.065.363.508,00	8.381.153.175,00	(36.684.210.333,00)	18,60
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	45.065.363.508,00	8.381.153.175,00	(36.684.210.333,00)	18,60
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	42.588.994.737,00	8.087.728.175,00	(34.501.266.562,00)	18,99
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.276.486.946,00	2.729.250.739,00	(6.547.236.207,00)	29,42
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.724.384.067,00	3.246.358.936,00	(8.478.025.131,00)	27,69
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5.1.05	Belanja Hibah	21.588.123.724,00	2.112.118.500,00	(19.476.005.224,00)	9,78
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.476.368.771,00	293.425.000,00	(2.182.943.771,00)	11,85
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.093.693.971,00	40.000.000,00	(2.053.693.971,00)	1,91
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382.674.800,00	253.425.000,00	(129.249.800,00)	66,22
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.814.637.605,50	6.392.004.193,00	(14.422.633.412,50)	30,71
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.814.637.605,50	6.392.004.193,00	(14.422.633.412,50)	30,71
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	20.814.637.605,50	6.392.004.193,00	(14.422.633.412,50)	30,71
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.040.782.782,50	5.819.156.423,00	(14.221.626.359,50)	29,04
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.177.083.129,00	3.465.760.323,00	(6.711.322.806,00)	34,05
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.863.699.653,50	2.353.396.100,00	(7.510.303.553,50)	23,86
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	773.854.823,00	572.847.770,00	(201.007.053,00)	74,03
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.334.853,00	0,00	(145.334.853,00)	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	628.519.970,00	572.847.770,00	(55.672.200,00)	91,14
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.515.928.854,50	21.260.000,00	(1.494.668.854,50)	1,40
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.515.928.854,50	21.260.000,00	(1.494.668.854,50)	1,40
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	1.515.928.854,50	21.260.000,00	(1.494.668.854,50)	1,40
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.080.594.362,50	21.260.000,00	(1.059.334.362,50)	1,97
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.594.362,50	21.260.000,00	(1.059.334.362,50)	1,97
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	435.334.492,00	0,00	(435.334.492,00)	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.610.544,00	0,00	(12.610.544,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.723.948,00	0,00	(422.723.948,00)	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	156.038.586,00	59.978.980,00	(96.059.606,00)	38,44
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	156.038.586,00	59.978.980,00	(96.059.606,00)	38,44
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000	5	BELANJA DAERAH	156.038.586,00	59.978.980,00	(96.059.606,00)	38,44
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	156.038.586,00	59.978.980,00	(96.059.606,00)	38,44
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.038.586,00	59.978.980,00	(96.059.606,00)	38,44
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	259.707.108.286,00	75.319.089.648,00	(184.388.018.638,00)	29,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	139.334.235.055,00	35.881.164.523,00	(103.453.070.532,00)	25,75
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000		Sekretariat Daerah	139.334.235.055,00	35.881.164.523,00	(103.453.070.532,00)	25,75
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	139.334.235.055,00	35.881.164.523,00	(103.453.070.532,00)	25,75
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	132.544.645.494,72	34.474.697.023,00	(98.069.948.471,72)	26,01
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	35.809.352.655,00	11.680.723.354,00	(24.128.629.301,00)	32,62
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.189.074.839,72	22.793.973.669,00	(67.395.101.170,72)	25,27
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5.1.05	Belanja Hibah	6.546.218.000,00	0,00	(6.546.218.000,00)	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.789.589.560,28	1.406.467.500,00	(5.383.122.060,28)	20,72
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.498.075.560,28	1.406.467.500,00	(5.091.608.060,28)	21,64
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	291.514.000,00	0,00	(291.514.000,00)	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	120.372.873.231,00	39.437.925.125,00	(80.934.948.106,00)	32,76
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000		Sekretariat DPRD	120.372.873.231,00	39.437.925.125,00	(80.934.948.106,00)	32,76
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	120.372.873.231,00	39.437.925.125,00	(80.934.948.106,00)	32,76
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	5.1	BELANJA OPERASI	96.098.608.057,40	32.000.512.743,00	(64.098.095.314,40)	33,30
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	36.488.632.228,00	15.336.589.562,00	(21.152.042.666,00)	42,03
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.609.975.829,40	16.663.923.181,00	(42.946.052.648,40)	27,95
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.274.265.173,60	7.437.412.382,00	(16.836.852.791,60)	30,64
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.950.814.310,60	5.086.527.534,00	(14.864.286.776,60)	25,50
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.323.450.863,00	2.350.884.848,00	(1.972.566.015,00)	54,38
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	658.857.333.465,74	232.787.636.647,00	(426.069.696.818,74)	35,33
5.01			PERENCANAAN	20.524.749.454,80	6.824.539.168,00	(13.700.210.286,80)	33,25
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.524.749.454,80	6.824.539.168,00	(13.700.210.286,80)	33,25
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5	BELANJA DAERAH	20.524.749.454,80	6.824.539.168,00	(13.700.210.286,80)	33,25
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.314.338.742,80	6.824.539.168,00	(13.489.799.574,80)	33,59
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.311.622.748,00	4.625.963.501,00	(8.685.659.247,00)	34,75
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.002.715.994,80	2.198.575.667,00	(4.804.140.327,80)	31,40
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.2	BELANJA MODAL	210.410.712,00	0,00	(210.410.712,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.410.712,00	0,00	(210.410.712,00)	0,00
5.02			KEUANGAN	618.242.992.745,24	219.644.365.079,00	(398.598.627.666,24)	35,53
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.771.193.000,00	3.127.191.100,00	(5.644.001.900,00)	35,65
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.771.193.000,00	3.127.191.100,00	(5.644.001.900,00)	35,65
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.771.193.000,00	3.127.191.100,00	(5.644.001.900,00)	35,65
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.771.193.000,00	3.127.191.100,00	(5.644.001.900,00)	35,65
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	571.334.940.609,24	206.238.335.550,00	(365.096.605.059,24)	36,10
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5	BELANJA DAERAH	571.334.940.609,24	206.238.335.550,00	(365.096.605.059,24)	36,10
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.228.161.993,69	6.132.450.063,00	(14.095.711.930,69)	30,32
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.705.866.618,05	4.492.593.744,00	(9.213.272.874,05)	32,78
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.522.295.375,64	1.639.856.319,00	(4.882.439.056,64)	25,14
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.012.370.857,00	0,00	(1.012.370.857,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.012.370.857,00	0,00	(1.012.370.857,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.442.284.504,55	2.082.560,00	(5.440.201.944,55)	0,04
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.082.560,00	(5.440.201.944,55)	0,04
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	544.652.123.254,00	200.103.802.927,00	(344.548.320.327,00)	36,74
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.652.123.254,00	200.103.802.927,00	(344.548.320.327,00)	36,74
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	38.136.859.136,00	10.278.838.429,00	(27.858.020.707,00)	26,95
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5	BELANJA DAERAH	38.136.859.136,00	10.278.838.429,00	(27.858.020.707,00)	26,95
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.1	BELANJA OPERASI	37.531.956.397,00	10.154.921.429,00	(27.377.034.968,00)	27,06
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	29.664.788.265,00	7.962.100.951,00	(21.702.687.314,00)	26,84
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.867.168.132,00	2.192.820.478,00	(5.674.347.654,00)	27,87
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.2	BELANJA MODAL	604.902.739,00	123.917.000,00	(480.985.739,00)	20,49
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.402.069,00	39.108.000,00	(170.294.069,00)	18,68
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.960.670,00	48.269.000,00	(310.691.670,00)	13,45
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.540.000,00	36.540.000,00	0,00	100,00
5.03			KEPEGAWAIAN	18.901.341.166,00	6.278.625.600,00	(12.622.715.566,00)	33,22
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.901.341.166,00	6.278.625.600,00	(12.622.715.566,00)	33,22
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5	BELANJA DAERAH	18.901.341.166,00	6.278.625.600,00	(12.622.715.566,00)	33,22
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.504.775.054,00	6.278.625.600,00	(12.226.149.454,00)	33,93
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.035.706.672,00	3.404.194.770,00	(6.631.511.902,00)	33,92
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.469.068.382,00	2.874.430.830,00	(5.594.637.552,00)	33,94
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.2	BELANJA MODAL	396.566.112,00	0,00	(396.566.112,00)	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.666.112,00	0,00	(221.666.112,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.900.000,00	0,00	(174.900.000,00)	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.188.250.099,70	40.106.800,00	(1.148.143.299,70)	3,38
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.188.250.099,70	40.106.800,00	(1.148.143.299,70)	3,38
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5	BELANJA DAERAH	1.188.250.099,70	40.106.800,00	(1.148.143.299,70)	3,38
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.187.593.978,70	40.106.800,00	(1.147.487.178,70)	3,38
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.593.978,70	40.106.800,00	(1.147.487.178,70)	3,38
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.2	BELANJA MODAL	656.121,00	0,00	(656.121,00)	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.121,00	0,00	(656.121,00)	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	30.408.129.304,00	9.198.970.578,00	(21.209.158.726,00)	30,25
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	30.408.129.304,00	9.198.970.578,00	(21.209.158.726,00)	30,25
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000		Inspektorat	30.408.129.304,00	9.198.970.578,00	(21.209.158.726,00)	30,25
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	5	BELANJA DAERAH	30.408.129.304,00	9.198.970.578,00	(21.209.158.726,00)	30,25
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.031.219.164,00	9.198.970.578,00	(20.832.248.586,00)	30,63
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	21.648.192.108,00	6.443.295.930,00	(15.204.896.178,00)	29,76
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.383.027.056,00	2.755.674.648,00	(5.627.352.408,00)	32,87
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	5.2	BELANJA MODAL	376.910.140,00	0,00	(376.910.140,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.910.140,00	0,00	(376.910.140,00)	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	87.916.606.622,46	27.543.860.743,00	(60.372.745.879,46)	31,33
7.01			KECAMATAN	87.916.606.622,46	27.543.860.743,00	(60.372.745.879,46)	31,33
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		Kecamatan Sekayu	10.324.889.048,00	3.940.115.627,00	(6.384.773.421,00)	38,16
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5	BELANJA DAERAH	10.324.889.048,00	3.940.115.627,00	(6.384.773.421,00)	38,16
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.179.487.031,00	3.940.115.627,00	(6.239.371.404,00)	38,71
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.353.190.629,00	3.165.202.121,00	(5.187.988.508,00)	37,89
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.826.296.402,00	774.913.506,00	(1.051.382.896,00)	42,43
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.2	BELANJA MODAL	145.402.017,00	0,00	(145.402.017,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.402.017,00	0,00	(145.402.017,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		Kecamatan Lais	4.725.637.985,00	1.578.573.624,00	(3.147.064.361,00)	33,40
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5	BELANJA DAERAH	4.725.637.985,00	1.578.573.624,00	(3.147.064.361,00)	33,40
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.646.172.996,20	1.578.573.624,00	(3.067.599.372,20)	33,98
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.546.976.571,00	1.261.873.693,00	(2.285.102.878,00)	35,58
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.196.425,20	316.699.931,00	(782.496.494,20)	28,81
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2	BELANJA MODAL	79.464.988,80	0,00	(79.464.988,80)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.464.988,80	0,00	(79.464.988,80)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		Kecamatan Babat Toman	6.864.524.708,99	3.240.443.917,00	(3.624.080.791,99)	47,21

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5	BELANJA DAERAH	6.864.524.708,99	3.240.443.917,00	(3.624.080.791,99)	47,21
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.778.741.908,99	3.201.643.917,00	(3.577.097.991,99)	47,23
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.535.273.045,00	1.761.817.653,00	(2.773.455.392,00)	38,85
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.243.468.863,99	1.439.826.264,00	(803.642.599,99)	64,18
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2	BELANJA MODAL	85.782.800,00	38.800.000,00	(46.982.800,00)	45,23
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.782.800,00	38.800.000,00	(46.982.800,00)	45,23
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		Kecamatan Keluang	5.060.224.145,00	1.656.793.468,00	(3.403.430.677,00)	32,74
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5	BELANJA DAERAH	5.060.224.145,00	1.656.793.468,00	(3.403.430.677,00)	32,74
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.938.567.897,00	1.555.592.468,00	(3.382.975.429,00)	31,50
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.774.985.451,00	1.194.596.265,00	(2.580.389.186,00)	31,65
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.582.446,00	360.996.203,00	(802.586.243,00)	31,02
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.2	BELANJA MODAL	121.656.248,00	101.201.000,00	(20.455.248,00)	83,19
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.656.248,00	101.201.000,00	(20.455.248,00)	83,19
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		Kecamatan Sanga Desa	5.566.745.605,00	1.954.151.459,00	(3.612.594.146,00)	35,10
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5	BELANJA DAERAH	5.566.745.605,00	1.954.151.459,00	(3.612.594.146,00)	35,10
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.471.891.665,00	1.879.004.459,00	(3.592.887.206,00)	34,34
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.030.848.576,00	1.366.764.085,00	(2.664.084.491,00)	33,91
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.441.043.089,00	512.240.374,00	(928.802.715,00)	35,55
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.2	BELANJA MODAL	94.853.940,00	75.147.000,00	(19.706.940,00)	79,22
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.853.940,00	75.147.000,00	(19.706.940,00)	79,22
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		Kecamatan Plakat Tinggi	4.293.670.603,00	1.377.306.857,00	(2.916.363.746,00)	32,08
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5	BELANJA DAERAH	4.293.670.603,00	1.377.306.857,00	(2.916.363.746,00)	32,08
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.074.776.538,00	1.210.592.509,00	(2.864.184.029,00)	29,71
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.927.734.895,70	833.857.494,00	(2.093.877.401,70)	28,48
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.147.041.642,30	376.735.015,00	(770.306.627,30)	32,84
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.2	BELANJA MODAL	218.894.065,00	166.714.348,00	(52.179.717,00)	76,16
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.179.717,00	0,00	(52.179.717,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.714.348,00	166.714.348,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		Kecamatan Batanghari Leko	4.166.315.645,00	1.127.005.284,00	(3.039.310.361,00)	27,05
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5	BELANJA DAERAH	4.166.315.645,00	1.127.005.284,00	(3.039.310.361,00)	27,05
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.093.213.274,00	1.127.005.284,00	(2.966.207.990,00)	27,53
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.881.959.957,00	809.360.194,00	(2.072.599.763,00)	28,08
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.211.253.317,00	317.645.090,00	(893.608.227,00)	26,22
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.2	BELANJA MODAL	73.102.371,00	0,00	(73.102.371,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.402.371,00	0,00	(54.402.371,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.700.000,00	0,00	(18.700.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		Kecamatan Sungai Keruh	3.982.090.009,00	1.243.170.062,00	(2.738.919.947,00)	31,22
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5	BELANJA DAERAH	3.982.090.009,00	1.243.170.062,00	(2.738.919.947,00)	31,22
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.910.791.179,00	1.223.940.062,00	(2.686.851.117,00)	31,30
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.745.214.507,00	908.442.131,00	(1.836.772.376,00)	33,09
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.165.576.672,00	315.497.931,00	(850.078.741,00)	27,07
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.2	BELANJA MODAL	71.298.830,00	19.230.000,00	(52.068.830,00)	26,97
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.298.830,00	19.230.000,00	(52.068.830,00)	26,97
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		Kecamatan Sungai Lilin	5.546.584.823,00	1.888.119.371,00	(3.658.465.452,00)	34,04
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5	BELANJA DAERAH	5.546.584.823,00	1.888.119.371,00	(3.658.465.452,00)	34,04
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.502.630.377,00	1.844.229.971,00	(3.658.400.406,00)	33,52
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.127.883.854,00	1.341.371.307,00	(2.786.512.547,00)	32,50
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.374.746.523,00	502.858.664,00	(871.887.859,00)	36,58
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.2	BELANJA MODAL	43.954.446,00	43.889.400,00	(65.046,00)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.954.446,00	43.889.400,00	(65.046,00)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		Kecamatan Bayung Lencir	5.061.972.049,00	2.070.786.541,00	(2.991.185.508,00)	40,91
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5	BELANJA DAERAH	5.061.972.049,00	2.070.786.541,00	(2.991.185.508,00)	40,91
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.986.092.338,00	1.996.305.541,00	(2.989.786.797,00)	40,04
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.661.782.065,00	1.221.244.659,00	(2.440.537.406,00)	33,35
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.324.310.273,00	775.060.882,00	(549.249.391,00)	58,53
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.2	BELANJA MODAL	75.879.711,00	74.481.000,00	(1.398.711,00)	98,16
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.879.711,00	74.481.000,00	(1.398.711,00)	98,16
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		Kecamatan Lalan	4.762.891.988,00	1.591.847.516,00	(3.171.044.472,00)	33,42
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5	BELANJA DAERAH	4.762.891.988,00	1.591.847.516,00	(3.171.044.472,00)	33,42
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.639.693.888,00	1.487.037.516,00	(3.152.656.372,00)	32,05
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.391.844.367,00	997.827.016,00	(2.394.017.351,00)	29,42
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.247.849.521,00	489.210.500,00	(758.639.021,00)	39,20
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.2	BELANJA MODAL	123.198.100,00	104.810.000,00	(18.388.100,00)	85,07
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.198.100,00	104.810.000,00	(18.388.100,00)	85,07
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		Kecamatan Tungkal Jaya	4.995.802.499,00	1.435.573.461,00	(3.560.229.038,00)	28,74
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5	BELANJA DAERAH	4.995.802.499,00	1.435.573.461,00	(3.560.229.038,00)	28,74
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.865.375.612,00	1.327.223.461,00	(3.538.152.151,00)	27,28
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.026.789.605,00	957.462.112,00	(2.069.327.493,00)	31,63

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.586.007,00	369.761.349,00	(1.468.824.658,00)	20,11
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.2	BELANJA MODAL	130.426.887,00	108.350.000,00	(22.076.887,00)	83,07
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.426.887,00	108.350.000,00	(22.076.887,00)	83,07
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		Kecamatan Lawang Wetan	4.742.295.672,00	1.798.345.640,00	(2.943.950.032,00)	37,92
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5	BELANJA DAERAH	4.742.295.672,00	1.798.345.640,00	(2.943.950.032,00)	37,92
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.608.031.213,00	1.710.575.640,00	(2.897.455.573,00)	37,12
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.250.582.148,00	1.172.601.867,00	(2.077.980.281,00)	36,07
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.449.065,00	537.973.773,00	(819.475.292,00)	39,63
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.2	BELANJA MODAL	134.264.459,00	87.770.000,00	(46.494.459,00)	65,37
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.264.459,00	87.770.000,00	(46.494.459,00)	65,37
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000		Kecamatan Babat Supat	4.217.302.289,00	1.348.938.313,00	(2.868.363.976,00)	31,99
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5	BELANJA DAERAH	4.217.302.289,00	1.348.938.313,00	(2.868.363.976,00)	31,99
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.069.395.378,50	1.251.838.313,00	(2.817.557.065,50)	30,76
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.613.214.200,50	799.295.366,00	(1.813.918.834,50)	30,59
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.181.178,00	452.542.947,00	(1.003.638.231,00)	31,08
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.2	BELANJA MODAL	147.906.910,50	97.100.000,00	(50.806.910,50)	65,65
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.906.910,50	97.100.000,00	(50.806.910,50)	65,65
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000		Kecamatan Jirak Jaya	3.611.399.223,00	868.923.903,00	(2.742.475.320,00)	24,06
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5	BELANJA DAERAH	3.611.399.223,00	868.923.903,00	(2.742.475.320,00)	24,06
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.494.721.997,00	868.923.903,00	(2.625.798.094,00)	24,86
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.314.686.608,00	600.662.428,00	(1.714.024.180,00)	25,95
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.180.035.389,00	268.261.475,00	(911.773.914,00)	22,73
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.2	BELANJA MODAL	116.677.226,00	0,00	(116.677.226,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.677.226,00	0,00	(116.677.226,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002		Kelurahan Soak Baru	684.148.533,00	7.529.149,00	(676.619.384,00)	1,10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	5	BELANJA DAERAH	684.148.533,00	7.529.149,00	(676.619.384,00)	1,10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	5.1	BELANJA OPERASI	646.917.468,00	7.529.149,00	(639.388.319,00)	1,16
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.917.468,00	7.529.149,00	(639.388.319,00)	1,16
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	5.2	BELANJA MODAL	37.231.065,00	0,00	(37.231.065,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.231.065,00	0,00	(37.231.065,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001		Kelurahan Serasan Jaya	600.219.072,00	12.882.915,00	(587.336.157,00)	2,15
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	5	BELANJA DAERAH	600.219.072,00	12.882.915,00	(587.336.157,00)	2,15
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	5.1	BELANJA OPERASI	583.616.247,00	12.882.915,00	(570.733.332,00)	2,21
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.616.247,00	12.882.915,00	(570.733.332,00)	2,21

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	5.2	BELANJA MODAL	16.602.825,00	0,00	(16.602.825,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.602.825,00	0,00	(16.602.825,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003		Kelurahan Balai Agung	669.522.773,00	122.693.013,00	(546.829.760,00)	18,33
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	5	BELANJA DAERAH	669.522.773,00	122.693.013,00	(546.829.760,00)	18,33
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	5.1	BELANJA OPERASI	250.984.974,00	75.690.063,00	(175.294.911,00)	30,16
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.984.974,00	75.690.063,00	(175.294.911,00)	30,16
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	5.2	BELANJA MODAL	418.537.799,00	47.002.950,00	(371.534.849,00)	11,23
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.151.799,00	47.002.950,00	(2.148.849,00)	95,63
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.922.000,00	0,00	(216.922.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.464.000,00	0,00	(152.464.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004		Kelurahan Kayuara	682.065.034,00	2.473.000,00	(679.592.034,00)	0,36
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	5	BELANJA DAERAH	682.065.034,00	2.473.000,00	(679.592.034,00)	0,36
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	5.1	BELANJA OPERASI	661.175.944,00	2.473.000,00	(658.702.944,00)	0,37
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.175.944,00	2.473.000,00	(658.702.944,00)	0,37
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	5.2	BELANJA MODAL	20.889.090,00	0,00	(20.889.090,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.889.090,00	0,00	(20.889.090,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001		Kelurahan Babat	758.024.172,96	4.043.000,00	(753.981.172,96)	0,53
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	5	BELANJA DAERAH	758.024.172,96	4.043.000,00	(753.981.172,96)	0,53
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	5.1	BELANJA OPERASI	736.697.187,96	4.043.000,00	(732.654.187,96)	0,55
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.904.167,96	4.043.000,00	(545.861.167,96)	0,74
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	5.1.05	Belanja Hibah	186.793.020,00	0,00	(186.793.020,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	5.2	BELANJA MODAL	21.326.985,00	0,00	(21.326.985,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.326.985,00	0,00	(21.326.985,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002		Kelurahan Mangun Jaya	766.737.231,51	6.790.278,00	(759.946.953,51)	0,89
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	5	BELANJA DAERAH	766.737.231,51	6.790.278,00	(759.946.953,51)	0,89
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	5.1	BELANJA OPERASI	728.756.805,51	6.790.278,00	(721.966.527,51)	0,93
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.733.055,51	6.790.278,00	(495.942.777,51)	1,35
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	5.1.05	Belanja Hibah	226.023.750,00	0,00	(226.023.750,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	5.2	BELANJA MODAL	37.980.426,00	0,00	(37.980.426,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.980.426,00	0,00	(37.980.426,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001		Kelurahan Ngulak I	832.978.633,00	70.933.336,00	(762.045.297,00)	8,52
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	5	BELANJA DAERAH	832.978.633,00	70.933.336,00	(762.045.297,00)	8,52
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	5.1	BELANJA OPERASI	802.231.633,00	70.933.336,00	(731.298.297,00)	8,84
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.758.408,00	70.933.336,00	(540.825.072,00)	11,59

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	5.1.05	Belanja Hibah	190.473.225,00	0,00	(190.473.225,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	5.2	BELANJA MODAL	30.747.000,00	0,00	(30.747.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.990.000,00	0,00	(9.990.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.757.000,00	0,00	(20.757.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001		Kelurahan Bayung Lencir	823.842.083,00	17.080.000,00	(806.762.083,00)	2,07
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	5	BELANJA DAERAH	823.842.083,00	17.080.000,00	(806.762.083,00)	2,07
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.058.224,00	17.080.000,00	(782.978.224,00)	2,13
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.842.224,00	17.080.000,00	(665.762.224,00)	2,50
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	5.1.05	Belanja Hibah	117.216.000,00	0,00	(117.216.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	5.2	BELANJA MODAL	23.783.859,00	0,00	(23.783.859,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.783.859,00	0,00	(23.783.859,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002		Kelurahan Bayung Lencir Indah	829.391.585,00	23.846.750,00	(805.544.835,00)	2,88
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	5	BELANJA DAERAH	829.391.585,00	23.846.750,00	(805.544.835,00)	2,88
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	5.1	BELANJA OPERASI	803.792.321,00	23.846.750,00	(779.945.571,00)	2,97
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.842.621,00	23.846.750,00	(429.995.871,00)	5,25
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	5.1.05	Belanja Hibah	349.949.700,00	0,00	(349.949.700,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.599.264,00	0,00	(25.599.264,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.599.264,00	0,00	(25.599.264,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002		Kelurahan Ngulak	833.612.894,00	80.243.480,00	(753.369.414,00)	9,63
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	5	BELANJA DAERAH	833.612.894,00	80.243.480,00	(753.369.414,00)	9,63
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	5.1	BELANJA OPERASI	831.947.894,00	80.243.480,00	(751.704.414,00)	9,65
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.004.074,00	80.243.480,00	(515.760.594,00)	13,46
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	5.1.05	Belanja Hibah	235.943.820,00	0,00	(235.943.820,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001		Kelurahan Sungai Lilin	833.014.354,00	31.713.688,00	(801.300.666,00)	3,81
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	5	BELANJA DAERAH	833.014.354,00	31.713.688,00	(801.300.666,00)	3,81
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	5.1	BELANJA OPERASI	822.057.211,00	20.807.938,00	(801.249.273,00)	2,53
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.140.301,00	20.807.938,00	(517.332.363,00)	3,87
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	5.1.05	Belanja Hibah	283.916.910,00	0,00	(283.916.910,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	5.2	BELANJA MODAL	10.957.143,00	10.905.750,00	(51.393,00)	99,53
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.957.143,00	10.905.750,00	(51.393,00)	99,53
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002		Kelurahan Sungai Lilin Jaya	838.919.254,00	43.537.091,00	(795.382.163,00)	5,19
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	5	BELANJA DAERAH	838.919.254,00	43.537.091,00	(795.382.163,00)	5,19

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	5.1	BELANJA OPERASI	811.482.274,00	16.131.191,00	(795.351.083,00)	1,99
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.381.870,00	16.131.191,00	(522.250.679,00)	3,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	5.1.05	Belanja Hibah	273.100.404,00	0,00	(273.100.404,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	5.2	BELANJA MODAL	27.436.980,00	27.405.900,00	(31.080,00)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.436.980,00	27.405.900,00	(31.080,00)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001		Kelurahan Keluang	841.784.711,00	0,00	(841.784.711,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	5	BELANJA DAERAH	841.784.711,00	0,00	(841.784.711,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	5.1	BELANJA OPERASI	835.785.161,00	0,00	(835.785.161,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	835.785.161,00	0,00	(835.785.161,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.999.550,00	0,00	(5.999.550,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.999.550,00	0,00	(5.999.550,00)	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.439.235.163,00	3.644.146.058,00	(12.795.089.105,00)	22,17
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.439.235.163,00	3.644.146.058,00	(12.795.089.105,00)	22,17
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.439.235.163,00	3.644.146.058,00	(12.795.089.105,00)	22,17
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	16.439.235.163,00	3.644.146.058,00	(12.795.089.105,00)	22,17
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.225.378.163,00	3.628.546.058,00	(12.596.832.105,00)	22,36
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.090.240.819,00	2.114.857.767,00	(3.975.383.052,00)	34,73
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.673.697.344,00	1.513.688.291,00	(3.160.009.053,00)	32,39
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	5.1.05	Belanja Hibah	5.461.440.000,00	0,00	(5.461.440.000,00)	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	213.857.000,00	15.600.000,00	(198.257.000,00)	7,29
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.857.000,00	15.600.000,00	(198.257.000,00)	7,29
			Jumlah	(23.470.262.133,01)	166.837.664.341,40	190.307.926.474,41	(710,85)

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran I.2 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. MUSI BANYUASIN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**92,49**	**3.754.947.990.722,66**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**587.378.681.108,99**	**561.951.316.985,08**	**95,67**	**393.331.951.633,26**
4.1.01	Pajak Daerah	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	99,04	113.650.131.384,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.729.859.000,00	1.966.095.017,00	72,02	1.543.727.943,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.314.000.000,00	1.618.646.268,00	69,95	1.195.382.631,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.314.000.000,00	1.618.646.268,00	69,95	1.195.382.631,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	345.000.000,00	315.447.169,00	91,43	304.396.812,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	345.000.000,00	315.447.169,00	91,43	304.396.812,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.859.000,00	20.835.955,00	80,57	18.150.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.859.000,00	20.835.955,00	80,57	18.150.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	45.000.000,00	11.165.625,00	24,81	25.798.500,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	45.000.000,00	11.165.625,00	24,81	25.798.500,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	420.000.000,00	494.109.277,35	117,64	441.129.655,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	420.000.000,00	494.109.277,35	117,64	441.129.655,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	420.000.000,00	494.109.277,35	117,64	441.129.655,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	249.522.750,00	124.516.000,00	49,90	185.995.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	249.522.750,00	124.516.000,00	49,90	185.995.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	249.522.750,00	124.516.000,00	49,90	185.995.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.029.103.000,00	7.616.339.132,00	375,35	2.154.819.361,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	679.103.000,00	530.737.668,00	78,15	731.637.551,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	679.103.000,00	530.737.668,00	78,15	731.637.551,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.350.000.000,00	7.085.601.464,00	524,85	1.423.181.810,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.350.000.000,00	7.085.601.464,00	524,85	1.423.181.810,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.904.394.000,00	29.645.996.684,00	99,13	20.159.511.725,00
4.1.01.15.01	PBBP2	29.904.394.000,00	29.645.996.684,00	99,13	20.159.511.725,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.904.394.000,00	29.645.996.684,00	99,13	20.159.511.725,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.139.938.000,00	7.529.732.798,00	29,95	22.025.247.116,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.895.077.000,00	4.315.087.939,00	48,51	3.726.851.636,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.895.077.000,00	4.315.087.939,00	48,51	3.726.851.636,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16.244.861.000,00	3.214.644.859,00	19,78	18.298.395.480,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16.244.861.000,00	3.214.644.859,00	19,78	18.298.395.480,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	73.502.200.000,00	96.471.738.738,00	131,25	67.139.700.584,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	18.959.803.000,00	19.845.901.322,00	104,67	20.287.176.537,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.029.803.000,00	3.818.291.051,00	126,02	3.458.882.492,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	15.930.000.000,00	16.027.610.271,00	100,61	16.828.294.045,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	52.311.073.000,00	73.698.351.460,00	140,88	44.791.269.227,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	47.311.073.000,00	52.526.553.898,00	111,02	41.240.120.495,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.000.000.000,00	21.171.797.562,00	423,43	3.551.148.732,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.585.642.000,00	1.511.728.463,00	95,33	1.459.213.817,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	900.000.000,00	789.313.053,00	87,70	884.798.058,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	235.642.000,00	315.134.475,00	133,73	130.562.338,00
4.1.01.19.03.0007	PBJT-Wisma Pariwisata	450.000.000,00	407.280.935,00	90,50	443.853.421,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	508.171.000,00	581.938.770,00	114,51	482.685.417,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	508.171.000,00	581.938.770,00	114,51	482.685.417,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	137.511.000,00	833.818.723,00	606,36	119.355.586,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	20.000.000,00	6.350.000,00	31,75	0,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	36.107.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	14.003.100,00	140,03	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dar	5.000.000,00	5.610.000,00	112,20	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wah	7.000.000,00	425.000,00	6,07	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	10.000.000,00	860.000,00	8,60	14.412.500,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	85.511.000,00	806.570.623,00	943,23	68.836.086,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	60.000.000.000,00	31.854.033.228,00	53,09	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	60.000.000.000,00	31.854.033.228,00	53,09	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	60.000.000.000,00	31.854.033.228,00	53,09	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.000.000.000,00	46.126.375.000,00	153,75	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	30.000.000.000,00	46.126.375.000,00	153,75	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	30.000.000.000,00	46.126.375.000,00	153,75	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.660.787.000,00	9.914.556.645,00	175,14	6.626.027.122,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	727.000.000,00	1.333.954.050,00	183,48	713.597.700,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	200.000.000,00	196.168.050,00	98,08	171.108.700,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	200.000.000,00	196.168.050,00	98,08	171.108.700,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	527.000.000,00	1.137.786.000,00	215,89	542.489.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	500.000.000,00	1.072.001.000,00	214,40	504.349.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.000.000,00	65.785.000,00	243,64	38.140.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.433.787.000,00	3.490.831.340,00	143,43	2.984.617.820,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	319.667.100,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	319.667.100,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tem	310.000.000,00	358.712.700,00	115,71	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tem	310.000.000,00	358.712.700,00	115,71	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	195.000.000,00	225.423.000,00	115,60	197.488.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	195.000.000,00	225.423.000,00	115,60	197.488.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00	40.050.000,00	100,12	40.635.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00	40.050.000,00	100,12	40.635.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.150.000,00	103,00	5.550.000,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.150.000,00	103,00	5.550.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	142.427.000,00	237.907.000,00	167,03	179.016.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	142.427.000,00	237.907.000,00	167,03	179.016.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.130.000.000,00	1.169.330.000,00	103,48	1.157.645.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.130.000.000,00	1.169.330.000,00	103,48	1.157.645.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	611.360.000,00	1.454.258.640,00	237,87	1.084.616.720,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	611.360.000,00	1.454.258.640,00	237,87	1.084.616.720,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00	5.089.771.255,00	203,59	2.927.811.602,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	5.089.771.255,00	203,59	2.927.811.602,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	5.089.771.255,00	203,59	2.927.811.602,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,31	27.898.190.463,75
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Mod	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,31	27.898.190.463,75
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Mod	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,31	22.898.190.463,75

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Mod	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,31	22.898.190.463,75
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Mod	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Mod	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	327.742.877.358,99	311.812.260.408,11	95,13	245.157.602.663,51
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.000.000,00	874.847.200,00	2.499,56	43.967.400,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	837.771.200,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Berm	0,00	666.129.200,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0223	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umur	0,00	171.642.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	23.075.000,00	0,00	664.400,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung K	0,00	23.075.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03.0006	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	664.400,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	14.001.000,00	40,00	43.303.000,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	35.000.000,00	14.001.000,00	40,00	43.303.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.243.250,00	21.235.150,00	340,12	8.514.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	6.243.250,00	21.235.150,00	340,12	8.514.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	6.243.250,00	21.235.150,00	340,12	8.514.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	5.500.000.000,00	4.036.886.464,00	73,39	2.825.685.039,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	3.668.330.952,00	73,36	2.502.943.951,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	3.668.330.952,00	73,36	2.502.943.951,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	368.555.512,00	73,71	322.741.088,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	368.555.512,00	73,71	322.741.088,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	518.872.763,00	10,37	6.889.782.308,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	518.872.763,00	10,37	6.889.782.308,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	518.872.763,00	10,37	6.889.782.308,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000.000,00	9.064.631.830,02	60,43	15.704.896.307,79
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejab	15.000.000.000,00	9.064.631.830,02	60,43	15.704.896.307,79
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejab	15.000.000.000,00	9.064.631.830,02	60,43	15.704.896.307,79
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.628.262.810,00	1.023.589.146,90	62,86	1.766.654.714,15
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.628.262.810,00	1.023.589.146,90	62,86	1.766.654.714,15
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.628.262.810,00	1.023.589.146,90	62,86	1.766.654.714,15
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	532.640.269,59	53,26	246.418.357,04
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	532.640.269,59	53,26	246.418.357,04
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	532.640.269,59	53,26	246.418.357,04

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	326.600.000,00	2.811.888.946,54	860,95	319.890.573,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.178.838,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.178.838,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	98.259.570,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	98.259.570,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	231.397,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	28.517,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkas	0,00	0,00	0,00	118.580,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fit	0,00	0,00	0,00	84.300,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.600.000,00	1.916.616,00	53,23	3.874.303,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	3.500.000,00	1.835.523,00	52,44	3.874.303,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	100.000,00	55.781,00	55,78	0,00
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	0,00	25.312,00	0,00	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	8.928.535,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	8.928.535,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.064.214,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.064.214,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	1.230.474,00	246,09	2.825.122,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	1.230.474,00	246,09	2.825.122,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	123.500,00	41,16	106.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	123.500,00	41,16	106.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	3.255.479,00	32,55	3.645.490,00
4.1.04.12.14.0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes	0,00	0,00	0,00	207.360,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00	3.255.479,00	32,55	0,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.438.130,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000,00	246.472.470,00	246,47	166.592.444,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000,00	246.472.470,00	246,47	166.592.444,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000,00	15.988.083,00	53,29	28.184.660,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	29.500.000,00	15.835.430,00	53,67	25.663.072,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000,00	152.653,00	30,53	2.521.588,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	174.200.000,00	2.378.992.149,54	1.365,66	0,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	25.000.000,00	17.301.017,00	69,20	0,00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katerin	133.200.000,00	62.485.808,00	46,91	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.12.19.0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.000.000,00	2.280.922.115,54	45.618,44	0,00
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1.000.000,00	4.486.325,00	448,63	0,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	5.000.000,00	3.308.868,00	66,17	0,00
4.1.04.12.19.0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	3.000.000,00	2.167.330,00	72,24	0,00
4.1.04.12.19.0011	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	1.000.000,00	3.636.451,00	363,64	0,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	500.000,00	4.332.877,00	866,57	0,00
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	100.000,00	124.321,00	124,32	0,00
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Meng	100.000,00	61.850,00	61,85	0,00
4.1.04.12.19.0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekol	100.000,00	4.750,00	4,75	0,00
4.1.04.12.19.0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	100.000,00	16.757,00	16,75	0,00
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, B	100.000,00	143.680,00	143,68	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.000.000,00	160.667.875,00	3.213,35	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	5.000.000,00	160.667.875,00	3.213,35	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.000.000,00	3.242.300,00	108,07	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	3.000.000,00	3.242.300,00	108,07	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	54.965.647.774,99	50.400.666.808,00	91,69	162.323.286,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	250.000.000,00	6.996.702,00	2,79	156.075.786,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pok	250.000.000,00	0,00	0,00	145.526.756,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN	0,00	6.996.702,00	0,00	10.076.550,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00	0,00	472.480,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan A	15.000.000,00	0,00	0,00	6.247.500,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan I	10.000.000,00	0,00	0,00	6.247.500,00
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan I	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerinta	54.700.647.774,99	50.393.670.106,00	92,12	0,00
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pem	54.700.647.774,99	50.393.670.106,00	92,12	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	99,28	217.189.470.678,53
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	99,28	217.189.470.678,53
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	99,28	217.189.470.678,53
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**587.378.681.108,99**	**561.951.316.985,08**	**95,67**	**393.331.951.633,26**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.702.991.131.666,60**	**3.406.212.851.924,43**	**91,98**	**3.354.108.863.089,40**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	3.233.090.228.896,00	92,23	3.114.853.763.214,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	2.860.225.317.214,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	1.944.582.915.190,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	924.769.185.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	23.973.622.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	297.548.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	5.297.190,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	165.672.089.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	469.216.170.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	338.102.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	11.820.680.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	318.397.128.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	4.092.455.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	1.269.504.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.143.842.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	23.587.293.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	491.100.513.274,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	338.787.763.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah d	0,00	0,00	0,00	55.448.156.274,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	63.346.751.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	22.405.130.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	8.512.713.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	140.633.056.225,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	1.438.155.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	24.853.982.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	5.235.169.880,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	495.500.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.776.150.800,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana F	0,00	0,00	0,00	11.341.588.900,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.217.759.145,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	35.605.662.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.030.119.500,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	52.638.969.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	283.908.832.525,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	110.493.148.018,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	3.335.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	110.210.106.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	6.241.250.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	11.816.388.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	10.329.300.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.344.700.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	22.830.928.101,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	6.766.969.230,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	541.043.176,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.298.679.867.500,00	2.150.925.726.600,00	93,57	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	1.184.338.675.000,00	1.062.202.851.600,00	89,68	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.154.339.667.000,00	1.035.357.829.100,00	89,69	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	29.412.956.500,00	26.323.412.700,00	89,49	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	575.775.500,00	514.408.800,00	89,34	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.276.000,00	7.201.000,00	70,07	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.104.488.916.500,00	1.078.870.599.000,00	97,68	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	115.371.778.000,00	115.371.778.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	718.244.164.500,00	698.994.151.000,00	97,31	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	178.790.500,00	173.438.000,00	97,00	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	11.598.254.000,00	11.393.376.000,00	98,23	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	255.104.974.000,00	249.037.868.000,00	97,62	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.157.149.500,00	3.066.182.000,00	97,11	0,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	9.852.276.000,00	9.852.276.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	9.852.276.000,00	9.852.276.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	583.685.042.000,00	511.199.784.788,00	87,58	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	355.676.786.000,00	355.355.330.349,00	99,90	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	355.676.786.000,00	355.355.330.349,00	99,90	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	228.008.256.000,00	155.844.454.439,00	68,35	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah d	148.680.806.000,00	87.526.161.439,00	58,86	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	44.036.622.000,00	33.027.465.000,00	74,99	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.690.828.000,00	32.690.828.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	397.471.740.000,00	361.674.496.514,00	90,99	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	35.072.538.000,00	33.369.884.583,00	95,14	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.277.216.000,00	3.270.672.075,00	99,80	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	662.717.000,00	646.655.132,00	97,57	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	715.275.000,00	688.736.038,00	96,28	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	99,03	0,00
4.2.01.09.01.0101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	22.000.000.000,00	20.362.542.438,00	92,55	0,00
4.2.01.09.01.0108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	6.919.330.000,00	6.917.775.000,00	99,97	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	362.399.202.000,00	328.304.611.931,00	90,59	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	108.373.400.000,00	108.652.188.850,00	100,25	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.958.750.000,00	2.958.750.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	190.001.926.000,00	170.997.700.414,00	89,99	0,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.235.745.000,00	99,68	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	99,94	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.605.107.000,00	5.028.850.665,00	76,13	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	300.172.000,00	300.172.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.919.293.000,00	6.670.431.485,00	37,22	0,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	2.503.225.000,00	1.608.397.500,00	64,25	0,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	12.262.736.000,00	11.913.301.973,00	97,15	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.363.520.000,00	7.099.830.044,00	84,89	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	437.760.000,00	437.760.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**3.279.836.649.500,00**	**3.023.800.007.902,00**	**92,19**	**2.860.225.317.214,00**
4.2.01.05	Dana Desa	225.564.334.000,00	209.290.220.994,00	92,78	229.955.545.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	225.564.334.000,00	209.290.220.994,00	92,78	229.955.545.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	225.564.334.000,00	209.290.220.994,00	92,78	229.955.545.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	24.672.901.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	24.672.901.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	24.672.901.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**225.564.334.000,00**	**209.290.220.994,00**	**92,78**	**254.628.446.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	173.122.623.028,43	87,61	239.255.099.875,40
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	125.600.000.000,00	137.258.525.061,83	109,28	171.283.262.620,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.600.000.000,00	137.258.525.061,83	109,28	171.283.262.620,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	13.578.082.138,00	0,00	21.654.493.306,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	8.892.076.144,00	0,00	24.343.104.998,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00	78.400.514.196,83	87,11	87.769.572.151,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	600.000.000,00	954.930.327,00	159,15	426.534.293,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.000.000.000,00	35.432.922.256,00	101,23	37.089.557.872,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	71.990.148.166,60	35.864.097.966,60	49,81	67.971.837.255,40
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	71.990.148.166,60	35.864.097.966,60	49,81	67.971.837.255,40
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	71.990.148.166,60	35.864.097.966,60	49,81	67.971.837.255,40
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**197.590.148.166,60**	**173.122.623.028,43**	**87,61**	**239.255.099.875,40**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**3.702.991.131.666,60**	**3.406.212.851.924,43**	**91,98**	**3.354.108.863.089,40**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.507.176.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	7.507.176.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	7.507.176.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	7.507.176.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	7.507.176.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.507.176.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**92,49**	**3.754.947.990.722,66**
5	**BELANJA DAERAH**	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**89,74**	**3.811.670.043.170,23**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**88,77**	**2.507.571.123.568,16**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.605.850.647.744,57	1.459.387.408.621,22	90,87	1.199.348.281.960,91
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	869.506.141.385,27	799.106.229.756,00	91,90	641.796.591.370,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	641.863.589.255,26	608.536.166.529,00	94,80	495.892.572.477,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	347.787.099.701,72	334.211.134.583,00	96,09	346.245.175.401,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	294.076.489.553,54	274.325.031.946,00	93,28	149.647.397.076,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.169.319.618,00	57.318.411.609,00	86,62	47.731.561.809,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.451.314.408,00	31.922.477.319,00	90,04	32.864.690.327,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	30.718.005.210,00	25.395.934.290,00	82,67	14.866.871.482,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.735.941.494,00	6.134.308.315,00	79,29	6.537.494.680,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.735.941.494,00	6.134.308.315,00	79,29	6.537.494.680,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.397.068.766,00	25.652.180.555,00	90,33	25.328.269.740,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.621.256.702,00	24.614.623.330,00	92,46	25.328.269.740,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.775.812.064,00	1.037.557.225,00	58,42	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.008.527.968,00	19.712.692.088,00	89,56	12.726.271.850,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.108.024.800,00	3.617.899.583,00	70,82	4.073.541.850,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	16.900.503.168,00	16.094.792.505,00	95,23	8.652.730.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41.669.691.240,60	36.730.418.293,00	88,14	28.002.147.396,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.241.083.686,60	17.316.528.368,00	89,99	17.951.264.676,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	22.428.607.554,00	19.413.889.925,00	86,55	10.050.882.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.406.896.598,92	5.840.497.488,00	62,08	856.163.540,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.751.586.705,92	4.118.709.885,00	71,60	854.553.579,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.655.309.893,00	1.721.787.603,00	47,10	1.609.961,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	185.192.930,09	9.531.283,00	5,14	7.475.813,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	136.993.525,50	4.230.050,00	3,08	4.564.114,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48.199.404,59	5.301.233,00	10,99	2.911.699,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	43.542.163.662,00	34.051.188.282,00	78,20	20.451.388.212,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.719.521.496,00	22.553.084.246,00	73,41	14.226.683.035,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.822.642.166,00	11.498.104.036,00	89,67	6.224.705.177,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.953.913.445,00	1.280.237.009,00	65,52	1.033.756.009,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.020.048.073,00	686.082.831,00	67,25	710.754.503,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	933.865.372,00	594.154.178,00	63,62	323.001.506,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.010.122.206,00	3.840.598.305,00	76,65	3.100.877.344,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.605.700.139,00	2.058.419.908,00	78,99	2.135.535.031,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.404.422.067,00	1.782.178.397,00	74,12	965.342.313,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.563.714.201,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.265.987.770,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	297.726.431,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	128.612.500,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	128.612.500,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	588.681.708.501,30	519.751.971.720,44	88,29	291.322.837.879,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	343.342.004.103,90	301.611.732.202,00	87,84	265.514.779.024,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	292.787.896.631,70	253.709.652.809,00	86,65	263.902.417.214,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.554.107.472,20	47.902.079.393,00	94,75	1.612.361.810,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	14.728.823.984,00	13.482.817.577,00	91,54	12.253.727.823,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14.666.491.000,00	13.443.817.189,00	91,66	12.253.727.823,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	62.332.984,00	39.000.388,00	62,56	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	14.706.625.000,40	14.298.752.449,00	97,22	13.554.331.032,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	14.699.625.000,00	14.293.772.449,00	97,23	13.554.331.032,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	7.000.000,40	4.980.000,00	71,14	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.904.255.413,00	190.358.669.492,44	88,16	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	11.444.320,00	11.444.320,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	153.721.480,00	153.721.480,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	966.950,00	966.950,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	99.374.080,00	63.281.172,00	63,67	0,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	403.468.090,00	403.468.090,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	14.070.540,00	7.884.587,00	56,03	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam da	228.249.588,00	109.908.877,00	48,15	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pec	1.127.686.750,00	827.734.611,44	73,40	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah	926.150.840,00	361.568.384,00	39,03	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertent	1.721.941.340,00	1.664.601.961,00	96,67	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermo	1.189.850.000,00	500.049.986,00	42,02	0,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendar	1.505.000.000,00	515.671.862,00	34,26	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	193.134.453.405,00	172.195.567.739,00	89,15	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.543.803.030,00	11.913.301.973,00	94,97	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.822.975.000,00	1.608.397.500,00	56,97	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	131.314.785.111,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	2.562.418.091,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	52.553.727,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	701.806.329,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	2.346.438,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	30.898.003,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	522.171.255,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	18.211.664,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	16.896.875,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	1.984.811,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	68.826.366,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Pe	0,00	0,00	0,00	599.361.095,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna	0,00	0,00	0,00	547.361.528,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	110.181.745.450,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	110.181.745.450,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	11.621.275.570,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	11.621.275.570,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	6.575.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	6.575.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	374.096.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	374.096.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.159.684.780,00	25.044.182.584,00	95,73	24.897.913.807,08
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.000.860.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.000.860.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	108.267.600,00	77,02	104.288.100,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	108.267.600,00	77,02	104.288.100,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.960.000,00	114.428.640,00	65,40	111.449.700,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.960.000,00	114.428.640,00	65,40	111.449.700,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.743.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.743.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.451.247.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.451.247.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.796.200,00	139.582.800,00	75,94	126.763.350,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.796.200,00	139.582.800,00	75,94	126.763.350,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.908.600.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.908.600.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.323.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.323.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	810.000.000,00	436.224.234,00	53,85	432.052.675,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	810.000.000,00	436.224.234,00	53,85	432.052.675,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	50.625.480,00	28.900,00	0,05	15.870,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	50.625.480,00	28.900,00	0,05	15.870,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.403.755.000,00	5.159.867.910,00	95,48	5.241.219.981,76
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	200.000.000,00	84.006.342,00	42,00	85.980.132,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	15.000.000,00	2.065.392,00	13,76	2.057.832,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	22.755.000,00	6.196.176,00	27,22	6.173.496,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.166.000.000,00	5.067.600.000,00	98,09	5.147.008.521,76
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00	6.617.400.000,00	99,62	6.690.259.130,32
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00	6.617.400.000,00	99,62	6.690.259.130,32
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.390.000,00	0,00	0,00	422.415.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.390.000,00	0,00	0,00	422.415.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.233.020.663,00	1.165.833.888,00	52,20	797.022.492,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000,00	42.900.000,00	61,28	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000,00	42.900.000,00	61,28	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00	4.326.000,00	47,53	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00	4.326.000,00	47,53	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	88.560.000,00	84,34	45.360.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	88.560.000,00	84,34	45.360.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.200.000,00	3.838.260,00	34,27	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.200.000,00	3.838.260,00	34,27	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	133.284.072,00	1.440.947,00	1,08	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	133.284.072,00	1.440.947,00	1,08	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.798.640,00	1.340,00	0,01	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.798.640,00	1.340,00	0,01	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.600.000,00	4.826.400,00	24,62	1.360.800,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.600.000,00	4.826.400,00	24,62	1.360.800,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.205.928,00	93.600,00	7,76	151.200,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.205.928,00	93.600,00	7,76	151.200,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00	280.800,00	46,80	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00	280.800,00	46,80	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.875.232.023,00	1.019.566.541,00	54,37	750.150.492,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	15.040.740,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	38.430.370,00	38.430.370,00	100,00	200.406.642,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	241.738,00	241.738,00	100,00	725.213,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	26.442.463,00	13.066.153,00	49,41	9.549.632,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	100.867.023,00	100.867.023,00	100,00	161.387.236,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	5.275.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.150.000,00	3.047.500,00	73,43	4.873.560,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.517.636,00	1.265.693,00	35,98	613.445,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bat	28.059.305,00	22.732.227,00	81,01	22.055.891,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa	309.817.143,00	216.173.781,00	69,77	175.482.797,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan B	246.199.745,00	82.164.883,00	33,37	154.740.336,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJ	508.631.600,00	311.582.338,00	61,25	0,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(	282.750.000,00	94.244.835,00	33,33	0,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Be	325.000.000,00	134.625.000,00	41,42	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.192.120.000,00	1.192.110.000,00	99,99	993.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	799.000.000,00	798.990.000,00	99,99	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	799.000.000,00	798.990.000,00	99,99	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	95,80	108.226.011.301,83
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	95,80	108.226.011.301,83
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	95,80	108.226.011.301,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.979.321.942,31	834.930.090.186,19	85,28	1.166.182.290.152,25
5.1.02.01	Belanja Barang	154.720.537.078,09	135.538.250.799,00	87,60	308.027.610.323,31
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	147.898.371.711,09	129.206.433.067,00	87,36	307.837.494.323,31
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.954.105.073,00	5.374.050.585,00	90,25	888.443.184,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.553.467.159,99	1.379.926.734,00	88,82	1.536.832.315,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.547.107.809,50	6.075.236.252,00	80,49	6.123.693.569,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	79.536.000,00	61.290.000,00	77,05	64.730.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.336.584.630,00	1.329.571.436,00	99,47	2.077.883.438,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	167.477.743,00	156.356.000,00	93,35	190.305.910,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.202.215.559,00	1.026.551.333,00	85,38	1.958.322.878,69
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	88.900.000,00	63.081.300,00	70,95	69.190.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.706.286,00	7.052.676,00	91,51	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	502.412.600,00	497.781.100,00	99,07	74.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.325.000,00	8.291.700,00	99,60	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.033.420.908,81	7.859.874.158,00	87,00	13.473.333.600,85
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.020.470.737,49	11.038.865.526,00	84,78	12.341.032.813,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.661.286.569,00	1.545.134.095,00	93,00	1.001.122.657,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.687.437.860,00	9.182.845.011,00	94,79	8.234.585.394,28
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	371.475.000,00	367.112.740,00	98,82	195.481.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.378.365.980,00	1.150.086.098,00	83,43	917.051.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.823.765.981,00	1.683.160.479,00	92,29	2.340.820.256,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.653.978.776,00	4.535.428.433,00	97,45	10.046.371.246,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.030.256.646,00	8.893.997.664,00	98,49	7.628.199.132,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepad	8.070.443.764,00	7.180.816.248,00	88,97	162.459.543.223,99
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainny	309.174.002,50	149.500.095,00	48,35	17.471.297.084,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strate	12.231.000,00	11.489.982,00	93,94	0,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strate	546.629.790,00	468.245.251,00	85,66	485.666.300,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.857.570.678,00	9.335.547.027,00	85,98	12.284.983.884,50
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	250.368.000,00	249.447.500,00	99,63	240.895.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.305.253.676,10	14.388.194.130,00	74,52	17.960.616.282,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.290.871.533,70	12.455.328.704,00	87,15	13.854.398.615,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	70.298.000,00	24.629.400,00	35,03	27.545.700,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.411.250,00	5.411.250,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	870.318.000,00	628.668.000,00	72,23	78.570.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.124.059.198,00	4.729.324.912,00	77,22	3.092.882.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	444.650.000,00	402.935.400,00	90,61	560.800.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.113.750.000,00	1.111.436.976,00	99,79	1.112.175.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	371.925.000,00	365.256.421,00	98,20	202.203.360,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	594.590.960,00	578.390.568,00	97,27	1.342.069.180,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.625.782.500,00	12.063.600.529,00	95,54	4.215.192.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	83.250.000,00	82.747.170,00	99,39	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	676.750.000,00	668.234.906,00	98,74	610.971.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	14.374.500,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	19.695.840,00	19.531.200,00	99,16	198.800.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	5.017.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	427.550.000,00	396.110.001,00	92,64	401.620.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	515.925.000,00	474.365.020,00	91,94	516.906.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.044.200.000,00	1.027.434.261,00	98,39	1.448.204.100,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	154.360.000,00	154.094.796,00	99,82	94.720.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.822.165.367,00	6.331.817.732,00	92,81	177.516.000,00
5.1.02.01.04.0012	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	6.597.936.420,00	6.130.500.000,00	92,91	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lai	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pe	202.293.547,00	181.417.652,00	89,68	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Ru	21.935.400,00	19.900.080,00	90,72	174.216.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	395.966.686.157,60	333.832.282.952,00	84,30	415.455.082.193,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	259.610.440.124,00	212.285.179.887,00	81,77	332.932.045.051,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.671.259.180,20	3.687.300.000,00	65,01	4.735.812.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.844.826.800,50	10.319.526.900,00	80,33	12.388.936.086,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	613.280.000,00	276.800.000,00	45,13	322.480.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	51.400.000,00	32.000.000,00	62,25	97.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi da	17.600.000,00	12.000.000,00	68,18	19.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.877.140.000,00	2.757.240.000,00	95,83	714.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	90.500.000,00	69.700.000,00	77,01	136.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.638.200.000,00	1.875.050.000,00	71,07	67.198.550.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.878.005.000,00	17.784.436.198,00	71,48	35.228.679.971,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	468.645.996,00	330.771.000,00	70,58	836.969.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	44.200.000,00	40.600.000,00	91,85	58.700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.138.400.000,00	3.624.800.000,00	87,58	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	943.200.000,00	762.000.000,00	80,78	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.132.600.000,00	1.390.500.000,00	65,20	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.503.200.000,00	1.377.800.000,00	91,65	1.387.300.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	814.560.000,00	783.050.000,00	96,13	1.020.680.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	5.565.310.916,50	4.766.860.000,00	85,65	2.927.480.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.443.950.000,00	1.324.605.650,00	91,73	1.013.825.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.221.350.000,00	1.824.776.410,00	82,14	1.240.687.400,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.199.668.000,00	12.088.874.000,00	79,53	22.140.706.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.451.108.400,00	7.397.214.800,00	78,26	22.666.059.100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.550.150.000,00	4.893.240.000,00	88,16	7.618.180.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	40.108.195.722,00	37.004.092.926,00	92,26	43.049.916.176,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.671.200.000,00	5.639.558.000,00	84,53	16.078.776.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.696.124.444,00	5.905.330.000,00	76,73	5.619.460.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	617.500.000,00	503.600.000,00	81,55	602.500.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.389.300.000,00	2.045.630.000,00	60,35	2.925.260.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	162.000.000,00	12.000.000,00	7,40	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	413.500.000,00	393.000.000,00	95,04	57.700.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	31.200.000,00	30.600.000,00	98,07	29.850.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	255.000.000,00	221.300.000,00	86,78	375.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	379.707.100,00	252.677.621,00	66,54	358.231.962,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	291.600.000,00	250.200.000,00	85,80	287.300.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	80.864.000,00	79.920.000,00	98,83	58.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.059.470.180,00	10.298.631.025,00	93,12	11.581.711.920,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	16.887.450.000,00	16.523.090.259,00	97,84	9.873.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangg	103.200.000,00	75.863.800,00	73,51	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	306.404.100,00	126.244.750,00	41,20	155.604.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	262.494.000,00	259.200.000,00	98,74	238.111.500,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	780.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.081.965.000,00	7.844.877.691,00	97,06	7.659.005.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	380.490.293,00	151.867.596,00	39,91	137.887.555,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.913.943.535,00	3.101.292.590,00	63,11	3.029.921.945,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	36.332.055.496,00	26.453.948.852,00	72,81	30.708.128.581,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	224.222.400,00	201.234.400,00	89,74	1.268.456.450,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.817.833.031,00	11.403.653.069,00	82,52	7.442.902.502,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	107.865.000,00	4.730.268,00	4,38	15.362.820,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.564.665.272,00	1.843.714.667,00	71,88	977.570.721,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	194.240.640,00	180.301.879,00	92,82	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.916.048.311,80	2.101.422.636,00	72,06	8.513.492.633,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	218.700.000,00	69.392.900,00	31,72	123.150.229,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	417.867.306,00	322.660.000,00	77,21	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.310.346.106,00	66.132.608.137,00	92,73	52.715.900.394,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.061.078.240,00	4.853.453.050,00	95,89	4.607.468.944,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	48.636.352.800,00	44.806.403.100,00	92,12	38.344.706.400,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	588.000.000,00	253.153.700,00	43,05	291.902.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.853.505.200,00	6.580.776.575,00	96,02	4.037.704.438,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.704.374.155,00	6.465.479.466,90	96,43	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	836.892.011,00	760.693.996,10	90,89	2.609.340.630,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.630.143.700,00	2.412.648.249,00	91,73	2.824.777.182,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.303.028.700,00	9.108.934.227,00	68,47	5.829.118.773,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	57.960.000,00	24.660.000,00	42,54	18.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.375.881.200,00	5.830.816.567,00	91,45	3.581.051.008,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	79.200.000,00	42.900.000,00	54,16	14.800.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	205.500.000,00	82.600.000,00	40,19	65.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.639.555.500,00	1.461.650.900,00	40,16	1.126.759.955,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	457.167.000,00	222.748.000,00	48,72	211.696.950,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	475.060.000,00	225.143.760,00	47,39	140.920.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.336.590.000,00	604.055.000,00	45,19	614.190.860,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	52.000.000,00	34.250.000,00	65,86	0,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	587.115.000,00	580.110.000,00	98,80	56.100.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.206.596.750,00	5.854.414.820,00	81,23	6.700.745.795,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	175.200.000,00	144.575.000,00	82,51	175.175.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.422.194.000,00	1.012.864.000,00	71,21	844.890.500,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	499.480.000,00	395.402.000,00	79,16	439.164.898,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	299.175.000,00	171.495.000,00	57,32	519.948.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00	207.480.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.629.547.750,00	3.105.078.820,00	85,55	3.769.087.397,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.181.000.000,00	1.025.000.000,00	86,79	745.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.751.666.127,60	25.797.204.431,00	96,43	8.170.657.260,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektur	0,00	0,00	0,00	31.423.500,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	164.971.000,00	164.786.700,00	99,88	399.168.800,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan	530.000.000,00	484.350.889,00	91,38	400.890.530,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	19.600.000,00	19.243.515,00	98,18	17.754.450,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.594.765.400,00	1.500.475.400,00	94,08	265.250.700,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi	156.977.183,90	151.453.395,00	96,48	704.331.630,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan	3.841.543.799,60	3.716.971.600,00	96,75	2.150.408.450,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan	10.368.989.233,00	9.957.779.194,00	96,03	2.822.846.050,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancan	158.241.600,00	158.241.600,00	100,00	533.843.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	5.196.356.570,00	5.115.217.270,00	98,43	0,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ru	1.658.214.100,00	1.619.286.628,00	97,65	441.324.900,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	140.376.760,00	140.211.870,00	99,88	109.251.750,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Ba	1.014.395.381,10	917.623.610,00	90,46	129.951.600,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Tel	621.015.600,00	574.258.260,00	92,47	42.598.800,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	294.372.000,00	294.372.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	476.007.500,00	474.907.500,00	99,76	0,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Ker	10.640.000,00	6.345.000,00	59,63	8.715.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	505.200.000,00	501.680.000,00	99,30	112.898.100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.946.746.600,00	3.313.494.750,00	83,95	1.445.155.100,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.955.312.600,00	1.425.776.900,00	72,91	591.359.700,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	99.333.900,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	361.471.500,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.900.414.000,00	1.796.725.600,00	94,54	300.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	91.020.000,00	90.992.250,00	99,96	92.990.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	647.200.000,00	611.500.000,00	94,48	428.850.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	484.900.000,00	484.900.000,00	100,00	428.850.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	162.300.000,00	126.600.000,00	78,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.190.661.750,00	10.728.946.700,00	81,33	7.232.609.820,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.828.939.000,00	9.979.206.800,00	84,36	6.732.788.020,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.361.722.750,00	749.739.900,00	55,05	499.821.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	104.644.846.356,92	86.439.913.665,59	82,60	119.964.115.170,51

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.865.682.327,00	24.006.875.582,00	86,15	19.544.920.741,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	0,00	0,00	0,00	26.765.864,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	0,00	199.533.239,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	494.733.233,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.953.415.510,00	1.757.011.863,00	89,94	998.972.528,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	527.139.529,00	391.382.170,00	74,24	466.047.948,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermot	21.607.352.608,00	18.502.130.594,00	85,62	15.137.171.557,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermot	226.560.000,00	15.570.361,00	6,87	124.748.715,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermot	406.108.000,00	395.732.200,00	97,44	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apu	443.330.000,00	422.704.650,00	95,34	182.570.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel B	115.833.000,00	115.722.000,00	99,90	80.800.900,00
5.1.02.03.02.0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengk	160.260.000,00	160.260.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Peng	0,00	0,00	0,00	4.975.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	59.146.680,00	40.997.000,00	69,31	120.730.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingi	1.561.430.000,00	1.412.807.882,00	90,48	1.563.286.757,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadar	14.500.000,00	14.087.600,00	97,15	4.950.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Stu	100.000.000,00	94.646.220,00	94,64	82.190.000,00
5.1.02.03.02.0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Pera	41.388.850,00	41.388.850,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Labo	51.132.150,00	51.060.000,00	99,85	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	14.870.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	147.286.000,00	146.353.500,00	99,36	42.575.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	100.000.000,00	99.821.792,00	99,82	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	100.000.000,00	99.278.400,00	99,27	0,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	250.800.000,00	245.920.500,00	98,05	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.147.096.809,92	14.666.582.350,60	96,82	12.234.466.977,51
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Ge	14.957.911.809,92	14.477.822.010,60	96,79	10.623.747.906,51
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Ge	104.185.000,00	104.185.000,00	100,00	1.491.471.993,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fa	85.000.000,00	84.575.340,00	99,50	119.247.078,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.546.262.358,00	47.682.262.232,99	77,47	88.112.831.452,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	33.919.013.988,00	22.954.586.132,99	67,67	43.347.333.452,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	27.229.472.050,00	24.330.338.800,00	89,35	44.209.526.750,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	397.776.320,00	397.337.300,00	99,88	555.971.250,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.804.862,00	84.193.500,00	98,12	71.896.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercora	85.804.862,00	84.193.500,00	98,12	71.896.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.852.329.230,10	84.944.164.715,00	75,94	123.651.799.601,60
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.738.673.230,10	84.858.306.915,00	75,94	123.482.365.766,60
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.758.541.983,45	64.244.202.024,00	84,80	93.640.379.557,50
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.980.131.246,65	20.614.104.891,00	57,29	29.841.986.209,10
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	113.656.000,00	85.857.800,00	75,54	169.433.835,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	113.656.000,00	85.857.800,00	75,54	169.433.835,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyaraka	13.899.891.072,00	12.559.020.733,00	90,35	30.135.445.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.294.891.072,00	11.954.020.733,00	89,91	30.135.445.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.705.395.000,00	3.454.821.197,00	73,42	1.847.250.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	8.589.496.072,00	8.499.199.536,00	98,94	4.663.895.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	23.039.300.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	585.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	605.000.000,00	605.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	605.000.000,00	605.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	74.737.535.966,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	74.737.535.966,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	74.737.535.966,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	66.854.596.833,00	66.759.329.833,00	99,85	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	66.854.596.833,00	66.759.329.833,00	99,85	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	65.073.733.533,00	64.978.466.533,00	99,85	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.780.863.300,00	1.780.863.300,00	100,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.984.964.004,00	1.238.891.164,00	62,41	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.984.964.004,00	1.238.891.164,00	62,41	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.984.964.004,00	1.238.891.164,00	62,41	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	88,03	94.210.701.897,83
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	88,03	94.210.701.897,83
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	88,03	94.210.701.897,83
5.1.05	Belanja Hibah	262.798.375.249,00	246.484.811.969,92	93,79	136.655.551.455,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.479.199.375,00	31.013.083.837,00	95,48	6.925.556.300,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	450.000.000,00	0,00	0,00	310.551.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	450.000.000,00	0,00	0,00	310.551.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	32.016.199.375,00	31.013.083.837,00	96,86	6.615.005.300,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	32.016.199.375,00	31.013.083.837,00	96,86	6.615.005.300,00
5.1.05.01.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01.03.0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.390.000.000,00	1.338.500.000,00	96,29	0,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.390.000.000,00	1.338.500.000,00	96,29	0,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.390.000.000,00	1.338.500.000,00	96,29	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Huk	197.956.700.745,00	183.766.142.051,92	92,83	97.888.073.655,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial ya	130.500.068.433,00	119.098.926.073,00	91,26	86.432.129.055,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sos	37.942.538.300,00	36.384.455.618,00	95,89	78.331.179.455,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan S	92.557.530.133,00	82.714.470.455,00	89,36	8.100.949.600,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Mem	53.523.969.399,00	51.153.283.888,92	95,57	6.266.248.500,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Tel	53.523.969.399,00	51.153.283.888,92	95,57	6.266.248.500,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarak	6.841.793.913,00	6.756.344.590,00	98,75	2.286.535.100,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kem	6.841.538.613,00	6.756.344.590,00	98,75	2.286.535.100,00
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy	255.300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	5.680.869.000,00	5.447.587.500,00	95,89	1.778.161.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	5.680.869.000,00	5.447.587.500,00	95,89	1.778.161.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.410.000.000,00	1.310.000.000,00	92,90	1.125.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indones	1.410.000.000,00	1.310.000.000,00	92,90	1.125.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.275.126.000,00	15.272.787.730,00	99,98	14.969.401.500,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.275.126.000,00	15.272.787.730,00	99,98	14.969.401.500,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.275.126.000,00	15.272.787.730,00	99,98	14.969.401.500,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	5.210.820.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	5.210.820.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	5.210.820.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	12.673.313.000,00	12.611.729.000,00	99,51	11.661.700.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	99,46	10.317.000.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	99,46	10.317.000.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	99,94	1.344.700.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	99,94	1.344.700.000,00
5.1.05.11	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro	3.024.036.129,00	2.482.569.351,00	82,09	0,00
5.1.05.11.01	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro	1.110.000.000,00	1.108.540.000,00	99,86	0,00
5.1.05.11.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro	1.110.000.000,00	1.108.540.000,00	99,86	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.05.11.02	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Mikro	1.914.036.129,00	1.374.029.351,00	71,78	0,00
5.1.05.11.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Mikro	1.914.036.129,00	1.374.029.351,00	71,78	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	78.068.692.000,00	56.468.348.310,00	72,33	5.385.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	52.758.692.000,00	31.168.348.310,00	59,07	410.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	52.305.900.000,00	30.724.525.000,00	58,74	410.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	52.305.900.000,00	30.724.525.000,00	58,74	410.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	452.792.000,00	443.823.310,00	98,01	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	452.792.000,00	443.823.310,00	98,01	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	25.310.000.000,00	25.300.000.000,00	99,96	4.825.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	25.310.000.000,00	25.300.000.000,00	99,96	4.825.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	25.310.000.000,00	25.300.000.000,00	99,96	4.825.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagar	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (B	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (B	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**88,77**	**2.507.571.123.568,16**
5.2	**BELANJA MODAL**	**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**88,65**	**814.583.797.586,07**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,61	14.159.821.565,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,61	14.159.821.565,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	976.073.350,00	929.771.730,00	95,25	13.517.976.665,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	94.590.400,00	49.084.200,00	51,89	704.593.100,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	9.668.350.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	54.761.850,00	54.761.850,00	100,00	743.908.900,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	826.721.100,00	825.925.680,00	99,90	2.401.124.665,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.020.712.400,00	220.712.400,00	21,62	641.844.900,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	890.132.000,00	90.132.000,00	10,12	0,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	130.580.400,00	130.580.400,00	100,00	641.844.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	94,24	102.795.588.522,20
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.684.492.982,00	2.539.463.345,00	94,59	6.012.437.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.949.675.040,00	1.843.710.000,00	94,56	5.623.240.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.949.675.040,00	1.843.710.000,00	94,56	5.548.640.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	74.600.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	734.817.942,00	695.753.345,00	94,68	389.197.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	550.000.000,00	525.001.495,00	95,45	314.100.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	184.817.942,00	170.751.850,00	92,38	51.547.000,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	23.550.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	22.372.352.397,00	21.467.474.838,00	95,95	17.863.295.421,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	22.256.795.757,00	21.352.251.838,00	95,93	17.805.795.421,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	83.769.147,00	66.960.000,00	79,93	178.917.447,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	7.039.600.000,00	6.904.700.000,00	98,08	5.149.400.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	954.995.250,00	855.000.000,00	89,52	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.383.531.360,00	1.358.427.985,00	98,18	1.476.247.974,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	943.000.000,00	896.185.003,00	95,03	80.080.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.851.900.000,00	11.270.978.850,00	95,09	10.921.150.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	0,00
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	0,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	85.571.640,00	85.248.000,00	99,62	57.500.000,00
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	85.571.640,00	85.248.000,00	99,62	57.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.059.611,00	18.408.655,00	73,45	23.062.500,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.650.000,00	665.000,00	10,00	0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	6.650.000,00	665.000,00	10,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	18.409.611,00	17.743.655,00	96,38	23.062.500,00
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	798.490,00	788.655,00	98,76	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	16.955.000,00	16.955.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	656.121,00	0,00	0,00	632.500,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.430.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	146.470.000,00	143.778.940,00	98,16	168.683.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	146.470.000,00	143.778.940,00	98,16	168.683.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	67.980.000,00	67.856.500,00	99,81	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	32.277.000,00	30.820.000,00	95,48	116.200.000,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	46.213.000,00	45.102.440,00	97,59	30.183.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.235.490.849,74	30.085.181.031,61	96,31	27.440.636.490,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.478.036.711,36	1.432.074.199,38	96,89	6.645.942.520,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.478.036.711,36	1.432.074.199,38	96,89	6.645.942.520,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.977.837.519,38	24.200.690.077,23	96,88	17.085.815.210,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.092.039.351,21	18.506.515.637,50	96,93	9.301.370.250,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	239.523.000,00	238.800.000,00	99,69	97.900.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.176.107.583,00	1.152.494.473,52	97,99	3.332.108.430,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	724.237.178,00	686.767.032,00	94,82	271.542.165,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.669.634.473,17	3.544.897.860,21	96,60	4.063.844.365,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	76.295.934,00	71.215.074,00	93,34	19.050.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.779.616.619,00	4.452.416.755,00	93,15	3.708.878.760,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	929.567.760,00	865.209.347,00	93,07	361.930.690,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.631.460.034,00	1.480.050.044,00	90,71	227.466.110,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	998.358.003,00	922.626.086,00	92,41	1.936.250.080,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	639.585.000,00	637.843.390,00	99,72	133.102.620,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	580.645.822,00	546.687.888,00	94,15	1.033.179.260,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.322.683.941,00	6.008.333.996,84	95,02	2.067.548.760,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.946.742.759,00	3.769.431.951,84	95,50	1.896.438.760,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.883.617.886,00	1.877.919.300,00	99,69	697.148.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.991.710.373,00	1.827.586.153,44	91,75	1.179.130.260,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	41.089.500,00	34.511.498,40	83,99	3.200.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.325.000,00	29.415.000,00	96,99	10.460.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.275.377.402,00	2.140.977.845,00	94,09	161.110.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	52.355.402,00	52.352.850,00	99,99	27.100.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	42.760.000,00	41.625.000,00	97,34	0,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	14.940.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2.180.262.000,00	2.046.999.995,00	93,88	119.070.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	100.563.780,00	97.924.200,00	97,37	0,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	100.563.780,00	97.924.200,00	97,37	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.193.814.203,00	9.923.280.992,00	97,34	5.284.983.550,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.182.264.203,00	9.923.280.992,00	97,45	5.284.983.550,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.607.264.203,00	9.363.779.692,00	97,46	3.264.960.150,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	549.448.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	175.000.000,00	166.750.000,00	95,28	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	451.250.000,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	400.000.000,00	392.751.300,00	98,18	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	1.019.325.400,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.135.221.313,00	2.057.197.811,19	96,34	2.264.906.900,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.127.221.313,00	2.049.397.811,19	96,34	2.139.651.900,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	401.707.200,00	401.204.700,00	99,87	187.341.300,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.678.692.700,00	1.644.127.593,00	97,94	1.790.257.000,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00
5.2.02.08.01.0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	29.191.313,00	4.065.518,19	13,92	16.053.600,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.630.100,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50	125.255.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50	125.255.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.080.473.526,54	14.435.011.675,86	95,71	18.670.582.265,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.323.658.188,26	10.872.043.472,55	96,01	15.632.637.635,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.239.879.577,40	7.837.939.750,21	95,12	9.058.139.714,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.083.778.610,86	3.034.103.722,34	98,38	6.574.497.921,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.756.815.338,28	3.562.968.203,31	94,84	3.037.944.630,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	452.550.700,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.273.036.009,00	1.230.277.268,00	96,64	994.719.800,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	630.664.935,00	594.898.883,13	94,32	234.911.150,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.853.114.394,28	1.737.792.052,18	93,77	1.355.762.980,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	39.008.000,00	38.034.999,00	97,50	5.550.000,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	39.008.000,00	38.034.999,00	97,50	5.550.000,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	39.008.000,00	38.034.999,00	97,50	5.550.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	2.326.395.962,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	2.326.395.962,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.326.395.962,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	12.610.544,00	0,00	0,00	1.300.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	12.610.544,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	12.610.544,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	110.522.687,00	109.517.150,00	99,09	71.575.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	50.582.687,00	49.577.150,00	98,01	13.875.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	40.637.087,00	39.657.150,00	97,58	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	9.945.600,00	9.920.000,00	99,74	13.875.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	59.940.000,00	59.940.000,00	100,00	57.700.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	59.940.000,00	59.940.000,00	100,00	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.449.353.200,00	1.420.105.585,00	97,98	1.582.332.725,20
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.449.353.200,00	1.420.105.585,00	97,98	1.582.332.725,20
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	499.500.000,00	496.944.780,00	99,48	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	854.393.200,00	838.321.285,00	98,11	1.412.122.725,20
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	95.460.000,00	84.839.520,00	88,87	170.210.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.879.675.920,00	1.673.766.867,08	89,04	19.300.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.879.675.920,00	1.673.766.867,08	89,04	19.300.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	747.156.000,00	745.955.967,08	99,83	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.132.519.920,00	927.810.900,00	81,92	19.300.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	9.142.633.737,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	9.142.633.737,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	9.142.633.737,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	10.061.637.943,00	10.017.214.994,00	99,55	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	10.061.637.943,00	10.017.214.994,00	99,55	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	10.018.563.943,00	9.974.140.994,00	99,55	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	43.074.000,00	43.074.000,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	74,54	9.850.365.212,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	74,54	9.850.365.212,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	74,54	9.850.365.212,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	87,79	161.139.070.395,87
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	133.162.093.375,00	121.409.472.082,34	91,17	157.635.880.919,87

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.247.146.325,00	111.029.378.032,34	90,82	145.964.902.019,87
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.940.321.831,00	27.647.871.762,00	95,53	27.310.626.401,96
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.326.332.800,00	9.575.771.376,00	92,73	27.286.510.908,50
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	26.141.750,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	252.500.000,00	198.493.000,00	78,61	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.207.536.051,00	33.132.606.350,00	94,10	67.179.485.249,50
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	621.112.450,00	565.440.250,00	91,03	6.191.033.250,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	1.236.125.725,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.375.088.193,00	39.411.832.344,34	84,98	16.562.416.984,91
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	498.113.250,00	497.362.950,00	99,84	198.703.500,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.914.947.050,00	10.380.094.050,00	95,09	11.670.978.900,00
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	93,31	2.035.935.200,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.113.866.250,00	5.899.915.250,00	96,50	9.635.043.700,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	847.904.350,00	846.183.507,74	99,79	1.881.611.650,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	847.904.350,00	846.183.507,74	99,79	1.881.611.650,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	87.017.000,00	86.695.407,74	99,63	40.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	590.734.350,00	589.365.100,00	99,76	1.739.474.650,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	170.153.000,00	170.123.000,00	99,98	102.137.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	23,91	1.621.577.826,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	23,91	1.621.577.826,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	23,91	1.621.577.826,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	87,42	519.469.106.288,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	514.661.340.173,89	446.796.535.676,80	86,81	486.384.795.788,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	472.047.861.543,00	419.339.259.676,80	88,83	467.522.852.638,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	402.359.449.834,00	351.283.390.643,80	87,30	430.657.076.732,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	695.016.944,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	69.688.411.709,00	68.055.869.033,00	97,65	36.170.758.962,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	42.613.478.630,89	27.457.276.000,00	64,43	18.861.943.150,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	32.221.291.827,00	21.734.561.450,00	67,45	18.400.539.900,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	49,68	0,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.635.010.803,89	1.868.300.750,00	70,90	461.403.250,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	28.274.717.510,00	26.221.866.815,00	92,73	11.055.471.200,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	313.000.000,00	308.288.000,00	98,49	1.046.719.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	313.000.000,00	308.288.000,00	98,49	1.046.719.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	87,01	1.222.837.950,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	87,01	1.222.837.950,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	25.738.515.460,00	23.979.114.065,00	93,16	8.785.914.250,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	25.738.515.460,00	23.979.114.065,00	93,16	8.785.914.250,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	18.026.319.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	4.582.379.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.582.379.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	5.125.205.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.125.205.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	8.318.735.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	8.318.735.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15.972.608.500,00	15.581.354.705,00	97,55	3.987.520.300,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	95,91	0,00
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	95,91	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	97,74	3.987.520.300,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	9.673.806.500,00	9.477.889.455,00	97,97	3.987.520.300,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.571.330.000,00	4.446.581.250,00	97,27	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	99,70	17.020.210.815,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	669.535.560,00	647.692.020,00	96,73	1.785.251.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	669.535.560,00	647.692.020,00	96,73	1.785.251.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	669.535.560,00	647.692.020,00	96,73	1.785.251.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	981.496.000,00	979.223.111,00	99,76	270.036.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	831.611.000,00	829.583.111,00	99,75	270.036.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	831.611.000,00	829.583.111,00	99,75	270.036.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	149.885.000,00	149.640.000,00	99,83	0,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	149.885.000,00	149.640.000,00	99,83	0,00
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	13.079.000,00	13.079.000,00	100,00	0,00
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	13.079.000,00	13.079.000,00	100,00	0,00
5.2.05.06.01.0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	13.079.000,00	13.079.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	14.964.923.815,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	14.964.923.815,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	14.964.923.815,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	19.452.359.293,00	19.414.573.293,00	99,80	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	19.452.359.293,00	19.414.573.293,00	99,80	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	18.826.296.593,00	18.788.510.593,00	99,79	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	626.062.700,00	626.062.700,00	100,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.393.177,00	79.228.870,00	82,19	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	96.393.177,00	79.228.870,00	82,19	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	96.393.177,00	79.228.870,00	82,19	0,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	75.754.947,00	74.448.870,00	98,27	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	20.638.230,00	4.780.000,00	23,16	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**88,65**	**814.583.797.586,07**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.442.284.504,55**	**2.766.488.804,00**	**50,83**	**2.155.951.800,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83	2.155.951.800,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83	2.155.951.800,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83	2.155.951.800,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83	2.155.951.800,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.442.284.504,55**	**2.766.488.804,00**	**50,83**	**2.155.951.800,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**544.652.123.254,00**	**528.350.989.472,00**	**97,00**	**487.359.170.216,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,00	487.359.170.216,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,00	487.359.170.216,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,00	487.359.170.216,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,00	487.359.170.216,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**544.652.123.254,00**	**528.350.989.472,00**	**97,00**	**487.359.170.216,00**
	JUMLAH BELANJA	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**89,74**	**3.811.670.043.170,23**
	SURPLUS/DEFISIT	**(23.470.262.133,01)**	**96.798.779.481,72**	**(412,43)**	**(56.722.052.447,57)**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**23.470.262.133,01**	**23.416.883.037,01**	**99,77**	**106.778.424.206,58**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**50.056.371.759,01**	**50.002.992.663,01**	**99,89**	**131.728.424.206,58**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.056.371.759,01	39.964.530.163,01	79,83	131.728.424.206,58
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	136.096.889,00	136.096.889,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	136.096.889,00	136.096.889,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Dae	136.096.889,00	136.096.889,00	100,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.792.394.000,00	12.792.394.000,00	100,00	0,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	100,00	0,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dar	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	100,00	0,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan	5.285.218.000,00	5.285.218.000,00	100,00	0,00
6.1.01.03.03.0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan	5.285.218.000,00	5.285.218.000,00	100,00	0,00
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	10.038.462.500,00
6.1.01.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daera	0,00	0,00	0,00	10.038.462.500,00
6.1.01.04.04.0006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen ke	0,00	0,00	0,00	10.038.462.500,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	53.379.096,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	53.379.096,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	53.379.096,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran P	16.104.649.562,01	6.012.807.965,24	37,33	103.879.165.742,68
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	16.104.649.562,01	6.012.807.965,24	37,33	103.879.165.742,68
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	16.104.649.562,01	6.012.807.965,24	37,33	103.879.165.742,68
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	100,00	17.757.416.867,90
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	100,00	17.757.416.867,90
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	100,00	17.757.416.867,90
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.038.462.500,00	0,00	0,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	10.038.462.500,00	0,00	0,00
6.1.05.03.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	10.038.462.500,00	0,00	0,00
6.1.05.03.02.0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	10.038.462.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50.056.371.759,01**	**50.002.992.663,01**	**99,89**	**131.728.424.206,58**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**26.586.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**100,00**	**24.950.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00	24.950.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00	24.950.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00	24.950.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00	24.950.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**26.586.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**100,00**	**24.950.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**23.470.262.133,01**	**23.416.883.037,01**	**99,77**	**106.778.424.206,58**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**120.215.662.518,73**	**0,00**	**50.056.371.759,01**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	(3.438.035,00)	99,96	
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	(3.438.035,00)	99,96	
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	(3.438.035,00)	99,96	
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	(3.438.035,00)	99,96	
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	(3.438.035,00)	99,96	
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	(3.438.035,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	(3.438.035,00)	99,96	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.771.193.000,00)	(8.767.754.965,00)	3.438.035,00	99,96	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.771.193.000,00)	(8.767.754.965,00)	3.438.035,00	99,96	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab.Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	989.582.029.956,00	915.487.859.792,50	(74.094.170.163,50)	92,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	786.434.529.336,00	716.818.809.334,00	(69.615.720.002,00)	91,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	123.749.850,00	112.497.850,00	(11.252.000,00)	90,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	53.750.000,00	53.258.000,00	(492.000,00)	99,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.750.000,00	53.258.000,00	(492.000,00)	99,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.750.000,00	53.258.000,00	(492.000,00)	99,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	49.999.850,00	39.239.850,00	(10.760.000,00)	78,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.999.850,00	39.239.850,00	(10.760.000,00)	78,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.850,00	39.239.850,00	(10.760.000,00)	78,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	(65.241.196.997,00)	91,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	(65.241.196.997,00)	91,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	(65.241.196.997,00)	91,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	(65.241.196.997,00)	91,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	14.441.750,00	(558.250,00)	96,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.000.000,00	14.441.750,00	(558.250,00)	96,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.441.750,00	(558.250,00)	96,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.441.750,00	(558.250,00)	96,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	97.385.000,00	78.796.900,00	(18.588.100,00)	80,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	97.385.000,00	78.796.900,00	(18.588.100,00)	80,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	97.385.000,00	78.796.900,00	(18.588.100,00)	80,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.385.000,00	78.796.900,00	(18.588.100,00)	80,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.114.645.040,00	1.102.863.882,00	(11.781.158,00)	98,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.993.640,00	29.642.439,00	(351.201,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.993.640,00	29.642.439,00	(351.201,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.993.640,00	29.642.439,00	(351.201,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	514.564.900,00	514.048.660,00	(516.240,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	514.564.900,00	514.048.660,00	(516.240,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	514.564.900,00	514.048.660,00	(516.240,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.000.000,00	59.405.535,00	(594.465,00)	99,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.405.535,00	(594.465,00)	99,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.405.535,00	(594.465,00)	99,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	150.000.000,00	149.736.748,00	(263.252,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.736.748,00	(263.252,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.736.748,00	(263.252,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.000.000,00	53.706.000,00	(1.294.000,00)	97,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	53.706.000,00	(1.294.000,00)	97,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	53.706.000,00	(1.294.000,00)	97,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	32.500.000,00	32.495.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	32.495.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.495.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.000.000,00	49.803.600,00	(196.400,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.803.600,00	(196.400,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.803.600,00	(196.400,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	222.586.500,00	214.025.900,00	(8.560.600,00)	96,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	222.586.500,00	214.025.900,00	(8.560.600,00)	96,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.586.500,00	214.025.900,00	(8.560.600,00)	96,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.176.658.200,00	1.078.070.998,00	(98.587.202,00)	91,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	723.600.000,00	685.391.998,00	(38.208.002,00)	94,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	723.600.000,00	685.391.998,00	(38.208.002,00)	94,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.600.000,00	685.391.998,00	(38.208.002,00)	94,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	453.058.200,00	392.679.000,00	(60.379.200,00)	86,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	453.058.200,00	392.679.000,00	(60.379.200,00)	86,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	453.058.200,00	392.679.000,00	(60.379.200,00)	86,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.436.842.400,00	5.036.945.005,00	(3.399.897.395,00)	59,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.810.542.400,00	802.095.005,00	(2.008.447.395,00)	28,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.810.542.400,00	802.095.005,00	(2.008.447.395,00)	28,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.810.542.400,00	802.095.005,00	(2.008.447.395,00)	28,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.626.300.000,00	4.234.850.000,00	(1.391.450.000,00)	75,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.626.300.000,00	4.234.850.000,00	(1.391.450.000,00)	75,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.626.300.000,00	4.234.850.000,00	(1.391.450.000,00)	75,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.905.894.600,00	2.072.035.700,00	(833.858.900,00)	71,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	535.499.600,00	376.877.325,00	(158.622.275,00)	70,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	535.499.600,00	376.877.325,00	(158.622.275,00)	70,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.499.600,00	376.877.325,00	(158.622.275,00)	70,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.230.608.000,00	1.614.105.000,00	(616.503.000,00)	72,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	730.608.000,00	687.426.000,00	(43.182.000,00)	94,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.608.000,00	687.426.000,00	(43.182.000,00)	94,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	926.679.000,00	(573.321.000,00)	61,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	926.679.000,00	(573.321.000,00)	61,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	139.787.000,00	81.053.375,00	(58.733.625,00)	57,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	139.787.000,00	81.053.375,00	(58.733.625,00)	57,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.787.000,00	81.053.375,00	(58.733.625,00)	57,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.147.500.620,00	198.669.050.458,50	(4.478.450.161,50)	97,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	114.545.823.330,00	112.333.430.715,50	(2.212.392.614,50)	98,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	3.364.900.000,00	3.082.027.500,00	(282.872.500,00)	91,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.364.900.000,00	3.082.027.500,00	(282.872.500,00)	91,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.364.900.000,00	3.082.027.500,00	(282.872.500,00)	91,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	1.135.566.000,00	1.130.291.000,00	(5.275.000,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.135.566.000,00	1.130.291.000,00	(5.275.000,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.135.566.000,00	1.130.291.000,00	(5.275.000,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.500.000.000,00	1.426.215.000,00	(73.785.000,00)	95,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	1.426.215.000,00	(73.785.000,00)	95,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.426.215.000,00	(73.785.000,00)	95,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	8.112.836.000,00	7.962.259.000,00	(150.577.000,00)	98,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000,00	643.493.000,00	(6.507.000,00)	98,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	650.000.000,00	643.493.000,00	(6.507.000,00)	98,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.462.836.000,00	7.318.766.000,00	(144.070.000,00)	98,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.462.836.000,00	7.318.766.000,00	(144.070.000,00)	98,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	100.000.000,00	98.980.000,00	(1.020.000,00)	98,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.980.000,00	(1.020.000,00)	98,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	98.980.000,00	(1.020.000,00)	98,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	5.037.060.000,00	4.891.319.537,50	(145.740.462,50)	97,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	5.037.060.000,00	4.891.319.537,50	(145.740.462,50)	97,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.037.060.000,00	4.891.319.537,50	(145.740.462,50)	97,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	362.300.000,00	297.101.500,00	(65.198.500,00)	82,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	362.300.000,00	297.101.500,00	(65.198.500,00)	82,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.300.000,00	297.101.500,00	(65.198.500,00)	82,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	705.554.300,00	638.022.784,00	(67.531.516,00)	90,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	705.554.300,00	638.022.784,00	(67.531.516,00)	90,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.554.300,00	638.022.784,00	(67.531.516,00)	90,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	318.852.000,00	221.073.800,00	(97.778.200,00)	69,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	318.852.000,00	221.073.800,00	(97.778.200,00)	69,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.852.000,00	221.073.800,00	(97.778.200,00)	69,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	74.728.033.180,00	74.557.580.271,00	(170.452.909,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	54.021.974.936,00	53.926.823.936,00	(95.151.000,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.553.314.936,00	47.458.542.936,00	(94.772.000,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	6.468.660.000,00	6.468.281.000,00	(379.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	20.706.058.244,00	20.630.756.335,00	(75.301.909,00)	99,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.040.337.351,00	7.002.821.442,00	(37.515.909,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.665.720.893,00	13.627.934.893,00	(37.786.000,00)	99,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	298.991.850,00	291.565.550,00	(7.426.300,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	298.991.850,00	291.565.550,00	(7.426.300,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.991.850,00	291.565.550,00	(7.426.300,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	6.122.120.000,00	5.815.503.240,00	(306.616.760,00)	94,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	5.791.400.000,00	5.485.955.040,00	(305.444.960,00)	94,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.791.400.000,00	5.485.955.040,00	(305.444.960,00)	94,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	330.720.000,00	329.548.200,00	(1.171.800,00)	99,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	330.720.000,00	329.548.200,00	(1.171.800,00)	99,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	5.863.645.200,00	5.310.572.500,00	(553.072.700,00)	90,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	299.395.000,00	283.096.200,00	(16.298.800,00)	94,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.05	Belanja Hibah	299.395.000,00	283.096.200,00	(16.298.800,00)	94,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	5.564.250.200,00	5.027.476.300,00	(536.773.900,00)	90,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.564.250.200,00	5.027.476.300,00	(536.773.900,00)	90,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	265.951.800,00	132.601.835,00	(133.349.965,00)	49,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	265.951.800,00	132.601.835,00	(133.349.965,00)	49,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.951.800,00	132.601.835,00	(133.349.965,00)	49,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	6.003.016.000,00	5.866.916.600,00	(136.099.400,00)	97,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	970.487.000,00	959.200.000,00	(11.287.000,00)	98,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.05	Belanja Hibah	970.487.000,00	959.200.000,00	(11.287.000,00)	98,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	5.032.529.000,00	4.907.716.600,00	(124.812.400,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.032.529.000,00	4.907.716.600,00	(124.812.400,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	626.997.000,00	611.400.598,00	(15.596.402,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	2.997.000,00	2.805.000,00	(192.000,00)	93,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.997.000,00	2.805.000,00	(192.000,00)	93,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2	BELANJA MODAL	624.000.000,00	608.595.598,00	(15.404.402,00)	97,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324.000.000,00	309.109.932,00	(14.890.068,00)	95,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	299.485.666,00	(514.334,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	66.456.227.890,00	64.382.078.242,00	(2.074.149.648,00)	96,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	1.107.450.000,00	1.089.939.000,00	(17.511.000,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.107.450.000,00	1.089.939.000,00	(17.511.000,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.107.450.000,00	1.089.939.000,00	(17.511.000,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	148.701.000,00	148.701.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	148.701.000,00	148.701.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.701.000,00	148.701.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.985.804.901,00	3.903.250.000,00	(82.554.901,00)	97,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	847.903.000,00	844.240.000,00	(3.663.000,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	847.903.000,00	844.240.000,00	(3.663.000,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	3.137.901.901,00	3.059.010.000,00	(78.891.901,00)	97,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.137.901.901,00	3.059.010.000,00	(78.891.901,00)	97,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	2.510.836.000,00	2.439.079.000,00	(71.757.000,00)	97,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	745.899.000,00	(4.101.000,00)	99,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.05	Belanja Hibah	750.000.000,00	745.899.000,00	(4.101.000,00)	99,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.760.836.000,00	1.693.180.000,00	(67.656.000,00)	96,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.760.836.000,00	1.693.180.000,00	(67.656.000,00)	96,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	1.400.000.000,00	1.250.000.000,00	(150.000.000,00)	89,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	1.400.000.000,00	1.250.000.000,00	(150.000.000,00)	89,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	1.250.000.000,00	(150.000.000,00)	89,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	397.663.000,00	397.663.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	397.663.000,00	397.663.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	397.663.000,00	397.663.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	5.720.000.000,00	5.655.197.699,00	(64.802.301,00)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.833.274,00	(166.726,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.833.274,00	(166.726,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	5.520.000.000,00	5.455.364.425,00	(64.635.575,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.520.000.000,00	5.455.364.425,00	(64.635.575,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	354.341.000,00	352.630.500,00	(1.710.500,00)	99,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	326.941.000,00	325.255.500,00	(1.685.500,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.941.000,00	325.255.500,00	(1.685.500,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.2	BELANJA MODAL	27.400.000,00	27.375.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.400.000,00	27.375.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	474.101.600,00	242.565.900,00	(231.535.700,00)	51,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	474.101.600,00	242.565.900,00	(231.535.700,00)	51,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.101.600,00	242.565.900,00	(231.535.700,00)	51,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	1.962.958.000,00	1.488.277.697,00	(474.680.303,00)	75,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.929.958.000,00	1.455.277.697,00	(474.680.303,00)	75,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.929.958.000,00	1.455.277.697,00	(474.680.303,00)	75,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.2	BELANJA MODAL	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	36.915.686.889,00	36.906.325.579,00	(9.361.310,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	28.107.747.897,00	28.105.293.627,00	(2.454.270,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.301.281.897,00	19.300.786.897,00	(495.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	8.806.466.000,00	8.804.506.730,00	(1.959.270,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	8.807.938.992,00	8.801.031.952,00	(6.907.040,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.021.300.592,00	3.014.393.552,00	(6.907.040,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.786.638.400,00	5.786.638.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	110.573.700,00	110.337.700,00	(236.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	110.573.700,00	110.337.700,00	(236.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.573.700,00	110.337.700,00	(236.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	1.227.871.850,00	517.489.850,00	(710.382.000,00)	42,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	1.227.871.850,00	517.489.850,00	(710.382.000,00)	42,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.871.850,00	517.489.850,00	(710.382.000,00)	42,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	2.196.462.950,00	2.142.247.950,00	(54.215.000,00)	97,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	764.726.000,00	(35.274.000,00)	95,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	764.726.000,00	(35.274.000,00)	95,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	1.396.462.950,00	1.377.521.950,00	(18.941.000,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.396.462.950,00	1.377.521.950,00	(18.941.000,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	5.859.400.000,00	5.686.723.250,00	(172.676.750,00)	97,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	5.721.600.000,00	5.549.334.000,00	(172.266.000,00)	96,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.721.600.000,00	5.549.334.000,00	(172.266.000,00)	96,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.2	BELANJA MODAL	137.800.000,00	137.389.250,00	(410.750,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	137.800.000,00	137.389.250,00	(410.750,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	2.084.377.000,00	2.051.650.117,00	(32.726.883,00)	98,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1	BELANJA OPERASI	313.475.000,00	305.912.973,00	(7.562.027,00)	97,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	3.050.000,00	(6.425.000,00)	32,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1.05	Belanja Hibah	304.000.000,00	302.862.973,00	(1.137.027,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2	BELANJA MODAL	1.770.902.000,00	1.745.737.144,00	(25.164.856,00)	98,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.770.902.000,00	1.745.737.144,00	(25.164.856,00)	98,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	20.330.592.500,00	20.166.023.315,00	(164.569.185,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	1.209.473.000,00	1.203.291.000,00	(6.182.000,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.209.473.000,00	1.203.291.000,00	(6.182.000,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.209.473.000,00	1.203.291.000,00	(6.182.000,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007		PENGADAAN MEBEL PAUD	130.000.000,00	129.999.870,00	(130,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	130.000.000,00	129.999.870,00	(130,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	129.999.870,00	(130,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	270.244.800,00	252.506.600,00	(17.738.200,00)	93,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	270.244.800,00	252.506.600,00	(17.738.200,00)	93,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.244.800,00	252.506.600,00	(17.738.200,00)	93,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	967.736.150,00	923.739.417,00	(43.996.733,00)	95,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	967.736.150,00	923.739.417,00	(43.996.733,00)	95,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	967.736.150,00	923.739.417,00	(43.996.733,00)	95,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	(60.768.000,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	(60.768.000,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	(60.768.000,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	44.958.300,00	42.235.846,00	(2.722.454,00)	93,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	44.958.300,00	42.235.846,00	(2.722.454,00)	93,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.958.300,00	42.235.846,00	(2.722.454,00)	93,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	1.695.142.000,00	1.688.713.000,00	(6.429.000,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	1.695.142.000,00	1.688.713.000,00	(6.429.000,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.05	Belanja Hibah	1.695.142.000,00	1.688.713.000,00	(6.429.000,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	398.440.000,00	397.440.000,00	(1.000.000,00)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	99,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	99,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.2	BELANJA MODAL	198.440.000,00	198.440.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.440.000,00	198.440.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	3.601.763.000,00	3.577.510.832,00	(24.252.168,00)	99,32	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.876.763.000,00	2.853.662.609,92	(23.100.390,08)	99,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.216.000,00	15.253.100,00	(11.962.900,00)	56,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.05	Belanja Hibah	2.849.547.000,00	2.838.409.509,92	(11.137.490,08)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2	BELANJA MODAL	725.000.000,00	723.848.222,08	(1.151.777,92)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	725.000.000,00	723.848.222,08	(1.151.777,92)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	104.200.000,00	104.183.500,00	(16.500,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1	BELANJA OPERASI	104.200.000,00	104.183.500,00	(16.500,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.200.000,00	104.183.500,00	(16.500,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051		REHABILITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	637.622.250,00	636.158.250,00	(1.464.000,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1	BELANJA OPERASI	637.622.250,00	636.158.250,00	(1.464.000,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1.05	Belanja Hibah	637.622.250,00	636.158.250,00	(1.464.000,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.814.856.900,00	1.787.518.186,00	(27.338.714,00)	98,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	401.066.800,00	374.632.586,00	(26.434.214,00)	93,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	369.702.900,00	343.972.166,00	(25.730.734,00)	93,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.032.400,00	235.522.224,00	(25.510.176,00)	90,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.05	Belanja Hibah	108.670.500,00	108.449.942,00	(220.558,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.2	BELANJA MODAL	31.363.900,00	30.660.420,00	(703.480,00)	97,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.363.900,00	30.660.420,00	(703.480,00)	97,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	(816.000,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	(816.000,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	(816.000,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	11.490.100,00	11.401.600,00	(88.500,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1	BELANJA OPERASI	11.490.100,00	11.401.600,00	(88.500,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.490.100,00	11.401.600,00	(88.500,00)	99,22	
				JUMLAH BELANJA	989.582.029.956,00	915.487.859.792,50	(74.094.170.163,50)	92,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(989.582.029.956,00)	(915.487.859.792,50)	74.094.170.163,50	92,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(989.582.029.956,00)	(915.487.859.792,50)	74.094.170.163,50	92,51	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.248.141.325,00	6.144.648.329,00	(103.492.996,00)	98,34	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.203.242.825,00	5.111.715.158,00	(91.527.667,00)	98,24	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.004.000,00	166.880.400,00	(4.123.600,00)	97,58	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	171.004.000,00	166.880.400,00	(4.123.600,00)	97,58	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.004.000,00	166.880.400,00	(4.123.600,00)	97,58	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.004.000,00	166.880.400,00	(4.123.600,00)	97,58	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.032.238.825,00	4.944.834.758,00	(87.404.067,00)	98,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	4.246.363.825,00	4.170.113.058,00	(76.250.767,00)	98,20	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.047.263.825,00	3.972.180.633,00	(75.083.192,00)	98,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.264.275,00	1.503.500.672,00	(71.763.603,00)	95,44	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.471.999.550,00	2.468.679.961,00	(3.319.589,00)	99,86	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	199.100.000,00	197.932.425,00	(1.167.575,00)	99,41	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	33.988.200,00	(1.011.800,00)	97,10	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	164.100.000,00	163.944.225,00	(155.775,00)	99,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN	785.875.000,00	774.721.700,00	(11.153.300,00)	98,58	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	785.875.000,00	774.721.700,00	(11.153.300,00)	98,58	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.875.000,00	774.721.700,00	(11.153.300,00)	98,58	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	343.150.000,00	342.635.650,00	(514.350,00)	99,85	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01		PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	343.150.000,00	342.635.650,00	(514.350,00)	99,85	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0003		PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH	343.150.000,00	342.635.650,00	(514.350,00)	99,85	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	343.150.000,00	342.635.650,00	(514.350,00)	99,85	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.150.000,00	342.635.650,00	(514.350,00)	99,85	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	286.397.500,00	278.225.521,00	(8.171.979,00)	97,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	286.397.500,00	278.225.521,00	(8.171.979,00)	97,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003		PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA	286.397.500,00	278.225.521,00	(8.171.979,00)	97,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	286.397.500,00	278.225.521,00	(8.171.979,00)	97,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.397.500,00	278.225.521,00	(8.171.979,00)	97,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	415.351.000,00	412.072.000,00	(3.279.000,00)	99,21	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01		PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	415.351.000,00	412.072.000,00	(3.279.000,00)	99,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	415.351.000,00	412.072.000,00	(3.279.000,00)	99,21	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	185.466.000,00	182.512.000,00	(2.954.000,00)	98,40	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.466.000,00	182.512.000,00	(2.954.000,00)	98,40	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	229.885.000,00	229.560.000,00	(325.000,00)	99,85	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.920.000,00	(80.000,00)	99,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.885.000,00	149.640.000,00	(245.000,00)	99,83	
				JUMLAH BELANJA	6.248.141.325,00	6.144.648.329,00	(103.492.996,00)	98,34	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.248.141.325,00)	(6.144.648.329,00)	103.492.996,00	98,34	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.248.141.325,00)	(6.144.648.329,00)	103.492.996,00	98,34	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab.Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	(1.753.121.693,94)	99,28	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	(1.753.121.693,94)	99,28	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	(1.753.121.693,94)	99,28	
				JUMLAH PENDAPATAN	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	(1.753.121.693,94)	99,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	719.889.042.809,60	654.292.089.617,38	(65.596.953.192,22)	90,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	566.363.756.288,60	518.734.825.136,38	(47.628.931.152,22)	91,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	169.255.510,00	127.053.949,00	(42.201.561,00)	75,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	77.978.710,00	65.701.000,00	(12.277.710,00)	84,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.978.710,00	65.701.000,00	(12.277.710,00)	84,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.978.710,00	65.701.000,00	(12.277.710,00)	84,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	34.800.000,00	28.769.000,00	(6.031.000,00)	82,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	28.769.000,00	(6.031.000,00)	82,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	28.769.000,00	(6.031.000,00)	82,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	56.476.800,00	32.583.949,00	(23.892.851,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	56.476.800,00	32.583.949,00	(23.892.851,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.476.800,00	32.583.949,00	(23.892.851,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	(10.264.979.175,00)	96,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	(10.264.979.175,00)	96,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	(10.264.979.175,00)	96,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	(10.264.979.175,00)	96,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	90.970.000,00	88.897.935,00	(2.072.065,00)	97,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	78.530.000,00	77.877.000,00	(653.000,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.530.000,00	77.877.000,00	(653.000,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.530.000,00	77.877.000,00	(653.000,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	12.440.000,00	11.020.935,00	(1.419.065,00)	88,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.440.000,00	11.020.935,00	(1.419.065,00)	88,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	11.020.935,00	(1.419.065,00)	88,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100.355.000,00	85.700.000,00	(14.655.000,00)	85,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	99.675.000,00	85.700.000,00	(13.975.000,00)	85,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.675.000,00	85.700.000,00	(13.975.000,00)	85,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.675.000,00	85.700.000,00	(13.975.000,00)	85,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	672.860.902,00	581.612.567,00	(91.248.335,00)	86,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.997.789,00	26.807.005,00	(3.190.784,00)	89,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.997.789,00	26.807.005,00	(3.190.784,00)	89,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.997.789,00	26.807.005,00	(3.190.784,00)	89,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	119.696.629,00	115.479.998,00	(4.216.631,00)	96,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.904.629,00	680.000,00	(2.224.629,00)	23,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.904.629,00	680.000,00	(2.224.629,00)	23,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	116.792.000,00	114.799.998,00	(1.992.002,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.792.000,00	114.799.998,00	(1.992.002,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	59.994.100,00	59.713.441,00	(280.659,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.994.100,00	59.713.441,00	(280.659,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.994.100,00	59.713.441,00	(280.659,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	105.142.384,00	102.841.950,00	(2.300.434,00)	97,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.142.384,00	102.841.950,00	(2.300.434,00)	97,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.142.384,00	102.841.950,00	(2.300.434,00)	97,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.340.000,00	54.656.375,00	(683.625,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.340.000,00	54.656.375,00	(683.625,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.340.000,00	54.656.375,00	(683.625,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	74.996.000,00	47.295.000,00	(27.701.000,00)	63,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	74.996.000,00	47.295.000,00	(27.701.000,00)	63,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.996.000,00	47.295.000,00	(27.701.000,00)	63,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	187.694.000,00	174.818.798,00	(12.875.202,00)	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	187.694.000,00	174.818.798,00	(12.875.202,00)	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.694.000,00	174.818.798,00	(12.875.202,00)	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	60.680.000,00	56.736.500,00	(3.943.500,00)	93,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	60.680.000,00	56.736.500,00	(3.943.500,00)	93,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.909.060,00	2.180.000,00	(729.060,00)	74,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.909.060,00	2.180.000,00	(729.060,00)	74,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	57.770.940,00	54.556.500,00	(3.214.440,00)	94,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.770.940,00	54.556.500,00	(3.214.440,00)	94,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.510.206.934,00	22.216.816.587,00	(8.293.390.347,00)	72,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.150.462.134,00	1.910.313.989,00	(240.148.145,00)	88,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.462.134,00	1.910.313.989,00	(240.148.145,00)	88,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.462.134,00	1.910.313.989,00	(240.148.145,00)	88,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	28.359.744.800,00	20.306.502.598,00	(8.053.242.202,00)	71,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.359.744.800,00	20.306.502.598,00	(8.053.242.202,00)	71,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.359.744.800,00	20.306.502.598,00	(8.053.242.202,00)	71,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.181.740.000,00	922.547.894,00	(259.192.106,00)	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	733.810.000,00	493.054.083,00	(240.755.917,00)	67,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	733.810.000,00	493.054.083,00	(240.755.917,00)	67,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.810.000,00	493.054.083,00	(240.755.917,00)	67,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	378.578.000,00	377.511.000,00	(1.067.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	378.578.000,00	377.511.000,00	(1.067.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.578.000,00	377.511.000,00	(1.067.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	69.352.000,00	51.982.811,00	(17.369.189,00)	74,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	69.352.000,00	51.982.811,00	(17.369.189,00)	74,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.352.000,00	51.982.811,00	(17.369.189,00)	74,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	265.303.354.033,60	236.646.104.970,38	(28.657.249.063,22)	89,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	265.303.354.033,60	236.646.104.970,38	(28.657.249.063,22)	89,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	247.133.443.625,60	226.745.316.997,38	(20.388.126.628,22)	91,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	(4.950.891.742,22)	95,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	(15.437.234.886,00)	88,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	18.169.910.408,00	9.900.787.973,00	(8.269.122.435,00)	54,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	(2.792.914.645,00)	74,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	(5.476.207.790,00)	23,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	151.499.254.397,00	134.152.595.148,00	(17.346.659.249,00)	88,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.177.098.534,00	51.886.905.128,00	(2.290.193.406,00)	95,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	17.000.000.000,00	15.803.621.212,00	(1.196.378.788,00)	92,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.572.000,00	24.060.342,00	(511.658,00)	97,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.572.000,00	24.060.342,00	(511.658,00)	97,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	16.975.428.000,00	15.779.560.870,00	(1.195.867.130,00)	92,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.975.428.000,00	15.779.560.870,00	(1.195.867.130,00)	92,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.794.415.000,00	1.717.146.950,00	(77.268.050,00)	95,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.792.375.000,00	1.717.146.950,00	(75.228.050,00)	95,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.098.900.000,00	1.049.998.950,00	(48.901.050,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	693.475.000,00	667.148.000,00	(26.327.000,00)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	3.826.449.800,00	3.576.722.500,00	(249.727.300,00)	93,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.025.000,00	2.720.000,00	(1.305.000,00)	67,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	2.720.000,00	(1.305.000,00)	67,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	3.822.424.800,00	3.574.002.500,00	(248.422.300,00)	93,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.822.424.800,00	3.574.002.500,00	(248.422.300,00)	93,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.898.845.000,00	1.843.984.500,00	(54.860.500,00)	97,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.915.000,00	4.760.000,00	(1.155.000,00)	80,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.915.000,00	4.760.000,00	(1.155.000,00)	80,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.892.930.000,00	1.839.224.500,00	(53.705.500,00)	97,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.892.930.000,00	1.839.224.500,00	(53.705.500,00)	97,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	898.665.000,00	877.410.450,00	(21.254.550,00)	97,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.055.000,00	3.620.000,00	(435.000,00)	89,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	3.620.000,00	(435.000,00)	89,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	894.610.000,00	873.790.450,00	(20.819.550,00)	97,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	894.610.000,00	873.790.450,00	(20.819.550,00)	97,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	8.709.094.084,00	8.644.756.483,00	(64.337.601,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	8.709.094.084,00	8.644.756.483,00	(64.337.601,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.709.094.084,00	8.644.756.483,00	(64.337.601,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	161.877.700,00	30.535.942,00	(131.341.758,00)	18,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	161.877.700,00	30.535.942,00	(131.341.758,00)	18,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.877.700,00	30.535.942,00	(131.341.758,00)	18,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	5.221.743.650,00	4.780.440.376,00	(441.303.274,00)	91,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	5.221.743.650,00	4.780.440.376,00	(441.303.274,00)	91,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.221.743.650,00	4.780.440.376,00	(441.303.274,00)	91,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	14.530.318.300,00	14.476.649.565,00	(53.668.735,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	14.525.149.500,00	14.476.649.565,00	(48.499.935,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.525.149.500,00	14.476.649.565,00	(48.499.935,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	5.168.800,00	0,00	(5.168.800,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.168.800,00	0,00	(5.168.800,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	135.690.000,00	135.637.150,00	(52.850,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	135.690.000,00	135.637.150,00	(52.850,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.690.000,00	135.637.150,00	(52.850,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.977.991.863,00	82.002.564.982,00	(14.975.426.881,00)	84,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	1.771.974.276,00	1.123.807.454,00	(648.166.822,00)	63,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.771.974.276,00	1.123.807.454,00	(648.166.822,00)	63,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.771.974.276,00	1.123.807.454,00	(648.166.822,00)	63,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	241.341.000,00	169.097.929,00	(72.243.071,00)	70,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	241.341.000,00	169.097.929,00	(72.243.071,00)	70,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.341.000,00	169.097.929,00	(72.243.071,00)	70,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	587.211.600,00	388.837.000,00	(198.374.600,00)	66,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	587.211.600,00	388.837.000,00	(198.374.600,00)	66,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.211.600,00	388.837.000,00	(198.374.600,00)	66,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	113.319.000,00	91.454.833,00	(21.864.167,00)	80,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	113.319.000,00	91.454.833,00	(21.864.167,00)	80,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.319.000,00	91.454.833,00	(21.864.167,00)	80,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	1.386.720.339,00	730.357.116,00	(656.363.223,00)	52,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.386.720.339,00	730.357.116,00	(656.363.223,00)	52,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.720.339,00	730.357.116,00	(656.363.223,00)	52,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	32.965.000,00	28.037.371,00	(4.927.629,00)	85,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.965.000,00	28.037.371,00	(4.927.629,00)	85,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.965.000,00	28.037.371,00	(4.927.629,00)	85,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	111.760.000,00	32.080.527,00	(79.679.473,00)	28,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	111.760.000,00	32.080.527,00	(79.679.473,00)	28,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.760.000,00	32.080.527,00	(79.679.473,00)	28,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	33.016.000,00	31.785.818,00	(1.230.182,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.016.000,00	31.785.818,00	(1.230.182,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.016.000,00	31.785.818,00	(1.230.182,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	14.130.000,00	13.680.309,00	(449.691,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.130.000,00	13.680.309,00	(449.691,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	13.680.309,00	(449.691,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	492.086.000,00	245.712.660,00	(246.373.340,00)	49,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	492.086.000,00	245.712.660,00	(246.373.340,00)	49,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.086.000,00	245.712.660,00	(246.373.340,00)	49,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	537.540.000,00	301.366.350,00	(236.173.650,00)	56,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	537.540.000,00	301.366.350,00	(236.173.650,00)	56,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.540.000,00	301.366.350,00	(236.173.650,00)	56,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	35.430.000,00	27.405.168,00	(8.024.832,00)	77,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	35.430.000,00	27.405.168,00	(8.024.832,00)	77,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.430.000,00	27.405.168,00	(8.024.832,00)	77,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	71.922.000,00	27.701.234,00	(44.220.766,00)	38,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	71.922.000,00	27.701.234,00	(44.220.766,00)	38,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.922.000,00	27.701.234,00	(44.220.766,00)	38,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	4.207.126.974,00	2.072.550.405,00	(2.134.576.569,00)	49,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.207.126.974,00	2.072.550.405,00	(2.134.576.569,00)	49,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.207.126.974,00	2.072.550.405,00	(2.134.576.569,00)	49,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	343.931.573,00	160.956.054,00	(182.975.519,00)	46,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	343.931.573,00	160.956.054,00	(182.975.519,00)	46,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.931.573,00	160.956.054,00	(182.975.519,00)	46,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	538.408.843,00	305.725.584,00	(232.683.259,00)	56,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	538.408.843,00	305.725.584,00	(232.683.259,00)	56,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.408.843,00	305.725.584,00	(232.683.259,00)	56,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	560.871.322,00	547.598.670,00	(13.272.652,00)	97,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	560.871.322,00	547.598.670,00	(13.272.652,00)	97,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.871.322,00	547.598.670,00	(13.272.652,00)	97,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0019		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	13.704.800,00	11.858.268,00	(1.846.532,00)	86,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	13.704.800,00	11.858.268,00	(1.846.532,00)	86,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.704.800,00	11.858.268,00	(1.846.532,00)	86,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	640.099.640,00	223.535.075,00	(416.564.565,00)	34,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	640.099.640,00	223.535.075,00	(416.564.565,00)	34,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.099.640,00	223.535.075,00	(416.564.565,00)	34,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	192.808.727,00	93.300.000,00	(99.508.727,00)	48,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	192.808.727,00	93.300.000,00	(99.508.727,00)	48,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.808.727,00	93.300.000,00	(99.508.727,00)	48,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	2.370.508.757,00	1.243.434.835,00	(1.127.073.922,00)	52,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	2.370.508.757,00	1.243.434.835,00	(1.127.073.922,00)	52,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.370.508.757,00	1.243.434.835,00	(1.127.073.922,00)	52,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	(4.504.959.358,00)	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	(4.504.959.358,00)	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	(4.504.959.358,00)	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	436.284.500,00	147.150.000,00	(289.134.500,00)	33,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	436.284.500,00	147.150.000,00	(289.134.500,00)	33,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.284.500,00	147.150.000,00	(289.134.500,00)	33,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	41.927.900,00	37.851.596,00	(4.076.304,00)	90,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	41.927.900,00	37.851.596,00	(4.076.304,00)	90,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.927.900,00	37.851.596,00	(4.076.304,00)	90,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	16.919.870.968,00	15.920.196.129,00	(999.674.839,00)	94,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	10.359.146.936,00	9.684.735.804,00	(674.411.132,00)	93,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.359.146.936,00	9.684.735.804,00	(674.411.132,00)	93,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	6.560.724.032,00	6.235.460.325,00	(325.263.707,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.966.055.722,00	3.664.354.500,00	(301.701.222,00)	92,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.594.668.310,00	2.571.105.825,00	(23.562.485,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.667.537.385,00	2.340.319.284,00	(1.327.218.101,00)	63,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.667.537.385,00	2.340.319.284,00	(1.327.218.101,00)	63,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.667.537.385,00	2.340.319.284,00	(1.327.218.101,00)	63,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	3.232.652.283,00	2.644.675.708,00	(587.976.575,00)	81,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	2.406.692.426,00	1.838.333.271,00	(568.359.155,00)	76,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.692.426,00	450.830.253,00	(455.862.173,00)	49,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.387.503.018,00	(112.496.982,00)	92,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2	BELANJA MODAL	825.959.857,00	806.342.437,00	(19.617.420,00)	97,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	825.959.857,00	806.342.437,00	(19.617.420,00)	97,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037		PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH	24.875.000,00	11.839.720,00	(13.035.280,00)	47,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	24.875.000,00	11.839.720,00	(13.035.280,00)	47,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.875.000,00	11.839.720,00	(13.035.280,00)	47,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	39.800.000,00	28.991.350,00	(10.808.650,00)	72,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	39.800.000,00	28.991.350,00	(10.808.650,00)	72,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.800.000,00	28.991.350,00	(10.808.650,00)	72,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	21.120.000,00	20.955.924,00	(164.076,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	21.120.000,00	20.955.924,00	(164.076,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	20.955.924,00	(164.076,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	90.937.535,00	43.754.900,00	(47.182.635,00)	48,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	90.937.535,00	43.754.900,00	(47.182.635,00)	48,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.937.535,00	43.754.900,00	(47.182.635,00)	48,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0043		PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK	13.270.000,00	13.007.697,00	(262.303,00)	98,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	13.270.000,00	13.007.697,00	(262.303,00)	98,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.270.000,00	13.007.697,00	(262.303,00)	98,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	217.921.319,00	145.334.000,00	(72.587.319,00)	66,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	217.921.319,00	145.334.000,00	(72.587.319,00)	66,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.921.319,00	145.334.000,00	(72.587.319,00)	66,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	246.405.922,00	135.692.172,00	(110.713.750,00)	55,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	246.405.922,00	135.692.172,00	(110.713.750,00)	55,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.405.922,00	135.692.172,00	(110.713.750,00)	55,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	169.800.000,00	100.650.000,00	(69.150.000,00)	59,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	169.800.000,00	100.650.000,00	(69.150.000,00)	59,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.800.000,00	100.650.000,00	(69.150.000,00)	59,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	1.312.290.000,00	800.400.000,00	(511.890.000,00)	60,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	1.312.290.000,00	800.400.000,00	(511.890.000,00)	60,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.290.000,00	800.400.000,00	(511.890.000,00)	60,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	132.970.000,00	126.693.460,00	(6.276.540,00)	95,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	132.970.000,00	126.693.460,00	(6.276.540,00)	95,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.970.000,00	126.693.460,00	(6.276.540,00)	95,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.970.000,00	126.693.460,00	(6.276.540,00)	95,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	211.194.000,00	136.431.578,00	(74.762.422,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	211.194.000,00	136.431.578,00	(74.762.422,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	211.194.000,00	136.431.578,00	(74.762.422,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.194.000,00	136.431.578,00	(74.762.422,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.266.478.000,00	866.105.571,00	(400.372.429,00)	68,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	19.980.000,00	19.577.358,00	(402.642,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	19.980.000,00	19.577.358,00	(402.642,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.980.000,00	19.577.358,00	(402.642,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	19.577.358,00	(402.642,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	252.755.000,00	101.592.980,00	(151.162.020,00)	40,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	252.755.000,00	101.592.980,00	(151.162.020,00)	40,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	252.755.000,00	101.592.980,00	(151.162.020,00)	40,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.755.000,00	101.592.980,00	(151.162.020,00)	40,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	993.743.000,00	744.935.233,00	(248.807.767,00)	74,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	993.743.000,00	744.935.233,00	(248.807.767,00)	74,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	993.743.000,00	744.935.233,00	(248.807.767,00)	74,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993.743.000,00	744.935.233,00	(248.807.767,00)	74,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	388.992.996,00	256.751.041,00	(132.241.955,00)	66,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	104.930.800,00	73.806.760,00	(31.124.040,00)	70,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	104.930.800,00	73.806.760,00	(31.124.040,00)	70,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.930.800,00	73.806.760,00	(31.124.040,00)	70,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.930.800,00	73.806.760,00	(31.124.040,00)	70,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.02		PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA	36.296.000,00	35.280.716,00	(1.015.284,00)	97,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.02.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PKRT KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA	36.296.000,00	35.280.716,00	(1.015.284,00)	97,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.296.000,00	35.280.716,00	(1.015.284,00)	97,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.296.000,00	35.280.716,00	(1.015.284,00)	97,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	195.241.200,00	103.072.162,00	(92.169.038,00)	52,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	195.241.200,00	103.072.162,00	(92.169.038,00)	52,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	195.241.200,00	103.072.162,00	(92.169.038,00)	52,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.241.200,00	103.072.162,00	(92.169.038,00)	52,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.04		PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	52.524.996,00	44.591.403,00	(7.933.593,00)	84,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	52.524.996,00	44.591.403,00	(7.933.593,00)	84,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.524.996,00	44.591.403,00	(7.933.593,00)	84,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.524.996,00	44.591.403,00	(7.933.593,00)	84,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	370.561.128,00	281.812.721,00	(88.748.407,00)	76,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.240.000,00	39.113.547,00	(126.453,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	39.240.000,00	39.113.547,00	(126.453,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.240.000,00	39.113.547,00	(126.453,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.240.000,00	39.113.547,00	(126.453,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.539.000,00	41.505.155,00	(33.845,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	41.539.000,00	41.505.155,00	(33.845,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.539.000,00	41.505.155,00	(33.845,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.539.000,00	41.505.155,00	(33.845,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	289.782.128,00	201.194.019,00	(88.588.109,00)	69,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	289.782.128,00	201.194.019,00	(88.588.109,00)	69,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	289.782.128,00	201.194.019,00	(88.588.109,00)	69,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.782.128,00	201.194.019,00	(88.588.109,00)	69,42	
				JUMLAH BELANJA	719.889.042.809,60	654.292.089.617,38	(65.596.953.192,22)	90,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(475.608.919.285,60)	(411.765.087.787,32)	63.843.831.498,28	86,57	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00	

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02.0.00.0.00.02.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00	
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00	
			PEMBIAYAAN NETTO	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00	
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(454.583.687.977,60)	(390.741.856.478,55)	63.843.831.499,05	85,95	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Peda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.15.0.00.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
	1.03.2.15.0.00.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
	1.03.2.15.0.00.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
				JUMLAH PENDAPATAN	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	573.184.547.383,60	483.752.323.274,79	(89.432.224.108,81)	84,39	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.559.402.997,89	31.144.942.031,00	(7.414.460.966,89)	80,77	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	85.360.479,80	46.985.908,00	(38.374.571,80)	55,04	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	47.648.480,00	37.638.208,00	(10.010.272,00)	78,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.648.480,00	37.638.208,00	(10.010.272,00)	78,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.648.480,00	37.638.208,00	(10.010.272,00)	78,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.999.999,80	9.347.700,00	(652.299,80)	93,47	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.999,80	9.347.700,00	(652.299,80)	93,47	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.999,80	9.347.700,00	(652.299,80)	93,47	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	27.712.000,00	0,00	(27.712.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.712.000,00	0,00	(27.712.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.712.000,00	0,00	(27.712.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	(893.252.080,60)	94,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	(893.252.080,60)	94,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	(893.252.080,60)	94,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	(893.252.080,60)	94,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	98.614.614,00	89.646.860,00	(8.967.754,00)	90,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	98.614.614,00	89.646.860,00	(8.967.754,00)	90,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.614.614,00	89.646.860,00	(8.967.754,00)	90,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.614.614,00	89.646.860,00	(8.967.754,00)	90,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	175.484.000,00	106.690.000,00	(68.794.000,00)	60,79	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	75.484.000,00	74.690.000,00	(794.000,00)	98,94	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.484.000,00	74.690.000,00	(794.000,00)	98,94	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.484.000,00	74.690.000,00	(794.000,00)	98,94	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	100.000.000,00	32.000.000,00	(68.000.000,00)	32,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	32.000.000,00	(68.000.000,00)	32,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	32.000.000,00	(68.000.000,00)	32,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.876.026.569,49	1.815.730.956,00	(60.295.613,49)	96,78	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	29.938.000,00	(62.000,00)	99,79	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.938.000,00	(62.000,00)	99,79	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.938.000,00	(62.000,00)	99,79	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.397.213.468,00	1.392.819.200,00	(4.394.268,00)	99,68	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.397.213.468,00	1.392.819.200,00	(4.394.268,00)	99,68	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.397.213.468,00	1.392.819.200,00	(4.394.268,00)	99,68	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.000.000,00	59.653.600,00	(346.400,00)	99,42	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.653.600,00	(346.400,00)	99,42	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.653.600,00	(346.400,00)	99,42	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.075.101,49	94.980.000,00	(5.095.101,49)	94,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.075.101,49	94.980.000,00	(5.095.101,49)	94,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.075.101,49	94.980.000,00	(5.095.101,49)	94,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.000.000,00	54.837.000,00	(163.000,00)	99,70	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.837.000,00	(163.000,00)	99,70	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.837.000,00	(163.000,00)	99,70	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	38.738.000,00	38.238.000,00	(500.000,00)	98,70	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.738.000,00	38.238.000,00	(500.000,00)	98,70	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.738.000,00	38.238.000,00	(500.000,00)	98,70	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000,00	14.749.000,00	(10.251.000,00)	58,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	14.749.000,00	(10.251.000,00)	58,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	14.749.000,00	(10.251.000,00)	58,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	170.000.000,00	130.516.156,00	(39.483.844,00)	76,77	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	130.516.156,00	(39.483.844,00)	76,77	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	130.516.156,00	(39.483.844,00)	76,77	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	308.397.865,00	307.252.030,00	(1.145.835,00)	99,62	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	308.397.865,00	307.252.030,00	(1.145.835,00)	99,62	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.494.665,00	1.400.000,00	(94.665,00)	93,66	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.494.665,00	1.400.000,00	(94.665,00)	93,66	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	306.903.200,00	305.852.030,00	(1.051.170,00)	99,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.903.200,00	305.852.030,00	(1.051.170,00)	99,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.799.557.346,00	11.595.333.585,00	(6.204.223.761,00)	65,14	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.438.487.346,00	8.951.278.385,00	(5.487.208.961,00)	61,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.438.487.346,00	8.951.278.385,00	(5.487.208.961,00)	61,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.438.487.346,00	8.951.278.385,00	(5.487.208.961,00)	61,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.361.070.000,00	2.644.055.200,00	(717.014.800,00)	78,66	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.361.070.000,00	2.644.055.200,00	(717.014.800,00)	78,66	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.361.070.000,00	2.644.055.200,00	(717.014.800,00)	78,66	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.894.338.620,00	1.754.931.269,00	(139.407.351,00)	92,64	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	646.970.000,00	517.465.369,00	(129.504.631,00)	79,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	646.970.000,00	517.465.369,00	(129.504.631,00)	79,98	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.970.000,00	517.465.369,00	(129.504.631,00)	79,98	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	213.235.000,00	213.235.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	213.235.000,00	213.235.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.235.000,00	213.235.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	925.261.500,00	919.380.900,00	(5.880.600,00)	99,36	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	925.261.500,00	919.380.900,00	(5.880.600,00)	99,36	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.261.500,00	919.380.900,00	(5.880.600,00)	99,36	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	108.872.120,00	104.850.000,00	(4.022.120,00)	96,30	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	108.872.120,00	104.850.000,00	(4.022.120,00)	96,30	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.872.120,00	104.850.000,00	(4.022.120,00)	96,30	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	33.654.797.475,00	30.161.582.786,00	(3.493.214.689,00)	89,62	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.797.227.125,00	29.358.998.136,00	(3.438.228.989,00)	89,51	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0026		REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR	1.627.753.200,00	1.603.108.700,00	(24.644.500,00)	98,48	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.627.753.200,00	1.603.108.700,00	(24.644.500,00)	98,48	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.627.753.200,00	1.603.108.700,00	(24.644.500,00)	98,48	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0072		EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK) PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	22.500.000,00	3.493.500,00	(19.006.500,00)	15,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0072	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	3.493.500,00	(19.006.500,00)	15,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0072	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	3.493.500,00	(19.006.500,00)	15,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0073		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI	289.090.600,00	274.106.300,00	(14.984.300,00)	94,81	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0073	5.1	BELANJA OPERASI	289.090.600,00	274.106.300,00	(14.984.300,00)	94,81	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0073	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.090.600,00	274.106.300,00	(14.984.300,00)	94,81	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0075		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	225.397.475,00	176.241.729,00	(49.155.746,00)	78,19	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0075	5.1	BELANJA OPERASI	225.397.475,00	176.241.729,00	(49.155.746,00)	78,19	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0075	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.397.475,00	176.241.729,00	(49.155.746,00)	78,19	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0077		PENGELOLAAN HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	2.836.500,00	(4.663.500,00)	37,82	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0077	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	2.836.500,00	(4.663.500,00)	37,82	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0077	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	2.836.500,00	(4.663.500,00)	37,82	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0078		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	282.802.200,00	279.510.507,00	(3.291.693,00)	98,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0078	5.1	BELANJA OPERASI	282.802.200,00	279.510.507,00	(3.291.693,00)	98,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0078	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.802.200,00	279.510.507,00	(3.291.693,00)	98,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0079		OPERASI DAN PEMELIHARAAN DANAU	346.679.400,00	333.064.000,00	(13.615.400,00)	96,07	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0079	5.1	BELANJA OPERASI	346.679.400,00	333.064.000,00	(13.615.400,00)	96,07	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0079	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.679.400,00	333.064.000,00	(13.615.400,00)	96,07	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0082		OPERASI DAN PEMELIHARAAN POLDER/KOLAM RETENSI	96.363.600,00	91.189.700,00	(5.173.900,00)	94,63	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0082	5.1	BELANJA OPERASI	96.363.600,00	91.189.700,00	(5.173.900,00)	94,63	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0082	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.363.600,00	91.189.700,00	(5.173.900,00)	94,63	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	22.590.137.350,00	19.857.554.950,00	(2.732.582.400,00)	87,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	22.590.137.350,00	19.857.554.950,00	(2.732.582.400,00)	87,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.590.137.350,00	19.857.554.950,00	(2.732.582.400,00)	87,90	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0109		PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	2.095.120.500,00	1.933.304.750,00	(161.815.750,00)	92,27	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1	BELANJA OPERASI	2.095.120.500,00	1.933.304.750,00	(161.815.750,00)	92,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.120.500,00	1.933.304.750,00	(161.815.750,00)	92,27	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0110		REHABILITASI BANGUNAN PERKUATAN TEBING	3.697.500,00	0,00	(3.697.500,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0110	5.1	BELANJA OPERASI	3.697.500,00	0,00	(3.697.500,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0110	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.697.500,00	0,00	(3.697.500,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0114		REHABILITASI EMBUNG DAN PENAMPUNGAN AIR LAINNYA	1.286.057.500,00	993.917.350,00	(292.140.150,00)	77,28	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0114	5.1	BELANJA OPERASI	13.942.500,00	8.946.650,00	(4.995.850,00)	64,16	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0114	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.942.500,00	8.946.650,00	(4.995.850,00)	64,16	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0114	5.2	BELANJA MODAL	1.272.115.000,00	984.970.700,00	(287.144.300,00)	77,42	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0114	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.272.115.000,00	984.970.700,00	(287.144.300,00)	77,42	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0120		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI	922.603.900,00	895.806.500,00	(26.797.400,00)	97,09	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0120	5.1	BELANJA OPERASI	922.603.900,00	895.806.500,00	(26.797.400,00)	97,09	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0120	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	922.603.900,00	895.806.500,00	(26.797.400,00)	97,09	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0121		PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	993.954.650,00	950.529.050,00	(43.425.600,00)	95,63	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0121	5.1	BELANJA OPERASI	42.867.600,00	1.035.000,00	(41.832.600,00)	2,41	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0121	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.867.600,00	1.035.000,00	(41.832.600,00)	2,41	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0121	5.2	BELANJA MODAL	951.087.050,00	949.494.050,00	(1.593.000,00)	99,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0121	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	951.087.050,00	949.494.050,00	(1.593.000,00)	99,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0125		PEMBANGUNAN PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR	1.044.072.500,00	1.023.914.850,00	(20.157.650,00)	98,06	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0125	5.1	BELANJA OPERASI	1.044.072.500,00	1.023.914.850,00	(20.157.650,00)	98,06	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0125	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.044.072.500,00	1.023.914.850,00	(20.157.650,00)	98,06	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0127		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI AIR TANAH DAN AIR BAKU	347.501.000,00	327.783.000,00	(19.718.000,00)	94,32	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0127	5.1	BELANJA OPERASI	347.501.000,00	327.783.000,00	(19.718.000,00)	94,32	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0127	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.501.000,00	327.783.000,00	(19.718.000,00)	94,32	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0128		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	615.995.750,00	612.636.750,00	(3.359.000,00)	99,45	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1	BELANJA OPERASI	615.995.750,00	612.636.750,00	(3.359.000,00)	99,45	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.995.750,00	612.636.750,00	(3.359.000,00)	99,45	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	857.570.350,00	802.584.650,00	(54.985.700,00)	93,58	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0023		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA	433.636.000,00	393.067.300,00	(40.568.700,00)	90,64	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	433.636.000,00	393.067.300,00	(40.568.700,00)	90,64	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.636.000,00	393.067.300,00	(40.568.700,00)	90,64	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0035		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	423.934.350,00	409.517.350,00	(14.417.000,00)	96,59	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	423.934.350,00	409.517.350,00	(14.417.000,00)	96,59	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.934.350,00	409.517.350,00	(14.417.000,00)	96,59	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	494.492.839.260,71	416.952.389.981,79	(77.540.449.278,92)	84,31	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	494.492.839.260,71	416.952.389.981,79	(77.540.449.278,92)	84,31	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0028		PENGELOLAAN LEGER JALAN	3.063.153.307,42	2.791.402.333,00	(271.750.974,42)	91,12	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	3.063.153.307,42	2.791.402.333,00	(271.750.974,42)	91,12	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.063.153.307,42	2.791.402.333,00	(271.750.974,42)	91,12	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	6.726.663.110,00	6.251.813.310,00	(474.849.800,00)	92,94	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	6.426.663.110,00	6.054.955.036,00	(371.708.074,00)	94,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.426.663.110,00	6.054.955.036,00	(371.708.074,00)	94,21	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	196.858.274,00	(103.141.726,00)	65,61	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	196.858.274,00	(103.141.726,00)	65,61	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0030		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA	624.804.700,00	468.285.700,00	(156.519.000,00)	74,94	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	223.097.500,00	67.081.000,00	(156.016.500,00)	30,06	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.097.500,00	67.081.000,00	(156.016.500,00)	30,06	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0030	5.2	BELANJA MODAL	401.707.200,00	401.204.700,00	(502.500,00)	99,87	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401.707.200,00	401.204.700,00	(502.500,00)	99,87	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	405.301.418.924,00	352.118.082.469,80	(53.183.336.454,20)	86,87	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	1.847.693.090,00	441.986.100,00	(1.405.706.990,00)	23,92	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.847.693.090,00	441.986.100,00	(1.405.706.990,00)	23,92	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	403.453.725.834,00	351.676.096.369,80	(51.777.629.464,20)	87,16	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.01	Belanja Modal Tanah	890.132.000,00	90.132.000,00	(800.000.000,00)	10,12	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	402.563.593.834,00	351.585.964.369,80	(50.977.629.464,20)	87,33	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	3.436.903.880,00	1.411.691.257,00	(2.025.212.623,00)	41,07	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	3.436.903.880,00	1.411.691.257,00	(2.025.212.623,00)	41,07	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.436.903.880,00	1.411.691.257,00	(2.025.212.623,00)	41,07	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0039		REHABILITASI JEMBATAN	2.217.230.000,00	1.836.639.934,00	(380.590.066,00)	82,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	2.217.230.000,00	1.836.639.934,00	(380.590.066,00)	82,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.217.230.000,00	1.836.639.934,00	(380.590.066,00)	82,83	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	34.943.373.131,29	23.459.118.800,00	(11.484.254.331,29)	67,13	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	278.214.500,40	47.400.600,00	(230.813.900,40)	17,03	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.214.500,40	47.400.600,00	(230.813.900,40)	17,03	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	34.665.158.630,89	23.411.718.200,00	(11.253.440.430,89)	67,53	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.665.158.630,89	23.411.718.200,00	(11.253.440.430,89)	67,53	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	1.718.864.000,00	1.449.635.344,00	(269.228.656,00)	84,33	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	1.718.864.000,00	1.449.635.344,00	(269.228.656,00)	84,33	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.718.864.000,00	1.449.635.344,00	(269.228.656,00)	84,33	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	5.101.816.526,00	4.778.160.071,00	(323.656.455,00)	93,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1	BELANJA OPERASI	5.101.816.526,00	4.778.160.071,00	(323.656.455,00)	93,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.101.816.526,00	4.778.160.071,00	(323.656.455,00)	93,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	31.358.611.682,00	22.387.560.762,99	(8.971.050.919,01)	71,39	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	31.358.611.682,00	22.387.560.762,99	(8.971.050.919,01)	71,39	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.358.611.682,00	22.387.560.762,99	(8.971.050.919,01)	71,39	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	550.000.000,00	1.520.000,00	(548.480.000,00)	0,27	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.01.0016		PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	1.520.000,00	(48.480.000,00)	3,04	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0013		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0014		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA SIPJAKI	25.000.000,00	1.520.000,00	(23.480.000,00)	6,08	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	1.520.000,00	(23.480.000,00)	6,08	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	1.520.000,00	(23.480.000,00)	6,08	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0015		OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04		PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0004		PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0006		PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.927.507.650,00	5.491.888.476,00	(435.619.174,00)	92,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	39.440.000,00	25.260.000,00	(14.180.000,00)	64,04	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0013		SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG	39.440.000,00	25.260.000,00	(14.180.000,00)	64,04	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	39.440.000,00	25.260.000,00	(14.180.000,00)	64,04	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.440.000,00	25.260.000,00	(14.180.000,00)	64,04	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.335.167.650,00	3.152.436.250,00	(182.731.400,00)	94,52	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0005		PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA	3.250.167.650,00	3.152.436.250,00	(97.731.400,00)	96,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.250.167.650,00	3.152.436.250,00	(97.731.400,00)	96,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.167.650,00	3.152.436.250,00	(97.731.400,00)	96,99	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0006		PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	971.728.000,00	868.902.100,00	(102.825.900,00)	89,41	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0004		PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	171.327.000,00	86.018.450,00	(85.308.550,00)	50,20	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	171.327.000,00	86.018.450,00	(85.308.550,00)	50,20	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.327.000,00	86.018.450,00	(85.308.550,00)	50,20	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0007		SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	800.401.000,00	782.883.650,00	(17.517.350,00)	97,81	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	800.401.000,00	782.883.650,00	(17.517.350,00)	97,81	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.401.000,00	782.883.650,00	(17.517.350,00)	97,81	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.581.172.000,00	1.445.290.126,00	(135.881.874,00)	91,40	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	1.062.577.000,00	1.014.694.426,00	(47.882.574,00)	95,49	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.577.000,00	1.014.694.426,00	(47.882.574,00)	95,49	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.577.000,00	1.014.694.426,00	(47.882.574,00)	95,49	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0005		OPERASIONALISASI TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTUR PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG	27.491.000,00	11.726.000,00	(15.765.000,00)	42,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.491.000,00	11.726.000,00	(15.765.000,00)	42,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.491.000,00	11.726.000,00	(15.765.000,00)	42,65	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0009		OPERASIONALISASI TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG	38.876.000,00	12.914.200,00	(25.961.800,00)	33,21	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.876.000,00	12.914.200,00	(25.961.800,00)	33,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.876.000,00	12.914.200,00	(25.961.800,00)	33,21	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0012		PENILAIAN PERWUJUDAN RTR	363.156.000,00	346.253.500,00	(16.902.500,00)	95,34	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0012	5.1	BELANJA OPERASI	363.156.000,00	346.253.500,00	(16.902.500,00)	95,34	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.156.000,00	346.253.500,00	(16.902.500,00)	95,34	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0014		PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN BIDANG PENATAAN RUANG	89.072.000,00	59.702.000,00	(29.370.000,00)	67,02	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	89.072.000,00	59.702.000,00	(29.370.000,00)	67,02	
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.072.000,00	59.702.000,00	(29.370.000,00)	67,02	
				JUMLAH BELANJA	573.184.547.383,60	483.752.323.274,79	(89.432.224.108,81)	84,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(572.969.547.383,60)	(483.320.747.994,79)	89.648.799.388,81	84,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(572.969.547.383,60)	(483.320.747.994,79)	89.648.799.388,81	84,35	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.15.0.00.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
	1.03.2.15.0.00.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
	1.03.2.15.0.00.04.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
				JUMLAH PENDAPATAN	215.000.000,00	431.575.280,00	216.575.280,00	200,73	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	(2.747.983.124,00)	89,44	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	(2.747.983.124,00)	89,44	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	(2.747.983.124,00)	89,44	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	14.465.337.300,00	14.011.030.164,00	(454.307.136,00)	96,85	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	220.200.800,00	86.559.459,00	(133.641.341,00)	39,30	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.200.800,00	86.559.459,00	(133.641.341,00)	39,30	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	(320.665.795,00)	97,74	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	(320.665.795,00)	97,74	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	11.562.254.900,00	9.268.578.912,00	(2.293.675.988,00)	80,16	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.562.254.900,00	9.268.578.912,00	(2.293.675.988,00)	80,16	
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.562.254.900,00	9.268.578.912,00	(2.293.675.988,00)	80,16	
				JUMLAH BELANJA	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	(2.747.983.124,00)	89,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(25.812.592.200,00)	(22.848.033.796,00)	2.964.558.404,00	88,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.812.592.200,00)	(22.848.033.796,00)	2.964.558.404,00	88,51	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000		5	BELANJA DAERAH	126.681.793.622,00	121.548.493.097,00	(5.133.300.525,00)	95,94	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.695.649.215,00	16.040.191.647,00	(2.655.457.568,00)	85,79	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	96.373.250,00	30.250.000,00	(66.123.250,00)	31,38	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.350.000,00	20.280.000,00	(16.070.000,00)	55,79	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.350.000,00	20.280.000,00	(16.070.000,00)	55,79	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.350.000,00	20.280.000,00	(16.070.000,00)	55,79	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	50.023.250,00	0,00	(50.023.250,00)	0,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.023.250,00	0,00	(50.023.250,00)	0,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.023.250,00	0,00	(50.023.250,00)	0,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	(1.487.766.945,00)	84,55	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	(1.487.766.945,00)	84,55	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	(1.487.766.945,00)	84,55	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	(1.487.766.945,00)	84,55	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	92.295.000,00	86.013.155,00	(6.281.845,00)	93,19	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	92.295.000,00	86.013.155,00	(6.281.845,00)	93,19	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.295.000,00	86.013.155,00	(6.281.845,00)	93,19	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.295.000,00	86.013.155,00	(6.281.845,00)	93,19	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	150.000.000,00	134.843.000,00	(15.157.000,00)	89,89	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	150.000.000,00	134.843.000,00	(15.157.000,00)	89,89	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	134.843.000,00	(15.157.000,00)	89,89	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	134.843.000,00	(15.157.000,00)	89,89	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.340.436.900,00	1.107.168.419,00	(233.268.481,00)	82,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	29.996.962,00	(3.038,00)	99,98	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.996.962,00	(3.038,00)	99,98	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.996.962,00	(3.038,00)	99,98	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	280.000.000,00	272.533.305,00	(7.466.695,00)	97,33	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	280.000.000,00	272.533.305,00	(7.466.695,00)	97,33	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.000.000,00	272.533.305,00	(7.466.695,00)	97,33	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.000.000,00	49.997.864,00	(10.002.136,00)	83,32	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	49.997.864,00	(10.002.136,00)	83,32	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	49.997.864,00	(10.002.136,00)	83,32	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	300.000.000,00	285.166.750,00	(14.833.250,00)	95,05	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	285.166.750,00	(14.833.250,00)	95,05	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	285.166.750,00	(14.833.250,00)	95,05	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	160.000.000,00	159.474.957,00	(525.043,00)	99,67	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	159.474.957,00	(525.043,00)	99,67	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	159.474.957,00	(525.043,00)	99,67	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.000.000,00	1.695.000,00	(3.305.000,00)	33,90	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.695.000,00	(3.305.000,00)	33,90	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.695.000,00	(3.305.000,00)	33,90	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	465.436.900,00	268.303.581,00	(197.133.319,00)	57,64	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	465.436.900,00	268.303.581,00	(197.133.319,00)	57,64	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.436.900,00	268.303.581,00	(197.133.319,00)	57,64	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.267.622.800,00	2.256.862.976,00	(10.759.824,00)	99,52	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.448.332.800,00	1.441.850.976,00	(6.481.824,00)	99,55	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.448.332.800,00	1.441.850.976,00	(6.481.824,00)	99,55	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.448.332.800,00	1.441.850.976,00	(6.481.824,00)	99,55	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	819.290.000,00	815.012.000,00	(4.278.000,00)	99,47	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	819.290.000,00	815.012.000,00	(4.278.000,00)	99,47	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.290.000,00	815.012.000,00	(4.278.000,00)	99,47	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.434.836.200,00	1.086.244.502,00	(348.591.698,00)	75,70	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	564.104.600,00	343.858.902,00	(220.245.698,00)	60,95	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	564.104.600,00	343.858.902,00	(220.245.698,00)	60,95	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.104.600,00	343.858.902,00	(220.245.698,00)	60,95	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	870.731.600,00	742.385.600,00	(128.346.000,00)	85,25	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	870.731.600,00	742.385.600,00	(128.346.000,00)	85,25	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.731.600,00	742.385.600,00	(128.346.000,00)	85,25	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.683.595.320,00	3.196.086.795,00	(487.508.525,00)	86,76	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	649.100.200,00	182.315.595,00	(466.784.605,00)	28,08	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	649.100.200,00	182.315.595,00	(466.784.605,00)	28,08	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.100.200,00	182.315.595,00	(466.784.605,00)	28,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.916.894.000,00	2.909.196.200,00	(7.697.800,00)	99,73	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	139.454.000,00	132.092.750,00	(7.361.250,00)	94,72	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.454.000,00	132.092.750,00	(7.361.250,00)	94,72	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.777.440.000,00	2.777.103.450,00	(336.550,00)	99,98	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.777.440.000,00	2.777.103.450,00	(336.550,00)	99,98	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	117.601.120,00	104.575.000,00	(13.026.120,00)	88,92	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	117.601.120,00	104.575.000,00	(13.026.120,00)	88,92	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.601.120,00	104.575.000,00	(13.026.120,00)	88,92	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11.405.988.800,00	10.771.686.050,00	(634.302.750,00)	94,43	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	6.498.866.250,00	6.201.815.250,00	(297.051.000,00)	95,42	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	1.636.866.250,00	1.579.999.250,00	(56.867.000,00)	96,52	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	78.400.000,00	(56.600.000,00)	58,07	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	78.400.000,00	(56.600.000,00)	58,07	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.501.866.250,00	1.501.599.250,00	(267.000,00)	99,98	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.501.866.250,00	1.501.599.250,00	(267.000,00)	99,98	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0009		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	4.862.000.000,00	4.621.816.000,00	(240.184.000,00)	95,05	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	223.500.000,00	(26.500.000,00)	89,40	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	223.500.000,00	(26.500.000,00)	89,40	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	4.612.000.000,00	4.398.316.000,00	(213.684.000,00)	95,36	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.612.000.000,00	4.398.316.000,00	(213.684.000,00)	95,36	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.04		PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	31.949.750,00	15.600.000,00	(16.349.750,00)	48,82	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.04.0004		PENATAUSAHAAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	31.949.750,00	15.600.000,00	(16.349.750,00)	48,82	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.949.750,00	15.600.000,00	(16.349.750,00)	48,82	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.949.750,00	15.600.000,00	(16.349.750,00)	48,82	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	4.875.172.800,00	4.554.270.800,00	(320.902.000,00)	93,41	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05.0003		PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS	4.875.172.800,00	4.554.270.800,00	(320.902.000,00)	93,41	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	74.092.000,00	74.092.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.092.000,00	74.092.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	(320.902.000,00)	93,31	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	(320.902.000,00)	93,31	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	(129.854.000,00)	99,49	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	(129.854.000,00)	99,49	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04.2.01.0001		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	(129.854.000,00)	99,49	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	(129.854.000,00)	99,49	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.904.000,00	505.050.000,00	(119.854.000,00)	80,82	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.310.000.000,00	25.300.000.000,00	(10.000.000,00)	99,96	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	70.645.251.607,00	68.931.565.400,00	(1.713.686.207,00)	97,57	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	70.645.251.607,00	68.931.565.400,00	(1.713.686.207,00)	97,57	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	70.628.476.982,00	68.915.865.400,00	(1.712.611.582,00)	97,57	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.438.191.333,00	3.350.142.000,00	(88.049.333,00)	97,43	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	659.305.000,00	576.016.200,00	(83.288.800,00)	87,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.778.886.333,00	2.774.125.800,00	(4.760.533,00)	99,82	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	(1.624.562.249,00)	97,58	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	(1.624.562.249,00)	97,58	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0010		VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG	16.774.625,00	15.700.000,00	(1.074.625,00)	93,59	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.774.625,00	15.700.000,00	(1.074.625,00)	93,59	
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.774.625,00	15.700.000,00	(1.074.625,00)	93,59	
				JUMLAH BELANJA	126.681.793.622,00	121.548.493.097,00	(5.133.300.525,00)	95,94	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(124.154.793.622,00)	(116.392.936.842,00)	7.761.856.780,00	93,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(124.154.793.622,00)	(116.392.936.842,00)	7.761.856.780,00	93,74	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	(89.787.620,00)	92,26	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	(89.787.620,00)	92,26	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	(89.787.620,00)	92,26	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0001		PENETAPAN DAFTAR MASYARAKAT PENERIMA SANTUNAN TANAH DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	(89.787.620,00)	92,26	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.111.413.750,00	1.065.112.130,00	(46.301.620,00)	95,83	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	100,00	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	100,00	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0001	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	(46.301.620,00)	95,81	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	(46.301.620,00)	95,81	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	6.514.000,00	(43.486.000,00)	13,02	
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	6.514.000,00	(43.486.000,00)	13,02	
				JUMLAH BELANJA	50.000.000,00	6.514.000,00	(43.486.000,00)	13,02	
					1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	(89.787.620,00)	92,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.365.586.250,00	4.083.930.125,00	2.718.343.875,00	299,06	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.365.586.250,00	4.083.930.125,00	2.718.343.875,00	299,06	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
	1.04.1.03.2.10.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	2.628.556.255,00	204,01	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000		5	BELANJA DAERAH	163.283.144.823,00	150.141.954.585,00	(13.141.190.238,00)	91,95	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.206.988.000,00	15.935.638.450,00	(2.271.349.550,00)	87,52	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.206.988.000,00	15.935.638.450,00	(2.271.349.550,00)	87,52	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0022		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	16.009.280.800,00	13.819.614.450,00	(2.189.666.350,00)	86,32	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	16.009.280.800,00	13.819.614.450,00	(2.189.666.350,00)	86,32	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.971.000,00	1.040.128.000,00	(152.843.000,00)	87,18	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0022	5.1.05	Belanja Hibah	14.816.309.800,00	12.779.486.450,00	(2.036.823.350,00)	86,25	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0022	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	2.197.707.200,00	2.116.024.000,00	(81.683.200,00)	96,28	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	470.235.200,00	459.140.000,00	(11.095.200,00)	97,64	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.235.200,00	459.140.000,00	(11.095.200,00)	97,64	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	(70.588.000,00)	95,91	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	(70.588.000,00)	95,91	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.926.238.650,00	19.681.243.564,00	(244.995.086,00)	98,77	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.926.238.650,00	19.681.243.564,00	(244.995.086,00)	98,77	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0021		PENINGKATAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)	2.969.095.550,00	2.969.095.550,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.804.163.600,00	1.804.163.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.383.400,00	201.383.400,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	1.602.780.200,00	1.602.780.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0033		PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA	9.768.000,00	9.750.000,00	(18.000,00)	99,81	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	9.768.000,00	9.750.000,00	(18.000,00)	99,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.768.000,00	9.750.000,00	(18.000,00)	99,81	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0035		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	77.217.000,00	54.000.000,00	(23.217.000,00)	69,93	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	77.217.000,00	54.000.000,00	(23.217.000,00)	69,93	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.217.000,00	54.000.000,00	(23.217.000,00)	69,93	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0037		PENYEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	175.000.000,00	163.836.000,00	(11.164.000,00)	93,62	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	163.836.000,00	(11.164.000,00)	93,62	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	163.836.000,00	(11.164.000,00)	93,62	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0038		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	477.570.200,00	400.645.314,00	(76.924.886,00)	83,89	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	477.570.200,00	400.645.314,00	(76.924.886,00)	83,89	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.570.200,00	400.645.314,00	(76.924.886,00)	83,89	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0039		PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	16.059.346.300,00	15.925.675.100,00	(133.671.200,00)	99,16	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	16.059.346.300,00	15.925.675.100,00	(133.671.200,00)	99,16	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.650.000,00	709.317.000,00	(54.333.000,00)	92,88	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.05	Belanja Hibah	15.295.696.300,00	15.216.358.100,00	(79.338.200,00)	99,48	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0041		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	158.241.600,00	158.241.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	158.241.600,00	158.241.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.241.600,00	158.241.600,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26.580.681.410,00	24.744.338.500,00	(1.836.342.910,00)	93,09	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.580.681.410,00	24.744.338.500,00	(1.836.342.910,00)	93,09	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01.0012		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	26.580.681.410,00	24.744.338.500,00	(1.836.342.910,00)	93,09	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.141.172.200,00	1.040.668.200,00	(100.504.000,00)	91,19	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.976.000,00	344.472.000,00	(100.504.000,00)	77,41	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1.05	Belanja Hibah	696.196.200,00	696.196.200,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	25.439.509.210,00	23.703.670.300,00	(1.735.838.910,00)	93,17	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.439.509.210,00	23.703.670.300,00	(1.735.838.910,00)	93,17	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	96.933.234.963,00	88.268.093.540,00	(8.665.141.423,00)	91,06	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	96.933.234.963,00	88.268.093.540,00	(8.665.141.423,00)	91,06	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.666.802.863,00	88.078.293.540,00	(8.588.509.323,00)	91,11	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	77.286.575.763,00	69.680.339.190,00	(7.606.236.573,00)	90,15	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.521.470.488,00	1.287.352.800,00	(234.117.688,00)	84,61	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	75.765.105.275,00	68.392.986.390,00	(7.372.118.885,00)	90,26	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	19.380.227.100,00	18.397.954.350,00	(982.272.750,00)	94,93	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.093.925.000,00	1.093.925.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.286.302.100,00	17.304.029.350,00	(982.272.750,00)	94,62	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	266.432.100,00	189.800.000,00	(76.632.100,00)	71,23	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	185.472.100,00	108.840.000,00	(76.632.100,00)	58,68	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.472.100,00	108.840.000,00	(76.632.100,00)	58,68	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	80.960.000,00	80.960.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.960.000,00	80.960.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	(123.361.269,00)	92,45	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	(123.361.269,00)	92,45	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09.2.01.0010		PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	(123.361.269,00)	92,45	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	(123.361.269,00)	92,45	
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	(123.361.269,00)	92,45	
				JUMLAH BELANJA	163.283.144.823,00	150.141.954.585,00	(13.141.190.238,00)	91,95	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(160.756.144.823,00)	(144.986.398.330,00)	15.769.746.493,00	90,19	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(160.756.144.823,00)	(144.986.398.330,00)	15.769.746.493,00	90,19	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab.Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	25.617.774.825,00	18.560.012.765,00	(7.057.762.060,00)	72,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.842.094.254,00	11.422.585.753,00	(2.419.508.501,00)	82,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	129.806.214,00	96.271.796,00	(33.534.418,00)	74,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	60.000.000,00	48.300.000,00	(11.700.000,00)	80,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	48.300.000,00	(11.700.000,00)	80,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	48.300.000,00	(11.700.000,00)	80,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.872.000,00	12.585.000,00	(7.287.000,00)	63,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.872.000,00	12.585.000,00	(7.287.000,00)	63,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.872.000,00	12.585.000,00	(7.287.000,00)	63,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	49.934.214,00	35.386.796,00	(14.547.418,00)	70,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.934.214,00	35.386.796,00	(14.547.418,00)	70,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.934.214,00	35.386.796,00	(14.547.418,00)	70,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	(1.296.996.837,70)	82,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	(1.296.996.837,70)	82,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	(1.296.996.837,70)	82,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	(1.296.996.837,70)	82,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	185.375.000,00	184.953.100,00	(421.900,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	185.375.000,00	184.953.100,00	(421.900,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	185.375.000,00	184.953.100,00	(421.900,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.375.000,00	184.953.100,00	(421.900,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	195.739.000,00	151.775.846,00	(43.963.154,00)	77,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	195.059.000,00	151.775.846,00	(43.283.154,00)	77,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	195.059.000,00	151.775.846,00	(43.283.154,00)	77,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.059.000,00	151.775.846,00	(43.283.154,00)	77,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	886.701.952,30	815.487.478,00	(71.214.474,30)	91,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.958.300,00	19.801.910,00	(156.390,00)	99,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.958.300,00	19.801.910,00	(156.390,00)	99,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.958.300,00	19.801.910,00	(156.390,00)	99,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	314.908.774,80	313.196.060,00	(1.712.714,80)	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	313.548.774,80	312.516.060,00	(1.032.714,80)	99,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.548.774,80	312.516.060,00	(1.032.714,80)	99,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	39.946.458,00	39.521.170,00	(425.288,00)	98,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.946.458,00	39.521.170,00	(425.288,00)	98,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.946.458,00	39.521.170,00	(425.288,00)	98,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	169.987.497,00	162.312.550,00	(7.674.947,00)	95,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	169.987.497,00	162.312.550,00	(7.674.947,00)	95,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.987.497,00	162.312.550,00	(7.674.947,00)	95,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.840.490,50	49.044.006,00	(796.484,50)	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.840.490,50	49.044.006,00	(796.484,50)	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.840.490,50	49.044.006,00	(796.484,50)	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	40.000.000,00	7.025.000,00	(32.975.000,00)	17,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	7.025.000,00	(32.975.000,00)	17,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	7.025.000,00	(32.975.000,00)	17,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	212.060.432,00	184.626.782,00	(27.433.650,00)	87,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	212.060.432,00	184.626.782,00	(27.433.650,00)	87,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.060.432,00	184.626.782,00	(27.433.650,00)	87,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	246.949.004,00	245.228.040,00	(1.720.964,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	47.629.004,00	46.705.040,00	(923.964,00)	98,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	46.949.004,00	46.025.040,00	(923.964,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.949.004,00	46.025.040,00	(923.964,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	199.320.000,00	198.523.000,00	(797.000,00)	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	198.640.000,00	197.843.000,00	(797.000,00)	99,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.640.000,00	197.843.000,00	(797.000,00)	99,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.701.488.390,00	1.793.234.607,00	(908.253.783,00)	66,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	334.186.790,00	228.139.407,00	(106.047.383,00)	68,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	334.186.790,00	228.139.407,00	(106.047.383,00)	68,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.186.790,00	228.139.407,00	(106.047.383,00)	68,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.367.301.600,00	1.565.095.200,00	(802.206.400,00)	66,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.367.301.600,00	1.565.095.200,00	(802.206.400,00)	66,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.367.301.600,00	1.565.095.200,00	(802.206.400,00)	66,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.994.122.000,00	1.930.719.030,00	(63.402.970,00)	96,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.019.450.000,00	964.007.160,00	(55.442.840,00)	94,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.019.450.000,00	964.007.160,00	(55.442.840,00)	94,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.450.000,00	964.007.160,00	(55.442.840,00)	94,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	949.792.000,00	945.191.870,00	(4.600.130,00)	99,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	949.792.000,00	945.191.870,00	(4.600.130,00)	99,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.792.000,00	945.191.870,00	(4.600.130,00)	99,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.880.000,00	21.520.000,00	(3.360.000,00)	86,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	24.880.000,00	21.520.000,00	(3.360.000,00)	86,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	21.520.000,00	(3.360.000,00)	86,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.775.680.571,00	7.137.427.012,00	(4.638.253.559,00)	60,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	102.637.550,00	74.476.270,00	(28.161.280,00)	72,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	102.637.550,00	74.476.270,00	(28.161.280,00)	72,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	102.637.550,00	74.476.270,00	(28.161.280,00)	72,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.637.550,00	74.476.270,00	(28.161.280,00)	72,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.519.530.821,00	1.321.868.289,00	(197.662.532,00)	86,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	346.924.821,00	318.683.357,00	(28.241.464,00)	91,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	89.067.750,00	69.061.007,00	(20.006.743,00)	77,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.067.750,00	69.061.007,00	(20.006.743,00)	77,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	257.857.071,00	249.622.350,00	(8.234.721,00)	96,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.857.071,00	249.622.350,00	(8.234.721,00)	96,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0018		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	99.323.000,00	94.762.400,00	(4.560.600,00)	95,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	99.323.000,00	94.762.400,00	(4.560.600,00)	95,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.323.000,00	94.762.400,00	(4.560.600,00)	95,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0021		PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	187.660.000,00	134.420.750,00	(53.239.250,00)	71,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	187.660.000,00	134.420.750,00	(53.239.250,00)	71,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.660.000,00	134.420.750,00	(53.239.250,00)	71,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	885.623.000,00	774.001.782,00	(111.621.218,00)	87,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	885.623.000,00	774.001.782,00	(111.621.218,00)	87,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.623.000,00	774.001.782,00	(111.621.218,00)	87,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.924.514.700,00	1.556.857.936,00	(367.656.764,00)	80,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	832.850.000,00	604.965.290,00	(227.884.710,00)	72,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	832.850.000,00	604.965.290,00	(227.884.710,00)	72,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.850.000,00	604.965.290,00	(227.884.710,00)	72,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	102.950.000,00	13.500.000,00	(89.450.000,00)	13,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.950.000,00	13.500.000,00	(89.450.000,00)	13,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.950.000,00	13.500.000,00	(89.450.000,00)	13,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	154.954.700,00	107.692.646,00	(47.262.054,00)	69,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	154.954.700,00	107.692.646,00	(47.262.054,00)	69,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.954.700,00	107.692.646,00	(47.262.054,00)	69,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0012		AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	833.760.000,00	830.700.000,00	(3.060.000,00)	99,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	833.760.000,00	830.700.000,00	(3.060.000,00)	99,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	833.760.000,00	830.700.000,00	(3.060.000,00)	99,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	8.228.997.500,00	4.184.224.517,00	(4.044.772.983,00)	50,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0005		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	62.000.000,00	1.824.000,00	(60.176.000,00)	2,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.000.000,00	1.824.000,00	(60.176.000,00)	2,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	1.824.000,00	(60.176.000,00)	2,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	7.956.917.000,00	4.020.013.353,00	(3.936.903.647,00)	50,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	199.741.000,00	165.599.553,00	(34.141.447,00)	82,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.741.000,00	165.599.553,00	(34.141.447,00)	82,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	(3.902.762.200,00)	49,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	(3.902.762.200,00)	49,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0014		PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	210.080.500,00	162.387.164,00	(47.693.336,00)	77,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	210.080.500,00	162.387.164,00	(47.693.336,00)	77,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.080.500,00	162.387.164,00	(47.693.336,00)	77,29	
				JUMLAH BELANJA	25.617.774.825,00	18.560.012.765,00	(7.057.762.060,00)	72,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(25.617.774.825,00)	(18.560.012.765,00)	7.057.762.060,00	72,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.617.774.825,00)	(18.560.012.765,00)	7.057.762.060,00	72,44	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	38.551.075.727,00	34.328.810.278,00	(4.222.265.449,00)	89,04	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.442.101.480,00	27.764.138.844,00	(3.677.962.636,00)	88,30	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	101.472.000,00	48.410.856,00	(53.061.144,00)	47,70	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	49.881.000,00	20.221.000,00	(29.660.000,00)	40,53	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.881.000,00	20.221.000,00	(29.660.000,00)	40,53	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.881.000,00	20.221.000,00	(29.660.000,00)	40,53	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	29.088.000,00	18.988.136,00	(10.099.864,00)	65,27	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.088.000,00	18.988.136,00	(10.099.864,00)	65,27	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.088.000,00	18.988.136,00	(10.099.864,00)	65,27	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0008		PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	22.503.000,00	9.201.720,00	(13.301.280,00)	40,89	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.503.000,00	9.201.720,00	(13.301.280,00)	40,89	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.503.000,00	9.201.720,00	(13.301.280,00)	40,89	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	(2.390.226.425,00)	89,78	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	(2.390.226.425,00)	89,78	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	(2.390.226.425,00)	89,78	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	(2.390.226.425,00)	89,78	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	116.357.250,00	94.362.500,00	(21.994.750,00)	81,09	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	116.357.250,00	94.362.500,00	(21.994.750,00)	81,09	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.357.250,00	94.362.500,00	(21.994.750,00)	81,09	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.357.250,00	94.362.500,00	(21.994.750,00)	81,09	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	73.903.000,00	43.720.687,00	(30.182.313,00)	59,15	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	73.903.000,00	43.720.687,00	(30.182.313,00)	59,15	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	73.903.000,00	43.720.687,00	(30.182.313,00)	59,15	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.903.000,00	43.720.687,00	(30.182.313,00)	59,15	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	600.047.047,00	578.271.444,00	(21.775.603,00)	96,37	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.858.074,00	14.674.000,00	(184.074,00)	98,76	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.858.074,00	14.674.000,00	(184.074,00)	98,76	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.858.074,00	14.674.000,00	(184.074,00)	98,76	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	124.965.284,00	118.581.560,00	(6.383.724,00)	94,89	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.973.000,00	6.209.600,00	(5.763.400,00)	51,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.973.000,00	6.209.600,00	(5.763.400,00)	51,86	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	112.992.284,00	112.371.960,00	(620.324,00)	99,45	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.992.284,00	112.371.960,00	(620.324,00)	99,45	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	52.808.486,00	52.094.000,00	(714.486,00)	98,64	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.808.486,00	52.094.000,00	(714.486,00)	98,64	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.808.486,00	52.094.000,00	(714.486,00)	98,64	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	96.699.038,00	95.971.017,00	(728.021,00)	99,24	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.699.038,00	95.971.017,00	(728.021,00)	99,24	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.699.038,00	95.971.017,00	(728.021,00)	99,24	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74.792.165,00	73.105.428,00	(1.686.737,00)	97,74	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	74.792.165,00	73.105.428,00	(1.686.737,00)	97,74	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.792.165,00	73.105.428,00	(1.686.737,00)	97,74	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.749.000,00	(251.000,00)	99,37	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.749.000,00	(251.000,00)	99,37	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.749.000,00	(251.000,00)	99,37	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.500.000,00	7.495.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.495.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.495.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	188.424.000,00	176.601.439,00	(11.822.561,00)	93,72	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188.424.000,00	176.601.439,00	(11.822.561,00)	93,72	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.424.000,00	176.601.439,00	(11.822.561,00)	93,72	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.606.675.200,00	4.843.248.739,00	(763.426.461,00)	86,38	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.765.600,00	60.298.739,00	(15.466.861,00)	79,58	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.765.600,00	60.298.739,00	(15.466.861,00)	79,58	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.765.600,00	60.298.739,00	(15.466.861,00)	79,58	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.530.909.600,00	4.782.950.000,00	(747.959.600,00)	86,47	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.530.909.600,00	4.782.950.000,00	(747.959.600,00)	86,47	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.530.909.600,00	4.782.950.000,00	(747.959.600,00)	86,47	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.544.024.362,00	1.146.728.422,00	(397.295.940,00)	74,26	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	84.230.000,00	83.320.575,00	(909.425,00)	98,92	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.230.000,00	83.320.575,00	(909.425,00)	98,92	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.230.000,00	83.320.575,00	(909.425,00)	98,92	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.158.870.000,00	768.707.347,00	(390.162.653,00)	66,33	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.158.870.000,00	768.707.347,00	(390.162.653,00)	66,33	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.870.000,00	768.707.347,00	(390.162.653,00)	66,33	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	89.964.862,00	84.873.500,00	(5.091.362,00)	94,34	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	89.964.862,00	84.873.500,00	(5.091.362,00)	94,34	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.964.862,00	84.873.500,00	(5.091.362,00)	94,34	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	198.759.500,00	197.727.000,00	(1.032.500,00)	99,48	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	198.079.500,00	197.047.000,00	(1.032.500,00)	99,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.079.500,00	197.047.000,00	(1.032.500,00)	99,47	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	12.200.000,00	12.100.000,00	(100.000,00)	99,18	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	12.100.000,00	(100.000,00)	99,18	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.100.000,00	(100.000,00)	99,18	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.625.459.710,00	1.331.453.046,00	(294.006.664,00)	81,91	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.059.690.250,00	856.133.446,00	(203.556.804,00)	80,79	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	105.750.000,00	103.500.000,00	(2.250.000,00)	97,87	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.750.000,00	103.500.000,00	(2.250.000,00)	97,87	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.750.000,00	103.500.000,00	(2.250.000,00)	97,87	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.099.000,00	51.324.700,00	(1.774.300,00)	96,65	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.099.000,00	51.324.700,00	(1.774.300,00)	96,65	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.099.000,00	51.324.700,00	(1.774.300,00)	96,65	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0006		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	176.850.000,00	53.700.000,00	(123.150.000,00)	30,36	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	176.850.000,00	53.700.000,00	(123.150.000,00)	30,36	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.850.000,00	53.700.000,00	(123.150.000,00)	30,36	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0010		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POL PPNGSIONAL POL PP DAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL	67.120.000,00	64.200.000,00	(2.920.000,00)	95,64	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	67.120.000,00	64.200.000,00	(2.920.000,00)	95,64	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.120.000,00	64.200.000,00	(2.920.000,00)	95,64	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0012		PENINGKATAN KAPASITAS SDM POL PP MELALUI UJI KOMPETENSI UNTUK USULAN PERPINDAHAN JABATAN KE JABATAN FUNGSIONAL POL PP, PROMOSI DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN	15.380.000,00	10.880.000,00	(4.500.000,00)	70,74	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	15.380.000,00	10.880.000,00	(4.500.000,00)	70,74	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.380.000,00	10.880.000,00	(4.500.000,00)	70,74	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0014		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATLINMAS MELALUI PELATIHAN TEKNIS SATPOL PP DAN SATLINMAS	25.215.000,00	21.780.000,00	(3.435.000,00)	86,37	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	25.215.000,00	21.780.000,00	(3.435.000,00)	86,37	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.215.000,00	21.780.000,00	(3.435.000,00)	86,37	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	308.625.000,00	304.486.596,00	(4.138.404,00)	98,65	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	308.625.000,00	304.486.596,00	(4.138.404,00)	98,65	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.625.000,00	304.486.596,00	(4.138.404,00)	98,65	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0016		PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	47.416.000,00	40.940.000,00	(6.476.000,00)	86,34	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	47.416.000,00	40.940.000,00	(6.476.000,00)	86,34	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.416.000,00	40.940.000,00	(6.476.000,00)	86,34	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0017		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	221.520.000,00	167.385.000,00	(54.135.000,00)	75,56	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	221.520.000,00	167.385.000,00	(54.135.000,00)	75,56	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.520.000,00	167.385.000,00	(54.135.000,00)	75,56	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0018		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.715.250,00	37.937.150,00	(778.100,00)	97,99	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	767.513,00	680.000,00	(87.513,00)	88,59	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.513,00	680.000,00	(87.513,00)	88,59	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	37.947.737,00	37.257.150,00	(690.587,00)	98,18	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.947.737,00	37.257.150,00	(690.587,00)	98,18	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	565.769.460,00	475.319.600,00	(90.449.860,00)	84,01	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0010		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	88.973.460,00	70.820.100,00	(18.153.360,00)	79,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	88.973.460,00	70.820.100,00	(18.153.360,00)	79,59	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.973.460,00	70.820.100,00	(18.153.360,00)	79,59	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	24.996.000,00	0,00	(24.996.000,00)	0,00	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	24.996.000,00	0,00	(24.996.000,00)	0,00	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.996.000,00	0,00	(24.996.000,00)	0,00	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	451.800.000,00	404.499.500,00	(47.300.500,00)	89,53	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	451.800.000,00	404.499.500,00	(47.300.500,00)	89,53	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.800.000,00	404.499.500,00	(47.300.500,00)	89,53	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	534.583.537,00	523.852.886,00	(10.730.651,00)	97,99	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	22.851.537,00	21.701.300,00	(1.150.237,00)	94,96	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	22.851.537,00	21.701.300,00	(1.150.237,00)	94,96	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.851.537,00	21.701.300,00	(1.150.237,00)	94,96	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.851.537,00	21.701.300,00	(1.150.237,00)	94,96	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	511.732.000,00	502.151.586,00	(9.580.414,00)	98,12	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	453.482.000,00	448.296.000,00	(5.186.000,00)	98,85	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	453.482.000,00	448.296.000,00	(5.186.000,00)	98,85	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.482.000,00	448.296.000,00	(5.186.000,00)	98,85	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	58.250.000,00	53.855.586,00	(4.394.414,00)	92,45	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	58.250.000,00	53.855.586,00	(4.394.414,00)	92,45	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.250.000,00	53.855.586,00	(4.394.414,00)	92,45	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.948.931.000,00	4.709.365.502,00	(239.565.498,00)	95,15	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.948.931.000,00	4.709.365.502,00	(239.565.498,00)	95,15	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	593.931.000,00	569.398.502,00	(24.532.498,00)	95,86	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	593.931.000,00	569.398.502,00	(24.532.498,00)	95,86	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.931.000,00	569.398.502,00	(24.532.498,00)	95,86	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	(215.033.000,00)	95,06	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	(215.033.000,00)	95,06	
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	(215.033.000,00)	95,06	
				JUMLAH BELANJA	38.551.075.727,00	34.328.810.278,00	(4.222.265.449,00)	89,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(38.551.075.727,00)	(34.328.810.278,00)	4.222.265.449,00	89,04	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.551.075.727,00)	(34.328.810.278,00)	4.222.265.449,00	89,04	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	16.439.235.163,00	15.207.525.112,00	(1.231.710.051,00)	92,50	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.897.576.963,00	6.894.939.209,00	(1.002.637.754,00)	87,30	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.672.000,00	40.110.800,00	(10.561.200,00)	79,15	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	40.568.000,00	35.556.800,00	(5.011.200,00)	87,64	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.568.000,00	35.556.800,00	(5.011.200,00)	87,64	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.568.000,00	35.556.800,00	(5.011.200,00)	87,64	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.104.000,00	4.554.000,00	(5.550.000,00)	45,07	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.104.000,00	4.554.000,00	(5.550.000,00)	45,07	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.104.000,00	4.554.000,00	(5.550.000,00)	45,07	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	(845.999.322,00)	86,10	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	(845.999.322,00)	86,10	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	(845.999.322,00)	86,10	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	(845.999.322,00)	86,10	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	36.902.500,00	36.902.500,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	36.902.500,00	36.902.500,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.902.500,00	36.902.500,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.902.500,00	36.902.500,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	80.355.000,00	75.230.000,00	(5.125.000,00)	93,62	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46.125.000,00	41.000.000,00	(5.125.000,00)	88,88	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.125.000,00	41.000.000,00	(5.125.000,00)	88,88	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.125.000,00	41.000.000,00	(5.125.000,00)	88,88	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	635.161.524,00	620.828.323,00	(14.333.201,00)	97,74	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	36.980.300,00	36.975.300,00	(5.000,00)	99,98	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.980.300,00	36.975.300,00	(5.000,00)	99,98	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.980.300,00	36.975.300,00	(5.000,00)	99,98	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	132.455.000,00	130.925.700,00	(1.529.300,00)	98,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	132.455.000,00	130.925.700,00	(1.529.300,00)	98,84	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.455.000,00	130.925.700,00	(1.529.300,00)	98,84	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.000.000,00	49.929.200,00	(70.800,00)	99,85	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.929.200,00	(70.800,00)	99,85	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.929.200,00	(70.800,00)	99,85	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	163.140.624,00	162.996.414,00	(144.210,00)	99,91	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	163.140.624,00	162.996.414,00	(144.210,00)	99,91	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.140.624,00	162.996.414,00	(144.210,00)	99,91	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62.935.000,00	56.280.405,00	(6.654.595,00)	89,42	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.935.000,00	56.280.405,00	(6.654.595,00)	89,42	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.935.000,00	56.280.405,00	(6.654.595,00)	89,42	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	22.194.600,00	17.069.400,00	(5.125.200,00)	76,90	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.194.600,00	17.069.400,00	(5.125.200,00)	76,90	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.194.600,00	17.069.400,00	(5.125.200,00)	76,90	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	167.456.000,00	166.651.904,00	(804.096,00)	99,51	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	167.456.000,00	166.651.904,00	(804.096,00)	99,51	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.456.000,00	166.651.904,00	(804.096,00)	99,51	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	81.402.000,00	81.226.902,00	(175.098,00)	99,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	81.402.000,00	81.226.902,00	(175.098,00)	99,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	81.402.000,00	81.226.902,00	(175.098,00)	99,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.402.000,00	81.226.902,00	(175.098,00)	99,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	459.085.800,00	360.543.380,00	(98.542.420,00)	78,53	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	131.876.200,00	96.193.380,00	(35.682.820,00)	72,94	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.876.200,00	96.193.380,00	(35.682.820,00)	72,94	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.876.200,00	96.193.380,00	(35.682.820,00)	72,94	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	327.209.600,00	264.350.000,00	(62.859.600,00)	80,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	327.209.600,00	264.350.000,00	(62.859.600,00)	80,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.209.600,00	264.350.000,00	(62.859.600,00)	80,78	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	463.757.320,00	435.855.807,00	(27.901.513,00)	93,98	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	294.165.000,00	269.263.697,00	(24.901.303,00)	91,53	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	294.165.000,00	269.263.697,00	(24.901.303,00)	91,53	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.165.000,00	269.263.697,00	(24.901.303,00)	91,53	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	154.952.320,00	152.078.320,00	(2.874.000,00)	98,14	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	154.952.320,00	152.078.320,00	(2.874.000,00)	98,14	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.952.320,00	152.078.320,00	(2.874.000,00)	98,14	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	14.640.000,00	14.513.790,00	(126.210,00)	99,13	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	14.640.000,00	14.513.790,00	(126.210,00)	99,13	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	14.513.790,00	(126.210,00)	99,13	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	(14.143.625,00)	99,18	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	(14.143.625,00)	99,18	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	1.630.010.270,00	1.621.717.491,00	(8.292.779,00)	99,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.630.010.270,00	1.621.717.491,00	(8.292.779,00)	99,49	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.630.010.270,00	1.621.717.491,00	(8.292.779,00)	99,49	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	98.731.900,00	93.481.440,00	(5.250.460,00)	94,68	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	98.731.900,00	93.481.440,00	(5.250.460,00)	94,68	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.731.900,00	93.481.440,00	(5.250.460,00)	94,68	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	13.475.000,00	12.874.614,00	(600.386,00)	95,54	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.475.000,00	12.874.614,00	(600.386,00)	95,54	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.475.000,00	12.874.614,00	(600.386,00)	95,54	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.002.762.000,00	5.980.019.495,00	(22.742.505,00)	99,62	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	6.002.762.000,00	5.980.019.495,00	(22.742.505,00)	99,62	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	5.561.440.000,00	5.561.439.305,00	(695,00)	99,99	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.561.440.000,00	5.561.439.305,00	(695,00)	99,99	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.999.305,00	(695,00)	99,99	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	5.461.440.000,00	5.461.440.000,00	0,00	100,00	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	88.222.000,00	87.776.132,00	(445.868,00)	99,49	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	88.222.000,00	87.776.132,00	(445.868,00)	99,49	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.222.000,00	87.776.132,00	(445.868,00)	99,49	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	102.755.000,00	86.760.417,00	(15.994.583,00)	84,43	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	102.755.000,00	86.760.417,00	(15.994.583,00)	84,43	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.755.000,00	86.760.417,00	(15.994.583,00)	84,43	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	250.345.000,00	244.043.641,00	(6.301.359,00)	97,48	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	250.345.000,00	244.043.641,00	(6.301.359,00)	97,48	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.345.000,00	244.043.641,00	(6.301.359,00)	97,48	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71.504.000,00	68.667.742,00	(2.836.258,00)	96,03	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71.504.000,00	68.667.742,00	(2.836.258,00)	96,03	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	71.504.000,00	68.667.742,00	(2.836.258,00)	96,03	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	71.504.000,00	68.667.742,00	(2.836.258,00)	96,03	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.504.000,00	68.667.742,00	(2.836.258,00)	96,03	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	381.819.890,00	243.381.606,00	(138.438.284,00)	63,74	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	381.819.890,00	243.381.606,00	(138.438.284,00)	63,74	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	381.819.890,00	243.381.606,00	(138.438.284,00)	63,74	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	381.819.890,00	243.381.606,00	(138.438.284,00)	63,74	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.819.890,00	243.381.606,00	(138.438.284,00)	63,74	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	343.355.140,00	292.443.515,00	(50.911.625,00)	85,17	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	343.355.140,00	292.443.515,00	(50.911.625,00)	85,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	37.859.840,00	37.540.773,00	(319.067,00)	99,15	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.859.840,00	37.540.773,00	(319.067,00)	99,15	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.859.840,00	37.540.773,00	(319.067,00)	99,15	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	65.312.000,00	63.040.067,00	(2.271.933,00)	96,52	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.312.000,00	63.040.067,00	(2.271.933,00)	96,52	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.312.000,00	63.040.067,00	(2.271.933,00)	96,52	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	95.686.000,00	88.658.865,00	(7.027.135,00)	92,65	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	95.686.000,00	88.658.865,00	(7.027.135,00)	92,65	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.686.000,00	88.658.865,00	(7.027.135,00)	92,65	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.497.300,00	103.203.810,00	(41.293.490,00)	71,42	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	144.497.300,00	103.203.810,00	(41.293.490,00)	71,42	
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.497.300,00	103.203.810,00	(41.293.490,00)	71,42	
				JUMLAH BELANJA	16.439.235.163,00	15.207.525.112,00	(1.231.710.051,00)	92,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.439.235.163,00)	(15.207.525.112,00)	1.231.710.051,00	92,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.439.235.163,00)	(15.207.525.112,00)	1.231.710.051,00	92,50	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	77.199.200.617,00	52.755.225.707,00	(24.443.974.910,00)	68,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.325.747.442,00	9.409.844.952,00	(1.915.902.490,00)	83,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	104.673.000,00	80.584.900,00	(24.088.100,00)	76,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	59.908.000,00	56.608.000,00	(3.300.000,00)	94,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.908.000,00	56.608.000,00	(3.300.000,00)	94,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.908.000,00	56.608.000,00	(3.300.000,00)	94,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.429.000,00	14.429.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.429.000,00	14.429.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.429.000,00	14.429.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	30.336.000,00	9.547.900,00	(20.788.100,00)	31,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.336.000,00	9.547.900,00	(20.788.100,00)	31,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.336.000,00	9.547.900,00	(20.788.100,00)	31,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	(1.612.548.310,00)	79,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	(1.612.548.310,00)	79,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	(1.612.548.310,00)	79,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	(1.612.548.310,00)	79,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	119.668.000,00	84.048.828,00	(35.619.172,00)	70,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	119.668.000,00	84.048.828,00	(35.619.172,00)	70,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	119.668.000,00	84.048.828,00	(35.619.172,00)	70,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.668.000,00	84.048.828,00	(35.619.172,00)	70,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	677.805.315,00	617.512.681,00	(60.292.634,00)	91,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	27.075.000,00	20.201.250,00	(6.873.750,00)	74,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.075.000,00	20.201.250,00	(6.873.750,00)	74,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.075.000,00	20.201.250,00	(6.873.750,00)	74,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	90.120.000,00	80.172.800,00	(9.947.200,00)	88,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.651.000,00	7.522.800,00	(128.200,00)	98,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.651.000,00	7.522.800,00	(128.200,00)	98,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	82.469.000,00	72.650.000,00	(9.819.000,00)	88,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.469.000,00	72.650.000,00	(9.819.000,00)	88,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	59.996.200,00	59.316.200,00	(680.000,00)	98,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.485.200,00	39.805.200,00	(680.000,00)	98,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.485.200,00	39.805.200,00	(680.000,00)	98,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	19.511.000,00	19.511.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.511.000,00	19.511.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	88.818.940,00	88.138.940,00	(680.000,00)	99,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.818.940,00	88.138.940,00	(680.000,00)	99,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.818.940,00	88.138.940,00	(680.000,00)	99,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	93.315.675,00	93.053.900,00	(261.775,00)	99,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	93.315.675,00	93.053.900,00	(261.775,00)	99,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.315.675,00	93.053.900,00	(261.775,00)	99,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	49.132.500,00	21.062.400,00	(28.070.100,00)	42,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	49.132.500,00	21.062.400,00	(28.070.100,00)	42,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.132.500,00	21.062.400,00	(28.070.100,00)	42,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	229.347.000,00	215.567.191,00	(13.779.809,00)	93,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	229.347.000,00	215.567.191,00	(13.779.809,00)	93,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.347.000,00	215.567.191,00	(13.779.809,00)	93,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80.600.000,00	79.920.000,00	(680.000,00)	99,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	80.600.000,00	79.920.000,00	(680.000,00)	99,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	79.920.000,00	79.920.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.920.000,00	79.920.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.240.305.820,00	1.088.008.472,00	(152.297.348,00)	87,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	124.010.220,00	110.834.072,00	(13.176.148,00)	89,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	124.010.220,00	110.834.072,00	(13.176.148,00)	89,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.010.220,00	110.834.072,00	(13.176.148,00)	89,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.116.295.600,00	977.174.400,00	(139.121.200,00)	87,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.116.295.600,00	977.174.400,00	(139.121.200,00)	87,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.116.295.600,00	977.174.400,00	(139.121.200,00)	87,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.144.955.238,00	1.114.578.312,00	(30.376.926,00)	97,34	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	360.170.000,00	340.349.283,00	(19.820.717,00)	94,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	360.170.000,00	340.349.283,00	(19.820.717,00)	94,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.170.000,00	340.349.283,00	(19.820.717,00)	94,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	715.505.238,00	713.129.029,00	(2.376.209,00)	99,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	715.505.238,00	713.129.029,00	(2.376.209,00)	99,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.505.238,00	713.129.029,00	(2.376.209,00)	99,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	69.280.000,00	61.100.000,00	(8.180.000,00)	88,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	69.280.000,00	61.100.000,00	(8.180.000,00)	88,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.280.000,00	61.100.000,00	(8.180.000,00)	88,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	32.238.251.650,00	13.440.048.061,00	(18.798.203.589,00)	41,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.01		PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	49.582.000,00	4.080.900,00	(45.501.100,00)	8,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KAT	49.582.000,00	4.080.900,00	(45.501.100,00)	8,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.582.000,00	4.080.900,00	(45.501.100,00)	8,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.582.000,00	4.080.900,00	(45.501.100,00)	8,23	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.188.669.650,00	13.435.967.161,00	(18.752.702.489,00)	41,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0001		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	105.045.000,00	104.406.149,00	(638.851,00)	99,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.045.000,00	104.406.149,00	(638.851,00)	99,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.045.000,00	104.406.149,00	(638.851,00)	99,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	6.443.879.000,00	6.426.085.050,00	(17.793.950,00)	99,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.443.879.000,00	6.426.085.050,00	(17.793.950,00)	99,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.443.879.000,00	6.426.085.050,00	(17.793.950,00)	99,72	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0003		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	24.779.869.700,00	6.150.593.352,00	(18.629.276.348,00)	24,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.779.869.700,00	6.150.593.352,00	(18.629.276.348,00)	24,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.779.869.700,00	1.405.593.352,00	(374.276.348,00)	78,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.000.000.000,00	4.745.000.000,00	(18.255.000.000,00)	20,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	826.290.950,00	731.406.110,00	(94.884.840,00)	88,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	826.290.950,00	731.406.110,00	(94.884.840,00)	88,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.290.950,00	731.406.110,00	(94.884.840,00)	88,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0005		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	33.585.000,00	23.476.500,00	(10.108.500,00)	69,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.585.000,00	23.476.500,00	(10.108.500,00)	69,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.585.000,00	23.476.500,00	(10.108.500,00)	69,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	(158.383.354,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	(158.383.354,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	1.471.563.000,00	1.328.206.846,00	(143.356.154,00)	90,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.471.563.000,00	1.328.206.846,00	(143.356.154,00)	90,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.771.000,00	884.383.536,00	(134.387.464,00)	86,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	452.792.000,00	443.823.310,00	(8.968.690,00)	98,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	220.415.700,00	205.388.500,00	(15.027.200,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	220.415.700,00	205.388.500,00	(15.027.200,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.415.700,00	205.388.500,00	(15.027.200,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0010		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	(3.507.487.438,00)	88,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	(3.507.487.438,00)	88,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0002		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	312.434.000,00	272.091.279,00	(40.342.721,00)	87,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	312.434.000,00	272.091.279,00	(40.342.721,00)	87,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.434.000,00	272.091.279,00	(40.342.721,00)	87,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	30.271.433.825,00	26.804.289.108,00	(3.467.144.717,00)	88,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.271.433.825,00	26.804.289.108,00	(3.467.144.717,00)	88,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.533.825,00	1.224.764.108,00	(140.769.717,00)	89,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.905.900.000,00	25.579.525.000,00	(3.326.375.000,00)	88,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	959.355.000,00	895.356.961,00	(63.998.039,00)	93,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	304.180.000,00	290.206.000,00	(13.974.000,00)	95,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	304.180.000,00	290.206.000,00	(13.974.000,00)	95,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	304.180.000,00	290.206.000,00	(13.974.000,00)	95,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.180.000,00	290.206.000,00	(13.974.000,00)	95,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	655.175.000,00	605.150.961,00	(50.024.039,00)	92,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	655.175.000,00	605.150.961,00	(50.024.039,00)	92,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	655.175.000,00	605.150.961,00	(50.024.039,00)	92,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.175.000,00	605.150.961,00	(50.024.039,00)	92,36	
				JUMLAH BELANJA	77.199.200.617,00	52.755.225.707,00	(24.443.974.910,00)	68,33	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(77.199.200.617,00)	(52.755.225.707,00)	24.443.974.910,00	68,33	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(77.199.200.617,00)	(52.755.225.707,00)	24.443.974.910,00	68,33	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000		5	BELANJA DAERAH	15.127.350.304,00	12.798.460.008,00	(2.328.890.296,00)	84,60	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.373.528.429,00	8.213.485.004,00	(1.160.043.425,00)	87,62	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	84.785.000,00	77.110.900,00	(7.674.100,00)	90,94	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.392.000,00	48.111.900,00	(2.280.100,00)	95,47	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.392.000,00	48.111.900,00	(2.280.100,00)	95,47	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.392.000,00	48.111.900,00	(2.280.100,00)	95,47	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.364.000,00	11.676.000,00	(2.688.000,00)	81,28	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.364.000,00	11.676.000,00	(2.688.000,00)	81,28	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.364.000,00	11.676.000,00	(2.688.000,00)	81,28	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	20.029.000,00	17.323.000,00	(2.706.000,00)	86,48	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.029.000,00	17.323.000,00	(2.706.000,00)	86,48	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.029.000,00	17.323.000,00	(2.706.000,00)	86,48	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	(1.014.759.657,00)	86,93	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	(1.014.759.657,00)	86,93	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	(1.014.759.657,00)	86,93	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	(1.014.759.657,00)	86,93	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	17.590.000,00	17.500.000,00	(90.000,00)	99,48	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	17.590.000,00	17.500.000,00	(90.000,00)	99,48	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.590.000,00	17.500.000,00	(90.000,00)	99,48	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.590.000,00	17.500.000,00	(90.000,00)	99,48	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	56.000.000,00	54.000.000,00	(2.000.000,00)	96,42	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	56.000.000,00	54.000.000,00	(2.000.000,00)	96,42	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	54.000.000,00	(2.000.000,00)	96,42	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	54.000.000,00	(2.000.000,00)	96,42	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	498.225.788,00	488.599.064,00	(9.626.724,00)	98,06	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.963.364,00	18.623.705,00	(1.339.659,00)	93,28	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.963.364,00	18.623.705,00	(1.339.659,00)	93,28	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.963.364,00	18.623.705,00	(1.339.659,00)	93,28	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	128.022.796,00	122.780.000,00	(5.242.796,00)	95,90	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	127.342.796,00	122.100.000,00	(5.242.796,00)	95,88	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.342.796,00	122.100.000,00	(5.242.796,00)	95,88	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	39.602.400,00	39.046.400,00	(556.000,00)	98,59	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.602.400,00	39.046.400,00	(556.000,00)	98,59	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.602.400,00	39.046.400,00	(556.000,00)	98,59	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	68.217.778,00	67.165.477,00	(1.052.301,00)	98,45	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.217.778,00	67.165.477,00	(1.052.301,00)	98,45	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.217.778,00	67.165.477,00	(1.052.301,00)	98,45	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.741.050,00	54.313.330,00	(427.720,00)	99,21	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.741.050,00	54.313.330,00	(427.720,00)	99,21	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.741.050,00	54.313.330,00	(427.720,00)	99,21	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.268.400,00	24.804.200,00	(464.200,00)	98,16	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.268.400,00	24.804.200,00	(464.200,00)	98,16	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.268.400,00	24.804.200,00	(464.200,00)	98,16	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	122.410.000,00	121.905.952,00	(504.048,00)	99,58	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.410.000,00	121.905.952,00	(504.048,00)	99,58	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.410.000,00	121.905.952,00	(504.048,00)	99,58	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.772.000,00	70.716.990,00	(55.010,00)	99,92	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	70.772.000,00	70.716.990,00	(55.010,00)	99,92	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	70.772.000,00	70.716.990,00	(55.010,00)	99,92	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.772.000,00	70.716.990,00	(55.010,00)	99,92	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	667.789.901,00	547.617.835,00	(120.172.066,00)	82,00	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	250.658.568,00	174.738.635,00	(75.919.933,00)	69,71	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.658.568,00	174.738.635,00	(75.919.933,00)	69,71	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.658.568,00	174.738.635,00	(75.919.933,00)	69,71	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	417.131.333,00	372.879.200,00	(44.252.133,00)	89,39	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	417.131.333,00	372.879.200,00	(44.252.133,00)	89,39	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.131.333,00	372.879.200,00	(44.252.133,00)	89,39	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	211.713.000,00	206.047.132,00	(5.665.868,00)	97,32	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	89.350.000,00	85.383.682,00	(3.966.318,00)	95,56	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.350.000,00	85.383.682,00	(3.966.318,00)	95,56	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.350.000,00	85.383.682,00	(3.966.318,00)	95,56	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	96.873.000,00	96.190.000,00	(683.000,00)	99,29	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	96.873.000,00	96.190.000,00	(683.000,00)	99,29	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.873.000,00	96.190.000,00	(683.000,00)	99,29	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	25.490.000,00	24.473.450,00	(1.016.550,00)	96,01	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	25.490.000,00	24.473.450,00	(1.016.550,00)	96,01	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.490.000,00	24.473.450,00	(1.016.550,00)	96,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	364.317.050,00	138.730.545,00	(225.586.505,00)	38,07	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02.2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	364.317.050,00	138.730.545,00	(225.586.505,00)	38,07	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02.2.01.0001		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	364.317.050,00	138.730.545,00	(225.586.505,00)	38,07	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	364.317.050,00	138.730.545,00	(225.586.505,00)	38,07	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.317.050,00	138.730.545,00	(225.586.505,00)	38,07	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	(577.241.156,00)	87,19	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	(577.241.156,00)	87,19	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	(577.241.156,00)	87,19	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	(577.241.156,00)	87,19	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	(577.241.156,00)	87,19	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	511.585.825,00	233.587.713,00	(277.998.112,00)	45,65	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.769.925,00	1.800.000,00	(150.969.925,00)	1,17	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.01.0004		PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN	152.769.925,00	1.800.000,00	(150.969.925,00)	1,17	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	152.769.925,00	1.800.000,00	(150.969.925,00)	1,17	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.769.925,00	1.800.000,00	(150.969.925,00)	1,17	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	311.387.900,00	186.033.602,00	(125.354.298,00)	59,74	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0001		PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	45.642.000,00	45.554.900,00	(87.100,00)	99,80	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.642.000,00	45.554.900,00	(87.100,00)	99,80	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.642.000,00	45.554.900,00	(87.100,00)	99,80	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0002		PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	109.323.000,00	108.821.650,00	(501.350,00)	99,54	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.323.000,00	108.821.650,00	(501.350,00)	99,54	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.323.000,00	108.821.650,00	(501.350,00)	99,54	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0003		JOB FAIR/BURSA KERJA	156.422.900,00	31.657.052,00	(124.765.848,00)	20,23	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	156.422.900,00	31.657.052,00	(124.765.848,00)	20,23	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.422.900,00	31.657.052,00	(124.765.848,00)	20,23	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.04		PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.428.000,00	45.754.111,00	(1.673.889,00)	96,47	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.04.0001		PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	47.428.000,00	45.754.111,00	(1.673.889,00)	96,47	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.428.000,00	45.754.111,00	(1.673.889,00)	96,47	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.428.000,00	45.754.111,00	(1.673.889,00)	96,47	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	371.027.000,00	283.005.902,00	(88.021.098,00)	76,27	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.655.000,00	110.002.091,00	(55.652.909,00)	66,40	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	165.655.000,00	110.002.091,00	(55.652.909,00)	66,40	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	165.655.000,00	110.002.091,00	(55.652.909,00)	66,40	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.655.000,00	110.002.091,00	(55.652.909,00)	66,40	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.372.000,00	173.003.811,00	(32.368.189,00)	84,23	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.694.000,00	96.883.196,00	(18.810.804,00)	83,74	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	115.694.000,00	96.883.196,00	(18.810.804,00)	83,74	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.694.000,00	96.883.196,00	(18.810.804,00)	83,74	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0004		PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.678.000,00	76.120.615,00	(13.557.385,00)	84,88	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.678.000,00	76.120.615,00	(13.557.385,00)	84,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.678.000,00	76.120.615,00	(13.557.385,00)	84,88	
				JUMLAH BELANJA	15.127.350.304,00	12.798.460.008,00	(2.328.890.296,00)	84,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.127.350.304,00)	(12.798.460.008,00)	2.328.890.296,00	84,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.127.350.304,00)	(12.798.460.008,00)	2.328.890.296,00	84,60	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	9.351.115.648,00	8.048.865.113,00	(1.302.250.535,00)	86,07	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.360.526.212,00	6.290.846.301,00	(1.069.679.911,00)	85,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.389.500,00	52.344.957,00	(13.044.543,00)	80,05	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	34.354.000,00	27.084.457,00	(7.269.543,00)	78,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.354.000,00	27.084.457,00	(7.269.543,00)	78,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.354.000,00	27.084.457,00	(7.269.543,00)	78,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.904.000,00	9.215.000,00	(689.000,00)	93,04	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.904.000,00	9.215.000,00	(689.000,00)	93,04	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.904.000,00	9.215.000,00	(689.000,00)	93,04	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	21.131.500,00	16.045.500,00	(5.086.000,00)	75,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.131.500,00	16.045.500,00	(5.086.000,00)	75,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.131.500,00	16.045.500,00	(5.086.000,00)	75,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	(936.846.999,00)	84,56	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	(936.846.999,00)	84,56	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	(936.846.999,00)	84,56	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	(936.846.999,00)	84,56	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	99.125.000,00	93.440.000,00	(5.685.000,00)	94,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	99.125.000,00	93.440.000,00	(5.685.000,00)	94,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.125.000,00	93.440.000,00	(5.685.000,00)	94,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.125.000,00	93.440.000,00	(5.685.000,00)	94,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	499.922.509,00	477.979.936,00	(21.942.573,00)	95,61	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.912.850,00	19.455.000,00	(457.850,00)	97,70	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.912.850,00	19.455.000,00	(457.850,00)	97,70	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.912.850,00	19.455.000,00	(457.850,00)	97,70	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	34.597.750,00	33.280.000,00	(1.317.750,00)	96,19	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	809.781,00	680.000,00	(129.781,00)	83,97	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.781,00	680.000,00	(129.781,00)	83,97	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	33.787.969,00	32.600.000,00	(1.187.969,00)	96,48	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.787.969,00	32.600.000,00	(1.187.969,00)	96,48	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	36.245.900,00	30.189.300,00	(6.056.600,00)	83,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.245.900,00	30.189.300,00	(6.056.600,00)	83,29	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.245.900,00	30.189.300,00	(6.056.600,00)	83,29	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	124.193.110,00	121.519.100,00	(2.674.010,00)	97,84	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	124.193.110,00	121.519.100,00	(2.674.010,00)	97,84	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.193.110,00	121.519.100,00	(2.674.010,00)	97,84	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	95.150.899,00	95.148.200,00	(2.699,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	95.150.899,00	95.148.200,00	(2.699,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.150.899,00	95.148.200,00	(2.699,00)	99,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	20.000.000,00	19.215.000,00	(785.000,00)	96,07	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.215.000,00	(785.000,00)	96,07	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.215.000,00	(785.000,00)	96,07	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	159.822.000,00	159.173.336,00	(648.664,00)	99,59	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	159.822.000,00	159.173.336,00	(648.664,00)	99,59	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.822.000,00	159.173.336,00	(648.664,00)	99,59	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	393.755.564,00	310.219.385,00	(83.536.179,00)	78,78	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	101.665.920,00	60.272.985,00	(41.392.935,00)	59,28	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.665.920,00	60.272.985,00	(41.392.935,00)	59,28	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.665.920,00	60.272.985,00	(41.392.935,00)	59,28	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	292.089.644,00	249.946.400,00	(42.143.244,00)	85,57	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	292.089.644,00	249.946.400,00	(42.143.244,00)	85,57	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.089.644,00	249.946.400,00	(42.143.244,00)	85,57	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	232.430.000,00	223.805.383,00	(8.624.617,00)	96,28	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	200.100.000,00	191.475.383,00	(8.624.617,00)	95,68	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.100.000,00	191.475.383,00	(8.624.617,00)	95,68	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.100.000,00	191.475.383,00	(8.624.617,00)	95,68	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	32.330.000,00	32.330.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	32.330.000,00	32.330.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.330.000,00	32.330.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	602.418.925,00	580.267.647,00	(22.151.278,00)	96,32	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	116.743.625,00	114.317.925,00	(2.425.700,00)	97,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.0008		SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA	116.743.625,00	114.317.925,00	(2.425.700,00)	97,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	116.743.625,00	114.317.925,00	(2.425.700,00)	97,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.743.625,00	114.317.925,00	(2.425.700,00)	97,92	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	485.675.300,00	465.949.722,00	(19.725.578,00)	95,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0001		SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	92.530.000,00	86.514.664,00	(6.015.336,00)	93,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	92.530.000,00	86.514.664,00	(6.015.336,00)	93,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.530.000,00	86.514.664,00	(6.015.336,00)	93,49	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	393.145.300,00	379.435.058,00	(13.710.242,00)	96,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	393.145.300,00	379.435.058,00	(13.710.242,00)	96,51	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.145.300,00	379.435.058,00	(13.710.242,00)	96,51	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	170.967.000,00	152.319.065,00	(18.647.935,00)	89,09	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.552.000,00	40.167.859,00	(384.141,00)	99,05	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	40.552.000,00	40.167.859,00	(384.141,00)	99,05	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.552.000,00	40.167.859,00	(384.141,00)	99,05	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.552.000,00	40.167.859,00	(384.141,00)	99,05	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	130.415.000,00	112.151.206,00	(18.263.794,00)	85,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	130.415.000,00	112.151.206,00	(18.263.794,00)	85,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	130.415.000,00	112.151.206,00	(18.263.794,00)	85,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.415.000,00	112.151.206,00	(18.263.794,00)	85,99	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	99.387.200,00	61.180.378,00	(38.206.822,00)	61,55	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01		PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.387.200,00	61.180.378,00	(38.206.822,00)	61,55	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01.0002		PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	99.387.200,00	61.180.378,00	(38.206.822,00)	61,55	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.387.200,00	61.180.378,00	(38.206.822,00)	61,55	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.387.200,00	61.180.378,00	(38.206.822,00)	61,55	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	335.008.911,00	327.194.013,00	(7.814.898,00)	97,66	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	128.060.450,00	122.254.977,00	(5.805.473,00)	95,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	128.060.450,00	122.254.977,00	(5.805.473,00)	95,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.060.450,00	122.254.977,00	(5.805.473,00)	95,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.060.450,00	122.254.977,00	(5.805.473,00)	95,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	206.948.461,00	204.939.036,00	(2.009.425,00)	99,02	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.747.500,00	150.055.000,00	(692.500,00)	99,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.747.500,00	150.055.000,00	(692.500,00)	99,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.747.500,00	150.055.000,00	(692.500,00)	99,54	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.200.961,00	54.884.036,00	(1.316.925,00)	97,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.200.961,00	54.884.036,00	(1.316.925,00)	97,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.200.961,00	54.884.036,00	(1.316.925,00)	97,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	782.807.400,00	637.057.709,00	(145.749.691,00)	81,38	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	625.983.000,00	496.807.023,00	(129.175.977,00)	79,36	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	625.983.000,00	496.807.023,00	(129.175.977,00)	79,36	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	625.983.000,00	496.807.023,00	(129.175.977,00)	79,36	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.983.000,00	496.807.023,00	(129.175.977,00)	79,36	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.824.400,00	140.250.686,00	(16.573.714,00)	89,43	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02.0005		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.824.400,00	140.250.686,00	(16.573.714,00)	89,43	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	156.824.400,00	140.250.686,00	(16.573.714,00)	89,43	
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.824.400,00	140.250.686,00	(16.573.714,00)	89,43	
				JUMLAH BELANJA	9.351.115.648,00	8.048.865.113,00	(1.302.250.535,00)	86,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.351.115.648,00)	(8.048.865.113,00)	1.302.250.535,00	86,07	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.351.115.648,00)	(8.048.865.113,00)	1.302.250.535,00	86,07	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	10.613.654.680,00	8.970.739.189,00	(1.642.915.491,00)	84,52	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.257.242.724,00	6.964.179.663,00	(1.293.063.061,00)	84,34	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.723.800,00	59.645.480,00	(31.078.320,00)	65,74	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	49.597.200,00	34.274.334,00	(15.322.866,00)	69,10	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.597.200,00	34.274.334,00	(15.322.866,00)	69,10	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.597.200,00	34.274.334,00	(15.322.866,00)	69,10	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.760.600,00	13.116.649,00	(7.643.951,00)	63,18	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.760.600,00	13.116.649,00	(7.643.951,00)	63,18	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.760.600,00	13.116.649,00	(7.643.951,00)	63,18	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	20.366.000,00	12.254.497,00	(8.111.503,00)	60,17	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.366.000,00	12.254.497,00	(8.111.503,00)	60,17	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.366.000,00	12.254.497,00	(8.111.503,00)	60,17	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	(1.113.453.330,00)	82,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	(1.113.453.330,00)	82,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	(1.113.453.330,00)	82,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	(1.113.453.330,00)	82,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	40.730.000,00	38.965.150,00	(1.764.850,00)	95,66	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	40.730.000,00	38.965.150,00	(1.764.850,00)	95,66	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.730.000,00	38.965.150,00	(1.764.850,00)	95,66	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.730.000,00	38.965.150,00	(1.764.850,00)	95,66	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.730.000,00	28.185.100,00	(27.544.900,00)	50,57	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	55.730.000,00	28.185.100,00	(27.544.900,00)	50,57	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.730.000,00	28.185.100,00	(27.544.900,00)	50,57	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.730.000,00	28.185.100,00	(27.544.900,00)	50,57	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	584.068.641,00	521.610.984,00	(62.457.657,00)	89,30	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.965.373,00	29.020.395,00	(944.978,00)	96,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.965.373,00	29.020.395,00	(944.978,00)	96,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.965.373,00	29.020.395,00	(944.978,00)	96,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	165.786.506,00	165.182.000,00	(604.506,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	165.106.506,00	164.502.000,00	(604.506,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.106.506,00	164.502.000,00	(604.506,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	57.913.584,00	55.862.970,00	(2.050.614,00)	96,45	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	57.913.584,00	55.862.970,00	(2.050.614,00)	96,45	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.913.584,00	55.862.970,00	(2.050.614,00)	96,45	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.903.173,00	71.869.170,00	(3.034.003,00)	95,94	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.903.173,00	71.869.170,00	(3.034.003,00)	95,94	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.903.173,00	71.869.170,00	(3.034.003,00)	95,94	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.976.350,00	48.792.414,00	(1.183.936,00)	97,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.976.350,00	48.792.414,00	(1.183.936,00)	97,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.976.350,00	48.792.414,00	(1.183.936,00)	97,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	49.994.000,00	17.233.717,00	(32.760.283,00)	34,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	49.994.000,00	17.233.717,00	(32.760.283,00)	34,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.994.000,00	17.233.717,00	(32.760.283,00)	34,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	115.529.655,00	93.690.318,00	(21.839.337,00)	81,09	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	115.529.655,00	93.690.318,00	(21.839.337,00)	81,09	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.529.655,00	93.690.318,00	(21.839.337,00)	81,09	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.927.350,00	59.677.600,00	(249.750,00)	99,58	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	59.927.350,00	59.677.600,00	(249.750,00)	99,58	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	59.247.350,00	58.997.600,00	(249.750,00)	99,57	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.247.350,00	58.997.600,00	(249.750,00)	99,57	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	577.685.800,00	526.465.354,00	(51.220.446,00)	91,13	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	86.733.000,00	82.599.754,00	(4.133.246,00)	95,23	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.733.000,00	82.599.754,00	(4.133.246,00)	95,23	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.733.000,00	82.599.754,00	(4.133.246,00)	95,23	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	490.952.800,00	443.865.600,00	(47.087.200,00)	90,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	490.952.800,00	443.865.600,00	(47.087.200,00)	90,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.952.800,00	443.865.600,00	(47.087.200,00)	90,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	568.020.000,00	562.726.192,00	(5.293.808,00)	99,06	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	163.070.000,00	158.613.642,00	(4.456.358,00)	97,26	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	163.070.000,00	158.613.642,00	(4.456.358,00)	97,26	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.070.000,00	158.613.642,00	(4.456.358,00)	97,26	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	380.550.000,00	379.812.000,00	(738.000,00)	99,80	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	380.550.000,00	379.812.000,00	(738.000,00)	99,80	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.550.000,00	379.812.000,00	(738.000,00)	99,80	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.400.000,00	24.300.550,00	(99.450,00)	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.400.000,00	24.300.550,00	(99.450,00)	99,59	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.300.550,00	(99.450,00)	99,59	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.151.697.392,00	1.834.930.635,00	(316.766.757,00)	85,27	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	734.681.692,00	488.346.321,00	(246.335.371,00)	66,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	33.129.000,00	16.388.000,00	(16.741.000,00)	49,46	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.129.000,00	16.388.000,00	(16.741.000,00)	49,46	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.129.000,00	16.388.000,00	(16.741.000,00)	49,46	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0007		PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	88.196.000,00	76.510.625,00	(11.685.375,00)	86,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	88.196.000,00	76.510.625,00	(11.685.375,00)	86,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.196.000,00	16.510.625,00	(11.685.375,00)	58,55	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0008		STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI KABUPATEN/KOTA	187.923.000,00	128.142.913,00	(59.780.087,00)	68,18	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	187.923.000,00	128.142.913,00	(59.780.087,00)	68,18	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.923.000,00	128.142.913,00	(59.780.087,00)	68,18	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0009		PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	115.031.500,00	97.228.436,00	(17.803.064,00)	84,52	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	115.031.500,00	97.228.436,00	(17.803.064,00)	84,52	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.381.500,00	80.911.436,00	(17.470.064,00)	82,24	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	16.650.000,00	16.317.000,00	(333.000,00)	98,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0010		PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA	232.226.000,00	104.085.000,00	(128.141.000,00)	44,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	232.226.000,00	104.085.000,00	(128.141.000,00)	44,82	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.226.000,00	4.085.000,00	(28.141.000,00)	12,67	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0010	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	50,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0013		PENYUSUNAN PROGNOSA NERACA PANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA	33.912.996,00	30.320.132,00	(3.592.864,00)	89,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	33.912.996,00	30.320.132,00	(3.592.864,00)	89,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.912.996,00	30.320.132,00	(3.592.864,00)	89,40	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0015		PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	21.155.000,00	14.447.000,00	(6.708.000,00)	68,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	21.155.000,00	14.447.000,00	(6.708.000,00)	68,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.155.000,00	14.447.000,00	(6.708.000,00)	68,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0016		PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	23.108.196,00	21.224.215,00	(1.883.981,00)	91,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	23.108.196,00	21.224.215,00	(1.883.981,00)	91,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.108.196,00	21.224.215,00	(1.883.981,00)	91,84	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	195.757.000,00	158.460.900,00	(37.296.100,00)	80,94	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	139.380.000,00	129.052.900,00	(10.327.100,00)	92,59	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	139.380.000,00	129.052.900,00	(10.327.100,00)	92,59	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.380.000,00	129.052.900,00	(10.327.100,00)	92,59	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0004		PEMELIHARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	56.377.000,00	29.408.000,00	(26.969.000,00)	52,16	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.837.000,00	29.408.000,00	(25.429.000,00)	53,62	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.837.000,00	29.408.000,00	(25.429.000,00)	53,62	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	0,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	0,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	1.221.258.700,00	1.188.123.414,00	(33.135.286,00)	97,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	47.341.500,00	40.613.100,00	(6.728.400,00)	85,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.341.500,00	40.613.100,00	(6.728.400,00)	85,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.341.500,00	40.613.100,00	(6.728.400,00)	85,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	1.173.917.200,00	1.147.510.314,00	(26.406.886,00)	97,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.173.917.200,00	1.147.510.314,00	(26.406.886,00)	97,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.917.200,00	97.510.314,00	(26.406.886,00)	78,68	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.987.545,00	35.035.642,00	(5.951.903,00)	85,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	40.987.545,00	35.035.642,00	(5.951.903,00)	85,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	40.987.545,00	35.035.642,00	(5.951.903,00)	85,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.987.545,00	35.035.642,00	(5.951.903,00)	85,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.987.545,00	35.035.642,00	(5.951.903,00)	85,47	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	163.727.019,00	136.593.249,00	(27.133.770,00)	83,42	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.727.019,00	136.593.249,00	(27.133.770,00)	83,42	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0004		REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.825.000,00	39.005.655,00	(5.819.345,00)	87,01	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.825.000,00	39.005.655,00	(5.819.345,00)	87,01	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.825.000,00	39.005.655,00	(5.819.345,00)	87,01	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0006		REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	26.991.000,00	22.641.706,00	(4.349.294,00)	83,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.991.000,00	22.641.706,00	(4.349.294,00)	83,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.991.000,00	22.641.706,00	(4.349.294,00)	83,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.911.019,00	74.945.888,00	(16.965.131,00)	81,54	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	91.911.019,00	74.945.888,00	(16.965.131,00)	81,54	
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.911.019,00	74.945.888,00	(16.965.131,00)	81,54	
				JUMLAH BELANJA	10.613.654.680,00	8.970.739.189,00	(1.642.915.491,00)	84,52	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.613.654.680,00)	(8.970.739.189,00)	1.642.915.491,00	84,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.613.654.680,00)	(8.970.739.189,00)	1.642.915.491,00	84,52	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.13.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.630.000.000,00	2.241.331.000,00	611.331.000,00	137,50	
	2.11.0.00.0.00.13.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.630.000.000,00	2.241.331.000,00	611.331.000,00	137,50	
	2.11.0.00.0.00.13.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.630.000.000,00	2.241.331.000,00	611.331.000,00	137,50	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.630.000.000,00	2.241.331.000,00	611.331.000,00	137,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	57.281.888.783,00	51.568.224.023,34	(5.713.664.759,66)	90,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.785.592.631,00	34.464.719.732,00	(4.320.872.899,00)	88,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	63.682.762,00	11.485.500,00	(52.197.262,00)	18,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	22.494.000,00	5.518.500,00	(16.975.500,00)	24,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.494.000,00	5.518.500,00	(16.975.500,00)	24,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.494.000,00	5.518.500,00	(16.975.500,00)	24,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.688.762,00	5.967.000,00	(2.721.762,00)	68,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.688.762,00	5.967.000,00	(2.721.762,00)	68,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.688.762,00	5.967.000,00	(2.721.762,00)	68,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	(1.568.224.394,00)	86,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	(1.568.224.394,00)	86,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	(1.568.224.394,00)	86,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	(1.568.224.394,00)	86,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	99.116.950,00	92.655.113,00	(6.461.837,00)	93,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	99.116.950,00	92.655.113,00	(6.461.837,00)	93,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.116.950,00	92.655.113,00	(6.461.837,00)	93,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.116.950,00	92.655.113,00	(6.461.837,00)	93,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	38.256.000,00	36.983.200,00	(1.272.800,00)	96,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38.256.000,00	36.983.200,00	(1.272.800,00)	96,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.256.000,00	36.983.200,00	(1.272.800,00)	96,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.256.000,00	36.983.200,00	(1.272.800,00)	96,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	981.678.574,00	795.874.349,00	(185.804.225,00)	81,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.998.873,00	27.496.898,00	(2.501.975,00)	91,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.998.873,00	27.496.898,00	(2.501.975,00)	91,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.873,00	27.496.898,00	(2.501.975,00)	91,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	494.585.900,00	462.917.210,00	(31.668.690,00)	93,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	489.385.900,00	457.717.210,00	(31.668.690,00)	93,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.385.900,00	457.717.210,00	(31.668.690,00)	93,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	59.992.272,00	42.915.700,00	(17.076.572,00)	71,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.992.272,00	42.915.700,00	(17.076.572,00)	71,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.272,00	42.915.700,00	(17.076.572,00)	71,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	99.998.972,00	44.926.934,00	(55.072.038,00)	44,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.998.972,00	44.926.934,00	(55.072.038,00)	44,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.998.972,00	44.926.934,00	(55.072.038,00)	44,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.716.561,00	48.424.459,00	(6.292.102,00)	88,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.716.561,00	48.424.459,00	(6.292.102,00)	88,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.716.561,00	48.424.459,00	(6.292.102,00)	88,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.000.000,00	510.000,00	(49.490.000,00)	1,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	510.000,00	(49.490.000,00)	1,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	510.000,00	(49.490.000,00)	1,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	152.385.996,00	128.883.148,00	(23.502.848,00)	84,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	152.385.996,00	128.883.148,00	(23.502.848,00)	84,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.385.996,00	128.883.148,00	(23.502.848,00)	84,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	60.000.000,00	48.536.970,00	(11.463.030,00)	80,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	60.000.000,00	48.536.970,00	(11.463.030,00)	80,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	48.536.970,00	(11.463.030,00)	80,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	48.536.970,00	(11.463.030,00)	80,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.605.893.152,00	23.261.237.697,00	(2.344.655.455,00)	90,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	442.467.252,00	306.861.497,00	(135.605.755,00)	69,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	442.467.252,00	306.861.497,00	(135.605.755,00)	69,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.467.252,00	306.861.497,00	(135.605.755,00)	69,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	25.163.425.900,00	22.954.376.200,00	(2.209.049.700,00)	91,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.163.425.900,00	22.954.376.200,00	(2.209.049.700,00)	91,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.163.425.900,00	22.954.376.200,00	(2.209.049.700,00)	91,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	701.341.865,00	550.547.969,00	(150.793.896,00)	78,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	263.240.000,00	158.540.161,00	(104.699.839,00)	60,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	263.240.000,00	158.540.161,00	(104.699.839,00)	60,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.240.000,00	158.540.161,00	(104.699.839,00)	60,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	266.054.559,00	257.934.202,00	(8.120.357,00)	96,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	266.054.559,00	257.934.202,00	(8.120.357,00)	96,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.054.559,00	257.934.202,00	(8.120.357,00)	96,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	172.047.306,00	134.073.606,00	(37.973.700,00)	77,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	172.047.306,00	134.073.606,00	(37.973.700,00)	77,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.047.306,00	134.073.606,00	(37.973.700,00)	77,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	397.795.000,00	389.145.879,00	(8.649.121,00)	97,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	397.795.000,00	389.145.879,00	(8.649.121,00)	97,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02.2.02.0005		PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	397.795.000,00	389.145.879,00	(8.649.121,00)	97,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	397.795.000,00	389.145.879,00	(8.649.121,00)	97,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.795.000,00	389.145.879,00	(8.649.121,00)	97,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.060.693.174,00	900.552.842,00	(160.140.332,00)	84,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.047.851.174,00	889.960.742,00	(157.890.432,00)	84,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0004		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	62.648.000,00	53.394.022,00	(9.253.978,00)	85,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	62.648.000,00	53.394.022,00	(9.253.978,00)	85,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.648.000,00	53.394.022,00	(9.253.978,00)	85,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0009		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMANTAU KUALITAS LINGKUNGAN DI KABUPATEN/KOTA	70.938.000,00	0,00	(70.938.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.938.000,00	0,00	(70.938.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.938.000,00	0,00	(70.938.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0011		PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	49.023.000,00	44.925.174,00	(4.097.826,00)	91,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	49.023.000,00	44.925.174,00	(4.097.826,00)	91,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.023.000,00	44.925.174,00	(4.097.826,00)	91,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0012		PENGAMBILAN CONTOH UJI DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN	204.786.000,00	202.018.182,00	(2.767.818,00)	98,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	204.786.000,00	202.018.182,00	(2.767.818,00)	98,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.786.000,00	202.018.182,00	(2.767.818,00)	98,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0014		PELAKSANAAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TINGKAT KABUPATEN/KOTA	51.798.000,00	26.749.095,00	(25.048.905,00)	51,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	51.798.000,00	26.749.095,00	(25.048.905,00)	51,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.798.000,00	26.749.095,00	(25.048.905,00)	51,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	608.658.174,00	562.874.269,00	(45.783.905,00)	92,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	465.801.174,00	421.021.819,00	(44.779.355,00)	90,38	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.801.174,00	421.021.819,00	(44.779.355,00)	90,38	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	142.857.000,00	141.852.450,00	(1.004.550,00)	99,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.857.000,00	141.852.450,00	(1.004.550,00)	99,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.03		PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	12.842.000,00	10.592.100,00	(2.249.900,00)	82,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.03.0007		KOORDINASI DAN SINKRONISASI RESTORASI	12.842.000,00	10.592.100,00	(2.249.900,00)	82,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.842.000,00	10.592.100,00	(2.249.900,00)	82,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.842.000,00	10.592.100,00	(2.249.900,00)	82,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.607.945.250,00	3.105.579.234,00	(502.366.016,00)	86,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	3.607.945.250,00	3.105.579.234,00	(502.366.016,00)	86,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	2.156.285.250,00	1.684.617.234,00	(471.668.016,00)	78,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.658.172.000,00	1.187.254.284,00	(470.917.716,00)	71,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.658.172.000,00	1.187.254.284,00	(470.917.716,00)	71,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	498.113.250,00	497.362.950,00	(750.300,00)	99,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	498.113.250,00	497.362.950,00	(750.300,00)	99,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0007		PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	1.451.660.000,00	1.420.962.000,00	(30.698.000,00)	97,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.451.320.000,00	1.420.622.000,00	(30.698.000,00)	97,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.451.320.000,00	1.420.622.000,00	(30.698.000,00)	97,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.423.000,00	103.394.558,00	(24.028.442,00)	81,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.423.000,00	103.394.558,00	(24.028.442,00)	81,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	62.369.000,00	56.893.626,00	(5.475.374,00)	91,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.369.000,00	56.893.626,00	(5.475.374,00)	91,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.369.000,00	56.893.626,00	(5.475.374,00)	91,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0009		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	65.054.000,00	46.500.932,00	(18.553.068,00)	71,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.054.000,00	46.500.932,00	(18.553.068,00)	71,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.054.000,00	46.500.932,00	(18.553.068,00)	71,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.711.000,00	32.603.811,00	(17.107.189,00)	65,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.711.000,00	32.603.811,00	(17.107.189,00)	65,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	49.711.000,00	32.603.811,00	(17.107.189,00)	65,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.711.000,00	32.603.811,00	(17.107.189,00)	65,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.711.000,00	32.603.811,00	(17.107.189,00)	65,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.114.000,00	52.108.704,00	(32.005.296,00)	61,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	84.114.000,00	52.108.704,00	(32.005.296,00)	61,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	84.114.000,00	52.108.704,00	(32.005.296,00)	61,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	84.114.000,00	52.108.704,00	(32.005.296,00)	61,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.114.000,00	52.108.704,00	(32.005.296,00)	61,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.168.614.728,00	12.520.119.263,34	(648.495.464,66)	95,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	13.168.614.728,00	12.520.119.263,34	(648.495.464,66)	95,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.908.044.153,00	8.561.733.625,00	(346.310.528,00)	96,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.620.243.903,00	5.519.581.620,00	(100.662.283,00)	98,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.620.243.903,00	5.519.581.620,00	(100.662.283,00)	98,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.287.800.250,00	3.042.152.005,00	(245.648.245,00)	92,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.287.800.250,00	3.042.152.005,00	(245.648.245,00)	92,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0008		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	61.154.068,00	(13.845.932,00)	81,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	61.154.068,00	(13.845.932,00)	81,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	61.154.068,00	(13.845.932,00)	81,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	4.185.570.575,00	3.897.231.570,34	(288.339.004,66)	93,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.421.055.700,00	1.308.002.868,00	(113.052.832,00)	92,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.381.055.700,00	1.271.902.867,00	(109.152.833,00)	92,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	36.100.001,00	(3.899.999,00)	90,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	2.764.514.875,00	2.589.228.702,34	(175.286.172,66)	93,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.315.000.000,00	2.140.814.998,00	(174.185.002,00)	92,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449.514.875,00	448.413.704,34	(1.101.170,66)	99,75	
				JUMLAH BELANJA	57.281.888.783,00	51.568.224.023,34	(5.713.664.759,66)	90,02	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(55.651.888.783,00)	(49.426.893.023,34)	6.324.995.759,66	88,63	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(55.651.888.783,00)	(49.426.893.023,34)	6.324.995.759,66	88,63	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	22.560.453.778,00	19.979.309.287,00	(2.581.144.491,00)	88,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.243.483.648,00	14.524.638.480,00	(1.718.845.168,00)	89,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	72.897.378,00	56.959.380,00	(15.937.998,00)	78,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	37.897.378,00	27.369.275,00	(10.528.103,00)	72,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.897.378,00	27.369.275,00	(10.528.103,00)	72,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.897.378,00	27.369.275,00	(10.528.103,00)	72,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.000.000,00	9.042.150,00	(957.850,00)	90,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.042.150,00	(957.850,00)	90,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.042.150,00	(957.850,00)	90,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0008		PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	25.000.000,00	20.547.955,00	(4.452.045,00)	82,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	20.547.955,00	(4.452.045,00)	82,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.547.955,00	(4.452.045,00)	82,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	(1.203.275.974,00)	88,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	(1.203.275.974,00)	88,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	(1.203.275.974,00)	88,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	(1.203.275.974,00)	88,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	97.386.000,00	62.900.400,00	(34.485.600,00)	64,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	97.386.000,00	62.900.400,00	(34.485.600,00)	64,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	97.386.000,00	62.900.400,00	(34.485.600,00)	64,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.386.000,00	62.900.400,00	(34.485.600,00)	64,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	820.841.460,00	778.899.864,00	(41.941.596,00)	94,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	28.295.778,00	(1.704.222,00)	94,31	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.295.778,00	(1.704.222,00)	94,31	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.295.778,00	(1.704.222,00)	94,31	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	119.971.800,00	117.596.380,00	(2.375.420,00)	98,02	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	119.971.800,00	117.596.380,00	(2.375.420,00)	98,02	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.971.800,00	117.596.380,00	(2.375.420,00)	98,02	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.000.000,00	54.779.610,00	(5.220.390,00)	91,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	54.779.610,00	(5.220.390,00)	91,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	54.779.610,00	(5.220.390,00)	91,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	200.000.000,00	195.289.000,00	(4.711.000,00)	97,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	195.289.000,00	(4.711.000,00)	97,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	195.289.000,00	(4.711.000,00)	97,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	70.936.500,00	64.298.164,00	(6.638.336,00)	90,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.936.500,00	64.298.164,00	(6.638.336,00)	90,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.936.500,00	64.298.164,00	(6.638.336,00)	90,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.000.000,00	44.525.989,00	(5.474.011,00)	89,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.525.989,00	(5.474.011,00)	89,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.525.989,00	(5.474.011,00)	89,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	249.933.160,00	234.154.943,00	(15.778.217,00)	93,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	249.933.160,00	234.154.943,00	(15.778.217,00)	93,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.933.160,00	234.154.943,00	(15.778.217,00)	93,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	400.000.000,00	398.680.000,00	(1.320.000,00)	99,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	400.000.000,00	398.680.000,00	(1.320.000,00)	99,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	398.680.000,00	(1.320.000,00)	99,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.680.000,00	(1.320.000,00)	99,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.716.192.223,00	1.406.245.857,00	(309.946.366,00)	81,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	488.127.779,00	404.947.057,00	(83.180.722,00)	82,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	488.127.779,00	404.947.057,00	(83.180.722,00)	82,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.127.779,00	404.947.057,00	(83.180.722,00)	82,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.228.064.444,00	1.001.298.800,00	(226.765.644,00)	81,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.228.064.444,00	1.001.298.800,00	(226.765.644,00)	81,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.228.064.444,00	1.001.298.800,00	(226.765.644,00)	81,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.537.549.400,00	2.425.611.766,00	(111.937.634,00)	95,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	207.610.000,00	197.039.495,00	(10.570.505,00)	94,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	207.610.000,00	197.039.495,00	(10.570.505,00)	94,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.610.000,00	197.039.495,00	(10.570.505,00)	94,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.249.930.600,00	2.156.548.811,00	(93.381.789,00)	95,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.930.600,00	96.382.867,00	(3.547.733,00)	96,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.930.600,00	96.382.867,00	(3.547.733,00)	96,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.150.000.000,00	2.060.165.944,00	(89.834.056,00)	95,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.100.000.000,00	2.010.770.875,00	(89.229.125,00)	95,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.395.069,00	(604.931,00)	98,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	80.008.800,00	72.023.460,00	(7.985.340,00)	90,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	80.008.800,00	72.023.460,00	(7.985.340,00)	90,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.008.800,00	72.023.460,00	(7.985.340,00)	90,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	452.701.919,00	364.238.872,00	(88.463.047,00)	80,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	325.986.500,00	263.928.227,00	(62.058.273,00)	80,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0001		PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	34.365.000,00	33.542.101,00	(822.899,00)	97,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.365.000,00	33.542.101,00	(822.899,00)	97,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.365.000,00	33.542.101,00	(822.899,00)	97,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	203.778.000,00	144.561.351,00	(59.216.649,00)	70,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	203.778.000,00	144.561.351,00	(59.216.649,00)	70,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.778.000,00	144.561.351,00	(59.216.649,00)	70,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0003		PENYELESAIAN MASALAH PENDAFTARAN PENDUDUK	47.839.500,00	47.461.000,00	(378.500,00)	99,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.839.500,00	47.461.000,00	(378.500,00)	99,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.839.500,00	47.461.000,00	(378.500,00)	99,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0005		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	40.004.000,00	38.363.775,00	(1.640.225,00)	95,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.004.000,00	38.363.775,00	(1.640.225,00)	95,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.004.000,00	38.363.775,00	(1.640.225,00)	95,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	126.715.419,00	100.310.645,00	(26.404.774,00)	79,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	126.715.419,00	100.310.645,00	(26.404.774,00)	79,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.715.419,00	100.310.645,00	(26.404.774,00)	79,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.715.419,00	100.310.645,00	(26.404.774,00)	79,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.141.402,00	249.906.799,00	(5.234.603,00)	97,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	163.297.000,00	160.152.813,00	(3.144.187,00)	98,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	163.297.000,00	160.152.813,00	(3.144.187,00)	98,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	163.297.000,00	160.152.813,00	(3.144.187,00)	98,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.297.000,00	160.152.813,00	(3.144.187,00)	98,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	91.844.402,00	89.753.986,00	(2.090.416,00)	97,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02.0006		FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	91.844.402,00	89.753.986,00	(2.090.416,00)	97,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	91.844.402,00	89.753.986,00	(2.090.416,00)	97,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.844.402,00	89.753.986,00	(2.090.416,00)	97,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.557.207.109,00	4.788.699.561,00	(768.507.548,00)	86,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	198.522.651,00	85.337.125,00	(113.185.526,00)	42,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	38.377.950,00	37.510.403,00	(867.547,00)	97,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.377.950,00	37.510.403,00	(867.547,00)	97,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.377.950,00	37.510.403,00	(867.547,00)	97,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0002		KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	160.144.701,00	47.826.722,00	(112.317.979,00)	29,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.144.701,00	47.826.722,00	(112.317.979,00)	29,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.144.701,00	47.826.722,00	(112.317.979,00)	29,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02		PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.486.339.681,00	4.059.389.148,00	(426.950.533,00)	90,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02.0001		PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.486.339.681,00	4.059.389.148,00	(426.950.533,00)	90,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.573.873.426,00	1.242.564.428,00	(331.308.998,00)	78,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.573.873.426,00	1.242.564.428,00	(331.308.998,00)	78,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.912.466.255,00	2.816.824.720,00	(95.641.535,00)	96,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.853.671.775,00	2.758.167.880,00	(95.503.895,00)	96,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	58.794.480,00	58.656.840,00	(137.640,00)	99,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	527.541.432,00	311.835.404,00	(215.706.028,00)	59,11	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	358.448.800,00	168.983.851,00	(189.464.949,00)	47,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	358.448.800,00	168.983.851,00	(189.464.949,00)	47,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.448.800,00	168.983.851,00	(189.464.949,00)	47,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0004		PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	26.708.923,00	26.616.216,00	(92.707,00)	99,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.708.923,00	26.616.216,00	(92.707,00)	99,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.708.923,00	26.616.216,00	(92.707,00)	99,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0005		SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.361.000,00	3.649.600,00	(711.400,00)	83,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.361.000,00	3.649.600,00	(711.400,00)	83,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.361.000,00	3.649.600,00	(711.400,00)	83,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0007		KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	80.752.255,00	68.347.212,00	(12.405.043,00)	84,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	80.752.255,00	68.347.212,00	(12.405.043,00)	84,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.752.255,00	68.347.212,00	(12.405.043,00)	84,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0008		PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	57.270.454,00	44.238.525,00	(13.031.929,00)	77,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	57.270.454,00	44.238.525,00	(13.031.929,00)	77,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.270.454,00	44.238.525,00	(13.031.929,00)	77,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	344.803.345,00	332.137.884,00	(12.665.461,00)	96,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0001		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	45.869.845,00	45.431.796,00	(438.049,00)	99,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.869.845,00	45.431.796,00	(438.049,00)	99,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.869.845,00	45.431.796,00	(438.049,00)	99,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0003		BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN	298.933.500,00	286.706.088,00	(12.227.412,00)	95,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	298.933.500,00	286.706.088,00	(12.227.412,00)	95,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.933.500,00	286.706.088,00	(12.227.412,00)	95,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.919.700,00	51.825.575,00	(94.125,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.919.700,00	51.825.575,00	(94.125,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	51.919.700,00	51.825.575,00	(94.125,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.919.700,00	51.825.575,00	(94.125,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.919.700,00	51.825.575,00	(94.125,00)	99,81	
				JUMLAH BELANJA	22.560.453.778,00	19.979.309.287,00	(2.581.144.491,00)	88,55	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(22.560.453.778,00)	(19.979.309.287,00)	2.581.144.491,00	88,55	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.560.453.778,00)	(19.979.309.287,00)	2.581.144.491,00	88,55	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	17.707.159.264,00	14.819.043.722,00	(2.888.115.542,00)	83,68	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.637.532.451,00	6.657.861.553,00	(1.979.670.898,00)	77,08	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	123.204.300,00	99.459.212,00	(23.745.088,00)	80,72	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	68.834.300,00	59.730.580,00	(9.103.720,00)	86,77	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.834.300,00	59.730.580,00	(9.103.720,00)	86,77	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.834.300,00	59.730.580,00	(9.103.720,00)	86,77	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	22.820.000,00	18.136.800,00	(4.683.200,00)	79,47	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.820.000,00	18.136.800,00	(4.683.200,00)	79,47	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	18.136.800,00	(4.683.200,00)	79,47	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	31.550.000,00	21.591.832,00	(9.958.168,00)	68,43	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	31.550.000,00	21.591.832,00	(9.958.168,00)	68,43	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.550.000,00	21.591.832,00	(9.958.168,00)	68,43	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	(1.428.674.753,00)	76,59	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	(1.428.674.753,00)	76,59	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	(1.428.674.753,00)	76,59	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	(1.428.674.753,00)	76,59	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	43.925.000,00	43.319.240,00	(605.760,00)	98,62	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	43.925.000,00	43.319.240,00	(605.760,00)	98,62	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.925.000,00	43.319.240,00	(605.760,00)	98,62	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.925.000,00	43.319.240,00	(605.760,00)	98,62	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	99.250.000,00	64.000.000,00	(35.250.000,00)	64,48	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	99.250.000,00	64.000.000,00	(35.250.000,00)	64,48	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.250.000,00	64.000.000,00	(35.250.000,00)	64,48	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	64.000.000,00	(35.250.000,00)	64,48	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	872.993.679,00	742.917.071,00	(130.076.608,00)	85,09	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.787.628,00	28.709.825,00	(1.077.803,00)	96,38	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.787.628,00	28.709.825,00	(1.077.803,00)	96,38	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.787.628,00	28.709.825,00	(1.077.803,00)	96,38	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	172.570.715,00	170.470.800,00	(2.099.915,00)	98,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	171.890.715,00	169.790.800,00	(2.099.915,00)	98,77	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.890.715,00	169.790.800,00	(2.099.915,00)	98,77	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.004.582,00	52.790.700,00	(7.213.882,00)	87,97	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.004.582,00	52.790.700,00	(7.213.882,00)	87,97	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.004.582,00	52.790.700,00	(7.213.882,00)	87,97	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	168.738.213,00	132.759.938,00	(35.978.275,00)	78,67	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	168.738.213,00	132.759.938,00	(35.978.275,00)	78,67	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.738.213,00	132.759.938,00	(35.978.275,00)	78,67	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	102.531.541,00	41.381.660,00	(61.149.881,00)	40,35	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	102.531.541,00	41.381.660,00	(61.149.881,00)	40,35	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.531.541,00	41.381.660,00	(61.149.881,00)	40,35	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	36.195.000,00	(3.805.000,00)	90,48	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	36.195.000,00	(3.805.000,00)	90,48	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	36.195.000,00	(3.805.000,00)	90,48	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	49.986.000,00	43.946.000,00	(6.040.000,00)	87,91	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	49.986.000,00	43.946.000,00	(6.040.000,00)	87,91	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.986.000,00	43.946.000,00	(6.040.000,00)	87,91	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	249.375.000,00	236.663.148,00	(12.711.852,00)	94,90	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	249.375.000,00	236.663.148,00	(12.711.852,00)	94,90	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.375.000,00	236.663.148,00	(12.711.852,00)	94,90	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	205.223.030,00	186.623.803,00	(18.599.227,00)	90,93	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	131.246.400,00	118.100.803,00	(13.145.597,00)	89,98	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.246.400,00	118.100.803,00	(13.145.597,00)	89,98	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.246.400,00	118.100.803,00	(13.145.597,00)	89,98	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	73.976.630,00	68.523.000,00	(5.453.630,00)	92,62	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	73.296.630,00	67.843.000,00	(5.453.630,00)	92,55	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.296.630,00	67.843.000,00	(5.453.630,00)	92,55	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	749.720.996,00	518.799.912,00	(230.921.084,00)	69,19	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	176.571.396,00	109.989.512,00	(66.581.884,00)	62,29	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	176.571.396,00	109.989.512,00	(66.581.884,00)	62,29	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.571.396,00	109.989.512,00	(66.581.884,00)	62,29	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	573.149.600,00	408.810.400,00	(164.339.200,00)	71,32	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	573.149.600,00	408.810.400,00	(164.339.200,00)	71,32	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.149.600,00	408.810.400,00	(164.339.200,00)	71,32	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	440.253.070,00	328.454.692,00	(111.798.378,00)	74,60	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	318.339.570,00	228.059.192,00	(90.280.378,00)	71,64	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	318.339.570,00	228.059.192,00	(90.280.378,00)	71,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.339.570,00	228.059.192,00	(90.280.378,00)	71,64	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	91.025.000,00	90.803.000,00	(222.000,00)	99,75	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	91.025.000,00	90.803.000,00	(222.000,00)	99,75	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.025.000,00	90.803.000,00	(222.000,00)	99,75	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	30.888.500,00	9.592.500,00	(21.296.000,00)	31,05	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	30.888.500,00	9.592.500,00	(21.296.000,00)	31,05	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.888.500,00	9.592.500,00	(21.296.000,00)	31,05	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	97.640.900,00	77.942.710,00	(19.698.190,00)	79,82	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	97.640.900,00	77.942.710,00	(19.698.190,00)	79,82	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0001		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA	53.747.000,00	47.627.100,00	(6.119.900,00)	88,61	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.747.000,00	47.627.100,00	(6.119.900,00)	88,61	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.747.000,00	47.627.100,00	(6.119.900,00)	88,61	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0002		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA	43.893.900,00	30.315.610,00	(13.578.290,00)	69,06	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.893.900,00	30.315.610,00	(13.578.290,00)	69,06	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.893.900,00	30.315.610,00	(13.578.290,00)	69,06	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	(540.254.987,00)	91,22	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	(540.254.987,00)	91,22	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	145.701.198,00	14.013.900,00	(131.687.298,00)	9,61	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	145.701.198,00	14.013.900,00	(131.687.298,00)	9,61	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.701.198,00	14.013.900,00	(131.687.298,00)	9,61	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	251.788.075,00	206.504.395,00	(45.283.680,00)	82,01	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	251.788.075,00	206.504.395,00	(45.283.680,00)	82,01	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.788.075,00	206.504.395,00	(45.283.680,00)	82,01	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	143.434.000,00	91.343.800,00	(52.090.200,00)	63,68	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.434.000,00	91.343.800,00	(52.090.200,00)	63,68	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.434.000,00	91.343.800,00	(52.090.200,00)	63,68	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0005		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	5.161.078.240,00	4.918.675.350,00	(242.402.890,00)	95,30	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.161.078.240,00	4.918.675.350,00	(242.402.890,00)	95,30	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.161.078.240,00	4.918.675.350,00	(242.402.890,00)	95,30	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0007		EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA	39.952.000,00	36.080.262,00	(3.871.738,00)	90,30	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.952.000,00	36.080.262,00	(3.871.738,00)	90,30	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.952.000,00	36.080.262,00	(3.871.738,00)	90,30	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	152.094.000,00	149.305.619,00	(2.788.381,00)	98,16	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	152.094.000,00	149.305.619,00	(2.788.381,00)	98,16	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.094.000,00	149.305.619,00	(2.788.381,00)	98,16	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0011		FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	52.675.000,00	21.293.700,00	(31.381.300,00)	40,42	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	52.675.000,00	21.293.700,00	(31.381.300,00)	40,42	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.675.000,00	21.293.700,00	(31.381.300,00)	40,42	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0013		FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	55.464.000,00	41.096.600,00	(14.367.400,00)	74,09	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	55.464.000,00	41.096.600,00	(14.367.400,00)	74,09	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.464.000,00	41.096.600,00	(14.367.400,00)	74,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0015		FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	55.464.000,00	44.459.200,00	(11.004.800,00)	80,15	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	55.464.000,00	44.459.200,00	(11.004.800,00)	80,15	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.464.000,00	44.459.200,00	(11.004.800,00)	80,15	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0018		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	96.888.000,00	91.510.700,00	(5.377.300,00)	94,44	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	96.888.000,00	91.510.700,00	(5.377.300,00)	94,44	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.888.000,00	91.510.700,00	(5.377.300,00)	94,44	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	(348.491.467,00)	87,63	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	(348.491.467,00)	87,63	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0001		IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.046.484.250,00	979.310.100,00	(67.174.150,00)	93,58	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.046.484.250,00	979.310.100,00	(67.174.150,00)	93,58	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.046.484.250,00	979.310.100,00	(67.174.150,00)	93,58	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	117.581.450,00	109.474.853,00	(8.106.597,00)	93,10	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	117.581.450,00	109.474.853,00	(8.106.597,00)	93,10	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.581.450,00	109.474.853,00	(8.106.597,00)	93,10	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0005		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	152.736.225,00	113.937.289,00	(38.798.936,00)	74,59	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	152.736.225,00	113.937.289,00	(38.798.936,00)	74,59	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.736.225,00	113.937.289,00	(38.798.936,00)	74,59	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	482.682.858,00	349.272.000,00	(133.410.858,00)	72,36	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	482.682.858,00	349.272.000,00	(133.410.858,00)	72,36	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.682.858,00	349.272.000,00	(133.410.858,00)	72,36	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0007		FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	91.272.800,00	88.026.926,00	(3.245.874,00)	96,44	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	91.272.800,00	88.026.926,00	(3.245.874,00)	96,44	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.272.800,00	88.026.926,00	(3.245.874,00)	96,44	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	926.689.817,00	828.934.765,00	(97.755.052,00)	89,45	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	926.689.817,00	828.934.765,00	(97.755.052,00)	89,45	
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.689.817,00	828.934.765,00	(97.755.052,00)	89,45	
				JUMLAH BELANJA	17.707.159.264,00	14.819.043.722,00	(2.888.115.542,00)	83,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.707.159.264,00)	(14.819.043.722,00)	2.888.115.542,00	83,68	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.707.159.264,00)	(14.819.043.722,00)	2.888.115.542,00	83,68	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	22.894.940.858,00	19.966.432.524,74	(2.928.508.333,26)	87,20	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.873.558.262,00	10.404.568.862,00	(1.468.989.400,00)	87,62	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	51.105.000,00	50.997.310,00	(107.690,00)	99,78	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	41.105.000,00	41.049.310,00	(55.690,00)	99,86	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.105.000,00	41.049.310,00	(55.690,00)	99,86	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.105.000,00	41.049.310,00	(55.690,00)	99,86	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.000.000,00	9.948.000,00	(52.000,00)	99,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.948.000,00	(52.000,00)	99,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.948.000,00	(52.000,00)	99,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	(1.128.337.387,00)	88,26	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	(1.128.337.387,00)	88,26	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	(1.128.337.387,00)	88,26	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	(1.128.337.387,00)	88,26	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	61.677.000,00	53.697.600,00	(7.979.400,00)	87,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	61.677.000,00	53.697.600,00	(7.979.400,00)	87,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	61.677.000,00	53.697.600,00	(7.979.400,00)	87,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.677.000,00	53.697.600,00	(7.979.400,00)	87,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	574.853.977,00	549.147.732,00	(25.706.245,00)	95,52	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.952.255,00	29.261.000,00	(691.255,00)	97,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.952.255,00	29.261.000,00	(691.255,00)	97,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.952.255,00	29.261.000,00	(691.255,00)	97,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	119.777.726,00	117.671.557,00	(2.106.169,00)	98,24	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	119.097.726,00	116.991.557,00	(2.106.169,00)	98,23	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.097.726,00	116.991.557,00	(2.106.169,00)	98,23	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	49.996.200,00	43.195.300,00	(6.800.900,00)	86,39	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.996.200,00	43.195.300,00	(6.800.900,00)	86,39	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.200,00	43.195.300,00	(6.800.900,00)	86,39	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.680.000,00	100.360.734,00	(319.266,00)	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.680.000,00	100.360.734,00	(319.266,00)	99,68	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.680.000,00	100.360.734,00	(319.266,00)	99,68	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.173.000,00	37.360.050,00	(4.812.950,00)	88,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.173.000,00	37.360.050,00	(4.812.950,00)	88,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.173.000,00	37.360.050,00	(4.812.950,00)	88,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,68	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,68	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,68	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000,00	22.251.500,00	(2.748.500,00)	89,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.251.500,00	(2.748.500,00)	89,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.251.500,00	(2.748.500,00)	89,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	167.274.796,00	159.172.591,00	(8.102.205,00)	95,15	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	167.274.796,00	159.172.591,00	(8.102.205,00)	95,15	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.274.796,00	159.172.591,00	(8.102.205,00)	95,15	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	697.767.200,00	695.397.692,00	(2.369.508,00)	99,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	638.880.000,00	638.879.693,00	(307,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	638.880.000,00	638.879.693,00	(307,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	638.880.000,00	638.879.693,00	(307,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	58.887.200,00	56.517.999,00	(2.369.201,00)	95,97	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	58.207.200,00	55.837.999,00	(2.369.201,00)	95,92	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.207.200,00	55.837.999,00	(2.369.201,00)	95,92	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	569.811.625,00	358.291.553,00	(211.520.072,00)	62,87	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	223.182.825,00	108.157.153,00	(115.025.672,00)	48,46	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	223.182.825,00	108.157.153,00	(115.025.672,00)	48,46	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.182.825,00	108.157.153,00	(115.025.672,00)	48,46	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	346.628.800,00	250.134.400,00	(96.494.400,00)	72,16	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	346.628.800,00	250.134.400,00	(96.494.400,00)	72,16	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.628.800,00	250.134.400,00	(96.494.400,00)	72,16	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	301.044.000,00	208.074.902,00	(92.969.098,00)	69,11	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	224.070.000,00	132.000.902,00	(92.069.098,00)	58,91	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	224.070.000,00	132.000.902,00	(92.069.098,00)	58,91	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.070.000,00	132.000.902,00	(92.069.098,00)	58,91	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	63.554.000,00	62.874.000,00	(680.000,00)	98,93	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	63.554.000,00	62.874.000,00	(680.000,00)	98,93	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.554.000,00	62.874.000,00	(680.000,00)	98,93	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	13.420.000,00	13.200.000,00	(220.000,00)	98,36	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.420.000,00	13.200.000,00	(220.000,00)	98,36	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	13.200.000,00	(220.000,00)	98,36	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	578.531.200,00	412.407.366,00	(166.123.834,00)	71,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	31.141.500,00	28.339.600,00	(2.801.900,00)	91,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.01.0021		KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL	31.141.500,00	28.339.600,00	(2.801.900,00)	91,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	31.141.500,00	28.339.600,00	(2.801.900,00)	91,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.141.500,00	28.339.600,00	(2.801.900,00)	91,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	547.389.700,00	384.067.766,00	(163.321.934,00)	70,16	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0009		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	60.000.000,00	58.851.000,00	(1.149.000,00)	98,08	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.851.000,00	(1.149.000,00)	98,08	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.851.000,00	(1.149.000,00)	98,08	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0011		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA	72.309.700,00	72.309.700,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	72.309.700,00	72.309.700,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.309.700,00	72.309.700,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	235.080.000,00	79.207.066,00	(155.872.934,00)	33,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	235.080.000,00	79.207.066,00	(155.872.934,00)	33,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.080.000,00	79.207.066,00	(155.872.934,00)	33,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	180.000.000,00	173.700.000,00	(6.300.000,00)	96,50	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	173.700.000,00	(6.300.000,00)	96,50	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	173.700.000,00	(6.300.000,00)	96,50	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.140.180.896,00	6.279.572.586,74	(860.608.309,26)	87,94	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.142.853.000,00	699.812.125,74	(443.040.874,26)	61,23	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0009		PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SARANA KIE PROGRAM BANGGA KENCANA	172.250.000,00	163.758.142,74	(8.491.857,26)	95,07	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	85.233.000,00	77.062.735,00	(8.170.265,00)	90,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.233.000,00	77.062.735,00	(8.170.265,00)	90,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	87.017.000,00	86.695.407,74	(321.592,26)	99,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.017.000,00	86.695.407,74	(321.592,26)	99,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	375.000.000,00	112.268.000,00	(262.732.000,00)	29,93	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	112.268.000,00	(262.732.000,00)	29,93	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	112.268.000,00	(262.732.000,00)	29,93	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	335.483.000,00	232.478.117,00	(103.004.883,00)	69,29	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	335.483.000,00	232.478.117,00	(103.004.883,00)	69,29	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.483.000,00	232.478.117,00	(103.004.883,00)	69,29	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	100.000.000,00	91.248.300,00	(8.751.700,00)	91,24	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	91.248.300,00	(8.751.700,00)	91,24	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.248.300,00	(8.751.700,00)	91,24	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0013		KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	75.000.000,00	53.019.566,00	(21.980.434,00)	70,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	53.019.566,00	(21.980.434,00)	70,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	53.019.566,00	(21.980.434,00)	70,69	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	85.120.000,00	47.040.000,00	(38.080.000,00)	55,26	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	85.120.000,00	47.040.000,00	(38.080.000,00)	55,26	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.120.000,00	47.040.000,00	(38.080.000,00)	55,26	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	2.008.978.000,00	1.989.408.300,00	(19.569.700,00)	99,02	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	1.944.000.000,00	1.936.000.000,00	(8.000.000,00)	99,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.944.000.000,00	1.936.000.000,00	(8.000.000,00)	99,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.944.000.000,00	1.936.000.000,00	(8.000.000,00)	99,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0006		FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)	64.978.000,00	53.408.300,00	(11.569.700,00)	82,19	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	64.978.000,00	53.408.300,00	(11.569.700,00)	82,19	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.978.000,00	53.408.300,00	(11.569.700,00)	82,19	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.893.423.099,00	2.554.132.788,00	(339.290.311,00)	88,27	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	67.618.000,00	66.848.180,00	(769.820,00)	98,86	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.618.000,00	66.848.180,00	(769.820,00)	98,86	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.618.000,00	66.848.180,00	(769.820,00)	98,86	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	2.576.620.000,00	2.306.950.900,00	(269.669.100,00)	89,53	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.078.620.000,00	823.447.000,00	(255.173.000,00)	76,34	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.620.000,00	823.447.000,00	(255.173.000,00)	76,34	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	(14.496.100,00)	99,03	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	(14.496.100,00)	99,03	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0006		PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	40.246.000,00	39.308.000,00	(938.000,00)	97,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.246.000,00	39.308.000,00	(938.000,00)	97,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.246.000,00	39.308.000,00	(938.000,00)	97,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0007		PEMBINAAN PASCA PELAYANAN BAGI PESERTA KB	62.005.500,00	58.372.228,00	(3.633.272,00)	94,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	62.005.500,00	58.372.228,00	(3.633.272,00)	94,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.005.500,00	58.372.228,00	(3.633.272,00)	94,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	64.342.249,00	33.909.897,00	(30.432.352,00)	52,70	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	64.342.249,00	33.909.897,00	(30.432.352,00)	52,70	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.342.249,00	33.909.897,00	(30.432.352,00)	52,70	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0011		DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK	82.591.350,00	48.743.583,00	(33.847.767,00)	59,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	82.591.350,00	48.743.583,00	(33.847.767,00)	59,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.591.350,00	48.743.583,00	(33.847.767,00)	59,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	1.094.926.797,00	1.036.219.373,00	(58.707.424,00)	94,63	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0001		PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	42.011.800,00	21.355.280,00	(20.656.520,00)	50,83	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.011.800,00	21.355.280,00	(20.656.520,00)	50,83	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.011.800,00	21.355.280,00	(20.656.520,00)	50,83	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0004		PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB	42.073.500,00	28.706.652,00	(13.366.848,00)	68,22	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.073.500,00	28.706.652,00	(13.366.848,00)	68,22	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.073.500,00	28.706.652,00	(13.366.848,00)	68,22	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0005		FASILITASI PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	136.274.997,00	128.500.000,00	(7.774.997,00)	94,29	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	136.274.997,00	128.500.000,00	(7.774.997,00)	94,29	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.274.997,00	128.500.000,00	(7.774.997,00)	94,29	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	874.566.500,00	857.657.441,00	(16.909.059,00)	98,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	874.566.500,00	857.657.441,00	(16.909.059,00)	98,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.566.500,00	857.657.441,00	(16.909.059,00)	98,06	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.302.670.500,00	2.869.883.710,00	(432.786.790,00)	86,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	431.670.500,00	406.672.832,00	(24.997.668,00)	94,20	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0016		PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)	134.400.000,00	114.260.000,00	(20.140.000,00)	85,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	134.400.000,00	114.260.000,00	(20.140.000,00)	85,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.400.000,00	114.260.000,00	(20.140.000,00)	85,01	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0017		PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	90.006.500,00	89.419.055,00	(587.445,00)	99,34	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	90.006.500,00	89.419.055,00	(587.445,00)	99,34	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.006.500,00	89.419.055,00	(587.445,00)	99,34	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	130.000.000,00	129.990.002,00	(9.998,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.990.002,00	(9.998,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.990.002,00	(9.998,00)	99,99	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0019		ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	77.264.000,00	73.003.775,00	(4.260.225,00)	94,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	77.264.000,00	73.003.775,00	(4.260.225,00)	94,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.264.000,00	73.003.775,00	(4.260.225,00)	94,48	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	2.871.000.000,00	2.463.210.878,00	(407.789.122,00)	85,79	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	1.305.000.000,00	897.210.878,00	(407.789.122,00)	68,75	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.305.000.000,00	897.210.878,00	(407.789.122,00)	68,75	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000.000,00	897.210.878,00	(407.789.122,00)	68,75	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	22.894.940.858,00	19.966.432.524,74	(2.928.508.333,26)	87,20	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(22.894.940.858,00)	(19.966.432.524,74)	2.928.508.333,26	87,20	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.894.940.858,00)	(19.966.432.524,74)	2.928.508.333,26	87,20	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.17.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	56.500.000,00	55.650.000,00	(850.000,00)	98,49	
	2.15.0.00.0.00.17.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.500.000,00	55.650.000,00	(850.000,00)	98,49	
	2.15.0.00.0.00.17.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	56.500.000,00	55.650.000,00	(850.000,00)	98,49	
				JUMLAH PENDAPATAN	56.500.000,00	55.650.000,00	(850.000,00)	98,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	18.140.479.690,00	15.860.986.345,00	(2.279.493.345,00)	87,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.426.989.076,40	11.761.846.654,00	(1.665.142.422,40)	87,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	69.557.150,00	54.840.000,00	(14.717.150,00)	78,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	47.445.150,00	44.352.000,00	(3.093.150,00)	93,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.445.150,00	44.352.000,00	(3.093.150,00)	93,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.445.150,00	44.352.000,00	(3.093.150,00)	93,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.200.000,00	10.488.000,00	(4.712.000,00)	69,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	10.488.000,00	(4.712.000,00)	69,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	10.488.000,00	(4.712.000,00)	69,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	6.912.000,00	0,00	(6.912.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.912.000,00	0,00	(6.912.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.912.000,00	0,00	(6.912.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	(1.162.833.186,00)	86,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	(1.162.833.186,00)	86,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	(1.162.833.186,00)	86,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	(1.162.833.186,00)	86,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	68.734.750,00	66.945.720,00	(1.789.030,00)	97,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	68.734.750,00	66.945.720,00	(1.789.030,00)	97,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.734.750,00	66.945.720,00	(1.789.030,00)	97,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.734.750,00	66.945.720,00	(1.789.030,00)	97,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100.000.000,00	49.027.300,00	(50.972.700,00)	49,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	100.000.000,00	49.027.300,00	(50.972.700,00)	49,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	49.027.300,00	(50.972.700,00)	49,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	49.027.300,00	(50.972.700,00)	49,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	559.309.677,60	456.993.192,00	(102.316.485,60)	81,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	19.865.670,00	(134.330,00)	99,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.865.670,00	(134.330,00)	99,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.865.670,00	(134.330,00)	99,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	88.276.203,60	84.881.700,00	(3.394.503,60)	96,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.197.967,00	0,00	(3.197.967,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.197.967,00	0,00	(3.197.967,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	85.078.236,60	84.881.700,00	(196.536,60)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.078.236,60	84.881.700,00	(196.536,60)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	40.000.000,00	39.382.526,00	(617.474,00)	98,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.382.526,00	(617.474,00)	98,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.382.526,00	(617.474,00)	98,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.795.474,00	81.225.669,00	(2.569.805,00)	96,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.795.474,00	81.225.669,00	(2.569.805,00)	96,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.795.474,00	81.225.669,00	(2.569.805,00)	96,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.500.000,00	41.457.424,00	(1.042.576,00)	97,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000,00	41.457.424,00	(1.042.576,00)	97,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	41.457.424,00	(1.042.576,00)	97,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	194.738.000,00	190.180.203,00	(4.557.797,00)	97,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	194.738.000,00	190.180.203,00	(4.557.797,00)	97,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.738.000,00	190.180.203,00	(4.557.797,00)	97,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	186.928.912,80	184.365.450,00	(2.563.462,80)	98,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	162.000.000,00	159.840.000,00	(2.160.000,00)	98,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.000.000,00	159.840.000,00	(2.160.000,00)	98,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	159.840.000,00	(2.160.000,00)	98,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	24.928.912,80	24.525.450,00	(403.462,80)	98,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	24.928.912,80	24.525.450,00	(403.462,80)	98,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.928.912,80	24.525.450,00	(403.462,80)	98,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.164.755.563,00	2.064.451.874,00	(100.303.689,00)	95,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	279.577.563,00	254.838.674,00	(24.738.889,00)	91,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	279.577.563,00	254.838.674,00	(24.738.889,00)	91,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.577.563,00	254.838.674,00	(24.738.889,00)	91,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.885.178.000,00	1.809.613.200,00	(75.564.800,00)	95,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.885.178.000,00	1.809.613.200,00	(75.564.800,00)	95,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.885.178.000,00	1.809.613.200,00	(75.564.800,00)	95,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.918.827.146,00	1.689.180.427,00	(229.646.719,00)	88,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.704.427.146,00	1.475.004.427,00	(229.422.719,00)	86,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.704.427.146,00	1.475.004.427,00	(229.422.719,00)	86,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.704.427.146,00	1.475.004.427,00	(229.422.719,00)	86,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	190.000.000,00	189.871.000,00	(129.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	189.871.000,00	(129.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	189.871.000,00	(129.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.400.000,00	24.305.000,00	(95.000,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.400.000,00	24.305.000,00	(95.000,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.305.000,00	(95.000,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.637.892.560,00	3.073.342.282,00	(564.550.278,00)	84,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	2.146.745.200,00	1.666.145.649,00	(480.599.551,00)	77,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1.720.848.200,00	1.251.286.665,00	(469.561.535,00)	72,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	455.315.000,00	4.266.600,00	(451.048.400,00)	0,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	4.266.600,00	(1.048.400,00)	80,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.265.533.200,00	1.247.020.065,00	(18.513.135,00)	98,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.265.533.200,00	1.247.020.065,00	(18.513.135,00)	98,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	425.897.000,00	414.858.984,00	(11.038.016,00)	97,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	425.897.000,00	414.858.984,00	(11.038.016,00)	97,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.897.000,00	414.858.984,00	(11.038.016,00)	97,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	6.413.400,00	6.028.000,00	(385.400,00)	93,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	6.413.400,00	6.028.000,00	(385.400,00)	93,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.724.050,00	3.628.000,00	(96.050,00)	97,42	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.724.050,00	3.628.000,00	(96.050,00)	97,42	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.689.350,00	2.400.000,00	(289.350,00)	89,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.689.350,00	2.400.000,00	(289.350,00)	89,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	272.570.161,00	253.487.456,00	(19.082.705,00)	92,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	7.500.000,00	7.332.200,00	(167.800,00)	97,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.332.200,00	(167.800,00)	97,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.332.200,00	(167.800,00)	97,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0004		PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	20.000.000,00	19.972.150,00	(27.850,00)	99,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.972.150,00	(27.850,00)	99,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.972.150,00	(27.850,00)	99,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0006		IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0007		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	238.070.161,00	219.433.106,00	(18.637.055,00)	92,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	238.070.161,00	219.433.106,00	(18.637.055,00)	92,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.070.161,00	219.433.106,00	(18.637.055,00)	92,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0008		KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	1.047.412.701,00	1.006.072.991,00	(41.339.710,00)	96,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	157.074.023,00	138.184.525,00	(18.889.498,00)	87,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	157.074.023,00	138.184.525,00	(18.889.498,00)	87,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.074.023,00	138.184.525,00	(18.889.498,00)	87,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0015		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	59.194.000,00	55.124.346,00	(4.069.654,00)	93,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	59.194.000,00	55.124.346,00	(4.069.654,00)	93,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.194.000,00	55.124.346,00	(4.069.654,00)	93,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0016		PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	99.560.000,00	88.739.520,00	(10.820.480,00)	89,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	95,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	95,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2	BELANJA MODAL	95.460.000,00	84.839.520,00	(10.620.480,00)	88,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.460.000,00	84.839.520,00	(10.620.480,00)	88,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0017		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	731.584.678,00	724.024.600,00	(7.560.078,00)	98,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	731.584.678,00	724.024.600,00	(7.560.078,00)	98,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.584.678,00	724.024.600,00	(7.560.078,00)	98,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	164.751.098,00	141.608.186,00	(23.142.912,00)	85,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08.0004		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA	164.751.098,00	141.608.186,00	(23.142.912,00)	85,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	161.308.720,00	141.608.186,00	(19.700.534,00)	87,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.308.720,00	141.608.186,00	(19.700.534,00)	87,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.442.378,00	0,00	(3.442.378,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.442.378,00	0,00	(3.442.378,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.027.578.053,60	978.634.191,00	(48.943.862,60)	95,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.03		PENERBITAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA	45.507.000,00	44.800.989,00	(706.011,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.03.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	45.507.000,00	44.800.989,00	(706.011,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.507.000,00	44.800.989,00	(706.011,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.507.000,00	44.800.989,00	(706.011,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13		PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	982.071.053,60	933.833.202,00	(48.237.851,60)	95,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	30.201.000,00	29.159.481,00	(1.041.519,00)	96,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.201.000,00	29.159.481,00	(1.041.519,00)	96,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.201.000,00	29.159.481,00	(1.041.519,00)	96,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0003		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	553.013.054,00	524.272.454,00	(28.740.600,00)	94,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	535.253.054,00	507.622.454,00	(27.630.600,00)	94,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.253.054,00	507.622.454,00	(27.630.600,00)	94,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0003	5.2	BELANJA MODAL	17.760.000,00	16.650.000,00	(1.110.000,00)	93,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.760.000,00	16.650.000,00	(1.110.000,00)	93,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0006		PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DAN DANAU	213.719.499,60	211.099.000,00	(2.620.499,60)	98,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0006	5.1	BELANJA OPERASI	213.719.499,60	211.099.000,00	(2.620.499,60)	98,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0011		PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	213.719.499,60	211.099.000,00	(2.620.499,60)	98,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0011	5.1	BELANJA OPERASI	185.137.500,00	169.302.267,00	(15.835.233,00)	91,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.947.500,00	26.226.267,00	(15.721.233,00)	62,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0011	5.2	BELANJA MODAL	41.947.500,00	26.226.267,00	(15.721.233,00)	62,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.190.000,00	143.076.000,00	(114.000,00)	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	143.190.000,00	143.076.000,00	(114.000,00)	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04.2.01		PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER	48.020.000,00	47.163.218,00	(856.782,00)	98,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04.2.01.0002		FASILITASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN TEMPAT TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER	48.020.000,00	47.163.218,00	(856.782,00)	98,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.020.000,00	47.163.218,00	(856.782,00)	98,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.020.000,00	47.163.218,00	(856.782,00)	98,21	
				JUMLAH BELANJA	48.020.000,00	47.163.218,00	(856.782,00)	98,21	
					18.140.479.690,00	15.860.986.345,00	(2.279.493.345,00)	87,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)					
					(18.083.979.690,00)	(15.805.336.345,00)	2.278.643.345,00	87,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					
					(18.083.979.690,00)	(15.805.336.345,00)	2.278.643.345,00	87,39	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	1.552.730.108,00	1.025.324.217,00	(527.405.891,00)	66,03	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.552.730.108,00	1.025.324.217,00	(527.405.891,00)	66,03	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.552.730.108,00	1.025.324.217,00	(527.405.891,00)	66,03	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0002		PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	389.678.000,00	136.269.104,00	(253.408.896,00)	34,96	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	380.678.500,00	136.269.104,00	(244.409.396,00)	35,79	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.678.500,00	136.269.104,00	(244.409.396,00)	35,79	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.999.500,00	0,00	(8.999.500,00)	0,00	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.999.500,00	0,00	(8.999.500,00)	0,00	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	825.480.200,50	616.986.912,00	(208.493.288,50)	74,74	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	825.480.200,50	616.986.912,00	(208.493.288,50)	74,74	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.480.200,50	616.986.912,00	(208.493.288,50)	74,74	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	337.571.967,50	272.068.201,00	(65.503.706,50)	80,59	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	40.068.960,50	27.276.171,00	(12.792.789,50)	68,07	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.068.960,50	27.276.171,00	(12.792.789,50)	68,07	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	297.502.947,00	244.792.030,00	(52.710.917,00)	82,28	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.904.250,00	224.220.000,00	(35.684.250,00)	86,27	
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0004	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	37.598.697,00	20.572.030,00	(17.026.667,00)	54,71	
				JUMLAH BELANJA	1.552.730.108,00	1.025.324.217,00	(527.405.891,00)	66,03	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.552.730.108,00)	(1.025.324.217,00)	527.405.891,00	66,03	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.552.730.108,00)	(1.025.324.217,00)	527.405.891,00	66,03	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	766.009.363,30	422.050.075,00	(343.959.288,30)	55,09	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	766.009.363,30	422.050.075,00	(343.959.288,30)	55,09	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	766.009.363,30	422.050.075,00	(343.959.288,30)	55,09	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0007		PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	250.947.863,30	173.319.159,00	(77.628.704,30)	69,06	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	79.714.305,30	22.319.158,00	(57.395.147,30)	27,99	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.714.305,30	22.319.158,00	(57.395.147,30)	27,99	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	171.233.558,00	151.000.001,00	(20.233.557,00)	88,18	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.233.558,00	151.000.001,00	(20.233.557,00)	88,18	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0008		PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	327.036.500,00	159.448.706,00	(167.587.794,00)	48,75	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	327.036.500,00	159.448.706,00	(167.587.794,00)	48,75	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.036.500,00	159.448.706,00	(167.587.794,00)	48,75	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	154.814.000,00	80.256.010,00	(74.557.990,00)	51,84	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	154.814.000,00	80.256.010,00	(74.557.990,00)	51,84	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.814.000,00	80.256.010,00	(74.557.990,00)	51,84	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0011		PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	33.211.000,00	9.026.200,00	(24.184.800,00)	27,17	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	33.211.000,00	9.026.200,00	(24.184.800,00)	27,17	
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.211.000,00	9.026.200,00	(24.184.800,00)	27,17	
				JUMLAH BELANJA	766.009.363,30	422.050.075,00	(343.959.288,30)	55,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(766.009.363,30)	(422.050.075,00)	343.959.288,30	55,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(766.009.363,30)	(422.050.075,00)	343.959.288,30	55,09	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	16.818.749.442,00	15.195.022.477,00	(1.623.726.965,00)	90,34	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.243.939.667,00	5.899.766.539,00	(1.344.173.128,00)	81,44	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	62.326.000,00	47.677.200,00	(14.648.800,00)	76,49	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	37.370.000,00	28.650.000,00	(8.720.000,00)	76,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.370.000,00	28.650.000,00	(8.720.000,00)	76,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.370.000,00	28.650.000,00	(8.720.000,00)	76,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.590.000,00	740.000,00	(5.850.000,00)	11,22	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.590.000,00	740.000,00	(5.850.000,00)	11,22	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.590.000,00	740.000,00	(5.850.000,00)	11,22	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	18.366.000,00	18.287.200,00	(78.800,00)	99,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	18.366.000,00	18.287.200,00	(78.800,00)	99,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.366.000,00	18.287.200,00	(78.800,00)	99,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	(1.205.930.712,00)	77,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	(1.205.930.712,00)	77,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	(1.205.930.712,00)	77,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	(1.205.930.712,00)	77,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	86.274.000,00	84.553.900,00	(1.720.100,00)	98,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	86.274.000,00	84.553.900,00	(1.720.100,00)	98,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	86.274.000,00	84.553.900,00	(1.720.100,00)	98,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.274.000,00	84.553.900,00	(1.720.100,00)	98,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	477.291.525,00	466.450.386,00	(10.841.139,00)	97,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	19.962.040,00	(37.960,00)	99,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.962.040,00	(37.960,00)	99,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.962.040,00	(37.960,00)	99,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	147.885.900,00	140.701.150,00	(7.184.750,00)	95,14	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	147.885.900,00	140.701.150,00	(7.184.750,00)	95,14	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.885.900,00	140.701.150,00	(7.184.750,00)	95,14	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	40.000.000,00	38.530.800,00	(1.469.200,00)	96,32	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.530.800,00	(1.469.200,00)	96,32	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.530.800,00	(1.469.200,00)	96,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	77.109.625,00	75.106.325,00	(2.003.300,00)	97,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	77.109.625,00	75.106.325,00	(2.003.300,00)	97,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.109.625,00	75.106.325,00	(2.003.300,00)	97,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	83.856.000,00	83.710.071,00	(145.929,00)	99,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	83.856.000,00	83.710.071,00	(145.929,00)	99,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.856.000,00	83.710.071,00	(145.929,00)	99,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	424.189.000,00	423.660.400,00	(528.600,00)	99,87	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	354.720.000,00	354.578.400,00	(141.600,00)	99,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	354.720.000,00	354.578.400,00	(141.600,00)	99,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.720.000,00	354.578.400,00	(141.600,00)	99,96	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	69.469.000,00	69.082.000,00	(387.000,00)	99,44	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	69.469.000,00	69.082.000,00	(387.000,00)	99,44	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.469.000,00	69.082.000,00	(387.000,00)	99,44	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	523.895.600,00	423.930.818,00	(99.964.782,00)	80,91	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	131.107.200,00	122.318.418,00	(8.788.782,00)	93,29	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.107.200,00	122.318.418,00	(8.788.782,00)	93,29	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.107.200,00	122.318.418,00	(8.788.782,00)	93,29	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	392.788.400,00	301.612.400,00	(91.176.000,00)	76,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	392.788.400,00	301.612.400,00	(91.176.000,00)	76,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.788.400,00	301.612.400,00	(91.176.000,00)	76,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	196.337.400,00	185.798.405,00	(10.538.995,00)	94,63	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	113.210.000,00	102.896.000,00	(10.314.000,00)	90,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.210.000,00	102.896.000,00	(10.314.000,00)	90,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.210.000,00	102.896.000,00	(10.314.000,00)	90,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	49.987.400,00	49.902.350,00	(85.050,00)	99,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	49.987.400,00	49.902.350,00	(85.050,00)	99,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.987.400,00	49.902.350,00	(85.050,00)	99,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	33.140.000,00	33.000.055,00	(139.945,00)	99,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	33.140.000,00	33.000.055,00	(139.945,00)	99,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.140.000,00	33.000.055,00	(139.945,00)	99,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	218.295.000,00	217.371.982,00	(923.018,00)	99,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	218.295.000,00	217.371.982,00	(923.018,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0003		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	142.255.000,00	141.544.104,00	(710.896,00)	99,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	142.255.000,00	141.544.104,00	(710.896,00)	99,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.255.000,00	141.544.104,00	(710.896,00)	99,50	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.040.000,00	75.827.878,00	(212.122,00)	99,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.040.000,00	75.827.878,00	(212.122,00)	99,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.040.000,00	75.827.878,00	(212.122,00)	99,72	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	247.357.000,00	244.392.880,00	(2.964.120,00)	98,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04.2.01		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	247.357.000,00	244.392.880,00	(2.964.120,00)	98,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04.2.01.0001		PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	247.357.000,00	244.392.880,00	(2.964.120,00)	98,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	247.357.000,00	244.392.880,00	(2.964.120,00)	98,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.357.000,00	244.392.880,00	(2.964.120,00)	98,80	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	173.292.250,00	157.049.370,00	(16.242.880,00)	90,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.292.250,00	157.049.370,00	(16.242.880,00)	90,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	173.292.250,00	157.049.370,00	(16.242.880,00)	90,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.292.250,00	157.049.370,00	(16.242.880,00)	90,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.292.250,00	157.049.370,00	(16.242.880,00)	90,62	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	829.699.200,00	828.530.853,00	(1.168.347,00)	99,85	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	829.699.200,00	828.530.853,00	(1.168.347,00)	99,85	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0004		FASILITASI KEMITRAAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0005		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	224.699.200,00	223.530.853,00	(1.168.347,00)	99,48	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	224.699.200,00	223.530.853,00	(1.168.347,00)	99,48	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.699.200,00	223.530.853,00	(1.168.347,00)	99,48	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	807.534.900,00	784.680.250,00	(22.854.650,00)	97,16	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	807.534.900,00	784.680.250,00	(22.854.650,00)	97,16	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0003		FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO	160.735.000,00	160.365.600,00	(369.400,00)	99,77	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.735.000,00	160.365.600,00	(369.400,00)	99,77	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.735.000,00	160.365.600,00	(369.400,00)	99,77	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	75.000.000,00	74.118.150,00	(881.850,00)	98,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.118.150,00	(881.850,00)	98,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.118.150,00	(881.850,00)	98,82	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0009		FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL USAHA KECIL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0011		FASILITASI SERTIFIKASI DAN STANDARDISASI USAHA MIKRO	139.500.000,00	138.936.500,00	(563.500,00)	99,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	139.500.000,00	138.936.500,00	(563.500,00)	99,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.500.000,00	138.936.500,00	(563.500,00)	99,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0014		PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	122.799.900,00	115.260.000,00	(7.539.900,00)	93,86	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	122.799.900,00	115.260.000,00	(7.539.900,00)	93,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.799.900,00	115.260.000,00	(7.539.900,00)	93,86	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0015		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	259.500.000,00	246.000.000,00	(13.500.000,00)	94,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	259.500.000,00	246.000.000,00	(13.500.000,00)	94,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.500.000,00	246.000.000,00	(13.500.000,00)	94,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	(235.400.822,00)	96,77	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	(235.400.822,00)	96,77	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0005		FASILITASI INKUBATOR USAHA MIKRO	20.000.000,00	19.999.534,00	(466,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.999.534,00	(466,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.999.534,00	(466,00)	99,99	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0006		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	7.278.631.425,00	7.043.231.069,00	(235.400.356,00)	96,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.278.631.425,00	7.043.231.069,00	(235.400.356,00)	96,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.762.425,00	487.103.569,00	(658.856,00)	99,86	
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	6.790.869.000,00	6.556.127.500,00	(234.741.500,00)	96,54	
				JUMLAH BELANJA	16.818.749.442,00	15.195.022.477,00	(1.623.726.965,00)	90,34	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.818.749.442,00)	(15.195.022.477,00)	1.623.726.965,00	90,34	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.818.749.442,00)	(15.195.022.477,00)	1.623.726.965,00	90,34	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000		5	BELANJA DAERAH	18.893.414.726,50	16.567.688.377,00	(2.325.726.349,50)	87,69	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.862.003.092,50	14.628.368.734,00	(2.233.634.358,50)	86,75	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	70.186.505,00	48.472.966,00	(21.713.539,00)	69,06	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	38.499.882,00	18.946.135,00	(19.553.747,00)	49,21	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.499.882,00	18.946.135,00	(19.553.747,00)	49,21	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.499.882,00	18.946.135,00	(19.553.747,00)	49,21	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.999.879,00	8.039.846,00	(1.960.033,00)	80,39	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.879,00	8.039.846,00	(1.960.033,00)	80,39	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.879,00	8.039.846,00	(1.960.033,00)	80,39	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	21.686.744,00	21.486.985,00	(199.759,00)	99,07	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.686.744,00	21.486.985,00	(199.759,00)	99,07	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.686.744,00	21.486.985,00	(199.759,00)	99,07	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	(1.238.422.250,00)	88,21	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	(1.238.422.250,00)	88,21	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	(1.238.422.250,00)	88,21	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	(1.238.422.250,00)	88,21	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	47.417.000,00	23.494.300,00	(23.922.700,00)	49,54	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	47.417.000,00	23.494.300,00	(23.922.700,00)	49,54	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.417.000,00	23.494.300,00	(23.922.700,00)	49,54	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.417.000,00	23.494.300,00	(23.922.700,00)	49,54	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	77.892.000,00	23.948.200,00	(53.943.800,00)	30,74	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	77.892.000,00	23.948.200,00	(53.943.800,00)	30,74	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.892.000,00	23.948.200,00	(53.943.800,00)	30,74	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.892.000,00	23.948.200,00	(53.943.800,00)	30,74	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.563.245.851,50	3.428.048.187,00	(135.197.664,50)	96,20	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	64.629.087,00	63.620.946,00	(1.008.141,00)	98,44	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.629.087,00	63.620.946,00	(1.008.141,00)	98,44	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.629.087,00	63.620.946,00	(1.008.141,00)	98,44	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.043.898.821,00	2.923.941.475,00	(119.957.346,00)	96,05	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.708.000,00	2.576.600,00	(131.400,00)	95,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.708.000,00	2.576.600,00	(131.400,00)	95,14	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.041.190.821,00	2.921.364.875,00	(119.825.946,00)	96,05	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.028.111.821,00	2.908.285.875,00	(119.825.946,00)	96,04	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.079.000,00	13.079.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	75.075.516,00	70.242.410,00	(4.833.106,00)	93,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.075.516,00	70.242.410,00	(4.833.106,00)	93,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.075.516,00	70.242.410,00	(4.833.106,00)	93,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	124.999.182,00	123.053.809,00	(1.945.373,00)	98,44	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	124.999.182,00	123.053.809,00	(1.945.373,00)	98,44	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.999.182,00	123.053.809,00	(1.945.373,00)	98,44	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	67.499.745,50	61.910.847,00	(5.588.898,50)	91,72	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.499.745,50	61.910.847,00	(5.588.898,50)	91,72	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.499.745,50	61.910.847,00	(5.588.898,50)	91,72	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.826.800,00	(173.200,00)	99,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.826.800,00	(173.200,00)	99,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.826.800,00	(173.200,00)	99,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	47.155.000,00	46.467.500,00	(687.500,00)	98,54	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.155.000,00	46.467.500,00	(687.500,00)	98,54	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.155.000,00	46.467.500,00	(687.500,00)	98,54	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	99.988.500,00	98.984.400,00	(1.004.100,00)	98,99	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.988.500,00	98.984.400,00	(1.004.100,00)	98,99	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.988.500,00	98.984.400,00	(1.004.100,00)	98,99	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	272.308.510,00	257.085.300,00	(15.223.210,00)	94,40	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	272.308.510,00	257.085.300,00	(15.223.210,00)	94,40	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.161.000,00	2.118.300,00	(42.700,00)	98,02	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.161.000,00	2.118.300,00	(42.700,00)	98,02	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	270.147.510,00	254.967.000,00	(15.180.510,00)	94,38	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.147.510,00	254.967.000,00	(15.180.510,00)	94,38	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.556.032.018,00	995.024.867,00	(561.007.151,00)	63,94	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	683.630.418,00	431.742.367,00	(251.888.051,00)	63,15	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	683.630.418,00	431.742.367,00	(251.888.051,00)	63,15	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.630.418,00	431.742.367,00	(251.888.051,00)	63,15	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	872.401.600,00	563.282.500,00	(309.119.100,00)	64,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	872.401.600,00	563.282.500,00	(309.119.100,00)	64,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.401.600,00	563.282.500,00	(309.119.100,00)	64,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	766.393.200,00	582.189.156,00	(184.204.044,00)	75,96	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	325.990.000,00	300.116.186,00	(25.873.814,00)	92,06	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	325.990.000,00	300.116.186,00	(25.873.814,00)	92,06	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.990.000,00	300.116.186,00	(25.873.814,00)	92,06	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	227.216.000,00	185.894.000,00	(41.322.000,00)	81,81	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	227.216.000,00	185.894.000,00	(41.322.000,00)	81,81	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.216.000,00	185.894.000,00	(41.322.000,00)	81,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	213.187.200,00	96.178.970,00	(117.008.230,00)	45,11	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	213.187.200,00	96.178.970,00	(117.008.230,00)	45,11	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.187.200,00	96.178.970,00	(117.008.230,00)	45,11	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	239.665.750,00	207.723.441,00	(31.942.309,00)	86,67	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.525.750,00	96.066.259,00	(8.459.491,00)	91,90	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	30.452.250,00	29.922.482,00	(529.768,00)	98,26	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.452.250,00	29.922.482,00	(529.768,00)	98,26	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.452.250,00	29.922.482,00	(529.768,00)	98,26	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0003		FASILITASI KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	40.153.000,00	32.506.800,00	(7.646.200,00)	80,95	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.153.000,00	32.506.800,00	(7.646.200,00)	80,95	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.153.000,00	32.506.800,00	(7.646.200,00)	80,95	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0004		REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	33.920.500,00	33.636.977,00	(283.523,00)	99,16	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.920.500,00	33.636.977,00	(283.523,00)	99,16	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.920.500,00	33.636.977,00	(283.523,00)	99,16	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	135.140.000,00	111.657.182,00	(23.482.818,00)	82,62	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.02.0004		PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	135.140.000,00	111.657.182,00	(23.482.818,00)	82,62	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	135.140.000,00	111.657.182,00	(23.482.818,00)	82,62	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.140.000,00	111.657.182,00	(23.482.818,00)	82,62	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	395.431.400,00	392.654.897,00	(2.776.503,00)	99,29	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	395.431.400,00	392.654.897,00	(2.776.503,00)	99,29	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	395.431.400,00	392.654.897,00	(2.776.503,00)	99,29	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	395.431.400,00	392.654.897,00	(2.776.503,00)	99,29	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.431.400,00	392.654.897,00	(2.776.503,00)	99,29	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	(48.369.024,00)	95,71	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	(48.369.024,00)	95,71	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	76.883.125,00	76.624.707,00	(258.418,00)	99,66	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	76.883.125,00	76.624.707,00	(258.418,00)	99,66	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.883.125,00	76.624.707,00	(258.418,00)	99,66	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	307.263.250,00	303.764.925,00	(3.498.325,00)	98,86	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	307.263.250,00	303.764.925,00	(3.498.325,00)	98,86	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.263.250,00	303.764.925,00	(3.498.325,00)	98,86	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	55.790.850,00	55.177.281,00	(613.569,00)	98,90	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	55.790.850,00	55.177.281,00	(613.569,00)	98,90	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.790.850,00	55.177.281,00	(613.569,00)	98,90	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	689.646.300,00	645.647.588,00	(43.998.712,00)	93,62	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	689.646.300,00	645.647.588,00	(43.998.712,00)	93,62	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.646.300,00	645.647.588,00	(43.998.712,00)	93,62	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	206.928.959,00	199.306.730,00	(7.622.229,00)	96,31	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	206.928.959,00	199.306.730,00	(7.622.229,00)	96,31	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	80.000.000,00	78.852.802,00	(1.147.198,00)	98,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	78.852.802,00	(1.147.198,00)	98,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	78.852.802,00	(1.147.198,00)	98,56	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	42.189.959,00	37.712.651,00	(4.477.308,00)	89,38	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.189.959,00	37.712.651,00	(4.477.308,00)	89,38	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.189.959,00	37.712.651,00	(4.477.308,00)	89,38	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	84.739.000,00	82.741.277,00	(1.997.723,00)	97,64	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	84.739.000,00	82.741.277,00	(1.997.723,00)	97,64	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.739.000,00	82.741.277,00	(1.997.723,00)	97,64	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	59.802.000,00	58.420.074,00	(1.381.926,00)	97,68	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06.2.01		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.802.000,00	58.420.074,00	(1.381.926,00)	97,68	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06.2.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	59.802.000,00	58.420.074,00	(1.381.926,00)	97,68	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.802.000,00	58.420.074,00	(1.381.926,00)	97,68	
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.802.000,00	58.420.074,00	(1.381.926,00)	97,68	
				JUMLAH BELANJA	18.893.414.726,50	16.567.688.377,00	(2.325.726.349,50)	87,69	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(18.893.414.726,50)	(16.567.688.377,00)	2.325.726.349,50	87,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.893.414.726,50)	(16.567.688.377,00)	2.325.726.349,50	87,69	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.3.26.0.00.21.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03	
	2.19.3.26.0.00.21.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03	
	2.19.3.26.0.00.21.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03	
				JUMLAH PENDAPATAN	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	118.332.272.052,00	102.737.522.359,00	(15.594.749.693,00)	86,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.507.566.591,00	13.257.048.597,00	(2.250.517.994,00)	85,48	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	75.587.500,00	50.464.386,00	(25.123.114,00)	66,76	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	40.738.000,00	24.093.964,00	(16.644.036,00)	59,14	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.738.000,00	24.093.964,00	(16.644.036,00)	59,14	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.738.000,00	24.093.964,00	(16.644.036,00)	59,14	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.940.000,00	8.002.000,00	(1.938.000,00)	80,50	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.940.000,00	8.002.000,00	(1.938.000,00)	80,50	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	8.002.000,00	(1.938.000,00)	80,50	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	24.909.500,00	18.368.422,00	(6.541.078,00)	73,74	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.909.500,00	18.368.422,00	(6.541.078,00)	73,74	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.909.500,00	18.368.422,00	(6.541.078,00)	73,74	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	(873.716.454,00)	90,72	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	(873.716.454,00)	90,72	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	(873.716.454,00)	90,72	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	(873.716.454,00)	90,72	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	52.728.750,00	51.901.008,00	(827.742,00)	98,43	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	52.728.750,00	51.901.008,00	(827.742,00)	98,43	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.728.750,00	51.901.008,00	(827.742,00)	98,43	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.728.750,00	51.901.008,00	(827.742,00)	98,43	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	94.386.000,00	38.500.000,00	(55.886.000,00)	40,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	94.386.000,00	38.500.000,00	(55.886.000,00)	40,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.386.000,00	38.500.000,00	(55.886.000,00)	40,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.386.000,00	38.500.000,00	(55.886.000,00)	40,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	723.268.345,00	703.935.081,00	(19.333.264,00)	97,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.999.900,00	29.842.905,00	(156.995,00)	99,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.999.900,00	29.842.905,00	(156.995,00)	99,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	29.842.905,00	(156.995,00)	99,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	200.052.960,00	200.009.759,00	(43.201,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	200.052.960,00	200.009.759,00	(43.201,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.052.960,00	200.009.759,00	(43.201,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	44.935.400,00	44.906.500,00	(28.900,00)	99,93	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.935.400,00	44.906.500,00	(28.900,00)	99,93	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.935.400,00	44.906.500,00	(28.900,00)	99,93	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	99.999.810,00	98.357.688,00	(1.642.122,00)	98,35	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.810,00	98.357.688,00	(1.642.122,00)	98,35	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.810,00	98.357.688,00	(1.642.122,00)	98,35	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	158.282.275,00	154.885.176,00	(3.397.099,00)	97,85	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	158.282.275,00	154.885.176,00	(3.397.099,00)	97,85	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.282.275,00	154.885.176,00	(3.397.099,00)	97,85	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.959.989,00	(40.011,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.959.989,00	(40.011,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.959.989,00	(40.011,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.000.000,00	36.455.000,00	(13.545.000,00)	72,91	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.455.000,00	(13.545.000,00)	72,91	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.455.000,00	(13.545.000,00)	72,91	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	99.998.000,00	99.518.064,00	(479.936,00)	99,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.998.000,00	99.518.064,00	(479.936,00)	99,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.998.000,00	99.518.064,00	(479.936,00)	99,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.531.448,00	17.093.778,00	(3.437.670,00)	83,25	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	20.531.448,00	17.093.778,00	(3.437.670,00)	83,25	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	20.531.448,00	17.093.778,00	(3.437.670,00)	83,25	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.531.448,00	17.093.778,00	(3.437.670,00)	83,25	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.602.620.472,00	3.395.975.441,00	(1.206.645.031,00)	73,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.703.756.472,00	946.093.041,00	(757.663.431,00)	55,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.703.756.472,00	946.093.041,00	(757.663.431,00)	55,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.756.472,00	946.093.041,00	(757.663.431,00)	55,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.898.864.000,00	2.449.882.400,00	(448.981.600,00)	84,51	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.898.864.000,00	2.449.882.400,00	(448.981.600,00)	84,51	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.898.864.000,00	2.449.882.400,00	(448.981.600,00)	84,51	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	514.914.000,00	449.365.281,00	(65.548.719,00)	87,26	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	328.560.000,00	269.250.281,00	(59.309.719,00)	81,94	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	328.560.000,00	269.250.281,00	(59.309.719,00)	81,94	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.560.000,00	269.250.281,00	(59.309.719,00)	81,94	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	171.104.000,00	164.865.000,00	(6.239.000,00)	96,35	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	171.104.000,00	164.865.000,00	(6.239.000,00)	96,35	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.104.000,00	164.865.000,00	(6.239.000,00)	96,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	904.676.500,00	678.547.924,00	(226.128.576,00)	75,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	667.150.500,00	498.619.006,00	(168.531.494,00)	74,73	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	543.713.000,00	412.217.766,00	(131.495.234,00)	75,81	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	543.713.000,00	412.217.766,00	(131.495.234,00)	75,81	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.928.000,00	18.859.500,00	(7.068.500,00)	72,73	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.05	Belanja Hibah	517.785.000,00	393.358.266,00	(124.426.734,00)	75,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0014		PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMENUHAN HAK PEMUDA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	107.530.500,00	70.958.640,00	(36.571.860,00)	65,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	107.530.500,00	70.958.640,00	(36.571.860,00)	65,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.530.500,00	70.958.640,00	(36.571.860,00)	65,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA	15.907.000,00	15.442.600,00	(464.400,00)	97,08	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	15.907.000,00	15.442.600,00	(464.400,00)	97,08	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.907.000,00	15.442.600,00	(464.400,00)	97,08	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	237.526.000,00	179.928.918,00	(57.597.082,00)	75,75	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.02.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	237.526.000,00	179.928.918,00	(57.597.082,00)	75,75	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	237.526.000,00	179.928.918,00	(57.597.082,00)	75,75	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.526.000,00	179.928.918,00	(57.597.082,00)	75,75	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	98.738.256.811,00	85.721.397.400,00	(13.016.859.411,00)	86,81	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.279.669.523,00	37.222.928.483,00	(7.056.741.040,00)	84,06	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	44.279.669.523,00	37.222.928.483,00	(7.056.741.040,00)	84,06	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.305.229.023,00	17.873.999.983,00	(1.431.229.040,00)	92,58	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.393.004.023,00	5.284.652.883,00	(108.351.140,00)	97,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	13.912.225.000,00	12.589.347.100,00	(1.322.877.900,00)	90,49	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	24.974.440.500,00	19.348.928.500,00	(5.625.512.000,00)	77,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.430.000,00	66.321.500,00	(6.108.500,00)	91,56	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.902.010.500,00	19.282.607.000,00	(5.619.403.500,00)	77,43	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.302.007.899,00	10.724.020.803,00	(2.577.987.096,00)	80,61	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	12.595.500.399,00	10.061.946.022,00	(2.533.554.377,00)	79,88	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.405.150.399,00	10.023.171.622,00	(2.381.978.777,00)	80,79	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.405.150.399,00	10.023.171.622,00	(2.381.978.777,00)	80,79	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	190.350.000,00	38.774.400,00	(151.575.600,00)	20,37	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.350.000,00	38.774.400,00	(151.575.600,00)	20,37	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0006		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	706.507.500,00	662.074.781,00	(44.432.719,00)	93,71	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	606.710.000,00	562.324.781,00	(44.385.219,00)	92,68	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.710.000,00	562.324.781,00	(44.385.219,00)	92,68	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	99.797.500,00	99.750.000,00	(47.500,00)	99,95	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.797.500,00	99.750.000,00	(47.500,00)	99,95	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	11.172.651.250,00	9.394.894.192,00	(1.777.757.058,00)	84,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0006		SELEKSI ATLET DAERAH	51.103.000,00	51.103.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.103.000,00	51.103.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.103.000,00	51.103.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0009		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	11.121.548.250,00	9.343.791.192,00	(1.777.757.058,00)	84,01	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.066.078.250,00	9.343.791.192,00	(1.722.287.058,00)	84,43	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.066.078.250,00	9.343.791.192,00	(1.722.287.058,00)	84,43	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	55.470.000,00	0,00	(55.470.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.470.000,00	0,00	(55.470.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	28.586.098.300,00	27.048.384.929,00	(1.537.713.371,00)	94,62	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0005		PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGELOLAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN/KOTA	28.481.098.300,00	27.048.384.929,00	(1.432.713.371,00)	94,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.481.098.300,00	27.048.384.929,00	(1.432.713.371,00)	94,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0005	5.1.05	Belanja Hibah	28.481.098.300,00	27.048.384.929,00	(1.432.713.371,00)	94,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0006		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	1.397.829.839,00	1.331.168.993,00	(66.660.846,00)	95,23	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0006		PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	154.292.960,00	91.330.671,00	(62.962.289,00)	59,19	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	154.292.960,00	91.330.671,00	(62.962.289,00)	59,19	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.292.960,00	91.330.671,00	(62.962.289,00)	59,19	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0007		PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANGAN	1.102.581.879,00	1.098.883.322,00	(3.698.557,00)	99,66	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.102.581.879,00	1.098.883.322,00	(3.698.557,00)	99,66	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.581.879,00	1.098.883.322,00	(3.698.557,00)	99,66	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0008		PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT	140.955.000,00	140.955.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	140.955.000,00	140.955.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.955.000,00	140.955.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	(101.243.712,00)	96,81	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	(101.243.712,00)	96,81	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPRAMUKAAN BERBASIS ELEKTRONIK	31.200.000,00	31.143.901,00	(56.099,00)	99,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.143.901,00	(56.099,00)	99,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.143.901,00	(56.099,00)	99,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	2.500.000.000,00	2.487.127.671,00	(12.872.329,00)	99,48	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000.000,00	2.487.127.671,00	(12.872.329,00)	99,48	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.500.000.000,00	2.487.127.671,00	(12.872.329,00)	99,48	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0003		PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	214.081.020,00	213.234.390,00	(846.630,00)	99,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	214.081.020,00	213.234.390,00	(846.630,00)	99,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.081.020,00	213.234.390,00	(846.630,00)	99,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0005		PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	236.493.530,00	150.222.196,00	(86.271.334,00)	63,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	236.493.530,00	150.222.196,00	(86.271.334,00)	63,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.493.530,00	150.222.196,00	(86.271.334,00)	63,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0007		PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	199.997.600,00	198.800.280,00	(1.197.320,00)	99,40	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	199.997.600,00	198.800.280,00	(1.197.320,00)	99,40	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.926.000,00	10.925.280,00	(720,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	189.071.600,00	187.875.000,00	(1.196.600,00)	99,36	
				JUMLAH BELANJA	118.332.272.052,00	102.737.522.359,00	(15.594.749.693,00)	86,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)					
					(118.189.845.052,00)	(102.499.615.359,00)	15.690.229.693,00	86,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					
					(118.189.845.052,00)	(102.499.615.359,00)	15.690.229.693,00	86,72	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2.19.3.26.0.00.21.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03
	2.19.3.26.0.00.21.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03
	2.19.3.26.0.00.21.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03
				JUMLAH PENDAPATAN	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,03
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	3.579.690.700,00	3.508.706.868,00	(70.983.832,00)	98,01
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.307.555.000,00	1.294.494.272,00	(13.060.728,00)	99,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01		PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	1.307.555.000,00	1.294.494.272,00	(13.060.728,00)	99,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01.0006		PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA	1.307.555.000,00	1.294.494.272,00	(13.060.728,00)	99,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.107.555.000,00	1.095.099.272,00	(12.455.728,00)	98,87
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.555.000,00	1.095.099.272,00	(12.455.728,00)	98,87
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.395.000,00	(605.000,00)	99,69
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.395.000,00	(605.000,00)	99,69
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	(53.666.428,00)	97,50
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	(53.666.428,00)	97,50
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	(53.666.428,00)	97,50
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	(53.666.428,00)	97,50
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.364.900,00	119.108.224,00	(4.256.676,00)	96,54
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	123.364.900,00	119.108.224,00	(4.256.676,00)	96,54
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05.2.02		PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	123.364.900,00	119.108.224,00	(4.256.676,00)	96,54
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05.2.02.0001		PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	123.364.900,00	119.108.224,00	(4.256.676,00)	96,54
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.364.900,00	119.108.224,00	(4.256.676,00)	96,54
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.364.900,00	119.108.224,00	(4.256.676,00)	96,54
				JUMLAH BELANJA	3.579.690.700,00	3.508.706.868,00	(70.983.832,00)	98,01
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.437.263.700,00)	(3.270.799.868,00)	166.463.832,00	95,15
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.437.263.700,00)	(3.270.799.868,00)	166.463.832,00	95,15

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	423.801.618,00	327.706.149,00	(96.095.469,00)	77,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	423.801.618,00	327.706.149,00	(96.095.469,00)	77,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.243.457,00	110.921.937,00	(57.321.520,00)	65,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02.0004		AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	168.243.457,00	110.921.937,00	(57.321.520,00)	65,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.265.432,00	83.046.174,00	(32.219.258,00)	72,04	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.265.432,00	83.046.174,00	(32.219.258,00)	72,04	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	52.978.025,00	27.875.763,00	(25.102.262,00)	52,61	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.978.025,00	27.875.763,00	(25.102.262,00)	52,61	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	255.558.161,00	216.784.212,00	(38.773.949,00)	84,82	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	116.629.341,00	96.429.232,00	(20.200.109,00)	82,68	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	116.629.341,00	96.429.232,00	(20.200.109,00)	82,68	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.629.341,00	96.429.232,00	(20.200.109,00)	82,68	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.928.820,00	120.354.980,00	(18.573.840,00)	86,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.928.820,00	120.354.980,00	(18.573.840,00)	86,63	
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.928.820,00	120.354.980,00	(18.573.840,00)	86,63	
				JUMLAH BELANJA	423.801.618,00	327.706.149,00	(96.095.469,00)	77,32	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(423.801.618,00)	(327.706.149,00)	96.095.469,00	77,32	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(423.801.618,00)	(327.706.149,00)	96.095.469,00	77,32	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	11.859.796.851,00	10.321.407.690,00	(1.538.389.161,00)	87,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.827.837.626,00	8.536.861.673,00	(1.290.975.953,00)	86,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	64.983.227,50	57.789.226,00	(7.194.001,50)	88,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.866.915,00	49.015.376,00	(1.851.539,00)	96,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.866.915,00	49.015.376,00	(1.851.539,00)	96,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.866.915,00	49.015.376,00	(1.851.539,00)	96,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.008.302,50	4.982.850,00	(25.452,50)	99,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.008.302,50	4.982.850,00	(25.452,50)	99,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.008.302,50	4.982.850,00	(25.452,50)	99,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	9.108.010,00	3.791.000,00	(5.317.010,00)	41,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.108.010,00	3.791.000,00	(5.317.010,00)	41,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.108.010,00	3.791.000,00	(5.317.010,00)	41,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	(1.022.569.737,00)	86,32	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	(1.022.569.737,00)	86,32	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	(1.022.569.737,00)	86,32	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	(1.022.569.737,00)	86,32	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	97.500.000,00	49.900.000,00	(47.600.000,00)	51,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	97.500.000,00	49.900.000,00	(47.600.000,00)	51,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	97.500.000,00	49.900.000,00	(47.600.000,00)	51,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	49.900.000,00	(47.600.000,00)	51,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	571.011.122,50	510.585.075,00	(60.426.047,50)	89,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	59.994.835,00	59.767.967,00	(226.868,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.994.835,00	59.767.967,00	(226.868,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.994.835,00	59.767.967,00	(226.868,00)	99,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	86.634.113,00	86.534.490,00	(99.623,00)	99,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.955.424,00	9.945.600,00	(9.824,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.955.424,00	9.945.600,00	(9.824,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	76.678.689,00	76.588.890,00	(89.799,00)	99,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.678.689,00	76.588.890,00	(89.799,00)	99,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	59.992.503,00	47.675.000,00	(12.317.503,00)	79,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.992.503,00	47.675.000,00	(12.317.503,00)	79,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.503,00	47.675.000,00	(12.317.503,00)	79,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	96.907.891,50	72.532.160,00	(24.375.731,50)	74,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.907.891,50	72.532.160,00	(24.375.731,50)	74,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.907.891,50	72.532.160,00	(24.375.731,50)	74,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.972.750,00	38.209.150,00	(16.763.600,00)	69,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.972.750,00	38.209.150,00	(16.763.600,00)	69,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.972.750,00	38.209.150,00	(16.763.600,00)	69,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	23.656.000,00	(344.000,00)	98,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.656.000,00	(344.000,00)	98,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.656.000,00	(344.000,00)	98,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	37.950.000,00	(2.050.000,00)	94,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	37.950.000,00	(2.050.000,00)	94,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.950.000,00	(2.050.000,00)	94,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	47.055.030,00	44.354.000,00	(2.701.030,00)	94,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.055.030,00	44.354.000,00	(2.701.030,00)	94,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.055.030,00	44.354.000,00	(2.701.030,00)	94,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	101.454.000,00	99.906.308,00	(1.547.692,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	101.454.000,00	99.906.308,00	(1.547.692,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.454.000,00	99.906.308,00	(1.547.692,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	494.412.100,00	483.476.500,00	(10.935.600,00)	97,78	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	482.000.000,00	471.100.000,00	(10.900.000,00)	97,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	482.000.000,00	471.100.000,00	(10.900.000,00)	97,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482.000.000,00	471.100.000,00	(10.900.000,00)	97,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	12.412.100,00	12.376.500,00	(35.600,00)	99,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	12.412.100,00	12.376.500,00	(35.600,00)	99,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.412.100,00	12.376.500,00	(35.600,00)	99,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	564.591.850,00	546.667.863,00	(17.923.987,00)	96,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	188.170.650,00	186.593.063,00	(1.577.587,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	188.170.650,00	186.593.063,00	(1.577.587,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.170.650,00	186.593.063,00	(1.577.587,00)	99,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	376.421.200,00	360.074.800,00	(16.346.400,00)	95,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	376.421.200,00	360.074.800,00	(16.346.400,00)	95,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.421.200,00	360.074.800,00	(16.346.400,00)	95,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	558.745.000,00	434.418.420,00	(124.326.580,00)	77,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	243.410.000,00	150.419.150,00	(92.990.850,00)	61,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	243.410.000,00	150.419.150,00	(92.990.850,00)	61,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.410.000,00	150.419.150,00	(92.990.850,00)	61,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	266.925.000,00	260.525.000,00	(6.400.000,00)	97,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	266.925.000,00	260.525.000,00	(6.400.000,00)	97,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.925.000,00	260.525.000,00	(6.400.000,00)	97,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	48.410.000,00	23.474.270,00	(24.935.730,00)	48,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	48.410.000,00	23.474.270,00	(24.935.730,00)	48,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.410.000,00	23.474.270,00	(24.935.730,00)	48,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.031.959.225,00	1.784.546.017,00	(247.413.208,00)	87,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	401.825.514,00	370.657.831,00	(31.167.683,00)	92,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	31.021.000,00	30.220.637,00	(800.363,00)	97,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.021.000,00	30.220.637,00	(800.363,00)	97,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.021.000,00	30.220.637,00	(800.363,00)	97,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0017		PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	24.477.828,00	12.949.600,00	(11.528.228,00)	52,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	24.477.828,00	12.949.600,00	(11.528.228,00)	52,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.477.828,00	12.949.600,00	(11.528.228,00)	52,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	346.326.686,00	327.487.594,00	(18.839.092,00)	94,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	165.063.226,00	146.733.024,00	(18.330.202,00)	88,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.955.446,00	35.464.234,00	(17.491.212,00)	66,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.05	Belanja Hibah	112.107.780,00	111.268.790,00	(838.990,00)	99,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	181.263.460,00	180.754.570,00	(508.890,00)	99,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	181.263.460,00	180.754.570,00	(508.890,00)	99,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.630.133.711,00	1.413.888.186,00	(216.245.525,00)	86,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	557.592.777,00	393.578.388,00	(164.014.389,00)	70,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	557.592.777,00	393.578.388,00	(164.014.389,00)	70,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.885.527,00	354.488.388,00	(160.397.139,00)	68,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.05	Belanja Hibah	42.707.250,00	39.090.000,00	(3.617.250,00)	91,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.027.213.934,00	1.005.127.460,00	(22.086.474,00)	97,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	942.921.883,00	941.369.060,00	(1.552.823,00)	99,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.513.000,00	401.513.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1.05	Belanja Hibah	541.408.883,00	539.856.060,00	(1.552.823,00)	99,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	84.292.051,00	63.758.400,00	(20.533.651,00)	75,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.539.951,00	63.758.400,00	(781.551,00)	98,78	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.752.100,00	0,00	(19.752.100,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	45.327.000,00	15.182.338,00	(30.144.662,00)	33,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	45.327.000,00	15.182.338,00	(30.144.662,00)	33,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.327.000,00	15.182.338,00	(30.144.662,00)	33,49	
				JUMLAH BELANJA	11.859.796.851,00	10.321.407.690,00	(1.538.389.161,00)	87,02	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(11.859.796.851,00)	(10.321.407.690,00)	1.538.389.161,00	87,02	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.859.796.851,00)	(10.321.407.690,00)	1.538.389.161,00	87,02	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.23.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	14.001.000,00	(20.999.000,00)	40,00	
	3.25.0.00.0.00.23.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00	14.001.000,00	(20.999.000,00)	40,00	
	3.25.0.00.0.00.23.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.000.000,00	14.001.000,00	(20.999.000,00)	40,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	35.000.000,00	14.001.000,00	(20.999.000,00)	40,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000		5	BELANJA DAERAH	16.197.107.218,00	14.379.531.261,00	(1.817.575.957,00)	88,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.087.204.794,00	8.731.555.222,00	(1.355.649.572,00)	86,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	51.412.000,00	25.662.610,00	(25.749.390,00)	49,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	33.613.000,00	22.020.610,00	(11.592.390,00)	65,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.613.000,00	22.020.610,00	(11.592.390,00)	65,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.613.000,00	22.020.610,00	(11.592.390,00)	65,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.775.000,00	0,00	(8.775.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.775.000,00	0,00	(8.775.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.775.000,00	0,00	(8.775.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	9.024.000,00	3.642.000,00	(5.382.000,00)	40,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.024.000,00	3.642.000,00	(5.382.000,00)	40,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.024.000,00	3.642.000,00	(5.382.000,00)	40,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	(1.081.759.553,00)	85,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	(1.081.759.553,00)	85,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	(1.081.759.553,00)	85,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	(1.081.759.553,00)	85,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	52.371.000,00	52.225.275,00	(145.725,00)	99,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	52.371.000,00	52.225.275,00	(145.725,00)	99,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.371.000,00	52.225.275,00	(145.725,00)	99,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.371.000,00	52.225.275,00	(145.725,00)	99,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	77.800.000,00	56.803.953,00	(20.996.047,00)	73,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	77.800.000,00	56.803.953,00	(20.996.047,00)	73,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.800.000,00	56.803.953,00	(20.996.047,00)	73,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.800.000,00	56.803.953,00	(20.996.047,00)	73,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	771.284.407,00	730.356.032,00	(40.928.375,00)	94,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	65.724.080,00	58.691.388,00	(7.032.692,00)	89,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.724.080,00	58.691.388,00	(7.032.692,00)	89,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.724.080,00	58.691.388,00	(7.032.692,00)	89,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	159.708.521,00	154.276.000,00	(5.432.521,00)	96,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	159.028.521,00	153.596.000,00	(5.432.521,00)	96,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.028.521,00	153.596.000,00	(5.432.521,00)	96,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	53.245.105,00	45.350.994,00	(7.894.111,00)	85,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.245.105,00	45.350.994,00	(7.894.111,00)	85,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.245.105,00	45.350.994,00	(7.894.111,00)	85,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	97.819.780,00	90.758.000,00	(7.061.780,00)	92,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	97.819.780,00	90.758.000,00	(7.061.780,00)	92,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.819.780,00	90.758.000,00	(7.061.780,00)	92,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.555.852,00	35.921.294,00	(634.558,00)	98,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.555.852,00	35.921.294,00	(634.558,00)	98,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.555.852,00	35.921.294,00	(634.558,00)	98,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	35.780.369,00	31.620.000,00	(4.160.369,00)	88,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	35.780.369,00	31.620.000,00	(4.160.369,00)	88,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.780.369,00	31.620.000,00	(4.160.369,00)	88,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	172.111.000,00	163.423.656,00	(8.687.344,00)	94,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	172.111.000,00	163.423.656,00	(8.687.344,00)	94,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.111.000,00	163.423.656,00	(8.687.344,00)	94,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	109.659.700,00	109.634.700,00	(25.000,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	109.659.700,00	109.634.700,00	(25.000,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.659.700,00	109.634.700,00	(25.000,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.593.163,00	7.539.800,00	(53.363,00)	99,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	7.593.163,00	7.539.800,00	(53.363,00)	99,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	6.913.163,00	6.859.800,00	(53.363,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.913.163,00	6.859.800,00	(53.363,00)	99,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.083.845.121,00	940.988.147,00	(142.856.974,00)	86,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	288.960.321,00	262.256.947,00	(26.703.374,00)	90,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	288.960.321,00	262.256.947,00	(26.703.374,00)	90,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.960.321,00	262.256.947,00	(26.703.374,00)	90,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	794.884.800,00	678.731.200,00	(116.153.600,00)	85,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	794.884.800,00	678.731.200,00	(116.153.600,00)	85,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.884.800,00	678.731.200,00	(116.153.600,00)	85,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	440.698.000,00	397.537.855,00	(43.160.145,00)	90,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	330.590.000,00	304.910.855,00	(25.679.145,00)	92,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	330.590.000,00	304.910.855,00	(25.679.145,00)	92,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.590.000,00	304.910.855,00	(25.679.145,00)	92,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	69.978.000,00	69.232.000,00	(746.000,00)	98,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	69.978.000,00	69.232.000,00	(746.000,00)	98,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.978.000,00	69.232.000,00	(746.000,00)	98,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	40.130.000,00	23.395.000,00	(16.735.000,00)	58,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.130.000,00	23.395.000,00	(16.735.000,00)	58,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.130.000,00	23.395.000,00	(16.735.000,00)	58,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.721.105.175,00	2.574.231.060,00	(146.874.115,00)	94,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.572.710.125,00	2.427.947.491,00	(144.762.634,00)	94,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN	67.852.500,00	62.456.330,00	(5.396.170,00)	92,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.852.500,00	62.456.330,00	(5.396.170,00)	92,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.852.500,00	62.456.330,00	(5.396.170,00)	92,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	2.504.857.625,00	2.365.491.161,00	(139.366.464,00)	94,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.504.857.625,00	2.365.491.161,00	(139.366.464,00)	94,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.073.000,00	68.934.305,00	(138.695,00)	99,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	2.435.784.625,00	2.296.556.856,00	(139.227.769,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.395.050,00	146.283.569,00	(2.111.481,00)	98,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	105.856.050,00	105.404.066,00	(451.984,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.856.050,00	105.404.066,00	(451.984,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.856.050,00	105.404.066,00	(451.984,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0002		PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	42.539.000,00	40.879.503,00	(1.659.497,00)	96,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.539.000,00	40.879.503,00	(1.659.497,00)	96,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.539.000,00	40.879.503,00	(1.659.497,00)	96,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.098.177.806,00	1.826.987.224,00	(271.190.582,00)	87,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	506.909.000,00	495.270.550,00	(11.638.450,00)	97,70	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	499.824.000,00	488.185.550,00	(11.638.450,00)	97,67	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	499.824.000,00	488.185.550,00	(11.638.450,00)	97,67	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.959.000,00	213.320.550,00	(11.638.450,00)	94,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	274.865.000,00	274.865.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.591.268.806,00	1.331.716.674,00	(259.552.132,00)	83,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.462.365.806,00	1.223.974.524,00	(238.391.282,00)	83,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.414.857.806,00	1.177.954.884,00	(236.902.922,00)	83,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.047.306,00	218.571.200,00	(142.476.106,00)	60,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.05	Belanja Hibah	1.053.810.500,00	959.383.684,00	(94.426.816,00)	91,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2	BELANJA MODAL	47.508.000,00	46.019.640,00	(1.488.360,00)	96,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.508.000,00	46.019.640,00	(1.488.360,00)	96,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0010		PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	128.903.000,00	107.742.150,00	(21.160.850,00)	83,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	128.903.000,00	107.742.150,00	(21.160.850,00)	83,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.903.000,00	107.742.150,00	(21.160.850,00)	83,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	360.784.493,00	342.220.409,00	(18.564.084,00)	94,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	360.784.493,00	342.220.409,00	(18.564.084,00)	94,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0004		PENGAWASAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	33.926.000,00	25.450.829,00	(8.475.171,00)	75,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.926.000,00	25.450.829,00	(8.475.171,00)	75,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.926.000,00	25.450.829,00	(8.475.171,00)	75,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0006		PENGAWASAN USAHA PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN/ATAU USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	18.319.000,00	17.010.728,00	(1.308.272,00)	92,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.319.000,00	17.010.728,00	(1.308.272,00)	92,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.319.000,00	17.010.728,00	(1.308.272,00)	92,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0007		PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU USAHA PENGANGKUTAN IKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	308.539.493,00	299.758.852,00	(8.780.641,00)	97,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	308.539.493,00	299.758.852,00	(8.780.641,00)	97,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.195.743,00	172.313.048,00	(7.882.695,00)	95,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	128.343.750,00	127.445.804,00	(897.946,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	929.834.950,00	904.537.346,00	(25.297.604,00)	97,27	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.01		PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	47.268.000,00	43.181.124,00	(4.086.876,00)	91,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.01.0005		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SKALA USAHA DAN RISIKO	47.268.000,00	43.181.124,00	(4.086.876,00)	91,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.268.000,00	43.181.124,00	(4.086.876,00)	91,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.268.000,00	43.181.124,00	(4.086.876,00)	91,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	882.566.950,00	861.356.222,00	(21.210.728,00)	97,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	276.791.000,00	267.382.156,00	(9.408.844,00)	96,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	276.791.000,00	267.382.156,00	(9.408.844,00)	96,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.791.000,00	267.382.156,00	(9.408.844,00)	96,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	605.775.950,00	593.974.066,00	(11.801.884,00)	98,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	578.675.950,00	567.457.276,00	(11.218.674,00)	98,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.675.950,00	281.565.676,00	(3.110.274,00)	98,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	294.000.000,00	285.891.600,00	(8.108.400,00)	97,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	27.100.000,00	26.516.790,00	(583.210,00)	97,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.100.000,00	26.516.790,00	(583.210,00)	97,84	
				JUMLAH BELANJA	16.197.107.218,00	14.379.531.261,00	(1.817.575.957,00)	88,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.162.107.218,00)	(14.363.530.261,00)	1.796.576.957,00	88,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.162.107.218,00)	(14.363.530.261,00)	1.796.576.957,00	88,88	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.24.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	40.050.000,00	50.000,00	100,12	
	3.27.0.00.0.00.24.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	40.050.000,00	50.000,00	100,12	
	3.27.0.00.0.00.24.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	40.050.000,00	50.000,00	100,12	
				JUMLAH PENDAPATAN	40.000.000,00	40.050.000,00	50.000,00	100,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	52.512.743.436,00	42.747.660.648,00	(9.765.082.788,00)	81,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.352.976.486,50	26.713.745.004,00	(5.639.231.482,50)	82,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157.413.530,33	145.711.385,00	(11.702.145,33)	92,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	49.194.347,00	45.229.837,00	(3.964.510,00)	91,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.194.347,00	45.229.837,00	(3.964.510,00)	91,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.194.347,00	45.229.837,00	(3.964.510,00)	91,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.000.000,00	19.904.052,00	(95.948,00)	99,52	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.904.052,00	(95.948,00)	99,52	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.904.052,00	(95.948,00)	99,52	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	88.219.183,33	80.577.496,00	(7.641.687,33)	91,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.906.883,33	33.477.496,00	(429.387,33)	98,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.906.883,33	33.477.496,00	(429.387,33)	98,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	54.312.300,00	47.100.000,00	(7.212.300,00)	86,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.312.300,00	47.100.000,00	(7.212.300,00)	86,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	(5.103.204.155,02)	80,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	(5.103.204.155,02)	80,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	(5.103.204.155,02)	80,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	(5.103.204.155,02)	80,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	88.191.250,00	88.051.331,00	(139.919,00)	99,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	88.191.250,00	88.051.331,00	(139.919,00)	99,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.191.250,00	88.051.331,00	(139.919,00)	99,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.191.250,00	88.051.331,00	(139.919,00)	99,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	621.745.446,15	542.215.463,00	(79.529.983,15)	87,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	28.035.704,00	25.211.430,00	(2.824.274,00)	89,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.035.704,00	25.211.430,00	(2.824.274,00)	89,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.035.704,00	25.211.430,00	(2.824.274,00)	89,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	182.305.179,00	173.478.792,00	(8.826.387,00)	95,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	182.305.179,00	173.478.792,00	(8.826.387,00)	95,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.305.179,00	173.478.792,00	(8.826.387,00)	95,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	56.918.025,00	49.045.158,00	(7.872.867,00)	86,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	56.918.025,00	49.045.158,00	(7.872.867,00)	86,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.918.025,00	49.045.158,00	(7.872.867,00)	86,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	97.123.788,99	89.519.357,00	(7.604.431,99)	92,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	97.123.788,99	89.519.357,00	(7.604.431,99)	92,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.123.788,99	89.519.357,00	(7.604.431,99)	92,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.359.595,16	42.272.517,00	(8.087.078,16)	83,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.359.595,16	42.272.517,00	(8.087.078,16)	83,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.359.595,16	42.272.517,00	(8.087.078,16)	83,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	39.993.104,00	0,00	(39.993.104,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.328.104,00	0,00	(38.328.104,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.328.104,00	0,00	(38.328.104,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	24.988.050,00	24.581.000,00	(407.050,00)	98,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.988.050,00	24.581.000,00	(407.050,00)	98,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.988.050,00	24.581.000,00	(407.050,00)	98,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	142.022.000,00	138.107.209,00	(3.914.791,00)	97,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	142.022.000,00	138.107.209,00	(3.914.791,00)	97,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.022.000,00	138.107.209,00	(3.914.791,00)	97,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.055.607.367,00	3.636.982.797,00	(418.624.570,00)	89,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	252.985.145,00	225.682.797,00	(27.302.348,00)	89,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	252.985.145,00	225.682.797,00	(27.302.348,00)	89,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.985.145,00	225.682.797,00	(27.302.348,00)	89,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.802.622.222,00	3.411.300.000,00	(391.322.222,00)	89,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.802.622.222,00	3.411.300.000,00	(391.322.222,00)	89,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.802.622.222,00	3.411.300.000,00	(391.322.222,00)	89,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	901.661.000,00	875.630.290,00	(26.030.710,00)	97,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	551.880.000,00	527.825.554,00	(24.054.446,00)	95,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	551.880.000,00	527.825.554,00	(24.054.446,00)	95,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.880.000,00	527.825.554,00	(24.054.446,00)	95,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	299.981.000,00	298.196.158,00	(1.784.842,00)	99,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	299.981.000,00	298.196.158,00	(1.784.842,00)	99,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.981.000,00	298.196.158,00	(1.784.842,00)	99,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	49.800.000,00	49.608.578,00	(191.422,00)	99,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	49.800.000,00	49.608.578,00	(191.422,00)	99,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	49.608.578,00	(191.422,00)	99,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.177.837.916,00	10.936.221.677,00	(2.241.616.239,00)	82,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	9.545.964.376,00	7.637.669.710,00	(1.908.294.666,00)	80,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	4.538.536.676,00	3.418.860.491,00	(1.119.676.185,00)	75,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.538.536.676,00	3.418.860.491,00	(1.119.676.185,00)	75,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.752.176,00	39.774.300,00	(17.977.876,00)	68,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	4.480.784.500,00	3.379.086.191,00	(1.101.698.309,00)	75,41	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	1.095.810.600,00	458.876.069,00	(636.934.531,00)	41,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.095.810.600,00	458.876.069,00	(636.934.531,00)	41,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.810.600,00	458.876.069,00	(636.934.531,00)	41,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0003		PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT TANAMAN PANGAN BERBENTUK BIJI/BENIH	38.686.000,00	20.533.178,00	(18.152.822,00)	53,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.686.000,00	20.533.178,00	(18.152.822,00)	53,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.686.000,00	20.533.178,00	(18.152.822,00)	53,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0014		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN	3.712.000.000,00	3.586.901.195,00	(125.098.805,00)	96,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	3.712.000.000,00	3.586.901.195,00	(125.098.805,00)	96,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	76.900.195,00	(99.805,00)	99,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0014	5.1.05	Belanja Hibah	3.635.000.000,00	3.510.001.000,00	(124.999.000,00)	96,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0016		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PASCAPANEN HORTIKULTURA	160.931.100,00	152.498.777,00	(8.432.323,00)	94,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	160.931.100,00	152.498.777,00	(8.432.323,00)	94,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.931.100,00	152.498.777,00	(8.432.323,00)	94,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.04		PENGAWASAN OBAT HEWAN DI TINGKAT PENGECER	17.565.000,00	15.199.000,00	(2.366.000,00)	86,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.04.0001		PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN PEREDARAN OBAT HEWAN	17.565.000,00	15.199.000,00	(2.366.000,00)	86,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.565.000,00	15.199.000,00	(2.366.000,00)	86,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.565.000,00	15.199.000,00	(2.366.000,00)	86,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	3.614.308.540,00	3.283.352.967,00	(330.955.573,00)	90,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	3.157.848.000,00	2.968.823.690,00	(189.024.310,00)	94,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.157.848.000,00	2.968.823.690,00	(189.024.310,00)	94,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.774.000,00	55.007.190,00	(3.766.810,00)	93,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.05	Belanja Hibah	3.099.074.000,00	2.913.816.500,00	(185.257.500,00)	94,02	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0004		PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	456.460.540,00	314.529.277,00	(141.931.263,00)	68,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	418.660.540,00	279.414.277,00	(139.246.263,00)	66,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.660.540,00	279.414.277,00	(139.246.263,00)	66,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	37.800.000,00	35.115.000,00	(2.685.000,00)	92,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.800.000,00	35.115.000,00	(2.685.000,00)	92,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.713.169.050,00	1.489.840.356,00	(223.328.694,00)	86,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	1.713.169.050,00	1.489.840.356,00	(223.328.694,00)	86,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN	20.540.000,00	6.298.553,00	(14.241.447,00)	30,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.540.000,00	6.298.553,00	(14.241.447,00)	30,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.540.000,00	6.298.553,00	(14.241.447,00)	30,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	156.936.610,00	154.254.753,00	(2.681.857,00)	98,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	156.936.610,00	154.254.753,00	(2.681.857,00)	98,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.772.500,00	6.458.753,00	(1.313.747,00)	83,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	149.164.110,00	147.796.000,00	(1.368.110,00)	99,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0006		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PINTU AIR	35.429.500,00	25.274.150,00	(10.155.350,00)	71,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.429.500,00	25.274.150,00	(10.155.350,00)	71,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.429.500,00	25.274.150,00	(10.155.350,00)	71,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	1.497.423.940,00	1.303.562.900,00	(193.861.040,00)	87,05	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.297.423.940,00	1.105.069.900,00	(192.354.040,00)	85,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.316.000,00	17.380.300,00	(22.935.700,00)	43,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.05	Belanja Hibah	1.257.107.940,00	1.087.689.600,00	(169.418.340,00)	86,52	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.493.000,00	(1.507.000,00)	99,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.493.000,00	(1.507.000,00)	99,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI	2.839.000,00	450.000,00	(2.389.000,00)	15,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.839.000,00	450.000,00	(2.389.000,00)	15,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.839.000,00	450.000,00	(2.389.000,00)	15,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.181.541.500,00	855.676.925,00	(325.864.575,00)	72,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	354.658.500,00	269.132.427,00	(85.526.073,00)	75,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0005		PELAKSANAAN SURVEILANS PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS PADA HEWAN	110.999.000,00	76.417.323,00	(34.581.677,00)	68,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	110.999.000,00	76.417.323,00	(34.581.677,00)	68,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.999.000,00	76.417.323,00	(34.581.677,00)	68,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	243.659.500,00	192.715.104,00	(50.944.396,00)	79,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	243.659.500,00	192.715.104,00	(50.944.396,00)	79,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.659.500,00	192.715.104,00	(50.944.396,00)	79,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	395.609.000,00	285.272.181,00	(110.336.819,00)	72,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.03.0002		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	395.609.000,00	285.272.181,00	(110.336.819,00)	72,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	395.609.000,00	285.272.181,00	(110.336.819,00)	72,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.609.000,00	285.272.181,00	(110.336.819,00)	72,10	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	431.274.000,00	301.272.317,00	(130.001.683,00)	69,85	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0002		PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	46.362.500,00	45.376.295,00	(986.205,00)	97,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.362.500,00	45.376.295,00	(986.205,00)	97,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.362.500,00	45.376.295,00	(986.205,00)	97,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0004		PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	162.226.500,00	133.624.944,00	(28.601.556,00)	82,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	162.226.500,00	133.624.944,00	(28.601.556,00)	82,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.226.500,00	133.624.944,00	(28.601.556,00)	82,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0007		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PETUGAS TEKNIS KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, DAN KESEJEHTERAAN HEWAN	222.685.000,00	122.271.078,00	(100.413.922,00)	54,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	222.685.000,00	122.271.078,00	(100.413.922,00)	54,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.685.000,00	122.271.078,00	(100.413.922,00)	54,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	116.512.500,00	56.312.780,00	(60.199.720,00)	48,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	116.512.500,00	56.312.780,00	(60.199.720,00)	48,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	116.512.500,00	56.312.780,00	(60.199.720,00)	48,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	116.512.500,00	56.312.780,00	(60.199.720,00)	48,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.512.500,00	56.312.780,00	(60.199.720,00)	48,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	(1.274.842.077,50)	67,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	(1.274.842.077,50)	67,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	2.607.970.974,00	1.825.016.896,00	(782.954.078,00)	69,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.607.970.974,00	1.825.016.896,00	(782.954.078,00)	69,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.607.970.974,00	1.825.016.896,00	(782.954.078,00)	69,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	741.527.067,00	450.210.960,00	(291.316.107,00)	60,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	741.527.067,00	450.210.960,00	(291.316.107,00)	60,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.527.067,00	350.210.960,00	(291.316.107,00)	54,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	183.447.942,50	6.816.050,00	(176.631.892,50)	3,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	183.447.942,50	6.816.050,00	(176.631.892,50)	3,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.447.942,50	6.816.050,00	(176.631.892,50)	3,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0006		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	437.760.000,00	413.820.000,00	(23.940.000,00)	94,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	437.760.000,00	413.820.000,00	(23.940.000,00)	94,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.760.000,00	413.820.000,00	(23.940.000,00)	94,53	
				JUMLAH BELANJA	52.512.743.436,00	42.747.660.648,00	(9.765.082.788,00)	81,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(52.472.743.436,00)	(42.707.610.648,00)	9.765.132.788,00	81,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(52.472.743.436,00)	(42.707.610.648,00)	9.765.132.788,00	81,39	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Perkebunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.25.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	139.860.000,00	705.183.360,00	565.323.360,00	504,20	
	3.27.0.00.0.00.25.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.860.000,00	705.183.360,00	565.323.360,00	504,20	
	3.27.0.00.0.00.25.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	139.860.000,00	705.183.360,00	565.323.360,00	504,20	
				JUMLAH PENDAPATAN	139.860.000,00	705.183.360,00	565.323.360,00	504,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	45.065.363.508,00	40.895.658.825,00	(4.169.704.683,00)	90,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.465.489.777,00	10.534.268.680,00	(1.931.221.097,00)	84,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	261.584.630,00	161.014.111,00	(100.570.519,00)	61,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	63.560.830,00	41.043.969,00	(22.516.861,00)	64,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.560.830,00	41.043.969,00	(22.516.861,00)	64,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.560.830,00	41.043.969,00	(22.516.861,00)	64,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.017.000,00	6.570.000,00	(12.447.000,00)	34,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.017.000,00	6.570.000,00	(12.447.000,00)	34,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.017.000,00	6.570.000,00	(12.447.000,00)	34,54	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	179.006.800,00	113.400.142,00	(65.606.658,00)	63,34	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	179.006.800,00	113.400.142,00	(65.606.658,00)	63,34	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.006.800,00	113.400.142,00	(65.606.658,00)	63,34	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	(1.400.837.826,00)	84,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	(1.400.837.826,00)	84,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	(1.400.837.826,00)	84,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	(1.400.837.826,00)	84,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	52.440.000,00	50.977.800,00	(1.462.200,00)	97,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	52.440.000,00	50.977.800,00	(1.462.200,00)	97,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.440.000,00	50.977.800,00	(1.462.200,00)	97,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.440.000,00	50.977.800,00	(1.462.200,00)	97,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	44.230.000,00	22.643.000,00	(21.587.000,00)	51,19	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20.230.000,00	14.643.000,00	(5.587.000,00)	72,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.230.000,00	14.643.000,00	(5.587.000,00)	72,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.230.000,00	14.643.000,00	(5.587.000,00)	72,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	33,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	33,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	33,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	495.022.234,00	448.576.902,00	(46.445.332,00)	90,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.874.729,00	29.044.260,00	(830.469,00)	97,22	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.874.729,00	29.044.260,00	(830.469,00)	97,22	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.874.729,00	29.044.260,00	(830.469,00)	97,22	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.912.831,00	46.907.500,00	(1.005.331,00)	97,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	47.232.831,00	46.227.500,00	(1.005.331,00)	97,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.232.831,00	46.227.500,00	(1.005.331,00)	97,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.166.561,00	49.262.355,00	(904.206,00)	98,19	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.173.561,00	42.992.355,00	(181.206,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.173.561,00	42.992.355,00	(181.206,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	6.993.000,00	6.270.000,00	(723.000,00)	89,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.993.000,00	6.270.000,00	(723.000,00)	89,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	139.472.014,00	130.518.430,00	(8.953.584,00)	93,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.472.014,00	130.518.430,00	(8.953.584,00)	93,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.472.014,00	130.518.430,00	(8.953.584,00)	93,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.246.499,00	56.581.474,00	(2.665.025,00)	95,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.246.499,00	56.581.474,00	(2.665.025,00)	95,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.246.499,00	56.581.474,00	(2.665.025,00)	95,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.978.600,00	3.978.600,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.978.600,00	3.978.600,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.978.600,00	3.978.600,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.891.000,00	1.560.500,00	(1.330.500,00)	53,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.891.000,00	1.560.500,00	(1.330.500,00)	53,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.891.000,00	1.560.500,00	(1.330.500,00)	53,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	121.480.000,00	91.223.783,00	(30.256.217,00)	75,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	121.480.000,00	91.223.783,00	(30.256.217,00)	75,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.480.000,00	91.223.783,00	(30.256.217,00)	75,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.207.500,00	40.307.000,00	(900.500,00)	97,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	41.207.500,00	40.307.000,00	(900.500,00)	97,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	39.847.500,00	39.627.000,00	(220.500,00)	99,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.847.500,00	39.627.000,00	(220.500,00)	99,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.518.449.667,00	1.178.982.311,00	(339.467.356,00)	77,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	228.339.000,00	194.932.311,00	(33.406.689,00)	85,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	228.339.000,00	194.932.311,00	(33.406.689,00)	85,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.339.000,00	194.932.311,00	(33.406.689,00)	85,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.290.110.667,00	984.050.000,00	(306.060.667,00)	76,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.290.110.667,00	984.050.000,00	(306.060.667,00)	76,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.110.667,00	984.050.000,00	(306.060.667,00)	76,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	776.068.800,00	756.118.436,00	(19.950.364,00)	97,42	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	339.455.000,00	327.539.957,00	(11.915.043,00)	96,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	339.455.000,00	327.539.957,00	(11.915.043,00)	96,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.455.000,00	327.539.957,00	(11.915.043,00)	96,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	383.354.800,00	380.433.650,00	(2.921.150,00)	99,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	382.674.800,00	379.753.650,00	(2.921.150,00)	99,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382.674.800,00	379.753.650,00	(2.921.150,00)	99,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	53.259.000,00	48.144.829,00	(5.114.171,00)	90,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	53.259.000,00	48.144.829,00	(5.114.171,00)	90,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.259.000,00	48.144.829,00	(5.114.171,00)	90,39	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.766.566.492,00	5.747.576.310,00	(1.018.990.182,00)	84,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	3.984.947.750,00	2.974.209.557,00	(1.010.738.193,00)	74,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	903.916.250,00	94.739.246,00	(809.177.004,00)	10,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	903.916.250,00	94.739.246,00	(809.177.004,00)	10,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.916.250,00	94.739.246,00	(809.177.004,00)	10,48	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	3.081.031.500,00	2.879.470.311,00	(201.561.189,00)	93,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.081.031.500,00	2.879.470.311,00	(201.561.189,00)	93,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.337.500,00	60.594.316,00	(35.743.184,00)	62,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.984.694.000,00	2.818.875.995,00	(165.818.005,00)	94,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	2.781.618.742,00	2.773.366.753,00	(8.251.989,00)	99,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	4.854.900,00	4.854.900,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.854.900,00	4.854.900,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.854.900,00	4.854.900,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0004		PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN	2.776.763.842,00	2.768.511.853,00	(8.251.989,00)	99,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.766.818.242,00	2.758.591.853,00	(8.226.389,00)	99,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.766.818.242,00	2.758.591.853,00	(8.226.389,00)	99,70	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	9.945.600,00	9.920.000,00	(25.600,00)	99,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.945.600,00	9.920.000,00	(25.600,00)	99,74	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.370.278.291,00	8.214.632.825,00	(155.645.466,00)	98,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	82.999.500,00	82.993.529,00	(5.971,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	82.999.500,00	82.993.529,00	(5.971,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.999.500,00	82.993.529,00	(5.971,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.999.500,00	82.993.529,00	(5.971,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	8.287.278.791,00	8.131.639.296,00	(155.639.495,00)	98,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN	37.235.500,00	37.235.500,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.235.500,00	37.235.500,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.235.500,00	37.235.500,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	7.960.699.529,00	7.811.050.386,00	(149.649.143,00)	98,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.960.699.529,00	7.811.050.386,00	(149.649.143,00)	98,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.252.665,00	205.029.836,00	(58.222.829,00)	77,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	7.697.446.864,00	7.606.020.550,00	(91.426.314,00)	98,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0004		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT	289.343.762,00	283.353.410,00	(5.990.352,00)	97,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	289.343.762,00	283.353.410,00	(5.990.352,00)	97,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.960.000,00	14.693.410,00	(4.266.590,00)	77,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	270.383.762,00	268.660.000,00	(1.723.762,00)	99,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	13.471.364.247,00	13.025.052.420,00	(446.311.827,00)	96,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	13.471.364.247,00	13.025.052.420,00	(446.311.827,00)	96,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	98.347.649,00	97.945.017,00	(402.632,00)	99,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.347.649,00	97.945.017,00	(402.632,00)	99,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.347.649,00	97.945.017,00	(402.632,00)	99,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0003		PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	13.373.016.598,00	12.927.107.403,00	(445.909.195,00)	96,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.383.341.558,00	11.043.397.403,00	(339.944.155,00)	97,01	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.351.220.160,00	2.134.034.003,00	(217.186.157,00)	90,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	9.032.121.398,00	8.909.363.400,00	(122.757.998,00)	98,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.989.675.040,00	1.883.710.000,00	(105.965.040,00)	94,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.989.675.040,00	1.883.710.000,00	(105.965.040,00)	94,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.190.081.000,00	843.468.510,00	(346.612.490,00)	70,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.190.081.000,00	843.468.510,00	(346.612.490,00)	70,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06.2.01.0005		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN	1.190.081.000,00	843.468.510,00	(346.612.490,00)	70,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.190.081.000,00	843.468.510,00	(346.612.490,00)	70,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.081.000,00	843.468.510,00	(346.612.490,00)	70,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	(270.923.621,00)	90,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	(270.923.621,00)	90,32	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	1.017.108.201,00	793.383.198,00	(223.725.003,00)	78,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.017.108.201,00	793.383.198,00	(223.725.003,00)	78,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.108.201,00	793.383.198,00	(223.725.003,00)	78,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	1.716.450.500,00	1.669.307.050,00	(47.143.450,00)	97,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.716.450.500,00	1.669.307.050,00	(47.143.450,00)	97,25	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.972.800,00	112.554.547,00	(418.253,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.603.477.700,00	1.556.752.503,00	(46.725.197,00)	97,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0008		PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI	68.025.000,00	67.969.832,00	(55.168,00)	99,91	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	68.025.000,00	67.969.832,00	(55.168,00)	99,91	
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.025.000,00	67.969.832,00	(55.168,00)	99,91	
				JUMLAH BELANJA	45.065.363.508,00	40.895.658.825,00	(4.169.704.683,00)	90,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(44.925.503.508,00)	(40.190.475.465,00)	4.735.028.043,00	89,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(44.925.503.508,00)	(40.190.475.465,00)	4.735.028.043,00	89,46	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	660.000.000,00	749.038.900,00	89.038.900,00	113,49	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	660.000.000,00	749.038.900,00	89.038.900,00	113,49	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	660.000.000,00	735.303.750,00	75.303.750,00	111,40	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	13.735.150,00	13.735.150,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	660.000.000,00	749.038.900,00	89.038.900,00	113,49	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	20.814.637.605,50	17.487.815.100,00	(3.326.822.505,50)	84,01	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.910.727.697,50	11.939.219.111,00	(1.971.508.586,50)	85,82	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	83.637.189,50	74.833.000,00	(8.804.189,50)	89,47	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	49.079.000,50	46.161.000,00	(2.918.000,50)	94,05	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.079.000,50	46.161.000,00	(2.918.000,50)	94,05	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.079.000,50	46.161.000,00	(2.918.000,50)	94,05	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.492.189,00	3.606.000,00	(5.886.189,00)	37,98	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.492.189,00	3.606.000,00	(5.886.189,00)	37,98	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.492.189,00	3.606.000,00	(5.886.189,00)	37,98	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	25.066.000,00	25.066.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.066.000,00	25.066.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.066.000,00	25.066.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	(1.381.949.192,00)	86,42	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	(1.381.949.192,00)	86,42	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	(1.381.949.192,00)	86,42	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	(1.381.949.192,00)	86,42	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	124.110.500,00	96.151.500,00	(27.959.000,00)	77,47	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	58.680.000,00	52.680.000,00	(6.000.000,00)	89,77	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.680.000,00	52.680.000,00	(6.000.000,00)	89,77	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.680.000,00	52.680.000,00	(6.000.000,00)	89,77	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	65.430.500,00	43.471.500,00	(21.959.000,00)	66,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.430.500,00	43.471.500,00	(21.959.000,00)	66,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.430.500,00	43.471.500,00	(21.959.000,00)	66,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	577.889.830,00	514.005.150,00	(63.884.680,00)	88,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.983.187,00	28.221.750,00	(1.761.437,00)	94,12	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.983.187,00	28.221.750,00	(1.761.437,00)	94,12	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.983.187,00	28.221.750,00	(1.761.437,00)	94,12	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	120.706.173,00	117.700.000,00	(3.006.173,00)	97,50	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	120.706.173,00	117.700.000,00	(3.006.173,00)	97,50	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.706.173,00	117.700.000,00	(3.006.173,00)	97,50	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	59.908.032,00	59.732.323,00	(175.709,00)	99,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.908.032,00	59.732.323,00	(175.709,00)	99,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.908.032,00	59.732.323,00	(175.709,00)	99,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	99.957.221,00	96.882.465,00	(3.074.756,00)	96,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.957.221,00	96.882.465,00	(3.074.756,00)	96,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.957.221,00	96.882.465,00	(3.074.756,00)	96,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.172.217,00	44.735.500,00	(10.436.717,00)	81,08	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.172.217,00	44.735.500,00	(10.436.717,00)	81,08	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.172.217,00	44.735.500,00	(10.436.717,00)	81,08	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	22.050.000,00	3.871.000,00	(18.179.000,00)	17,55	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.050.000,00	3.871.000,00	(18.179.000,00)	17,55	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	3.871.000,00	(18.179.000,00)	17,55	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	190.113.000,00	162.862.112,00	(27.250.888,00)	85,66	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	190.113.000,00	162.862.112,00	(27.250.888,00)	85,66	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.113.000,00	162.862.112,00	(27.250.888,00)	85,66	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.628.680,00	22.115.000,00	(2.513.680,00)	89,79	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	24.628.680,00	22.115.000,00	(2.513.680,00)	89,79	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	24.628.680,00	22.115.000,00	(2.513.680,00)	89,79	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.628.680,00	22.115.000,00	(2.513.680,00)	89,79	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.557.569.349,00	2.195.571.818,00	(361.997.531,00)	85,84	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	488.110.949,00	397.161.418,00	(90.949.531,00)	81,36	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	488.110.949,00	397.161.418,00	(90.949.531,00)	81,36	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.110.949,00	397.161.418,00	(90.949.531,00)	81,36	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.069.458.400,00	1.798.410.400,00	(271.048.000,00)	86,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.069.458.400,00	1.798.410.400,00	(271.048.000,00)	86,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.458.400,00	1.798.410.400,00	(271.048.000,00)	86,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	365.809.020,00	241.408.706,00	(124.400.314,00)	65,99	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	316.860.000,00	201.924.847,00	(114.935.153,00)	63,72	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	316.860.000,00	201.924.847,00	(114.935.153,00)	63,72	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.860.000,00	201.924.847,00	(114.935.153,00)	63,72	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	7.407.520,00	7.407.520,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	7.407.520,00	7.407.520,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.407.520,00	7.407.520,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	41.541.500,00	32.076.339,00	(9.465.161,00)	77,21	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	41.541.500,00	32.076.339,00	(9.465.161,00)	77,21	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.541.500,00	32.076.339,00	(9.465.161,00)	77,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	350.949.378,00	184.183.700,00	(166.765.678,00)	52,48	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.01		PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	69.851.000,00	15.674.500,00	(54.176.500,00)	22,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	69.851.000,00	15.674.500,00	(54.176.500,00)	22,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.851.000,00	15.674.500,00	(54.176.500,00)	22,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.851.000,00	15.674.500,00	(54.176.500,00)	22,43	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.02		PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	35.667.000,00	6.842.500,00	(28.824.500,00)	19,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.02.0001		FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	35.667.000,00	6.842.500,00	(28.824.500,00)	19,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.667.000,00	6.842.500,00	(28.824.500,00)	19,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.667.000,00	6.842.500,00	(28.824.500,00)	19,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.06		PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	245.431.378,00	161.666.700,00	(83.764.678,00)	65,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.06.0003		PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN BERBAHAYA (PA-B2) MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2)	245.431.378,00	161.666.700,00	(83.764.678,00)	65,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	245.431.378,00	161.666.700,00	(83.764.678,00)	65,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.431.378,00	161.666.700,00	(83.764.678,00)	65,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	771.243.450,00	691.175.678,00	(80.067.772,00)	89,61	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	771.243.450,00	691.175.678,00	(80.067.772,00)	89,61	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	771.243.450,00	691.175.678,00	(80.067.772,00)	89,61	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.131.000,00	125.735.428,00	(24.395.572,00)	83,75	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.131.000,00	125.735.428,00	(24.395.572,00)	83,75	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	621.112.450,00	565.440.250,00	(55.672.200,00)	91,03	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	621.112.450,00	565.440.250,00	(55.672.200,00)	91,03	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	884.861.000,00	615.248.650,00	(269.612.350,00)	69,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.01		MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	24.491.000,00	8.102.300,00	(16.388.700,00)	33,08	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	24.491.000,00	8.102.300,00	(16.388.700,00)	33,08	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.491.000,00	8.102.300,00	(16.388.700,00)	33,08	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.491.000,00	8.102.300,00	(16.388.700,00)	33,08	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	835.894.000,00	596.662.550,00	(239.231.450,00)	71,38	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	30.862.000,00	11.097.600,00	(19.764.400,00)	35,95	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.862.000,00	11.097.600,00	(19.764.400,00)	35,95	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.862.000,00	11.097.600,00	(19.764.400,00)	35,95	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0003		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	805.032.000,00	585.564.950,00	(219.467.050,00)	72,73	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	805.032.000,00	585.564.950,00	(219.467.050,00)	72,73	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.032.000,00	585.564.950,00	(219.467.050,00)	72,73	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.03		PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.476.000,00	10.483.800,00	(13.992.200,00)	42,83	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.03.0003		PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	24.476.000,00	10.483.800,00	(13.992.200,00)	42,83	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.476.000,00	10.483.800,00	(13.992.200,00)	42,83	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.476.000,00	10.483.800,00	(13.992.200,00)	42,83	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	(726.346.149,00)	84,32	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	(726.346.149,00)	84,32	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0002		PAMERAN DAGANG NASIONAL	935.363.500,00	557.185.780,00	(378.177.720,00)	59,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	935.363.500,00	557.185.780,00	(378.177.720,00)	59,56	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.363.500,00	557.185.780,00	(378.177.720,00)	59,56	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0003		PAMERAN DAGANG LOKAL	3.673.267.240,00	3.332.661.811,00	(340.605.429,00)	90,72	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.673.267.240,00	3.332.661.811,00	(340.605.429,00)	90,72	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.673.267.240,00	3.332.661.811,00	(340.605.429,00)	90,72	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0004		MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN	25.348.000,00	17.785.000,00	(7.563.000,00)	70,16	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.348.000,00	17.785.000,00	(7.563.000,00)	70,16	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.348.000,00	17.785.000,00	(7.563.000,00)	70,16	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	198.404.040,00	118.998.800,00	(79.405.240,00)	59,97	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	198.404.040,00	118.998.800,00	(79.405.240,00)	59,97	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	144.498.040,00	89.981.800,00	(54.516.240,00)	62,27	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	144.498.040,00	89.981.800,00	(54.516.240,00)	62,27	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.498.040,00	89.981.800,00	(54.516.240,00)	62,27	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	53.906.000,00	29.017.000,00	(24.889.000,00)	53,82	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.906.000,00	29.017.000,00	(24.889.000,00)	53,82	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.906.000,00	29.017.000,00	(24.889.000,00)	53,82	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	64.473.300,00	31.356.570,00	(33.116.730,00)	48,63	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07.2.01		PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	64.473.300,00	31.356.570,00	(33.116.730,00)	48,63	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07.2.01.0006		PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	64.473.300,00	31.356.570,00	(33.116.730,00)	48,63	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	64.473.300,00	31.356.570,00	(33.116.730,00)	48,63	
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.473.300,00	31.356.570,00	(33.116.730,00)	48,63	
				JUMLAH BELANJA	20.814.637.605,50	17.487.815.100,00	(3.326.822.505,50)	84,01	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(20.154.637.605,50)	(16.738.776.200,00)	3.415.861.405,50	83,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.154.637.605,50)	(16.738.776.200,00)	3.415.861.405,50	83,05	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	660.000.000,00	749.038.900,00	89.038.900,00	113,49	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	660.000.000,00	749.038.900,00	89.038.900,00	113,49	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	660.000.000,00	735.303.750,00	75.303.750,00	111,40	
	3.30.3.31.0.00.26.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	13.735.150,00	13.735.150,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	660.000.000,00	749.038.900,00	89.038.900,00	113,49	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	1.515.928.854,50	1.218.039.282,00	(297.889.572,50)	80,34	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.385.407.854,50	1.170.843.882,00	(214.563.972,50)	84,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1.385.407.854,50	1.170.843.882,00	(214.563.972,50)	84,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	538.105.534,00	374.381.270,00	(163.724.264,00)	69,57	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	102.771.042,00	30.864.920,00	(71.906.122,00)	30,03	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.771.042,00	30.864.920,00	(71.906.122,00)	30,03	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	435.334.492,00	343.516.350,00	(91.818.142,00)	78,90	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.610.544,00	0,00	(12.610.544,00)	0,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.723.948,00	343.516.350,00	(79.207.598,00)	81,26	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	847.302.320,50	796.462.612,00	(50.839.708,50)	93,99	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	847.302.320,50	796.462.612,00	(50.839.708,50)	93,99	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.302.320,50	796.462.612,00	(50.839.708,50)	93,99	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	27.517.000,00	14.735.000,00	(12.782.000,00)	53,54	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	27.517.000,00	14.735.000,00	(12.782.000,00)	53,54	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	27.517.000,00	14.735.000,00	(12.782.000,00)	53,54	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.517.000,00	14.735.000,00	(12.782.000,00)	53,54	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.517.000,00	14.735.000,00	(12.782.000,00)	53,54	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	103.004.000,00	32.460.400,00	(70.543.600,00)	31,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	103.004.000,00	32.460.400,00	(70.543.600,00)	31,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	103.004.000,00	32.460.400,00	(70.543.600,00)	31,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	103.004.000,00	32.460.400,00	(70.543.600,00)	31,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.004.000,00	32.460.400,00	(70.543.600,00)	31,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	1.515.928.854,50	1.218.039.282,00	(297.889.572,50)	80,34	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(855.928.854,50)	(469.000.382,00)	386.928.472,50	54,79	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(855.928.854,50)	(469.000.382,00)	386.928.472,50	54,79	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.5.02.0.00.27.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	319.500.000,00	69.500.000,00	127,80	
	4.01.5.02.0.00.27.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	319.500.000,00	69.500.000,00	127,80	
	4.01.5.02.0.00.27.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	250.000.000,00	312.000.000,00	62.000.000,00	124,80	
	4.01.5.02.0.00.27.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	250.000.000,00	319.500.000,00	69.500.000,00	127,80	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	139.334.235.055,00	125.183.301.094,00	(14.150.933.961,00)	89,84	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.554.434.845,00	101.367.224.596,00	(12.187.210.249,00)	89,26	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	71.478.894,50	68.228.209,00	(3.250.685,50)	95,45	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.844.894,50	34.020.000,00	(2.824.894,50)	92,33	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.844.894,50	34.020.000,00	(2.824.894,50)	92,33	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.844.894,50	34.020.000,00	(2.824.894,50)	92,33	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	29.070.000,00	28.794.000,00	(276.000,00)	99,05	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.070.000,00	28.794.000,00	(276.000,00)	99,05	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.070.000,00	28.794.000,00	(276.000,00)	99,05	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	5.564.000,00	5.414.209,00	(149.791,00)	97,30	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.564.000,00	5.414.209,00	(149.791,00)	97,30	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.564.000,00	5.414.209,00	(149.791,00)	97,30	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	(4.971.936.034,00)	85,65	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	(4.971.936.034,00)	85,65	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	(4.971.936.034,00)	85,65	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	(4.971.936.034,00)	85,65	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	632.361.992,00	604.614.230,00	(27.747.762,00)	95,61	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	581.113.992,00	579.534.230,00	(1.579.762,00)	99,72	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	581.113.992,00	579.534.230,00	(1.579.762,00)	99,72	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.113.992,00	579.534.230,00	(1.579.762,00)	99,72	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	51.248.000,00	25.080.000,00	(26.168.000,00)	48,93	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.248.000,00	25.080.000,00	(26.168.000,00)	48,93	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.248.000,00	25.080.000,00	(26.168.000,00)	48,93	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.004.212.601,00	648.770.297,00	(355.442.304,00)	64,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	191.170.000,00	179.228.520,00	(11.941.480,00)	93,75	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	191.170.000,00	179.228.520,00	(11.941.480,00)	93,75	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.170.000,00	179.228.520,00	(11.941.480,00)	93,75	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	41.927.500,00	27.862.284,00	(14.065.216,00)	66,45	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.927.500,00	27.862.284,00	(14.065.216,00)	66,45	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.927.500,00	27.862.284,00	(14.065.216,00)	66,45	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	670.622.000,00	441.679.493,00	(228.942.507,00)	65,86	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	670.622.000,00	441.679.493,00	(228.942.507,00)	65,86	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.622.000,00	441.679.493,00	(228.942.507,00)	65,86	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100.493.101,00	0,00	(100.493.101,00)	0,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	100.493.101,00	0,00	(100.493.101,00)	0,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.493.101,00	0,00	(100.493.101,00)	0,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	19.461.887.976,46	18.241.596.361,00	(1.220.291.615,46)	93,72	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	449.888.373,00	449.888.373,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	449.888.373,00	449.888.373,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.888.373,00	449.888.373,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.284.611.371,78	4.135.326.411,00	(149.284.960,78)	96,51	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.801.870.200,00	1.730.512.788,00	(71.357.412,00)	96,03	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.352.200,00	88.070.300,00	(60.281.900,00)	59,36	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.653.518.000,00	1.642.442.488,00	(11.075.512,00)	99,33	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.482.741.171,78	2.404.813.623,00	(77.927.548,78)	96,86	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.441.227.171,78	2.363.321.823,00	(77.905.348,78)	96,80	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.514.000,00	41.491.800,00	(22.200,00)	99,94	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.464.194.245,00	1.362.770.209,00	(101.424.036,00)	93,07	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.608.875,00	70.512.445,00	(96.430,00)	99,86	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.608.875,00	70.512.445,00	(96.430,00)	99,86	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.393.585.370,00	1.292.257.764,00	(101.327.606,00)	92,72	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.393.585.370,00	1.292.257.764,00	(101.327.606,00)	92,72	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	795.926.743,90	743.949.384,00	(51.977.359,90)	93,46	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	795.926.743,90	743.949.384,00	(51.977.359,90)	93,46	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.926.743,90	743.949.384,00	(51.977.359,90)	93,46	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	800.393.342,78	747.723.067,00	(52.670.275,78)	93,41	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	800.393.342,78	747.723.067,00	(52.670.275,78)	93,41	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.393.342,78	747.723.067,00	(52.670.275,78)	93,41	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	189.043.800,00	173.599.800,00	(15.444.000,00)	91,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	189.043.800,00	173.599.800,00	(15.444.000,00)	91,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.043.800,00	173.599.800,00	(15.444.000,00)	91,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.680.000,00	40.000.000,00	(680.000,00)	98,32	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.680.000,00	40.000.000,00	(680.000,00)	98,32	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	40.000.000,00	(680.000,00)	98,32	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.597.867.505,00	7.078.238.155,00	(519.629.350,00)	93,16	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.347.867.505,00	6.829.351.735,00	(518.515.770,00)	92,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.347.867.505,00	6.829.351.735,00	(518.515.770,00)	92,94	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0008	5.2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	248.886.420,00	(1.113.580,00)	99,55	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0008	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	248.886.420,00	(1.113.580,00)	99,55	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.839.282.595,00	3.510.100.962,00	(329.181.633,00)	91,42	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.839.282.595,00	3.510.100.962,00	(329.181.633,00)	91,42	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.839.282.595,00	3.510.100.962,00	(329.181.633,00)	91,42	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.860.840.721,85	7.574.834.185,00	(286.006.536,85)	96,36	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	7.190.389.880,35	7.016.508.246,00	(173.881.634,35)	97,58	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.949.789.373,35	6.816.890.246,00	(132.899.127,35)	98,08	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.057.089.373,35	2.036.390.247,00	(20.699.126,35)	98,99	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0002	5.1.05	Belanja Hibah	4.892.700.000,00	4.780.499.999,00	(112.200.001,00)	97,70	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	240.600.507,00	199.618.000,00	(40.982.507,00)	82,96	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.600.507,00	199.618.000,00	(40.982.507,00)	82,96	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	670.450.841,50	558.325.939,00	(112.124.902,50)	83,27	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	669.770.841,50	557.645.939,00	(112.124.902,50)	83,25	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	669.770.841,50	557.645.939,00	(112.124.902,50)	83,25	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.529.176.208,00	15.101.009.391,00	(3.428.166.817,00)	81,49	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.357.739.808,00	4.656.156.394,00	(1.701.583.414,00)	73,23	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.357.739.808,00	4.656.156.394,00	(1.701.583.414,00)	73,23	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.357.739.808,00	4.656.156.394,00	(1.701.583.414,00)	73,23	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.171.436.400,00	10.444.852.997,00	(1.726.583.403,00)	85,81	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.171.436.400,00	10.444.852.997,00	(1.726.583.403,00)	85,81	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.171.436.400,00	10.444.852.997,00	(1.726.583.403,00)	85,81	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.574.310.760,00	11.756.205.963,00	(818.104.797,00)	93,49	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.833.214.900,00	5.208.191.656,00	(625.023.244,00)	89,28	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.833.214.900,00	5.208.191.656,00	(625.023.244,00)	89,28	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.833.214.900,00	5.208.191.656,00	(625.023.244,00)	89,28	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.822.905.860,00	4.718.413.284,00	(104.492.576,00)	97,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.822.905.860,00	4.718.413.284,00	(104.492.576,00)	97,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.822.905.860,00	4.718.413.284,00	(104.492.576,00)	97,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.918.190.000,00	1.829.601.023,00	(88.588.977,00)	95,38	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.918.190.000,00	1.829.601.023,00	(88.588.977,00)	95,38	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.918.190.000,00	1.829.601.023,00	(88.588.977,00)	95,38	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.916.868.640,00	1.634.612.747,00	(282.255.893,00)	85,27	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	357.788.640,00	146.267.347,00	(211.521.293,00)	40,88	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	357.788.640,00	146.267.347,00	(211.521.293,00)	40,88	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	357.788.640,00	146.267.347,00	(211.521.293,00)	40,88	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	751.480.000,00	689.355.400,00	(62.124.600,00)	91,73	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	751.480.000,00	689.355.400,00	(62.124.600,00)	91,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.480.000,00	689.355.400,00	(62.124.600,00)	91,73	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	799.000.000,00	798.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	799.000.000,00	798.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	799.000.000,00	798.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	8.835.541.948,00	8.620.298.734,00	(215.243.214,00)	97,56	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	5.111.817.948,00	5.018.061.734,00	(93.756.214,00)	98,16	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.741.990.328,00	3.721.391.690,00	(20.598.638,00)	99,44	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.741.990.328,00	3.721.391.690,00	(20.598.638,00)	99,44	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.369.827.620,00	1.296.670.044,00	(73.157.576,00)	94,65	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.369.827.620,00	1.296.670.044,00	(73.157.576,00)	94,65	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	2.205.750.000,00	2.147.913.271,00	(57.836.729,00)	97,37	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.902.715.000,00	1.852.040.063,00	(50.674.937,00)	97,33	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.902.715.000,00	1.852.040.063,00	(50.674.937,00)	97,33	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	303.035.000,00	295.873.208,00	(7.161.792,00)	97,63	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	303.035.000,00	295.873.208,00	(7.161.792,00)	97,63	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	1.517.974.000,00	1.454.323.729,00	(63.650.271,00)	95,80	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.437.944.950,00	1.374.305.738,00	(63.639.212,00)	95,57	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.437.944.950,00	1.374.305.738,00	(63.639.212,00)	95,57	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	80.029.050,00	80.017.991,00	(11.059,00)	99,98	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.029.050,00	80.017.991,00	(11.059,00)	99,98	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	1.535.905.702,50	1.380.869.582,00	(155.036.120,50)	89,90	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	450.704.550,00	391.759.645,00	(58.944.905,00)	86,92	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	450.704.550,00	391.759.645,00	(58.944.905,00)	86,92	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.704.550,00	391.759.645,00	(58.944.905,00)	86,92	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	305.748.000,00	290.111.709,00	(15.636.291,00)	94,88	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	305.748.000,00	290.111.709,00	(15.636.291,00)	94,88	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.748.000,00	290.111.709,00	(15.636.291,00)	94,88	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	602.058.792,50	544.960.142,00	(57.098.650,50)	90,51	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	602.058.792,50	544.960.142,00	(57.098.650,50)	90,51	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.058.792,50	544.960.142,00	(57.098.650,50)	90,51	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	177.394.360,00	154.038.086,00	(23.356.274,00)	86,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	177.394.360,00	154.038.086,00	(23.356.274,00)	86,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.394.360,00	154.038.086,00	(23.356.274,00)	86,83	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	6.479.285.385,69	6.055.556.916,00	(423.728.469,69)	93,46	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	2.460.420.000,00	2.166.574.778,00	(293.845.222,00)	88,05	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.460.420.000,00	2.166.574.778,00	(293.845.222,00)	88,05	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.460.420.000,00	2.166.574.778,00	(293.845.222,00)	88,05	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	3.798.642.180,00	3.678.921.838,00	(119.720.342,00)	96,84	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.798.642.180,00	3.678.921.838,00	(119.720.342,00)	96,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.798.642.180,00	3.678.921.838,00	(119.720.342,00)	96,84	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	220.223.205,69	210.060.300,00	(10.162.905,69)	95,38	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	220.223.205,69	210.060.300,00	(10.162.905,69)	95,38	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.223.205,69	210.060.300,00	(10.162.905,69)	95,38	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.770.488.235,00	22.117.218.847,00	(1.653.269.388,00)	93,04	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.526.472.727,00	1.183.731.083,00	(342.741.644,00)	77,54	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1.241.808.580,00	975.582.126,00	(266.226.454,00)	78,56	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.241.808.580,00	975.582.126,00	(266.226.454,00)	78,56	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.808.580,00	975.582.126,00	(266.226.454,00)	78,56	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	148.230.351,00	111.568.397,00	(36.661.954,00)	75,26	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.230.351,00	111.568.397,00	(36.661.954,00)	75,26	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.230.351,00	111.568.397,00	(36.661.954,00)	75,26	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	136.433.796,00	96.580.560,00	(39.853.236,00)	70,78	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	136.433.796,00	96.580.560,00	(39.853.236,00)	70,78	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.433.796,00	96.580.560,00	(39.853.236,00)	70,78	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.036.689.941,00	20.086.001.197,00	(950.688.744,00)	95,48	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	19.521.927.630,00	18.965.522.259,00	(556.405.371,00)	97,14	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.521.927.630,00	18.965.522.259,00	(556.405.371,00)	97,14	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.521.927.630,00	18.965.522.259,00	(556.405.371,00)	97,14	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	146.433.745,00	72.001.172,00	(74.432.573,00)	49,16	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.433.745,00	72.001.172,00	(74.432.573,00)	49,16	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.433.745,00	72.001.172,00	(74.432.573,00)	49,16	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1.368.328.566,00	1.048.477.766,00	(319.850.800,00)	76,62	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.368.328.566,00	1.048.477.766,00	(319.850.800,00)	76,62	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.368.328.566,00	1.048.477.766,00	(319.850.800,00)	76,62	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	846.127.567,00	599.415.085,00	(246.712.482,00)	70,84	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	149.012.607,00	148.758.975,00	(253.632,00)	99,82	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	149.012.607,00	148.758.975,00	(253.632,00)	99,82	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.012.607,00	148.758.975,00	(253.632,00)	99,82	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	619.901.977,50	373.749.107,00	(246.152.870,50)	60,29	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	619.901.977,50	373.749.107,00	(246.152.870,50)	60,29	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.901.977,50	373.749.107,00	(246.152.870,50)	60,29	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	77.212.982,50	76.907.003,00	(305.979,50)	99,60	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	77.212.982,50	76.907.003,00	(305.979,50)	99,60	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.212.982,50	76.907.003,00	(305.979,50)	99,60	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	361.198.000,00	248.071.482,00	(113.126.518,00)	68,68	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	142.136.000,00	82.188.846,00	(59.947.154,00)	57,82	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	142.136.000,00	82.188.846,00	(59.947.154,00)	57,82	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.136.000,00	82.188.846,00	(59.947.154,00)	57,82	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0002		FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	198.320.000,00	146.782.600,00	(51.537.400,00)	74,01	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	198.320.000,00	146.782.600,00	(51.537.400,00)	74,01	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.320.000,00	146.782.600,00	(51.537.400,00)	74,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	20.742.000,00	19.100.036,00	(1.641.964,00)	92,08	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.742.000,00	19.100.036,00	(1.641.964,00)	92,08	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.742.000,00	19.100.036,00	(1.641.964,00)	92,08	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.009.311.975,00	1.698.857.651,00	(310.454.324,00)	84,54	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	316.669.000,00	298.163.542,00	(18.505.458,00)	94,15	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	121.786.000,00	109.335.984,00	(12.450.016,00)	89,77	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	121.786.000,00	109.335.984,00	(12.450.016,00)	89,77	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.786.000,00	109.335.984,00	(12.450.016,00)	89,77	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	95.759.000,00	90.598.298,00	(5.160.702,00)	94,61	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.759.000,00	90.598.298,00	(5.160.702,00)	94,61	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.759.000,00	90.598.298,00	(5.160.702,00)	94,61	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	99.124.000,00	98.229.260,00	(894.740,00)	99,09	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.124.000,00	98.229.260,00	(894.740,00)	99,09	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.124.000,00	98.229.260,00	(894.740,00)	99,09	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	472.647.000,00	410.113.765,00	(62.533.235,00)	86,76	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	254.842.000,00	231.149.865,00	(23.692.135,00)	90,70	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	254.842.000,00	231.149.865,00	(23.692.135,00)	90,70	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.842.000,00	231.149.865,00	(23.692.135,00)	90,70	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	148.244.000,00	119.014.800,00	(29.229.200,00)	80,28	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.244.000,00	119.014.800,00	(29.229.200,00)	80,28	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.244.000,00	119.014.800,00	(29.229.200,00)	80,28	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	69.561.000,00	59.949.100,00	(9.611.900,00)	86,18	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	69.561.000,00	59.949.100,00	(9.611.900,00)	86,18	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.561.000,00	59.949.100,00	(9.611.900,00)	86,18	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	589.159.975,00	470.030.490,00	(119.129.485,00)	79,77	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	302.621.475,00	260.374.332,00	(42.247.143,00)	86,03	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	302.621.475,00	260.374.332,00	(42.247.143,00)	86,03	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.621.475,00	260.374.332,00	(42.247.143,00)	86,03	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	189.864.500,00	162.992.288,00	(26.872.212,00)	85,84	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	189.864.500,00	162.992.288,00	(26.872.212,00)	85,84	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.864.500,00	162.992.288,00	(26.872.212,00)	85,84	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	96.674.000,00	46.663.870,00	(50.010.130,00)	48,26	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.674.000,00	46.663.870,00	(50.010.130,00)	48,26	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.674.000,00	46.663.870,00	(50.010.130,00)	48,26	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	630.836.000,00	520.549.854,00	(110.286.146,00)	82,51	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	15.571.000,00	7.348.800,00	(8.222.200,00)	47,19	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.571.000,00	7.348.800,00	(8.222.200,00)	47,19	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.571.000,00	7.348.800,00	(8.222.200,00)	47,19	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	388.048.000,00	345.889.586,00	(42.158.414,00)	89,13	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	388.048.000,00	345.889.586,00	(42.158.414,00)	89,13	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.048.000,00	345.889.586,00	(42.158.414,00)	89,13	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	227.217.000,00	167.311.468,00	(59.905.532,00)	73,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	227.217.000,00	167.311.468,00	(59.905.532,00)	73,63	
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.217.000,00	167.311.468,00	(59.905.532,00)	73,63	
				JUMLAH BELANJA	139.334.235.055,00	125.183.301.094,00	(14.150.933.961,00)	89,84	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(139.084.235.055,00)	(124.863.801.094,00)	14.220.433.961,00	89,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(139.084.235.055,00)	(124.863.801.094,00)	14.220.433.961,00	89,77	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000		5	BELANJA DAERAH	120.372.873.231,00	103.075.482.952,00	(17.297.390.279,00)	85,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.843.970.269,81	84.516.540.562,00	(6.327.429.707,81)	93,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.447.950,00	34.950.300,00	(497.650,00)	98,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.182.850,00	15.054.800,00	(128.050,00)	99,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.182.850,00	15.054.800,00	(128.050,00)	99,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.182.850,00	15.054.800,00	(128.050,00)	99,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.597.000,00	10.278.000,00	(319.000,00)	96,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.597.000,00	10.278.000,00	(319.000,00)	96,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.597.000,00	10.278.000,00	(319.000,00)	96,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0008		PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	9.668.100,00	9.617.500,00	(50.600,00)	99,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.668.100,00	9.617.500,00	(50.600,00)	99,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.668.100,00	9.617.500,00	(50.600,00)	99,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	(1.829.430.959,00)	81,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	(1.829.430.959,00)	81,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	(1.829.430.959,00)	81,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	(1.829.430.959,00)	81,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	372.443.500,00	299.235.023,00	(73.208.477,00)	80,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	372.443.500,00	299.235.023,00	(73.208.477,00)	80,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	372.443.500,00	299.235.023,00	(73.208.477,00)	80,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.443.500,00	299.235.023,00	(73.208.477,00)	80,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	844.559.960,00	707.671.385,00	(136.888.575,00)	83,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	141.009.960,00	139.191.500,00	(1.818.460,00)	98,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	141.009.960,00	139.191.500,00	(1.818.460,00)	98,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.009.960,00	139.191.500,00	(1.818.460,00)	98,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	94.741.000,00	17.000.000,00	(77.741.000,00)	17,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.741.000,00	17.000.000,00	(77.741.000,00)	17,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.741.000,00	17.000.000,00	(77.741.000,00)	17,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	608.809.000,00	551.479.885,00	(57.329.115,00)	90,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	608.809.000,00	551.479.885,00	(57.329.115,00)	90,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.809.000,00	551.479.885,00	(57.329.115,00)	90,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	15.368.675.693,81	14.093.916.313,00	(1.274.759.380,81)	91,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	146.593.810,00	134.525.163,00	(12.068.647,00)	91,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	146.593.810,00	134.525.163,00	(12.068.647,00)	91,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.593.810,00	134.525.163,00	(12.068.647,00)	91,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.903.984.338,76	5.683.392.657,00	(220.591.681,76)	96,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.315.270,44	51.100.000,00	(15.215.270,44)	77,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.315.270,44	51.100.000,00	(15.215.270,44)	77,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.837.669.068,32	5.632.292.657,00	(205.376.411,32)	96,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.837.669.068,32	5.632.292.657,00	(205.376.411,32)	96,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	956.472.691,67	945.540.010,00	(10.932.681,67)	98,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.433.820,00	33.231.180,00	(1.202.640,00)	96,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.433.820,00	33.231.180,00	(1.202.640,00)	96,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	922.038.871,67	912.308.830,00	(9.730.041,67)	98,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	922.038.871,67	912.308.830,00	(9.730.041,67)	98,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	105.086.455,00	103.429.295,00	(1.657.160,00)	98,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.086.455,00	103.429.295,00	(1.657.160,00)	98,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.086.455,00	103.429.295,00	(1.657.160,00)	98,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	302.335.071,57	292.078.203,00	(10.256.868,57)	96,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	302.335.071,57	292.078.203,00	(10.256.868,57)	96,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.335.071,57	292.078.203,00	(10.256.868,57)	96,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	400.500.000,00	219.825.000,00	(180.675.000,00)	54,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	400.500.000,00	219.825.000,00	(180.675.000,00)	54,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.500.000,00	219.825.000,00	(180.675.000,00)	54,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	7.513.703.326,81	6.675.165.985,00	(838.537.341,81)	88,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.513.703.326,81	6.675.165.985,00	(838.537.341,81)	88,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.513.703.326,81	6.675.165.985,00	(838.537.341,81)	88,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.222.003.798,00	12.749.857.066,00	(472.146.732,00)	96,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	7.138.522.000,00	6.991.899.992,00	(146.622.008,00)	97,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.422.000,00	0,00	(21.422.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.422.000,00	0,00	(21.422.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.117.100.000,00	6.991.899.992,00	(125.200.008,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.117.100.000,00	6.991.899.992,00	(125.200.008,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	6.083.481.798,00	5.757.957.074,00	(325.524.724,00)	94,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.475.427,39	0,00	(9.475.427,39)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.475.427,39	0,00	(9.475.427,39)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	6.074.006.370,61	5.757.957.074,00	(316.049.296,61)	94,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.074.006.370,61	5.757.957.074,00	(316.049.296,61)	94,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.045.768.422,00	5.458.903.652,00	(586.864.770,00)	90,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	993.243.000,00	849.564.052,00	(143.678.948,00)	85,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	993.243.000,00	849.564.052,00	(143.678.948,00)	85,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	993.243.000,00	849.564.052,00	(143.678.948,00)	85,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.052.525.422,00	4.609.339.600,00	(443.185.822,00)	91,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.052.525.422,00	4.609.339.600,00	(443.185.822,00)	91,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.052.525.422,00	4.609.339.600,00	(443.185.822,00)	91,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.379.032.863,00	5.866.793.870,00	(512.238.993,00)	91,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	306.550.000,00	275.696.609,00	(30.853.391,00)	89,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	306.550.000,00	275.696.609,00	(30.853.391,00)	89,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.550.000,00	275.696.609,00	(30.853.391,00)	89,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	985.500.000,00	854.611.222,00	(130.888.778,00)	86,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	985.500.000,00	854.611.222,00	(130.888.778,00)	86,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.500.000,00	854.611.222,00	(130.888.778,00)	86,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.864.550.863,00	4.520.665.039,00	(343.885.824,00)	92,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	541.100.000,00	515.142.113,00	(25.957.887,00)	95,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.100.000,00	515.142.113,00	(25.957.887,00)	95,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	4.323.450.863,00	4.005.522.926,00	(317.927.937,00)	92,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.323.450.863,00	4.005.522.926,00	(317.927.937,00)	92,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	222.432.000,00	215.821.000,00	(6.611.000,00)	97,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	222.432.000,00	215.821.000,00	(6.611.000,00)	97,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.432.000,00	215.821.000,00	(6.611.000,00)	97,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	27.846.554.780,00	26.608.739.560,00	(1.237.815.220,00)	95,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	26.552.804.780,00	25.437.302.584,00	(1.115.502.196,00)	95,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.552.804.780,00	25.437.302.584,00	(1.115.502.196,00)	95,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	26.552.804.780,00	25.437.302.584,00	(1.115.502.196,00)	95,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	1.113.750.000,00	1.111.436.976,00	(2.313.024,00)	99,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.113.750.000,00	1.111.436.976,00	(2.313.024,00)	99,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.750.000,00	1.111.436.976,00	(2.313.024,00)	99,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	180.000.000,00	60.000.000,00	(120.000.000,00)	33,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	60.000.000,00	(120.000.000,00)	33,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	60.000.000,00	(120.000.000,00)	33,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	10.793.655.855,00	10.590.076.904,00	(203.578.951,00)	98,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	8.189.176.375,00	8.012.839.824,00	(176.336.551,00)	97,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.189.176.375,00	8.012.839.824,00	(176.336.551,00)	97,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.189.176.375,00	8.012.839.824,00	(176.336.551,00)	97,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	2.604.479.480,00	2.577.237.080,00	(27.242.400,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.604.479.480,00	2.577.237.080,00	(27.242.400,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.604.479.480,00	2.577.237.080,00	(27.242.400,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	29.528.902.961,19	18.558.942.390,00	(10.969.960.571,19)	62,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	2.030.026.525,00	485.536.387,00	(1.544.490.138,00)	23,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	1.965.226.525,00	485.536.387,00	(1.479.690.138,00)	24,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.965.226.525,00	485.536.387,00	(1.479.690.138,00)	24,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.965.226.525,00	485.536.387,00	(1.479.690.138,00)	24,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	64.800.000,00	0,00	(64.800.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.800.000,00	0,00	(64.800.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	0,00	(64.800.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	4.260.530.713,00	2.147.239.383,00	(2.113.291.330,00)	50,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	1.080.686.654,00	609.272.346,00	(471.414.308,00)	56,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.080.686.654,00	609.272.346,00	(471.414.308,00)	56,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.686.654,00	609.272.346,00	(471.414.308,00)	56,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	1.080.686.654,00	396.293.990,00	(684.392.664,00)	36,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.080.686.654,00	396.293.990,00	(684.392.664,00)	36,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.686.654,00	396.293.990,00	(684.392.664,00)	36,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	650.435.125,00	305.640.546,00	(344.794.579,00)	46,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	650.435.125,00	305.640.546,00	(344.794.579,00)	46,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.435.125,00	305.640.546,00	(344.794.579,00)	46,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	650.435.125,00	97.462.000,00	(552.973.125,00)	14,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	650.435.125,00	97.462.000,00	(552.973.125,00)	14,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.435.125,00	97.462.000,00	(552.973.125,00)	14,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	798.287.155,00	738.570.501,00	(59.716.654,00)	92,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	798.287.155,00	738.570.501,00	(59.716.654,00)	92,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.287.155,00	738.570.501,00	(59.716.654,00)	92,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	(12.033.165,00)	99,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	(12.033.165,00)	99,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	(12.033.165,00)	99,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	(12.033.165,00)	99,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	3.585.007.300,00	3.245.556.538,00	(339.450.762,00)	90,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.222.672.000,00	1.159.753.738,00	(62.918.262,00)	94,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.222.672.000,00	1.159.753.738,00	(62.918.262,00)	94,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.672.000,00	1.159.753.738,00	(62.918.262,00)	94,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	576.000.000,00	570.000.000,00	(6.000.000,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	576.000.000,00	570.000.000,00	(6.000.000,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.000.000,00	570.000.000,00	(6.000.000,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	1.366.335.300,00	1.095.802.800,00	(270.532.500,00)	80,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.366.335.300,00	1.095.802.800,00	(270.532.500,00)	80,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.366.335.300,00	1.095.802.800,00	(270.532.500,00)	80,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	6.284.876.169,19	1.126.474.775,00	(5.158.401.394,19)	17,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	112.300.000,00	8.729.302,00	(103.570.698,00)	7,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	112.300.000,00	8.729.302,00	(103.570.698,00)	7,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.300.000,00	8.729.302,00	(103.570.698,00)	7,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	6.172.576.169,19	1.117.745.473,00	(5.054.830.696,19)	18,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.172.576.169,19	1.117.745.473,00	(5.054.830.696,19)	18,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.172.576.169,19	1.117.745.473,00	(5.054.830.696,19)	18,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.07		PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	(71.853.505,00)	95,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.07.0002		PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	(71.853.505,00)	95,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	(71.853.505,00)	95,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	(71.853.505,00)	95,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	10.301.932.600,00	8.571.492.323,00	(1.730.440.277,00)	83,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	5.256.092.600,00	5.021.765.950,00	(234.326.650,00)	95,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.256.092.600,00	5.021.765.950,00	(234.326.650,00)	95,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.256.092.600,00	5.021.765.950,00	(234.326.650,00)	95,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	5.045.840.000,00	3.549.726.373,00	(1.496.113.627,00)	70,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.045.840.000,00	3.549.726.373,00	(1.496.113.627,00)	70,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.045.840.000,00	3.549.726.373,00	(1.496.113.627,00)	70,34	
				JUMLAH BELANJA	120.372.873.231,00	103.075.482.952,00	(17.297.390.279,00)	85,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(120.372.873.231,00)	(103.075.482.952,00)	17.297.390.279,00	85,63	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(120.372.873.231,00)	(103.075.482.952,00)	17.297.390.279,00	85,63	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000		5	BELANJA DAERAH	20.524.749.454,80	17.913.422.660,00	(2.611.326.794,80)	87,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.377.305.467,60	14.262.725.578,00	(2.114.579.889,60)	87,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	49.885.566,00	24.261.342,00	(25.624.224,00)	48,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	41.153.436,00	21.231.042,00	(19.922.394,00)	51,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.153.436,00	21.231.042,00	(19.922.394,00)	51,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.153.436,00	21.231.042,00	(19.922.394,00)	51,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.732.130,00	3.030.300,00	(5.701.830,00)	34,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.732.130,00	3.030.300,00	(5.701.830,00)	34,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.732.130,00	3.030.300,00	(5.701.830,00)	34,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	(1.737.651.492,00)	86,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	(1.737.651.492,00)	86,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	(1.737.651.492,00)	86,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	(1.737.651.492,00)	86,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	91.622.000,00	90.392.315,00	(1.229.685,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	91.622.000,00	90.392.315,00	(1.229.685,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.622.000,00	90.392.315,00	(1.229.685,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.622.000,00	90.392.315,00	(1.229.685,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	300.078.000,00	286.117.677,00	(13.960.323,00)	95,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	300.078.000,00	286.117.677,00	(13.960.323,00)	95,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	300.078.000,00	286.117.677,00	(13.960.323,00)	95,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.078.000,00	286.117.677,00	(13.960.323,00)	95,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	710.403.285,60	674.164.527,00	(36.238.758,60)	94,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.962.409,00	28.019.974,00	(1.942.435,00)	93,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.962.409,00	28.019.974,00	(1.942.435,00)	93,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.962.409,00	28.019.974,00	(1.942.435,00)	93,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	166.389.104,00	159.855.200,00	(6.533.904,00)	96,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	162.067.104,00	155.533.200,00	(6.533.904,00)	95,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.067.104,00	155.533.200,00	(6.533.904,00)	95,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	59.992.295,00	56.605.648,00	(3.386.647,00)	94,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.992.295,00	56.605.648,00	(3.386.647,00)	94,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.295,00	56.605.648,00	(3.386.647,00)	94,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	125.678.456,60	117.708.305,00	(7.970.151,60)	93,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	125.678.456,60	117.708.305,00	(7.970.151,60)	93,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.678.456,60	117.708.305,00	(7.970.151,60)	93,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	105.679.021,00	102.554.410,00	(3.124.611,00)	97,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	105.679.021,00	102.554.410,00	(3.124.611,00)	97,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.679.021,00	102.554.410,00	(3.124.611,00)	97,04	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	11.306.000,00	8.510.000,00	(2.796.000,00)	75,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	11.306.000,00	8.510.000,00	(2.796.000,00)	75,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.306.000,00	8.510.000,00	(2.796.000,00)	75,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	171.396.000,00	160.950.990,00	(10.445.010,00)	93,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	171.396.000,00	160.950.990,00	(10.445.010,00)	93,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.396.000,00	160.950.990,00	(10.445.010,00)	93,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	52.665.608,00	46.280.000,00	(6.385.608,00)	87,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	52.665.608,00	46.280.000,00	(6.385.608,00)	87,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	48.343.608,00	41.958.000,00	(6.385.608,00)	86,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.343.608,00	41.958.000,00	(6.385.608,00)	86,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.142.188.260,00	898.429.799,00	(243.758.461,00)	78,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	435.508.260,00	331.351.099,00	(104.157.161,00)	76,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	435.508.260,00	331.351.099,00	(104.157.161,00)	76,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.508.260,00	331.351.099,00	(104.157.161,00)	76,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	706.680.000,00	567.078.700,00	(139.601.300,00)	80,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	706.680.000,00	567.078.700,00	(139.601.300,00)	80,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.680.000,00	567.078.700,00	(139.601.300,00)	80,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	718.840.000,00	669.108.662,00	(49.731.338,00)	93,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	444.930.000,00	404.612.005,00	(40.317.995,00)	90,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	444.930.000,00	404.612.005,00	(40.317.995,00)	90,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.930.000,00	404.612.005,00	(40.317.995,00)	90,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	199.060.000,00	197.873.000,00	(1.187.000,00)	99,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.060.000,00	197.873.000,00	(1.187.000,00)	99,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.060.000,00	197.873.000,00	(1.187.000,00)	99,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	74.850.000,00	66.623.657,00	(8.226.343,00)	89,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	74.850.000,00	66.623.657,00	(8.226.343,00)	89,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.850.000,00	66.623.657,00	(8.226.343,00)	89,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.961.857.167,20	1.717.056.814,00	(244.800.353,20)	87,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1.533.760.492,00	1.362.417.448,00	(171.343.044,00)	88,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0001		ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	50.505.000,00	50.505.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.505.000,00	50.505.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.505.000,00	50.505.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0002		KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	452.315.000,00	355.874.397,00	(96.440.603,00)	78,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	452.315.000,00	355.874.397,00	(96.440.603,00)	78,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.315.000,00	355.874.397,00	(96.440.603,00)	78,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	358.209.000,00	308.250.550,00	(49.958.450,00)	86,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	358.209.000,00	308.250.550,00	(49.958.450,00)	86,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.209.000,00	308.250.550,00	(49.958.450,00)	86,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	672.731.492,00	647.787.501,00	(24.943.991,00)	96,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	672.731.492,00	647.787.501,00	(24.943.991,00)	96,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.731.492,00	647.787.501,00	(24.943.991,00)	96,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	64.943.050,00	56.402.450,00	(8.540.600,00)	86,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0002		PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	27.661.000,00	19.120.400,00	(8.540.600,00)	69,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.661.000,00	19.120.400,00	(8.540.600,00)	69,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.661.000,00	19.120.400,00	(8.540.600,00)	69,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0003		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.282.050,00	37.282.050,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.282.050,00	37.282.050,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.282.050,00	37.282.050,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.656.250,00	241.402.052,00	(59.254.198,00)	80,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	75.229.894,00	40.843.154,00	(34.386.740,00)	54,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.229.894,00	40.843.154,00	(34.386.740,00)	54,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.229.894,00	40.843.154,00	(34.386.740,00)	54,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	225.426.356,00	200.558.898,00	(24.867.458,00)	88,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	225.426.356,00	200.558.898,00	(24.867.458,00)	88,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.426.356,00	200.558.898,00	(24.867.458,00)	88,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.04		IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	62.497.375,20	56.834.864,00	(5.662.511,20)	90,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.04.0002		PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	62.497.375,20	56.834.864,00	(5.662.511,20)	90,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.497.375,20	56.834.864,00	(5.662.511,20)	90,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.497.375,20	56.834.864,00	(5.662.511,20)	90,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.185.586.820,00	1.933.640.268,00	(251.946.552,00)	88,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	533.470.500,00	457.891.111,00	(75.579.389,00)	85,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	98.978.000,00	85.516.768,00	(13.461.232,00)	86,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.978.000,00	85.516.768,00	(13.461.232,00)	86,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.978.000,00	85.516.768,00	(13.461.232,00)	86,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	69.109.000,00	54.470.877,00	(14.638.123,00)	78,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.109.000,00	54.470.877,00	(14.638.123,00)	78,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.109.000,00	54.470.877,00	(14.638.123,00)	78,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	136.935.250,00	105.426.449,00	(31.508.801,00)	76,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	136.935.250,00	105.426.449,00	(31.508.801,00)	76,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.935.250,00	105.426.449,00	(31.508.801,00)	76,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	228.448.250,00	212.477.017,00	(15.971.233,00)	93,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	228.448.250,00	212.477.017,00	(15.971.233,00)	93,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.448.250,00	212.477.017,00	(15.971.233,00)	93,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	230.235.000,00	196.409.737,00	(33.825.263,00)	85,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	60.956.000,00	60.684.984,00	(271.016,00)	99,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.956.000,00	60.684.984,00	(271.016,00)	99,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.956.000,00	60.684.984,00	(271.016,00)	99,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	36.162.000,00	9.007.868,00	(27.154.132,00)	24,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.162.000,00	9.007.868,00	(27.154.132,00)	24,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.162.000,00	9.007.868,00	(27.154.132,00)	24,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	87.456.000,00	87.455.154,00	(846,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	87.456.000,00	87.455.154,00	(846,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.456.000,00	87.455.154,00	(846,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	45.661.000,00	39.261.731,00	(6.399.269,00)	85,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	45.661.000,00	39.261.731,00	(6.399.269,00)	85,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.661.000,00	39.261.731,00	(6.399.269,00)	85,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	1.421.881.320,00	1.279.339.420,00	(142.541.900,00)	89,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	447.107.820,00	415.162.820,00	(31.945.000,00)	92,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	447.107.820,00	415.162.820,00	(31.945.000,00)	92,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.107.820,00	415.162.820,00	(31.945.000,00)	92,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	38.588.000,00	24.369.400,00	(14.218.600,00)	63,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.588.000,00	24.369.400,00	(14.218.600,00)	63,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.588.000,00	24.369.400,00	(14.218.600,00)	63,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	118.422.000,00	99.406.200,00	(19.015.800,00)	83,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	118.422.000,00	99.406.200,00	(19.015.800,00)	83,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.422.000,00	99.406.200,00	(19.015.800,00)	83,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	668.997.500,00	614.226.300,00	(54.771.200,00)	91,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	668.997.500,00	614.226.300,00	(54.771.200,00)	91,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.997.500,00	614.226.300,00	(54.771.200,00)	91,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	148.766.000,00	126.174.700,00	(22.591.300,00)	84,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	148.766.000,00	126.174.700,00	(22.591.300,00)	84,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.766.000,00	126.174.700,00	(22.591.300,00)	84,81	
				JUMLAH BELANJA	20.524.749.454,80	17.913.422.660,00	(2.611.326.794,80)	87,27	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(20.524.749.454,80)	(17.913.422.660,00)	2.611.326.794,80	87,27	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.524.749.454,80)	(17.913.422.660,00)	2.611.326.794,80	87,27	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000		5	BELANJA DAERAH	1.188.250.099,70	937.123.166,00	(251.126.933,70)	78,86	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	759.064.298,85	573.736.437,00	(185.327.861,85)	75,58	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	248.207.228,00	166.810.842,00	(81.396.386,00)	67,20	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.01.0014		FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN	248.207.228,00	166.810.842,00	(81.396.386,00)	67,20	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	248.207.228,00	166.810.842,00	(81.396.386,00)	67,20	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.207.228,00	166.810.842,00	(81.396.386,00)	67,20	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	234.627.839,85	192.228.577,00	(42.399.262,85)	81,92	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0001		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK- ASPEK SOSIAL	34.628.150,00	30.031.166,00	(4.596.984,00)	86,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.628.150,00	30.031.166,00	(4.596.984,00)	86,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.628.150,00	30.031.166,00	(4.596.984,00)	86,72	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0003		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	199.999.689,85	162.197.411,00	(37.802.278,85)	81,09	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	199.999.689,85	162.197.411,00	(37.802.278,85)	81,09	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.689,85	162.197.411,00	(37.802.278,85)	81,09	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	104.801.333,00	76.287.936,00	(28.513.397,00)	72,79	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03.0007		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	104.801.333,00	76.287.936,00	(28.513.397,00)	72,79	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	104.145.212,00	76.287.936,00	(27.857.276,00)	73,25	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.145.212,00	76.287.936,00	(27.857.276,00)	73,25	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	656.121,00	0,00	(656.121,00)	0,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.121,00	0,00	(656.121,00)	0,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	171.427.898,00	138.409.082,00	(33.018.816,00)	80,73	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	73.560.120,00	61.653.954,00	(11.906.166,00)	83,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.560.120,00	61.653.954,00	(11.906.166,00)	83,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.560.120,00	61.653.954,00	(11.906.166,00)	83,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0004		SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	49.316.000,00	34.107.500,00	(15.208.500,00)	69,16	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.316.000,00	34.107.500,00	(15.208.500,00)	69,16	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.316.000,00	34.107.500,00	(15.208.500,00)	69,16	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0005		FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	48.551.778,00	42.647.628,00	(5.904.150,00)	87,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	48.551.778,00	42.647.628,00	(5.904.150,00)	87,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.551.778,00	42.647.628,00	(5.904.150,00)	87,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	429.185.800,85	363.386.729,00	(65.799.071,85)	84,66	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN	429.185.800,85	363.386.729,00	(65.799.071,85)	84,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0002		PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS HASIL RISET	299.999.799,85	249.983.007,00	(50.016.792,85)	83,32	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	299.999.799,85	249.983.007,00	(50.016.792,85)	83,32	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.999.799,85	249.983.007,00	(50.016.792,85)	83,32	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0006		KOORDINASI SISTEM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH	129.186.001,00	113.403.722,00	(15.782.279,00)	87,78	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	129.186.001,00	113.403.722,00	(15.782.279,00)	87,78	
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.186.001,00	113.403.722,00	(15.782.279,00)	87,78	
				JUMLAH BELANJA	1.188.250.099,70	937.123.166,00	(251.126.933,70)	78,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.188.250.099,70)	(937.123.166,00)	251.126.933,70	78,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.188.250.099,70)	(937.123.166,00)	251.126.933,70	78,86	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.757.691.779.441,59	3.407.073.698.124,43	(350.618.081.317,16)	90,66	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.700.647.774,99	860.846.200,00	(53.839.801.574,99)	1,57	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.700.647.774,99	860.846.200,00	(53.839.801.574,99)	1,57	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.702.991.131.666,60	3.406.212.851.924,43	(296.778.279.742,17)	91,98	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	3.233.090.228.896,00	(272.310.754.604,00)	92,23	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	173.122.623.028,43	(24.467.525.138,17)	87,61	
				JUMLAH PENDAPATAN	3.757.691.779.441,59	3.407.073.698.124,43	(350.618.081.317,16)	90,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000		5	BELANJA DAERAH	571.334.940.609,24	549.979.082.492,39	(21.355.858.116,85)	96,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.857.952.996,69	15.055.391.108,39	(1.802.561.888,30)	89,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	51.667.127,72	46.377.400,00	(5.289.727,72)	89,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	41.667.332,72	36.845.850,00	(4.821.482,72)	88,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.667.332,72	36.845.850,00	(4.821.482,72)	88,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.667.332,72	36.845.850,00	(4.821.482,72)	88,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.999.795,00	9.531.550,00	(468.245,00)	95,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.795,00	9.531.550,00	(468.245,00)	95,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.795,00	9.531.550,00	(468.245,00)	95,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	(1.266.618.540,05)	89,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	(1.266.618.540,05)	89,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	(1.266.618.540,05)	89,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	(1.266.618.540,05)	89,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	122.582.000,00	111.620.062,00	(10.961.938,00)	91,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	122.582.000,00	111.620.062,00	(10.961.938,00)	91,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.582.000,00	111.620.062,00	(10.961.938,00)	91,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.582.000,00	111.620.062,00	(10.961.938,00)	91,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	298.226.000,00	249.951.139,00	(48.274.861,00)	83,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	153.386.000,00	151.085.139,00	(2.300.861,00)	98,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.386.000,00	151.085.139,00	(2.300.861,00)	98,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.386.000,00	151.085.139,00	(2.300.861,00)	98,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	144.840.000,00	98.866.000,00	(45.974.000,00)	68,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	144.840.000,00	98.866.000,00	(45.974.000,00)	68,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.840.000,00	98.866.000,00	(45.974.000,00)	68,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.749.394.609,00	1.630.646.982,00	(118.747.627,00)	93,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.417,00	29.946.982,00	(53.435,00)	99,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.417,00	29.946.982,00	(53.435,00)	99,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.417,00	29.946.982,00	(53.435,00)	99,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	890.261.257,00	877.817.469,00	(12.443.788,00)	98,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.008.000,00	13.293.538,00	(714.462,00)	94,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.008.000,00	13.293.538,00	(714.462,00)	94,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	876.253.257,00	864.523.931,00	(11.729.326,00)	98,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	876.253.257,00	864.523.931,00	(11.729.326,00)	98,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	59.995.070,00	52.337.000,00	(7.658.070,00)	87,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	59.995.070,00	52.337.000,00	(7.658.070,00)	87,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.995.070,00	52.337.000,00	(7.658.070,00)	87,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	330.005.636,00	285.343.541,00	(44.662.095,00)	86,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	330.005.636,00	285.343.541,00	(44.662.095,00)	86,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.005.636,00	285.343.541,00	(44.662.095,00)	86,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	88.355.029,00	71.974.895,00	(16.380.134,00)	81,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	88.355.029,00	71.974.895,00	(16.380.134,00)	81,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.355.029,00	71.974.895,00	(16.380.134,00)	81,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.340.200,00	37.013.862,00	(13.326.338,00)	73,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.340.200,00	37.013.862,00	(13.326.338,00)	73,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.340.200,00	37.013.862,00	(13.326.338,00)	73,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	300.437.000,00	276.213.233,00	(24.223.767,00)	91,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	300.437.000,00	276.213.233,00	(24.223.767,00)	91,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.437.000,00	276.213.233,00	(24.223.767,00)	91,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	136.797.600,00	135.362.849,00	(1.434.751,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	136.797.600,00	135.362.849,00	(1.434.751,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	136.117.600,00	134.682.849,00	(1.434.751,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.117.600,00	134.682.849,00	(1.434.751,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.057.790.432,00	879.968.906,00	(177.821.526,00)	83,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	445.132.032,00	339.314.506,00	(105.817.526,00)	76,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	445.132.032,00	339.314.506,00	(105.817.526,00)	76,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.132.032,00	339.314.506,00	(105.817.526,00)	76,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	612.658.400,00	540.654.400,00	(72.004.000,00)	88,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	612.658.400,00	540.654.400,00	(72.004.000,00)	88,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.658.400,00	540.654.400,00	(72.004.000,00)	88,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	985.628.609,92	812.215.692,39	(173.412.917,53)	82,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	45.490.000,00	44.462.018,00	(1.027.982,00)	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.490.000,00	44.462.018,00	(1.027.982,00)	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.490.000,00	44.462.018,00	(1.027.982,00)	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	439.540.000,00	286.271.180,00	(153.268.820,00)	65,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	439.540.000,00	286.271.180,00	(153.268.820,00)	65,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.540.000,00	286.271.180,00	(153.268.820,00)	65,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	424.433.049,92	419.609.357,39	(4.823.692,53)	98,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	424.433.049,92	419.609.357,39	(4.823.692,53)	98,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.433.049,92	419.609.357,39	(4.823.692,53)	98,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	76.165.560,00	61.873.137,00	(14.292.423,00)	81,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	76.165.560,00	61.873.137,00	(14.292.423,00)	81,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.165.560,00	61.873.137,00	(14.292.423,00)	81,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	553.346.254.112,55	533.966.575.425,00	(19.379.678.687,55)	96,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	811.825.000,00	710.036.237,00	(101.788.763,00)	87,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	115.000.000,00	100.615.350,00	(14.384.650,00)	87,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	100.615.350,00	(14.384.650,00)	87,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	100.615.350,00	(14.384.650,00)	87,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	105.000.000,00	89.857.300,00	(15.142.700,00)	85,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	89.857.300,00	(15.142.700,00)	85,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	89.857.300,00	(15.142.700,00)	85,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	240.745.000,00	224.942.690,00	(15.802.310,00)	93,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	240.745.000,00	224.942.690,00	(15.802.310,00)	93,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.745.000,00	224.942.690,00	(15.802.310,00)	93,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	193.840.000,00	179.826.377,00	(14.013.623,00)	92,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	193.840.000,00	179.826.377,00	(14.013.623,00)	92,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.840.000,00	179.826.377,00	(14.013.623,00)	92,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	157.240.000,00	114.794.520,00	(42.445.480,00)	73,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	157.240.000,00	114.794.520,00	(42.445.480,00)	73,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.240.000,00	114.794.520,00	(42.445.480,00)	73,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.510.199.950,00	1.423.401.393,00	(86.798.557,00)	94,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	96.702.000,00	61.929.400,00	(34.772.600,00)	64,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.702.000,00	61.929.400,00	(34.772.600,00)	64,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.702.000,00	61.929.400,00	(34.772.600,00)	64,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0003		PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	84.293.500,00	69.671.821,00	(14.621.679,00)	82,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.293.500,00	69.671.821,00	(14.621.679,00)	82,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.293.500,00	69.671.821,00	(14.621.679,00)	82,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	79.204.450,00	41.800.172,00	(37.404.278,00)	52,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	79.204.450,00	41.800.172,00	(37.404.278,00)	52,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.204.450,00	41.800.172,00	(37.404.278,00)	52,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	614.622.650,00	506.521.411,00	(108.101.239,00)	82,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	34.186.500,00	26.425.385,00	(7.761.115,00)	77,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.186.500,00	26.425.385,00	(7.761.115,00)	77,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.186.500,00	26.425.385,00	(7.761.115,00)	77,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	29.802.400,00	25.375.518,00	(4.426.882,00)	85,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.802.400,00	25.375.518,00	(4.426.882,00)	85,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.802.400,00	25.375.518,00	(4.426.882,00)	85,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	136.151.400,00	125.916.338,00	(10.235.062,00)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	136.151.400,00	125.916.338,00	(10.235.062,00)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.151.400,00	125.916.338,00	(10.235.062,00)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	69.666.000,00	69.258.500,00	(407.500,00)	99,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.666.000,00	69.258.500,00	(407.500,00)	99,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.666.000,00	69.258.500,00	(407.500,00)	99,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	97.382.500,00	95.934.217,00	(1.448.283,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	97.382.500,00	95.934.217,00	(1.448.283,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.382.500,00	95.934.217,00	(1.448.283,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0007		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	41.790.000,00	23.109.302,00	(18.680.698,00)	55,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	41.790.000,00	23.109.302,00	(18.680.698,00)	55,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.790.000,00	23.109.302,00	(18.680.698,00)	55,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0009		PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	43.279.000,00	38.206.917,00	(5.072.083,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.279.000,00	38.206.917,00	(5.072.083,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.279.000,00	38.206.917,00	(5.072.083,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0010		PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	39.910.900,00	0,00	(39.910.900,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	39.910.900,00	0,00	(39.910.900,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.910.900,00	0,00	(39.910.900,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	58.179.500,00	45.431.347,00	(12.748.153,00)	78,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	58.179.500,00	45.431.347,00	(12.748.153,00)	78,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.179.500,00	45.431.347,00	(12.748.153,00)	78,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0012		PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA	64.274.450,00	56.863.887,00	(7.410.563,00)	88,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	64.274.450,00	56.863.887,00	(7.410.563,00)	88,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.274.450,00	56.863.887,00	(7.410.563,00)	88,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	550.189.185.862,55	531.178.467.809,00	(19.010.718.053,55)	96,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	544.746.901.358,00	528.411.979.005,00	(16.334.922.353,00)	97,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	94.778.104,00	60.989.533,00	(33.788.571,00)	64,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.778.104,00	60.989.533,00	(33.788.571,00)	64,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	(16.301.133.782,00)	97,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	(16.301.133.782,00)	97,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	(2.675.795.700,55)	50,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	(2.675.795.700,55)	50,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	(2.675.795.700,55)	50,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	220.420.650,00	148.148.575,00	(72.272.075,00)	67,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	160.143.000,00	90.861.421,00	(69.281.579,00)	56,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.143.000,00	90.861.421,00	(69.281.579,00)	56,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.143.000,00	90.861.421,00	(69.281.579,00)	56,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	60.277.650,00	57.287.154,00	(2.990.496,00)	95,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.277.650,00	57.287.154,00	(2.990.496,00)	95,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.277.650,00	57.287.154,00	(2.990.496,00)	95,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.130.733.500,00	957.115.959,00	(173.617.541,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.130.733.500,00	957.115.959,00	(173.617.541,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0004		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	104.978.400,00	90.330.586,00	(14.647.814,00)	86,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	104.978.400,00	90.330.586,00	(14.647.814,00)	86,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.978.400,00	90.330.586,00	(14.647.814,00)	86,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	150.080.000,00	139.051.262,00	(11.028.738,00)	92,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.080.000,00	139.051.262,00	(11.028.738,00)	92,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.080.000,00	139.051.262,00	(11.028.738,00)	92,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	71.126.000,00	65.284.336,00	(5.841.664,00)	91,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.126.000,00	65.284.336,00	(5.841.664,00)	91,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.126.000,00	65.284.336,00	(5.841.664,00)	91,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	161.478.700,00	123.314.061,00	(38.164.639,00)	76,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	161.478.700,00	123.314.061,00	(38.164.639,00)	76,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.478.700,00	123.314.061,00	(38.164.639,00)	76,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0008		PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	57.287.400,00	38.961.351,00	(18.326.049,00)	68,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	57.287.400,00	38.961.351,00	(18.326.049,00)	68,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.287.400,00	38.961.351,00	(18.326.049,00)	68,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0009		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	46.630.200,00	36.133.633,00	(10.496.567,00)	77,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.630.200,00	36.133.633,00	(10.496.567,00)	77,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.630.200,00	36.133.633,00	(10.496.567,00)	77,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	121.810.800,00	99.824.329,00	(21.986.471,00)	81,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	121.810.800,00	99.824.329,00	(21.986.471,00)	81,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.810.800,00	99.824.329,00	(21.986.471,00)	81,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	36.609.000,00	29.371.000,00	(7.238.000,00)	80,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	36.609.000,00	29.371.000,00	(7.238.000,00)	80,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.609.000,00	29.371.000,00	(7.238.000,00)	80,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	163.647.000,00	126.351.829,00	(37.295.171,00)	77,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	163.647.000,00	126.351.829,00	(37.295.171,00)	77,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.647.000,00	126.351.829,00	(37.295.171,00)	77,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0013		PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	217.086.000,00	208.493.572,00	(8.592.428,00)	96,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	217.086.000,00	208.493.572,00	(8.592.428,00)	96,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.086.000,00	208.493.572,00	(8.592.428,00)	96,04	
				JUMLAH BELANJA	571.334.940.609,24	549.979.082.492,39	(21.355.858.116,85)	96,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	3.186.356.838.832,35	2.857.094.615.632,04	(329.262.223.200,31)	89,66	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	2.447.030.825,01	2.393.651.728,24	(53.379.096,77)	97,81	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.033.140.451,01	28.979.761.354,24	(53.379.096,77)	99,81	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.033.140.451,01	18.941.298.854,24	(10.091.841.596,77)	65,24	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.038.462.500,00	10.038.462.500,00	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.033.140.451,01	28.979.761.354,24	(53.379.096,77)	99,81	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.45.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	2.447.030.825,01	2.393.651.728,24	(53.379.096,77)	97,81	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.188.803.869.657,36	2.859.488.267.360,28	(329.315.602.297,08)	89,67	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.46.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	282.702.122.810,00	308.613.676.160,02	25.911.553.350,02	109,16	
	5.02.0.00.0.00.46.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	282.702.122.810,00	308.613.676.160,02	25.911.553.350,02	109,16	
	5.02.0.00.0.00.46.0000		4.1.01	Pajak Daerah	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	(2.146.080.875,65)	99,04	
	5.02.0.00.0.00.46.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	(11.604.435.942,38)	61,31	
	5.02.0.00.0.00.46.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.727.106.060,00	68.389.176.228,05	39.662.070.168,05	238,06	
				JUMLAH PENDAPATAN	282.702.122.810,00	308.613.676.160,02	25.911.553.350,02	109,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000		5	BELANJA DAERAH	38.136.859.136,00	27.478.423.703,44	(10.658.435.432,56)	72,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.580.955.236,00	24.419.993.251,44	(9.160.961.984,56)	72,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.580.500,00	56.213.580,00	(32.366.920,00)	63,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	44.161.500,00	17.311.580,00	(26.849.920,00)	39,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.161.500,00	17.311.580,00	(26.849.920,00)	39,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.161.500,00	17.311.580,00	(26.849.920,00)	39,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.684.000,00	6.552.000,00	(4.132.000,00)	61,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.684.000,00	6.552.000,00	(4.132.000,00)	61,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.684.000,00	6.552.000,00	(4.132.000,00)	61,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	33.735.000,00	32.350.000,00	(1.385.000,00)	95,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.735.000,00	32.350.000,00	(1.385.000,00)	95,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.735.000,00	32.350.000,00	(1.385.000,00)	95,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	(8.158.932.894,56)	72,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	(8.158.932.894,56)	72,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	(8.158.932.894,56)	72,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	(8.158.932.894,56)	72,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	150.000.000,00	137.234.510,00	(12.765.490,00)	91,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	150.000.000,00	137.234.510,00	(12.765.490,00)	91,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	137.234.510,00	(12.765.490,00)	91,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	137.234.510,00	(12.765.490,00)	91,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.193.121.891,00	1.136.967.814,00	(56.154.077,00)	95,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	26.977.593,00	(3.022.407,00)	89,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.977.593,00	(3.022.407,00)	89,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.977.593,00	(3.022.407,00)	89,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	218.234.200,00	176.863.500,00	(41.370.700,00)	81,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.423.100,00	13.052.400,00	(41.370.700,00)	23,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.423.100,00	13.052.400,00	(41.370.700,00)	23,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	163.811.100,00	163.811.100,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.271.100,00	127.271.100,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.540.000,00	36.540.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.000.000,00	59.004.450,00	(995.550,00)	98,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.004.450,00	(995.550,00)	98,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.004.450,00	(995.550,00)	98,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	267.078.800,00	262.526.600,00	(4.552.200,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	267.078.800,00	262.526.600,00	(4.552.200,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.078.800,00	262.526.600,00	(4.552.200,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	363.403.891,00	360.746.338,00	(2.657.553,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	363.403.891,00	360.746.338,00	(2.657.553,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.403.891,00	360.746.338,00	(2.657.553,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.405.000,00	(595.000,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.405.000,00	(595.000,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.405.000,00	(595.000,00)	98,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.188.000,00	25.025.000,00	(163.000,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.188.000,00	25.025.000,00	(163.000,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.188.000,00	25.025.000,00	(163.000,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	189.217.000,00	186.419.333,00	(2.797.667,00)	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	189.217.000,00	186.419.333,00	(2.797.667,00)	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.217.000,00	186.419.333,00	(2.797.667,00)	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	66.545.369,00	64.811.169,00	(1.734.200,00)	97,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	66.545.369,00	64.811.169,00	(1.734.200,00)	97,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.988.300,00	15.254.100,00	(1.734.200,00)	89,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.988.300,00	15.254.100,00	(1.734.200,00)	89,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	49.557.069,00	49.557.069,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.557.069,00	49.557.069,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.470.704.711,00	769.720.999,00	(700.983.712,00)	52,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	398.516.267,00	240.635.399,00	(157.880.868,00)	60,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	398.516.267,00	240.635.399,00	(157.880.868,00)	60,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.516.267,00	240.635.399,00	(157.880.868,00)	60,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.072.188.444,00	529.085.600,00	(543.102.844,00)	49,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.072.188.444,00	529.085.600,00	(543.102.844,00)	49,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.188.444,00	529.085.600,00	(543.102.844,00)	49,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	947.214.500,00	749.189.809,00	(198.024.691,00)	79,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	182.560.000,00	95.157.180,00	(87.402.820,00)	52,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	182.560.000,00	95.157.180,00	(87.402.820,00)	52,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.560.000,00	95.157.180,00	(87.402.820,00)	52,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	327.970.000,00	237.934.730,00	(90.035.270,00)	72,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	327.970.000,00	237.934.730,00	(90.035.270,00)	72,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.970.000,00	237.934.730,00	(90.035.270,00)	72,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	386.705.000,00	382.990.000,00	(3.715.000,00)	99,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.744.330,00	24.950.000,00	(2.794.330,00)	89,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.744.330,00	24.950.000,00	(2.794.330,00)	89,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	358.960.670,00	358.040.000,00	(920.670,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.960.670,00	358.040.000,00	(920.670,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	49.979.500,00	33.107.899,00	(16.871.601,00)	66,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	49.979.500,00	33.107.899,00	(16.871.601,00)	66,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.979.500,00	33.107.899,00	(16.871.601,00)	66,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.555.903.900,00	3.058.430.452,00	(1.497.473.448,00)	67,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.555.903.900,00	3.058.430.452,00	(1.497.473.448,00)	67,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	183.078.000,00	178.933.860,00	(4.144.140,00)	97,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	183.078.000,00	178.933.860,00	(4.144.140,00)	97,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.078.000,00	178.933.860,00	(4.144.140,00)	97,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	267.122.500,00	210.010.523,00	(57.111.977,00)	78,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	267.122.500,00	210.010.523,00	(57.111.977,00)	78,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.122.500,00	210.010.523,00	(57.111.977,00)	78,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	103.800.000,00	74.807.150,00	(28.992.850,00)	72,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.800.000,00	74.807.150,00	(28.992.850,00)	72,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000,00	74.807.150,00	(28.992.850,00)	72,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	79.600.800,00	51.246.056,00	(28.354.744,00)	64,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.026.900,00	26.338.155,00	(20.688.745,00)	56,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.026.900,00	26.338.155,00	(20.688.745,00)	56,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	32.573.900,00	24.907.901,00	(7.665.999,00)	76,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.573.900,00	24.907.901,00	(7.665.999,00)	76,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	600.584.000,00	271.701.116,00	(328.882.884,00)	45,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	600.584.000,00	271.701.116,00	(328.882.884,00)	45,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.584.000,00	271.701.116,00	(328.882.884,00)	45,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	445.429.600,00	349.813.291,00	(95.616.309,00)	78,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	445.429.600,00	349.813.291,00	(95.616.309,00)	78,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.429.600,00	349.813.291,00	(95.616.309,00)	78,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	371.304.500,00	220.917.399,00	(150.387.101,00)	59,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	371.304.500,00	220.917.399,00	(150.387.101,00)	59,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.304.500,00	220.917.399,00	(150.387.101,00)	59,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0008		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	818.478.500,00	532.337.956,00	(286.140.544,00)	65,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	818.478.500,00	532.337.956,00	(286.140.544,00)	65,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.478.500,00	532.337.956,00	(286.140.544,00)	65,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	315.995.000,00	174.652.070,00	(141.342.930,00)	55,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	315.995.000,00	174.652.070,00	(141.342.930,00)	55,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.995.000,00	174.652.070,00	(141.342.930,00)	55,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	362.410.000,00	357.883.681,00	(4.526.319,00)	98,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	362.410.000,00	357.883.681,00	(4.526.319,00)	98,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.410.000,00	357.883.681,00	(4.526.319,00)	98,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	261.136.000,00	210.933.941,00	(50.202.059,00)	80,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	261.136.000,00	210.933.941,00	(50.202.059,00)	80,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.136.000,00	210.933.941,00	(50.202.059,00)	80,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0012		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	269.497.000,00	95.022.734,00	(174.474.266,00)	35,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	269.497.000,00	95.022.734,00	(174.474.266,00)	35,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.497.000,00	95.022.734,00	(174.474.266,00)	35,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	361.103.000,00	223.847.650,00	(137.255.350,00)	61,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	361.103.000,00	223.847.650,00	(137.255.350,00)	61,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.103.000,00	223.847.650,00	(137.255.350,00)	61,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	25.040.000,00	15.235.600,00	(9.804.400,00)	60,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	25.040.000,00	15.235.600,00	(9.804.400,00)	60,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.040.000,00	15.235.600,00	(9.804.400,00)	60,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0015		ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	91.325.000,00	91.087.425,00	(237.575,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	91.325.000,00	91.087.425,00	(237.575,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.325.000,00	91.087.425,00	(237.575,00)	99,73	
				JUMLAH BELANJA	38.136.859.136,00	27.478.423.703,44	(10.658.435.432,56)	72,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	244.565.263.674,00	281.135.252.456,58	36.569.988.782,58	114,95	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	244.565.263.674,00	281.135.252.456,58	36.569.988.782,58	114,95	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000		5	BELANJA DAERAH	18.901.341.166,00	16.017.578.593,00	(2.883.762.573,00)	84,74	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.376.430.991,00	10.612.209.957,00	(1.764.221.034,00)	85,74	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.676.000,00	11.128.000,00	(21.548.000,00)	34,05	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.008.000,00	5.192.000,00	(19.816.000,00)	20,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.008.000,00	5.192.000,00	(19.816.000,00)	20,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.008.000,00	5.192.000,00	(19.816.000,00)	20,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.968.000,00	4.240.000,00	(728.000,00)	85,34	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.968.000,00	4.240.000,00	(728.000,00)	85,34	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.968.000,00	4.240.000,00	(728.000,00)	85,34	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	2.700.000,00	1.696.000,00	(1.004.000,00)	62,81	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	1.696.000,00	(1.004.000,00)	62,81	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	1.696.000,00	(1.004.000,00)	62,81	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	(1.427.908.508,00)	85,77	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	(1.427.908.508,00)	85,77	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	(1.427.908.508,00)	85,77	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	(1.427.908.508,00)	85,77	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	46.282.500,00	42.729.250,00	(3.553.250,00)	92,32	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	46.282.500,00	42.729.250,00	(3.553.250,00)	92,32	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.282.500,00	42.729.250,00	(3.553.250,00)	92,32	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.282.500,00	42.729.250,00	(3.553.250,00)	92,32	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	169.541.000,00	154.062.500,00	(15.478.500,00)	90,87	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	51.536.000,00	48.780.000,00	(2.756.000,00)	94,65	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.536.000,00	48.780.000,00	(2.756.000,00)	94,65	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.536.000,00	48.780.000,00	(2.756.000,00)	94,65	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	118.005.000,00	105.282.500,00	(12.722.500,00)	89,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	118.005.000,00	105.282.500,00	(12.722.500,00)	89,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.005.000,00	105.282.500,00	(12.722.500,00)	89,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	768.256.399,00	728.612.722,00	(39.643.677,00)	94,83	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.023.558,00	30.012.170,00	(11.388,00)	99,96	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.023.558,00	30.012.170,00	(11.388,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.023.558,00	30.012.170,00	(11.388,00)	99,96	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	157.297.892,00	143.840.006,00	(13.457.886,00)	91,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	156.617.892,00	143.160.006,00	(13.457.886,00)	91,40	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.617.892,00	143.160.006,00	(13.457.886,00)	91,40	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60.009.930,00	59.665.727,00	(344.203,00)	99,42	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.009.930,00	59.665.727,00	(344.203,00)	99,42	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.009.930,00	59.665.727,00	(344.203,00)	99,42	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	200.001.799,00	199.566.802,00	(434.997,00)	99,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.001.799,00	199.566.802,00	(434.997,00)	99,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.001.799,00	199.566.802,00	(434.997,00)	99,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	107.040.020,00	106.456.355,00	(583.665,00)	99,45	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	107.040.020,00	106.456.355,00	(583.665,00)	99,45	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.040.020,00	106.456.355,00	(583.665,00)	99,45	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	40.000.000,00	39.657.100,00	(342.900,00)	99,14	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.657.100,00	(342.900,00)	99,14	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.657.100,00	(342.900,00)	99,14	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	133.883.200,00	109.454.562,00	(24.428.638,00)	81,75	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.883.200,00	109.454.562,00	(24.428.638,00)	81,75	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.883.200,00	109.454.562,00	(24.428.638,00)	81,75	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	65.728.220,00	64.880.000,00	(848.220,00)	98,70	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	65.728.220,00	64.880.000,00	(848.220,00)	98,70	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	65.048.220,00	64.200.000,00	(848.220,00)	98,69	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.048.220,00	64.200.000,00	(848.220,00)	98,69	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	733.730.200,00	589.352.705,00	(144.377.495,00)	80,32	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	192.329.000,00	147.993.105,00	(44.335.895,00)	76,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	192.329.000,00	147.993.105,00	(44.335.895,00)	76,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.329.000,00	147.993.105,00	(44.335.895,00)	76,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	541.401.200,00	441.359.600,00	(100.041.600,00)	81,52	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	541.401.200,00	441.359.600,00	(100.041.600,00)	81,52	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.401.200,00	441.359.600,00	(100.041.600,00)	81,52	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	524.510.000,00	413.646.616,00	(110.863.384,00)	78,86	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	281.330.000,00	172.145.616,00	(109.184.384,00)	61,18	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	281.330.000,00	172.145.616,00	(109.184.384,00)	61,18	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.330.000,00	172.145.616,00	(109.184.384,00)	61,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	224.880.000,00	223.801.000,00	(1.079.000,00)	99,52	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.980.000,00	49.601.000,00	(379.000,00)	99,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	49.601.000,00	(379.000,00)	99,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	174.900.000,00	174.200.000,00	(700.000,00)	99,59	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.900.000,00	174.200.000,00	(700.000,00)	99,59	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	18.300.000,00	17.700.000,00	(600.000,00)	96,72	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.300.000,00	17.700.000,00	(600.000,00)	96,72	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	17.700.000,00	(600.000,00)	96,72	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.524.910.175,00	5.405.368.636,00	(1.119.541.539,00)	82,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	548.275.050,00	349.395.663,00	(198.879.387,00)	63,72	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	220.000.050,00	160.136.591,00	(59.863.459,00)	72,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	220.000.050,00	160.136.591,00	(59.863.459,00)	72,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.050,00	160.136.591,00	(59.863.459,00)	72,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0004		EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	197.650.000,00	98.869.200,00	(98.780.800,00)	50,02	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	197.650.000,00	98.869.200,00	(98.780.800,00)	50,02	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.650.000,00	98.869.200,00	(98.780.800,00)	50,02	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	25.000.000,00	24.886.708,00	(113.292,00)	99,54	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.886.708,00	(113.292,00)	99,54	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.886.708,00	(113.292,00)	99,54	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	44.625.000,00	40.326.700,00	(4.298.300,00)	90,36	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	44.625.000,00	40.326.700,00	(4.298.300,00)	90,36	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.625.000,00	40.326.700,00	(4.298.300,00)	90,36	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	61.000.000,00	25.176.464,00	(35.823.536,00)	41,27	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	61.000.000,00	25.176.464,00	(35.823.536,00)	41,27	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	25.176.464,00	(35.823.536,00)	41,27	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	408.449.800,00	404.152.638,00	(4.297.162,00)	98,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	97.887.950,00	97.786.982,00	(100.968,00)	99,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	97.887.950,00	97.786.982,00	(100.968,00)	99,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.887.950,00	97.786.982,00	(100.968,00)	99,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	73.081.925,00	72.644.006,00	(437.919,00)	99,40	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.081.925,00	72.644.006,00	(437.919,00)	99,40	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.081.925,00	72.644.006,00	(437.919,00)	99,40	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	237.479.925,00	233.721.650,00	(3.758.275,00)	98,41	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	237.479.925,00	233.721.650,00	(3.758.275,00)	98,41	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.479.925,00	233.721.650,00	(3.758.275,00)	98,41	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	5.280.373.975,00	4.383.643.004,00	(896.730.971,00)	83,01	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	3.205.712.628,00	2.514.061.552,00	(691.651.076,00)	78,42	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.205.712.628,00	2.514.061.552,00	(691.651.076,00)	78,42	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.205.712.628,00	2.514.061.552,00	(691.651.076,00)	78,42	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	1.039.122.847,00	903.813.987,00	(135.308.860,00)	86,97	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.039.122.847,00	903.813.987,00	(135.308.860,00)	86,97	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.122.847,00	903.813.987,00	(135.308.860,00)	86,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	741.663.900,00	706.391.055,00	(35.272.845,00)	95,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	741.663.900,00	706.391.055,00	(35.272.845,00)	95,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.663.900,00	706.391.055,00	(35.272.845,00)	95,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0006		FASILITASI SERTIFIKASI JABATAN ASN	148.999.700,00	138.018.160,00	(10.981.540,00)	92,62	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	148.999.700,00	138.018.160,00	(10.981.540,00)	92,62	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.999.700,00	138.018.160,00	(10.981.540,00)	92,62	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0009		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL	144.874.900,00	121.358.250,00	(23.516.650,00)	83,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	144.874.900,00	121.358.250,00	(23.516.650,00)	83,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.874.900,00	121.358.250,00	(23.516.650,00)	83,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	287.811.350,00	268.177.331,00	(19.634.019,00)	93,17	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	51.421.500,00	49.038.630,00	(2.382.870,00)	95,36	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.421.500,00	49.038.630,00	(2.382.870,00)	95,36	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.421.500,00	49.038.630,00	(2.382.870,00)	95,36	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0005		PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	25.120.000,00	22.833.057,00	(2.286.943,00)	90,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.120.000,00	22.833.057,00	(2.286.943,00)	90,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.120.000,00	22.833.057,00	(2.286.943,00)	90,89	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	58.991.850,00	50.274.156,00	(8.717.694,00)	85,22	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	58.991.850,00	50.274.156,00	(8.717.694,00)	85,22	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.991.850,00	50.274.156,00	(8.717.694,00)	85,22	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0008		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	60.229.500,00	57.074.930,00	(3.154.570,00)	94,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.229.500,00	57.074.930,00	(3.154.570,00)	94,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.229.500,00	57.074.930,00	(3.154.570,00)	94,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0009		PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI	15.064.500,00	14.467.849,00	(596.651,00)	96,03	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.064.500,00	14.467.849,00	(596.651,00)	96,03	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.064.500,00	14.467.849,00	(596.651,00)	96,03	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0010		EVALUASI DISIPLIN ASN	76.984.000,00	74.488.709,00	(2.495.291,00)	96,75	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	76.984.000,00	74.488.709,00	(2.495.291,00)	96,75	
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.984.000,00	74.488.709,00	(2.495.291,00)	96,75	
				JUMLAH BELANJA	18.901.341.166,00	16.017.578.593,00	(2.883.762.573,00)	84,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(18.901.341.166,00)	(16.017.578.593,00)	2.883.762.573,00	84,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.901.341.166,00)	(16.017.578.593,00)	2.883.762.573,00	84,74	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000		5	BELANJA DAERAH	30.408.129.304,00	25.088.897.285,00	(5.319.232.019,00)	82,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.901.548.854,00	21.053.176.273,00	(4.848.372.581,00)	81,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.771.300,00	69.786.878,00	(20.984.422,00)	76,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	51.601.450,00	31.982.528,00	(19.618.922,00)	61,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.601.450,00	31.982.528,00	(19.618.922,00)	61,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.601.450,00	31.982.528,00	(19.618.922,00)	61,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.999.900,00	9.924.600,00	(75.300,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.900,00	9.924.600,00	(75.300,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.900,00	9.924.600,00	(75.300,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	29.169.950,00	27.879.750,00	(1.290.200,00)	95,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.169.950,00	27.879.750,00	(1.290.200,00)	95,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.169.950,00	27.879.750,00	(1.290.200,00)	95,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	(4.222.751.903,00)	80,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	(4.222.751.903,00)	80,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	(4.222.751.903,00)	80,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	(4.222.751.903,00)	80,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	89.316.500,00	76.033.124,00	(13.283.376,00)	85,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	89.316.500,00	76.033.124,00	(13.283.376,00)	85,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.316.500,00	76.033.124,00	(13.283.376,00)	85,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.316.500,00	76.033.124,00	(13.283.376,00)	85,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	581.971.000,00	479.829.642,00	(102.141.358,00)	82,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	48.387.000,00	25.735.076,00	(22.651.924,00)	53,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.387.000,00	25.735.076,00	(22.651.924,00)	53,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.387.000,00	25.735.076,00	(22.651.924,00)	53,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	533.584.000,00	454.094.566,00	(79.489.434,00)	85,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	533.584.000,00	454.094.566,00	(79.489.434,00)	85,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.584.000,00	454.094.566,00	(79.489.434,00)	85,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	945.756.970,00	881.210.163,00	(64.546.807,00)	93,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.867.180,00	24.823.396,00	(43.784,00)	99,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.867.180,00	24.823.396,00	(43.784,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.867.180,00	24.823.396,00	(43.784,00)	99,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	118.439.340,00	117.335.450,00	(1.103.890,00)	99,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	117.759.340,00	116.655.450,00	(1.103.890,00)	99,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.759.340,00	116.655.450,00	(1.103.890,00)	99,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	54.725.900,00	54.725.013,00	(887,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.725.900,00	54.725.013,00	(887,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.725.900,00	54.725.013,00	(887,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.633.452,00	88.494.478,00	(12.138.974,00)	87,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.633.452,00	88.494.478,00	(12.138.974,00)	87,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.633.452,00	88.494.478,00	(12.138.974,00)	87,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	128.741.098,00	114.723.076,00	(14.018.022,00)	89,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	128.741.098,00	114.723.076,00	(14.018.022,00)	89,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.741.098,00	114.723.076,00	(14.018.022,00)	89,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	39.000.000,00	(1.000.000,00)	97,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.000.000,00	(1.000.000,00)	97,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.000.000,00	(1.000.000,00)	97,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	48.776.000,00	47.480.000,00	(1.296.000,00)	97,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	48.776.000,00	47.480.000,00	(1.296.000,00)	97,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.776.000,00	47.480.000,00	(1.296.000,00)	97,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	429.574.000,00	394.628.750,00	(34.945.250,00)	91,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	429.574.000,00	394.628.750,00	(34.945.250,00)	91,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.574.000,00	394.628.750,00	(34.945.250,00)	91,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	614.550.800,00	587.367.200,00	(27.183.600,00)	95,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	354.720.000,00	330.720.000,00	(24.000.000,00)	93,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	354.720.000,00	330.720.000,00	(24.000.000,00)	93,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.720.000,00	330.720.000,00	(24.000.000,00)	93,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	259.830.800,00	256.647.200,00	(3.183.600,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	259.150.800,00	255.967.200,00	(3.183.600,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.150.800,00	255.967.200,00	(3.183.600,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	920.289.856,00	568.258.231,00	(352.031.625,00)	61,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	282.199.012,00	220.758.231,00	(61.440.781,00)	78,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	282.199.012,00	220.758.231,00	(61.440.781,00)	78,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.199.012,00	220.758.231,00	(61.440.781,00)	78,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	638.090.844,00	347.500.000,00	(290.590.844,00)	54,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	638.090.844,00	347.500.000,00	(290.590.844,00)	54,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.090.844,00	347.500.000,00	(290.590.844,00)	54,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.010.700.320,00	965.250.830,00	(45.449.490,00)	95,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	488.910.000,00	445.264.022,00	(43.645.978,00)	91,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	488.910.000,00	445.264.022,00	(43.645.978,00)	91,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.910.000,00	445.264.022,00	(43.645.978,00)	91,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	198.624.000,00	197.207.558,00	(1.416.442,00)	99,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	198.624.000,00	197.207.558,00	(1.416.442,00)	99,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.624.000,00	197.207.558,00	(1.416.442,00)	99,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	323.166.320,00	322.779.250,00	(387.070,00)	99,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	323.166.320,00	322.779.250,00	(387.070,00)	99,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.166.320,00	322.779.250,00	(387.070,00)	99,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.157.755.950,00	2.796.347.857,00	(361.408.093,00)	88,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	2.342.915.500,00	2.030.724.093,00	(312.191.407,00)	86,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	655.441.400,00	529.950.311,00	(125.491.089,00)	80,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	655.441.400,00	529.950.311,00	(125.491.089,00)	80,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.441.400,00	529.950.311,00	(125.491.089,00)	80,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	524.718.500,00	373.767.100,00	(150.951.400,00)	71,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	524.718.500,00	373.767.100,00	(150.951.400,00)	71,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.718.500,00	373.767.100,00	(150.951.400,00)	71,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	310.357.000,00	290.671.362,00	(19.685.638,00)	93,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	310.357.000,00	290.671.362,00	(19.685.638,00)	93,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.357.000,00	290.671.362,00	(19.685.638,00)	93,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	91.866.950,00	85.992.650,00	(5.874.300,00)	93,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.866.950,00	85.992.650,00	(5.874.300,00)	93,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.866.950,00	85.992.650,00	(5.874.300,00)	93,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	558.352.750,00	553.534.600,00	(4.818.150,00)	99,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	558.352.750,00	553.534.600,00	(4.818.150,00)	99,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.352.750,00	553.534.600,00	(4.818.150,00)	99,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	202.178.900,00	196.808.070,00	(5.370.830,00)	97,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	202.178.900,00	196.808.070,00	(5.370.830,00)	97,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.178.900,00	196.808.070,00	(5.370.830,00)	97,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	814.840.450,00	765.623.764,00	(49.216.686,00)	93,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	814.840.450,00	765.623.764,00	(49.216.686,00)	93,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	814.840.450,00	765.623.764,00	(49.216.686,00)	93,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.840.450,00	765.623.764,00	(49.216.686,00)	93,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.348.824.500,00	1.239.373.155,00	(109.451.345,00)	91,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	152.723.950,00	145.904.703,00	(6.819.247,00)	95,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.01.0001		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	152.723.950,00	145.904.703,00	(6.819.247,00)	95,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	152.723.950,00	145.904.703,00	(6.819.247,00)	95,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.723.950,00	145.904.703,00	(6.819.247,00)	95,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.196.100.550,00	1.093.468.452,00	(102.632.098,00)	91,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	263.930.000,00	231.738.650,00	(32.191.350,00)	87,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	263.930.000,00	231.738.650,00	(32.191.350,00)	87,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.930.000,00	231.738.650,00	(32.191.350,00)	87,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	347.119.900,00	316.223.216,00	(30.896.684,00)	91,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	347.119.900,00	316.223.216,00	(30.896.684,00)	91,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.119.900,00	316.223.216,00	(30.896.684,00)	91,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	490.000.000,00	450.716.236,00	(39.283.764,00)	91,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	490.000.000,00	450.716.236,00	(39.283.764,00)	91,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000,00	450.716.236,00	(39.283.764,00)	91,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	95.050.650,00	94.790.350,00	(260.300,00)	99,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	95.050.650,00	94.790.350,00	(260.300,00)	99,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.050.650,00	94.790.350,00	(260.300,00)	99,72	
				JUMLAH BELANJA	30.408.129.304,00	25.088.897.285,00	(5.319.232.019,00)	82,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(30.408.129.304,00)	(25.088.897.285,00)	5.319.232.019,00	82,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(30.408.129.304,00)	(25.088.897.285,00)	5.319.232.019,00	82,50	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sekayu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		5	BELANJA DAERAH	10.324.889.048,00	9.220.368.788,00	(1.104.520.260,00)	89,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.848.100.885,00	8.901.514.188,00	(946.586.697,00)	90,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.706.000,00	14.118.000,00	(1.588.000,00)	89,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.761.000,00	4.186.000,00	(1.575.000,00)	72,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.761.000,00	4.186.000,00	(1.575.000,00)	72,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.761.000,00	4.186.000,00	(1.575.000,00)	72,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.945.000,00	9.932.000,00	(13.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.945.000,00	9.932.000,00	(13.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.945.000,00	9.932.000,00	(13.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	(709.931.714,00)	91,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	(709.931.714,00)	91,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	(709.931.714,00)	91,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	(709.931.714,00)	91,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.775.000,00	32.696.000,00	(13.079.000,00)	71,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	45.775.000,00	32.696.000,00	(13.079.000,00)	71,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.775.000,00	32.696.000,00	(13.079.000,00)	71,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.775.000,00	32.696.000,00	(13.079.000,00)	71,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	298.114.806,00	276.820.859,00	(21.293.947,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.992.205,00	9.986.300,00	(5.905,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.992.205,00	9.986.300,00	(5.905,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.205,00	9.986.300,00	(5.905,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.317.764,00	42.421.550,00	(896.214,00)	97,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	42.637.764,00	41.741.550,00	(896.214,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.637.764,00	41.741.550,00	(896.214,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.909.071,00	19.905.157,00	(3.914,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.909.071,00	19.905.157,00	(3.914,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.909.071,00	19.905.157,00	(3.914,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.023.558,00	39.632.792,00	(390.766,00)	99,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	40.023.558,00	39.632.792,00	(390.766,00)	99,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.023.558,00	39.632.792,00	(390.766,00)	99,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.039.208,00	33.983.900,00	(55.308,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.039.208,00	33.983.900,00	(55.308,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.039.208,00	33.983.900,00	(55.308,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	25.680.000,00	25.655.000,00	(25.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.680.000,00	25.655.000,00	(25.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.680.000,00	25.655.000,00	(25.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.000.000,00	37.380.000,00	(12.620.000,00)	74,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	37.380.000,00	(12.620.000,00)	74,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	37.380.000,00	(12.620.000,00)	74,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	75.153.000,00	67.856.160,00	(7.296.840,00)	90,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.153.000,00	67.856.160,00	(7.296.840,00)	90,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.153.000,00	67.856.160,00	(7.296.840,00)	90,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	29.658.770,00	29.534.450,00	(124.320,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	29.658.770,00	29.534.450,00	(124.320,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	28.978.770,00	28.854.450,00	(124.320,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.978.770,00	28.854.450,00	(124.320,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	896.536.800,00	722.538.175,00	(173.998.625,00)	80,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	134.317.600,00	74.689.375,00	(59.628.225,00)	55,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.317.600,00	74.689.375,00	(59.628.225,00)	55,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.317.600,00	74.689.375,00	(59.628.225,00)	55,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	762.219.200,00	647.848.800,00	(114.370.400,00)	84,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	762.219.200,00	647.848.800,00	(114.370.400,00)	84,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	762.219.200,00	647.848.800,00	(114.370.400,00)	84,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	209.118.880,00	182.547.789,00	(26.571.091,00)	87,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	120.760.000,00	96.902.245,00	(23.857.755,00)	80,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.760.000,00	96.902.245,00	(23.857.755,00)	80,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.760.000,00	96.902.245,00	(23.857.755,00)	80,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	68.045.880,00	68.045.544,00	(336,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	68.045.880,00	68.045.544,00	(336,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.045.880,00	68.045.544,00	(336,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.313.000,00	17.600.000,00	(2.713.000,00)	86,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	20.313.000,00	17.600.000,00	(2.713.000,00)	86,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.313.000,00	17.600.000,00	(2.713.000,00)	86,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	370.952.733,00	224.542.600,00	(146.410.133,00)	60,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	289.023.400,00	146.476.000,00	(142.547.400,00)	50,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	289.023.400,00	146.476.000,00	(142.547.400,00)	50,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	289.023.400,00	146.476.000,00	(142.547.400,00)	50,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.023.400,00	146.476.000,00	(142.547.400,00)	50,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	81.929.333,00	78.066.600,00	(3.862.733,00)	95,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	81.929.333,00	78.066.600,00	(3.862.733,00)	95,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.143.850,00	5.850.000,00	(2.293.850,00)	71,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.143.850,00	5.850.000,00	(2.293.850,00)	71,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	73.785.483,00	72.216.600,00	(1.568.883,00)	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.785.483,00	72.216.600,00	(1.568.883,00)	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.455.430,00	11.840.000,00	(615.430,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	12.455.430,00	11.840.000,00	(615.430,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	12.455.430,00	11.840.000,00	(615.430,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.455.430,00	11.840.000,00	(615.430,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.455.430,00	11.840.000,00	(615.430,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.600.000,00	25.600.000,00	(1.000.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	26.600.000,00	25.600.000,00	(1.000.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	26.600.000,00	25.600.000,00	(1.000.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.600.000,00	25.600.000,00	(1.000.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	25.600.000,00	(1.000.000,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.780.000,00	56.872.000,00	(9.908.000,00)	85,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.780.000,00	56.872.000,00	(9.908.000,00)	85,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	34.930.000,00	25.870.000,00	(9.060.000,00)	74,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	34.930.000,00	25.870.000,00	(9.060.000,00)	74,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.930.000,00	25.870.000,00	(9.060.000,00)	74,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	31.850.000,00	31.002.000,00	(848.000,00)	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	31.850.000,00	31.002.000,00	(848.000,00)	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	31.002.000,00	(848.000,00)	97,33	
				JUMLAH BELANJA	10.324.889.048,00	9.220.368.788,00	(1.104.520.260,00)	89,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.324.889.048,00)	(9.220.368.788,00)	1.104.520.260,00	89,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.324.889.048,00)	(9.220.368.788,00)	1.104.520.260,00	89,30	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Serasan Jaya

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001		5	BELANJA DAERAH	600.219.072,00	540.189.062,00	(60.030.010,00)	89,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	96.205.011,00	47.019.297,00	(49.185.714,00)	48,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	96.205.011,00	47.019.297,00	(49.185.714,00)	48,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	96.205.011,00	47.019.297,00	(49.185.714,00)	48,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	79.602.186,00	30.416.472,00	(49.185.714,00)	38,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.602.186,00	30.416.472,00	(49.185.714,00)	38,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	16.602.825,00	16.602.825,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.602.825,00	16.602.825,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	504.014.061,00	493.169.765,00	(10.844.296,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	504.014.061,00	493.169.765,00	(10.844.296,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	346.207.562,00	345.702.684,00	(504.878,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	346.207.562,00	345.702.684,00	(504.878,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.207.562,00	345.702.684,00	(504.878,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	157.806.499,00	147.467.081,00	(10.339.418,00)	93,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	157.806.499,00	147.467.081,00	(10.339.418,00)	93,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.806.499,00	147.467.081,00	(10.339.418,00)	93,44	
				JUMLAH BELANJA	600.219.072,00	540.189.062,00	(60.030.010,00)	89,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(600.219.072,00)	(540.189.062,00)	60.030.010,00	89,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(600.219.072,00)	(540.189.062,00)	60.030.010,00	89,99	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Soak Baru

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002		5	BELANJA DAERAH	684.148.533,00	646.540.999,00	(37.607.534,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.104.668,02	71.699.371,00	(14.405.297,02)	83,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	86.104.668,02	71.699.371,00	(14.405.297,02)	83,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	86.104.668,02	71.699.371,00	(14.405.297,02)	83,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.873.603,02	40.364.071,00	(8.509.532,02)	82,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.873.603,02	40.364.071,00	(8.509.532,02)	82,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	37.231.065,00	31.335.300,00	(5.895.765,00)	84,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.231.065,00	31.335.300,00	(5.895.765,00)	84,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	598.043.864,98	574.841.628,00	(23.202.236,98)	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	598.043.864,98	574.841.628,00	(23.202.236,98)	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	347.619.949,00	337.772.391,00	(9.847.558,00)	97,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	347.619.949,00	337.772.391,00	(9.847.558,00)	97,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.619.949,00	337.772.391,00	(9.847.558,00)	97,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	250.423.915,98	237.069.237,00	(13.354.678,98)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	250.423.915,98	237.069.237,00	(13.354.678,98)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.423.915,98	237.069.237,00	(13.354.678,98)	94,66	
				JUMLAH BELANJA	684.148.533,00	646.540.999,00	(37.607.534,00)	94,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(684.148.533,00)	(646.540.999,00)	37.607.534,00	94,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(684.148.533,00)	(646.540.999,00)	37.607.534,00	94,50	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Balai Agung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003		5	BELANJA DAERAH	669.522.773,00	633.336.017,00	(36.186.756,00)	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.258.686,00	116.451.829,00	(6.806.857,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	123.258.686,00	116.451.829,00	(6.806.857,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	123.258.686,00	116.451.829,00	(6.806.857,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.798.807,00	50.074.602,00	(6.724.205,00)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.798.807,00	50.074.602,00	(6.724.205,00)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	66.459.879,00	66.377.227,00	(82.652,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.073.879,00	47.002.950,00	(70.929,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.386.000,00	19.374.277,00	(11.723,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	546.264.087,00	516.884.188,00	(29.379.899,00)	94,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	546.264.087,00	516.884.188,00	(29.379.899,00)	94,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	350.000.000,00	341.583.640,00	(8.416.360,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	341.583.640,00	(8.416.360,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.536.000,00	196.495.136,00	(1.040.864,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.464.000,00	145.088.504,00	(7.375.496,00)	95,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	196.264.087,00	175.300.548,00	(20.963.539,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	194.186.167,00	175.300.548,00	(18.885.619,00)	90,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.186.167,00	175.300.548,00	(18.885.619,00)	90,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.077.920,00	0,00	(2.077.920,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.077.920,00	0,00	(2.077.920,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	669.522.773,00	633.336.017,00	(36.186.756,00)	94,59	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(669.522.773,00)	(633.336.017,00)	36.186.756,00	94,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(669.522.773,00)	(633.336.017,00)	36.186.756,00	94,59	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Kayuara

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004		5	BELANJA DAERAH	682.065.034,00	506.740.152,00	(175.324.882,00)	74,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94.719.160,00	93.565.091,00	(1.154.069,00)	98,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	94.719.160,00	93.565.091,00	(1.154.069,00)	98,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	94.719.160,00	93.565.091,00	(1.154.069,00)	98,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	73.830.070,00	72.677.117,00	(1.152.953,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.830.070,00	72.677.117,00	(1.152.953,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	20.889.090,00	20.887.974,00	(1.116,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.889.090,00	20.887.974,00	(1.116,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	587.345.874,00	413.175.061,00	(174.170.813,00)	70,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	587.345.874,00	413.175.061,00	(174.170.813,00)	70,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	348.640.000,00	174.827.974,00	(173.812.026,00)	50,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	348.640.000,00	174.827.974,00	(173.812.026,00)	50,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.640.000,00	174.827.974,00	(173.812.026,00)	50,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	238.705.874,00	238.347.087,00	(358.787,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	238.705.874,00	238.347.087,00	(358.787,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.705.874,00	238.347.087,00	(358.787,00)	99,84	
				JUMLAH BELANJA	682.065.034,00	506.740.152,00	(175.324.882,00)	74,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(682.065.034,00)	(506.740.152,00)	175.324.882,00	74,29	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(682.065.034,00)	(506.740.152,00)	175.324.882,00	74,29	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Lais

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		5	BELANJA DAERAH	4.725.637.985,00	4.204.281.479,00	(521.356.506,00)	88,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.352.409.645,00	3.906.288.689,00	(446.120.956,00)	89,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.592.000,00	0,00	(11.592.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.302.000,00	0,00	(4.302.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.302.000,00	0,00	(4.302.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.302.000,00	0,00	(4.302.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.290.000,00	0,00	(7.290.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.290.000,00	0,00	(7.290.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.290.000,00	0,00	(7.290.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	(334.515.532,00)	90,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	(334.515.532,00)	90,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	(334.515.532,00)	90,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	(334.515.532,00)	90,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.575.000,00	19.200.000,00	(27.375.000,00)	41,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46.575.000,00	19.200.000,00	(27.375.000,00)	41,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.575.000,00	19.200.000,00	(27.375.000,00)	41,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.575.000,00	19.200.000,00	(27.375.000,00)	41,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	233.428.738,20	217.656.103,00	(15.772.635,20)	93,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.021.636,00	10.021.636,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.021.636,00	10.021.636,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.021.636,00	10.021.636,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.085.656,00	49.964.000,00	(121.656,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	49.405.656,00	49.284.000,00	(121.656,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.405.656,00	49.284.000,00	(121.656,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.197.452,00	17.197.452,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.197.452,00	17.197.452,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.197.452,00	17.197.452,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	30.653.996,00	30.213.615,00	(440.381,00)	98,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.653.996,00	30.213.615,00	(440.381,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.653.996,00	30.213.615,00	(440.381,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.964.998,20	17.961.200,00	(3.798,20)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.964.998,20	17.961.200,00	(3.798,20)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.964.998,20	17.961.200,00	(3.798,20)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	24.977.200,00	(15.022.800,00)	62,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	24.977.200,00	(15.022.800,00)	62,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.977.200,00	(15.022.800,00)	62,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.485.000,00	15.370.000,00	(115.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.485.000,00	15.370.000,00	(115.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.485.000,00	15.370.000,00	(115.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	52.020.000,00	51.951.000,00	(69.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.020.000,00	51.951.000,00	(69.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.020.000,00	51.951.000,00	(69.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.739.332,80	30.738.800,00	(532,80)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	30.739.332,80	30.738.800,00	(532,80)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	30.059.332,80	30.058.800,00	(532,80)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.059.332,80	30.058.800,00	(532,80)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	270.273.203,00	229.615.234,00	(40.657.969,00)	84,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.957.203,00	57.569.634,00	(28.387.569,00)	66,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.957.203,00	57.569.634,00	(28.387.569,00)	66,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.957.203,00	57.569.634,00	(28.387.569,00)	66,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	184.316.000,00	172.045.600,00	(12.270.400,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	184.316.000,00	172.045.600,00	(12.270.400,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.316.000,00	172.045.600,00	(12.270.400,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.824.800,00	196.617.513,00	(16.207.287,00)	92,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	123.500.000,00	120.030.713,00	(3.469.287,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.500.000,00	120.030.713,00	(3.469.287,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	120.030.713,00	(3.469.287,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	74.904.800,00	74.904.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.904.800,00	74.904.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.904.800,00	74.904.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	14.420.000,00	1.682.000,00	(12.738.000,00)	11,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	14.420.000,00	1.682.000,00	(12.738.000,00)	11,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	1.682.000,00	(12.738.000,00)	11,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.869.340,00	280.027.790,00	(49.841.550,00)	84,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	316.685.000,00	274.133.450,00	(42.551.550,00)	86,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	316.685.000,00	274.133.450,00	(42.551.550,00)	86,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	316.685.000,00	274.133.450,00	(42.551.550,00)	86,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.685.000,00	274.133.450,00	(42.551.550,00)	86,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	10.934.340,00	5.894.340,00	(5.040.000,00)	53,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.934.340,00	5.894.340,00	(5.040.000,00)	53,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.934.340,00	5.894.340,00	(5.040.000,00)	53,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.934.340,00	5.894.340,00	(5.040.000,00)	53,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.388.000,00	9.605.000,00	(1.783.000,00)	84,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	11.388.000,00	9.605.000,00	(1.783.000,00)	84,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.388.000,00	9.605.000,00	(1.783.000,00)	84,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.388.000,00	9.605.000,00	(1.783.000,00)	84,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.388.000,00	9.605.000,00	(1.783.000,00)	84,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.421.000,00	8.360.000,00	(15.061.000,00)	35,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.421.000,00	8.360.000,00	(15.061.000,00)	35,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	11.088.000,00	2.700.000,00	(8.388.000,00)	24,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	11.088.000,00	2.700.000,00	(8.388.000,00)	24,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.088.000,00	2.700.000,00	(8.388.000,00)	24,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	12.333.000,00	5.660.000,00	(6.673.000,00)	45,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.333.000,00	5.660.000,00	(6.673.000,00)	45,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.333.000,00	5.660.000,00	(6.673.000,00)	45,89	
				JUMLAH BELANJA	4.725.637.985,00	4.204.281.479,00	(521.356.506,00)	88,96	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.725.637.985,00)	(4.204.281.479,00)	521.356.506,00	88,96	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.725.637.985,00)	(4.204.281.479,00)	521.356.506,00	88,96	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Babat Toman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		5	BELANJA DAERAH	6.864.524.708,99	6.501.483.146,00	(363.041.562,99)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.239.046.156,74	5.890.766.583,00	(348.279.573,74)	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.499.940,05	17.464.335,00	(35.605,05)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.496.259,75	7.462.500,00	(33.759,75)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.496.259,75	7.462.500,00	(33.759,75)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.496.259,75	7.462.500,00	(33.759,75)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.003.680,30	10.001.835,00	(1.845,30)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.003.680,30	10.001.835,00	(1.845,30)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.003.680,30	10.001.835,00	(1.845,30)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	(274.566.671,00)	93,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	(274.566.671,00)	93,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	(274.566.671,00)	93,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	(274.566.671,00)	93,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	47.355.000,00	34.000.000,00	(13.355.000,00)	71,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	47.355.000,00	34.000.000,00	(13.355.000,00)	71,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.355.000,00	34.000.000,00	(13.355.000,00)	71,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.355.000,00	34.000.000,00	(13.355.000,00)	71,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	348.399.750,69	333.209.722,00	(15.190.028,69)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.989.800,00	9.989.776,00	(24,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.989.800,00	9.989.776,00	(24,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.989.800,00	9.989.776,00	(24,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	54.446.168,00	54.364.250,00	(81.918,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	54.446.168,00	54.364.250,00	(81.918,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.446.168,00	54.364.250,00	(81.918,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.016.075,00	19.993.875,00	(22.200,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.016.075,00	19.993.875,00	(22.200,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.016.075,00	19.993.875,00	(22.200,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	48.534.751,00	48.534.751,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.534.751,00	48.534.751,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.534.751,00	48.534.751,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.499.956,69	17.499.500,00	(456,69)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.499.956,69	17.499.500,00	(456,69)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.499.956,69	17.499.500,00	(456,69)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	107.750.000,00	107.665.000,00	(85.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	107.750.000,00	107.665.000,00	(85.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.750.000,00	107.665.000,00	(85.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.163.000,00	50.162.570,00	(430,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.163.000,00	50.162.570,00	(430,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.163.000,00	50.162.570,00	(430,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	31.336.632,00	31.250.000,00	(86.632,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	31.336.632,00	31.250.000,00	(86.632,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	31.336.632,00	31.250.000,00	(86.632,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.336.632,00	31.250.000,00	(86.632,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	465.541.600,00	422.968.729,00	(42.572.871,00)	90,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.336.000,00	64.988.729,00	(20.347.271,00)	76,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.336.000,00	64.988.729,00	(20.347.271,00)	76,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.336.000,00	64.988.729,00	(20.347.271,00)	76,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	380.205.600,00	357.980.000,00	(22.225.600,00)	94,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	380.205.600,00	357.980.000,00	(22.225.600,00)	94,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.205.600,00	357.980.000,00	(22.225.600,00)	94,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	793.640.189,00	791.167.423,00	(2.472.766,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	83.960.000,00	81.493.094,00	(2.466.906,00)	97,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.960.000,00	81.493.094,00	(2.466.906,00)	97,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.960.000,00	81.493.094,00	(2.466.906,00)	97,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	702.360.189,00	702.354.329,00	(5.860,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	702.360.189,00	702.354.329,00	(5.860,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.360.189,00	702.354.329,00	(5.860,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	587.213.552,25	572.451.563,00	(14.761.989,25)	97,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	581.963.000,00	569.712.083,00	(12.250.917,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	581.963.000,00	569.712.083,00	(12.250.917,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	581.963.000,00	569.712.083,00	(12.250.917,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.963.000,00	569.712.083,00	(12.250.917,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	2.750.552,25	2.739.480,00	(11.072,25)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.750.552,25	2.739.480,00	(11.072,25)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.552,25	2.739.480,00	(11.072,25)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.552,25	2.739.480,00	(11.072,25)	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	6.864.524.708,99	6.501.483.146,00	(363.041.562,99)	94,71	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.864.524.708,99)	(6.501.483.146,00)	363.041.562,99	94,71	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.864.524.708,99)	(6.501.483.146,00)	363.041.562,99	94,71	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Babat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001		5	BELANJA DAERAH	758.024.172,96	266.143.158,00	(491.881.014,96)	35,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	110.947.500,96	16.611.748,00	(94.335.752,96)	14,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	110.947.500,96	16.611.748,00	(94.335.752,96)	14,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	110.947.500,96	16.611.748,00	(94.335.752,96)	14,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	89.620.515,96	16.611.748,00	(73.008.767,96)	18,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.620.515,96	16.611.748,00	(73.008.767,96)	18,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	21.326.985,00	0,00	(21.326.985,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.326.985,00	0,00	(21.326.985,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	647.076.672,00	249.531.410,00	(397.545.262,00)	38,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	647.076.672,00	249.531.410,00	(397.545.262,00)	38,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	399.057.775,00	249.531.410,00	(149.526.365,00)	62,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	399.057.775,00	249.531.410,00	(149.526.365,00)	62,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.057.775,00	249.531.410,00	(149.526.365,00)	62,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	248.018.897,00	0,00	(248.018.897,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	248.018.897,00	0,00	(248.018.897,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.225.877,00	0,00	(61.225.877,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	186.793.020,00	0,00	(186.793.020,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	758.024.172,96	266.143.158,00	(491.881.014,96)	35,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(758.024.172,96)	(266.143.158,00)	491.881.014,96	35,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(758.024.172,96)	(266.143.158,00)	491.881.014,96	35,11	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Mangun Jaya

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002		5	BELANJA DAERAH	766.737.231,51	290.937.463,00	(475.799.768,51)	37,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.791.583,13	41.398.224,00	(51.393.359,13)	44,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	92.791.583,13	41.398.224,00	(51.393.359,13)	44,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	92.791.583,13	41.398.224,00	(51.393.359,13)	44,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.811.157,13	41.398.224,00	(13.412.933,13)	75,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.811.157,13	41.398.224,00	(13.412.933,13)	75,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	37.980.426,00	0,00	(37.980.426,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.980.426,00	0,00	(37.980.426,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	673.945.648,38	249.539.239,00	(424.406.409,38)	37,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	673.945.648,38	249.539.239,00	(424.406.409,38)	37,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	399.027.409,00	249.539.239,00	(149.488.170,00)	62,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	399.027.409,00	249.539.239,00	(149.488.170,00)	62,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.027.409,00	249.539.239,00	(149.488.170,00)	62,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	274.918.239,38	0,00	(274.918.239,38)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	274.918.239,38	0,00	(274.918.239,38)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.894.489,38	0,00	(48.894.489,38)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	226.023.750,00	0,00	(226.023.750,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	766.737.231,51	290.937.463,00	(475.799.768,51)	37,94	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(766.737.231,51)	(290.937.463,00)	475.799.768,51	37,94	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(766.737.231,51)	(290.937.463,00)	475.799.768,51	37,94	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Keluang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		5	BELANJA DAERAH	5.060.224.145,00	4.047.128.725,00	(1.013.095.420,00)	79,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.652.073.145,00	3.698.977.754,00	(953.095.391,00)	79,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.565.200,00	14.729.600,00	(6.835.600,00)	68,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.965.200,00	14.729.600,00	(235.600,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.965.200,00	14.729.600,00	(235.600,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.965.200,00	14.729.600,00	(235.600,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	(814.691.042,00)	78,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	(814.691.042,00)	78,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	(814.691.042,00)	78,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	(814.691.042,00)	78,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	280.611.879,00	241.077.001,00	(39.534.878,00)	85,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.998.436,00	9.644.368,00	(354.068,00)	96,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.998.436,00	9.644.368,00	(354.068,00)	96,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.436,00	9.644.368,00	(354.068,00)	96,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	74.897.694,00	74.843.535,00	(54.159,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.383.394,00	1.360.000,00	(23.394,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.383.394,00	1.360.000,00	(23.394,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	73.514.300,00	73.483.535,00	(30.765,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.514.300,00	73.483.535,00	(30.765,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.981.554,00	19.926.056,00	(55.498,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.981.554,00	19.926.056,00	(55.498,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.981.554,00	19.926.056,00	(55.498,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	39.999.794,00	39.384.662,00	(615.132,00)	98,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.999.794,00	39.384.662,00	(615.132,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.794,00	39.384.662,00	(615.132,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.240.000,00	0,00	(17.240.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.240.000,00	0,00	(17.240.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.240.000,00	0,00	(17.240.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	19.999.980,00	(20.000.020,00)	49,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	19.999.980,00	(20.000.020,00)	49,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	19.999.980,00	(20.000.020,00)	49,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000,00	24.871.790,00	(128.210,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.871.790,00	(128.210,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.871.790,00	(128.210,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	53.494.401,00	52.406.610,00	(1.087.791,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	53.494.401,00	52.406.610,00	(1.087.791,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.494.401,00	52.406.610,00	(1.087.791,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.141.948,00	47.441.000,00	(700.948,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	48.141.948,00	47.441.000,00	(700.948,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	48.141.948,00	47.441.000,00	(700.948,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.141.948,00	47.441.000,00	(700.948,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	331.290.667,00	253.712.636,00	(77.578.031,00)	76,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	54.000.000,00	43.331.036,00	(10.668.964,00)	80,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	43.331.036,00	(10.668.964,00)	80,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	43.331.036,00	(10.668.964,00)	80,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	277.290.667,00	210.381.600,00	(66.909.067,00)	75,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	277.290.667,00	210.381.600,00	(66.909.067,00)	75,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.290.667,00	210.381.600,00	(66.909.067,00)	75,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	174.940.000,00	161.185.108,00	(13.754.892,00)	92,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	78.840.000,00	74.870.108,00	(3.969.892,00)	94,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.840.000,00	74.870.108,00	(3.969.892,00)	94,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	74.870.108,00	(3.969.892,00)	94,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	21.130.000,00	11.345.000,00	(9.785.000,00)	53,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.130.000,00	11.345.000,00	(9.785.000,00)	53,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.130.000,00	11.345.000,00	(9.785.000,00)	53,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	391.296.000,00	336.886.971,00	(54.409.029,00)	86,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	371.918.000,00	332.008.971,00	(39.909.029,00)	89,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	371.918.000,00	332.008.971,00	(39.909.029,00)	89,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	371.918.000,00	332.008.971,00	(39.909.029,00)	89,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.918.000,00	332.008.971,00	(39.909.029,00)	89,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	16.978.000,00	2.553.000,00	(14.425.000,00)	15,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	16.978.000,00	2.553.000,00	(14.425.000,00)	15,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.978.000,00	2.553.000,00	(14.425.000,00)	15,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.978.000,00	2.553.000,00	(14.425.000,00)	15,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.325.000,00	(75.000,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.325.000,00	1.425.000,00	(3.900.000,00)	26,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	5.325.000,00	1.425.000,00	(3.900.000,00)	26,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.325.000,00	1.425.000,00	(3.900.000,00)	26,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.325.000,00	1.425.000,00	(3.900.000,00)	26,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	1.425.000,00	(3.900.000,00)	26,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.060.000,00	5.489.000,00	(1.571.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	7.060.000,00	5.489.000,00	(1.571.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	7.060.000,00	5.489.000,00	(1.571.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.060.000,00	5.489.000,00	(1.571.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	5.489.000,00	(1.571.000,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.470.000,00	4.350.000,00	(120.000,00)	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.470.000,00	4.350.000,00	(120.000,00)	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	4.470.000,00	4.350.000,00	(120.000,00)	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	4.470.000,00	4.350.000,00	(120.000,00)	97,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	4.350.000,00	(120.000,00)	97,31	
				JUMLAH BELANJA	5.060.224.145,00	4.047.128.725,00	(1.013.095.420,00)	79,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.060.224.145,00)	(4.047.128.725,00)	1.013.095.420,00	79,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.060.224.145,00)	(4.047.128.725,00)	1.013.095.420,00	79,97	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Keluang**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001		5	BELANJA DAERAH	841.784.711,00	733.178.646,00	(108.606.065,00)	87,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.929.259,00	62.949.881,00	(86.979.378,00)	41,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	149.929.259,00	62.949.881,00	(86.979.378,00)	41,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	149.929.259,00	62.949.881,00	(86.979.378,00)	41,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	143.929.709,00	56.955.881,00	(86.973.828,00)	39,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.929.709,00	56.955.881,00	(86.973.828,00)	39,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	5.999.550,00	5.994.000,00	(5.550,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.999.550,00	5.994.000,00	(5.550,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	691.855.452,00	670.228.765,00	(21.626.687,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	691.855.452,00	670.228.765,00	(21.626.687,00)	96,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	347.593.088,00	346.068.088,00	(1.525.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	347.593.088,00	346.068.088,00	(1.525.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.593.088,00	346.068.088,00	(1.525.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	344.262.364,00	324.160.677,00	(20.101.687,00)	94,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	344.262.364,00	324.160.677,00	(20.101.687,00)	94,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.262.364,00	324.160.677,00	(20.101.687,00)	94,16	
				JUMLAH BELANJA	841.784.711,00	733.178.646,00	(108.606.065,00)	87,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(841.784.711,00)	(733.178.646,00)	108.606.065,00	87,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(841.784.711,00)	(733.178.646,00)	108.606.065,00	87,09	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sanga Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		5	BELANJA DAERAH	5.566.745.605,00	4.809.857.680,00	(756.887.925,00)	86,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.211.851.106,00	4.608.245.865,00	(603.605.241,00)	88,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.995.000,00	13.875.000,00	(120.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.820.000,00	5.760.000,00	(60.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.820.000,00	5.760.000,00	(60.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	5.760.000,00	(60.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.175.000,00	8.115.000,00	(60.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.175.000,00	8.115.000,00	(60.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	8.115.000,00	(60.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	(531.211.388,00)	86,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	(531.211.388,00)	86,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	(531.211.388,00)	86,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	(531.211.388,00)	86,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.600.000,00	15.440.100,00	(159.900,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	15.600.000,00	15.440.100,00	(159.900,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.440.100,00	(159.900,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.440.100,00	(159.900,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	392.468.900,00	387.424.500,00	(5.044.400,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.988.530,00	9.891.000,00	(97.530,00)	99,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.988.530,00	9.891.000,00	(97.530,00)	99,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.988.530,00	9.891.000,00	(97.530,00)	99,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.993.500,00	75.827.000,00	(166.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	75.313.500,00	75.147.000,00	(166.500,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.313.500,00	75.147.000,00	(166.500,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.724.040,00	13.635.550,00	(88.490,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.724.040,00	13.635.550,00	(88.490,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.724.040,00	13.635.550,00	(88.490,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	38.485.330,00	38.328.900,00	(156.430,00)	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.485.330,00	38.328.900,00	(156.430,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.485.330,00	38.328.900,00	(156.430,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.138.500,00	26.841.550,00	(1.296.950,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.138.500,00	26.841.550,00	(1.296.950,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.138.500,00	26.841.550,00	(1.296.950,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	25.000.000,00	24.864.000,00	(136.000,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.864.000,00	(136.000,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.864.000,00	(136.000,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	126.500.000,00	123.835.000,00	(2.665.000,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	126.500.000,00	123.835.000,00	(2.665.000,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.500.000,00	123.835.000,00	(2.665.000,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	74.639.000,00	74.201.500,00	(437.500,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.639.000,00	74.201.500,00	(437.500,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.639.000,00	74.201.500,00	(437.500,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.220.440,00	19.380.600,00	(839.840,00)	95,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	20.220.440,00	19.380.600,00	(839.840,00)	95,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	19.540.440,00	19.380.600,00	(159.840,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.540.440,00	19.380.600,00	(159.840,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	505.283.400,00	455.158.752,00	(50.124.648,00)	90,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	47.181.400,00	33.223.952,00	(13.957.448,00)	70,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.181.400,00	33.223.952,00	(13.957.448,00)	70,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.181.400,00	33.223.952,00	(13.957.448,00)	70,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	458.102.000,00	421.934.800,00	(36.167.200,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	458.102.000,00	421.934.800,00	(36.167.200,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.102.000,00	421.934.800,00	(36.167.200,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	233.434.790,00	217.329.725,00	(16.105.065,00)	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	120.880.000,00	105.320.725,00	(15.559.275,00)	87,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.880.000,00	105.320.725,00	(15.559.275,00)	87,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.880.000,00	105.320.725,00	(15.559.275,00)	87,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	90.204.790,00	90.061.000,00	(143.790,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.204.790,00	90.061.000,00	(143.790,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.204.790,00	90.061.000,00	(143.790,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	22.350.000,00	21.948.000,00	(402.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.350.000,00	21.948.000,00	(402.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	21.948.000,00	(402.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	311.521.000,00	158.777.700,00	(152.743.300,00)	50,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	303.095.000,00	153.119.700,00	(149.975.300,00)	50,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	303.095.000,00	153.119.700,00	(149.975.300,00)	50,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	303.095.000,00	153.119.700,00	(149.975.300,00)	50,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.095.000,00	153.119.700,00	(149.975.300,00)	50,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	5.976.000,00	5.658.000,00	(318.000,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.976.000,00	5.658.000,00	(318.000,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.976.000,00	5.658.000,00	(318.000,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.976.000,00	5.658.000,00	(318.000,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.650.000,00	7.475.000,00	(175.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	7.650.000,00	7.475.000,00	(175.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	7.650.000,00	7.475.000,00	(175.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.475.000,00	(175.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.475.000,00	(175.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.800.000,00	16.687.500,00	(112.500,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	16.800.000,00	16.687.500,00	(112.500,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	10.020.000,00	9.967.500,00	(52.500,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.020.000,00	9.967.500,00	(52.500,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	9.967.500,00	(52.500,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.780.000,00	6.720.000,00	(60.000,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.780.000,00	6.720.000,00	(60.000,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	6.720.000,00	(60.000,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.923.499,00	18.671.615,00	(251.884,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.923.499,00	18.671.615,00	(251.884,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	11.423.499,00	11.171.615,00	(251.884,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	11.423.499,00	11.171.615,00	(251.884,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.423.499,00	11.171.615,00	(251.884,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	5.566.745.605,00	4.809.857.680,00	(756.887.925,00)	86,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.566.745.605,00)	(4.809.857.680,00)	756.887.925,00	86,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.566.745.605,00)	(4.809.857.680,00)	756.887.925,00	86,40	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Ngulak I

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001		5	BELANJA DAERAH	832.978.633,00	828.287.457,00	(4.691.176,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.408.174,00	122.100.852,00	(3.307.322,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	125.408.174,00	122.100.852,00	(3.307.322,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	125.408.174,00	122.100.852,00	(3.307.322,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.408.174,00	122.100.852,00	(3.307.322,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.408.174,00	122.100.852,00	(3.307.322,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	707.570.459,00	706.186.605,00	(1.383.854,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	707.570.459,00	706.186.605,00	(1.383.854,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	400.000.000,00	399.738.262,00	(261.738,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	390.010.000,00	389.748.262,00	(261.738,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.010.000,00	389.748.262,00	(261.738,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	307.570.459,00	306.448.343,00	(1.122.116,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	286.813.459,00	285.913.343,00	(900.116,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.340.234,00	96.102.233,00	(238.001,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	190.473.225,00	189.811.110,00	(662.115,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	20.757.000,00	20.535.000,00	(222.000,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.757.000,00	20.535.000,00	(222.000,00)	98,93	
				JUMLAH BELANJA	832.978.633,00	828.287.457,00	(4.691.176,00)	99,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(832.978.633,00)	(828.287.457,00)	4.691.176,00	99,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(832.978.633,00)	(828.287.457,00)	4.691.176,00	99,43	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Ngulak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002		5	BELANJA DAERAH	833.612.894,00	800.474.895,00	(33.137.999,00)	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.607.825,00	122.468.025,00	(3.139.800,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	125.607.825,00	122.468.025,00	(3.139.800,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	125.607.825,00	122.468.025,00	(3.139.800,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.607.825,00	122.468.025,00	(3.139.800,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.607.825,00	122.468.025,00	(3.139.800,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	708.005.069,00	678.006.870,00	(29.998.199,00)	95,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	708.005.069,00	678.006.870,00	(29.998.199,00)	95,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	349.575.000,00	349.363.652,00	(211.348,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	347.910.000,00	347.698.652,00	(211.348,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.910.000,00	347.698.652,00	(211.348,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	358.430.069,00	328.643.218,00	(29.786.851,00)	91,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	358.430.069,00	328.643.218,00	(29.786.851,00)	91,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.486.249,00	93.425.338,00	(29.060.911,00)	76,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	235.943.820,00	235.217.880,00	(725.940,00)	99,69	
				JUMLAH BELANJA	833.612.894,00	800.474.895,00	(33.137.999,00)	96,02	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(833.612.894,00)	(800.474.895,00)	33.137.999,00	96,02	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(833.612.894,00)	(800.474.895,00)	33.137.999,00	96,02	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Plakat Tinggi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		5	BELANJA DAERAH	4.293.670.603,00	3.234.733.373,00	(1.058.937.230,00)	75,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.897.421.007,90	3.006.438.973,00	(890.982.034,90)	77,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.601.000,00	4.900.000,00	(9.701.000,00)	33,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.800.500,00	2.825.000,00	(1.975.500,00)	58,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.500,00	2.825.000,00	(1.975.500,00)	58,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.500,00	2.825.000,00	(1.975.500,00)	58,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.800.500,00	2.075.000,00	(7.725.500,00)	21,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.800.500,00	2.075.000,00	(7.725.500,00)	21,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.500,00	2.075.000,00	(7.725.500,00)	21,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	(650.814.705,70)	77,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	(650.814.705,70)	77,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	(650.814.705,70)	77,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	(650.814.705,70)	77,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.460.000,00	34.286.000,00	(11.174.000,00)	75,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	45.460.000,00	34.286.000,00	(11.174.000,00)	75,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.460.000,00	34.286.000,00	(11.174.000,00)	75,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.460.000,00	34.286.000,00	(11.174.000,00)	75,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	282.630.337,20	193.936.704,00	(88.693.633,20)	68,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.225.449,00	5.910.000,00	(9.315.449,00)	38,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.225.449,00	5.910.000,00	(9.315.449,00)	38,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.225.449,00	5.910.000,00	(9.315.449,00)	38,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.157.248,00	38.738.999,00	(418.249,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	39.157.248,00	38.738.999,00	(418.249,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.157.248,00	38.738.999,00	(418.249,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.993.556,00	680.000,00	(19.313.556,00)	3,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.993.556,00	680.000,00	(19.313.556,00)	3,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.993.556,00	680.000,00	(19.313.556,00)	3,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.316.872,00	14.455.117,00	(4.861.755,00)	74,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.316.872,00	14.455.117,00	(4.861.755,00)	74,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.316.872,00	14.455.117,00	(4.861.755,00)	74,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.877.212,00	27.686.289,00	(7.190.923,00)	79,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.877.212,00	27.686.289,00	(7.190.923,00)	79,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.877.212,00	27.686.289,00	(7.190.923,00)	79,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	24.999.999,00	(15.000.001,00)	62,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	24.999.999,00	(15.000.001,00)	62,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.999.999,00	(15.000.001,00)	62,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	36.755.000,20	9.151.000,00	(27.604.000,20)	24,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	36.755.000,20	9.151.000,00	(27.604.000,20)	24,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.755.000,20	9.151.000,00	(27.604.000,20)	24,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	77.305.000,00	72.315.300,00	(4.989.700,00)	93,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.305.000,00	72.315.300,00	(4.989.700,00)	93,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.305.000,00	72.315.300,00	(4.989.700,00)	93,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.022.469,00	0,00	(13.022.469,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	13.022.469,00	0,00	(13.022.469,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	13.022.469,00	0,00	(13.022.469,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.022.469,00	0,00	(13.022.469,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	284.837.958,00	230.489.105,00	(54.348.853,00)	80,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.001.536,00	46.924.705,00	(28.076.831,00)	62,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.001.536,00	46.924.705,00	(28.076.831,00)	62,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.001.536,00	46.924.705,00	(28.076.831,00)	62,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	209.836.422,00	183.564.400,00	(26.272.022,00)	87,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	209.836.422,00	183.564.400,00	(26.272.022,00)	87,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.836.422,00	183.564.400,00	(26.272.022,00)	87,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	329.134.348,00	265.906.974,00	(63.227.374,00)	80,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	118.260.000,00	93.742.626,00	(24.517.374,00)	79,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	118.260.000,00	93.742.626,00	(24.517.374,00)	79,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.260.000,00	93.742.626,00	(24.517.374,00)	79,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	197.584.348,00	166.714.348,00	(30.870.000,00)	84,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.870.000,00	0,00	(30.870.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.870.000,00	0,00	(30.870.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	166.714.348,00	166.714.348,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.714.348,00	166.714.348,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	13.290.000,00	5.450.000,00	(7.840.000,00)	41,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.290.000,00	5.450.000,00	(7.840.000,00)	41,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	5.450.000,00	(7.840.000,00)	41,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.249.595,10	228.294.400,00	(147.955.195,10)	60,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	366.549.095,10	228.294.400,00	(138.254.695,10)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	366.549.095,10	228.294.400,00	(138.254.695,10)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	366.549.095,10	228.294.400,00	(138.254.695,10)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.549.095,10	228.294.400,00	(138.254.695,10)	62,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	7.138.000,00	0,00	(7.138.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	7.138.000,00	0,00	(7.138.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.138.000,00	0,00	(7.138.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.138.000,00	0,00	(7.138.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.562.500,00	0,00	(2.562.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.562.500,00	0,00	(2.562.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.562.500,00	0,00	(2.562.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	0,00	(2.562.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	4.293.670.603,00	3.234.733.373,00	(1.058.937.230,00)	75,33	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.293.670.603,00)	(3.234.733.373,00)	1.058.937.230,00	75,33	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.293.670.603,00)	(3.234.733.373,00)	1.058.937.230,00	75,33	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Batanghari Leko

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		5	BELANJA DAERAH	4.166.315.645,00	2.932.719.965,00	(1.233.595.680,00)	70,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.685.471.645,00	2.703.809.965,00	(981.661.680,00)	73,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.156.000,00	75.000,00	(7.081.000,00)	1,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.250.000,00	73.000,00	(1.177.000,00)	5,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	73.000,00	(1.177.000,00)	5,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	73.000,00	(1.177.000,00)	5,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.906.000,00	2.000,00	(5.904.000,00)	0,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.906.000,00	2.000,00	(5.904.000,00)	0,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.906.000,00	2.000,00	(5.904.000,00)	0,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	(847.866.794,00)	70,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	(847.866.794,00)	70,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	(847.866.794,00)	70,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	(847.866.794,00)	70,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.623.000,00	21.998.000,00	(24.625.000,00)	47,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46.283.000,00	21.998.000,00	(24.285.000,00)	47,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.283.000,00	21.998.000,00	(24.285.000,00)	47,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.283.000,00	21.998.000,00	(24.285.000,00)	47,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	241.110.521,00	238.257.024,00	(2.853.497,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.230.500,00	14.134.629,00	(95.871,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.230.500,00	14.134.629,00	(95.871,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.230.500,00	14.134.629,00	(95.871,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.892.371,00	46.538.185,00	(354.186,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	46.552.371,00	46.198.185,00	(354.186,00)	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.852.371,00	27.498.185,00	(354.186,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.999.500,00	19.795.145,00	(204.355,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.999.500,00	19.795.145,00	(204.355,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.500,00	19.795.145,00	(204.355,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.999.150,00	19.963.435,00	(35.715,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.999.150,00	19.963.435,00	(35.715,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.150,00	19.963.435,00	(35.715,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.493.000,00	16.095.000,00	(1.398.000,00)	92,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.493.000,00	16.095.000,00	(1.398.000,00)	92,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.493.000,00	16.095.000,00	(1.398.000,00)	92,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	32.500.000,00	31.950.630,00	(549.370,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	31.950.630,00	(549.370,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	31.950.630,00	(549.370,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	24.990.000,00	24.860.000,00	(130.000,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.990.000,00	24.860.000,00	(130.000,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	24.860.000,00	(130.000,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	65.006.000,00	64.920.000,00	(86.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.006.000,00	64.920.000,00	(86.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.006.000,00	64.920.000,00	(86.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	26.890.000,00	22.417.900,00	(4.472.100,00)	83,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	26.890.000,00	22.417.900,00	(4.472.100,00)	83,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	26.550.000,00	22.077.900,00	(4.472.100,00)	83,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.550.000,00	22.077.900,00	(4.472.100,00)	83,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	279.202.167,00	235.554.878,00	(43.647.289,00)	84,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	79.429.500,00	65.376.878,00	(14.052.622,00)	82,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.429.500,00	65.376.878,00	(14.052.622,00)	82,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.429.500,00	65.376.878,00	(14.052.622,00)	82,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	199.772.667,00	170.178.000,00	(29.594.667,00)	85,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	199.772.667,00	170.178.000,00	(29.594.667,00)	85,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.772.667,00	170.178.000,00	(29.594.667,00)	85,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	202.530.000,00	151.414.000,00	(51.116.000,00)	74,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	131.000.000,00	80.758.000,00	(50.242.000,00)	61,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.000.000,00	80.758.000,00	(50.242.000,00)	61,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	80.758.000,00	(50.242.000,00)	61,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	55.930.000,00	55.706.000,00	(224.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.930.000,00	55.706.000,00	(224.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.930.000,00	55.706.000,00	(224.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.600.000,00	14.950.000,00	(650.000,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	14.950.000,00	(650.000,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	14.950.000,00	(650.000,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	455.942.000,00	216.700.000,00	(239.242.000,00)	47,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	449.177.000,00	216.700.000,00	(232.477.000,00)	48,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	449.177.000,00	216.700.000,00	(232.477.000,00)	48,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	449.177.000,00	216.700.000,00	(232.477.000,00)	48,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.177.000,00	216.700.000,00	(232.477.000,00)	48,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.265.000,00	0,00	(4.265.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	4.265.000,00	0,00	(4.265.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.265.000,00	0,00	(4.265.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	0,00	(4.265.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.206.000,00	3.500.000,00	(3.706.000,00)	48,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	7.206.000,00	3.500.000,00	(3.706.000,00)	48,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	7.206.000,00	3.500.000,00	(3.706.000,00)	48,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.206.000,00	3.500.000,00	(3.706.000,00)	48,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.206.000,00	3.500.000,00	(3.706.000,00)	48,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.856.000,00	510.000,00	(5.346.000,00)	8,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	5.856.000,00	510.000,00	(5.346.000,00)	8,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	5.856.000,00	510.000,00	(5.346.000,00)	8,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.856.000,00	510.000,00	(5.346.000,00)	8,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.856.000,00	510.000,00	(5.346.000,00)	8,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.840.000,00	8.200.000,00	(3.640.000,00)	69,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.840.000,00	8.200.000,00	(3.640.000,00)	69,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	8.240.000,00	8.200.000,00	(40.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.240.000,00	8.200.000,00	(40.000,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	8.200.000,00	(40.000,00)	99,51	
				JUMLAH BELANJA	4.166.315.645,00	2.932.719.965,00	(1.233.595.680,00)	70,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.166.315.645,00)	(2.932.719.965,00)	1.233.595.680,00	70,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.166.315.645,00)	(2.932.719.965,00)	1.233.595.680,00	70,39	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sungai Keruh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		5	BELANJA DAERAH	3.982.090.009,00	3.188.504.577,00	(793.585.432,00)	80,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.556.715.009,00	3.044.210.743,00	(512.504.266,00)	85,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.630.000,00	8.314.000,00	(316.000,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.524.000,00	6.208.000,00	(316.000,00)	95,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.524.000,00	6.208.000,00	(316.000,00)	95,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.524.000,00	6.208.000,00	(316.000,00)	95,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.745.214.507,00	2.290.379.874,00	(454.834.633,00)	83,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.745.214.507,00	2.290.379.874,00	(454.834.633,00)	83,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.745.214.507,00	2.290.379.874,00	(454.834.633,00)	83,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.745.214.507,00	2.290.379.874,00	(454.834.633,00)	83,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.708.750,00	37.643.000,00	(8.065.750,00)	82,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	45.708.750,00	37.643.000,00	(8.065.750,00)	82,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.708.750,00	37.643.000,00	(8.065.750,00)	82,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.708.750,00	37.643.000,00	(8.065.750,00)	82,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	259.418.715,00	253.726.300,00	(5.692.415,00)	97,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.081.100,00	4.757.000,00	(324.100,00)	93,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.081.100,00	4.757.000,00	(324.100,00)	93,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.081.100,00	4.757.000,00	(324.100,00)	93,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.408.830,00	52.408.830,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	52.068.830,00	52.068.830,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.068.830,00	52.068.830,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.229.600,00	8.871.500,00	(1.358.100,00)	86,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.229.600,00	8.871.500,00	(1.358.100,00)	86,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.229.600,00	8.871.500,00	(1.358.100,00)	86,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.934.085,00	24.934.085,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.934.085,00	24.934.085,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.934.085,00	24.934.085,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.489.850,00	16.638.000,00	(851.850,00)	95,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.489.850,00	16.638.000,00	(851.850,00)	95,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.489.850,00	16.638.000,00	(851.850,00)	95,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	25.600.000,00	25.000.000,00	(600.000,00)	97,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.600.000,00	25.000.000,00	(600.000,00)	97,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	25.000.000,00	(600.000,00)	97,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	47.250.000,00	45.590.000,00	(1.660.000,00)	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.250.000,00	45.590.000,00	(1.660.000,00)	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	45.590.000,00	(1.660.000,00)	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	76.425.250,00	75.526.885,00	(898.365,00)	98,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	76.425.250,00	75.526.885,00	(898.365,00)	98,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.425.250,00	75.526.885,00	(898.365,00)	98,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.570.000,00	19.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	19.570.000,00	19.570.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	271.711.037,00	243.797.701,00	(27.913.336,00)	89,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.293.437,00	91.354.501,00	(8.938.936,00)	91,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.293.437,00	91.354.501,00	(8.938.936,00)	91,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.293.437,00	91.354.501,00	(8.938.936,00)	91,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	171.417.600,00	152.443.200,00	(18.974.400,00)	88,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	171.417.600,00	152.443.200,00	(18.974.400,00)	88,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.417.600,00	152.443.200,00	(18.974.400,00)	88,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	206.462.000,00	190.779.868,00	(15.682.132,00)	92,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	120.760.000,00	106.157.868,00	(14.602.132,00)	87,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.760.000,00	106.157.868,00	(14.602.132,00)	87,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.760.000,00	106.157.868,00	(14.602.132,00)	87,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	74.722.000,00	74.722.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.722.000,00	74.722.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.722.000,00	74.722.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.980.000,00	9.900.000,00	(1.080.000,00)	90,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.980.000,00	9.900.000,00	(1.080.000,00)	90,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	9.900.000,00	(1.080.000,00)	90,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	418.675.000,00	139.353.834,00	(279.321.166,00)	33,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	410.310.000,00	130.988.834,00	(279.321.166,00)	31,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	410.310.000,00	130.988.834,00	(279.321.166,00)	31,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	410.310.000,00	130.988.834,00	(279.321.166,00)	31,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.310.000,00	130.988.834,00	(279.321.166,00)	31,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.700.000,00	4.940.000,00	(1.760.000,00)	73,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.700.000,00	4.940.000,00	(1.760.000,00)	73,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	4.180.000,00	4.000.000,00	(180.000,00)	95,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.180.000,00	4.000.000,00	(180.000,00)	95,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	4.000.000,00	(180.000,00)	95,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	2.520.000,00	940.000,00	(1.580.000,00)	37,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.520.000,00	940.000,00	(1.580.000,00)	37,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	940.000,00	(1.580.000,00)	37,30	
				JUMLAH BELANJA	3.982.090.009,00	3.188.504.577,00	(793.585.432,00)	80,07	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.982.090.009,00)	(3.188.504.577,00)	793.585.432,00	80,07	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.982.090.009,00)	(3.188.504.577,00)	793.585.432,00	80,07	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sungai Lilin

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		5	BELANJA DAERAH	5.546.584.823,00	4.636.137.082,00	(910.447.741,00)	83,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.128.299.823,00	4.249.357.082,00	(878.942.741,00)	82,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	(735.566.932,00)	82,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	(735.566.932,00)	82,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	(735.566.932,00)	82,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	(735.566.932,00)	82,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	333.084.731,00	288.964.822,00	(44.119.909,00)	86,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.133.744,00	11.113.600,00	(20.144,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.133.744,00	11.113.600,00	(20.144,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.133.744,00	11.113.600,00	(20.144,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	44.634.446,00	44.569.400,00	(65.046,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	43.954.446,00	43.889.400,00	(65.046,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.954.446,00	43.889.400,00	(65.046,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	16.279.052,00	16.264.844,00	(14.208,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.279.052,00	16.264.844,00	(14.208,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.279.052,00	16.264.844,00	(14.208,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.774.489,00	33.017.408,00	(757.081,00)	97,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.774.489,00	33.017.408,00	(757.081,00)	97,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.774.489,00	33.017.408,00	(757.081,00)	97,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.221.000,00	13.728.000,00	(1.493.000,00)	90,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.221.000,00	13.728.000,00	(1.493.000,00)	90,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.221.000,00	13.728.000,00	(1.493.000,00)	90,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	25.680.000,00	0,00	(25.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.680.000,00	0,00	(25.680.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.680.000,00	0,00	(25.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	78.630.000,00	72.850.000,00	(5.780.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	78.630.000,00	72.850.000,00	(5.780.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.630.000,00	72.850.000,00	(5.780.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	107.732.000,00	97.421.570,00	(10.310.430,00)	90,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	107.732.000,00	97.421.570,00	(10.310.430,00)	90,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.732.000,00	97.421.570,00	(10.310.430,00)	90,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	428.119.600,00	350.603.164,00	(77.516.436,00)	81,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	89.586.000,00	58.766.364,00	(30.819.636,00)	65,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.586.000,00	58.766.364,00	(30.819.636,00)	65,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.586.000,00	58.766.364,00	(30.819.636,00)	65,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	338.533.600,00	291.836.800,00	(46.696.800,00)	86,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	338.533.600,00	291.836.800,00	(46.696.800,00)	86,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.533.600,00	291.836.800,00	(46.696.800,00)	86,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	235.659.638,00	213.920.174,00	(21.739.464,00)	90,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	122.260.000,00	100.711.536,00	(21.548.464,00)	82,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.260.000,00	100.711.536,00	(21.548.464,00)	82,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.260.000,00	100.711.536,00	(21.548.464,00)	82,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	97.539.638,00	97.348.638,00	(191.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	97.539.638,00	97.348.638,00	(191.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.539.638,00	97.348.638,00	(191.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	406.945.000,00	380.075.000,00	(26.870.000,00)	93,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	406.945.000,00	380.075.000,00	(26.870.000,00)	93,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	406.945.000,00	380.075.000,00	(26.870.000,00)	93,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	406.945.000,00	380.075.000,00	(26.870.000,00)	93,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.945.000,00	380.075.000,00	(26.870.000,00)	93,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.340.000,00	6.705.000,00	(4.635.000,00)	59,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.340.000,00	6.705.000,00	(4.635.000,00)	59,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	5.040.000,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	6.300.000,00	4.185.000,00	(2.115.000,00)	66,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	4.185.000,00	(2.115.000,00)	66,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	4.185.000,00	(2.115.000,00)	66,42	
				JUMLAH BELANJA	5.546.584.823,00	4.636.137.082,00	(910.447.741,00)	83,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.546.584.823,00)	(4.636.137.082,00)	910.447.741,00	83,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.546.584.823,00)	(4.636.137.082,00)	910.447.741,00	83,58	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Sungai Lilin

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001		5	BELANJA DAERAH	833.014.354,00	744.127.703,00	(88.886.651,00)	89,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.014.354,00	117.761.363,00	(15.252.991,00)	88,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	133.014.354,00	117.761.363,00	(15.252.991,00)	88,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	133.014.354,00	117.761.363,00	(15.252.991,00)	88,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	122.057.211,00	106.855.613,00	(15.201.598,00)	87,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.057.211,00	106.855.613,00	(15.201.598,00)	87,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.957.143,00	10.905.750,00	(51.393,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.957.143,00	10.905.750,00	(51.393,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	626.366.340,00	(73.633.660,00)	89,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	700.000.000,00	626.366.340,00	(73.633.660,00)	89,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	350.000.000,00	342.986.335,00	(7.013.665,00)	97,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	342.986.335,00	(7.013.665,00)	97,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	342.986.335,00	(7.013.665,00)	97,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	350.000.000,00	283.380.005,00	(66.619.995,00)	80,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	283.380.005,00	(66.619.995,00)	80,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.083.090,00	0,00	(66.083.090,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	283.916.910,00	283.380.005,00	(536.905,00)	99,81	
				JUMLAH BELANJA	833.014.354,00	744.127.703,00	(88.886.651,00)	89,32	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(833.014.354,00)	(744.127.703,00)	88.886.651,00	89,32	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(833.014.354,00)	(744.127.703,00)	88.886.651,00	89,32	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Sungai Lilin Jaya

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002		5	BELANJA DAERAH	838.919.254,00	736.457.243,00	(102.462.011,00)	87,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.919.254,00	118.896.191,00	(20.023.063,00)	85,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	138.919.254,00	118.896.191,00	(20.023.063,00)	85,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	138.919.254,00	118.896.191,00	(20.023.063,00)	85,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	111.482.274,00	91.490.291,00	(19.991.983,00)	82,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.482.274,00	91.490.291,00	(19.991.983,00)	82,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	27.436.980,00	27.405.900,00	(31.080,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.436.980,00	27.405.900,00	(31.080,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	617.561.052,00	(82.438.948,00)	88,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	700.000.000,00	617.561.052,00	(82.438.948,00)	88,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	350.000.000,00	345.298.962,00	(4.701.038,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	345.298.962,00	(4.701.038,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	345.298.962,00	(4.701.038,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	350.000.000,00	272.262.090,00	(77.737.910,00)	77,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	272.262.090,00	(77.737.910,00)	77,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.899.596,00	0,00	(76.899.596,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	273.100.404,00	272.262.090,00	(838.314,00)	99,69	
				JUMLAH BELANJA	838.919.254,00	736.457.243,00	(102.462.011,00)	87,78	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(838.919.254,00)	(736.457.243,00)	102.462.011,00	87,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(838.919.254,00)	(736.457.243,00)	102.462.011,00	87,78	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Bayung Lencir

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		5	BELANJA DAERAH	5.061.972.049,00	4.519.991.559,00	(541.980.490,00)	89,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.536.311.185,00	3.995.786.309,00	(540.524.876,00)	88,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.858.000,00	16.877.000,00	(981.000,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.018.000,00	7.037.000,00	(981.000,00)	87,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.018.000,00	7.037.000,00	(981.000,00)	87,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.018.000,00	7.037.000,00	(981.000,00)	87,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	(519.811.635,00)	85,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	(519.811.635,00)	85,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	(519.811.635,00)	85,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	(519.811.635,00)	85,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	40.460.000,00	40.286.000,00	(174.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40.460.000,00	40.286.000,00	(174.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.460.000,00	40.286.000,00	(174.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.460.000,00	40.286.000,00	(174.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	253.179.988,00	235.987.815,00	(17.192.173,00)	93,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.936.150,00	9.750.000,00	(186.150,00)	98,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.936.150,00	9.750.000,00	(186.150,00)	98,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.936.150,00	9.750.000,00	(186.150,00)	98,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.796.379,00	45.787.500,00	(1.008.879,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	46.796.379,00	45.787.500,00	(1.008.879,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.796.379,00	45.787.500,00	(1.008.879,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.001.090,00	19.676.000,00	(325.090,00)	98,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.001.090,00	19.676.000,00	(325.090,00)	98,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.001.090,00	19.676.000,00	(325.090,00)	98,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.980.999,00	19.980.999,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.980.999,00	19.980.999,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.999,00	19.980.999,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.495.370,40	17.409.000,00	(86.370,40)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.495.370,40	17.409.000,00	(86.370,40)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.495.370,40	17.409.000,00	(86.370,40)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	73.969.999,60	73.534.316,00	(435.683,60)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	73.969.999,60	73.534.316,00	(435.683,60)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.969.999,60	73.534.316,00	(435.683,60)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	29.083.332,00	28.693.500,00	(389.832,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	29.083.332,00	28.693.500,00	(389.832,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	29.083.332,00	28.693.500,00	(389.832,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.083.332,00	28.693.500,00	(389.832,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	349.093.800,00	347.607.748,00	(1.486.052,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	83.115.000,00	82.972.948,00	(142.052,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.115.000,00	82.972.948,00	(142.052,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.115.000,00	82.972.948,00	(142.052,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	265.978.800,00	264.634.800,00	(1.344.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	265.978.800,00	264.634.800,00	(1.344.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.978.800,00	264.634.800,00	(1.344.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	184.854.000,00	184.363.816,00	(490.184,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	85.460.000,00	85.313.816,00	(146.184,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.460.000,00	85.313.816,00	(146.184,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.460.000,00	85.313.816,00	(146.184,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	74.774.000,00	74.500.000,00	(274.000,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.774.000,00	74.500.000,00	(274.000,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.774.000,00	74.500.000,00	(274.000,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.620.000,00	24.550.000,00	(70.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.620.000,00	24.550.000,00	(70.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.620.000,00	24.550.000,00	(70.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	496.438.364,00	496.064.250,00	(374.114,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	479.347.000,00	479.335.500,00	(11.500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	479.347.000,00	479.335.500,00	(11.500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	479.347.000,00	479.335.500,00	(11.500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.347.000,00	479.335.500,00	(11.500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	14.591.364,00	14.328.750,00	(262.614,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	14.591.364,00	14.328.750,00	(262.614,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.591.364,00	14.328.750,00	(262.614,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.591.364,00	14.328.750,00	(262.614,00)	98,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.740.000,00	11.056.000,00	(684.000,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	11.740.000,00	11.056.000,00	(684.000,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	11.740.000,00	11.056.000,00	(684.000,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.740.000,00	11.056.000,00	(684.000,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	11.056.000,00	(684.000,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.982.500,00	12.885.000,00	(97.500,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.982.500,00	12.885.000,00	(97.500,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	4.700.000,00	4.650.000,00	(50.000,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.650.000,00	(50.000,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.650.000,00	(50.000,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	8.282.500,00	8.235.000,00	(47.500,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.282.500,00	8.235.000,00	(47.500,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.282.500,00	8.235.000,00	(47.500,00)	99,42	
				JUMLAH BELANJA	5.061.972.049,00	4.519.991.559,00	(541.980.490,00)	89,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.061.972.049,00)	(4.519.991.559,00)	541.980.490,00	89,29	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.061.972.049,00)	(4.519.991.559,00)	541.980.490,00	89,29	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Bayung Lencir

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001		5	BELANJA DAERAH	823.842.083,00	802.465.735,00	(21.376.348,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.827.512,00	124.002.150,00	(825.362,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	124.827.512,00	124.002.150,00	(825.362,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	124.827.512,00	124.002.150,00	(825.362,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	108.325.253,00	107.499.891,00	(825.362,00)	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.325.253,00	107.499.891,00	(825.362,00)	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	16.502.259,00	16.502.259,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.502.259,00	16.502.259,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.014.571,00	678.463.585,00	(20.550.986,00)	97,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	699.014.571,00	678.463.585,00	(20.550.986,00)	97,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	349.037.519,00	338.842.600,00	(10.194.919,00)	97,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	341.755.919,00	331.581.000,00	(10.174.919,00)	97,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.755.919,00	331.581.000,00	(10.174.919,00)	97,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.281.600,00	7.261.600,00	(20.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.281.600,00	7.261.600,00	(20.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	349.977.052,00	339.620.985,00	(10.356.067,00)	97,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	349.977.052,00	339.620.985,00	(10.356.067,00)	97,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.761.052,00	226.820.985,00	(5.940.067,00)	97,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	117.216.000,00	112.800.000,00	(4.416.000,00)	96,23	
				JUMLAH BELANJA	823.842.083,00	802.465.735,00	(21.376.348,00)	97,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(823.842.083,00)	(802.465.735,00)	21.376.348,00	97,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(823.842.083,00)	(802.465.735,00)	21.376.348,00	97,40	

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Bayung Lencir Indah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002		5	BELANJA DAERAH	829.391.585,00	816.746.998,00	(12.644.587,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.120.659,00	124.410.535,00	(710.124,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	125.120.659,00	124.410.535,00	(710.124,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	125.120.659,00	124.410.535,00	(710.124,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	107.679.895,00	106.969.771,00	(710.124,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.679.895,00	106.969.771,00	(710.124,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	17.440.764,00	17.440.764,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.440.764,00	17.440.764,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	704.270.926,00	692.336.463,00	(11.934.463,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	704.270.926,00	692.336.463,00	(11.934.463,00)	98,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	349.994.476,00	347.844.713,00	(2.149.763,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	341.835.976,00	339.686.213,00	(2.149.763,00)	99,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.835.976,00	339.686.213,00	(2.149.763,00)	99,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	354.276.450,00	344.491.750,00	(9.784.700,00)	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	354.276.450,00	344.491.750,00	(9.784.700,00)	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.326.750,00	4.326.750,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	349.949.700,00	340.165.000,00	(9.784.700,00)	97,20	
				JUMLAH BELANJA	829.391.585,00	816.746.998,00	(12.644.587,00)	98,47	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(829.391.585,00)	(816.746.998,00)	12.644.587,00	98,47	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(829.391.585,00)	(816.746.998,00)	12.644.587,00	98,47	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Lalan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		5	BELANJA DAERAH	4.762.891.988,00	3.351.771.714,00	(1.411.120.274,00)	70,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.196.835.788,00	3.100.138.214,00	(1.096.697.574,00)	73,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.978.000,00	18.582.000,00	(2.396.000,00)	88,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.100.000,00	5.704.000,00	(2.396.000,00)	70,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	5.704.000,00	(2.396.000,00)	70,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	5.704.000,00	(2.396.000,00)	70,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.878.000,00	12.878.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.878.000,00	12.878.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.878.000,00	12.878.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	(989.586.053,00)	70,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	(989.586.053,00)	70,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	(989.586.053,00)	70,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	(989.586.053,00)	70,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	57.638.000,00	55.246.000,00	(2.392.000,00)	95,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	18.582.000,00	17.460.000,00	(1.122.000,00)	93,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.582.000,00	17.460.000,00	(1.122.000,00)	93,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.582.000,00	17.460.000,00	(1.122.000,00)	93,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39.056.000,00	37.786.000,00	(1.270.000,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.056.000,00	37.786.000,00	(1.270.000,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.056.000,00	37.786.000,00	(1.270.000,00)	96,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	407.928.020,50	395.607.050,00	(12.320.970,50)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.999.500,00	9.983.600,00	(15.900,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.500,00	9.983.600,00	(15.900,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	9.983.600,00	(15.900,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	74.074.100,00	73.840.000,00	(234.100,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	74.074.100,00	73.840.000,00	(234.100,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.074.100,00	73.840.000,00	(234.100,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.093.900,00	17.043.900,00	(50.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.093.900,00	17.043.900,00	(50.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.093.900,00	17.043.900,00	(50.000,00)	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	39.967.020,00	39.704.550,00	(262.470,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.967.020,00	39.704.550,00	(262.470,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.967.020,00	39.704.550,00	(262.470,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.500.000,00	17.362.500,00	(137.500,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.362.500,00	(137.500,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.362.500,00	(137.500,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	36.100.000,00	24.975.000,00	(11.125.000,00)	69,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.100.000,00	24.975.000,00	(11.125.000,00)	69,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.100.000,00	24.975.000,00	(11.125.000,00)	69,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	122.714.500,50	122.637.500,00	(77.000,50)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	122.714.500,50	122.637.500,00	(77.000,50)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.714.500,50	122.637.500,00	(77.000,50)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	90.479.000,00	90.060.000,00	(419.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.479.000,00	90.060.000,00	(419.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.479.000,00	90.060.000,00	(419.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	49.804.000,00	49.450.000,00	(354.000,00)	99,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	49.804.000,00	49.450.000,00	(354.000,00)	99,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	49.124.000,00	48.770.000,00	(354.000,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.124.000,00	48.770.000,00	(354.000,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	131.910.400,50	117.085.200,00	(14.825.200,50)	88,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.630.167,00	19.995.200,00	(3.634.967,00)	84,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.630.167,00	19.995.200,00	(3.634.967,00)	84,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.630.167,00	19.995.200,00	(3.634.967,00)	84,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	108.280.233,50	97.090.000,00	(11.190.233,50)	89,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	108.280.233,50	97.090.000,00	(11.190.233,50)	89,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.280.233,50	97.090.000,00	(11.190.233,50)	89,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	136.733.000,00	61.909.650,00	(74.823.350,00)	45,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	36.920.000,00	36.919.650,00	(350,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.920.000,00	36.919.650,00	(350,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.920.000,00	36.919.650,00	(350,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	74.823.000,00	0,00	(74.823.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.823.000,00	0,00	(74.823.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.823.000,00	0,00	(74.823.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	531.316.200,00	217.653.500,00	(313.662.700,00)	40,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	511.436.200,00	200.403.500,00	(311.032.700,00)	39,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	511.436.200,00	200.403.500,00	(311.032.700,00)	39,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	511.436.200,00	200.403.500,00	(311.032.700,00)	39,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.436.200,00	200.403.500,00	(311.032.700,00)	39,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	17.380.000,00	17.250.000,00	(130.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	17.380.000,00	17.250.000,00	(130.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.380.000,00	17.250.000,00	(130.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	17.250.000,00	(130.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.850.000,00	10.730.000,00	(120.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	10.850.000,00	10.730.000,00	(120.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.850.000,00	10.730.000,00	(120.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.850.000,00	10.730.000,00	(120.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.730.000,00	(120.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.260.000,00	10.230.000,00	(30.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	10.260.000,00	10.230.000,00	(30.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	10.260.000,00	10.230.000,00	(30.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.260.000,00	10.230.000,00	(30.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	10.230.000,00	(30.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.630.000,00	13.020.000,00	(610.000,00)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.630.000,00	13.020.000,00	(610.000,00)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	7.160.000,00	7.130.000,00	(30.000,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	7.160.000,00	7.130.000,00	(30.000,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.160.000,00	7.130.000,00	(30.000,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	6.470.000,00	5.890.000,00	(580.000,00)	91,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.470.000,00	5.890.000,00	(580.000,00)	91,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	5.890.000,00	(580.000,00)	91,03	
				JUMLAH BELANJA	4.762.891.988,00	3.351.771.714,00	(1.411.120.274,00)	70,37	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.762.891.988,00)	(3.351.771.714,00)	1.411.120.274,00	70,37	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.762.891.988,00)	(3.351.771.714,00)	1.411.120.274,00	70,37	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tungkal Jaya

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		5	BELANJA DAERAH	4.995.802.499,00	4.207.670.880,21	(788.131.618,79)	84,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.616.336.499,00	3.840.305.880,21	(776.030.618,79)	83,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.495.047,00	3.485.500,00	(9.547,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.547.750,00	1.539.500,00	(8.250,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.547.750,00	1.539.500,00	(8.250,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.547.750,00	1.539.500,00	(8.250,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.947.297,00	1.946.000,00	(1.297,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.947.297,00	1.946.000,00	(1.297,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.947.297,00	1.946.000,00	(1.297,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	(559.967.243,00)	81,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	(559.967.243,00)	81,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	(559.967.243,00)	81,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	(559.967.243,00)	81,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	34.900.000,00	28.130.000,00	(6.770.000,00)	80,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	14.670.000,00	13.500.000,00	(1.170.000,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.670.000,00	13.500.000,00	(1.170.000,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	13.500.000,00	(1.170.000,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20.230.000,00	14.630.000,00	(5.600.000,00)	72,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.230.000,00	14.630.000,00	(5.600.000,00)	72,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.230.000,00	14.630.000,00	(5.600.000,00)	72,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	339.469.487,00	326.852.000,00	(12.617.487,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.925.065,00	9.787.000,00	(138.065,00)	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.925.065,00	9.787.000,00	(138.065,00)	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.925.065,00	9.787.000,00	(138.065,00)	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	88.220.927,00	87.180.000,00	(1.040.927,00)	98,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	87.540.927,00	86.500.000,00	(1.040.927,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.540.927,00	86.500.000,00	(1.040.927,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.992.545,00	17.615.000,00	(377.545,00)	97,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.992.545,00	17.615.000,00	(377.545,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.992.545,00	17.615.000,00	(377.545,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.875.678,00	24.783.800,00	(91.878,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.875.678,00	24.783.800,00	(91.878,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.875.678,00	24.783.800,00	(91.878,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.292.272,00	14.236.000,00	(56.272,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.292.272,00	14.236.000,00	(56.272,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.292.272,00	14.236.000,00	(56.272,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	60.750.000,00	60.470.000,00	(280.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.750.000,00	60.470.000,00	(280.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.750.000,00	60.470.000,00	(280.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	123.413.000,00	112.780.200,00	(10.632.800,00)	91,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	123.413.000,00	112.780.200,00	(10.632.800,00)	91,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.413.000,00	112.780.200,00	(10.632.800,00)	91,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.565.960,00	43.030.000,00	(535.960,00)	98,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	43.565.960,00	43.030.000,00	(535.960,00)	98,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	42.885.960,00	42.350.000,00	(535.960,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.885.960,00	42.350.000,00	(535.960,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	282.566.400,00	220.642.666,00	(61.923.734,00)	78,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	146.652.000,00	107.134.666,00	(39.517.334,00)	73,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.652.000,00	107.134.666,00	(39.517.334,00)	73,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.652.000,00	107.134.666,00	(39.517.334,00)	73,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	135.914.400,00	113.508.000,00	(22.406.400,00)	83,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	135.914.400,00	113.508.000,00	(22.406.400,00)	83,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.914.400,00	113.508.000,00	(22.406.400,00)	83,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	885.550.000,00	751.343.352,21	(134.206.647,79)	84,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	78.840.000,00	65.347.396,00	(13.492.604,00)	82,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.840.000,00	65.347.396,00	(13.492.604,00)	82,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	65.347.396,00	(13.492.604,00)	82,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	800.000.000,00	679.295.956,21	(120.704.043,79)	84,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	679.295.956,21	(120.704.043,79)	84,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	679.295.956,21	(120.704.043,79)	84,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.710.000,00	6.700.000,00	(10.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.710.000,00	6.700.000,00	(10.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	6.700.000,00	(10.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	335.226.000,00	324.875.000,00	(10.351.000,00)	96,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	333.076.000,00	324.875.000,00	(8.201.000,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	333.076.000,00	324.875.000,00	(8.201.000,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	333.076.000,00	324.875.000,00	(8.201.000,00)	97,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.076.000,00	324.875.000,00	(8.201.000,00)	97,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.240.000,00	42.490.000,00	(1.750.000,00)	96,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.240.000,00	42.490.000,00	(1.750.000,00)	96,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	12.540.000,00	11.465.000,00	(1.075.000,00)	91,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	12.540.000,00	11.465.000,00	(1.075.000,00)	91,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	11.465.000,00	(1.075.000,00)	91,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	31.700.000,00	31.025.000,00	(675.000,00)	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	31.700.000,00	31.025.000,00	(675.000,00)	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.700.000,00	31.025.000,00	(675.000,00)	97,87	
				JUMLAH BELANJA	4.995.802.499,00	4.207.670.880,21	(788.131.618,79)	84,22	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.995.802.499,00)	(4.207.670.880,21)	788.131.618,79	84,22	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.995.802.499,00)	(4.207.670.880,21)	788.131.618,79	84,22	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Lawang Wetan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		5	BELANJA DAERAH	4.742.295.672,00	4.325.659.879,00	(416.635.793,00)	91,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.327.235.672,00	3.939.461.879,00	(387.773.793,00)	91,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.020.000,00	0,00	(7.020.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	(298.948.958,00)	90,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	(298.948.958,00)	90,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	(298.948.958,00)	90,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	(298.948.958,00)	90,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	323.564.174,00	310.404.665,00	(13.159.509,00)	95,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.696.998,00	6.963.000,00	(733.998,00)	90,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.696.998,00	6.963.000,00	(733.998,00)	90,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.696.998,00	6.963.000,00	(733.998,00)	90,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.174.459,00	47.011.400,00	(163.059,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	46.494.459,00	46.331.400,00	(163.059,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.494.459,00	46.331.400,00	(163.059,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.089.356,00	12.329.000,00	(760.356,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.089.356,00	12.329.000,00	(760.356,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.089.356,00	12.329.000,00	(760.356,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	46.016.661,00	45.812.866,00	(203.795,00)	99,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.016.661,00	45.812.866,00	(203.795,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.016.661,00	45.812.866,00	(203.795,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.698.400,00	21.545.400,00	(5.153.000,00)	80,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.698.400,00	21.545.400,00	(5.153.000,00)	80,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.698.400,00	21.545.400,00	(5.153.000,00)	80,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	25.680.000,00	25.655.000,00	(25.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.680.000,00	25.655.000,00	(25.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.680.000,00	25.655.000,00	(25.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.880.000,00	20.100.000,00	(5.780.000,00)	77,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.880.000,00	20.100.000,00	(5.780.000,00)	77,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.880.000,00	20.100.000,00	(5.780.000,00)	77,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	131.328.300,00	130.987.999,00	(340.301,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	131.328.300,00	130.987.999,00	(340.301,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.328.300,00	130.987.999,00	(340.301,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87.770.000,00	87.770.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	421.105.400,00	363.979.149,00	(57.126.251,00)	86,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	87.375.000,00	70.292.749,00	(17.082.251,00)	80,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.375.000,00	70.292.749,00	(17.082.251,00)	80,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.375.000,00	70.292.749,00	(17.082.251,00)	80,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	333.730.400,00	293.686.400,00	(40.044.000,00)	88,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	333.730.400,00	293.686.400,00	(40.044.000,00)	88,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.730.400,00	293.686.400,00	(40.044.000,00)	88,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	202.193.950,00	191.174.875,00	(11.019.075,00)	94,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	118.260.000,00	112.548.925,00	(5.711.075,00)	95,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	118.260.000,00	112.548.925,00	(5.711.075,00)	95,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.260.000,00	112.548.925,00	(5.711.075,00)	95,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	67.593.950,00	66.645.950,00	(948.000,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.593.950,00	66.645.950,00	(948.000,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.593.950,00	66.645.950,00	(948.000,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	16.340.000,00	11.980.000,00	(4.360.000,00)	73,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.340.000,00	11.980.000,00	(4.360.000,00)	73,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.340.000,00	11.980.000,00	(4.360.000,00)	73,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	384.490.000,00	361.928.000,00	(22.562.000,00)	94,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	378.580.000,00	361.928.000,00	(16.652.000,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	378.580.000,00	361.928.000,00	(16.652.000,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	378.580.000,00	361.928.000,00	(16.652.000,00)	95,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.580.000,00	361.928.000,00	(16.652.000,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.400.000,00	5.250.000,00	(3.150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	8.400.000,00	5.250.000,00	(3.150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8.400.000,00	5.250.000,00	(3.150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	5.250.000,00	(3.150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	5.250.000,00	(3.150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.400.000,00	7.770.000,00	(630.000,00)	92,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	8.400.000,00	7.770.000,00	(630.000,00)	92,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	8.400.000,00	7.770.000,00	(630.000,00)	92,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	7.770.000,00	(630.000,00)	92,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.770.000,00	(630.000,00)	92,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.770.000,00	11.250.000,00	(2.520.000,00)	81,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.770.000,00	11.250.000,00	(2.520.000,00)	81,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	7.770.000,00	5.250.000,00	(2.520.000,00)	67,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	7.770.000,00	5.250.000,00	(2.520.000,00)	67,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	5.250.000,00	(2.520.000,00)	67,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	4.742.295.672,00	4.325.659.879,00	(416.635.793,00)	91,21	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.742.295.672,00)	(4.325.659.879,00)	416.635.793,00	91,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.742.295.672,00)	(4.325.659.879,00)	416.635.793,00	91,21	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Babat Supat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000		5	BELANJA DAERAH	4.217.302.289,00	3.346.679.861,00	(870.622.428,00)	79,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.691.637.589,00	2.931.374.061,00	(760.263.528,00)	79,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.358.974,00	5.718.000,00	(9.640.974,00)	37,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.858.974,00	5.718.000,00	(2.140.974,00)	72,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.858.974,00	5.718.000,00	(2.140.974,00)	72,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.858.974,00	5.718.000,00	(2.140.974,00)	72,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	(534.466.342,50)	79,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	(534.466.342,50)	79,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	(534.466.342,50)	79,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	(534.466.342,50)	79,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.762.000,00	15.403.000,00	(31.359.000,00)	32,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46.762.000,00	15.403.000,00	(31.359.000,00)	32,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.762.000,00	15.403.000,00	(31.359.000,00)	32,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.762.000,00	15.403.000,00	(31.359.000,00)	32,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	381.253.471,50	296.062.175,00	(85.191.296,50)	77,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.996.927,00	9.943.000,00	(53.927,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.996.927,00	9.943.000,00	(53.927,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.927,00	9.943.000,00	(53.927,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	115.406.910,50	115.149.400,00	(257.510,50)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	99.206.910,50	98.949.400,00	(257.510,50)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.206.910,50	98.949.400,00	(257.510,50)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.994.874,00	19.994.874,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.994.874,00	19.994.874,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.874,00	19.994.874,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.471.400,00	24.471.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.471.400,00	24.471.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.471.400,00	24.471.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.021.860,00	5.810.000,00	(1.211.860,00)	82,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.021.860,00	5.810.000,00	(1.211.860,00)	82,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.021.860,00	5.810.000,00	(1.211.860,00)	82,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	40.000.000,00	21.978.000,00	(18.022.000,00)	54,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	21.978.000,00	(18.022.000,00)	54,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	21.978.000,00	(18.022.000,00)	54,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	55.785.000,00	8.660.000,00	(47.125.000,00)	15,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	55.785.000,00	8.660.000,00	(47.125.000,00)	15,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.785.000,00	8.660.000,00	(47.125.000,00)	15,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	108.576.500,00	90.055.501,00	(18.520.999,00)	82,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	108.576.500,00	90.055.501,00	(18.520.999,00)	82,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.576.500,00	90.055.501,00	(18.520.999,00)	82,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	346.126.943,00	287.298.650,00	(58.828.293,00)	83,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	155.616.499,00	112.021.450,00	(43.595.049,00)	71,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.616.499,00	112.021.450,00	(43.595.049,00)	71,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.616.499,00	112.021.450,00	(43.595.049,00)	71,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	190.510.444,00	175.277.200,00	(15.233.244,00)	92,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	190.510.444,00	175.277.200,00	(15.233.244,00)	92,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.510.444,00	175.277.200,00	(15.233.244,00)	92,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	240.222.000,00	199.444.378,00	(40.777.622,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	78.840.000,00	48.866.396,00	(29.973.604,00)	61,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.840.000,00	48.866.396,00	(29.973.604,00)	61,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	48.866.396,00	(29.973.604,00)	61,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	149.792.000,00	148.777.982,00	(1.014.018,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	149.792.000,00	148.777.982,00	(1.014.018,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.792.000,00	148.777.982,00	(1.014.018,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	11.590.000,00	1.800.000,00	(9.790.000,00)	15,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.590.000,00	1.800.000,00	(9.790.000,00)	15,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.590.000,00	1.800.000,00	(9.790.000,00)	15,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	501.151.200,00	403.605.800,00	(97.545.400,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	465.577.000,00	384.445.600,00	(81.131.400,00)	82,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	465.577.000,00	384.445.600,00	(81.131.400,00)	82,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	465.577.000,00	384.445.600,00	(81.131.400,00)	82,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.577.000,00	384.445.600,00	(81.131.400,00)	82,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	33.099.200,00	18.615.200,00	(14.484.000,00)	56,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	33.099.200,00	18.615.200,00	(14.484.000,00)	56,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.099.200,00	18.615.200,00	(14.484.000,00)	56,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.099.200,00	18.615.200,00	(14.484.000,00)	56,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.475.000,00	545.000,00	(1.930.000,00)	22,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.475.000,00	545.000,00	(1.930.000,00)	22,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.475.000,00	545.000,00	(1.930.000,00)	22,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	545.000,00	(1.930.000,00)	22,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.880.000,00	6.000.000,00	(880.000,00)	87,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	6.880.000,00	6.000.000,00	(880.000,00)	87,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.880.000,00	6.000.000,00	(880.000,00)	87,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.880.000,00	6.000.000,00	(880.000,00)	87,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	6.000.000,00	(880.000,00)	87,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.873.500,00	0,00	(3.873.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	3.873.500,00	0,00	(3.873.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	3.873.500,00	0,00	(3.873.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.873.500,00	0,00	(3.873.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.873.500,00	0,00	(3.873.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.760.000,00	5.700.000,00	(8.060.000,00)	41,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.760.000,00	5.700.000,00	(8.060.000,00)	41,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	6.880.000,00	2.850.000,00	(4.030.000,00)	41,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	6.880.000,00	2.850.000,00	(4.030.000,00)	41,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	2.850.000,00	(4.030.000,00)	41,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	6.880.000,00	2.850.000,00	(4.030.000,00)	41,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.880.000,00	2.850.000,00	(4.030.000,00)	41,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	2.850.000,00	(4.030.000,00)	41,42	
				JUMLAH BELANJA	4.217.302.289,00	3.346.679.861,00	(870.622.428,00)	79,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.217.302.289,00)	(3.346.679.861,00)	870.622.428,00	79,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.217.302.289,00)	(3.346.679.861,00)	870.622.428,00	79,35	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. M. TOHA

Lampiran I.3 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Jirak Jaya

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000		5	BELANJA DAERAH	3.611.399.223,00	2.833.068.412,00	(778.330.811,00)	78,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.096.998.723,00	2.428.577.412,00	(668.421.311,00)	78,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.475.000,00	0,00	(12.475.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.975.000,00	0,00	(4.975.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.975.000,00	0,00	(4.975.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	0,00	(4.975.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	(570.950.542,00)	75,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	(570.950.542,00)	75,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	(570.950.542,00)	75,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	(570.950.542,00)	75,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	67.845.000,00	48.816.000,00	(19.029.000,00)	71,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	67.845.000,00	48.816.000,00	(19.029.000,00)	71,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.845.000,00	48.816.000,00	(19.029.000,00)	71,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.845.000,00	48.816.000,00	(19.029.000,00)	71,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	290.468.806,00	285.148.492,00	(5.320.314,00)	98,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.997.200,00	9.558.200,00	(439.000,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.997.200,00	9.558.200,00	(439.000,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.997.200,00	9.558.200,00	(439.000,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.023.606,00	46.523.000,00	(500.606,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	46.343.606,00	45.843.000,00	(500.606,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.343.606,00	45.843.000,00	(500.606,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.999.500,00	19.960.785,00	(38.715,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.999.500,00	19.960.785,00	(38.715,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.500,00	19.960.785,00	(38.715,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.348.800,00	33.348.483,00	(317,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.348.800,00	33.348.483,00	(317,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.348.800,00	33.348.483,00	(317,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.137.700,00	15.035.000,00	(3.102.700,00)	82,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.137.700,00	15.035.000,00	(3.102.700,00)	82,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.137.700,00	15.035.000,00	(3.102.700,00)	82,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	32.500.000,00	32.400.630,00	(99.370,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	32.400.630,00	(99.370,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.400.630,00	(99.370,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000,00	24.500.000,00	(500.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.500.000,00	(500.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.500.000,00	(500.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	104.462.000,00	103.822.394,00	(639.606,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	104.462.000,00	103.822.394,00	(639.606,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.462.000,00	103.822.394,00	(639.606,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	71.013.620,00	69.960.650,00	(1.052.970,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	71.013.620,00	69.960.650,00	(1.052.970,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	70.333.620,00	69.280.650,00	(1.052.970,00)	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.333.620,00	69.280.650,00	(1.052.970,00)	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	287.069.689,00	238.629.411,00	(48.440.278,00)	83,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	65.460.000,00	39.699.411,00	(25.760.589,00)	60,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.460.000,00	39.699.411,00	(25.760.589,00)	60,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.460.000,00	39.699.411,00	(25.760.589,00)	60,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	221.609.689,00	198.930.000,00	(22.679.689,00)	89,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	221.609.689,00	198.930.000,00	(22.679.689,00)	89,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.609.689,00	198.930.000,00	(22.679.689,00)	89,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.440.000,00	42.286.793,00	(11.153.207,00)	79,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	42.040.000,00	31.990.793,00	(10.049.207,00)	76,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.040.000,00	31.990.793,00	(10.049.207,00)	76,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.040.000,00	31.990.793,00	(10.049.207,00)	76,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	11.400.000,00	10.296.000,00	(1.104.000,00)	90,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	10.296.000,00	(1.104.000,00)	90,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	10.296.000,00	(1.104.000,00)	90,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	473.930.500,00	366.991.000,00	(106.939.500,00)	77,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	461.925.000,00	360.406.000,00	(101.519.000,00)	78,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	461.925.000,00	360.406.000,00	(101.519.000,00)	78,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	461.925.000,00	360.406.000,00	(101.519.000,00)	78,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.925.000,00	360.406.000,00	(101.519.000,00)	78,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	9.515.500,00	4.185.000,00	(5.330.500,00)	43,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	9.515.500,00	4.185.000,00	(5.330.500,00)	43,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.515.500,00	4.185.000,00	(5.330.500,00)	43,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.515.500,00	4.185.000,00	(5.330.500,00)	43,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.240.000,00	13.500.000,00	(1.740.000,00)	88,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	15.240.000,00	13.500.000,00	(1.740.000,00)	88,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	15.240.000,00	13.500.000,00	(1.740.000,00)	88,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.240.000,00	13.500.000,00	(1.740.000,00)	88,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	13.500.000,00	(1.740.000,00)	88,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.070.000,00	10.800.000,00	(270.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	11.070.000,00	10.800.000,00	(270.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	11.070.000,00	10.800.000,00	(270.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.070.000,00	10.800.000,00	(270.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.070.000,00	10.800.000,00	(270.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.160.000,00	13.200.000,00	(960.000,00)	93,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.160.000,00	13.200.000,00	(960.000,00)	93,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0015		FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN RUANG DESA SERTA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	7.080.000,00	6.300.000,00	(780.000,00)	88,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	6.300.000,00	(780.000,00)	88,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	6.300.000,00	(780.000,00)	88,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	7.080.000,00	6.900.000,00	(180.000,00)	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	6.900.000,00	(180.000,00)	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	6.900.000,00	(180.000,00)	97,45	
				JUMLAH BELANJA	3.611.399.223,00	2.833.068.412,00	(778.330.811,00)	78,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.611.399.223,00)	(2.833.068.412,00)	778.330.811,00	78,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.611.399.223,00)	(2.833.068.412,00)	778.330.811,00	78,44	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M. TOHA

Lampiran I.4 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.982.904.212.192,51	1.785.508.915.102,29	731.084.397.570,69	645.357.854.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	909.525.627.669,00	837.903.899.828,92	80.056.402.287,00	77.583.959.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	909.525.627.669,00	837.903.899.828,92	80.056.402.287,00	77.583.959.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	783.966.906.236,00	714.985.402.674,00	2.467.623.100,00	1.833.406.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.749.850,00	112.497.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.750.000,00	53.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.999.850,00	39.239.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.441.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	14.441.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.385.000,00	78.796.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.385.000,00	78.796.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.080.140,00	588.815.222,00	514.564.900,00	514.048.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.993.640,00	29.642.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	514.564.900,00	514.048.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	59.405.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	149.736.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	53.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.500.000,00	32.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	49.803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.586.500,00	214.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	723.600.000,00	685.391.998,00	453.058.200,00	392.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	723.600.000,00	685.391.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	453.058.200,00	392.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.436.842.400,00	5.036.945.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.810.542.400,00	802.095.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.626.300.000,00	4.234.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.405.894.600,00	1.145.356.700,00	1.500.000.000,00	926.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	535.499.600,00	376.877.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	730.608.000,00	687.426.000,00	1.500.000.000,00	926.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.787.000,00	81.053.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	125.558.721.433,00	122.918.497.154,92	77.588.779.187,00	75.750.553.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.687.903.886,00	62.881.738.645,00	50.857.919.444,00	49.451.692.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	3.364.900.000,00	3.082.027.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	1.135.566.000,00	1.130.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.426.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	650.000.000,00	643.493.000,00	7.462.836.000,00	7.318.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	100.000.000,00	98.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	5.037.060.000,00	4.891.319.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	362.300.000,00	297.101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	705.554.300,00	638.022.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	318.852.000,00	221.073.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.021.974.936,00	53.926.823.936,00	20.706.058.244,00	20.630.756.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	298.991.850,00	291.565.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.791.400.000,00	5.485.955.040,00	330.720.000,00	329.548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	299.395.000,00	283.096.200,00	5.564.250.200,00	5.027.476.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	265.951.800,00	132.601.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	970.487.000,00	959.200.000,00	5.032.529.000,00	4.907.716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.997.000,00	2.805.000,00	624.000.000,00	608.595.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.810.172.047,00	39.166.165.521,00	25.646.055.843,00	25.215.912.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	1.107.450.000,00	1.089.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	148.701.000,00	148.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	847.903.000,00	844.240.000,00	3.137.901.901,00	3.059.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000,00	745.899.000,00	1.760.836.000,00	1.693.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	397.663.000,00	397.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000,00	199.833.274,00	5.520.000.000,00	5.455.364.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	326.941.000,00	325.255.500,00	27.400.000,00	27.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	474.101.600,00	242.565.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.929.958.000,00	1.455.277.697,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28.107.747.897,00	28.105.293.627,00	8.807.938.992,00	8.801.031.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	110.573.700,00	110.337.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.227.871.850,00	517.489.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	800.000.000,00	764.726.000,00	1.396.462.950,00	1.377.521.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.721.600.000,00	5.549.334.000,00	137.800.000,00	137.389.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	313.475.000,00	305.912.973,00	1.770.902.000,00	1.745.737.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.277.152.500,00	19.113.735.222,92	1.053.440.000,00	1.052.288.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.209.473.000,00	1.203.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	0,00	130.000.000,00	129.999.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	270.244.800,00	252.506.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	967.736.150,00	923.739.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	44.958.300,00	42.235.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.695.142.000,00	1.688.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	199.000.000,00	198.440.000,00	198.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	2.876.763.000,00	2.853.662.609,92	725.000.000,00	723.848.222,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	104.200.000,00	104.183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	637.622.250,00	636.158.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.783.493.000,00	1.756.857.766,00	31.363.900,00	30.660.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	369.702.900,00	343.972.166,00	31.363.900,00	30.660.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.490.100,00	11.401.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	654.844.111.238,60	599.971.220.255,38	65.044.931.571,00	54.320.869.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	379.501.974.698,00	353.802.980.182,00	40.314.297.131,00	38.184.621.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.885.839.315,00	281.919.363.668,00	174.562.940,00	169.356.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.255.510,00	127.053.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.978.710,00	65.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.800.000,00	28.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	56.476.800,00	32.583.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.970.000,00	88.897.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.530.000,00	77.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.440.000,00	11.020.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.355.000,00	85.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.675.000,00	85.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.068.902,00	466.812.569,00	116.792.000,00	114.799.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.997.789,00	26.807.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.904.629,00	680.000,00	116.792.000,00	114.799.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.994.100,00	59.713.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.142.384,00	102.841.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.340.000,00	54.656.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.996.000,00	47.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.694.000,00	174.818.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.909.060,00	2.180.000,00	57.770.940,00	54.556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.909.060,00	2.180.000,00	57.770.940,00	54.556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.510.206.934,00	22.216.816.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.150.462.134,00	1.910.313.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.359.744.800,00	20.306.502.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.740.000,00	922.547.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	733.810.000,00	493.054.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.578.000,00	377.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.352.000,00	51.982.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76.765.397.347,00	70.575.829.231,00	40.139.734.191,00	38.015.264.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot	14.863.324.200,00	14.677.982.999,00	39.313.774.334,00	37.208.922.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	24.572.000,00	24.060.342,00	16.975.428.000,00	15.779.560.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.040.000,00	0,00	1.792.375.000,00	1.717.146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.025.000,00	2.720.000,00	3.822.424.800,00	3.574.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.915.000,00	4.760.000,00	1.892.930.000,00	1.839.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4.055.000,00	3.620.000,00	894.610.000,00	873.790.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	8.709.094.084,00	8.644.756.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehata	161.877.700,00	30.535.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	5.221.743.650,00	4.780.440.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di F	14.525.149.500,00	14.476.649.565,00	5.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	135.690.000,00	135.637.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.557.909.147,00	55.634.721.194,00	825.959.857,00	806.342.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.916.000,00	49.300.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	219.741.000,00	169.097.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	587.211.600,00	388.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.879.000,00	58.214.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.428.499,00	36.224.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.965.000,00	28.037.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.360.000,00	17.480.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33.016.000,00	31.785.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.130.000,00	13.680.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.036.000,00	19.062.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.400.000,00	22.966.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.230.000,00	24.705.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/a	71.922.000,00	27.701.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.440.500,00	82.410.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.388.000,00	18.056.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.278.000,00	33.675.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	560.871.322,00	547.598.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	13.704.800,00	11.858.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	76.679.500,00	27.345.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	209.702.900,00	165.998.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	436.284.500,00	147.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	41.927.900,00	37.851.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.381.023.426,00	1.830.001.271,00	825.959.857,00	806.342.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24.875.000,00	11.839.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	19.800.000,00	19.791.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	21.120.000,00	20.955.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	22.910.000,00	22.804.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	13.270.000,00	13.007.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	50.575.000,00	19.418.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	132.970.000,00	126.693.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132.970.000,00	126.693.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	211.194.000,00	136.431.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	211.194.000,00	136.431.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.266.478.000,00	866.105.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	19.980.000,00	19.577.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Keseha	19.980.000,00	19.577.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	252.755.000,00	101.592.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	252.755.000,00	101.592.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	993.743.000,00	744.935.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	993.743.000,00	744.935.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	388.992.996,00	256.751.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (	104.930.800,00	73.806.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko A	104.930.800,00	73.806.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekala	36.296.000,00	35.280.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan K	36.296.000,00	35.280.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produks	195.241.200,00	103.072.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri F	195.241.200,00	103.072.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga	52.524.996,00	44.591.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sa	52.524.996,00	44.591.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	195.267.040,00	184.930.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	39.240.000,00	39.113.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	39.240.000,00	39.113.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.539.000,00	41.505.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	41.539.000,00	41.505.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	114.488.040,00	104.311.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	114.488.040,00	104.311.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	31.080.963.622,00	30.225.416.027,00	3.514.245.960,00	2.464.492.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.850.163.622,00	28.167.587.018,00	3.226.745.960,00	2.179.222.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	28.850.163.622,00	28.167.587.018,00	3.226.745.960,00	2.179.222.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.850.163.622,00	28.167.587.018,00	3.226.745.960,00	2.179.222.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.230.800.000,00	2.057.829.009,00	287.500.000,00	285.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.230.800.000,00	2.057.829.009,00	287.500.000,00	285.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.230.800.000,00	2.057.829.009,00	287.500.000,00	285.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	35.163.294.901,00	32.651.861.310,00	8.557.039.522,00	3.757.411.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.667.493.470,00	30.180.695.425,00	8.202.250.000,00	3.431.968.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	32.667.493.470,00	30.180.695.425,00	8.202.250.000,00	3.431.968.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	32.667.493.470,00	30.180.695.425,00	8.202.250.000,00	3.431.968.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.495.801.431,00	2.471.165.885,00	354.789.522,00	325.443.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.495.801.431,00	2.471.165.885,00	354.789.522,00	325.443.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.495.801.431,00	2.471.165.885,00	354.789.522,00	325.443.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003		Puskesmas Ngulak	3.292.769.566,00	2.075.409.413,00	530.940.000,00	461.369.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.762.300.847,00	1.872.436.713,00	530.940.000,00	461.369.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.762.300.847,00	1.872.436.713,00	530.940.000,00	461.369.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.762.300.847,00	1.872.436.713,00	530.940.000,00	461.369.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	519.918.719,00	201.072.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	519.918.719,00	201.072.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.760.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.450.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.400.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	77.050.000,00	20.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.843.573,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.750.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.467.828,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14.200.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.150.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	101.767.318,00	18.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	33.600.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	55.600.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.550.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	10.550.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	10.550.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		Puskesmas Babat Toman	4.471.027.882,00	3.547.158.337,00	366.281.800,00	327.988.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.567.321.000,00	3.002.688.262,00	366.281.800,00	327.988.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.567.321.000,00	3.002.688.262,00	366.281.800,00	327.988.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.567.321.000,00	3.002.688.262,00	366.281.800,00	327.988.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	903.706.882,00	544.470.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	903.706.882,00	544.470.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.471.988,00	72.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	77.200.000,00	64.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	44.100.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.125.000,00	121.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.150.232,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.800.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.200.000,00	44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	197.231.662,00	126.060.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	86.200.000,00	59.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005		Puskesmas Ulak Paceh	2.258.577.230,00	1.618.257.229,00	189.349.689,00	169.142.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.683.290.000,00	1.281.742.047,00	189.349.689,00	169.142.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.683.290.000,00	1.281.742.047,00	189.349.689,00	169.142.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.683.290.000,00	1.281.742.047,00	189.349.689,00	169.142.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	566.087.230,00	336.515.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	566.087.230,00	336.515.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.920.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58.000.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.700.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	163.157.139,00	115.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.900.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.400.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.512.880,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.100.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	94.650.233,00	69.128.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.846.978,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	23.300.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006		Puskesmas Tanah Abang	1.240.830.388,00	961.796.863,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	799.023.360,00	679.510.676,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	799.023.360,00	679.510.676,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	799.023.360,00	679.510.676,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	440.007.028,00	282.286.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440.007.028,00	282.286.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.800.000,00	35.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.000.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.400.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.964.971,00	73.104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.600.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.500.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.600.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.400.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.231.897,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	65.012.895,00	56.070.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.886.000,00	10.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.711.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	14.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	15.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007		Puskesmas Lubuk Bintialo	1.250.040.059,00	1.113.432.050,00	55.000.000,00	18.493.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	509.781.636,00	509.661.991,00	55.000.000,00	18.493.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	509.781.636,00	509.661.991,00	55.000.000,00	18.493.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	509.781.636,00	509.661.991,00	55.000.000,00	18.493.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	702.468.423,00	567.506.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	702.468.423,00	567.506.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.640.000,00	32.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.900.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.700.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.700.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	133.702.236,00	90.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.400.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.300.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.014.628,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.900.000,00	39.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	160.607.559,00	147.332.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat M	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.664.000,00	23.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	35.640.000,00	32.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.200.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	39.900.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	37.790.000,00	36.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	37.790.000,00	36.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	37.790.000,00	36.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008		Puskesmas Bukit Selabu	850.813.305,00	646.404.977,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	407.313.071,00	383.190.673,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	407.313.071,00	383.190.673,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	407.313.071,00	383.190.673,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	440.500.234,00	263.214.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440.500.234,00	263.214.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.180.000,00	17.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.232.840,00	17.782.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.200.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.680.000,00	88.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.100.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.500.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.000.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.395.372,00	38.095.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	85.832.022,00	39.941.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	21.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009		Puskesmas Cinta Karya	1.568.427.835,00	1.119.121.300,22	176.078.200,00	131.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.027.370.540,00	806.238.404,22	176.078.200,00	131.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.027.370.540,00	806.238.404,22	176.078.200,00	131.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.027.370.540,00	806.238.404,22	176.078.200,00	131.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	532.528.618,00	312.882.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	532.528.618,00	312.882.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.320.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.500.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.600.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	97.050.000,00	55.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.200.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.000.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.320.000,00	35.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.788.000,00	108.102.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.080.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.470.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	32.200.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.528.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	8.528.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	8.528.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010		Puskesmas Suka Damai	1.350.284.141,00	917.131.842,00	215.635.400,00	78.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	881.496.846,00	679.485.126,00	215.635.400,00	78.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	881.496.846,00	679.485.126,00	215.635.400,00	78.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	881.496.846,00	679.485.126,00	215.635.400,00	78.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	468.787.295,00	237.646.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.787.295,00	237.646.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.960.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.960.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	132.115.024,00	58.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.700.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.600.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	137.700.838,00	64.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	107.401.433,00	75.894.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011		Puskesmas Sido Rahayu	1.238.286.669,00	829.700.177,00	163.533.461,00	120.370.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	775.817.974,00	593.440.477,00	163.533.461,00	120.370.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	775.817.974,00	593.440.477,00	163.533.461,00	120.370.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	775.817.974,00	593.440.477,00	163.533.461,00	120.370.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	460.293.999,00	234.439.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	460.293.999,00	234.439.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.900.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.900.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.850.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	84.330.000,00	26.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.580.611,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.040.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	78.443.388,00	64.882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.174.696,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	2.174.696,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	2.174.696,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012		Puskesmas Tebing Bulang	2.536.232.056,00	2.012.689.718,00	82.433.493,00	44.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.979.127.964,00	1.624.181.423,00	82.433.493,00	44.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.979.127.964,00	1.624.181.423,00	82.433.493,00	44.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.979.127.964,00	1.624.181.423,00	82.433.493,00	44.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	546.928.092,00	378.832.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	546.928.092,00	378.832.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.240.000,00	54.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	57.000.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	143.721.474,00	79.515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.600.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.504.799,00	31.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	94.381.819,00	67.586.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	69.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.176.000,00	9.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	10.176.000,00	9.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	10.176.000,00	9.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013		Puskesmas Jirak	2.108.478.584,00	1.285.731.583,00	181.202.442,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.443.686.800,00	939.598.646,00	181.202.442,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.443.686.800,00	939.598.646,00	181.202.442,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.443.686.800,00	939.598.646,00	181.202.442,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.791.784,00	346.132.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.791.784,00	346.132.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	106.363.006,00	82.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.800.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.800.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.600.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.800.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.756.459,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.152.319,00	113.603.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	5.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.120.000,00	4.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	84.100.000,00	51.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014		Puskesmas Balai Agung	4.221.730.749,00	3.568.990.104,50	450.000.000,00	77.944.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.399.854.796,00	2.919.199.402,50	450.000.000,00	77.944.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.399.854.796,00	2.919.199.402,50	450.000.000,00	77.944.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.399.854.796,00	2.919.199.402,50	450.000.000,00	77.944.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	821.875.953,00	649.790.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	821.875.953,00	649.790.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	188.160.000,00	148.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.200.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.088.516,00	147.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.600.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.602.000,00	84.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.158.462,00	151.394.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.686.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.400.975,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	62.800.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015		Puskesmas Lumpatan	3.177.360.469,00	2.386.172.315,72	377.856.460,00	216.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.475.768.000,00	1.939.694.402,72	377.856.460,00	216.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.475.768.000,00	1.939.694.402,72	377.856.460,00	216.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.475.768.000,00	1.939.694.402,72	377.856.460,00	216.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	696.236.469,00	441.133.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	696.236.469,00	441.133.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.861.486,00	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.700.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.200.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	164.998.330,00	69.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.717.394,00	28.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.198.000,00	60.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	161.356.259,00	98.029.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.150.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.555.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	18.900.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	132.600.000,00	83.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.356.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	5.356.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	5.356.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016		Puskesmas Lais	3.345.235.390,60	2.144.646.747,46	357.457.485,00	245.459.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.747.617.062,60	1.871.188.309,46	357.457.485,00	245.459.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.747.617.062,60	1.871.188.309,46	357.457.485,00	245.459.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.747.617.062,60	1.871.188.309,46	357.457.485,00	245.459.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	592.828.328,00	273.458.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	592.828.328,00	273.458.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.990.000,00	39.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.730.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.700.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.800.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	121.270.000,00	62.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.600.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.911.510,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.145.000,00	47.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	130.701.818,00	27.857.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.800.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	64.200.000,00	45.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017		Puskesmas Gardu Harapan	1.163.667.621,00	723.853.663,00	81.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	738.553.591,00	555.525.713,00	81.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	738.553.591,00	555.525.713,00	81.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	738.553.591,00	555.525.713,00	81.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	422.276.030,00	166.193.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	422.276.030,00	166.193.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.300.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.600.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.500.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.950.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	123.417.000,00	38.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.950.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.519.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	87.665.030,00	47.456.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.775.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.600.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	34.100.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.838.000,00	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	2.838.000,00	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	2.838.000,00	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018		Puskesmas Teluk Kijing	1.291.495.623,00	866.896.084,16	81.318.525,00	43.029.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	731.866.722,00	641.823.725,16	81.318.525,00	43.029.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	731.866.722,00	641.823.725,16	81.318.525,00	43.029.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	731.866.722,00	641.823.725,16	81.318.525,00	43.029.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	545.611.823,00	219.155.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	545.611.823,00	219.155.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.650.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.800.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34.000.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.000.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	121.495.008,00	46.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.700.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.804.882,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.730.592,00	50.752.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.131.341,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.600.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.017.078,00	5.917.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	14.017.078,00	5.917.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0018	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	14.017.078,00	5.917.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019		Puskesmas Tanjung Kerang	2.185.860.692,00	1.365.180.325,00	156.805.000,00	67.434.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.488.040.910,00	955.319.831,00	156.805.000,00	67.434.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.488.040.910,00	955.319.831,00	156.805.000,00	67.434.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.488.040.910,00	955.319.831,00	156.805.000,00	67.434.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	697.819.782,00	409.860.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	697.819.782,00	409.860.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116.480.000,00	98.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.899.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.500.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34.650.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	163.324.632,00	45.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.800.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.250.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.250.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.008.727,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.000.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.322.850,00	95.729.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.554.573,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0019	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	28.800.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020		Puskesmas Sungai Lilin	3.422.190.820,00	2.555.648.782,00	300.000.000,00	220.086.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.658.079.051,00	2.186.152.449,00	300.000.000,00	220.086.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.658.079.051,00	2.186.152.449,00	300.000.000,00	220.086.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.658.079.051,00	2.186.152.449,00	300.000.000,00	220.086.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	751.926.532,00	363.016.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	751.926.532,00	363.016.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.820.000,00	23.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	102.050.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.100.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	45.000.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	113.555.000,00	79.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.050.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.300.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.900.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.684.788,00	44.734.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	207.576.652,00	102.563.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.320.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.245.092,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	69.000.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.185.237,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	12.185.237,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0020	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	12.185.237,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021		Puskesmas Sri Gunung	1.743.518.829,00	1.188.333.074,00	130.250.000,00	126.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.240.636.055,00	914.313.966,00	130.250.000,00	126.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.240.636.055,00	914.313.966,00	130.250.000,00	126.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.240.636.055,00	914.313.966,00	130.250.000,00	126.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	492.182.774,00	272.669.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	492.182.774,00	272.669.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.240.000,00	22.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.200.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.700.000,00	30.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.950.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.500.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.524.716,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.748.058,00	96.474.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.080.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	36.240.000,00	24.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.700.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	10.700.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0021	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	10.700.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022		Puskesmas Karya Maju	2.174.201.804,00	1.382.161.408,36	242.100.843,00	103.910.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.648.067.923,00	1.133.140.643,36	242.100.843,00	103.910.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.648.067.923,00	1.133.140.643,36	242.100.843,00	103.910.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.648.067.923,00	1.133.140.643,36	242.100.843,00	103.910.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	526.133.881,00	249.020.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	526.133.881,00	249.020.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.640.000,00	52.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	70.950.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	153.954.000,00	31.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.500.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.900.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.071.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	84.862.881,00	50.962.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.056.000,00	20.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0022	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	14.100.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023		Puskesmas Mekar jaya	1.598.402.099,00	990.930.718,00	193.488.600,00	169.740.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.071.252.594,00	849.250.718,00	193.488.600,00	169.740.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.071.252.594,00	849.250.718,00	193.488.600,00	169.740.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.071.252.594,00	849.250.718,00	193.488.600,00	169.740.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	527.149.505,00	141.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	527.149.505,00	141.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.050.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.200.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	144.985.067,00	17.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.190.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	117.941.640,00	41.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.852.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.730.000,00	24.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0023	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.800.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024		Puskesmas Bayung Lencir	5.275.702.738,00	3.583.499.813,03	660.342.000,00	571.788.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.136.404.854,00	3.003.977.618,03	660.342.000,00	571.788.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.136.404.854,00	3.003.977.618,03	660.342.000,00	571.788.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.136.404.854,00	3.003.977.618,03	660.342.000,00	571.788.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.125.016.984,00	571.958.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.125.016.984,00	571.958.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.200.000,00	30.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.080.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	76.200.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50.440.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	301.886.200,00	139.984.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.750.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.900.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	69.500.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.100.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.773.471,00	66.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	219.940.866,00	124.276.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	11.958.000,00	6.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.368.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	93.840.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.280.900,00	7.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	14.280.900,00	7.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0024	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	14.280.900,00	7.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025		Puskesmas Suka Jaya	1.540.758.986,00	1.106.637.870,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	832.709.355,00	785.979.618,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	832.709.355,00	785.979.618,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	832.709.355,00	785.979.618,00	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	701.709.631,00	315.270.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	701.709.631,00	315.270.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.341.796,00	26.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	63.150.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.600.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.532.000,00	78.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.400.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.600.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	16.200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.394.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.378.646,00	84.641.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.469.189,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.944.000,00	4.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.600.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	55.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.340.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	6.340.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0025	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	6.340.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026		Puskesmas Peninggalan	2.059.281.054,00	1.441.797.856,68	270.495.250,00	232.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.456.831.516,00	1.016.374.522,68	270.495.250,00	232.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.456.831.516,00	1.016.374.522,68	270.495.250,00	232.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.456.831.516,00	1.016.374.522,68	270.495.250,00	232.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	601.049.538,00	424.423.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	601.049.538,00	424.423.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	248.134.740,00	172.603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.650.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.510.400,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95.344.780,00	58.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.879.618,00	113.939.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	31.300.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0026	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027		Puskesmas Sumber Harum	1.371.473.051,00	1.043.551.177,00	125.000.000,00	35.287.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	832.274.534,00	663.159.661,00	125.000.000,00	35.287.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	832.274.534,00	663.159.661,00	125.000.000,00	35.287.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	832.274.534,00	663.159.661,00	125.000.000,00	35.287.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	539.198.517,00	380.391.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.198.517,00	380.391.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.600.000,00	43.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.900.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.100.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.750.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.432.000,00	121.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47.410.000,00	32.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	91.016.517,00	85.316.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.790.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0027	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	33.600.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028		Puskesmas Berojaya Timur	1.401.058.083,00	905.407.414,00	284.857.500,00	99.850.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	942.385.893,00	654.610.107,00	284.857.500,00	99.850.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	942.385.893,00	654.610.107,00	284.857.500,00	99.850.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	942.385.893,00	654.610.107,00	284.857.500,00	99.850.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	457.772.190,00	250.197.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	457.772.190,00	250.197.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.800.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.850.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	76.688.000,00	29.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.800.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.135.500,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.600.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.050.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.508.690,00	71.729.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	25.200.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0028	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029		Puskesmas Bandar Agung	1.864.718.101,00	1.394.001.871,00	169.387.050,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.274.677.896,00	1.138.591.871,00	169.387.050,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.274.677.896,00	1.138.591.871,00	169.387.050,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.274.677.896,00	1.138.591.871,00	169.387.050,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	570.772.705,00	243.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.772.705,00	243.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84.250.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.250.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.400.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	99.097.000,00	68.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.750.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.300.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.900.000,00	39.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.545.205,00	43.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	9.450.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	40.000.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.267.500,00	11.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da	19.267.500,00	11.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0029	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	19.267.500,00	11.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030		Puskesmas Karang Mukti	2.498.926.381,00	1.579.175.956,00	300.000.000,00	184.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.664.945.970,00	1.178.964.997,00	300.000.000,00	184.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.664.945.970,00	1.178.964.997,00	300.000.000,00	184.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.664.945.970,00	1.178.964.997,00	300.000.000,00	184.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	833.980.411,00	400.210.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	833.980.411,00	400.210.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.800.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.500.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232.222.000,00	69.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.200.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48.300.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.416.049,00	42.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.462.362,00	122.230.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.400.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0030	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	79.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031		Puskesmas Air Balui	1.109.696.326,00	715.866.172,15	88.626.350,00	88.113.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	585.003.792,00	551.955.576,15	88.626.350,00	88.113.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	585.003.792,00	551.955.576,15	88.626.350,00	88.113.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	585.003.792,00	551.955.576,15	88.626.350,00	88.113.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	524.692.534,00	163.910.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	524.692.534,00	163.910.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.640.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.011.137,00	9.495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.200.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.800.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.478.806,00	22.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.472.591,00	45.025.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	19.200.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0031	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	43.650.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101		Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	145.486.831.486,00	138.221.377.895,10	6.235.994.410,00	5.942.306.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.854.285.981,00	133.065.636.985,10	317.559.900,00	317.559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	139.854.285.981,00	133.065.636.985,10	317.559.900,00	317.559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139.854.285.981,00	133.065.636.985,10	317.559.900,00	317.559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.632.545.505,00	5.155.740.910,00	5.918.434.510,00	5.624.746.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.632.545.505,00	5.155.740.910,00	5.918.434.510,00	5.624.746.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0101	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.632.545.505,00	5.155.740.910,00	5.918.434.510,00	5.624.746.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	245.926.681.563,71	209.570.863.735,99	490.541.010.642,89	424.323.414.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.436.637.000,71	104.433.309.750,99	442.747.910.382,89	379.319.013.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.855.286.329,89	29.446.270.801,00	1.704.116.668,00	1.698.671.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.360.479,80	46.985.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.648.480,00	37.638.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.999,80	9.347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	27.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98.614.614,00	89.646.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.614.614,00	89.646.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.484.000,00	106.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.484.000,00	74.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.813.101,49	422.911.756,00	1.397.213.468,00	1.392.819.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	1.397.213.468,00	1.392.819.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	59.653.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.075.101,49	94.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	54.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	38.738.000,00	38.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	14.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	130.516.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.494.665,00	1.400.000,00	306.903.200,00	305.852.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.494.665,00	1.400.000,00	306.903.200,00	305.852.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.799.557.346,00	11.595.333.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.438.487.346,00	8.951.278.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.361.070.000,00	2.644.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.338.620,00	1.754.931.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	646.970.000,00	517.465.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.235.000,00	213.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	925.261.500,00	919.380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.872.120,00	104.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	31.431.595.425,00	28.227.118.036,00	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	30.574.025.075,00	27.424.533.386,00	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.627.753.200,00	1.603.108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewen	22.500.000,00	3.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	289.090.600,00	274.106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	225.397.475,00	176.241.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	2.836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabu	282.802.200,00	279.510.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau	346.679.400,00	333.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	96.363.600,00	91.189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	22.590.137.350,00	19.857.554.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.095.120.500,00	1.933.304.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	13.942.500,00	8.946.650,00	1.272.115.000,00	984.970.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, La	922.603.900,00	895.806.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	42.867.600,00	1.035.000,00	951.087.050,00	949.494.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.044.072.500,00	1.023.914.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Bal	347.501.000,00	327.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung	615.995.750,00	612.636.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasny	857.570.350,00	802.584.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	433.636.000,00	393.067.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	423.934.350,00	409.517.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.672.247.595,82	41.266.512.437,99	438.820.591.664,89	375.685.877.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	55.672.247.595,82	41.266.512.437,99	438.820.591.664,89	375.685.877.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	3.063.153.307,42	2.791.402.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencana	6.426.663.110,00	6.054.955.036,00	300.000.000,00	196.858.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	223.097.500,00	67.081.000,00	401.707.200,00	401.204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.847.693.090,00	441.986.100,00	403.453.725.834,00	351.676.096.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.436.903.880,00	1.411.691.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	2.217.230.000,00	1.836.639.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	278.214.500,40	47.400.600,00	34.665.158.630,89	23.411.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.718.864.000,00	1.449.635.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	5.101.816.526,00	4.778.160.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	31.358.611.682,00	22.387.560.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	550.000.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	25.000.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.927.507.650,00	5.491.888.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/K	39.440.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	39.440.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.335.167.650,00	3.152.436.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	3.250.167.650,00	3.152.436.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	971.728.000,00	868.902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	171.327.000,00	86.018.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	800.401.000,00	782.883.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.581.172.000,00	1.445.290.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.062.577.000,00	1.014.694.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	27.491.000,00	11.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	38.876.000,00	12.914.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	363.156.000,00	346.253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	89.072.000,00	59.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	115.490.044.563,00	105.137.553.985,00	47.793.100.260,00	45.004.400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.479.516.000,00	14.278.754.450,00	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.479.516.000,00	14.278.754.450,00	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	16.009.280.800,00	13.819.614.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	470.235.200,00	459.140.000,00	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	18.761.306.700,00	18.516.311.614,00	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.761.306.700,00	18.516.311.614,00	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.804.163.600,00	1.804.163.600,00	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	9.768.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	77.217.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	175.000.000,00	163.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00	400.645.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	16.059.346.300,00	15.925.675.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL	158.241.600,00	158.241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.141.172.200,00	1.040.668.200,00	25.439.509.210,00	23.703.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam D	1.141.172.200,00	1.040.668.200,00	25.439.509.210,00	23.703.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.141.172.200,00	1.040.668.200,00	25.439.509.210,00	23.703.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	77.472.047.863,00	69.789.179.190,00	19.461.187.100,00	18.478.914.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan	77.472.047.863,00	69.789.179.190,00	19.461.187.100,00	18.478.914.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentinga	77.286.575.763,00	69.680.339.190,00	19.380.227.100,00	18.397.954.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat	185.472.100,00	108.840.000,00	80.960.000,00	80.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah I	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.699.830.923,00	41.738.026.892,00	81.981.962.699,00	79.810.466.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.699.830.923,00	41.738.026.892,00	81.981.962.699,00	79.810.466.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.818.919.215,00	12.175.542.892,00	3.876.730.000,00	3.864.648.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.373.250,00	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.350.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.023.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.295.000,00	86.013.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	92.295.000,00	86.013.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	134.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	134.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.060.436.900,00	834.635.114,00	280.000.000,00	272.533.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.996.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	280.000.000,00	272.533.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	49.997.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000,00	285.166.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	160.000.000,00	159.474.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.436.900,00	268.303.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.448.332.800,00	1.441.850.976,00	819.290.000,00	815.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.448.332.800,00	1.441.850.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	819.290.000,00	815.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.434.836.200,00	1.086.244.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	564.104.600,00	343.858.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	870.731.600,00	742.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	906.155.320,00	418.983.345,00	2.777.440.000,00	2.777.103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	649.100.200,00	182.315.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.454.000,00	132.092.750,00	2.777.440.000,00	2.777.103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.601.120,00	104.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	491.041.750,00	391.592.000,00	10.914.947.050,00	10.380.094.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	385.000.000,00	301.900.000,00	6.113.866.250,00	5.899.915.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	135.000.000,00	78.400.000,00	1.501.866.250,00	1.501.599.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	250.000.000,00	223.500.000,00	4.612.000.000,00	4.398.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko	31.949.750,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Ko	31.949.750,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	74.092.000,00	74.092.000,00	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus	74.092.000,00	74.092.000,00	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perm	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.454.965.958,00	3.365.842.000,00	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.454.965.958,00	3.365.842.000,00	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.438.191.333,00	3.350.142.000,00	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	16.774.625,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGA	50.890.660.181,20	43.741.759.683,00	13.278.190.370,80	9.147.063.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.043.603.975,20	13.899.592.515,00	8.574.170.849,80	4.660.420.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.282.956.475,20	10.866.201.653,00	559.137.778,80	556.384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.806.214,00	96.271.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.872.000,00	12.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.934.214,00	35.386.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	185.375.000,00	184.953.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	185.375.000,00	184.953.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.739.000,00	151.775.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.059.000,00	151.775.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.153.177,50	502.971.418,00	313.548.774,80	312.516.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.958.300,00	19.801.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.360.000,00	680.000,00	313.548.774,80	312.516.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.946.458,00	39.521.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.987.497,00	162.312.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.840.490,50	49.044.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.060.432,00	184.626.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.360.000,00	1.360.000,00	245.589.004,00	243.868.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	46.949.004,00	46.025.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.000,00	680.000,00	198.640.000,00	197.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.701.488.390,00	1.793.234.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.186.790,00	228.139.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.367.301.600,00	1.565.095.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.994.122.000,00	1.930.719.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	1.019.450.000,00	964.007.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	949.792.000,00	945.191.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.880.000,00	21.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.760.647.500,00	3.033.390.862,00	8.015.033.071,00	4.104.036.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	102.637.550,00	74.476.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Anca	102.637.550,00	74.476.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.261.673.750,00	1.072.245.939,00	257.857.071,00	249.622.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	89.067.750,00	69.061.007,00	257.857.071,00	249.622.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	99.323.000,00	94.762.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	187.660.000,00	134.420.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupate	885.623.000,00	774.001.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.924.514.700,00	1.556.857.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	832.850.000,00	604.965.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	102.950.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	154.954.700,00	107.692.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	833.760.000,00	830.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	471.821.500,00	329.810.717,00	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	62.000.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	199.741.000,00	165.599.553,00	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	210.080.500,00	162.387.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	33.847.056.206,00	29.842.167.168,00	4.704.019.521,00	4.486.643.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.131.029.696,00	27.454.719.884,00	311.071.784,00	309.418.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.472.000,00	48.410.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.881.000,00	20.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.088.000,00	18.988.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	22.503.000,00	9.201.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	116.357.250,00	94.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	116.357.250,00	94.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.903.000,00	43.720.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.903.000,00	43.720.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.054.763,00	465.899.484,00	112.992.284,00	112.371.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.858.074,00	14.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.973.000,00	6.209.600,00	112.992.284,00	112.371.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.808.486,00	52.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.699.038,00	95.971.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.792.165,00	73.105.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	7.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.424.000,00	176.601.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.606.675.200,00	4.843.248.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.765.600,00	60.298.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.530.909.600,00	4.782.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.944.862,00	949.681.422,00	198.079.500,00	197.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	84.230.000,00	83.320.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	1.158.870.000,00	768.707.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.964.862,00	84.873.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	680.000,00	680.000,00	198.079.500,00	197.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.587.511.973,00	1.294.195.896,00	37.947.737,00	37.257.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.021.742.513,00	818.876.296,00	37.947.737,00	37.257.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tin	105.750.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.099.000,00	51.324.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ket	176.850.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol	67.120.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jab	15.380.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satp	25.215.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pe	308.625.000,00	304.486.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada M	47.416.000,00	40.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala	221.520.000,00	167.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	767.513,00	680.000,00	37.947.737,00	37.257.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	565.769.460,00	475.319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	88.973.460,00	70.820.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	24.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	451.800.000,00	404.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	534.583.537,00	523.852.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	22.851.537,00	21.701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Anca	22.851.537,00	21.701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	511.732.000,00	502.151.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	453.482.000,00	448.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	58.250.000,00	53.855.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	593.931.000,00	569.398.502,00	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Ber	593.931.000,00	569.398.502,00	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.931.000,00	569.398.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	77.017.300.617,00	52.583.144.707,00	181.900.000,00	172.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000		Dinas Sosial	77.017.300.617,00	52.583.144.707,00	181.900.000,00	172.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.143.847.442,00	9.237.763.952,00	181.900.000,00	172.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.673.000,00	80.584.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.908.000,00	56.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.429.000,00	14.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	30.336.000,00	9.547.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.668.000,00	84.048.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119.668.000,00	84.048.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	575.825.315,00	525.351.681,00	101.980.000,00	92.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.075.000,00	20.201.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.651.000,00	7.522.800,00	82.469.000,00	72.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.485.200,00	39.805.200,00	19.511.000,00	19.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.818.940,00	88.138.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93.315.675,00	93.053.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.132.500,00	21.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.347.000,00	215.567.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	0,00	79.920.000,00	79.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	0,00	79.920.000,00	79.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.240.305.820,00	1.088.008.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.010.220,00	110.834.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.116.295.600,00	977.174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.955.238,00	1.114.578.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	360.170.000,00	340.349.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	715.505.238,00	713.129.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.280.000,00	61.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	32.238.251.650,00	13.440.048.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	49.582.000,00	4.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	49.582.000,00	4.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	32.188.669.650,00	13.435.967.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105.045.000,00	104.406.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/	6.443.879.000,00	6.426.085.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/K	24.779.869.700,00	6.150.593.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenang	826.290.950,00	731.406.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	33.585.000,00	23.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, ser	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.471.563.000,00	1.328.206.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	220.415.700,00	205.388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	312.434.000,00	272.091.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.271.433.825,00	26.804.289.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	959.355.000,00	895.356.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	304.180.000,00	290.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	304.180.000,00	290.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	655.175.000,00	605.150.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	655.175.000,00	605.150.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	340.540.548.401,90	298.114.794.268,00	66.140.993.994,30	58.638.422.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.929.235.508,00	12.605.643.018,00	198.114.796,00	192.816.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.929.235.508,00	12.605.643.018,00	198.114.796,00	192.816.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.175.413.633,00	8.020.668.014,00	198.114.796,00	192.816.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.785.000,00	77.110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.392.000,00	48.111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.364.000,00	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.029.000,00	17.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.590.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.590.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.882.992,00	366.499.064,00	127.342.796,00	122.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.963.364,00	18.623.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	127.342.796,00	122.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.602.400,00	39.046.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.217.778,00	67.165.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.741.050,00	54.313.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.268.400,00	24.804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.410.000,00	121.905.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	70.772.000,00	70.716.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	70.772.000,00	70.716.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.789.901,00	547.617.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.658.568,00	174.738.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.131.333,00	372.879.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.713.000,00	206.047.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	89.350.000,00	85.383.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.873.000,00	96.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.490.000,00	24.473.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	364.317.050,00	138.730.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	364.317.050,00	138.730.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	364.317.050,00	138.730.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster K	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	511.585.825,00	233.587.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	152.769.925,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	152.769.925,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	311.387.900,00	186.033.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	45.642.000,00	45.554.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	109.323.000,00	108.821.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	156.422.900,00	31.657.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	47.428.000,00	45.754.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Ind	47.428.000,00	45.754.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	371.027.000,00	283.005.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yar	165.655.000,00	110.002.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga K	165.655.000,00	110.002.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusa	205.372.000,00	173.003.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berak	115.694.000,00	96.883.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.0.00.5.06.10.0000	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	89.678.000,00	76.120.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.317.327.679,00	8.016.265.113,00	33.787.969,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.317.327.679,00	8.016.265.113,00	33.787.969,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.326.738.243,00	6.258.246.301,00	33.787.969,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.389.500,00	52.344.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.354.000,00	27.084.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.904.000,00	9.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	21.131.500,00	16.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.125.000,00	93.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.125.000,00	93.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.134.540,00	445.379.936,00	33.787.969,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.912.850,00	19.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	809.781,00	680.000,00	33.787.969,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.245.900,00	30.189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.193.110,00	121.519.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.150.899,00	95.148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.822.000,00	159.173.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.755.564,00	310.219.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.665.920,00	60.272.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.089.644,00	249.946.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.430.000,00	223.805.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	200.100.000,00	191.475.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.330.000,00	32.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	602.418.925,00	580.267.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/	116.743.625,00	114.317.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	116.743.625,00	114.317.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarak	485.675.300,00	465.949.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	92.530.000,00	86.514.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosia	393.145.300,00	379.435.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	170.967.000,00	152.319.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.552.000,00	40.167.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/	40.552.000,00	40.167.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordi	130.415.000,00	112.151.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabup	130.415.000,00	112.151.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	99.387.200,00	61.180.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data d	99.387.200,00	61.180.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabup	99.387.200,00	61.180.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	335.008.911,00	327.194.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabu	128.060.450,00	122.254.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.060.450,00	122.254.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewen	206.948.461,00	204.939.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.747.500,00	150.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Da	56.200.961,00	54.884.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	782.807.400,00	637.057.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	625.983.000,00	496.807.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pe	625.983.000,00	496.807.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinas	156.824.400,00	140.250.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.0.00.0.00.11.0000	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Ting	156.824.400,00	140.250.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.387.760.824,00	8.747.239.589,00	225.893.856,00	223.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000		Dinas Ketahanan Pangan	10.387.760.824,00	8.747.239.589,00	225.893.856,00	223.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.032.888.868,00	6.740.680.063,00	224.353.856,00	223.499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.723.800,00	59.645.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.597.200,00	34.274.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.760.600,00	13.116.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.366.000,00	12.254.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.730.000,00	38.965.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.730.000,00	38.965.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.730.000,00	28.185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.730.000,00	28.185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.962.135,00	357.108.984,00	165.106.506,00	164.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.965.373,00	29.020.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	165.106.506,00	164.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.913.584,00	55.862.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.903.173,00	71.869.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.976.350,00	48.792.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.994.000,00	17.233.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.529.655,00	93.690.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	59.247.350,00	58.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	59.247.350,00	58.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.685.800,00	526.465.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.733.000,00	82.599.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.952.800,00	443.865.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.020.000,00	562.726.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	163.070.000,00	158.613.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.550.000,00	379.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	24.300.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.150.157.392,00	1.834.930.635,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Ka	734.681.692,00	488.346.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	33.129.000,00	16.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	88.196.000,00	76.510.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	187.923.000,00	128.142.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	115.031.500,00	97.228.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	232.226.000,00	104.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	33.912.996,00	30.320.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	21.155.000,00	14.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	23.108.196,00	21.224.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	194.217.000,00	158.460.900,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	139.380.000,00	129.052.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54.837.000,00	29.408.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan	1.221.258.700,00	1.188.123.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	47.341.500,00	40.613.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	1.173.917.200,00	1.147.510.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.987.545,00	35.035.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	40.987.545,00	35.035.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.987.545,00	35.035.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	163.727.019,00	136.593.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	163.727.019,00	136.593.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	44.825.000,00	39.005.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	26.991.000,00	22.641.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.12.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/	91.911.019,00	74.945.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	54.760.000,00	11.274.000,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	54.760.000,00	11.274.000,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	54.760.000,00	11.274.000,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Da	54.760.000,00	11.274.000,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.760.000,00	4.760.000,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.1.03.2.10.05.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pemba	50.000.000,00	6.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	48.587.897.508,00	43.370.751.736,00	8.693.991.275,00	8.197.472.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000		Dinas Lingkungan Hidup	48.587.897.508,00	43.370.751.736,00	8.693.991.275,00	8.197.472.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.236.206.731,00	33.958.465.552,00	549.385.900,00	506.254.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.682.762,00	11.485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.494.000,00	5.518.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.688.762,00	5.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	99.116.950,00	92.655.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	99.116.950,00	92.655.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.256.000,00	36.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.256.000,00	36.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.292.674,00	338.157.139,00	489.385.900,00	457.717.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.873,00	27.496.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	489.385.900,00	457.717.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.272,00	42.915.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.972,00	44.926.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.716.561,00	48.424.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.385.996,00	128.883.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	60.000.000,00	48.536.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	60.000.000,00	48.536.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.605.893.152,00	23.261.237.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.467.252,00	306.861.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.163.425.900,00	22.954.376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.341.865,00	550.547.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	263.240.000,00	158.540.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.054.559,00	257.934.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.047.306,00	134.073.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	397.795.000,00	389.145.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	397.795.000,00	389.145.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	397.795.000,00	389.145.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	917.836.174,00	758.700.392,00	142.857.000,00	141.852.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	904.994.174,00	748.108.292,00	142.857.000,00	141.852.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air,	62.648.000,00	53.394.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	70.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	49.023.000,00	44.925.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	204.786.000,00	202.018.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	51.798.000,00	26.749.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	465.801.174,00	421.021.819,00	142.857.000,00	141.852.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.842.000,00	10.592.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	12.842.000,00	10.592.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.658.512.000,00	1.187.594.284,00	1.949.433.250,00	1.917.984.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.658.512.000,00	1.187.594.284,00	1.949.433.250,00	1.917.984.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.658.172.000,00	1.187.254.284,00	498.113.250,00	497.362.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	340.000,00	340.000,00	1.451.320.000,00	1.420.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA	127.423.000,00	103.394.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	127.423.000,00	103.394.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	62.369.000,00	56.893.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	65.054.000,00	46.500.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTU	49.711.000,00	32.603.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasya	49.711.000,00	32.603.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lemb	49.711.000,00	32.603.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.114.000,00	52.108.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP	84.114.000,00	52.108.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabup	84.114.000,00	52.108.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.116.299.603,00	6.888.738.556,00	6.052.315.125,00	5.631.380.707,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	7.116.299.603,00	6.888.738.556,00	6.052.315.125,00	5.631.380.707,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.620.243.903,00	5.519.581.620,00	3.287.800.250,00	3.042.152.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	75.000.000,00	61.154.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.13.0000	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TP	1.421.055.700,00	1.308.002.868,00	2.764.514.875,00	2.589.228.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.978.015.723,00	14.586.042.243,00	5.582.438.055,00	5.393.267.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.978.015.723,00	14.586.042.243,00	5.582.438.055,00	5.393.267.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.573.511.848,00	11.948.196.156,00	2.669.971.800,00	2.576.442.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.897.378,00	56.959.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.897.378,00	27.369.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.042.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000,00	20.547.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.386.000,00	62.900.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.386.000,00	62.900.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.869.660,00	661.303.484,00	119.971.800,00	117.596.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	28.295.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	119.971.800,00	117.596.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	54.779.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	195.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.936.500,00	64.298.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	44.525.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.933.160,00	234.154.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	400.000.000,00	398.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	400.000.000,00	398.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.716.192.223,00	1.406.245.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.127.779,00	404.947.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.228.064.444,00	1.001.298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.549.400,00	365.445.822,00	2.150.000.000,00	2.060.165.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	207.610.000,00	197.039.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.930.600,00	96.382.867,00	2.150.000.000,00	2.060.165.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.008.800,00	72.023.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	452.701.919,00	364.238.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	325.986.500,00	263.928.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	34.365.000,00	33.542.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	203.778.000,00	144.561.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	47.839.500,00	47.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40.004.000,00	38.363.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	126.715.419,00	100.310.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terk	126.715.419,00	100.310.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	255.141.402,00	249.906.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	163.297.000,00	160.152.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	163.297.000,00	160.152.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	91.844.402,00	89.753.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	91.844.402,00	89.753.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.644.740.854,00	1.971.874.841,00	2.912.466.255,00	2.816.824.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	198.522.651,00	85.337.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.377.950,00	37.510.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	160.144.701,00	47.826.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.573.873.426,00	1.242.564.428,00	2.912.466.255,00	2.816.824.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelapor	1.573.873.426,00	1.242.564.428,00	2.912.466.255,00	2.816.824.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	527.541.432,00	311.835.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	358.448.800,00	168.983.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	26.708.923,00	26.616.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.361.000,00	3.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	80.752.255,00	68.347.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	57.270.454,00	44.238.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	344.803.345,00	332.137.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.869.845,00	45.431.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Da	298.933.500,00	286.706.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.919.700,00	51.825.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	51.919.700,00	51.825.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.14.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	51.919.700,00	51.825.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.461.971.919,00	14.581.409.922,00	245.187.345,00	237.633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.461.971.919,00	14.581.409.922,00	245.187.345,00	237.633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.392.345.106,00	6.420.227.753,00	245.187.345,00	237.633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.204.300,00	99.459.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.834.300,00	59.730.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.820.000,00	18.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	31.550.000,00	21.591.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.925.000,00	43.319.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.925.000,00	43.319.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.250.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.250.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	701.102.964,00	573.126.271,00	171.890.715,00	169.790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.787.628,00	28.709.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	171.890.715,00	169.790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.004.582,00	52.790.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.738.213,00	132.759.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.531.541,00	41.381.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	36.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.986.000,00	43.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.375.000,00	236.663.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.926.400,00	118.780.803,00	73.296.630,00	67.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.246.400,00	118.100.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	73.296.630,00	67.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.720.996,00	518.799.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.571.396,00	109.989.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.149.600,00	408.810.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.253.070,00	328.454.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	318.339.570,00	228.059.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.025.000,00	90.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.888.500,00	9.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	97.640.900,00	77.942.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	97.640.900,00	77.942.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	53.747.000,00	47.627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	43.893.900,00	30.315.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	145.701.198,00	14.013.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	251.788.075,00	206.504.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	143.434.000,00	91.343.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.161.078.240,00	4.918.675.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	39.952.000,00	36.080.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	152.094.000,00	149.305.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	52.675.000,00	21.293.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	55.464.000,00	41.096.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	55.464.000,00	44.459.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	96.888.000,00	91.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HU	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembag	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1.046.484.250,00	979.310.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posya	117.581.450,00	109.474.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pe	152.736.225,00	113.937.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	482.682.858,00	349.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	91.272.800,00	88.026.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesej	926.689.817,00	828.934.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.493.738.932,00	17.584.523.968,00	2.401.201.926,00	2.381.908.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000		Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	20.493.738.932,00	17.584.523.968,00	2.401.201.926,00	2.381.908.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.057.373.336,00	9.592.859.613,00	816.184.926,00	811.709.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.105.000,00	50.997.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.105.000,00	41.049.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.677.000,00	53.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.677.000,00	53.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.756.251,00	432.156.175,00	119.097.726,00	116.991.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.952.255,00	29.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	119.097.726,00	116.991.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.996.200,00	43.195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.680.000,00	100.360.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.173.000,00	37.360.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	22.251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.274.796,00	159.172.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	697.087.200,00	694.717.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	638.880.000,00	638.879.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	58.207.200,00	55.837.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.811.625,00	358.291.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.182.825,00	108.157.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.628.800,00	250.134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.044.000,00	208.074.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	224.070.000,00	132.000.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.554.000,00	62.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	578.531.200,00	412.407.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabu	31.141.500,00	28.339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	31.141.500,00	28.339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	547.389.700,00	384.067.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	58.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	72.309.700,00	72.309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	235.080.000,00	79.207.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	180.000.000,00	173.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.555.163.896,00	4.709.373.279,00	1.585.017.000,00	1.570.199.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesu	1.055.836.000,00	613.116.718,00	87.017.000,00	86.695.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	85.233.000,00	77.062.735,00	87.017.000,00	86.695.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	375.000.000,00	112.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatar	335.483.000,00	232.478.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Lu	100.000.000,00	91.248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.000.000,00	53.019.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	85.120.000,00	47.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.008.978.000,00	1.989.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.944.000.000,00	1.936.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Ke	64.978.000,00	53.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayana	1.395.423.099,00	1.070.628.888,00	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fas	67.618.000,00	66.848.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.078.620.000,00	823.447.000,00	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	40.246.000,00	39.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	62.005.500,00	58.372.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termas	64.342.249,00	33.909.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	82.591.350,00	48.743.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/	1.094.926.797,00	1.036.219.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pela	42.011.800,00	21.355.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	42.073.500,00	28.706.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	136.274.997,00	128.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	874.566.500,00	857.657.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.302.670.500,00	2.869.883.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	431.670.500,00	406.672.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	134.400.000,00	114.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, F	90.006.500,00	89.419.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	130.000.000,00	129.990.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	77.264.000,00	73.003.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ K	2.871.000.000,00	2.463.210.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo	1.305.000.000,00	897.210.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	28.284.853.312,60	23.612.731.981,00	15.883.218.577,40	15.527.863.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.782.455.700,00	9.355.138.371,00	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.782.455.700,00	9.355.138.371,00	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.782.455.700,00	9.355.138.371,00	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	220.200.800,00	86.559.459,00	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	1.03.2.15.0.00.04.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11.562.254.900,00	9.268.578.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000		Dinas Perhubungan	16.502.397.612,60	14.257.593.610,00	1.638.082.077,40	1.603.392.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.316.981.927,00	11.652.439.504,00	110.007.149,40	109.407.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.557.150,00	54.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.445.150,00	44.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.200.000,00	10.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	6.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68.734.750,00	66.945.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	68.734.750,00	66.945.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	49.027.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	49.027.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.231.441,00	372.111.492,00	85.078.236,60	84.881.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.865.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.197.967,00	0,00	85.078.236,60	84.881.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	39.382.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.795.474,00	81.225.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.500.000,00	41.457.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.738.000,00	190.180.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.000.000,00	159.840.000,00	24.928.912,80	24.525.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.000.000,00	159.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	24.928.912,80	24.525.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.164.755.563,00	2.064.451.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.577.563,00	254.838.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.885.178.000,00	1.809.613.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.918.827.146,00	1.689.180.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	1.704.427.146,00	1.475.004.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	189.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	24.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.270.767.632,00	1.739.082.697,00	1.367.124.928,00	1.334.259.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	881.212.000,00	419.125.584,00	1.265.533.200,00	1.247.020.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	455.315.000,00	4.266.600,00	1.265.533.200,00	1.247.020.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	425.897.000,00	414.858.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.724.050,00	3.628.000,00	2.689.350,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parki	3.724.050,00	3.628.000,00	2.689.350,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	272.570.161,00	253.487.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	19.972.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	238.070.161,00	219.433.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	951.952.701,00	921.233.471,00	95.460.000,00	84.839.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	157.074.023,00	138.184.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	59.194.000,00	55.124.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4.100.000,00	3.900.000,00	95.460.000,00	84.839.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	731.584.678,00	724.024.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	161.308.720,00	141.608.186,00	3.442.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetens	161.308.720,00	141.608.186,00	3.442.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	866.628.053,60	818.908.191,00	160.950.000,00	159.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang P	45.507.000,00	44.800.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai	45.507.000,00	44.800.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	821.121.053,60	774.107.202,00	160.950.000,00	159.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dar	30.201.000,00	29.159.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	535.253.054,00	507.622.454,00	17.760.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	213.719.499,60	211.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	41.947.500,00	26.226.267,00	143.190.000,00	143.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	48.020.000,00	47.163.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	48.020.000,00	47.163.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	48.020.000,00	47.163.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.065.739.879,50	27.053.855.416,00	854.838.075,90	594.696.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	30.065.739.879,50	27.053.855.416,00	854.838.075,90	594.696.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.391.792.160,50	9.080.370.308,00	367.608.823,40	365.116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.421.500,00	40.727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.860.000,00	18.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.560.000,00	8.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.001.500,00	14.619.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.688.530.587,00	6.843.938.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.688.530.587,00	6.843.938.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.855.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.855.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.377.163,50	427.706.063,00	120.489.989,40	119.558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.427,00	28.370.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	120.489.989,40	119.558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.000.000,00	99.925.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.626.236,50	54.510.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.400.000,00	44.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.350.500,00	160.710.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	47.118.834,00	46.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	47.118.834,00	46.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.519.426.660,00	1.377.278.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.357.460,00	384.354.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.069.200,00	992.924.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.181.250,00	333.718.851,00	200.000.000,00	199.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	341.230.000,00	179.998.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.711.250,00	122.825.000,00	200.000.000,00	199.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.240.000,00	30.895.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.871.117.559,50	7.199.820.149,00	332.898.870,70	229.580.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.871.117.559,50	7.199.820.149,00	332.898.870,70	229.580.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penye	166.962.250,00	83.781.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	643.829.000,00	313.085.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.957.000.000,00	5.821.489.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	443.104.000,00	412.973.755,00	88.418.070,70	86.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	660.222.309,50	568.488.993,00	244.480.800,00	143.000.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.802.830.159,50	10.773.664.959,00	154.330.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.802.830.159,50	10.773.664.959,00	154.330.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	253.609.380,00	54.375.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.427.912.779,50	10.673.907.343,00	154.330.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	121.308.000,00	45.382.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.551.407.142,00	14.935.336.977,00	267.342.300,00	259.685.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.551.407.142,00	14.935.336.977,00	267.342.300,00	259.685.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.976.597.367,00	5.640.081.039,00	267.342.300,00	259.685.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.326.000,00	47.677.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.370.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.590.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	18.366.000,00	18.287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.274.000,00	84.553.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	86.274.000,00	84.553.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.405.625,00	325.749.236,00	147.885.900,00	140.701.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.962.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	147.885.900,00	140.701.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	38.530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.109.625,00	75.106.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.856.000,00	83.710.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	354.720.000,00	354.578.400,00	69.469.000,00	69.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.720.000,00	354.578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	69.469.000,00	69.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.895.600,00	423.930.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.107.200,00	122.318.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.788.400,00	301.612.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.350.000,00	135.896.055,00	49.987.400,00	49.902.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion	113.210.000,00	102.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	49.987.400,00	49.902.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.140.000,00	33.000.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	218.295.000,00	217.371.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	218.295.000,00	217.371.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	142.255.000,00	141.544.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah K	76.040.000,00	75.827.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	247.357.000,00	244.392.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota	247.357.000,00	244.392.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	247.357.000,00	244.392.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	173.292.250,00	157.049.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabu	173.292.250,00	157.049.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Kop	173.292.250,00	157.049.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	829.699.200,00	828.530.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	829.699.200,00	828.530.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	224.699.200,00	223.530.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	807.534.900,00	784.680.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, P	807.534.900,00	784.680.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	160.735.000,00	160.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	75.000.000,00	74.118.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	139.500.000,00	138.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	122.799.900,00	115.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM da	259.500.000,00	246.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	20.000.000,00	19.999.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.19.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	7.278.631.425,00	7.043.231.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.582.076.395,50	13.391.356.502,00	3.311.338.331,00	3.176.331.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.582.076.395,50	13.391.356.502,00	3.311.338.331,00	3.176.331.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.550.664.761,50	11.452.036.859,00	3.311.338.331,00	3.176.331.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.186.505,00	48.472.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.499.882,00	18.946.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.879,00	8.039.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	21.686.744,00	21.486.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.417.000,00	23.494.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.417.000,00	23.494.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.892.000,00	23.948.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.892.000,00	23.948.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.055.030,50	506.683.312,00	3.041.190.821,00	2.921.364.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.629.087,00	63.620.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.708.000,00	2.576.600,00	3.041.190.821,00	2.921.364.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.075.516,00	70.242.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.999.182,00	123.053.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.499.745,50	61.910.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.155.000,00	46.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.988.500,00	98.984.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.161.000,00	2.118.300,00	270.147.510,00	254.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.161.000,00	2.118.300,00	270.147.510,00	254.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.032.018,00	995.024.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	683.630.418,00	431.742.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.401.600,00	563.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766.393.200,00	582.189.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	325.990.000,00	300.116.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.216.000,00	185.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.187.200,00	96.178.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	239.665.750,00	207.723.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Dae	104.525.750,00	96.066.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman M	30.452.250,00	29.922.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	40.153.000,00	32.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berl	33.920.500,00	33.636.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	135.140.000,00	111.657.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	135.140.000,00	111.657.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	395.431.400,00	392.654.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	395.431.400,00	392.654.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	395.431.400,00	392.654.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	76.883.125,00	76.624.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terinte	307.263.250,00	303.764.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	55.790.850,00	55.177.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	689.646.300,00	645.647.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	206.928.959,00	199.306.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	206.928.959,00	199.306.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegia	80.000.000,00	78.852.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	42.189.959,00	37.712.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	84.739.000,00	82.741.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	59.802.000,00	58.420.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	59.802.000,00	58.420.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Pe	59.802.000,00	58.420.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	92.791.629.644,00	83.032.965.922,00	25.540.642.408,00	19.704.556.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	92.791.629.644,00	83.032.965.922,00	25.540.642.408,00	19.704.556.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.286.982.183,00	13.039.945.060,00	220.584.408,00	217.103.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.587.500,00	50.464.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.738.000,00	24.093.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.940.000,00	8.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	24.909.500,00	18.368.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.728.750,00	51.901.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.728.750,00	51.901.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.386.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.386.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	523.215.385,00	503.925.322,00	200.052.960,00	200.009.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.999.900,00	29.842.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	200.052.960,00	200.009.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.935.400,00	44.906.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.999.810,00	98.357.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	158.282.275,00	154.885.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.959.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	36.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.998.000,00	99.518.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	20.531.448,00	17.093.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	20.531.448,00	17.093.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.602.620.472,00	3.395.975.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.703.756.472,00	946.093.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.898.864.000,00	2.449.882.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.914.000,00	449.365.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion	328.560.000,00	269.250.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.104.000,00	164.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	904.676.500,00	678.547.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelo	667.150.500,00	498.619.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausa	543.713.000,00	412.217.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	107.530.500,00	70.958.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pe	15.907.000,00	15.442.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.526.000,00	179.928.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupa	237.526.000,00	179.928.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	73.418.198.811,00	66.233.944.500,00	25.320.058.000,00	19.487.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewena	19.305.229.023,00	17.873.999.983,00	24.974.440.500,00	19.348.928.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pema	19.305.229.023,00	17.873.999.983,00	24.974.440.500,00	19.348.928.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.011.860.399,00	10.585.496.403,00	290.147.500,00	138.524.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12.405.150.399,00	10.023.171.622,00	190.350.000,00	38.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah	606.710.000,00	562.324.781,00	99.797.500,00	99.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.117.181.250,00	9.394.894.192,00	55.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	51.103.000,00	51.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	11.066.078.250,00	9.343.791.192,00	55.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	28.586.098.300,00	27.048.384.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	28.481.098.300,00	27.048.384.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.397.829.839,00	1.331.168.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	154.292.960,00	91.330.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1.102.581.879,00	1.098.883.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	140.955.000,00	140.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	31.200.000,00	31.143.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2.500.000.000,00	2.487.127.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	214.081.020,00	213.234.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	236.493.530,00	150.222.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepr	199.997.600,00	198.800.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	594.775.805,30	271.050.074,00	171.233.558,00	151.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	594.775.805,30	271.050.074,00	171.233.558,00	151.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	594.775.805,30	271.050.074,00	171.233.558,00	151.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	594.775.805,30	271.050.074,00	171.233.558,00	151.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	79.714.305,30	22.319.158,00	171.233.558,00	151.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500,00	159.448.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	154.814.000,00	80.256.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.246.227.661,00	780.532.187,00	306.502.447,00	244.792.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	1.246.227.661,00	780.532.187,00	306.502.447,00	244.792.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.246.227.661,00	780.532.187,00	306.502.447,00	244.792.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.246.227.661,00	780.532.187,00	306.502.447,00	244.792.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Da	380.678.500,00	136.269.104,00	8.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Nc	825.480.200,50	616.986.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.0.00.18.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.068.960,50	27.276.171,00	297.502.947,00	244.792.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.819.156.325,00	5.717.155.904,00	428.985.000,00	427.492.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.819.156.325,00	5.717.155.904,00	428.985.000,00	427.492.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.004.142.825,00	4.913.782.733,00	199.100.000,00	197.932.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	171.004.000,00	166.880.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	171.004.000,00	166.880.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.833.138.825,00	4.746.902.333,00	199.100.000,00	197.932.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4.047.263.825,00	3.972.180.633,00	199.100.000,00	197.932.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan	785.875.000,00	774.721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	343.150.000,00	342.635.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	343.150.000,00	342.635.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	343.150.000,00	342.635.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	286.397.500,00	278.225.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	286.397.500,00	278.225.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	286.397.500,00	278.225.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	185.466.000,00	182.512.000,00	229.885.000,00	229.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	185.466.000,00	182.512.000,00	229.885.000,00	229.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	185.466.000,00	182.512.000,00	229.885.000,00	229.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.023.150.551,00	9.516.829.330,00	836.646.300,00	804.578.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.023.150.551,00	9.516.829.330,00	836.646.300,00	804.578.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.256.746.837,00	7.976.796.283,00	571.090.789,00	560.065.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.983.227,50	57.789.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.866.915,00	49.015.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.008.302,50	4.982.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	9.108.010,00	3.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.500.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.500.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.332.433,50	433.996.185,00	76.678.689,00	76.588.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.994.835,00	59.767.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.955.424,00	9.945.600,00	76.678.689,00	76.588.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.503,00	47.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.907.891,50	72.532.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.972.750,00	38.209.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	23.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.055.030,00	44.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.454.000,00	99.906.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	494.412.100,00	483.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	482.000.000,00	471.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	12.412.100,00	12.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.591.850,00	546.667.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.170.650,00	186.593.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.421.200,00	360.074.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.745.000,00	434.418.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	243.410.000,00	150.419.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.925.000,00	260.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.410.000,00	23.474.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.766.403.714,00	1.540.033.047,00	265.555.511,00	244.512.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.562.054,00	189.903.261,00	181.263.460,00	180.754.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	31.021.000,00	30.220.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	24.477.828,00	12.949.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	165.063.226,00	146.733.024,00	181.263.460,00	180.754.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.545.841.660,00	1.350.129.786,00	84.292.051,00	63.758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	557.592.777,00	393.578.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kew	942.921.883,00	941.369.060,00	84.292.051,00	63.758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	45.327.000,00	15.182.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	370.823.593,00	299.830.386,00	52.978.025,00	27.875.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	370.823.593,00	299.830.386,00	52.978.025,00	27.875.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	370.823.593,00	299.830.386,00	52.978.025,00	27.875.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	115.265.432,00	83.046.174,00	52.978.025,00	27.875.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	115.265.432,00	83.046.174,00	52.978.025,00	27.875.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	255.558.161,00	216.784.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	116.629.341,00	96.429.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.22.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	138.928.820,00	120.354.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	135.239.319.659,00	116.082.867.734,00	4.602.190.249,00	4.308.261.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.956.557.534,00	14.146.539.031,00	240.549.684,00	232.992.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000		Dinas Perikanan	15.956.557.534,00	14.146.539.031,00	240.549.684,00	232.992.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.921.263.110,00	8.571.099.422,00	165.941.684,00	160.455.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.412.000,00	25.662.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.613.000,00	22.020.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	9.024.000,00	3.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.371.000,00	52.225.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.371.000,00	52.225.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.800.000,00	56.803.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.800.000,00	56.803.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.255.886,00	576.760.032,00	159.028.521,00	153.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.724.080,00	58.691.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	159.028.521,00	153.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.245.105,00	45.350.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.819.780,00	90.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.555.852,00	35.921.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.780.369,00	31.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.111.000,00	163.423.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	109.659.700,00	109.634.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	6.913.163,00	6.859.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	6.913.163,00	6.859.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.845.121,00	940.988.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.960.321,00	262.256.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	794.884.800,00	678.731.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.698.000,00	397.537.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	330.590.000,00	304.910.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.978.000,00	69.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.130.000,00	23.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.721.105.175,00	2.574.231.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	2.572.710.125,00	2.427.947.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	67.852.500,00	62.456.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.504.857.625,00	2.365.491.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	148.395.050,00	146.283.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	105.856.050,00	105.404.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	42.539.000,00	40.879.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.050.669.806,00	1.780.967.584,00	47.508.000,00	46.019.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	506.909.000,00	495.270.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	499.824.000,00	488.185.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta P	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.543.760.806,00	1.285.697.034,00	47.508.000,00	46.019.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.414.857.806,00	1.177.954.884,00	47.508.000,00	46.019.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	128.903.000,00	107.742.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	360.784.493,00	342.220.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lai	360.784.493,00	342.220.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	33.926.000,00	25.450.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai ke	18.319.000,00	17.010.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabup	308.539.493,00	299.758.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	902.734.950,00	878.020.556,00	27.100.000,00	26.516.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	47.268.000,00	43.181.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Da	47.268.000,00	43.181.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten,	855.466.950,00	834.839.432,00	27.100.000,00	26.516.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabup	276.791.000,00	267.382.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.23.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabup	578.675.950,00	567.457.276,00	27.100.000,00	26.516.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.379.690.700,00	3.309.311.868,00	200.000.000,00	199.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	3.379.690.700,00	3.309.311.868,00	200.000.000,00	199.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.107.555.000,00	1.095.099.272,00	200.000.000,00	199.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.107.555.000,00	1.095.099.272,00	200.000.000,00	199.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.107.555.000,00	1.095.099.272,00	200.000.000,00	199.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	123.364.900,00	119.108.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	123.364.900,00	119.108.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	123.364.900,00	119.108.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	94.625.655.694,00	80.823.624.531,00	2.952.451.250,00	2.819.694.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	52.036.660.957,00	42.293.473.856,00	476.082.479,00	454.186.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.114.694.007,50	26.493.166.212,00	238.282.479,00	220.578.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.101.230,33	98.611.385,00	54.312.300,00	47.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.194.347,00	45.229.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.904.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	33.906.883,33	33.477.496,00	54.312.300,00	47.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.191.250,00	88.051.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	88.191.250,00	88.051.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.775.267,15	368.736.671,00	183.970.179,00	173.478.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.035.704,00	25.211.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	182.305.179,00	173.478.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.918.025,00	49.045.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.123.788,99	89.519.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.359.595,16	42.272.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	38.328.104,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.988.050,00	24.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.022.000,00	138.107.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.055.607.367,00	3.636.982.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.985.145,00	225.682.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.802.622.222,00	3.411.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.661.000,00	875.630.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	551.880.000,00	527.825.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.981.000,00	298.196.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.800.000,00	49.608.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.140.037.916,00	10.901.106.677,00	37.800.000,00	35.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	9.545.964.376,00	7.637.669.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spe	4.538.536.676,00	3.418.860.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.095.810.600,00	458.876.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	38.686.000,00	20.533.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	3.712.000.000,00	3.586.901.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	160.931.100,00	152.498.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	17.565.000,00	15.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	17.565.000,00	15.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Ka	3.576.508.540,00	3.248.237.967,00	37.800.000,00	35.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.157.848.000,00	2.968.823.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	418.660.540,00	279.414.277,00	37.800.000,00	35.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.513.169.050,00	1.291.347.356,00	200.000.000,00	198.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.513.169.050,00	1.291.347.356,00	200.000.000,00	198.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	20.540.000,00	6.298.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	156.936.610,00	154.254.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	35.429.500,00	25.274.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.297.423.940,00	1.105.069.900,00	200.000.000,00	198.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.839.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.181.541.500,00	855.676.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	354.658.500,00	269.132.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	110.999.000,00	76.417.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.659.500,00	192.715.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.609.000,00	285.272.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	395.609.000,00	285.272.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	431.274.000,00	301.272.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	46.362.500,00	45.376.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	162.226.500,00	133.624.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, da	222.685.000,00	122.271.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	116.512.500,00	56.312.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	116.512.500,00	56.312.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebu	116.512.500,00	56.312.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.607.970.974,00	1.825.016.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	741.527.067,00	450.210.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	183.447.942,50	6.816.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	437.760.000,00	413.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000		Dinas Perkebunan	42.588.994.737,00	38.530.150.675,00	2.476.368.771,00	2.365.508.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.988.741.646,00	10.062.390.530,00	476.748.131,00	471.878.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.584.630,00	161.014.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.560.830,00	41.043.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.017.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	179.006.800,00	113.400.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.440.000,00	50.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.440.000,00	50.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.230.000,00	22.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.230.000,00	14.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.796.403,00	396.079.402,00	54.225.831,00	52.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.874.729,00	29.044.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	47.232.831,00	46.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.173.561,00	42.992.355,00	6.993.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.472.014,00	130.518.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.246.499,00	56.581.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.978.600,00	3.978.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.891.000,00	1.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.480.000,00	91.223.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.360.000,00	680.000,00	39.847.500,00	39.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.360.000,00	680.000,00	39.847.500,00	39.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.449.667,00	1.178.982.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.339.000,00	194.932.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.290.110.667,00	984.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.394.000,00	376.364.786,00	382.674.800,00	379.753.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	339.455.000,00	327.539.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	680.000,00	680.000,00	382.674.800,00	379.753.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.259.000,00	48.144.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.756.620.892,00	5.737.656.310,00	9.945.600,00	9.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.984.947.750,00	2.974.209.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spe	903.916.250,00	94.739.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.081.031.500,00	2.879.470.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kal	2.771.673.142,00	2.763.446.753,00	9.945.600,00	9.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4.854.900,00	4.854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	2.766.818.242,00	2.758.591.853,00	9.945.600,00	9.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.370.278.291,00	8.214.632.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	82.999.500,00	82.993.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	82.999.500,00	82.993.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.287.278.791,00	8.131.639.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	37.235.500,00	37.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.960.699.529,00	7.811.050.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	289.343.762,00	283.353.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	11.481.689.207,00	11.141.342.420,00	1.989.675.040,00	1.883.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	11.481.689.207,00	11.141.342.420,00	1.989.675.040,00	1.883.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebu	98.347.649,00	97.945.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, da	11.383.341.558,00	11.043.397.403,00	1.989.675.040,00	1.883.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.190.081.000,00	843.468.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.190.081.000,00	843.468.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.190.081.000,00	843.468.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.017.108.201,00	793.383.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.716.450.500,00	1.669.307.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	68.025.000,00	67.969.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.040.782.782,50	16.775.152.330,00	773.854.823,00	712.662.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.040.782.782,50	16.775.152.330,00	773.854.823,00	712.662.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.757.985.324,50	11.791.996.591,00	152.742.373,00	147.222.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.637.189,50	74.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.079.000,50	46.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.492.189,00	3.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.066.000,00	25.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.110.500,00	96.151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.680.000,00	52.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.430.500,00	43.471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.183.657,00	396.305.150,00	120.706.173,00	117.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.983.187,00	28.221.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	120.706.173,00	117.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.908.032,00	59.732.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.957.221,00	96.882.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.172.217,00	44.735.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.050.000,00	3.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.113.000,00	162.862.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	24.628.680,00	22.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	24.628.680,00	22.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.557.569.349,00	2.195.571.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.110.949,00	397.161.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.069.458.400,00	1.798.410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.401.500,00	234.001.186,00	7.407.520,00	7.407.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	316.860.000,00	201.924.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	7.407.520,00	7.407.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.541.500,00	32.076.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	350.949.378,00	184.183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	69.851.000,00	15.674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Sw	69.851.000,00	15.674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	35.667.000,00	6.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	35.667.000,00	6.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	245.431.378,00	161.666.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bah	245.431.378,00	161.666.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	150.131.000,00	125.735.428,00	621.112.450,00	565.440.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	150.131.000,00	125.735.428,00	621.112.450,00	565.440.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	150.131.000,00	125.735.428,00	621.112.450,00	565.440.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	884.861.000,00	615.248.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/	24.491.000,00	8.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Ag	24.491.000,00	8.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupa	835.894.000,00	596.662.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distri	30.862.000,00	11.097.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko	805.032.000,00	585.564.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.476.000,00	10.483.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.476.000,00	10.483.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Un	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	935.363.500,00	557.185.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	3.673.267.240,00	3.332.661.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	25.348.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	198.404.040,00	118.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	198.404.040,00	118.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	144.498.040,00	89.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	53.906.000,00	29.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	64.473.300,00	31.356.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	64.473.300,00	31.356.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	64.473.300,00	31.356.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.080.594.362,50	874.522.932,00	435.334.492,00	343.516.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.080.594.362,50	874.522.932,00	435.334.492,00	343.516.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	950.073.362,50	827.327.532,00	435.334.492,00	343.516.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	950.073.362,50	827.327.532,00	435.334.492,00	343.516.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	102.771.042,00	30.864.920,00	435.334.492,00	343.516.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	847.302.320,50	796.462.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	27.517.000,00	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	27.517.000,00	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang me	27.517.000,00	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	103.004.000,00	32.460.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Ka	103.004.000,00	32.460.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.26.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lai	103.004.000,00	32.460.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	156.038.586,00	153.717.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	156.038.586,00	153.717.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	156.038.586,00	153.717.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	156.038.586,00	153.717.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daera	106.968.100,00	106.754.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.0.00.5.06.10.0000	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	49.070.486,00	46.962.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	228.643.253.552,12	198.583.019.578,00	31.063.854.733,88	29.675.764.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	132.544.645.494,72	118.807.518.105,00	6.789.589.560,28	6.375.782.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000		Sekretariat Daerah	132.544.645.494,72	118.807.518.105,00	6.789.589.560,28	6.375.782.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.764.845.284,72	94.991.441.607,00	6.789.589.560,28	6.375.782.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.478.894,50	68.228.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.844.894,50	34.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.070.000,00	28.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.564.000,00	5.414.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	632.361.992,00	604.614.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	581.113.992,00	579.534.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.248.000,00	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.004.212.601,00	648.770.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	191.170.000,00	179.228.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.927.500,00	27.862.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	670.622.000,00	441.679.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.493.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.335.561.434,68	14.295.638.554,00	4.126.326.541,78	3.945.957.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	449.888.373,00	449.888.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.801.870.200,00	1.730.512.788,00	2.482.741.171,78	2.404.813.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.608.875,00	70.512.445,00	1.393.585.370,00	1.292.257.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	795.926.743,90	743.949.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.393.342,78	747.723.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	189.043.800,00	173.599.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.347.867.505,00	6.829.351.735,00	250.000.000,00	248.886.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.839.282.595,00	3.510.100.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.950.469.373,35	6.817.570.246,00	910.371.348,50	757.263.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.949.789.373,35	6.816.890.246,00	240.600.507,00	199.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	669.770.841,50	557.645.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.529.176.208,00	15.101.009.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.357.739.808,00	4.656.156.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.171.436.400,00	10.444.852.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.574.310.760,00	11.756.205.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion	5.833.214.900,00	5.208.191.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.822.905.860,00	4.718.413.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.918.190.000,00	1.829.601.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.916.868.640,00	1.634.612.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	357.788.640,00	146.267.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	751.480.000,00	689.355.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	799.000.000,00	798.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.082.650.278,00	6.947.737.491,00	1.752.891.670,00	1.672.561.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.741.990.328,00	3.721.391.690,00	1.369.827.620,00	1.296.670.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.902.715.000,00	1.852.040.063,00	303.035.000,00	295.873.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.437.944.950,00	1.374.305.738,00	80.029.050,00	80.017.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.535.905.702,50	1.380.869.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	450.704.550,00	391.759.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	305.748.000,00	290.111.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	602.058.792,50	544.960.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	177.394.360,00	154.038.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6.479.285.385,69	6.055.556.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.460.420.000,00	2.166.574.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.798.642.180,00	3.678.921.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220.223.205,69	210.060.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.770.488.235,00	22.117.218.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.526.472.727,00	1.183.731.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.241.808.580,00	975.582.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	148.230.351,00	111.568.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	136.433.796,00	96.580.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.036.689.941,00	20.086.001.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19.521.927.630,00	18.965.522.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	146.433.745,00	72.001.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.368.328.566,00	1.048.477.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	846.127.567,00	599.415.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	149.012.607,00	148.758.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	619.901.977,50	373.749.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	77.212.982,50	76.907.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	361.198.000,00	248.071.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	142.136.000,00	82.188.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	198.320.000,00	146.782.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	20.742.000,00	19.100.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.009.311.975,00	1.698.857.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	316.669.000,00	298.163.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.786.000,00	109.335.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	95.759.000,00	90.598.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	99.124.000,00	98.229.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	472.647.000,00	410.113.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	254.842.000,00	231.149.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	148.244.000,00	119.014.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	69.561.000,00	59.949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	589.159.975,00	470.030.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	302.621.475,00	260.374.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	189.864.500,00	162.992.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	96.674.000,00	46.663.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	630.836.000,00	520.549.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15.571.000,00	7.348.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	388.048.000,00	345.889.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.5.02.0.00.27.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	227.217.000,00	167.311.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	96.098.608.057,40	79.775.501.473,00	24.274.265.173,60	23.299.981.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000		Sekretariat DPRD	96.098.608.057,40	79.775.501.473,00	24.274.265.173,60	23.299.981.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.569.705.096,21	61.216.559.083,00	24.274.265.173,60	23.299.981.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.447.950,00	34.950.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.182.850,00	15.054.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.597.000,00	10.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	9.668.100,00	9.617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	372.443.500,00	299.235.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	372.443.500,00	299.235.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	844.559.960,00	707.671.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141.009.960,00	139.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.741.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	608.809.000,00	551.479.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.608.967.753,82	7.549.314.826,00	6.759.707.939,99	6.544.601.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	146.593.810,00	134.525.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.315.270,44	51.100.000,00	5.837.669.068,32	5.632.292.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.433.820,00	33.231.180,00	922.038.871,67	912.308.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.086.455,00	103.429.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	302.335.071,57	292.078.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.500.000,00	219.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.513.703.326,81	6.675.165.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.897.427,39	0,00	13.191.106.370,61	12.749.857.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.422.000,00	0,00	7.117.100.000,00	6.991.899.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.475.427,39	0,00	6.074.006.370,61	5.757.957.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.045.768.422,00	5.458.903.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.243.000,00	849.564.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.052.525.422,00	4.609.339.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.055.582.000,00	1.861.270.944,00	4.323.450.863,00	4.005.522.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	306.550.000,00	275.696.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	985.500.000,00	854.611.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	541.100.000,00	515.142.113,00	4.323.450.863,00	4.005.522.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.432.000,00	215.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.846.554.780,00	26.608.739.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.552.804.780,00	25.437.302.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.113.750.000,00	1.111.436.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	180.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	10.793.655.855,00	10.590.076.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8.189.176.375,00	8.012.839.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.604.479.480,00	2.577.237.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	29.528.902.961,19	18.558.942.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.030.026.525,00	485.536.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.965.226.525,00	485.536.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.260.530.713,00	2.147.239.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.080.686.654,00	609.272.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.080.686.654,00	396.293.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	650.435.125,00	305.640.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	650.435.125,00	97.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	798.287.155,00	738.570.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.585.007.300,00	3.245.556.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.222.672.000,00	1.159.753.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	576.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.366.335.300,00	1.095.802.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.284.876.169,19	1.126.474.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	112.300.000,00	8.729.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	6.172.576.169,19	1.117.745.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	10.301.932.600,00	8.571.492.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.256.092.600,00	5.021.765.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.045.840.000,00	3.549.726.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	106.538.019.166,19	87.801.333.247,83	2.224.906.541,00	2.174.574.056,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
5.01			PERENCANAAN	20.314.338.742,80	17.715.931.460,00	210.410.712,00	197.491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.314.338.742,80	17.715.931.460,00	210.410.712,00	197.491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.166.894.755,60	14.065.234.378,00	210.410.712,00	197.491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.885.566,00	24.261.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.153.436,00	21.231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.732.130,00	3.030.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.622.000,00	90.392.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	91.622.000,00	90.392.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.078.000,00	286.117.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.078.000,00	286.117.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.336.181,60	518.631.327,00	162.067.104,00	155.533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.409,00	28.019.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.322.000,00	4.322.000,00	162.067.104,00	155.533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.295,00	56.605.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.678.456,60	117.708.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.679.021,00	102.554.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.306.000,00	8.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.396.000,00	160.950.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.322.000,00	4.322.000,00	48.343.608,00	41.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.322.000,00	4.322.000,00	48.343.608,00	41.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.188.260,00	898.429.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.508.260,00	331.351.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.680.000,00	567.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.840.000,00	669.108.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	444.930.000,00	404.612.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.060.000,00	197.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.850.000,00	66.623.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.961.857.167,20	1.717.056.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.533.760.492,00	1.362.417.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.505.000,00	50.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan La	452.315.000,00	355.874.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	358.209.000,00	308.250.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko	672.731.492,00	647.787.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.943.050,00	56.402.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	27.661.000,00	19.120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	37.282.050,00	37.282.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.656.250,00	241.402.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.229.894,00	40.843.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	225.426.356,00	200.558.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	62.497.375,20	56.834.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	62.497.375,20	56.834.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.185.586.820,00	1.933.640.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	533.470.500,00	457.891.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,	98.978.000,00	85.516.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pem	69.109.000,00	54.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manus	136.935.250,00	105.426.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pem	228.448.250,00	212.477.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	230.235.000,00	196.409.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD	60.956.000,00	60.684.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	36.162.000,00	9.007.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD da	87.456.000,00	87.455.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	45.661.000,00	39.261.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.421.881.320,00	1.279.339.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	447.107.820,00	415.162.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	38.588.000,00	24.369.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infra	118.422.000,00	99.406.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	668.997.500,00	614.226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kew	148.766.000,00	126.174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	66.531.311.390,69	53.512.260.034,83	1.617.273.596,00	1.595.522.850,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	20.228.161.993,69	17.862.397.436,39	1.012.370.857,00	999.206.780,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.845.582.139,69	14.056.184.328,39	1.012.370.857,00	999.206.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.667.127,72	46.377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.667.332,72	36.845.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.795,00	9.531.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	122.582.000,00	111.620.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	122.582.000,00	111.620.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	298.226.000,00	249.951.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	153.386.000,00	151.085.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.840.000,00	98.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.141.352,00	766.123.051,00	876.253.257,00	864.523.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.417,00	29.946.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.008.000,00	13.293.538,00	876.253.257,00	864.523.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.995.070,00	52.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.005.636,00	285.343.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.355.029,00	71.974.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.340.200,00	37.013.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.437.000,00	276.213.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	136.117.600,00	134.682.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	136.117.600,00	134.682.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.057.790.432,00	879.968.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.132.032,00	339.314.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.658.400,00	540.654.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.628.609,92	812.215.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	45.490.000,00	44.462.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	439.540.000,00	286.271.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.433.049,92	419.609.357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.165.560,00	61.873.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.251.846.354,00	2.849.097.149,00	0,00	0,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	811.825.000,00	710.036.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	115.000.000,00	100.615.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	105.000.000,00	89.857.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang F	240.745.000,00	224.942.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daera	193.840.000,00	179.826.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	157.240.000,00	114.794.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.510.199.950,00	1.423.401.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96.702.000,00	61.929.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84.293.500,00	69.671.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pe	79.204.450,00	41.800.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	614.622.650,00	506.521.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.186.500,00	26.425.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	29.802.400,00	25.375.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan S	136.151.400,00	125.916.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69.666.000,00	69.258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	97.382.500,00	95.934.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	41.790.000,00	23.109.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Dae	43.279.000,00	38.206.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	39.910.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	58.179.500,00	45.431.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	64.274.450,00	56.863.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	94.778.104,00	60.989.533,00	0,00	0,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	94.778.104,00	60.989.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	220.420.650,00	148.148.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	160.143.000,00	90.861.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/K	60.277.650,00	57.287.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.130.733.500,00	957.115.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.130.733.500,00	957.115.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	104.978.400,00	90.330.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	150.080.000,00	139.051.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	71.126.000,00	65.284.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	161.478.700,00	123.314.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	57.287.400,00	38.961.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	46.630.200,00	36.133.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Baran	121.810.800,00	99.824.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36.609.000,00	29.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	163.647.000,00	126.351.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.45.0000	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	217.086.000,00	208.493.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	37.531.956.397,00	26.882.107.633,44	604.902.739,00	596.316.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.008.626.397,00	23.848.585.082,44	572.328.839,00	571.408.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.580.500,00	56.213.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.161.500,00	17.311.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.684.000,00	6.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	33.735.000,00	32.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	137.234.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	137.234.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.310.791,00	973.156.714,00	163.811.100,00	163.811.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	26.977.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.423.100,00	13.052.400,00	163.811.100,00	163.811.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	59.004.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.078.800,00	262.526.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	363.403.891,00	360.746.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.188.000,00	25.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.217.000,00	186.419.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.988.300,00	15.254.100,00	49.557.069,00	49.557.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.988.300,00	15.254.100,00	49.557.069,00	49.557.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.470.704.711,00	769.720.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.516.267,00	240.635.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.072.188.444,00	529.085.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.253.830,00	391.149.809,00	358.960.670,00	358.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	182.560.000,00	95.157.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	327.970.000,00	237.934.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.744.330,00	24.950.000,00	358.960.670,00	358.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.979.500,00	33.107.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.523.330.000,00	3.033.522.551,00	32.573.900,00	24.907.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.523.330.000,00	3.033.522.551,00	32.573.900,00	24.907.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	183.078.000,00	178.933.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	267.122.500,00	210.010.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	103.800.000,00	74.807.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	47.026.900,00	26.338.155,00	32.573.900,00	24.907.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	600.584.000,00	271.701.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	445.429.600,00	349.813.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas	371.304.500,00	220.917.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	818.478.500,00	532.337.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	315.995.000,00	174.652.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	362.410.000,00	357.883.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	261.136.000,00	210.933.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	269.497.000,00	95.022.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	361.103.000,00	223.847.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25.040.000,00	15.235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.46.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	91.325.000,00	91.087.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	18.504.775.054,00	15.636.018.587,00	396.566.112,00	381.560.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.504.775.054,00	15.636.018.587,00	396.566.112,00	381.560.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.979.864.879,00	10.230.649.951,00	396.566.112,00	381.560.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.676.000,00	11.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.008.000,00	5.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.968.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.700.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.282.500,00	42.729.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.282.500,00	42.729.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.541.000,00	154.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.536.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	118.005.000,00	105.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.638.507,00	585.452.716,00	156.617.892,00	143.160.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.023.558,00	30.012.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	156.617.892,00	143.160.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.009.930,00	59.665.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.001.799,00	199.566.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.040.020,00	106.456.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	39.657.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.883.200,00	109.454.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	65.048.220,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	65.048.220,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.730.200,00	589.352.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.329.000,00	147.993.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.401.200,00	441.359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.610.000,00	239.446.616,00	174.900.000,00	174.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	281.330.000,00	172.145.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.980.000,00	49.601.000,00	174.900.000,00	174.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.524.910.175,00	5.405.368.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	548.275.050,00	349.395.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	220.000.050,00	160.136.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	197.650.000,00	98.869.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	25.000.000,00	24.886.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	44.625.000,00	40.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.000.000,00	25.176.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	408.449.800,00	404.152.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	97.887.950,00	97.786.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.081.925,00	72.644.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	237.479.925,00	233.721.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.280.373.975,00	4.383.643.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3.205.712.628,00	2.514.061.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.039.122.847,00	903.813.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	741.663.900,00	706.391.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	148.999.700,00	138.018.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	144.874.900,00	121.358.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.811.350,00	268.177.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	51.421.500,00	49.038.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	25.120.000,00	22.833.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	58.991.850,00	50.274.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60.229.500,00	57.074.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.064.500,00	14.467.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	76.984.000,00	74.488.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.187.593.978,70	937.123.166,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.187.593.978,70	937.123.166,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	758.408.177,85	573.736.437,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	248.207.228,00	166.810.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	248.207.228,00	166.810.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	234.627.839,85	192.228.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	34.628.150,00	30.031.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	199.999.689,85	162.197.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	104.145.212,00	76.287.936,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	104.145.212,00	76.287.936,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	171.427.898,00	138.409.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	73.560.120,00	61.653.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	49.316.000,00	34.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	48.551.778,00	42.647.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	429.185.800,85	363.386.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	429.185.800,85	363.386.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	299.999.799,85	249.983.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.44.0000	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	129.186.001,00	113.403.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	30.031.219.164,00	24.716.274.635,00	376.910.140,00	372.622.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	30.031.219.164,00	24.716.274.635,00	376.910.140,00	372.622.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000		Inspektorat	30.031.219.164,00	24.716.274.635,00	376.910.140,00	372.622.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.524.638.714,00	20.680.553.623,00	376.910.140,00	372.622.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.771.300,00	69.786.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.601.450,00	31.982.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900,00	9.924.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	29.169.950,00	27.879.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.316.500,00	76.033.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.316.500,00	76.033.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.971.000,00	479.829.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.387.000,00	25.735.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	533.584.000,00	454.094.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	827.997.630,00	764.554.713,00	117.759.340,00	116.655.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.867.180,00	24.823.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	117.759.340,00	116.655.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.725.900,00	54.725.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.633.452,00	88.494.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	128.741.098,00	114.723.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.776.000,00	47.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.574.000,00	394.628.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.400.000,00	331.400.000,00	259.150.800,00	255.967.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.720.000,00	330.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	259.150.800,00	255.967.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.289.856,00	568.258.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.199.012,00	220.758.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	638.090.844,00	347.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.010.700.320,00	965.250.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Ke	488.910.000,00	445.264.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.624.000,00	197.207.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323.166.320,00	322.779.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.157.755.950,00	2.796.347.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.342.915.500,00	2.030.724.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	655.441.400,00	529.950.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	524.718.500,00	373.767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	310.357.000,00	290.671.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	91.866.950,00	85.992.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	558.352.750,00	553.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa	202.178.900,00	196.808.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	814.840.450,00	765.623.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	814.840.450,00	765.623.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.348.824.500,00	1.239.373.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	152.723.950,00	145.904.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	152.723.950,00	145.904.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.196.100.550,00	1.093.468.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	263.930.000,00	231.738.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	347.119.900,00	316.223.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	490.000.000,00	450.716.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.44.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	95.050.650,00	94.790.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	85.575.086.637,16	71.468.082.012,21	2.341.519.985,30	2.237.600.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	85.575.086.637,16	71.468.082.012,21	2.341.519.985,30	2.237.600.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000		Kecamatan Sekayu	10.179.487.031,00	9.077.556.188,00	145.402.017,00	142.812.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.484.351,00	8.830.918.188,00	71.616.534,00	70.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.706.000,00	14.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.761.000,00	4.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.945.000,00	9.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.775.000,00	32.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.775.000,00	32.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.477.042,00	235.079.309,00	42.637.764,00	41.741.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.205,00	9.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	42.637.764,00	41.741.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.909.071,00	19.905.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.023.558,00	39.632.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.039.208,00	33.983.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.680.000,00	25.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.153.000,00	67.856.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	28.978.770,00	28.854.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	28.978.770,00	28.854.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.536.800,00	722.538.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.317.600,00	74.689.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	762.219.200,00	647.848.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.118.880,00	182.547.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	120.760.000,00	96.902.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.045.880,00	68.045.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.313.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	297.167.250,00	152.326.000,00	73.785.483,00	72.216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	289.023.400,00	146.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	289.023.400,00	146.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	8.143.850,00	5.850.000,00	73.785.483,00	72.216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.143.850,00	5.850.000,00	73.785.483,00	72.216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.455.430,00	11.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.455.430,00	11.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	12.455.430,00	11.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	26.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.780.000,00	56.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.780.000,00	56.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	34.930.000,00	25.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	31.850.000,00	31.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001		Kelurahan Serasan Jaya	583.616.247,00	523.586.237,00	16.602.825,00	16.602.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.602.186,00	30.416.472,00	16.602.825,00	16.602.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	79.602.186,00	30.416.472,00	16.602.825,00	16.602.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.602.186,00	30.416.472,00	16.602.825,00	16.602.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	504.014.061,00	493.169.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	504.014.061,00	493.169.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	346.207.562,00	345.702.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.806.499,00	147.467.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002		Kelurahan Soak Baru	646.917.468,00	615.205.699,00	37.231.065,00	31.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.873.603,02	40.364.071,00	37.231.065,00	31.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	48.873.603,02	40.364.071,00	37.231.065,00	31.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.873.603,02	40.364.071,00	37.231.065,00	31.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	598.043.864,98	574.841.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	598.043.864,98	574.841.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.619.949,00	337.772.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250.423.915,98	237.069.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003		Kelurahan Balai Agung	250.984.974,00	225.375.150,00	418.537.799,00	407.960.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.798.807,00	50.074.602,00	66.459.879,00	66.377.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	56.798.807,00	50.074.602,00	66.459.879,00	66.377.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	56.798.807,00	50.074.602,00	66.459.879,00	66.377.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	194.186.167,00	175.300.548,00	352.077.920,00	341.583.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	194.186.167,00	175.300.548,00	352.077.920,00	341.583.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	350.000.000,00	341.583.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	194.186.167,00	175.300.548,00	2.077.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004		Kelurahan Kayuara	661.175.944,00	485.852.178,00	20.889.090,00	20.887.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.830.070,00	72.677.117,00	20.889.090,00	20.887.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	73.830.070,00	72.677.117,00	20.889.090,00	20.887.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.830.070,00	72.677.117,00	20.889.090,00	20.887.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	587.345.874,00	413.175.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	587.345.874,00	413.175.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	348.640.000,00	174.827.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.29.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	238.705.874,00	238.347.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000		Kecamatan Lais	4.646.172.996,20	4.124.938.679,00	79.464.988,80	79.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.272.944.656,20	3.826.945.889,00	79.464.988,80	79.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.575.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.575.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.023.082,20	168.372.103,00	49.405.656,00	49.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.021.636,00	10.021.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	49.405.656,00	49.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.197.452,00	17.197.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.653.996,00	30.213.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.964.998,20	17.961.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	24.977.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.485.000,00	15.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.020.000,00	51.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	30.059.332,80	30.058.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	30.059.332,80	30.058.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.273.203,00	229.615.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.957.203,00	57.569.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.316.000,00	172.045.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.824.800,00	196.617.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	123.500.000,00	120.030.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.904.800,00	74.904.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.420.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.869.340,00	280.027.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	316.685.000,00	274.133.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	316.685.000,00	274.133.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	10.934.340,00	5.894.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.934.340,00	5.894.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.388.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.388.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	11.388.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.421.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.421.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	11.088.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.30.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.333.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		Kecamatan Babat Toman	6.778.741.908,99	6.415.868.896,00	85.782.800,00	85.614.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.153.263.356,74	5.805.152.333,00	85.782.800,00	85.614.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.499.940,05	17.464.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.496.259,75	7.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.003.680,30	10.001.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.355.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.355.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.953.582,69	278.845.472,00	54.446.168,00	54.364.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.989.800,00	9.989.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	54.446.168,00	54.364.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.016.075,00	19.993.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.534.751,00	48.534.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.499.956,69	17.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	107.750.000,00	107.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.163.000,00	50.162.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	31.336.632,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	31.336.632,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.541.600,00	422.968.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.336.000,00	64.988.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.205.600,00	357.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	793.640.189,00	791.167.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	83.960.000,00	81.493.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	702.360.189,00	702.354.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	587.213.552,25	572.451.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	581.963.000,00	569.712.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	581.963.000,00	569.712.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	2.750.552,25	2.739.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.750.552,25	2.739.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001		Kelurahan Babat	736.697.187,96	266.143.158,00	21.326.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.620.515,96	16.611.748,00	21.326.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	89.620.515,96	16.611.748,00	21.326.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	89.620.515,96	16.611.748,00	21.326.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	647.076.672,00	249.531.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	647.076.672,00	249.531.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	399.057.775,00	249.531.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	248.018.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002		Kelurahan Mangun Jaya	728.756.805,51	290.937.463,00	37.980.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.811.157,13	41.398.224,00	37.980.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	54.811.157,13	41.398.224,00	37.980.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.811.157,13	41.398.224,00	37.980.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	673.945.648,38	249.539.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	673.945.648,38	249.539.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	399.027.409,00	249.539.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	274.918.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		Kecamatan Keluang	4.938.567.897,00	3.926.204.190,00	121.656.248,00	120.924.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.530.416.897,00	3.578.053.219,00	121.656.248,00	120.924.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.565.200,00	14.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.965.200,00	14.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.097.579,00	167.593.466,00	73.514.300,00	73.483.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.436,00	9.644.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.383.394,00	1.360.000,00	73.514.300,00	73.483.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.981.554,00	19.926.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.794,00	39.384.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	19.999.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	24.871.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.494.401,00	52.406.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	48.141.948,00	47.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	48.141.948,00	47.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.290.667,00	253.712.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	43.331.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.290.667,00	210.381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.940.000,00	161.185.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	78.840.000,00	74.870.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.130.000,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	391.296.000,00	336.886.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	371.918.000,00	332.008.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	371.918.000,00	332.008.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	16.978.000,00	2.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.978.000,00	2.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.400.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.400.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.325.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.325.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	5.325.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.060.000,00	5.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.060.000,00	5.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	7.060.000,00	5.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.470.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.470.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.470.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001		Kelurahan Keluang	835.785.161,00	727.184.646,00	5.999.550,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	143.929.709,00	56.955.881,00	5.999.550,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	143.929.709,00	56.955.881,00	5.999.550,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	143.929.709,00	56.955.881,00	5.999.550,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	691.855.452,00	670.228.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	691.855.452,00	670.228.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.593.088,00	346.068.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	344.262.364,00	324.160.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		Kecamatan Sanga Desa	5.471.891.665,00	4.715.330.080,00	94.853.940,00	94.527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.116.997.166,00	4.513.718.265,00	94.853.940,00	94.527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.995.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.820.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.175.000,00	8.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.600.000,00	15.440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.600.000,00	15.440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.155.400,00	312.277.500,00	75.313.500,00	75.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.530,00	9.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	75.313.500,00	75.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.724.040,00	13.635.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.485.330,00	38.328.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.138.500,00	26.841.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	24.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.500.000,00	123.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.639.000,00	74.201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	0,00	19.540.440,00	19.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	0,00	19.540.440,00	19.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.283.400,00	455.158.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.181.400,00	33.223.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.102.000,00	421.934.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.434.790,00	217.329.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	120.880.000,00	105.320.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.204.790,00	90.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.350.000,00	21.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	311.521.000,00	158.777.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	303.095.000,00	153.119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	303.095.000,00	153.119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	5.976.000,00	5.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.976.000,00	5.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.650.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.650.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	7.650.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.800.000,00	16.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.800.000,00	16.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	10.020.000,00	9.967.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.780.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.923.499,00	18.671.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.923.499,00	18.671.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	11.423.499,00	11.171.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001		Kelurahan Ngulak I	802.231.633,00	797.762.457,00	30.747.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.408.174,00	122.100.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	125.408.174,00	122.100.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.408.174,00	122.100.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	676.823.459,00	675.661.605,00	30.747.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	676.823.459,00	675.661.605,00	30.747.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	390.010.000,00	389.748.262,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	286.813.459,00	285.913.343,00	20.757.000,00	20.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002		Kelurahan Ngulak	831.947.894,00	798.809.895,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.607.825,00	122.468.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	125.607.825,00	122.468.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.607.825,00	122.468.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	706.340.069,00	676.341.870,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	706.340.069,00	676.341.870,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.910.000,00	347.698.652,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	358.430.069,00	328.643.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		Kecamatan Plakat Tinggi	4.074.776.538,00	3.029.280.026,00	218.894.065,00	205.453.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.678.526.942,90	2.800.985.626,00	218.894.065,00	205.453.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.601.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.800.500,00	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.800.500,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.460.000,00	34.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.460.000,00	34.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.473.089,20	155.197.705,00	39.157.248,00	38.738.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.225.449,00	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	39.157.248,00	38.738.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.993.556,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.316.872,00	14.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.877.212,00	27.686.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	24.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.755.000,20	9.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.305.000,00	72.315.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	13.022.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	13.022.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.837.958,00	230.489.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.001.536,00	46.924.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.836.422,00	183.564.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.420.000,00	99.192.626,00	166.714.348,00	166.714.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	118.260.000,00	93.742.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.870.000,00	0,00	166.714.348,00	166.714.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.290.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.249.595,10	228.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.549.095,10	228.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.549.095,10	228.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	7.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		Kecamatan Batanghari Leko	4.093.213.274,00	2.864.443.880,00	73.102.371,00	68.276.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.612.369.274,00	2.635.533.880,00	73.102.371,00	68.276.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.156.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.250.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.906.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.623.000,00	21.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.283.000,00	21.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.558.150,00	192.058.839,00	46.552.371,00	46.198.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.230.500,00	14.134.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.000,00	340.000,00	46.552.371,00	46.198.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.500,00	19.795.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.150,00	19.963.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.493.000,00	16.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.500.000,00	31.950.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.990.000,00	24.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.006.000,00	64.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.000,00	340.000,00	26.550.000,00	22.077.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	340.000,00	340.000,00	26.550.000,00	22.077.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.202.167,00	235.554.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.429.500,00	65.376.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.772.667,00	170.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.530.000,00	151.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	131.000.000,00	80.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.930.000,00	55.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	455.942.000,00	216.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	449.177.000,00	216.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	449.177.000,00	216.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.206.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.206.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	7.206.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.856.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.856.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	5.856.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.840.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.840.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.240.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		Kecamatan Sungai Keruh	3.910.791.179,00	3.117.205.747,00	71.298.830,00	71.298.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.485.416.179,00	2.972.911.913,00	71.298.830,00	71.298.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.630.000,00	8.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.524.000,00	6.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.745.214.507,00	2.290.379.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.745.214.507,00	2.290.379.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.708.750,00	37.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.708.750,00	37.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.349.885,00	201.657.470,00	52.068.830,00	52.068.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.081.100,00	4.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.000,00	340.000,00	52.068.830,00	52.068.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.229.600,00	8.871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.934.085,00	24.934.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.489.850,00	16.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.600.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.250.000,00	45.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.425.250,00	75.526.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.000,00	340.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	340.000,00	340.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.711.037,00	243.797.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.293.437,00	91.354.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.417.600,00	152.443.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.462.000,00	190.779.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	120.760.000,00	106.157.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.722.000,00	74.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.980.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	418.675.000,00	139.353.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.310.000,00	130.988.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.310.000,00	130.988.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.700.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.700.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	4.180.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.520.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		Kecamatan Sungai Lilin	5.502.630.377,00	4.592.247.682,00	43.954.446,00	43.889.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.084.345.377,00	4.205.467.682,00	43.954.446,00	43.889.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.130.285,00	245.075.422,00	43.954.446,00	43.889.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.133.744,00	11.113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	43.954.446,00	43.889.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.279.052,00	16.264.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.774.489,00	33.017.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.221.000,00	13.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.630.000,00	72.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.732.000,00	97.421.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.119.600,00	350.603.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.586.000,00	58.766.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.533.600,00	291.836.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.659.638,00	213.920.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	122.260.000,00	100.711.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.539.638,00	97.348.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	406.945.000,00	380.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.945.000,00	380.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.945.000,00	380.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.340.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.340.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	5.040.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.300.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001		Kelurahan Sungai Lilin	822.057.211,00	733.221.953,00	10.957.143,00	10.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.057.211,00	106.855.613,00	10.957.143,00	10.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	122.057.211,00	106.855.613,00	10.957.143,00	10.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.057.211,00	106.855.613,00	10.957.143,00	10.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	626.366.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	626.366.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	342.986.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	283.380.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002		Kelurahan Sungai Lilin Jaya	811.482.274,00	709.051.343,00	27.436.980,00	27.405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	111.482.274,00	91.490.291,00	27.436.980,00	27.405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	111.482.274,00	91.490.291,00	27.436.980,00	27.405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.482.274,00	91.490.291,00	27.436.980,00	27.405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	617.561.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	617.561.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	345.298.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	272.262.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		Kecamatan Bayung Lencir	4.986.092.338,00	4.445.510.559,00	75.879.711,00	74.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.460.431.474,00	3.921.305.309,00	75.879.711,00	74.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.858.000,00	16.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.018.000,00	7.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.460.000,00	40.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.460.000,00	40.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.383.609,00	190.200.315,00	46.796.379,00	45.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.936.150,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	46.796.379,00	45.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.001.090,00	19.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.980.999,00	19.980.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.495.370,40	17.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.969.999,60	73.534.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	29.083.332,00	28.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	29.083.332,00	28.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.093.800,00	347.607.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.115.000,00	82.972.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.978.800,00	264.634.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.854.000,00	184.363.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	85.460.000,00	85.313.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.774.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.620.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	496.438.364,00	496.064.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	479.347.000,00	479.335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	479.347.000,00	479.335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	14.591.364,00	14.328.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.591.364,00	14.328.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	4.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.740.000,00	11.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.740.000,00	11.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	11.740.000,00	11.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.982.500,00	12.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.982.500,00	12.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	4.700.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.282.500,00	8.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001		Kelurahan Bayung Lencir	800.058.224,00	778.701.876,00	23.783.859,00	23.763.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.325.253,00	107.499.891,00	16.502.259,00	16.502.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	108.325.253,00	107.499.891,00	16.502.259,00	16.502.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	108.325.253,00	107.499.891,00	16.502.259,00	16.502.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	691.732.971,00	671.201.985,00	7.281.600,00	7.261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	691.732.971,00	671.201.985,00	7.281.600,00	7.261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	341.755.919,00	331.581.000,00	7.281.600,00	7.261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.977.052,00	339.620.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002		Kelurahan Bayung Lencir Indah	803.792.321,00	791.147.734,00	25.599.264,00	25.599.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	107.679.895,00	106.969.771,00	17.440.764,00	17.440.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	107.679.895,00	106.969.771,00	17.440.764,00	17.440.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	107.679.895,00	106.969.771,00	17.440.764,00	17.440.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	696.112.426,00	684.177.963,00	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	696.112.426,00	684.177.963,00	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	341.835.976,00	339.686.213,00	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	354.276.450,00	344.491.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000		Kecamatan Lalan	4.639.693.888,00	3.229.161.714,00	123.198.100,00	122.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.073.637.688,00	2.977.528.214,00	123.198.100,00	122.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.978.000,00	18.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.100.000,00	5.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.878.000,00	12.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.638.000,00	55.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.582.000,00	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.056.000,00	37.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.853.920,50	321.767.050,00	74.074.100,00	73.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.500,00	9.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	74.074.100,00	73.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.093.900,00	17.043.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.967.020,00	39.704.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000,00	17.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	36.100.000,00	24.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.714.500,50	122.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.479.000,00	90.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	49.124.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	49.124.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.910.400,50	117.085.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.630.167,00	19.995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.280.233,50	97.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.733.000,00	61.909.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	36.920.000,00	36.919.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	531.316.200,00	217.653.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.436.200,00	200.403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.436.200,00	200.403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	17.380.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.380.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.850.000,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.850.000,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	10.850.000,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.260.000,00	10.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.260.000,00	10.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	10.260.000,00	10.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.630.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.630.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	7.160.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.39.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.470.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000		Kecamatan Tungkal Jaya	4.865.375.612,00	4.078.820.880,21	130.426.887,00	128.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.485.909.612,00	3.711.455.880,21	130.426.887,00	128.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.495.047,00	3.485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.547.750,00	1.539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.947.297,00	1.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.900.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.670.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.230.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.928.560,00	240.352.000,00	87.540.927,00	86.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.925.065,00	9.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	87.540.927,00	86.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.992.545,00	17.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.875.678,00	24.783.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.292.272,00	14.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.750.000,00	60.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.413.000,00	112.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	42.885.960,00	42.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	42.885.960,00	42.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.566.400,00	220.642.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.652.000,00	107.134.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.914.400,00	113.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.550.000,00	751.343.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	78.840.000,00	65.347.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000,00	679.295.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	335.226.000,00	324.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	333.076.000,00	324.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	333.076.000,00	324.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.240.000,00	42.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.240.000,00	42.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	12.540.000,00	11.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.40.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	31.700.000,00	31.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000		Kecamatan Lawang Wetan	4.608.031.213,00	4.191.558.479,00	134.264.459,00	134.101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.192.971.213,00	3.805.360.479,00	134.264.459,00	134.101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.069.715,00	264.073.265,00	46.494.459,00	46.331.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.696.998,00	6.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	46.494.459,00	46.331.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.089.356,00	12.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.016.661,00	45.812.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.698.400,00	21.545.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.680.000,00	25.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.880.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.328.300,00	130.987.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	87.770.000,00	87.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.105.400,00	363.979.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.375.000,00	70.292.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.730.400,00	293.686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.193.950,00	191.174.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	118.260.000,00	112.548.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.593.950,00	66.645.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.340.000,00	11.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	384.490.000,00	361.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	378.580.000,00	361.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	378.580.000,00	361.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.400.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.400.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	8.400.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.400.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.400.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	8.400.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.770.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.770.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	7.770.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000		Kecamatan Babat Supat	4.069.395.378,50	3.199.030.461,00	147.906.910,50	147.649.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.543.730.678,50	2.783.724.661,00	147.906.910,50	147.649.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.358.974,00	5.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.858.974,00	5.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.762.000,00	15.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.762.000,00	15.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.046.561,00	197.112.775,00	99.206.910,50	98.949.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.927,00	9.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	99.206.910,50	98.949.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.994.874,00	19.994.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.471.400,00	24.471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.021.860,00	5.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.785.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.576.500,00	90.055.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.126.943,00	287.298.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.616.499,00	112.021.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.510.444,00	175.277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.222.000,00	199.444.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	78.840.000,00	48.866.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.792.000,00	148.777.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.590.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	501.151.200,00	403.605.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	465.577.000,00	384.445.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	465.577.000,00	384.445.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	33.099.200,00	18.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.099.200,00	18.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.475.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.475.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.880.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.880.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	6.880.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.873.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.873.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	3.873.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.760.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.760.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	6.880.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.42.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.880.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000		Kecamatan Jirak Jaya	3.494.721.997,00	2.717.944.762,00	116.677.226,00	115.123.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.980.321.497,00	2.313.453.762,00	116.677.226,00	115.123.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.845.000,00	48.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.845.000,00	48.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.125.200,00	239.305.492,00	46.343.606,00	45.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.200,00	9.558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	680.000,00	46.343.606,00	45.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.500,00	19.960.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.348.800,00	33.348.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.137.700,00	15.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.500.000,00	32.400.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.462.000,00	103.822.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	70.333.620,00	69.280.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	70.333.620,00	69.280.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.069.689,00	238.629.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.460.000,00	39.699.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.609.689,00	198.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.440.000,00	42.286.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	42.040.000,00	31.990.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.400.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	473.930.500,00	366.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	461.925.000,00	360.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	461.925.000,00	360.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah y	9.515.500,00	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.515.500,00	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.490.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.490.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.240.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.240.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu	15.240.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.070.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.070.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	11.070.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.160.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.160.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	7.080.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.43.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.080.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.225.378.163,00	14.995.372.510,00	213.857.000,00	212.152.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.225.378.163,00	14.995.372.510,00	213.857.000,00	212.152.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.225.378.163,00	14.995.372.510,00	213.857.000,00	212.152.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.683.719.963,00	6.682.786.607,00	213.857.000,00	212.152.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.672.000,00	40.110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.568.000,00	35.556.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.104.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.902.500,00	36.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.902.500,00	36.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.355.000,00	75.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.125.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.706.524,00	489.902.623,00	132.455.000,00	130.925.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.980.300,00	36.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	132.455.000,00	130.925.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.929.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.140.624,00	162.996.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.935.000,00	56.280.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.194.600,00	17.069.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.456.000,00	166.651.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	81.402.000,00	81.226.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	81.402.000,00	81.226.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.085.800,00	360.543.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.876.200,00	96.193.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.209.600,00	264.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.757.320,00	435.855.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasior	294.165.000,00	269.263.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.952.320,00	152.078.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000,00	14.513.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter K	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Per	1.630.010.270,00	1.621.717.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Per	98.731.900,00	93.481.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Nega	13.475.000,00	12.874.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKA	6.002.762.000,00	5.980.019.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	6.002.762.000,00	5.980.019.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokras	5.561.440.000,00	5.561.439.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fa	88.222.000,00	87.776.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, F	102.755.000,00	86.760.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, F	250.345.000,00	244.043.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71.504.000,00	68.667.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	71.504.000,00	68.667.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi S	71.504.000,00	68.667.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	381.819.890,00	243.381.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan B	381.819.890,00	243.381.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Per	381.819.890,00	243.381.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS	343.355.140,00	292.443.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	343.355.140,00	292.443.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	37.859.840,00	37.540.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing	65.312.000,00	63.040.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	95.686.000,00	88.658.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	1.05.8.01.0.00.06.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	144.497.300,00	103.203.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	2.925.697.036.935,88	2.597.270.659.087,33	838.048.630.214,17	742.977.252.064,46	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CALK	2025 audited	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih awal**	**5.2.1**	**40.017.909.259,01**	**119.544.525.633,58**
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.2	39.964.530.163,01	131.728.424.206,58
3	Subtotal (1-2)		53.379.096,00	(12.183.898.573,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA/SILPA)	5.2.3	120.215.662.518,73	50.056.371.759,01
5	Subtotal (3+4)		120.269.041.614,73	37.872.473.186,01
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(53.379.096,00)	2.092.056.977,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	53.379.096,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**	**5.2.6**	**120.215.662.518,73**	**40.017.909.259,01**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CALK	2025 AUDITED	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a	219.429.211.366,89	116.919.823.314,23	102.509.388.052,66	87,67
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b	9.914.556.645,00	6.615.437.122,00	3.299.119.523,00	49,87
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.c	18.395.564.057,62	27.898.190.463,75	(9.502.626.406,13)	(34,06)
7	Lain-Lain PAD yang Sah	5.4.1.1.d	311.510.391.596,08	256.584.812.767,20	54.925.578.828,88	21,41
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)**	**5.4.1.1**	**559.249.723.665,59**	**408.018.263.667,18**	**151.231.459.998,41**	**37,06**
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
11	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
12	Dana Perimbangan	5.4.1.2.a.1	0,00	3.207.161.559.950,00	(3.207.161.559.950,00)	(100,00)
13	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.a.4	3.216.255.766.600,00	0,00	3.216.255.766.600,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.a.5	511.199.784.788,00	0,00	511.199.784.788,00	0,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.4.1.2.a.6	361.674.496.514,00	0,00	361.674.496.514,00	0,00
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan (12 s/d 15)**	**5.4.1.2.a**	**4.089.130.047.902,00**	**3.207.161.559.950,00**	**881.968.487.952,00**	**27,50**
17						
18	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
19	Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.a.7	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Insentif Fiskal	5.4.1.2.a.9	0,00	24.672.901.000,00	(24.672.901.000,00)	(100,00)
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19)**	**5.4.1.2.a**	**0,00**	**24.672.901.000,00**	**(24.672.901.000,00)**	**(100,00)**
21						
22	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.b.1	149.472.488.116,83	143.235.880.828,00	6.236.607.288,83	4,35
24	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.b.2	44.664.446.000,00	89.734.017.222,00	(45.069.571.222,00)	(50,23)
25	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s/d 24)**	**5.4.1.2.b**	**194.136.934.116,83**	**232.969.898.050,00**	**(38.832.963.933,17)**	**(16,67)**
26						**0,00**
27	**Jumlah Pendapatan Transfer (16+20+25)**	**5.4.1.2**	**4.283.266.982.018,83**	**3.464.804.359.000,00**	**818.462.623.018,83**	**23,62**
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
30	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.a	3.310.130.617,00	32.143.312.336,00	(28.833.181.719,00)	(89,70)
31	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (30 s/d 31)**	**5.4.1.3**	**3.310.130.617,00**	**32.143.312.336,00**	**(28.833.181.719,00)**	**(89,70)**
33	**JUMLAH PENDAPATAN (8+27+32)**	**5.4.1**	**4.845.826.836.301,42**	**3.904.965.935.003,18**	**940.860.901.298,24**	**24,09**

No.	Uraian	CALK	2025 AUDITED	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
34						
35	**BEBAN DAERAH**					
36	**BEBAN OPERASI**					
37	Beban Pegawai	5.4.2.1.a	1.435.432.866.998,98	1.241.059.955.842,15	194.372.911.156,83	15,66
38	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.b	761.186.121.141,70	1.037.375.310.868,65	(276.189.189.726,95)	(26,62)
39	Beban Bunga	5.4.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Hibah	5.4.2.1.d	206.151.495.582,23	327.840.001.447,95	(121.688.505.865,72)	(37,12)
42	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.e	53.270.248.310,00	30.951.229.000,00	22.319.019.310,00	72,11
43	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.f	9.876.012.699,72	8.307.558.197,49	1.568.454.502,23	18,88
44	Beban Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Jumlah Beban Operasi (37 s/d 44)**	**5.4.2.1**	**2.465.916.744.732,63**	**2.645.534.055.356,24**	**(179.617.310.623,61)**	**(6,79)**
46						
47	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**					
48	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.a	160.426.694.573,90	164.938.426.930,51	(4.511.732.356,61)	(2,74)
49	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.b	118.397.463.812,49	73.163.063.231,91	45.234.400.580,58	61,83
50	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.4.2.2.c	673.096.903.810,47	625.960.362.594,27	47.136.541.216,20	7,53
51	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.2.d	8.239.595.491,58	8.407.916.262,83	(168.320.771,25)	(2,00)
53	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.2.e	5.088.838,00	3.957.982,00	1.130.856,00	28,57
54	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (48 s/d 53)**	**5.4.2.2**	**960.165.746.526,44**	**872.473.727.001,52**	**87.692.019.524,92**	**10,05**
55						
56	**BEBAN TRANSFER**					
57	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3	319.060.768.478,00	257.403.625.216,00	61.657.143.262,00	23,95
58	**Jumlah Beban Transfer (57)**	**5.4.2.3**	**319.060.768.478,00**	**257.403.625.216,00**	**61.657.143.262,00**	**23,95**
59						
60	**BEBAN TAK TERDUGA**					
61	Beban Tak Terduga	5.4.2.4	2.766.488.804,00	2.155.951.800,00	610.537.004,00	28,32
62	**Jumlah Beban Tak Terduga (61)**	**5.4.2.4**	**2.766.488.804,00**	**2.155.951.800,00**	**610.537.004,00**	**28,32**
63						
64	**JUMLAH BEBAN (45+54+58+62)**	**5.4.2**	**3.747.909.748.541,07**	**3.777.567.359.373,76**	**(29.657.610.832,69)**	**(0,79)**
65	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-64)**	**5.4.3**	**1.097.917.087.760,35**	**127.398.575.629,42**	**970.518.512.130,93**	**761,80**
66						
67	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
68	**SURPLUS NON OPERASIONAL**					
69	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.1	462.101.200,00	0,00	462.101.200,00	0,00
70	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
72	**Jumlah Surplus Non Operasional (69 s/d 71)**	**5.4.4.1**	**462.101.200,00**	**0,00**	**462.101.200,00**	**0,00**
73						

No.	Uraian	CALK	2025 AUDITED	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
74	**DEFISIT NON OPERASIONAL**					
75	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.4.2.a	66.726.101.389,53	31.084.276.225,35	35.641.825.164,18	114,66
76	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2	(3.187.603.991,00)	0,00	(3.187.603.991,00)	0,00
78	**Jumlah Defisit Non Operasional (75 s/d 77)**	**5.4.4.2**	**63.538.497.398,53**	**31.084.276.225,35**	**32.454.221.173,18**	**104,41**
79	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72-78)**	**5.4.4**	**(63.076.396.198,53)**	**(31.084.276.225,35)**	**(31.992.119.973,18)**	**102,92**
80	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (65+79)**		**1.034.840.691.561,82**	**96.314.299.404,07**	**938.526.392.157,75**	**974,44**
81						
82	**POS LUAR BIASA**					
83	**PENDAPATAN LUAR BIASA**					
84	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
85	**Jumlah Pendapatan Luar Biasa (84)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
86						
87	**BEBAN LUAR BIASA**					
88	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
89	**Jumlah Beban Luar Biasa (88)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**POS LUAR BIASA (85-89)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	**SURPLUS/DEFISIT-LO (80+90)**	**5.4.5**	**1.034.840.691.561,82**	**96.314.299.404,07**	**938.526.392.157,75**	**974,44**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CALK	2025 audited	2024
1	**EKUITAS AWAL;**	5.6.1	**7.970.883.849.249,46**	**7.686.534.601.891,04**
2	SURPLUS/DEFISIT-LO;	5.6.2	1.034.840.691.561,82	96.314.299.404,07
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	(1.225.197.004.074,01)	188.034.947.954,35
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Kas Setara Kas		(53.379.096,00)	53.379.096,00
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(1.999.046.766,08)	(1.403.163.003,00)
	Ekuitas Koreksi PencatatanPiutang Transfer Pemerintah Pusat		(558.436.605.000,00)	0,00
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang		0,03	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan		(995.542.900,00)	0,00
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah		0,00	135,00
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		0,00	(1.619.391.565,00)
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		178.105.000,00	0,00
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	(4.716.378.560,14)
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan		(638.548.086.335,19)	265.940.298.736,40
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Tagihan Jangka Panjang		0,00	(121.405.312,00)
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain		(3.153.160.775,82)	(2.922.450.085,91)
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(11.754.773.828,87)	(5.538.560,00)
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		349.680.217,93	0,00
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Utang Belanja		1.482.479.410,00	(67.170.402.927,00)
	Ekuitas Koreksi Pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya		(12.266.674.000,00)	0,00
4	**EKUITAS AKHIR**	5.6.4	**7.780.527.536.737,27**	**7.970.883.849.249,46**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CALK	2025 audited	2024
1	**ASET**			
2	**ASET LANCAR**			
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	120.217.562.517,73	50.020.804.636,01
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1	86.783.266.056,28	20.411.627.231,24
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.2	898.697.059,00	70.644.339,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.3	36.908.624,00	16.360,00
7	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.a.4	26.904.128.168,45	21.023.231.308,77
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.a.5	0,00	34.653.000,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.a.6	1.899.999,00	1.899.999,00
10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.a.7	181.686.000,00	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.a.8	5.410.976.611,00	8.478.732.398,00
12	Piutang Pajak	5.3.1.1.b	104.788.440.583,11	107.208.561.154,57
13	Piutang Retribusi	5.3.1.1.c	337.355.660,00	337.355.660,00
14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.d	4.688.693.024,49	7.988.751.082,15
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.e	1.114.240.284.000,00	558.436.605.000,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.f	60.286.989.738,00	39.272.678.649,60
17	Piutang lainnya	5.3.1.1.g	1.341.277.110,76	1.090.465.728,15
18	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.h	(63.674.997.925,95)	(56.418.244.324,47)
19	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.i	3.857.716.699,47	2.829.694.542,74
20	Persediaan	5.3.1.1.j	52.967.332.963,25	62.686.442.169,49
21	**Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20)**	**5.3.1.1**	**1.399.050.654.370,86**	**773.453.114.298,24**
22	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
23	**Investasi Non Permanen**			
24	Dana Bergulir		0,00	0,00
25	**Jumlah Investasi Non Permanen (24)**		**0,00**	**0,00**
26	**Investasi Permanen**			
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.a	671.540.671.670,97	703.954.597.087,50
28	**Jumlah Investasi Permanen (27)**	**5.3.1.2.a**	**671.540.671.670,97**	**703.954.597.087,50**
29	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (25+28)**	**5.3.1.2**	**671.540.671.670,97**	**703.954.597.087,50**
30	**ASET TETAP**			
31	Tanah	5.3.1.3.a	537.373.517.393,80	537.219.524.393,80
32	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	1.573.018.555.113,03	1.493.802.174.447,16
33	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	3.486.082.218.783,01	3.397.608.252.384,33
34	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	10.345.578.746.315,61	10.175.467.918.209,98
35	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	123.647.979.134,25	102.918.522.672,25
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	125.505.712.746,98	134.349.043.799,18
37	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(10.752.831.558.042,60)	(9.212.027.604.863,45)
38	**Jumlah Aset Tetap (31 s/d 37)**	**5.3.1.3**	**5.438.375.171.444,08**	**6.629.337.831.043,25**
39	**ASET LAINNYA**			
40	Tagihan Jangka Panjang		7.702.694.056,41	1.268.160.673,01
41	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.a	501.428.296,00	501.428.296,00
42	Tagihan Ganti Kerugian/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.b	7.201.265.760,41	766.732.377,01
43	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.c	96.793.859.862,46	84.295.429.790,46
44	Aset Lain-lain	5.3.1.4.d	405.159.703.879,89	295.778.834.971,59
45	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.e	(77.338.622.798,26)	(57.344.253.477,80)
46	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.f	(94.986.960.240,90)	(53.615.349.691,93)
47	Dana Treasury Deposite Facility (TDF)	5.3.1.4.g	0,00	48.910.244.000,00
48	**Jumlah Aset lainnya (41 s/d 47)**	**5.3.1.4**	**337.330.674.759,60**	**319.293.066.265,33**
49	**PROPERTI INVESTASI**			
50	Properti Investasi	5.3.1.5.a	105.462.609.886,97	107.851.966.837,36
51	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.b	(11.685.475,00)	(6.596.637,00)
52	**Jumlah Properti Investasi (50 s/d 51)**	**5.3.1.5**	**105.450.924.411,97**	**107.845.370.200,36**
53	**JUMLAH ASET (21+29+38+48+52)**	**5.3.1**	**7.951.748.096.657,48**	**8.533.883.978.894,68**

No.	Uraian	CALK	2025 audited	2024
54	**KEWAJIBAN**			
55	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
56	Utang perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	1.899.999,00	1.899.999,00
57	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
58	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.b	81.116.609,66	98.582.440,26
59	Utang Belanja	5.3.2.1.c	77.338.720.081,55	478.038.861.880,96
60	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.d	12.266.674.000,00	2.225.000.000,00
61	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 60)**	**5.3.2.1**	**89.688.410.690,21**	**480.364.344.320,22**
62	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
63	Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.a	81.532.149.230,00	82.635.785.325,00
64	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
65	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
66	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (63 s/d 65)**		81.532.149.230,00	82.635.785.325,00
67	**JUMLAH KEWAJIBAN (61+66)**	**5.3.2**	**171.220.559.920,21**	**563.000.129.645,22**
68	**EKUITAS**			
69	**EKUITAS**	**5.3.3**	**7.780.527.536.737,27**	**7.970.883.849.249,46**
70	**JUMLAH EKUITAS (69)**	**5.3.3**	**7.780.527.536.737,27**	**7.970.883.849.249,46**
71	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (67+70)**		**7.951.748.096.657,48**	**8.533.883.978.894,68**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CALK	2025 audited	2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**			
2	***ARUS MASUK KAS***			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	221.828.935.874,35	113.650.131.384,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	9.914.556.645,00	6.626.027.122,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	18.395.564.057,62	27.898.190.463,75
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.d	310.937.413.208,11	245.113.635.263,51
7	Penerimaan Dana Perimbangan	5.5.1.1.e	0,00	2.860.225.317.214,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.f	2.150.925.726.600,00	0,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.g	511.199.784.788,00	0,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.i	361.674.496.514,00	0,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.j	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.k	209.290.220.994,00	229.955.545.000,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.l	0,00	24.672.901.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.m	137.258.525.061,83	171.283.262.620,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.n	35.864.097.966,60	67.971.837.255,40
16	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.o	0,00	7.507.176.000,00
17	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.p	0,00	0,00
18	***Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)***	**5.5.1.1**	**3.967.289.321.709,51**	**3.754.904.023.322,66**
19	***ARUS KELUAR KAS***			
20	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	1.459.387.408.621,22	1.199.348.281.960,91
21	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.b	834.930.090.186,19	1.166.182.290.152,25
22	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.c	0,00	0,00
23	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.d	246.484.811.969,92	136.655.551.455,00
24	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.e	56.468.348.310,00	5.385.000.000,00
25	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.f	2.766.488.804,00	2.155.951.800,00
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.2.g	528.350.989.472,00	487.359.170.216,00
30	***Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 26)***	**5.5.1.2**	**3.128.388.137.363,33**	**2.997.086.245.584,16**
31	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18-27)**	**5.5.1**	**838.901.184.346,18**	**757.817.777.738,50**
32				
33	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**			
34	***ARUS MASUK KAS***			
35	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.a	837.771.200,00	0,00
36	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.b	23.075.000,00	664.400,00
37	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.c	14.001.000,00	43.303.000,00
38	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.d	0,00	0,00
39	Pendapatan penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.e	0,00	0,00
40	***Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 36)***	**5.5.2.1**	**874.847.200,00**	**43.967.400,00**
41	***ARUS KELUAR KAS***			
42	Perolehan Tanah	5.5.2.2.a	1.150.484.130,00	14.159.821.565,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.b	108.116.548.508,58	102.795.588.522,20
44	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.c	123.976.665.935,08	161.139.070.395,87
45	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.d	488.599.757.196,80	519.469.106.288,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.e	21.054.567.424,00	17.020.210.815,00
47	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.f	79.228.870,00	0,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.g	26.586.109.626,00	24.950.000.000,00
49	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
50	***Jumlah Arus Keluar Kas (39 s/d 45)***	**5.5.2.2**	**769.563.361.690,46**	**839.533.797.586,07**
51	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (37-46)**	**5.5.2**	**(768.688.514.490,46)**	**(839.489.830.186,07)**

No.	Uraian	CALK	2025 audited	2024
52				
53	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**			
54	***ARUS MASUK KAS***			
55	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1	0,00	0,00
56	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1	0,00	0,00
57	***Jumlah Arus Masuk Kas (51 s/d 52)***	**5.5.3.1**	**0,00**	**0,00**
58	***ARUS KELUAR KAS***			
59	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.2	0,00	0,00
60	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2	0,00	0,00
62	***Jumlah Arus Keluar Kas (55 s/d 56)***	**5.5.3.2**	**0,00**	**0,00**
63	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (53-**	**5.5.3**	**0,00**	**0,00**
64				
65	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**			
66	***ARUS MASUK KAS***			
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.a	228.317.057.979,69	171.984.348.568,75
68	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk	5.5.4.1.b	543.340.797,00	1.188.612.335,00
69	***Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 63)***	**5.5.4.1**	228.860.398.776,69	173.172.960.903,75
70	***ARUS KELUAR KAS***			
71	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.a	228.317.057.979,69	172.027.891.464,75
72	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar	5.5.4.2.b	505.873.675,00	1.176.312.335,00
73	***Jumlah Arus Keluar Kas (66 s/d 67)***	**5.5.4.2**	**228.822.931.654,69**	**173.204.203.799,75**
74	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (64**	**5.5.4**	**37.467.122,00**	**(31.242.896,00)**
75				
76	**Kenaikan/Penurunan Kas (28+47+58+69)**		**70.250.136.977,72**	**(81.703.295.343,57)**
77	**Saldo Awal Kas**	**5.5.5.1**	**50.020.804.636,01**	**121.644.558.383,58**
	Koreksi SiLPA		53.379.096,00	
	Kas di Kas Daerah		86.783.266.056,28	20.411.627.231,24
	Kas di Bendahara Pengeluaran		898.697.059,00	70.644.339,00
	Kas di Bendahara Penerimaan		36.908.624,00	16.360,00
	Kas di Bendahara BLUD		26.904.128.168,45	21.023.231.308,77
	Kas Dana BOS		0,00	34.653.000,00
	Kas Lainnya		1.899.999,00	1.899.999,00
	Kas Dana BOSP		181.686.000,00	0,00
	Kas Dana BOK Puskesmas		5.410.976.611,00	8.478.732.398,00
73	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.5.3**	**120.217.562.517,73**	**50.020.804.636,01**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 – 2025 24
Tabel 2.2. Data Capaian Indikator Ekonomi Makro Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2025 24
Tabel 2.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024 dan 2025..... 30
Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2025 32
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2025 32
Tabel 3.3. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2025 34
Tabel 3.4. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2025 35
Tabel 3.5. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Tahun 2025 35
Tabel 3.6. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur diluar Pembayaran Kewajiban Atas Hutang Pihak Lain Tahun 2025 36
Tabel 3.7. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan Tahun 2025 37
Tabel 3.8. Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2025 37
Tabel 3.9. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 38
Tabel 3.10. Daftar Proyek Strategis Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 39
Tabel 4.1. Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 48
Tabel 4.2. Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang 62
Tabel 4.3. Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi 64
Tabel 5. 1 Rincian Pendapatan Per Kelompok Pendapatan-LRA TA 2025 dan 2024 75
Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024 76
Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024 77
Tabel 5.4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024 88
Tabel 5.5. Perhitungan Dividen Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2023 dan 2024 93
Tabel 5.6. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024 94
Tabel 5.7. Pendapatan Transfer-LRA 101
Tabel 5.8. Rincian Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat-LRA 102
Tabel 5.9. Rincian Dana Bagi Hasil-LRA 102

Tabel 5.10. Perincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA.. 103
Tabel 5.11. Perincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA 104
Tabel 5.12. Rincian Transfer Dana Desa-LRA 105
Tabel 5.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA .. 107
Tabel 5.14. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah –LRA 108
Tabel 5.15. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024 113
Tabel 5.16. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024..... 114
Tabel 5.17. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 115
Tabel 5.18. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 115
Tabel 5.19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024..... 117
Tabel 5.20. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang undangan TA 2025 dan 2024 118
Tabel 5.21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 121
Tabel 5.22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 121
Tabel 5.23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 122
Tabel 5.24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 123
Tabel 5.25. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024..... 123
Tabel 5.26. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 124
Tabel 5.27. Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025..... 126
Tabel 5.28. Rincian Penerimaan Pembiayaan 129
Tabel 5.29. Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah..... 131
Tabel 5.30. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)..... 132
Tabel 5.31. Rincian Aset Lancar 137
Tabel 5.32. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu 141
Tabel 5.33. Kas BLUD RSUD Sekayu..... 142
Tabel 5.34. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin 142
Tabel 5.35. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin 142

Tabel 5.36. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir 143
Tabel 5.37. Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir 143
Tabel 5.38. Perhitungan Kas BLUD 29 Puskesmas 143
Tabel 5.39. Kas di Bendahara BOS 145
Tabel 5.40. Kas di Bendahara BOK 145
Tabel 5.41. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 146
Tabel 5.42. Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah 157
Tabel 5.43. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi 158
Tabel 5.44. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 159
Tabel 5.45. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya 159
Tabel 5.46. Rincian Beban Dibayar Dimuka 160
Tabel 5.47. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik 163
Tabel 5.48. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel 163
Tabel 5.49. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding 164
Tabel 5.50. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Muba Energi Maju Berjaya 166
Tabel 5.51. Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 168
Tabel 5.52. Mutasi Aset Tetap Tanah 168
Tabel 5.53. Aset Tetap Tanah Pemkab Muba yang Belum Bersertifikat 174
Tabel 5.54. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 175
Tabel 5.55. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 183
Tabel 5.56. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi 189
Tabel 5.57. Mutasi Aset Tetap Lainnya 194
Tabel 5.58. Mutasi Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 196
Tabel 5.59. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 199
Tabel 5.60. Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 200
Tabel 5.61. Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 200
Tabel 5.62. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 201
Tabel 5.63. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 201
Tabel 5.64. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 202

Tabel 5.65. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 202
Tabel 5.66. Koreksi Temuan dan Bukan Temuan Terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 202
Tabel 5.67. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 203
Tabel 5.68. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 207
Tabel 5.69. Rekapitulasi Aset Lain-lain 208
Tabel 5.70. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 212
Tabel 5.71. Rincian Properti Investasi - Tanah 214
Tabel 5.72. Rincian Properti Investasi – Gedung dan Bangunan 214
Tabel 5.73. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya 222
Tabel 5.74. Mutasi Utang kepada Pemerintah Pusat 223
Tabel 5.75. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 225
Tabel 5.76. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO 226
Tabel 5.77. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 226
Tabel 5.78. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 227
Tabel 5.79. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah 228
Tabel 5.80. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO 229
Tabel 5.81. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2025 229
Tabel 5.82. Rekonsiliasi Lain-lain PAD yang Sah- LO TA 2025 230
Tabel 5.83. Rincian Pendapatan Transfer-LO 231
Tabel 5.84. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 232
Tabel 5.85. Rekonsiliasi PendapatanTransfer Pemerintah Pusat- LO TA 2025 232
Tabel 5.86. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 233
Tabel 5.87. Rekonsiliasi Transfer Pemerintah Pusat- LO TA 2025 233
Tabel 5.88. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO 235
Tabel 5.89. Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2025 235
Tabel 5.90. Rincian Beban 237
Tabel 5.91. Rincian Beban Operasi-LO 238
Tabel 5.92. Rincian Beban Pegawai 238
Tabel 5.93. Rekonsiliasi antara Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO 239
Tabel 5.94. Rincian Beban Barang dan Jasa 240
Tabel 5.95. Rincian Beban Persediaan 241
Tabel 5.96. Rekonsiliasi antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan 241
Tabel 5.97. Rincian Beban Jasa 245

Tabel 5.98. Rekonsiliasi antara Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO 245
Tabel 5.99. Rincian Beban Pemeliharaan..... 248
Tabel 5.100. Rekonsiliasi antara Belanja Pemeliharaan-LRA..... 248
Tabel 5.101. Rincian Beban Perjalanan Dinas..... 250
Tabel 5.102. Rekonsiliasi antara Belanja Perjalanan Dinas -LRA 250
Tabel 5.103. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 251
Tabel 5.104. Rekonsiliasi antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LRA dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO 252
Tabel 5.105. Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BOSP dengan Beban Barang dan Jasa BOSP..... 252
Tabel 5.106. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD 253
Tabel 5.107. Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD..... 253
Tabel 5.108. Rincian Beban Penyisihan Piutang 256
Tabel 5.109. Rincian Beban Transfer 258
Tabel 5.110. Rekonsiliasi antara Belanja Transfer 259
Tabel 5.111. Surplus/Defisit Operasi..... 259
Tabel 5.112. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 267
Tabel 5.113. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi..... 268
Tabel 5.114. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi..... 269
Tabel 5.115. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 269
Tabel 5.116. Penyetoran PFK dengan Mekanisme SP2D UP/GU/TU/LS..... 270
Tabel 5.117. Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU/LS 273
Tabel 5.118. Koreksi Kesalahan Kiriman Uang 273
Tabel 5.119. Saldo Awal Kas..... 274
Tabel 5.120. Kenaikan (Penurunan) Kas 275
Tabel 5.121. Saldo Akhir Kas..... 275
Tabel 5.122. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024..... 276

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kas Setara Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.a	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BLUD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.b	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.c	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Negeri Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.d	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Reguler – SD Negeri Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.e	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Reguler – SMP Negeri Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.f	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Kinerja – SD Negeri Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.g	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Kinerja – SMP Negeri Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 1.h	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1.i	Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk *Mandatory Spending* – Fungsi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1.j	Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk *Mandatory Spending* – Fungsi Pendidikan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1.k	Rekapitulasi Belanja Pemerintahan Daerah untuk *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 1.l	Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2	Rekapitulasi Piutang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 3.a	Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 3.b	Rincian Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025

Lampiran 3.c	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 3.d	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 3.e	Rincian Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 5.a	Piutang Transfer Antar Daerah – Bagi Hasil Provinsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 5.b	Piutang Transfer Antar Daerah – Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Mutasi Penyisihan Piutang Pajak dan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 8.a	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 8.b	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 8.c	Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 8.d	Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Daftar Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Rekapitulasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Rekbapitulasi Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Rekapitulasi Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 15	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025

Lampiran 15.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 15.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 15.c	Daftar BMD pada Pengguna Barang Aset Tetap Tanah Sudah Bersetifikat Intrakomptabel Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15.d	Daftar BMD pada Pengguna Barang Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat Intrakomptabel Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15.e	Daftar BMD pada Pengguna Barang Aset Tetap Tanah Bawah Jalan Belum Sertifikat Intrakomptabel Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15.f	Daftar BMD pada Pengguna Barang Aset Tetap Selain Tanah Bawah Jalan Belum Bersertifikat Intrakomptabel Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15.g	Daftar BMD pada Pengguna Barang Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat Sudah Proses di BPN Intrakomptabel Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15.h	Daftar BMD pada Pengguna Barang Aset Tetap Tanah Bersertifikat Belum Update di E-BMD Intrakomptabel Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 16	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 16.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 16.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 16.c	Lembar Kerja Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 17	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 17.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 17.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 17.c	Rekap Temuan Pemeriksa Terhadap Kekurangan Volume pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025

Lampiran 18	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 18.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 18.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 18.c	Rekap Temuan Pemeriksa Terhadap Kekurangan Volume pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 19	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 19.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 19.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 20	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 20.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 20.b	Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 20.c	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 20.d	Lampiran Program Revitalisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 21	Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 21.a	Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap per Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 21.b	Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 21.c	Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025

Lampiran 21.d	Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 22.a	Rekapitulasi Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 22.b	Rekapitulasi Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 23	Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 23.a	Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 23.b	Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain (Rusak Berat, DED dan Kurang Volume Pekerjaan) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.a	Rekapitulasi Temuan Gaji, TPP dan Honor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.b	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Rusak Berat Berdasarkan Harga Perolehan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.c	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Rusak Berat Berdasarkan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.d	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Rusak Berat Berdasarkan Nilai Buku Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.e	Rekapitulasi Mutasi Kurang Volume (Aset Lain-Lain) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.f	Rekapitulasi Mutasi Kurang Volume (Aset Lain-Lain) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.g	Rincian Aset Lain-Lain yang digunakan oleh Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.h	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain yang digunakan oleh Pemerintah Desa Berdasarkan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.i	Rekapitulasi Aset Lain-Lain yang digunakan oleh Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.j	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain – Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025

Lampiran 24.k	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain - Tanah Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.l	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain – Peralatan dan Mesin Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.m	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain – Gedung dan Bangunan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.n	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain – Jalan, Jaringan dan Irigasi Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.o	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Penyertaan Modal PDAM - Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 24.p	Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Penyertaan Modal PDAM – Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 25	Rekapitulasi Rincian Dana Transfer – Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025
Lampiran 26	Mutasi Data Utang PFK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 27	Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 28	Rekapitulasi Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 28.a	Rincian Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 29	Rekapitulasi Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 29.a	Rincian Saldo Utang Kelebihan Pembayaran PAD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 29.b	Utang Jangka Pendek Lainnya – Rincian Saldo Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 29.c	Rincian Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 30	Rincian Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 2025

Lampiran 31	Rincian Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 32	Rincian Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 33	Rincian Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 34	Rincian Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 35	Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 2025
Lampiran 35.a	Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025
Lampiran 36	Rincian Beban Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 37	Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 38	Rincian Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 39	Rincian Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 40	Rincian Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 41	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 41.a	Rincian Perhitungan Surplus Aset Non Lancar – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 41.b	Rincian Perhitungan Defisit Aset Non Lancar – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 41.c	Rincian Perhitungan Defisit Aset Non Lancar – Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 42	Perhitungan Koreksi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 42.a	Rincian Perhitungan Koreksi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 42.b	Rincian Surplus Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025

Lampiran 43	Aset Tetap Berindikasi Properti Investasi - Aset Tetap ke Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 43.a	Rincian Aset Tetap Berindikasi Properti Investasi – Aset Tetap ke Aset Lainnya – Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025
Lampiran 43.b	Rincian Aset Tetap Berindikasi Properti Investasi – Aset Tetap ke Aset Lainnya – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang disajikan secara lengkap sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang;

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
m. Peraturan Presiden Republik Indonesia 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
s. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
t. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pengelompokkan dan Kodefikasi Barang Milik Kabupaten Musi Banyuasin;
u. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
v. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
w. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

x. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

y. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

z. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

aa. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut.

I. Pendahuluan
   - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
   - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
   - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
   - 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Kabupaten Musi Banyuasin
   - 2.2 Kebijakan Keuangan

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
   - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
   - 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi
   - 4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
   - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
   - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
   - 4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional (LO)

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LAK)

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

VII. Penutup

LAMPIRAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Kabupaten Musi Banyuasin

Kerangka ekonomi daerah menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi dan fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025. Kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini serta proyeksi pada triwulan pertama tahun tersebut. Dalam penyusunannya, diperhatikan pula isu-isu yang perlu diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, dan sasaran pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka ini mencakup aspek-aspek penting yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan, distribusi pendapatan, serta arah kebijakan fiskal daerah. Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah dan mengarahkan alokasi anggaran secara efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan ekonomi tahun 2025 menjadi bagian dari proses jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Untuk mencapainya, sejumlah kebijakan strategis akan diimplementasikan guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan pemerataan hasil pembangunan. Kebijakan tersebut meliputi investasi infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang inovatif untuk menunjang produktivitas dan efisiensi. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat daya saing daerah secara global.

Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih bertumpu pada sektor primer. Pada tahun 2025 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 46,87 persen, dilanjutkan dengan sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,27 persen dan Industri Pengolahan sebesar 12,33 persen.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,11 persen. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2024 yang bernilai sebesar 4,94 persen dengan didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 – 2025

	2023	2024	2025
MUBA	4,51	4,94	5,11
PROVINSI	5,08	5,03	5,35
NASIONAL	5,04	5,03	5,11

(dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, Diolah

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah yang positif hingga mencapai angka 5,11 persen pada tahun 2025. Sebagian besar sektor usaha mengalami peningkatan yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional yang masing-masing mencapai 5,35 persen pada tahun yang sama.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2025, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 46,87% (angka ini menurun dari 49,79% pada tahun 2024). Selanjutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,27% (angka ini meningkat dari 10,97% pada tahun 2024) dan disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 12,33% (angka ini meningkat dari 11,92% pada tahun 2024). Berikutnya sektor konstruksi sebesar 8,52% (angka ini meningkat dari 8,20% pada tahun 2024) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,45% (angka ini meningkat dari 5,90% di tahun 2024).

Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih bertumpu pada sektor primer. Pada tahun 2025 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 46,87 persen, dilanjutkan dengan sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,27 persen dan Industri Pengolahan sebesar 12,33 persen. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen, dilanjutkan dengan sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,04 persen dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen.

Selain itu, data capaian indikator Capaian Indikator Ekonomi Makro Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Data Capaian Indikator Ekonomi Makro Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2025

(dalam persen)

Indikator Makro Ekonomi	2023	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka MUBA	2,58	2,13	2,04
Gini Rasio	0,31	0,31	0,21
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,3	72,27	73,17
Angka Kemiskinan	14,9	12,88	9,97

Sumber:Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Muba, 20252025 (Muba Dalam Angka, 2025, BPS)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang menurun secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, TPT tercatat sebesar 2,58%, kemudian menurun menjadi 2,13% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 2,04% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian TPT Kabupaten Musi Banyuasin yang terus menurun dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan agar penurunan pengangguran dapat lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Adapun beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1) Melalui peningkatan kualitas SDM berbasis pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang merupakan salah satu dari 22 Program Unggulan Bupati Musi Banyuasin yaitu melalui Program Digitalisasi dan Klinik Usaha dengan pelatihan sektor unggulan seperti migas dan perkebunan;
2) Mendorong kegiatan investasi di Musi Banyuasin yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal.
3) Program-program pada Perangkat Daerah yang mendukung urusan tenaga kerja antara lain Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

d. Gini Ratio

Gini Rasio Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode tahun 2023–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025. Pada tahun 2023, Gini Rasio tercatat sebesar 0,31, dan tetap berada pada angka 0,31 pada tahun 2024, dan menurun menjadi 0,21 pada tahun 2025. Penurunan sebesar 0,10 poin dalam satu tahun (tahun 2024 ke 2025) merupakan capaian yang cukup signifikan dan mengindikasikan adanya peningkatan distribusi kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, Gini Rasio Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kondisi yang semakin membaik dengan tingkat ketimpangan yang menuju rendah. Penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi indikasi bahwa pembangunan daerah telah bergerak ke arah yang lebih inklusif dan merata. Untuk menjaga agar gini rasio tetap terjaga upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :

1) Melalui Program Perlindungan Sosial seperti Program Bantuan langsung

kepada masyarakat yaitu Program Bantu Umak dan Bantuan Pangan yang tepat sasaran.

2) Melalui Program peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan kepada masyarakat.
3) Pemerataan infrastruktur dasar masyarakat dengan pembangunan jalan dan jembatan.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, IPM tercatat sebesar 71,3, kemudian meningkat menjadi 72,27 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 73,17 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kinerja yang baik dan terus meningkat dalam periode 2023–2025. Namun demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan peningkatan IPM yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan pada masa mendatang. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Program Unggulan Bupati, antara lain sebagai berikut:

1) Program Gratis Sekolah Negeri dan Program Beasiswa Prestasi sampai Sarjana.
2) Penurunan stunting di intervensi dengan Program Bantuan Sayang Anak (BASANAK).
3) Program One Student One Sport.
4) Penguatan layanan kesehatan dengan Program Revitalisasi Posyandu.
5) Pengembangan UMKM dan ekonomi diintervensi dengan Program Keluarga Maju (PKM).

f. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode tahun 2023–2025 menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 14,9%, kemudian menurun menjadi 12,88% pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 9,97% pada tahun 2025. Dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2025 ini, dari angka 12.88 % menjadi 9.97 %, Kabupaten Musi Banyuasin kini berada di posisi tengah dan mematahkan stigma buruk yang telah melekat selama lebih dari 20 tahun sebagai predikat salah satu Kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan capaian persentase penduduk miskin satu digit pada tahun 2025, untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin di Kabupaten Muba lebih rendah dari pada persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dalam periode 2023–2025. Hal ini menunjukkan capaian kebijakan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program-program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang fokus untuk menurunkan angka kemiskinan.Namun demikian, upaya yang berkelanjutan dan lebih terarah tetap diperlukan untuk memastikan

bahwa penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara konsisten, merata, tepat sasaran dan berkelanjutan pada masa mendatang. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Program Unggulan Bupati, antara lain sebagai berikut:

1) Program Keluarga Maju (PKM) untuk Pengentasan Kemiskinan.
2) Program Santunan Kematian dan Fakir Miskin.
3) Program Bantuan UMKM, Petani dan Nelayan.
4) Program Bantuan Bibit Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
5) Program Pemberdayaan Disabilitas.
6) Program Iklim Usaha Aman dan Sehat.
7) Program Pada Perangkat Daerah seperti Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah, isu strategis pembangunan di luar kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

a. Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19
   Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global pada tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar ke berbagai dunia. Penanganan virus Covid-19 telah dilakukan dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 secara bertahap, serta penerapan protokol kesehatan. Pemulihannya telah dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya kembali perekonomian yang sempat terkontraksi pada tahun 2020.
b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang
   Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) neraca pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten;
c. Kemiskinan dan Pengangguran
   Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari $ 1,25 PPP per hari atau berdasarkan garis kemiskinan BPS lebih kurang sebanyak 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.;
d. Krisis Energi
   Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan

energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber- sumber energi yang dapat diperbaharui;

e. Tuntutan Pemerintahan yang bersih dan profesional
   Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas;

f. Kemampuan Keuangan Negara
   Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Anggaran merupakan alat atau komponen yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran sebaiknya mudah dibaca, dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi.

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti :

a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mencakup seluruh kebutuhan;
c. Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan; dan
d. Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
b. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work *better and cost less*);
c. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
d. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented)* untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; dan
e. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel 2.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024 dan 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Anggaran Perubahan 2025	Selisih	%
1	2	2	4	5
PENDAPATAN	**4.654.239.641.897,00**	**3.366.370.761.800,00**	**(1.287.868.880.097,00)**	**(27,67)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**619.651.955.525,00**	**529.884.959.800,00**	**(89.766.995.725,00)**	**(14,49)**
Pendapatan Pajak Daerah	123.016.354.000,00	216.466.151.000,00	93.449.797.000,00	75,97
Pendapatan Retribusi Daerah	6.713.287.000,00	5.195.787.000,00	(1.517.500.000,00)	(22,60)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	459.922.314.525,00	278.223.021.800,00	(181.699.292.725,00)	(39,51)
PENDAPATAN TRANSFER	**4.027.080.510.372,00**	**2.836.485.802.000,00**	**(1.190.594.708.372,00)**	**(29,56)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.742.293.325.384,00	2.710.885.802.000,00	(1.031.407.523.384,00)	(27,56)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.787.184.988,00	125.600.000.000,00	(159.187.184.988,00)	(55,90)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.507.176.000,00**	**0,00**	**(7.507.176.000,00)**	**(100,00)**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.507.176.000,00	0,00	(7.507.176.000,00)	0,00
BELANJA DAERAH	**4.750.926.224.507,58**	**3.185.075.879.146,00**	**(1.565.850.345.361,58)**	**(32,96)**
BELANJA OPERASI	**2.977.667.797.595,18**	**2.384.132.390.457,00**	**(593.535.407.138,18)**	**(19,93)**
Belanja Pegawai	1.368.661.726.364,58	1.260.994.266.412,00	(107.667.459.952,58)	(7,87)
Belanja Barang dan Jasa	1.421.094.838.567,60	915.867.821.096,00	(505.227.017.471,60)	(35,55)
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	167.145.566.663,00	140.278.069.039,00	(26.867.497.624,00)	(16,07)
Belanja Bantuan Sosial	20.765.666.000,00	66.992.233.910,00	46.226.567.910,00	222,61
BELANJA MODAL	**1.233.172.084.375,40**	**523.070.692.769,00**	**(710.101.391.606,40)**	**(57,58)**
Belanja Modal Tanah	28.773.940.611,00	10.314.120.000,00	(18.459.820.611,00)	(64,15)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.961.626.066,40	74.347.961.221,00	(57.613.664.845,40)	(43,66)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.596.894.445,00	100.593.747.003,00	(94.003.147.442,00)	(48,31)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	860.625.026.492,00	336.951.016.463,00	(523.674.010.029,00)	(60,85)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.199.706.111,00	797.330.777,00	(16.402.375.334,00)	(95,36)
Belanja Modal Aset Lainnya	14.890.650,00	66.517.305,00	51.626.655,00	346,71
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.435.810.272,00**	**6.997.200.620,00**	**1.561.390.348,00**	**28,72**
Belanja Tidak Terduga	5.435.810.272,00	6.997.200.620,00	1.561.390.348,00	28,72
BELANJA TRANSFER	**534.650.532.265,00**	**270.875.595.300,00**	**(263.774.936.965,00)**	**(49,34)**
Belanja Bantuan Keuangan	534.650.532.265,00	270.875.595.300,00	(263.774.936.965,00)	(49,34)
SURPLUS/(DEFISIT)	**(96.686.582.610,58)**	**181.294.882.654,00**	**277.981.465.264,58**	**(287,51)**

Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Anggaran Perubahan 2025	Selisih	%
1	2	2	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**121.636.582.610,58**	**69.983.013.972,00**	**(51.653.568.638,58)**	**(42,47)**
SILPA tahun anggaran Sebelumnya	121.636.582.610,58	69.983.013.972,00	(51.653.568.638,58)	(42,47)
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**24.950.000.000,00**	**27.486.109.626,00**	**2.536.109.626,00**	**10,16**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	24.950.000.000,00	27.486.109.626,00	2.536.109.626,00	10,16
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh TempoPokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	**96.686.582.610,58**	**42.496.904.346,00**	**(54.189.678.264,58)**	**(56,05)**
SILPA TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**223.791.787.000,00**	**223.791.787.000,00**	**0,00**

Terdapat empat kali pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025, rincian pergeseran APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp3.968.164.168.909,51 atau 92,49% dari anggaran pendapatan Rp4.290.369.812.775,59. Dari 47 SKPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengelola penerimaan sebanyak 13 SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	99,28
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.000.000,00	431.575.280,00	200,73
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.527.000.000,00	5.155.556.255,00	204,02
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.630.000.000,00	2.241.331.000,00	137,50
5	Dinas Perhubungan	56.500.000,00	55.650.000,00	98,50
6	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	142.427.000,00	237.907.000,00	167,04
7	Dinas Perikanan	35.000.000,00	14.001.000,00	40,00
8	Dinass Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	40.000.000,00	40.050.000,00	100,13
9	Dinas Perkebunan	139.860.000,00	705.183.360,00	504,21
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	660.000.000,00	749.038.900,00	113,49
11	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	319.500.000,00	127,80
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.757.691.779.441,59	3.407.073.698.124,43	90,67
13	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	282.702.122.810,00	308.613.676.160,02	109,17
	Jumlah	**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**92,49**

Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp4.313.840.074.908,60 dan terealisasi sebesar Rp3.871.365.389.427,79 atau 89,74% rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.004.601.364.281,00	930.400.263.086,50	92,61
2	Dinas Kesehatan	719.889.042.809,60	654.292.089.617,38	90,89
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	599.212.139.583,60	507.031.932.350,79	84,62
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	291.126.352.195,00	272.762.073.812,00	93,69

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.617.774.825,00	18.560.012.765,00	72,45
6	Satuan Polisi Pamong Praja	38.551.075.727,00	34.328.810.278,00	89,05
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.439.235.163,00	15.207.525.112,00	92,51
8	Dinas Sosial	77.199.200.617,00	52.755.225.707,00	68,34
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.283.388.890,00	12.952.177.050,00	84,75
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.351.115.648,00	8.048.865.113,00	86,07
11	Dinas Ketahanan Pangan	10.613.654.680,00	8.970.739.189,00	84,52
12	Dinas Lingkungan Hidup	57.281.888.783,00	51.568.224.023,34	90,03
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.560.453.778,00	19.979.309.287,00	88,56
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.707.159.264,00	14.819.043.722,00	83,69
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	22.894.940.858,00	19.966.432.524,74	87,21
16	Dinas Perhubungan	18.140.479.690,00	15.860.986.345,00	87,43
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.239.317.426,70	29.095.925.815,00	87,53
18	Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	16.818.749.442,00	15.195.022.477,00	90,35
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.893.414.726,50	16.567.688.377,00	87,69
19	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	121.911.962.752,00	106.246.229.227,00	87,15
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	12.283.598.469,00	10.649.113.839,00	86,69
21	Dinas Perikanan	16.197.107.218,00	14.379.531.261,00	88,78
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	52.512.743.436,00	42.747.660.648,00	81,40
24	Dinas Perkebunan	45.065.363.508,00	40.895.658.825,00	90,75
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22.330.566.460,00	18.705.854.382,00	83,77
26	Sekretariat Daerah	139.334.235.055,00	125.183.301.094,00	89,84
27	Sekretariat DPRD	120.372.873.231,00	103.075.482.952,00	85,63
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.712.999.554,50	18.850.545.826,00	86,82
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	571.334.940.609,24	549.979.082.492,39	96,26
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	38.136.859.136,00	27.478.423.703,44	72,05
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.901.341.166,00	16.017.578.593,00	84,74
32	Inspektorat	30.408.129.304,00	25.088.897.285,00	193,57
33	Kecamatan Sekayu	12.960.844.460,00	11.547.175.018,00	244,35
34	Kecamatan Lais	4.725.637.985,00	4.204.281.479,00	50,11
35	Kecamatan Babat Toman	8.389.286.113,46	7.058.563.767,00	84,14
36	Kecamatan Keluang	5.902.008.856,00	4.780.307.371,00	80,99
37	Kecamatan Sanga Desa	7.233.337.132,00	6.438.620.032,00	89,01
38	Kecamatan Plakat Tinggi	4.293.670.603,00	3.234.733.373,00	75,34
39	Kecamatan Batanghari Leko	4.166.315.645,00	2.932.719.965,00	70,39
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.982.090.009,00	3.188.504.577,00	80,07
41	Kecamatan Sungai Lilin	7.218.518.431,00	6.116.722.028,00	84,74

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
42	Kecamatan Bayung Lencir	6.715.205.717,00	6.139.204.292,00	91,42
43	Kecamatan Lalan	4.762.891.988,00	3.351.771.714,00	70,37
44	Kecamatan Tungkal Jaya	4.995.802.499,00	4.207.670.880,21	84,22
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.742.295.672,00	4.325.659.879,00	91,21
46	Kecamatan Babat Supat	4.217.302.289,00	3.346.679.861,00	79,36
47	Kecamatan Jirak Jaya	3.611.399.223,00	2.833.068.412,00	78,45
	Jumlah	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**89,74**

Adapun belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdapat pada Lampiran 1.h.

3.1.2 Kinerja *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh Undang-Undang, tujuan mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi:

1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Pendidikan
   Mandatory Spending bidang Pendidikan diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1 "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."
   Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang Pendidikan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Alokasi Mandatory Spending Bidang Pendidikan	1.101.321.078.282,35	1.015.893.689.481,50
Total Belanja Daerah	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79
Rasio (%)	25.53%	26,24%

Untuk alokasi anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan telah memenuhi amanat dari peraturan perundang – undangan dengan alokasi anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan sebesar Rp1.101.321.078.282,35 atau 25,53% dari total belanja daerah. Realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.015.893.689.481,50 atau 26,24% dari realisasi total belanja daerah.
Rincian mengenai Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1.j.

2) Dalam rangka peningkatan bidang Kesehatan

Mandatory Spending bidang Kesehatan diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Pasal 409 ayat 1 "Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah"
Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang Kesehatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Anggaran Kesehatan	727.029.223.705,60	657.546.034.531,12
Total Belanja Daerah	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79
Gaji ASN	869.506.141.385,27	799.106.229.756,00
Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	3.444.333.933.523,33	3.072.259.159.671,79
Rasio (%)	21,11%	21,40%

Untuk alokasi anggaran Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp727.029.223.705,60 atau 21,11% dari total belanja daerah diluar gaji ASN sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi anggaran Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 sebesar Rp657.546.034.531,12 atau 21,40% dari total realisasi belanja daerah.
Rincian mengenai Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1.i.

3) Dalam rangka bidang infrastruktur
Mandatory spending bidang infrastruktur diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 147 ayat (1) "Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke Daerah dan/atau Desa"
Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Total Alokasi *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.669.388.187.196,29	1.197.621.145.809,40
Total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer	3.769.187.951.654,60	3.343.014.399.955,79
Rasio (%)	44,29%	35,82%

Untuk alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik, pada APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan sebesar Rp1.669.388.187.196,29 atau 44,29% dari total belanja daerah diluar belanja transfer dimana penandaan alokasi rincian belanja infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM/7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja

Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun realisasi alokasi anggaran mandatory spending infrastruktur adalah sebesar Rp1.197.621.145.809,40 atau 35,82% total belanja daerah diluar belanja transfer.

Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kewajiban atas hutang pihak lain yang belum dibayar yang dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2025. Pada penganggaran alokasi mandatory spending belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk didalamnya terdapat pembayaran kewajiban atas hutang pihak lain tahun 2024 sebesar Rp366.014.151.974,00, sehingga total alokasi mandatory spending belanja infrastruktur pelayanan publik diluar pembayaran kewajiban atas hutang pihak lain tahun 2024 sebesar Rp1.303.374.035.222,29 atau 34,58% dari total belanja daerah diluar belanja transfer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Anggaran Dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur diluar Pembayaran Kewajiban Atas Hutang Pihak Lain Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Total Alokasi *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (diluar pembayaran kewajiban atas hutang pihak lain)	1.303.374.035.222,29	831.606.993.835,40
Total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer	3.769.187.951.654,60	3.343.014.399.955,79
Rasio (%)	34,58%	24,88%

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* pada bidang infrastruktur, apabila perhitungan didasarkan pada alokasi anggaran belanja infrastruktur di luar pembayaran kewajiban atas hutang pihak lain Tahun Anggaran 2024, maka total alokasi *mandatory spending* untuk belanja infrastruktur pelayanan publik tercatat sebesar Rp1.303.374.035.222,29 atau setara dengan 34,58% dari total belanja daerah di luar belanja transfer.

Adapun realisasi dari alokasi anggaran bidang infrastruktur tersebut, dengan mengecualikan pembayaran atas hutang pihak lain Tahun Anggaran 2024, adalah sebesar Rp831.606.993.835,40 atau mencapai 24,88% dari total belanja daerah.

Ketidakterpenuhinya mandatory spending pada bidang infrastruktur tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian yang menuntut dilakukannya penyesuaian kebijakan fiskal. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Bupati Nomor 063 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja, sehingga berdampak pada belum optimalnya pemenuhan alokasi mandatory spending di bidang infrastruktur.

Rincian mengenai Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1.k.

4) Dalam rangka bidang pengawasan

   Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi alokasi dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Dimana berdasarkan total belanja daerah

dengan klasifikasi pemerintah daerah kabupaten/kota diatas Rp2.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah

Adapun pengalokasian anggaran dan realisasi unsur pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Anggaran Dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Pengawasan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Anggaran Pengawasan	30.408.129.304,00	25.088.897.285,00
Total Belanja Daerah	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79
Rasio (%)	0,70%	0,65%

Untuk alokasi anggaran unsur pengawasan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan sebesar Rp30.408.129.304,00 atau 0,70% dari total belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi anggaran pengawasan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp25.088.897.285,00 atau 0,65% dari total belanja daerah.

5) Kebijakan pembayaran kewajiban atas hutang pihak lain TA. 2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang persiapan penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, terdapat arahan untuk melakukan pembayaran kewajiban atas hutang pihak ke-3 Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan dalam anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp393.634.035.524, yaitu dengan menggunakan anggaran kurang bayar s.d tahun 2023 pada PMK 89/2024 baik yang sudah salur dalam bentuk TDF (KMK 44/2024) ataupun yang belum diatur penyalurannya sebesar Rp, 558.436.774.000,-, karena BTT tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban, mengingat bahwa Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2023 belum dimasukan dalam prognosis Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2025.

Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, khususnya pada lampiran halaman 99 angka 3.4.3 huruf d angka 2)b) sub (2), yang menyatakan bahwa kewajiban kepada pihak lain dikategorikan sebagai belanja yang bersifat wajib dan termasuk dalam keperluan mendesak.

6) Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2025 sebesar Rp276.316.145.888,00 dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp276.289.125.112,00 atau telah terealisasi sebesar 99,99%. Adapun pengalokasian anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Anggaran Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
Anggaran Alokasi Dana Desa diluar ADDK yang Tidak Tersalurkan TA.2024	276.316.145.888,00	276.289.125.112,00

Total Dana Tranfer Umum (DBH + DAU)	2.554.226.363.000	2.421.715.276.388,00
Rasio (%)	10,82%	11,41%

Untuk alokasi anggaran Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan sebesar Rp276.316.145.888,00 atau 10,82% dari total Dana Transfer Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp276.289.125.112,00 atau 11,41% dari dari total Dana Transfer Umum dikurang dengan DBH Kurang Bayar Tahun 2023 yang dianggarkan pada APBD Tahun 2025 (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).

7) Belanja Pegawai

Pengalokasian belanja pegawai diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 146 ayat (1) "Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD."

Adapun anggaran dan realisasi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN			Pergeseran setelah Perubahan 2025	Realisasi
1.	a.	Total Belanja Daerah		4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79
		1)	Belanja Pegawai	1.605.850.647.744,57	1.459.387.408.621,22
		2)	Jumlah Tunjangan Guru (a+b+c)	208.501.231.435,00	185.717.267.212,00
		a.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	193.134.453.405,00	172.195.567.739,00
		b.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.543.803.030,00	11.913.301.973,00
		c.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.822.975.000,00	1.608.397.500,00
		3)	Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	1.397.349.416.309,57	1.273.670.141.409,22
2.	Presentase Belanja Pegawai terhadap APBD			**32,39%**	**32,90%**

Pada Tahun Anggaran 2025, persentase belanja pegawai dalam APBD tercatat telah melampaui batas 30%. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap proporsi belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana hal ini akan menambah postur APBD secara keseluruhan yang dapat menurunkan persentase belanja pegawai. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu restrukturasi kelembagaan dengan melakukan perampingan organisasi perangkat daerah, penggabungan unit kerja yang tidak efektif, serta pengurangan jabatan struktural yang tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga melakukan rasionalisasi kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan beban kerja.

8) Proyek Strategis

Adapun rincian Proyek Strategis Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.10. Daftar Proyek Strategis Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :**	**60.395.775.275,00**	**44.240.914.138,20**
1	Peningkatan Ruas Jalan Trans B3 (Bukit Indah) - Kramat Jaya (DBH Sawit)	7.684.775.275,00	7.604.069.000,00
2	Lapis Ulang dalam Kota Sekayu dengan Aspal Hotmix, Kec. Sekayu	7.969.000.000,00	7.505.228.950,00
3	Lanjutan Pemeliharaan Ruas Jalan Jirak - Trans. D1 (Mekar Jaya)	5.958.000.000,00	5.449.573.350,00
4	Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan P11 (Galih Sari) - Perbatasan Muba	5.958.000.000,00	4.077.676.088,20
5	Peningkatan Ruas Jalan Sukarami - Simpang Sari - Tanah Abang - Saut - Simpang Selabu - Dawas - C2	9.945.000.000,00	7.389.666.750,00
6	Lanjutan Pemeliharaan Ruas Jalan Km.11 - Sido Rahayu (B2), Kec. Plakat Tinggi	5.964.000.000,00	5.629.728.500,00
7	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Sari - Bandar Jaya	8.961.000.000,00	6.584.971.500,00
8	Pembangunan Jembatan Desa Muara Teladan Menuju Talang Salaburau Kec. Sekayu	7.956.000.000,00	0,00
2.	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN :**	**23.510.000.000,00**	**18.267.093.000,00**
1	Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu (MPP) Sekayu	7.000.000.000,00	6.895.000.000,00
2	Pembangunan Masjid Miftahul Huda Jalan Peternakan Rt. 015 Rw. 01 Kel. Serasan Jaya	3.600.000.000,00	0,00

No.	Nama Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Lanjutan Pembangunan Rumah Relokasi di Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu	3.500.000.000,00	3.356.741.000,00
4	Penataan Halaman dan Rehab Masjid Jami Annur Sekayu	3.240.000.000,00	3.190.868.000,00
5	Pembangunan Sarpras dan Penataan Lingkungan Mako Brimob Kec. Sekayu	2.670.000.000,00	2.612.813.000,00
6	Pembangunan dan Rehab Drainase Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu	2.000.000.000,00	1.228.663.000,00
7	Rehab Drainase di Perumahan Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu	1.500.000.000,00	983.008.000,00
3.	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :**	**8.434.110.000,00**	**7.265.345.500,00**
1	Pembangunan Gedung Serbaguna Korwil Dikbud Kec. Plakat Tinggi	1.500.000.000,00	926.679.000,00
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Perumahan Griya Bumi Lestari Kec. Balai Agung Kec. Sekayu	1.150.000.000,00	1.005.340.500,00
3	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Muara Baru (Filial) Kec. Bayung Lencir	1.107.450.000,00	1.029.937.000,00
4	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Tebing Merana (Filial) Kec. Bayung Lencir	1.107.450.000,00	1.046.750.000,00
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Galih Sari Kec. Lalan	1.061.760.000,00	916.700.000,00
6	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 Bayung Lencir	1.107.450.000,00	1.089.939.000,00
7	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMPN 1 Sekayu Kec. Sekayu	1.400.000.000,00	1.250.000.000,00
4.	**DINAS KESEHATAN :**	**16.275.428.000,00**	**15.185.026.000,00**
1	Penambahan Ruang Puskesmas Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan (DAK Fisik)	8.637.714.000	7.975.000.000,00
2	Penambahan Ruang Puskesmas Bukit Selabu Kec. Batang Hari Leko (DAK Fisik)	7.637.714.000	7.210.026.000,00
5.	**DINAS SOSIAL :**	**45.633.000.000,00**	**23.756.275.000,00**
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	39.585.000.000,00	17.708.275.000,00
2	luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Kategori Pekerja Rentan	6.048.000.000,00	6.048.000.000,00
6.	**DINAS PERKEBUNAN :**	**12.995.302.998,00**	**12.803.478.000,00**

1	Pembangunan Jalan Produksi Desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan KT. Sinar Tani	950.000.000,00	933.009.000,00
2	Pembangunan Jalan Produksi Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman KT. Tani Pantra	950.000.000,00	936.724.000,00
3	Pembangunan Jalan Produksi KT Barokah Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir	1.615.000.000,00	1.587.708.000,00
4	Pembangunan Jalan Produksi Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir KT. Srimulyo	760.000.000,00	748.900.000,00
5	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa	348.843.499,00	344.157.000,00
6	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Ingin Maju Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa	305.924.415,00	301.419.000,00
7	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Batu Belide Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa	226.217.499,00	223.008.000,00
8	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Lebung Selang Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa	772.765.799,00	760.465.000,00
9	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Suka Maju Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa	563.438.999,00	556.640.000,00
10	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Bayung Jaya Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman	410.156.499,00	403.101.000,00
11	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Bayung Sejahtera Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman	428.550.399,00	421.863.000,00
12	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Sungai Putih Mekar Jaya Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman	410.156.499,00	403.101.000,00
13	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu	704.458.899,00	693.446.000,00
14	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Seluas 100 Ha Kelompok Tani Margo Tani Desa Air Putih Ulu C1 Kecamatan Plakat Tinggi	655.408.499,00	693.446.000,00
15	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Manunggal Karso Desa Air Putih Ulu C1 Kecamatan Plakat Tinggi	661.539.799,00	644.304.000,00
16	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Among Kesmo Desa Tanjung Kaputran Kecamatan Plakat Tinggi	459.206.899,00	452.084.000,00
17	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Sukarela Desa Tanjung Kaputran Kecamatan Plakat Tinggi	630.883.299,00	619.870.000,00
18	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Daihatsu Roxy Desa Kasmaran Kecamtan Babat Toman	655.408.499,00	645.381.000,00
19	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Tani Setia Bakti Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman	465.338.199,00	457.731.000,00

20	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Pagar Kaye Kecamatan Sungai Keruh	330.449.599,00	328.114.000,00
21	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Kelompok Tani Suka Maju Desa Pagar Kaye Kecamatan Sungai Keruh	324.318.299,00	322.011.000,00
22	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kelompok Kelompok Tani Serasi Jaya Desa Pagar Kaye Kecamatan Sungai Keruh	367.237.399,00	364.733.000,00
7.	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI :**	**2.163.735.000,00**	**2.163.735.000,00**
1	Pelatihan Sub Sektor Industri Minyak dan Gas 2 Jurusan Untuk 40 Orang Peserta dan Pelatihan Bahasa Jepang 80 Orang	2.163.735.000,00	1.582.269.000,00
8.	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN :**	**2.678.724.480,00**	**2.678.724.480,00**
1	Jasa Penyelenggaraan Acara Muba Expo 2025	2.678.724.480,00	2.545.292.961,00
9.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :**	**5.884.800.000,00**	**4.879.825.527,00**
1	Belanja Bandwidth Untuk Seluruh Perangkat Daerah	2.832.000.000,00	2.580.000.000,00
2	Belanja Sewa Jaringan Metro E	2.322.000.000,00	1.878.835.527,00
3	Belanja Internet Setelit	730.800.000,00	420.990.000,00
10.	**RSUD SEKAYU**	**5.000.000.000,00**	**4.558.696.726,00**
1	Pembangunan Gedung IGD RSUD Sekayu (DAK Fisik)	4.763.000.000,00	4.322.936.726,00
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi (DAK Fisik)	237.000.000,00	235.760.000,00
	TOTAL :	**182.970.875.753,00**	**135.799.113.371,20**

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA. 2025 Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih menemui hambatan dan kendala, antara lain :

a. Kinerja Pendapatan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah;
2) Adanya kebijakan internal beberapa perusahaan/pihak ketiga yang bergerak

di bidang reklame dalam pengurangan penyelenggaraan reklame rokok dan elektronik di Kabupaten Musi Banyuasin;

3) Potensi pajak sarang burung walet yang berkurang disebabkan karena pengaruh harga jual sarang burung walet yang rendah, kondisi cuaca, adanya pencurian terhadap hasil panen dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan hasil/omset yang sebenarnya serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sarang burung walet;
4) Belum Optimal penggalian potensi pajak Kendaraan Bermotor;
5) Adanya Efisiensi Anggaran pada Perangkat Daerah sehingga mengurangi kegiatan yang memberikan kontribusi dalam Penerimaan PBJT atas jasa Perhotelan, PBJT atas Makan dan/atau Minuman serta PBJT atas jasa kesenian dan Hiburan;
6) Masih banyak masyarakat yang belum menerima SPPT PBB meskipun SPPT PBB telah disampaikan diawal tahun melalui Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
7) Belum optimalnya validasi data PBB-P2 dan penggalian potensi PBB-P2;
8) Masih lemahnya kemampuan finansial masyarakat sehingga menyulitkan membayar PBB P2 tepat waktu;
9) Terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang relative sedikit;
10) Maraknya pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
11) Belum optimalnya penggalian potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutama pada perusahaan perkebunan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah;
2) Terus berupaya menggali potensi pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
3) Melakukan MoU dengan Instansi terkait seperti Kejaksaan, Satpol-PP, Bank Sumsel Babel, Kantor Pos, Bank BRI, dalam rangka perluasan pembayaran Pajak Daerah;
4) Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah melalui perubahan regulasi dibidang perpajakan;
5) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas petugas pengelola pajak;
6) Penggunaan alat perekam transaksi pada PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, dan Jasa Kesenian dan Hiburan guna mempermudah pengawasan dan pemeriksaan terhadap objek pajak yang memiliki potensi penerimaan daerah;
7) Inovasi pembayaran pajak daerah menggunakan virtual account guna memberikan kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat atau wajib pajak;
8) Melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi bagi masyarakat atau

wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;

9) Pemasangan alat ukur air (*water flow meter*) untuk wajib pajak air tanah; dan
10) Melakukan penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah secara insentif.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi PAD:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
2) Melakukan profiling/mendata ulang/validasi/pemutakhiran data pajak daerah sehingga memperkuat basis data yang dimiliki;
3) Membuat benchmarking pajak guna mengindentifikasi masalah dan merumuskan solusi terbaik sehingga mengoptimalkan pendapatan asli daerah yaitu :
   a) Melakukan koordinasi dengan KPP Pratama guna memperkuat basis data sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan KPP Pratama.
   b) Melaksanakan joint operation pemeriksaan dan penagihan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan KPP Pratama.
   c) Melakukan koordinasi atas kewajiban pemohon dan wajib pajak guna memenuhi ketentuan perizinan dan perpajakan berdasarkan MoU dengan DPMPTSP.
4) Melakukan intensitas pemungutan pajak daerah;
5) Memperluas subjek dan objek pajak sehingga menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah yaitu :
   a) Melakukan extensifikasi dan intensifikasi objek pajak
   b) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan objek pajak baru yang belum melaporkan pajaknya ke BPPRD Kab. Muba
   c) Mensosialisasikan peraturan atas perluasan objek pajak daerah :
      (1) PAT : Sumur Bor
      (2) Pjk. Reklame : Reklame yang melekat di dinding
      (3) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan : Taman Wisata
      (4) PBJT atas makanan dan minuman : Café/Toko kue yang menyediakan peralatan makan dan minum.
   d) Mensosialisasikan Surat Edaran Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tentang pentingnya memindahkan pencatatan dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ke Kabupaten Musi Banyuasin (Opsen PKB dan Opsen BBNKB) ke pelaku usaha/Perusahaan diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
6) Mengoptimalkan Pengelolaan pajak daerah;
7) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah;
8) Melakukan penyesuaian regulasi jika ada Perubahan pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait Pajak dan Retribusi Daerah;

9) Menggali potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
10) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah.
11) Digitalisasi Pelayanan BPHTB

Hal-hal yang mempengaruhi over target :

1) Meningkatnya data objek pajak baru dan tervalidasinya data objek pajak;
2) Meningkatnya penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
3) Meningkatnya pengawasan terhadap Wajib Pajak; dan
4) Tertagihnya tunggakan dan piutang Pajak Daerah.

Dasar/ prosedur penetapan Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
4) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
5) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu;
7) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Reklame;
8) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
9) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tata cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
10) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
11) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata cara Nilai Perolehan Air Tanah.

b. Kinerja Belanja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

1) Terlambatnya proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan fisik konstruksi;
2) Terdapat 8 (delapan) program yang pada tahun anggaran 2025 tidak memiliki alokasi anggaran yang terdiri dari;
   (a) Program Pengembangan Permukiman;

(b) Program Kawasan Permukiman;
(c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
(d) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
(e) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
(f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha yang Terkait Dengann Pplh;
(g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
(h) Program Informasi dan Komunikasi Publik.

3) Fluktuasi harga yang sangat signifikan yang menyebabkan harga pasar tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
4) Khusus untuk kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baru pelaksanaannya dikarenakan menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan RI;
5) Baru dimulainya proses pengadaan barang dan jasa kegiatan yang bersumber dari dana bantuan keuangan bersifat khusus (BKBK) Provinsi Sumatra Selatan pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata;
6) Adanya kegiatan yang menentang secara prosedural dimulai pada triwulan ke III dan pada kegiatan yanag sifatnya tidak terduga (kejadian luar biasa/bencana alam/cuaca ekstrim);
7) Terjadi migrasi e-catalog versi 5 ke versi 6;
8) Masih minimnya personil lainnya yang bersertifikat kompetensi dan pejabat pembuat komitmen bersertifikat kompetensi (tipe C).
9) Terdapat ISU rotasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi kinerja belanja:

1) Melengkapi proses persyaratan pemilihan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang memerlukan penyedia sehingga tender dapat segera dilakukan ;
2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan efisiensi anggaran agar menyesuaikan ketentuan dan jadwal perencanaan yang telah disusun dengan tetap memperhatikan pencapaian output kegiatan;
3) Menginstruksikan ASN untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi PBJ level 1 dan PPK Tipe C ;
4) Segera mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dana nya bersumber dari dana alokasi khusus sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait;
5) Memperhatikan dimulainya kegiatan yang secara procedural memiliki periodesasi pelaksanaan tertentu;
6) Terkait rotasi pejabat struktural,agar pengguna anggaran segera menetapkan KPA, PPK, BENDAHARA DAN PPSM;
7) Melakukan pencermatan Kembali dalam proses perencanaan agar setiap pengusulan program bisa diikuti dengan pengealokasian dana;
8) Agar SKPD yang memiliki paket pekerjaan kontraktural dengan bagiab pengadaan barang dan jasa setda kab.MUBA terkait e-catalog versi 5 dan 6

9) Agar dioptimalkan pencapaian realisasi fisik dan penyerapan keuangan pertriwulan sesuai dengan anggaran kas dan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai keseimbangan antara realisasi fisik dan penyerapan keuangan.
10) SKPD agar melakukan langkah kreatif dan inovatif dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan dalam percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan indicator kinerja.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 47 SKPD.

Adapun perangkat daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1.01.2.22.5.02.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan
3	1.03.2.15.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1.04.1.03.2.10.05.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	1.05.0.00.0.00.08.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.05.1.04.0.00.07.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1.05.8.01.0.00.06.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1.06.0.00.0.00.09.0000	Dinas Sosial
9	2.07.3.32.5.06.10.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10	2.08.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	2.09.0.00.0.00.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan
12	2.11.0.00.0.00.13.0000	Dinas Lingkungan Hidup
13	2.12.0.00.0.00.14.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	2.13.4.01.0.00.15.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	2.14.0.00.0.00.16.0000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
16	2.15.0.00.0.00.17.0000	Dinas Perhubungan
17	2.16.2.20.2.21.18.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	2.17.0.00.0.00.19.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	2.18.4.01.0.00.20.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2.19.3.26.0.00.21.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
21	2.23.2.24.0.00.22.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
22	3.25.0.00.0.00.23.0000	Dinas Perikanan

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
23	3.27.2.20.0.00.24.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
24	3.27.2.20.0.00.25.0000	Dinas Perkebunan
25	3.30.3.31.0.00.26.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	4.01.5.02.0.00.27.0000	Sekretariat Daerah
27	4.02.0.00.0.00.28.0000	Sekretariat DPRD
28	5.01.5.05.0.00.44.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	5.02.0.00.0.00.45.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
30	5.02.0.00.0.00.46.0000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
31	5.03.0.00.0.00.47.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
32	6.01.0.00.0.00.44.0000	Inspektorat
33	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Sekayu
34	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Lais
35	7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Babat Toman
36	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Keluang
37	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Sanga Desa
38	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Plakat Tinggi
39	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Batanghari Leko
40	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Sungai Keruh
41	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Sungai Lilin
42	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Bayung Lencir
43	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Lalan
44	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Tungkal Jaya
45	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Lawang Wetan
46	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Babat Supat
47	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Jirak Jaya

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan (Laporan Realisasi Anggaran), dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (Neraca), serta pengakuan Pendapatan-LO dan Beban-LO, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I SAP Berbasis Akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah

hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Komponen laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini disajikan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD Kabupaten Musi Banyuasin. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

a) Pendapatan;
b) Belanja;
c) Surplus/defisit;
d) Pembiayaan; dan
e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

(a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;

(b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah(BUD);

(c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan atas dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG);

(d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

(e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan; dan

(f) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima desa dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan atas dana desa yang berasal dari pemerintah pusat dengan syarat wajib melaporkan kepada BUD dan pengesahannya disahkan oleh BUD.

(2) Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak dalam jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(3) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

(a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

(a) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;

(b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

(c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;

(d) Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP atas pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD diakui sebagai belanja setelah dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan; dan

(e) Belanja dana desa atas pendapatan yang diterima langsung oleh desa diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.

(2) Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.

(3) Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi; belanja modal; belanja tak terduga; belanja transfer dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

c) Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar-LRA adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

(1) Pengakuan

Transfer masuk dan pendapatan transfer

(a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah; dan

(b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Transfer keluar

(a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D sudah dicairkan atas beban anggaran transfer keluar; dan

(b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

(2) Pengukuran

Transfer masuk dan pendapatan transfer

(a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di rekening kas umum daerah; dan
(b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar

(a) Untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
(b) Untuk kepentingan penyusunan laporan operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penilaian

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam laporan operasional.

Meskipun demikian, jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

(4) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

(a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada laporan realisasi anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada laporan operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
(b) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam laporan realisasi anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada laporan operasional;

(c) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
(d) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan apabila terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan
(e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut.

(a) Penjelasan atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada laporan realisasi anggaran, rincian realisasi beban transfer pada laporan operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
(b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
(c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam laporan realisasi anggaran dengan realisasi beban transfer pada laporan operasional; dan
(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). LPSAL memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut.

a) Saldo anggaran lebih awal;
b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
e) Saldo anggaran lebih akhir.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang

diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

a) Kas dan setara kas;
b) Investasi jangka pendek;
c) Piutang;
d) Persediaan;
e) Investasi jangka panjang;
f) Aset tetap;
g) Kewajiban jangka pendek;
h) Kewajiban jangka panjang; dan
i) Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut.

a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi; dan
c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, dan mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(1) Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(2) Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari

manajemen kas dan buka merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada laporan arus kas.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

(1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;

(2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan

(3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai kas dan setara kas.

c) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

(1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

(3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum ditransfer yang merupakan hak pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan.

Catatan: Sehubungan Dana Otsus hanya diperuntukkan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan NAD maka pengaturan kebijakannya disesuaikan kondisi setempat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka hak tagih timbul pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh pemerintah pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian pemerintah daerah yang belum dibayar.

Piutang dana transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang yang bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah terdapat surat ketetapan surat penagihan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

(1) Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

(a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

(b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Kepala Daerah cq Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk Wajib Pajak Daerah (WPD) yang mengajukan keberatan; dan

(c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan
Piutang yang timbul dari kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul karena adanya pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

(a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
(b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat; dan
(c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan seperti yang dikemukakan di atas, sebagai berikut.

(a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
(b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya *(subsequent measurement)* terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(2) Penilaian

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

(a) Kualitas piutang lancar;
(b) Kualitas piutang kurang lancar;
(c) Kualitas piutang diragukan; dan
(d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(a) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak daerah *(self assessment);* dan
(b) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah *(official assessment).*

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak daerah *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
    (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah kooperatif; dan/atau
    (5) Wajib pajak daerah likuid; dan/atau
    (6) Wajib pajak daerah tidak mengajukan keberatan/banding.
(b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
    (2) Apabila wajib pajak terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    (5) Wajib pajak daerah mengajukan keberatan/banding.
(c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang dua tahun lebih sampai dengan lima tahun; dan/atau
    (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    (5) Wajib pajak daerah mengalami kesulitan likuiditas.
(d) Kualitas macet, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
    (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah tidak ditemukan; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    (5) Wajib pajak daerah mengalami musibah *(force majeure).*

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
    (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah kooperatif; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah likuid; dan/atau
    (5) Wajib pajak daerah tidak mengajukan keberatan/banding.
(b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
    (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah kurang kooperatif; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah mengajukan keberatan/banding.
(c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang dua tahun lebih sampai dengan lima tahun; dan/atau
    (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah tidak kooperatif; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah mengalami kesulitan likuiditas.
(d) Kualitas macet, dengan kriteria:
    (1) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
    (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
    (3) Wajib pajak daerah tidak ditemukan; dan/atau
    (4) Wajib pajak daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    (5) Wajib pajak daerah mengalami musibah *(force majeure)*.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak daerah khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

(a) Kualitas lancar, jika umur piutang nol sampai dengan satu bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan;
(b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari satu bulan sampai dengan tiga bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
(c) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari tiga bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau sejak tanggal surat tagihan kedua yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
(d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak daerah selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
(b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
(c) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
(d) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4.2. Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
1	Lancar	0,5
2	Kurang Lancar	10
3	Diragukan	50
4	Macet	100

d) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk Beban Dibayar Dimuka diantaranya:

(1) Pengakuan

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran namun pemerintah daerah belum menerima manfaat atas pembayaran tersebut, yang selanjutnya pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas manfaat yang telah diperoleh. Beban Dibayar Dimuka harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban serta periode masa manfaat yang jelas.

(2) Pengukuran dan Penilaian

Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai nominal pembayaran dikurangi dengan perhitungan nilai manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah. Perhitungan nilai manfaat dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. Nilai manfaat yang telah diterima dicatat sebagai beban pada akhir periode pelaporan.

(3) Penyajian dan Pengungkapan

Beban Dibayar Dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun Beban Dibayar Dimuka diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan dua kondisi, yaitu:

(1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
Beban diakui sebelum pengeluaran kas selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

(2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca). Perhitungan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan metode perhitungan secara harian dengan jumlah hari sebanyak 365 hari dalam satu tahun.

e) Persediaan

(1) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

(a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

(2) Pencatatan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

(3) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Persediaan dicatat secara periodik. Oleh karena itu, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

f) Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

(1) Metode biaya

Dengan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

(3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Tabel 4.3. Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan (%)
1	2	3
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun	0,5
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun	10
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun	50

4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100

Penggunaan metode tersebut di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut.

(1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan

(4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g) Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh, nilainya dapat diukur dengan handal dan terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

(6) Merupakan objek pemeliharaan atau membutuhkan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

(7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan *(Capitalization Thresholds).*

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) perolehan awal aset tetap dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus diakui sebagai komponen aset tetap (dikapitalisasi) atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terbagi dalam:

(1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;

(2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00; dan

(3) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dan tidak berlaku surut.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban operasional kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kebudayaan.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
    (a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    (b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
    (c) Bertambah volume; dan/atau
    (d) Bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Perhitungan penyusutan dan amortisasi menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap berikut tidak dilakukan penyusutan, yaitu:

(1) Tanah;

(2) Konstruksi dalam pengerjaan, sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan tersebut jadi dan siap pakai;

(3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati;

(4) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang pengelolaan aset daerah untuk diusulkan dan dilakukan penghapusan;

(5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang pengelola aset daerah untuk dilakukan penghapusan.

Aset Hewan dan Tanaman tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud apabila informasi tentang harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan atas aset tersebut tidak ditemukan.

h) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

(1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian, dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah, pertukaran, kerjasama, dan donasi/hibah. Aset tidak berwujud harus dapat diidentifkasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.

Contoh aset tidak berwujud adalah:

(a) Goodwill;
(b) Hak Cipta;
(c) Hak Paten;
(d) Royalti;
(e) Software;
(f) Lisensi dan franchise;
(g) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang;dan
(h) Aset Tak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (software) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Maka masa manfaat aset tak berwujud di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama 5 tahun kecuali masa manfaat ATB ditetapkan dalam perolehan ATB. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu tahun. Nilai Amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai beban Amortisasi dan dicatat pada Akuntansi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai pengurang nilai Aset Tidak Berwujud.

(5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

i) Properti Investasi

(1) Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

(a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

(2) Pengukuran Saat Pengakuan Awal

(a) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

(b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

(c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian clan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak clan biaya transaksi lainnya.

(d) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

(e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

(f) Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

(g) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasiftkasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

(h) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

(i) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

(j) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
1) Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
2) Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
3) Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

(k) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

1) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau

2) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

(l) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

(3) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

(a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(b) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

(c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

(d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

(e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

(f) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

(g) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi ftsik properti investasi tersebut.

(h) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

(i) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

(j) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

1) Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
2) Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
3) Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

(k) Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

(l) Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

j) Kewajiban

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, pendapatan diterima dimuka, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Perhitungan nilai pendapatan diterima dimuka dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan pada saat kas diterima, pada saat akhir periode pelaporan masih terdapat kewajiban belum dilaksanakan diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka dilakukan dengan metode perhitungan secara harian dengan jumlah hari sebanyak 365 hari dalam satu tahun.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

(a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
(b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
(c) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang penyelesaiannya sebelum laporan keuangan disetujui.

k) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut.

a) Pendapatan-LO;
b) Beban;
c) Surplus/defisit dari operasi;
d) Kegiatan non operasional;
e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
f) Pos luar biasa; dan

g) Surplus/defisit-LO.

Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

(1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);

(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi; dan

(3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Akuntansi pendapatan-LO diakui berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, tidak dalam jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Beban-LO

Beban pada laporan operasional diakui:

(1) Pada saat timbulnya kewajiban;

(2) Pada saat terjadinya konsumsi aset; dan

(3) Pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, telepon, internet dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS serta honorarium pegawai hononer/tidak tetap adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Struktur laporan perubahan ekuitas mencakup pos-pos sebagai berikut.

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan

d) Ekuitas akhir.

4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

c. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik *(reciprocal)* maupun tanpa mengeliminasinya.

d. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada SKPD yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut.

    1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahinya.
    2) Neraca BLUD digabungkan kepada Neraca satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahinya.
    3) Laporan Operasional digabungkan kepada Laporan Operasional satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahinya.
    4) Laporan Perubahan Ekuitas digabungkan kepada Laporan Perubahan Ekuitas satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahinya.
    5) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
    6) Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL bendahara umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp4.290.369.812.775,59	**Rp3.968.164.168.909,51**	**Rp3.754.947.990.722,66**

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan sebesar Rp4.290.369.812.775,59 dengan realisasi sebesar Rp3.968.164.168.909,51 atau 92,49% dari nilai anggaran. Realisasi tersebut naik sebesar Rp213.216.178.186,85 atau 5,68% dibandingkan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.754.947.990.722,66. Komposisi pencapaian realisasi Pendapatan per kelompok Pendapatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Rincian Pendapatan Per Kelompok Pendapatan-LRA
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	587.378.681.108,99	561.951.316.985,08	95,67	393.331.951.633,26
2	Pendapatan Transfer - LRA	3.702.991.131.666,60	3.406.212.851.924,43	91,99	3.354.108.863.089,40
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	7.507.176.000,00
Jumlah		**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**92,49**	**3.754.947.990.722,66**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp587.378.681.108,99	**Rp561.951.316.985,08**	**Rp393.331.951.633,26**

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan PAD sebesar Rp587.378.681.108,99 dengan realisasi sebesar Rp561.951.316.985,08 atau 95,67% dari nilai anggaran. Anggaran di 2024 sebesar Rp619.651.955.525,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp32.273.274.416,01 dikarenakan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2024 dianggarkan Participating Interest (PI 10%) dari BUMD PT Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp202.000.000.000,00 pada rekening Lain-Lain PAD yang Sah namun hingga akhir tahun tidak terealisasi karena proses tahapan belum selesai sehingga pada TA. 2025 tidak dianggarkan kembali. Sementara itu Realisasi PAD TA. 2025 naik sebesar

Rp168.619.365.351,82 atau 42,87% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp393.331.951.633,26. Rincian penerimaan PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	99,04	113.650.131.384,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.660.787.000,00	9.914.556.645,00	175,14	6.626.027.122,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,32	27.898.190.463,75
4	Lain-lain PAD yang Sah	327.742.877.358,99	311.812.260.408,11	95,13	245.157.602.663,51
Jumlah		**587.378.681.108,99**	**561.951.316.985,08**	**95,67**	**393.331.951.633,26**

a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp223.975.016.750,00	**Rp221.828.935.874,35**	**Rp113.650.131.384,00**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2025. Dasar pemungutan Pajak Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
8) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
9) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
10) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame.
11) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pajak Walet.
12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pajak Daerah sebesar Rp223.975.016.750,00 dengan realisasi sebesar Rp221.828.935.874,35 atau 99,04% dari nilai anggaran. Realisasi Pajak Daerah tersebut naik sebesar Rp108.178.804.490,35 atau 95,19% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp113.650.131.384,00. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pajak Reklame - LRA	2.729.859.000,00	1.966.095.017,00	72,02	1.543.727.943,00
2	Pajak Air Tanah - LRA	420.000.000,00	494.109.277,35	117,65	441.129.655,00
3	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	249.522.750,00	124.516.000,00	49,90	185.995.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.029.103.000,00	7.616.339.132,00	375,35	2.154.819.361,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LRA	29.904.394.000,00	29.645.996.684,00	99,14	20.159.511.725,00
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	25.139.938.000,00	7.529.732.798,00	29,95	22.025.247.116,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	73.502.200.000,00	96.471.738.738,00	131,25	67.139.700.584,00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	60.000.000.000,00	31.854.033.228,00	53,09	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.000.000.000,00	46.126.375.000,00	153,75	0,00
Jumlah		**223.975.016.750,00**	**221.828.935.874,35**	**99,04**	**113.650.131.384,00**

Tabel di atas menggambarkan dari sembilan jenis Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2025, sebanyak empat jenis pajak terealisasi melebihi target yang dianggarkan dan lima jenis pajak lainnya tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai penyerapan pajak daerah sebagai berikut.

1) Pajak Reklame

   Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi.

   a) Reklame Papan, *Videotron, Billboard, Megatron*, Baliho, *Shopsign, Tinplate*;
   b) Reklame Kain, *Screen*, *Vertical Banner*;
   c) Reklame melekat, stiker dan poster;
   d) Reklame selebaran;
   e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
   f) Reklame udara;
   g) Reklame apung;
   h) Reklame suara;
   i) Reklame film/slide; dan
   j) Reklame peragaan.

   Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah.

   a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
   b) Penyelenggaraan Reklame calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
   c) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
   d) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
   e) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

   Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Target Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp2.729.859.000,00 terealisasi sebesar Rp1.966.095.017,00 atau 72,02% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.927.966.563,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp38.128.454,00 Adapun penjelasan mengenai Realisasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut.

a) Target Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* sebesar Rp2.314.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.618.646.268,00 atau 69,95% Hal ini dikarenakan rendahnya kegiatan/event di Kabupaten Musi Banyuasin yang menggunakan Reklame *Papan/Billboard/Videotron/Megatron*.
b) Target Pajak Reklame Kain sebesar Rp345.000.000,00 terealisasi sebesar Rp315.447.169,00 atau 91,43%. Hal ini dikarenakan.
   (1) Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
   (2) Rendahnya kegiatan/*event* di Kabupaten Musi Banyuasin yang menggunakan Reklame Kain.
c) Target Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp25.859.000,00 terealisasi sebesar Rp20.835.955,00 atau 80,57%. Hal ini dikarenakan.
   (1) Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
   (2) Rendahnya kegiatan/*event* di Kabupaten Musi Banyuasin yang menggunakan Reklame Melekat/Stiker.
d) Target Pajak Reklame Berjalan dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.165.625,00 atau 24,81%. Hal ini dikarenakan rendahnya kegiatan/*event* di Kabupaten Musi Banyuasin yang menggunakan Reklame Berjalan.

2) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut.

a) Jenis sumber air.
b) Lokasi sumber air.
c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
d) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
e) Kualitas air.
f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Target Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp420.000.000,00 tercapai sebesar Rp494.109.277,35 atau 117,64% merupakan realisasi pendapatan

sebesar Rp487.224.027,35 dan pembayaran piutang sebesar Rp6.885.250,00. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut adalah sebagai berikut.

a) Adanya perubahan ketetapan setelah dilakukan pemeriksaan pajak objek pajak.
b) Beberapa objek pajak telah menggunakan water meter yaitu instrumen yang mengukur volume air yang mengalir (kerja sama dengan PDAM Muba).

3) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dalam bentuk pengambilan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami. Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet baik di habitat alami maupun di luar habitat alami ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp249.522.750,00 terealisasi sebesar Rp124.516.000,00 atau 49,90% merupakan merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp122.466.000,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.050.000,00. Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh:

a) Banyak keluhan dari wajib pajak karna harga sarang burung walet mengalami penurunan hingga 67% disebabkan tutupnya ekspor sarang burung walet ke China
b) Populasi walet berpindah (migrasi walet), sehingga penurunan hasil panen.
c) Banyak pelaku usaha tidak memiliki izin resmi sehingga sulit dilakukan intervensi sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak.

4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan Batuan yang meliputi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, *bentonit, dolomit, feldspar*, garam batu (*halite*), *grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker*, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, *perlit, phospat, talk*, tanah serap (*fullers earth*), tanah *diatome*, tanah liat, *tras, yarosif, zeolite, basal, traktit*, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar pengenaan Pajak. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung

dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Besar tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% (dua puluh persen).

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 sebesar Rp2.029.103.000,00 terealisasi sebesar Rp7.616.339.132,00 atau 375,35% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp7.581.442.069,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp34.897.063,00. Adapun penjelasan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut.

a) Target Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp679.103.000,00 terealisasi sebesar Rp530.737.668,00 atau 78,15%. Rendahnya pencapaian ini karena pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin banyak yang belum dilaksanakan.
b) Target Pajak Tanah Liat sebesar Rp1.350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.085.601.464,00 atau 524,85%. Pencapaian tersebut dikarenakan meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak.

5) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang.

a) Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelengaraan pemerintahan.
b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman nasional, tanah pengembangan yang di kuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
f) Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut.

a) Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

b) Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun.
c) Untuk NJOP di atas Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun.
d) Untuk NJOP di atas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun.
e) Untuk NJOP di atas Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
f) Untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.

Target PBB Perdesaan Perkotaan Tahun 2025 sebesar Rp29.904.394.000,00 terealisasi sebesar Rp29.645.996.684,00 atau 99,13% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp28.748.703.236 dan pembayaran piutang sebesar Rp897.293.448,00. Pencapaian realisasi tersebut dikarenakan.

a) Masih banyaknya Wajib Pajak PBB P2 yang tidak berdomisili di lokasi Objek Pajak sehingga menyulitkan petugas pemungut pajak melakukan penagihan terhadap wajib pajak tersebut.
b) Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.
c) Masih lemahnya kemampuan finansial masyarakat sehingga menyulitkan membayar PBB P2 tepat waktu.
d) Masih Lemahnya sanksi yang diberikan terhadap masyarakat.

6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari.

a) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
c) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
d) Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau

Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan tarif yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.139.938.000,00 terealisasi sebesar Rp7.529.732.798,00 atau 29,95% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp7.231.672.318,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp298.060.480,00. Adapun penjelasan mengenai Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut.

a) Target BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp8.895.077.000,00 terealisasi sebesar Rp4.315.087.939,00 atau 48,51%. Pencapaian ini dikarenakan.
   (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang membuat sertifikat hak milik.
   (2) Belum tergalinya potensi BPHTB di perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
   (3) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan BPHTB sesuai nilai jual pasar, menyebabkan penerimaan dari Pajak BPHTB tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
b) Target BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp16.244.861.000,00 terealisasi sebesar Rp3.214.644.859,00 atau 19,78%. Pencapaian ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat yang membuat sertifikat hak milik.

7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, jasa tenaga listrik, dan jasa parkir.

Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) kecuali tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa serta PBJT atas Tenaga Listrik.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp73.502.200.000,00 terealisasi sebesar Rp96.471.738.738,00 atau 131,25%. Adapun penjelasan mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah sebagai berikut.

a) PBJT-Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

(1) Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp500.000,00per bulan.

(2) Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman.

(3) Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

(4) Disedikan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Target PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp 18.959.803.000,00 terealisasi sebesar Rp19.845.901.322,00 atau 104,67%. Pencapaian ini dikarenakan.

(1) Beberapa objek pajak (restoran profesional) menggunakan alat perekam data pajak online (Tapping Box) seperti rocket chiken, CFC, rumah makan pagi sore dan rumah makan mbak tatik sehigga peningkatan penerimaan PBJT Makanan dan/atau minuman dalam beberapa tahun terakhir.

(2) Adanya objek pajak dari produk indomaret (point coffee) yang dikelolah profesional sehingga berdampak meningkatnya pajak.

(3) Catering perusahan yang ada dikabupaten Muba tepat waktu dalam membayar pajak, sehingga tidak adanya tunggakan pajak dari perusahan.

(4) Adanya event Porprov Tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin juga berdampak pada tercapainya target penerimaan Pajak.

b) PBJT-Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Subjek PBJT atas tenaga listrik adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sementara itu, objek PBJT atas tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk.

(1) Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain selain industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Konsumsi tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, baik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maupun bukan kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Target PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp52.311.073.000,00 terealisasi sebesar Rp73.698.351.460,00 atau 140,88%. Pencapaian tersebut dikarenakan.

(1) Pembayaran piutang PBJT-Tenaga Listrik perusahan yang dibawah K3S sehingga meningkatkan pendapatan PBJT-Tenaga Listrik.

(2) Upaya Penagihan, Pemeriksaan dan Rekonsiliasi pada wajib Pajak PBJT Tenaga Listrik pelanggan baru pada PT. PLN.

(3) SKPDKB berdasarkan dari Rekonsiliasi BPK dan BPPRD dari Penerimaan PBJT Tenaga Listrik PT. MEP.

c) PBJT-Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi.

(1) Jasa tempat tinggal diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

(3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

(4) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata.

(5) jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Target PBJT-Jasa Perhotelan Rp1.585.642.000,00 terealisasi sebesar Rp1.511.728.463,00 atau 95,33%. Pencapaian tersebut dikarenakan.

(1) Keadaan Geografis Kabupaten Musi Banyuasin yang bukan merupakan Tujuan Wisata menjadi salah satu faktor tidak tercapai target PBJT Perhotelan.

(2) Jarangnya event nasional maupun internasional di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga berdampak juga dari penerimaan pajak hotel.

(3) Alat Tapping box yang dipasang pada objek pajak PBJT Perhotelan tidak digunakan maksimal oleh wajib pajak.

(4) Beberapa objek pajak telah dilakukan penutupan sementara dan permanen dikarenakan tidak adanya potensi pajak.

d) PBJT-Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Pengenaan tarif parkir ditetapkan sebagai berikut.

(1) Pengenaan Parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kendaraan roda 6 (enam) atau lebih golongan bus, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

(2) Pengenaan parkir progresif untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk dua jam

pertama dan tambahan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya, kendaraan roda enam (enam) atau lebih golongan bis, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap jam berikutnya.

(3) Pajak parkir vallet hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih dengan tarif parkir sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk sekali parkir.

Target PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp508.171.000,00 terealisasi sebesar Rp581.938.770,00 atau 114,51%. Pencapaian tersebut dikarenakan:

(1) Banyaknya Indomaret/Alfamart/ Pertokoan lainya di tiap kecamatan dan kelurahan/desa berdampak tercapainya PBJT Jasa Parkir.

(2) Adanya perundang-undangan yang baru bahwa dikenakan Pajak atas penyedian tempat parkir sebagai suatu usaha sehingga perusahan-perusahaan, Perbankan, maupun rumah sakit di kenakan pungutan pajak.

e) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk.

(1) Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran.

(2) Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).

Target PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp137.511.000,00 terealisasi sebesar Rp833.818.723,00 atau 606,36%. Pencapaian tersebut dikarenakan:

(1) Perubahan tarif dari 20% menjadi 40% pada Tahun 2025 berdampak surplusnya penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

(2) Adanya trend masyarakat pola hidup sehat dan bugar sehingga menjamurnya objek pajak (gym) dan tempat tongkrongan anak-anak muda yaitu billyard.

(3) Kepatuhan pajak dari pengusaha pemilik pasar malam.

8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Tarif

tersebut dihitung dari besaran Pajak terutang. Target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp60.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.854.033.228,00 atau 53,09%. Berdasarkan Data dari UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jumlah Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB dan BBNKB sebanyak 80.721 Unit.

9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Tarif tersebut dihitung dari besaran Pajak terutang. Target Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp30.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp46.126.375.000,00 atau 153,75%. Berdasarkan Data dari UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jumlah Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB dan BBNKB sebanyak 80.721 Unit.

a. Pendapatan Retribusi Daerah–LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp5.660.787.000,00	**Rp9.914.556.645,00**	**Rp6.626.027.122,00**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Sampai dengan 31 Desember 2025, dasar pemungutan Retribusi Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Retribusi Daerah sebesar Rp5.660.787.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.914.556.645,00 atau 175,14% dari nilai anggaran. Realisasi Retribusi Daerah tersebut naik sebesar Rp3.288.529.523,00 atau 49,63% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.626.027.122,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	200.000.000,00	196.168.050,00	98,08	171.108.700,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	527.000.000,00	1.137.786.000,00	215,90	542.489.000,00
3	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	0,00	0,00	0,00	319.667.100,00
4	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	310.000.000,00	358.712.700,00	115,71	0,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan - LRA	195.000.000,00	225.423.000,00	115,60	197.488.000,00
6	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak - LRA	40.000.000,00	40.050.000,00	100,12	40.635.000,00
7	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan - LRA	5.000.000,00	5.150.000,00	103,00	5.550.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LRA	142.427.000,00	237.907.000,00	167,03	179.016.000,00
9	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah - LRA	1.130.000.000,00	1.169.330.000,00	103,48	1.157.645.000,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	611.360.000,00	1.454.258.640,00	237,87	1.084.616.720,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LRA	2.500.000.000,00	5.089.771.255,00	203,59	2.927.811.602,00
Jumlah		**5.660.787.000,00**	**9.914.556.645,00**	**175,14**	**6.626.027.122,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 jenis Retribusi Daerah, terdapat 9 jenis retribusi yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan. Penjelasan untuk retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kebersihan

   Target Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp527.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.137.786.000,00 atau 215,89%. Pelayanan Kebersihan merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

   (1) pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan sementara;
   (2) pengangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   (3) penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   (4) penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
   (5) pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

   Adapun rincian Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah sebagai berikut.

   a) Retribusi Pelayanan Persampahan

      Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Target Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.072.001.000,00 atau 214,40%. Pencapaian tersebut dikarenakan.

      (1) Bertambahnya data objek retribusi yang selalu update.
      (2) Adanya penambahan retribusi persampahan dari perusahaan.

(3) Adanya retribusi rumah makan yang ada di Sekayu.
(4) Adanya retribusi pertokoan yang ada jalan-jalan di sekayu seluruh pelaku usaha (pertokoan) yang ada di sekayu.

b) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp27.000.000,00 terealisasi sebesar Rp65.785.000,00 atau 243,64%. Pencapaian tersebut dikarenakan.

(1) Penyedotan Kakus sudah mencapai target dikarenakan sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2) Sudah melakukan sanitasi sehat.
(3) Door to door.
(4) Membuat Stiker.

2) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan dari fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Struktur tarif digolongkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, luas lantai bangunan atau lokal, tata letak, jangka waktu pemakaian dan klasifikasi. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Target Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp310.000.000.00 terealisasi sebesar Rp358.712.700,00 atau 115,71%. Pencapaian tersebut dikarenakan.

(1) Tingkat Partisipasi di Retribusi semakin membaik.
(2) Realisasi diatas target dikarenakan optimalisasi penagihan oleh petugas diseluruh UPTD Pasar dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
(3) Dikarenakan banyak pembayaran atas wajib pajak yang menunggak pada Tahun 2024.

3) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Target Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp195.000.000,00 terealisasi sebesar Rp225.423.000,00 atau 115,60%. Rincian Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan – Dinas Perhubungan yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00%. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi parkir, selain itu jumlah kendaraan/ masyarakat yang parkir meningkat/ bertambah pada titik lokasi parkir.

b) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan - Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp180.423.000,00 atau 120,28%. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

4) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan frekuensi penggunaan pelayanan rumah pemotongan dan jumlah hewan ternak. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Target Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp40.050.000,00 atau 100,12%. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya pengguna jasa retribusi RPH dan tingkat partisipasi di retribusi semakin membaik.

5) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pelayanan jasa kepelabuhanan adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.150.000,00 atau 103,00%. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap retribusi daerah karena fasilitas pelabuhan yang mulai terpenuhi.

6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Target Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp142.427.000,00 terealisasi sebesar Rp237.907.000,00 atau 167,03%. Pencapaian tersebut dikarenakan sudah sadarnya masyarakat yang menggunakan gedung olahraga dan fasilitas yang semakin baik dari sebelumnya.

7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kabupaten. Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten adalah.

a) penjualan basil produksi usaha Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

b) kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan.
c) kegiatan sosial dan budaya.
d) kegiatan keagamaan.

Tingkat penggunaan jasa penjualan basil produksi usaha Pemerintah Kabupaten diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Kabupaten. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Target Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar Rp1.130.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.169.330.000,00 atau 103,48%. Pencapaian tersebut dikarenakan di tahun 2024 sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat penambahan Objek Retribusi pengambilan contoh uji.

8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atauoptimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
b) tidak menghambat iklim investasi di Daerah.
c) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian aset daerah. Target Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp611.360.000,00 terealisasi sebesar Rp1.454.258.640,00 atau 237,87%. Rincian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dianggarkan sebesar Rp215.000.000,00 terealisasi sebesar Rp431.575.280,00 atau 200,73%. Hal tersebut dikarenakan telah berjalannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin dan alat berat ini banyak dipakai secara swakelola/ dipakai untuk kepentingan pemerintah dalam rangka memperbaiki jalan.
b) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00 terealisasi sebesar Rp6.330.000,00 atau 84,62%. Hal tersebut dikarenakan pengunaan derek dimana pemanfaatan pengunaannya tidak setiap hari dan bersifat *social oriented*, terutama pada saat terjadi kecelakaan dan hanya di manfaatkan jika ada yang membutuhkan saja.
c) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – Dinas Perkebunan dianggarkan sebesar Rp139.860.000,00 terealisasi sebesar Rp705.183.360,00 atau 504,21%. Pencapaian tersebut dikarenakan banyaknya peminjaman alat

berat baik dari perorangan, kelompok tani maupun perusahaan pada Dinas Perkebunan.

d) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp312.000.000,00 atau 124,80%. Pencapaian tersebut dikarenakan.
   (1) meningkatnya antusias masyarakat dalam penggunaan Gedung Dharma Wanita.
   (2) fasilitas yang semakin baik dari sebelumnya.
   (3) dikarenakan banyak peminat/banyak yang sewa untuk acara pernikahan dan juga acara politik.

9) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung meliputi.

a) kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis.
b) penerbitan persetujuan Bangunan Gedung.
c) inspeksi Bangunan Gedung.
d) penerbitan SLF dan SBKBG.
e) pencetakan plakat SLF.

Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.089.771.255,00 atau 203,59%. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap retribusi persetujuan bangunan gedung.

Namun, terdapat satu jenis retribusi dengan realisasi tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai capaian retribusi daerah, adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang meliputi Retribusi pelataran yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima dan pedagang asongan dan/atau sejenisnya, Retribusi Los dan Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Struktur tarif digolongkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, intensitas pemakaian, luas kios/los/pelataran dan waktu pemakaian dan klasifikasi pasar. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Target Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp196.168.050,00 atau 98,08%. Hal ini dikarenakan sering hujan dan banyak yang pindah berjualan di luar pasar. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak dianggarkan dan tidak terealisasi dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar

Rp319.667.100,00. Hal tersebut dikarenakan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga rekening Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diganti menjadi rekening Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya di tahun 2025.

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp30.000.000.000,00	**Rp18.395.564.057,62**	**Rp27.898.190.463,75**

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.395.564.057,62 atau 61,31% dari nilai anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut turun sebesar Rp9.502.626.406,13 atau 34,06% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.082.895.564,79. Realisasi tersebut merupakan jumlah dividen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2025. Saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 91.582 lembar dengan jumlah dividen yang diterima Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp18.395.564.057,62 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 20 Juni 2025 sesuai dengan Surat Direktur Utama Bank Sumsel Babel Nomor 485/DIR/III/B/2025.

Penurunan dividen di tahun 2025 disebabkan oleh penurunan laba audited Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024 dibandingkan dengan laba pada tahun buku 2023. Berikut perhitungan saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2024:

Tabel 5.5. Perhitungan Dividen Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2023 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nominal		Kenaikan/(penurunan)
		2023	2024	
a	Saham	91.582.000.000,00	91.582.000.000,00	0,00
b	Agio Saham	37.469.074.000,00	37.469.074.000,00	0,00
c	Sisa Setoran (Belum mencapai harga 1 Lembar Saham)	569.431,23	569.431,23	0,00
d	Total Setoran Modal (a+b+c)	129.051.643.431,23	129.051.643.431,23	0,00
e	Lembar saham yang dimiliki	91.582,00	91.582,00	0,00
	Perhitungan Dividen			0,00
f	Dividen Kepada Pemegang Saham	292.003.684.494,00	237.900.689.421,50	(54.102.995.072,50)
g	Lembar Saham Yang Dimiliki untuk Perhitungan Dividen	91.582,00	91.582,00	0,00
h	Lembar Saham Gabungan	1.167.877,50	1.184.384,50	16.507,00
i	Dividen yang diterima (g/h*f)	**22.898.190.463,75**	**18.395.564.057,62**	(4.502.626.406,13)

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp327.742.877.358,99	**Rp311.812.260.408,11**	**Rp245.157.602.663,51**

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp327.742.877.358,99 dengan realisasi sebesar Rp Rp311.812.260.408,11 atau 95,13% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut naik sebesar Rp 66.654.657.744,60 atau 27,19% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp245.157.602.663,51. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	35.000.000,00	874.847.200,00	2.499,56	43.967.400,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.243.250,00	21.235.150,00	340,12	8.514.000,00
3	Jasa Giro - LRA	5.500.000.000,00	4.036.886.464,00	73,39	2.825.685.039,00
4	Pendapatan Bunga - LRA	5.000.000.000,00	518.872.763,00	10,37	6.889.782.308,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	15.000.000.000,00	9.064.631.830,02	60,43	15.704.896.307,79
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.628.262.810,00	1.023.589.146,90	62,86	1.766.654.714,15
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	1.000.000.000,00	532.640.269,59	53,26	246.418.357,04
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	326.600.000,00	2.811.888.946,54	860,95	319.890.573,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	54.965.647.774,99	50.400.666.808,00	91,69	162.323.286,00
11	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	99,28	217.189.470.678,53
Jumlah		**327.742.877.358,99**	**311.812.260.408,11**	**95,13**	**245.157.602.663,51**

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 jenis Lain-lain PAD yang Sah, terdapat tiga jenis Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan dan sepuluh jenis yang tidak memenuhi target yag dianggarkan. Penjelasan mengenai capaian Lain-lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut.

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

   Hasil Penjualan BUMD Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp874.847.200,00, terdiri dari.

   a) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp837.771.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp40.453.000 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(2) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Kijang KF 70 Short, Tahun 1997, Nopol BG 1431 BZ, no. Rangka : MHF11KF7000019231 No. Mesin : 7K-0186281 pada RSUD Sekayu sebesar Rp19.968.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(3) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada RSUD Sekayu sebesar Rp3.279.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(4) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Ford/Ranger Double Cabin XLS 4x4 2.2 L, Tahun 2012, Nopol BG 9708 BZ, nomor rangka : MNBDMFF80CW121783 No. Mesin : P4AT1021659 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp32.665.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(5) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type NISSAN/GRAND LIVINA SV Tahun 2010 Nopol BG 1294 BZ nomor rangka : MHBG1CG1FAJ038274 No. Mesin : HR15-953864A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp34.431.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(6) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Ford Ranger D.CAB XLS 2.2 L (4x4) Tahun 2012, Nopol BG 9709 BZ, nomor rangka : MNBDMFF80CW121793, No. Mesin : P4AT1021675 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp62.940.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(7) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Mitsubishi L300 Tahun 2003 Nopol BG 9075 BZ, nomor rangka : MHML300B3R231286 Nomor Mesin : 4D56C354769 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp22.212.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025

berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(8) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Izuzu/Ambulance Tahun 2004 Nopol BG 9081 BZ, nomor rangka : MHCNH55EY4J009765 Nomor Mesin : M-009765 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 31.812.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(9) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp78.980.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(10) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp47.188.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(11) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.742.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:288/KPTS/BPKAD-V/2024 tanggal 25 Juli 2024.

(12) Penjualan kendaraan dinas BG 8 BZ Eks. BG 1368 BZ pada Sekretariat DPRD sebesar Rp61.591.200,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 25 April 2025 dan sebesar Rp20.000.000,00 yag disetor ke kas daerah pada tanggal 7 Juli 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:251/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 26 Mei 2025.

(13) Penjualan 1 (satu) Paket Scarp pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp35.200.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(14) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Ford Everest, Tahun 2011, Nopol 1126 BZ, nomor rangka : MNBLS4D10BW314717 Nomor Msein : WLAT1254674 sebesar Rp40.150.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(15) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Yamaha/ 5 LM, Tahun 2003, Nopol BG 8860 BZ no rangka : MH35LM0023K169579 Nomor Mesin : 5LM-169638 sebesar Rp1.350.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(16) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Yamaha/ Jupiter ATCW New L (4x4), Tahun 2012, Nopol BG 5565 BZ, nomor rangka : M-I355S002CK097497 Nomor Mesin : 55-S-097493 sebesar Rp2.800.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(17) Penjualan 1 (satu) Kendaraan Roda 4 merk/type Ford/New Everest, Tahun 2014, Nopol BG 1290 BZ, nomor rangka : MNBLS4D10EW507529, Nomor Mesin : WLAT1392059 sebesar Rp73.950.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(18) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp44.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(19) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.300.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(20) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp8.460.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(21) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Isuzul/NHR 55 EZ, Tahun 2009, Nopol BG 9102 BZ, nomor rangka : MHCNH55EY9J028273 Nomor Mesin : M028273 sebesar Rp41.400.000,00 pada Dinas Kesehatan yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(22) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.400.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(23) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Mitsubish/Pajero Sport GLS, Tahun 2011, Nopol BG 1160 BZ, nomor rangka : MMBGNKG40CF006054 Nomor Mesin : 4D56UCDA6082 sebesar Rp79.500.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Penjualan Besi Tiang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp19.575.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 08 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:B-000.2.3.2/15/KPTS-DISPOPAR/2025 tanggal 26 September 2025.

(2) Penjualan Sisa Bongkaran Bagunan Instalasi Pembangkit Listrik Lain-Lain pada Puskesmas Bukit Selabu sebesar Rp2.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 05 November 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:483/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

(3) Penjualan Sisa Bongkaran Bagunan Instalasi Gardu Induk Listrik Kapasitas Besar pada Puskesmas Ulak Paceh sebesar Rp1.500.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 05 November 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:483/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

c) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp14.001.000,00 yang merupakan Hasil Penjualan Biota Perairan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan hasil penjualan dari ikan nila, ikan patin, ikan lele, benih lele, dan benih nila.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BUMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp21.235.150,00 terdiri dari:

a) Pembayaran sewa kios Rumah Gambo satu Tahun (1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025) sebesar Rp13.735.150,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Realisasi tersebut berdasarkan perjanjian antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dengan Fitria Wulandari Putri selaku pihak Kedai

Gambo dengan Surat Perjanjian Nomor:511/85/DISDAGPERIN/2025.

b) Pembayaran sewa menyewa lahan kosong milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk keperluan usaha rumah makan dan toko perabotan plastik sebesar Rp7.500.000,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Perjanjian antara Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Indra Bakti Nomor:500.17/016/IX/2025

3) Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp4.036.886.464,00 terdiri dari jasa giro kas daerah sebesar Rp 3.668.330.952,00 dan jasa giro bendahara sebesar Rp368.555.512,00.

4) Pendapatan Bunga

Penerimaan Bunga Deposito terealisasi sebesar Rp518.872.763,00 merupakan TDF Remunerasi Triwulan ke-1 sampai dengan Triwulan ke-2.

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp9.064.631.830,02 dengan rincian sebagai berikut.

a) Pengembalian Hasil Audit BPK dan APIP sebesar Rp8.959.999.453,02.

b) Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya sebesar Rp104.632.377,00.

6) Penerimaan Komisi, potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lainnya terealisasi sebesar Rp1.023.589.146,90 dengan rincian sebagai berikut.

a) TASPEN sebesar Rp20.500.000,00.

b) Lain-Lain (BP2RD) sebesar Rp1.003.089.146,90 yang terdiri dari ;

(1) Kelebihan pembayaran temuan BPK sebesar Rp895.019,84.

(2) Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp37.038.503,00.

(3) Transfer via atm yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp965.155.624,06.

7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp532.640.269,59.

8) Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp2.811.888.946,54 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sebagai berikut.

a) Pendapatan denda Pajak Reklame sebesar Rp1.916.616,00.
b) Pendapatan denda Pajak Air Tanah sebesar Rp1.230.474,00.
c) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp123.500,00.
d) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp3.255.479,00.
e) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebesar Rp246.472.470,00.

f) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp15.988.083,00.
g) Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp2.378.992.149,54.
h) Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp160.667.875,00.
i) Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3.242.300,00.

9) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00 namun tidak terealisasi. Hal tersebut dikarenakan realisasi tergantung dengan pelaksanaan pekerjaan.

10) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp54.965.647.774,99 terealisasi sebesar Rp50.400.666.808,00 atau 91,69% yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat.

11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah. Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD.

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditargetkan sebesar Rp244.280.123.524,00 terealisasi sebesar Rp242.527.001.830,06 atau 99,28% merupakan pendapatan dan pembayaran piutang yang dikelola oleh BLUD pada Dinas Kesehatan yaitu 3 RSUD dan 29 Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

a) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu dianggarkan sebesar Rp140.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp133.970.347.732,59 atau 95,69% merupakan realisasi pendapatan Rp130.973.938.972,59 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.996.408.760,00.

b) Pendapatan BLUD RSUD Sungai Lilin dianggarkan sebesar Rp29.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.019.447.266,57 atau 117,30% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp33.997.203.966,57 dan pembayaran piutang sebesar Rp22.243.300,00.

c) Pendapatan BLUD RSUD Bayung Lencir dianggarkan sebesar Rp26.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.504.914.879,00 atau 130,20% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp34.501.513.879,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp3.401.000,00.

d) Pendapatan 29 BLUD Puskesmas dianggarkan sebesar Rp48.780.123.524,00 dan terealisasi sebesar Rp40.032.291.951,90 atau 82,07% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp39.930.444.951,90 dan pembayaran piutang sebesar Rp101.847.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp3.702.991.131.666,60	**Rp3.406.212.851.924,43**	**Rp3.354.108.863.089,40**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka perimbangan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp3.702.991.131.666,60 dengan realisasi sebesar Rp3.406.212.851.924,43 atau 91,98% dari nilai anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut naik sebesar Rp52.103.988.835,03 atau 1,55% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.354.108.863.089,40. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.7. Pendapatan Transfer-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	3.505.400.983.500,00	3.233.090.228.896,00	92,23	3.114.853.763.214,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	197.590.148.166,60	173.122.623.028,43	87,62	239.255.099.875,40
Jumlah		**3.702.991.131.666,60**	**3.406.212.851.924,43**	**91,99**	**3.354.108.863.089,40**

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp3.279.836.649.500,00	**Rp3.023.800.007.902,00**	**Rp2.860.225.317.214,00**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan pajak untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan tersebut

meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp3.279.836.649.500,00 dan terealisasi sebesar Rp3.023.800.007.902,00 atau 92,19% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Perimbangan tersebut naik sebesar Rp163.574.690.688,00 atau 5,72% dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.860.225.317.214,00. Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.8. Rincian Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	2.298.679.867.500,00	2.150.925.726.600,00	93,57	1.944.582.915.190,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	583.685.042.000,00	511.199.784.788,00	87,58	491.100.513.274,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	35.072.538.000,00	33.369.884.583,00	95,14	140.633.056.225,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	362.399.202.000,00	328.304.611.931,00	90,59	283.908.832.525,00
Jumlah		**3.279.836.649.500,00**	**3.023.800.007.902,00**	**92,19**	**2.860.225.317.214,00**

1) Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**

Rp2.298.679.867.500,00 **Rp2.150.925.726.600,00** **Rp1.944.582.915.190,00**

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan Sumber Daya Alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2025, DBH dianggarkan sebesar Rp2.298.679.867.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.150.925.726.600,00 atau 93,57% dari nilai anggaran. Realisasi DBH tersebut naik sebesar Rp206.342.811.410,00 atau 10,61% dibandingkan dengan realisasi DBH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.944.582.915.190,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.9. Rincian Dana Bagi Hasil-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	1.154.339.667.000,00	1.035.357.829.100,00	89,69	924.769.185.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LRA	29.412.956.500,00	26.323.412.700,00	89,49	23.973.622.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LRA	575.775.500,00	514.408.800,00	89,34	297.548.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LRA	10.276.000,00	7.201.000,00	70,08	5.297.190,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LRA	115.371.778.000,00	115.371.778.000,00	100,00	165.672.089.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LRA	718.244.164.500,00	698.994.151.000,00	97,32	469.216.170.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LRA	178.790.500,00	173.438.000,00	97,00	338.102.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	11.598.254.000,00	11.393.376.000,00	98,23	11.820.680.000,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	255.104.974.000,00	249.037.868.000,00	97,62	318.397.128.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA	3.157.149.500,00	3.066.182.000,00	97,11	4.092.455.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)-LRA	1.000,00	1.000,00	100,00	1.269.504.000,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LRA	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.143.842.000,00
13	DBH Sawit-LRA	9.852.276.000,00	9.852.276.000,00	100,00	23.587.293.000,00
Jumlah		**2.298.679.867.500,00**	**2.150.925.726.600,00**	**93,57**	**1.944.582.915.190,00**

2) Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp583.685.042.000,00	**Rp511.199.784.788,00**	**Rp491.100.513.274,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2025, DAU dianggarkan sebesar Rp583.685.042.000,00 dan terealisasi sebesar Rp511.199.784.788,00 atau 87,58% dari nilai anggaran. Realisasi DAU tersebut naik sebesar Rp20.099.271.514,00 atau 4,09% dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp491.100.513.274,00.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp35.072.538.000,00	**Rp33.369.884.583,00**	**Rp140.633.056.225,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada Tahun Anggaran 2025, DAK dianggarkan sebesar Rp35.072.538.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.369.884.583,00 atau 95,14% dari nilai anggaran. Realisasi DAK tersebut turun sebesar Rp107.263.171.642,00 atau 76,27% dibandingkan dengan realisasi DAK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp140.633.056.225,00. Adapun Pendapatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan pada tabel berikut.

Tabel 5.10. Perincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LRA	3.277.216.000,00	3.270.672.075,00	99,80	1.438.155.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LRA	662.717.000,00	646.655.132,00	97,57	24.853.982.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA	715.275.000,00	688.736.038,00	96,28	5.235.169.880,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	99,03	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	22.000.000.000,00	20.362.542.438,00	92,55	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	6.919.330.000,00	6.917.775.000,00	99,97	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	495.500.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - LRA	0,00	0,00	0,00	2.776.150.800,00
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - LRA	0,00	0,00	0,00	11.341.588.900,00
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan - LRA	0,00	0,00	0,00	5.217.759.145,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan - LRA	0,00	0,00	0,00	35.605.662.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LRA	0,00	0,00	0,00	1.030.119.500,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	52.638.969.000,00
Jumlah		**35.072.538.000,00**	**33.369.884.583,00**	**95,14**	**140.633.056.225,00**

4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**

Rp362.399.202.000,00 **Rp328.304.611.931,00** **Rp283.908.832.525,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada Tahun Anggaran 2025, DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp362.399.202.000,00 dan terealisasi sebesar Rp328.304.611.931,00 atau 90,59% dari nilai anggaran. Realisasi DAK Non Fisik tersebut naik sebesar Rp44.395.779.406,00 atau 15,64% dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp283.908.832.525,00. Adapun Pendapatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan pada tabel berikut.

Tabel 5.11. Perincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	DAK Non Fisik - BOS Reguler	108.373.400.000,00	108.652.188.850,00	100,25	110.493.148.018,00
2	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.958.750.000,00	2.958.750.000,00	100,00	3.335.000.000,00
3	DAK Non Fisik - TPG PNSD	190.001.926.000,00	170.997.700.414,00	89,99	110.210.106.000,00
4	DAK Non Fisik - BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.235.745.000,00	99,68	10.329.300.000,00
5	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	99,94	1.344.700.000,00
6	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.605.107.000,00	5.028.850.665,00	76,13	0,00
7	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	300.172.000,00	300.172.000,00	100,00	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.919.293.000,00	6.670.431.485,00	37,22	0,00
9	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	2.503.225.000,00	1.608.397.500,00	64,25	0,00
10	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	12.262.736.000,00	11.913.301.973,00	97,15	0,00
11	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.363.520.000,00	7.099.830.044,00	84,89	0,00
12	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	437.760.000,00	437.760.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	0,00	0,00	0,00	22.830.928.101,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
14	DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	0,00	0,00	0,00	6.766.969.230,00
16	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	6.241.250.000,00
17	DAK Non Fisik - TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	11.816.388.000,00
18	DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	541.043.176,00
Jumlah		**362.399.202.000,00**	**328.304.611.931,00**	**90,59**	**283.908.832.525,00**

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya LRA

1) Dana Desa - LRA

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**

Rp225.564.334.000,00 **Rp209.290.220.994,00** **Rp229.955.545.000,00**

Realisasi Dana Desa (APBN) sebesar Rp209.290.220.994,00 atau 92,78% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Desa tersebut turun sebesar Rp20.665.324.006,00 atau 8,99% dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp229.955.545.000,00. Rincian transfer Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12. Rincian Transfer Dana Desa-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penyaluran dari RKUN ke RKD		Jumlah Desa
		Tanggal SP2D	Jumlah	
1	TAHAP I Batch 1	30-Jan-25	6.771.028.446,00	26
2	TAHAP I Batch 2	06-Feb-25	6.304.104.990,00	21
3	TAHAP I Batch 3	14-Feb-25	14.790.969.646,00	47
4	TAHAP I Batch 4	18-Feb-24	9.892.381.320,00	42
5	TAHAP I Batch 5	18-Feb-25	12.298.273.580,00	42
6	TAHAP I Batch 6	06-Mar-25	10.784.920.068,00	40
7	TAHAP I Batch 7	13-Mar-25	10.659.958.652,00	40
8	TAHAP I Batch 8	17-Mar-25	9.108.752.400,00	61
9	TAHAP I Batch 9	17-Mar-25	9.633.639.960,00	39
10	TAHAP I Batch 10	21-Mar-25	6.349.819.200,00	31
11	TAHAP I Batch 11	21-Mar-25	7.876.271.200,00	31
12	TAHAP I Batch 12	24-Apr-25	7.812.328.674,00	28
13	TAHAP I Batch 13	24-Apr-25	8.471.683.124,00	28
14	TAHAP I Batch 14	14-May-25	191.291.400,00	1

No	Uraian	Penyaluran dari RKUN ke RKD		Jumlah Desa
		Tanggal SP2D	Jumlah	
15	TAHAP I Batch 15	14-May-25	171.209.600,00	1
16	TAHAP I Batch 16	05-Jun-25	475.170.000,00	1
17	TAHAP I Batch 17	05-Jun-25	497.595.200,00	1
18	TAHAP II Batch 1	24-Jul-25	10.196.526.100,00	59
19	TAHAP II Batch 2	24-Jul-25	15.567.110.150,00	59
20	TAHAP II Batch 3	08-Aug-25	8.525.735.572,00	49
21	TAHAP II Batch 4	08-Aug-25	13.090.120.908,00	49
22	TAHAP II Batch 5	10-Sep-25	6.992.373.584,00	42
23	TAHAP II Batch 6	10-Sep-25	11.652.730.224,00	42
24	TAHAP II Batch 7	15-Sep-25	2.005.594.440,00	13
25	TAHAP II Batch 8	15-Sep-25	3.693.612.360,00	13
26	TAHAP II Batch 9	17-Sep-25	2.766.918.640,00	16
27	TAHAP II Batch 10	17-Sep-25	4.737.385.560,00	16
28	TAHAP II Batch 11	23-Okt-25	3.433.911.840,00	24
29	TAHAP II Batch 12	24-Okt-25	4.170.717.756,00	23
30	TAHAP II Batch 13	10-Des-25	368.086.400,00	3
TOTAL			**Rp209.290.220.994,00**	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2024, maka dapat diketahui beberapa hal terkait mekanisme penyaluran dana desa.

a) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke Desa.
b) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
c) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD.
d) Pemotongan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa.
e) Pernerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan

pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, kemudian pemotongan Dana Desa dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu tampak tidak seperti melalui RKUD.

2) Insentif Fiskal - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp0,00	**Rp0,00**	**Rp24.672.901.000,00**

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dana Insentif Daerah di tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp24.672.901.000,00.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp197.590.148.166,60	**Rp173.122.623.028,43**	**Rp239.255.099.875,40**

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp197.590.148.166,60 dan terealisasi sebesar Rp173.122.623.028,43 atau 87,61% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Antar Daerah turun sebesar Rp66.132.476.846,97 atau 27,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp239.255.099.875,40. Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.600.000.000,00	137.258.525.061,83	109,28	171.283.262.620,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	71.990.148.166,60	35.864.097.966,60	49,81	67.971.837.255,40
Jumlah		**197.590.148.166,60**	**173.122.623.028,43**	87,61	**239.255.099.875,40**

1) Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp125.600.000.000,00	**Rp137.258.525.061,83**	**Rp171.283.262.620,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dianggarkan sebesar Rp125.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp137.258.525.061,83 atau 109,28% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Pendapatan Bagi Hasil turun sebesar Rp34.024.737.558,17 atau 19,86% dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2024 sebesar Rp171.283.262.620,00. Adapun Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.14. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah –LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	13.578.082.138,00	0,00	21.654.493.306,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	8.892.076.144,00	0,00	24.343.104.998,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00	78.400.514.196,83	87,11	87.769.572.151,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	600.000.000,00	954.930.327,00	159,16	426.534.293,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.000.000.000,00	35.432.922.256,00	101,23	37.089.557.872,00
Jumlah		**125.600.000.000,00**	**137.258.525.061,83**	**109,28**	**171.283.262.620,00**

Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 sebesar Rp137.258.525.061,83 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut.

a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 184/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan Januari Tahun 2025 sebesar Rp6.636.353.152,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp72.005.753,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.564.347.399,00.

b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 183/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 4 Januari Tahun 2025 sebesar Rp318.067.741,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp72.005.753,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.564.347.399,00.

c) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 900/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan Februari Tahun 2025 sebesar Rp6.272.647.979,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp78.769.868,00.

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.193.878.111,00.

d) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 201/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provini Sumatera Selatan untuk Bulan Oktober Tahun 2024 sebesar Rp12.352.473.483,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor R2 + R4 sebesar Rp2.148.805.051,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.533.997.547,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp98.604.005.868,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.571.066.880,00.

e) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 84/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.853.944.523,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor R2 + R4 sebesar Rp2.964.212.605,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.778.729.293,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.025.707.391,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp85.295.234,00.

f) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 955/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk Bulan November Tahun 2024 sebesar Rp11.040.273.482,83 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor R2 + R4 sebesar Rp2.079.922.543,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.452.545.391,00
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.401.092.711,83,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp106.712.837,00.

g) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 249/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan Maret Tahun 2025 sebesar Rp6.448.369.169,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp73.536.015,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.374.833.154,00.

h) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 384/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan April Tahun 2025 sebesar Rp7.381.145.214,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp77.503.834,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.303.641.380,00.

i) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 419/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan Mei Tahun 2025 sebesar Rp6.850.898.276,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp71.905.579,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.778.992697,00.

j) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 586/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan Juni Tahun 2025 sebesar Rp7.662.808.955,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp85.201.873,00.
   - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.577.607.082,00.

k) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 652/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 04 September 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan Juli

Tahun 2025 sebesar Rp7.258.699.267,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp70.048.119,00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.118.651.148,00.

l) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 736/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 07 Oktober 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan Agustus Tahun 2025 sebesar Rp7.191.060.714,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp74.734.084,00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.116.326.630,00.

m) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 861/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk Bulan September Tahun 2025 sebesar Rp7.558.860.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp60.613.126,00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.498.247.724,00.

n) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 304/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Desember 2024 dan Triwulan I Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Maret 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.188.523.743,00 dan sebesar Rp8.732.216.599,00.

o) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 304/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Bulan April 2025 sampai dengan Bulan Juni 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.798.454.787,00.

p) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 876/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Bulan Juli 2025 sampai dengan Bulan September 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.349.137.593,00.

q) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 998/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober 2025 dan Bulan November 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.364.589.534,00.

2) Bantuan Keuangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp71.990.148.166,60	**Rp35.864.097.966,60**	**Rp67.971.837.255,40**

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi di anggarkan sebesar Rp71.990.148.166,60 dan terealisasi sebesar Rp35.864.097.966,60 atau 49,81% dari nilai anggaran. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi turun sebesar Rp32.107.739.288,80 atau 47,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp67.971.837.255,40. Penyaluran Bantuan Keuangan berdasarkan.

a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 507/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 431/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp0,00	**Rp0,00**	**Rp7.507.176.000,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi dibandingkan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp7.507.176.000,00.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya *(performance-based budgeting)*, yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp4.313.840.074.908,60	**Rp3.871.365.389.427,79**	**Rp3.811.670.043.170,23**

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja sebesar Rp4.313.840.074.908,60 dengan realisasi sebesar Rp3.871.365.389.427,79 atau 89,74% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja tersebut naik sebesar Rp59.695.346.257,56 atau 1,57% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.811.670.043.170,23.

Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.15. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Operasi	2.925.697.036.935,88	2.597.270.659.087,33	88,77	2.507.571.123.568,16
2	Belanja Modal	838.048.630.214,17	742.977.252.064,46	88,66	814.583.797.586,07
3	Belanja Tak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83	2.155.951.800,00
4	Belanja Transfer	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,01	487.359.170.216,00
Jumlah		**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**89,74**	**3.811.670.043.170,23**

Realisasi belanja pada Tahun 2025 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2024 adalah Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Operasi naik sebesar Rp89.699.535.519,17 atau 3,58% dibandingkan dengan realisasi Belanja

Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.507.571.123.568,16. Belanja Tak Terduga naik Rp610.537.004,00 atau 28,32% dibandingkan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp2.155.951.800,00. Demikian juga dengan Belanja Transfer naik sebesar Rp40.991.819.256,00 atau 8,41% dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar Rp487.359.170.216,00. Sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp71.606.545.521,61 atau 8,79% dibandingkan dengan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp814.583.797.586,07. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dirinci sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Operasi

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp2.925.697.036.935,88	**Rp2.597.270.659.087,33**	**Rp2.507.571.123.568,16**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp2.925.697.036.935,88 dengan realisasi sebesar Rp2.597.270.659.087,33 atau 88,77% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut naik sebesar Rp89.699.535.519,17 atau 3,58% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.507.571.123.568,16. Belanja Operasi dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.16. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Pegawai	1.605.850.647.744,57	1.459.387.408.621,22	90,88	1.199.348.281.960,91
2	Belanja Barang dan Jasa	978.979.321.942,31	834.930.090.186,19	85,29	1.166.182.290.152,25
3	Belanja Hibah	262.798.375.249,00	246.484.811.969,92	93,79	136.655.551.455,00
4	Belanja Bantuan Sosial	78.068.692.000,00	56.468.348.310,00	72,33	5.385.000.000,00
Jumlah		**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**88,77**	**2.507.571.123.568,16**

a. Belanja Pegawai

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp1.605.850.647.744,57	**Rp1.459.387.408.621,22**	**Rp1.199.348.281.960,91**

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.605.850.647.744,57 dan terealisasi sebesar Rp1.459.387.408.621,22 atau

90,88% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Pegawai tersebut naik sebesar Rp260.039.126.660,31 atau 21,68% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.199.348.281.960,91.

Tabel 5.17. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	869.506.141.385,27	799.106.229.756,00	91,90	641.796.591.370,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	588.681.708.501,30	519.751.971.720,44	88,29	291.322.837.879,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	131.314.785.111,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.159.684.780,00	25.044.182.584,00	95,74	24.897.913.807,08
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.233.020.663,00	1.165.833.888,00	52,21	797.022.492,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.192.120.000,00	1.192.110.000,00	100,00	993.120.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	95,81	108.226.011.301,83
Jumlah		**1.605.850.647.744,57**	**1.459.387.408.621,22**	**90,88**	**1.199.348.281.960,91**

Atas Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp799.106.229.756,00 terdapat koreksi kurang catat Belanja atas Kelebihan setor PFK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.899.583,00 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp461.500,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp978.979.321.942,31	**Rp834.930.090.186,19**	**Rp1.166.182.290.152,25**

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp978.979.321.942,31 dan terealisasi sebesar Rp834.930.090.186,19 atau 85,28% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Barang dan jasa tersebut turun sebesar Rp331.252.199.966,06 atau 28,40% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.166.182.290.152,25. Belanja Barang dan Jasa dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.18. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Barang Pakai Habis	147.898.371.711,09	129.206.433.067,00	87,36	307.837.494.323,31
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0	12.600.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.822.165.367,00	6.331.817.732,00	92,81	177.516.000,00
4	Belanja Jasa Kantor	259.610.440.124,00	212.285.179.887,00	81,77	332.932.045.051,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.310.346.106,00	66.132.608.137,00	92,74	52.715.900.394,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.303.028.700,00	9.108.934.227,00	68,47	5.829.118.773,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.206.596.750,00	5.854.414.820,00	81,24	6.700.745.795,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.751.666.127,60	25.797.204.431,00	96,43	8.170.657.260,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.946.746.600,00	3.313.494.750,00	83,96	1.445.155.100,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	647.200.000,00	611.500.000,00	94,48	428.850.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.190.661.750,00	10.728.946.700,00	81,34	7.232.609.820,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.865.682.327,00	24.006.875.582,00	86,15	19.544.920.741,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.147.096.809,92	14.666.582.350,60	96,83	12.234.466.977,51
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.546.262.358,00	47.682.262.232,99	77,47	88.112.831.452,00
15	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.804.862,00	84.193.500,00	98,12	71.896.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.738.673.230,10	84.858.306.915,00	75,94	123.482.365.766,60
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	113.656.000,00	85.857.800,00	75,54	169.433.835,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.294.891.072,00	11.954.020.733,00	89,91	30.135.445.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	605.000.000,00	605.000.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0	74.737.535.966,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP	66.854.596.833,00	66.759.329.833,00	99,86	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.984.964.004,00	1.238.891.164,00	62,41	0,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	88,04	94.210.701.897,83
	Jumlah	**978.979.321.942,31**	**834.930.090.186,19**	**85,29**	**1.166.182.290.152,25**

Dari Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebesar Rp25.797.204.431,00 terdapat koreksi atas kurang catat Belanja atas pembayaran ganda SP2D pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp34.376.000,00.

c. Belanja Hibah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp262.798.375.249,00	**Rp246.484.811.969,92**	**Rp136.655.551.455,00**

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp262.798.375.249,00 dan terealisasi sebesar Rp246.484.811.969,92 atau 93,79% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Hibah tersebut naik sebesar Rp109.829.260.514,92 atau 80,37% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp136.655.551.455,00.

Rekapitulasi Realisasi belanja hibah dapat dilihat pada Lampiran 1l.

Tabel 5.19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.479.199.375,00	31.013.083.837,00	95,49	6.925.556.300,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.390.000.000,00	1.338.500.000,00	96,29	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	197.956.700.745,00	183.766.142.051,92	92,83	97.888.073.655,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	15.275.126.000,00	15.272.787.730,00	99,98	14.969.401.500,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	5.210.820.000,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	12.673.313.000,00	12.611.729.000,00	99,51	11.661.700.000,00
7	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro	3.024.036.129,00	2.482.569.351,00	82,09	0,00
Jumlah		**262.798.375.249,00**	**246.484.811.969,92**	**93,79**	**136.655.551.455,00**

Realisasi sebesar Rp246.484.811.969,92 merupakan jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 2025, yang terdiri dari:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp31.013.083.837,00 dengan rincian sebagai berikut
   a) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp26.040.792.450,00 untuk pembangunan rehab gedung dan kantor pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin.
   b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.882.559.987,00 berupa kendaraan minibus, kendaraan roda empat dan peralatan kantor Polres Musi Banyuasin.
   c) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.089.731.400,00 berupa Sarana dan Prasarana Ruang CAT *Assesment Center* Polda Sumsel.
2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp1.338.500.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa mobil ambulance, mobil jenazah dan kendaraan Desa siaga di Kecamatan pada Kabupaten Musi Banyuasin.
3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp183.766.142.051,92. dengan rincian sebagai berikut.
   a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp119.098.926.073,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.20. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang undangan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	OPD
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Musi Banyuasin	1.500.000.000,00	1.387.503.018,00	92,50	2.275.803.603	DINKES
2	Pembangunan Desa-Desa Kab. Musi Banyuasin	77.861.089.783,00	69.355.010.950,00	89,08	5.406.650.300,00	PERKIM
3	Partai Politik	5.461.440.000,00	5.461.440.000,00	100,00	0,00	KESBANGPOL
4	Kepala Desa Mulya Jaya Kec. Lalan	40.000.000,00	36.100.001,00	90,25	0,00	DLH
5	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Musi Banyuasin	28.481.098.300,00	27.048.384.929,00	94,97	3.849.832.200,00	DISPOPAR
6	Gerakan Pramuka Kwarcab Kab. Musi Banyuasin	2.500.000.000,00	2.487.127.671,00	99,49	2.490.764.272,00	DISPOPAR
7	Pembangunan Gedung, sarana dan prasarana Olahraga dalam wilayah Kab. Musi Banyuasin	14.101.296.600,00	12.777.222.100,00	90,61	0,00	DISPOPAR
8	Sarana dan Prasarana Peralatan Penangkapan dan Pengolahan Ikan	555.143.750,00	546.137.404	98,38	0,00	DISKAN
Jumlah		**130.500.068.433,00**	**119.098.926.073,00**	**91,26**	**14.023.050.375,00**	

b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp51.153.283.888,92 dengan rincian sebagai berikut:
   (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.886.052.109,92 Pembangunan ruang kelas baru, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Tradisional.
   (2) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp16.317.000,00 berupa Hibah Barang (Vacuum Sealer) untuk Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
   (3) Dinas Perikanan sebesar Rp3.398.005.540,00 untuk Peralatan Perikanan, Benih Ikan, dan Pakan Ikan.
   (4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp11.038.389.291,00 pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian, pengadaan bibit ternak, pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.
   (5) Dinas Perkebunan sebesar Rp21.159.672.448,00.
   (6) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.201.882.500,00 berupa pembelian tenda dan kursi untuk peralatan dan perlengkapan kantor pada kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
   (7) Kelurahan Bayung Lencir sebesar Rp112.800.000,00 Belanja Hibah Tempat Sampah.
   (8) Kelurahan Bayung Lencir Indah sebesar Rp340.165.000,00 Belanja Hibah Tenda dan Kursi.

c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp6.756.344.590,00 dengan rincian sebagai berikut :
   (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.066.129.740,00 untuk pembangunan dan rehab masjid, TPU, TPA, Gereja dan Pembangunan desa di Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp690.214.850,00 berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan dan pengembangan literasi berbasis inklusi social.

d) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar pada untuk UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp5.447.587.500,00.

e) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp1.310.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.210.000.000,00 untuk kegiatan Kelompok Desa B2SA dan pembelian gabah.

(2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp100.000.000,00 untuk pemberdayaan kelompok wanita tani.

4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta yang terealisasi sebesar Rp15.272.787.000,00

5) Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp12.611.729.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp11.210.245.000,00.

b) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp1.401.484.000,00.

6) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro terealisasi sebesar Rp2.482.569.351,00 dengan rician sebagai berikut:

a) Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro sebesar Rp1.108.540.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

b) Belanja Hibah Barang kepada Usaha Mikro sebesar Rp1.374.029.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp393.358.266,00.

(2) Kelurahan Ngulak sebesar Rp 235.217.880,00.

(3) Kelurahan Ngulak I sebesar Rp189.811.110,00.

(4) Kelurahan Sungai Lilinsebesar Rp283.380.005,00.

(5) Kelurahan Sungai Lilin Jaya sebesar Rp272.262.090,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp78.068.692.000,00	**Rp56.468.348.310,00**	**Rp5.385.000.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp78.068.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.468.348.310,00 atau 72,33% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut naik sebesar Rp51.083.348.310,00 atau 948,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.385.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya program unggulan baru dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Program Keluarga Maju (PKM) pada Dinas Sosial dan terdapat penambahan utang di Tahun 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Realisasi sebesar Rp56.468.348.310,00 merupakan jumlah Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025, yang terdiri dari.

1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp30.724.525.000,00 pada Dinas Sosial beurpa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan tunai untuk masyarakat miskin (BANTU UMAK) di Kabupaten Musi Banyuasin.
2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp443.823.310,00 pada Dinas Sosial penyediaan permakanan sembako ke masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.
3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp25.300.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Bedah Rumah Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat merupakan Dana Bantuan Umak (bantuan tunai untuk masyarakat miskin) yang tidak tersalurkan sebesar Rp828.750.000,00 pada Dinas Sosial.

5.1.2.1.2 Belanja Modal

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp838.048.630.214,17	**Rp742.977.252.064,46**	**Rp814.583.797.586,07**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp838.048.630.214,17 dan terealisasi sebesar Rp742.977.252.064,46 atau 88,66% dari nilai anggaran merupakan realisasi belanja sebesar Rp410.414.134.335,46 dan pembayaran utang sebesar Rp332.563.117.729,00. Realisasi Belanja Modal tersebut turun sebesar Rp71.606.545.521,61 atau 8,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp814.583.797.586,07. Rincian Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,62	14.159.821.565,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	94,24	102.795.588.522,20
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	87,80	161.139.070.395,87
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	87,42	519.469.106.288,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	99,71	17.020.210.815,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	96.393.177,00	79.228.870,00	82,19	0,00
Jumlah		**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**88,66**	**814.583.797.586,07**

a. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp1.996.785.750,00	**Rp1.150.484.130,00**	**Rp14.159.821.565,00**

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp1.996.785.750,00 dan terealisasi sebesar Rp1.150.484.130,00 atau 57,62% dari nilai anggaran merupakan realisasi belanja sebesar Rp344.208.780,00 dan pembayaran utang sebesar Rp806.275.350,00. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut turun sebesar Rp13.009.337.435,00 atau 91,88% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.159.821.565,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Tanah Persil	22.563.356.119,00	929.771.730,00	4,12	13.517.976.665,00
2	Belanja Modal Lapangan	1.600.000.000,00	220.712.400,00	13,79	641.844.900,00
Jumlah		**24.163.356.119,00**	**1.150.484.130,00**	**4,76**	**14.159.821.565,00**

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp114.723.099.390,28	**Rp108.116.548.508,58**	**Rp102.795.588.522,20**

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp114.723.099.390,28 dan terealisasi sebesar Rp108.116.548.508,58 atau 94,24% dari nilai anggaran merupakan realisasi belanja sebesar Rp94.438.938.520,58 dan pembayaran utang sebesar Rp13.677.609.988,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut naik sebesar Rp5.320.959.986,38 atau 5,18% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.795.588.522,20. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.949.675.040,00	1.843.710.000,00	94,56	5.623.240.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	734.817.942,00	695.753.345,00	94,68	389.197.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	22.256.795.757,00	21.352.251.838,00	95,94	17.805.795.421,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	0,00
6	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	85.571.640,00	85.248.000,00	99,62	57.500.000,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.650.000,00	665.000,00	10,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	18.409.611,00	17.743.655,00	96,38	23.062.500,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	146.470.000,00	143.778.940,00	98,16	168.683.000,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	1.478.036.711,36	1.432.074.199,38	96,89	6.645.942.520,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.977.837.519,38	24.200.690.077,23	96,89	17.085.815.210,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	4.779.616.619,00	4.452.416.755,00	93,15	3.708.878.760,00
13	Belanja Modal Alat Studio	3.946.742.759,00	3.769.431.951,84	95,51	1.896.438.760,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.275.377.402,00	2.140.977.845,00	94,09	161.110.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	100.563.780,00	97.924.200,00	97,38	0,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.182.264.203,00	9.923.280.992,00	97,46	5.284.983.550,00
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.127.221.313,00	2.049.397.811,19	96,34	2.139.651.900,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50	125.255.000,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	11.323.658.188,26	10.872.043.472,55	96,01	15.632.637.635,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.756.815.338,28	3.562.968.203,31	94,84	3.037.944.630,00
23	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	39.008.000,00	38.034.999,00	97,51	5.550.000,00
24	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	2.326.395.962,00
25	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	12.610.544,00	0,00	0,00	1.300.000,00
26	Belanja Modal Alat Pelindung	50.582.687,00	49.577.150,00	98,01	13.875.000,00
27	Belanja Modal Alat SAR	59.940.000,00	59.940.000,00	100,00	57.700.000,00
28	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.449.353.200,00	1.420.105.585,00	97,98	1.582.332.725,20
30	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.879.675.920,00	1.673.766.867,08	89,05	19.300.000,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	9.142.633.737,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOP-BOS	10.061.637.943,00	10.017.214.994,00	99,56	0,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	74,55	9.850.365.212,00
Jumlah		**114.723.099.390,28**	**108.116.548.508,58**	**94,24**	**102.795.588.522,20**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp141.207.215.860,00	**Rp123.976.665.935,08**	**Rp161.139.070.395,87**

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp141.207.215.860,00 dan terealisasi sebesar Rp123.976.665.935,08 atau 87,79% dari nilai anggaran merupakan realisasi belanja sebesar

Rp96.733.689.844,08 dan pembayaran utang sebesar Rp27.242.976.091,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut turun sebesar Rp37.162.404.460,79 atau 23,06% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp161.139.070.395,87. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.247.146.325,00	111.029.378.032,34	90,82	145.964.902.019,87
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.914.947.050,00	10.380.094.050,00	95,10	11.670.978.900,00
3	Belanja Modal Bangunan Tugu /Tanda Batas	847.904.350,00	846.183.507,74	99,80	1.881.611.650,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	23,91	1.621.577.826,00
Jumlah		**141.207.215.860,00**	**123.976.665.935,08**	**87,80**	**161.139.070.395,87**

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp558.908.666.183,89	**Rp488.599.757.196,80**	**Rp519.469.106.288,00**

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp558.908.666.183,89 dan terealisasi sebesar Rp488.599.757.196,80 atau 87,42% dari nilai anggaran merupakan realisasi belanja sebesar Rp197.913.004.896,80 dan pembayaran utang sebesar Rp290.686.752.300,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut turun sebesar Rp30.869.349.091,20 atau 5,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp519.469.106.288,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.25. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Jalan	472.047.861.543,00	419.339.259.676,80	88,83	467.522.852.638,00
2	Belanja Modal Jembatan	42.613.478.630,89	27.457.276.000,00	64,43	18.861.943.150,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	313.000.000,00	308.288.000,00	98,49	1.046.719.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	87,01	1.222.837.950,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	25.738.515.460,00	23.979.114.065,00	93,16	8.785.914.250,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	4.582.379.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	5.125.205.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	8.318.735.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	95,91	0,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	97,75	3.987.520.300,00
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00		15.000.000,00
Jumlah		**558.908.666.183,89**	**488.599.757.196,80**	**87,42**	**519.469.106.288,00**

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp21.116.469.853,00	**Rp21.054.567.424,00**	**Rp17.020.210.815,00**

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp21.116.469.853,00 dan terealisasi sebesar Rp21.054.567.424,00 atau 99,71% dari nilai anggaran merupakan realisasi belanja sebesar Rp20.905.063.424,00 dan pembayaran utang sebesar Rp149.504.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut naik sebesar Rp4.034.356.609,00 atau 23,70% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.020.210.815,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.26. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	669.535.560,00	647.692.020,00	96,74	1.785.251.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan	831.611.000,00	829.583.111,00	99,76	270.036.000,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	149.885.000,00	149.640.000,00	99,84	0,00
5	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	13.079.000,00	13.079.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	14.964.923.815,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	19.452.359.293,00	19.414.573.293,00	99,81	0,00
Jumlah		**21.116.469.853,00**	**21.054.567.424,00**	**99,71**	**17.020.210.815,00**

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp96.393.177,00	**Rp79.228.870,00**	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp96.393.177,00 dan terealisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp79.228.870,00 atau 82,19% merupakan realisasi belanja sebesar Rp20.905.063.424,00 dan pembayaran utang sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tersebut naik sebesar Rp79.228.870,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang tidak terealisasi.

5.1.2.1.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp5.442.284.504,55	**Rp2.766.488.804,00**	**Rp2.155.951.800,00**

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Tak Terduga

sebesar Rp5.442.284.504,55 dengan realisasi sebesar Rp2.766.488.804,00 atau 50,83% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut naik sebesar Rp610.537.004,00 atau 28,32% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.155.951.800,00. Adapun rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut.

a. Pembayaran Pengembalian Dana Pelimpahan Opsen Pajak MBLB an. Wajib Pajak Daerah PT. Bejana Tanah Liat berdasarkan Surat Kepala BPPRD No. B-900.1.13.1/366/BPPRD /2025 dan Nota Dinas Kabid Akuntansi BPKAD No.B-900/144/BPKAD-IV/2025 tanggal 07-05-2025. Sebesar Rp2.082.560,00.
b. Pembayaran Pengembalian Dana Pelimpahan Opsen Pajak MBLB an. Wajib Pajak Daerah PT. Petronesia Benimel berdasarkan Surat Kepala BPPRD No. B-900.1.13.1/487/BPPRD /2025 dan Nota Dinas Kabid Akuntansi BPKAD No.B-900/157/BPKAD-IV/2025 tanggal 12-06-2025 sebesar Rp29.867.502,00.
c. Pembayaran Pengembalian Dana Pelimpahan Opsen Pajak MBLB an. Wajib Pajak Daerah PT. Pesona Alam Perkasa berdasarkan Surat Kepala BPPRD No. B-900.1.13.1/535/BPPRD /2025 dan Nota Dinas Kabid Akuntansi BPKAD No.B-900/202/BPKAD-IV/2025 tanggal 07-07-2025 sebesar Rp3.940.662,00.
d. Pembayaran Pengembalian Dana Pelimpahan Opsen Pajak MBLB an. Wajib Pajak Daerah PT. Jaluko Jaya Abadi berdasarkan Surat Kepala BPPRD No. B-900.1.13.1/497/BPPRD/2025 dan Nota Dinas Kabid Akuntansi BPKAD No.B-900/217/BPKAD-IV/2025 tanggal 11-07-2025 sebesar Rp41.439.330,00.
e. Pembayaran Pengembalian Sisa Kontrak Dana Hibah RR TA. 2024 berd. Srt Kepala BPBD No. B-900/1224/BPBD/2025 dan Nota Dinas Kabid Akuntansi BPKAD No.B-900/509/BPKAD-IV/2025 tanggal 30-12-2025 ke RKUN melalui kode Billing 820251231031092 sebesar Rp2.689.158.750,00.

5.1.2.1.4 Belanja Transfer

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp544.652.123.254,00	**Rp528.350.989.472,00**	**Rp487.359.170.216,00**

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Transfer sebesar Rp544.652.123.254,00 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan realisasi sebesar Rp528.350.989.472,00 atau 97% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer tersebut naik sebesar Rp40.991.819.256,00 atau 8,41% dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp487.359.170.216,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut sebagian bersumber dari APBN sebesar Rp209.290.220.994,00 yang mekanisme penyalurannya langsung dari RKUN ke RKD. Sedangkan sisanya sebesar Rp319.060.768.478,00 merupakan

Alokasi Dana Desa Kabupaten yang mekanismenya penyalurannya melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang digunakan pada belanja tidak langsung untuk penghasilan tetap perangkat desa dan pada belanja langsung untuk operasioanal desa dan kendaraan operasional desa.

5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Semester II Tahun Anggaran 2025, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH		%
		ANGGARAN	REALISASI	
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.713.988.609.763,20**	**2.430.866.769.116,67**	**89,57**
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	989.582.029.956,00	915.487.859.792,50	92,51
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	989.582.029.956,00	915.487.859.792,50	92,51
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	719.889.042.809,60	654.292.089.617,38	90,89
	Dinas Kesehatan	419.816.271.829,00	391.987.601.246,00	93,37
	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	151.722.825.896,00	144.163.684.355,10	95,02
	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	34.595.209.582,00	32.689.908.986,00	94,49
	Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	43.720.334.423,00	36.409.273.114,00	83,28
	UPT. Puskesmas Ngulak	3.823.709.566,00	2.536.779.193,00	66,34
	UPT. Puskesmas Babat Toman	4.837.309.682,00	3.875.146.811,00	80,11
	UPT. Puskesmas Ulak Paceh	2.447.926.919,00	1.787.399.491,00	73,02
	UPT. Puskesmas Tanah Abang	1.308.830.388,00	961.796.863,00	73,49
	UPT. Puskesmas Lubuk Bintialo	1.305.040.059,00	1.131.925.855,00	86,73
	UPT. Puskesmas Bukit Selabu	895.813.305,00	646.404.977,00	72,16
	UPT. Puskesmas Cinta Karya	1.744.506.035,00	1.250.736.300,22	71,70
	UPT. Puskesmas Suka Damai	1.565.919.541,00	995.636.842,00	63,58
	UPT. Puskesmas Sido Rahayu	1.401.820.130,00	950.071.027,00	67,77
	UPT. Puskesmas Tebing Bulang	2.618.665.549,00	2.057.274.218,00	78,56
	UPT. Puskesmas Jirak	2.289.681.026,00	1.336.831.583,00	58,39
	UPT. Puskesmas Balai Agung	4.671.730.749,00	3.646.934.241,50	78,06
	UPT. Puskesmas Lumpatan	3.555.216.929,00	2.602.782.315,72	73,21
	UPT. Puskesmas Lais	3.702.692.875,60	2.390.106.246,46	64,55
	UPT. Puskesmas Gardu Harapan	1.244.732.621,00	723.853.663,00	58,15
	UPT. Puskesmas Teluk Kijing	1.372.814.148,00	909.926.083,16	66,28
	UPT. Puskesmas Tanjung Kerang	2.342.665.692,00	1.432.615.324,00	61,15
	UPT. Puskesmas Sungai Lilin	3.722.190.820,00	2.775.735.732,00	74,57
	UPT. Puskesmas Sri Gunung	1.873.768.829,00	1.314.631.174,00	70,16

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH		%
		ANGGARAN	REALISASI	
	UPT. Puskesmas Karya Maju	2.416.302.647,00	1.486.072.118,36	61,50
	UPT. Puskesmas Mekar jaya	1.791.890.699,00	1.160.670.858,00	64,77
	UPT. Puskesmas Suka Jaya	1.621.608.986,00	1.187.487.870,00	73,23
	UPT. Puskesmas Peninggalan	2.329.776.304,00	1.674.210.356,68	71,86
	UPT. Puskesmas Sumber Harum	1.496.473.051,00	1.078.838.820,00	72,09
	UPT. Puskesmas Berojaya Timur	1.685.915.583,00	1.005.257.416,00	59,63
	UPT. Puskesmas Bandar Agung	2.034.105.151,00	1.399.351.871,00	68,79
	UPT. Puskesmas Karang Mukti	2.798.926.381,00	1.763.875.956,00	63,02
	UPT. Puskesmas Bayung Lencir	5.936.044.738,00	4.155.288.688,03	70,00
	UPT. Puskesmas Air Balui	1.198.322.676,00	803.980.022,15	67,09
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	736.467.692.206,60	633.894.277.859,79	86,07
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	573.184.547.383,60	483.752.323.274,79	84,40
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	163.283.144.823,00	150.141.954.585,00	91,95
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	126.681.793.622,00	121.548.493.097,00	95,95
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	126.681.793.622,00	121.548.493.097,00	95,95
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	64.168.850.552,00	52.888.823.043,00	82,42
	Satuan Polisi Pamong Praja	38.551.075.727,00	34.328.810.278,00	89,05
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.617.774.825,00	18.560.012.765,00	72,45
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	77.199.200.617,00	52.755.225.707,00	68,34
	Dinas Sosial	77.199.200.617,00	52.755.225.707,00	68,34
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**406.681.542.396,20**	**356.753.216.614,08**	**87,72**
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.127.350.304,00	12.798.460.008,00	84,60
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.127.350.304,00	12.798.460.008,00	84,60
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.351.115.648,00	8.048.865.113,00	86,07
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.351.115.648,00	8.048.865.113,00	86,07
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.613.654.680,00	8.970.739.189,00	84,52
	Dinas Ketahanan Pangan	10.613.654.680,00	8.970.739.189,00	84,52
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	92,27
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	92,27
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	57.281.888.783,00	51.568.224.023,34	90,03
	Dinas Lingkungan Hidup	57.281.888.783,00	51.568.224.023,34	90,03
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.560.453.778,00	19.979.309.287,00	88,56
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.560.453.778,00	19.979.309.287,00	88,56
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.707.159.264,00	14.819.043.722,00	83,69
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.707.159.264,00	14.819.043.722,00	83,69
VIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22.894.940.858,00	19.966.432.524,74	87,21
	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	22.894.940.858,00	19.966.432.524,74	87,21
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	44.168.071.890,00	39.140.595.421,00	88,62
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	89,44
	Dinas Perhubungan	18.140.479.690,00	15.860.986.345,00	87,43
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.920.577.955,40	27.648.551.523,00	89,42
	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.920.577.955,40	27.648.551.523,00	89,42
XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.818.749.442,00	15.195.022.477,00	90,35
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.818.749.442,00	15.195.022.477,00	90,35
XII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.893.414.726,50	16.567.688.377,00	87,69
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.893.414.726,50	16.567.688.377,00	87,69
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	118.332.272.052,00	102.737.522.359,00	86,82
	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	118.332.272.052,00	102.737.522.359,00	86,82
XIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	766.009.363,30	422.050.075,00	55,10
	Dinas Komunikasi dan Informatika	766.009.363,30	422.050.075,00	55,10
XV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.552.730.108,00	1.025.324.217,00	66,03
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.552.730.108,00	1.025.324.217,00	66,03
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.248.141.325,00	6.144.648.329,00	98,34
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.248.141.325,00	6.144.648.329,00	98,34
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.859.796.851,00	10.321.407.690,00	87,03
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.859.796.851,00	10.321.407.690,00	87,03
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	423.801.618,00	327.706.149,00	77,33
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	423.801.618,00	327.706.149,00	77,33

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH		%
		ANGGARAN	REALISASI	
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**139.841.509.908,00**	**120.391.129.026,00**	**86,09**
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.197.107.218,00	14.379.531.261,00	88,78
	Dinas Perikanan	16.197.107.218,00	14.379.531.261,00	88,78
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.579.690.700,00	3.508.706.868,00	98,02
1	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	3.579.690.700,00	3.508.706.868,00	98,02
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	97.578.106.944,00	83.643.319.473,00	85,72
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	52.512.743.436,00	42.747.660.648,00	81,40
	Dinas Perkebunan	45.065.363.508,00	40.895.658.825,00	90,75
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.814.637.605,50	17.487.815.100,00	84,02
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.814.637.605,50	17.487.815.100,00	84,02
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.515.928.854,50	1.218.039.282,00	80,35
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.515.928.854,50	1.218.039.282,00	80,35
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	156.038.586,00	153.717.042,00	98,51
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	156.038.586,00	153.717.042,00	98,51
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**259.707.108.286,00**	**228.258.784.046,00**	**87,89**
I	SEKRETARIAT DAERAH	139.334.235.055,00	125.183.301.094,00	89,84
	Sekretariat Daerah	139.334.235.055,00	125.183.301.094,00	89,84
II	SEKRETARIAT DPRD	120.372.873.231,00	103.075.482.952,00	85,63
	Sekretariat DPRD	120.372.873.231,00	103.075.482.952,00	85,63
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**658.857.333.465,74**	**621.093.385.579,83**	**94,27**
I	PERENCANAAN	20.524.749.454,80	17.913.422.660,00	87,28
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.524.749.454,80	17.913.422.660,00	87,28
II	KEUANGAN	618.242.992.745,24	586.225.261.160,83	94,82
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	99,96
	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	571.334.940.609,24	549.979.082.492,39	96,26
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	38.136.859.136,00	27.478.423.703,44	72,05
III	KEPEGAWAIAN	18.901.341.166,00	16.017.578.593,00	84,74
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.901.341.166,00	16.017.578.593,00	84,74
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.188.250.099,70	937.123.166,00	78,87
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.188.250.099,70	937.123.166,00	78,87
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**30.408.129.304,00**	**25.088.897.285,00**	**82,51**
I	INSPEKTORAT DAERAH	30.408.129.304,00	25.088.897.285,00	82,51
	Inspektorat	30.408.129.304,00	25.088.897.285,00	82,51
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**87.916.606.622,46**	**73.705.682.648,21**	**83,84**
I	KECAMATAN	87.916.606.622,46	73.705.682.648,21	83,84
	Kecamatan Sekayu	10.324.889.048,00	9.220.368.788,00	89,30
	Kecamatan Lais	4.725.637.985,00	4.204.281.479,00	88,97
	Kecamatan Babat Toman	6.864.524.708,99	6.501.483.146,00	94,71
	Kecamatan Keluang	5.060.224.145,00	4.047.128.725,00	79,98
	Kecamatan Sanga Desa	5.566.745.605,00	4.809.857.680,00	86,40
	Kecamatan Plakat Tinggi	4.293.670.603,00	3.234.733.373,00	75,34
	Kecamatan Batanghari Leko	4.166.315.645,00	2.932.719.965,00	70,39
	Kecamatan Sungai Keruh	3.982.090.009,00	3.188.504.577,00	80,07
	Kecamatan Sungai Lilin	5.546.584.823,00	4.636.137.082,00	83,59
	Kecamatan Bayung Lencir	5.061.972.049,00	4.519.991.559,00	89,29
	Kecamatan Lalan	4.762.891.988,00	3.351.771.714,00	70,37
	Kecamatan Tungkal Jaya	4.995.802.499,00	4.207.670.880,21	84,22
	Kecamatan Lawang Wetan	4.742.295.672,00	4.325.659.879,00	91,21
	Kecamatan Babat Supat	4.217.302.289,00	3.346.679.861,00	79,36
	Kecamatan Jirak Jaya	3.611.399.223,00	2.833.068.412,00	78,45
	Kelurahan Soak Baru	684.148.533,00	646.540.999,00	94,50
	Kelurahan Serasan Jaya	600.219.072,00	540.189.062,00	90,00
	Kelurahan Balai Agung	669.522.773,00	633.336.017,00	94,60
	Kelurahan Kayuara	682.065.034,00	506.740.152,00	74,29
	Kelurahan Babat	758.024.172,96	266.143.158,00	35,11
	Kelurahan Mangun Jaya	766.737.231,51	290.937.463,00	37,94
	Kelurahan Ngulak I	832.978.633,00	828.287.457,00	99,44
	Kelurahan Bayung Lencir	823.842.083,00	802.465.735,00	97,41
	Kelurahan Bayung Lencir Indah	829.391.585,00	816.746.998,00	98,48
	Kelurahan Ngulak	833.612.894,00	800.474.895,00	96,02
	Kelurahan Sungai Lilin	833.014.354,00	744.127.703,00	89,33
	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	838.919.254,00	736.457.243,00	87,79
	Kelurahan Keluang	841.784.711,00	733.178.646,00	87,10
H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**16.439.235.163,00**	**15.207.525.112,00**	**92,51**
I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.439.235.163,00	15.207.525.112,00	92,51
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.439.235.163,00	15.207.525.112,00	92,51
	Jumlah	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**89,74**

5.1.3 Surplus/(Defisit)

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
(Rp23.470.262.133,01)	**Rp96.798.779.481,72**	**(Rp56.722.052.447,57)**

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan defisit sebesar (Rp23.470.262.133,01) dan terealisasi surplus sebesar Rp96.798.779.481,72 dari nilai anggaran. Realisasi tersebut naik sebesar Rp153.520.831.929,29 atau 270,65% dibandingkan dengan realisasi defisit Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp56.722.052.447,57).

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp50.056.371.759,01	**Rp50.002.992.663,01**	**Rp131.728.424.206,58**

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp50.056.371.759,01 dengan realisasi sebesar Rp50.002.992.663,01 atau 99,89% dari nilai anggaran. Penerimaan Pembiayaan ini turun sebesar Rp81.725.431.543,57 atau 62,04% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp131.728.424.206,58. Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.28. Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.056.371.759,01	50.002.992.663,01	99,89	131.728.424.206,58
Jumlah		**50.056.371.759,01**	**50.002.992.663,01**	**99,89**	**131.728.424.206,58**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp50.056.371.759,01	**Rp50.002.992.663,01**	**Rp131.728.424.206,58**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp50.056.371.759,01 dengan realisasi sebesar Rp50.002.992.663,01 atau 99,89% dari nilai anggaran. Terdapat selisih sebesar Rp53.379.096,00 antara anggaran sebesar Rp50.056.371.759,01 dengan realisasi sebesar Rp50.002.992.663,01 dikarenakan koreksi kelebihan catat tahun sebelumnya yang merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah yang merupakan SP2D LS pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 16.06/04.0/001128/ LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PPR1/12/2024 sebesar Rp37.779.096,00 dan 16.06/04.0/001130/LS/ 4.01.5.02.0.00.27.0000/ PPR1/12/2024 sebesar Rp15.6000.000,00 yang di debit pada tanggal 2 Januari 2025.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp26.586.109.626,00	**Rp26.586.109.626,00**	**Rp24.950.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp26.586.109.626,00 dengan realisasi sebesar Rp26.586.109.626,00 atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut naik sebesar Rp1.636.109.626,00 atau 6,56% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.950.000.000,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 merupakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp26.586.109.626,00.

a. Penyertaan Modal Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp26.586.109.626,00	**Rp26.586.109.626,00**	**Rp24.950.000.000,00**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp26.586.109.626,00 dengan realisasi sebesar Rp26.586.109.626,00 atau 100,00% dari nilai anggaran. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) tersebut turun sebesar Rp1.636.109.626,00 atau 6,56% dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.950.000.000,00. Realisasi pengeluaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.586.109.626,00 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.29. Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	PDAM Tirta Randik	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00	24.950.000.000,00
Jumlah		**26.586.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	100,00	**24.950.000.000,00**

1) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Randik sebesar Rp26.586.109.626,00 terdiri dari.
   a) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 16.06/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.45.0000/M/8/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebesar Rp12.243.109.626,00 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal No: T.690.146/PERUMDA/MUBA/VIII/2025 tanggal 6-8-2025.
   b) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 16.06/04.0/000002/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.45.0000/M/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp12.243.000.000,00 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: T.690.201/PERUMDA/MUBA/X/2025 tanggal 3-10-2025.
   c) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 16.06/04.0/000003/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.45.0000/M/12/2025 tanggal 09 Desember 2025 sebesar Rp2.100.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 553/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 18-11-2025 serta Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: T.690.267/PERUMDA/MUBA/XII/2025 tanggal 01-12-2025.

5.1.4.3 Pembiayaan Netto

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp23.470.262.133,01	**Rp23.416.883.037,01**	**Rp106.778.424.206,58**

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp23.470.262.133,01 dengan realisasi sebesar Rp23.416.883.037,01 atau 99,77% dari nilai anggaran. Realisasi Pembiayaan Netto tersebut turun sebesar Rp83.361.541.169,57 atau 78,07% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp106.778.424.206,58 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Penerimaan Pembiayaan	Rp	50.002.992.663,01	
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	26.586.109.626,00	_
	Rp	**23.416.883.037,01**	

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp0,00	**Rp120.215.662.518,73**	**Rp50.056.371.759,01**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp120.215.662.518,73. SiLPA Tahun Anggaran 2025 naik sebesar Rp70.159.290.759,72 atau sebesar 140,16% dari realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar 120.257.399.601,73. Rincian SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.30. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

(dalam rupiah)

No	Perhitungan APBD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Daerah	4.290.369.812.775,59	3.968.164.168.909,51	92,49	3.754.947.990.722,66
2	Belanja Daerah	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	89,74	3.811.670.043.170,23
3	Surplus (Defisit)	(23.470.262.133,01)	96.798.779.481,72	-412,43	(56.722.052.447,57)
4	Penerimaan Pembiayaan	50.056.371.759,01	50.002.992.663,01	99,89	131.728.424.206,58
5	Pengeluaran Pembiayaan	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00	24.950.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	23.470.262.133,01	23.416.883.037,01	99,77	106.778.424.206,58
SiLPA (SiKPA)		**0,00**	**120.215.662.518,73**	**0,00**	**50.056.371.759,01**

Dari Silpa tersebut terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Berjalan dengan rincian sebagai berikut.

a.	SiLPA Tahun Berjalan (LRA)	:	Rp120.215.662.518,73
	SAL Akhir Tahun Berjalan (LPSAL)	:	Rp120.215.662.518,73 -
			Rp0,00
	Penjelasan :		
	Tidak terdapat perbedaan antara SiLPA Tahun Berjalan (LRA) dan SAL Akhir Tahun Berjalan (LPSAL)		
b.	SiLPA Tahun Berjalan (LRA)	:	Rp120.215.662.518,73
	Kas setara kas tahun berjalan	:	Rp120.217.562.517,73
			-Rp1.899.999,00
	Penjelasan perbedaan :		
1)	Selisih Negatif merupakan saldo kas di Bendahara SD Negeri 2 Sekayu atas PPN dalam negeri untuk kegiatan TA. 2023 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Maret 2026		(Rp1.899.999,00)
c.	Silpa Tahun 2024 (LRA)	:	Rp50.056.371.759,01
	Penggunaan SiLPA Tahun Berjalan (LPSAL)	:	Rp39.964.530.163,01
			Rp10.091.841.596,00
	Penjelasan perbedaan :		
1)	Koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah yang merupakan SP2D LS pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 16.06/04.0/001128/LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PPR1/12/2024 sebesar Rp37.779.096 dan 16.06/04.0/001130/LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PPR1/12/2024 Sebesar Rp16.000.000 yang didebit pada tanggal 2 Januari 2025		Rp53.379.096,00
2)	Pengembalian dana penyertaan modal yang disetor ke kas daerah pada tanggal 09 Desember 2024		Rp10.038.462.500,00
d.	Saldo Kas Akhir TA.2024	:	Rp50.020.804.636,01
	Silpa TA 2024	:	Rp50.056.371.759,01
			-Rp35.567.123,00
	Penjelasan perbedaan :		
	Piutang PFK TA. 2024		-Rp37.467.122,00
	Utang Pajak TA.2024		Rp1.899.999,00
			-Rp35.567.123,00

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp40.017.909.259,01	**Rp119.544.525.633,58**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp40.017.909.259,01 merupakan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp39.964.530.163,01	**Rp131.728.424.206,58**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp39.964.530.163,01. Terdapat perbedaan antara SiLPA Tahun 2024 dengan Penggunaan SiLPA Tahun Berjalan dengan rincian sebagai berikut.

Silpa Tahun 2024 (LRA)	:	Rp50.056.371.759,01
Penggunaan SiLPA Tahun Berjalan (LPSAL)	:	Rp39.964.530.163,01
		Rp10.091.841.596,00
Penjelasan perbedaan :		
Koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah yang merupakan SP2D LS pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 16.06/04.0/001128/LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PPR1/12/2024 sebesar Rp37.779.096 dan 16.06/04.0/001130/LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PPR1/12/2024 Sebesar Rp16.000.000 yang didebit pada tanggal 2 Januari 2025		Rp53.379.096,00
Pengembalian dana penyertaan modal yang disetor ke kas daerah pada tanggal 09 Desember 2024		Rp10.038.462.500,00
		Rp10.091.841.596,00

5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp120.215.662.518,73	**Rp50.056.371.759,01**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

1	Surplus anggaran	96.798.779.481,72
2	Pembiayaan netto	**23.416.883.037,01**
	SiLPA Tahun Berjalan	**120.215.662.518,73**

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp53.379.096,00)	**Rp2.092.056.977,00**

Koreksi atas Kesalahan Pembukuan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar (Rp53.379.096,00) merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah yang merupakan SP2D LS pada tanggal 31 Desember 2024 yang lebih catat sebagai penerimaan pembiayaan di LRA Tahun 2024.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp120.215.662.518,73	**Rp40.017.909.259,01**

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp120.215.662.518,73 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 setelah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2025 tersebut naik sebesar Rp80.197.753.259,72 atau 200,40% dibanding Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.017.909.259,01.

5.3 Neraca

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening Neraca yang disajikan dengan perincian secara detail dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini, dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebagai berikut.

5.3.1 Aset

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp7.951.748.096.657,48	**Rp8.533.883.978.894,68**

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo akhir Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.951.748.096.657,48 turun sebesar Rp582.135.882.237,20 atau 6,82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.533.883.978.894,68. Rincian jumlah Aset sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.399.050.654.370,86	**Rp773.453.114.298,24**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut:

a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Lancar.

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.399.050.654.370,86 naik sebesar Rp625.597.540.072,62 atau 80,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp773.453.114.298,24. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut.

Tabel 5.31. Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	86.783.266.056,28	20.411.627.231,24
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	898.697.059,00	70.644.339,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	36.908.624,00	16.360,00
4	Kas di Bendahara BLUD	26.904.128.168,45	21.023.231.308,77
5	Kas Dana BOS	0,00	34.653.000,00
6	Kas Lainnya	1.899.999,00	1.899.999,00
7	Kas Dana BOSP	181.686.000,00	0,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	5.410.976.611,00	8.478.732.398,00
9	Piutang Pajak	104.788.440.583,11	107.208.561.154,57
10	Piutang Retribusi	337.355.660,00	337.355.660,00
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	4.688.693.024,49	7.988.751.082,15
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.114.240.284.000,00	558.436.605.000,00
13	Piutang Transfer Antar Daerah	60.286.989.738,00	39.272.678.649,60
14	Piutang lainnya	1.341.277.110,76	1.090.465.728,15
15	Penyisihan Piutang	(63.674.997.925,95)	(56.418.244.324,47)
16	Beban Dibayar Dimuka	3.857.716.699,47	2.829.694.542,74
17	Persediaan	52.967.332.963,25	62.686.442.169,49
Jumlah		**1.399.050.654.370,86**	**773.453.114.298,24**

a. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp120.217.562.517,73	**Rp50.020.804.636,01**

Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.217.562.517,73 atau naik sebesar Rp70.196.757.881,72 atau 140,34% dibandingkan dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.020.804.636,01. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Adapun rincian dari Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp86.783.266.056,28	**Rp20.411.627.231,24**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.783.266.056,28 atau naik sebesar Rp66.371.638.825,04 atau

325,17% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.411.627.231,24

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki satu rekening Kas Daerah. Kas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 928/KPTS-BPKAD/2023 yang menetapkan Nomor Rekening 149.300.0001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp86.783.266.056,28

Dari saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp86.783.266.056,28 terdapat kas yang dibatasi penggunaannya pada Tahun 2025 sebesar Rp14.120.050.548,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) DAK Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp1.093.442.423,00;
b) DAK Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp531.403.546,00;
c) DAK Fisik Bidang Air Minum sebesar Rp29.561.000,00;
d) DAK Fisik Bidang Sanitasi sebesar Rp 71.496.373,00;
e) DAK Fisik Bidang Irigasi sebesar Rp2.870.379.800,00;
f) DAK Fisik Bidang Jalan sebesar Rp309.835.970,00;
g) DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp5.767.100,00;
h) DAK Fisik Bidang Pasar sebesar Rp6.157.750,00;
i) DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp8.259.000,00;
j) DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp574.247.490,00;
l) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp65.055.751,00;
m) DAK Fisik Bidang Sanitasi - cadangan sebesar Rp300.000,00;
n) DAK Fisik Bidang irigasi - cadangan sebesar Rp860.000,00;
o) DAK Fisik Bidang Pariwisata - cadangan sebesar Rp6.238.000,00;
p) DAK Fisik Bidang Pertanian - cadangan sebesar Rp10.465.000,00
q) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - cadangan sebesar Rp7.140.000,00
r) DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman - cadangan sebesar Rp11.212.000,00

s) DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp1.918.799.305,00
t) DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (DTP) sebesar Rp319.750.000,00
u) DAK Non Fisik BOK sebesar Rp762.582.755,00

v) DAK Non Fisik BOKB sebesar Rp1.276.434.354,00
w) DAK Non Fisik PK Pertanian sebesar Rp23.940.000,00
x) DAK Non Fisik TKG sebesar Rp281.067.030,00
y) DAK Non Fisik POM sebesar Rp123.293.078,00
z) DAK RR sebesar Rp963.603.450,00
aa) DAU Spesifik Grant Pendanaan Kelurahan sebesar Rp114.427.945,00
ab) DAU Spesifik Grant Bidang Pendidikan sebesar Rp4.636,00
ac) DAU Spesifik Grant Bidang Kesehatan sebesar Rp1.317.866.006,00
ad) Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp361.086.877,00
ae) DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp698.303.924,00
af) DID sebesar Rp326.662.263,00
ag) Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp30.407.722,00

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp898.697.059,00	**Rp70.644.339,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 sebesar Rp898.697.059,00 naik sebesar Rp828.052.720,00 atau 1.172,14%. Adapun rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial di Rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 016401002084309 sebesar Rp853.379.416,00 yang disetor ke rekening kas umum daerah pada tanggal 19 Januari 2026 dan merupakan Dana Bantuan Umak yang tidak tersalurkan sebesar Rp828.750.000,00 Dan giro tabungan sebesar Rp24.629.416,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dana Bantuan Sosial “Bantu Umak” antara Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sekayu Nomor : 900/115/DINSOS/2025 dan Nomor:B.1.e-B/KCSEKAYU/01/2026.

b) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp700.000,00 yang merupakan setoran atas SP2D Nomor 16.06/04.0/000056/GU/2.08.0.00.0.00.11.0000/P2/9/2025 Tanggal 10 September 2025 sesuai TBP No 16.06/06.0/000448/UP/2.08.0.00.0.00.11.0000/P2/9/2025 Tanggal 16 September 2026 di karenakan adanya double entri TBP karena BUG pada SIPD RI dan sudah disetor ke rekening kas umum daerah pada tanggal 30 Januari 2026

c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp44.607.643,00 yang merupakan kurang setor sisa Ganti Uang Persediaan atas SP2D Nomor 16.06/04.0/000106/GU/ 5.02.0.00.0.00.46.0000/PPR1/11/2025 Tanggal 11 November 2025 dan sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 14 Januari 2026.

d) Terdapat reklasifikasi dari Piutang ke Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kelebihan bayar SP2D Dinas Perikanan Nomor 16.06/04.0/000132/LS/ 3.25.0.00.0.00.23.0000/PPRI /12/2025 Tanggal 16 Desember 2025 sebesar Rp11.587.500,00 dan didebit di RKUD sebesar Rp11.597.500,00 Atas kelebihan tersebut telah disetor kembali ke RKUD pada tanggal 12 Januari 2026.

Selain kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp898.697.059,00, terdapat kas di Bendahara SKPD yang sudah dicatat sebagai belanja di tahun 2025, yakni :

a) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lais di Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 149.3010409 sebesar Rp1.235.000,00 yang merupakan SP2D LS pada tanggal 23 Desember 2025 dengan Nomor 16.06/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.30.0000/PPR1/12/202 5 yang didebit pada tanggal 2 Januari 2026 sebesar Rp1.235.000,00.

b) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata di Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 14931000122 sebesar Rp1.321.323 yang terdiri dari :

1)	SP2D LS pada tanggal 23 Desember 2025 dengan Nomor 16.06/04.0/000457/LS/ 2.19.3.26.0.00.21.0000/PPR1/12/2025 yang didebit pada tanggal 6 Januari 2026	Rp662.162,00
2)	SP2D LS pada tanggal 23 Desember 2025 dengan Nomor 16.06/04.0/000456/LS/2.19.3.26.0.00.21.0 000/PPR1/12/2025 yang didebit pada tanggal 5 JANUARI 2026	Rp662.161,00
3)	Setor Tunai Bendahara untuk biaya transfer antar bank	Rp10.000,00
4)	Biaya transfer antar bank @ Rp6.500	(Rp13.000)
	Jumlah	**Rp1.321.323,00**

3) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2025	**31 Desember 2024**
Rp36.908.624,00	**Rp16.360,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.908.624,00 naik sebesar Rp36.892.264,00 atau

225.502,84%. Adapun rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a) Penyetoran atas saldo kas Tahun 2024 yang merupakan penerimaan PBB dan masih berada di Rekening BRI BPPRD Nomor 0164.01.001273.30.3 per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.360,00 dan disetor Rekening Kas Daerah pada Tanggal 15 Agustus 2025. Rekening tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

b) Mutasi tambah sebesar Rp.36.908.624,00 adalah Pembayaran Pajak PBB yang masih berada di Rekening BRI Nomor 0164.01.001273.30.3 dan belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Rekening tersbut dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan sudah disetor ke Kas Daerah tanggal 4 Maret 2026 dengan rincian terdiri dari Pajak PBB sebesar Rp.36.894.000,00 dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.14.624,00

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp26.904.128.168,45	**Rp21.023.231.308,77**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.904.128.168,45 naik sebesar Rp5.880.896.859,68 atau 27,97% dibanding saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.023.231.308,77.

Adapun rincian saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

a) Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp758.996.728,87 terdiri dari:

Tabel 5.32. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu

(dalam rupiah)

No	Uraian	Rekening	Jumlah
1	Giro BPD Sumsel Babel	149-30-10609	138.049.910,86
2	Giro Bank Mandiri	113-00-1213880-0	168.229.435,81
3	Giro Bank BRI	0164-01001-115-301	10.074.026,60
4	Bank BNI Giro	0724-870982	5.487.831,00
5	Giro Syariah Mandiri Pengeluaran	7132125133	383.555.157,15
6	Giro Bank Sumsel UP Pengeluaran	1493013356	11.228,00
7	Kas Tunai Bend Pengeluaran	-	94.921,00
8	Giro Bank Syariah Indonesia Penerimaan	7141076951	44.889.218,45
9	Kas Tunai Bend Penerimaan	-	8.605.000,00
JUMLAH			**758.996.728,87**

Adapun Penjelasan Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp8.605.000,00 merupakan kas loket tanggal 31 Desember 2025 sore dan malam yang belum dilakukan transfer ke rekening bank. Selain itu terdapat Reklas dari Piutang ke Kas BLUD sebesar Rp94.921,00 yang merupakan lebih bayar potongan iuran wajib pegawai jaminan Kesehatan sebesar 1% bulan pelayanan September 2025 terhadap pegawai RSUD Sekayu an. Dr. Muhammad Luqman Nul Hakim.

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2025 berasal dari:

Tabel 5.33. Kas BLUD RSUD Sekayu

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2024	171.845.881,38
2	Pendapatan	133.970.347.732,59
3	Belanja	133.383.196.885,10
Perhitungan saldo 31 Desember 2025		**758.996.728,87**

b) Saldo Kas BLUD pada RSUD Sungai Lilin sebesar Rp6.749.546.871,62 yang terdiri dari:

Tabel 5.34. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Bank Kas BLUD 160-301-0004	268.455.533,00
2	Bank Kas BLUD 714-310-7544	6.474.508.138,62
3	Kas Tunai Bend Penerimaan	6.583.200,00
JUMLAH		**6.749.546.871,62**

Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp6.583.200,00 adalah *Petty Cash* di kasir sebesar Rp1.500.000,00 serta Pendapatan layanan pasien umum Medikal CheckUp, rawat jalan dan IGD sebesar Rp5.083.200,00 pada tanggal 31 Desember 2024 yang disetor ke rekening kas BLUD pada tanggal 5 Januari 2025.

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.35. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo 31 Desember 2024	3.076.909.582,05
2	Pendapatan	34.019.447.266,57
3	Belanja	30.346.809.977,00
Perhitungan saldo 31 Des 2024		**6.749.546.871,62**

c) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp15.261.994.885,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.36. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	2.809.715,00
3	Bank Kas BLUD 176-301-0005	1.161.319,00
4	Bank Kas BLUD 383738377-3	15.258.023.851,00
JUMLAH		**15.261.994.885,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.809.715,00 dengan rincian pendapatan rawat jalan sebesar Rp 441.634,00 dan rawat inap sebesar Rp 2.368.081,00 yang merupakan pendapatan layanan pasien umum tanggal 31 Desember 2025 pada jam 14.00 WIB s.d 24.00 WIB yang disetor ke kas blud pada tanggal 02 Januari 2026.

Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37. Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo 31 Desember 2024	14.369.743.470,00
2	Pendapatan	34.504.914.879,00
3	Belanja	33.612.663.464,00
Perhitungan saldo 31 Des 2025		**15.261.994.885,00**

d) Kas Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.133.589.682,96 terdiri dari:

Tabel 5.38. Perhitungan Kas BLUD 29 Puskesmas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2024	3.404.732.375,34
2	Pendapatan	40.032.291.951,90
3	Belanja	39.303.434.644,28
	Perhitungan saldo 31 Des 2025	**4.133.589.682,96**

Rincian lebih lanjut perhitungan kas 29 BLUD dapat dilihat pada Lampiran 1.a.

5) Kas Dana BOS

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	**Rp34.653.000,00**

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 atau turun sebesar Rp34.653.000,00 atau 100% dibandingkan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.653.000,00 dikarenakan rekklasifikasi ke akun Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

6) Kas Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.899.999,00	**Rp1.899.999,00**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sama dengan Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.899.999,00 yang merupakan PPn Dalam Negeri pada SD Negeri 2 Sekayu yang baru disetor ke RKUD pada Tanggal 2 Maret 2026

7) Kas Dana BOSP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp181.686.000,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp181.686.000,00 atau meningkat sebesar 100% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Kas Dana BOSP adalah saldo dana yang mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran sekolah yang sumbernya berasal dari transfer pemerintah pusat sesuai dengan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sisa Dana BOSP pada akhir tahun tetap berada di rekening bank sekolah. Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOS yang terdapat pada rekening sekolah diakui sebagai SiLPA. Perhitungan Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.39. Kas di Bendahara BOS

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo 31 Desember 2024	**0,00**
Reklasifikasi dari Kas Dana BOS	34.653.000,00
Setoran Temuan BPK	11.802.000,00
Setoran Temuan Inspektorat	284.047.120,00
Pendapatan	96.042.302.000,00
Belanja sw asta	96.191.118.120,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	**181.686.000,00**

Rekapitulasi Realisasi Dana BOSP per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1c s.d. 1g.

8) Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp5.410.976.611,00	**Rp8.478.732.398,00**

Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.410.976.611,00. Saldo tersebut merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan kepada Puskesmas yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Perhitungan saldo BOK per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.40. Kas di Bendahara BOK

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo 31 Desember 2024	**8.478.732.398,00**
pendapatan BOK	6.670.431.485,00
belanja BOK	9.738.187.272,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**5.410.976.611,00**

Rincian lebih lanjut tentang perhitungan saldo Kas bendahara BOK dapat dilihat pada Lampiran 1.b.

b. Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp104.788.440.583,11	**Rp107.208.561.154,57**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp104.788.440.583,11 adalah gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai Saldo Piutang Pajak Daerah tahun 2025 tersebut turun sebesar Rp2.420.120.571,46 atau 2,26% dibandingkan nilai Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.208.561.154,57 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pajak Reklame	186.622.640,00	106.146.439,00
2	Pajak Air Tanah	899.126.420,00	873.639.127,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	2.220.000,00	3.800.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	780.926.198,00	157.611.527,00
5	PBB Pedesaan Perkotaan	99.211.816.603,00	90.160.280.880,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	1.157.938.838,00	1.240.028.218,00
7	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	673.571.508,00	604.129.528,00
8	PBJT- Tenaga Listrik	1.234.844.773,11	13.416.185.208,57
9	PBJT- Jasa Perhotelan	600.585.135,00	606.912.863,00
10	PBJT- Jasa Parkir	31.264.400,00	37.492.700,00
11	PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	9.524.068,00	2.334.664,00
Jumlah		**104.788.440.583,11**	**107.208.561.154,57**

Rekapitulasi mutasi Piutang Pajak Daerah selama Tahun 2025 yaitu

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024	Rp107.208.561.154,57
Mutasi Tambah :	
- Penambahan Piutang Pajak Daerah	Rp12.285.519.708,00
Mutasi Kurang :	
- Koreksi Piutang Pajak Daerah	Rp544.829.102,31
- Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Rp19.100.000,00
- Pembayaran Piutang Pajak Daerah	Rp14.141.711.177,15
Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025	Rp104.788.440.583,11

Adapun mutasi piutang pajak daerah dapat dirinci sebagai berikut.

1) Mutasi tambah sebesar Rp12.285.519.708,00 yang merupakan penambahan piutang pajak daerah dengan rincian:
   a) Pajak Reklame sebesar Rp80.956.201,00;
   b) Pajak Air Tanah sebesar Rp32.372.543,00;
   c) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp470.000,00;
   d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp658.211.734,00;
   e) PBB Pedesaan Perkotaan sebesar Rp9.948.566.720,00;
   f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebesar Rp235.071.100,00;
   g) PBJT- Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp386.049.857,00;
   h) PBJT- Tenaga Listrik sebesar Rp922.210.149,00;
   i) PBJT- Jasa Perhotelan sebesar Rp9.559.500,00;

j) PBJT- Jasa Parkir sebesar Rp4.862.500,00; dan
k) PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp7.189.404,00;

2) Mutasi kurang sebesar Rp14.705.640.279,46 dengan rincian
a) Koreksi lebih catat piutang Pajak Daerah sebesar Rp544.829.102,31 yang terdiri dari:
(1) Koreksi kurang catat Pajak Reklame sebesar Rp37.648.454,00;
(2) Koreksi kurang catat PBB Pedesaan Perkotaan sebesar Rp262.451,00;
(3) Koreksi lebih catat PBJT- Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp19.723.091,00; dan
(4) Koreksi lebih catat PBJT- Tenaga Listrik sebesar Rp563.016.916,31;
b) Penghapusan Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan sebesar Rp19.100.000,00.
c) Pembayaran Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.141.711.177,15 dengan rincian:
(1) Pajak Reklame sebesar Rp38.128.454,00;
(2) Pajak Air Tanah sebesar Rp6.885.250,00;
(3) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp2.050.000,00;
(4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp34.897.063,00;
(5) PBB Pedesaan Perkotaan sebesar Rp897.293.448,00;
(6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebesar Rp298.060.480,00;
(7) PBJT- Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp296.884.786,00;
(8) PBJT- Tenaga Listrik sebesar Rp12.540.533.668,15;
(9) PBJT- Jasa Perhotelan sebesar Rp15.887.228,00; dan
(10) PBJT- Jasa Parkir sebesar Rp11.090.800,00;

Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3a.

c. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp337.355.660,00	**Rp337.355.660,00**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp337.355.660,00, saldo tersebut merupakan piutang retribusi atas

Menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp336.530.660,00 dan Piutang retribusi Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp825.000,00.

Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3b.

d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp4.688.693.024,49	**Rp7.988.751.082,15**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diantaranya Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Piutang BLUD, dan Piutang Lain-Lain PAD.

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.688.693.024,49 turun sebesar Rp3.300.058.057,66 atau 41,31% dibandingkan nilai Piutang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.988.751.082,15 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

1) Dinas Kesehatan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp3.097.618.944,66	**Rp5.608.159.534,07**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan piutang BLUD yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD.

Piutang lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.097.618.944,66 turun sebesar Rp2.510.540.589,41 atau 44,77% dibandingkan nilai Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.608.159.534,07. Dengan rincian sebagai berikut.

Rekapitulasi Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan Tahun 2025 yaitu:

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah -Dinas Kesehatan 31 Desember 2024	Rp5.608.159.534,07
Mutasi Tambah :	
- Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah -Dinas Kesehatan	Rp2.519.939.618,00
Mutasi Kurang :	
- Koreksi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah -Dinas Kesehatan	Rp1.906.580.147,41
- Pembayaran Piutang Lain-Lain PAD yang Sah -Dinas Kesehatan	Rp3.123.900.060,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025	Rp3.097.618.944,66

Adapun mutasi piutang pajak dapat dirinci sebagai berikut.

a) Mutasi Tambah sebesar Rp2.519.939.618,00 yang merupakan Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Dinas Kesehatan dengan rincian:
   (1) BLUD Puskesmas Ngulak berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp5.420.000,00;
   (2) BLUD Puskesmas Babat Toman berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp6.048.000,00;
   (3) BLUD Puskesmas Ulak Paceh berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp625.000,00;
   (4) BLUD Puskesmas Tanah Abang berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp2.540.000,00;
   (5) BLUD Puskesmas Bukit Selabu berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp1.380.000,00;
   (6) BLUD Puskesmas Lumpatan berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp5.570.000,00;
   (7) BLUD Puskesmas Lais berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp5.375.000,00;
   (8) BLUD Puskesmas Teluk Kijing berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp3.245.000,00;
   (9) BLUD Puskesmas Bandar Agung berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp16.648.000,00;
   (10) BLUD Puskesmas Air Balui berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp22.764.000,00;
   (11) BLUD RSUD Sungai Lilin berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp56.500.000,00;
   (12) BLUD RSUD Bayung Lencir berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp2.388.524.100,00;
   (13) BLUD RSUD Sekayu berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp5.300.518,00.

b) Mutasi Kurang sebesar Rp5.030.480.207,41 dengan rincian:
   (1) Koreksi Piutang Pajak Pendapatan BLUD sebesar Rp1.906.580.147,41 yang terdiri dari Penghapusan berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 230/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp111.927.302,41 dan Koreksi Piutang

BPJS Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp1.794.652.845,00

(2) Pembayaran Piutang Pajak Pendapatan BLUD sebesar Rp3.123.900.060,00 dengan rincian :

(a) BLUD Puskesmas Ngulak berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp5.420.000,00;

(b) BLUD Puskesmas Babat Toman berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp17.328.000,00;

(c) BLUD Puskesmas Tebing Bulang berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp5.745.000,00;

(d) BLUD Puskesmas Jirak berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp1.280.000,00;

(e) BLUD Puskesmas Gardu Harapan berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp4.062.000,00;

(f) BLUD Puskesmas Tanjung Kerang berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp4.000.000,00;

(g) BLUD Puskesmas Sri Gunung berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp5.600.000,00;

(h) BLUD Puskesmas Karya Maju berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp20.523.000,00;

(i) BLUD Puskesmas Mekarjaya berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp873.000,00;

(j) BLUD Puskesmas Bandar Agung berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp11.000.000,00;

(k) BLUD Puskesmas Air Balui berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp26.016.000,00;

(l) BLUD RSUD Sungai Lilin berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp22.243.300,00;

(m) BLUD RSUD Bayung Lencir berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp3.401.000,00; dan

(n) BLUD RSUD Sekayu berdasarkan klaim bulan Desember sebesar Rp2.996.408.760,00.

2) BLUD RSUD SEKAYU

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	**Rp3.000.000,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp3.000.000,00 atau 100% dibandingkan nilai Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Piutang lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSUD Sekayu terdiri dari :

(1) Pengurangan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSUD Sekayu yang merupakan Sewa ruang ATM PT Bank BSI selama 1(satu) Tahun (28 Oktober 2024 - 28 Oktober 2025) dan telah dibayar sebesar Rp3.000.000,00 Tanggal 3 Januari 2025 berdasarkan kontrak No:100.3.7/089/RS/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Sewa Menyewa Penempatan ATM BSI.

(2) Penambahan piutang dari lebih bayar potongan iuran wajib pegawai jaminan Kesehatan sebesar 1 % bulan pelayanan September 2025 terhadap pegawai RSUD Sekayu an. Dr. Muhammad Luqman Nul Hakim sebesar Rp94.921,00.

(3) Koreksi BPK atas Reklasifikasi dari Piutang ke Kas BLUD yang merupakan lebih bayar potongan iuran wajib pegawai jaminan kesehatan 1% dengan nilai sebesar Rp94.921,00

3) BPKAD

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp9.748.980,00	**Rp415.525.019,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BPKAD per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.748.980,00 turun sebesar Rp405.776.039,00 atau 97,65% dibandingkan nilai Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp415.525.019,00.

Rekapitulasi Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BPKAD tahun 2025 yaitu.

Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024	Rp415.525.019,00
Mutasi tambah:	
– Penambahan Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah	Rp7.361.083,00
Mutasi kurang:	
– Pembayaran Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah	Rp413.137.122,00
Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025	Rp9.748.980,00

a) Mutasi tambah sebesar Rp7.361.083,00 yang merupakan Penambahan Piutang Pajak Lain-lain PAD pada BPKAD atas kelebihan pembayaran PFK dengan rincian:

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp461.500,00 yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar

Rp369.200,00 dan Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp92.300,00;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.560.000,00 yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp1.248.000,00 dan Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp312.000,00; dan

(3) Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang sebesar Rp5.339.583,00 yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai 8% sebesar Rp770.200,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp3.655.498,00 dan Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp913.885,00.

b) Mutasi kurang sebesar Rp413.137.122,00 yang merupakan Pembayaran Piutang Pajak Lain-lain pada BPKAD yang Sah dengan rincian:

(1) Kelebihan pembayaran iuran Taspen JKK dan JKM bulan November 2024 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyusin berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Kekurangan Iuran/Kelebihan Iuran JKK JKM ASN Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024 Tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp 37.467.122,00;dan

(2) Hasil penjualan lelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Nomor:587/04.02/2024-1 Tanggal 09 Juli 2024 sebesar Rp375.670.000,00 yang terdiri dari Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp 204.028.000,00 dan Alat Kedokteran Umum sebesar Rp171.642.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 15 Januari 2025.

4) SKPD

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.581.325.099,83	**Rp1.962.066.529,08**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.581.325.099,83 turun sebesar Rp380.741.429,25 atau 19,41% dibandingkan nilai Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.962.066.529,08. Dengan rincian sebagai berikut:

Adapun rincian mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada SKPD selama tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

a) Mutasi tambah sebesar Rp1.618.315.336,83 yang terdiri dari:
   (1) Penambahan terkait double cair sebesar Rp34.386.000,00 yang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp34.376.000,00 dan Dinas Perikanan sebesar Rp10.000,00
   (2) Penambahan terkait hasil pemeriksaan Setoran Temuan BPK RI, Inspektorat, BPKP dan pengembalian kelebihan belanja yang sudah disetor ke Kas Daerah pada 1 Januari s.d 28 Februari 2026 sebesar Rp450.815.047,13, dengan rincian sebagai berikut
      (a) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp11.888.070,00;
      (b) Dinas Kesehatan sebesar Rp30.316.358,00;
      (c) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp23.302.357,00;
      (d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.000.000,00;
      (e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.832.860,00;
      (f) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp100.648.115,13; dan
      (g) Sekretariat DPRD sebesar Rp262.827.287,00;
   (3) Koreksi temuan pemeriksaan LKPD sebesar Rp140.650.176,96 yang terdiri dari Mekanisme Pemutusan Kontrak dan Pengenaan Sanksi atas Pekerjaan Jalan yang Tidak Selesai pada Dinas Perkim Tidak Sesuai Ketentuan serta keterlambatan Pelaksanaan dan Kekurangan Pengenaan Denda atas Paket Pekerjaan Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tiga SKPD (PUPR, Perkim, Dinkes).
   (4) Koreksi atas hasil pemeriksaan KIB F pada PUPR diketahui 6 Aset KDP yang tidak tepat pengakuannya sebesar Rp992.464.112,74
b) Mutasi kurang sebesar Rp1.999.056.766,08 yang merupakan Pembayaran atas pengembalian kelebihan belanja yang sudah di setor ke Kas Daerah pada 1 Januari s.d 28 Februari 2025 dan koreksi BPK atas Reklas dari Piutang ke Kas Bendahara Pengeluaran yang merupakan

Kelebihan Bayar SP2D Dinas Perikanan Tahun 2025 yang disetor di Tahun 2026 sebesar Rp10.000.

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3c.

e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.114.240.284.000,00	**Rp558.436.605.000,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan nilai definitif atas Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-DBH per 31 Desember 2024	Rp558.436.605.000
Mutasi tambah:	
– Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-DBH	Rp1.114.240.284.000
Mutasi kurang:	
– Koreksi Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat-DBH	Rp558.436.605.000
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-DBH per 31 Desember 2025	Rp1.114.240.284.000

Adapun rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1) Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat -DBH berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.114.240.284.000,00.
2) Koreksi atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat -DBH sebesar Rp558.436.605,00

Rincian mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 4.

f. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp60.286.989.738,00	**Rp39.272.678.649,60**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang dana bagi hasil pajak daerah dan kurang salur Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.543.056.841,00 naik sebesar Rp4.270.378.191,40 atau 10,87% dibandingkan nilai Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.272.678.649,60. Rekapitulasi Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah selama tahun 2025 yaitu:

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024	Rp	39.272.678.649,60
Mutasi tambah:		
– Penambahan Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	43.543.056.841,00
– Koreksi BPK Kurang catat piutang	Rp	17.149.429.897,00
Mutasi kurang:		
– Pembayaran Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	39.272.678.649,60
– Koreksi BPK Lebih catat piutang	Rp	405.497.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025	Rp	60.286.989.738,00

Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah selama tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1) Penambahan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp60.692.486.738,00 yang terdiri dari:
   a) Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur No: 962KPTS/BAPENDA/2025 tentang alokasi bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Oktober Tahun 2025 sebesar Rp7.417.006.641,00;
   b) Bantuan Keuangan berdasarkan SK Gubernur No:431/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.126.050.200,00; dan
   c) Bantuan Keuangan berdasarkan SK Gubernur No:431/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00;
   d) Koreksi BPK atas kurang catat piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp17.149.429.897,00 yang terdiri dari:
      - SK Gubernur No:999/KPTS/BAPENDA/2025 Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan November Tahun 2025 sebesar Rp8.544.552.734,00; dan
      - SK Gubernur No:102/KPTS/BAPENDA/2026 Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Selatan untuk bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp8.604.877.163,00.

2) Pembayaran Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp39.678.175.649,60 yang terdiri dari:
   a) Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur No: 900KPTS/BAPENDA/2024 tentang alokasi bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Oktober Tahun 2024 sebesar Rp12.352.473.483,00 ; dan
   b) Bantuan Keuangan berdasarkan SK Gubernur No:398/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.920.205.166,60.
   c) Koreksi BPK atas lebih catat piutang Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp405.497.000,00 berdasarkan SK Gubernur No:156/KPTS/BPKAD/2026 tentang Alokasi Anggaran kurang salur belanja keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Rincian mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.d.

g. Piutang Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.341.277.110,76	**Rp1.090.465.728,15**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.341.277.110,76 naik sebesar Rp250.811.382,61 atau 23,00% dibandingkan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.090.465.728,15. Mutasi Piutang Lainnya selama tahun 2025 yaitu:

1) Pembayaran Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp268.032.687,45; dan
2) Penambahan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp518.844.070,06 yang berdasarkan SKTJM.

Rincian mutasi piutang lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.e.

h. Penyisihan Piutang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp63.674.997.925,95)	**(Rp56.418.244.324,47)**

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp63.674.997.925,95) turun sebesar Rp7.256.753.601,48 atau 12,86% dibandingkan nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp56.418.244.324,45).

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 6 s.d 8d.

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp62.574.803.766,25)	**(Rp55.131.423.858,00)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar (Rp62.574.803.766,25) turun sebesar Rp7.443.379.908,25 atau 13,50% dibandingkan nilai Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp55.131.423.858,00). Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah selama tahun 2025 yaitu:

Tabel 5.42. Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2024 (Rp)	Koreksi	Beban	Pendapatan Lain-lain -LO	Penyisihan Piutang Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3-4+5-6
1	Pajak Reklame	42.865.682,50	0,00	8.481.875,98	236.242,27	51.111.316,21
2	Pajak Air Tanah	167.473.098,81	0,00	212.089.225,46	34.426,25	379.527.898,02
3	Pajak Sarang Burung Walet	525.250,00	0,00	2.350,00	10.250,00	517.350,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.306.526,70	0,00	43.472.773,19	174.485,32	60.604.814,57
5	PBB Pedesaan Perkotaan	53.548.316.673,17	0,00	7.534.838.227,18	140.201.898,15	60.942.953.002,20
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangur	302.563.297,49	19.100.000,00	52.711.828,71	4.199.426,90	331.975.699,30
6	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	83.310.476,67	0,00	43.654.734,85	1.489.173,93	125.476.037,59
7	PBJT- Tenaga Listrik	563.068.827,42	0,00	11.708.926,17	344.968.847,44	229.808.906,16
8	PBJT- Jasa Perhotelan	401.205.394,85	0,00	48.336.770,00	3.817.338,55	445.724.826,30
10	PBJT- Jasa Parkir	4.393.164,00	0,00	2.538.291,00	608.952,50	6.322.502,50
11	PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	395.466,40	0,00	385.947,02	-	781.413,42
Jumlah		**55.131.423.858,00**	**19.100.000,00**	**7.958.220.949,56**	**495.741.041,31**	**62.574.803.766,25**

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 8a.

2) Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp337.355.660,00)	**(Rp337.355.660,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp337.355.660,00) sama dengan Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024. Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi selama tahun 2025 yaitu:

Tabel 5.43. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2024	Koreksi	Beban	Pendapatan lain-lain-LO	Penyisihan Piutang Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7 =3-4+5-6
1	Menara Telekomunikasi	336.530.660,00	0,00	0,00	0,00	336.530.660,00
1	Laboratorium	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
Jumlah		**337.355.660,00**	0,00	0,00	0,00	**337.355.660,00**

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 8b.

3) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp593.370.172,64)	**(Rp897.465.536,37)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar (Rp593.370.172,64) naik sebesar Rp304.095.363,73 atau 33,88% dibandingkan nilai Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp897.465.536,37). Mutasi Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah selama tahun 2025 yaitu:

Tabel 5.44. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2024 (Rp)	Koreksi/ Penghapusan	Beban	Pendapatan Lain-lain -LO	Koreksi BPK	Penyisihan Piutang Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7=3-4+5-6+7
1	BLUD PKM Ngulak	27.100,00	-	27.100,00	27.100,00		27.100,00
2	BLUD PKM Babat Toman	86.640,00	-	30.240,00	86.640,00		30.240,00
3	BLUD PKM Ulak Paceh	-	-	3.125,00	-		3.125,00
4	BLUD PKM Tanah Abang	-	-	12.700,00	-		12.700,00
5	BLUD PKM Lubuk Bintialo	-	-	-	-		0,00
6	BLUD PKM Bukit Selabu	-	-	6.900,00	-		6.900,00
7	BLUD PKM Cinta Karya	-	-	-	-		0,00
8	BLUD PKM Suka Damai	-	-	-	-		0,00
9	BLUD PKM Sidorahayu	-	-	-	-		0,00
10	BLUD PKM Tebing Bulang	28.725,00	-	-	28.725,00		0,00
11	BLUD PKM Jirak	6.400,00	-	-	6.400,00		0,00
12	BLUD PKM Balai Agung	-	-	-	-		0,00
13	BLUD PKM Lumpatan	-	-	27.850,00	-		27.850,00
14	BLUD PKM Lais	-	-	26.875,00	-		26.875,00
15	BLUD PKM Gardu Harapan	20.310,00	-	-	20.310,00		0,00
16	BLUD PKM Teluk Kijing	-	-	16.225,00	-		16.225,00
17	BLUD PKM Tanjung Kerang	20.000,00	-	-	20.000,00		0,00
18	BLUD PKM Sungai Lilin	-	-	-	-		0,00
19	BLUD PKM Sri Gunung	28.000,00	-	-	28.000,00		0,00
20	BLUD PKM Karya Maju	102.615,00	-	-	102.615,00		0,00
21	BLUD PKM Mekarjaya	4.365,00	-	-	4.365,00		0,00
22	BLUD PKM Bayung Lencir	-	-	-	-		0,00
23	BLUD PKM Suka Jaya	-	-	-	-		0,00
24	BLUD PKM Peninggalan	-	-	-	-		0,00
25	BLUD PKM Sumber Harum	-	-	-	-		0,00
26	BLUD PKM Berojaya Timur	-	-	-	-		0,00
27	BLUD PKM Bandar Agung	55.000,00	-	83.240,00	55.000,00		83.240,00
28	BLUD PKM Karang Mukti	-	-	-	-		0,00
29	BLUD PKM Air Balui	130.080,00	-	113.820,00	130.080,00		113.820,00
30	BLUD RSUD S. LILIN	74.311.111,50	-	282.500,00	217.711,50		74.375.900,00
31	BLUD RSUD BYG LENCIR	17.065.607,00	-	11.942.620,50	17.005,00		28.991.222,50
32	BLUD RSUD SEKAYU	801.111.000,26	1.906.580.147,41	1.785.706.083,37	193.673.108,96		486.563.827,26
33	SEWA ATM	15.000,00	-	-	15.000,00		0,00
34	BPJS	2.387.897,00	-	-	-		2.387.897,00
35	PFK	187.335,61	-	-	187.335,61		0,00
36	Lelang Kendaraan Roda Empat	1.020.140,00	-	-	1.020.140,00		0,00
37	Lelang Alat Kedokteran	858.210,00	-	-	858.210,00		0,00
37	Denda Keterlambatan	-	-	-	-	703.250,88	703.250,88
JUMLAH		897.465.536,37	1.906.580.147,41	1.798.279.278,87	196.497.746,07	703.250,88	593.370.172,64

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 8c.

4) Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp169.468.327,06)	**(Rp51.999.270,09)**

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar (Rp169.468.327,06) turun sebesar Rp117.469.056,97 atau 225,91% dibandingkan nilai Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp51.999.270,09). Mutasi Penyisihan Piutang Lainnya selama tahun 2025 yaitu:

Tabel 5.45. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2024 (Rp)	Koreksi/ Penghapusan	Beban	Pendapatan Lain-lain - LO	Penyisihan Piutang Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3-4+5-6
1	Tuntutan Ganti Rugi	51.999.270,09	-	118.809.220,41	1.340.163,44	169.468.327,06
Jumlah		**51.999.270,09**	**-**	**118.809.220,41**	**1.340.163,44**	**169.468.327,06**

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 8d.

i. Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp3.857.716.699,47	**Rp2.829.694.542,74**

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.857.716.699,47 naik sebesar Rp 1.028.022.156,73 atau 36,33% dibanding Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.829.694.542,74. Saldo Beban dibayar dimuka merupakan premi asuransi yang dibayar dimuka oleh 30 SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada perusahaan penyedia jasa asuransi namun manfaatnya belum diterima seluruhnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.857.716.699,47 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.46. Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.476.473.484,65
2	Belanja Premi Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
3	Belanja Premi Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00
4	Belanja Premi Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.381.243.214,82
Total		**3.857.716.699,47**

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10.

j. Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp52.967.332.963,25	**Rp62.686.442.169,49**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.967.332.963,25 turun sebesar Rp9.719.109.206,24 atau 15,50% dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.686.442.169,49. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 terdiri dari;

1) Bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp3.496.000,00;

2) Bahan kimia sebesar Rp1.186.272.815,18;
3) Bahan bakar dan pelumas sebesar Rp4.875.000,00;
4) Bibit tanaman sebesar Rp234.067.836,00;
5) Isi tabung gas sebesar Rp20.315.178,00;
6) Bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp26.220.666,01;
7) Bahan lainnya sebesar Rp757.445.382,31;
8) Suku cadang alat kedokteran sebesar Rp918.496,00;
9) Alat tulis kantor sebesar Rp1.751.116.574,80;
10) Kertas dan cover sebesar Rp40.254.015,00;
11) Bahan cetak sebesar Rp649.021.194,89;
12) Benda pos sebesar Rp446.000,00;
13) Bahan komputer sebesar Rp134.976.336,06;
14) Perabot kantor sebesar Rp38.527.339,50;
15) Alat listrik sebesar Rp5.712.228.295,04;
16) Suvenir/cendera mata sebesar Rp234.095.800,00;
17) Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp207.049.123,50;
18) Obat sebesar Rp10.464.366.422,81;
19) Obat lainnya sebesar Rp5.870.424.312,96;
20) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya sebesar Rp11.671.450,00 yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang digunakan untuk keperluan siap siaga untuk bencana atau krisis;
21) Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp500.804.137,44 terdapat empat SKPD yang memiliki sisa persediaan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut;
    a) Puskesmas Bayung Lencir senilai Rp15.960.832,00 berupa KB yang akan digunakan untuk pasien yang akan memasang KB.
    b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp151.066.689,44 berupa kegiatan rehabilitasi bangunan yang belum diserahkan dikarenakan sedang menunggu proses penandatanganan.
    c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp238.714.544,00 berupa alat-alat bantuan yang akan disalurkan ketika ada bencana.
    d) Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana senilai Rp95.062.072,00 berupa obat-obatan yang akan disalurkan sesuai dengan permintaan fasilitas kesehatan.

22) Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp24.727.529.650,00 terdapat dua SKPD yang memiliki sisa persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya dengan rincian sebagai berikut;
    a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp24.723.629.650,00 merupakan Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya berupa kegiatan pembangunan, rehabilitasi bangunan serta penataan halaman yang belum diserahkan kepada pihak terkait yang disebabkan karena masih dalam proses penadatanganan Berita Acara Serah Terima.
    b) Badan penanggulangan bencana daerah senilai Rp3.900.000,00 berupa kantong mayat yang masih menjadi persediaan di gudang.
23) Natura sebesar Rp391.148.907,75;
24) Natura dan pakan lainnya sebesar Rp62.000,00.

Rincian Rekapitulasi Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.3.1.2 Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp671.540.671.670,97	**Rp703.954.597.087,50**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Investasi pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.540.671.670,97 atau mengalami penurunan sebesar Rp32.413.925.416,53 atau 4,60% dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp703.954.597.087,50. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi tersebut merupakan investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengukuran investasi menggunakan metode ekuitas dengan mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Investasi Permanen

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp671.540.671.670,97	**Rp703.954.597.087,50**

Saldo Investasi Permanen pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.540.671.670,97 mengalami penurunan sebesar Rp32.413.925.416,53 atau 4,60% dibandingkan dengan saldo

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp703.954.597.087,50. Rincian Investasi Permanen adalah sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp312.420.985.551,20	**Rp330.313.160.007,15**

Saldo Investasi pada PDAM Tirta Randik per 31 Desember 2025 sebesar Rp312.420.985.551,20 mengalami penurunan sebesar Rp17.892.174.455,95 atau 5,42% dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp330.313.160.007,15.

Tabel 5.47. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total
	1	2	3	4	5=2+3-4
1	PDAM Tirta Randik	330.313.160.007,15	26.586.109.626,00	44.478.284.081,95	312.420.985.551,20

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Randik" Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 1987 tanggal 2 November 1987. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005. PDAM "Tirta Randik" berkantor pusat di Kota Sekayu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah, maka Direksi PDAM dapat membentuk Cabang atau Perwakilan atau bagian perusahaan di kota-kota lainnya di dalam daerah pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesa**r** Rp26.586.109.626,00. Pengurangan investasi sebesar Rp44.478.284.081,95 merupakan perhitungan dengan metode equitas atas rugi PDAM Tirta Randik Tahun 2025 sehingga total investasi permanen pada PDAM Tirta Randik per 31 Desember 2025 sebesar Rp312.420.985.551,20. PDAM Tirta Randik telah selesai diaudit oleh KAP Achmad Rifai & Bunyamin

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel

Saldo Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.051.643.431,23 tidak terdapat kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 Desember 2024.

Tabel 5.48. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	per 31 Desember 2024
	1	2	3	4	5=2+3-4
1	PT. Bank SumselBabel	129.051.643.431,23	0,00	0,00	129.051.643.431,23

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp219.409.770.231,54	**Rp248.079.196.878,12**

Saldo Investasi pada PT Petro Muba Holding per 31 Desember 2025 sebesar Rp219.409.770.231,54 mengalami penurunan sebesar Rp28.669.426.646,58 atau 11,56% dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp248.079.196.878,12, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total
	1	2	3	4	5=2+3-4
1	PT Petro Muba Holding	248.079.196.878,12	-	28.669.426.646,58	219.409.770.231,54
Total		**248.079.196.878,12**	**-**	**28.669.426.646,58**	**219.409.770.231,54**

Perusahaan PT Petro Muba didirikan melalui Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Februari 2002. Perusahaan ini mengalami perubahan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Mei 2009 dengan salinan akta Nomor 4 tanggal 6 Juni 2009. Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-51915.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 28 Oktober 2009. Aktivitas perusahaan terdiri dari lima perusahaan anak dengan satu perusahaan induk yang terdiri dari:

a) PT Petro Muba sebagai Perusahaan Induk;
b) PT Muba Link sebagai Perusahaan Anak;
c) PT Kilang Muba sebagai Perusahaan Anak;
d) PT Muba Electric Power sebagai Perusahaan Anak;
e) PT Muba Sarana sebagai Perusahaan Anak;dan
f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari (PMBL)

Pengurangan investasi sebesar Rp28.669.426.646,58 merupakan perhitungan dengan metode ekuitas atas rugi PT Petro Muba Holding Tahun 2025 sebesar Rp18.561.751.404,58 dan koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra.Suhartati & Rekan, sebesar Rp10.107.675.242,00 sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2025 pada PT Petro Muba Holding sebesar Rp219.409.770.231,54**,** dengan rincian sebagai berikut.

a) PT Petro Muba

   Dari saldo Investasi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.463.396.594,00 terdapat pengurangan sebesar Rp13.650.772.020,00 yang merupakan perhitungan dengan metode ekuitas atas rugi PT Petro Muba Tahun 2025 sebesar

Rp13.649.758.803,00 dan koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra.Suhartati & Rekan, sebesar Rp1.013.217,00 sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2025 pada PT Petro Muba sebesar Rp32.812.624.574,00.

b) PT Muba Link

Didirikan di Sekayu dengan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 06 Januari 2003. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 29 April Tahun 2008 Nomor AHU 21734.01.01 Tahun 2008. Anggaran dasar perusahan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 22 Oktober 2012 yang anggaran dasarnya mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Muba Link tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor AHU-007764J.AH.0109 Tahun 2013. Perseroan ini bergerak di bidang pengolahan gedung, jasa perhotelan, event organizer dan jasa pariwisata.

Dari saldo Investasi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.066.559.661,70 terdapat penambahan sebesar Rp4.344.012,42 yang merupakan perhitungan dengan metode ekuitas atas laba PT Muba Link Tahun 2025. Pengurangan sebesar Rp223.158.325,00 merupakan koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra.Suhartati & Rekan, sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2025 pada PT Muba Link sebesar Rp1.847.745.349,12.

c) PT Kilang Muba

Sudah tidak beroperasi lagi dengan total investasi permanen pada PT Kilang Muba per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.609.581.500,00.

d) PT Muba Electric Power

Didirikan di Sekayu dengan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 30 September 2006. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 28 September Tahun 2006 Nomor 105-00218 HT.01.01 Tahun 2006. Anggaran dasar perusahan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Notaris Nomor 24 tanggal 25 November 2015. Perseroan ini bergerak di bidang Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Pembangunan.

Dari saldo Investasi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp196.811.807.351,42 terdapat pengurangan sebesar

Rp14.803.461.678,00 merupakan perhitungan dengan metode ekuitas atas rugi PT Muba Electric Power Tahun 2025 sebesar Rp4.916.336.614,00 dan koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra.Suhartati & Rekan, sebesar Rp9.887.125.064,00 sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2025 pada PT Muba Electric Power sebesar Rp182.008.345.673,42.

e) PT Muba Sarana

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LS) pada tanggal 10 April 2023 disetujui pembekuan untuk sementara waktu terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan usaha PT Muba Sarana. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Sarana per 31 Desember 2025 menanggung rugi sebesar Rp2.007.624.290,00.

f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari

PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari merupakan anak perusahaan PT Petro Muba Holding yang baru berdiri pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003398.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018012416103615 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Perseroan ini bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pembangunan dan pertanian.

Dari saldo Investasi Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.864.523.939,00) terdapat koreksi investasi permanen atas laba audited 2025 PT Perkebunan Musi Banyuasin sebesar Rp3.621.364,00. Namun di tahun 2026, PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari sudah tidak beroperasi lagi sehingga total investasi permanen pada PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari per 31 Desember 2025 menanggung rugi sebesar Rp1.860.902.575,00.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Muba Energi Maju Berjaya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp10.658.272.457,00	**(Rp3.489.403.229,00)**

Saldo Investasi pada PT Muba Energi Maju Berjaya per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.658.272.457,00

Tabel 5.50. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Muba Energi Maju Berjaya

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total
	1	2	3	4	5=2+3-4
1	PT Muba Energi Maju Berjaya	(3.489.403.229,00)	14.150.768.186,00	3.092.500,00	10.658.272.457,00
Total		**(3.489.403.229,00)**	**14.150.768.186,00**	**3.092.500,00**	**10.658.272.457,00**

PT Muba Energi Maju Berjaya (PT MEMB) (Perseroda) yang dibentuk berdasarkan Perda No.1 Tahun 2021 pada tanggal 20 Januari 2021 adalah sebagai Pengelola Dana Participating Interest (PI) 10% dengan Akta Notaris Nomor 123 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 dan telah mendapatkan pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0019734.H.01.01 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 sebagai usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengantisipasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia dimana Daerah diberikan hak istimewa (privilege) untuk mengembangkan potensi daerahnya. Penambahan investasi sesuai metode ekuitas atas laba PT MEMB Tahun 2025 sebesar Rp10.658.272.457,00. Penambahan Investasi senilai Rp14.147.675.686,00 merupakan laba Tahun 2025 dari Laporan Keuangan Audited sebesar Rp14.150.768.186,00 yang diaudit oleh KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin pada tanggal 20 April 2026 dengan Laporan Auditor Independen Nomor:00048/3.0246/AU.8/02/0141-1/1/IV/2026 dan koreksi Pengurangan investasi sebesar Rp3.092.500,00 merupakan koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Tahun 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sukardi Hasan & Rekan.

Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2025, dapat dilihat pada Lampiran 13.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp5.438.375.171.444,08	**Rp6.629.337.831.043,25**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.438.375.171.444,08 mengalami penurunan sebesar Rp1.190.962.659.599,17 atau 17,97% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.629.337.831.043,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51. Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2025	NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	537.373.517.393,80	537.219.524.393,80
2	Peralatan Mesin	1.573.018.555.113,03	1.493.802.174.447,16
3	Gedung dan Bangunan	3.486.082.218.783,01	3.397.608.252.384,33
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.345.578.746.315,61	10.175.467.918.209,98
5	Aset Tetap Lainnya	123.647.979.134,25	102.918.522.672,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	125.505.712.746,98	134.349.043.799,18
7	Akumulasi Penyusutan	(10.752.831.558.042,60)	(9.212.027.604.863,45)
JUMLAH		**5.438.375.171.444,08**	**6.629.337.831.043,25**

Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 14.

a. Tanah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp537.373.517.393,80	**Rp537.219.524.393,80**

Aset Tetap Tanah pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp537.373.517.393,80 mengalami kenaikan sebesar Rp153.993.000,00 atau 0,03% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp537.219.524.393,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52. Mutasi Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah Persil	362.767.841.471,80	6.924.600.137,00	6.770.607.137,00	362.921.834.471,80
Tanah Non Persil	38.413.211.249,39	140.000.000,00	1.037.260.000,00	37.515.951.249,39
Lapangan	136.038.471.672,61	4.471.243.067,90	3.573.983.067,90	136.935.731.672,61
Jumlah	**537.219.524.393,80**	**11.535.843.204,90**	**11.381.850.204,90**	**537.373.517.393,80**

Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp11.535.843.204,90 diperoleh dari:

1) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Belanja Modal APBD sebesar Rp1.150.484.130,00 terdiri dari:
   a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp90.132.000,00 berupa Tanah untuk Jalan Kabupaten.
   b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.060.352.130,00 berupa Pembebasan Lahan, Jasa Konsultan Pembebasan Lahan dan Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum, TPU dan Kantor Organisasi Gema Keadilan.
2) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp198.493.000,00 berupa Penimbunan Tanah Kosong Jl.

Peternakan, Serasan Jaya (Kesalahan KIB antar Aset Tetap) dari Gedung dan Bangunan.

3) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp10.186.866.074,90 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.670.573.324,00 berupa Tanah Persil dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
   b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.337.270.667,90 berupa tanah untuk jalan kabuapaten dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
   c) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp956.675.000,00 berupa Tanah Gedung Serbaguna (GSCC) dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
   d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp140.000.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
   e) Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa sebesar Rp343.910.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
   f) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp490.250.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
   g) Dinas Perkebunan sebesar Rp352.820.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lawang Wetan dan UPTD Perkebunan Kecamatan Sungai Keruh dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
   h) Sekretariat DPRD sebesar Rp897.260.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
   i) Kecamatan Sekayu sebesar Rp12.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Industri Minuman dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
   j) Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp970.107.083,00 berupa Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan dan Tanah Persil Lainnya Lain-lain dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
   k) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp16.000.000,00 berupa Tanah untuk Monumen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp11.381.850.204,90 diperoleh dari:

1) Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan sebesar Rp344.208.780,00 terdiri dari:
   a) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.084.200,00 berupa Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan

Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perumahan Relokasi di Kecamatan Sekayu ke Kajian pada Aset Lainnya;

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.228.500,00 berupa Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum Desa Pandan Dulang Kec. Lawang Wetan Kajian pada Aset Lainnya Kajian pada Aset Lainnya;

c) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.217.400,00 berupa Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kajian pada Aset Lainnya Kajian pada Aset Lainnya;

d) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.173.000,00 berupa Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Ngulak Kajian pada Aset Lainnya Kajian pada Aset Lainnya;

e) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.192.980,00 berupa Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum di samping Taman Air Serasan Sekate Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kajian pada Aset Lainnya Kajian pada Aset Lainnya;

f) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.150.800,00 berupa Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kolam Retensi di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kajian pada Aset Lainnya Kajian pada Aset Lainnya;

g) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.161.900,00 berupa Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah untuk perluasan fasilitas umum pendukung pemkab muba di palembang Kajian pada Aset Lainnya Kajian pada Aset Lainnya.

2) Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Beban Hutang sebesar Rp806.275.350,00 terdiri dari:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp90.132.000,00 berupa Tanah untuk Jalan Kabupaten Tanah untuk Jalan Kabupaten, Jasa Konsultan Pembebasan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum TPU Desa Lais Kec. Lais, Jasa Konsultan Pengadaan Tanah untuk TPU di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais, Jasa Konsultan Pembebasan lahan untuk Kantor Organisasi Gema Keadilan, Jasa Konsultan Pembebasan Lahan untuk PASUM (untuk pembangunan gedung serbaguna) Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko, Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan dan Jasa Konsultan Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan;

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp74.680.800,00 berupa Jasa Konsultan Pembebasan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum TPU Desa Lais Kec. Lais;

c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp55.899.600,00 berupa Jasa Konsultan Pengadaan Tanah untuk TPU di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais;

d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp54.761.850,00 berupa Jasa Konsultan Pembebasan lahan untuk Kantor Organisasi Gema Keadilan;

e) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp55.921.800,00 berupa Jasa Konsultan Pembebasan Lahan untuk PASUM (untuk pembangunan gedung serbaguna) Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko;

f) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp418.680.000,00 berupa Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan;

g) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp56.199.300,00 berupa Jasa Konsultan Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan;

3) Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Penghapusan karena Hibah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Keputusan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Nomor:009.A/SKPHD/BPKAD-V/2025 dan Nomor: 000.2.3.2/067/SKPHD/Bapenda/2025 tanggal 24 Nopember 2025 sebesar Rp44.500.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.

4) Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp10.186.866.074,90 terdiri dari:

a) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp901.399.083,00 berupa Tanah Bangunan Industri Minuman ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp355.910.000,00 berupa Tanah Bangunan Industri Minuman dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah ke Kecamatan Sekayu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp8.929.556.991,90 berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan ke:

(1) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp2.670.573.324,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Dinas Kependidikan dan Kebudayaan.

(2) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp490.250.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan.

(3) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp352.820.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Dinas Perkebunan.
(4) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp84.708.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Kecamatan Sungai Lilin.
(5) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp956.675.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
(6) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp897.260.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Sekretariat DPRD
(7) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp3.337.270.667,90 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(8) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp140.000.000,00 berupa Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Aset Tetap Tanah - Permasalahan Sengketa Aset Tetap Tanah Pemda

Terdapat pemasalahan atas tanah Pemkab. Musi Banyuasin terkait pembebasan lahan yang telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2009, dengan uraian sebagai berikut.

a. Tanah Tahun 2006

Bupati Musi Banyuasin telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 2020 Tahun 2006 tanggal 13 November 2026 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Seluas ± 40.730 m2 Untuk Keperluan Pembangunan Gedung Diklat Guru dan Pondok Pesantren di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu.

Panitia Pengadaan Tanah mengadakan pertemuan dengan pemilik tanah Ir. M. Lukaymena yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 580.I/49/PPT/04-09 tanggal 8 Desember 2006. BA ini diketahui bahwa tanah yang dibebaskan seluas ± 40.730 m2 terdiri dari 3 (tiga) persil; harga ganti rugi ditentukan sebesar Rp32.650,00 per meter; persentase pemilik 90%; jumlah yang harus dibayar sebesar Rp1.196.851.050,00, (40.730 m2 x Rp32.650,00 x 90%); PPh 5% sebesar Rp59.842.553,00 (Rp1.196.851.050,00 x 5%); jumlah ganti rugi diterima pemilik tanah sebesar Rp1.137.008.497,00; dan tanah belum bersertifikat. Atas tanah ini telah dibayarkan kepada Ir. M. Lukaymena berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 708/I/BAP/2006 tanggal 11 Desember 2006 dan kwitansi pembayaran tanggal Desember 2026 sebesar Rp1.196.851.050,00, termasuk PPh 5% sebesar Rp59.842.553,00.

b. Tanah Tahun 2009

Bupati Musi Banyuasin telah mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0361 Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009 mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Seluas ± 58.131 m2 Untuk Lokasi Madrasah Internasional di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu. Atas keputusan Bupati ini telah dilakukan pembayaran termasuk PPh 5% kepada masing masing pemilik tanah, sbb:

1. Rahmat Bin Hasan, luas tanah 17.526 m2, dengan pembayaran Nomor 26/I/BAP/2009 tanggal 1 April 2009 dan kwitansi pembayaran tangal 1 April 2009 sebesar Rp792.175.200,00.

2. Hidayat Bin Umar, luas tanah 8.585 m2, dengan dokumen pembayaran Nomor 27/I/BAP/2009 tanggal 1 April 2009 dan kwitansi pembayaran tangal 1 April 2009 sebesar Rp388.042.00,00.

3. Mungkim Abdullah, luas tanah 16.319 m2, dengan dokumen pembayaran Nomor 28/I/BAP/2009 tanggal 1 April 2009 dan kwitansi pembayaran tangal 1 April 2009 Mungkim Abdullah sebesar Rp737.618.800,00.

4. Andriadi bin Umar, luas tanah 9.144 m2, dengan dokumen pembayaran Nomor 29/I/BAP/2009 tanggal 1 April 2009 dan kwitansi pembayaran tangal 1 April 2009 sebesar Rp413.308.800,00.

5. Syamsiah Binti Abul, luas tanah 6.557 m2, dengan dokumen pembayaran Nomor 30/I/BAP/2009 tanggal 1 April 2009 dan kwitansi pembayaran tanggal 1 April 2009 sebesar Rp296.376.400,00.

Tambahan Pengungkapan Terkait Permasalahan Aset Tetap Tanah yang Bersengketa:

(1) Pemkab. Muba telah membuat sertifikat tanah untuk mengabungkan lahan pembebasan tahun 2006 dan tahun 2009. Dan pada tahun 2009 juga telah diterbikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009 dengan Register Nomor 04.09.01.09.4.00009 tanggal 6 April 2009 dengan nilai Rp6.122.002.833,88.

(2) Pada tahun 2015, terbitlah Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Marzikum di tanah Pemda yang telah bersertifikat dengan Nomor 09 Tahun 2009 dengan Register Nomor 04.09.01.09.4.00009 tanggal 6 April 2009 seluas ± 1 Ha. Pada tahun yang sama dilakukan jual beli tanah dari Marzikum kepada Aswandi (Pancaroba) seluas ± 1 Ha.

(3) Pada tahun 2018, diterbitkan lagi Surat Pengakuan Hak (SPH) a/n. Aswandi (Pancaroba), selanjutnya atas tanah tersebut oleh Aswandi alias Iwan Bawang dijual kepada masyarakat berupa tanah kavlingan dengan harga Rp40.000.000,00 per meternya. Dari tahun 2018 s.d. 2025 di lahan tersebut telah berdiri bangunan rumah sebanyak 22 unit.

(4) Pada tahun 2025, Pemkab Muba (dhi. BPKAD, bidang Aset) melakukan koordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Muba terkait sengketa lahan tanah Pemkab. Muba dengan pihak Pancaroba. Selanjutnya Kejari Muba melakukan pengusutan dan penyidikan lahan milik Pemkab. Muba sampai ketahap pemeriksaan di Kasi Intel Kejari Muba.

(5) Pada tahun 2026 dilanjutkan penyelidikan oleh Kasie Pidsus Kejari Muba dan dilakukan proses pengeledahan dokumen/informasi dan penyitaan barang bukti baik dari Pihak Pemkab. Muba dan Pihak Pancaroba, berdasarkan BA Penyitaan pada BPKAD tanggal 13 April 2006 dan BA Penyitaan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah tanggal 13 April 2026.

Aset Tetap Tanah Pemkab Muba yang Belum Bersertifikat

Tabel 5.53. Aset Tetap Tanah Pemkab Muba yang Belum Bersertifikat

Uraian	Total	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Dalam Proses di BPN	Sudah Terbit Sertifikat Tapi Belum Update Pada Aplikasi
Tanah Bawah Jalan	118	1	117	-	-
Selain Tanah Bawah Jalan	1.404	455	949	80	35
Jumlah	**1.522**	**456**	**1.066**	**80**	**35**

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pencatatan aset tetap tanah sampai dengan tanggal pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sebanyak 1.522 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 456 bidang (29,96%) telah memiliki sertifikat hak atas tanah, sedangkan 1.066 bidang (70,04%) masih belum bersertifikat.

Berdasarkan jenis penggunaannya, tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah bawah jalan berjumlah 118 bidang, dengan rincian 1 bidang telah bersertifikat dan 117 bidang belum bersertifikat. Adapun tanah selain tanah bawah jalan berjumlah 1.404 bidang, yang terdiri atas 455 bidang telah bersertifikat dan 949 bidang belum bersertifikat.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah Pemerintah Daerah, telah dilakukan upaya percepatan sertifikasi tanah melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sampai dengan tanggal pelaporan, dari 1.066 bidang tanah yang belum bersertifikat, sebanyak 80 bidang tanah sedang dalam proses penerbitan sertifikat pada BPN dan 35 bidang tanah sudah terbit sertifikatnya namun belum dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi e-BMD.

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 15,15.a-15.h.

b. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.573.018.555.113,03	**Rp1.493.802.174.447,16**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.573.018.555.113,03 mengalami kenaikan sebesar Rp79.216.380.665,87 atau 5,30% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.493.802.174.447,16, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Alat Besar	90.657.427.571,66	6.474.721.145,00	63.476.000,00	97.068.672.716,66
Alat Angkutan	398.150.916.951,78	26.464.085.118,00	8.877.788.247,00	415.737.213.822,78
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.840.742.024,77	797.893.660,19	139.829.760,19	16.498.805.924,77
Alat Pertanian	16.462.082.196,00	220.228.323,00	125.078.000,00	16.557.232.519,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	342.048.428.820,84	43.498.485.511,53	15.428.598.485,33	370.118.315.847,05
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	44.410.630.175,99	5.633.943.616,64	1.552.433.877,00	48.492.139.915,63
Alat Kedokteran dan Kesehatan	271.556.059.163,52	12.516.690.349,00	6.926.752.177,00	277.145.997.335,52
Alat Laboratorium	65.606.639.709,11	2.981.777.032,00	710.125.275,00	67.878.291.466,11
Alat Persenjataan	1.257.817.910,00	24.976.740,00	4.534.340,00	1.278.260.310,00
Komputer	221.672.422.181,29	17.022.081.069,14	4.240.440.585,19	234.454.062.665,24
Alat Eksplorasi	431.128.969,00	0,00	0,00	431.128.969,00
Alat Pengeboran	7.550.000,00	0,00	5.550.000,00	2.000.000,00
Alat Produksi, Pengolahan dan	2.287.359.538,00	0,00	0,00	2.287.359.538,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	4.250.422.010,00	145.618.150,00	27.441.850,00	4.368.598.310,00
Alat Peraga	121.212.210,00	24.371.600,00	4.531.900,00	141.051.910,00
Peralatan Proses/Produksi	118.110.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	118.110.000,00
Rambu-rambu	7.674.506.532,20	1.416.595.585,00	676.701.445,00	8.414.400.672,20
Peralatan Olahraga	11.248.718.483,00	1.781.466.622,08	1.003.271.914,00	12.026.913.191,08
Jumlah	**1.493.802.174.447,16**	**119.006.784.521,58**	**39.790.403.855,71**	**1.573.018.555.113,03**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.006.784.521,58 diperoleh dari:

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari dari Belanja Modal APBD sebesar Rp89.919.555.886,58 berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Keselamatan Kerja dan Rambu - Rambu, Peralatan Olah Raga terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.367.050.410,58
   b) Dinas Kesehatan sebesar Rp11.005.724.368,00
   c) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp3.329.084.500,00
   d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.099.875.930,00
   e) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.262.430.305,00
   f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp212.152.602,00
   g) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp4.289.596.110,00
   h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp608.163.450,00
   i) Dinas Sosial sebesar Rp172.081.000,00
   j) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp192.816.990,00
   k) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp32.600.000,00
   l) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp223.499.600,00
   m) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp7.251.695.633,00

n) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.875.764.260,00
o) Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa sebesar Rp237.633.800,00
p) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.295.213.149,00
q) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.603.392.735,00
r) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp770.867.108,00
s) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp209.783.150,00
t) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.163.252.875,00
u) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp421.949.437,00
v) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp651.699.553,00
w) Dinas Perikanan sebesar Rp232.992.230,00
x) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp255.693.792,00
y) Dinas Perkebunan sebesar Rp1.985.754.500,00
z) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp139.815.000,00
aa) Inspektorat sebesar Rp372.622.650,00
bb) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp197.491.200,00
cc) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp999.206.780,00
dd) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp201.736.070,00
ee) Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sebesar Rp207.360.006,00
ff) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp19.294.458.553,00
gg) Kecamatan Sekayu sebesar Rp258.641.649,00
hh) Kecamatan Lais sebesar Rp79.342.800,00
ii) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp85.614.250,00
jj) Kecamatan Keluang sebesar Rp126.918.535,00
kk) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp106.182.600,00
ll) Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp38.738.999,00
mm) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp49.576.085,00
nn) Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp71.298.830,00
oo) Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp82.201.050,00
pp) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp123.844.123,00
qq) Kecamatan Lalan sebesar Rp122.610.000,00
rr) Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp128.850.000,00
ss) Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp134.101.400,00
tt) Kecamatan Babat Supat sebesar Rp147.649.400,00
uu) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp115.123.650,00
vv) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp6.085.404.769,00

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja BLUD sebesar Rp8.179.777.628,00 berupa Alat Besar, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Keselamatan Kerja dan Alat Peraga, Rambu - Rambu terdiri dari:
   a) Puskesmas Air Balui sebesar Rp88.113.850,00.
   b) Puskesmas Babat Toman sebesar Rp310.661.988,00.
   c) Puskesmas Balai Agung sebesar Rp59.744.137,00.
   d) Puskesmas Bandar Agung sebesar Rp5.350.000,00.
   e) Puskesmas Bayung Lencir sebesar Rp253.938.875,00.
   f) Puskesmas Brojaya Timur sebesar Rp99.850.002,00.
   g) Puskesmas Cinta Karya sebesar Rp32.905.000,00.
   h) Puskesmas Jirak sebesar Rp51.100.000,00.
   i) Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp45.050.000,00.
   j) Puskesmas Karya Maju sebesar Rp45.210.710,00.
   k) Puskesmas Lais sebesar Rp245.459.499,00.
   l) Puskesmas Lubuk Bintialo sebesar Rp18.493.805,00.
   m) Puskesmas Lumpatan sebesar Rp17.230.000,00.
   n) Puskesmas Mekar Jaya sebesar Rp169.740.140,00.
   o) Puskesmas Ngulak sebesar Rp376.819.780,00.
   p) Puskesmas Peninggalan sebesar Rp3.902.500,00.
   q) Puskesmas Sidorahayu sebesar Rp63.694.050,00.
   r) Puskesmas Sri Gunung sebesar Rp126.298.100,00.
   s) Puskesmas Suka Damai sebesar Rp78.505.000,00.
   t) Puskesmas Suka Jaya sebesar Rp80.850.000,00.
   u) Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp35.287.643,00.
   v) Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp220.086.950,00.
   w) Puskesmas Tanjung Kerang sebesar Rp67.434.999,00.
   x) Puskesmas Tebing Bulang sebesar Rp44.584.500,00.
   y) Puskesmas Teluk Kijing sebesar Rp43.029.999,00.
   z) Puskesmas Ulak Paceh sebesar Rp169.142.262,00.
   aa) Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir sebesar Rp2.930.510.980,00.
   bb) Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin sebesar Rp2.179.222.959,00.
   cc) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp317.559.900,00.
3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.017.214.994,00 untuk 658 Sekolah yang tersebar di 15 Kecamatan terdiri dari:
   a) Alat Besar sebesar Rp43.993.750,00
   b) Alat Angkutan sebesar Rp9.260.000,00

c) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp28.117.660,00
d) Alat Pertanian sebesar Rp41.342.883,00
e) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp6.676.742.767,00
f) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp870.696.151,00
g) Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp4.584.800,00
h) Alat Laboratorium sebesar Rp413.331.549,00
i) Alat Persenjataan sebesar Rp21.917.400,00
j) Komputer sebesar Rp1.694.384.834,00
k) Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp99.174.200,00
l) Alat Peraga sebesar Rp8.210.000,00
m) Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp3.850.000,00
n) Peralatan Olah Raga sebesar Rp101.609.000,00

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan pada Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp121.086.410,00 berupa Alat Angkutan dan Komputer dari Bagian Umum
5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp549.163.724,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp488.971.924,00 berupa Alat Besar, Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Laboratorium dan Komputer dari Aset Tetap Lainnya.
   b) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp18.700.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Aset Tetap Lainnya.
   c) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp41.491.800,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya.
6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Babat Supat sebesar Rp16.200.000,00 berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.
7) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp88.235.010,00 berupa Belanja Barang dan Jasa ke Alat Kantor dan Rumah Tangga.
8) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang Kesalahan Rekening pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.130.500.000,00 berupa Belanja Barang dan Jasa ke Alat Besar dan Alat Angkutan
9) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp1.874.408.869,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp119.851.900,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Puskesmas Tenggulang Raya;
   b) Dinas Sosial sebesar Rp388.087.280,00 berupa Alat Angkutan berupa Sepeda Motor dan Mini Bus dari Bagian Umum Sekretariat Daerah;

c) Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa sebesar Rp1.366.469.689,00 berupa Alat Besar, Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

10) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah Barang Masuk terdiri sebesar Rp2.110.647.000,00 terdiri dari:
    a) Dinas Kesehatan sebesar Rp69.120.000,00 berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan;
    b) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.041.527.000,00 berupa 4 unit Bus Trans Muba.
11) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar rekening dalam KIB pada Dinas Sosial sebesar Rp33.850.000,00 berupa Laptop dan Mesin Potong Rumput.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.790.403.855,71 diperoleh dari:

1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Aset Extrakomptabel sebesar Rp5.979.499.006,52 berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga dan Peralatan Proses/Produksi terdiri dari:
    a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.596.862.147,00
    b) Dinas Kesehatan sebesar Rp481.794.518,14
    c) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.263.857,00
    d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.328.550,00
    e) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp3.231.550,00
    f) Dinas Perhubungan sebesar Rp685.992.945,00
    g) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp344.100,00
    h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp8.702.400,00
    i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp91.134.885,00
    j) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp1.192.140,00
    k) Dinas Perikanan sebesar Rp188.700,00
    l) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp5.794.200,00
    m) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.235.000,38
    n) Sekretariat DPRD sebesar Rp14.319.000,00
    o) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp8.800.000,00
    p) Kecamatan Keluang sebesar Rp150.683,00
    q) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp11.655.000,00
    r) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp7.979.346,00
    s) Kecamatan Lalan sebesar Rp37.830.000,00
    t) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp8.699.985,00

2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan pada Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp121.086.410,00 berupa Alat Angkutan dari Bagian Umum.
3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan pada Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp44.679.900,00 berupa Peralatan Olahraga Ke Aset Tetap Lainnya.
4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Kesalahan Rekening Belanja sebesar Rp299.945.094,00 terdiri dari:
    a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp217.240.904,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Peralatan Olah Raga dari Belanja Barang dan Jasa;
    b) Dinas Kesehatan sebesar Rp11.008.805,00 berupa Alat Kedokteran, alat laboratorium dan alat umum dan rumah tangga lainnya Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa;
    c) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp20.390.385,00 berupa Peralatan Komputer Lainnya Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa;
    d) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp35.115.000,00 berupa Alat Laboratorium Lainnya Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa;
    e) Dinas Perkebunan sebesar Rp16.190.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Lain-Lain Sepatu Boot Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa.
5) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Kategori Bukan Aset sebesar Rp1.073.497.702,29 terdiri dari:
    a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.444.400,00 berupa Alat Besar, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Laboratorium dan Peralatan Olah Raga.
    b) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp37.257.150,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Keselamatan Kerja.
    c) Dinas Sosial sebesar Rp19.511.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
    d) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp115.286.804,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga , Komputer dan Peralatan Olah Raga.
    e) Sekretariat DPRD sebesar Rp260.139.156,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
    f) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.731.600,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
    g) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp621.127.592,29 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Beban Hutang sebesar Rp13.689.829.988,00 berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Komputer, Alat Keselamatan Kerja dan Peralatan Olah Raga terdiri dari:

a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.250.391.000,00
b) Dinas Kesehatan sebesar Rp512.970.084,00
c) Rumah Sakit Umum Sekayu sebesar Rp317.559.900,00
d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.728.283.120,00
e) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.934.175.000,00
f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp15.600.000,00
g) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.747.350,00
h) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp365.470.000,00
i) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp98.500.000,00
j) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp842.540.000,00
k) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp81.088.000,00
l) Dinas Perkebunan sebesar Rp40.000.000,00
m) Badan Pengelolaan Pajak dan Retsibusi Daerah sebesar Rp39.108.000,00
n) Sekretariat DPRD sebesar Rp5.086.527.534,00
o) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp7.550.000,00
p) Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp87.770.000,00
q) Kecamatan Babat Supat sebesar Rp113.300.000,00
r) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp165.250.000,00

7) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Hibah sebesar Rp2.990.712.000,00 terdiri dari:
   a) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.447.612.000,00 berupa Alat Angkutan.
   b) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp543.100.000,00 berupa Alat Angkutan.
8) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Lelang sebesar Rp2.838.207.967,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp362.482.417,00 berupa Alat Angkutan.
   b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp382.391.800,00 berupa Alat Angkutan.
   c) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp428.500.000,00 berupa Alat Angkutan.
   d) Dinas Perhubungan sebesar Rp260.000.000,00 berupa Alat Angkutan.
   e) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp389.000.000,00 berupa Alat Angkutan.
   f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp527.450.750,00 berupa Alat Angkutan.
   g) Sekretariat DPRD sebesar Rp488.383.000,00 berupa Alat Angkutan.
9) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp1.874.408.869,00 terdiri dari:

a) Dinas Kesehatan (Puskesmas Tenggulang Raya) sebesar Rp119.851.900,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Dinas Kesehatan.

b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.366.469.689,00 berupa Alat Besar, Alat Pertanian, dan Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

c) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp388.087.280,00 berupa Alat Angkutan ke Dinas Sosial.

10) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp10.844.686.918,90 terdiri dari:

a) RSUD Sekayu sebesar Rp6.749.558.405,00 berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Kedokteran dan Kesehatan dan Alat Laboratorium.

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.261.325.622,90 berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Laboratorium dan Komputer.

c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp420.822.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dan Komputer.

d) Dinas Perhubungan sebesar Rp864.873.961,00 berupa Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan Rumah Tangga, dan Komputer.

e) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.572.000,00 berupa Komputer.

f) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp40.619.600,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Laboratorium dan Komputer.

g) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp504.915.330,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga , Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Laboratorium dan Komputer.

11) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar rekening dalam KIB pada Dinas Sosial sebesar Rp33.850.000,00 berupa Laptop dan Mesin Potong Rumput.

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 16, 16.a-16.c.

c. Gedung dan Bangunan

Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp3.486.082.218.783,01	**Rp3.397.608.252.384,33**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.486.082.218.783,01 mengalami kenaikan sebesar Rp88.473.966.398,68 atau 2,60% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.397.608.252.384,33, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.109.579.270.796,13	131.433.310.038,85	51.129.616.797,91	3.189.882.964.037,07
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	224.785.657.509,60	14.956.579.750,00	8.128.695.450,00	231.613.541.809,60
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20.698.890.560,61	3.423.668.000,00	3.423.668.000,00	20.698.890.560,61
Bangunan Menara Perambuan	208.817.850,00	4.969.750,00	31.972.300,00	181.815.300,00
Tugu/Tanda Batas	42.335.615.667,99	2.874.770.392,74	1.505.378.985,00	43.705.007.075,73
Jumlah	**3.397.608.252.384,33**	**152.693.297.931,59**	**64.219.331.532,91**	**3.486.082.218.783,01**

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp152.693.297.931,59 diperoleh dari:

1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal APBD sebesar Rp122.255.655.590,08 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Bangunan Menara Perambuan dan Tugu/Tanda Batas terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp33.132.606.350,00
   b) Dinas Kesehatan sebesar Rp22.955.469.970,00
   c) RSUD Sekayu sebesar Rp4.558.696.726,00
   d) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp31.626.158.800,00
   e) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp197.047.000,00
   f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp197.843.000,00
   g) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp945.776.654,34
   h) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.409.450.875,00
   i) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp86.695.407,74
   j) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp199.049.000,00
   k) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp49.902.350,00
   l) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp19.482.002.000,00
   m) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp198.493.000,00
   n) Dinas Perkebunan sebesar Rp379.753.650,00
   o) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp916.364.120,00
   p) Badan Pengelolaan Pajak dan Retsibusi Daerah sebesar Rp358.040.000,00
   q) Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sebesar Rp174.200.000,00
   r) Sekretariat DPRD sebesar Rp4.005.522.926,00
   s) Kecamatan Sekayu sebesar Rp215.869.413,00
   t) Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp166.714.348,00

2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja BLUD sebesar Rp1.721.010.345,00 terdiri dari:
   a) Puskesmas Babat Toman sebesar Rp17.326.486,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   b) Puskesmas Balai Agung sebesar Rp18.200.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   c) Puskesmas Bayung Lencir sebesar Rp317.850.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   d) Puskesmas Cinta Karya sebesar Rp98.710.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   e) Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp139.650.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   f) Puskesmas Karya Maju sebesar Rp58.700.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   g) Puskesmas Lumpatan sebesar Rp199.380.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   h) Puskesmas Ngulak sebesar Rp84.550.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   i) Puskesmas Peninggalan sebesar Rp228.510.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   j) Puskesmas Sidorahayu sebesar Rp56.676.800,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   k) Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir sebesar Rp501.457.059,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan sebesar Rp1.526.990.636,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp196.495.136,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dari Kecamatan Sekayu.
   b) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp215.590.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal & Bangunan Gedung Tempat Kerja Kecamatan Sekayu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
   c) Kecamatan Sekayu sebesar Rp540.704.500,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
   d) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp574.201.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja & Bangunan Gedung Tempat Tinggal Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Komunikasi dan Informatika & Satuan Polisi Pamong Praja.
4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp2.303.820.560,00 terdiri dari:
   a) RSUD Sekayu sebesar Rp2.295.662.060,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen dari Jalan, Jaringan dan Irigasi

b) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp8.158.500,00 berupa Bangunan Kesehatan Lain-lain berupa Atap Alderon Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Peralatan dan Mesin.

5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Beban Hutang sebesar Rp5.129.118.900,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp97.606.400,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   b) Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp5.031.512.500,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   c) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp5.587.477.334,90 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
6) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.409.757.028,00 terdiri dari:
   a) RSUD Sekayu sebesar Rp245.643.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp426.275.200,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
   c) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp322.390.278,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   d) Kecamatan Sekayu sebesar Rp30.731.261,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   e) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp11.402.185,00 berupa Tugu/Tanda Batas.
   f) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp373.315.104,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp178.105.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
8) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang Kesalahan Rekening pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp658.102.400,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
9) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp17.510.737.472,51 terdiri dari:
   a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp545.730.752,09 berupa Bangunan Gedung Kantor Lain-lain dan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Lain - Lain dari Bagian Umum Sekretariat Daerah.
   b) Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa sebesar Rp6.289.438.200,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan.
   c) Kecamatan Sekayu sebesar Rp183.900.000,00 berupa Bangunan Gedung Pabrik Permanen dari Dinas Perindustrian dan Perdangangan.

d) Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp1.168.111.000,00 berupa Tugu Pembangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

e) Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp845.919.000,00 berupa Tugu Pembangunan dan Tugu Lainnya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

f) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp8.477.638.520,42 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain-lain dan Tugu Pembangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.219.331.532,91 diperoleh dari:

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Extrakomptabel sebesar Rp253.994.656,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp55.526.486,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   b) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp11.402.185,00 berupa Tugu/Tanda Batas.
   c) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp187.065.985,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan sebesar Rp1.526.990.636,00 terdiri dari:
   a) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp756.294.500,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Kecamatan Sekayu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
   b) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp197.047.000,00 berupa Rumah Dinas ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.
   c) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp178.105.000,00 berupa Rumah Dinas ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.
   d) Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp199.049.000,00 berupa Rumah Dinas ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.
   e) Kecamatan Sekayu sebesar Rp196.495.136,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Dinas Kesehatan.
3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp8.883.570.604,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp2.330.197.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Peralatan dan Mesin.
   b) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.283.806.200,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
   c) Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp4.071.074.404,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Jalan , Jaringan dan Irigasi.

d) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan sebesar Rp198.493.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Tanah.

4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan sebesar Rp754.279.150,00 terdiri dari:
   a) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp159.733.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
   b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp594.546.150,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tugu/Tanda Batas.
5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kesalahan Rekening Belanja sebesar Rp130.661.100,00 terdiri dari:
   a) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp75.789.000,00
   b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp49.902.350,00
   c) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.969.750,00
6) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran sebesar Rp892.293.528,40 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp28.713.272,59 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   b) Dinas Kesehatan sebesar Rp233.764.049,21 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   c) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp146.594.678,63 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal Dan Tugu/Tanda Batas.
   d) Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp483.221.527,97 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
7) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Beban Hutang sebesar Rp29.110.390.301,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.316.048.950,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal dan Tugu/Tanda Batas.
   b) Dinas Kesehatan sebesar Rp686.980.450,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   c) RSUD Sekayu sebesar Rp2.541.305.060,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   d) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp14.864.562.750,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal dan Tugu/Tanda Batas.
   e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp247.628.125,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   f) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp511.787.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.
   g) Dinas Perkebunan sebesar Rp253.425.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.

h) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp122.784.770,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.

i) Badan Pengelolaan Pajak dan Retsibusi Daerah sebesar Rp48.269.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.

j) Sekretariat DPRD sebesar Rp2.350.884.848,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.

k) Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp166.714.348,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.

8) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Penghapusan Pemusnahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.522.117.725,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

9) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Penghapusan Hibah Barang sebesar Rp607.293.810,00 terdiri dari:

a) Dinas Kesehatan sebesar Rp187.682.810,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Poskesdes Desa Sereka ke Desa Sereka Kec. Babat Toman.

b) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp419.611.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Kantor UPTD Sungai Lilin Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

10) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp17.510.737.472,51 terdiri dari:

a) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp10.491.668.520,42 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti ke Kecamatan Jirak Jaya, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Plakat Tinggi.

b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp6.473.338.200,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja ke Kecamatan Lais dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

c) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp545.730.752,09 berupa Gedung Rumah Singgah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kab. Muba ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

11) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp27.002.550,00 berupa Bangunan Menara Perambuan ke Rusak Berat.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 17, 17.a-17.c.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp10.345.578.746.315,61	**Rp10.175.467.918.210,98**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.345.578.746.315,61 mengalami kenaikan sebesar Rp170.110.828.105,63 atau

1,67% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.175.467.918.209,98, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Jalan	7.567.653.739.091,44	508.090.035.699,12	285.730.233.519,69	7.790.013.541.270,87
Jembatan	1.049.330.531.529,80	34.663.221.214,42	113.847.506.615,39	970.146.246.128,83
Bangunan Air Irigasi	105.422.066.106,41	9.700.631.064,00	8.866.331.130,95	106.256.366.039,46
Bangunan Pengairan Pasang Surut	514.740.320.619,11	0,00	0,00	514.740.320.619,11
Bangunan Pengembangan Rawa	40.846.602.894,12	0,00	0,00	40.846.602.894,12
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	249.350.727.348,81	16.379.377.894,00	712.685.412,63	265.017.419.830,18
Bangunan Pengembangan Sumber	30.662.856.738,03	509.070.649,00	0,00	31.171.927.387,03
Bangunan Air Bersih / Air Baku	54.128.797.574,46	1.934.464.750,00	1.018.864.750,00	55.044.397.574,46
Bangunan Air Kotor	47.371.567.727,75	0,00	0,00	47.371.567.727,75
Instalasi Air Bersih / Air Baku	50.884.388.141,26	2.114.974.000,00	16.351.326,25	52.983.010.815,01
Instalasi Air Kotor	15.009.777.000,00	0,00	0,00	15.009.777.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	7.584.107.600,00	0,00	0,00	7.584.107.600,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	11.216.734.850,00	0,00	784.000.000,00	10.432.734.850,00
Instalasi Gardu Listrik	10.651.661.649,67	0,00	107.811.470,00	10.543.850.179,67
Instalasi PeRT.ahanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi Gas	1.370.774.966,07	0,00	0,00	1.370.774.966,07
Instalasi Pengaman	266.912.768,00	0,00	0,00	266.912.768,00
Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan Air Minum	21.919.382.040,00	22.552.650,00	0,00	21.941.934.690,00
Jaringan Listrik	385.472.378.180,86	13.924.470.705,00	6.144.186.295,00	393.252.662.590,86
Jaringan Telepon	407.252.626,00	0,00	0,00	407.252.626,00
Jaringan Gas	11.170.038.758,19	0,00	0,00	11.170.038.758,19
Jumlah	**10.175.467.918.209,98**	**587.338.798.625,54**	**417.227.970.519,91**	**10.345.578.746.315,61**

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp587.338.798.625,54 diperoleh dari:

1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari dari Belanja Modal APBD sebesar Rp488.599.757.196,80 terdiri dari:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp275.443.765,00 berupa Bangunan Air Irigasi.
   b) RSUD Sekayu sebesar Rp2.295.662.060,00 berupa Jalan.
   c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp391.053.476.298,80 berupa Jalan, Jembatan, Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Bersih/Air Baku dan Jaringan Listrik.

d) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp90.926.277.700,00 berupa Jalan, Bangunan Air Irigasi, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dan Instalasi Air Bersih / Air Baku.

e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.854.413.800,00 berupa Jembatan.

f) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp49.395.069,00 berupa Jalan.

g) Kecamatan Sekayu sebesar Rp145.088.504,00 berupa Jalan.

2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp4.081.074.404,00 terdiri dari:

a) Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp4.071.074.404,00 berupa Jalan dan Bangunan Air Irigasi yang sebelumnya tercatat pada Bangunan Gedung Tempat Kerja.

b) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.000.000,00 berupa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah yang sebelumnya tercatat pada Alat Laboratorium.

3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Beban Utang merupakan perolehan Aset Tetap yang telah diakui sebagai penambahan nilai aset namun berasal dari Penambahan Utang Belanja pada Tahun 2025 sebesar Rp35.161.586.400,00 terdiri dari:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp33.770.018.200,00 berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air Bersih/Air Baku yang berasal dari Penambahan Utang Belanja Modal Jaringan, Jalan, dan Irigasi Tahun 2025.

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.391.568.200,00 yang berasal dari Penambahan Utang Belanja Tahun 2025 dengan rincian berupa Utang Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp48.429.000,00 dan Utang Belanja Modal Jaringan, Jalan, dan Irigasi sebesar Rp1.343.139.200,00.

4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.688.798.733,00 terdiri dari:

a) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.091.485.650,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.

b) Kecamatan Sekayu sebesar Rp851.345.417,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.

c) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp499.070.649,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.

d) Kecamatan Keluang sebesar Rp346.068.088,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.

e) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp733.410.288,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.

f) Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp688.285.297,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.

g) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp479.133.344,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.

5) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp367.956.750,00 berupa Jalan
6) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Barang Kesalahan Rekening pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp245.040.000,00 berupa Instalasi Air Bersih / Air Baku dari Belanja Barang dan Jasa.
7) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp53.693.832.244,91 berupa Jalan dan Jembatan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.
8) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas antar Rekening dalam KIB sebesar Rp500.752.896,83 terdiri dari:
    a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp395.250.000,00 berupa Jalan dan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dari Jembatan dan Bangunan Air Bersih/Air Baku.
    b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp105.502.896,83 berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air Bersih/Air Baku Bangunan Air Irigasi.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp417.227.970.519,91 diperoleh dari:

1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp38.746.574.048,80 terdiri dari:
    a) RSUD Sekayu sebesar Rp2.295.662.060,00 ke Gedung dan Bangunan.
    b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp30.924.141.788,80 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
    c) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.672.356.400,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
    d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.854.413.800,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran sebesar Rp1.366.081.976,46 terdiri dari:
    a) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp644.574.291,09 berupa Instalasi Air Bersih / Air Baku Dan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Perangkat Daerah.
    b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp454.266.968,89 berupa Jalan, Jembatan dan Jaringan Listrik.
    c) Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp267.240.716,48 berupa Jalan dan Bangunan Air Irigasi.
3) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Beban Hutang sebesar Rp280.687.762.777,82 merupakan pelunasan atas Beban Hutang Tahun Anggaran 2024. Nilai tersebut sebelumnya telah diakui dan tercatat sebagai penambahan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2024, sehingga transaksi

ini dimaksudkan untuk mengurangi pencatatan kewajiban (beban hutang) dan tidak mengurangi nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. terdiri dari:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp250.895.530.627,82 berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air Bersih/Air Baku yang berasal dari Pembayaran Utang Belanja Tahun 2024 dengan rincian berupa Utang Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp1.357.920.000,00 dan Utang Belanja Modal Jaringan, Jalan, dan Irigasi sebesar Rp249.537.610.627,82.

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp29.792.232.150,00 berupa Jalan dan Bangunan Air Irigasi yang berasal dari Pembayaran Utang Belanja Tahun 2024 dengan rincian berupa Utang Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp388.473.000,00 dan Utang Belanja Modal Jaringan, Jalan, dan Irigasi sebesar Rp29.403.759.150,00.

4) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp894.268.470,00 berupa Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan Jaringan Listrik.

5) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp94.996.590.600,00 berupa Jembatan.

6) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas antar Rekening dalam KIB sebesar Rp500.752.896,83 terdiri dari:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp395.250.000,00 berupa Jembatan dan Bangunan Air Bersih/Air Baku.

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp105.502.896,83 berupa Bangunan Air Irigasi

7) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Pencatatan Aset pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp90.000,00 berupa Jalan karena kesalahan penginputan Beban Hutang Tahun 2024.

8) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp35.849.750,00 berupa Jalan dan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam karena kelebihan pembayaran.

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Jembatan Roboh yang Masih Tercatat di KIB D

Terdapat jembatan pada jalan kabupaten arteri tahun perolehan 2009 dengan nilai perolehan sebesar Rp94.996.590.600,00 pada Dinas PUPR diketahui masih tercatat dalam KIB D.

1) Jembatan yang roboh tersebut berlokasi di Kec. Lalan, dan mulai roboh tahun 2024 karena ditabrak oleh tongkang bermutan batubara yang ditarik oleh Tagboat Madelin Spirit/BG Santana Jaya Cargo milik PT Bara Sentosa Lestari (PT BSL) Assist Tug Paris 22 yang mengakibatkan sebagian struktur atas jembatan mengalami deformasi/roboh dan jatuh ke sungai (bentang 60 dan 80 Meter) tanggal 12 Agustus 2024 jam 21.00. Adapun bagian yang roboh bentang rangka baja sepanjang 140 m yakni bentang 60 m dan bentang 80 m.

2) Pemda Muba telah melakukan koordinasi dengan pihak asosiasi AP6L, dimana AP6L harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas robohnya bentang 60 dan bentang 80, dengan menyediakan LCT kapal penyeberangan untuk masyarakat P11 dan P6.
3) Hasil rapat tanggal 23 Agustus 2024 diketahui terdapat kesepatan untuk membangun kembali jembatan antara asosiasi AP6L, PT APAU Sejahtera Abadi (PT APAU) dan PT Asia Mulia Transpasifik (PT AMT), dengan existing bentang jembatan 10 m, + 120 m, +10 m, dan ketingian jembatan naik 1 m. Ketiganya bersepakat menanggung jawab renteng dimana 50% oleh asosiasi AP6L dan 50% oleh PT APAU dan PT AMT.
4) Atas kesepakatan tersebut asosiasi AP6L ingin melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan dengan metode EPC (Engineering Procorement Construction), dengan menunjuk PT D Konsindo (PT D) sebagai konsultan Manajemen Konstruksi penunjukan kontraktor pelaksana PT Ciawenindo Mitra Perkasa (PT CMP) – PT Pakuhaji Naga Perkasa (PT PNP) selaku pelaksana pekerjaan (KSO).
5) Berdasarkan SPMK Nomor 092/MK-AP6L-AMT/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang pekerjaan revitalisasi jembatan P6 Lalan Musi Banyuasin, dengan waktu pelaksaan 300 hari s.d. 31 Desember 2025 dengan nilai kontrak Rp68.950.000.000,00 (belum termasuk PPN).
6) Pekerjaan yg dilaksanana oleh PT CMP s.d. Oktober 2025 telah selesai 38,56%, namun proses pembayaran pada saat itu sebesar 16% lalu dilanjutkan pembayaran s.d. 31 Desember 2025 sebesar 37,12% atau sebesar Rp25.600.000.000,00.
7) Berdasarkan hasil rapat pada bulan Januari 2026 diketahui bahwa asosiasi AP6L bersedia melaksanakan pekerjaan apabila anggaran tersedia dan minta bantuan dari Pemerintah. Asosiasi dan pihak penabrak (PT APAU dan PT AMT) bersepakat melakukan perpanjangan waktu pekerjaan s.d. September 2026.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 18, 18.a-18.b.

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp123.647.979.134,25	**Rp102.918.522.672,25**

Aset Tetap Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 123.647.979.134,25 mengalami kenaikan sebesar Rp20.729.456.462,00 atau 20,14% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 102.918.522.672,25, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dinas Kependidikan Dan	71.281.256.381,00	20.520.702.534,00	618.422.062,00	91.183.536.853,00
Dinas Kesehatan	387.991.900,00	0,00	0,00	387.991.900,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan	24.377.570.181,25	0,00	0,00	24.377.570.181,25
Dinas Perumahan Dan Kawasan	49.850.000,00	0,00	0,00	49.850.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	892.280.000,00	0,00	0,00	892.280.000,00
Dinas Sosial	16.540.000,00	0,00	0,00	16.540.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.527.629.100,00	377.000.000,00	0,00	1.904.629.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan	0,00	13.079.000,00	13.079.000,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	308.629.630,00	0,00	0,00	308.629.630,00
Dinas Perpustakaan Dan	492.253.550,00	180.754.570,00	0,00	673.008.120,00
Dinas Perikanan	361.471.500,00	0,00	0,00	361.471.500,00
Dinas Perkebunan	223.300.000,00	0,00	0,00	223.300.000,00
Dinas Perdagangan Dan	1.253.046.366,00	0,00	0,00	1.253.046.366,00
Inspektorat	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00
Badan Perencanaan Dan	151.766.000,00	0,00	0,00	151.766.000,00
Badan Pengelola Keuangan Dan	1.035.652.064,00	0,00	0,00	1.035.652.064,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan	6.658.000,00	36.540.000,00	36.540.000,00	6.658.000,00
Sekretariat Dprd	102.229.000,00	0,00	0,00	102.229.000,00
Kecamatan Sanga Desa	0,00	20.535.000,00	0,00	20.535.000,00
Kecamatan Batanghari Leko	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00
Sekretariat Daerah Kab. Muba	385.099.000,00	290.378.220,00	41.491.800,00	633.985.420,00
Jumlah	**102.918.522.672,25**	**21.457.689.324,00**	**728.232.862,00**	**123.647.979.134,25**

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.457.689.324,00 diperoleh dari:

1) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari dari Belanja Modal APBD sebesar Rp1.639.994.131,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.080.007.341,00 berupa Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dan Tanaman.
   b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp13.079.000,00 berupa Barang Koleksi Non Budaya.
   c) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp180.754.570,00 berupa Bahan Perpustakaan.
   d) Badan Pengelolaan Pajak dan Retsibusi Daerah sebesar Rp36.540.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
   e) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp20.535.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
   f) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp18.700.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
   g) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp290.378.220,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

2) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.414.573.293,00 berupa Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dan Barang Koleksi Non Budaya.
3) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.121.900,00 berupa Bahan Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dari Peralatan dan Mesin.
4) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp377.000.000,00 berupa Bahan Perpustakaan.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp728.232.862,00 diperoleh dari:

1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp514.909.224,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp454.717.424,00 berupa Bahan Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga ke Peralatan dan Mesin.
   b) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp18.700.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga ke Peralatan dan Mesin.
   c) Sekretariat Daerah Kab. Muba sebesar Rp41.491.800,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga ke Peralatan dan Mesin.
2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Kategori Bukan Aset pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.202.938,00 berupa Bahan Perpustakaan.
3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Beban Hutang sebesar Rp149.504.000,00 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp99.885.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
   b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp13.079.000,00 berupa Barang Koleksi Non Budaya.
   c) Badan Pengelolaan Pajak dan Retsibusi Daerah sebesar Rp36.540.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
4) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Koreksi Lainnya pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan sebesar Rp37.616.700,00 berupa Bahan Perpustakaan.

Aset Hewan berupa Anak Satwa Rusa Totol (*Axis-axis sp*) sebanyak 17 (empat belas) ekor yang terdiri dari Rusa Totol sebanyak 14 (sebelas) ekor dan Rusa Sambar sebanyak 3 (tiga) ekor dengan kondisi baik, berlokasi di Rumah Dinas Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 19, 19.a-19.b.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp125.505.712.746,98	**Rp134.349.043.799,18**

Aset Tetap Kostruksi dalam Pengerjaan pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp125.505.712.746,98 mengalami pengurangan sebesar Rp8.843.331.052,19 atau 6,58% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp134.349.043.799,18, dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 merupakan kontrak pekerjaan di TA 2024 yang belum selesai pengerjaannya dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.58. Mutasi Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan	0,00	2.579.202.252,30	0,00	2.579.202.252,30
Dinas Kesehatan	99.289.500,00	0,00	0,00	99.289.500,00
Rsud Sekayu	481.222.500,00	0,00	0,00	481.222.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	131.387.976.799,18	35.386.945.978,50	55.801.802.712,44	110.973.120.065,23
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.103.692.000,00	4.381.195.828,60	41.115.500,00	5.443.772.328,60
Dinas Lingkungan Hidup	879.549.000,00	0,00	0,00	879.549.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	397.314.000,00	0,00	0,00	397.314.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.096.278.265,95	0,00	4.096.278.265,95
Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata	0,00	555.964.834,90	0,00	555.964.834,90
Jumlah	**134.349.043.799,18**	**46.999.587.160,25**	**55.842.918.212,44**	**125.505.712.746,98**

Penambahan Aset Tetap Kostruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp46.999.587.160,25 diperoleh dari:

1) Penambahan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp41.064.915.188,80 terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp2.330.197.000,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dari Gedung dan Bangunan.
   b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp30.924.141.788,80 berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan jaringan.
   c) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp3.956.162.600,00 berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan & Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan jaringan Jalan, Irigasi, dan jaringan & Gedung dan Bangunan.
   d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.854.413.800,00 berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan & Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan jaringan & Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan jaringan & Gedung dan Bangunan.

2) Penambahan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari Beban Hutang merupakan perolehan Aset Tetap yang telah diakui sebagai penambahan nilai aset yang masih dalam pengerjaan namun berasal dari Penambahan Utang Belanja pada Tahun 2025 sebesar Rp5.934.671.971,45 yang merupakan penjumlahan dari Beban Hutang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.047.300.158,60 dan Beban Hutang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.815.421.612,85 yang terdiri dari:
   a) Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp249.005.252,30 berupa Beban Utang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.
   b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp4.462.804.189,70 berupa Beban Utang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
   c) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp425.033.228,60 berupa Beban Utang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp242.330.071,40 dan Beban Utang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp110.752.957,20.
   d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp241.864.465,95 berupa Beban Utang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
   e) Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp555.964.834,90 berupa Beban Utang Belanja atas Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.

Pengurangan Aset Tetap Kostruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp55.842.918.212,44 diperoleh dari:

1) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp53.693.832.244,91 berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan Dari Jalan, Irigasi, dan jaringan.
2) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Koreksi Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp992.464.112,74.
3) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran sebesar Rp1.156.621.854,80 terdiri dari:
   a) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.115.506.354,80.
   b) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp41.115.500,00.

Rincian mutasi Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 20, 20.a-20.c

Kekurangan Volume

Terdapat Temuan Pemeriksa terkait Kekurangan Volume sebesar Rp1.501.534.640,70 yang terdiri dari Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan sebesar Rp389.431.424,88 dan Kekurangan Volume Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.112.103.215,82.

Atas temuan tersebut telah dilakukan simulasi penyesuaian pada sistem pengelolaan aset. Namun demikian, koreksi nilai aset tidak dapat dilakukan dalam Laporan Keuangan Audited karena penyesuaian tersebut menyebabkan terjadinya duplikasi item koreksi pada laporan penyusutan aset tetap. Selain itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai akumulasi penyusutan setelah koreksi menjadi lebih besar daripada nilai perolehan aset yang telah disesuaikan, sehingga mengakibatkan ketidakwajaran penyajian saldo aset tetap dan akumulasi penyusutannya.

Dengan mempertimbangkan dampak koreksi terhadap keseluruhan perhitungan penyusutan aset tetap serta untuk menjaga kewajaran penyajian laporan keuangan secara menyeluruh, koreksi atas temuan kekurangan volume dimaksud tidak dilakukan pada Laporan Keuangan Audited.

Rekapitulasi Dana Revitalisasi Sekolah

Berdasarkan data operasional terkait program revitalisasi sekolah, berikut adalah ringkasan realisasi Dana Revitalisasi dan Sisa Dana yang tercatat pada masing-masing rekening satuan pendidikan:

1. Ikhtisar Total Anggaran dan Sisa Dana

Secara keseluruhan, Total Dana Revitalisasi yang dialokasikan kepada 60 satuan pendidikan (terdiri dari komponen TK, KB, SDN, SD IT, SMPN, dan SMPS) adalah sebesar Rp59.958.774.081,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).

Dari total alokasi tersebut, sebagian besar dana telah direalisasikan sepenuhnya oleh pihak sekolah, dengan total sisa dana agregat yang masih tertinggal di rekening bank per tanggal pelaporan adalah sebesar Rp5.138 (Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

2. Rincian Sisa Dana Pendukung Transaksi

Dari total 60 sekolah yang menerima dana, terdapat 58 sekolah yang mencatatkan penyerapan dana telah selesai 100% atau sisa dana operasional telah dikembalikan/dikosongkan sesuai ketentuan.

Adapun sisa dana sebesar Rp5.138 tersebut secara eksklusif bersumber dari 2 (dua) sekolah dengan rincian sebagai berikut:

- SMPN 6 Batang Hari Leko: Memiliki sisa dana sebesar Rp4.938.
- TKN Pembina Ngulak: Memiliki sisa dana sebesar Rp200.

Rekapitulasi Dana Digitalisasi Sekolah

Berdasarkan hasil inventarisasi atas aset yang diperoleh melalui Program Digitalisasi Sekolah, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan verifikasi keberadaan barang pada 57 sekolah. Nilai perolehan aset yang diinventarisasi tercatat sebesar Rp1.909.152.000,00.

Aset yang menjadi objek inventarisasi terdiri atas Smart Interactive Flat Panel (IFP TV), Laptop, Harddisk, dan perangkat Internet Satelit. Inventarisasi dilaksanakan untuk memastikan keberadaan fisik, kesesuaian data pencatatan, serta kondisi barang yang telah diserahkan kepada masing-masing sekolah penerima.

Berdasarkan hasil inventarisasi, seluruh barang yang tercatat pada Program Digitalisasi Sekolah dapat ditemukan dan diverifikasi keberadaannya pada sekolah penerima sesuai dengan dokumen pendukung yang tersedia. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh aset dimaksud berada dalam kondisi baik dan masih dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran serta pelaksanaan program digitalisasi di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa aset Program Digitalisasi Sekolah senilai Rp1.909.152.000,00 pada 57 sekolah penerima telah dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta didukung oleh keberadaan fisik barang yang dapat dipertanggungjawabkan.

g. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp10.752.831.558.042,60)	**(Rp9.212.027.604.863,45)**

Akumulasi Penyusutan adalah akumulasi alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.752.831.558.042,60 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.540.803.953.179,15 atau 16,73% dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.212.027.604.863,45. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.59. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	Nilai Buku Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8=3-7
1	Tanah	537.373.517.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	537.373.517.393,80
2	Peralatan dan Mesin	1.573.018.555.113,03	1.229.373.206.966,99	161.922.842.370,24	20.944.315.050,80	1.370.351.734.286,43	202.666.820.826,60
3	Gedung dan Bangunan	3.486.082.218.783,01	755.694.638.186,90	161.439.700.826,89	3.759.201.879,03	913.375.137.134,76	2.572.707.081.648,25
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.345.578.746.315,61	7.226.959.759.709,56	1.296.667.579.593,34	54.522.652.681,48	8.469.104.686.621,41	1.876.474.059.694,20
5	Aset Tetap Lainya	123.647.979.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	123.647.979.134,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	125.505.712.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	125.505.712.746,98
	JUMLAH	**16.191.206.729.486,68**	**9.212.027.604.863,45**	**1.620.030.122.790,46**	**79.226.169.611,31**	**10.752.831.558.042,60**	**5.438.375.171.444,08**

1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.370.351.734.286,43 atau mengalami peningkatan sebesar Rp140.978.527.319,44 atau 11,47% dari nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.229.373.206.966,99. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2025	Rp	1.229.373.206.966,99
Penambahan:	Rp	161.922.842.370,24

Tabel 5.60. Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2025 Unaudited	129.294.240.978,10
2	Koreksi Beban Penyusutan yang Bukan Temuan	5.009.192.288,57
3	Koreksi Beban Penyusutan Temuan	26.124.260.307,23
4	Koreksi Penambahan Akum Saldo Awal Temuan Terkoreksi	82.995.023,67
5	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.412.153.772,67
	JUMLAH	**161.922.842.370,24**

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.944.315.050,80 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.61. Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.412.153.772,67
2	Penghapusan lelang Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.349.824.967,00
3	Penghapusan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.574.335.333,00
4	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasifikasi ke Rusak Berat	10.844.686.918,90
5	Pembulatan Aplikasi	0,03
6	Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan TA. 2024 yang Bukan Temuan	154.780.439,00
7	Koreksi Pengurangan Temuan Akumulasi Penyusutan TA. 2024	3.119.151.620,20
8	Koreksi Pengurangan Karena Mutasi ke KDP	999.000,00
9	Koreksi Pengurangan Karena Penghapusan Lelang	488.383.000,00
	JUMLAH	**20.944.315.050,80**

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp913.375.137.134,76 atau mengalami kenaikan sebesar Rp157.680.498.947,86 atau 20,87% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp755.694.638.186,90 dengan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2025	Rp	755.694.638.186,90
Penambahan:	Rp	161.439.700.826,89

Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp161.439.700.826,89 yang dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 5.62. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2025	74.988.185.733,48
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.224.539.557,24
3	Koreksi Temuan Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu	40.337.675.733,10
4	Koreksi Penambahan Beban Penyusutan yang Bukan Temuan	43.889.299.803,06
	JUMLAH	**161.439.700.826,89**

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.759.201.879,03 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.63. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.224.539.557,24
2	Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	230.550.314,00
3	Penghapusan Pemusnahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	819.150.393,00
4	Koreksi kelebihan Catat Akumulasi	789.713,74
5	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di reklasifikasi ke Rusak Berat	4.150.177,00
6	Koreksi Temuan Kekurangan Volume	94.345.346,33
7	Pengurangan Beban Penyusutan Bukan Temuan Terkoreksi	357.047.719,68
8	Koreksi Pengurangan Beban Penyusutan Karena Merupakan Aset Tetap KDP	28.628.658,04
	JUMLAH	**3.759.201.879,03**

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.469.104.686.621,41 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.242.144.926.911,85 atau 17,19% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.226.959.759.709,56 dengan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2025	Rp	7.226.959.759.709,56
Penambahan:	Rp	1.296.667.579.593,34

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.296.667.579.593,34 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA. 2025	613.995.893.087,88
2	Koreksi Penambahan Beban Penyusutan Tahun Lalu yang Bukan Temuan	111.695.320,62
3	Koreksi Penambahan Beban Penyusutan Tahun Lalu Temuan	81.157.853.833,44
4	Koreksi Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu yang Bukan Temuan	17.750.815.687,21
5	Koreksi Temuan Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu	583.651.321.664,18
	JUMLAH	**1.296.667.579.593,34**

Saldo Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.522.652.681,48 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.65. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Penghapusan Pemusnahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.273.446,00
2	Koreksi Temuan Beban Penyusutan Kekurangan Volume	232.476.556,87
3	Pengurangan beban penyusutan bukan temuan terkoreksi	17.548.790.829,11
4	Pengurangan beban penyusutan temuan terkoreksi	4.387.271.045,50
5	Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap Rusak Berat	32.298.840.804,00
	JUMLAH	**54.522.652.681,48**

Rincian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Lampiran 21 dan 21a-21d.

Tabel 5.66. Koreksi Temuan dan Bukan Temuan Terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap				Jumlah			Selisih
	Nama Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Item di LK Unaudited	Item di Temuan Pemeriksaa	Item Diperbaiki oleh LPPIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peralatan dan Mesin	1.573.018.555.113,03	1.370.351.734.286,43	202.666.820.826,60	182.223	16.063	18.628	2.565
2	Gedung dan Bangunan	3.486.082.218.783,01	913.375.137.134,76	2.572.707.081.648,25	6.950	1.868	1.740	128
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.345.578.746.315,61	8.469.104.686.621,41	1.876.474.059.694,20	7.671	1.536	1.646	110
	JUMLAH	**15.404.679.520.211,65**	**10.752.831.558.042,60**	**4.651.847.962.169,05**	**196.844**	**19.467**	**22.014**	**2.803**

Keterangan Selisih:

1. Peralatan dan Mesin

   Jumlah Item pada LK Unaudited sebanyak 182.223 Item. Terdapat Temuan Pemeriksa sebanyak 16.063 Item. Dari 16.063 Item telah di Koreksi sebanyak 16.003 Item. Sedangkan 60 Item sisanya tidak dilakukan koreksi karena Item tersebut 59 Item sudah dimutasikan dan 1 Item merupakan Hibah ke Universitas Sriwijaya.

Jumlah Item yang diperbaiki oleh LPPIA UI sebanyak 18.628 Item. 18.628 Item ini terdiri dari 16.003 Item yang merupakan Koreksi Temuan Pemeriksa dan 2.625 Item yang Koreksi Bukan Temuan Pemeriksa.

Sehingga terdapat selisih yang bukan temuan pemeriksa sebanyak 2.565 Item.

2. Gedung dan Bangunan

   Jumlah Item pada LK Unaudited sebanyak 6.950 Item. Terdapat Temuan Pemeriksa sebanyak 1.868 Item. Dari 1.868 Item tersebut, yang di perbaiki oleh LPPIA UI sebanyak 1.740 Item. Sehingga terdapat selisih sebanyak 128 Item yang tidak diperbaiki karena 128 Item tersebut nilai akumulasi penyusutan dan masa manfaatnya telah sesuai.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

   Jumlah Item pada LK Unaudited sebanyak 7.671 Item. Terdapat Temuan Pemeriksa sebanyak 1.536 Item. Jumlah Item yang diperbaiki oleh LPPIA UI sebanyak 1.646 Item terdiri dari 1.536 Item Temuan Pemeriksa dan 110 Item Koreksi Bukan Temuan Pemeriksa.

   Sehingga selisih 110 Item merupakan Koreksi Bukan Temuan Pemeriksa

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp337.330.674.759,60	**Rp319.293.066.265,33**

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp337.330.674.759,60 atau kenaikan sebesar Rp18.037.608.494,27 atau 5,65% dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp319.293.066.265,33, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Koreksi BPK		Per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	Tagihan Penjualan Angsuran	501.428.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.428.296,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	766.732.377,01	0,00	0,00	6.434.533.383,40	0,00	7.201.265.760,41
3	Aset Tak Berwujud	84.295.429.790,46	12.583.089.772,00	84.659.700,00	0,00	0,00	96.793.859.862,46
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(57.344.253.477,80)	(10.888.128.629,67)	(79.000,00)	(11.722.254.430,29)	(2.615.934.739,49)	(77.338.622.798,26)
5	Aset Lain-lain	295.778.834.971,59	12.608.281.295,51	5.872.439.847,82	102.645.027.460,61	0,00	405.159.703.879,89
6	Akumulasi Aset Lain-lain	(53.615.349.691,93)	(10.858.549.052,90)	(1.785.779.307,93)	(32.298.840.804,00)	0,00	(94.986.960.240,90)
7	Dana Treasury Deposite Facility (TDF)	48.910.244.000,00	0,00	48.910.244.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**319.293.066.265,33**	**3.444.693.384,94**	**53.081.485.239,89**	**65.058.465.609,72**	**(2.615.934.739,49)**	**337.330.674.759,60**

a. Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp501.428.296,00	**Rp501.428.296,00**

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran yaitu tagihan penjualan kendaraan dinas dan penjualan tanah milik pemerintah. Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 sebesar Rp501.428.296,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp501.428.296,00.

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada lampiran 22a.

b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp7.201.265.760,41	**Rp766.732.377,01**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Atas TGR yang belum diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut dicatat pada kelompok Aset Lainnya.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.201.265.760,41 mengalami kenaikan sebesar Rp6.434.533.383,40 atau 839,22% dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2024 sebesar Rp766.732.377,01. Kenaikan sebesar Rp6.434.493.383,40 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi atas temuan DTT Belanja atas Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pejabat Administrator Tidak Sesuai Ketentuan pada 28 SKPD sebesar Rp1.381.082.147,4;
    a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp81.584.890,50;
    b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp57.834.620,00;
    c. Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah sebesar Rp9.533.527,22;
    d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.287.520,50;
    e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp100.896.920,18;
    f. Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp71.674.735,00;
    g. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp37.737.781,00;
    h. Dinas Perkebunan sebesar Rp4.903.123,00;
    i. Dinas Sosial sebesar Rp150.341.751,00;

j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp13.184.328,50;
k. Inspektorat sebesar Rp100.367.141,00;
l. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp173.124.988,00;
m. Sekretariat Daerah sebesar Rp39.164.525,00;
n. Sekretariat DPRD sebesar Rp4.907.185,00;
o. Kecamatan Babat Supat sebesar Rp78.260.880,50;
p. Kecamatan Babat Toman sebesar Rp36.238.935,00;
q. Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp46.590.747,50;
r. Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp36.349.213,00;
s. Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp32.533.135,50;
t. Kecamatan Keluang sebesar Rp55.138.771,00;
u. Kecamatan Lais sebesar Rp4.042.454,00;
v. Kecamatan Lalan sebesar Rp58.410.916,50;
w. Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp35.565.146,00;
x. Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp36.427.401,00;
y. Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp16.624.981,00;
z. Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp41.154.908,50;
aa. Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp22.909.563,00; dan
bb. Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp24.292.059,00;

2. Koreksi atas temuan LKPD Realisasi Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada 24 Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa BOSP pada 43 sekolah sebesar Rp583.893.034,00;
3. Koreksi atas temuan LKPD Realisasi Belanja Pemeliharaan pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya Rp43.395.000,00;
4. Koreksi atas temuan LKPD Realisasi Belanja Makanan dan Minuman pada RSUD Bayung Lencir Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Rp21.488.020,00;
5. Koreksi atas temuan LKPD Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia serta Tim Pelaksana Kegiatan pada 22 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.084.381.075,00;
   a. Kelebihan pembayaran belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp75.275.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
      - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp530.000;
      - Inspektorat sebesar Rp630.000,00; dan
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp74.115.000,00.
   b. Kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada 23 SKPD sebesar Rp1.009.106.075,00 dengan rincian sebagai berikut:
      - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp26.705.000,00;
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp243.665.000;
      - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp203.620.000,00;

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp29.452.500,00;
- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp59.812.500,00;
- Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp82.012.500,00;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.030.000,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp36.050.000,00;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp35.200.000,00;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.500.000,00;
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp46.587.500,00;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp52.515.000,00;
- Dinas Perhubungan sebesar Rp8.355.000,00;
- Inspektorat sebesar Rp24.440.000,00;
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.417.500,00;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp31.750.000,00;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp18.555.000,00;
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.605.000,00;
- Dinas Perkebunan sebesar Rp4.717.500,00;
- Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.026.075,00;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp50.0000,00;
- Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp20.550.000,00; dan
- Sekretariat Daerah sebesar Rp40.000,00.

6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp75.672.841,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp11.533.777,00;
7. Koreksi atas temuan DTT Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar total Rp322.501.758,00. Selama proses penyusunan laporan, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat DPRD sebesar Rp244.759.175,00
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp47.954.327,00; dan
   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp29.788.256,00.
8. Koreksi atas temuan DTT. Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp84.872.500,00;
9. Koreksi atas temuan DTT. Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Melalui Swakelola Tidak Sesuai Ketentuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.825.713.231,00.

Adapun rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada lampiran 22b.

c. Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp96.793.859.862,46	**Rp84.295.429.790,46**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset non keuangan tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas.

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp96.793.859.862,46 mengalami kenaikan sebesar Rp12.498.430.072,00 atau 14,83% dibandingkan nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.295.429.790,46. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.68. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp.)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp.)
		Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
Aset Tak Berwujud	**84.295.429.790,46**	**12.583.089.772,00**	**84.659.700,00**	**96.793.859.862,46**
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisensi dan Frechise	350.209.750,46	74.448.870,00	0,00	424.658.620,46
Hak Cipta	2.802.863.453,00	0,00	0,00	2.802.863.453,00
Hak Paten	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	22.118.275.829,00	434.905.000,00	84.659.700,00	22.468.521.129,00
Kajian	58.942.580.758,00	12.073.735.902,00	0,00	71.016.316.660,00
ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
ATB dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
ATB Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**84.295.429.790,46**	**12.583.089.772,00**	**84.659.700,00**	**96.793.859.862,46**

Saldo Awal 1 Januari 2025 **Rp84.295.429.790,46**
Penambahan: **Rp12.583.089.772,00**

1) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Konsultansi Bidang Telematika per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.484.601.842,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.792.030,00 berupa Lisensi Antivirus dan SSL Wildcard Domain.
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp58.656.840,00 berupa Lisensi Operating System dan aplikasi Microsoft Office.
   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp98.790.000,00 berupa Pengembangan Aplikasi.
   d. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.780.000,00 berupa Aplikasi Eset.
   e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp246.675.300,00 berupa Website Mal Pelayanan Publik mpp.mubakab.go.id.
   f. Dinas Perikanan sebesar Rp84.659.700,00 berupa Aplikasi Ikan MUSI.
   g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.486.684.644,00 berupa Jasa Konsultansi.

h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.397.982.000,00 berupa Jasa Konsultansi.
i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp90.581.328,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan.

2) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Reklas dari Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.098.487.930,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp503.941.780,00 berupa Jasa Konsultansi.
b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp594.546.150,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan.

Pengurangan **Rp84.659.700,00**

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sbeesar Rp84.659.700,00 merupakan pembayaran Beban Hutang belanja tahun anggaran 2024 Dinas Perikanan berupa Aplikasi Ikan Musi.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 23-23a.

d. Aset Lainnya – Aset Lain-lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp405.159.703.879,89	**Rp295.778.834.971,59**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dana Cadangan. Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp405.159.703.879,89 atau mengalami kenaikan sebesar Rp109.380.868.908,30 atau 36,98% dibandingkan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp295.778.834.971,59.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp405.159.703.879,89 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.69. Rekapitulasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2024	TAMBAH	KURANG	Koreksi BPK Tambah	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025
Rekapitulasi Temuan Gaji,TPP, dan Honor	542.210.925,00	0,00	0,00	0,00	542.210.925,00
PPH 21	8.809.440,00	0,00	0,00	0,00	8.809.440,00
Aset Rusak Berat	4.169.565.000,00	10.871.689.468,90	1.426.387.133,00	94.996.590.600,00	108.611.457.935,90
Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	291.058.249.606,59	1.736.591.826,61	4.446.052.714,82	7.648.436.860,61	295.997.225.578,99
JUMLAH	**295.778.834.971,59**	**12.608.281.295,51**	**5.872.439.847,82**	**102.645.027.460,61**	**405.159.703.879,89**

Mutasi Aset Lainnya- Aset Lain-Lain Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2025 **Rp295.778.834.971,59**

Penambahan: **Rp 12.608.281.295,51**

1) Mutasi penambahan atas Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.871.689.468,90 adalah sebagai berikut.
a) Penambahan dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp6.749.558.405,00;

b) Penambahan dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.261.325.622,90;
c) Penambahan dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp864.873.961,00;
d) Penambahan dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.572.000,00 dan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp27.002.550,00;
e) Penambahan dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp504.915.330,00;
f) Penambahan dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp420.822.000,00; dan
g) Penambahan dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp40.619.600,00.

2) Mutasi penambahan atas Aset Lainnya-Aset Lain-lain Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.736.591.826,61 adalah sebagai berikut.
a) Penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp28.713.272,59;
b) Penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.292.891.939,00;
c) Penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp13.172.480,50; dan
d) Penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp401.814.134,52.

Pengurangan: Rp 5.872.439.847,82

Mutasi pengurangan atas Aset Lainnya-Aset Lain-lain selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Lain-lain yang berasal dari penghapusan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.426.387.133,00. Pada Tahun 2025, telah dilakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang atas Aset Rusak Berat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor:501/KPTS-BPKAD/2025.
2) Pengurangan Aset Lain-lain yang berasal dari pembayaran atas kekurangan volumen pekerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.446.052.714,82 terdiri dari.
a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp83.933.516,49 merupakan pembayaran kekurangan volume atas pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor;
b) Dinas Kesehatan sebesar Rp51.489.328,16 merupakan pembayaran kekurangan volume atas pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor;

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.744.434.916,59 merupakan pembayaran kekurangan volume atas kegiatan pembuatan penahan tanah, kegiatan normalisasi sungai, kegiatan pembuatan dan peningkatan jalan, dan kegiatan pembangunan jembatan;
d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.326.908.742,60 merupakan pembayaran kekurangan volume atas kegiatan Penataan TPU, kegiatan penimbunan, kegiatan Pembuatan Drainase dan Jaringan, dan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan;
e) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp29.564.263,98 merupakan pembayaran kekurangan volume atas kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana olahraga;
f) Dinas Perkebunan sebesar Rp105.000.000,00 merupakan pembayaran kekurangan volume atas Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi;
g) Sekretaritat Daerah sebesar Rp8.000.000,35 merupakan pembayaran kekurangan volume atas Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung;
h) Sekretaritat DPRD sebesar Rp86.721.946,65 merupakan pembayaran kekurangan volume atas Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung;
i) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp10.000.000,00 merupakan pembayaran kekurangan volume atas Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung;

Koreksi BPK: Rp102.645.027.460,61

1) Penambahan Atas Koreksi Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume sebesar Rp7.648.436.860,61 dengan rincian sebagai berikut.
   a) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp233.764.049,21;
   b) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Belanja Barang dan jasa pada sebesar PUPR Rp3.562.713.231,00;
   c) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Belanja Modal-KDP Jalan Kota pada PUPR sebesar Rp1.115.506.354,80;
   d) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada PUPR sebesar Rp454.266.968,89;
   e) Hasil Pmeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Belanja Hibah pada Perkim sebesar Rp541.966.402,56;
   f) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Belanja Barang dan jasa pada Perkim sebesar Rp572.459.755,00;
   g) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Belanja Modal-KDP Jalan Kota pada Perkim sebesar Rp28.860.000,00;
   h) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisasi menjadi Aset Tetap KDP Gedung Bangunan pada Perkim sebesar Rp12.255.500,00;

i) Jurnal Temuan Kurang Volume atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perkim sebesar Rp631.401.810,59;
j) Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Perkim sebesar Rp35.097.500,00;
k) Hasil Pmeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Perkim sebesar Rp111.497.178,63;
l) Jurnal Temuan Kurang Volume atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp267.240.716,48; dan
m) Hasil Pmeriksaan LKPD tahun 2025 atas kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp81.407.393,45.

2) Koreksi Reklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain Rusak Berat atas Hasil pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas Reklas dari KIB D menjadi Aset Lain-lain pada PUPR sebesar Rp94.996.590.600,00.

Adapun rincian mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 24 dan 24.a-24.p.

e. Aset Lainnya – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp77.338.622.798,26)	**(Rp57.344.253.477,80)**

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2025. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2024, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2025.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.338.622.798,26 mengalami kenaikan sebesar Rp19.994.369.320,46 atau 34,87% dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.344.253.477,80.

Terdapat Penambahan atas Koreksi BPK sebesar Rp11.722.254.430,29 dengan rincian sebagai berikut.

1) Koreksi Penambahan Akumulasi Saldo Awal Bukan Temuan Terkoreksi sebesar Rp5.798.379.982,80;
2) Koreksi Penambahan Akumulasi Saldo Awal Temuan Terkoreksi sebesar Rp5.916.868.046,09; dan
3) Penambahan Beban Penyusutan Bukan Temuan Terkoreksi sebesar Rp7.006.401,40.

Terdapat Pengurangan atas Koreksi BPK sebesar Rp2.615.934.739,49 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Beban Penyusutan Bukan Temuan Terkoreksi sebesar Rp267.763.123,40; dan
2) Pengurangan Beban Penyusutan Temuan Terkoreksi sebesar Rp2.348.171.616,09.

Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 23.b.

f. Aset Lainnya – Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp94.986.960.240,90)	**(Rp53.615.349.691,93)**

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari beban penyusutan periodik. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp94.986.960.240,90 mengalami kenaikan sebesar Rp41.371.610.548,97 atau 77,16% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.615.349.691,93. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp94.986.960.240,90 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.70. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2024	TAMBAH	KURANG	Koreksi BPK	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025
Rusak Berat	**4.099.944.243,00**	**10.858.549.052,90**	**1.426.387.133,00**	**32.298.840.804,00**	**45.830.946.966,90**
Aset Tetap yang Tidak dgunakan dalam Operasional Pemerintah	**49.515.405.448,93**	**0,00**	**359.392.174,93**	0,00	**49.156.013.274,00**
a. Aset Lain-Lain Yang Digunakan Oleh Pemerintah Desa	29.841.817.762,93	0,00	247.541.998,93	0,00	29.594.275.764,00
b. P3D Peralatan dan Mesin	1.082.438.161,00	0,00	0,00	0,00	1.082.438.161,00
c. P3D Gedung dan Bangunan	13.645.839.125,00	0,00	0,00	0,00	13.645.839.125,00
d. P3D Jalan, Jaringan dan ligasi	2.130.349.713,00	0,00	0,00	0,00	2.130.349.713,00
e. Penyertaan Modal PDAM -JJI	2.814.960.687,00	0,00	111.850.176,00	0,00	2.703.110.511,00
JUMLAH	**53.615.349.691,93**	**10.858.549.052,90**	**1.785.779.307,93**	**32.298.840.804,00**	**94.986.960.240,90**

Penambahan Koreksi BPK atas Reklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain Rusak Berat atas Jembatan Lalan dikarenakan roboh ditabrak oleh tongkang bermuatan batubara sebesar Rp32.298.840.804,00.

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 24.c, 24.h, 24l, 24.m, 24.n, 24.p.

g. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	**Rp48.910.244.000,00**

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana TDF per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.910.244.000,00 atau 100% dibandingkan dengan *Treasury*

Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.910.244.000,00. Pencairan TDF sebesar Rp48.910.244.000,00 masuk ke rekening Kas Daerah pada tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp48.835.673.918,00 dan tanggal 11 April 2025 sebesar Rp74.570.082,00. Rincian Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dapat dilihat pada Lampiran 25.

5.3.1.5 Properti Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp105.450.924.411,97	**Rp107.845.370.200,36**

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.450.924.411,97 mengalami penurunan sebesar Rp2.394.445.788,39 atau 2,22% dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.845.370.200,36. Penurunan terjadi karena terdapat aset tanah yang dihibahkan kepada pihak lain sebesar Rp2.389.356.950,39 dan penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp5.088.838.dengan rincian sebagai berikut:

a. Properti Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp105.462.609.886,97	**Rp107.851.966.837,36**

Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2025 Rp105.462.609.886,97 mengalami penurunan sebesar Rp2.389.356.950,39 atau 2,22% dibandingkan dengan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.851.966.837,36. Jumlah Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.462.609.886,97 dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah

Tabel 5.71. Rincian Properti Investasi - Tanah

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jenis Barang/Nama Barang	Saldo Awal (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*6*
1	Bagian Tata Pemerintahan	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	11.452.865.281,44	11.452.865.281,44
		Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	4.981.296.580,00	4.981.296.580,00
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.171.473.714,30	1.171.473.714,30
		Tanah Hutan Produksi	375.200.000,00	375.200.000,00
		Tanah Hutan Produksi	162.100.000,00	162.100.000,00
2	Bagian Umum	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	38.333.640,00	38.333.640,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	15.322.887.077,00	15.322.887.077,00
		Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	42.999.190.389,00	42.999.190.389,00
		Tanah Persil Lainnya Lain-lain	1.540.207.500,00	1.540.207.500,00
		Tanah Persil Lainnya Lain-lain	1.752.538.800,00	1.752.538.800,00
4	Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Terminal Darat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
		Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	17.173.366.736,00	17.173.366.736,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	688.221.900,00	688.221.900,00
		Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	303.834.000,00	303.834.000,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	55.080.000,00	55.080.000,00
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	597.540.000,00	597.540.000,00
		Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	329.580.000,00	329.580.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	370.614.838,00	370.614.838,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	Tanah untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan Lain-lain	375.000.000,00	375.000.000,00
		Tanah Padang Semak Belukar	504.547.000,00	504.547.000,00
		Tanah untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan Lain-lain	2.070.833.331,23	2.070.833.331,23
			105.264.710.786,97	**105.264.710.786,97**

2) Gedung dan Bangunan

Tabel 5.72. Rincian Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jenis Barang/Nama Barang	Saldo Awal (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	197.899.100,00	11.685.475,00	186.213.625,00

b. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp11.685.475,00)	**(Rp6.596.637,00)**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2025 merupakan akumulasi penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.685.475,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.088.838,00,00 atau 77,14% dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.596.637,00. Adapun penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.088.838,00 merupakan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar Rp11.685.475,00. Metode penyusutan yang digunakan untuk perhitungan Properti Investasi adalah metode garis lurus.

Terkait penghasilan sewa menyewa properti investasi, penerimaan hasil sewa tersebut diakui berdasarkan jenis pendapatan masing-masing yang mana

dituangkan di Laporan Realisasi Anggaran. Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terdapat Properti Investasi yang disewakan kepada masyarakat yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Kedai Kuliner Gambo dan pada Sekretariat Daerah berupa berupa Lahan Kosong. Untuk beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) penganggarannya dianggarkan di kode rekening belanja pada SKPD yang menaungi properti investasi tersebut.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp171.220.559.920,21	**Rp563.000.129.645,22**

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp171.220.559.920,21 turun sebesar Rp391.779.569.725,01 atau 69,59% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp563.000.129.645,22. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp89.688.410.690,21	**Rp480.364.344.320,22**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp89.688.410.690,21 turun sebesar Rp390.675.933.630,01 atau 81,33% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp480.364.344.320,22. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.899.999,00	**Rp1.899.999,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.899.999,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan nilai Utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.899.999,00. Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.899.999,00 merupakan PPN pada SD Negeri 2 Sekayu atas Belanja BOS tahun 2023 yang di setor ke kas negara pada tanggal 02 Maret 2026.

Mutasi Data Utang PFK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 26.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp81.116.609,66	**Rp98.582.440,26**

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima lebih dahulu pada tahun berjalan atau sebelumnya menjadi pendapatan pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pihak Ketiga yang telah diterima uang namun jasanya belum diberikan di tahun anggaran 2025. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp81.116.609,66 mengalami penurunan sebesar Rp17.465.830,60 atau 17,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.582.440,26. Adapun penjelasan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp81.116.609,66 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

   Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Sekayu sebesar Rp42.525.531,32 dengan rincian sebagai berikut:

   a) Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 28 Februari 2026 dengan jangka waktu 24 Bulan merupakan sewa atas Ruang ATM berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sekayu tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI Nomor: REG.01/ADW/VII/2024 tanggal 02 April 2024 dengan nilai sisa pada 31 Desember 2025 sebesar Rp2.937.860,08;
   b) Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 19 Mei 2027 dengan jangka waktu 12 Bulan merupakan sewa atas Ruang Kantor dan ATM berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Kas dan ATM Nomor: 119/028/RS/V/2021 dan Nomor: 028.1/SKY/PK/4/B/2021 tanggal 19 Mei 2021 dengan nilai sisa pada 31 Desember 2025 sebesar Rp23.039.726,03;
   c) Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 29 Oktober 2026 dengan jangka waktu 12 Bulan merupakan sewa atas Ruang ATM berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Penempatan Gerai CMR BSI Nomor: 100.3.7/068/RS/XI/2025 dan Nomor: 05/508-3/275 29 Oktober 2025 dengan nilai sisa pada 31 Desember 2025 sebesar Rp16.547.945,21.

2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

   Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 13 Juli 2028 dengan jangka waktu 60 Bulan merupakan Sewa Ruangan Kantor dan ATM PT Bank Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

tentang Sewa Menyewa Kantor Kas dan ATM Nomor 039/SKY/PK/4/B/2021 dan Nomor: B-970/749/BPKAD-I/2021 tanggal 19 Juni 2023 dengan nilai sisa pada 31 Desember 2025 sebesar Rp36.855.078,34.

3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
   Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.736.000,00 merupakan penerimaan pajak reklame Tahun 2026 yang dibayar di Tahun 2025 oleh PT. Expo Pariwara Utama terkait Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 27.

c. Utang Belanja

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp77.338.720.081,55	**Rp478.038.861.880,96**

Utang Belanja merupakan utang karena belum dibayarkannya Belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional di tahun berjalan.

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp77.338.720.081,55 mengalami penurunan sebesar Rp400.700.141.799,41 atau 83,82% dibandingkan dengan Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp478.038.861.880,96. Adapun Mutasi atas Utang Belanja TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Utang Belanja 01 Januari 2025	478.038.861.880,96
Koreksi UnAudited	
Tambah (+)	268.950.000,00
Kurang (-)	948.241.780,00
Pembayaran Selama 2025	477.333.976.935,96
Penambahan Utang 2025	77.134.165.404,10
Koreksi Audited	
Tambah (+)	1.068.729.081,45
Kurang (-)	889.767.569,00
Saldo Akhir Utang Belanja 31 Desember 2025	77.338.720.081,55

Penjelasan dari rincian mutasi utang belanja tahun 2025 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2025, terdapat Koreksi atas Saldo Akhir Utang Belanja per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

1) Koreksi tambah sebesar Rp268.950.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Koreksi sebesar Rp250.544.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor Surat: B-900.1.15.1/7327/KES/2025 merupakan kesalahan pencatatan yang sebelumnya dicatat pada Dinas Kesehatan;
   b) Koreksi sebesar Rp18.300.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor Surat: B-900.1.15.1/7327/KES/2025 merupakan kesalahan pencatatan yang sebelumnya dicatat pada Dinas Kesehatan;

c) Koreksi sebesar Rp56.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan selisih antara pencatatan utang tahun 2024 dengan pembayaran utang tahun 2025 terkait Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Keruh Nomor Kontrak: 47/SPK/PPK-Sekrt/APBDP/PERKIM/2024;
d) Koreksi sebesar Rp50.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan selisih antara pencatatan utang tahun 2024 dengan pembayaran utang tahun 2025 terkait Kegiatan Pengerasan Jalan Cor Beton Dusun 5 Desa Mulyorejo, Kecamatan Sungai Lilin Nomor Kontrak: 40/SP/PPK-BID.Prmh/APBDP/PERKIM/2024.

2) Koreksi kurang sebesar Rp948.241.780,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
a) Koreksi sebesar Rp268.844.000,00 pada Dinas Kesehatan dengan Nomor Surat: B-900.1.15.1/7327/KES/2025 yang terdiri dari kesalahan pencatatan utang yang seharusnya dicatat pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir sebesar Rp250.544.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin sebesar Rp18.300.000,00;
b) Koreksi sebesar Rp198.272.260,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu merupakan kelebihan pencatatan Utang BLUD pada Tahun 2024;
c) Koreksi sebesar Rp250,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu merupakan pencatatan utang RSUD Sekayu berdasarkan faktur yang diterbitkan oleh penyedia. Berdasarkan faktur PT Rajawali Nusindo dengan nomor FKT/PLB/2024/00001767 tanggal 19 Juli 2024 ditagih sebesar Rp80.114.250,00. Terdapat perbedaan antara faktur yang diterbitkan oleh penyedia dengan nominal yang ada pada *E-Catalog* ID paket: OPA-P2406-9665397 tanggal 13 Juli 2024 sebesar Rp80.114.000,00. Sehingga pembayaran utang TA 2025 mengikuti nilai pada *E-Catalog*;
d) Koreksi sebesar Rp7.150.650,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor Surat: 900/4818/Dikbud/2025 merupakan kelebihan pencatatan Utang Tambahan Penghasilan Pegawai TPP 13 pada Tahun 2024;
e) Koreksi sebesar Rp3.415.470,00 pada Dinas Perkebunan dengan Nomor Surat: B-900/110/Disbun/2026 merupakan kesalahan pengakuan Utang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat Excavator pada Tahun 2024;
f) Koreksi sebesar Rp470.559.400,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari:
(1) Koreksi sebesar Rp400 merupakan kesalahan pencatatan Utang pada Tahun 2024 terkait Pekerjaan Penyusunan Database Sistem Pengelolaan Air Limbah (Sanitasi)

Berbasis Data Spasial berdasarkan BAST Nomor: 190.2/BASTL/BID.UPTD/APBD/DPKP/2024 yaitu nilai utang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp158.242.000 sedangkan yang dibayar pada tahun 2025 sebesar Rp158.241.600;

(2) Koreksi sebesar Rp18.703.000,00 merupakan kesalahan pencatatan utang pada tahun 2024 terkait Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mushola Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Surat Nomor: 31/SPK/PPK-Sekrt/APBDP/PERKIM/2024 dimana nilai tersebut sudah tercatat utang pada tahun 2024 sebesar Rp18.703.000,00 sedangkan pada tahun 2025 nilai tersebut tidak dibayarkan karena kegiatan fisik yang terkait tidak memungkinkan untuk di selesaikan sesuai dengan Nomor Surat: 85/SCM/XI/2024;

(3) Koreksi sebesar Rp111.000,00 merupakan kurang bayar utang terkait Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Bor Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya Nomor Kontrak: 89/SPK/PPK-BID.PSAMPL-APBDP/PERKIM/2024 sesuai dengan dengan Surat Nomor: 06/AS/I/2025 dimana nilai utang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp48.673.000,00 sedangkan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp48.562.000,00;

(4) Koreksi sebesar Rp2.000.000,00 merupakan kurang bayar utang terkait Kegiatan Pembangunan Aula Fasilitas Umum Rt. 08 Dusun III Desar Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Nomor Kontrak: 39/SP/PPK-Bid.TB/APBD/PERKIM/2024 sesuai dengan Surat Nomor: 27/DA/I/2024 dimana nilai utang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp68.440.550,00 sedangkan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp66.440.550,00;

(5) Koreksi sebesar Rp1.712.000,00 merupakan kurang bayar terkait Kegiatan Pembangunan Sumur Bor dan Perlengkapannya di Dusun Muara Padang Desa Epil Barat Kecamatan Lais Nomor Kontrak: 80/SPK/PPK-BID.TB/APBDP/PERKIM/2024 sesuai dengan Surat Nomor: 04/FP/I/2025 dimana nilai utang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp94.782.000,00 sedangkan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp93.070.000,00;

(6) Koreksi sebesar Rp500.000,00 merupakan kurang bayar terkait Kegiatan Pembangunan Teras Masjid Baitul Rahman Desa Sinar Tungkal Nomor Kontrak: 47/SPK/PPK-Bid.PSAMPL/APBDP/PERKIM/2024 sesuai dengan Surat Nomor: 45/RJP/I/2024 dimana nilai utang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp66.777.500,00 sedangkan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp66.277.500,00;

(7) Koreksi sebesar Rp447.443.000,00 merupakan nilai kontrak yang tercatat ganda di SPH terkait Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kepala Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Nomor Kontrak: 33/SP/PPP-Bid.Permukiman/APBD.P/PERKIM/2024;
(8) Koreksi sebesar Rp90.000,00 merupakan kurang bayar terkait Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mushola Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Nomor Kontrak: 31/SPK/PPK-Sekrt/APBDP/PERKIM/2024 sesuai dengan Surat Nomor: 07/M/I/2025 dimana nilai utang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp348.388.300,00 sedangkan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp348.298.300,00.

Adapun Pembayaran Utang Belanja selama Tahun 2025 sebesar Rp477.333.976.935,96 atas Pembayaran Saldo Utang Belanja Tahun 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp30.494.061.160,14;
2) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp102.313.926.009,00;
3) Utang Belanja Hibah sebesar Rp21.460.563.850,00;
4) Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp806.275.350,00;
5) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.670.329.988;
6) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.295.730.601,00;
7) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp280.143.585.977,82;
8) Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp149.504.000,00.

Adapun Penambahan Utang Belanja pada Tahun 2025 sebesar Rp77.134.165.404,30 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp9.018.882.518,30;
2) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp20.144.330.046,00;
3) Utang Belanja Hibah sebesar Rp2.380.681.149,10;
4) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.928.087.593,80; dan
5) Utang Belanja Modal Jaringan, Jalan, dan Irigasi sebesar Rp39.662.184.096,90;

Terdapat Koreksi BPK atas Saldo Akhir Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

1) Koreksi tambah sebesar Rp1.068.729.081,45 yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Koreksi sebesar Rp40.257.415,00 merupakan Kurang Catat Utang IWP 4% PNS & PPPK pada Puskesmas Lumpatan Tahun 2025;

b) Koreksi sebesar Rp222.703.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 yang belum tercatat namun telah terbayar pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c) Koreksi sebesar Rp18.703.000,00 merupakan Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang tidak dapat dihapuskan karena belum ada ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
d) Koreksi sebesar Rp348.739.200,00 merupakan Utang Belanja Hibah Tahun 2024 yang belum tercatat namun telah terbayar pada Tahun 2025 atas 5 SP2D berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perkebunan;
e) Koreksi sebesar Rp7.448.000,00 merupakan Utang Belanja Hibah Tahun 2024 yang belum tercatat namun telah terbayar pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f) Koreksi sebesar Rp84.087.000,00 merupakan Utang Belanja Hibah yang belum tercatat di Neraca 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
g) Koreksi sebesar Rp781.931,50 merupakan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang belum tercatat di Neraca 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
h) Koreksi sebesar Rp54.750.000,00 merupakan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2024 yang belum tercatat namun telah terbayar pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perkebunan;
i) Koreksi sebesar Rp241.864.465,95 merupakan Utang Belanja Modal Jembatan yang belum tercatat di Neraca 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j) Koreksi sebesar Rp49.395.069,00 merupakan Utang Belanja Modal Jalan Lainnya Tahun 2024 yang belum tercatat namun telah terbayar pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Koreksi Kurang sebesar Rp889.767.569,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
a) Koreksi sebesar Rp6.282.300,00 merupakan Koreksi Lebih Catat Utang Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan;

b) Koreksi sebesar Rp222.703.000,00 merupakan Pembayaran atas Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c) Koreksi sebesar Rp200.450.000,00 merupakan Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Utang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
d) Koreksi sebesar Rp7.448.000,00 merupakan Pembayaran atas Utang Belanja Hibah Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e) Koreksi sebesar Rp348.739.200,00 merupakan Pembayaran atas Utang Belanja Hibah Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perkebunan;
f) Koreksi sebesar Rp54.750.000,00 merupakan Pembayaran atas Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perkebunan;
g) Koreksi sebesar Rp49.395.069,00 merupakan Pembayaran atas Utang Belanja Modal Jalan Lainnya Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rincian Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 28, dan 28a.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp12.266.674.000,00	**Rp2.225.000.000,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang berasal dari utang belanja selain dari Belanja Barang dan Jasa.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.266.674.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.041.674.000,00 atau 451,31% dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.225.000.000,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.73. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Utang	Mutasi TA. 2025 (Rp)		Saldo Utang
	Per 31/12/2024	Pembayaran	Penambahan	Per 31/12/2025
1	2	3	4	5= 2-3+4
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	12.266.674.000,00	12.266.674.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	**2.225.000.000,00**	**2.225.000.000,00**	**12.266.674.000,00**	**12.266.674.000,00**

Terhadap tabel Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya diatas dapat diuraikan bahwa:

1) Terdapat pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.225.000.000,00 atas saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024.
2) Terdapat penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp12.266.674.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2025 yang dapat dirinci sebagai berikut:
   a) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan sebesar Rp228.775.000,00;
   b) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi sebesar Rp78.213.000,00;
   c) Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit sebesar Rp.11.959.686.000,00.

Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 29, 29a, & 29b.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp81.532.149.230,00	**Rp82.635.785.325,00**

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81.532.149.230,00 turun sebesar Rp1.103.636.095,00 atau 1,34% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.635.785.325,00. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang kepada Pemerintah Pusat

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp81.532.149.230,00	**Rp82.635.785.325,00**

Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81.532.149.230,00 mengalami penurunan 1,34% dibandingkan nilai Utang per 31 Desember 2024. Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp81.532.149.230,00 merupakan Iuran Jaminan Kesehatan dari tahun 2020 s.d 2025 yang dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.74. Mutasi Utang kepada Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Utang	Mutasi TA. 2025 (Rp)		Saldo Utang
	Per 31/12/2024	Pembayaran	Penambahan	Per 31/12/2025
1	2	3	4	5= 2-3+4
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	82.635.785.325,00	1.250.000.000,00	146.363.905,00	81.532.149.230,00
JUMLAH	**82.635.785.325,00**	**1.250.000.000,00**	**146.363.905,00**	**81.532.149.230,00**

1) Pembayaran Utang atas Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sekayu, BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, dan BPJS Kesehatan Kacab. Palembang s.d Triwulan IV Tahun 2024 Nomor: 12401/BA/III-01/1124 & Nomor: B-900/057/BPKAD-III/2024 sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan Nomor SP2D: 16.06/04.0/000087/LS/5.02.0.00.0.00.45.0000/PR/10/2025 Tanggal 22 Oktober 2025.
2) Penambahan Utang atas Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sekayu, BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, dan BPJS Kesehatan Kacab. Palembang s.d Triwulan IV tahun 2025 Nomor: B-900/156-1/BPKAD-III/2025 dan Nomor: B-900/156-2/BPKAD-III/2025 dengan total sebesar Rp146.363.905,00 yang terdiri dari:
   a) PNS sebesar Rp131.822.396,00 yaitu kelebihan iuran 1% berjumlah (Rp65.098.031,00) dan kekurangan iuran 4% berjumlah Rp196.920.427,00. Namun hasil Perhitungan tersebut belum melakukan rekonsiliasi rampung atas:
      (1) TPP (Iuran 1%) lebih bayar sebesar Rp63.120.673,00;
      (2) Jasa Medis (Iuran 1%) lebih bayar sebesar Rp5.504.318;
      (3) TPP (Iuran 4%) kurang bayar sebesar Rp91.818.123,00;
      (4) Jasa Medis (Iuran 4%) kurang bayar sebesar Rp90.659.678,00.

   b) PPPK sebesar Rp14.541.509,00 yaitu kekurangan iuran 1% berjumlah Rp11.706.263,00 dan kekurangan iuran 4% berjumlah Rp2.835.246,00 yang belum memperhitungkan iuran TPP, TPG, dan Jasa Medis Tahun 2025.
   c) Di Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Rp500.000.000,00 untuk mengangsur pembayaran utang atas Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp7.780.527.536.737,27	**Rp7.970.883.849.249,46**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.780.527.536.737,27.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas pada 31 Desember 2025 sebesar Rp7.780.527.536.737,27 turun sebesar Rp190.356.312.512,19 atau 2,39% dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.970.883.849.249,46.

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama periode Tahun 2025, nilai Surplus-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar Rp1.034.840.691.561,82

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp4.845.826.836.301,42	**Rp3.904.965.935.003,18**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp4.845.826.836.301,42. Pendapatan-LO Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp940.860.901.298,24 atau 24,09% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp3.904.965.935.003,18.

Tabel 5.75. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	559.249.723.665,59	408.018.263.667,18	151.231.459.998,41	37,06
2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	4.283.266.982.018,83	3.464.804.359.000,00	818.462.623.018,83	23,62
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	3.310.130.617,00	32.143.312.336,00	(28.833.181.719,00)	(89,70)
JUMLAH		**4.845.826.836.301,42**	**3.904.965.935.003,18**	**940.860.901.298,24**	**24,09**

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp559.249.723.665,59	**Rp408.018.263.667,18**

Pendapatan Asli Daerah-LO menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp559.249.723.665,59. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp151.231.459.998,41 atau 37,06% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp408.018.263.667,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Daerah -LO	219.429.211.366,89	116.919.823.314,23	102.509.388.052,66	87,67
2	Retribusi Daerah-LO	9.914.556.645,00	6.615.437.122,00	3.299.119.523,00	49,87
3	Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	18.395.564.057,62	27.898.190.463,75	(9.502.626.406,13)	34,06
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	311.510.391.596,08	256.584.812.767,20	54.925.578.828,88	21,41
JUMLAH		**559.249.723.665,59**	**408.018.263.667,18**	**151.231.459.998,41**	**37,06**

Saldo Pendapatan-LO masing-masing jenis PAD dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp219.429.211.366,89	**Rp116.919.823.314,23**

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2025, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2025 ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Keterangan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2025.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp219.429.211.366,89 . Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp102.509.388.052,66 atau 87,67% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp116.919.823.314,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Reklame-LO	2.044.835.218,00	1.460.619.122,00	584.216.096,00	40,00
2	Pajak Air Tanah-LO	519.596.570,35	436.123.497,00	83.473.073,35	19,14
3	Pajak Sarang Burung Walet-LO	122.936.000,00	188.045.000,00	(65.109.000,00)	(34,62)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	8.239.653.803,00	2.199.156.198,00	6.040.497.605,00	274,67
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	38.700.564.471,00	29.148.367.402,00	9.552.197.069,00	32,77
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	7.466.743.418,00	5.763.992.631,00	1.702.750.787,00	29,54
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	84.354.473.658,54	77.723.519.464,23	6.630.954.194,31	8,53
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	31.854.033.228,00	0,00	31.854.033.228,00	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	46.126.375.000,00	0,00	46.126.375.000,00	0,00
	Jumlah	**219.429.211.366,89**	**116.919.823.314,23**	**102.509.388.052,66**	**87,67**

Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.78. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	5= 3-4+5
1	Pajak Reklame-LO	1.966.095.017,00	39.864.454,00	118.604.655,00	2.044.835.218,00
2	Pajak Air Tanah-LO	494.109.277,35	6.885.250,00	32.372.543,00	519.596.570,35
3	Pajak Sarang Burung Walet-LO	124.516.000,00	2.050.000,00	470.000,00	122.936.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	7.616.339.132,00	34.897.063,00	658.211.734,00	8.239.653.803,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	29.645.996.684,00	897.293.448,00	9.951.861.235,00	38.700.564.471,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	7.529.732.798,00	298.060.480,00	235.071.100,00	7.466.743.418,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	96.471.738.738,00	13.447.136.489,46	1.329.871.410,00	84.354.473.658,54
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-	31.854.033.228,00	0,00	0,00	31.854.033.228,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	46.126.375.000,00	0,00	0,00	46.126.375.000,00
	jumlah	**221.828.935.874,35**	**14.726.187.184,46**	**12.326.462.677,00**	**219.429.211.366,89**

Pendapatan Pajak Daerah menurut LRA adalah sebesar Rp221.828.935.874,35 sedangkan menurut LO adalah sebesar Rp219.429.211.366,89 terdapat perbedaan sebesar Rp2.399.724.507,46 yang dapat diuraikan sebagai berikut

1) Mutasi kurang sebesar Rp14.726.187.184,46 terdiri dari:
   a) Pembayaran Piutang Pajak Reklame-LO sebesar Rp38.128.454,00;
   b) Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah-LO sebesar Rp6.885.250,00;
   c) Pembayaran Piutang Pajak Sarang Burung Walet-LO sebesar Rp2.050.000,00;
   d) Pembayaran Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO sebesar Rp34.897.063,00;
   e) Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO sebesar Rp897.293.448,00;
   f) Pembayaran Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO sebesar Rp298.060.480,00;
   g) Pembayaran Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO sebesar Rp12.864.396.482,15;
   h) Koreksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO sebesar Rp582.740.007,31; dan
   i) Pendapatan diterima dimuka Reklame BPPRD Tahun 2025 sebesar Rp1.736.000,00;
2) Mutasi tambah sebesar Rp12.326.462.677,00 terdiri dari:
   a) Penambahan Piutang Pajak Reklame-LO sebesar Rp80.956.201,00;
   b) Penambahan Piutang Pajak Air Tanah-LO sebesar Rp32.372.543,00;
   c) Penambahan Piutang Pajak Sarang Burung Walet-LO sebesar Rp470.000,00;
   d) Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO sebesar Rp658.211.734,00;

e) Penambahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO sebesar Rp9.948.566.720,00;

f) Penambahan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO sebesar Rp235.071.100,00;

g) Penambahan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO sebesar Rp1.329.871.410,00;

h) Koreksi Pajak Reklame-LO sebesar Rp37.648.454,00;

i) Koreksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO sebesar Rp262.451,00; dan

j) Pendapatan diterima dimuka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO sebesar Rp3.032.064,00;

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp9.914.556.645,00	**Rp6.615.437.122,00**

Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh sebelas SKPD. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pendapatan Retribusi Daerah -LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp9.914.556.645,00 . Pendapatan Retribusi Daerah -LO Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp3.299.119.523,00 atau 49,87% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp6.615.437.122,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	196.168.050,00	171.108.700,00	25.059.350,00	14,65
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	1.137.786.000,00	542.489.000,00	595.297.000,00	109,73
3	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	319.667.100,00	(319.667.100,00)	(100,00)
4	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	358.712.700,00	0,00	358.712.700,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	225.423.000,00	190.488.000,00	34.935.000,00	18,34
6	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	40.050.000,00	40.635.000,00	(585.000,00)	(1,44)
7	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	5.150.000,00	5.550.000,00	(400.000,00)	(7,21)
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	237.907.000,00	179.016.000,00	58.891.000,00	32,90
9	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.169.330.000,00	1.154.055.000,00	15.275.000,00	1,32
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	1.454.258.640,00	1.084.616.720,00	369.641.920,00	34,08
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	5.089.771.255,00	2.927.811.602,00	2.161.959.653,00	73,84
Jumlah		**9.914.556.645,00**	**6.615.437.122,00**	**3.299.119.523,00**	**49,87**

Selain itu tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah menurut LRA dan menurut LO yakni sebesar Rp9.914.556.645,00.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Tahun 2025	Tahun 2024

Rp18.395.564.057,62 **Rp27.898.190.463,75**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp18.395.564.057,62 . Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO Tahun 2025 tersebut turun sebesar Rp9.502.626.406,13 atau 34,06% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp27.898.190.463,75 dan tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA.

Tabel 5.80. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	18.395.564.057,62	27.898.190.463,75	(9.502.626.406,13)	(34,06)
Jumlah		**18.395.564.057,62**	**27.898.190.463,75**	**(9.502.626.406,13)**	**(34,06)**

d. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2025 **Tahun 2024**

Rp311.510.391.596,08 **Rp256.584.812.767,20**

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO meliputi antara lain Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian, Penerimaan Komisi, Pendapatan Denda, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan JKN dan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya.

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp311.510.391.596,08. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp54.925.578.828,88 atau 21,41% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp256.584.812.767,20 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	33.576.000,00	418.973.000,00	(385.397.000,00)	(91,99)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	35.777.964,69	23.096.658,02	12.681.306,67	54,91
3	Jasa Giro-LO	4.036.886.464,00	2.821.237.080,00	1.215.649.384,00	43,09
4	Pendapatan Bunga-LO	518.872.763,00	6.889.782.308,00	(6.370.909.545,00)	(92,47)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	9.315.443.212,63	16.690.227.810,79	(7.374.784.598,16)	(44,19)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.762.320.650,70	10.317.826.343,54	(8.555.505.692,84)	(82,92)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	673.290.446,55	246.418.357,04	426.872.089,51	173,23
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.811.888.946,54	319.890.573,00	2.491.998.373,54	779,02
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	50.400.666.808,00	162.323.286,00	50.238.343.522,00	0,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	241.921.668.339,97	218.695.037.350,81	23.226.630.989,16	10,62
	JUMLAH	**311.510.391.596,08**	**256.584.812.767,20**	**54.925.578.828,88**	**21,41**

Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.82. Rekonsiliasi Lain-lain PAD yang Sah- LO TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	874.847.200,00	841.271.200,00	0,00	33.576.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	21.235.150,00	36.855.078,34	51.397.893,03	35.777.964,69
3	Jasa Giro-LO	4.036.886.464,00	0,00	0,00	4.036.886.464,00
4	Pendapatan Bunga-LO	518.872.763,00	0,00	0,00	518.872.763,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	9.064.631.830,02	268.032.687,45	518.844.070,06	9.315.443.212,63
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.023.589.146,90	0,00	738.731.503,81	1.762.320.650,71
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	532.640.269,59	0,00	140.650.176,96	673.290.446,55
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.811.888.946,54	0,00	0,00	2.811.888.946,54
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	50.400.666.808,00	0,00	0,00	50.400.666.808,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	242.527.001.830,06	3.169.425.591,32	2.564.092.101,23	241.921.668.339,97
JUMLAH		**311.812.260.408,11**	**4.315.584.557,11**	**4.013.715.745,08**	**311.510.391.596,08**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah menurut LRA adalah sebesar Rp311.812.260.408,11 sedangkan menurut LO adalah sebesar Rp311.510.391.596,08 terdapat perbedaan sebesar Rp301.868.812,03 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mutasi kurang sebesar Rp4.315.584.557,11 terdiri dari:
   a. Pembayaran Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp375.670.000,00;
   b. Pembayaran Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar Rp268.032.687,45;
   c. Pembayaran Piutang Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp3.126.900.060,00;
   d. Pendapatan diterima dimuka BPKAD Tahun 2025 sebesar Rp36.855.078,34;
   e. Pendapatan diterima dimuka RSUD Sekayu Tahun 2025 sebesar Rp42.525.531,32;
   f. Surplus penjualan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp462.101.200,00;dan
   g. Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp3.500.000,00;

2. Mutasi tambah sebesar Rp4.013.715.745,08 terdiri dari:
   a. Penambahan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar Rp518.844.070,06;

b. Penambahan Piutang Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp2.519.939.618,00;
c. Surplus atas pembayaran Piutang sebesar Rp693.578.950,81;
d. Pendapatan diterima dimuka BPKAD Tahun 2024 sebesar Rp51.397.893,03;
e. Pendapatan diterima dimuka RSUD Sekayu Tahun 2024 sebesar Rp44.152.483,23;
f. Utang Dinas Perkebunan Tahun 2024 yang tidak ditagih oleh pihak ketiga sebesar Rp3.415.470,00 berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Penagihan Nomor: B-900/110/Disbun/2026 Tanggal 26 Februari 2026;
g. Koreksi temuan pemeriksaan LKPD atas Mekanisme Pemutusan Kontrak dan Pengenaan Sanksi atas Pekerjaan Jalan yang Tidak Selesai pada Dinas Perkim Tidak Sesuai Ketentuan serta eterlambatan Pelaksanaan dan Kekurangan Pengenaan Denda atas Paket Pekerjaan Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tiga SKPD (PUPR, Perkim, Dinkes) sebesar Rp140.650.176,96.
h. Koreksi Pembayaran Double atas SP2D Perkim tahun 2025 yang disetor di 2026 sebesar Rp34.376.000,00
i. Koreksi kurang catat belanja atas Kelebihan setor PFK 2025 sebesar Rp7.361.083,00

5.4.1.2 Pendapatan Transfer– LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp4.283.266.982.018,83	**Rp3.464.804.359.000,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer -LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp4.283.266.982.018,83. Pendapatan Transfer -LO Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp818.462.623.018,83 atau 23,26% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp3.464.804.359.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83. Rincian Pendapatan Transfer-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.089.130.047.902,00	3.231.834.460.950,00	857.295.586.952,00	26,53
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	194.136.934.116,83	232.969.898.050,00	(38.832.963.933,17)	(16,67)
JUMLAH		**4.283.266.982.018,83**	**3.464.804.359.000,00**	**818.462.623.018,83**	**23,62**

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp4.089.130.047.902,00	**Rp3.231.834.460.950,00**

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp4.089.130.047.902,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp881.968.487.952,00 atau 27,50% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp3.231.834.460.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Dana Perimbangan-LO	0,00	3.207.161.559.950,00	(3.207.161.559.950,00)	(100,00)
2	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	3.216.255.766.600,00	0,00	3.216.255.766.600,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	511.199.784.788,00	0,00	511.199.784.788,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	361.674.496.514,00	0,00	361.674.496.514,00	0,00
5	Insentif Fiskal-LO	0,00	24.672.901.000,00	(24.672.901.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	**4.089.130.047.902,00**	**3.231.834.460.950,00**	**857.295.586.952,00**	26,53

Rekonsiliasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.85. Rekonsiliasi PendapatanTransfer Pemerintah Pusat- LO TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
1	Dana Perimbangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	2.150.925.726.600,00	61.176.918.000,00	1.126.506.958.000,00	3.216.255.766.600,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	511.199.784.788,00	0,00	0,00	511.199.784.788,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	361.674.496.514,00	0,00	0,00	361.674.496.514,00
5	Dana Desa	209.290.220.994,00	209.290.220.994,00	0,00	0,00
6	Insentif Fiskal-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**3.233.090.228.896,00**	**270.467.138.994,00**	**1.126.506.958.000,00**	**4.089.130.047.902,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurut LRA adalah sebesar Rp3.233.090.228.896,00 sedangkan menurut LO adalah sebesar Rp4.089.130.047.902,00 terdapat perbedaan sebesar Rp843.773.145.006,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Mutasi kurang sebesar Rp270.467.138.994,00 yang terdiri dari :
   a. Treasury Deposit Facility Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.910.244.000,00,
   b. Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp209.290.220.994,00;
   c. Penambahan lebih bayar berdasarkan PMK No. 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp12.266.674.000,00.

2) Mutasi tambah sebesar Rp 1.126.506.958.000 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebesar Rp1.114.240.284.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025.

b. Koreksi Kode Rekening dari Pendapatan-LO ke Ekuitas atas Jurnal Pencatatan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA. 2025 terkait Kelebihan Transfer Pusat Tahun 2024 berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 sebesar Rp12.266.674.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp194.136.934.116,83	**Rp232.969.898.050,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp194.136.934.116,83. Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO Tahun 2025 tersebut turun sebesar Rp38.832.963.933,17 atau 16,67% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp232.969.898.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	149.472.488.116,83	143.235.880.828,00	6.236.607.288,83	4,35
2	Bantuan Keuangan	44.664.446.000,00	89.734.017.222,00	(45.069.571.222,00)	(50,23)
	JUMLAH	**194.136.934.116,83**	**232.969.898.050,00**	**(38.832.963.933,17)**	(16,67)

Rekonsiliasi Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.87. Rekonsiliasi Transfer Pemerintah Pusat- LO TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	137.258.525.061,83	12.352.473.483,00	24.566.436.538,00	149.472.488.116,83
2	Bantuan Keuangan	35.864.097.966,60	27.325.702.166,60	36.126.050.200,00	44.664.446.000,00
	JUMLAH	**173.122.623.028,43**	**39.678.175.649,60**	**60.692.486.738,00**	**194.136.934.116,83**

Pendapatan Transfer Antar Daerah menurut LRA adalah sebesar Rp173.122.623.028,43 sedangkan menurut LO adalah sebesar

Rp194.136.934.116,83 terdapat perbedaan sebesar Rp21.014.311.088,40 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Mutasi kurang sebesar Rp39.678.175.649,60 terdiri dari:
   a) Pembayaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil-LO berdasarkan SK Gubernur No: 900KPTS/BAPENDA/2024 tentang alokasi bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Oktober Tahun 2024 sebesar Rp12.352.473.483,00;
   b) Pembayaran Piutang Bantuan Keuangan SK Gubernur No:398/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.920.205.166,60.
   c) Koreksi BPK atas lebih catat piutang Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp405.497.000,00 berdasarkan SK Gubernur No:156/KPTS/BPKAD/2026 tentang Alokasi Anggaran kurang salur belanja keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

2) Mutasi tambah sebesar Rp60.692.486.738,00terdiri dari:
   a) Penambahan Piutang Pendapatan Bagi Hasil-LO berdasarkan SK Gubernur No: 962KPTS/BAPENDA/2025 tentang alokasi bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Oktober Tahun 2025 sebesar Rp7.417.006.641,00;
   b) Penambahan Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp36.126.050.200,00 dengan rincian:
      (1) SK Gubernur No: 431/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.126.050.200,00
      (2) SK Gubernur No: 507/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00.
   c) Koreksi BPK atas kurang catat piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp17.149.429.897,00 yang terdiri dari:
      (1) SK Gubernur No:999/KPTS/BAPENDA/2025 Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan November Tahun 2025 sebesar Rp8.544.552.734,00; dan

(2) SK Gubernur No:102/KPTS/BAPENDA/2026 Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp8.604.877.163,00.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp3.310.130.617,00	**Rp32.143.312.336,00**

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp3.310.130.617,00 . Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 tersebut turun sebesar Rp28.833.181.719,00 atau 89,70% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp32.143.312.336,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah-LO	3.310.130.617,00	32.143.312.336,00	(28.833.181.719,00)	(89,70)
JUMLAH		**3.310.130.617,00**	**32.143.312.336,00**	**(28.833.181.719,00)**	**(89,70)**

a. Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp3.310.130.617,00	**Rp32.143.312.336,00**

Saldo Pendapatan Hibah-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp3.310.130.617,00 . Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 tersebut turun sebesar Rp28.833.181.719,00 atau 89,70% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp32.143.312.336,00.

Tabel 5.89. Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	2.912.928.617,00	30.987.752.702,00	(28.074.824.085,00)	(90,60)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	680.333.234,00	(680.333.234,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	397.202.000,00	475.226.400,00	(78.024.400,00)	(16,42)
	JUMLAH	**3.310.130.617,00**	**32.143.312.336,00**	**(28.833.181.719,00)**	**(89,70)**

Tidak terdapat realisasi untuk Pendapatan Hibah-LRA, sedangkan Realisasi Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp3.310.130.617,00 yang dikarenakan:

1) Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp2.916.928.617,00 dengan rincian :
   a) Dinas Perhubungan mendapatkan hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Kendaraan Micro Bus Penumpang sebesar Rp1.644.325.000,00 berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor: 521/KPTS-BPKAD/2025 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Tanggal 30 Oktober 2025;
   b) Puskesmas Bayung Lencir mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan berupa alat kesehatan (Oxygen Consentrator) sebesar Rp69.120.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara Nomor: KN.01.08/A.X/3244/2025 Tanggal 13 Agustus 2025;
   c) Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah dari BKKBN berupa Obat-obatan yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp695.372.797,00;
   d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan hibah dari Provinsi Sumsel dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri berupa blangko E-KTP sebesar Rp504.110.820,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Blangko KTP Elektronik Nomor: 470/09/Dukcapil.II/2025 Tanggal 11 Februari 2025; dan

2) Penambahan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp397.202.000,00 pada Dinas Perhubungan mendapatkan hibah dari General Manager Operational PT Triaryani berupa Kendaraan Micro Bus Penumpang berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor: 521/KPTS-BPKAD/2025 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Tanggal 30 Oktober 2025.

5.4.2 Beban

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp3.747.909.748.541,07	**Rp3.777.567.359.373,76**

Beban Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle).*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan utang, reklasifikasi, kapitalisasi belanja, beban dibayar dimuka dan akun lainnya

Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Bantuan Keuangan, dan Beban Tak Terduga. Beban Transfer terdiri dari Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa.

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2025. Beban untuk Periode 31 Desember 2025 sebesar Rp3.747.909.748.541,07. Beban turun sebesar Rp 29.657.610.832,69 atau 0,79% dibandingkan dengan beban Tahun 2024 sebesar Rp3.777.567.359.373,76. Rincian mengenai Beban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.90. Rincian Beban

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pegawai	1.435.432.866.998,98	1.241.059.955.842,15	194.372.911.156,83	15,66
2	Beban Barang dan Jasa	761.186.121.141,70	1.037.375.310.868,65	(276.189.189.726,95)	(26,62)
3	Beban Bunga	0,00	0,00	-	-
4	Beban Hibah	206.151.495.582,23	327.840.001.447,95	(121.688.505.865,72)	(37,12)
5	Beban Bantuan Sosial	53.270.248.310,00	30.951.229.000,00	22.319.019.310,00	72,11
6	Beban Penyisihan Piutang	9.876.012.699,72	8.307.558.197,49	1.568.454.502,23	18,88
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	160.426.694.573,90	164.938.426.930,51	(4.511.732.356,61)	(2,74)
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	118.397.463.812,49	73.163.063.231,91	45.234.400.580,58	61,83
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	673.096.903.810,47	625.960.362.594,27	47.136.541.216,20	7,53

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
10	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.239.595.491,58	8.407.916.262,83	(168.320.771,25)	(2,00)
11	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.088.838,00	3.957.982,00	1.130.856,00	100,00
12	Beban Bantuan Keuangan	319.060.768.478,00	257.403.625.216,00	61.657.143.262,00	23,95
13	Beban Tak Terduga	2.766.488.804,00	2.155.951.800,00	610.537.004,00	28,32
	JUMLAH	**3.747.909.748.541,07**	**3.777.567.359.373,76**	**(29.657.610.832,69)**	**(0,79)**

Penjelasan rincian realisasi beban operasional adalah sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp2.465.916.744.732,63	**Rp2.645.534.055.356,24**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.465.916.744.732,63 beban tersebut turun sebesar Rp179.617.310.623,61 atau 6,79% dibandingkan Beban Operasi-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.645.534.055.356,24 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.91. Rincian Beban Operasi-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pegawai	1.435.432.866.998,98	1.241.059.955.842,15	194.372.911.156,83	15,66
2	Beban Barang dan Jasa	761.186.121.141,70	1.037.375.310.868,65	(276.189.189.726,95)	(26,62)
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Hibah	206.151.495.582,23	327.840.001.447,95	(121.688.505.865,72)	(37,12)
5	Beban Bantuan Sosial	53.270.248.310,00	30.951.229.000,00	22.319.019.310,00	72,11
6	Beban Penyisihan Piutang	9.876.012.699,72	8.307.558.197,49	1.568.454.502,23	18,88
	JUMLAH	**2.465.916.744.732,63**	**2.645.534.055.356,24**	**(179.617.310.623,61)**	**6,79**

a. Beban Pegawai

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.435.432.866.998,98	**Rp1.241.059.955.842,15**

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp1.435.432.866.998,98 naik sebesar Rp194.372.911.156,83 atau 15,66% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.241.059.955.842,15dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92. Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Beban Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	798.000.754.689,00	657.178.893.143,00	140.821.861.546,00	21,43
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	495.942.919.069,04	313.736.368.967,00	182.206.550.102,04	58,08
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	131.314.072.611,00	(131.314.072.611,00)	(100,00)

No	Beban Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.044.182.584,00	24.897.913.807,08	146.268.776,92	0,59
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.165.833.888,00	797.022.492,00	368.811.396,00	46,27
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.192.110.000,00	993.120.000,00	198.990.000,00	20,04
7	Beban Pegawai BLUD	114.087.066.768,94	112.142.564.822,07	1.944.501.946,87	1,73
Jumlah		**1.435.432.866.998,98**	**1.241.059.955.842,15**	**194.372.911.156,83**	**15,66**

Tabel 5.93. Rekonsiliasi antara Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	BELANJA - LRA	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 31 DESEMBER 2025
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	799.106.229.756,00	146.363.905,00	1.251.838.972,00	798.000.754.689,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	519.751.971.720,44	-	23.809.052.651,40	495.942.919.069,04
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	0,00	0,00	-
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.044.182.584,00	0,00	0,00	25.044.182.584,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.165.833.888,00	0,00	0,00	1.165.833.888,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	1.192.110.000,00	0,00	0,00	1.192.110.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	113.127.080.672,78	9.059.139.933	8.099.153.837,14	114.087.066.768,94
Jumlah		**1.459.387.408.621,22**	**9.205.503.838,30**	**33.160.045.460,54**	**1.435.432.866.998,98**

Belanja Pegawai-LRA Sebesar Rp1.459.387.408.621,22 sedangkan beban pegawai-LO sebesar Rp1.435.425.505.915,98 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp23.954.541.622,24 dengan rincian sebagai berikut:

1) Mutasi tambah sebesar Rp9.205.503.838,30 terdiri dari:
   a) Penambahan Utang Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp146.363.905,00 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
   b) Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 sebesar Rp9.018.882.518,30
   c) Penambahan atas Koreksi BPK Kurang Catat Utang IWP 4% PNS & PPPK Tahun 2025 pada Puskesmas Lumpatan sebesar Rp40.257.415,00
2) Mutasi kurang sebesar Rp31.778.963.313,14 terdiri dari:
   a) Pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan PPU Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 s.d 2024 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp1.250.000.000,00;
   b) Piutang Setoran Temuan BPK pada Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.838.972,00;
   c) Jurnal Pembayaran Utang TPP ke 13 PNS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.394.907.323,00;
   d) Piutang Setoran Temuan BPK Temuan Audit BPK pada Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp33.063.181,00; dan
   e) Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.099.153.837,14.

f) Koreksi atas temuan DTT Belanja atas Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pejabat Administrator Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.381.082.147,4.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada lampiran 30.

b. Beban Barang dan Jasa

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp761.186.121.141,70	**Rp1.037.375.310.868,65**

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun anggaran 2025. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2025, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2025, persediaan akhir per 31 Desember 2025, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

Beban Barang dan Jasa merupakan pengakuan atas pembayaran dan/atau kewajiban pemerintah daerah atas Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok belanja langsung. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp761.186.121.141,70 turun sebesar Rp276.189.189.726,95 atau 26,62% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp1.037.375.310.868,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Beban Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Persediaan	134.292.127.482,08	145.552.360.525,25	(11.260.233.043,17)	(7,74)
2	Beban Jasa	281.743.784.636,02	425.040.670.073,32	(143.296.885.437,30)	(33,71)
3	Beban Pemeliharaan	53.765.831.287,59	140.264.259.547,11	(86.498.428.259,52)	(61,67)
4	Beban Perjalanan Dinas	84.748.945.239,00	123.469.227.850,60	(38.720.282.611,60)	(31,36)
5	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	27.115.570.733,00	31.546.845.000,00	(4.431.274.267,00)	(14,05)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	74.730.733.966,00	(74.730.733.966,00)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	66.257.700.837,00	0,00	66.257.700.837,00	100,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.238.891.164,00	0,00	1.238.891.164,00	100,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	112.023.269.763,01	96.771.213.906,37	15.252.055.856,64	15,76
Jumlah		**761.186.121.141,70**	**1.037.375.310.868,65**	**(276.189.189.726,95)**	**(26,62)**

Adapun rincian dari Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

1) Beban Persediaan

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp134.292.127.482,08	**Rp145.552.360.525,25**

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama satu tahun anggaran. Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp134.292.127.482,08 turun sebesar Rp11.260.233.043,17 atau 7.73% dibandingkan Beban

persediaan Tahun 2024 sebesar Rp145.552.360.525,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95. Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Beban Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Barang Pakai Habis	128.355.762.529,70	137.159.158.334,25	(8.803.395.804,55)	(6,42)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	5.735.047.220,38	8.200.307.191,00	(2.465.259.970,62)	(30,06)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	201.317.732,00	192.895.000,00	8.422.732,00	4,37
4	Beban Barang Ekstra Kompatable	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**134.292.127.482,08**	**145.552.360.525,25**	**(11.260.233.043,17)**	**(7,74)**

Tabel 5.96. Rekonsiliasi antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan

(dalam rupiah)

Beban Persediaan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang	LO (Rp)
2	3	4	5=3-4	6
Beban Pakai Habis	129.206.433.067,00	50.642.608.954,12	51.493.279.491,42	128.355.762.529,70
Beban Barang Tak Pakai Habis	0,00	5.763.907.220,38	28.860.000,00	5.735.047.220,38
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	6.331.817.732,00		6.130.500.000,00	201.317.732,00
Jumlah	**135.538.250.799,00**	**56.406.516.174,50**	**57.652.639.491,42**	**134.292.127.482,08**

Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp135.538.250.799,00 sedangkan beban persediaan-LO sebesar Rp135.455.426.398,95 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp82.824.400,05 dengan rincian sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp57.569.815.091,37 terdiri dari:
   (1) Persediaan awal Tahun 2025 sebesar Rp47.144.583.372,83;
   (2) Kategori Bukan Aset sebesar Rp1.054.388.302,29 yang terdiri dari:
      - Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.731.600,00;
      - Dinas Sosial sebesar Rp19.511.000,00;
      - Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp37.257.150,00;
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp621.127.592,29;
      - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp260.139.156,00; dan
      - Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp114.621.804,00.
   (3) Koreksi Rekening Belanja Aset Tetap sebesar Rp110.079.190,00 yang terdiri dari:
      - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp35.115.000,00;

- Dinas Perkebunan sebesar Rp16.190.000,00;
- Dinas Kesehatan - Puskesmas Lais sebesar Rp1.290.000,00
- Dinas Kesehatan - Puskesmas Lubuk Bintialo sebesar Rp9.718.805,00;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp20.390.385,00; dan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.375.000,00.

(4) Hibah Barang Pakai Habis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.068.703.089,00 yang terdiri dari:
- Hibah Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dari BKKBN sebesar Rp468.392.364,00 berupa berupa Obat-obatan yang diserahkan ke masyarakat; dan
- Hibah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Provinsi Sumsel dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima Blangko KTP Elektronik Nomor: 470/09/Dukcapil.II/2025 Tanggal 11 Februari 2025 sebesar Rp600.310.725,00 berupa blangko E-KTP.

(5) Aset ekstrakomptable sebesar Rp5.763.907.220,38 yang terdiri dari
- Kecamatan Lalan sebesar Rp37.830.000,00;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp5.794.200,00;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp10.328.550,00;
- Kecamatan Babat Toman sebesar Rp8.800.000,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp344.100,00;
- Dinas Perhubungan sebesar Rp685.992.945,00;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.231.550,00;
- Kecamatan Keluang sebesar Rp150.683,00;
- Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp195.045.331,00;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp91.134.885,00;
- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp2.235.000,38;
- Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp23.057.185,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp8.699.985,00;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp1.192.140,00;
- Sekretariat DPRD sebesar Rp14.319.000,00;
- Dinas Kesehatan sebesar Rp38.874.562,00;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp8.702.400,00;

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.263.857,00;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.625.722.147,00; dan
- Dinas Perikanan sebesar Rp188.700,00.

(6) Koreksi tambah BPK beban persediaan sebesar Rp1.246.855.000,00

b) Mutasi Kurang sebesar Rp57.652.639.491,42 terdiri dari:

(1) Persedian Akhir Tahun 2025 sebesar Rp26.051.731.935,42;

(2) Piutang Setoran Temuan BPK sebesar Rp292.124.421,00 terdiri dari:
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp244.759.175,00;
- Dinas Kesehatan sebesar Rp29.788.256,00; dan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.576.990,00.

(3) Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap sebesar Rp4.012.761.633,00 yang terdiri dari:
- Kecamatan Babat Toman sebesar Rp499.070.649,00;
- Kecamatan Sekayu sebesar Rp882.076.678,00;
- Kecamatan Keluang sebesar Rp346.068.088,00;
- Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp688.285.297,00;
- Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp852.448.448,00; dan
- Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp744.812.473,00.

(4) Pembayaran Utang Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp14.184.973.564,00 yang terdiri dari:
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp124.147.254,00;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp94.651.500,00;
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp217.401.100,00;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp183.149.370,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp122.426.000,00;
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp500.595.500,00;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.739.182.300,00;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp25.614.400,00;
- Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp4.480.317.000,00;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp103.014.900,00;
- Dinas Perikanan sebesar Rp189.350.000,00;
- Dinas Perkebunan sebesar Rp1.768.174.750,00;

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp401.513.000,00;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp646.349.000,00;
- Kecamatan Babat Supat sebesar Rp76.020.600,00;
- Kecamatan Babat Toman sebesar Rp163.201.900,00;
- Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp4.326.750,00;
- Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp22.850.000,00;
- Kecamatan Keluang sebesar Rp4.900.000,00;
- Kecamatan Lalan sebesar Rp141.218.000,00;
- Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp25.650.000,00;
- Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp22.607.500,00
- Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp43.500.000,00;
- Kecamatan Sekayu sebesar Rp4.959.000,00;
- Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp14.835.000,00;
- Kelurahan Ngulak sebesar Rp37.772.946,00;
- Kelurahan Ngulak I sebesar Rp37.988.706,00;
- Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin sebesar Rp18.300.000,00; dan
- Sekretariat Daerah sebesar Rp1.184.795.808,00.

(5) Koreksi Rekening Belanja Aset Tetap sebesar Rp6.375.540.000,00 yang terdiri dari:
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp245.040.000,00; dan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.130.500.000,00.

(6) Koreksi mutasi kurang BPK pada Beban Persediaan senilai Rp7.427.916.748,56.

Rincian beban persediaan dapat dilihat pada Lampiran 31.

2) Beban Jasa

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp281.743.784.636,02	**Rp425.040.670.073,32**

Beban Jasa merupakan biaya pemakaian Jasa selama satu tahun anggaran. Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp281.743.784.636,02 turun sebesar Rp143.296.885.437,30 atau 33,71% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp425.040.670.073,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97. Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Beban Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Jasa Kantor	189.464.529.892,00	337.116.200.323,00	(147.651.670.431,00)	(43,80)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	66.028.330.563,09	53.765.036.469,00	12.263.294.094,09	22,81
3	Beban Sew a Peralatan dan Mesin	6.844.621.261,18	6.119.274.245,32	725.347.015,86	11,85
4	Beban Sew a Gedung dan Bangunan	5.430.082.070,00	7.097.487.636,00	(1.667.405.566,00)	(23,49)
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.759.102.299,75	10.138.969.980,00	(7.379.867.680,25)	(72,79)
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.255.360.850,00	763.552.600,00	1.491.808.250,00	195,38
7	Beban Beasisw a Pendidikan PNS	611.500.000,00	428.850.000,00	182.650.000,00	42,59
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.350.257.700,00	9.611.298.820,00	(1.261.041.120,00)	(13,12)
Jumlah		**281.743.784.636,02**	**425.040.670.073,32**	**(143.296.885.437,30)**	**(33,71)**

Tabel 5.98. Rekonsiliasi antara Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO

(dalam rupiah)

No	Beban Jasa	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Beban Jasa Kantor	212.285.179.887,00	1.156.997.800,00	23.977.567.795,00	189.464.529.892,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	66.132.608.137,00	1.814.146.393,74	1.918.423.967,65	66.028.330.563,09
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.108.934.227,00	1.139.780.249,00	3.404.093.214,82	6.844.621.261,18
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.854.414.820,00	0,00	424.332.750,00	5.430.082.070,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	25.762.828.431,00	214.231.200,00	23.217.957.331,25	2.759.102.299,75
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.313.494.750,00	0,00	1.058.133.900,00	2.255.360.850,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	611.500.000,00	0,00	0,00	611.500.000,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.728.946.700,00	0,00	2.378.689.000,00	8.350.257.700,00
Jumlah		**333.797.906.952,00**	**4.325.155.642,74**	**56.379.197.958,72**	**281.743.784.636,02**

Belanja Jasa-LRA Sebesar Rp333.797.906.952,00, sedangkan beban Jasa-LO sebesar Rp281.743.824.636,02 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp52.054.082.315,98 dengan rincian sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp4.325.155.642,74 terdiri dari :

(1) Pemakaian asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2024 sebesar Rp2.829.694.542,74;

(2) Penambahan Utang Jasa Kantor Tahun 2025 sebesar Rp200.450.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

(3) Penambahan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp124.232.100,00 pada Dinas Kesehatan.

(4) Penambahan Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp179.855.200,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(5) Koreksi mutasi tambah BPK pada beban jasa kantor dan beban jasa konsultasi konstruksi senilai Rp990.923.800,00

b) Mutasi Kurang sebesar Rp56.379.197.958,72 terdiri dari:
   (1) Pembayaran asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2025 sebesar Rp3.857.716.699,47;
   (2) Koreksi Belanja Jasa ke Aset sebesar Rp1.691.083.428,00 pada;
      - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp377.000.000,00;
      - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp243.080.778,00; dan
      - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.071.002.650,00;
   (3) Pembayaran Utang Jasa Kantor Tahun 2024 sebesar Rp4.258.283.920,00 yang terdiri dari:
      - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp63.000.000,00;
      - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.196.038.320,00;
      - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp399.573.200,00;
      - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp383.850.000,00;
      - Dinas Perkebunan sebesar Rp3.978.600,00;
      - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp568.000.000,00;
      - Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp118.800.000,00;
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp345.043.800,00; dan
      - Sekretariat DPRD sebesar Rp180.000.000,00.
   (4) Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp435.668.183,00 yang terdiri dari:
      - Dinas Kesehatan sebesar Rp386.468.483,00; dan
      - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.199.700,00.
   (5) Pembayaran Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.022.850.000,00 terdiri dari:
      - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp438.400.000,00;
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp1.950.000,00;
      - Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp12.800.000,00;
      - Kecamatan Lalan sebesar Rp27.000.000,00; dan
      - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp542.700.000,00.
   (6) Pembayaran Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp424.332.750,00 terdiri dari:
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp215.847.750,00;
      - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp180.000.000; dan
      - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp28.485.000,00.

(7) Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp10.413.754.120,00 terdiri dari
   - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp713.089.320,00;
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.989.160.400,00;
   - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp178.254.900,00;
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.188.983.000,00;
   - Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp245.643.000,00; dan
   - Sekretariat Daerah sebesar Rp98.623.500,00.

(8) Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp513.312.600,00 terdiri dari:
   - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp197.646.600,00;
   - Dinas Perikanan sebesar Rp84.659.700,00;
   - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp48.784.500,00;
   - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp137.178.000,00; dan
   - Dinas Perkebunan sebesar Rp45.043.800,00.

(9) Pembayaran Utang Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.378.689.000,00 terdiri dari:
   - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp1.984.417.000,00; dan
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp394.272.000,00.

(10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp544.821.300,00 terdiri dari:
   - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp246.675.300,00;
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp98.790.000,00; dan
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp199.356.000,00.

(11) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.775.891.972,00 terdiri dari:
   - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp90.581.328,00
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.486.684.644,00; dan
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.198.626.000,00.

(12) Piutang Setoran Temuan BPK pada Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp32.584.526,25 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

(13) Koreksi BPK mutasi kurang pada beban jasa kantor, beban iuran jaminan/asuransi dan beban jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp40.060.538.920,00.

Rincian beban jasa dapat dilihat pada Lampiran 32.

3) Beban Pemeliharaan

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp53.765.831.287,59	**Rp140.264.259.547,11**

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp53.765.831.287,59 turun sebesar Rp86.498.428.259,52 atau 61,67% dibandingkan dengan Beban pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp140.264.259.547,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99. Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.584.980.724,00	20.838.537.019,60	1.746.443.704,40	8,38
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.539.618.440,60	14.720.184.477,51	(2.180.566.036,91)	(14,81)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.557.038.622,99	104.633.642.050,00	(86.076.603.427,01)	(82,26)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	84.193.500,00	71.896.000,00	12.297.500,00	17,10
Jumlah		**53.765.831.287,59**	**140.264.259.547,11**	**(86.498.428.259,52)**	**(61,67)**

Tabel 5.100. Rekonsiliasi antara Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO

(dalam rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.006.875.582,00	665.000,00	1.422.559.858,00	22.584.980.724,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.666.582.350,60	56.854.600,00	2.183.818.510,00	12.539.618.440,60
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.682.262.232,99	24.530.450,00	29.149.754.060,00	18.557.038.622,99
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	84.193.500,00	0,00	0,00	84.193.500,00
Jumlah		**86.439.913.665,59**	**82.050.050,00**	**32.756.132.428,00**	**53.765.831.287,59**

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp86.439.913.665,59 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp53.765.831.287,59 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp32.674.082.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp82.050.050,00 yang terdiri dari:

(1) Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.530.450,00;

(2) Jurnal Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.952.250,00;

(3) Koreksi Aset Tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp49.902.350,00;

(4) Kategori Bukan Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Tahun 2025 sebesar Rp665.000,00; dan

(5) Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.530.450,00.

b) Mutasi Kurang sebesar Rp25.959.664.766,00 yang terdiri dari:

(1) Koreksi Aset Tetap Belanja Pemeliharaan Aset Menjadi Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp88.235.010,00;

(2) Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.355.489.858,00 yang terdiri dari:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp47.255.000,00;
- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp51.388.850,00;
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp585.436.000,00;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp195.285.000,00;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp76.429.570,00;
- Dinas Perkebunan sebesar Rp89.565.000,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp266.039.250,00;
- Sekretariat DPRD sebesar Rp20.562.000,00; dan
- Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp23.529.188,00.

(3) Koreksi atas perbedaan Anggaran Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp23.675.000,00;

(4) Jurnal Penutup Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.146.137.398,00;

(5) Jurnal Penutup Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp2.095.583.500,00 terdiri dari:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp12.694.320,00;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.383.500,00;
- Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp31.815.950,00;

- Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp48.859.638,00;
- Dinas Sosial sebesar Rp417.955.238,00;
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp231.748.165,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp159.799.360,00;
- Kecamatan Babat Toman sebesar Rp627.636.329,00;
- Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp178.105.000,00; dan
- Dinas Kesehatan sebesar Rp188.586.000,00.

(6) Koreksi mutasi kurang BPK pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp7.047.011.662,00.

Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada lampiran 33.

4) Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp84.748.945.239,00	**Rp123.469.227.850,60**

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp84.748.945.239,00 turun sebesar Rp38.720.282.611,60 atau 31,36% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp123.469.227.850,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101. Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Perjalanan Dinas	84.748.945.239,00	123.469.227.850,60	(38.720.282.611,60)	(31,36)
	Jumlah	**84.748.945.239,00**	**123.469.227.850,60**	**(38.720.282.611,60)**	**(31,36)**

Tabel 5.102. Rekonsiliasi antara Belanja Perjalanan Dinas -LRA dengan Beban Perjalanan Dinas -LO

(dalam rupiah)

No	Beban Perjalanan Dinas	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.858.306.915,00	0,00	195.219.476,00	84.663.087.439,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	85.857.800,00	0,00	0,00	85.857.800,00
Jumlah		**84.944.164.715,00**	**0,00**	**195.219.476,00**	**84.748.945.239,00**

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp84.944.164.715,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp84.748.945.239,00 sehingga terdapat

perbedaan sebesar Rp195.219.476,00 dengan rincian Mutasi Kurang sebesar Rp195.219.476 merupakan yang terdiri atas:

(1) setoran atas pengembalian temuan BPK RI senilai Rp23.140.358,00 yang terdiri dari:
   a) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp3.650.000.00;
   b) Sekretariat DPRD sebesar Rp18.068.112,00;
   c) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp422.246,00; dan
   d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp1.000.000,00;
(2) Koreksi mutase kurang BPK atas Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah senilai Rp172.079.118,00

Rincian beban perjalanan dinas dapat dilihat pada lampiran 34.

5) Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp27.115.570.733,00	**Rp31.546.845.000,00**

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp27.115.570.733,00 turun sebesar Rp4.431.274.267,00 atau 14,05% dibandingkan dengan beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp31.546.845.000,00.

Tabel 5.103. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.115.570.733,00	31.546.845.000,00	(4.431.274.267,00)	(14,05)
	Jumlah	**27.115.570.733,00**	**31.546.845.000,00**	**(4.431.274.267,00)**	**(14,05)**

Tabel 5.104. Rekonsiliasi antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LRA dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO

(dalam rupiah)

No	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.954.020.733,00	0,00	1.411.400.000,00	10.542.620.733,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	605.000.000,00	15.967.950.000,00	0,00	16.572.950.000,00
Jumlah		**12.559.020.733,00**	**15.967.950.000,00**	**1.411.400.000,00**	**27.115.570.733,00**

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp12.559.020.733,00, sedangkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp11.147.620.733,00 terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.411.400.000,00 yang merupakan pembayaran utang Tahun Anggaran 2024 kepada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan terdapat koreksi mutasi tambah BPK atas Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp15.967.950.000,00.

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dinas dapat dilihat pada lampiran 35.

6) Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.238.891.164,00	**Rp0,00**

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.238.891.164,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.238.891.164,00 atau 100% dibandingkan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dapat dilihat pada lampiran 35.a.

7) Beban Barang dan Jasa BOSP

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp66.257.700.837,00	**Rp0,00**

Beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp66.257.700.837,00 naik sebesar Rp66.257.700.837,00 atau 100% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dikarenakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS.

Tabel 5.105. Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BOSP dengan Beban Barang dan Jasa BOSP

(dalam rupiah)

No	Beban Barang dan Jasa BOSP	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Barang dan Jasa BOSP	66.759.329.833,00	44.647.338,00	0,00	66.803.977.171,00
Jumlah		**66.759.329.833,00**	**44.647.338,00**	**0,00**	**66.803.977.171,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja dan Beban Barang dan Jasa BOS berupa mutasi tambah yang merupakan kategori bukan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp44.647.338,00 dan terdapat mutasi kurang BPK sebesar Rp546.276.334,00;

Rincian Beban Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada lampiran 37.

8) Beban Barang dan Jasa BLUD

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp112.023.269.763,01	**Rp96.771.213.906,37**

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp112.023.269.763,01 naik sebesar Rp15.252.055.856,64 atau 15,76% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp Rp96.771.213.906,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Beban Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	112.023.269.763,01	96.771.213.906,37	15.252.055.856,64	15,76
Jumlah		**112.023.269.763,01**	**96.771.213.906,37**	**15.252.055.856,64**	**15,76**

Tabel 5.107. Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Beban Barang dan Jasa BLUD	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	113.618.236.324,60	34.645.359.384,80	36.240.325.946,39	112.023.269.763,01
Jumlah		**113.618.236.324,60**	**34.645.359.384,80**	**36.240.325.946,39**	**112.023.269.763,01**

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp113.618.236.324,60 sedangkan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp112.023.269.763,01 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.594.966.561,59, dengan rincian sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp34.645.359.384,80 terdiri dari:
   (1) Persediaan 2024 pada 32 BLUD sebesar Rp14.538.435.896,66;
   (2) Penambahan Utang Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp19.608.477.046,00 pada 32 BLUD; dan

(3) Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp498.446.442,14 pada Dinas Kesehatan.

b) Mutasi Kurang sebesar Rp36.240.325.946,39 terdiri dari:

(1) Pembayaran Utang Tahun 2024 sebesar Rp23.640.179.766,00 pada 32 BLUD; dan

(2) Persediaan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp12.578.658.160,39 pada 32 BLUD.

(3) Koreksi mutasi kurang BPK atas Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir senilai Rp21.488.020,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada lampiran 37.

c. Beban Bunga

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat saldo Beban Bunga periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 untuk Tahun 2025.

d. Beban Hibah

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp206.151.495.582,23	**Rp327.840.001.447,95**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp206.151.495.582,23 turun sebesar Rp121.688.505.865,72 atau 37,12% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp327.840.001.447,95. Belanja Hibah-LRA Tahun 2025 sebesar Rp246.484.811.969,92 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2025 sebesar Rp206.151.495.582,23 sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp40.333.316.387,69 yang terdiri dari:

Mutasi Tambah sebesar Rp12.069.171.442,49 yaitu:

a) Penambahan Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.082.640,00;

b) Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.182.598.509,10;

c) Hibah Keluar Aset Tanah, Gedung kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.226.977.113,39,00 yang terdiri dari:

- Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp416.376.667,00;

- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp421.243.496,00; dan
- Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 2.389.356.950,39.

d) Koreksi salah Rekening Aset Tetap pada Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp270.624.654,00.

e) Koreksi mutasi tambah BPK pada Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp6.461.513.180,00

Mutasi Kurang sebesar Rp52.673.112.484,18 yaitu:

a) Pembayaran Utang Tahun 2024 sebesar Rp21.073.472.850,00 yang terdiri dari;
   - Bebah Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.353.079.700,00; dan
   - Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.720.393.150,00.

b) Perbedaan Anggaran Utang 2024 sebesar Rp15.241.260.450,00 terdiri dari;
   - Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.652.730.150,00; dan
   - Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.588.530.300,00.

c) Piutang Lainnya Tahun 2025 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp32.213.838,88.

d) Koreksi Salah Rekening Aset Tetap pada Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 957.932.933,30.

e) Persediaan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.894.671.150,00;

f) Koreksi mutasi kurang BPK atas Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp473.561.262,00

Rincian Beban Hibah dapat dilihat pada lampiran 38.

e. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp53.270.248.310,00	**Rp30.951.229.000,00**

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp53.270.248.310,00 naik sebesar Rp22.319.019.310,00 atau 72,11% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp30.951.229.000,00. Belanja Bantuan Sosial–LRA Tahun 2025 sebesar Rp56.468.348.310,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp53.270.248.310,00. Perbedaan tersebut merupakan Perbedaan Anggaran Utang Tahun 2024 sebesar Rp3.701.900.000,00 yang terdiri dari;

Perbedaan Anggaran Utang Tahun 2024 sebesar Rp3.450.000.000,00 pada:

a) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu pada Dinas Sosial sebesar Rp400.000.000,00; dan
b) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.050.000.000,00
c) Koreksi mutasi tambah BPK atas Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu senilai 251.900.000,00

Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada lampiran 40.

f. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp9.876.012.699,72	**Rp8.307.558.197,49**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp9.876.012.699,72 naik sebesar Rp1.568.454.502,23 atau 18,88% dibandingkan dengan beban penyisihan piutang Tahun 2024 sebesar Rp8.307.558.197,49. Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp9.875.309.448,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108. Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban Penyisihan 2025 (Rp)
1	2	3
1	Piutang Pajak Daerah	7.958.220.949,56
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.798.982.529,75
3	Penyisihan Piutang Lainnya	118.809.220,41
Jumlah		**9.876.012.699,72**

Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang dilihat pada Lampiran 6.

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp960.165.746.526,44	**Rp872.473.727.001,52**

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional. Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp960.165.746.526,44 turun sebesar Rp87.692.019.524,92 atau 10,05% dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp872.473.727.001,52. Saldo beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp960.165.746.526,44 dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp160.426.694.573,90	**Rp164.938.426.930,51**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp160.426.694.573,90 turun sebesar Rp4.511.732.356,61 atau 2,74% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp164.938.426.930,51

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp118.397.463.812,49	**Rp73.163.063.231,91**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp118.397.463.812,49 naik sebesar Rp45.234.400.580,58 atau 6.1,83% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp73.163.063.231,91 yang merupakan Beban Penyusutan Bangunan Gedung.

c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp673.096.903.810,47	**Rp625.960.362.594,27**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp673.096.903.810,47 naik sebesar Rp47.136.541.216,20 atau 7,53% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp625.960.362.594,27.

d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp8.239.595.491,58	**Rp8.407.916.262,83**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp8.239.595.491,58 turun sebesar Rp168.320.771,25 atau 2,00% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp8.407.916.262,83.

e. Beban Penyusutan Properti Investasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp5.088.838,00	**Rp3.957.982,00**

Beban Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp5.088.838,00 naik sebesar Rp1.130.856,00 atau 28,57% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024 sebesar Rp3.957.982,00.

5.4.2.3 Beban Transfer

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp319.060.768.478,00	**Rp257.403.625.216,00**

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp319.060.768.478,00 naik sebesar Rp61.657.143.262,00 atau 23,95% dibandingkan dengan beban transfer Tahun 2024 sebesar Rp257.403.625.216,00.

Tabel 5.109. Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Transfer	319.060.768.478,00	257.403.625.216,00	61.657.143.262,00	23,95
Jumlah		**319.060.768.478,00**	**257.403.625.216,00**	**61.657.143.262,00**	**23,95**

Tabel 5.110. Rekonsiliasi antara Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Beban Transfer	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	528.350.989.472,00	0,00	209.290.220.994,00	319.060.768.478,00
Jumlah		**528.350.989.472,00**	**0,00**	**209.290.220.994,00**	**319.060.768.478,00**

Belanja Transfer-LRA sebesar Rp528.350.989.472,00 sedangkan Beban Transfer sebesar Rp319.060.768.478,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp209.290.220.994,00 yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Dana Desa karena transfer bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tidak dicatat dalam beban transfer-LO.

Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada lampiran 39.

5.4.2.4 Beban Tak Terduga

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp2.766.488.804,00	**Rp2.155.951.800,00**

Beban Tak Terduga periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp2.766.488.804,00 naik sebesar Rp610.537.004,00 atau 28,32% dibandingkan dengan Beban Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp2.155.951.800,00.

Belanja Tak Terduga menurut LRA adalah sebesar Rp2.766.488.804,00 tidak dapat perbedaan dengan Beban Tak Terduga menurut LO.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.097.917.087.760,35	**Rp127.398.575.629,42**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Surplus dari Operasi Tahun 2025 sebesar Rp1.097.917.087.760,35 naik sebesar Rp970.518.512.130,93 atau 761,80% dibandingkan dengan surplus Tahun 2024 sebesar Rp127.398.575.629,42. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.111. Surplus/Defisit Operasi

(dalam rupiah)

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2025 (Rp)
1	Pendapatan	4.845.826.836.301,42
2	Beban	3.747.909.748.541,07
	Surplus dari Operasi (1-2)	**1.097.917.087.760,35**

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp63.076.396.198,53)	**(Rp31.084.276.225,35)**

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya. Defisit dari Kegiatan Non operasional Tahun 2025 sebesar Rp63.076.396.198,53 naik sebesar Rp31.992.119.973,18 atau 102,92% dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp31.084.276.225,35. Saldo Defisit dari Kegiatan Non operasional sebesar Rp63.076.396.198,53. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 41.

5.4.4.1 Surplus Non Operasional

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp462.101.200,00	**Rp0,00**

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Surplus Non Operasional periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp462.101.200,00 naik sebesar Rp462.101.200,00 atau 100% dibandingkan dengan Surplus Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp462.101.200,00	**Rp0,00**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp462.101.200,00 naik sebesar Rp462.101.200,00 atau 100% dibandingkan dengan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi sebesar Rp462.101.200,00 merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar - Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penjualan kendaraan dinas BG 8 BZ Eks. BG 1368 BZ pada Sekretariat DPRD sebesar Rp61.591.200,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 25 April 2025 dan sebesar Rp20.000.000,00 yag disetor ke kas daerah pada tanggal 7 Juli 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:251/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 26 Mei 2025.

(2) Penjualan 1 (satu) Paket Scarp pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp35.200.000,00 yang disetor ke kas daerah

pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(3) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Ford Everest, Tahun 2011, Nopol 1126 BZ, nomor rangka : MNBLS4D10BW314717 Nomor Msein : WLAT1254674 sebesar Rp40.150.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(4) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk/type Yamaha/ 5 LM, Tahun 2003, Nopol BG 8860 BZ no rangka : MH35LM0023K169579 Nomor Mesin : 5LM-169638 sebesar Rp1.350.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(5) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk/type Yamaha/ Jupiter ATCW New L (4x4), Tahun 2012, Nopol BG 5565 BZ, nomor rangka : M-I355S002CK097497 Nomor Mesin : 55-S-097493 sebesar Rp2.800.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(6) Penjualan 1 (satu) Kendaraan Roda 4 merk/type Ford/New Everest, Tahun 2014, Nopol BG 1290 BZ, nomor rangka : MNBLS4D10EW507529, Nomor Mesin : WLAT1392059 sebesar Rp73.950.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(7) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp44.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(8) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.300.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(9) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp8.460.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(10) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Isuzul/NHR 55 EZ, Tahun 2009, Nopol BG 9102 BZ, nomor rangka : MHCNH55EY9J028273 Nomor Mesin : M028273 sebesar Rp41.400.000,00 pada Dinas Kesehatan yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(11) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.400.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

(12) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Mitsubish/Pajero Sport GLS, Tahun 2011, Nopol BG 1160 BZ, nomor rangka : MMBGNKG40CF006054 Nomor Mesin : 4D56UCDA6082 sebesar Rp79.500.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disetor ke kas daerah pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:493/KPTS/BPKAD-V/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

Rincian perhitungan Surplus Aset Non Lancar Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 41a.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp63.538.497.398,53	**Rp31.084.276.225,35**

Defisit Non Operasional periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp63.538.497.398,53 naik sebesar Rp32.454.221.173,18 atau 104,41% dibandingkan dengan Defisit Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp31.084.276.225,35. Realisasi sebesar Rp63.538.497.398,53 merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp63.538.497.398,53.

a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp66.726.101.389,53	**Rp31.084.276.225,35**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp66.726.101.389,53 naik sebesar Rp35.641.825.164,18 atau 114,66% dibandingkan dengan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp31.084.276.225,35. Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp66.726.101.389,53 yang terdiri dari:

1) Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.699.467.332,00 dengan uraian sebagai berikut:
   - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.721.907.145,00 pada Puskesmas Ulak Paceh berdasarkan

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:483/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.977.560.187,00 pada Puskesmas Bukit Selabu berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:483/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

Rincian Perhitungan Defisit Aset Non Lancar-Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran 41b.

2) Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp838.995.024,00 dengan uraian sebagai berikut:
   - Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp74.595.024,00 pada Puskesmas Ulak Paceh berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:483/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 10 Oktober 2025; dan
   - Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp764.400.000,00 pada Puskesmas Bukit Selabu berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:483/KPTS-BPKAD/2025 tanggal 10 Oktober 2025

   Rincian Perhitungan Defisit Aset Non Lancar- Jalan, Jaringan, dan Irigasi dapat dilihat pada Lampiran 41c

3) Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp48.889.267.300,53 merupakan laba rugi BUMD di Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:
   - Defisit PDAM Tirta Randik sebesar Rp44.478.284.081,95;
   - Defisit PT Petro Muba sebesar Rp13.649.758.803,00;
   - Surplus PT Muba Link sebesar Rp4.344.012,42;
   - Defisit PT Muba Electric Rugi Power sebesar Rp4.916.336.614,00;
   - Surplus PT. Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp14.150.768.186,00

4) Koreksi Investasi Permanen atas Hasil Audit Kantor Akuntan Publik atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD sebesar Rp10.110.767.742,00 yang merupakan koreksi rugi BUMD di Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:
   - Defisit PT Petro Muba sebesar Rp1.013.217,00;
   - Defisit PT Muba Link sebesar Rp223.158.325,00;
   - Defisit PT Muba Electric Rugi Power sebesar Rp9.887.125.064,00
   - Surplus PT Perkebunan Muba Lestari sebesar Rp3.621.364,00; dan
   - Defisit PT. Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp3.092.500,00.

5.4.5 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.034.840.691.561,82	**Rp96.314.299.404,07**

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Di Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami surplus sebesar Rp1.034.840.691.561,82 naik sebesar Rp938.526.392.157,75 atau 974,44% dibandingkan dengan defisit Tahun 2024 sebesar Rp96.314.299.404,07.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris. Arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan.
   a) Penerimaan Pajak Daerah;
   b) Penerimaan Retribusi Daerah;
   c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
   d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
   e) Penerimaan Dana Perimbangan;
   f) Penerimaan Dana Bagi Hasil;
   g) Penerimaan Dana Alokasi Umum;
   h) Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik;
   i) Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID);
   j) Penerimaan Dana Desa;
   k) Penerimaan Insentif Fiskal;
   l) Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi;
   m) Penerimaan Bantuan Keuangan;
   n) Penerimaan Hibah; dan
   o) Penerimaan dari Pendapatan Lainnnya.
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang dan Jasa;
   c) Pembayaran Bunga;
   d) Pembayaran Belanja Hibah;
   e) Pembayaran Bantuan Sosial;
   f) Pembayaran Tak Terduga; dan
   g) Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta Investasi Lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan

dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan Aset Tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan Arus Keluar Kas diperoleh dari pembelian Aset Tetap.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan Utang Jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Piutang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes.

Rincian Arus Masuk dan Keluar Kas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp838.901.184.346,18 dan Rp757.817.777.738,50 Saldo tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari Aktivitas Operasi berasal dari komponen berikut.

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp3.967.289.321.709,51 dan Rp3.754.904.023.322,66 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran; dan
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.128.388.137.363,33 dan Rp2.997.086.245.584,16 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.112. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas			
a.	Penerimaan Pajak Daerah	221.828.935.874,35	113.650.131.384,00
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	9.914.556.645,00	6.626.027.122,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.395.564.057,62	27.898.190.463,75
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	310.937.413.208,11	245.113.635.263,51
e.	Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	2.860.225.317.214,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	2.150.925.726.600,00	0,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	511.199.784.788,00	0,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	361.674.496.514,00	0,00
i.	Penerimaan Dana Desa	209.290.220.994,00	229.955.545.000,00
j.	Penerimaan Insentif Fiskal	0,00	24.672.901.000,00
k.	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	137.258.525.061,83	171.283.262.620,00
l.	Penerimaan Bantuan Keuangan	35.864.097.966,60	67.971.837.255,40
m.	Penerimaan Hibah	0,00	7.507.176.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**3.967.289.321.709,51**	**3.754.904.023.322,66**
Arus Kas Keluar			
a.	Pembayaran Pegawai	1.459.387.408.621,22	1.199.348.281.960,91
b.	Pembayaran Barang dan Jasa	834.930.090.186,19	1.166.182.290.152,25
c.	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
d.	Pembayaran Belanja Hibah	246.484.811.969,92	136.655.551.455,00
e.	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	56.468.348.310,00	5.385.000.000,00
f.	Pembayaran Tak Terduga	2.766.488.804,00	2.155.951.800,00
g.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	528.350.989.472,00	487.359.170.216,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**3.128.388.137.363,33**	**2.997.086.245.584,16**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**838.901.184.346,18**	**757.817.777.738,50**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp768.688.514.490,46)	**(Rp839.489.830.186,07)**

Menjelaskan aktivitas investasi non keuangan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas aktivitas investasi per 31 Desember 2025 defisit sebesar (Rp768.688.514.490,46) dengan rincian sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp874.847.200,00	**Rp43.967.400,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan berupa Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp874.847.200,00.

Tabel 5.113. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	837.771.200,00	0,00
b.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	23.075.000,00	664.400,00
c.	Penjualan Tetap Lainnya	14.001.000,00	43.303.000,00
Arus Masuk Kas		**874.847.200,00**	**43.967.400,00**

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp769.563.361.690,46	**Rp839.533.797.586,07**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp769.563.361.690,46 merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja Aset Tetap, penyertaan modal dan Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah yang memberi manfaat lebih. Rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.114. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Belanja Tanah	1.150.484.130,00	14.159.821.565,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	108.116.548.508,58	102.795.588.522,20
c.	Belanja Gedung dan Bangunan	123.976.665.935,08	161.139.070.395,87
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	488.599.757.196,80	519.469.106.288,00
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.054.567.424,00	17.020.210.815,00
f.	Belanja Aset Lainnya	79.228.870,00	0,00
g.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	26.586.109.626,00	24.950.000.000,00
Arus Keluar Kas		**769.563.361.690,46**	**839.533.797.586,07**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp0,00)	**(Rp0,00)**

Tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2025

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp 37.467.122,00	**(Rp31.242.896,00)**

Menjelaskan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), kiriman uang atas pemindahbukuan antar rekening milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan koreksi kesalahan kiriman uang atas koreksi pemindahbukuan rekening Kas Daerah. Arus Kas Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.467.122,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.115. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
-	**Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris**	**228.860.398.776,69**	**173.172.960.903,75**
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	228.317.057.979,69	171.984.348.568,75
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk	543.340.797,00	1.188.612.335,00
-	**Dikurangi Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris**	**228.822.931.654,69**	**173.204.203.799,75**
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	228.317.057.979,69	172.027.891.464,75
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar	505.873.675,00	1.176.312.335,00
Arus Kas Bersih		**37.467.122,00**	**-31.242.896,00**

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris:

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp228.860.398.776,69 terdiri:

a. Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Penerimaan yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU/LS sebesar Rp228.317.057.979,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116. Penyetoran PFK dengan Mekanisme SP2D UP/GU/TU/LS

(dalam Rupiah)

NO.	Uraian	Penerimaan
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	8.815.768.857,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	33.618.172.863,00
3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	32.639.742.780,00
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	924.620.179,00
5	Jaminan Kematian (JKM)	2.768.750.792,00
6	PPH Psl 21	29.423.193.082,25
7	Pajak Penghasilan Ps 22	2.235.811.405,12
8	Pajak Penghasilan Ps 23	2.042.627.678,51
9	PajakPenghasilan Ps 4 (2)	13.438.411.768,80
10	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	102.409.958.574,01
Jumlah		**228.317.057.979,69**

b. Koreksi kesalahan kiriman uang masuk sebesar Rp543.340.797,00 dapat dirinci sebagai berikut.

1) Pada tanggal 7 januari 2025 Kredit ke Kas daerah sebesar Rp14.459.075,00 yang merupakan kesalahan Pelimpahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang;
2) Pada tanggal 26 Maret 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar Rp37.467.122,00 merupakan setoran kelebihan PFK Gaji Tahun 2024;
3) Pada tanggal 20 Mei 2025 Kredit di kas Daerah sebesar Rp4.614.000,00 merupakan Kesalahan Transfer oleh PT. Kirana Musi Persada untuk pembayaran pajak air permukaan periode April 2025 yang seharusnya masuk ke Rekening kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4) Pada tanggal 26 Mei 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar RP49.300.180,00 merupakan double bayar sewa sound system pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5) Pada tanggal 5 Juli 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar Rp1.006.126,00 merupakan pencairan ganda dengan Nomor yang sama 16.06/04.0/000.110/LS/4.01.5.02.0.00.27/P1/3/2025 atas

nama CV. ZA Aldis Production untuk Pajak Penembahan Nilai (PPN) pada Sekretariat Daerah Kab. Muba;

6) Pada tanggal 5 Juli 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar Rp5.533.694,00 merupakan pencairan ganda dengan Nomor yang sama 16.06/04.0/000.110/LS/4.01.5.02.0.00.27/P1/3/2025 atas nama CV. ZA Aldis Production untuk Pajak Penghasilan Ps 23 (PPH) pada Sekretariat Daerah Kab. Muba;
7) Pada tanggal 3 Juli 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar Rp33.995.925,00 merupakan Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh PT. Petronesia Benimel yang seharusnya masuk ke Rekening kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8) Pada tanggal 15 Juli Kredit di kas daerah sebesar Rp1.859.064,00 merupakan Pembayaran Pajak MBLB PT. Bajana Tanah Liat yang seharusnya masuk ke Rekening kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9) Pada tanggal 1 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp100.737.557,00 merupakan pencarian ganda untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS bulan September 2025 pada Kecamatan Keluang;
10) Pada tanggal 1 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp4.311.103,00 merupakan pencairan ganda untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K bulan September 2025 pada Inspektorat;
11) Pada tanggal 1 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp55.551.251,00 merupakan pencairan ganda untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS bulan September 2025 pada Kecamatan Batanghari Leko;
12) Pada tanggal 1 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp70.688.230,00 merupakan pencairan ganda untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS bulan September 2025 pada Kecamatan Lalan.
13) Pada tanggal 3 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp12.411.960,00 merupakan kesalahan pemotongan PFK pada Kecamatan Sanga Desa dengan nomor SP2D 16.06/04.0/000051/LS/7.01.0.00.0.00.33.0000/P2/9/2025;
14) Pada tanggal 3 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp12.436.265,00 merupakan kesalahan pemotongan PFK pada Kecamatan Babat Toman dengan nomor SP2D 16.06/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.31.0000/P2/9/2025;
15) Pada tanggal 3 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp46.656.159,00 merupakan kesalahan pemotongan PFK pada Dinas Kesehatan dengan nomor SP2D 16.06/04.0/000359/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/9/2025;
16) Pada tanggal 3 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp7.609.831,00 merupakan kesalahan pemotongan PFK pada Kecamatan Lalan. dengan nomor SP2D 16.06/04.0/0000631/LS/7.01.0.00.0.00.39.0000/P2/9/2025;

17) Pada tanggal 3 September 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp21.060.867,00 merupakan kesalahan pemotongan PFK pada Dinas Ketahanan Pangan dengan nomor SP2D 16.06/04.0/000051/LS/2.09.0.00.0.00.12.0000/P2/9/2025 dan dengan nomor SP2D 16.06/04.0/000052/LS/2.09.0.00.0.00.12.0000/P2/9/2025;
18) Pada tanggal 11 September 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar Rp400.000.00 yang merupakan kelebihan pengembalian gaji a.n Obi Sandra pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin;
19) Pada tanggal 30 September 2025 Kredit ke Kas daerah sebesar Rp1.210.008,00 yang merupakan Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame Apotek Sehati Kecamatan Sungai Lilin yang telah di pindahbukukan ke rekening wajib pajak atas nama kosim ke rekening Maybank;
20) Pada tanggal 14 Oktober 2026 Kredit di kas Daerah sebesar Rp8.040.000,00 yang merupakan Pembayaran Pajak PPH Psl 21 pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dan telah di pindahbukukan ke Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
21) Pada tanggal 17 Oktober 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar Rp2.151.123,00 yang merupakan kelebihan Bayar Opsen Pajak MBLB CV. Mecca Karya Mandiri pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan telah di pindahbukukan ke rekening wajib pajak atas nama Mulyadi di rekening Bank BRI;
22) Pada tanggal 22 Oktober 2025 Kredit di kas Daerah sebesar Rp1.705.274,00 yang merupakan 2 kali pembayaran Opsen Pajak MBLB CV. Trida Sarana yang seharusnya masuk ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi sumatera Selatan ;
23) Pada tanggal 14 November 2025 Kredit di Kas Daerah sebesar Rp28.800.000,00 yang merupakan pencairan ganda untuk pembayaran atas gaji pegawai honorer / kontrak Bulan September 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
24) Pada tanggal 1 Desember 2025 Kredit ke Kas Daerah sebesar Rp1.124.328,00 yang merupakan 2 kali Pembayaran Opsen Pajak MBLB CV. Shaqueena dan CV. Agung Sejati yang seharusnya masuk ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi sumatera Selatan;
25) Pada tanggal 2 Desember 2025 Kredit ke Kas Daerah sebesar Rp211.655,00 yang merupakan kesalahan Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh wajib Pajak CV.Sura Maju yang seharusnya masuk ke rekening kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
26) Pada tanggal 10 Desember 2025 Kredit di kas daerah sebesar Rp20.000.000,00 merupkan pencairan ganda untuk pembayaran

bantuan hibah uang untuk bantuan alat pertukangan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris:

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp228.822.931.654,69 terdiri dari.

a. Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU/LS sebesar Rp228.317.057.979,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117. Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU/LS

(dalam rupiah)

NO.	Uraian	Pengeluaran
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	8.815.768.857,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	33.618.172.863,00
3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	32.639.742.780,00
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	924.620.179,00
5	Jaminan Kematian (JKM)	2.768.750.792,00
6	PPH Psl 21	29.423.193.082,25
7	Pajak Penghasilan Ps 22	2.235.811.405,12
8	Pajak Penghasilan Ps 23	2.042.627.678,51
9	PajakPenghasilan Ps 4 (2)	13.438.411.768,80
10	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	102.409.958.574,01
Jumlah		**228.317.057.979,69**

b. Koreksi kesalahan kiriman uang keluar sebesar Rp505.873.675,00 merupakan pengembalian atas kesalahan kiriman uang masuk dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.118. Koreksi Kesalahan Kiriman Uang

(dalam rupiah)

No. SP2D	Tanggal SP2D	Tanggal Rekening Koran	Jumlah
16.06/04.0/000110/LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PI/3/2025	27 Maret 2025	27 Maret 2025	55.840.000,00
B-900/091/BPKAD-III/2025	5 Agustus 2025	5 Agustus 2025	4.614.000,00
B-900/090/BPKAD-III/2025	5 Agustus 2025	5 Agustus 2025	33.995.925,00

No. SP2D	Tanggal SP2D	Tanggal Rekening Koran	Jumlah
B-900/102/BPKAD-III/2025	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025	1.859.064,00
16.06/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.32.0000/P2/8/2025	01 September 2025	01 September 2025	3.260.295,00
16.06/04.0/000075/LS/6.01.0.00.0.00.44.0000/P2/8/2025	01 September 2025	01 September 2025	4.311.103,00
16.06/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0.00.35.0000/P2/7/2025	01 September 2025	01 September 2025	55.551.251,00
16.06/04.0/000061/LS/7.01.0.00.0.00.39.0000/P2/8/2025	01 September 2025	01 September 2025	70.688.230,00
16.06/04.0/000059/LS/7.01.0.00.0.00.32.0000/P2/8/2025	01 September 2025	01 September 2025	97.477.262,00
B-900/112/BPKAD-III/2025	03 September 2025	03 September 2025	100.175.082,00
B-900/120/BPKAD-III/2025	15 September 2025	15 September 2025	542.625,00
B-900/118/BPKAD-III/2025	15 September 2025	15 September 2025	13.782.800,00
B-900/119/BPKAD-III/2025	15 September 2025	15 September 2025	133.650,00
B-900/121/BPKAD-III/2025	25 September 2025	25 September 2025	400.000,00
B-900/142/BPKAD-III/2025	04 November 2025	04 November 2025	1.210.008,00
B-900/143/BPKAD-III/2025	04 November 2025	04 November 2025	8.040.000,00
B-900/146/BPKAD-III/2025	10 November 2025	10 November 2025	1.705.274,00
16.06/04.0/001038/LS/1.04.1.03.2.10.05.0000/PPR1/11/2025	12 November 2025	12 September 2025	28.800.000,00
B-900/151/BPKAD-III/2025	2 Desember 2025	2 Desember 2025	2.151.123,00
16.06/04.0/000155/LS/2.17.0.00.0.00.19.0-000/PPR1/11/2025	8 Desember 2025	8 Desember 2025	20.000.000,00
B-900/1691/BPKAD-III/2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025	1.124.328,00
16.06/04.0/000059/LS/6.01.0.00.0.00.32.0000/P2/8/2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025	211.655,00
Total			**505.873.675,00**

Selisih Kesalahan Koreksi kiriman uang masuk sebesar Rp543.340.797,00 dan koreksi kiriman uang keluar sebesar Rp505.873.675,00 adalah sebesar Rp37.467.122 yang merupakan kelebihan PFK Gaji Tahun 2024 sebesar Rp37.467.122,00 dan telah di setor ke kas Daerah pada tanggal 26 Maret 2025.

5.5.5 Ikhtisar Laporan Arus Kas

1. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas per 1 Januari 2025 sebesar Rp50.020.804.636,01 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian.

Tabel 5.119. Saldo Awal Kas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	20.411.627.231,24	99.296.440.410,68
Kas di Bendahara Pengeluaran	70.644.339,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	16.360,00	5.910.647,00
Kas di BLUD	21.023.231.308,77	17.757.416.867,90
Kas di Bendahara FKTP	0,00	51.230.510,00
Kas di Bendahara BOS	34.653.000,00	21.000.000,00
Kas Lainnya	1.899.999,00	4.512.559.948,00
Kas Dana BOK Puskesmas	8.478.732.398,00	0,00
Julmah Saldo Akhir Kas	**50.020.804.636,01**	**121.644.558.383,58**

2. Perubahan/Mutasi Kas

Perubahan/mutasi kas sepanjang per 31 Desember 2025 menginformasikan tentang kenaikan/penurunan kas dari berbagai aktivitas, dengan rincian.

Tabel 5.120. Kenaikan (Penurunan) Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kenaikan Kas Operasi	838.901.184.346,18	757.817.777.738,50
2	Penurunan Kas Investasi	(768.688.514.490,46)	(839.489.830.186,07)
3	Kenaikan Kas Pendanaan	0,00	0,00
4	Kenaikan Kas Transitoris	37.467.122,00	(31.242.896,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas		**70.250.136.977,72**	**(81.703.295.343,57)**

a. Dari data tersebut berarti terdapat kenaikan kas bersih Tahun 2025 sebesar Rp70.250.136.977,72 yaitu selisih antara kenaikan kas dari aktivitas operasi dengan penurunan kas dari aktivitas investasi dan kenaikan kas transitoris. Selain data tersebut, terdapat perubahan mutasi kas yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah yang merupakan SP2D LS pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 16.06/04.0/001128/LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PPR1/12/2024 sebesar Rp37.779.096 dan 16.06/04.0/001130/LS/4.01.5.02.0.00.27.0000/PPR1/12/2024 Sebesar Rp16.000.000 yang didebit pada tanggal 2 Januari 2025

3. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.217.562.517,73 yang merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121. Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kas di Kas Daerah	86.783.266.056,28	20.411.627.231,24
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	898.697.059,00	70.644.339,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	36.908.624,00	16.360,00
4	Kas di BLUD	26.904.128.168,45	21.023.231.308,77
5	Kas di Bendahara BOS	181.686.000,00	34.653.000,00
6	Kas Lainnya	1.899.999,00	1.899.999,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	5.410.976.611,00	8.478.732.398,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**120.217.562.517,73**	**50.020.804.636,01**

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan sebagai berikut.

Tabel 5.122. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
EKUITAS AWAL;	7.970.883.849.249,46	7.686.534.601.891,04
SURPLUS/DEFISIT-LO;	1.031.653.087.570,82	96.314.299.404,07
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	(1.225.197.004.074,01)	188.034.947.954,35
Ekuitas Koreksi Pencatatan Kas Setara Kas	(53.379.096,00)	53.379.096,00
Ekuitas Koreksi Pencatatan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.999.046.766,08)	(1.403.163.003,00)
Ekuitas Koreksi PencatatanPiutang Transfer Pemerintah Pusat	(558.436.605.000,00)	-
Ekuitas Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang	0,03	-
Koreksi Nilai Persediaan	(995.542.900,00)	-
Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah	-	135,00
Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	(1.619.391.565,00)
Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	178.105.000,00	-
Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	(4.716.378.560,14)
Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	(638.548.086.335,19)	265.940.298.736,40
Ekuitas Koreksi Pencatatan Tagihan Jangka Panjang	-	(121.405.312,00)
Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain	(3.153.160.775,82)	(2.922.450.085,91)
Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.754.773.828,87)	(5.538.560,00)
Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	349.680.217,93	-
Ekuitas Koreksi Pencatatan Utang Belanja	1.482.479.410,00	(67.170.402.927,00)
Ekuitas Koreksi Pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya	(12.266.674.000,00)	-
EKUITAS AKHIR	7.777.339.932.746,27	7.970.883.849.249,46

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp7.970.883.849.249,46	**Rp7.686.534.601.891,04**

Saldo Ekuitas Awal sebesar Rp7.970.883.849.249,46 merupakan saldo awal Ekuitas dana Tahun 2025. Ekuitas Awal Tahun 2025 tersebut naik sebesar Rp284.349.247.358,42 atau 3,70% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp7.686.534.601.891,04.

5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Surplus Laporan Operasional (LO)

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.034.840.691.561,82	**Rp96.314.299.404,07**

Surplus Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.034.840.691.561,82 merupakan Surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Surplus Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 naik sebesar Rp938.526.392.157,75 atau 974,44 % dibandingkan nilai Surplus Tahun 2024 sebesar Rp96.314.299.404,07.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp1.225.197.004.074,01)	**Rp188.034.947.954,35**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Tahun 2025 sebesar (Rp1.225.197.004.074,01), turun sebesar Rp1.413.231.952.028,36 atau 751,58% dibandingkan nilai Tahun 2024 sebesar Rp188.034.947.954,35 yang terdiri dari:

a. Ekuitas Koreksi Pencatatan Kas Setara Kas

Koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya sebesar (Rp53.379.096,00) atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah yang merupakan SP2D LS pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 16.06/04.0/001128/LS/4.01.5.02. 0.00.27.0000/PPR1/12/2024 sebesar (Rp37.379.096,00) dan 16.06/04.0/001130/LS/4.01.5.02. 0.00.27 .0000/PPR1/12/2024 Sebesar (Rp16.000.000,00) yang didebit pada tanggal 2 Januari 2025;

b. Ekuitas Koreksi Pencatatan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Koreksi atas Pembayaran pengembalian kelebihan belanja atas temuan BPK berdasarkan audit LKPD yang sudah di setor ke Kas Daerah pada 1 Januari s.d 28 Februari 2025 sebesar (Rp1.999.046.766,08) yang terdiri dari :

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp2.585.000,00);
2) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar (Rp3.573.467,00);
3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar (Rp1.091.465,00);
4) Dinas Kesehatan sebesar (Rp3.410.000,00);
5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp1.573.996.828,12);
6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar (Rp30.680.870,00);
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar (Rp5.253.007,00);
8) Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar (Rp2.036.600,00);

9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp40.368.520,00);
10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp87.291.534,33);
11) Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar (Rp36.980.237,00);
12) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp10.616.196,48);
13) Dinas Perhubungan sebesar (Rp2.035.000,00);
14) Dinas Perikanan sebesar (Rp36.465.022,00);
15) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp14.250.369,75);
16) Dinas Sosial sebesar (Rp1.896.000,00);
17) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar (Rp1.750.000,00);
18) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar (Rp10.360.000,00);
19) Dinas Perkebunan sebesar (Rp88.666.649,40);
20) Kecamatan Babat Toman sebesar (Rp45.740.000,00);

c. Ekuitas Koreksi PencatatanPiutang Transfer Pemerintah Pusat

Koreksi Lebih catat Piutang Dana Transfer Umum pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar (Rp558.436.605.000,00) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian:

1) Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB sebesar (Rp181.996.936.000,00);
2) Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21 sebesar (Rp7.604.767.000,00);
3) Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar (Rp194.367.000,00);
4) Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT sebesar (Rp552.000,00);
5) Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi sebesar (Rp277.001.985.000,00);
6) Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar (Rp77.013.035,00);
7) Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar (Rp2.948.139.003,00);
8) Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar (Rp87.303.852.962,00);
9) Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar (Rp1.308.993.000,00);

d. Ekuitas Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang

Pembulatan jurnal sebesar Rp0.03 yang terdiri dari

1) Penyisihan Piutang PBBP2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp0,01;
2) Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp0,01;
3) Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp0,01;

e. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025 sebesar (Rp995.542.900,00) yang merupakan koreksi saldo awal yang terdiri dari:

1) Kurang catat Persediaan atas Bahan Cetak sebesar Rp1.568.100,00 pada Sekretariat Daerah;
2) Lebih catat Persediaan atas Suvenir/Cendera Mata sebesar (Rp6.211.000,00) pada Sekretariat Daerah;
3) Lebih catat Persediaan atas Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar (Rp994.800.000,00) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikarenakan kesalahan rekening dari persediaan menjadi belanja modal;
4) Kurang catat atas Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.900.000,00;

f. Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Koreksi kurang catat atas Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp178.105.000,00 disebabkan karena koreksi kesalahan rekening dari belanja pemeliharaan pemeliharaan Gedung ke belanja modal Gedung dan bangunan;

g. Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan

Koreksi atas Pencatatan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(638.548.086.335,19) yang terdiri dari :

1. Koreksi kurang catat atas Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perkebunan sebesar Rp789.713,74;
2. Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada BPKAD sebesar Rp0,03.
3. Koreksi hasil pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun lalu setelah perbaikan masa manfaat pada 23 SKPD sebesar Rp3.119.151.620,20
4. Koreksi Penyesuaian atas Akumulasi Bukan Temuan - Pengurangan atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun lalu setelah perbaikan masa manfaat pada 4 SKPD sebesar Rp154.780.439,00
5. Koreksi penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun lalu setelah perbaikan masa manfaat pada 2 SKPD sebesar (Rp82.995.023,67)
6. Koreksi hasil pemeriksaan LKPD tahun 2025 atas Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun lalu setelah perbaikan masa manfaat pada 46 SKPD sebesar (Rp40.337.675.733,09)
7. Koreksi Penyesuaian atas Akumulasi Bukan Temuan LKPD tahun 2025 atas Penambahan Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Tahun Lalu sebesar (Rp17.750.815.687,22)
8. Koreksi Temuan LKPD tahun 2025 atas Penambahan Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Tahun Lalu sebesar (Rp583.651.321.664,18)

h. Ekuitas Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain

Koreksi atas pencatatan asset lain-lain sebesar (Rp3.153.160.775,82) yang terdiri dari:

1) Koreksi kurang catat atas setoran kurang volume sebesar Rp1.292.891.939,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk rekening jasa konsultasi pada 196 paket kegiatan swakelola tipe I.;

2) Pembayaran atas setoran kurang volume sebesar (Rp4.446.052.714,82)yang terdiri dari :
    1) Dinas Kesehatan sebesar (Rp51.489.328,16);
    2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp2.744.434.916,59);
    3) Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar (Rp29.564.263,98);
    4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp83.933.516,49);
    5) Dinas Perkebunan sebesar (Rp105.000.000,00);
    6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp1.326.908.742,60);
    7) Kecamatan Sanga Desa sebesar (Rp10.000.000,00);
    8) Sekretariat Daerah sebesar (Rp8.000.000,35);
    9) Sekretariat DPRD sebesar (Rp86.721.946,65);

i. Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi atas Pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp 11.754.773.828,87) yang terdiri dari :

1) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp0,01
2) Koreksi kurang catat atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp79.000,00;
3) Koreksi lebih catat atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp39.604.800,00);
4) Penyesuaian atas Akumulasi Amortisasi Temuan LKPD tahun 2025 atas Penambahan Akumulasi Amortisasi ATB pada 23 SKPD sebesar (Rp5.916.868.046,08)
5) Penyesuaian atas Akumulasi Amortisasi Bukan Temuan LKPD tahun 2025 atas Penambahan Akumulasi Amortisasi ATB pada 29 SKPD sebesar (Rp5.798.379.982,80)

j. Ekuitas Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Koreksi atas Pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp349.680.217,93 yang terdiri dari :

(a) Koreksi Kurang catat atas Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp111.850.176,00;
(b) Kurang catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp247.541.998,93 yang terdiri dari:
    a) Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp29.025.475,00;
    b) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp2.244.687,00;
    c) Kecamatan Babat Supat sebesar Rp9.072.291,00;
    d) Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp22.426.119,00;
    e) Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp18.281.648,00;
    f) Kecamatan Lalan sebesar Rp25.516.171,00;
    g) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp20.280.574,93;
    h) Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp19.894.459,00;
    i) Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp19.406.414,00;
    j) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp14.046.074,00;
    k) Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp3.731.670,00;

l) Kecamatan Keluang sebesar Rp13.257.922,00;
m) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp6.210.543,00;
n) Kecamatan Lais sebesar Rp20.572.834,00;
o) Kecamatan Sekayu sebesar Rp23.575.117,00;

(c) Lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp9.711.957,00) yg terdiri dari:
1) Puskesmas Babat Toman sebesar (Rp6.045.290,00);
2) Puskesmas Ulak Paceh sebesar (Rp3.666.667,00);

k. Ekuitas Koreksi Pencatatan Utang Belanja

Koreksi atas pencatatan utang belanja sebesar Rp1.482.479.410,00 yang terdiri dari:

1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.150.650,00;
2) Utang Belanja Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp198.272.010,00;
3) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp650.766.300,00 yang disebabkan karena terdapat koreksi dalam pencatatan utang, dimana Tahun 2024 utang tersebut yang dicatat pada rekening belanja barang dan jasa tetapi pada Tahun 2025 dibayarkan melalui rekening belanja modal senilai Rp648.766.300,00 sedangkan sisanya senilai Rp2.000.000,00 disebabkan karena kesalahan pencatatan nilai utang tahun 2024 dimana nilai utang yang tercatat pada Tahun 2024 Rp68.440.550,00 sedangkan yang seharusnya dibayarkan Rp66.440.550,00;
4) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.300.000,00;
5) Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp400,00 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan utang tahun 2024 dimana nilai utang yang tercatat pada Tahun 2024 Rp158.242.000,00 sedangkan yang dibayar tahun 2025 sebesar Rp158.241.600,00;
6) Koreksi sebesar Rp18.703.000,00 merupakan kesalahan pencatatan Utang pada tahun 2024 terkait Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mushola Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Surat Nomor: 31/SPK/PPK-Sekrt/APBDP/PERKIM/2024 dimana nilai tersebut sudah tercatat sebesar Rp18.703.000,00 sedangkan pada Tahun 2025 nilai tersebut tidak dibayarkan 2025 dikarenakan kegiatan fisik yang terkait tidak memungkinkan untuk di selesaikan sesuai dengan Nomor Surat: 85/SCM/XI/2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.703.000,00;
7) Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Total sebesar Rp350.134.000,00 yang terdiri dari;
a) Dinas Kesehatan sebesar Rp250.544.000,00 dikarenakan kesalahan pencatatan utang yang sebelumnya pada Dinas

Kesehatan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir berdasarkan Nomor Surat: B900.1.15.1/7327 /KES /2025;

b) Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp99.590.000,00 dikarenakan kesalahan pencatatan utang menjadi belanja modal Gedung dan bangunan;

8) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp250,00;

9) Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp449.655.000,00 yang merupakan koreksi karena kesalahan pencatatan utang ditahun 2024 pada 2 paket pekerjaan dengan total koreksi Rp2.212.000,00 dan sisanya senilai Rp447.443.000,00 disebabkan karena merupakan nilai kontrak yang tercatat ganda di SPH di Tahun 2024 terkait Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kepala Desa Panai Kecamatan Sanga Desa;

10) Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp387.091.000,00 yang disebabkan karena terdapat koreksi dalam pencatatan utang, dimana Tahun 2024 utang tersebut yang dicatat pada rekening belanja barang dan jasa tetapi pada Tahun 2025 dibayarkan melalui rekening belanja modal senilai Rp387.091.000,00;

11) Koreksi atas Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung berdasarkan Temuan BPK Lampiran 23 Utang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp18.703.000,00)

12) Koreksi atas Utang Pemeliharaan Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 dengan Pembayaran SP2D No: 16.06/04.0/000517/LS/1.03.2.15.0.00.04.0000/P2/8/2025, tanggal 27 Agustus 2025 & 16.06/04.0/000518/LS/1.03.2.15.0.00.04. 0000/P2/8/2025, tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp222.703.000,00)

13) Koreksi atas Utang Hibah Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 dengan Pembayaran SP2D No: 16.06/04.0/000564/LS/1.04.1.03.2.10.05.0000/P2/8/2025, tanggal 1 Agustus 2025 berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp7.448.000,00)

14) Koreksi Utang Hibah Tahun 2024 yang belum tercatat pada Tahun 2025 atas 5 SP2D berdasarkan Lampiran 23 Temuan Pemeriksaan BPK terkait Utang pada Dinas Perkebunan (Rp348.739.200,00)

l. Ekuitas Koreksi Pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya

Koreksi Kode Rekening dari Pendapatan-LO ke Ekuitas atas Jurnal Pencatatan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA. 2025 terkait Kelebihan Transfer Pusat Tahun 2024 berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 sebesar (Rp12.266.674.000,00)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp7.780.527.536.737,27	**Rp7.970.883.849.249,46**

Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp7.780.527.536.737,27. turun sebesar Rp190.356.312.512,19 atau 2,39% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp7.970.883.849.249,46.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 821).

Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak antara 1030-1050 Bujur Timur dan 1,30-40 Lintang Selatan yang terbentang dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai bagian timur dengan luas wilayah 14.265,96 km^2 yang terdiri atas 14 kecamatan dan 263 desa.

Kondisi geografis tersebut memberikan tipologi kabupaten hampir 53% dari luasnya merupakan dataran rendah atau rawa-rawa, sebesar 12% berupa dataran tinggi dan bergelombang dan sisanya 35% berupa tanah datar. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah sekitarnya dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten PALI;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

BAB VII
PENUTUP

Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1	Laporan Realisasi Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	a. Pendapatan	4.290.369.812.775,59	3.968.164.168.909,51
	b. Belanja	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79
	c. Surplus / (Defisit)	(23.470.262.133,01)	96.798.779.481,72
	d. Penerimaan Pembiayaan	50.056.371.759,01	50.002.992.663,01
	e. Pengeluaran Pembiayaan	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00
	f. Pembiayaan Netto	23.470.262.133,01	23.416.883.037,01
	g. SiLPA	0,00	120.215.662.518,73

2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	a. Saldo Anggaran Lebih awal	40.017.909.259,01	119.544.525.633,58
	b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	39.964.530.163,01	131.728.424.206,58
	c. Subtotal (a-b)	53.379.096,00	(12.183.898.573,00)
	d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berialan	120.215.662.518,73	50.056.371.759,01
	e. Subtotal (c+d)	120.269.041.614,73	37.872.473.186,01
	f. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	(53.379.096,00)	2.092.056.977,00
	g. Lain-lain	0,00	53.379.096,00
	h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	120.215.662.518,73	40.017.909.259,01

3	Neraca	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	a. Aset	7.951.748.096.657,48	8.533.883.978.894,68
	b. Kewajiban	171.220.559.920,21	563.000.129.645,22
	c. Ekuitas	7.780.527.536.737,27	7.970.883.849.249,46

4	**Laporan Operasional**	**Tahun 2025 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
	Kegiatan Operasional		
	- Pendapatan	4.845.826.836.301,42	3.904.965.935.003,18
	- Beban	3.747.909.748.541,07	3.777.567.359.373,76
	- Surplus Defisit dari Operasional	1.097.917.087.760,35	127.398.575.629,42
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(63.076.396.198,53)	(31.084.276.225,35)
	Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	1.034.840.691.561,82	96.314.299.404,07
	Pos Luar Biasa		
	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Surplus/Defisit- LO	1.034.840.691.561,82	96.314.299.404,07

5	**Laporan Arus Kas**	**Tahun 2025 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
	a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	838.901.184.346,18	757.817.777.738,50
	b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(768.688.514.490,46)	(839.489.830.186,07)
	c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	37.467.122,00	(31.242.896,00)
	e. Kenaikan/Penurunan Kas	70.250.136.977,72	(81.703.295.343,57)
	c. Saldo Awal Kas	50.020.804.636,01	121.644.558.383,58
	d. Saldo Akhir Kas	120.217.562.517,73	50.020.804.636,01

6	**Laporan Perubahan Ekuitas**	**Tahun 2025 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
	a. Ekuitas Awal	7.970.883.849.249,46	7.686.534.601.891,04
	b. Surplus/Defisit- LO	1.034.840.691.561,82	96.314.299.404,07
	e. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(1.225.197.004.074,01)	188.034.947.954,35
	d. Ekuitas Akhir	7.780.527.536.737,27	7.970.883.849.249,46

Demikian penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, untuk dapat dijadikan sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran VIII : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1		2	4	5	6	7 = 4+5-6
		PIUTANG PAJAK	**107.208.561.154,57**	**12.323.430.613,00**	**14.743.551.184,46**	**104.788.440.583,11**
1	BPPRD	Pajak Reklame	106.146.439,00	118.604.655,00	38.128.454,00	186.622.640,00
2	BPPRD	Pajak Air Tanah	873.639.127,00	32.372.543,00	6.885.250,00	899.126.420,00
3	BPPRD	Pajak Sarang Burung Walet	3.800.000,00	470.000,00	2.050.000,00	2.220.000,00
4	BPPRD	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	157.611.527,00	658.211.734,00	34.897.063,00	780.926.198,00
5	BPPRD	PBB Pedesaan Perkotaan	90.160.280.880,00	9.948.829.171,00	897.293.448,00	99.211.816.603,00
6	BPPRD	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	1.240.028.218,00	235.071.100,00	317.160.480,00	1.157.938.838,00
7	BPPRD	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	604.129.528,00	386.049.857,00	316.607.877,00	673.571.508,00
8	BPPRD	PBJT- Tenaga Listrik	13.416.185.208,57	922.210.149,00	13.103.550.584,46	1.234.844.773,11
9	BPPRD	PBJT- Jasa Perhotelan	606.912.863,00	9.559.500,00	15.887.228,00	600.585.135,00
10	BPPRD	PBJT- Jasa Parkir	37.492.700,00	4.862.500,00	11.090.800,00	31.264.400,00
11	BPPRD	PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	2.334.664,00	7.189.404,00	0,00	9.524.068,00
		PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**337.355.660,00**	**0,00**	**0,00**	**337.355.660,00**
1	DISKOMINFO	MENARA TELEKOMUNIKASI	336.530.660,00	0,00	0,00	336.530.660,00
2	DLH	LABORATORIUM	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
		PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**7.988.751.082,15**	**4.145.710.958,83**	**7.445.769.016,49**	**4.688.693.024,49**
1	DINKES	BLUD Puskesmas Ngulak	5.420.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00
2	DINKES	BLUD Puskesmas Babat Toman	17.328.000,00	6.048.000,00	17.328.000,00	6.048.000,00
3	DINKES	BLUD Puskesmas Ulak Paceh	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
4	DINKES	BLUD Puskesmas Tanah Abang	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
5	DINKES	BLUD Puskesmas Lubuk Bintialo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINKES	BLUD Puskesmas Bukit Selabu	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1		2	4	5	6	7 = 4+5-6
7	DINKES	BLUD Puskesmas Cinta Karya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINKES	BLUD Puskesmas Suka Damai	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINKES	BLUD Puskesmas Sidorahayu	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINKES	BLUD Puskesmas Tebing Bulang	5.745.000,00	0,00	5.745.000,00	0,00
11	DINKES	BLUD Puskesmas Jirak	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
12	DINKES	BLUD Puskesmas Balai Agung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINKES	BLUD Puskesmas Lumpatan	0,00	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00
14	DINKES	BLUD Puskesmas Lais	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
15	DINKES	BLUD Puskesmas Gardu Harapan	4.062.000,00	0,00	4.062.000,00	0,00
16	DINKES	BLUD Puskesmas Teluk Kijing	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00
17	DINKES	BLUD Puskesmas Tanjung Kerang	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
18	DINKES	BLUD Puskesmas Sungai Lilin	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DINKES	BLUD Puskesmas Sri Gunung	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
20	DINKES	BLUD Puskesmas Karya Maju	20.523.000,00	0,00	20.523.000,00	0,00
21	DINKES	BLUD Puskesmas Mekarjaya	873.000,00	0,00	873.000,00	0,00
22	DINKES	BLUD Puskesmas Bayung Lencir	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DINKES	BLUD Puskesmas Suka Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DINKES	BLUD Puskesmas Peninggalan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DINKES	BLUD Puskesmas Sumber Harum	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DINKES	BLUD Puskesmas Berojaya Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DINKES	BLUD Puskesmas Bandar Agung	11.000.000,00	16.648.000,00	11.000.000,00	16.648.000,00
28	DINKES	BLUD Puskesmas Karang Mukti	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DINKES	BLUD Puskesmas Air Balui	26.016.000,00	22.764.000,00	26.016.000,00	22.764.000,00
30	DINKES	BLUD RSUD Sungai Lilin	96.336.700,00	56.500.000,00	22.243.300,00	130.593.400,00
31	DINKES	BLUD RSUD Bayung Lencir	20.449.602,00	2.388.524.100,00	3.401.000,00	2.405.572.702,00
32	DINKES	BLUD RSUD Sekayu	5.389.526.232,07	5.300.518,00	4.902.988.907,41	491.837.842,66
33	RSUD Sekayu	RSUD Sekayu - Potongan iuran wajib	0,00	94.921,00	94.921,00	0,00

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1		2	4	5	6	7 = 4+5-6
34	RSUD Sekayu	Piutang Lainnya (sewa atm RSUD Sekayu)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
35	BPKAD	BPKAD - BPJS	2.387.897,00	0,00	0,00	2.387.897,00
36	BPKAD	BPKAD - Lelang Kendaraan	204.028.000,00	0,00	204.028.000,00	0,00
37	BPKAD	BPKAD - Lelang Alat Kedokteran	171.642.000,00	0,00	171.642.000,00	0,00
38	BPKAD	BPKAD - PFK	37.467.122,00	7.361.083,00	37.467.122,00	7.361.083,00
39	SKPD	D. PERKIM - PFK	0,00	34.376.000,00	0,00	34.376.000,00
40	SKPD	D. PERIKANAN - PFK	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41	SKPD	BPPRD - Denda Keterlambatan	0,00	140.650.176,96	0,00	140.650.176,96
42	SKPD	BPPRD - Denda Keterlambatan	0,00	992.464.112,74	0,00	992.464.112,74
43	SKPD	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH (SETORAN BPK)	1.962.066.529,08	450.815.047,13	1.999.046.766,08	413.834.810,13
		PIUT. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-Dana Perimbangan	**558.436.605.000,00**	**1.114.240.284.000,00**	**558.436.605.000,00**	**1.114.240.284.000,00**
1	BPKAD	Dana Bagi Hasil Pajak	558.436.605.000,00	1.114.240.284.000,00	558.436.605.000,00	1.114.240.284.000,00
		PIUT. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	**39.272.678.649,60**	**60.692.486.738,00**	**39.678.175.649,60**	**60.286.989.738,00**
1	BPKAD	Bagi Hasil Provinsi	12.352.473.483,00	24.566.436.538,00	12.352.473.483,00	24.566.436.538,00
2	BPKAD	Bantuan keuangan	26.920.205.166,60	36.126.050.200,00	27.325.702.166,60	35.720.553.200,00
		PIUTANG LAINNYA	**1.090.465.728,15**	**518.844.070,06**	**268.032.687,45**	**1.341.277.110,76**
1	BPPRD	Tuntutan Ganti Rugi	1.090.465.728,15	518.844.070,06	268.032.687,45	1.341.277.110,76
		JUMLAH	**714.334.417.274,47**	**1.191.920.756.379,89**	**620.572.133.538,00**	**1.285.683.040.116,36**

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran IX : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1 2 3 4 5		NIHIL		
JUMLAH				

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran X : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
		NIHIL		
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XI : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2013	Dinas Perkebunan	Nota Kesepakatan Kerja-sama antara Pemkab. Muba dengan Bank Sumsel No. 415.42 / 013 / disbun / 2002 dan no. 036/dir/III/2002	Non Permanen	2.092.056.977,00	2.092.056.977,00	-	2.092.056.977,00	-	-	-	2.092.056.977,00
JUMLAH NON PERMANEN (DANA BERGULIR)					**2.092.056.977,00**	**2.092.056.977,00**	-	**2.092.056.977,00**	-	-	-	**2.092.056.977,00**
2	2013	PDAM Kab. Muba.	Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada PDAM Tirta Randik Kab. Muba.	Permanen	708.357.685.624,41	535.532.685.624,58	24.486.109.626,00	560.482.685.624,58	147.874.999.999,83	-	-	560.482.685.624,58
3	2013	BPDSS	Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Pe-nyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada PT. Bank Pem-bangunan Daerah Sumsel-Babel.	Permanen	129.051.643.431,23	119.051.643.431,23	-	119.051.643.431,23	10.000.000.000,00	25.082.895.564,79	-	119.051.643.431,23
4	2013	PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA	SK Bupati No. 716/KPTS-BPKAD/2022 Tgl 7 Desember 2022	Permanen	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5		**PT.PETROMUBA HOLDING**			**686.504.425.927,24**	**459.828.576.289,00**	-	**459.828.576.289,00**	**226.675.849.638,24**	-	-	**459.828.576.289,00**
	2013	PT. Petro Muba	Perda No. 7 Tahun 2017 tanggal 4 September 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Pe-nyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada Perseroan Terbatas PETRO MUBA	Permanen	4.080.966.560,00	16.630.966.560,00	-	16.630.966.560,00	(12.550.000.000,00)	-	-	16.630.966.560,00
	2013	PT. Muba Link		Permanen	176.475.710.679,00	126.635.680.679,00	-	126.635.680.679,00	49.840.030.000,00	-	-	126.635.680.679,00
	2013	PT. Muba Electric Power		Permanen	456.843.247.188,24	314.022.429.050,00	-	314.022.429.050,00	142.820.818.138,24	-	-	314.022.429.050,00
	2013	PT. Muba Sarana		Permanen	42.494.920.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	40.494.920.000,00	-	-	2.000.000.000,00
	2013	PT. Kilang Muba		Permanen	6.609.581.500,00	-	-	-	6.609.581.500,00	-	-	-
	2019	PT. Perkebunan Muba Lestari	SK Bupati No. 770/KPTS-BPKAD/2019	Permanen	-	539.500.000,00	-	539.500.000,00	(539.500.000,00)	-	-	539.500.000,00
JUMLAH PERMANEN (PENYERTAAN MODAL)					**1.524.913.754.982,88**	**1.114.412.905.344,81**	**24.486.109.626,00**	**1.139.362.905.344,81**	**384.550.849.638,07**	**25.082.895.564,79**	-	**1.139.362.905.344,81**
JUMLAH KESELURUHAN					**1.527.005.811.959,88**	**1.116.504.962.321,81**	**24.486.109.626,00**	**1.141.454.962.321,81**	**384.550.849.638,07**	**25.082.895.564,79**	-	**1.141.454.962.321,81**

Sekayu, 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XII : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.543.108.864.432,52	83.938.308.198,88	17.417.810.885,59	1.609.629.361.746
2	Dinas Kesehatan	202.489.530.348,01	3.706.305.368,00	1.908.842.223,00	204.286.993.493
3	Puskesmas Ngulak	9.066.785.960,44	1.325.012.080,00	99.793.880,00	10.292.004.160
4	Puskesmas Babat Toman	8.061.810.261,48	765.455.624,00	47.629.686,00	8.779.636.199
5	Puskesmas Ulak Paceh	7.160.288.885,44	8.442.482.512,00	2.236.259.135,00	13.366.512.262
6	Puskesmas Tanah Abang	4.945.489.232,00	2.444.784.650,00	131.473.049,21	7.258.800.833
7	Puskesmas Lubuk Bintialo	7.461.138.895,00	1.079.656.205,00	13.714.805,00	8.527.080.295
8	Puskesmas Bukit Selabu	6.682.457.126,00	7.989.402.370,00	3.194.627.060,00	11.477.232.436
9	Puskesmas Cinta Karya	9.997.540.523,13	461.469.000,00	24.605.000,00	10.434.404.523
10	Puskesmas Suka Damai	3.515.284.083,00	428.504.650,00	3.200.000,00	3.940.588.733
11	Puskesmas Sido Rahayu	3.818.655.127,00	120.370.850,00	10.644.450,00	3.928.381.527
12	Puskesmas Tebing Bulang	6.566.391.459,30	44.584.500,00	1.081.000,00	6.609.894.959
13	Puskesmas Jirak	7.870.656.143,36	51.100.000,00	1.600.000,00	7.920.156.143
14	Puskesmas Balai Agung	8.969.591.783,36	274.439.273,00	32.445.000,00	9.211.586.056
15	Puskesmas Lumpatan	6.867.496.485,25	415.978.000,00	8.230.000,00	7.275.244.485
16	Puskesmas Lais	5.535.680.683,24	544.121.499,00	47.340.500,00	6.032.461.682
17	Puskesmas Gardu Harapan	9.258.433.722,65	481.726.750,00	-	9.740.160.473
18	Puskesmas Teluk Kijing	5.566.614.470,56	393.029.649,00	780.000,00	5.958.864.120
19	Puskesmas Tanjung Kerang	5.550.284.782,00	67.434.999,00	1.000.000,00	5.616.719.781
20	Puskesmas Sungai Lilin	8.550.553.397,00	248.736.950,00	6.044.950,00	8.793.245.397

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
21	Puskesmas Sri Gunung	8.443.957.369,00	126.298.100,00	10.000.000,00	8.560.255.469
22	Puskesmas Karya Maju	9.670.357.928,81	103.910.710,00	2.643.000,00	9.771.625.639
23	Puskesmas Mekar Jaya	5.005.860.087,34	558.494.940,00	24.285.000,00	5.540.070.027
24	Puskesmas Bayung Lencir	8.565.270.275,39	669.558.875,00	16.624.700,00	9.218.204.450
25	Puskesmas Sukajaya	7.662.335.922,00	80.850.000,00	-	7.743.185.922
26	Puskesmas Peninggalan	7.690.880.762,42	232.412.500,00	-	7.923.293.262
27	Puskesmas Sumber Harum	4.066.538.555,00	35.287.643,00	6.050.153,00	4.095.776.045
28	Puskesmas Berojaya Timur	6.571.498.740,00	232.850.002,00	3.300.002,00	6.801.048.740
29	Puskesmas Bandar Agung	8.669.935.426,00	34.000.000,00	5.350.000,00	8.698.585.426
30	Puskesmas Karang Mukti	9.525.472.079,00	184.700.000,00	-	9.710.172.079
31	BLUD RSUD Sungai Lilin	70.087.889.873,02	2.464.492.959,00	131.036.303,14	72.421.346.529
32	BLUD RSUD Bayung Lencir	82.184.204.128,16	9.504.411.804,00	91.933.968,00	91.596.681.964
33	Puskesmas Air Balui	10.027.715.870,00	693.470.750,00	7.913.850,00	10.713.272.770
34	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	556.706.448.689,37	13.042.308.246,00	11.904.085.425,00	557.844.671.510
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.810.799.113.766,70	526.325.258.070,11	435.285.997.817,96	9.901.838.374.019
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	936.285.861.902,18	135.131.064.110,43	67.250.075.714,87	1.004.166.850.298
37	Satuan Polisi Pamong Praja	24.330.357.619,00	4.486.643.110,00	662.804.150,00	28.154.196.579
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.261.122.392,26	8.756.698.515,95	3.864.742.350,00	62.153.078.558
39	Dinas Sosial	19.799.669.229,97	594.018.280,00	53.361.000,00	20.340.326.510
40	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	37.918.892.354,40	192.816.990,00	-	38.111.709.344
41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.447.548.203,50	718.330.752,09	-	7.165.878.956

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
42	Dinas Ketahanan Pangan	31.805.446.563,00	401.604.600,00	181.852.350,00	32.025.198.813
43	Dinas Lingkungan Hidup	157.719.202.402,47	8.574.472.287,34	613.098.125,00	165.680.576.565
44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.742.115.541,27	5.334.610.204,00	3.231.550,00	34.073.494.195
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.779.705.223,00	8.237.451.689,00	-	22.017.156.912
46	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	14.183.459.858,70	2.381.908.556,74	-	16.565.368.415
47	Dinas Perhubungan	87.350.174.348,48	3.644.919.735,00	4.258.478.906,00	86.736.615.177
48	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.305.908.873,20	969.916.108,00	327.467.650,00	48.948.357.331
49	Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	15.889.768.460,34	259.685.500,00	58.604.750,00	16.090.849.210
50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.125.228.359,71	3.391.921.875,00	946.753.885,00	19.570.396.350
51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	16.923.265.000,00	832.454.123,00	390.192.140,00	17.365.526.983
52	Dinas Perikanan	51.921.882.364,45	232.992.230,00	188.700,00	52.154.685.894
53	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	248.554.936.732,08	29.884.893.453,90	5.529.698.452,45	272.910.131.734
54	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	83.038.751.840,58	1.142.929.792,00	697.719.000,00	83.483.962.633
55	Dinas Perkebunan	171.525.631.553,67	2.718.328.150,00	309.615.000,00	173.934.344.704
56	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	206.739.629.058,72	1.056.179.120,00	9.440.499.559,00	198.355.308.620
57	Sekretariat Daerah	591.785.225.042,32	7.112.562.199,00	11.869.046.141,28	587.028.741.100
58	Sekretariat DPRD	120.187.839.883,98	24.197.241.479,00	8.200.253.538,00	136.184.827.825
59	Inspektorat	18.546.982.961,00	372.622.650,00	-	18.919.605.611
60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.079.482.040,65	197.491.200,00	5.794.200,00	36.271.179.041
61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42.674.620.287,60	999.206.780,00	2.235.000,38	43.671.592.067
62	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	32.760.867.004,38	596.316.070,00	123.917.000,00	33.233.266.074
63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.573.920.591,00	381.560.006,00	-	7.955.480.597
64	Kecamatan Sekayu	21.285.161.192,01	2.238.280.744,00	196.495.136,00	23.326.946.800
65	Kecamatan Lais	10.163.719.281,71	79.342.800,00	-	10.243.062.082
66	Kecamatan Babat Toman	32.179.328.907,19	584.684.899,00	16.350.000,00	32.747.663.806
67	Kecamatan Keluang	10.217.903.499,82	472.986.623,00	150.683,00	10.690.739.440
68	Kecamatan Sanga Desa	28.347.444.475,33	850.995.073,00	23.057.185,00	29.175.382.363

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
69	Kecamatan Plakat Tinggi	7.120.055.723,00	1.394.099.347,00	166.714.348,00	8.347.440.722
70	Kecamatan Batanghari Leko	8.938.108.600,36	86.976.085,00	18.700.000,00	9.006.384.685
71	Kecamatan Sungai Keruh	9.720.341.117,84	71.298.830,00	-	9.791.639.948
72	Kecamatan Sungai Lilin	19.660.850.543,42	2.586.512.430,00	-	22.247.362.973
73	Kecamatan Bayung Lencir	25.420.319.331,88	984.451.071,00	204.935.431,00	26.199.834.972
74	Kecamatan Lalan	8.492.234.880,40	122.610.000,00	37.830.000,00	8.577.014.880
75	Kecamatan Tungkal Jaya	10.625.284.280,40	128.850.000,00	-	10.754.134.280
76	Kecamatan Lawang Wetan	16.899.544.838,38	134.101.400,00	87.770.000,00	16.945.876.238
77	Kecamatan Babat Supat	9.660.753.899,10	163.849.400,00	113.300.000,00	9.711.303.299
78	Kecamatan Jirak Jaya	2.636.849.871,00	8.608.762.170,42	40.619.600,00	11.204.992.441
79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.019.012.500,00	212.152.602,00	818.813.300,00	17.412.351.302
Jumlah		**15.841.365.435.907**	**939.032.000.768**	**589.190.707.188**	**16.191.206.729.487**

Sekayu, 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XIII : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI 2025		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2026
			TAMBAH	KURANG	
1	TANAH	537.219.524.393,80	11.535.843.204,90	11.381.850.204,90	537.373.517.393,80
2	PERALATAN DAN MESIN	1.493.802.174.447,16	119.006.784.521,58	39.790.403.855,71	1.573.018.555.113,03
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.397.608.252.384,33	152.693.297.931,59	64.219.331.532,91	3.486.082.218.783,01
4	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	10.175.467.918.209,98	587.338.798.625,54	417.227.970.519,91	10,345,578,746,315,61
5	ASET TETAP LAINNYA	102.918.522.672,25	21.457.689.324,00	728.232.862,00	123.647.979.134,25
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	134.349.043.799,18	46.999.587.160,25	55.842.918.212,44	125.505.712.746,98
	JUMLAH	**15.841.365.435.906,70**	**939.032.000.767,86**	**589.190.707.187,87**	**16.191.206.729.486,68**

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XIV : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	2.579.202.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.202.253,30
2	Dinas Kesehatan	99.289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.289.500,00
3	BLUD RSUD Sungai Lilin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BLUD RSUD Bayung Lencir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	481.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.222.500,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.387.976.799,18	0,00	0,00	35.386.945.978,50	0,00	0,00	0,00	55.801.802.712,44	0,00	0,00	110.973.120.065,24
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.103.692.000,00	0,00	2.598.086.471,40	1.783.109.357,20	0,00	0,00	12.255.500,00	28.860.000,00	0,00	0,00	5.443.772.328,60
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	4.096.278.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.278.265,95
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	879.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.549.000,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	0,00	0,00	555.964.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.964.834,90
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	397.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.314.000,00
JUMLAH		**134.349.043.799,18**	**0,00**	**5.733.253.559,60**	**41.266.333.601,65**	**0,00**	**0,00**	**12.255.500,00**	**55.830.662.712,44**	**0,00**	**0,00**	**125.505.712.747,98**

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XV : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.561.036.344,70	726.452.633,59	204.920.683,16	28.082.568.295,13
2	Dinas Kesehatan	1.227.889.292,09	645.437.956,61	1.491.291.843,49	382.035.405,21
	Puskesmas Ngulak	0,00	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00
	Puskesmas Babat Toman	6.045.290,00	21.850.000,00	27.895.290,00	0,00
	Puskesmas Ulak Paceh	3.666.667,00	0,00	3.666.667,00	0,00
	Puskesmas Lumpatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Karya Maju	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLUD Rumah Sakit Sungai Lilin	13.500.000,00	6.000.000,00	19.500.000,00	0,00
	BLUD Rumah Sakit Bayung Lencir	77.733.300,00	21.488.020,00	38.039.700,00	61.181.620,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	53.746.860,63	6.775.718.130,82	6.829.464.991,45	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.794.558.093,15	115.038.794.968,69	46.855.300.194,56	125.978.052.867,28
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	56.907.916.022,80	6.341.857.306,18	5.590.024.435,50	57.659.748.893,48

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
6	Satuan Polisi Pamong Praja	35.087.767,00	255.137.488,00	0,00	290.225.255,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	788.851.271,33	19.888.000,00	69.608.000,00	739.131.271,33
8	Dinas Sosial	83.181.760,00	160.331.751,00	63.171.760,00	180.341.751,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	82.920.389,00	97.944.108,50	107.867.669,00	72.996.828,50
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	35.803.887,00	0,00	30.153.987,00	5.649.900,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	236.118.600,33	77.607.520,50	251.039.212,33	62.686.908,50
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.330.762,40	152.251.980,00	24.072.650,40	136.510.092,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.916.619,67	123.446.896,18	5.916.595,67	121.446.920,18
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	237.318.000,00	64.442.781,00	59.329.500,00	242.431.281,00
16	Dinas Perhubungan	1.108.244.652,53	921.136.161,00	1.520.038.059,67	509.342.753,86
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	458.696.703,34	219.279.026,60	575.948.732,94	102.026.997,00
18	Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	0,00	9.533.527,22	0,00	9.533.527,22
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	303.447.344,16	264.201.050,00	359.348.154,16	208.300.240,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	329.749.059,60	52.521.692,00	293.401.215,20	88.869.536,40
21	Dinas Perikanan	236.679.528,00	0,00	96.914.988,00	139.764.540,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	543.047.503,88	834.163.054,45	267.127.878,98	1.110.082.679,35

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	199.588.500,33	0,00	199.588.500,33	0,00
24	Dinas Perkebunan	827.597.571,32	45.361.023,00	420.445.139,47	452.513.454,85
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.811.605.552,00	687.544.978,00	1.038.662.287,60	1.460.488.242,40
26	Sekretariat Daerah	14.699.239.457,90	989.524.338,00	1.140.150.943,02	14.548.612.852,88
27	Sekretariat DPRD	213.482.626,65	453.606.701,00	135.737.116,65	531.352.211,00
28	Inspektorat	166.427.467,00	146.273.341,00	187.263.667,00	125.437.141,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	493.326.770,68	120.825.140,00	398.951.910,68	215.200.000,00
30	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	56.291.391.912,17	1.534.573.733,01	50.580.542.814,50	7.245.422.830,68
31	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.548.507.054,06	239.622.741,67	1.002.436.285,75	1.785.693.509,98
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	180.429.604,17	42.905.500,00	204.780.104,17	18.555.000,00
33	Kecamatan Sekayu	10.828.930.361,38	58.672.617,00	35.097.500,00	10.852.505.478,38
34	Kecamatan Lais	8.864.378.807,00	24.615.288,00	0,00	8.888.994.095,00
35	Kecamatan Babat Toman	76.139.791,00	42.449.478,00	0,00	118.589.269,00
36	Kecamatan Keluang	4.139.922.233,00	68.396.693,00	-	4.208.318.926,00
37	Kecamatan Sanga Desa	1.502.598.171,14	20.356.651,00	10.000.000,00	1.512.954.822,14
38	Kecamatan Plakat Tinggi	10.676.276.760,00	65.452.876,00	-	10.741.729.636,00
39	Kecamatan Batanghari Leko	4.401.564.682,00	60.636.821,50	-	4.462.201.503,50

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
40	Kecamatan Sungai Keruh	5.589.975.724,00	60.561.322,50	-	5.650.537.046,50
41	Kecamatan Sungai Lilin	7.192.873.546,74	45.804.022,00	10.298.077,00	7.228.379.491,74
42	Kecamatan Bayung Lencir	9.474.941.448,75	56.629.787,93	-	9.531.571.236,68
43	Kecamatan Lalan	8.229.834.650,19	83.927.087,50	-	8.313.761.737,69
44	Kecamatan Tungkal Jaya	9.017.421.226,23	42.573.707,00	-	9.059.994.933,23
45	Kecamatan Lawang Wetan	8.620.229.245,00	58.491.265,00	-	8.678.720.510,00
46	Kecamatan Babat Supat	4.525.587.631,00	87.333.171,50	-	4.612.920.802,50
47	Kecamatan Jirak jaya	583.309.753,01	75.397.422,50	40.619.600,00	618.087.575,51
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	706.026.890,50	420.822.000,00	285.204.890,50
Jumlah		**319.293.066.265,33**	**138.686.496.648,95**	**120.648.888.154,68**	**337.330.674.759,60**

Sekayu, 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XVI : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2			NIHIL					
3								
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XVII : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.899.999,00	228.309.696.896,69	228.309.696.896,69	1.899.999,00
2	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	98.582.440,26	0,00	17.465.830,60	81.116.609,66
4	Utang Belanja	478.038.861.880,96	78.471.844.485,55	479.171.986.284,96	77.338.720.081,55
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.225.000.000,00	12.266.674.000,00	2.225.000.000,00	12.266.674.000,00
JUMLAH		**480.364.344.320,22**	**319.048.215.382,24**	**709.724.149.012,25**	**89.688.410.690,21**

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XVIII : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	82.635.785.325,00	146.363.905,00	1.250.000.000,00	81.532.149.230,00
JUMLAH					

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XIX : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1		2	4	5		6	7 = (4+5+6)	8
			NIHIL					
Jumlah			-	-		-	-	-

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XXI.1 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
IKHTISARLAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x 18
1	PDAM TIRTA RANDIK SEKAYU	AUDITED		19.846.157.837,93	350.717.096.707,48	-	370.563.254.545,41	-	-	-	-	24.486.109.626,00		370.563.249.545,41	(44.478.284.081,95)	350.571.075.089,46		
2	PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA	AUDITED		10.882.607.144,00	400.404.670,00	-	11.283.011.814,00	-	-	-	-	-		10.704.112.824,00	1.000.000,00	10.705.112.824,00		
2	PT. PETRO MUBA HOLDING	UN-AUDITED		72.291.589.606,43	576.627.202.653,28	8.063.251.557,15	656.982.043.816,86	64.410.792.836,38	92.917.858.206,00	157.328.651.042,38	901.384.394.055,00	-		11.795.697.900,33	(287.930.126.252,67)	625.249.965.702,66	-	-
	a PT. PETRO MUBA	UN-AUDITED		12.375.831.442,00	470.888.136.053,00	574.542.000,00	483.838.509.495,00	2.440.647.845,00	190.990.156,00	2.631.638.001,00	471.601.195.289,00	-		-	22.680.893.009,00	494.282.088.298,00		
	b PT. MUBA SARANA	UN-AUDITED		1.195.167.604,00	40.030.577,00	-	1.235.198.181,00	3.170.212.441,00	-	3.170.212.441,00	1.825.436.587,00			-	(3.760.450.847,00)	1.935.014.260,00		
	c PT. MUBA LINK	UN-AUDITED		5.175.660.519,43	11.389.123.337,28	3.599.029.557,15	20.163.813.413,86	4.766.085.956,38	-	4.766.085.956,38	106.275.680.679,00			11.795.697.900,33	(110.942.484.778,67)	7.128.895.800,66		
	d PT. MUBA ELEKTRIC POWER	UN-AUDITED		53.493.194.194,00	92.726.868.050,00	3.889.680.000,00	150.109.742.244,00	53.493.194.194,00	92.726.868.050,00	146.220.062.244,00	314.072.500.000,00	-		-	(196.002.218.719,00)	118.070.286.281,00		
	e PT. KILANG MUBA	UN-AUDITED		-	-	-	-	-	-	-	6.609.581.500,00	-		-	-	6.609.581.500,00		
	f PT. PERKEBUNAN MUBA LESTARI	UN-AUDITED		51.735.847,00	1.583.044.636,00	-	1.634.780.483,00	540.652.400,00	-	540.652.400,00	1.000.000.000,00	-		-	94.128.083,00	1.094.128.083,00		
	JUMLAH			103.020.354.588,36	927.744.704.030,76	8.063.251.557,15	1.038.828.310.176,27	64.410.792.836,38	92.917.858.206,00	157.328.651.042,38	901.384.394.055,00	24.486.109.626,00		393.063.060.269,74	(332.407.410.834,62)	986.526.153.616,12	-	-

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XXI.2 : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	PDAM TIRTA RANDIK SEKAYU	AUDITED		67.162.075.763,83	111.640.359.845,78	(44.478.284.081,95)	-	-	(44.478.284.081,95)
2	PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA	AUDITED		17.803.862.423,00	3.648.077.432,00	14.155.784.991,00	(5.016.805,00)	-	14.150.768.186,00
3	**PT. PETRO MUBA HOLDING**			**51.273.131.994,80**	**29.945.224.169,07**	**22.422.576.467,87**	**2.976.222.872,00**	**12.918.199.148,44**	**12.480.600.191,43**
	a PT. PETRO MUBA	UN-AUDITED		25.246.845.550,00	24.343.558.605,00	903.286.945,00	496.967.517,00	42.875.202,00	1.357.379.260,00
	b PT. MUBA SARANA	UN-AUDITED		-	792.334.130,00	(792.334.130,00)	-	550.000,00	(792.884.130,00)
	c PT. MUBA LINK	UN-AUDITED		14.637.354.844,80	547.334.321,07	15.184.689.165,87	2.308.781.320,00	12.871.563.833,44	4.621.906.652,43
	d PT. MUBA ELEKTRIC POWER	UN-AUDITED		11.478.115.300,00	4.001.884.713,00	7.476.230.587,00	170.455.867,00	2.843.478,00	7.643.842.976,00
	e PT. KILANG MUBA	UN-AUDITED		-	-	-	-	-	-
	f PR. PERKEBUNAN MUBA LESTARI	UN-AUDITED		(89.183.700,00)	260.112.400,00	(349.296.100,00)	18.168,00	366.635,00	(349.644.567,00)
	JUMLAH			136.239.070.181,63	145.233.661.446,85	(7.899.922.623,08)	2.971.206.067,00	12.918.199.148,44	(17.846.915.704,52)

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran 1

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
01	**KECAMATAN SEKAYU**		27.904.923.758	28.310.505.845	101,5	27.583.046.762	25.201.526.172	91,4	(233.927.229)	(16.406.629)	7,0	87.949.767	3.092.573.043	516,3
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	2.708.842.400	2.733.501.648	100,9	2.819.438.386	2.623.856.125	93,1	164.519.843	164.519.843	100,0	53.923.857	274.165.367	508,4
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	4	2.799.100.363	2.842.744.763	101,6	2.845.188.495	2.675.057.262	94,0	46.088.132	46.088.132	100,0	0	213.775.633	240,0
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	4	3.198.955.004	3.251.676.128	101,6	2.957.483.901	2.913.031.918	98,5	(241.471.103)	(241.471.103)	100,0	0	97.173.107	512,0
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	4	3.356.494.926	3.356.494.926	100,0	3.449.425.713	3.260.153.205	94,5	92.930.787	94.450.787	101,6	0	190.792.508	912,0
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	4	2.605.668.663	2.803.002.210	107,6	2.444.627.983	1.518.078.250	62,1	(161.040.680)	54.746.720	(34,0)	0	1.339.670.680	!5E18
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	4	2.012.917.568	2.011.442.795	99,9	1.932.295.775	1.653.940.849	85,6	(80.621.094)	(80.621.094)	100,0	700	276.880.852	407,4
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	4	2.338.914.899	2.338.914.899	100,0	2.334.617.853	2.285.522.481	97,9	(4.297.046)	(4.297.046)	100,0	0	49.095.372	496,0
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	2.279.366.995	2.279.631.476	100,0	2.261.398.457	2.110.632.340	93,3	(17.968.538)	(17.968.538)	100,0	0	151.030.598	184,0
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	4	3.374.517.216	3.409.591.276	101,0	3.196.592.320	3.092.675.938	96,7	(150.871.547)	(150.658.347)	99,9	27.053.349	166.256.991	614,6
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	4	3.230.145.724	3.283.505.724	101,7	3.341.977.879	3.068.577.804	91,8	118.804.016	118.804.016	100,0	6.971.861	333.731.936	786,8
02	**KECAMATAN LAIS**		40.251.025.299	39.883.679.279	99,1	40.518.638.337	39.539.356.536	97,6	268.313.038	268.313.038	100,0	700.000	612.635.781	519,3
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	2.424.438.512	2.421.214.802	99,9	2.704.210.224	2.498.342.096	92,4	279.771.712	279.771.712	100,0	0	202.644.418	088,0
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	4	2.219.832.411	2.254.839.831	101,6	2.232.567.955	2.213.103.538	99,1	12.735.544	12.735.544	100,0	0	54.471.837	448,0
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG TIMUR	4	2.572.237.976	2.288.659.012	89,0	2.574.049.224	2.287.674.472	88,9	1.811.248	1.811.248	100,0	0	2.795.788	0,0
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	4	2.772.180.603	2.773.894.576	100,1	2.873.886.968	2.874.269.416	100,0	101.706.365	101.706.365	100,0	0	1.331.525	300,0
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	4	2.949.712.805	2.952.233.453	100,1	2.968.527.743	2.941.263.023	99,1	18.814.938	18.814.938	100,0	0	29.785.368	864,0
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	4	2.523.885.512	2.419.894.572	95,9	2.594.332.509	2.456.139.559	94,7	70.446.997	70.446.997	100,0	0	34.202.010	096,0
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	4	3.138.874.904	3.146.233.280	100,2	3.204.768.172	3.170.122.358	98,9	65.893.268	65.893.268	100,0	0	42.004.190	216,0
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	4	2.506.486.174	2.501.164.285	99,8	2.414.187.652	2.404.303.755	99,6	(92.298.522)	(92.298.522)	100,0	0	4.562.008	400,0
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I	4	2.745.251.704	2.744.560.605	100,0	2.818.269.048	2.775.931.790	98,5	73.017.344	73.017.344	100,0	0	41.646.159	200,6
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II	4	2.520.884.613	2.515.938.855	99,8	2.603.380.846	2.567.566.593	98,6	82.496.233	82.496.233	100,0	0	30.868.495	240,0
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III	4	2.802.108.914	2.803.562.579	100,1	2.568.390.197	2.556.563.958	99,5	(233.718.717)	(233.718.717)	100,0	0	13.279.904	300,0
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTARA	4	2.143.189.964	2.138.834.143	99,8	2.170.598.208	2.161.515.386	99,6	28.108.244	28.108.244	100,0	700.000	5.427.001	775,3
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARAT	4	2.319.192.704	2.315.323.269	99,8	2.417.626.976	2.351.694.136	97,3	98.434.272	98.434.272	100,0	0	62.063.405	696,0
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELATAN	4	2.189.131.811	2.185.016.824	99,8	2.199.158.694	2.181.032.348	99,2	10.026.883	10.026.883	100,0	0	14.011.359	128,0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	4	2.193.332.951	2.195.010.460	100,1	2.094.784.996	2.068.273.040	98,7	(98.547.955)	(98.547.955)	100,0	0	28.189.465	904,0
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	2.230.283.741	2.227.298.733	99,9	2.079.898.924	2.031.561.068	97,7	(150.384.817)	(150.384.817)	100,0	0	45.352.848	0,0
03	**KECAMATAN SUNGAI KERUH**		23.854.108.055	23.865.350.111	100,0	24.164.960.637	23.969.580.751	99,2	310.852.588	310.167.768	99,8	6	205.937.128	441,3
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	4	2.150.128.966	2.150.592.960	100,0	2.174.857.459	2.164.816.849	99,5	24.728.493	24.728.493	100,0	0	10.504.604	0,0
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	4	2.215.218.408	2.216.739.216	100,1	2.369.490.487	2.363.884.567	99,8	154.272.085	154.272.085	100,0	6	7.126.734	906,4
03.2004.	PEMERINTAH DESA KARTAYU	4	2.531.653.952	2.533.012.203	100,1	2.531.653.952	2.452.656.858	96,9	0	0	0,0	0	80.355.345	0,0
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	4	2.109.971.763	2.110.497.341	100,0	2.110.915.319	2.110.822.726	100,0	943.556	943.556	100,0	0	618.171	0,0
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	2.228.887.966	2.229.879.242	100,0	2.295.357.589	2.267.232.943	98,8	66.469.623	66.469.623	100,0	0	29.115.922	0,0
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG	4	2.718.386.108	2.718.933.533	100,0	2.741.979.287	2.711.586.108	98,9	23.593.179	23.593.179	100,0	0	30.940.604	0,0
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	2.553.170.306	2.553.999.147	100,0	2.553.855.126	2.520.183.886	98,7	684.820	0	0,0	0	33.815.261	880,0
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	4	2.637.844.106	2.638.388.876	100,0	2.651.065.067	2.641.796.978	99,7	13.220.961	13.220.961	100,0	0	9.812.859	860,0
03.2014.	PEMERINTAH DESA KERTA JAYA	4	2.414.589.714	2.417.000.099	100,1	2.414.589.714	2.414.996.412	100,0	0	0	0,0	0	2.003.687	0,0
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA	4	2.294.256.766	2.296.307.494	100,1	2.321.196.636	2.321.603.424	100,0	26.939.870	26.939.870	100,0	0	1.643.940	185,5
04	**KECAMATAN BATANG HARI LEKO**		35.671.292.982	35.058.851.037	98,3	38.198.616.501	35.408.063.458	92,7	2.530.436.137	2.467.207.700	97,5	3.112.618	2.117.995.279	045,5
04.2001.	PEMERINTAH DESA BUKIT SEJAHTERA	4	2.364.566.855	2.359.586.046	99,8	2.435.223.979	2.361.772.247	97,0	70.657.124	70.657.124	100,0	0	68.470.923	568,0
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUKIT PANGKUASAN	4	1.926.545.115	1.927.691.011	100,1	1.931.450.309	1.895.058.638	98,1	4.955.194	4.605.194	92,9	50.000	37.237.567	475,1
04.2003.	PEMERINTAH DESA TANAH ABANG	4	2.473.756.617	2.235.441.735	90,4	2.680.724.083	2.360.810.616	88,1	206.967.466	206.967.466	100,0	0	81.598.585	0,0
04.2004.	PEMERINTAH DESA TALANG LEBAN	4	2.015.878.164	2.017.885.025	100,1	2.148.045.962	2.000.859.902	93,1	132.167.798	132.167.798	100,0	0	149.192.921	0,0
04.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH	4	2.078.171.333	2.077.663.047	100,0	2.154.138.558	2.087.202.217	96,9	79.029.843	79.029.843	100,0	3.062.618	69.490.673	269,0
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH	4	1.970.404.515	1.971.481.878	100,1	2.009.404.515	1.967.398.465	97,9	39.000.000	39.000.000	100,0	0	43.083.413	0,0
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL	4	1.971.418.715	1.974.189.709	100,1	2.010.043.440	1.932.976.699	96,2	38.624.725	0	0,0	0	41.213.010	0,0
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	4	2.961.704.467	2.965.958.501	100,1	3.098.972.535	2.889.678.030	93,2	137.268.068	137.268.068	100,0	0	213.548.539	0,0
04.2009.	PEMERINTAH DESA SAKO SUBAN	4	2.853.927.018	2.863.318.736	100,3	3.773.921.653	3.546.755.121	94,0	919.994.635	895.740.923	97,4	0	212.304.538	096,0
04.2010.	PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU	4	2.154.933.964	2.152.149.436	99,9	2.227.764.270	2.128.197.069	95,5	72.830.306	72.830.306	100,0	0	96.782.673	088,0
04.2011.	PEMERINTAH DESA SAUT	4	2.313.458.505	2.316.635.685	100,1	2.512.018.834	2.426.659.045	96,6	198.560.329	198.560.329	100,0	0	88.536.969	0,0
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI	4	1.925.237.315	1.924.351.494	100,0	1.987.853.059	1.813.834.665	91,2	62.615.744	62.615.744	100,0	0	173.132.573	0,0
04.2013.	PEMERINTAH DESA PINGGAP	4	1.904.585.714	1.905.939.041	100,1	2.009.490.669	1.941.115.022	96,6	104.904.955	104.904.955	100,0	0	69.728.974	0,0
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	4	1.945.238.715	1.946.142.845	100,0	1.950.981.223	1.733.105.565	88,8	5.742.508	5.742.508	100,0	0	218.779.788	0,0
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	4	2.129.770.513	1.737.526.765	81,6	2.469.143.422	1.678.171.018	68,0	339.372.909	339.372.909	100,0	0	398.728.656	0,0
04.2016.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BULIAN	4	2.681.695.457	2.682.890.083	100,0	2.799.439.989	2.644.469.139	94,5	117.744.532	117.744.532	100,0	0	156.165.476	0,0
05	**KECAMATAN SANGA DESA**		36.207.606.110	36.335.791.499	100,4	41.523.356.947	40.098.401.725	96,6	5.404.752.701	5.404.752.701	100,0	89.001.864	1.642.142.475	845,1
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI	4	2.115.203.378	2.123.341.986	100,4	2.391.517.078	2.297.013.771	96,0	276.313.700	276.313.700	100,0	0	102.641.915	0,0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	4	2.382.386.338	2.386.094.664	100,2	2.521.167.838	2.463.972.414	97,7	138.781.500	138.781.500	100,0	0	60.903.750	0,0
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I	4	1.613.504.179	1.615.401.850	100,1	1.920.353.079	1.856.375.322	96,7	306.848.900	306.848.900	100,0	0	65.875.428	0,0
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	4	2.433.890.288	2.439.195.093	100,2	2.772.203.988	2.526.401.068	91,1	338.313.700	338.313.700	100,0	0	251.107.725	0,0
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	4	1.966.193.667	1.977.089.671	100,6	2.303.607.367	2.215.370.282	96,2	337.413.700	337.413.700	100,0	0	99.133.089	0,0
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	4	2.230.977.879	2.257.205.583	101,2	2.636.156.579	2.580.944.629	97,9	405.178.700	405.178.700	100,0	0	81.439.654	0,0
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	4	2.261.016.966	2.264.408.292	100,1	2.514.180.666	2.440.653.642	97,1	253.163.700	253.163.700	100,0	0	76.918.350	0,0
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III	4	1.737.296.384	1.730.784.156	99,6	2.013.119.814	1.953.083.235	97,0	275.823.430	275.823.430	100,0	0	53.524.351	0,0
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	2.055.332.119	2.074.076.041	100,9	2.315.815.819	2.263.619.811	97,7	260.483.700	260.483.700	100,0	0	70.939.930	0,0
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	2.449.939.467	2.460.987.100	100,5	2.728.283.167	2.667.155.270	97,8	278.343.700	278.343.700	100,0	0	72.175.530	0,0
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	4	2.480.079.469	2.488.859.525	100,4	2.865.301.559	2.808.590.058	98,0	385.222.090	385.222.090	100,0	0	65.491.557	0,0
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	4	1.901.833.531	1.908.876.207	100,4	2.178.147.231	2.085.649.432	95,8	365.315.564	365.315.564	100,0	89.001.864	188.542.339	211,8
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	4	1.863.349.270	1.869.517.830	100,3	2.117.758.619	2.051.073.652	96,9	254.409.349	254.409.349	100,0	0	72.853.527	0,0
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	4	1.996.561.531	2.002.177.974	100,3	2.351.301.831	2.270.677.944	96,6	354.740.300	354.740.300	100,0	0	86.240.330	0,0
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	4	1.886.297.529	1.889.085.653	100,1	2.157.638.797	2.049.897.565	95,0	271.341.268	271.341.268	100,0	0	110.529.356	0,0
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI	4	2.574.568.087	2.578.258.674	100,1	2.851.313.787	2.791.601.114	97,9	276.745.700	276.745.700	100,0	0	63.403.260	0,0
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI	4	2.259.176.028	2.270.431.200	100,5	2.885.489.728	2.776.322.516	96,2	626.313.700	626.313.700	100,0	0	120.422.384	0,0
06	**KECAMATAN BABAT TOMAN**		27.671.278.463	27.762.023.409	100,3	27.975.040.500	27.099.793.194	96,9	305.197.297	305.197.297	100,0	1.435.260	967.427.512	404,3
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA	4	2.348.479.858	2.349.018.114	100,0	2.390.214.322	2.335.549.487	97,7	41.734.464	41.734.464	100,0	0	55.203.091	504,0
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA	4	1.864.568.815	1.864.706.877	100,0	1.869.383.068	1.856.083.451	99,3	4.814.253	4.814.253	100,0	0	13.437.679	0,0
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	2.113.708.619	2.109.392.287	99,8	2.131.908.619	2.024.571.930	95,0	18.200.000	18.200.000	100,0	0	103.020.357	0,0
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	2.169.433.657	2.197.960.106	101,3	2.235.392.919	2.174.559.288	97,3	65.959.262	65.959.262	100,0	0	89.360.080	0,0
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	4	2.065.966.664	2.092.311.439	101,3	2.236.556.351	2.188.281.094	97,8	170.589.687	170.589.687	100,0	0	74.620.032	0,0
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI	4	2.412.191.316	2.411.894.944	100,0	2.416.983.550	2.360.575.630	97,7	6.227.494	6.227.494	100,0	1.435.260	57.546.808	009,5
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	2.969.693.717	2.962.329.492	99,8	2.790.321.382	2.710.335.192	97,1	(179.372.335)	(179.372.335)	100,0	0	72.621.965	0,0
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	4	2.642.393.917	2.642.379.813	100,0	2.713.066.437	2.552.622.900	94,1	70.672.520	70.672.520	100,0	0	160.429.433	904,0
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	4	2.309.603.056	2.309.336.137	100,0	2.320.025.983	2.254.848.110	97,2	10.422.927	10.422.927	100,0	0	64.910.954	0,0
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO	4	2.293.015.654	2.313.216.167	100,9	2.313.619.943	2.229.311.392	96,4	20.604.289	20.604.289	100,0	0	104.509.064	104,0
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	4	2.298.766.856	2.326.041.316	101,2	2.356.455.293	2.282.034.077	96,8	57.688.437	57.688.437	100,0	0	101.695.676	0,0
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	4	2.183.456.334	2.183.436.717	100,0	2.201.112.633	2.131.020.643	96,8	17.656.299	17.656.299	100,0	0	70.072.373	0,0
07	**KECAMATAN SUNGAI LILIN**		32.392.004.469	32.054.011.175	99,0	33.285.739.567	31.760.740.853	95,4	893.735.098	848.813.969	95,0	0	1.142.084.291	0,0
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	3.025.616.191	3.048.405.489	100,8	3.104.998.782	3.073.198.462	99,0	79.382.591	79.382.591	100,0	0	54.589.618	0,0
07.2008.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	2.357.733.498	2.124.069.869	90,1	2.502.244.053	2.067.833.843	82,6	144.510.555	144.510.555	100,0	0	200.746.581	0,0
07.2009.	PEMERINTAH DESA LINGGO SARI	4	2.401.252.140	2.401.312.653	100,0	2.515.493.236	2.418.050.661	96,1	114.241.096	124.241.096	108,8	0	107.503.088	664,0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	4	2.544.655.088	2.319.135.867	91,1	2.611.424.451	2.344.614.310	89,8	66.769.363	66.769.363	100,0	0	41.290.920	672,0
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	4	2.278.704.597	2.283.285.003	100,2	2.345.145.897	2.308.097.293	98,4	66.441.300	66.441.300	100,0	0	41.629.010	0,0
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI	4	2.294.979.298	2.316.470.380	100,9	2.406.718.986	2.188.663.241	90,9	111.739.688	56.818.558	50,8	0	184.625.697	0,0
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	4	2.673.378.090	2.695.807.896	100,8	2.551.123.575	2.429.073.182	95,2	(122.254.515)	(122.254.515)	100,0	0	144.480.199	112,0
07.2014.	PEMERINTAH DESA BUMI KENCANA	4	2.695.568.050	2.696.313.529	100,0	2.744.364.050	2.722.548.984	99,2	48.796.000	48.796.000	100,0	0	22.560.545	0,0
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI	4	2.406.624.948	2.407.556.905	100,0	2.441.067.427	2.438.358.867	99,9	34.442.479	34.442.479	100,0	0	3.640.517	423,5
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN	4	2.474.595.797	2.496.898.945	100,9	2.543.212.753	2.517.751.455	99,0	68.616.956	68.616.956	100,0	0	47.764.446	0,0
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	4	2.708.299.589	2.713.790.559	100,2	2.971.685.589	2.774.560.004	93,4	263.386.000	263.386.000	100,0	0	202.616.555	0,0
07.2019.	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	4	2.340.751.898	2.340.888.999	100,0	2.431.632.218	2.393.521.884	98,4	90.880.320	90.880.320	100,0	0	38.247.435	960,0
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	4	2.189.845.285	2.210.075.081	100,9	2.116.628.550	2.084.468.667	98,5	(73.216.735)	(73.216.735)	100,0	0	52.389.679	0,0
08	**KECAMATAN KELUANG**		30.414.344.979	30.461.680.067	100,2	30.549.867.329	29.434.380.500	96,3	135.522.350	150.867.350	111,3	0	1.178.166.917	'6E18
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO	5	2.245.288.394	2.277.723.197	101,4	2.155.381.333	2.120.778.238	98,4	(89.907.061)	(89.907.061)	100,0	0	67.037.898	0,0
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM	5	2.076.033.089	2.096.779.109	101,0	2.011.220.038	1.996.007.680	99,2	(64.813.051)	(64.813.051)	100,0	0	35.958.378	0,0
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS	5	2.727.603.989	2.749.939.564	100,8	2.646.083.076	2.613.551.283	98,8	(81.520.913)	(81.520.913)	100,0	0	54.867.368	504,0
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	2.429.738.900	2.450.461.668	100,9	2.289.009.220	2.231.843.350	97,5	(140.729.680)	(140.729.680)	100,0	0	77.888.638	0,0
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	5	2.452.773.989	2.483.223.657	101,2	2.473.677.568	2.379.025.151	96,2	20.903.579	21.248.579	101,7	0	125.447.085	0,0
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	5	2.767.627.498	2.535.353.142	91,6	2.962.921.077	2.690.177.871	90,8	195.293.579	210.293.579	107,7	0	55.468.850	0,0
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	2.650.245.641	2.672.137.048	100,8	2.663.862.506	2.550.409.986	95,7	13.616.865	13.616.865	100,0	0	135.343.927	896,0
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA	5	2.579.381.690	2.600.775.704	100,8	2.551.475.536	2.526.104.828	99,0	(27.906.154)	(27.906.154)	100,0	0	46.764.722	296,0
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA	5	2.331.833.639	2.352.331.492	100,9	2.397.792.169	2.331.382.219	97,2	65.958.530	65.958.530	100,0	0	86.907.803	296,0
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	1.879.856.499	1.899.740.703	101,1	1.924.071.913	1.871.400.995	97,3	44.215.414	44.215.414	100,0	0	72.555.122	600,0
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	2.129.003.000	2.149.169.139	100,9	2.162.679.440	2.027.652.476	93,8	33.676.440	33.676.440	100,0	0	155.193.103	I5E18
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	5	2.196.254.649	2.217.731.552	101,0	2.209.399.386	2.060.797.091	93,3	13.144.737	13.144.737	100,0	0	170.079.198	0,0
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	5	1.948.704.002	1.976.314.092	101,4	2.102.294.067	2.035.249.332	96,8	153.590.065	153.590.065	100,0	0	94.654.825	688,0
09	**KECAMATAN BAYUNG LENCIR**		56.185.233.869	49.065.107.459	87,3	56.886.984.186	46.494.742.624	81,7	761.710.639	1.052.480.398	138,2	59.960.322	3.622.845.233	042,1
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	4	3.495.927.349	2.645.896.920	75,7	3.166.483.240	2.265.616.946	71,5	(329.444.109)	(329.458.800)	100,0	0	50.821.174	0,0
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	4	3.663.690.013	2.880.354.530	78,6	3.686.159.213	1.998.534.604	54,2	65.170.200	65.170.200	100,0	42.701.000	946.990.126	217,7
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	4	2.322.124.502	2.068.337.923	89,1	2.567.126.447	1.931.023.466	75,2	245.001.945	245.001.945	100,0	0	382.316.402	0,0
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	4	2.601.439.640	2.223.003.825	85,5	2.629.303.207	2.279.714.657	86,7	31.515.105	131.515.105	417,3	3.651.538	74.804.273	048,6
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	2.364.287.500	2.091.577.554	88,5	2.220.627.569	1.909.829.623	86,0	(143.659.931)	(140.008.393)	97,5	0	41.739.538	496,0
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	4	2.160.727.001	2.214.871.376	102,5	2.388.735.982	2.372.361.152	99,3	228.008.981	228.008.981	100,0	0	70.519.205	0,0
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	4	2.290.893.411	1.912.612.305	83,5	2.714.216.534	2.080.269.176	76,6	423.323.123	511.923.123	120,9	0	344.266.252	480,0
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	2.372.048.368	2.263.175.802	95,4	2.315.270.755	2.182.067.200	94,2	(56.777.613)	(56.778.000)	100,0	0	24.330.602	0,0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	3.530.618.885	2.766.583.105	78,4	3.314.030.696	2.601.834.819	78,5	(216.588.189)	(107.158.189)	49,5	0	57.590.097	0,0
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	4	3.436.535.456	2.835.855.937	82,5	3.511.962.814	2.835.730.063	80,7	75.427.358	75.427.358	100,0	0	75.553.232	504,0
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	4	3.192.238.343	3.198.508.710	100,2	3.008.766.843	2.943.375.011	97,8	(183.471.500)	(183.471.500)	100,0	0	71.662.199	0,0
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	4	2.393.801.141	2.145.058.721	89,6	2.411.464.908	2.086.143.545	86,5	17.663.767	17.663.767	100,0	0	76.578.943	0,0
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	2.473.035.840	2.179.470.442	88,1	2.637.787.442	2.270.112.196	86,1	164.751.602	160.515.000	97,4	0	69.873.246	800,0
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	2.046.229.126	1.780.343.176	87,0	2.022.264.426	1.730.080.997	85,6	(23.964.700)	(23.990.000)	100,1	0	26.272.179	0,0
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	4	2.122.227.118	1.909.284.510	90,0	2.346.933.640	1.853.216.241	79,0	224.707.230	224.707.230	100,0	708	280.775.499	556,4
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	2.783.501.274	2.234.650.935	80,3	3.026.792.586	2.388.332.453	78,9	256.898.388	250.263.588	97,4	13.607.076	96.582.070	709,8
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	3.187.710.119	2.767.379.442	86,8	3.393.296.174	2.849.022.662	84,0	205.586.055	205.586.055	100,0	0	123.942.835	0,0
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	4	2.393.368.764	2.115.234.530	88,4	2.324.451.315	2.002.279.772	86,1	(68.917.449)	(68.917.449)	100,0	0	44.037.309	0,0
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	2.981.565.640	2.992.467.575	100,4	2.848.545.488	2.569.344.446	90,2	(133.020.152)	(133.020.152)	100,0	0	290.102.977	896,0
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	2.169.057.313	1.726.055.666	79,6	2.160.670.236	1.550.982.675	71,8	(8.387.077)	(8.387.077)	100,0	0	166.685.914	0,0
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	2.204.207.066	2.114.384.475	95,9	2.192.094.672	1.794.870.920	81,9	(12.112.394)	(12.112.394)	100,0	0	307.401.161	0,0
10	**KECAMATAN PLAKAT TINGGI**		34.839.644.972	34.140.162.745	98,0	35.738.319.214	33.833.440.512	94,7	898.674.242	898.674.242	100,0	0	1.205.396.475	0,0
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	4	2.434.681.466	2.437.125.792	100,1	2.467.592.038	2.347.265.460	95,1	32.910.572	32.910.572	100,0	0	122.770.905	784,0
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	2.345.825.217	2.348.646.517	100,1	2.370.770.942	2.340.070.163	98,7	24.945.725	24.945.725	100,0	0	33.522.079	0,0
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	4	2.227.869.364	2.001.798.379	89,9	2.385.928.728	2.070.622.218	86,8	158.059.364	158.059.364	100,0	0	89.235.525	072,0
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	4	2.264.289.455	2.268.442.941	100,2	2.349.181.612	2.213.864.467	94,2	84.892.157	84.892.157	100,0	0	139.470.631	080,0
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	2.720.850.356	2.726.378.533	100,2	2.784.896.140	2.644.453.218	95,0	64.045.784	64.045.784	100,0	0	145.971.099	712,0
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	4	2.006.545.115	2.008.042.400	100,1	2.022.434.991	1.978.189.281	97,8	15.889.876	15.889.876	100,0	0	45.742.996	792,0
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	4	2.370.236.415	2.372.996.374	100,1	2.426.891.528	2.293.112.503	94,5	56.655.113	56.655.113	100,0	0	136.538.984	0,0
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	4	2.353.554.166	2.355.179.172	100,1	2.360.966.343	2.332.607.268	98,8	7.412.177	7.412.177	100,0	0	29.984.081	640,0
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	4	2.109.456.265	2.111.654.950	100,1	2.144.446.252	2.126.368.782	99,2	34.989.987	34.989.987	100,0	0	20.276.155	096,0
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTRAN	4	2.279.854.091	2.007.160.519	88,0	2.420.127.610	2.094.034.753	86,5	140.273.519	140.273.519	100,0	0	53.399.285	0,0
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU	4	2.749.901.209	2.751.703.818	100,1	2.774.162.074	2.712.944.529	97,8	24.260.865	24.260.865	100,0	0	63.020.154	0,0
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG	4	2.387.441.206	2.390.601.196	100,1	2.427.229.006	2.361.301.274	97,3	39.787.800	39.787.800	100,0	0	69.087.722	088,0
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA	4	2.560.725.267	2.563.448.008	100,1	2.631.963.595	2.514.325.370	95,5	71.238.328	71.238.328	100,0	0	120.360.966	0,0
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	4	2.074.954.364	2.076.843.048	100,1	2.090.487.077	2.058.909.076	98,5	15.532.713	15.532.713	100,0	0	33.466.685	720,0
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	1.953.461.016	1.720.141.098	88,1	2.081.241.276	1.745.372.151	83,9	127.780.260	127.780.260	100,0	0	102.549.207	0,0
11	**KECAMATAN LALAN**		59.865.350.560	56.286.347.705	94,0	59.545.814.233	53.792.105.142	90,3	(319.536.327)	(193.009.127)	60,4	0	2.301.233.436	0,0
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG	5	2.964.127.613	2.316.870.724	78,2	3.067.800.946	2.402.689.340	78,3	103.673.333	103.673.333	100,0	0	17.854.716	300,0
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	5	2.606.691.504	2.608.686.447	100,1	2.544.521.780	2.534.461.878	99,6	(62.169.724)	(62.169.724)	100,0	0	12.054.845	0,0
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	5	2.363.990.962	2.364.814.207	100,0	2.350.479.033	2.336.960.278	99,4	(13.511.929)	(13.511.929)	100,0	0	14.342.000	327,0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	5	2.310.568.251	1.897.527.695	82,1	2.223.919.802	1.280.088.479	57,6	(86.648.449)	(44.570.449)	51,4	0	572.868.767	0,0
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI	5	2.176.459.164	1.832.989.342	84,2	2.231.731.831	1.873.847.021	84,0	55.272.667	70.272.667	127,1	0	29.414.988	496,0
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	5	2.227.661.865	2.231.866.311	100,2	2.251.498.221	2.213.333.023	98,3	23.836.356	23.836.356	100,0	0	42.369.644	304,0
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	5	2.157.630.164	1.829.464.064	84,8	2.188.180.964	1.823.835.846	83,3	30.550.800	0	0,0	0	5.628.218	0,0
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	5	2.077.237.016	2.075.086.550	99,9	1.977.897.169	1.891.991.078	95,7	(99.339.847)	(99.339.847)	100,0	0	83.755.625	0,0
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	2.056.105.016	2.052.310.984	99,8	2.038.262.815	1.831.265.172	89,8	(17.842.201)	(17.842.201)	100,0	0	203.203.611	488,0
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	2.024.492.216	2.020.229.964	99,8	1.913.501.045	1.855.268.457	97,0	(110.991.171)	(110.991.171)	100,0	0	53.970.336	0,0
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA	5	2.024.925.381	2.026.490.955	100,1	1.955.130.317	1.949.690.712	99,7	(69.795.064)	(69.795.064)	100,0	0	7.005.179	0,0
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG	5	2.090.495.016	1.789.489.904	85,6	2.126.758.189	1.734.027.300	81,5	36.263.173	36.263.173	100,0	0	91.725.777	312,0
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG	5	1.872.818.715	1.873.317.237	100,0	1.865.052.568	1.862.519.924	99,9	(7.766.147)	(7.766.147)	100,0	0	3.031.166	566,0
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	5	1.945.135.214	1.943.400.770	99,9	1.886.309.350	1.874.449.072	99,4	(58.825.864)	(58.825.864)	100,0	0	10.125.834	0,0
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI	5	2.023.328.216	1.844.940.809	91,2	2.034.300.600	1.714.679.937	84,3	10.972.384	10.972.384	100,0	0	141.233.256	312,0
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	4	2.343.164.360	2.152.801.468	91,9	2.368.893.317	2.110.044.264	89,1	25.728.957	25.728.957	100,0	0	68.486.161	0,0
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	5	2.012.518.581	1.760.526.359	87,5	2.325.636.622	2.033.057.270	87,4	313.118.041	313.118.041	100,0	0	40.587.130	0,0
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING	5	2.439.216.956	2.110.239.570	86,5	2.343.931.080	2.006.957.969	85,6	(95.285.876)	(95.285.876)	100,0	0	7.995.725	0,0
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	5	2.274.080.956	1.947.200.539	85,6	2.474.985.550	1.905.450.463	77,0	200.904.594	300.904.594	149,8	0	342.654.670	072,0
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	5	1.953.391.080	1.954.069.908	100,0	1.885.030.866	1.868.921.866	99,1	(68.360.214)	(68.360.214)	100,0	0	16.787.828	968,0
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA	5	2.080.087.575	2.074.463.054	99,7	1.975.370.135	1.959.685.202	99,2	(104.717.440)	(104.717.440)	100,0	0	10.060.412	0,0
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA	5	2.435.488.654	2.434.002.241	99,9	2.455.806.066	2.140.236.257	87,2	20.317.412	20.317.412	100,0	0	314.083.396	096,0
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	5	2.364.460.655	2.370.925.407	100,3	2.377.144.751	2.341.305.741	98,5	12.684.096	12.684.096	100,0	0	42.303.762	0,0
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	2.515.152.965	2.510.637.259	99,8	2.363.066.597	2.328.740.502	98,5	(152.086.368)	(152.086.368)	100,0	0	29.810.389	896,0
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG	5	2.193.646.464	2.195.285.308	100,1	2.119.273.499	2.029.149.255	95,7	(74.372.965)	(74.372.965)	100,0	0	91.763.088	0,0
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG	5	2.353.200.286	2.349.021.168	99,8	2.319.388.786	2.298.644.374	99,1	(33.811.500)	(33.811.500)	100,0	0	16.565.294	0,0
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	1.979.275.715	1.719.689.461	86,9	1.881.942.333	1.590.804.462	84,5	(97.333.382)	(97.333.382)	100,0	0	31.551.617	0,0
12	**KECAMATAN TUNGKAL JAYA**		39.943.000.986	40.128.171.827	100,5	39.137.463.118	37.462.066.269	95,7	(605.282.292)	(595.282.292)	98,3	200.255.576	2.070.823.267	034,1
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	4	3.271.717.204	3.290.999.132	100,6	2.984.756.204	2.934.463.981	98,3	(286.961.000)	(270.961.000)	94,4	0	85.574.151	0,0
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	3.091.883.208	3.092.026.985	100,0	3.206.409.822	2.986.772.338	93,2	114.526.614	114.526.614	100,0	0	219.781.261	0,0
12.2003.	PEMERINTAH DESA BERLIAN JAYA	4	2.618.712.313	2.617.200.924	99,9	2.573.154.259	2.499.456.259	97,1	(45.558.054)	(45.558.054)	100,0	0	72.186.611	0,0
12.2004.	PEMERINTAH DESA SIMPANG TUNGKAL	4	2.562.051.607	2.557.517.647	99,8	2.434.470.622	2.224.121.427	91,4	(127.580.985)	(127.580.985)	100,0	0	205.815.235	0,0
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNGKAL	4	2.402.848.353	2.445.240.317	101,8	2.293.590.353	2.262.659.947	98,7	(109.258.000)	(115.258.000)	105,5	0	67.322.370	0,0
12.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER HARUM	4	2.317.026.914	2.315.326.020	99,9	2.442.073.914	2.311.389.067	94,6	125.181.078	125.181.078	100,0	134.078	129.118.031	300,6
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	4	2.155.226.963	2.152.764.082	99,9	2.033.424.618	1.994.309.919	98,1	(121.802.345)	(121.802.345)	100,0	0	36.651.818	504,0
12.2008.	PEMERINTAH DESA SINAR HARAPAN	4	2.394.117.346	2.393.357.201	100,0	2.230.285.676	2.107.199.095	94,5	(159.886.287)	(159.886.287)	100,0	3.945.383	126.271.819	200,5

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
12.2009.	PEMERINTAH DESA BANJAR JAYA	4	2.433.189.111	2.434.430.437	100,1	2.340.074.712	2.327.237.412	99,5	75.425.500	75.425.500	100,0	168.539.899	182.618.525	108,4
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	2.645.189.406	2.769.380.158	104,7	2.582.863.806	2.517.979.809	97,5	(62.325.600)	(62.325.600)	100,0	0	189.074.749	0,0
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR	4	2.862.641.404	2.860.835.595	99,9	2.967.621.549	2.889.524.368	97,4	104.980.145	104.980.145	100,0	0	76.291.372	0,0
12.2012.	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI	4	2.129.608.779	2.124.719.441	99,8	2.057.025.693	2.013.940.162	97,9	(72.583.086)	(72.583.086)	100,0	0	38.196.193	0,0
12.2013.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	4	2.328.413.212	2.327.457.525	100,0	2.251.906.741	2.127.553.091	94,5	(76.506.471)	(76.506.471)	100,0	0	123.397.963	0,0
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	4	2.285.755.682	2.283.444.380	99,9	2.157.110.093	2.050.071.303	95,0	(101.009.373)	(101.009.373)	100,0	27.636.216	132.363.704	479,0
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	4	2.115.211.628	2.131.504.893	100,8	2.196.982.174	2.110.324.287	96,1	81.770.546	81.770.546	100,0	0	102.951.152	024,0
12.2016.	PEMERINTAH DESA SINAR TUNGKAL	4	2.329.407.856	2.331.967.090	100,1	2.385.712.881	2.105.063.803	88,2	56.305.025	56.305.025	100,0	0	283.208.312	0,0
13	**KECAMATAN LAWANG WETAN**		32.365.127.198	29.593.906.481	91,4	33.385.057.745	28.540.713.810	85,5	1.164.044.574	1.158.759.154	99,5	144.114.027	2.211.951.825	534,9
13.2001.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH	4	2.416.041.743	2.144.353.190	88,8	2.432.284.308	2.156.587.240	88,7	16.766.728	16.766.728	100,0	524.163	4.532.678	864,7
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	4	2.816.131.355	2.896.521.078	102,9	2.875.583.053	2.730.030.985	94,9	59.451.698	59.451.698	100,0	0	225.941.791	0,0
13.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DURIAN	4	1.861.250.115	1.609.286.931	86,5	1.950.435.115	1.549.078.891	79,4	89.185.000	89.185.000	100,0	0	149.393.040	0,0
13.2004.	PEMERINTAH DESA NAPAL	4	1.881.871.463	1.667.095.285	88,6	2.148.792.052	1.706.434.146	79,4	391.520.464	391.520.464	100,0	124.599.875	352.181.603	282,7
13.2005.	PEMERINTAH DESA RANTAU KASIH	4	2.401.159.356	2.401.955.053	100,0	2.531.732.956	2.486.437.956	98,2	130.573.600	130.573.600	100,0	0	46.090.697	0,0
13.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN I	4	2.181.382.356	1.949.169.374	89,4	2.180.952.356	1.315.460.505	60,3	0	0	0,0	430.000	633.708.869	374,2
13.2007.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN II	4	2.045.190.270	1.753.451.218	85,7	2.045.190.270	1.749.997.908	85,6	0	0	0,0	0	3.453.310	0,0
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU	4	2.235.606.429	2.233.376.549	99,9	2.366.556.337	2.016.223.959	85,2	130.949.908	130.949.908	100,0	0	348.102.498	0,0
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU	4	2.114.117.364	1.907.346.847	90,2	2.118.124.300	1.850.457.909	87,4	4.436.936	0	0,0	430.000	56.888.938	230,0
13.2010.	PEMERINTAH DESA KARANG WARU	4	1.963.711.917	1.714.616.550	87,3	1.983.040.822	1.711.003.550	86,3	19.328.905	18.480.421	95,6	0	22.093.421	0,0
13.2011.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	4	2.095.256.953	1.816.691.720	86,7	2.095.256.953	1.833.584.036	87,5	18.129.989	18.129.989	100,0	18.129.989	1.237.673	6,8
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG	4	2.225.775.717	2.162.740.039	97,2	2.479.884.417	2.140.476.142	86,3	254.108.700	254.108.700	100,0	0	276.372.597	0,0
13.2013.	PEMERINTAH DESA SIMPANG SARI	4	1.906.965.077	1.647.852.930	86,4	1.981.557.723	1.701.669.180	85,9	74.592.646	74.592.646	100,0	0	20.776.396	896,0
13.2014.	PEMERINTAH DESA TALANG PIASE	4	2.140.548.265	1.846.111.274	86,2	2.115.548.265	1.836.646.244	86,8	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	(15.534.970)	0,0
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG	4	2.080.118.818	1.843.338.442	88,6	2.080.118.818	1.756.625.159	84,4	0	0	0,0	0	86.713.283	0,0
14	**KECAMATAN BABAT SUPAT**		38.947.627.096	38.778.884.254	99,6	39.920.731.478	34.756.599.967	87,1	1.384.212.953	1.737.462.589	125,5	411.108.571	5.759.746.876	401,0
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	3.302.536.809	3.302.476.921	100,0	3.292.099.028	3.032.877.382	92,1	64.048.401	64.048.400	100,0	74.486.182	333.647.939	447,9
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	5	2.383.817.415	2.389.405.822	100,2	2.381.250.579	1.993.694.591	83,7	(2.566.836)	(2.566.836)	100,0	0	393.144.395	128,0
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT	4	2.440.281.908	2.438.152.472	99,9	2.692.602.291	2.180.561.114	81,0	252.320.383	282.115.383	111,8	0	539.706.741	0,0
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	3.035.349.730	3.020.386.420	99,5	3.202.431.944	3.018.192.419	94,2	167.082.214	167.082.214	100,0	0	169.276.215	712,0
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	4	2.810.063.518	2.814.077.340	100,1	2.647.927.884	2.324.506.387	87,8	(162.135.634)	(141.505.634)	87,3	0	348.065.319	0,0
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	4	2.432.851.265	2.209.478.171	90,8	2.432.851.265	1.659.037.307	68,2	336.622.371	336.622.371	100,0	336.622.371	887.063.235	263,5
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	2.691.182.015	2.699.155.397	100,3	2.687.803.458	2.580.922.103	96,0	(3.378.557)	56.621.443	675,9)	0	174.854.737	896,0
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAYA	4	1.930.163.251	1.925.909.227	99,8	1.941.692.833	1.649.390.197	84,9	11.529.582	11.529.582	100,0	0	288.048.612	128,0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	4	1.981.291.917	2.012.534.610	101,6	2.166.920.673	1.836.261.232	84,7	185.628.756	205.628.756	110,8	0	381.902.134	880,0
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	4	2.169.464.408	2.171.696.576	100,1	2.202.040.174	2.064.909.727	93,8	32.575.766	64.980.766	199,5	0	171.767.615	784,0
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	4	2.018.321.416	2.018.823.615	100,0	1.962.955.060	1.769.356.149	90,1	(55.366.356)	(55.366.720)	100,0	0	194.100.746	i4E18
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT	4	2.347.852.356	2.352.550.159	100,2	2.659.823.083	1.890.721.687	71,1	311.970.727	432.870.727	138,8	0	894.699.199	i1E18
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	4	2.464.469.718	2.469.846.109	100,2	2.537.686.816	2.113.036.593	83,3	73.217.098	102.737.098	140,3	0	459.546.614	0,0
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	4	2.647.132.756	2.654.489.339	100,3	2.816.106.288	2.631.835.747	93,5	168.973.532	168.973.532	100,0	0	191.627.124	496,0
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	4	2.198.573.164	2.203.451.021	100,2	2.221.751.208	2.132.993.700	96,0	23.178.062	43.178.062	186,3	18	113.635.383	680,8
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	4	2.094.275.450	2.096.451.055	100,1	2.074.788.894	1.878.303.632	90,5	(19.486.556)	513.444	(2,6)	0	218.660.867	0,0
15	**KECAMATAN JIRAK JAYA**		26.701.618.396	26.633.850.898	99,7	27.840.066.633	27.434.102.655	98,5	1.177.660.487	1.177.660.487	100,0	39.212.251	377.408.730	962,5
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK	4	2.954.920.306	2.959.053.410	100,1	3.002.191.512	2.946.335.131	98,1	47.271.206	47.271.206	100,0	0	59.989.485	472,0
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU	4	2.303.487.029	2.302.263.002	99,9	2.492.875.447	2.490.143.565	99,9	189.388.418	189.388.418	100,0	0	1.507.855	600,0
15.2003.	PEMERINTAH DESA TALANG SIMPANG	4	2.113.192.696	2.114.254.101	100,1	2.167.495.334	2.163.037.126	99,8	54.302.638	54.302.638	100,0	0	5.519.613	418,0
15.2004.	PEMERINTAH DESA JEMBATAN GANTUNG	4	2.424.569.621	2.419.764.921	99,8	2.495.876.334	2.458.092.788	98,5	71.306.713	71.306.713	100,0	0	32.978.846	328,0
15.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG MANDUNG	4	1.945.606.753	1.928.731.303	99,1	1.966.577.138	1.945.098.598	98,9	20.970.385	20.970.385	100,0	0	4.603.090	666,0
15.2006.	PEMERINTAH DESA REJOSARI	4	2.198.587.978	2.158.377.069	98,2	2.349.693.225	2.301.860.887	98,0	190.317.498	190.317.498	100,0	39.212.251	46.833.680	119,4
15.2007.	PEMERINTAH DESA BANGKIT JAYA	4	1.938.419.198	1.934.482.495	99,8	1.978.374.800	1.900.876.505	96,1	39.955.602	39.955.602	100,0	0	73.561.592	0,0
15.2008.	PEMERINTAH DESA BARU JAYA	4	1.980.920.811	1.980.659.743	100,0	2.005.994.598	2.004.019.185	99,9	25.073.787	25.073.787	100,0	0	1.714.345	900,0
15.2009.	PEMERINTAH DESA SINAR JAYA	4	2.368.380.354	2.369.017.609	100,0	2.457.506.597	2.455.217.022	99,9	89.126.243	89.126.243	100,0	0	2.926.830	900,0
15.2010.	PEMERINTAH DESA SETIA JAYA	4	1.963.672.186	1.964.116.804	100,0	2.036.966.924	1.948.096.043	95,6	73.294.738	73.294.738	100,0	0	89.315.499	200,0
15.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	2.574.728.708	2.572.871.755	99,9	2.903.471.482	2.884.784.841	99,4	328.742.774	328.742.774	100,0	0	16.829.688	0,0
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	4	1.935.132.756	1.930.258.686	99,7	1.983.043.240	1.936.540.963	97,7	47.910.484	47.910.484	100,0	0	41.628.207	0,0
	JUMLAH		543.214.187.193	528.358.323.791	97,3	556.253.703.188	514.825.614.168	92,6	14.076.366.257	14.975.658.644	106,4	1.036.850.262	28.508.368.268	749,5

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran 2a

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Rp)				REALISASI PENDAPATAN DESA (Rp)				%	SISA ANGGARAN
			PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	0	2.644.633.663	64.208.737	2.708.842.400	30.100.000	2.639.192.911	64.208.737	2.733.501.648	**100,91**	(24.659.248)
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	4	0	2.793.013.863	6.086.500	2.799.100.363	43.644.400	2.793.013.863	6.086.500	2.842.744.763	**101,56**	(43.644.400)
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	4	0	3.188.455.364	10.499.640	3.198.955.004	56.480.000	3.182.561.216	12.634.912	3.251.676.128	**101,65**	(52.721.124)
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	4	66.312.100	3.282.681.465	7.501.361	3.356.494.926	66.312.100	3.282.681.465	7.501.361	3.356.494.926	**100,00**	0
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	4	83.700.000	2.321.968.663	200.000.000	2.605.668.663	170.350.000	2.425.618.820	207.033.390	2.803.002.210	**107,57**	(197.333.547)
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	4	0	2.011.077.823	1.839.746	2.012.917.568	0	2.006.694.994	4.747.801	2.011.442.795	**99,93**	1.474.774
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	4	0	2.337.011.826	1.903.073	2.338.914.899	0	2.337.011.826	1.903.073	2.338.914.899	**100,00**	0
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	0	2.276.924.774	2.442.221	2.279.366.995	0	2.277.189.255	2.442.221	2.279.631.476	**100,01**	(264.481)
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	4	0	3.347.463.867	27.053.349	3.374.517.216	41.875.000	3.340.662.927	27.053.349	3.409.591.276	**101,04**	(35.074.060)
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	4	0	3.218.073.863	12.071.861	3.230.145.724	53.360.000	3.218.073.863	12.071.861	3.283.505.724	**101,65**	(53.360.000)
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	0	2.422.438.512	2.000.000	2.424.438.512	0	2.416.997.760	4.217.042	2.421.214.802	**99,87**	3.223.710
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	4	0	2.219.832.411	0	2.219.832.411	0	2.253.034.808	1.805.023	2.254.839.831	**101,58**	(35.007.420)
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG TIMUI	4	0	2.570.237.976	2.000.000	2.572.237.976	0	2.287.324.261	1.334.751	2.288.659.012	**88,98**	283.578.964
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	4	0	2.772.180.603	0	2.772.180.603	0	2.772.180.603	1.713.973	2.773.894.576	**100,06**	(1.713.973)
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	4	985.000	2.947.637.805	1.090.000	2.949.712.805	985.000	2.947.637.805	3.610.648	2.952.233.453	**100,09**	(2.520.648)
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	4	0	2.523.885.512	0	2.523.885.512	0	2.418.444.760	1.449.812	2.419.894.572	**95,88**	103.990.940
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	4	0	3.098.173.704	40.701.200	3.138.874.904	0	3.099.164.883	47.068.397	3.146.233.280	**100,23**	(7.358.376)
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	4	0	2.489.980.805	16.505.369	2.506.486.174	0	2.484.564.492	16.599.793	2.501.164.285	**99,79**	5.321.889
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I	4	31.650.000	2.711.511.704	2.090.000	2.745.251.704	31.530.000	2.711.511.704	1.518.901	2.744.560.605	**99,97**	691.099
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II	4	0	2.518.384.613	2.500.000	2.520.884.613	0	2.513.699.521	2.239.334	2.515.938.855	**99,80**	4.945.758
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III	4	0	2.801.018.914	1.090.000	2.802.108.914	0	2.801.699.008	1.863.571	2.803.562.579	**100,05**	(1.453.665)
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTAR	4	0	2.141.099.964	2.090.000	2.143.189.964	0	2.137.094.966	1.739.177	2.138.834.143	**99,80**	4.355.821
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARA	4	13.000.000	2.304.192.704	2.000.000	2.319.192.704	13.000.000	2.300.534.312	1.788.957	2.315.323.269	**99,83**	3.869.435
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELA	4	12.000.000	2.175.131.811	2.000.000	2.189.131.811	12.000.000	2.171.504.643	1.512.181	2.185.016.824	**99,81**	4.114.987
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	4	0	2.191.332.951	2.000.000	2.193.332.951	0	2.193.086.312	1.924.148	2.195.010.460	**100,08**	(1.677.509)
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	9.000.000	2.219.193.741	2.090.000	2.230.283.741	9.000.000	2.215.566.573	2.732.160	2.227.298.733	**99,87**	2.985.008
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	4	0	2.150.128.966	0	2.150.128.966	0	2.150.128.966	463.994	2.150.592.960	**100,02**	(463.994)
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	4	0	2.209.218.408	6.000.000	2.215.218.408	0	2.209.218.408	7.520.808	2.216.739.216	**100,07**	(1.520.808)
03.2004.	PEMERINTAH DESA KARTAYU	4	0	2.531.281.366	372.586	2.531.653.952	0	2.531.281.366	1.730.837	2.533.012.203	**100,05**	(1.358.251)
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	4	0	2.101.290.265	8.681.498	2.109.971.763	0	2.101.290.265	9.207.076	2.110.497.341	**100,02**	(525.578)
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	0	2.228.887.966	0	2.228.887.966	0	2.228.887.966	991.276	2.229.879.242	**100,04**	(991.276)
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG	4	0	2.718.386.108	0	2.718.386.108	0	2.718.386.108	547.425	2.718.933.533	**100,02**	(547.425)
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	0	2.553.170.306	0	2.553.170.306	0	2.553.170.306	828.841	2.553.999.147	**100,03**	(828.841)
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	4	0	2.620.531.106	17.313.000	2.637.844.106	0	2.620.531.106	17.857.770	2.638.388.876	**100,02**	(544.770)
03.2014.	PEMERINTAH DESA KERTA JAYA	4	0	2.414.589.714	0	2.414.589.714	0	2.415.449.145	1.550.954	2.417.000.099	**100,10**	(2.410.385)

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Rp)				REALISASI PENDAPATAN DESA (Rp)				%	SISA ANGGARAN
			PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA	4	0	2.294.256.766	0	2.294.256.766	0	2.294.256.766	2.050.728	2.296.307.494	**100,09**	(2.050.728)
04.2001.	PEMERINTAH DESA BUKIT SEJAHTERA	4	0	2.362.566.855	2.000.000	2.364.566.855	0	2.357.126.103	2.459.943	2.359.586.046	**99,79**	4.980.809
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUKIT PANGKUASAN	4	0	1.926.545.115	0	1.926.545.115	0	1.926.545.115	1.145.896	1.927.691.011	**100,06**	(1.145.896)
04.2003.	PEMERINTAH DESA TANAH ABANG	4	0	2.473.756.617	0	2.473.756.617	0	2.231.234.949	4.206.786	2.235.441.735	**90,37**	238.314.882
04.2004.	PEMERINTAH DESA TALANG LEBAN	4	0	2.015.878.164	0	2.015.878.164	0	2.015.878.164	2.006.861	2.017.885.025	**100,10**	(2.006.861)
04.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH	4	0	2.075.108.715	3.062.618	2.078.171.333	0	2.075.108.715	2.554.332	2.077.663.047	**99,98**	508.286
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH	4	0	1.970.404.515	0	1.970.404.515	0	1.970.404.515	1.077.363	1.971.481.878	**100,05**	(1.077.363)
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL	4	20.050.000	1.951.368.715	0	1.971.418.715	20.050.000	1.951.595.413	2.544.296	1.974.189.709	**100,14**	(2.770.994)
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	4	0	2.961.704.467	0	2.961.704.467	0	2.961.704.467	4.254.034	2.965.958.501	**100,14**	(4.254.034)
04.2009.	PEMERINTAH DESA SAKO SUBAN	4	0	2.853.927.018	0	2.853.927.018	0	2.853.927.018	9.391.718	2.863.318.736	**100,33**	(9.391.718)
04.2010.	PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU	4	0	2.154.933.964	0	2.154.933.964	0	2.149.493.212	2.656.224	2.152.149.436	**99,87**	2.784.528
04.2011.	PEMERINTAH DESA SAUT	4	0	2.313.458.505	0	2.313.458.505	0	2.313.458.505	3.177.180	2.316.635.685	**100,14**	(3.177.180)
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI	4	3.200.000	1.922.037.315	0	1.925.237.315	0	1.922.037.315	2.314.179	1.924.351.494	**99,95**	885.821
04.2013.	PEMERINTAH DESA PINGGAP	4	0	1.904.585.714	0	1.904.585.714	0	1.904.585.714	1.353.327	1.905.939.041	**100,07**	(1.353.327)
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	4	0	1.945.238.715	0	1.945.238.715	0	1.945.238.715	904.130	1.946.142.845	**100,05**	(904.130)
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	4	0	2.127.680.513	2.090.000	2.129.770.513	0	1.730.771.818	6.754.947	1.737.526.765	**81,58**	392.243.748
04.2016.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BULIAN	4	0	2.681.695.457	0	2.681.695.457	0	2.679.201.779	3.688.304	2.682.890.083	**100,04**	(1.194.626)
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI	4	0	2.115.203.378	0	2.115.203.378	0	2.119.997.739	3.344.247	2.123.341.986	**100,38**	(8.138.608)
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	4	0	1.861.160.678	521.225.660	2.382.386.338	0	1.861.160.678	524.933.986	2.386.094.664	**100,16**	(3.708.326)
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I	4	0	1.613.504.179	0	1.613.504.179	0	1.613.504.179	1.897.671	1.615.401.850	**100,12**	(1.897.671)
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	4	0	1.912.664.628	521.225.660	2.433.890.288	0	1.912.664.628	526.530.465	2.439.195.093	**100,22**	(5.304.805)
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	4	9.440.000	1.733.379.527	223.374.140	1.966.193.667	17.450.000	1.733.379.527	226.260.144	1.977.089.671	**100,55**	(10.896.004)
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	4	30.980.000	2.199.997.879	0	2.230.977.879	53.510.000	2.200.117.879	3.577.704	2.257.205.583	**101,18**	(26.227.704)
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	4	0	2.261.016.966	0	2.261.016.966	0	2.261.016.966	3.391.326	2.264.408.292	**100,15**	(3.391.326)
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III	4	0	1.718.325.680	18.970.704	1.737.296.384	0	1.718.690.563	12.093.593	1.730.784.156	**99,63**	6.512.228
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	0	2.055.332.119	0	2.055.332.119	16.180.000	2.055.332.119	2.563.922	2.074.076.041	**100,91**	(18.743.922)
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	0	2.449.939.467	0	2.449.939.467	6.580.000	2.450.000.133	4.406.967	2.460.987.100	**100,45**	(11.047.633)
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	4	5.700.000	2.470.811.879	3.567.590	2.480.079.469	8.500.000	2.475.079.679	5.279.846	2.488.859.525	**100,35**	(8.780.056)
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	4	0	1.901.833.531	0	1.901.833.531	0	1.905.392.842	3.483.365	1.908.876.207	**100,37**	(7.042.676)
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	4	0	1.863.349.270	0	1.863.349.270	0	1.863.361.470	6.156.360	1.869.517.830	**100,33**	(6.168.560)
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	4	0	1.996.561.531	0	1.996.561.531	1.560.000	1.996.741.405	3.876.569	2.002.177.974	**100,28**	(5.616.443)
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	4	0	1.886.297.529	0	1.886.297.529	0	1.886.297.529	2.788.124	1.889.085.653	**100,15**	(2.788.124)
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI	4	0	2.053.342.427	521.225.660	2.574.568.087	0	2.053.342.427	524.916.247	2.578.258.674	**100,14**	(3.690.587)
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI	4	0	2.259.176.028	0	2.259.176.028	0	2.258.794.208	11.636.992	2.270.431.200	**100,50**	(11.255.172)
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA	4	0	2.346.389.858	2.090.000	2.348.479.858	500.000	2.346.389.858	2.128.256	2.349.018.114	**100,02**	(538.256)
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA	4	0	1.862.478.815	2.090.000	1.864.568.815	0	1.862.478.815	2.228.062	1.864.706.877	**100,01**	(138.062)
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	0	2.111.618.619	2.090.000	2.113.708.619	0	2.106.597.867	2.794.420	2.109.392.287	**99,80**	4.316.332
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	0	2.167.299.254	2.134.403	2.169.433.657	0	2.195.526.842	2.433.264	2.197.960.106	**101,31**	(28.526.449)
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	4	0	2.063.876.664	2.090.000	2.065.966.664	54.850.000	2.034.436.664	3.024.775	2.092.311.439	**101,28**	(26.344.775)
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI	4	0	2.408.666.056	3.525.260	2.412.191.316	0	2.408.666.056	3.228.888	2.411.894.944	**99,99**	296.372

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Rp)				REALISASI PENDAPATAN DESA (Rp)				%	SISA ANGGARAN
			PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	36.600.000	2.929.003.717	4.090.000	2.969.693.717	42.685.788	2.916.492.501	3.151.203	2.962.329.492	**99,75**	7.364.225
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	4	0	2.626.553.917	15.840.000	2.642.393.917	0	2.626.553.917	15.825.896	2.642.379.813	**100,00**	14.104
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	4	0	2.307.303.056	2.300.000	2.309.603.056	0	2.306.889.660	2.446.477	2.309.336.137	**99,99**	266.919
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO	4	0	2.290.715.654	2.300.000	2.293.015.654	0	2.290.715.654	22.500.513	2.313.216.167	**100,88**	(20.200.513)
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	4	0	2.298.766.856	0	2.298.766.856	700.000	2.298.766.856	26.574.460	2.326.041.316	**101,19**	(27.274.460)
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	4	0	2.181.366.334	2.090.000	2.183.456.334	0	2.181.366.334	2.070.383	2.183.436.717	**100,00**	19.617
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	22.000.000	3.001.526.191	2.090.000	3.025.616.191	22.000.000	3.022.130.719	4.274.770	3.048.405.489	**100,75**	(22.789.298)
07.2008.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	0	2.355.733.498	2.000.000	2.357.733.498	0	2.121.350.698	2.719.171	2.124.069.869	**90,09**	233.663.629
07.2009.	PEMERINTAH DESA LINGGO SARI	4	0	2.399.162.140	2.090.000	2.401.252.140	0	2.399.162.140	2.150.513	2.401.312.653	**100,00**	(60.513)
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	4	0	2.542.565.088	2.090.000	2.544.655.088	0	2.317.162.528	1.973.339	2.319.135.867	**91,14**	225.519.221
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	4	55.000.000	2.222.704.597	1.000.000	2.278.704.597	55.000.000	2.222.704.597	5.580.406	2.283.285.003	**100,20**	(4.580.406)
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI	4	0	2.291.979.298	3.000.000	2.294.979.298	0	2.311.979.298	4.491.082	2.316.470.380	**100,94**	(21.491.082)
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	4	42.000.000	2.628.378.090	3.000.000	2.673.378.090	42.000.000	2.648.378.090	5.429.806	2.695.807.896	**100,84**	(22.429.806)
07.2014.	PEMERINTAH DESA BUMI KENCANA	4	0	2.693.327.104	2.240.946	2.695.568.050	0	2.693.780.500	2.533.029	2.696.313.529	**100,03**	(745.479)
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI	4	32.000.000	2.372.624.948	2.000.000	2.406.624.948	32.000.000	2.373.380.608	2.176.297	2.407.556.905	**100,04**	(931.957)
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN	4	0	2.473.595.797	1.000.000	2.474.595.797	0	2.493.595.797	3.303.148	2.496.898.945	**100,90**	(22.303.148)
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	4	0	2.705.299.589	3.000.000	2.708.299.589	0	2.704.317.231	9.473.328	2.713.790.559	**100,20**	(5.490.970)
07.2019.	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	4	0	2.320.851.898	19.900.000	2.340.751.898	0	2.320.851.898	20.037.101	2.340.888.999	**100,01**	(137.101)
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	4	8.000.000	2.178.668.350	3.176.935	2.189.845.285	8.000.000	2.198.668.350	3.406.731	2.210.075.081	**100,92**	(20.229.796)
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO	5	0	2.243.288.394	2.000.000	2.245.288.394	0	2.263.288.394	14.434.803	2.277.723.197	**101,44**	(32.434.803)
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM	5	0	2.074.033.089	2.000.000	2.076.033.089	0	2.094.033.089	2.746.020	2.096.779.109	**101,00**	(20.746.020)
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS	5	0	2.725.603.989	2.000.000	2.727.603.989	0	2.745.603.989	4.335.575	2.749.939.564	**100,82**	(22.335.575)
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	30.000.000	2.397.238.900	2.500.000	2.429.738.900	30.000.000	2.417.238.900	3.222.768	2.450.461.668	**100,85**	(20.722.768)
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	5	0	2.450.273.989	2.500.000	2.452.773.989	10.200.000	2.470.273.989	2.749.668	2.483.223.657	**101,24**	(30.449.668)
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	5	0	2.763.627.498	4.000.000	2.767.627.498	0	2.531.510.698	3.842.444	2.535.353.142	**91,61**	232.274.356
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	20.000.000	2.628.545.641	1.700.000	2.650.245.641	20.000.000	2.648.545.641	3.591.407	2.672.137.048	**100,83**	(21.891.407)
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA	5	0	2.577.381.690	2.000.000	2.579.381.690	0	2.597.381.690	3.394.014	2.600.775.704	**100,83**	(21.394.014)
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA	5	0	2.330.233.639	1.600.000	2.331.833.639	0	2.350.233.639	2.097.853	2.352.331.492	**100,88**	(20.497.853)
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	0	1.877.856.499	2.000.000	1.879.856.499	0	1.897.856.499	1.884.204	1.899.740.703	**101,06**	(19.884.204)
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	70.800.000	2.056.203.000	2.000.000	2.129.003.000	70.800.000	2.076.203.000	2.166.139	2.149.169.139	**100,95**	(20.166.139)
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	5	0	2.193.754.649	2.500.000	2.196.254.649	0	2.213.754.649	3.976.903	2.217.731.552	**100,98**	(21.476.903)
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	5	0	1.946.204.002	2.500.000	1.948.704.002	0	1.966.204.002	10.110.090	1.976.314.092	**101,42**	(27.610.090)
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	4	3.651.538	3.490.185.811	2.090.000	3.495.927.349	14.151.538	2.624.367.331	7.378.051	2.645.896.920	**75,69**	850.030.429
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	4	0	3.591.989.013	71.701.000	3.663.690.013	0	2.843.669.280	36.685.250	2.880.354.530	**78,62**	783.335.483
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	4	0	2.322.124.502	0	2.322.124.502	0	2.061.260.698	7.077.225	2.068.337.923	**89,07**	253.786.579
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	4	3.651.538	2.597.788.102	0	2.601.439.640	3.651.538	2.211.214.089	8.138.198	2.223.003.825	**85,45**	378.435.815
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	3.651.538	2.335.895.962	24.740.000	2.364.287.500	3.651.538	2.061.818.874	26.107.142	2.091.577.554	**88,47**	272.709.946
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	4	3.651.538	2.157.075.463	0	2.160.727.001	58.651.538	2.152.541.503	3.678.335	2.214.871.376	**102,51**	(54.144.375)
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	4	33.295.970	2.255.836.962	1.760.479	2.290.893.411	22.695.270	1.882.189.402	7.727.633	1.912.612.305	**83,49**	378.281.106
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	14.746.456	2.357.301.912	0	2.372.048.368	14.746.456	2.243.462.739	4.966.607	2.263.175.802	**95,41**	108.872.566

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Rp)				REALISASI PENDAPATAN DESA (Rp)				%	SISA ANGGARAN
			PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	98.195.270	3.430.333.615	2.090.000	3.530.618.885	104.195.270	2.654.221.165	8.166.670	2.766.583.105	**78,36**	764.035.780
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	4	3.651.538	3.432.883.918	0	3.436.535.456	8.651.538	2.822.828.170	4.376.229	2.835.855.937	**82,52**	600.679.519
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	4	8.776.538	3.181.371.805	2.090.000	3.192.238.343	8.776.538	3.181.371.805	8.360.367	3.198.508.710	**100,20**	(6.270.367)
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	4	3.651.538	2.378.942.211	11.207.392	2.393.801.141	3.651.538	2.136.990.051	4.417.132	2.145.058.721	**89,61**	248.742.420
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	3.651.538	2.469.384.302	0	2.473.035.840	3.651.538	2.168.427.902	7.391.002	2.179.470.442	**88,13**	293.565.398
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	1.810.164	2.044.418.962	0	2.046.229.126	3.310.164	1.773.999.562	3.033.450	1.780.343.176	**87,01**	265.885.950
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	4	1.810.164	2.120.416.954	0	2.122.227.118	3.810.164	1.900.227.601	5.246.745	1.909.284.510	**89,97**	212.942.608
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	6.010.788	2.763.855.601	13.634.885	2.783.501.274	1.810.164	2.227.326.229	5.514.542	2.234.650.935	**80,28**	548.850.339
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	12.457.906	3.173.162.213	2.090.000	3.187.710.119	12.457.906	2.743.939.413	10.982.123	2.767.379.442	**86,81**	420.330.677
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	4	0	2.393.368.764	0	2.393.368.764	0	2.110.863.142	4.371.388	2.115.234.530	**88,38**	278.134.234
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	3.651.538	2.970.914.102	7.000.000	2.981.565.640	3.651.538	2.969.078.078	19.737.959	2.992.467.575	**100,37**	(10.901.935)
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	159.250	2.166.808.063	2.090.000	2.169.057.313	0	1.722.493.440	3.562.226	1.726.055.666	**79,58**	443.001.647
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	3.651.538	2.174.386.455	26.169.073	2.204.207.066	3.651.538	2.105.774.038	4.958.899	2.114.384.475	**95,92**	89.822.591
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	4	6.575.000	2.366.048.265	62.058.201	2.434.681.466	6.575.000	2.366.029.817	64.520.975	2.437.125.792	**100,10**	(2.444.326)
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	0	2.345.825.217	0	2.345.825.217	0	2.345.825.217	2.821.300	2.348.646.517	**100,12**	(2.821.300)
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	4	40.000.000	2.187.869.364	0	2.227.869.364	40.000.000	1.957.174.164	4.624.215	2.001.798.379	**89,85**	226.070.985
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	4	0	2.264.289.455	0	2.264.289.455	0	2.264.289.455	4.153.486	2.268.442.941	**100,18**	(4.153.486)
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	0	2.720.850.356	0	2.720.850.356	0	2.720.850.356	5.528.177	2.726.378.533	**100,20**	(5.528.177)
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	4	0	2.006.545.115	0	2.006.545.115	0	2.006.111.155	1.931.245	2.008.042.400	**100,07**	(1.497.285)
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	4	0	2.370.236.415	0	2.370.236.415	0	2.370.236.415	2.759.959	2.372.996.374	**100,12**	(2.759.959)
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	4	17.050.000	2.336.504.166	0	2.353.554.166	17.050.000	2.336.504.166	1.625.006	2.355.179.172	**100,07**	(1.625.006)
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	4	1.000.000	2.108.456.265	0	2.109.456.265	1.000.000	2.108.456.265	2.198.685	2.111.654.950	**100,10**	(2.198.685)
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTRAN	4	0	2.276.479.215	3.374.876	2.279.854.091	0	2.004.360.381	2.800.138	2.007.160.519	**88,04**	272.693.572
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU	4	0	2.749.901.209	0	2.749.901.209	0	2.749.901.209	1.802.609	2.751.703.818	**100,07**	(1.802.609)
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG	4	0	2.387.441.206	0	2.387.441.206	0	2.387.441.206	3.159.990	2.390.601.196	**100,13**	(3.159.990)
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA	4	0	2.560.725.267	0	2.560.725.267	0	2.560.725.267	2.722.741	2.563.448.008	**100,11**	(2.722.741)
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	4	0	2.074.954.364	0	2.074.954.364	0	2.074.954.364	1.888.684	2.076.843.048	**100,09**	(1.888.684)
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	1.000.000	1.952.461.016	0	1.953.461.016	1.000.000	1.714.029.416	5.111.682	1.720.141.098	**88,06**	233.319.918
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG	5	0	2.964.127.613	0	2.964.127.613	0	2.310.416.213	6.454.511	2.316.870.724	**78,16**	647.256.889
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	5	100.000.000	2.505.101.504	1.590.000	2.606.691.504	100.000.000	2.505.101.504	3.584.943	2.608.686.447	**100,08**	(1.994.943)
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	5	0	2.362.022.415	1.968.547	2.363.990.962	0	2.362.022.415	2.791.792	2.364.814.207	**100,03**	(823.245)
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	5	0	2.304.412.704	6.155.547	2.310.568.251	0	1.890.670.343	6.857.352	1.897.527.695	**82,12**	413.040.556
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI	5	0	2.176.459.164	0	2.176.459.164	0	1.830.481.008	2.508.334	1.832.989.342	**84,22**	343.469.822
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	5	25.000.000	2.202.661.865	0	2.227.661.865	25.000.000	2.202.661.865	4.204.446	2.231.866.311	**100,19**	(4.204.446)
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	5	0	2.156.040.164	1.590.000	2.157.630.164	0	1.828.036.964	1.427.100	1.829.464.064	**84,79**	328.166.100
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	5	0	2.077.237.016	0	2.077.237.016	0	2.072.022.962	3.063.588	2.075.086.550	**99,90**	2.150.466
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	0	2.054.515.016	1.590.000	2.056.105.016	0	2.049.074.264	3.236.720	2.052.310.984	**99,82**	3.794.032
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	0	2.022.902.216	1.590.000	2.024.492.216	0	2.017.461.464	2.768.500	2.020.229.964	**99,79**	4.262.252
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA	5	0	2.023.854.416	1.070.965	2.024.925.381	0	2.023.854.416	2.636.539	2.026.490.955	**100,08**	(1.565.574)
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG	5	0	2.090.495.016	0	2.090.495.016	0	1.786.458.264	3.031.640	1.789.489.904	**85,60**	301.005.112

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Rp)				REALISASI PENDAPATAN DESA (Rp)				%	SISA ANGGARAN
			PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG	5	0	1.871.228.715	1.590.000	1.872.818.715	0	1.871.228.715	2.088.522	1.873.317.237	**100,03**	(498.522)
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	5	0	1.945.135.214	0	1.945.135.214	0	1.941.054.650	2.346.120	1.943.400.770	**99,91**	1.734.444
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI	5	0	2.023.328.216	0	2.023.328.216	0	1.841.504.060	3.436.749	1.844.940.809	**91,18**	178.387.407
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	4	7.183.905	2.335.980.455	0	2.343.164.360	7.183.095	2.140.504.045	5.114.328	2.152.801.468	**91,88**	190.362.892
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	5	0	2.011.447.616	1.070.965	2.012.518.581	0	1.754.633.216	5.893.143	1.760.526.359	**87,48**	251.992.222
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING	5	0	2.439.216.956	0	2.439.216.956	0	2.108.081.756	2.157.814	2.110.239.570	**86,51**	328.977.386
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	5	0	2.274.080.956	0	2.274.080.956	0	1.942.529.608	4.670.931	1.947.200.539	**85,63**	326.880.417
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	5	0	1.952.320.115	1.070.965	1.953.391.080	0	1.952.320.115	1.749.793	1.954.069.908	**100,03**	(678.828)
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA	5	0	2.076.699.515	3.388.060	2.080.087.575	0	2.071.712.159	2.750.895	2.074.463.054	**99,73**	5.624.521
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA	5	0	2.435.488.654	0	2.435.488.654	0	2.430.047.903	3.954.338	2.434.002.241	**99,94**	1.486.413
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	5	0	2.364.460.655	0	2.364.460.655	0	2.364.460.655	6.464.752	2.370.925.407	**100,27**	(6.464.752)
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	11.312.200	2.502.270.366	1.570.399	2.515.152.965	11.312.200	2.496.300.652	3.024.407	2.510.637.259	**99,82**	4.515.706
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG	5	0	2.192.049.964	1.596.500	2.193.646.464	0	2.192.049.964	3.235.344	2.195.285.308	**100,07**	(1.638.844)
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG	5	0	2.351.059.655	2.140.631	2.353.200.286	0	2.345.996.733	3.024.435	2.349.021.168	**99,82**	4.179.118
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	0	1.979.275.715	0	1.979.275.715	0	1.716.967.919	2.721.542	1.719.689.461	**86,88**	259.586.254
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	4	286.734.000	2.981.483.204	3.500.000	3.271.717.204	298.906.000	2.985.978.951	6.114.181	3.290.999.132	**100,59**	(19.281.928)
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	22.000.000	3.069.883.208	0	3.091.883.208	22.000.000	3.064.064.626	5.962.359	3.092.026.985	**100,00**	(143.777)
12.2003.	PEMERINTAH DESA BERLIAN JAYA	4	0	2.618.712.313	0	2.618.712.313	0	2.613.120.429	4.080.495	2.617.200.924	**99,94**	1.511.389
12.2004.	PEMERINTAH DESA SIMPANG TUNGKAL	4	0	2.556.241.113	5.810.494	2.562.051.607	0	2.551.707.153	5.810.494	2.557.517.647	**99,82**	4.533.960
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNGKAL	4	0	2.402.848.353	0	2.402.848.353	0	2.398.767.789	46.472.528	2.445.240.317	**101,76**	(42.391.964)
12.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER HARUM	4	0	2.317.026.914	0	2.317.026.914	0	2.311.019.317	4.306.703	2.315.326.020	**99,93**	1.700.894
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	4	0	2.155.226.963	0	2.155.226.963	0	2.150.239.607	2.524.475	2.152.764.082	**99,89**	2.462.881
12.2008.	PEMERINTAH DESA SINAR HARAPAN	4	0	2.390.171.963	3.945.383	2.394.117.346	0	2.385.184.607	8.172.594	2.393.357.201	**99,97**	760.145
12.2009.	PEMERINTAH DESA BANJAR JAYA	4	0	2.431.198.011	1.991.100	2.433.189.111	0	2.431.097.010	3.333.427	2.434.430.437	**100,05**	(1.241.326)
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	0	2.645.189.406	0	2.645.189.406	105.000.000	2.658.841.862	5.538.296	2.769.380.158	**104,69**	(124.190.752)
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR	4	35.000.000	2.827.641.404	0	2.862.641.404	35.000.000	2.821.747.256	4.088.339	2.860.835.595	**99,94**	1.805.809
12.2012.	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI	4	0	2.127.398.363	2.210.416	2.129.608.779	0	2.122.411.007	2.308.434	2.124.719.441	**99,77**	4.889.338
12.2013.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	4	0	2.328.413.212	0	2.328.413.212	0	2.322.519.064	4.938.461	2.327.457.525	**99,96**	955.687
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	4	0	2.278.119.466	7.636.216	2.285.755.682	0	2.271.771.922	11.672.458	2.283.444.380	**99,90**	2.311.302
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	4	0	2.115.211.628	0	2.115.211.628	0	2.129.317.480	2.187.413	2.131.504.893	**100,77**	(16.293.265)
12.2016.	PEMERINTAH DESA SINAR TUNGKAL	4	0	2.329.407.856	0	2.329.407.856	0	2.324.647.198	7.319.892	2.331.967.090	**100,11**	(2.559.234)
13.2001.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH	4	0	2.415.517.580	524.163	2.416.041.743	0	2.141.559.968	2.793.222	2.144.353.190	**88,75**	271.688.553
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	4	42.352.952	2.772.841.403	937.000	2.816.131.355	75.452.952	2.792.841.403	28.226.723	2.896.521.078	**102,85**	(80.389.723)
13.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DURIAN	4	0	1.861.250.115	0	1.861.250.115	0	1.606.752.828	2.534.103	1.609.286.931	**86,46**	251.963.184
13.2004.	PEMERINTAH DESA NAPAL	4	0	1.879.871.463	2.000.000	1.881.871.463	0	1.661.851.226	5.244.059	1.667.095.285	**88,59**	214.776.178
13.2005.	PEMERINTAH DESA RANTAU KASIH	4	0	2.401.159.356	0	2.401.159.356	0	2.397.922.723	4.032.330	2.401.955.053	**100,03**	(795.697)
13.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN I	4	0	2.180.382.356	1.000.000	2.181.382.356	0	1.937.778.552	11.390.822	1.949.169.374	**89,35**	232.212.982
13.2007.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN II	4	0	2.045.090.270	100.000	2.045.190.270	0	1.752.152.020	1.299.198	1.753.451.218	**85,74**	291.739.052
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU	4	2.000.000	2.231.439.613	2.166.816	2.235.606.429	3.000.000	2.225.734.380	4.642.169	2.233.376.549	**99,90**	2.229.880
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU	4	15.400.000	2.097.717.364	1.000.000	2.114.117.364	18.800.000	1.886.898.164	1.648.683	1.907.346.847	**90,22**	206.770.517

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Rp)				REALISASI PENDAPATAN DESA (Rp)				%	SISA ANGGARAN
			PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.2010.	PEMERINTAH DESA KARANG WARU	4	0	1.963.711.917	0	1.963.711.917	0	1.713.363.690	1.252.860	1.714.616.550	**87,32**	249.095.367
13.2011.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	4	0	2.076.126.964	19.129.989	2.095.256.953	0	1.815.203.161	1.488.559	1.816.691.720	**86,70**	278.565.233
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG	4	0	2.222.136.515	3.639.202	2.225.775.717	0	1.979.605.316	183.134.723	2.162.740.039	**97,17**	63.035.678
13.2013.	PEMERINTAH DESA SIMPANG SARI	4	0	1.906.965.077	0	1.906.965.077	0	1.646.779.359	1.073.571	1.647.852.930	**86,41**	259.112.147
13.2014.	PEMERINTAH DESA TALANG PIASE	4	0	2.140.548.265	0	2.140.548.265	0	1.844.491.073	1.620.201	1.846.111.274	**86,24**	294.436.991
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG	4	0	2.078.028.818	2.090.000	2.080.118.818	0	1.779.826.418	63.512.024	1.843.338.442	**88,62**	236.780.376
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	2.900.000	3.299.636.809	0	3.302.536.809	2.400.000	3.293.440.397	6.636.524	3.302.476.921	**100,00**	59.888
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	5	0	2.383.817.415	0	2.383.817.415	700.000	2.383.817.415	4.888.407	2.389.405.822	**100,23**	(5.588.407)
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT	4	0	2.437.981.908	2.300.000	2.440.281.908	0	2.430.349.742	7.802.730	2.438.152.472	**99,91**	2.129.436
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	5.000.000	3.027.849.730	2.500.000	3.035.349.730	11.200.000	3.003.945.571	5.240.849	3.020.386.420	**99,51**	14.963.310
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	4	0	2.787.343.518	22.720.000	2.810.063.518	221.700	2.787.343.518	26.512.122	2.814.077.340	**100,14**	(4.013.822)
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	4	13.550.000	2.417.301.265	2.000.000	2.432.851.265	11.200.000	2.189.790.499	8.487.672	2.209.478.171	**90,82**	223.373.094
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	431.000	2.687.751.015	3.000.000	2.691.182.015	3.031.000	2.687.751.015	8.373.382	2.699.155.397	**100,30**	(7.973.382)
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAYA	4	0	1.926.836.016	3.327.235	1.930.163.251	0	1.920.488.472	5.420.755	1.925.909.227	**99,78**	4.254.024
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	4	25.000.000	1.954.291.917	2.000.000	1.981.291.917	52.794.750	1.954.291.917	5.447.943	2.012.534.610	**101,58**	(31.242.693)
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	4	3.000.000	2.164.964.408	1.500.000	2.169.464.408	3.000.000	2.164.964.408	3.732.168	2.171.696.576	**100,10**	(2.232.168)
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	4	0	2.015.921.416	2.400.000	2.018.321.416	0	2.015.921.416	2.902.199	2.018.823.615	**100,02**	(502.199)
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT	4	0	2.347.852.356	0	2.347.852.356	0	2.342.411.604	10.138.555	2.352.550.159	**100,20**	(4.697.803)
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	4	0	2.464.469.718	0	2.464.469.718	0	2.464.469.718	5.376.391	2.469.846.109	**100,22**	(5.376.391)
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	4	8.400.000	2.638.732.756	0	2.647.132.756	11.000.000	2.638.732.756	4.756.583	2.654.489.339	**100,28**	(7.356.583)
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	4	12.000.000	2.186.573.164	0	2.198.573.164	14.450.000	2.186.573.164	2.427.857	2.203.451.021	**100,22**	(4.877.857)
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	4	0	2.093.762.006	513.444	2.094.275.450	0	2.094.328.751	2.122.304	2.096.451.055	**100,10**	(2.175.605)
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK	4	0	2.954.920.306	0	2.954.920.306	0	2.954.920.306	4.133.104	2.959.053.410	**100,14**	(4.133.104)
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU	4	0	2.300.197.613	3.289.416	2.303.487.029	0	2.299.920.893	2.342.109	2.302.263.002	**99,95**	1.224.027
15.2003.	PEMERINTAH DESA TALANG SIMPANG	4	0	2.112.290.818	901.878	2.113.192.696	0	2.112.290.818	1.963.283	2.114.254.101	**100,05**	(1.061.405)
15.2004.	PEMERINTAH DESA JEMBATAN GANTUNG	4	0	2.422.147.657	2.421.964	2.424.569.621	0	2.417.613.697	2.151.224	2.419.764.921	**99,80**	4.804.700
15.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG MANDUNG	4	0	1.931.074.315	14.532.438	1.945.606.753	0	1.925.822.478	2.908.825	1.928.731.303	**99,13**	16.875.450
15.2006.	PEMERINTAH DESA REJOSARI	4	0	2.155.488.408	43.099.570	2.198.587.978	0	2.155.790.672	2.586.397	2.158.377.069	**98,17**	40.210.909
15.2007.	PEMERINTAH DESA BANGKIT JAYA	4	0	1.935.539.416	2.879.782	1.938.419.198	0	1.931.458.852	3.023.643	1.934.482.495	**99,80**	3.936.703
15.2008.	PEMERINTAH DESA BARU JAYA	4	0	1.974.548.917	6.371.894	1.980.920.811	0	1.974.548.917	6.110.826	1.980.659.743	**99,99**	261.068
15.2009.	PEMERINTAH DESA SINAR JAYA	4	0	2.366.496.556	1.883.798	2.368.380.354	0	2.366.496.556	2.521.053	2.369.017.609	**100,03**	(637.255)
15.2010.	PEMERINTAH DESA SETIA JAYA	4	0	1.962.329.917	1.342.269	1.963.672.186	0	1.962.329.917	1.786.887	1.964.116.804	**100,02**	(444.618)
15.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	0	2.573.299.906	1.428.802	2.574.728.708	0	2.567.534.673	5.337.082	2.572.871.755	**99,93**	1.856.953
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	4	0	1.933.584.016	1.548.740	1.935.132.756	0	1.928.861.141	1.397.545	1.930.258.686	**99,75**	4.874.070

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN PENDAPATAN DESA (Rp)				REALISASI PENDAPATAN DESA (Rp)				%	SISA ANGGARAN
			PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH	PAD	TRANSFER	LAIN-LAIN	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH		1.495.432.505	538.901.634.477	2.817.120.211	543.214.187.193	2.193.644.759	522.571.017.137	3.593.661.895	528.358.323.791	97,27	14.855.863.402

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran 2b

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN BELANJA DESA (Rp)					REALISASI BELANJA DESA (Rp)					%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	501.991.600	931.639.363	1.268.607.423	117.200.000	2.819.438.386	478.084.996	861.143.706	1.167.427.423	117.200.000	2.623.856.125	**93,06**	195.582.262
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN		491.301.600	1.115.198.195	1.033.088.700	205.600.000	2.845.188.495	481.541.600	1.092.698.522	895.217.140	205.600.000	2.675.057.262	**94,02**	170.131.233
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU		590.796.500	1.171.521.051	916.714.747	278.451.604	2.957.483.901	571.588.862	1.154.534.846	908.523.210	278.385.000	2.913.031.918	**98,50**	44.451.983
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN		566.117.300	1.018.434.601	1.610.873.812	254.000.000	3.449.425.713	566.117.300	972.803.746	1.467.232.159	254.000.000	3.260.153.205	**94,51**	189.272.508
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA		511.263.000	890.400.223	918.564.761	124.400.000	2.444.627.983	490.220.329	611.631.921	293.826.000	122.400.000	1.518.078.250	**62,10**	926.549.733
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK		402.283.200	739.322.892	655.353.642	135.336.041	1.932.295.775	387.607.868	678.972.721	461.360.260	126.000.000	1.653.940.849	**85,59**	278.354.926
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG		500.241.600	907.726.421	820.249.832	106.400.000	2.334.617.853	500.241.600	868.349.972	810.530.909	106.400.000	2.285.522.481	**97,90**	49.095.372
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	532.412.328	852.223.520	791.962.609	84.800.000	2.261.398.457	529.824.583	766.072.357	729.935.400	84.800.000	2.110.632.340	**93,33**	150.766.117
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II		589.127.808	2.036.499.512	406.965.000	164.000.000	3.196.592.320	581.819.472	1.946.958.956	399.897.510	164.000.000	3.092.675.938	**96,75**	103.916.382
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	4	566.306.900	1.182.955.379	1.475.715.600	117.000.000	3.341.977.879	558.970.061	1.154.868.583	1.237.739.160	117.000.000	3.068.577.804	**91,82**	273.400.075
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	497.531.632	1.090.466.752	926.411.840	189.800.000	2.704.210.224	492.090.880	989.571.816	826.879.400	189.800.000	2.498.342.096	**92,39**	205.868.128
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	4	456.312.000	783.720.044	844.935.911	147.600.000	2.232.567.955	452.296.324	768.317.514	844.889.700	147.600.000	2.213.103.538	**99,13**	19.464.417
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG		518.291.200	1.138.134.724	802.597.700	115.025.600	2.574.049.224	517.638.110	852.813.062	802.197.700	115.025.600	2.287.674.472	**88,87**	286.374.752
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING		513.901.600	932.425.622	1.270.759.746	156.800.000	2.873.886.968	513.901.600	932.808.536	1.270.759.280	156.800.000	2.874.269.416	**100,01**	(382.448)
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS		529.644.720	1.038.809.000	1.212.874.023	187.200.000	2.968.527.743	529.531.371	1.023.131.141	1.201.400.511	187.200.000	2.941.263.023	**99,08**	27.264.720
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK		556.828.600	1.035.114.697	858.389.212	144.000.000	2.594.332.509	482.864.593	1.011.235.754	818.039.212	144.000.000	2.456.139.559	**94,67**	138.192.950
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL		543.471.876	994.528.343	1.436.367.953	230.400.000	3.204.768.172	536.017.100	983.618.958	1.420.086.300	230.400.000	3.170.122.358	**98,92**	34.645.814
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI		530.844.720	1.049.431.253	693.511.679	140.400.000	2.414.187.652	524.496.384	1.045.844.771	693.562.600	140.400.000	2.404.303.755	**99,59**	9.883.897
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I		518.578.548	795.110.000	1.437.413.372	67.167.128	2.818.269.048	518.578.548	754.823.789	1.435.362.325	67.167.128	2.775.931.790	**98,50**	42.337.258
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II		514.091.200	1.102.528.113	848.361.533	138.400.000	2.603.380.846	488.056.316	1.096.890.377	848.219.900	134.400.000	2.567.566.593	**98,62**	35.814.253
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III		529.780.800	955.764.569	915.923.228	166.921.600	2.568.390.197	523.594.149	950.125.669	915.922.540	166.921.600	2.556.563.958	**99,54**	11.826.239
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG	4	454.862.400	941.509.000	683.319.608	90.907.200	2.170.598.208	450.857.392	936.707.594	683.270.000	90.680.400	2.161.515.386	**99,58**	9.082.822
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG		509.191.200	848.396.173	930.039.603	130.000.000	2.417.626.976	504.581.674	831.240.962	885.871.500	130.000.000	2.351.694.136	**97,27**	65.932.840
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG	4	457.192.032	1.078.297.000	508.469.662	155.200.000	2.199.158.694	457.192.032	1.060.228.016	508.412.300	155.200.000	2.181.032.348	**99,18**	18.126.346
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	4	480.801.600	892.627.451	627.755.945	93.600.000	2.094.784.996	480.801.600	866.125.540	627.745.900	93.600.000	2.068.273.040	**98,73**	26.511.956
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	459.462.000	805.824.132	713.150.985	101.461.807	2.079.898.924	431.109.760	790.369.308	708.682.000	101.400.000	2.031.561.068	**97,68**	48.337.856
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	4	500.241.600	900.386.559	723.829.300	50.400.000	2.174.857.459	492.487.749	898.099.800	723.829.300	50.400.000	2.164.816.849	**99,54**	10.040.610
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	4	421.723.200	882.153.806	993.613.481	72.000.000	2.369.490.487	421.723.200	882.547.971	987.613.396	72.000.000	2.363.884.567	**99,76**	5.605.920
03.2004.	PEMERINTAH DESA KARTAYU	4	501.350.400	920.227.943	1.066.875.609	43.200.000	2.531.653.952	501.350.400	915.321.758	992.784.700	43.200.000	2.452.656.858	**96,88**	78.997.094
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA		474.467.378	875.309.570	707.138.371	54.000.000	2.110.915.319	474.467.378	875.216.977	707.138.371	54.000.000	2.110.822.726	**100,00**	92.593
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	500.692.800	805.290.356	870.574.433	118.800.000	2.295.357.589	500.272.800	788.676.620	859.483.523	118.800.000	2.267.232.943	**98,77**	28.124.646
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG		603.277.272	1.228.920.015	855.782.000	54.000.000	2.741.979.287	603.277.272	1.205.326.836	848.982.000	54.000.000	2.711.586.108	**98,89**	30.393.179
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI		554.270.400	993.386.426	934.198.300	72.000.000	2.553.855.126	554.081.484	992.904.102	901.198.300	72.000.000	2.520.183.886	**98,68**	33.671.240

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN BELANJA DESA (Rp)					REALISASI BELANJA DESA (Rp)					%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	4	553.941.696	934.463.871	1.110.259.500	52.400.000	2.651.065.067	553.941.696	933.195.782	1.102.259.500	52.400.000	2.641.796.978	**99,65**	9.268.089
03.2014.	PEMERINTAH DESA KERTA JAYA		531.160.800	1.118.707.705	692.721.209	72.000.000	2.414.589.714	531.160.800	1.119.114.403	692.721.209	72.000.000	2.414.996.412	**100,02**	(406.698)
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA		500.241.600	969.762.557	743.192.479	108.000.000	2.321.196.636	500.241.600	970.262.715	743.099.109	108.000.000	2.321.603.424	**100,02**	(406.788)
04.2001.	PEMERINTAH DESA BUKIT SEJAHTERA		451.262.400	855.351.035	1.088.890.544	39.720.000	2.435.223.979	445.785.048	828.680.899	1.047.586.300	39.720.000	2.361.772.247	**96,98**	73.451.732
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUKIT PANGKUASA	4	397.233.600	960.027.300	503.197.409	70.992.000	1.931.450.309	392.246.244	954.437.385	479.197.409	69.177.600	1.895.058.638	**98,12**	36.391.671
04.2003.	PEMERINTAH DESA TANAH ABANG		635.981.600	1.128.674.568	741.824.515	174.243.400	2.680.724.083	634.818.052	1.009.924.164	547.825.000	168.243.400	2.360.810.616	**88,07**	319.913.467
04.2004.	PEMERINTAH DESA TALANG LEBAN	4	453.362.400	894.837.619	708.785.943	91.060.000	2.148.045.962	450.506.740	796.628.283	682.664.879	71.060.000	2.000.859.902	**93,15**	147.186.060
04.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH		397.233.600	910.784.864	734.020.094	112.100.000	2.154.138.558	378.720.204	872.847.221	723.534.792	112.100.000	2.087.202.217	**96,89**	66.936.341
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH		402.033.600	773.210.215	736.720.700	97.440.000	2.009.404.515	399.721.383	747.716.382	722.520.700	97.440.000	1.967.398.465	**97,91**	42.006.050
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL		406.233.600	780.636.840	780.273.000	42.900.000	2.010.043.440	406.233.600	723.720.299	760.122.800	42.900.000	1.932.976.699	**96,17**	77.066.741
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	4	527.731.200	861.788.068	1.626.203.267	83.250.000	3.098.972.535	502.909.030	835.259.900	1.468.259.100	83.250.000	2.889.678.030	**93,25**	209.294.505
04.2009.	PEMERINTAH DESA SAKO SUBAN	4	470.702.400	1.152.072.010	2.003.487.243	147.660.000	3.773.921.653	466.491.268	1.074.823.353	1.857.780.500	147.660.000	3.546.755.121	**93,98**	227.166.532
04.2010.	PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU	4	451.262.400	1.101.751.370	574.670.500	100.080.000	2.227.764.270	429.033.912	1.034.535.457	574.627.700	90.000.000	2.128.197.069	**95,53**	99.567.201
04.2011.	PEMERINTAH DESA SAUT		372.744.000	1.045.885.234	997.975.200	95.414.400	2.512.018.834	372.744.000	960.785.445	997.715.200	95.414.400	2.426.659.045	**96,60**	85.359.789
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI		398.193.600	840.495.015	675.704.444	73.460.000	1.987.853.059	392.872.776	724.351.745	625.150.144	71.460.000	1.813.834.665	**91,25**	174.018.394
04.2013.	PEMERINTAH DESA PINGGAP		397.233.600	883.253.608	608.743.461	120.260.000	2.009.490.669	388.531.344	853.833.678	578.490.000	120.260.000	1.941.115.022	**96,60**	68.375.647
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	4	397.443.600	1.030.858.508	388.119.115	134.560.000	1.950.981.223	376.522.057	995.808.508	226.215.000	134.560.000	1.733.105.565	**88,83**	217.875.658
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	4	377.144.000	849.283.615	1.178.065.807	64.650.000	2.469.143.422	370.477.020	649.897.998	614.596.000	43.200.000	1.678.171.018	**67,97**	790.972.404
04.2016.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BULIA	4	500.241.600	1.175.663.357	1.044.335.032	79.200.000	2.799.439.989	493.439.436	1.059.034.671	1.012.795.032	79.200.000	2.644.469.139	**94,46**	154.970.850
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI		529.780.800	907.818.509	925.117.769	28.800.000	2.391.517.078	529.780.800	852.116.271	886.316.700	28.800.000	2.297.013.771	**96,05**	94.503.307
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	4	463.338.000	919.671.860	1.070.757.978	67.400.000	2.521.167.838	463.338.000	870.477.236	1.062.757.178	67.400.000	2.463.972.414	**97,73**	57.195.424
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I		397.233.600	892.534.550	601.784.929	28.800.000	1.920.353.079	397.233.600	833.556.793	596.784.929	28.800.000	1.856.375.322	**96,67**	63.977.757
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	4	542.911.460	1.177.687.500	1.022.805.028	28.800.000	2.772.203.988	542.911.460	1.054.578.780	900.110.828	28.800.000	2.526.401.068	**91,13**	245.802.920
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE		478.971.181	905.306.042	897.730.144	21.600.000	2.303.607.367	460.482.182	843.557.956	889.730.144	21.600.000	2.215.370.282	**96,17**	88.237.085
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG		565.113.400	995.304.700	938.938.479	136.800.000	2.636.156.579	565.113.400	940.092.750	938.938.479	136.800.000	2.580.944.629	**97,91**	55.211.950
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	4	456.312.000	892.396.016	1.079.072.650	86.400.000	2.514.180.666	456.312.000	830.588.992	1.067.352.650	86.400.000	2.440.653.642	**97,08**	73.527.024
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III		397.233.600	910.220.509	662.465.705	43.200.000	2.013.119.814	397.233.600	857.383.930	655.265.705	43.200.000	1.953.083.235	**97,02**	60.036.579
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	454.472.400	1.476.242.119	341.382.900	43.718.400	2.315.815.819	454.472.400	1.424.046.111	341.382.900	43.718.400	2.263.619.811	**97,75**	52.196.008
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	480.801.600	975.042.000	1.153.121.167	119.318.400	2.728.283.167	480.801.600	922.944.103	1.144.091.167	119.318.400	2.667.155.270	**97,76**	61.127.897
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG		558.613.900	1.193.180.559	1.051.399.900	62.107.200	2.865.301.559	558.613.900	1.136.469.058	1.051.399.900	62.107.200	2.808.590.058	**98,02**	56.711.501
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	4	524.731.200	887.111.000	725.797.831	40.507.200	2.178.147.231	524.731.200	839.518.423	680.892.609	40.507.200	2.085.649.432	**95,75**	92.497.799
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	4	397.233.600	856.709.500	791.426.719	72.388.800	2.117.758.619	397.233.600	800.870.182	780.581.070	72.388.800	2.051.073.652	**96,85**	66.684.967
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	4	524.731.200	1.035.613.200	729.757.431	61.200.000	2.351.301.831	524.731.200	965.830.222	718.916.522	61.200.000	2.270.677.944	**96,57**	80.623.887
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	4	475.752.000	900.147.323	695.339.474	86.400.000	2.157.638.797	453.432.000	837.996.336	672.069.229	86.400.000	2.049.897.565	**95,01**	107.741.232
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI		485.772.800	1.155.628.187	1.145.112.800	64.800.000	2.851.313.787	485.772.800	1.101.375.814	1.139.652.500	64.800.000	2.791.601.114	**97,91**	59.712.673
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI		451.262.400	1.068.480.219	1.307.628.709	58.118.400	2.885.489.728	451.262.400	962.313.007	1.304.628.709	58.118.400	2.776.322.516	**96,22**	109.167.212
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA		524.731.200	820.719.958	912.263.164	132.500.000	2.390.214.322	524.731.200	804.666.587	874.551.700	131.600.000	2.335.549.487	**97,71**	54.664.835

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN BELANJA DESA (Rp)					REALISASI BELANJA DESA (Rp)					%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA		397.233.600	802.095.161	649.154.307	20.900.000	1.869.383.068	397.233.500	788.829.342	649.120.609	20.900.000	1.856.083.451	**99,29**	13.299.617
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	500.652.000	1.054.566.010	523.390.609	53.300.000	2.131.908.619	491.680.210	996.118.720	483.473.000	53.300.000	2.024.571.930	**94,97**	107.336.689
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	434.272.800	828.553.849	878.166.270	94.400.000	2.235.392.919	434.272.800	806.343.264	839.543.224	94.400.000	2.174.559.288	**97,28**	60.833.631
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	4	473.522.400	961.004.655	709.129.296	92.900.000	2.236.556.351	470.641.800	926.616.162	698.123.132	92.900.000	2.188.281.094	**97,84**	48.275.257
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI		474.844.800	957.941.850	831.589.700	152.607.200	2.416.983.550	474.844.800	941.043.930	792.679.700	152.007.200	2.360.575.630	**97,67**	56.407.920
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	605.799.600	1.130.252.537	945.919.245	108.350.000	2.790.321.382	598.188.000	1.109.328.149	894.469.043	108.350.000	2.710.335.192	**97,13**	79.986.190
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN		603.249.600	950.066.002	1.072.000.835	87.750.000	2.713.066.437	580.407.984	891.199.490	1.000.465.426	80.550.000	2.552.622.900	**94,09**	160.443.537
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	4	475.752.000	865.683.483	874.890.500	103.700.000	2.320.025.983	474.532.000	836.725.610	839.890.500	103.700.000	2.254.848.110	**97,19**	65.177.873
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO		426.772.800	794.214.154	991.182.989	101.450.000	2.313.619.943	426.772.800	785.085.592	916.003.000	101.450.000	2.229.311.392	**96,36**	84.308.551
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA		446.212.800	992.015.471	785.727.022	132.500.000	2.356.455.293	446.212.800	979.149.955	724.171.322	132.500.000	2.282.034.077	**96,84**	74.421.216
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	4	480.091.200	797.399.326	805.372.107	118.250.000	2.201.112.633	468.624.220	781.786.585	765.059.838	115.550.000	2.131.020.643	**96,82**	70.091.990
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	582.388.800	1.412.498.511	1.052.511.471	57.600.000	3.104.998.782	582.388.800	1.388.340.362	1.044.869.300	57.600.000	3.073.198.462	**98,98**	31.800.320
07.2008.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI		529.780.800	1.236.739.498	668.720.555	67.003.200	2.502.244.053	529.780.800	938.508.043	532.541.800	67.003.200	2.067.833.843	**82,64**	434.410.210
07.2009.	PEMERINTAH DESA LINGGO SARI	4	476.400.000	1.234.888.540	762.963.096	41.241.600	2.515.493.236	475.398.548	1.162.048.113	739.363.000	41.241.000	2.418.050.661	**96,13**	97.442.575
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	4	506.239.224	1.206.188.188	860.641.875	38.355.164	2.611.424.451	504.247.007	991.345.639	810.666.500	38.355.164	2.344.614.310	**89,78**	266.810.141
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	4	505.291.200	1.155.300.697	630.554.000	54.000.000	2.345.145.897	498.791.200	1.126.799.093	628.507.000	54.000.000	2.308.097.293	**98,42**	37.048.604
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI		530.158.800	1.000.484.009	840.076.177	36.000.000	2.406.718.986	529.644.720	956.465.921	666.552.600	36.000.000	2.188.663.241	**90,94**	218.055.745
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR		561.071.340	1.033.210.750	920.841.485	36.000.000	2.551.123.575	558.971.340	932.191.373	901.910.469	36.000.000	2.429.073.182	**95,22**	122.050.393
07.2014.	PEMERINTAH DESA BUMI KENCANA	4	678.532.800	1.280.156.850	713.588.000	72.086.400	2.744.364.050	678.497.323	1.265.601.261	710.900.000	67.550.400	2.722.548.984	**99,21**	21.815.066
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI		451.262.400	1.251.561.027	675.100.000	63.144.000	2.441.067.427	451.262.400	1.248.852.467	675.100.000	63.144.000	2.438.358.867	**99,89**	2.708.560
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN		505.291.200	1.066.824.847	862.970.706	108.126.000	2.543.212.753	505.291.200	1.043.963.655	860.370.600	108.126.000	2.517.751.455	**99,00**	25.461.298
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	4	529.644.936	1.210.141.453	1.121.048.000	110.851.200	2.971.685.589	482.227.098	1.157.196.126	1.024.285.580	110.851.200	2.774.560.004	**93,37**	197.125.585
07.2019.	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	4	529.780.800	1.290.074.218	545.422.000	66.355.200	2.431.632.218	525.143.252	1.274.001.432	528.022.000	66.355.200	2.393.521.884	**98,43**	38.110.334
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA		506.331.600	1.014.786.794	523.118.156	72.392.000	2.116.628.550	493.547.297	996.958.370	521.571.000	72.392.000	2.084.468.667	**98,48**	32.159.883
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO		537.192.000	722.291.052	809.498.281	86.400.000	2.155.381.333	536.360.774	691.058.179	806.959.285	86.400.000	2.120.778.238	**98,39**	34.603.095
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM		414.744.000	760.193.908	782.282.130	54.000.000	2.011.220.038	414.744.000	751.478.499	775.785.181	54.000.000	1.996.007.680	**99,24**	15.212.358
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS	5	571.780.800	843.410.079	1.176.892.197	54.000.000	2.646.083.076	571.705.234	819.311.603	1.168.534.446	54.000.000	2.613.551.283	**98,77**	32.531.793
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	578.760.000	1.154.976.800	513.162.020	42.110.400	2.289.009.220	578.760.000	1.098.781.750	512.709.600	41.592.000	2.231.843.350	**97,50**	57.165.870
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG		571.644.720	929.185.399	911.647.449	61.200.000	2.473.677.568	571.644.720	869.195.430	876.985.001	61.200.000	2.379.025.151	**96,17**	94.652.417
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	5	792.068.616	966.734.391	1.139.318.070	64.800.000	2.962.921.077	792.068.616	789.873.495	1.043.435.760	64.800.000	2.690.177.871	**90,79**	272.743.206
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	500.317.200	979.138.770	1.118.051.336	66.355.200	2.663.862.506	498.249.383	922.861.403	1.062.944.000	66.355.200	2.550.409.986	**95,74**	113.452.520
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA		596.270.400	867.497.118	1.012.108.018	75.600.000	2.551.475.536	596.270.400	847.126.410	1.007.108.018	75.600.000	2.526.104.828	**99,01**	25.370.708
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA		507.262.400	959.934.000	846.499.769	84.096.000	2.397.792.169	508.320.324	902.626.579	836.339.316	84.096.000	2.331.382.219	**97,23**	66.409.950
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	439.233.600	807.446.360	587.391.953	90.000.000	1.924.071.913	439.233.600	769.217.805	572.949.590	90.000.000	1.871.400.995	**97,26**	52.670.918
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	463.723.200	1.092.765.787	521.990.453	84.200.000	2.162.679.440	443.229.898	983.125.187	517.097.391	84.200.000	2.027.652.476	**93,76**	135.026.964
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH		524.752.000	1.208.432.185	433.015.201	43.200.000	2.209.399.386	524.752.000	1.083.047.105	409.797.986	43.200.000	2.060.797.091	**93,27**	148.602.295
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	5	470.702.400	930.410.000	582.215.267	118.966.400	2.102.294.067	446.455.749	892.067.883	577.759.300	118.966.400	2.035.249.332	**96,81**	67.044.735

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN BELANJA DESA (Rp)					REALISASI BELANJA DESA (Rp)					%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG		459.320.088	1.139.855.523	1.366.348.891	200.958.738	3.166.483.240	430.426.128	916.877.618	717.356.000	200.957.200	2.265.616.946	**71,55**	900.866.294
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	4	505.136.376	1.528.929.409	1.288.650.228	363.443.200	3.686.159.213	470.276.376	936.407.028	282.008.000	309.843.200	1.998.534.604	**54,22**	1.687.624.609
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU		480.661.632	971.100.870	944.290.345	171.073.600	2.567.126.447	435.376.540	740.867.326	583.706.000	171.073.600	1.931.023.466	**75,22**	636.102.981
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU		456.312.000	1.096.616.402	856.091.436	220.283.369	2.629.303.207	401.831.436	989.945.051	667.731.170	220.207.000	2.279.714.657	**86,70**	349.588.550
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA		402.240.432	933.619.323	794.767.814	90.000.000	2.220.627.569	400.124.584	843.287.039	576.418.000	90.000.000	1.909.829.623	**86,00**	310.797.946
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG		443.531.976	1.114.364.928	689.731.878	141.107.200	2.388.735.982	438.998.016	1.104.360.327	687.895.609	141.107.200	2.372.361.152	**99,31**	16.374.830
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA		402.240.504	908.561.500	1.241.436.930	161.977.600	2.714.216.534	379.291.550	701.352.227	847.777.399	151.848.000	2.080.269.176	**76,64**	633.947.358
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	480.661.632	967.568.080	746.789.843	120.251.200	2.315.270.755	475.918.368	843.315.832	743.165.000	119.668.000	2.182.067.200	**94,25**	133.203.555
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	554.140.800	1.309.582.085	1.231.983.811	218.324.000	3.314.030.696	536.168.775	1.065.123.344	782.218.700	218.324.000	2.601.834.819	**78,51**	712.195.877
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK		627.782.940	1.297.902.788	1.300.760.286	285.516.800	3.511.962.814	621.888.792	1.023.376.257	904.948.214	285.516.800	2.835.730.063	**80,74**	676.232.751
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA		533.662.320	1.154.484.038	1.111.820.485	208.800.000	3.008.766.843	532.325.928	1.099.890.383	1.102.358.700	208.800.000	2.943.375.011	**97,83**	65.391.832
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA		455.566.800	1.096.373.202	706.580.906	152.944.000	2.411.464.908	455.566.800	896.060.537	581.572.208	152.944.000	2.086.143.545	**86,51**	325.321.363
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	456.170.088	1.137.775.416	873.237.138	170.604.800	2.637.787.442	454.386.328	928.800.908	729.628.960	157.296.000	2.270.112.196	**86,06**	367.675.246
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	402.240.432	959.851.409	518.394.985	141.777.600	2.022.264.426	399.972.799	710.215.198	488.245.000	131.648.000	1.730.080.997	**85,55**	292.183.429
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYA		426.981.976	927.870.450	804.594.414	187.486.800	2.346.933.640	393.613.582	714.995.859	561.420.000	183.186.800	1.853.216.241	**78,96**	493.717.399
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	441.561.488	1.511.051.294	927.141.076	147.038.728	3.026.792.586	378.247.808	1.227.947.217	661.098.700	121.038.728	2.388.332.453	**78,91**	638.460.133
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA		505.153.356	1.248.638.741	1.489.616.077	149.888.000	3.393.296.174	482.932.603	1.015.427.934	1.200.774.125	149.888.000	2.849.022.662	**83,96**	544.273.512
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	4	475.715.064	984.449.642	761.294.609	102.992.000	2.324.451.315	464.017.284	897.604.488	540.258.000	100.400.000	2.002.279.772	**86,14**	322.171.543
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	460.853.052	1.022.424.138	1.077.536.598	287.731.700	2.848.545.488	447.595.544	908.806.202	925.427.000	287.515.700	2.569.344.446	**90,20**	279.201.042
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	431.414.940	936.802.914	725.626.782	66.825.600	2.160.670.236	421.744.620	776.000.455	286.412.000	66.825.600	1.550.982.675	**71,78**	609.687.561
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	452.104.248	1.021.133.643	577.492.381	141.364.400	2.192.094.672	439.185.786	855.984.991	364.485.743	135.214.400	1.794.870.920	**81,88**	397.223.752
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI		478.560.000	949.460.742	910.571.297	129.000.000	2.467.592.038	478.560.000	867.744.095	871.961.365	129.000.000	2.347.265.460	**95,12**	120.326.579
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI		605.582.400	1.067.088.000	587.440.542	110.660.000	2.370.770.942	602.892.353	1.039.077.268	587.440.542	110.660.000	2.340.070.163	**98,71**	30.700.779
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA		452.299.200	1.201.468.000	672.661.528	59.500.000	2.385.928.728	451.885.200	919.126.854	661.610.164	38.000.000	2.070.622.218	**86,78**	315.306.510
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	4	453.292.584	937.964.000	941.525.028	16.400.000	2.349.181.612	415.004.699	878.959.678	903.500.090	16.400.000	2.213.864.467	**94,24**	135.317.145
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU		477.048.000	1.141.413.656	1.022.334.484	144.100.000	2.784.896.140	441.886.915	1.114.137.603	944.328.700	144.100.000	2.644.453.218	**94,96**	140.442.922
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	4	398.071.464	1.101.476.605	443.136.922	79.750.000	2.022.434.991	394.471.464	1.065.845.413	438.122.404	79.750.000	1.978.189.281	**97,81**	44.245.711
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU		556.084.800	1.143.602.372	592.144.356	135.060.000	2.426.891.528	556.084.800	1.030.853.103	591.114.600	115.060.000	2.293.112.503	**94,49**	133.779.025
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH		502.056.000	1.146.588.466	686.311.877	26.010.000	2.360.966.343	502.056.000	1.118.491.568	686.049.700	26.010.000	2.332.607.268	**98,80**	28.359.075
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA		475.752.000	1.030.124.841	593.219.411	45.350.000	2.144.446.252	474.109.783	1.013.689.588	593.219.411	45.350.000	2.126.368.782	**99,16**	18.077.470
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTR		557.312.328	1.431.125.142	318.230.140	113.460.000	2.420.127.610	557.312.328	1.189.374.885	253.887.540	93.460.000	2.094.034.753	**86,53**	326.092.857
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU		630.979.200	1.519.786.309	521.236.565	102.160.000	2.774.162.074	630.629.200	1.484.949.629	495.205.700	102.160.000	2.712.944.529	**97,79**	61.217.545
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG		368.277.240	1.486.682.541	512.393.524	59.875.701	2.427.229.006	365.826.292	1.441.424.548	494.175.434	59.875.000	2.361.301.274	**97,28**	65.927.732
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA		524.731.200	1.307.632.400	625.294.795	174.305.200	2.631.963.595	524.731.200	1.218.390.659	596.898.311	174.305.200	2.514.325.370	**95,53**	117.638.225
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	4	452.299.200	1.034.232.993	539.554.884	64.400.000	2.090.487.077	452.299.200	1.017.655.705	524.554.171	64.400.000	2.058.909.076	**98,49**	31.578.001
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI		421.723.200	1.072.446.800	529.571.276	57.500.000	2.081.241.276	414.394.426	874.368.145	399.109.580	57.500.000	1.745.372.151	**83,86**	335.869.125
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG		510.825.612	925.639.801	1.459.935.533	171.400.000	3.067.800.946	504.921.397	724.712.612	1.001.655.331	171.400.000	2.402.689.340	**78,32**	665.111.605

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN BELANJA DESA (Rp)					REALISASI BELANJA DESA (Rp)					%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO		505.291.200	1.079.206.880	920.524.500	39.499.200	2.544.521.780	505.291.300	1.075.424.178	914.247.200	39.499.200	2.534.461.878	**99,60**	10.059.902
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	5	554.270.400	990.048.618	777.201.615	28.958.400	2.350.479.033	547.670.400	983.255.869	777.075.609	28.958.400	2.336.960.278	**99,42**	13.518.755
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	5	505.291.200	892.202.700	787.833.902	38.592.000	2.223.919.802	502.440.000	580.029.479	177.027.000	20.592.000	1.280.088.479	**57,56**	943.831.323
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI		451.262.400	981.401.964	683.867.467	115.200.000	2.231.731.831	445.864.644	903.171.577	409.610.800	115.200.000	1.873.847.021	**83,96**	357.884.810
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA		475.752.000	1.123.100.415	569.845.806	82.800.000	2.251.498.221	475.752.000	1.106.879.573	547.901.450	82.800.000	2.213.333.023	**98,30**	38.165.198
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	5	451.080.000	1.184.461.000	493.039.964	59.600.000	2.188.180.964	413.680.598	974.255.248	405.100.000	30.800.000	1.823.835.846	**83,35**	364.345.118
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	5	427.812.936	918.756.300	590.043.133	41.284.800	1.977.897.169	416.282.448	918.129.426	516.294.404	41.284.800	1.891.991.078	**95,66**	85.906.091
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	421.723.200	895.199.606	630.705.209	90.634.800	2.038.262.815	416.282.448	864.697.324	463.250.600	87.034.800	1.831.265.172	**89,84**	206.997.643
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI		421.723.200	836.674.926	528.788.609	126.314.310	1.913.501.045	416.282.448	810.343.809	502.328.200	126.314.000	1.855.268.457	**96,96**	58.232.588
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA		421.723.200	875.937.756	605.069.361	52.400.000	1.955.130.317	421.755.587	870.505.025	605.030.100	52.400.000	1.949.690.712	**99,72**	5.439.605
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG		421.723.200	1.341.000.139	290.542.050	73.492.800	2.126.758.189	415.782.448	990.600.018	255.712.034	71.932.800	1.734.027.300	**81,53**	392.730.889
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG		397.233.600	800.871.359	627.003.609	39.944.000	1.865.052.568	397.233.600	798.338.715	627.003.609	39.944.000	1.862.519.924	**99,86**	2.532.644
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR		372.744.000	842.700.459	609.664.891	61.200.000	1.886.309.350	368.663.436	834.934.636	609.651.000	61.200.000	1.874.449.072	**99,37**	11.860.278
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI		421.723.200	897.063.839	652.913.561	62.600.000	2.034.300.600	416.660.278	777.980.259	457.439.400	62.600.000	1.714.679.937	**84,29**	319.620.663
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG		451.262.400	923.461.917	904.169.000	90.000.000	2.368.893.317	443.829.431	823.358.983	752.855.850	90.000.000	2.110.044.264	**89,07**	258.849.053
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI		421.723.200	935.055.384	887.658.038	81.200.000	2.325.636.622	419.320.936	783.440.434	749.095.900	81.200.000	2.033.057.270	**87,42**	292.579.352
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING		475.752.000	1.049.416.556	774.936.124	43.826.400	2.343.931.080	475.752.000	925.134.069	562.245.500	43.826.400	2.006.957.969	**85,62**	336.973.111
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	5	475.752.000	854.911.921	1.122.721.629	21.600.000	2.474.985.550	459.546.767	682.320.996	741.982.700	21.600.000	1.905.450.463	**76,99**	569.535.087
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI		397.233.600	880.696.657	500.700.609	106.400.000	1.885.030.866	397.233.600	867.588.566	497.699.700	106.400.000	1.868.921.866	**99,15**	16.109.000
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA		397.233.600	797.316.066	736.250.469	44.570.000	1.975.370.135	392.246.844	786.617.889	736.250.469	44.570.000	1.959.685.202	**99,21**	15.684.933
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA		451.262.400	1.147.848.866	815.755.200	40.939.600	2.455.806.066	445.821.648	1.079.012.409	581.602.200	33.800.000	2.140.236.257	**87,15**	315.569.809
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	5	451.262.400	960.081.896	937.000.455	28.800.000	2.377.144.751	451.262.400	939.240.941	922.002.400	28.800.000	2.341.305.741	**98,49**	35.839.010
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	500.241.600	1.192.775.165	626.957.832	43.092.000	2.363.066.597	493.894.056	1.173.633.446	618.121.000	43.092.000	2.328.740.502	**98,55**	34.326.095
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG		451.262.400	913.910.900	687.700.199	66.400.000	2.119.273.499	451.262.400	908.810.446	602.676.409	66.400.000	2.029.149.255	**95,75**	90.124.244
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG		452.762.400	840.436.586	965.316.200	60.873.600	2.319.388.786	447.699.478	831.169.896	958.901.400	60.873.600	2.298.644.374	**99,11**	20.744.412
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA		397.233.600	937.151.215	487.761.518	59.796.000	1.881.942.333	392.246.244	769.830.718	368.931.500	59.796.000	1.590.804.462	**84,53**	291.137.871
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN		544.836.048	1.241.793.200	1.031.309.828	166.817.128	2.984.756.204	543.436.048	1.198.402.845	1.027.807.960	164.817.128	2.934.463.981	**98,32**	50.292.223
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI		609.341.908	1.152.660.320	1.199.701.994	244.705.600	3.206.409.822	568.127.582	1.059.283.902	1.156.306.454	203.054.400	2.986.772.338	**93,15**	219.637.484
12.2003.	PEMERINTAH DESA BERLIAN JAYA	4	505.291.200	942.060.376	957.221.883	168.580.800	2.573.154.259	499.397.052	919.585.307	911.893.100	168.580.800	2.499.456.259	**97,14**	73.698.000
12.2004.	PEMERINTAH DESA SIMPANG TUNGKAI		474.465.426	1.186.010.024	581.115.172	192.880.000	2.434.470.622	473.779.280	1.124.022.262	433.439.885	192.880.000	2.224.121.427	**91,36**	210.349.195
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNG		484.973.200	1.050.135.753	615.223.000	143.258.400	2.293.590.353	477.146.032	1.027.032.515	615.223.000	143.258.400	2.262.659.947	**98,65**	30.930.406
12.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER HARUM	4	529.864.392	1.032.137.300	715.213.822	164.858.400	2.442.073.914	495.086.895	988.025.950	715.213.822	113.062.400	2.311.389.067	**94,65**	130.684.847
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI		426.772.800	977.818.931	484.151.287	144.681.600	2.033.424.618	408.825.444	957.659.588	484.151.287	143.673.600	1.994.309.919	**98,08**	39.114.699
12.2008.	PEMERINTAH DESA SINAR HARAPAN		426.772.800	1.002.446.087	682.441.189	118.625.600	2.230.285.676	420.785.444	934.059.451	633.728.600	118.625.600	2.107.199.095	**94,48**	123.086.581
12.2009.	PEMERINTAH DESA BANJAR JAYA	4	458.904.000	1.406.826.311	345.544.401	128.800.000	2.340.074.712	458.775.980	1.399.287.031	340.374.401	128.800.000	2.327.237.412	**99,45**	12.837.300
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	554.270.400	971.036.700	1.009.295.906	48.260.800	2.582.863.806	537.158.375	937.509.368	997.672.066	45.640.000	2.517.979.809	**97,49**	64.883.997
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR		554.485.536	1.148.373.918	1.214.614.895	50.147.200	2.967.621.549	547.684.596	1.084.597.677	1.207.094.895	50.147.200	2.889.524.368	**97,37**	78.097.181

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN BELANJA DESA (Rp)					REALISASI BELANJA DESA (Rp)					%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.2012.	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI	4	426.772.800	1.187.207.395	343.642.298	99.403.200	2.057.025.693	415.048.474	1.156.378.835	343.109.653	99.403.200	2.013.940.162	**97,91**	43.085.531
12.2013.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	4	480.801.600	1.056.562.142	663.184.599	51.358.400	2.251.906.741	474.530.848	939.904.844	663.184.599	49.932.800	2.127.553.091	**94,48**	124.353.650
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	4	496.641.600	1.387.360.750	168.773.343	104.334.400	2.157.110.093	493.706.856	1.328.941.970	123.865.677	103.556.800	2.050.071.303	**95,04**	107.038.790
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	4	475.752.000	1.549.399.859	96.460.715	75.369.600	2.196.982.174	457.764.550	1.521.393.822	57.610.715	73.555.200	2.110.324.287	**96,06**	86.657.887
12.2016.	PEMERINTAH DESA SINAR TUNGKAL	4	475.752.000	920.989.356	839.371.525	149.600.000	2.385.712.881	469.857.852	842.481.951	643.124.000	149.600.000	2.105.063.803	**88,24**	280.649.078
13.2001.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH	4	529.780.800	1.106.127.700	695.275.808	101.100.000	2.432.284.308	519.844.717	928.890.840	606.751.683	101.100.000	2.156.587.240	**88,67**	275.697.068
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	4	505.291.200	1.095.404.341	1.175.832.312	99.055.200	2.875.583.053	496.912.753	1.003.300.212	1.130.762.820	99.055.200	2.730.030.985	**94,94**	145.552.068
13.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DURIAN	4	397.233.600	847.501.000	655.197.915	50.502.600	1.950.435.115	392.296.976	623.161.000	493.243.315	40.377.600	1.549.078.891	**79,42**	401.356.224
13.2004.	PEMERINTAH DESA NAPAL		426.772.800	833.852.456	733.324.496	154.842.300	2.148.792.052	421.521.010	638.328.523	511.992.313	134.592.300	1.706.434.146	**79,41**	442.357.906
13.2005.	PEMERINTAH DESA RANTAU KASIH		473.252.000	951.968.400	1.035.187.556	71.325.000	2.531.732.956	473.252.000	916.798.400	1.035.187.556	61.200.000	2.486.437.956	**98,21**	45.295.000
13.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN I	4	475.752.000	894.451.656	744.679.700	66.069.000	2.180.952.356	392.280.710	493.820.295	400.415.500	28.944.000	1.315.460.505	**60,32**	865.491.851
13.2007.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN II		451.262.400	1.057.981.195	426.909.875	109.036.800	2.045.190.270	446.155.008	1.036.506.100	158.300.000	109.036.800	1.749.997.908	**85,57**	295.192.362
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU		505.291.200	859.690.000	884.325.137	117.250.000	2.366.556.337	499.301.808	685.155.443	723.766.708	108.000.000	2.016.223.959	**85,20**	350.332.378
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU		455.882.400	1.083.334.436	523.120.664	55.786.800	2.118.124.300	453.442.400	992.158.245	367.820.464	37.036.800	1.850.457.909	**87,36**	267.666.391
13.2010.	PEMERINTAH DESA KARANG WARU	4	446.212.800	913.253.117	543.294.905	80.280.000	1.983.040.822	446.212.773	687.531.977	496.978.800	80.280.000	1.711.003.550	**86,28**	272.037.272
13.2011.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	4	452.817.600	1.174.416.287	342.023.066	126.000.000	2.095.256.953	447.376.848	918.214.111	341.993.077	126.000.000	1.833.584.036	**87,51**	261.672.917
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG		547.469.460	1.110.332.000	724.139.757	97.943.200	2.479.884.417	547.469.460	965.108.367	529.955.115	97.943.200	2.140.476.142	**86,31**	339.408.275
13.2013.	PEMERINTAH DESA SIMPANG SARI	4	395.160.000	1.079.611.785	421.735.938	85.050.000	1.981.557.723	395.160.000	949.518.934	277.239.246	79.751.000	1.701.669.180	**85,88**	279.888.543
13.2014.	PEMERINTAH DESA TALANG PIASE	4	477.696.000	893.063.892	647.338.373	97.450.000	2.115.548.265	471.801.852	812.754.819	454.639.573	97.450.000	1.836.646.244	**86,82**	278.902.021
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG		472.257.600	892.251.000	670.410.218	45.200.000	2.080.118.818	471.693.353	703.251.938	538.479.868	43.200.000	1.756.625.159	**84,45**	323.493.659
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	627.668.928	1.568.887.388	983.193.984	112.348.728	3.292.099.028	611.306.796	1.400.079.705	909.818.881	111.672.000	3.032.877.382	**92,13**	259.221.646
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	5	554.270.400	1.008.186.356	692.229.423	126.564.400	2.381.250.579	554.270.400	904.232.191	408.930.000	126.262.000	1.993.694.591	**83,72**	387.555.988
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT		603.249.600	968.083.408	1.013.266.083	108.003.200	2.692.602.291	592.010.830	906.220.255	579.326.829	103.003.200	2.180.561.114	**80,98**	512.041.177
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	637.528.800	1.341.822.669	1.033.350.875	189.729.600	3.202.431.944	628.716.540	1.272.457.679	937.167.000	179.851.200	3.018.192.419	**94,25**	184.239.525
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG		627.739.200	1.053.116.109	882.350.975	84.721.600	2.647.927.884	604.719.153	992.835.234	642.684.000	84.268.000	2.324.506.387	**87,79**	323.421.497
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP		475.752.000	1.198.011.876	543.143.389	215.944.000	2.432.851.265	475.752.000	773.643.307	243.698.000	165.944.000	1.659.037.307	**68,19**	773.813.958
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	554.270.400	881.699.906	1.133.700.352	118.132.800	2.687.803.458	554.270.400	860.410.311	1.048.447.392	117.794.000	2.580.922.103	**96,02**	106.881.355
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAY.	4	421.723.200	932.049.635	542.430.398	45.489.600	1.941.692.833	416.282.448	828.735.649	359.487.300	44.884.800	1.649.390.197	**84,95**	292.302.636
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGUL		446.212.800	933.403.000	676.008.873	111.296.000	2.166.920.673	441.418.434	857.019.598	426.635.200	111.188.000	1.836.261.232	**84,74**	330.659.441
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA		446.424.048	917.029.105	733.161.421	105.425.600	2.202.040.174	415.833.197	853.399.930	690.251.000	105.425.600	2.064.909.727	**93,77**	137.130.447
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BAR		421.464.000	996.434.701	440.606.359	104.450.000	1.962.955.060	421.763.990	875.517.159	367.625.000	104.450.000	1.769.356.149	**90,14**	193.598.911
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT		475.715.064	956.051.776	1.125.960.243	102.096.000	2.659.823.083	441.929.878	699.486.669	647.209.140	102.096.000	1.890.721.687	**71,08**	769.101.396
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR		627.739.200	999.507.482	812.329.734	98.110.400	2.537.686.816	623.625.804	857.763.789	539.055.000	92.592.000	2.113.036.593	**83,27**	424.650.223
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN		475.752.000	1.134.266.038	1.101.074.650	105.013.600	2.816.106.288	475.492.800	1.060.863.326	994.767.621	100.712.000	2.631.835.747	**93,46**	184.270.541
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAY		451.262.400	974.469.229	684.075.579	111.944.000	2.221.751.208	448.676.400	900.624.000	674.073.300	109.620.000	2.132.993.700	**96,01**	88.757.508
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	4	397.293.864	905.088.230	678.333.200	94.073.600	2.074.788.894	397.293.864	889.565.468	498.407.500	93.036.800	1.878.303.632	**90,53**	196.485.262
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK		554.270.400	1.492.487.006	921.816.506	33.617.600	3.002.191.512	554.270.400	1.452.631.831	907.815.300	31.617.600	2.946.335.131	**98,14**	55.856.381

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	ANGGARAN BELANJA DESA (Rp)					REALISASI BELANJA DESA (Rp)					%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH	PEGAWAI	BRG & JASA	MODAL	TAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU		505.291.200	1.093.185.420	795.614.827	98.784.000	2.492.875.447	505.291.200	1.090.453.538	795.614.827	98.784.000	2.490.143.565	**99,89**	2.731.882
15.2003.	PEMERINTAH DESA TALANG SIMPANG		470.768.496	1.310.268.038	294.644.400	91.814.400	2.167.495.334	470.701.600	1.305.876.726	294.644.400	91.814.400	2.163.037.126	**99,79**	4.458.208
15.2004.	PEMERINTAH DESA JEMBATAN GANTU		500.166.000	1.060.244.485	836.300.249	99.165.600	2.495.876.334	495.747.340	1.040.964.248	822.215.600	99.165.600	2.458.092.788	**98,49**	37.783.546
15.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG MANDUNG		402.075.594	1.297.748.148	223.553.396	43.200.000	1.966.577.138	397.392.630	1.293.505.968	211.000.000	43.200.000	1.945.098.598	**98,91**	21.478.540
15.2006.	PEMERINTAH DESA REJOSARI		446.212.800	1.457.842.574	372.212.251	73.425.600	2.349.693.225	446.212.800	1.411.010.487	371.212.000	73.425.600	2.301.860.887	**97,96**	47.832.338
15.2007.	PEMERINTAH DESA BANGKIT JAYA		421.723.200	1.131.531.598	330.353.602	94.766.400	1.978.374.800	409.393.768	1.106.318.337	290.398.000	94.766.400	1.900.876.505	**96,08**	77.498.295
15.2008.	PEMERINTAH DESA BARU JAYA		446.212.800	1.265.068.511	221.417.287	73.296.000	2.005.994.598	446.212.800	1.263.095.885	221.414.500	73.296.000	2.004.019.185	**99,90**	1.975.413
15.2009.	PEMERINTAH DESA SINAR JAYA		475.752.000	849.607.854	1.036.861.943	95.284.800	2.457.506.597	475.752.000	848.318.279	1.035.861.943	95.284.800	2.455.217.022	**99,91**	2.289.575
15.2010.	PEMERINTAH DESA SETIA JAYA	4	446.212.800	888.763.177	610.694.947	91.296.000	2.036.966.924	446.212.800	871.892.296	538.694.947	91.296.000	1.948.096.043	**95,64**	88.870.881
15.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA		554.270.400	1.138.006.208	1.054.450.874	156.744.000	2.903.471.482	537.147.126	1.136.784.839	1.054.108.874	156.744.000	2.884.784.841	**99,36**	18.686.641
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	4	421.723.200	911.332.147	537.351.093	112.636.800	1.983.043.240	415.735.844	877.937.926	530.230.393	112.636.800	1.936.540.963	**97,66**	46.502.277
	JUMLAH		111.505.313.759	237.448.294.859	184.111.900.924	23.188.193.646	556.253.703.188	109.728.243.499	218.986.355.676	163.562.560.845	22.548.454.148	514.825.614.168	**92,55**	41.428.089.020

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran 2c

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				PENGELUARAN PEMBIAYAAN				PEMBIAYAAN NETTO		
			ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	726.035.503	726.035.503	100,00	0	561.515.660	561.515.660	100,00	0	164.519.843	164.519.843	100,00
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	4	226.042.132	226.042.132	100,00	0	179.954.000	179.954.000	100,00	0	46.088.132	46.088.132	100,00
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	4	68.528.897	68.528.897	100,00	0	310.000.000	310.000.000	100,00	0	(241.471.103)	(241.471.103)	100,00
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	4	367.930.787	367.930.787	100,00	0	275.000.000	273.480.000	99,45	1.520.000	92.930.787	94.450.787	101,64
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	4	54.746.720	54.746.720	100,00	0	215.787.400	0	0,00	215.787.400	(161.040.680)	54.746.720	(34,00)
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	4	32.272.906	32.272.906	100,00	0	112.894.000	112.894.000	100,00	0	(80.621.094)	(80.621.094)	100,00
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	4	143.680.954	143.680.954	100,00	0	147.978.000	147.978.000	100,00	0	(4.297.046)	(4.297.046)	100,00
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	110.831.462	110.831.462	100,00	0	128.800.000	128.800.000	100,00	0	(17.968.538)	(17.968.538)	100,00
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	4	122.591.653	122.591.653	100,00	0	273.463.200	273.250.000	99,92	213.200	(150.871.547)	(150.658.347)	99,86
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	4	378.804.016	378.804.016	100,00	0	260.000.000	260.000.000	100,00	0	118.804.016	118.804.016	100,00
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	279.771.712	279.771.712	100,00	0	0	0	0,00	0	279.771.712	279.771.712	100,00
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	4	12.735.544	12.735.544	100,00	0	0	0	0,00	0	12.735.544	12.735.544	100,00
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG TIMUF	4	1.811.248	1.811.248	100,00	0	0	0	0,00	0	1.811.248	1.811.248	100,00
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	4	101.706.365	101.706.365	100,00	0	0	0	0,00	0	101.706.365	101.706.365	100,00
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	4	18.814.938	18.814.938	100,00	0	0	0	0,00	0	18.814.938	18.814.938	100,00
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	4	70.446.997	70.446.997	100,00	0	0	0	0,00	0	70.446.997	70.446.997	100,00
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	4	65.893.268	65.893.268	100,00	0	0	0	0,00	0	65.893.268	65.893.268	100,00
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	4	13.649.478	13.649.478	100,00	0	105.948.000	105.948.000	100,00	0	(92.298.522)	(92.298.522)	100,00
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I	4	73.017.344	73.017.344	100,00	0	0	0	0,00	0	73.017.344	73.017.344	100,00
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II	4	82.496.233	82.496.233	100,00	0	0	0	0,00	0	82.496.233	82.496.233	100,00
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III	4	15.775.783	15.775.783	100,00	0	249.494.500	249.494.500	100,00	0	(233.718.717)	(233.718.717)	100,00
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTAR	4	28.108.244	28.108.244	100,00	0	0	0	0,00	0	28.108.244	28.108.244	100,00
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARA	4	98.434.272	98.434.272	100,00	0	0	0	0,00	0	98.434.272	98.434.272	100,00
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELA	4	10.026.883	10.026.883	100,00	0	0	0	0,00	0	10.026.883	10.026.883	100,00
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	4	49.130.045	49.130.045	100,00	0	147.678.000	147.678.000	100,00	0	(98.547.955)	(98.547.955)	100,00
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	13.477.386	13.477.386	100,00	0	163.862.203	163.862.203	100,00	0	(150.384.817)	(150.384.817)	100,00
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	4	24.728.493	24.728.493	100,00	0	0	0	0,00	0	24.728.493	24.728.493	100,00
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	4	154.272.085	154.272.085	100,00	0	0	0	0,00	0	154.272.085	154.272.085	100,00
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	4	943.556	943.556	100,00	0	0	0	0,00	0	943.556	943.556	100,00
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	66.469.623	66.469.623	100,00	0	0	0	0,00	0	66.469.623	66.469.623	100,00
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG	4	23.593.179	23.593.179	100,00	0	0	0	0,00	0	23.593.179	23.593.179	100,00
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	684.820	0	0,00	684.820	0	0	0,00	0	684.820	0	0,00
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	4	13.220.961	13.220.961	100,00	0	0	0	0,00	0	13.220.961	13.220.961	100,00
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA	4	26.939.870	26.939.870	100,00	0	0	0	0,00	0	26.939.870	26.939.870	100,00

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				PENGELUARAN PEMBIAYAAN				PEMBIAYAAN NETTO		
			ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04.2001.	PEMERINTAH DESA BUKIT SEJAHTERA	4	70.657.124	70.657.124	100,00	0	0	0	0,00	0	70.657.124	70.657.124	100,00
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUKIT PANGKUASAN	4	4.955.194	4.605.194	92,94	350.000	0	0	0,00	0	4.955.194	4.605.194	92,94
04.2003.	PEMERINTAH DESA TANAH ABANG	4	206.967.466	206.967.466	100,00	0	0	0	0,00	0	206.967.466	206.967.466	100,00
04.2004.	PEMERINTAH DESA TALANG LEBAN	4	132.167.798	132.167.798	100,00	0	0	0	0,00	0	132.167.798	132.167.798	100,00
04.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH	4	79.029.843	79.029.843	100,00	0	0	0	0,00	0	79.029.843	79.029.843	100,00
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH	4	39.000.000	39.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0	39.000.000	39.000.000	100,00
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL	4	38.624.725	0	0,00	38.624.725	0	0	0,00	0	38.624.725	0	0,00
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	4	137.268.068	137.268.068	100,00	0	0	0	0,00	0	137.268.068	137.268.068	100,00
04.2009.	PEMERINTAH DESA SAKO SUBAN	4	919.994.635	895.740.923	97,36	24.253.712	0	0	0,00	0	919.994.635	895.740.923	97,36
04.2010.	PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU	4	72.830.306	72.830.306	100,00	0	0	0	0,00	0	72.830.306	72.830.306	100,00
04.2011.	PEMERINTAH DESA SAUT	4	198.560.329	198.560.329	100,00	0	0	0	0,00	0	198.560.329	198.560.329	100,00
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI	4	62.615.744	62.615.744	100,00	0	0	0	0,00	0	62.615.744	62.615.744	100,00
04.2013.	PEMERINTAH DESA PINGGAP	4	104.904.955	104.904.955	100,00	0	0	0	0,00	0	104.904.955	104.904.955	100,00
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	4	5.742.508	5.742.508	100,00	0	0	0	0,00	0	5.742.508	5.742.508	100,00
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	4	339.372.909	339.372.909	100,00	0	0	0	0,00	0	339.372.909	339.372.909	100,00
04.2016.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BULIAN	4	117.744.532	117.744.532	100,00	0	0	0	0,00	0	117.744.532	117.744.532	100,00
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI	4	276.313.700	276.313.700	100,00	0	0	0	0,00	0	276.313.700	276.313.700	100,00
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	4	338.781.500	338.781.500	100,00	0	200.000.000	200.000.000	100,00	0	138.781.500	138.781.500	100,00
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I	4	306.848.900	306.848.900	100,00	0	0	0	0,00	0	306.848.900	306.848.900	100,00
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	4	338.313.700	338.313.700	100,00	0	0	0	0,00	0	338.313.700	338.313.700	100,00
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	4	337.413.700	337.413.700	100,00	0	0	0	0,00	0	337.413.700	337.413.700	100,00
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	4	405.178.700	405.178.700	100,00	0	0	0	0,00	0	405.178.700	405.178.700	100,00
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	4	253.163.700	253.163.700	100,00	0	0	0	0,00	0	253.163.700	253.163.700	100,00
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III	4	275.823.430	275.823.430	100,00	0	0	0	0,00	0	275.823.430	275.823.430	100,00
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	260.483.700	260.483.700	100,00	0	0	0	0,00	0	260.483.700	260.483.700	100,00
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	278.343.700	278.343.700	100,00	0	0	0	0,00	0	278.343.700	278.343.700	100,00
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	4	385.222.090	385.222.090	100,00	0	0	0	0,00	0	385.222.090	385.222.090	100,00
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	4	365.315.564	365.315.564	100,00	0	0	0	0,00	0	365.315.564	365.315.564	100,00
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	4	254.409.349	254.409.349	100,00	0	0	0	0,00	0	254.409.349	254.409.349	100,00
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	4	354.740.300	354.740.300	100,00	0	0	0	0,00	0	354.740.300	354.740.300	100,00
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	4	271.341.268	271.341.268	100,00	0	0	0	0,00	0	271.341.268	271.341.268	100,00
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI	4	276.745.700	276.745.700	100,00	0	0	0	0,00	0	276.745.700	276.745.700	100,00
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI	4	626.313.700	626.313.700	100,00	0	0	0	0,00	0	626.313.700	626.313.700	100,00
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA	4	41.734.464	41.734.464	100,00	0	0	0	0,00	0	41.734.464	41.734.464	100,00
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA	4	4.814.253	4.814.253	100,00	0	0	0	0,00	0	4.814.253	4.814.253	100,00
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	18.200.000	18.200.000	100,00	0	0	0	0,00	0	18.200.000	18.200.000	100,00
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	65.959.262	65.959.262	100,00	0	0	0	0,00	0	65.959.262	65.959.262	100,00
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	4	170.589.687	170.589.687	100,00	0	0	0	0,00	0	170.589.687	170.589.687	100,00
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI	4	6.227.494	6.227.494	100,00	0	0	0	0,00	0	6.227.494	6.227.494	100,00
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	74.817.665	74.817.665	100,00	0	254.190.000	254.190.000	100,00	0	(179.372.335)	(179.372.335)	100,00

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				PENGELUARAN PEMBIAYAAN				PEMBIAYAAN NETTO		
			ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	4	70.672.520	70.672.520	100,00	0	0	0	0,00	0	70.672.520	70.672.520	100,00
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	4	10.422.927	10.422.927	100,00	0	0	0	0,00	0	10.422.927	10.422.927	100,00
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO	4	20.604.289	20.604.289	100,00	0	0	0	0,00	0	20.604.289	20.604.289	100,00
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	4	57.688.437	57.688.437	100,00	0	0	0	0,00	0	57.688.437	57.688.437	100,00
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	4	17.656.299	17.656.299	100,00	0	0	0	0,00	0	17.656.299	17.656.299	100,00
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	79.382.591	79.382.591	100,00	0	0	0	0,00	0	79.382.591	79.382.591	100,00
07.2008.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	144.510.555	144.510.555	100,00	0	0	0	0,00	0	144.510.555	144.510.555	100,00
07.2009.	PEMERINTAH DESA LINGGO SARI	4	124.241.096	124.241.096	100,00	0	10.000.000	0	0,00	10.000.000	114.241.096	124.241.096	108,75
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	4	66.769.363	66.769.363	100,00	0	0	0	0,00	0	66.769.363	66.769.363	100,00
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	4	66.441.300	66.441.300	100,00	0	0	0	0,00	0	66.441.300	66.441.300	100,00
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI	4	296.639.688	241.718.558	81,49	54.921.130	184.900.000	184.900.000	100,00	0	111.739.688	56.818.558	50,85
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	4	80.245.485	80.245.485	100,00	0	202.500.000	202.500.000	100,00	0	(122.254.515)	(122.254.515)	100,00
07.2014.	PEMERINTAH DESA BUMI KENCANA	4	48.796.000	48.796.000	100,00	0	0	0	0,00	0	48.796.000	48.796.000	100,00
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI	4	34.442.479	34.442.479	100,00	0	0	0	0,00	0	34.442.479	34.442.479	100,00
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN	4	68.616.956	68.616.956	100,00	0	0	0	0,00	0	68.616.956	68.616.956	100,00
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	4	273.386.000	273.386.000	100,00	0	10.000.000	10.000.000	100,00	0	263.386.000	263.386.000	100,00
07.2019.	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	4	90.880.320	90.880.320	100,00	0	0	0	0,00	0	90.880.320	90.880.320	100,00
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	4	73.867.265	73.867.265	100,00	0	147.084.000	147.084.000	100,00	0	(73.216.735)	(73.216.735)	100,00
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO	5	50.092.939	50.092.939	100,00	0	140.000.000	140.000.000	100,00	0	(89.907.061)	(89.907.061)	100,00
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM	5	60.186.949	60.186.949	100,00	0	125.000.000	125.000.000	100,00	0	(64.813.051)	(64.813.051)	100,00
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS	5	125.919.683	125.919.683	100,00	0	207.440.596	207.440.596	100,00	0	(81.520.913)	(81.520.913)	100,00
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	26.270.320	26.270.320	100,00	0	167.000.000	167.000.000	100,00	0	(140.729.680)	(140.729.680)	100,00
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	5	95.248.579	95.248.579	100,00	0	74.345.000	74.000.000	99,54	345.000	20.903.579	21.248.579	101,65
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	5	345.293.579	345.293.579	100,00	0	150.000.000	135.000.000	90,00	15.000.000	195.293.579	210.293.579	107,68
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	128.361.865	128.361.865	100,00	0	114.745.000	114.745.000	100,00	0	13.616.865	13.616.865	100,00
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA	5	137.093.846	137.093.846	100,00	0	165.000.000	165.000.000	100,00	0	(27.906.154)	(27.906.154)	100,00
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA	5	65.958.530	65.958.530	100,00	0	0	0	0,00	0	65.958.530	65.958.530	100,00
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	107.215.414	107.215.414	100,00	0	63.000.000	63.000.000	100,00	0	44.215.414	44.215.414	100,00
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	108.176.440	108.176.440	100,00	0	74.500.000	74.500.000	100,00	0	33.676.440	33.676.440	100,00
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	5	163.144.737	163.144.737	100,00	0	150.000.000	150.000.000	100,00	0	13.144.737	13.144.737	100,00
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	5	213.590.065	213.590.065	100,00	0	60.000.000	60.000.000	100,00	0	153.590.065	153.590.065	100,00
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	4	122.155.691	122.141.000	99,99	14.691	451.599.800	451.599.800	100,00	0	(329.444.109)	(329.458.800)	100,00
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	4	65.170.200	65.170.200	100,00	0	0	0	0,00	0	65.170.200	65.170.200	100,00
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	4	245.001.945	245.001.945	100,00	0	0	0	0,00	0	245.001.945	245.001.945	100,00
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	4	131.515.105	131.515.105	100,00	0	100.000.000	0	0,00	100.000.000	31.515.105	131.515.105	417,31
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	55.847.807	55.847.807	100,00	0	199.507.738	195.856.200	98,17	3.651.538	(143.659.931)	(140.008.393)	97,46
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	4	228.008.981	228.008.981	100,00	0	0	0	0,00	0	228.008.981	228.008.981	100,00
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	4	631.923.123	631.923.123	100,00	0	208.600.000	120.000.000	57,53	88.600.000	423.323.123	511.923.123	120,93
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	108.402.387	108.402.000	100,00	387	165.180.000	165.180.000	100,00	0	(56.777.613)	(56.778.000)	100,00
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	216.081.811	216.081.811	100,00	0	432.670.000	323.240.000	74,71	109.430.000	(216.588.189)	(107.158.189)	49,48

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				PENGELUARAN PEMBIAYAAN				PEMBIAYAAN NETTO		
			ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	4	75.427.358	75.427.358	100,00	0	0	0	0,00	0	75.427.358	75.427.358	100,00
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	4	86.028.500	86.028.500	100,00	0	269.500.000	269.500.000	100,00	0	(183.471.500)	(183.471.500)	100,00
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	4	168.176.367	168.176.367	100,00	0	150.512.600	150.512.600	100,00	0	17.663.767	17.663.767	100,00
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	329.730.602	325.494.000	98,72	4.236.602	164.979.000	164.979.000	100,00	0	164.751.602	160.515.000	97,43
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	115.435.300	115.410.000	99,98	25.300	139.400.000	139.400.000	100,00	0	(23.964.700)	(23.990.000)	100,11
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	4	351.902.230	351.902.230	100,00	0	127.195.000	127.195.000	100,00	0	224.707.230	224.707.230	100,00
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	276.898.388	250.263.588	90,38	26.634.800	20.000.000	0	0,00	20.000.000	256.898.388	250.263.588	97,42
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	205.586.055	205.586.055	100,00	0	0	0	0,00	0	205.586.055	205.586.055	100,00
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	4	101.082.551	101.082.551	100,00	0	170.000.000	170.000.000	100,00	0	(68.917.449)	(68.917.449)	100,00
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	169.479.848	169.479.848	100,00	0	302.500.000	302.500.000	100,00	0	(133.020.152)	(133.020.152)	100,00
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	120.604.123	120.604.123	100,00	0	128.991.200	128.991.200	100,00	0	(8.387.077)	(8.387.077)	100,00
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	134.226.606	134.226.606	100,00	0	146.339.000	146.339.000	100,00	0	(12.112.394)	(12.112.394)	100,00
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	4	32.910.572	32.910.572	100,00	0	0	0	0,00	0	32.910.572	32.910.572	100,00
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	24.945.725	24.945.725	100,00	0	0	0	0,00	0	24.945.725	24.945.725	100,00
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	4	158.059.364	158.059.364	100,00	0	0	0	0,00	0	158.059.364	158.059.364	100,00
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	4	84.892.157	84.892.157	100,00	0	0	0	0,00	0	84.892.157	84.892.157	100,00
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	64.045.784	64.045.784	100,00	0	0	0	0,00	0	64.045.784	64.045.784	100,00
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	4	15.889.876	15.889.876	100,00	0	0	0	0,00	0	15.889.876	15.889.876	100,00
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	4	56.655.113	56.655.113	100,00	0	0	0	0,00	0	56.655.113	56.655.113	100,00
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	4	7.412.177	7.412.177	100,00	0	0	0	0,00	0	7.412.177	7.412.177	100,00
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	4	34.989.987	34.989.987	100,00	0	0	0	0,00	0	34.989.987	34.989.987	100,00
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTRAN	4	140.273.519	140.273.519	100,00	0	0	0	0,00	0	140.273.519	140.273.519	100,00
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU	4	24.260.865	24.260.865	100,00	0	0	0	0,00	0	24.260.865	24.260.865	100,00
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG	4	39.787.800	39.787.800	100,00	0	0	0	0,00	0	39.787.800	39.787.800	100,00
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA	4	71.238.328	71.238.328	100,00	0	0	0	0,00	0	71.238.328	71.238.328	100,00
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	4	15.532.713	15.532.713	100,00	0	0	0	0,00	0	15.532.713	15.532.713	100,00
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	127.780.260	127.780.260	100,00	0	0	0	0,00	0	127.780.260	127.780.260	100,00
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG	5	356.573.333	356.573.333	100,00	0	252.900.000	252.900.000	100,00	0	103.673.333	103.673.333	100,00
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	5	77.450.276	77.450.276	100,00	0	139.620.000	139.620.000	100,00	0	(62.169.724)	(62.169.724)	100,00
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	5	112.458.071	112.458.071	100,00	0	125.970.000	125.970.000	100,00	0	(13.511.929)	(13.511.929)	100,00
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	5	272.999.551	272.999.551	100,00	0	359.648.000	317.570.000	88,30	42.078.000	(86.648.449)	(44.570.449)	51,44
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI	5	80.272.667	80.272.667	100,00	0	25.000.000	10.000.000	40,00	15.000.000	55.272.667	70.272.667	127,14
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	5	23.836.356	23.836.356	100,00	0	0	0	0,00	0	23.836.356	23.836.356	100,00
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	5	30.550.800	0	0,00	30.550.800	0	0	0,00	0	30.550.800	0	0,00
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	5	58.375.153	58.375.153	100,00	0	157.715.000	157.715.000	100,00	0	(99.339.847)	(99.339.847)	100,00
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	82.157.799	82.157.799	100,00	0	100.000.000	100.000.000	100,00	0	(17.842.201)	(17.842.201)	100,00
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	53.282.829	53.282.829	100,00	0	164.274.000	164.274.000	100,00	0	(110.991.171)	(110.991.171)	100,00
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA	5	49.104.536	49.104.536	100,00	0	118.899.600	118.899.600	100,00	0	(69.795.064)	(69.795.064)	100,00
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG	5	138.127.173	138.127.173	100,00	0	101.864.000	101.864.000	100,00	0	36.263.173	36.263.173	100,00
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG	5	88.126.853	88.126.853	100,00	0	95.893.000	95.893.000	100,00	0	(7.766.147)	(7.766.147)	100,00

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				PENGELUARAN PEMBIAYAAN				PEMBIAYAAN NETTO		
			ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	5	58.032.136	58.032.136	100,00	0	116.858.000	116.858.000	100,00	0	(58.825.864)	(58.825.864)	100,00
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI	5	168.372.384	168.372.384	100,00	0	157.400.000	157.400.000	100,00	0	10.972.384	10.972.384	100,00
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	4	145.527.557	145.527.557	100,00	0	119.798.600	119.798.600	100,00	0	25.728.957	25.728.957	100,00
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	5	404.397.041	404.397.041	100,00	0	91.279.000	91.279.000	100,00	0	313.118.041	313.118.041	100,00
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING	5	20.114.124	20.114.124	100,00	0	115.400.000	115.400.000	100,00	0	(95.285.876)	(95.285.876)	100,00
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	5	300.904.594	300.904.594	100,00	0	100.000.000	0	0,00	100.000.000	200.904.594	300.904.594	149,77
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	5	29.930.786	29.930.786	100,00	0	98.291.000	98.291.000	100,00	0	(68.360.214)	(68.360.214)	100,00
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA	5	36.166.560	36.166.560	100,00	0	140.884.000	140.884.000	100,00	0	(104.717.440)	(104.717.440)	100,00
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA	5	133.317.412	133.317.412	100,00	0	113.000.000	113.000.000	100,00	0	20.317.412	20.317.412	100,00
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	5	135.684.096	135.684.096	100,00	0	123.000.000	123.000.000	100,00	0	12.684.096	12.684.096	100,00
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	11.445.632	11.445.632	100,00	0	163.532.000	163.532.000	100,00	0	(152.086.368)	(152.086.368)	100,00
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG	5	26.327.035	26.327.035	100,00	0	100.700.000	100.700.000	100,00	0	(74.372.965)	(74.372.965)	100,00
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG	5	43.762.500	43.762.500	100,00	0	77.574.000	77.574.000	100,00	0	(33.811.500)	(33.811.500)	100,00
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	50.352.218	50.352.218	100,00	0	147.685.600	147.685.600	100,00	0	(97.333.382)	(97.333.382)	100,00
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	4	51.000.000	51.000.000	100,00	0	337.961.000	321.961.000	95,27	16.000.000	(286.961.000)	(270.961.000)	94,42
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	114.526.614	114.526.614	100,00	0	0	0	0,00	0	114.526.614	114.526.614	100,00
12.2003.	PEMERINTAH DESA BERLIAN JAYA	4	66.445.946	66.445.946	100,00	0	112.004.000	112.004.000	100,00	0	(45.558.054)	(45.558.054)	100,00
12.2004.	PEMERINTAH DESA SIMPANG TUNGKAL	4	108.567.015	108.567.015	100,00	0	236.148.000	236.148.000	100,00	0	(127.580.985)	(127.580.985)	100,00
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNGKAL	4	83.824.000	77.824.000	92,84	6.000.000	193.082.000	193.082.000	100,00	0	(109.258.000)	(115.258.000)	105,49
12.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER HARUM	4	125.181.078	125.181.078	100,00	0	0	0	0,00	0	125.181.078	125.181.078	100,00
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	4	57.742.655	57.742.655	100,00	0	179.545.000	179.545.000	100,00	0	(121.802.345)	(121.802.345)	100,00
12.2008.	PEMERINTAH DESA SINAR HARAPAN	4	73.606.713	73.606.713	100,00	0	233.493.000	233.493.000	100,00	0	(159.886.287)	(159.886.287)	100,00
12.2009.	PEMERINTAH DESA BANJAR JAYA	4	175.425.500	175.425.500	100,00	0	100.000.000	100.000.000	100,00	0	75.425.500	75.425.500	100,00
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	156.774.400	156.774.400	100,00	0	219.100.000	219.100.000	100,00	0	(62.325.600)	(62.325.600)	100,00
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR	4	104.980.145	104.980.145	100,00	0	0	0	0,00	0	104.980.145	104.980.145	100,00
12.2012.	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI	4	103.809.114	103.809.114	100,00	0	176.392.200	176.392.200	100,00	0	(72.583.086)	(72.583.086)	100,00
12.2013.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	4	120.488.029	120.488.029	100,00	0	196.994.500	196.994.500	100,00	0	(76.506.471)	(76.506.471)	100,00
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	4	73.706.627	73.706.627	100,00	0	174.716.000	174.716.000	100,00	0	(101.009.373)	(101.009.373)	100,00
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	4	81.770.546	81.770.546	100,00	0	0	0	0,00	0	81.770.546	81.770.546	100,00
12.2016.	PEMERINTAH DESA SINAR TUNGKAL	4	230.186.025	230.186.025	100,00	0	173.881.000	173.881.000	100,00	0	56.305.025	56.305.025	100,00
13.2001.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH	4	16.766.728	16.766.728	100,00	0	0	0	0,00	0	16.766.728	16.766.728	100,00
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	4	129.451.698	129.451.698	100,00	0	70.000.000	70.000.000	100,00	0	59.451.698	59.451.698	100,00
13.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DURIAN	4	89.185.000	89.185.000	100,00	0	0	0	0,00	0	89.185.000	89.185.000	100,00
13.2004.	PEMERINTAH DESA NAPAL	4	391.520.464	391.520.464	100,00	0	0	0	0,00	0	391.520.464	391.520.464	100,00
13.2005.	PEMERINTAH DESA RANTAU KASIH	4	130.573.600	130.573.600	100,00	0	0	0	0,00	0	130.573.600	130.573.600	100,00
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU	4	130.949.908	130.949.908	100,00	0	0	0	0,00	0	130.949.908	130.949.908	100,00
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU	4	4.436.936	0	0,00	4.436.936	0	0	0,00	0	4.436.936	0	0,00
13.2010.	PEMERINTAH DESA KARANG WARU	4	19.328.905	18.480.421	95,61	848.484	0	0	0,00	0	19.328.905	18.480.421	95,61
13.2011.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	4	18.129.989	18.129.989	100,00	0	0	0	0,00	0	18.129.989	18.129.989	100,00
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG	4	254.108.700	254.108.700	100,00	0	0	0	0,00	0	254.108.700	254.108.700	100,00

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S.D 31/12/2025

KODE	URAIAN	KODE POSTING	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				PENGELUARAN PEMBIAYAAN				PEMBIAYAAN NETTO		
			ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.2013.	PEMERINTAH DESA SIMPANG SARI	4	74.592.646	74.592.646	100,00	0	0	0	0,00	0	74.592.646	74.592.646	100,00
13.2014.	PEMERINTAH DESA TALANG PIASE	4	0	0	0,00	0	25.000.000	25.000.000	100,00	0	(25.000.000)	(25.000.000)	100,00
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG	4	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	144.307.401	144.307.400	100,00	1	80.259.000	80.259.000	100,00	0	64.048.401	64.048.400	100,00
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	5	92.433.164	92.433.164	100,00	0	95.000.000	95.000.000	100,00	0	(2.566.836)	(2.566.836)	100,00
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT	4	282.115.383	282.115.383	100,00	0	29.795.000	0	0,00	29.795.000	252.320.383	282.115.383	111,81
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	277.082.214	277.082.214	100,00	0	110.000.000	110.000.000	100,00	0	167.082.214	167.082.214	100,00
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	4	108.494.366	108.494.366	100,00	0	270.630.000	250.000.000	92,38	20.630.000	(162.135.634)	(141.505.634)	87,28
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	4	336.622.371	336.622.371	100,00	0	0	0	0,00	0	336.622.371	336.622.371	100,00
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	410.696.443	410.696.443	100,00	0	414.075.000	354.075.000	85,51	60.000.000	(3.378.557)	56.621.443	375,91)
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAYA	4	11.529.582	11.529.582	100,00	0	0	0	0,00	0	11.529.582	11.529.582	100,00
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	4	205.628.756	205.628.756	100,00	0	20.000.000	0	0,00	20.000.000	185.628.756	205.628.756	110,77
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	4	64.980.766	64.980.766	100,00	0	32.405.000	0	0,00	32.405.000	32.575.766	64.980.766	199,48
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	4	64.633.644	64.633.280	100,00	364	120.000.000	120.000.000	100,00	0	(55.366.356)	(55.366.720)	100,00
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT	4	432.870.727	432.870.727	100,00	0	120.900.000	0	0,00	120.900.000	311.970.727	432.870.727	138,75
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	4	250.087.098	250.087.098	100,00	0	176.870.000	147.350.000	83,31	29.520.000	73.217.098	102.737.098	140,32
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	4	168.973.532	168.973.532	100,00	0	0	0	0,00	0	168.973.532	168.973.532	100,00
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	4	63.178.062	63.178.062	100,00	0	40.000.000	20.000.000	50,00	20.000.000	23.178.062	43.178.062	186,29
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	4	513.444	513.444	100,00	0	20.000.000	0	0,00	20.000.000	(19.486.556)	513.444	(2,63)
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK	4	47.271.206	47.271.206	100,00	0	0	0	0,00	0	47.271.206	47.271.206	100,00
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU	4	189.388.418	189.388.418	100,00	0	0	0	0,00	0	189.388.418	189.388.418	100,00
15.2003.	PEMERINTAH DESA TALANG SIMPANG	4	54.302.638	54.302.638	100,00	0	0	0	0,00	0	54.302.638	54.302.638	100,00
15.2004.	PEMERINTAH DESA JEMBATAN GANTUNG	4	71.306.713	71.306.713	100,00	0	0	0	0,00	0	71.306.713	71.306.713	100,00
15.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG MANDUNG	4	20.970.385	20.970.385	100,00	0	0	0	0,00	0	20.970.385	20.970.385	100,00
15.2006.	PEMERINTAH DESA REJOSARI	4	190.317.498	190.317.498	100,00	0	0	0	0,00	0	190.317.498	190.317.498	100,00
15.2007.	PEMERINTAH DESA BANGKIT JAYA	4	39.955.602	39.955.602	100,00	0	0	0	0,00	0	39.955.602	39.955.602	100,00
15.2008.	PEMERINTAH DESA BARU JAYA	4	25.073.787	25.073.787	100,00	0	0	0	0,00	0	25.073.787	25.073.787	100,00
15.2009.	PEMERINTAH DESA SINAR JAYA	4	89.126.243	89.126.243	100,00	0	0	0	0,00	0	89.126.243	89.126.243	100,00
15.2010.	PEMERINTAH DESA SETIA JAYA	4	73.294.738	73.294.738	100,00	0	0	0	0,00	0	73.294.738	73.294.738	100,00
15.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	328.742.774	328.742.774	100,00	0	0	0	0,00	0	328.742.774	328.742.774	100,00
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	4	47.910.484	47.910.484	100,00	0	0	0	0,00	0	47.910.484	47.910.484	100,00
	JUMLAH		30.150.856.654	29.959.273.903	99,36	191.582.751	16.074.490.397	14.983.615.259	93,21	1.090.875.138	14.076.366.257	14.975.658.644	106,39

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

MENURUT BIDANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH DAERAH : 06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN						REALISASI					
		BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH	BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	1.462.573.844	818.299.640	268.873.903	154.491.000	115.200.000	2.819.438.386	1.300.012.485	805.130.640	251.572.000	151.941.000	115.200.000	2.623.856.125
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	1.411.889.197	603.245.000	381.497.298	244.957.000	203.600.000	2.845.188.495	1.246.936.762	599.060.000	381.478.500	243.982.000	203.600.000	2.675.057.262
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	1.653.934.851	577.552.050	262.829.000	222.768.000	240.400.000	2.957.483.901	1.614.370.718	573.114.200	262.829.000	222.318.000	240.400.000	2.913.031.918
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	1.435.496.353	1.305.893.360	275.680.000	180.356.000	252.000.000	3.449.425.713	1.325.784.345	1.237.278.860	275.680.000	169.410.000	252.000.000	3.260.153.205
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	994.027.586	845.093.398	245.625.000	237.482.000	122.400.000	2.444.627.983	747.955.650	291.915.600	172.725.000	183.082.000	122.400.000	1.518.078.250
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	843.592.873	569.664.860	214.780.000	178.258.041	126.000.000	1.932.295.775	702.275.589	459.163.260	212.580.000	153.922.000	126.000.000	1.653.940.849
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	1.029.342.893	841.653.000	203.800.000	155.421.961	104.400.000	2.334.617.853	1.005.191.521	820.709.000	201.100.000	154.121.961	104.400.000	2.285.522.481
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	921.046.848	780.536.609	325.878.000	151.137.000	82.800.000	2.261.398.457	899.357.940	670.959.400	319.878.000	137.637.000	82.800.000	2.110.632.340
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	1.481.849.181	977.646.140	390.097.000	185.000.000	162.000.000	3.196.592.320	1.460.629.638	895.249.300	390.097.000	184.700.000	162.000.000	3.092.675.938
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	1.601.698.279	1.161.315.600	308.046.000	155.918.000	115.000.000	3.341.977.879	1.565.249.154	926.314.650	306.096.000	155.918.000	115.000.000	3.068.577.804
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	966.386.744	895.626.840	340.056.040	314.340.600	187.800.000	2.704.210.224	881.831.096	791.604.400	340.056.000	297.050.600	187.800.000	2.498.342.096
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	811.127.755	886.782.700	221.460.000	165.597.500	147.600.000	2.232.567.955	794.803.338	886.760.700	218.410.000	165.529.500	147.600.000	2.213.103.538
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG TIMUR	1.302.120.224	551.904.000	204.973.000	403.452.000	111.600.000	2.574.049.224	1.145.395.472	550.624.000	200.273.000	279.782.000	111.600.000	2.287.674.472
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	1.361.543.968	699.304.000	282.797.500	375.441.500	154.800.000	2.873.886.968	1.361.926.836	699.303.580	282.797.500	375.441.500	154.800.000	2.874.269.416
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	1.134.754.043	942.814.700	325.864.000	377.895.000	187.200.000	2.968.527.743	1.111.489.323	938.814.700	325.864.000	377.895.000	187.200.000	2.941.263.023
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	1.112.548.149	783.659.860	244.932.000	309.192.500	144.000.000	2.594.332.509	995.823.299	780.539.360	226.832.000	308.944.900	144.000.000	2.456.139.559
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	1.380.306.392	719.380.780	440.300.000	434.381.000	230.400.000	3.204.768.172	1.347.902.058	717.154.000	440.299.300	434.367.000	230.400.000	3.170.122.358
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	989.658.052	752.287.100	288.387.000	243.455.500	140.400.000	2.414.187.652	980.014.155	752.287.100	288.387.000	243.215.500	140.400.000	2.404.303.755
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I	1.188.658.176	1.035.761.872	255.320.000	272.179.000	66.350.000	2.818.269.048	1.180.747.890	1.038.264.900	235.110.000	255.459.000	66.350.000	2.775.931.790
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II	1.142.591.846	703.294.000	278.880.000	347.215.000	131.400.000	2.603.380.846	1.110.881.993	703.229.600	278.880.000	347.175.000	127.400.000	2.567.566.593
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III	1.179.399.109	824.080.688	267.087.400	146.623.000	151.200.000	2.568.390.197	1.171.173.558	824.080.000	263.487.400	146.623.000	151.200.000	2.556.563.958
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTARA	903.267.508	640.137.400	260.540.000	276.653.300	90.000.000	2.170.598.208	897.364.686	636.957.400	260.540.000	276.653.300	90.000.000	2.161.515.386
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARAT	1.218.091.303	497.620.073	329.290.000	244.625.600	128.000.000	2.417.626.976	1.197.131.136	497.347.400	293.890.000	235.325.600	128.000.000	2.351.694.136
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELATAN	875.259.915	492.056.779	396.206.800	282.435.200	153.200.000	2.199.158.694	873.625.048	492.026.300	382.745.800	279.435.200	153.200.000	2.181.032.348
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	1.132.027.996	472.081.500	253.725.000	143.350.500	93.600.000	2.094.784.996	1.121.256.040	461.541.500	249.525.000	142.350.500	93.600.000	2.068.273.040
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	1.046.630.117	503.227.000	288.803.000	139.777.000	101.461.807	2.079.898.924	998.554.068	503.227.000	288.803.000	139.577.000	101.400.000	2.031.561.068
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	995.653.459	516.908.000	290.396.000	321.500.000	50.400.000	2.174.857.459	986.512.849	516.908.000	289.496.000	321.500.000	50.400.000	2.164.816.849
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	919.983.400	932.108.481	274.558.606	170.840.000	72.000.000	2.369.490.487	914.377.571	932.108.396	274.558.600	170.840.000	72.000.000	2.363.884.567
03.2004.	PEMERINTAH DESA KARTAYU	1.145.879.952	653.727.000	301.642.000	387.205.000	43.200.000	2.531.653.952	1.066.882.858	653.727.000	301.642.000	387.205.000	43.200.000	2.452.656.858
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	825.040.309	768.746.355	277.973.655	185.155.000	54.000.000	2.110.915.319	824.947.716	768.746.355	277.973.655	185.155.000	54.000.000	2.110.822.726
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	949.836.689	713.108.900	283.021.000	230.591.000	118.800.000	2.295.357.589	927.610.543	713.108.900	283.021.000	224.692.500	118.800.000	2.267.232.943
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG	1.501.420.287	288.099.000	361.545.000	536.915.000	54.000.000	2.741.979.287	1.471.027.108	288.099.000	361.545.000	536.915.000	54.000.000	2.711.586.108
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	1.325.942.812	564.712.600	283.342.000	307.857.714	72.000.000	2.553.855.126	1.292.321.572	564.662.600	283.342.000	307.857.714	72.000.000	2.520.183.886
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	1.351.727.288	230.836.450	343.366.329	674.735.000	50.400.000	2.651.065.067	1.343.459.199	230.836.450	342.366.329	674.735.000	50.400.000	2.641.796.978
03.2014.	PEMERINTAH DESA KERTA JAYA	1.117.340.714	550.962.000	271.467.000	402.820.000	72.000.000	2.414.589.714	1.117.747.412	550.962.000	271.467.000	402.820.000	72.000.000	2.414.996.412
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA	898.145.027	649.942.609	321.079.000	344.030.000	108.000.000	2.321.196.636	898.551.815	649.942.609	321.079.000	344.030.000	108.000.000	2.321.603.424
04.2001.	PEMERINTAH DESA BUKIT SEJAHTERA	1.156.018.679	618.359.300	255.094.000	366.032.000	39.720.000	2.435.223.979	1.129.109.947	580.595.300	254.479.000	357.868.000	39.720.000	2.361.772.247
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUKIT PANGKUASAN	774.160.056	570.585.994	204.779.400	313.524.859	68.400.000	1.931.450.309	769.347.979	565.020.800	202.965.000	289.324.859	68.400.000	1.895.058.638

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN						REALISASI					
		BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH	BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH
04.2003.	PEMERINTAH DESA TANAH ABANG	1.047.772.768	681.874.515	390.712.800	386.639.000	173.725.000	2.680.724.083	1.001.302.816	485.740.000	367.792.800	338.250.000	167.725.000	2.360.810.616
04.2004.	PEMERINTAH DESA TALANG LEBAN	1.035.837.843	491.184.119	202.144.000	313.565.000	91.060.000	2.133.790.962	959.414.502	485.456.400	193.009.000	291.920.000	71.060.000	2.000.859.902
04.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH	914.325.214	612.829.000	207.628.344	307.256.000	112.100.000	2.154.138.558	878.688.873	612.829.000	188.128.344	295.456.000	112.100.000	2.087.202.217
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH	930.411.515	441.502.200	201.948.000	338.102.800	97.440.000	2.009.404.515	912.905.465	422.302.200	201.948.000	332.802.800	97.440.000	1.967.398.465
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL	935.713.440	497.804.000	206.311.000	327.315.000	42.900.000	2.010.043.440	880.661.899	497.799.800	204.895.000	306.720.000	42.900.000	1.932.976.699
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	944.406.268	1.270.513.867	285.710.000	515.092.400	83.250.000	3.098.972.535	909.250.930	1.112.569.700	274.910.000	509.697.400	83.250.000	2.889.678.030
04.2009.	PEMERINTAH DESA SAKO SUBAN	1.031.897.252	1.896.861.401	198.528.000	498.975.000	147.660.000	3.773.921.653	867.190.621	1.842.646.500	198.528.000	490.730.000	147.660.000	3.546.755.121
04.2010.	PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU	815.340.076	590.007.194	353.875.000	378.542.000	90.000.000	2.227.764.270	770.615.369	575.344.700	340.695.000	351.542.000	90.000.000	2.128.197.069
04.2011.	PEMERINTAH DESA SAUT	1.110.910.634	633.315.200	251.130.000	423.063.000	93.600.000	2.512.018.834	1.091.343.845	615.048.200	245.430.000	381.237.000	93.600.000	2.426.659.045
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI	993.818.653	428.221.000	184.421.706	307.931.700	73.460.000	1.987.853.059	907.296.265	410.321.400	159.940.000	264.817.000	71.460.000	1.813.834.665
04.2013.	PEMERINTAH DESA PINGGAP	903.672.181	443.476.488	204.485.000	337.597.000	120.260.000	2.009.490.669	861.257.022	443.476.000	203.585.000	312.537.000	120.260.000	1.941.115.022
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	930.116.223	358.378.000	184.870.000	343.057.000	134.560.000	1.950.981.223	805.790.565	264.828.000	184.870.000	343.057.000	134.560.000	1.733.105.565
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	1.083.601.355	720.757.456	248.144.611	351.990.000	64.650.000	2.469.143.422	787.047.018	311.159.000	208.090.000	328.675.000	43.200.000	1.678.171.018
04.2016.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BULIAN	1.180.309.289	966.073.700	258.795.000	315.062.000	79.200.000	2.799.439.989	1.107.694.139	896.118.000	248.845.000	312.612.000	79.200.000	2.644.469.139
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI	957.740.378	729.596.700	309.132.000	366.248.000	28.800.000	2.391.517.078	915.594.371	727.796.700	302.912.000	321.910.700	28.800.000	2.297.013.771
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	819.057.260	929.480.578	386.052.000	319.178.000	67.400.000	2.521.167.838	806.202.936	929.479.778	386.049.000	274.840.700	67.400.000	2.463.972.414
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I	774.161.070	546.304.009	219.445.000	351.643.000	28.800.000	1.920.353.079	757.422.613	544.604.009	218.243.000	307.305.700	28.800.000	1.856.375.322
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	1.110.230.126	971.126.697	339.969.165	322.078.000	28.800.000	2.772.203.988	1.099.185.594	784.305.609	336.369.165	277.740.700	28.800.000	2.526.401.068
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	1.084.557.667	595.969.700	279.752.000	321.728.000	21.600.000	2.303.607.367	1.044.377.882	592.249.700	279.752.000	277.390.700	21.600.000	2.215.370.282
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	954.546.970	744.703.609	300.067.000	500.039.000	136.800.000	2.636.156.579	949.315.320	739.063.609	300.064.000	455.701.700	136.800.000	2.580.944.629
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	1.227.148.800	561.038.866	294.040.000	345.553.000	86.400.000	2.514.180.666	1.203.361.076	559.238.866	290.438.000	301.215.700	86.400.000	2.440.653.642
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III	812.120.069	540.146.745	300.475.000	317.178.000	43.200.000	2.013.119.814	797.126.799	539.445.736	300.470.000	272.840.700	43.200.000	1.953.083.235
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	1.241.379.819	395.776.000	296.062.000	339.398.000	43.200.000	2.315.815.819	1.233.873.111	395.426.000	296.060.000	295.060.700	43.200.000	2.263.619.811
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	1.152.121.567	742.771.600	319.967.000	394.623.000	118.800.000	2.728.283.167	1.137.133.970	740.971.600	319.964.000	350.285.700	118.800.000	2.667.155.270
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	962.021.950	1.004.396.609	285.855.000	551.828.000	61.200.000	2.865.301.559	949.797.749	1.004.246.609	285.855.000	507.490.700	61.200.000	2.808.590.058
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	846.858.400	651.702.831	320.612.000	319.374.000	39.600.000	2.178.147.231	841.524.123	608.897.609	320.591.000	275.036.700	39.600.000	2.085.649.432
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	1.081.451.519	377.932.100	274.962.000	311.413.000	72.000.000	2.117.758.619	1.060.949.652	376.132.100	274.960.000	267.031.900	72.000.000	2.051.073.652
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	1.264.297.831	397.831.000	282.645.000	345.328.000	61.200.000	2.351.301.831	1.229.812.244	396.031.000	282.644.000	300.990.700	61.200.000	2.270.677.944
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	982.069.097	427.954.700	334.047.000	327.168.000	86.400.000	2.157.638.797	919.884.165	426.738.700	334.044.000	282.830.700	86.400.000	2.049.897.565
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI	1.076.693.437	961.327.350	361.415.000	387.078.000	64.800.000	2.851.313.787	1.061.395.064	961.252.350	361.413.000	342.740.700	64.800.000	2.791.601.114
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI	838.949.119	1.344.377.609	248.707.000	395.856.000	57.600.000	2.885.489.728	760.144.207	1.342.630.609	248.707.000	367.240.700	57.600.000	2.776.322.516
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA	1.261.188.622	495.074.700	202.152.000	301.299.000	130.500.000	2.390.214.322	1.212.823.787	494.174.700	197.652.000	301.299.000	129.600.000	2.335.549.487
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA	752.297.453	599.280.609	220.472.006	278.433.000	18.900.000	1.869.383.068	745.177.842	599.280.609	214.292.000	278.433.000	18.900.000	1.856.083.451
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	1.021.263.010	486.235.609	249.992.000	323.118.000	51.300.000	2.131.908.619	998.843.930	446.318.000	234.992.000	293.118.000	51.300.000	2.024.571.930
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	1.102.658.219	530.966.700	215.622.000	293.746.000	92.400.000	2.235.392.919	1.044.074.588	530.966.700	213.572.000	293.546.000	92.400.000	2.174.559.288
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	853.948.764	648.668.132	235.689.455	407.350.000	90.900.000	2.236.556.351	810.266.962	648.668.132	231.096.000	407.350.000	90.900.000	2.188.281.094
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI	1.121.772.850	590.525.700	251.442.000	304.143.000	149.100.000	2.416.983.550	1.077.764.930	588.725.700	245.442.000	299.543.000	149.100.000	2.360.575.630
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	1.518.319.382	644.831.000	317.777.000	203.044.000	106.350.000	2.790.321.382	1.451.458.192	643.256.000	306.227.000	203.044.000	106.350.000	2.710.335.192
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	1.278.849.937	678.499.500	343.972.000	323.995.000	87.750.000	2.713.066.437	1.149.498.400	678.499.500	320.872.000	323.203.000	80.550.000	2.552.622.900
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	1.238.061.983	484.209.000	205.612.000	290.443.000	101.700.000	2.320.025.983	1.197.529.110	484.209.000	202.762.000	268.648.000	101.700.000	2.254.848.110
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO	1.250.995.943	460.337.000	208.772.000	294.065.000	99.450.000	2.313.619.943	1.166.687.392	460.337.000	208.772.000	294.065.000	99.450.000	2.229.311.392
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	1.183.104.156	456.217.022	291.096.000	295.538.115	130.500.000	2.356.455.293	1.136.438.640	428.461.322	291.096.000	295.538.115	130.500.000	2.282.034.077
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	1.261.707.199	314.391.500	252.957.934	255.806.000	116.250.000	2.201.112.633	1.203.402.143	313.111.500	249.957.000	251.000.000	113.550.000	2.131.020.643

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN						REALISASI					
		BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH	BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	1.359.323.628	836.445.554	437.923.000	413.706.600	57.600.000	3.104.998.782	1.345.998.162	835.844.700	433.049.000	400.706.600	57.600.000	3.073.198.462
07.2008.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	1.086.088.253	727.543.800	268.445.000	355.367.000	64.800.000	2.502.244.053	902.746.043	570.232.800	228.688.000	301.367.000	64.800.000	2.067.833.843
07.2009.	PEMERINTAH DESA LINGGO SARI	1.132.775.096	632.091.540	281.166.600	433.460.000	36.000.000	2.515.493.236	1.100.803.661	603.291.000	266.766.000	411.190.000	36.000.000	2.418.050.661
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	1.265.767.977	638.741.874	254.733.000	418.381.600	33.800.000	2.611.424.451	1.223.986.850	517.401.500	223.435.000	345.990.960	33.800.000	2.344.614.310
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	960.415.897	738.990.000	260.195.000	331.545.000	54.000.000	2.345.145.897	930.736.293	738.990.000	260.195.000	324.176.000	54.000.000	2.308.097.293
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI	1.101.309.447	796.529.039	244.834.000	228.046.500	36.000.000	2.406.718.986	1.016.865.641	692.997.600	239.434.000	203.366.000	36.000.000	2.188.663.241
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	1.290.051.875	731.600.700	226.379.000	267.092.000	36.000.000	2.551.123.575	1.263.608.182	697.785.000	228.769.000	202.911.000	36.000.000	2.429.073.182
07.2014.	PEMERINTAH DESA BUMI KENCANA	1.184.211.050	807.415.000	261.172.000	430.366.000	61.200.000	2.744.364.050	1.164.983.984	807.415.000	261.172.000	427.778.000	61.200.000	2.722.548.984
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI	851.901.427	794.738.200	233.446.000	499.781.800	61.200.000	2.441.067.427	849.192.867	794.738.200	233.446.000	499.781.800	61.200.000	2.438.358.867
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN	863.352.006	945.475.947	251.961.000	378.023.800	104.400.000	2.543.212.753	859.660.355	938.687.100	251.961.000	363.043.000	104.400.000	2.517.751.455
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	1.365.742.836	804.692.000	263.545.753	429.705.000	108.000.000	2.971.685.589	1.283.617.251	719.692.000	259.195.753	404.055.000	108.000.000	2.774.560.004
07.2019.	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	1.077.405.218	609.150.500	263.675.000	416.601.500	64.800.000	2.431.632.218	1.044.294.884	609.150.500	263.675.000	411.601.500	64.800.000	2.393.521.884
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	1.098.218.756	470.017.794	249.601.000	228.991.000	69.800.000	2.116.628.550	1.081.838.667	461.537.000	243.666.000	227.627.000	69.800.000	2.084.468.667
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO	1.166.026.633	471.429.700	294.558.000	136.967.000	86.400.000	2.155.381.333	1.148.039.745	468.029.700	288.188.000	130.120.793	86.400.000	2.120.778.238
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM	1.235.638.038	244.082.000	338.093.000	139.407.000	54.000.000	2.011.220.038	1.220.711.394	244.082.000	338.093.000	139.121.286	54.000.000	1.996.007.680
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS	1.495.421.262	643.365.814	299.483.000	153.813.000	54.000.000	2.646.083.076	1.480.775.183	643.365.814	290.766.000	144.644.286	54.000.000	2.613.551.283
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.112.733.020	577.920.200	378.993.000	183.363.000	36.000.000	2.289.009.220	1.077.967.957	576.685.600	358.193.000	182.996.793	36.000.000	2.231.843.350
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	1.198.580.148	683.004.420	285.403.000	245.490.000	61.200.000	2.473.677.568	1.181.104.865	649.846.000	282.403.000	204.471.286	61.200.000	2.379.025.151
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	1.765.420.505	709.898.590	277.048.582	145.753.400	64.800.000	2.962.921.077	1.693.226.978	541.625.700	249.473.000	141.052.193	64.800.000	2.690.177.871
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	1.447.510.506	544.735.000	310.850.000	295.967.000	64.800.000	2.663.862.506	1.383.815.874	534.330.000	273.503.000	293.961.112	64.800.000	2.550.409.986
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA	1.294.252.455	718.448.081	318.723.000	144.452.000	75.600.000	2.551.475.536	1.274.601.747	718.448.081	313.723.000	143.732.000	75.600.000	2.526.104.828
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA	1.152.076.469	532.775.700	318.738.000	311.402.000	82.800.000	2.397.792.169	1.119.811.519	527.825.700	302.573.000	298.372.000	82.800.000	2.331.382.219
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	868.266.509	486.069.404	283.273.000	196.463.000	90.000.000	1.924.071.913	837.251.649	473.007.900	280.420.160	190.721.286	90.000.000	1.871.400.995
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	990.215.749	526.578.691	368.778.000	197.907.000	79.200.000	2.162.679.440	859.762.826	524.958.000	366.808.000	196.923.650	79.200.000	2.027.652.476
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	1.124.535.686	600.568.700	297.185.000	143.910.000	43.200.000	2.209.399.386	1.008.517.377	578.012.000	292.437.000	138.630.714	43.200.000	2.060.797.091
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	919.635.205	643.380.862	216.473.000	205.005.000	117.800.000	2.102.294.067	861.154.889	639.664.300	215.768.000	200.862.143	117.800.000	2.035.249.332
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	1.211.793.348	1.281.405.440	287.632.914	187.600.000	198.051.538	3.166.483.240	1.103.434.946	569.562.000	212.700.000	181.870.000	198.050.000	2.265.616.946
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	1.312.272.213	1.167.580.000	343.964.000	506.343.000	356.000.000	3.686.159.213	871.358.604	312.615.000	287.908.000	224.253.000	302.400.000	1.998.534.604
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	1.196.094.447	673.307.000	331.840.000	221.885.000	144.000.000	2.567.126.447	992.079.466	441.844.000	290.745.000	62.355.000	144.000.000	1.931.023.466
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	1.065.053.196	844.391.642	307.908.369	336.350.000	75.600.000	2.629.303.207	951.088.487	620.844.170	295.832.000	336.350.000	75.600.000	2.279.714.657
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	1.007.960.401	654.164.368	303.270.800	165.232.000	90.000.000	2.220.627.569	984.485.623	409.813.000	264.099.000	161.432.000	90.000.000	1.909.829.623
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	836.537.045	719.709.859	234.272.678	460.016.400	138.200.000	2.388.735.982	826.584.893	717.909.859	234.250.000	455.416.400	138.200.000	2.372.361.152
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	1.186.531.604	963.274.890	231.270.000	171.940.040	161.200.000	2.714.216.534	965.950.176	618.744.000	198.335.000	146.040.000	151.200.000	2.080.269.176
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	1.171.564.547	541.984.237	333.691.971	157.630.000	110.400.000	2.315.270.755	1.081.412.200	514.264.000	323.691.000	152.300.000	110.400.000	2.182.067.200
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	1.465.709.526	1.117.565.900	357.960.270	159.495.000	213.300.000	3.314.030.696	1.318.926.119	611.098.700	299.045.000	159.465.000	213.300.000	2.601.834.819
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	1.422.397.614	989.673.200	357.539.000	466.353.000	276.000.000	3.511.962.814	1.300.685.863	544.182.200	255.639.000	459.223.000	276.000.000	2.835.730.063
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	1.474.901.820	757.376.985	380.393.038	187.295.000	208.800.000	3.008.766.843	1.446.204.511	750.172.500	377.993.000	160.205.000	208.800.000	2.943.375.011
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	1.150.704.166	609.644.342	330.106.400	170.010.000	151.000.000	2.411.464.908	1.043.862.637	453.364.508	270.506.400	167.410.000	151.000.000	2.086.143.545
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	1.303.768.234	563.207.808	326.475.000	300.336.400	144.000.000	2.637.787.442	1.209.226.196	379.646.000	269.175.000	268.065.000	144.000.000	2.270.112.196
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	1.020.464.426	391.380.000	324.620.000	159.800.000	126.000.000	2.022.264.426	926.444.997	274.846.000	253.620.000	149.170.000	126.000.000	1.730.080.997
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	853.458.476	873.442.000	301.838.000	165.495.164	152.700.000	2.346.933.640	707.406.241	611.267.000	231.038.000	155.105.000	148.400.000	1.853.216.241
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	1.505.458.998	660.719.588	326.140.000	400.474.000	134.000.000	3.026.792.586	1.374.660.453	382.688.000	269.690.000	253.294.000	108.000.000	2.388.332.453
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.509.644.140	898.757.450	371.184.500	469.710.084	144.000.000	3.393.296.174	1.346.913.162	610.163.000	315.905.000	432.041.500	144.000.000	2.849.022.662

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN						REALISASI					
		BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH	BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	946.808.366	887.601.949	237.845.000	151.796.000	100.400.000	2.324.451.315	884.137.772	630.101.000	237.845.000	149.796.000	100.400.000	2.002.279.772
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	1.280.243.752	780.361.400	310.563.036	190.941.600	286.435.700	2.848.545.488	1.067.342.710	741.041.400	301.263.036	173.261.600	286.435.700	2.569.344.446
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	958.307.881	779.426.909	205.109.446	152.426.000	65.400.000	2.160.670.236	794.509.675	376.947.000	169.100.000	145.026.000	65.400.000	1.550.982.675
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	1.026.108.718	656.219.498	210.563.956	176.802.500	122.400.000	2.192.094.672	949.983.677	357.334.743	206.400.000	158.752.500	122.400.000	1.794.870.920
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	912.842.189	783.800.449	244.880.000	399.069.400	127.000.000	2.467.592.038	907.531.395	745.190.665	244.880.000	322.663.400	127.000.000	2.347.265.460
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	1.064.596.242	552.171.700	308.910.000	336.433.000	108.660.000	2.370.770.942	1.062.560.463	548.571.700	308.910.000	311.368.000	108.660.000	2.340.070.163
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	960.591.564	624.844.164	365.180.000	377.813.000	57.500.000	2.385.928.728	897.981.054	577.707.164	255.130.000	303.804.000	36.000.000	2.070.622.218
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	1.155.592.741	597.035.871	292.236.000	289.917.000	14.400.000	2.349.181.612	1.067.538.072	585.095.871	285.368.524	261.462.000	14.400.000	2.213.864.467
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	1.240.919.584	745.809.900	302.434.656	353.632.000	142.100.000	2.784.896.140	1.126.841.662	745.809.900	302.434.656	327.267.000	142.100.000	2.644.453.218
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	928.399.082	466.717.314	253.883.596	295.685.000	77.750.000	2.022.434.991	901.367.967	466.717.314	253.883.000	278.471.000	77.750.000	1.978.189.281
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	927.355.185	651.453.743	360.845.000	354.177.600	133.060.000	2.426.891.528	891.545.803	647.834.100	360.845.000	279.827.600	113.060.000	2.293.112.503
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	1.094.976.343	683.563.000	321.985.000	236.432.000	24.010.000	2.360.966.343	1.086.352.268	683.563.000	321.730.000	216.952.000	24.010.000	2.332.607.268
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	1.014.744.252	446.964.000	343.893.000	295.495.000	43.350.000	2.144.446.252	1.013.631.782	443.364.000	343.143.000	282.880.000	43.350.000	2.126.368.782
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTRAN	1.096.243.005	513.151.805	349.645.000	349.627.800	111.460.000	2.420.127.610	1.045.869.747	381.259.606	287.611.600	287.833.800	91.460.000	2.094.034.753
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU	1.409.644.165	260.787.700	481.343.209	522.227.000	100.160.000	2.774.162.074	1.383.313.829	257.187.700	481.043.000	491.240.000	100.160.000	2.712.944.529
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG	1.124.117.006	550.694.000	347.789.000	347.169.000	57.460.000	2.427.229.006	1.104.169.274	550.694.000	347.789.000	301.189.000	57.460.000	2.361.301.274
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA	931.204.411	649.512.784	482.545.000	397.951.400	170.750.000	2.631.963.595	925.445.170	621.116.300	481.945.000	315.068.900	170.750.000	2.514.325.370
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	825.436.913	576.237.171	365.449.993	260.963.000	62.400.000	2.090.487.077	825.903.912	561.237.171	363.199.993	246.168.000	62.400.000	2.058.909.076
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	794.693.976	549.974.300	298.865.000	382.208.000	55.500.000	2.081.241.276	751.454.856	412.335.295	220.775.000	305.307.000	55.500.000	1.745.372.151
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG	1.146.313.546	1.279.312.400	256.312.000	227.463.000	158.400.000	3.067.800.946	1.050.403.340	753.133.000	213.490.000	227.263.000	158.400.000	2.402.689.340
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	1.306.812.080	677.583.700	375.946.000	148.180.000	36.000.000	2.544.521.780	1.299.152.178	677.583.700	375.946.000	145.780.000	36.000.000	2.534.461.878
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	1.110.638.424	767.188.609	241.994.000	205.458.000	25.200.000	2.350.479.033	1.097.119.669	767.188.609	241.994.000	205.458.000	25.200.000	2.336.960.278
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	1.212.489.802	521.493.000	241.444.000	212.493.000	36.000.000	2.223.919.802	704.772.479	196.708.000	154.140.000	206.468.000	18.000.000	1.280.088.479
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI	1.148.331.831	442.926.000	222.392.000	302.882.000	115.200.000	2.231.731.831	1.124.620.021	140.075.000	191.270.000	302.682.000	115.200.000	1.873.847.021
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	1.079.365.021	474.305.200	369.695.000	245.333.000	82.800.000	2.251.498.221	1.057.299.823	474.305.200	354.195.000	244.733.000	82.800.000	2.213.333.023
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	1.036.669.164	455.905.800	317.807.000	320.199.000	57.600.000	2.188.180.964	967.306.846	334.245.000	232.615.000	260.869.000	28.800.000	1.823.835.846
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	1.045.292.969	397.409.200	291.837.000	203.758.000	39.600.000	1.977.897.169	959.386.878	397.409.200	291.837.000	203.758.000	39.600.000	1.891.991.078
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	816.024.494	639.642.709	291.846.212	211.549.400	79.200.000	2.038.262.815	790.265.672	471.398.100	282.652.000	211.349.400	75.600.000	1.831.265.172
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	865.990.535	519.293.700	244.442.500	182.970.000	100.804.310	1.913.501.045	817.772.457	513.979.500	239.942.500	182.770.000	100.804.000	1.855.268.457
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA	1.046.669.008	396.579.400	260.842.909	200.639.000	50.400.000	1.955.130.317	1.043.680.312	394.329.400	260.842.000	200.439.000	50.400.000	1.949.690.712
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG	876.237.368	690.409.821	339.686.000	162.825.000	57.600.000	2.126.758.189	791.331.586	437.811.714	295.904.000	151.380.000	57.600.000	1.734.027.300
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG	718.970.959	685.755.609	276.246.000	148.080.000	36.000.000	1.865.052.568	717.088.315	685.305.609	276.246.000	147.880.000	36.000.000	1.862.519.924
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	1.011.027.350	369.145.000	214.027.000	230.910.000	61.200.000	1.886.309.350	1.000.991.072	369.145.000	214.027.000	229.086.000	61.200.000	1.874.449.072
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI	805.131.391	708.746.209	193.950.000	263.873.000	62.600.000	2.034.300.600	758.287.637	475.219.300	174.900.000	243.673.000	62.600.000	1.714.679.937
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	1.186.337.948	598.124.369	352.366.000	142.065.000	90.000.000	2.368.893.317	1.126.214.555	425.924.959	332.009.750	135.895.000	90.000.000	2.110.044.264
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	1.031.565.493	685.600.129	311.422.000	217.849.000	79.200.000	2.325.636.622	941.838.370	520.469.900	273.900.000	217.649.000	79.200.000	2.033.057.270
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING	1.292.757.222	536.708.858	264.152.000	207.113.000	43.200.000	2.343.931.080	1.231.598.369	288.716.600	236.330.000	207.113.000	43.200.000	2.006.957.969
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	1.452.901.550	559.911.000	245.916.000	194.657.000	21.600.000	2.474.985.550	1.176.748.663	317.550.800	196.994.000	192.557.000	21.600.000	1.905.450.463
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	1.036.750.866	290.899.000	247.192.000	205.789.000	104.400.000	1.885.030.866	1.031.941.866	290.899.000	236.092.000	205.589.000	104.400.000	1.868.921.866
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA	1.011.912.635	472.386.500	240.917.000	205.584.000	44.570.000	1.975.370.135	1.001.627.702	472.386.500	236.117.000	204.984.000	44.570.000	1.959.685.202
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA	1.304.516.966	508.781.000	365.171.000	236.397.500	40.939.600	2.455.806.066	1.077.316.757	502.531.000	345.791.000	180.797.500	33.800.000	2.140.236.257
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	1.364.186.751	406.008.000	321.642.000	256.508.000	28.800.000	2.377.144.751	1.335.147.741	399.708.000	321.342.000	256.308.000	28.800.000	2.341.305.741
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	998.273.288	836.643.309	282.687.000	209.463.000	36.000.000	2.363.066.597	976.062.502	826.498.000	281.927.000	208.253.000	36.000.000	2.328.740.502

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN						REALISASI					
		BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH	BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG	837.166.999	688.585.500	388.086.000	151.435.000	54.000.000	2.119.273.499	834.542.755	603.585.500	385.786.000	151.235.000	54.000.000	2.029.149.255
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG	1.096.075.086	678.908.700	234.852.000	262.753.000	46.800.000	2.319.388.786	1.083.130.674	671.408.700	234.752.000	262.553.000	46.800.000	2.298.644.374
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.016.580.433	335.455.400	268.732.000	225.174.500	36.000.000	1.881.942.333	937.261.962	153.261.000	240.912.000	223.369.500	36.000.000	1.590.804.462
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	1.454.315.204	832.273.000	319.063.000	215.105.000	164.000.000	2.984.756.204	1.432.075.481	828.313.000	316.470.500	193.605.000	164.000.000	2.934.463.981
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	1.504.481.114	628.129.000	423.134.708	442.665.000	208.000.000	3.206.409.822	1.416.363.224	618.129.000	362.403.508	391.876.606	198.000.000	2.986.772.338
12.2003.	PEMERINTAH DESA BERLIAN JAYA	1.165.043.922	711.979.137	236.203.000	294.328.200	165.600.000	2.573.154.259	1.110.165.959	711.979.100	233.903.000	277.808.200	165.600.000	2.499.456.259
12.2004.	PEMERINTAH DESA SIMPANG TUNGKAL	1.089.582.711	610.280.287	322.047.624	226.160.000	186.400.000	2.434.470.622	1.085.548.965	458.764.838	313.347.624	180.060.000	186.400.000	2.224.121.427
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNGKAL	1.326.426.353	300.304.000	242.320.000	282.340.000	142.200.000	2.293.590.353	1.313.895.947	300.304.000	242.320.000	263.940.000	142.200.000	2.262.659.947
12.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER HARUM	1.049.818.914	657.331.000	256.083.200	383.240.800	95.600.000	2.442.073.914	1.000.767.267	618.481.000	242.000.000	354.540.800	95.600.000	2.311.389.067
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	964.039.918	522.287.000	289.232.700	136.265.000	121.600.000	2.033.424.618	943.433.219	522.287.000	288.224.700	118.765.000	121.600.000	1.994.309.919
12.2008.	PEMERINTAH DESA SINAR HARAPAN	1.101.583.376	541.210.600	295.705.000	174.586.700	117.200.000	2.230.285.676	1.033.000.495	531.628.600	283.105.000	142.265.000	117.200.000	2.107.199.095
12.2009.	PEMERINTAH DESA BANJAR JAYA	948.481.911	710.696.585	224.687.216	327.409.000	128.800.000	2.340.074.712	947.466.213	710.640.199	230.423.000	309.908.000	128.800.000	2.327.237.412
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	1.402.707.156	721.140.150	246.606.500	170.010.000	42.400.000	2.582.863.806	1.363.798.959	715.965.150	243.985.700	151.830.000	42.400.000	2.517.979.809
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR	1.336.319.049	732.037.500	347.520.000	505.745.000	46.000.000	2.967.621.549	1.299.646.868	732.317.500	336.220.000	475.340.000	46.000.000	2.889.524.368
12.2012.	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI	1.106.820.915	442.298.178	245.840.600	164.866.000	97.200.000	2.057.025.693	1.090.892.947	441.765.533	241.865.000	142.216.682	97.200.000	2.013.940.162
12.2013.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	1.098.556.042	586.588.599	293.531.600	233.630.500	39.600.000	2.251.906.741	1.059.212.992	586.303.599	288.806.000	153.630.500	39.600.000	2.127.553.091
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	1.099.241.193	445.865.600	340.350.000	170.429.300	101.224.000	2.157.110.093	1.039.538.440	440.465.600	336.834.263	132.009.000	101.224.000	2.050.071.303
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	1.003.508.065	631.566.409	212.519.400	277.388.300	72.000.000	2.196.982.174	936.434.578	631.566.409	209.455.000	260.868.300	72.000.000	2.110.324.287
12.2016.	PEMERINTAH DESA SINAR TUNGKAL	1.291.389.265	527.624.116	241.142.500	185.957.000	139.600.000	2.385.712.881	1.249.692.103	328.754.700	219.310.000	167.707.000	139.600.000	2.105.063.803
13.2001.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH	1.062.574.083	544.615.225	296.835.000	427.160.000	101.100.000	2.432.284.308	990.871.140	445.191.100	252.125.000	367.300.000	101.100.000	2.156.587.240
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	1.205.935.493	848.651.360	298.787.000	424.709.200	97.500.000	2.875.583.053	1.162.871.097	793.636.530	285.404.158	390.619.200	97.500.000	2.730.030.985
13.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DURIAN	1.018.014.115	320.239.000	240.987.000	321.470.000	49.725.000	1.950.435.115	965.557.491	160.484.400	232.587.000	150.850.000	39.600.000	1.549.078.891
13.2004.	PEMERINTAH DESA NAPAL	908.478.671	438.436.481	274.494.300	378.432.600	148.950.000	2.148.792.052	833.497.646	201.575.200	205.064.300	337.597.000	128.700.000	1.706.434.146
13.2005.	PEMERINTAH DESA RANTAU KASIH	1.349.695.956	460.220.600	264.402.000	386.089.400	71.325.000	2.531.732.956	1.349.695.956	460.220.600	264.402.000	350.919.400	61.200.000	2.486.437.956
13.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN I	1.224.905.356	287.354.000	272.472.000	332.096.000	64.125.000	2.180.952.356	882.599.005	129.215.500	163.215.000	113.431.000	27.000.000	1.315.460.505
13.2007.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN II	908.523.322	337.909.875	275.674.948	415.082.125	108.000.000	2.045.190.270	903.665.208	69.300.000	275.674.000	393.358.700	108.000.000	1.749.997.908
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU	1.287.487.337	394.412.000	243.882.000	323.525.000	117.250.000	2.366.556.337	1.163.598.959	394.412.000	243.882.000	106.331.000	108.000.000	2.016.223.959
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU	890.519.600	522.554.700	292.780.000	357.520.000	54.750.000	2.118.124.300	838.443.409	354.104.500	267.180.000	354.730.000	36.000.000	1.850.457.909
13.2010.	PEMERINTAH DESA KARANG WARU	862.112.917	464.545.905	257.702.000	320.830.000	77.850.000	1.983.040.822	832.452.750	432.229.800	221.671.000	146.800.000	77.850.000	1.711.003.550
13.2011.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	1.038.637.314	290.807.000	229.627.000	410.185.639	126.000.000	2.095.256.953	942.100.797	255.568.600	211.927.000	297.987.639	126.000.000	1.833.584.036
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG	1.203.081.417	541.684.000	349.880.000	292.739.000	92.500.000	2.479.884.417	1.193.181.142	333.883.600	321.080.000	199.831.400	92.500.000	2.140.476.142
13.2013.	PEMERINTAH DESA SIMPANG SARI	807.171.646	487.009.077	283.082.000	319.245.000	85.050.000	1.981.557.723	744.679.414	333.362.384	252.560.000	291.316.382	79.751.000	1.701.669.180
13.2014.	PEMERINTAH DESA TALANG PIASE	1.137.392.265	324.928.000	244.686.000	311.092.000	97.450.000	2.115.548.265	1.096.916.044	129.357.200	233.286.000	279.637.000	97.450.000	1.836.646.244
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG	918.187.568	532.800.250	296.823.000	289.108.000	43.200.000	2.080.118.818	850.805.259	381.689.900	222.942.000	257.988.000	43.200.000	1.756.625.159
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	1.766.177.628	452.205.400	438.511.000	527.205.000	108.000.000	3.292.099.028	1.662.410.982	414.715.400	398.622.000	449.129.000	108.000.000	3.032.877.382
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	944.279.620	706.685.959	284.246.000	321.289.000	124.750.000	2.381.250.579	863.484.591	456.031.000	260.246.000	289.183.000	124.750.000	1.993.694.591
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT	1.677.322.791	331.922.500	241.052.000	336.505.000	105.800.000	2.692.602.291	1.208.846.614	323.282.500	235.652.000	311.980.000	100.800.000	2.180.561.114
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	1.286.628.260	861.691.348	423.689.836	453.422.500	177.000.000	3.202.431.944	1.253.167.919	766.547.000	378.090.000	443.387.500	177.000.000	3.018.192.419
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	1.440.883.267	612.056.617	297.749.000	215.239.000	82.000.000	2.647.927.884	1.230.961.887	511.356.500	289.949.000	210.239.000	82.000.000	2.324.506.387
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	910.411.265	546.338.000	361.612.000	402.490.000	212.000.000	2.432.851.265	750.834.307	248.083.000	281.712.000	216.408.000	162.000.000	1.659.037.307
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	1.176.326.866	954.334.592	246.994.000	194.348.000	115.800.000	2.687.803.458	1.073.619.011	954.261.092	243.394.000	193.848.000	115.800.000	2.580.922.103
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAYA	1.035.730.633	361.991.000	234.265.200	266.506.000	43.200.000	1.941.692.833	898.123.797	272.310.000	211.760.400	223.996.000	43.200.000	1.649.390.197
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	1.012.932.473	436.135.200	255.227.000	354.626.000	108.000.000	2.166.920.673	757.186.032	426.585.200	251.227.000	293.263.000	108.000.000	1.836.261.232

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN						REALISASI					
		BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH	BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 05	JUMLAH
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	1.264.554.174	313.834.500	253.672.000	267.979.500	102.000.000	2.202.040.174	1.185.523.727	308.834.500	253.072.000	215.479.500	102.000.000	2.064.909.727
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	772.911.927	457.846.359	410.810.774	216.936.000	104.450.000	1.962.955.060	700.312.149	374.815.000	384.711.000	205.068.000	104.450.000	1.769.356.149
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT	1.444.313.573	566.419.610	255.882.000	292.407.900	100.800.000	2.659.823.083	1.031.038.787	336.445.000	225.782.000	196.655.900	100.800.000	1.890.721.687
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	1.344.780.220	554.140.000	251.933.596	291.833.000	95.000.000	2.537.686.816	1.025.741.093	551.807.500	243.512.000	201.976.000	90.000.000	2.113.036.593
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	1.341.554.738	749.362.550	259.587.200	368.401.800	97.200.000	2.816.106.288	1.200.047.547	735.745.200	239.788.000	359.055.000	97.200.000	2.631.835.747
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	832.815.629	703.494.579	260.805.000	314.636.000	110.000.000	2.221.751.208	767.880.400	690.672.300	256.305.000	310.136.000	108.000.000	2.132.993.700
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	1.186.104.894	296.955.000	256.492.000	245.237.000	90.000.000	2.074.788.894	1.017.640.132	276.682.500	256.492.000	237.489.000	90.000.000	1.878.303.632
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK	1.422.026.212	622.640.300	546.361.000	383.564.000	27.600.000	3.002.191.512	1.395.291.831	620.640.300	542.461.000	360.342.000	27.600.000	2.946.335.131
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU	1.078.789.138	647.725.409	339.601.100	333.159.800	93.600.000	2.492.875.447	1.076.057.256	647.725.409	339.601.100	333.159.800	93.600.000	2.490.143.565
15.2003.	PEMERINTAH DESA TALANG SIMPANG	1.088.391.710	322.565.400	313.183.000	353.355.224	90.000.000	2.167.495.334	1.087.850.026	322.565.400	312.083.000	350.538.700	90.000.000	2.163.037.126
15.2004.	PEMERINTAH DESA JEMBATAN GANTUNG	1.338.245.822	404.554.112	339.212.000	316.664.400	97.200.000	2.495.876.334	1.315.241.788	404.470.600	335.412.000	305.768.400	97.200.000	2.458.092.788
15.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG MANDUNG	782.700.529	530.461.609	295.625.000	314.590.000	43.200.000	1.966.577.138	769.711.989	530.371.609	287.225.000	314.590.000	43.200.000	1.945.098.598
15.2006.	PEMERINTAH DESA REJOSARI	1.267.203.625	435.195.300	247.458.000	327.836.300	72.000.000	2.349.693.225	1.262.911.687	435.195.300	246.858.000	284.895.900	72.000.000	2.301.860.887
15.2007.	PEMERINTAH DESA BANGKIT JAYA	879.704.100	443.158.700	257.592.000	304.320.000	93.600.000	1.978.374.800	816.205.805	443.158.700	243.592.000	304.320.000	93.600.000	1.900.876.505
15.2008.	PEMERINTAH DESA BARU JAYA	918.082.098	422.179.500	336.328.900	257.404.100	72.000.000	2.005.994.598	917.018.685	422.179.500	336.328.900	256.492.100	72.000.000	2.004.019.185
15.2009.	PEMERINTAH DESA SINAR JAYA	1.111.150.897	705.239.700	253.510.000	294.006.000	93.600.000	2.457.506.597	1.108.861.322	705.239.700	253.510.000	294.006.000	93.600.000	2.455.217.022
15.2010.	PEMERINTAH DESA SETIA JAYA	852.380.224	534.469.300	266.760.000	293.357.400	90.000.000	2.036.966.924	851.485.343	462.469.300	266.760.000	277.381.400	90.000.000	1.948.096.043
15.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	1.271.344.954	726.941.127	276.562.401	473.823.000	154.800.000	2.903.471.482	1.252.950.314	726.649.127	276.562.400	473.823.000	154.800.000	2.884.784.841
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	903.818.331	288.195.909	393.923.000	285.508.000	111.600.000	1.983.043.240	868.966.054	288.195.909	393.323.000	274.456.000	111.600.000	1.936.540.963
	JUMLAH	**255.194.279.361**	**144.673.314.764**	**66.488.552.643**	**67.689.644.466**	**22.193.656.955**	**556.239.448.188**	**240.189.537.244**	**128.061.014.347**	**63.166.727.318**	**61.674.855.559**	**21.733.479.700**	**514.825.614.168**

KETERANGAN :

- BIDANG 01 = PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- BIDANG 02 = PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- BIDANG 03 = PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- BIDANG 04 = PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- BIDANG 05 = BIDANG TIDAK TERDUGA

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN**			
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**1.495.432.505,00**	**2.193.644.759,00**	**(698.212.254,00)**
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	294.952.109,00	310.552.375,00	(15.600.266,00)
1.1.2.	Hasil Aset Desa	750.096.538,00	1.028.753.288,00	(278.656.750,00)
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	445.258.858,00	849.214.096,00	(403.955.238,00)
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**538.901.634.477,08**	**522.571.017.137,24**	**16.330.617.339,84**
1.2.1.	Dana Desa	225.657.967.800,38	209.569.460.433,24	16.088.507.367,14
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	309.993.466.676,70	309.291.356.704,00	702.109.972,70
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	2.940.000.000,00	3.400.000.000,00	(460.000.000,00)
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	310.200.000,00	310.200.000,00	0,00
1.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**2.817.120.210,96**	**3.593.661.894,87**	**(776.541.683,91)**
1.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	1.563.676.980,00	1.563.676.980,00	0,00
1.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	10.201.200,00	10.201.200,00	0,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn	624.851.226,72	817.174.678,21	(192.323.451,49)
1.3.6.	Bunga Bank	310.764.814,24	856.234.896,66	(545.470.082,42)
1.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	307.625.990,00	346.374.140,00	(38.748.150,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	**543.214.187.193,04**	**528.358.323.791,11**	**14.855.863.401,93**
2.	**BELANJA**			
2.1.	**Belanja Pegawai**	**111.505.313.759,00**	**109.728.243.498,75**	**1.777.070.260,25**
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10.574.618.077,00	10.385.583.798,00	189.034.279,00
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	70.764.542.342,00	69.385.827.914,75	1.378.714.427,25
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	503.631.060,00	481.301.378,00	22.329.682,00
2.1.4.	Tunjangan BPD	29.662.522.280,00	29.475.530.408,00	186.991.872,00
2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**237.448.294.858,69**	**218.986.355.675,60**	**18.461.939.183,09**
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.397.783.216,61	46.887.580.522,92	3.510.202.693,69
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	99.212.497.057,00	93.989.576.675,00	5.222.920.382,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	28.997.987.081,00	24.601.879.819,83	4.396.107.261,17
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.820.931.390,50	2.461.302.856,50	359.628.534,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	20.186.390.753,61	18.633.420.830,85	1.552.969.922,76
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.515.276.229,55	4.752.930.009,50	762.346.220,05
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	30.317.429.130,42	27.659.664.961,00	2.657.764.169,42
2.3.	**Belanja Modal**	**184.111.900.924,35**	**163.562.560.845,45**	**20.549.340.078,90**
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	724.460.677,95	644.138.148,00	80.322.529,95
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	23.589.615.137,84	20.874.919.151,33	2.714.695.986,51
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	24.361.085.714,00	23.322.484.404,12	1.038.601.309,88
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	57.368.934.416,32	49.683.999.041,60	7.684.935.374,72
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	56.413.860.121,21	50.014.295.840,00	6.399.564.281,21
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	4.713.323.725,00	3.915.275.680,00	798.048.045,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	7.264.158.576,13	6.500.738.730,00	763.419.846,13
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	1.320.455.697,38	1.111.795.564,00	208.660.133,38
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	8.356.006.858,52	7.494.914.286,40	861.092.572,12
2.4.	**Belanja Tidak Terduga**	**23.188.193.645,92**	**22.548.454.148,00**	**639.739.497,92**
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	23.188.193.645,92	22.548.454.148,00	639.739.497,92
	JUMLAH BELANJA	**556.253.703.187,96**	**514.825.614.167,80**	**41.428.089.020,16**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(13.039.515.994,92)**	**13.532.709.623,31**	**26.572.225.618,23**
3.	**PEMBIAYAAN**			
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**30.150.856.654,34**	**29.959.273.903,41**	**191.582.750,93**
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.669.860.112,76	26.584.087.003,41	85.773.109,35
3.1.4.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	3.380.996.541,58	3.275.186.900,00	105.809.641,58
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**16.074.490.397,00**	**14.983.615.259,00**	**1.090.875.138,00**
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.049.783.297,00	13.958.908.159,00	1.090.875.138,00
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	1.024.707.100,00	1.024.707.100,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**14.076.366.257,34**	**14.975.658.644,41**	**(899.292.387,07)**
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**1.036.850.262,42**	**28.508.368.267,72**	**(27.471.518.005,30)**

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran 1

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01	**KECAMATAN SEKAYU**		14.373.441.171	14.454.837.140	14.752.163.266	13.720.619.638	378.722.796	378.722.796	0	0	700	1.112.940.298
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	1.491.201.663	1.485.760.911	1.586.270.906	1.415.789.040	95.069.243	95.069.243	0	0	0	165.041.115
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	4	1.571.596.863	1.571.596.863	1.659.306.817	1.507.474.452	87.709.954	87.709.954	0	0	0	151.832.365
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	4	1.622.820.364	1.616.926.216	1.622.820.364	1.588.893.672	0	0	0	0	0	28.032.544
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	4	1.563.075.465	1.563.075.465	1.668.300.434	1.620.006.033	105.224.969	105.224.969	0	0	0	48.294.401
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	4	1.141.221.663	1.244.871.820	1.166.196.820	889.119.329	24.975.157	24.975.157	0	0	0	380.727.648
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	4	1.130.386.823	1.126.003.994	1.134.378.069	1.012.762.868	3.991.946	3.991.946	0	0	700	117.233.072
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	4	1.277.607.826	1.277.607.826	1.318.676.749	1.302.117.826	41.068.923	41.068.923	0	0	0	16.558.923
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	1.317.952.774	1.318.217.255	1.323.657.747	1.243.040.883	5.704.973	5.704.973	0	0	0	80.881.345
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	4	1.656.867.867	1.650.066.927	1.657.940.244	1.553.015.262	1.072.377	1.072.377	0	0	0	98.124.042
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	4	1.600.709.863	1.600.709.863	1.614.615.117	1.588.400.273	13.905.254	13.905.254	0	0	0	26.214.844
02	**KECAMATAN LAIS**		21.830.317.730	21.448.130.411	21.921.363.806	21.208.630.763	91.746.076	91.746.076	0	0	700.000	331.245.724
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	1.233.110.512	1.227.669.760	1.239.418.000	1.127.168.380	6.307.488	6.307.488	0	0	0	106.808.868
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	4	1.192.990.411	1.226.192.808	1.202.634.299	1.185.878.524	9.643.888	9.643.888	0	0	0	49.958.172
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG TIMUR	4	1.539.420.976	1.256.507.261	1.540.016.105	1.256.716.213	595.129	595.129	0	0	0	386.177
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	4	1.450.479.603	1.450.479.603	1.450.479.603	1.450.479.603	0	0	0	0	0	0
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	4	1.545.629.805	1.545.629.805	1.548.858.002	1.545.442.882	3.228.197	3.228.197	0	0	0	3.415.120
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	4	1.348.790.512	1.243.349.760	1.348.790.512	1.212.820.905	0	0	0	0	0	30.528.855
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	4	1.530.919.704	1.531.910.883	1.545.590.277	1.532.200.309	14.670.573	14.670.573	0	0	0	14.381.147
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	4	1.398.687.805	1.393.271.492	1.406.912.973	1.398.579.637	8.225.168	8.225.168	0	0	0	2.917.023
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I	4	1.477.789.704	1.477.789.704	1.477.789.704	1.473.415.301	0	0	0	0	0	4.374.403
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II	4	1.331.400.613	1.326.715.521	1.331.400.613	1.301.686.216	0	0	0	0	0	25.029.305
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III	4	1.389.311.914	1.389.992.008	1.396.101.074	1.386.313.735	6.789.160	6.789.160	0	0	0	10.467.433
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTARA	4	1.244.895.964	1.240.890.966	1.251.957.830	1.247.694.992	7.761.866	7.761.866	0	0	700.000	957.840
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARAT	4	1.420.249.704	1.416.591.312	1.420.249.704	1.400.834.674	0	0	0	0	0	15.756.638
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELATAN	4	1.261.290.811	1.257.663.643	1.261.290.811	1.254.660.332	0	0	0	0	0	3.003.311

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	4	1.260.457.951	1.262.211.312	1.294.296.242	1.273.916.700	33.838.291	33.838.291	0	0	0	22.132.903
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	1.204.891.741	1.201.264.573	1.205.578.057	1.160.822.360	686.316	686.316	0	0	0	41.128.529
03	**KECAMATAN SUNGAI KERUH**		13.991.997.971	13.992.857.402	14.002.172.959	13.851.825.548	10.174.994	10.174.994	0	0	6	151.206.848
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	4	1.279.589.966	1.279.589.966	1.279.589.966	1.270.927.849	0	0	0	0	0	8.662.117
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	4	1.250.546.408	1.250.546.408	1.250.546.402	1.250.546.396	0	0	0	0	6	12
03.2004.	PEMERINTAH DESA KARTAYU	4	1.391.972.366	1.391.972.366	1.391.972.366	1.312.975.700	0	0	0	0	0	78.996.666
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	4	1.250.146.265	1.250.146.265	1.250.146.265	1.249.860.552	0	0	0	0	0	285.713
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	1.332.173.966	1.332.173.966	1.332.173.966	1.318.103.056	0	0	0	0	0	14.070.910
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG	4	1.707.727.108	1.707.727.108	1.707.727.108	1.700.927.108	0	0	0	0	0	6.800.000
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	1.536.184.306	1.536.184.306	1.536.184.306	1.502.995.390	0	0	0	0	0	33.188.916
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	4	1.587.315.106	1.587.315.106	1.587.315.106	1.579.047.017	0	0	0	0	0	8.268.089
03.2014.	PEMERINTAH DESA KERTA JAYA	4	1.362.035.714	1.362.895.145	1.362.035.714	1.362.035.714	0	0	0	0	0	859.431
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA	4	1.294.306.766	1.294.306.766	1.304.481.760	1.304.406.766	10.174.994	10.174.994	0	0	0	74.994
04	**KECAMATAN BATANG HARI LEKO**		19.643.510.364	19.630.059.717	20.535.110.824	19.262.636.713	891.600.459	880.220.050	0	0	(1)	1.247.643.054
04.2001.	PEMERINTAH DESA BUKIT SEJAHTERA	4	1.452.138.855	1.446.698.103	1.505.435.817	1.466.489.748	53.296.962	53.296.962	0	0	0	33.505.317
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUKIT PANGKUASAN	4	1.151.184.115	1.151.184.115	1.155.789.309	1.143.079.112	4.605.194	4.605.194	0	0	0	12.710.197
04.2003.	PEMERINTAH DESA TANAH ABANG	4	1.395.104.617	1.395.255.749	1.469.301.768	1.455.740.452	74.197.151	74.197.151	0	0	0	13.712.448
04.2004.	PEMERINTAH DESA TALANG LEBAN	4	1.191.392.164	1.191.392.164	1.255.667.543	1.195.143.502	64.275.379	64.275.379	0	0	0	60.524.041
04.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH	4	1.121.943.715	1.121.943.715	1.174.507.489	1.124.676.340	52.563.774	52.563.774	0	0	0	49.831.149
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH	4	1.163.120.515	1.163.120.515	1.182.320.515	1.141.002.283	19.200.000	19.200.000	0	0	0	41.318.232
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL	4	1.135.768.715	1.135.995.413	1.136.175.412	1.101.546.600	406.697	0	0	0	0	34.448.813
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	4	1.250.397.467	1.250.397.467	1.326.554.034	1.181.994.130	76.156.567	76.156.567	0	0	0	144.559.904
04.2009.	PEMERINTAH DESA SAKO SUBAN	4	1.205.194.018	1.205.194.018	1.329.425.952	1.164.499.268	124.231.933	113.258.221	0	0	(1)	153.952.971
04.2010.	PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU	4	1.249.242.964	1.243.802.212	1.295.285.776	1.216.531.069	46.042.812	46.042.812	0	0	0	73.313.955
04.2011.	PEMERINTAH DESA SAUT	4	1.340.726.505	1.340.726.505	1.382.379.505	1.360.338.400	41.653.000	41.653.000	0	0	0	22.041.105
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI	4	1.164.124.315	1.164.124.315	1.179.085.403	1.101.024.764	14.961.088	14.961.088	0	0	0	78.060.639
04.2013.	PEMERINTAH DESA PINGGAP	4	1.137.903.714	1.137.903.714	1.208.615.182	1.193.265.344	70.711.468	70.711.468	0	0	0	15.349.838
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	4	1.128.663.715	1.128.663.715	1.130.956.223	1.027.704.713	2.292.508	2.292.508	0	0	0	103.251.510
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	4	1.091.658.513	1.091.205.218	1.304.915.907	1.003.379.020	213.257.394	213.257.394	0	0	0	301.083.592
04.2016.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BULIAN	4	1.464.946.457	1.462.452.779	1.498.694.989	1.386.221.968	33.748.532	33.748.532	0	0	0	109.979.343
05	**KECAMATAN SANGA DESA**		19.308.418.396	19.319.281.871	24.348.507.520	23.232.602.199	5.129.090.988	5.129.090.988	0	0	89.001.864	1.215.770.660
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI	4	1.147.710.378	1.152.504.739	1.416.024.078	1.327.085.709	268.313.700	268.313.700	0	0	0	93.732.730

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	4	1.119.289.678	1.119.289.678	1.450.071.178	1.397.979.878	330.781.500	330.781.500	0	0	0	52.091.300
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I	4	962.823.179	962.823.179	1.206.136.879	1.147.393.379	243.313.700	243.313.700	0	0	0	58.743.500
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	4	1.176.163.628	1.176.163.628	1.506.477.328	1.457.048.328	330.313.700	330.313.700	0	0	0	49.429.000
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	4	1.006.466.527	1.006.466.527	1.335.880.227	1.257.179.728	329.413.700	329.413.700	0	0	0	78.700.499
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	4	1.202.013.879	1.202.133.879	1.482.527.579	1.428.413.879	280.513.700	280.513.700	0	0	0	54.233.700
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	4	1.381.963.966	1.381.963.966	1.625.277.666	1.566.736.166	243.313.700	243.313.700	0	0	0	58.541.500
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III	4	986.711.680	987.076.563	1.250.335.110	1.202.053.601	263.623.430	263.623.430	0	0	0	48.646.392
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	1.238.659.119	1.238.659.119	1.481.972.819	1.432.877.819	243.313.700	243.313.700	0	0	0	49.095.000
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	1.318.632.467	1.318.693.133	1.586.946.167	1.531.780.667	268.313.700	268.313.700	0	0	0	55.226.166
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	4	1.172.998.879	1.175.152.879	1.418.693.379	1.368.074.879	245.694.500	245.694.500	0	0	0	52.772.500
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	4	1.156.305.531	1.159.864.842	1.424.619.231	1.334.771.509	357.315.564	357.315.564	0	0	89.001.864	182.408.897
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	4	1.158.597.270	1.158.609.470	1.405.006.619	1.347.847.970	246.409.349	246.409.349	0	0	0	57.170.849
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	4	1.119.905.531	1.120.085.405	1.449.719.231	1.377.233.822	329.813.700	329.813.700	0	0	0	72.665.283
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	4	1.092.393.529	1.092.393.529	1.353.977.474	1.264.049.729	261.583.945	261.583.945	0	0	0	89.927.745
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI	4	1.018.983.127	1.018.983.127	1.287.728.827	1.231.202.227	268.745.700	268.745.700	0	0	0	56.526.600
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI	4	1.048.800.028	1.048.418.208	1.667.113.728	1.560.872.909	618.313.700	618.313.700	0	0	0	105.858.999
06	**KECAMATAN BABAT TOMAN**		16.603.146.800	16.584.169.024	16.847.973.890	16.279.185.861	244.827.090	244.827.090	0	0	0	549.810.253
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA	4	1.473.060.858	1.473.060.858	1.501.152.315	1.457.261.825	28.091.457	28.091.457	0	0	0	43.890.490
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA	4	1.126.715.815	1.126.715.815	1.130.296.370	1.124.085.609	3.580.555	3.580.555	0	0	0	6.210.761
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	1.279.413.619	1.274.572.867	1.279.413.619	1.217.023.910	0	0	0	0	0	57.548.957
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	1.359.763.254	1.387.990.842	1.395.240.516	1.345.264.624	35.477.262	35.477.262	0	0	0	78.203.480
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	4	1.200.897.664	1.171.457.664	1.240.764.187	1.204.890.132	39.866.523	39.866.523	0	0	0	6.434.055
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI	4	1.436.047.056	1.436.047.056	1.437.291.027	1.400.104.700	1.243.971	1.243.971	0	0	0	37.186.327
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	1.556.980.717	1.544.469.501	1.588.531.149	1.556.643.941	31.550.432	31.550.432	0	0	0	19.375.992
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	4	1.483.523.917	1.483.523.917	1.529.622.893	1.475.462.260	46.098.976	46.098.976	0	0	0	54.160.633
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	4	1.439.407.056	1.438.993.660	1.447.825.856	1.411.028.580	8.418.800	8.418.800	0	0	0	36.383.880
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO	4	1.370.796.654	1.370.796.654	1.372.940.654	1.294.445.800	2.144.000	2.144.000	0	0	0	78.494.854
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	4	1.444.253.856	1.444.253.856	1.485.667.778	1.411.184.922	41.413.922	41.413.922	0	0	0	74.482.856
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	4	1.432.286.334	1.432.286.334	1.439.227.526	1.381.789.558	6.941.192	6.941.192	0	0	0	57.437.968
07	**KECAMATAN SUNGAI LILIN**		19.343.926.588	19.344.757.814	19.760.003.836	19.238.711.259	416.077.248	416.077.248	0	0	0	522.123.803
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	1.780.648.191	1.781.252.719	1.850.559.985	1.842.580.900	69.911.794	69.911.794	0	0	0	8.583.613
07.2008.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	1.405.526.498	1.405.526.498	1.408.961.298	1.289.865.800	3.434.800	3.434.800	0	0	0	119.095.498
07.2009.	PEMERINTAH DESA LINGGO SARI	4	1.537.340.140	1.537.340.140	1.560.086.829	1.505.837.548	22.746.689	22.746.689	0	0	0	54.249.281

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	4	1.561.032.088	1.561.032.088	1.561.032.088	1.548.599.671	0	0	0	0	0	12.432.417
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	4	1.322.504.597	1.322.504.597	1.329.723.897	1.305.469.200	7.219.300	7.219.300	0	0	0	24.254.697
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI	4	1.367.488.298	1.367.488.298	1.409.441.489	1.354.983.514	41.953.191	41.953.191	0	0	0	54.457.975
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	4	1.616.026.090	1.616.026.090	1.660.504.621	1.619.913.209	44.478.531	44.478.531	0	0	0	40.591.412
07.2014.	PEMERINTAH DESA BUMI KENCANA	4	1.684.362.104	1.684.815.500	1.684.362.104	1.667.796.868	0	0	0	0	0	17.018.632
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI	4	1.286.780.948	1.287.536.608	1.286.877.553	1.286.877.400	96.605	96.605	0	0	0	755.813
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN	4	1.419.846.797	1.419.846.797	1.420.948.497	1.417.117.669	1.101.700	1.101.700	0	0	0	3.830.828
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	4	1.602.042.589	1.601.060.231	1.714.392.589	1.555.549.331	112.350.000	112.350.000	0	0	0	157.860.900
07.2019.	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	4	1.354.774.898	1.354.774.898	1.416.270.792	1.409.832.452	61.495.894	61.495.894	0	0	0	6.438.340
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	4	1.405.553.350	1.405.553.350	1.456.842.094	1.434.287.697	51.288.744	51.288.744	0	0	0	22.554.397
08	**KECAMATAN KELUANG**		18.571.086.979	18.571.086.979	19.156.606.124	18.584.630.213	585.519.145	585.519.145	0	0	0	571.975.911
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO	5	1.455.834.394	1.455.834.394	1.461.495.325	1.441.907.077	5.660.931	5.660.931	0	0	0	19.588.248
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM	5	1.296.923.089	1.296.923.089	1.326.413.837	1.316.658.467	29.490.748	29.490.748	0	0	0	9.755.370
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS	5	1.505.450.989	1.505.450.989	1.612.698.921	1.593.770.352	107.247.932	107.247.932	0	0	0	18.928.569
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	1.471.787.900	1.471.787.900	1.471.986.406	1.436.836.836	198.506	198.506	0	0	0	35.149.570
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	5	1.574.375.989	1.574.375.989	1.624.722.119	1.574.672.207	50.346.130	50.346.130	0	0	0	50.049.912
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	5	1.806.970.498	1.806.970.498	1.878.254.458	1.862.893.975	71.283.960	71.283.960	0	0	0	15.360.483
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	1.519.637.641	1.519.637.641	1.543.961.877	1.479.003.695	24.324.236	24.324.236	0	0	0	64.958.182
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA	5	1.626.079.690	1.626.079.690	1.626.080.608	1.613.578.090	918	918	0	0	0	12.502.518
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA	5	1.411.825.639	1.411.825.639	1.418.360.716	1.385.031.640	6.535.077	6.535.077	0	0	0	33.329.076
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	1.157.314.499	1.157.314.499	1.212.866.868	1.196.356.093	55.552.369	55.552.369	0	0	0	16.510.775
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	1.230.360.000	1.230.360.000	1.306.394.678	1.181.009.489	76.034.678	76.034.678	0	0	0	125.385.189
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	5	1.306.021.649	1.306.021.649	1.312.473.740	1.199.779.700	6.452.091	6.452.091	0	0	0	112.694.040
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	5	1.208.505.002	1.208.505.002	1.360.896.571	1.303.132.592	152.391.569	152.391.569	0	0	0	57.763.979
09	**KECAMATAN BAYUNG LENCIR**		27.968.245.765	27.832.639.723	28.718.099.784	26.790.942.256	749.854.727	852.990.821	0	0	708	1.894.688.288
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	4	1.266.911.811	1.262.377.851	1.318.676.262	1.282.764.328	51.764.451	51.750.000	0	0	0	31.363.523
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	4	1.536.051.013	1.534.124.080	1.585.611.013	1.018.133.576	49.560.000	49.560.000	0	0	0	565.550.504
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	4	1.277.137.502	1.273.034.498	1.277.137.502	1.114.352.410	0	0	0	0	0	158.682.088
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	4	1.247.183.102	1.242.211.089	1.290.459.471	1.224.431.008	43.276.369	43.276.369	0	0	0	61.056.450
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	1.161.264.962	1.157.637.794	1.161.264.962	1.159.056.184	0	0	0	0	0	(1.418.390)
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	4	1.235.098.463	1.230.564.503	1.235.628.463	1.226.471.825	530.000	530.000	0	0	0	4.622.678
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	4	1.174.704.962	1.169.868.738	1.365.126.404	1.186.469.640	190.421.442	190.421.442	0	0	0	173.820.540
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	1.356.437.912	1.351.904.102	1.359.166.062	1.340.259.868	2.728.150	2.728.000	0	0	0	14.372.234

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	1.444.683.615	1.439.016.165	1.469.748.770	1.421.162.775	25.065.155	25.065.155	0	0	0	42.918.545
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	4	1.680.925.918	1.675.031.770	1.694.280.828	1.674.973.406	13.354.910	13.354.910	0	0	0	13.413.274
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	4	1.659.312.805	1.659.312.805	1.677.230.305	1.655.354.128	17.917.500	17.917.500	0	0	0	21.876.177
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	4	1.367.779.211	1.367.779.211	1.413.472.166	1.359.257.173	45.692.955	45.692.955	0	0	0	54.214.993
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	1.471.766.302	1.471.766.302	1.542.584.510	1.514.379.988	70.818.208	67.157.000	0	0	0	24.543.314
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	1.177.014.962	1.177.014.962	1.188.240.262	1.171.510.299	11.225.300	11.200.000	0	0	0	16.704.663
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	4	1.200.680.954	1.196.464.601	1.242.298.954	974.679.382	41.618.708	41.618.708	0	0	708	263.403.927
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	1.180.115.601	1.176.941.829	1.180.115.601	1.094.401.236	0	106.837.203	0	0	0	189.377.796
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	1.485.500.213	1.485.500.213	1.527.737.247	1.448.973.103	42.237.034	42.237.034	0	0	0	78.764.144
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	4	1.303.152.764	1.298.618.804	1.322.038.366	1.289.353.484	18.885.602	18.885.602	0	0	0	28.150.922
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	1.223.691.102	1.221.855.078	1.251.404.062	1.203.847.594	27.712.960	27.712.960	0	0	0	45.720.444
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	1.259.912.063	1.201.670.320	1.261.669.595	1.100.555.220	1.757.532	1.757.532	0	0	0	102.872.632
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	1.258.920.528	1.239.945.008	1.354.208.979	1.330.555.629	95.288.451	95.288.451	0	0	0	4.677.830
10	**KECAMATAN PLAKAT TINGGI**		20.553.835.895	20.553.383.487	20.932.050.270	20.178.961.633	378.214.375	378.214.375	0	0	0	752.636.230
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	4	1.230.756.265	1.230.737.817	1.230.756.265	1.133.155.564	0	0	0	0	0	97.582.253
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	1.455.327.217	1.455.327.217	1.470.529.948	1.461.489.901	15.202.731	15.202.731	0	0	0	9.040.047
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	4	1.279.284.364	1.279.284.364	1.384.320.560	1.323.632.364	105.036.196	105.036.196	0	0	0	60.688.196
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	4	1.407.148.455	1.407.148.455	1.448.723.392	1.345.913.094	41.574.937	41.574.937	0	0	0	102.810.298
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	1.522.300.356	1.522.300.356	1.549.939.898	1.468.489.271	27.639.542	27.639.542	0	0	0	81.450.627
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	4	1.166.934.115	1.166.500.155	1.168.225.105	1.135.446.374	1.290.990	1.290.990	0	0	0	32.344.772
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	4	1.410.963.415	1.410.963.415	1.425.450.948	1.368.542.500	14.487.533	14.487.533	0	0	0	56.908.448
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	4	1.358.298.166	1.358.298.166	1.364.567.785	1.352.191.257	6.269.619	6.269.619	0	0	0	12.376.528
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	4	1.293.756.265	1.293.756.265	1.294.213.576	1.289.821.359	457.311	457.311	0	0	0	4.392.217
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTRAN	4	1.369.145.215	1.369.145.215	1.462.439.216	1.412.226.717	93.294.001	93.294.001	0	0	0	50.212.499
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU	4	1.779.760.209	1.779.760.209	1.787.079.779	1.761.963.228	7.319.570	7.319.570	0	0	0	25.116.551
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG	4	1.417.318.206	1.417.318.206	1.441.673.482	1.388.376.267	24.355.276	24.355.276	0	0	0	53.297.215
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA	4	1.411.603.267	1.411.603.267	1.411.603.267	1.352.476.467	0	0	0	0	0	59.126.800
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	4	1.263.699.364	1.263.699.364	1.263.699.364	1.243.179.364	0	0	0	0	0	20.520.000
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	1.187.541.016	1.187.541.016	1.228.827.685	1.142.057.906	41.286.669	41.286.669	0	0	0	86.769.779
11	**KECAMATAN LALAN**		36.698.631.876	36.625.030.593	37.735.861.089	35.927.856.407	1.037.229.213	1.037.229.213	0	0	0	1.734.403.399
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG	5	1.372.008.613	1.372.008.613	1.609.534.770	1.596.753.653	237.526.157	237.526.157	0	0	0	12.781.116
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	5	1.622.301.504	1.622.301.504	1.672.886.222	1.663.609.900	50.584.718	50.584.718	0	0	0	9.276.322
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	5	1.473.429.415	1.473.429.415	1.473.429.415	1.461.388.409	0	0	0	0	0	12.041.006

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	5	1.375.997.704	1.375.997.704	1.414.876.708	964.999.000	38.879.004	38.879.004	0	0	0	449.877.708
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI	5	1.320.137.164	1.315.149.808	1.328.222.641	1.322.364.344	8.085.477	8.085.477	0	0	0	870.941
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	5	1.389.221.865	1.389.221.865	1.389.821.865	1.382.455.325	600.000	600.000	0	0	0	7.366.540
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	5	1.351.168.164	1.351.168.164	1.351.168.164	1.288.255.298	0	0	0	0	0	62.912.866
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	5	1.268.658.016	1.263.443.962	1.278.858.016	1.192.249.199	10.200.000	10.200.000	0	0	0	81.394.763
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	1.259.208.016	1.253.767.264	1.310.561.603	1.116.488.248	51.353.587	51.353.587	0	0	0	188.632.603
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	1.249.258.216	1.243.817.464	1.256.462.526	1.233.831.548	7.204.310	7.204.310	0	0	0	17.190.226
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA	5	1.254.071.416	1.254.071.416	1.272.384.600	1.269.859.687	18.313.184	18.313.184	0	0	0	2.524.913
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG	5	1.280.775.016	1.275.334.264	1.389.718.730	1.307.142.962	108.943.714	108.943.714	0	0	0	77.135.016
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG	5	1.214.064.715	1.214.064.715	1.275.062.736	1.274.063.209	60.998.021	60.998.021	0	0	0	999.527
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	5	1.173.054.214	1.168.973.650	1.173.654.214	1.161.235.836	600.000	600.000	0	0	0	8.337.814
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI	5	1.256.188.216	1.251.200.860	1.260.524.955	1.134.487.778	4.336.739	4.336.739	0	0	0	121.049.821
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	4	1.519.912.455	1.514.245.005	1.535.192.655	1.499.718.386	15.280.200	15.280.200	0	0	0	29.806.819
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	5	1.244.604.616	1.244.604.616	1.322.686.228	1.296.158.736	78.081.612	78.081.612	0	0	0	26.527.492
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING	5	1.572.409.956	1.572.409.956	1.584.216.014	1.577.927.800	11.806.058	11.806.058	0	0	0	6.288.214
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	5	1.489.018.956	1.483.124.808	1.668.245.421	1.430.207.467	179.226.465	179.226.465	0	0	0	232.143.806
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	5	1.228.941.115	1.228.941.115	1.248.959.300	1.234.408.900	20.018.185	20.018.185	0	0	0	14.550.400
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA	5	1.239.554.515	1.234.567.159	1.246.468.015	1.233.530.953	6.913.500	6.913.500	0	0	0	7.949.706
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA	5	1.573.655.654	1.568.214.903	1.605.568.871	1.390.074.448	31.913.217	31.913.217	0	0	0	210.053.672
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	5	1.519.475.655	1.519.475.655	1.562.523.996	1.550.864.626	43.048.341	43.048.341	0	0	0	11.659.370
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	1.376.710.366	1.370.740.652	1.377.228.366	1.351.645.656	518.000	518.000	0	0	0	19.612.996
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG	5	1.352.542.964	1.352.542.964	1.363.560.987	1.274.314.917	11.018.023	11.018.023	0	0	0	89.246.070
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG	5	1.501.415.655	1.496.352.733	1.514.330.955	1.502.654.478	12.915.300	12.915.300	0	0	0	6.613.555
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	1.220.847.715	1.215.860.359	1.249.713.115	1.217.165.644	28.865.400	28.865.400	0	0	0	27.560.115
12	**KECAMATAN TUNGKAL JAYA**		22.650.526.877	22.578.889.779	22.656.979.125	21.512.416.477	6.504.248	504.248	0	0	52.000	1.066.977.550
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	4	1.631.350.204	1.635.845.951	1.631.350.204	1.603.240.136	0	0	0	0	0	32.605.815
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	1.735.770.208	1.729.951.626	1.735.770.208	1.595.101.118	0	0	0	0	0	134.850.508
12.2003.	PEMERINTAH DESA BERLIAN JAYA	4	1.365.136.313	1.359.544.429	1.365.136.313	1.298.271.952	0	0	0	0	0	61.272.477
12.2004.	PEMERINTAH DESA SIMPANG TUNGKAL	4	1.375.653.113	1.371.119.153	1.375.653.113	1.191.451.280	0	0	0	0	0	179.667.873
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNGKAL	4	1.437.442.353	1.433.361.789	1.443.442.353	1.413.414.932	6.000.000	0	0	0	0	19.946.857
12.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER HARUM	4	1.340.962.914	1.334.955.317	1.340.910.914	1.219.737.417	0	0	0	0	52.000	115.217.900
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	4	1.257.503.963	1.252.516.607	1.258.008.211	1.221.048.607	504.248	504.248	0	0	0	31.972.248
12.2008.	PEMERINTAH DESA SINAR HARAPAN	4	1.222.706.963	1.217.719.607	1.222.706.963	1.128.819.044	0	0	0	0	0	88.900.563

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN** **REALISASI S/D 31/12/2025**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN** **Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa**

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
12.2009.	PEMERINTAH DESA BANJAR JAYA	4	1.264.072.511	1.264.072.511	1.264.072.511	1.252.442.980	0	0	0	0	0	11.629.531
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	1.582.332.406	1.575.984.862	1.582.332.406	1.527.089.581	0	0	0	0	0	48.895.281
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR	4	1.692.737.404	1.686.843.256	1.692.737.404	1.614.226.796	0	0	0	0	0	72.616.460
12.2012.	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI	4	1.245.437.363	1.240.450.007	1.245.437.363	1.203.688.119	0	0	0	0	0	36.761.888
12.2013.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	4	1.362.714.212	1.356.820.064	1.362.714.212	1.324.352.015	0	0	0	0	0	32.468.049
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	4	1.402.546.466	1.396.198.922	1.402.546.466	1.326.142.919	0	0	0	0	0	70.056.003
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	4	1.273.030.628	1.267.136.480	1.273.030.628	1.192.308.778	0	0	0	0	0	74.827.702
12.2016.	PEMERINTAH DESA SINAR TUNGKAL	4	1.461.129.856	1.456.369.198	1.461.129.856	1.401.080.803	0	0	0	0	0	55.288.395
13	**KECAMATAN LAWANG WETAN**		19.522.407.076	19.481.539.281	19.660.770.482	18.980.464.984	138.363.406	138.363.406	0	0	0	639.437.703
13.2001.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH	4	1.351.439.580	1.336.243.168	1.368.204.308	1.351.428.765	16.764.728	16.764.728	0	0	0	1.579.131
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	4	1.507.070.403	1.507.070.403	1.554.224.321	1.484.219.925	47.153.918	47.153.918	0	0	0	70.004.396
13.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DURIAN	4	1.182.684.115	1.187.333.428	1.182.684.115	1.172.877.491	0	0	0	0	0	14.455.937
13.2004.	PEMERINTAH DESA NAPAL	4	1.169.802.463	1.164.550.626	1.171.739.669	1.138.773.346	1.937.206	1.937.206	0	0	0	27.714.486
13.2005.	PEMERINTAH DESA RANTAU KASIH	4	1.500.562.356	1.497.325.723	1.510.312.356	1.505.442.356	9.750.000	9.750.000	0	0	0	1.633.367
13.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN I	4	1.481.242.356	1.485.721.552	1.481.242.356	1.124.060.505	0	0	0	0	0	361.661.047
13.2007.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN II	4	1.218.167.270	1.215.561.820	1.218.167.270	1.213.058.808	0	0	0	0	0	2.503.012
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU	4	1.308.741.613	1.303.036.380	1.356.906.521	1.231.549.016	48.164.908	48.164.908	0	0	0	119.652.272
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU	4	1.240.809.364	1.240.809.364	1.240.809.364	1.227.299.364	0	0	0	0	0	13.510.000
13.2010.	PEMERINTAH DESA KARANG WARU	4	1.263.524.917	1.263.524.890	1.263.524.917	1.261.164.750	0	0	0	0	0	2.360.140
13.2011.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	4	1.236.012.964	1.230.685.561	1.236.012.964	1.230.572.212	0	0	0	0	0	113.349
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG	4	1.264.966.515	1.259.185.716	1.264.966.515	1.258.392.273	0	0	0	0	0	793.443
13.2013.	PEMERINTAH DESA SIMPANG SARI	4	1.185.265.077	1.184.206.759	1.199.857.723	1.178.805.435	14.592.646	14.592.646	0	0	0	19.993.970
13.2014.	PEMERINTAH DESA TALANG PIASE	4	1.326.033.265	1.320.199.073	1.326.033.265	1.320.139.117	0	0	0	0	0	59.956
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG	4	1.286.084.818	1.286.084.818	1.286.084.818	1.282.681.621	0	0	0	0	0	3.403.197
14	**KECAMATAN BABAT SUPAT**		22.587.030.417	22.538.000.563	23.703.168.731	20.498.158.701	1.322.248.669	1.322.248.669	0	0	206.110.355	3.362.090.531
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	1.871.990.809	1.865.794.397	1.871.990.809	1.815.678.145	71.586.181	71.586.181	0	0	71.586.181	121.702.433
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	5	1.412.503.415	1.412.503.415	1.432.736.460	1.085.023.400	20.233.045	20.233.045	0	0	0	347.713.060
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT	4	1.590.497.908	1.582.865.742	1.826.614.265	1.370.737.559	236.116.357	236.116.357	0	0	0	448.244.540
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	1.536.672.730	1.512.768.571	1.536.981.201	1.492.996.740	308.471	308.471	0	0	0	20.080.302
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	4	1.524.792.518	1.524.792.518	1.568.670.106	1.335.714.453	43.877.588	43.877.588	0	0	0	232.955.653
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	4	1.274.863.265	1.274.787.699	1.274.863.265	967.162.764	134.524.156	134.524.156	0	0	134.524.156	442.149.091
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	1.394.432.015	1.394.432.015	1.626.541.407	1.533.615.417	232.109.392	232.109.392	0	0	0	92.925.990
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAYA	4	1.193.218.016	1.186.870.472	1.193.218.016	1.026.852.948	0	0	0	0	0	160.017.524

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	4	1.198.557.917	1.198.557.917	1.296.139.871	1.102.890.134	97.581.954	97.581.954	0	0	0	193.249.737
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	4	1.390.630.408	1.390.630.408	1.408.753.453	1.346.579.297	18.123.045	18.123.045	0	0	0	62.174.156
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	4	1.254.211.416	1.254.211.416	1.264.795.359	1.098.261.700	10.583.943	10.583.943	0	0	0	166.533.659
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT	4	1.412.915.356	1.407.474.604	1.714.818.420	1.326.447.787	301.903.064	301.903.064	0	0	0	382.929.881
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	4	1.430.212.718	1.430.212.718	1.554.986.752	1.209.118.804	124.774.034	124.774.034	0	0	0	345.867.948
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	4	1.506.128.756	1.506.128.756	1.506.826.862	1.375.647.221	698.106	698.106	0	0	0	131.179.641
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	4	1.247.133.164	1.247.133.164	1.276.962.479	1.230.448.200	29.829.333	29.829.333	0	0	18	46.514.297
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	4	1.348.270.006	1.348.836.751	1.348.270.006	1.180.984.132	0	0	0	0	0	167.852.619
15	**KECAMATAN JIRAK JAYA**		16.361.021.845	16.336.692.920	16.856.278.452	16.603.842.631	495.256.607	495.256.607	0	0	0	228.106.896
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK	4	1.735.540.306	1.735.540.306	1.735.540.306	1.720.907.131	0	0	0	0	0	14.633.175
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU	4	1.351.798.613	1.351.521.893	1.457.097.615	1.457.096.715	105.299.002	105.299.002	0	0	0	(275.820)
15.2003.	PEMERINTAH DESA TALANG SIMPANG	4	1.248.354.818	1.248.354.818	1.248.354.818	1.244.882.800	0	0	0	0	0	3.472.018
15.2004.	PEMERINTAH DESA JEMBATAN GANTUNG	4	1.544.350.657	1.539.816.697	1.549.351.794	1.519.634.240	5.001.137	5.001.137	0	0	0	25.183.594
15.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG MANDUNG	4	1.177.424.315	1.172.172.478	1.183.814.470	1.175.603.515	6.390.155	6.390.155	0	0	0	2.959.118
15.2006.	PEMERINTAH DESA REJOSARI	4	1.429.480.408	1.429.782.672	1.564.270.255	1.520.235.877	134.789.847	134.789.847	0	0	0	44.336.642
15.2007.	PEMERINTAH DESA BANGKIT JAYA	4	1.185.414.416	1.181.333.852	1.189.070.018	1.159.056.768	3.655.602	3.655.602	0	0	0	25.932.686
15.2008.	PEMERINTAH DESA BARU JAYA	4	1.246.857.917	1.246.857.917	1.247.559.270	1.246.645.008	701.353	701.353	0	0	0	914.262
15.2009.	PEMERINTAH DESA SINAR JAYA	4	1.504.020.556	1.504.020.556	1.544.720.556	1.543.720.556	40.700.000	40.700.000	0	0	0	1.000.000
15.2010.	PEMERINTAH DESA SETIA JAYA	4	1.221.237.917	1.221.237.917	1.261.937.917	1.173.961.917	40.700.000	40.700.000	0	0	0	87.976.000
15.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	1.528.510.906	1.522.745.673	1.672.020.933	1.653.605.660	143.510.027	143.510.027	0	0	0	12.650.040
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	4	1.188.031.016	1.183.308.141	1.202.540.500	1.188.492.444	14.509.484	14.509.484	0	0	0	9.325.181
	JUMLAH		310.007.545.750	309.291.356.704	321.587.110.158	305.871.485.282	11.875.430.041	11.961.185.726	0	0	295.865.632	15.381.057.148

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran 1

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01	**KECAMATAN SEKAYU**		12.847.864.000	12.847.864.000	11.854.287.380	10.827.125.010	1.471.815.640	1.471.815.640	2.465.392.260	2.247.871.660	0	1.244.682.970
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	1.133.432.000	1.133.432.000	1.159.482.600	1.142.513.600	587.566.260	587.566.260	561.515.660	561.515.660	0	16.969.000
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	4	1.201.417.000	1.201.417.000	1.067.643.000	1.056.225.500	46.180.000	46.180.000	179.954.000	179.954.000	0	11.417.500
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	4	1.545.635.000	1.545.635.000	1.258.364.420	1.251.961.000	22.729.420	22.729.420	310.000.000	310.000.000	0	6.403.420
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	4	1.699.606.000	1.699.606.000	1.577.755.400	1.509.217.500	153.149.400	153.149.400	275.000.000	273.480.000	0	70.057.900
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	4	1.160.747.000	1.160.747.000	968.942.200	543.796.600	23.982.600	23.982.600	215.787.400	0	0	640.933.000
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	4	860.691.000	860.691.000	773.780.360	620.506.360	25.983.360	25.983.360	112.894.000	112.894.000	0	153.274.000
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	4	1.039.404.000	1.039.404.000	993.123.000	962.019.000	101.697.000	101.697.000	147.978.000	147.978.000	0	31.104.000
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	938.972.000	938.972.000	913.361.000	847.001.000	103.189.000	103.189.000	128.800.000	128.800.000	0	66.360.000
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	4	1.670.596.000	1.670.596.000	1.480.831.300	1.480.681.300	83.698.500	83.698.500	273.463.200	273.250.000	0	363.200
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	4	1.597.364.000	1.597.364.000	1.661.004.100	1.413.203.150	323.640.100	323.640.100	260.000.000	260.000.000	0	247.800.950
02	**KECAMATAN LAIS**		17.995.916.000	17.995.916.000	17.459.467.373	17.291.768.242	130.534.076	130.534.076	666.982.703	666.982.703	0	167.699.131
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	1.169.328.000	1.169.328.000	1.218.860.000	1.167.568.700	49.532.000	49.532.000	0	0	0	51.291.300
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	4	1.006.842.000	1.006.842.000	1.008.249.600	1.006.774.000	1.407.600	1.407.600	0	0	0	1.475.600
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG TIMUR	4	1.010.817.000	1.010.817.000	1.010.817.000	1.010.817.000	0	0	0	0	0	0
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	4	1.301.701.000	1.301.701.000	1.315.726.466	1.315.725.580	14.025.466	14.025.466	0	0	0	886
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	4	1.382.008.000	1.382.008.000	1.394.408.000	1.375.008.000	12.400.000	12.400.000	0	0	0	19.400.000
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	4	1.155.095.000	1.155.095.000	1.155.095.000	1.154.584.500	0	0	0	0	0	510.500
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	4	1.547.254.000	1.547.254.000	1.559.944.600	1.559.925.400	12.690.600	12.690.600	0	0	0	19.200
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	4	1.071.293.000	1.071.293.000	970.070.600	969.830.600	4.725.600	4.725.600	105.948.000	105.948.000	0	240.000
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I	4	1.233.722.000	1.233.722.000	1.233.722.000	1.197.582.000	0	0	0	0	0	36.140.000
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II	4	1.186.984.000	1.186.984.000	1.186.984.000	1.186.903.500	0	0	0	0	0	80.500
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III	4	1.391.707.000	1.391.707.000	1.149.787.500	1.149.787.500	7.575.000	7.575.000	249.494.500	249.494.500	0	0
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTARA	4	876.204.000	876.204.000	883.581.800	880.401.800	7.377.800	7.377.800	0	0	0	3.180.000
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARAT	4	863.943.000	863.943.000	863.943.000	823.405.162	0	0	0	0	0	40.537.838
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELATAN	4	893.841.000	893.841.000	893.841.000	883.980.000	0	0	0	0	0	9.861.000

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	4	910.875.000	910.875.000	772.972.000	768.371.500	9.775.000	9.775.000	147.678.000	147.678.000	0	4.600.500
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	994.302.000	994.302.000	841.464.807	841.103.000	11.025.010	11.025.010	163.862.203	163.862.203	0	361.807
03	**KECAMATAN SUNGAI KERUH**		9.629.743.000	9.629.743.000	9.645.403.000	9.631.014.500	15.660.000	15.660.000	0	0	0	14.388.500
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	4	850.539.000	850.539.000	850.539.000	850.539.000	0	0	0	0	0	0
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	4	938.672.000	938.672.000	938.672.000	938.672.000	0	0	0	0	0	0
03.2004.	PEMERINTAH DESA KARTAYU	4	1.119.309.000	1.119.309.000	1.119.309.000	1.119.309.000	0	0	0	0	0	0
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	4	831.144.000	831.144.000	831.144.000	831.144.000	0	0	0	0	0	0
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	876.714.000	876.714.000	876.714.000	862.375.500	0	0	0	0	0	14.338.500
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG	4	990.659.000	990.659.000	990.659.000	990.659.000	0	0	0	0	0	0
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	996.986.000	996.986.000	996.986.000	996.936.000	0	0	0	0	0	50.000
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	4	1.013.216.000	1.013.216.000	1.013.216.000	1.013.216.000	0	0	0	0	0	0
03.2014.	PEMERINTAH DESA KERTA JAYA	4	1.032.554.000	1.032.554.000	1.032.554.000	1.032.554.000	0	0	0	0	0	0
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA	4	979.950.000	979.950.000	995.610.000	995.610.000	15.660.000	15.660.000	0	0	0	0
04	**KECAMATAN BATANG HARI LEKO**		15.997.380.000	15.358.251.800	17.197.809.413	15.826.076.100	1.200.479.414	1.158.393.414	0	0	50.001	690.569.114
04.2001.	PEMERINTAH DESA BUKIT SEJAHTERA	4	910.428.000	910.428.000	915.888.000	882.794.000	5.460.000	5.460.000	0	0	0	33.094.000
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUKIT PANGKUASAN	4	775.361.000	775.361.000	775.661.000	751.661.000	350.000	0	0	0	50.000	23.700.000
04.2003.	PEMERINTAH DESA TANAH ABANG	4	1.078.652.000	835.979.200	1.093.102.000	811.322.800	14.450.000	14.450.000	0	0	0	39.106.400
04.2004.	PEMERINTAH DESA TALANG LEBAN	4	824.486.000	824.486.000	867.961.400	787.216.400	43.475.400	43.475.400	0	0	0	80.745.000
04.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG BULUH	4	953.165.000	953.165.000	961.925.000	961.925.000	8.760.000	8.760.000	0	0	0	0
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH	4	807.284.000	807.284.000	819.084.000	818.084.000	11.800.000	11.800.000	0	0	0	1.000.000
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL	4	815.600.000	815.600.000	844.056.000	810.795.800	28.456.000	0	0	0	0	4.804.200
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	4	1.711.307.000	1.711.307.000	1.766.989.000	1.701.307.000	55.682.000	55.682.000	0	0	0	65.682.000
04.2009.	PEMERINTAH DESA SAKO SUBAN	4	1.648.733.000	1.648.733.000	2.310.991.293	2.246.785.000	662.258.294	648.978.294	0	0	1	50.926.294
04.2010.	PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU	4	905.691.000	905.691.000	918.541.000	910.391.000	12.850.000	12.850.000	0	0	0	8.150.000
04.2011.	PEMERINTAH DESA SAUT	4	972.732.000	972.732.000	1.124.921.700	1.060.877.700	152.189.700	152.189.700	0	0	0	64.044.000
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI	4	757.913.000	757.913.000	792.848.000	699.538.400	34.935.000	34.935.000	0	0	0	93.309.600
04.2013.	PEMERINTAH DESA PINGGAP	4	766.682.000	766.682.000	799.189.020	747.489.000	32.507.020	32.507.020	0	0	0	51.700.020
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	4	816.575.000	816.575.000	818.975.000	705.125.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	113.850.000
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	4	1.036.022.000	639.566.600	1.086.932.000	673.351.000	50.910.000	50.910.000	0	0	0	17.125.600
04.2016.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BULIAN	4	1.216.749.000	1.216.749.000	1.300.745.000	1.257.413.000	83.996.000	83.996.000	0	0	0	43.332.000
05	**KECAMATAN SANGA DESA**		14.703.478.300	14.705.592.100	15.155.905.100	15.029.281.400	452.426.800	452.426.800	0	0	0	128.737.500
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI	4	947.493.000	947.493.000	955.493.000	949.169.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	6.323.800

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	4	721.871.000	721.871.000	729.871.000	723.167.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	6.703.800
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I	4	630.681.000	630.681.000	694.216.200	688.512.400	63.535.200	63.535.200	0	0	0	5.703.800
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	4	716.501.000	716.501.000	724.501.000	713.135.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	11.365.800
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	4	706.913.000	706.913.000	714.913.000	704.709.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	10.203.800
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	4	977.984.000	977.984.000	1.102.649.000	1.100.745.200	124.665.000	124.665.000	0	0	0	1.903.800
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	4	859.053.000	859.053.000	868.903.000	853.149.200	9.850.000	9.850.000	0	0	0	15.753.800
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III	4	711.614.000	711.614.000	723.814.000	711.550.200	12.200.000	12.200.000	0	0	0	12.263.800
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	796.673.000	796.673.000	804.673.000	800.969.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	3.703.800
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	1.111.307.000	1.111.307.000	1.119.307.000	1.114.403.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	4.903.800
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	4	1.277.813.000	1.279.926.800	1.407.063.000	1.406.959.200	129.250.000	129.250.000	0	0	0	2.217.600
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	4	725.528.000	725.528.000	733.528.000	730.104.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	3.423.800
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	4	684.752.000	684.752.000	692.752.000	682.704.400	8.000.000	8.000.000	0	0	0	10.047.600
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	4	856.656.000	856.656.000	881.582.600	872.578.800	24.926.600	24.926.600	0	0	0	9.003.800
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	4	773.904.000	773.904.000	781.904.000	765.200.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	16.703.800
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI	4	1.014.359.300	1.014.359.300	1.022.359.300	1.018.352.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	4.007.100
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI	4	1.190.376.000	1.190.376.000	1.198.376.000	1.193.872.200	8.000.000	8.000.000	0	0	0	4.503.800
06	**KECAMATAN BABAT TOMAN**		10.750.892.000	10.750.712.000	10.677.747.300	10.432.045.050	181.045.300	181.045.300	254.190.000	254.190.000	0	245.522.250
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA	4	853.329.000	853.329.000	863.439.000	855.539.000	10.110.000	10.110.000	0	0	0	7.900.000
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA	4	715.763.000	715.763.000	715.763.000	710.263.000	0	0	0	0	0	5.500.000
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	812.205.000	812.025.000	812.205.000	768.705.000	0	0	0	0	0	43.320.000
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	787.536.000	787.536.000	793.018.000	783.718.000	5.482.000	5.482.000	0	0	0	9.300.000
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	4	842.979.000	842.979.000	922.596.000	911.596.000	79.617.000	79.617.000	0	0	0	11.000.000
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI	4	952.619.000	952.619.000	955.323.200	937.823.200	2.704.200	2.704.200	0	0	0	17.500.000
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	1.352.023.000	1.352.023.000	1.122.442.050	1.115.471.000	24.609.050	24.609.050	254.190.000	254.190.000	0	6.971.050
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	4	1.123.030.000	1.123.030.000	1.141.854.950	1.037.960.450	18.824.950	18.824.950	0	0	0	103.894.500
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	4	847.896.000	847.896.000	847.896.000	823.251.000	0	0	0	0	0	24.645.000
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO	4	899.919.000	899.919.000	916.919.000	912.919.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	4.000.000
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	4	834.513.000	834.513.000	848.272.400	847.772.400	13.759.400	13.759.400	0	0	0	500.000
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	4	729.080.000	729.080.000	738.018.700	727.027.000	8.938.700	8.938.700	0	0	0	10.991.700
07	**KECAMATAN SUNGAI LILIN**		12.842.490.000	12.362.704.640	13.103.768.530	12.373.134.610	815.762.530	815.762.530	554.484.000	544.484.000	0	260.848.560
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	1.220.878.000	1.220.878.000	1.225.179.880	1.202.504.600	4.301.880	4.301.880	0	0	0	22.675.280
07.2008.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	950.207.000	715.824.200	1.061.717.000	777.334.200	111.510.000	111.510.000	0	0	0	50.000.000
07.2009.	PEMERINTAH DESA LINGGO SARI	4	861.822.000	861.822.000	937.463.000	911.693.000	85.641.000	85.641.000	10.000.000	0	0	35.770.000

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	4	981.533.000	736.130.440	1.046.087.000	795.529.960	64.554.000	64.554.000	0	0	0	5.154.480
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	4	900.200.000	900.200.000	956.822.000	944.222.000	56.622.000	56.622.000	0	0	0	12.600.000
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI	4	924.491.000	924.491.000	869.132.000	832.691.500	129.541.000	129.541.000	184.900.000	184.900.000	0	36.440.500
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	4	1.012.352.000	1.012.352.000	843.100.000	807.984.000	33.248.000	33.248.000	202.500.000	202.500.000	0	35.116.000
07.2014.	PEMERINTAH DESA BUMI KENCANA	4	1.008.965.000	1.008.965.000	1.057.761.000	1.054.163.000	48.796.000	48.796.000	0	0	0	3.598.000
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI	4	1.085.844.000	1.085.844.000	1.116.256.200	1.115.056.200	30.412.200	30.412.200	0	0	0	1.200.000
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN	4	1.053.749.000	1.053.749.000	1.117.891.450	1.095.511.150	64.142.450	64.142.450	0	0	0	22.380.300
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	4	1.103.257.000	1.103.257.000	1.232.106.000	1.213.156.000	138.849.000	138.849.000	10.000.000	10.000.000	0	18.950.000
07.2019.	PEMERINTAH DESA PANCA TUNGGAL	4	966.077.000	966.077.000	993.072.000	983.072.000	26.995.000	26.995.000	0	0	0	10.000.000
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	4	773.115.000	773.115.000	647.181.000	640.217.000	21.150.000	21.150.000	147.084.000	147.084.000	0	6.964.000
08	**KECAMATAN KELUANG**		11.693.158.000	11.441.041.200	11.082.350.704	10.611.295.524	880.223.300	880.223.300	1.491.030.596	1.475.685.596	0	234.283.380
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO	5	787.454.000	787.454.000	690.749.000	677.212.000	43.295.000	43.295.000	140.000.000	140.000.000	0	13.537.000
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM	5	777.110.000	777.110.000	680.810.000	676.810.000	28.700.000	28.700.000	125.000.000	125.000.000	0	4.000.000
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS	5	1.220.153.000	1.220.153.000	1.028.972.404	1.018.823.814	16.260.000	16.260.000	207.440.596	207.440.596	0	10.148.590
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	925.451.000	925.451.000	778.976.950	769.021.950	20.525.950	20.525.950	167.000.000	167.000.000	0	9.955.000
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	5	875.898.000	875.898.000	840.149.050	803.713.000	38.596.050	38.596.050	74.345.000	74.000.000	0	36.781.050
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	5	956.657.000	704.540.200	1.070.140.000	825.175.400	263.483.000	263.483.000	150.000.000	135.000.000	0	7.847.800
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	1.108.908.000	1.108.908.000	1.084.502.000	1.045.758.000	90.339.000	90.339.000	114.745.000	114.745.000	0	38.744.000
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA	5	951.302.000	951.302.000	912.202.000	900.565.000	125.900.000	125.900.000	165.000.000	165.000.000	0	11.637.000
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA	5	918.408.000	918.408.000	976.146.000	944.241.000	57.738.000	57.738.000	0	0	0	31.905.000
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	720.542.000	720.542.000	680.364.595	648.318.360	22.822.595	22.822.595	63.000.000	63.000.000	0	32.046.235
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	825.843.000	825.843.000	765.273.000	757.106.000	13.930.000	13.930.000	74.500.000	74.500.000	0	8.167.000
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	5	887.733.000	887.733.000	839.098.855	816.882.000	101.365.855	101.365.855	150.000.000	150.000.000	0	22.216.855
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	5	737.699.000	737.699.000	734.966.850	727.669.000	57.267.850	57.267.850	60.000.000	60.000.000	0	7.297.850
09	**KECAMATAN BAYUNG LENCIR**		27.144.278.000	20.045.424.789	26.257.234.047	18.032.949.920	2.286.278.847	2.429.704.755	3.173.322.800	2.855.292.800	0	1.586.886.824
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	4	2.203.274.000	1.341.989.480	1.813.065.440	948.637.000	61.391.240	61.391.000	451.599.800	451.599.800	0	3.143.680
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	4	2.035.938.000	1.289.545.200	2.051.548.200	958.718.000	15.610.200	15.610.200	0	0	0	346.437.400
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	4	1.024.987.000	768.226.200	1.218.582.000	743.774.000	193.595.000	193.595.000	0	0	0	218.047.200
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	4	1.330.605.000	949.003.000	1.293.068.000	1.007.866.000	62.463.000	62.463.000	100.000.000	0	0	3.600.000
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	1.154.631.000	884.181.080	958.774.800	681.202.000	0	0	195.856.200	195.856.200	0	7.122.880
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	4	901.977.000	901.977.000	1.060.350.000	1.054.142.400	158.373.000	158.373.000	0	0	0	6.207.600
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	4	1.061.132.000	692.320.664	1.151.597.000	740.329.000	299.065.000	299.065.000	208.600.000	120.000.000	0	131.056.664
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	980.864.000	871.558.637	921.358.237	806.024.000	105.674.237	105.674.000	165.180.000	165.180.000	0	6.028.637

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	1.965.650.000	1.195.205.000	1.595.580.400	933.938.700	62.600.400	62.600.400	432.670.000	323.240.000	0	626.700
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	4	1.731.958.000	1.127.796.400	1.786.141.400	1.128.431.400	54.183.400	54.183.400	0	0	0	53.548.400
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	4	1.502.059.000	1.502.059.000	1.300.348.500	1.257.160.800	67.789.500	67.789.500	269.500.000	269.500.000	0	43.187.700
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	4	991.163.000	749.210.840	947.151.120	704.676.120	106.500.720	106.500.720	150.512.600	150.512.600	0	522.840
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	977.618.000	676.661.600	1.059.976.000	723.164.000	247.337.000	247.337.000	164.979.000	164.979.000	0	35.855.600
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	847.404.000	576.984.600	812.214.000	536.074.000	104.210.000	104.210.000	139.400.000	139.400.000	0	5.720.600
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	4	899.736.000	683.763.000	1.072.281.000	849.241.000	299.740.000	299.740.000	127.195.000	127.195.000	0	7.067.000
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	1.263.740.000	730.384.400	1.243.740.000	740.384.000	0	143.426.385	20.000.000	0	0	133.426.785
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	1.667.662.000	1.238.439.200	1.776.286.550	1.320.753.000	108.624.550	108.624.550	0	0	0	26.310.750
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	4	1.070.216.000	792.244.338	978.167.000	687.717.000	77.951.000	77.951.000	170.000.000	170.000.000	0	12.478.338
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	1.727.223.000	1.727.223.000	1.562.633.000	1.337.859.000	137.910.000	137.910.000	302.500.000	302.500.000	0	224.774.000
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	886.896.000	500.823.120	848.814.800	429.625.000	90.910.000	90.910.000	128.991.200	128.991.200	0	33.116.920
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	919.545.000	845.829.030	805.556.600	443.233.500	32.350.600	32.350.600	146.339.000	146.339.000	0	288.607.130
10	**KECAMATAN PLAKAT TINGGI**		13.844.551.000	13.103.305.366	14.091.721.075	13.014.079.563	247.170.075	247.170.075	0	0	0	336.395.878
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	4	1.115.292.000	1.115.292.000	1.115.292.000	1.104.326.900	0	0	0	0	0	10.965.100
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	870.498.000	870.498.000	879.178.000	856.863.000	8.680.000	8.680.000	0	0	0	22.315.000
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	4	888.585.000	657.889.800	909.897.838	654.475.000	21.312.838	21.312.838	0	0	0	24.727.638
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	4	837.141.000	837.141.000	848.941.000	816.236.000	11.800.000	11.800.000	0	0	0	32.705.000
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	1.178.550.000	1.178.550.000	1.193.360.000	1.154.785.000	14.810.000	14.810.000	0	0	0	38.575.000
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	4	819.611.000	819.611.000	832.786.358	822.260.404	13.175.358	13.175.358	0	0	0	10.525.954
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	4	939.273.000	939.273.000	955.778.000	891.928.000	16.505.000	16.505.000	0	0	0	63.850.000
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	4	958.206.000	958.206.000	958.206.000	941.951.000	0	0	0	0	0	16.255.000
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	4	794.700.000	794.700.000	805.676.000	791.461.000	10.976.000	10.976.000	0	0	0	14.215.000
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTRAN	4	887.334.000	615.215.166	927.313.979	654.151.859	39.979.979	39.979.979	0	0	0	1.043.286
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU	4	939.941.000	939.941.000	954.221.000	920.384.000	14.280.000	14.280.000	0	0	0	33.837.000
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG	4	950.123.000	950.123.000	963.003.000	949.653.000	12.880.000	12.880.000	0	0	0	13.350.000
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA	4	1.129.122.000	1.129.122.000	1.129.122.000	1.098.372.500	0	0	0	0	0	30.749.500
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	4	791.255.000	791.255.000	791.255.000	779.730.000	0	0	0	0	0	11.525.000
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	744.920.000	506.488.400	827.690.900	577.501.900	82.770.900	82.770.900	0	0	0	11.757.400
11	**KECAMATAN LALAN**		22.455.240.000	18.882.623.239	20.805.941.000	16.992.526.050	1.657.886.800	1.627.336.000	3.307.185.800	3.150.107.800	0	367.325.389
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG	5	1.572.119.000	918.407.600	1.429.718.700	776.007.300	110.499.700	110.499.700	252.900.000	252.900.000	0	0
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	5	862.800.000	862.800.000	746.320.000	746.320.000	23.140.000	23.140.000	139.620.000	139.620.000	0	0
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	5	868.593.000	868.593.000	852.491.000	852.491.000	109.868.000	109.868.000	125.970.000	125.970.000	0	0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	5	908.415.000	494.672.639	776.732.000	313.628.000	227.965.000	227.965.000	359.648.000	317.570.000	0	91.439.639
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI	5	836.322.000	495.331.200	877.927.000	525.309.000	66.605.000	66.605.000	25.000.000	10.000.000	0	26.627.200
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	5	793.440.000	793.440.000	810.332.000	810.332.000	16.892.000	16.892.000	0	0	0	0
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	5	784.872.000	456.868.800	815.422.800	515.205.000	30.550.800	0	0	0	0	(58.336.200)
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	5	788.579.000	788.579.000	635.799.000	635.799.000	4.935.000	4.935.000	157.715.000	157.715.000	0	0
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	775.307.000	775.307.000	702.512.000	694.087.000	27.205.000	27.205.000	100.000.000	100.000.000	0	8.425.000
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	753.644.000	753.644.000	605.324.000	596.669.200	15.954.000	15.954.000	164.274.000	164.274.000	0	8.654.800
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA	5	749.783.000	749.783.000	656.136.400	653.886.400	25.253.000	25.253.000	118.899.600	118.899.600	0	2.250.000
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG	5	789.720.000	491.124.000	710.730.000	406.188.000	22.874.000	22.874.000	101.864.000	101.864.000	0	5.946.000
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG	5	637.164.000	637.164.000	565.811.000	565.361.000	24.540.000	24.540.000	95.893.000	95.893.000	0	450.000
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	5	752.081.000	752.081.000	690.104.000	690.104.000	54.881.000	54.881.000	116.858.000	116.858.000	0	0
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI	5	747.140.000	570.303.200	744.435.000	559.414.800	154.695.000	154.695.000	157.400.000	157.400.000	0	8.183.400
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	4	796.068.000	606.259.040	797.609.400	573.122.550	121.340.000	121.340.000	119.798.600	119.798.600	0	34.677.890
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	5	746.843.000	490.028.600	881.305.900	615.056.400	225.741.900	225.741.900	91.279.000	91.279.000	0	9.435.100
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING	5	846.807.000	515.671.800	736.644.800	405.508.600	5.237.800	5.237.800	115.400.000	115.400.000	0	1.000
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	5	765.062.000	439.404.800	780.488.000	450.330.800	115.426.000	115.426.000	100.000.000	0	0	104.500.000
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	5	703.379.000	703.379.000	612.413.000	612.413.000	7.325.000	7.325.000	98.291.000	98.291.000	0	0
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA	5	817.145.000	817.145.000	702.126.000	702.126.000	25.865.000	25.865.000	140.884.000	140.884.000	0	0
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA	5	841.833.000	841.833.000	826.030.100	729.280.500	97.197.100	97.197.100	113.000.000	113.000.000	0	96.749.600
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	5	824.985.000	824.985.000	785.900.000	769.700.000	83.915.000	83.915.000	123.000.000	123.000.000	0	16.200.000
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	1.105.560.000	1.105.560.000	950.353.000	946.400.000	8.325.000	8.325.000	163.532.000	163.532.000	0	3.953.000
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG	5	819.507.000	819.507.000	730.347.000	730.347.000	11.540.000	11.540.000	100.700.000	100.700.000	0	0
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG	5	829.644.000	829.644.000	775.795.000	768.295.000	23.725.000	23.725.000	77.574.000	77.574.000	0	7.500.000
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	738.428.000	481.107.560	607.133.900	349.144.500	16.391.500	16.391.500	147.685.600	147.685.600	0	668.960
12	**KECAMATAN TUNGKAL JAYA**		16.883.646.500	16.883.545.499	14.702.873.401	14.291.183.294	261.949.500	261.949.500	2.274.182.700	2.258.182.700	168.539.899	596.129.005
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	4	1.330.133.000	1.330.133.000	1.051.306.000	1.051.306.000	0	0	278.827.000	262.827.000	0	16.000.000
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	1.334.113.000	1.334.113.000	1.334.113.000	1.255.144.606	0	0	0	0	0	78.968.394
12.2003.	PEMERINTAH DESA BERLIAN JAYA	4	1.253.576.000	1.253.576.000	1.141.572.000	1.137.511.000	0	0	112.004.000	112.004.000	0	4.061.000
12.2004.	PEMERINTAH DESA SIMPANG TUNGKAL	4	1.180.588.000	1.180.588.000	944.440.000	918.369.638	0	0	236.148.000	236.148.000	0	26.070.362
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNGKAL	4	965.406.000	965.406.000	812.148.000	810.148.000	39.824.000	39.824.000	193.082.000	193.082.000	0	2.000.000
12.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER HARUM	4	976.064.000	976.064.000	976.064.000	972.801.300	0	0	0	0	0	3.262.700
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUMBER SARI	4	897.723.000	897.723.000	764.878.000	762.128.000	46.700.000	46.700.000	179.545.000	179.545.000	0	2.750.000
12.2008.	PEMERINTAH DESA SINAR HARAPAN	4	1.167.465.000	1.167.465.000	933.972.000	903.838.600	0	0	233.493.000	233.493.000	0	30.133.400

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
12.2009.	PEMERINTAH DESA BANJAR JAYA	4	1.167.125.500	1.167.024.499	1.074.011.101	1.073.910.100	175.425.500	175.425.500	100.000.000	100.000.000	168.539.899	168.539.899
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	1.062.857.000	1.062.857.000	843.757.000	840.262.000	0	0	219.100.000	219.100.000	0	3.495.000
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR	4	1.134.904.000	1.134.904.000	1.134.904.000	1.134.409.750	0	0	0	0	0	494.250
12.2012.	PEMERINTAH DESA PANDAN SARI	4	881.961.000	881.961.000	705.568.800	705.568.800	0	0	176.392.200	176.392.200	0	0
12.2013.	PEMERINTAH DESA MARGO MULYO	4	965.699.000	965.699.000	768.704.500	682.369.500	0	0	196.994.500	196.994.500	0	86.335.000
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	4	855.573.000	855.573.000	680.857.000	649.337.000	0	0	174.716.000	174.716.000	0	31.520.000
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO	4	842.181.000	842.181.000	842.181.000	842.181.000	0	0	0	0	0	0
12.2016.	PEMERINTAH DESA SINAR TUNGKAL	4	868.278.000	868.278.000	694.397.000	551.898.000	0	0	173.881.000	173.881.000	0	142.499.000
13	**KECAMATAN LAWANG WETAN**		12.710.380.000	9.621.221.000	13.314.528.705	9.200.266.683	823.748.580	823.748.580	95.000.000	95.000.000	124.599.875	1.149.702.897
13.2001.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH	4	1.064.078.000	805.316.800	1.064.080.000	805.158.475	2.000	2.000	0	0	0	160.325
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	4	1.265.771.000	1.265.771.000	1.278.068.780	1.202.521.108	82.297.780	82.297.780	70.000.000	70.000.000	0	75.547.672
13.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DURIAN	4	678.566.000	419.419.400	767.751.000	376.201.400	89.185.000	89.185.000	0	0	0	132.403.000
13.2004.	PEMERINTAH DESA NAPAL	4	710.069.000	497.300.600	974.124.325	567.660.800	388.655.200	388.655.200	0	0	124.599.875	318.295.000
13.2005.	PEMERINTAH DESA RANTAU KASIH	4	900.597.000	900.597.000	1.021.420.600	980.995.600	120.823.600	120.823.600	0	0	0	40.425.000
13.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN I	4	699.140.000	452.057.000	699.140.000	191.400.000	0	0	0	0	0	260.657.000
13.2007.	PEMERINTAH DESA KARANG RINGIN II	4	826.923.000	536.590.200	826.923.000	536.589.700	0	0	0	0	0	500
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU	4	922.698.000	922.698.000	1.005.483.000	781.739.000	82.785.000	82.785.000	0	0	0	223.744.000
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU	4	856.908.000	626.088.800	856.908.000	607.338.800	0	0	0	0	0	18.750.000
13.2010.	PEMERINTAH DESA KARANG WARU	4	700.187.000	449.838.800	700.187.000	449.838.800	0	0	0	0	0	0
13.2011.	PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	4	840.114.000	584.517.600	840.114.000	584.517.600	0	0	0	0	0	0
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG	4	937.170.000	700.419.600	937.170.000	603.702.000	0	0	0	0	0	96.717.600
13.2013.	PEMERINTAH DESA SIMPANG SARI	4	721.700.000	462.572.600	781.700.000	522.572.600	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0
13.2014.	PEMERINTAH DESA TALANG PIASE	4	814.515.000	524.292.000	789.515.000	516.289.200	0	0	25.000.000	25.000.000	0	(16.997.200)
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG	4	771.944.000	473.741.600	771.944.000	473.741.600	0	0	0	0	0	0
14	**KECAMATAN BABAT SUPAT**		15.948.685.000	15.721.249.800	15.588.711.478	13.815.348.820	1.315.662.979	1.315.662.979	1.529.934.000	1.176.684.000	145.702.500	2.044.879.959
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	1.407.646.000	1.407.646.000	1.389.641.920	1.195.781.920	62.254.920	62.254.920	80.259.000	80.259.000	0	193.860.000
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	5	951.314.000	951.314.000	923.742.350	884.397.000	67.428.350	67.428.350	95.000.000	95.000.000	0	39.345.350
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT	4	827.484.000	827.484.000	836.691.500	788.166.500	39.002.500	39.002.500	29.795.000	0	0	78.320.000
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	1.471.177.000	1.471.177.000	1.635.300.851	1.499.057.500	274.123.851	274.123.851	110.000.000	110.000.000	0	136.243.351
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	4	1.263.181.000	1.263.181.000	1.053.042.617	967.519.000	60.491.617	60.491.617	270.630.000	250.000.000	0	106.153.617
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	4	1.122.438.000	895.002.800	1.122.438.000	683.087.000	145.702.500	145.702.500	0	0	145.702.500	357.618.300
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	1.273.319.000	1.273.319.000	1.031.357.500	1.018.711.000	172.113.500	172.113.500	414.075.000	354.075.000	0	72.646.500
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAYA	4	713.618.000	713.618.000	722.084.307	601.899.000	8.466.307	8.466.307	0	0	0	120.185.307

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

REALISASI S/D 31/12/2025

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	4	735.734.000	735.734.000	743.601.500	675.246.500	27.867.500	27.867.500	20.000.000	0	0	88.355.000
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	4	754.334.000	754.334.000	763.437.500	697.487.500	41.508.500	41.508.500	32.405.000	0	0	98.355.000
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	4	741.710.000	741.710.000	673.384.074	650.416.300	51.674.074	51.674.074	120.000.000	120.000.000	0	22.967.774
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT	4	914.937.000	914.937.000	881.053.510	526.273.900	87.016.510	87.016.510	120.900.000	0	0	475.679.610
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	4	1.014.257.000	1.014.257.000	951.725.000	880.352.500	114.338.000	114.338.000	176.870.000	147.350.000	0	100.892.500
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	4	1.112.604.000	1.112.604.000	1.250.413.350	1.198.948.200	137.809.350	137.809.350	0	0	0	51.465.150
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	4	919.440.000	919.440.000	905.305.500	870.685.500	25.865.500	25.865.500	40.000.000	20.000.000	0	54.620.000
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	4	725.492.000	725.492.000	705.492.000	677.319.500	0	0	20.000.000	0	0	48.172.500
15	**KECAMATAN JIRAK JAYA**		10.240.896.000	10.240.896.000	10.704.829.764	10.600.441.000	463.933.764	463.933.764	0	0	0	104.388.764
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK	4	1.199.380.000	1.199.380.000	1.199.380.000	1.178.158.000	0	0	0	0	0	21.222.000
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU	4	948.399.000	948.399.000	1.029.199.000	1.029.199.000	80.800.000	80.800.000	0	0	0	0
15.2003.	PEMERINTAH DESA TALANG SIMPANG	4	863.936.000	863.936.000	918.235.724	917.665.000	54.299.724	54.299.724	0	0	0	570.724
15.2004.	PEMERINTAH DESA JEMBATAN GANTUNG	4	877.797.000	877.797.000	897.697.100	891.677.000	19.900.100	19.900.100	0	0	0	6.020.100
15.2005.	PEMERINTAH DESA TALANG MANDUNG	4	753.650.000	753.650.000	766.650.000	766.650.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0
15.2006.	PEMERINTAH DESA REJOSARI	4	726.008.000	726.008.000	742.323.400	742.323.000	16.315.400	16.315.400	0	0	0	400
15.2007.	PEMERINTAH DESA BANGKIT JAYA	4	750.125.000	750.125.000	786.425.000	741.125.000	36.300.000	36.300.000	0	0	0	45.300.000
15.2008.	PEMERINTAH DESA BARU JAYA	4	727.691.000	727.691.000	744.291.540	744.291.000	16.600.540	16.600.540	0	0	0	540
15.2009.	PEMERINTAH DESA SINAR JAYA	4	862.476.000	862.476.000	874.926.000	874.926.000	12.450.000	12.450.000	0	0	0	0
15.2010.	PEMERINTAH DESA SETIA JAYA	4	741.092.000	741.092.000	746.292.000	746.292.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0
15.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	1.044.789.000	1.044.789.000	1.221.212.000	1.221.212.000	176.423.000	176.423.000	0	0	0	0
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	4	745.553.000	745.553.000	778.198.000	746.923.000	32.645.000	32.645.000	0	0	0	31.275.000
	JUMLAH		225.688.597.800	209.590.090.433	221.642.578.271	197.968.535.766	12.204.577.605	12.275.366.713	15.811.704.859	14.724.481.259	438.892.275	9.172.440.121

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran 1

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01	**KECAMATAN SEKAYU**		150.012.100	462.121.500	411.158.831	342.157.475	261.146.731	261.146.731	0	0	0	381.110.756
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	0	30.100.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	0	0	0	30.100.000
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	4	0	43.644.400	31.033.380	28.950.000	31.033.380	31.033.380	0	0	0	45.727.780
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	4	0	56.480.000	45.799.476	45.645.500	45.799.476	45.799.476	0	0	0	56.633.976
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	4	66.312.100	66.312.100	141.768.075	75.239.000	75.455.975	75.455.975	0	0	0	66.529.075
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	4	83.700.000	170.350.000	84.116.975	84.116.000	416.975	416.975	0	0	0	86.650.975
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	4	0	0	216.975	216.975	216.975	216.975	0	0	0	0
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	0	0	216.975	0	216.975	216.975	0	0	0	216.975
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	4	0	41.875.000	30.216.975	30.200.000	30.216.975	30.216.975	0	0	0	41.891.975
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR		0	53.360.000	34.390.000	34.390.000	34.390.000	34.390.000	0	0	0	53.360.000
02	**KECAMATAN LAIS**		86.635.000	91.515.000	288.970.800	256.225.300	202.335.800	202.335.800	0	0	0	37.625.500
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	0	0	48.285.800	36.645.800	48.285.800	48.285.800	0	0	0	11.640.000
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	4	0	0	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	0	0	0	0
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	4	985.000	985.000	985.000	0	0	0	0	0	0	985.000
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	4	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	4	20.000.000	25.000.000	57.050.000	37.050.000	37.050.000	37.050.000	0	0	0	25.000.000
02.2009.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING I	4	31.650.000	31.530.000	31.650.000	31.529.500	0	0	0	0	0	500
02.2010.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING II	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTARA	4	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARAT	4	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELATAN	4	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
04	**KECAMATAN BATANG HARI LEKO**		23.250.000	20.050.000	37.300.000	23.050.000	14.050.000	14.050.000	0	0	0	11.050.000
04.2006.	PEMERINTAH DESA LUBUK BUAH	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
04.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI NAPAL	4	20.050.000	20.050.000	20.050.000	20.050.000	0	0	0	0	0	0
04.2008.	PEMERINTAH DESA LUBUK BINTIALO	4	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
04.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG BALI	4	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
04.2014.	PEMERINTAH DESA PENGATURAN	4	0	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000
04.2015.	PEMERINTAH DESA ULAK KEMBANG	4	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
05	**KECAMATAN SANGA DESA**		46.120.000	103.780.000	64.030.000	62.000.000	17.910.000	17.910.000	0	0	0	59.690.000
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	4	9.440.000	17.450.000	9.440.000	9.440.000	0	0	0	0	0	8.010.000
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	4	30.980.000	53.510.000	30.980.000	30.980.000	0	0	0	0	0	22.530.000
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	0	16.180.000	9.170.000	9.170.000	9.170.000	9.170.000	0	0	0	16.180.000
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	0	6.580.000	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000	0	0	0	8.610.000
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	4	5.700.000	8.500.000	12.410.000	12.410.000	6.710.000	6.710.000	0	0	0	2.800.000
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I		0	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000
06	**KECAMATAN BABAT TOMAN**		36.600.000	98.735.788	146.938.454	108.050.000	110.338.454	110.338.454	0	0	0	101.024.242
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA		0	500.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.800.000
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	0	0	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	0	0	0	0
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG		0	54.850.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000	0	0	0	54.850.000
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	36.600.000	42.685.788	52.088.454	14.500.000	15.488.454	15.488.454	0	0	0	43.674.242
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	4	0	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	4	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	700.000
07	**KECAMATAN SUNGAI LILIN**		159.000.000	159.000.000	171.000.000	117.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	54.000.000
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0
07.2011.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI BARU	4	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	4	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	42.000.000
07.2015.	PEMERINTAH DESA MEKAR JADI	4	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0
07.2017.	PEMERINTAH DESA PINANG BANJAR	4	0	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	4	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
08	**KECAMATAN KELUANG**		120.800.000	131.000.000	162.420.964	131.850.000	41.620.964	41.620.964	0	0	0	40.770.964
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG		0	10.200.000	0	0	0	0	0	0	0	10.200.000
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	20.000.000	20.000.000	28.550.000	20.000.000	8.550.000	8.550.000	0	0	0	8.550.000
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	70.800.000	70.800.000	82.800.000	82.800.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	5	0	0	21.070.964	9.050.000	21.070.964	21.070.964	0	0	0	12.020.964
09	**KECAMATAN BAYUNG LENCIR**		211.001.348	282.040.774	282.135.572	215.587.888	78.437.300	78.437.300	3.651.538	0	3.651.538	144.890.186
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	4	3.651.538	14.151.538	12.651.538	12.650.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	10.501.538
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	4	0	0	8.991.600	8.991.600	8.991.600	8.991.600	0	0	0	0
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	4	3.651.538	3.651.538	0	0	0	0	0	0	3.651.538	3.651.538
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	3.651.538	3.651.538	0	0	0	0	3.651.538	0	0	3.651.538
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	4	3.651.538	58.651.538	51.972.788	51.921.250	48.321.250	48.321.250	0	0	0	55.051.538
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	4	33.295.970	22.695.270	43.896.670	0	10.600.700	10.600.700	0	0	0	33.295.970
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	14.746.456	14.746.456	14.746.456	14.700.000	0	0	0	0	0	46.456
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	98.195.270	104.195.270	98.195.270	98.195.000	0	0	0	0	0	6.000.270
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	4	3.651.538	8.651.538	3.972.788	3.800.000	321.250	321.250	0	0	0	5.172.788
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	4	3.651.538	3.651.538	3.973.038	3.973.000	321.500	321.500	0	0	0	38
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	4	3.651.538	3.651.538	3.972.788	1.326.788	321.250	321.250	0	0	0	2.646.000
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	3.651.538	3.651.538	3.651.538	0	0	0	0	0	0	3.651.538
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	1.810.164	3.310.164	1.810.164	1.800.000	0	0	0	0	0	1.510.164
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	4	1.810.164	3.810.164	1.969.414	150.000	159.250	159.250	0	0	0	3.819.414
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	6.010.788	1.810.164	6.010.788	0	0	0	0	0	0	1.810.164
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	12.457.906	12.457.906	12.698.906	12.080.000	241.000	241.000	0	0	0	618.906
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	9.651.538	15.651.538	9.651.788	6.000.250	250	250	0	0	0	9.651.538
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	159.250	0	318.500	0	159.250	159.250	0	0	0	159.250
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	3.651.538	3.651.538	3.651.538	0	0	0	0	0	0	3.651.538
10	**KECAMATAN PLAKAT TINGGI**		65.625.000	65.625.000	65.625.000	65.625.000	0	0	0	0	0	0
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	4	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	0	0	0	0	0	0
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	4	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	4	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	0	0	0	0	0	0
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	**KECAMATAN LALAN**		143.496.105	143.495.295	146.079.555	119.766.545	2.583.450	2.583.450	0	0	0	26.312.200
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	5	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	5	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	4	7.183.905	7.183.095	9.767.355	9.766.545	2.583.450	2.583.450	0	0	0	0

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	11.312.200	11.312.200	11.312.200	10.000.000	0	0	0	0	0	1.312.200
12	**KECAMATAN TUNGKAL JAYA**		343.734.000	460.906.000	322.600.000	322.600.000	38.000.000	38.000.000	59.134.000	59.134.000	0	117.172.000
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	4	286.734.000	298.906.000	227.600.000	227.600.000	0	0	59.134.000	59.134.000	0	12.172.000
12.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0
12.2005.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN TUNGKAL	4	0	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	0	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
12.2011.	PEMERINTAH DESA BERO JAYA TIMUR	4	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**KECAMATAN LAWANG WETAN**		59.752.952	97.252.952	59.752.952	59.752.952	0	0	0	0	0	37.500.000
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA	4	42.352.952	75.452.952	42.352.952	42.352.952	0	0	0	0	0	33.100.000
13.2008.	PEMERINTAH DESA ULAK TEBERAU	4	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU	4	15.400.000	18.800.000	15.400.000	15.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000
14	**KECAMATAN BABAT SUPAT**		70.281.000	109.997.450	122.135.880	83.075.000	74.754.880	74.754.880	0	0	22.900.000	101.677.330
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	2.900.000	2.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	0	2.900.000	6.800.000
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG		0	700.000	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	0	0	0	2.230.000
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	5.000.000	11.200.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	6.200.000
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	4	0	221.700	934.880	0	934.880	934.880	0	0	0	1.156.580
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	4	13.550.000	11.200.000	13.550.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	31.200.000
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	431.000	3.031.000	1.531.000	1.531.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	2.600.000
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	4	25.000.000	52.794.750	40.945.000	36.945.000	15.945.000	15.945.000	0	0	0	31.794.750
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	4	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	4	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	4	0	0	3.245.000	0	3.245.000	3.245.000	0	0	0	3.245.000
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	4	8.400.000	11.000.000	35.000.000	32.599.000	26.600.000	26.600.000	0	0	0	5.001.000
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	4	12.000.000	14.450.000	12.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.450.000
	JUMLAH		1.516.307.505	2.225.519.759	2.280.148.008	1.906.740.160	853.177.579	853.177.579	62.785.538	59.134.000	26.551.538	1.112.823.178

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 13 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran 1

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

REALISASI S/D 31/12/2025

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Sumber Dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01	**KECAMATAN SEKAYU**		200.000.000	200.000.000	200.000.000	180.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
01.2001.	PEMERINTAH DESA SUKARAMI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2002.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2003.	PEMERINTAH DESA BAILANGU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2004.	PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2005.	PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
01.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI MEDAK	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2007.	PEMERINTAH DESA SUNGAI BATANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2008.	PEMERINTAH DESA RIMBA UKUR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2013.	PEMERINTAH DESA LUMPATAN II	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
01.2014.	PEMERINTAH DESA BALIANGU TIMUR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02	**KECAMATAN LAIS**		280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2001.	PEMERINTAH DESA DANAU CALA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2002.	PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG TIMUR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2004.	PEMERINTAH DESA PETALING	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2005.	PEMERINTAH DESA LAIS	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2006.	PEMERINTAH DESA TELUK	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2007.	PEMERINTAH DESA EPIL	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2008.	PEMERINTAH DESA PURWOSARI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2011.	PEMERINTAH DESA TELUK KIJING III	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG UTARA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2013.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG BARAT	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2014.	PEMERINTAH DESA TANJUNG AGUNG SELATAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2015.	PEMERINTAH DESA LAIS UTARA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
02.2016.	PEMERINTAH DESA EPIL BARAT	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
03	**KECAMATAN SUNGAI KERUH**		200.000.000	200.000.000	200.000.000	199.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
03.2002.	PEMERINTAH DESA PAGAR KAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKALALI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2004.	PEMERINTAH DESA KARTAYU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2006.	PEMERINTAH DESA SUNGAI DUA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2007.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2008.	PEMERINTAH DESA TEBING BULANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2009.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2010.	PEMERINTAH DESA RANTAU SIALANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
03.2014.	PEMERINTAH DESA KERTA JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
03.2015.	PEMERINTAH DESA KERAMAT JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05	**KECAMATAN SANGA DESA**		340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2001.	PEMERINTAH DESA AIR BALUI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2002.	PEMERINTAH DESA NGANTI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2003.	PEMERINTAH DESA JUD I	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2004.	PEMERINTAH DESA JUD II	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2005.	PEMERINTAH DESA PENGGAGE	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2006.	PEMERINTAH DESA NGUNANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2007.	PEMERINTAH DESA NGULAK II	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2008.	PEMERINTAH DESA NGULAK III	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2009.	PEMERINTAH DESA ULAK EMBACANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2010.	PEMERINTAH DESA TERUSAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2011.	PEMERINTAH DESA KEMANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2012.	PEMERINTAH DESA TANJUNG RAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2013.	PEMERINTAH DESA AIR ITAM	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2014.	PEMERINTAH DESA KEBAN I	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2015.	PEMERINTAH DESA KEBAN II	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2017.	PEMERINTAH DESA PANAI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
05.2018.	PEMERINTAH DESA MACANG SAKTI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06	**KECAMATAN BABAT TOMAN**		240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2001.	PEMERINTAH DESA SEREKA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2002.	PEMERINTAH DESA SUGI RAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN** **REALISASI S/D 31/12/2025**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN** **Sumber Dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi**

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
06.2003.	PEMERINTAH DESA SUGI WARAS	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2004.	PEMERINTAH DESA BERUGE	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2005.	PEMERINTAH DESA MUARA PUNJUNG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2007.	PEMERINTAH DESA BANGUN SARI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2008.	PEMERINTAH DESA TOMAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2009.	PEMERINTAH DESA KASMARAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2022.	PEMERINTAH DESA SUNGAI ANGIT	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2023.	PEMERINTAH DESA SRIMULYO	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2042.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
06.2043.	PEMERINTAH DESA TOMAN BARU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
07	**KECAMATAN SUNGAI LILIN**		0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
07.2007.	PEMERINTAH DESA SRI GUNUNG	4	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
07.2010.	PEMERINTAH DESA MULYO REJO	4	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
07.2012.	PEMERINTAH DESA CINTA DAMAI	4	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
07.2013.	PEMERINTAH DESA BERLIAN MAKMUR	4	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
07.2016.	PEMERINTAH DESA NUSA SERASAN	4	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
07.2021.	PEMERINTAH DESA BUKIT JAYA	4	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08	**KECAMATAN KELUANG**		0	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000.000
08.2001.	PEMERINTAH DESA TENGGARO	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2003.	PEMERINTAH DESA TANJUNG DALAM		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2004.	PEMERINTAH DESA DAWAS		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2005.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2006.	PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2007.	PEMERINTAH DESA KARYA MAJU	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2008.	PEMERINTAH DESA TEGAL MULYO	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2009.	PEMERINTAH DESA CIPTA PRAJA	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2010.	PEMERINTAH DESA LOKA JAYA		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2011.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2012.	PEMERINTAH DESA SIDO REJO	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2013.	PEMERINTAH DESA MULYO ASIH	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
08.2014.	PEMERINTAH DESA SRIDAMAI	5	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
09	**KECAMATAN BAYUNG LENCIR**		420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	0	0	0	0	0	0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN** **REALISASI S/D 31/12/2025**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN** **Sumber Dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi**

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
09.2006.	PEMERINTAH DESA MUARA MERANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2007.	PEMERINTAH DESA MANGSANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2008.	PEMERINTAH DESA TAMPANG BARU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2009.	PEMERINTAH DESA KALI BERAU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2010.	PEMERINTAH DESA SINDANG MARGA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2011.	PEMERINTAH DESA TELANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2012.	PEMERINTAH DESA PAGAR DESA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2013.	PEMERINTAH DESA MENDIS	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2014.	PEMERINTAH DESA PULAI GADING	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2015.	PEMERINTAH DESA MUARA MEDAK	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2017.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2026.	PEMERINTAH DESA SENAWAR JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2048.	PEMERINTAH DESA SIMPANG BAYAT	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2049.	PEMERINTAH DESA BAYAT ILIR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2050.	PEMERINTAH DESA PANGKALAN BAYAT	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2051.	PEMERINTAH DESA MUARA BAHAR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2058.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2059.	PEMERINTAH DESA MENDIS JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2060.	PEMERINTAH DESA KEPAYANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2061.	PEMERINTAH DESA WONO REJO	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
09.2063.	PEMERINTAH DESA LUBUK HARJO	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10	**KECAMATAN PLAKAT TINGGI**		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2001.	PEMERINTAH DESA SIDO MUKTI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2002.	PEMERINTAH DESA SUKA DAMAI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2003.	PEMERINTAH DESA SUKA JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2004.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2005.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2006.	PEMERINTAH DESA BANGUN HARJA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2007.	PEMERINTAH DESA SIDO RAHAYU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2008.	PEMERINTAH DESA BUKIT INDAH	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2009.	PEMERINTAH DESA WARGA MULYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KAPUTRAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2011.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ULU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
10.2012.	PEMERINTAH DESA SIALANG AGUNG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2013.	PEMERINTAH DESA CINTA KARYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2014.	PEMERINTAH DESA AIR PUTIH ILIR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2015.	PEMERINTAH DESA SUMBER REJEKI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11	**KECAMATAN LALAN**		540.000.000	540.000.000	540.000.000	520.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
11.2001.	PEMERINTAH DESA KARANG AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2002.	PEMERINTAH DESA KARANG REJO	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2003.	PEMERINTAH DESA KARANG MAKMUR	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2004.	PEMERINTAH DESA PERUMPUNG RAYA	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
11.2005.	PEMERINTAH DESA GALIH SARI	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2006.	PEMERINTAH DESA KARANG TIRTA	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2007.	PEMERINTAH DESA PURWO AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2008.	PEMERINTAH DESA KARYA MUKTI	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2009.	PEMERINTAH DESA SRI KARANG REJO	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2010.	PEMERINTAH DESA MEKAR SARI	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2011.	PEMERINTAH DESA AGUNG JAYA	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2012.	PEMERINTAH DESA BUMI AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2013.	PEMERINTAH DESA JAYA AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2014.	PEMERINTAH DESA SUKA MAKMUR	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2015.	PEMERINTAH DESA MANDALA SARI	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2016.	PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2017.	PEMERINTAH DESA KARANG SARI	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2018.	PEMERINTAH DESA SRI GADING	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2019.	PEMERINTAH DESA MULYA AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2020.	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2021.	PEMERINTAH DESA MADYA MULYA	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2022.	PEMERINTAH DESA MULYA JAYA	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2023.	PEMERINTAH DESA SARI AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2024.	PEMERINTAH DESA SUKA JADI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2025.	PEMERINTAH DESA RINGIN AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2026.	PEMERINTAH DESA TRI MULYA AGUNG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
11.2027.	PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
12	**KECAMATAN TUNGKAL JAYA**		40.000.000	80.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	80.000.000

PROVINSI : **16 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KABUPATEN/KOTA : **16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
12.2001.	PEMERINTAH DESA PENINGGALAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
12.2010.	PEMERINTAH DESA BEJI MULYO	4	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
12.2014.	PEMERINTAH DESA SRI MULYO	4	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
12.2015.	PEMERINTAH DESA SIDO MULYO		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
13	**KECAMATAN LAWANG WETAN**		40.000.000	80.000.000	40.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
13.2002.	PEMERINTAH DESA ULAK PACEH JAYA		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
13.2009.	PEMERINTAH DESA BUMI AYU		0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
13.2012.	PEMERINTAH DESA RANTAU PANJANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
13.2015.	PEMERINTAH DESA PANDAN DULANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
14	**KECAMATAN BABAT SUPAT**		320.000.000	320.000.000	320.000.000	307.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000
14.2001.	PEMERINTAH DESA SUKA MAJU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2002.	PEMERINTAH DESA LETANG	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2003.	PEMERINTAH DESA SUPAT	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2004.	PEMERINTAH DESA BABAT BANYUASIN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2005.	PEMERINTAH DESA TANJUNG KERANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2006.	PEMERINTAH DESA LANGKAP	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000
14.2007.	PEMERINTAH DESA GAJAH MATI	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2008.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2009.	PEMERINTAH DESA BANDAR TENGGULANG	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2010.	PEMERINTAH DESA SUMBER JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2011.	PEMERINTAH DESA TENGGULANG BARU	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2012.	PEMERINTAH DESA SUPAT BARAT	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2013.	PEMERINTAH DESA SUPAT TIMUR	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2014.	PEMERINTAH DESA SERATUS LAPAN	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2015.	PEMERINTAH DESA BABAT RAMBA JAYA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
14.2016.	PEMERINTAH DESA GAJAH MUDA	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
15	**KECAMATAN JIRAK JAYA**		20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
15.2001.	PEMERINTAH DESA JIRAK	4	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
15.2002.	PEMERINTAH DESA RUKUN RAHAYU	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2012.	PEMERINTAH DESA LAYAN	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVINSI : 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

REALISASI S/D 31/12/2025

KABUPATEN/KOTA : 16.06 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sumber Dana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	JUMLAH		2.940.000.000	3.400.000.000	2.920.000.000	2.806.000.000	0	0	0	0	20.000.000	594.000.000

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Sekayu, 12 Agustus 2026

Bupati Musi Banyuasin

H. M. Toha

Lampiran XXII: Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026.

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode		Uraian	Kelompok Belanja							
			Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
01		PELAYANAN UMUM	2.152.027.842.192,46	1.920.459.438.480,42	77.421.451.976,78	66.441.971.029,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
01	01	Pelayanan Umum	14.671.633.842,50	11.964.961.879,00	3.083.699.813,00	2.967.824.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	1.187.593.978,70	937.123.166,00	656.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	2.106.094.263.240,44	1.882.275.053.156,42	73.531.575.548,78	62.771.408.206,00	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00
01	06	Pembangunan Daerah	25.196.947.087,82	20.946.748.881,00	752.542.469,00	674.862.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	90	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya	4.877.404.043,00	4.335.551.398,00	52.978.025,00	27.875.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		KETERTIBAN DAN KEAMANAN	7.436.029.010,00	6.316.195.107,00	12.407.980.808,00	8.281.260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02	Penanggulangan Bencana	5.848.517.037,00	5.021.999.211,00	12.370.033.071,00	8.244.003.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	Pembinaan Hukum	1.587.511.973,00	1.294.195.896,00	37.947.737,00	37.257.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		EKONOMI	287.426.933.174,42	246.079.244.346,99	505.881.448.734,39	438.804.486.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	15.857.607.233,00	14.278.411.677,00	621.112.450,00	565.440.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	Tenaga Kerja	5.753.821.875,00	4.584.975.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	56.557.514.464,50	49.843.507.398,00	2.312.028.640,00	2.199.774.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	Pengairan	32.572.767.625,00	29.267.786.236,00	27.662.711.260,00	25.638.135.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	07	Industri dan Konstruksi	80.738.644.025,50	72.177.862.653,00	19.896.521.592,00	18.822.430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	08	Transportasi	70.640.118.981,42	53.226.804.914,99	454.593.803.092,89	391.104.333.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	09	Telekomunikasi dan Informatika	20.920.175.380,00	18.754.017.295,00	793.731.699,50	474.372.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	90	Ekonomi lainnya	4.386.283.590,00	3.945.879.169,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	35.095.265.127,00	33.431.760.274,00	10.416.191.075,00	9.916.502.187,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	Manajemen Limbah	9.306.431.603,00	8.550.191.234,00	8.001.748.375,00	7.549.365.657,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	Manajemen Air Limbah	18.761.306.700,00	18.516.311.614,00	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	03	Penanggulangan Polusi	1.045.259.174,00	862.094.950,00	142.857.000,00	141.852.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05	Tata Ruang dan Pertanahan	5.982.267.650,00	5.503.162.476,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode		Uraian	Kelompok Belanja							
			Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
06		PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	46.360.427.708,00	43.841.238.450,00	79.832.704.699,00	77.602.701.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	Pengembangan Perumahan	26.425.945.750,00	26.196.642.000,00	10.914.947.050,00	10.380.094.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	02	Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum	3.454.965.958,00	3.365.842.000,00	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	03	Penyediaan Air Minum	16.479.516.000,00	14.278.754.450,00	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		KESEHATAN	116.261.193.894,00	99.303.003.945,00	48.285.475.223,00	45.820.924.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	Obat dan Peralatan Kesehatan	388.992.996,00	264.001.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	02	Pelayanan Kesehatan Perorangan	104.798.796.174,00	89.897.714.257,00	46.700.458.223,00	44.250.724.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	370.561.128,00	278.718.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	04	Keluarga Berencana	9.436.365.596,00	7.996.464.355,00	1.585.017.000,00	1.570.199.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07	90	Kesehatan lainnya	1.266.478.000,00	866.105.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		PARIWISATA	3.379.690.700,00	3.309.311.868,00	200.000.000,00	199.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	Pengembangan Pariwisata	3.379.690.700,00	3.309.311.868,00	200.000.000,00	199.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		PENDIDIKAN	210.648.928.933,00	200.168.706.967,92	103.603.377.698,00	95.910.011.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01	Pendidikan Anak Usia Dini	19.277.152.500,00	19.113.735.222,92	1.053.440.000,00	1.052.288.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	Pendidikan Dasar	104.498.075.933,00	102.047.904.166,00	76.503.975.287,00	74.667.604.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	04	Pendidikan Nonformal dan Informal	3.549.896.714,00	3.296.890.813,00	296.919.411,00	275.173.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	77.504.647.461,00	69.993.020.862,00	25.320.058.000,00	19.487.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	11	Pengembangan Budaya	5.819.156.325,00	5.717.155.904,00	428.985.000,00	427.492.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		PERLINDUNGAN SOSIAL	67.060.726.197,00	44.361.759.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)	32.238.251.650,00	13.440.048.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	05	Pemberdayaan Perempuan	1.990.589.436,00	1.758.018.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90	Perlindungan Sosial lainnya	156.038.586,00	153.717.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**5.442.284.504,55**	**2.766.488.804,00**	**544.652.123.254,00**	**528.350.989.472,00**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XXIII Perda Kab. Musi Banyuaisn
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN *MANDATORY SPENDING* -BIDANG PENDIDIKAN TA 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	989.582.029.956,00	915.487.859.792,50
	1) Belanja Operasi:	909.525.627.669,00	837.903.899.828,92
	a. belanja pegawai;	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00
	b. belanja barang dan jasa;	97.490.594.673,00	91.278.853.701,00
	c. belanja hibah;	39.470.678.750,00	39.301.888.878,92
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	80.056.402.287,00	77.583.959.963,58
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	0,00	0,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	0,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	0,00	0,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	11.859.796.851,00	10.321.407.690,00
	1) Belanja Operasi:	11.023.150.551,00	9.516.829.330,00
	a. belanja pegawai;	7.476.594.326,00	6.454.024.589
	b. belanja barang dan jasa;	2.850.332.312,00	2.372.589.891,00
	c. belanja hibah;	696.223.913,00	690.214.850,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	836.646.300,00	804.578.360,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	118.332.272.052,00	102.737.522.359,00
	1) Belanja Operasi:	92.791.629.644	83.032.965.922
	a. belanja pegawai;	9.423.530.076,00	8.549.813.622
	b. belanja barang dan jasa;	37.767.919.668,00	31.777.059.334,00
	c. belanja hibah;	45.600.179.900,00	42.706.092.966,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	25.540.642.408,00	19.704.556.437,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.119.774.098.859,00	1.028.546.789.841,50
3.	Total Belanja Daerah	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	26%	26,57%

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M TOHA

Lampiran XXIII Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN *MANDATORY SPENDING*- BIDANG KESEHATAN TA 2025

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	**a. Belanja pada Dinas Kesehatan:**	**719.889.042.809,60**	**654.292.089.617,38**	**90,89%**
	1) Belanja Operasi:	**654.844.111.238,60**	**599.971.220.255,38**	**91,62%**
	a. belanja pegawai;	386.352.306.324,00	371.136.435.406,78	96,06%
	b. belanja barang dan jasa;	266.991.804.914,60	227.447.281.830,60	85,19%
	c. belanja hibah;	1.500.000.000,00	1.387.503.018,00	92,50%
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	
	2) Belanja Modal;	65.044.931.571,00	54.320.869.362,00	83,51%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**7.140.180.896,00**	**6.279.572.586,74**	**87,95%**
	1. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai	1.142.853.000,00	699.812.125,74	61,23%
	2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.008.978.000,00	1.989.408.300,00	99,03%
	3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	2.893.423.099,00	2.554.132.788,00	88,27%
	4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	1.094.926.797,00	1.036.219.373,00	94,64%
2.	**Anggaran Kesehatan (a+b)**	**727.029.223.705,60**	**660.571.662.204,12**	**90,86%**
3.	**Total Belanja Daerah**	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.323.652.344,79**	**89,74%**
4.	**Gaji ASN**	**869.506.141.385,27**	**799.098.868.673,00**	**91,90%**
5.	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**3.444.333.933.523,33**	**3.072.224.783.671,79**	**89,20%**
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	**21,11%**	**21,50%**	**101,86%**

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M TOHA

Lampiran XXIII Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN *MANDATORY SPENDING* -BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TA 2024

A. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	**Total Belanja**	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a) Belanja Bagi Hasil	-	-	0,00%
	b) Belanja Bantuan Keuangan	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,01%
	Jumlah	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,01%
3.	**Selisih (1-2)**	3.769.187.951.654,60	3.343.014.399.955,79	88,69%
4.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	1.507.675.180.661,84	1.337.205.759.982,32	88,69%

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal			
	1) tanah;	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,62%
	2) peralatan dan mesin;	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	94,24%
	3) gedung dan bangunan;	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	87,80%
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	87,42%
	5) aset tetap *lainnya*;	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	99,71%
	6) aset lainnya.	96.393.177,00	79.228.870,00	0,00%
	b) Belanja Pemeliharaan	104.644.846.356,92	86.439.913.665,59	82,60%
2.	a) Belanja Hibah/Barang/Jasa Yang Diserahkan	271.177.993.015,50	253.815.128.312,92	93,60%
	b) Belanja Bantuan Sosial;	-	-	0,00%
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	-	-	0,00%
3.	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	1.213.871.469.586,59	1.083.232.294.042,97	89,24%

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M TOHA

Lampiran XXIV : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
A	**SPM Bidang Pendidikan**				
1	**Pendidikan Dasar**				
		1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.364.900.000,00	-
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.122.120.000,00	-
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.863.645.200,00	697.859.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.003.016.000,00	2.768.042.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.695.142.000,00	595.142.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	637.622.250,00	287.622.250,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	318.852.000,00	5.985.000,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.962.958.000,00	34.350.000,00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	705.554.300,00	-
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	265.951.800,00	43.526.800,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	626.997.000,00	-
			Total	**27.566.758.550,00**	**4.432.527.050,00**
2	**Pendidikan Anak Usia Dini**				
		2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	270.244.800,00	-
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	967.736.150,00	216.402.500,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	398.440.000,00	198.440.000,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.601.763.000,00	-
			Total	**5.238.183.950,00**	**414.842.500,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
3	**Pendidikan Kesetaraan**				
		3	Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Kesetaraan		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	401.066.800,00	92.000.000,00
			Total	**401.066.800,00**	**92.000.000,00**
			Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan	**33.206.009.300,00**	**4.939.369.550,00**
B	**SPM Bidang Kesehatan**				
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**				
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.771.974.276,00	26.464.000,00
			Total	**1.771.974.276,00**	**26.464.000,00**
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**				
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	241.341.000,00	117.575.000,00
			Total	**241.341.000,00**	**117.575.000,00**
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**				
		3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	587.211.600,00	6.105.600,00
			Total	**587.211.600,00**	**6.105.600,00**
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**				
		4	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.319.000,00	32.067.405,00
			Total	**113.319.000,00**	**32.067.405,00**
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**				
		5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.386.720.339,00	3.482.613,00
			Total	**1.386.720.339,00**	**3.482.613,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**				
		6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.965.000,00	3.894.016,00
			Total	**32.965.000,00**	**3.894.016,00**
7	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**				
		7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33.016.000,00	1.192.960,00
			Total	**33.016.000,00**	**1.192.960,00**
8	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**				
		8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	492.086.000,00	2.662.800,00
			Total	**492.086.000,00**	**2.662.800,00**
9	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				
		9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	111.760.000,00	1.740.000,00
			Total	**111.760.000,00**	**1.740.000,00**
10	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**				
		10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.130.000,00	0,00
			Total	**14.130.000,00**	**-**
11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**				
		11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	537.540.000,00	7.750.400,00
			Total	**537.540.000,00**	**7.750.400,00**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
12	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**				
		12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	35.430.000,00	14.162.413,00
			Total	**35.430.000,00**	**14.162.413,00**
			Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan	**5.357.493.215,00**	**215.357.207,00**
C	**SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**				
1	**Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**				
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.969.095.550,00	922.314.400,00
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	9.768.000,00	0,00
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	77.217.000,00	0,00
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	175.000.000,00	0,00
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00	51.875.614,00
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	16.059.346.300,00	372.378.100,00
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	158.241.600,00	158.241.600,00
			Total	**19.926.238.650,00**	**1.504.809.714,00**
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**				
		2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	16.009.280.800,00	6.066.883.800,00

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.197.707.200,00	0,00
			Total	**18.206.988.000,00**	**6.066.883.800,00**
			Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**38.133.226.650,00**	**7.571.693.514,00**
D	**SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
1	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**				
		1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.862.000.000,00	-
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.949.750,00	-
			Total	**4.893.949.750,00**	**-**
2	**Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota**				
		2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.636.866.250,00	330.523.050,00
			Total	**1.636.866.250,00**	**330.523.050,00**
			Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**6.530.816.000,00**	**330.523.050,00**
E	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**				
1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum**				
		1	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	67.120.000,00	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
			Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	15.380.000,00	0,00
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	25.215.000,00	0,00
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	308.625.000,00	57.181.300,00
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	221.520.000,00	14.721.000,00
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.715.250,00	0,00
			Total	**676.575.250,00**	**71.902.300,00**
2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**				
		2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	102.637.550,00	-
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	22.851.537,00	-
			Total	**125.489.087,00**	**-**
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**				
		3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	346.924.821,00	13.620.107,00
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	99.323.000,00	3.654.900,00
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	885.623.000,00	95.150.950,00
			Total	**1.331.870.821,00**	**112.425.957,00**
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				
		4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	832.850.000,00	218.261.340,00
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	102.950.000,00	3.600.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	154.954.700,00	19.231.200,00
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	833.760.000,00	167.400.000,00
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	453.482.000,00	158.376.000,00
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	58.250.000,00	0,00
			Total	**2.436.246.700,00**	**566.868.540,00**
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				
		5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.931.000,00	193.843.700,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-
			Total	**593.931.000,00**	**193.843.700,00**
			Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	**5.164.112.858,00**	**945.040.497,00**
F	**SPM Bidang Sosial**				
1	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota**				
		1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		
			Pelayanan Dukungan Psikososial	304.180.000,00	289.526.000,00
			Total	**304.180.000,00**	**289.526.000,00**
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				
		2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		

No	Jenis Pelayanan Dasar		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
			Penyediaan Permakanan	1.471.563.000,00	310.276.136,00
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	220.415.700,00	35.093.600,00
			Pemberian Layanan Kedaruratan	400.000.000,00	400.000.000,00
			Total	**2.091.978.700,00**	**745.369.736,00**
			Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial	**2.396.158.700,00**	**1.034.895.736,00**

Sekayu, 12 Agustus 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M. TOHA

Lampiran XXV: Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. MUSI BANYUASIN
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA. 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**(322.205.643.866,08)**	**92,49**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**587.378.681.108,99**	**561.951.316.985,08**	**(25.427.364.123,91)**	**95,67**
4.1.01	Pajak Daerah	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	(2.146.080.875,65)	99,04
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.729.859.000,00	1.966.095.017,00	(763.763.983,00)	72,02
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.314.000.000,00	1.618.646.268,00	(695.353.732,00)	69,95
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.314.000.000,00	1.618.646.268,00	(695.353.732,00)	69,95
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	345.000.000,00	315.447.169,00	(29.552.831,00)	91,43
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	345.000.000,00	315.447.169,00	(29.552.831,00)	91,43
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.859.000,00	20.835.955,00	(5.023.045,00)	80,58
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.859.000,00	20.835.955,00	(5.023.045,00)	80,58
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	45.000.000,00	11.165.625,00	(33.834.375,00)	24,81
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	45.000.000,00	11.165.625,00	(33.834.375,00)	24,81
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	420.000.000,00	494.109.277,35	74.109.277,35	117,65
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	420.000.000,00	494.109.277,35	74.109.277,35	117,65
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	420.000.000,00	494.109.277,35	74.109.277,35	117,65
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	249.522.750,00	124.516.000,00	(125.006.750,00)	49,90
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	249.522.750,00	124.516.000,00	(125.006.750,00)	49,90
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	249.522.750,00	124.516.000,00	(125.006.750,00)	49,90
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.029.103.000,00	7.616.339.132,00	5.587.236.132,00	375,35
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	679.103.000,00	530.737.668,00	(148.365.332,00)	78,15
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	679.103.000,00	530.737.668,00	(148.365.332,00)	78,15
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.350.000.000,00	7.085.601.464,00	5.735.601.464,00	524,86
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.350.000.000,00	7.085.601.464,00	5.735.601.464,00	524,86
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.904.394.000,00	29.645.996.684,00	(258.397.316,00)	99,14
4.1.01.15.01	PBBP2	29.904.394.000,00	29.645.996.684,00	(258.397.316,00)	99,14
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.904.394.000,00	29.645.996.684,00	(258.397.316,00)	99,14
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.139.938.000,00	7.529.732.798,00	(17.610.205.202,00)	29,95

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.895.077.000,00	4.315.087.939,00	(4.579.989.061,00)	48,51
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.895.077.000,00	4.315.087.939,00	(4.579.989.061,00)	48,51
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16.244.861.000,00	3.214.644.859,00	(13.030.216.141,00)	19,79
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16.244.861.000,00	3.214.644.859,00	(13.030.216.141,00)	19,79
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	73.502.200.000,00	96.471.738.738,00	22.969.538.738,00	131,25
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	18.959.803.000,00	19.845.901.322,00	886.098.322,00	104,67
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.029.803.000,00	3.818.291.051,00	788.488.051,00	126,02
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	15.930.000.000,00	16.027.610.271,00	97.610.271,00	100,61
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	52.311.073.000,00	73.698.351.460,00	21.387.278.460,00	140,88
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	47.311.073.000,00	52.526.553.898,00	5.215.480.898,00	111,02
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.000.000.000,00	21.171.797.562,00	16.171.797.562,00	423,44
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.585.642.000,00	1.511.728.463,00	(73.913.537,00)	95,34
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	900.000.000,00	789.313.053,00	(110.686.947,00)	87,70
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	235.642.000,00	315.134.475,00	79.492.475,00	133,73
4.1.01.19.03.0007	PBJT-Wisma Pariwisata	450.000.000,00	407.280.935,00	(42.719.065,00)	90,51
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	508.171.000,00	581.938.770,00	73.767.770,00	114,52
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	508.171.000,00	581.938.770,00	73.767.770,00	114,52
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	137.511.000,00	833.818.723,00	696.307.723,00	606,37
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	20.000.000,00	6.350.000,00	(13.650.000,00)	31,75
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	14.003.100,00	4.003.100,00	140,03
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	5.000.000,00	5.610.000,00	610.000,00	112,20
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	7.000.000,00	425.000,00	(6.575.000,00)	6,07
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	10.000.000,00	860.000,00	(9.140.000,00)	8,60
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	85.511.000,00	806.570.623,00	721.059.623,00	943,24
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	60.000.000.000,00	31.854.033.228,00	(28.145.966.772,00)	53,09
4.1.01.20.01	Opsen PKB	60.000.000.000,00	31.854.033.228,00	(28.145.966.772,00)	53,09
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	60.000.000.000,00	31.854.033.228,00	(28.145.966.772,00)	53,09
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.000.000.000,00	46.126.375.000,00	16.126.375.000,00	153,75
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	30.000.000.000,00	46.126.375.000,00	16.126.375.000,00	153,75
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	30.000.000.000,00	46.126.375.000,00	16.126.375.000,00	153,75

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02	Retribusi Daerah	5.660.787.000,00	9.914.556.645,00	4.253.769.645,00	175,14
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	727.000.000,00	1.333.954.050,00	606.954.050,00	183,49
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	200.000.000,00	196.168.050,00	(3.831.950,00)	98,08
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	200.000.000,00	196.168.050,00	(3.831.950,00)	98,08
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	527.000.000,00	1.137.786.000,00	610.786.000,00	215,90
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	500.000.000,00	1.072.001.000,00	572.001.000,00	214,40
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.000.000,00	65.785.000,00	38.785.000,00	243,65
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.433.787.000,00	3.490.831.340,00	1.057.044.340,00	143,43
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	310.000.000,00	358.712.700,00	48.712.700,00	115,71
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	310.000.000,00	358.712.700,00	48.712.700,00	115,71
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	195.000.000,00	225.423.000,00	30.423.000,00	115,60
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	195.000.000,00	225.423.000,00	30.423.000,00	115,60
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00	40.050.000,00	50.000,00	100,13
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00	40.050.000,00	50.000,00	100,13
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.150.000,00	150.000,00	103,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.150.000,00	150.000,00	103,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,04
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	142.427.000,00	237.907.000,00	95.480.000,00	167,04
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.130.000.000,00	1.169.330.000,00	39.330.000,00	103,48
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.130.000.000,00	1.169.330.000,00	39.330.000,00	103,48
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	611.360.000,00	1.454.258.640,00	842.898.640,00	237,87
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	611.360.000,00	1.454.258.640,00	842.898.640,00	237,87
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00	5.089.771.255,00	2.589.771.255,00	203,59
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	5.089.771.255,00	2.589.771.255,00	203,59
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	5.089.771.255,00	2.589.771.255,00	203,59

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	(11.604.435.942,38)	61,32
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	(11.604.435.942,38)	61,32
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	(11.604.435.942,38)	61,32
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	(11.604.435.942,38)	61,32
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	327.742.877.358,99	311.812.260.408,11	(15.930.616.950,88)	95,14
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.000.000,00	874.847.200,00	839.847.200,00	2.499,56
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	837.771.200,00	837.771.200,00	0,00
4.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	666.129.200,00	666.129.200,00	0,00
4.1.04.01.02.0223	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	171.642.000,00	171.642.000,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	23.075.000,00	23.075.000,00	0,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	23.075.000,00	23.075.000,00	0,00
4.1.04.01.03.0006	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	14.001.000,00	(20.999.000,00)	40,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	35.000.000,00	14.001.000,00	(20.999.000,00)	40,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.243.250,00	21.235.150,00	14.991.900,00	340,13
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	6.243.250,00	21.235.150,00	14.991.900,00	340,13
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	6.243.250,00	21.235.150,00	14.991.900,00	340,13
4.1.04.05	Jasa Giro	5.500.000.000,00	4.036.886.464,00	(1.463.113.536,00)	73,40
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	3.668.330.952,00	(1.331.669.048,00)	73,37
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	3.668.330.952,00	(1.331.669.048,00)	73,37
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	368.555.512,00	(131.444.488,00)	73,71
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	368.555.512,00	(131.444.488,00)	73,71

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	518.872.763,00	(4.481.127.237,00)	10,38
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	518.872.763,00	(4.481.127.237,00)	10,38
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	518.872.763,00	(4.481.127.237,00)	10,38
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000.000,00	9.064.631.830,02	(5.935.368.169,98)	60,43
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000.000,00	9.064.631.830,02	(5.935.368.169,98)	60,43
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.000.000.000,00	9.064.631.830,02	(5.935.368.169,98)	60,43
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.628.262.810,00	1.023.589.146,90	(604.673.663,10)	62,86
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.628.262.810,00	1.023.589.146,90	(604.673.663,10)	62,86
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.628.262.810,00	1.023.589.146,90	(604.673.663,10)	62,86
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	532.640.269,59	(467.359.730,41)	53,26
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	532.640.269,59	(467.359.730,41)	53,26
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	532.640.269,59	(467.359.730,41)	53,26
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	326.600.000,00	2.811.888.946,54	2.485.288.946,54	860,96
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.600.000,00	1.916.616,00	(1.683.384,00)	53,24
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	3.500.000,00	1.835.523,00	(1.664.477,00)	52,44
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	100.000,00	55.781,00	(44.219,00)	55,78
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	0,00	25.312,00	25.312,00	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	1.230.474,00	730.474,00	246,09
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	1.230.474,00	730.474,00	246,09
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	123.500,00	(176.500,00)	41,17
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	123.500,00	(176.500,00)	41,17
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	3.255.479,00	(6.744.521,00)	32,55
4.1.04.12.14.0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00	3.255.479,00	(6.744.521,00)	32,55
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000,00	246.472.470,00	146.472.470,00	246,47
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000,00	246.472.470,00	146.472.470,00	246,47
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000,00	15.988.083,00	(14.011.917,00)	53,29
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	29.500.000,00	15.835.430,00	(13.664.570,00)	53,68
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000,00	152.653,00	(347.347,00)	30,53
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	174.200.000,00	2.378.992.149,54	2.204.792.149,54	1.365,67
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	25.000.000,00	17.301.017,00	(7.698.983,00)	69,20
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	133.200.000,00	62.485.808,00	(70.714.192,00)	46,91
4.1.04.12.19.0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.000.000,00	2.280.922.115,54	2.275.922.115,54	45.618,44
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1.000.000,00	4.486.325,00	3.486.325,00	448,63
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	5.000.000,00	3.308.868,00	(1.691.132,00)	66,18
4.1.04.12.19.0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	3.000.000,00	2.167.330,00	(832.670,00)	72,24
4.1.04.12.19.0011	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	1.000.000,00	3.636.451,00	2.636.451,00	363,65
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	500.000,00	4.332.877,00	3.832.877,00	866,58

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	100.000,00	124.321,00	24.321,00	124,32
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	100.000,00	61.850,00	(38.150,00)	61,85
4.1.04.12.19.0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	100.000,00	4.750,00	(95.250,00)	4,75
4.1.04.12.19.0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	100.000,00	16.757,00	(83.243,00)	16,76
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	100.000,00	143.680,00	43.680,00	143,68
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.000.000,00	160.667.875,00	155.667.875,00	3.213,36
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	5.000.000,00	160.667.875,00	155.667.875,00	3.213,36
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.000.000,00	3.242.300,00	242.300,00	108,08
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	3.000.000,00	3.242.300,00	242.300,00	108,08
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	54.965.647.774,99	50.400.666.808,00	(4.564.980.966,99)	91,69
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	250.000.000,00	6.996.702,00	(243.003.298,00)	2,80
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	6.996.702,00	6.996.702,00	0,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	54.700.647.774,99	50.393.670.106,00	(4.306.977.668,99)	92,13
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	54.700.647.774,99	50.393.670.106,00	(4.306.977.668,99)	92,13
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	(1.753.121.693,94)	99,28
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	(1.753.121.693,94)	99,28
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	244.280.123.524,00	242.527.001.830,06	(1.753.121.693,94)	99,28
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**587.378.681.108,99**	**561.951.316.985,08**	**(25.427.364.123,91)**	**95,67**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.702.991.131.666,60**	**3.406.212.851.924,43**	**(296.778.279.742,17)**	**91,99**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	3.233.090.228.896,00	(272.310.754.604,00)	92,23
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.298.679.867.500,00	2.150.925.726.600,00	(147.754.140.900,00)	93,57

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01.07.01	DBH Pajak	1.184.338.675.000,00	1.062.202.851.600,00	(122.135.823.400,00)	89,69
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.154.339.667.000,00	1.035.357.829.100,00	(118.981.837.900,00)	89,69
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	29.412.956.500,00	26.323.412.700,00	(3.089.543.800,00)	89,50
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	575.775.500,00	514.408.800,00	(61.366.700,00)	89,34
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.276.000,00	7.201.000,00	(3.075.000,00)	70,08
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.104.488.916.500,00	1.078.870.599.000,00	(25.618.317.500,00)	97,68
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	115.371.778.000,00	115.371.778.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	718.244.164.500,00	698.994.151.000,00	(19.250.013.500,00)	97,32
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	178.790.500,00	173.438.000,00	(5.352.500,00)	97,01
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	11.598.254.000,00	11.393.376.000,00	(204.878.000,00)	98,23
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	255.104.974.000,00	249.037.868.000,00	(6.067.106.000,00)	97,62
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.157.149.500,00	3.066.182.000,00	(90.967.500,00)	97,12
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	9.852.276.000,00	9.852.276.000,00	0,00	100,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	9.852.276.000,00	9.852.276.000,00	0,00	100,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	583.685.042.000,00	511.199.784.788,00	(72.485.257.212,00)	87,58
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	355.676.786.000,00	355.355.330.349,00	(321.455.651,00)	99,91
4.2.01.08.01.0001	DAU	355.676.786.000,00	355.355.330.349,00	(321.455.651,00)	99,91
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	228.008.256.000,00	155.844.454.439,00	(72.163.801.561,00)	68,35
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	148.680.806.000,00	87.526.161.439,00	(61.154.644.561,00)	58,87
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	44.036.622.000,00	33.027.465.000,00	(11.009.157.000,00)	75,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.690.828.000,00	32.690.828.000,00	0,00	100,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	397.471.740.000,00	361.674.496.514,00	(35.797.243.486,00)	90,99
4.2.01.09.01	DAK Fisik	35.072.538.000,00	33.369.884.583,00	(1.702.653.417,00)	95,15
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.277.216.000,00	3.270.672.075,00	(6.543.925,00)	99,80
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	662.717.000,00	646.655.132,00	(16.061.868,00)	97,58
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	715.275.000,00	688.736.038,00	(26.538.962,00)	96,29
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	(14.496.100,00)	99,03
4.2.01.09.01.0101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	22.000.000.000,00	20.362.542.438,00	(1.637.457.562,00)	92,56
4.2.01.09.01.0108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	6.919.330.000,00	6.917.775.000,00	(1.555.000,00)	99,98
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	362.399.202.000,00	328.304.611.931,00	(34.094.590.069,00)	90,59
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	108.373.400.000,00	108.652.188.850,00	278.788.850,00	100,26

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.958.750.000,00	2.958.750.000,00	0,00	100,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	190.001.926.000,00	170.997.700.414,00	(19.004.225.586,00)	90,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.235.745.000,00	(35.268.000,00)	99,69
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	(816.000,00)	99,94
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.605.107.000,00	5.028.850.665,00	(1.576.256.335,00)	76,14
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	300.172.000,00	300.172.000,00	0,00	100,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.919.293.000,00	6.670.431.485,00	(11.248.861.515,00)	37,22
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	2.503.225.000,00	1.608.397.500,00	(894.827.500,00)	64,25
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	12.262.736.000,00	11.913.301.973,00	(349.434.027,00)	97,15
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.363.520.000,00	7.099.830.044,00	(1.263.689.956,00)	84,89
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	437.760.000,00	437.760.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**3.279.836.649.500,00**	**3.023.800.007.902,00**	**(256.036.641.598,00)**	**92,19**
4.2.01.05	Dana Desa	225.564.334.000,00	209.290.220.994,00	(16.274.113.006,00)	92,79
4.2.01.05.01	Dana Desa	225.564.334.000,00	209.290.220.994,00	(16.274.113.006,00)	92,79
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	225.564.334.000,00	209.290.220.994,00	(16.274.113.006,00)	92,79
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**225.564.334.000,00**	**209.290.220.994,00**	**(16.274.113.006,00)**	**92,79**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	173.122.623.028,43	(24.467.525.138,17)	87,62
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	125.600.000.000,00	137.258.525.061,83	11.658.525.061,83	109,28
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.600.000.000,00	137.258.525.061,83	11.658.525.061,83	109,28
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	13.578.082.138,00	13.578.082.138,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	8.892.076.144,00	8.892.076.144,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00	78.400.514.196,83	(11.599.485.803,17)	87,11
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	600.000.000,00	954.930.327,00	354.930.327,00	159,16
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.000.000.000,00	35.432.922.256,00	432.922.256,00	101,24
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	71.990.148.166,60	35.864.097.966,60	(36.126.050.200,00)	49,82

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	71.990.148.166,60	35.864.097.966,60	(36.126.050.200,00)	49,82
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	71.990.148.166,60	35.864.097.966,60	(36.126.050.200,00)	49,82
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**197.590.148.166,60**	**173.122.623.028,43**	**(24.467.525.138,17)**	**87,62**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**3.702.991.131.666,60**	**3.406.212.851.924,43**	**(296.778.279.742,17)**	**91,99**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.290.369.812.775,59**	**3.968.164.168.909,51**	**(322.205.643.866,08)**	**92,49**
5	**BELANJA DAERAH**	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**(442.474.685.480,81)**	**89,74**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**(328.426.377.848,55)**	**88,77**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.605.850.647.744,57	1.459.387.408.621,22	(146.463.239.123,35)	90,88
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	869.506.141.385,27	799.106.229.756,00	(70.399.911.629,27)	91,90
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	641.863.589.255,26	608.536.166.529,00	(33.327.422.726,26)	94,81
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	347.787.099.701,72	334.211.134.583,00	(13.575.965.118,72)	96,10
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	294.076.489.553,54	274.325.031.946,00	(19.751.457.607,54)	93,28
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.169.319.618,00	57.318.411.609,00	(8.850.908.009,00)	86,62
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.451.314.408,00	31.922.477.319,00	(3.528.837.089,00)	90,05
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	30.718.005.210,00	25.395.934.290,00	(5.322.070.920,00)	82,67
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.735.941.494,00	6.134.308.315,00	(1.601.633.179,00)	79,30
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.735.941.494,00	6.134.308.315,00	(1.601.633.179,00)	79,30
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.397.068.766,00	25.652.180.555,00	(2.744.888.211,00)	90,33
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.621.256.702,00	24.614.623.330,00	(2.006.633.372,00)	92,46
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.775.812.064,00	1.037.557.225,00	(738.254.839,00)	58,43
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.008.527.968,00	19.712.692.088,00	(2.295.835.880,00)	89,57
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.108.024.800,00	3.617.899.583,00	(1.490.125.217,00)	70,83
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	16.900.503.168,00	16.094.792.505,00	(805.710.663,00)	95,23
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41.669.691.240,60	36.730.418.293,00	(4.939.272.947,60)	88,15
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.241.083.686,60	17.316.528.368,00	(1.924.555.318,60)	90,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	22.428.607.554,00	19.413.889.925,00	(3.014.717.629,00)	86,56
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.406.896.598,92	5.840.497.488,00	(3.566.399.110,92)	62,09

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.751.586.705,92	4.118.709.885,00	(1.632.876.820,92)	71,61
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.655.309.893,00	1.721.787.603,00	(1.933.522.290,00)	47,10
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	185.192.930,09	9.531.283,00	(175.661.647,09)	5,15
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	136.993.525,50	4.230.050,00	(132.763.475,50)	3,09
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48.199.404,59	5.301.233,00	(42.898.171,59)	11,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	43.542.163.662,00	34.051.188.282,00	(9.490.975.380,00)	78,20
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.719.521.496,00	22.553.084.246,00	(8.166.437.250,00)	73,42
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.822.642.166,00	11.498.104.036,00	(1.324.538.130,00)	89,67
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.953.913.445,00	1.280.237.009,00	(673.676.436,00)	65,52
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.020.048.073,00	686.082.831,00	(333.965.242,00)	67,26
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	933.865.372,00	594.154.178,00	(339.711.194,00)	63,62
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.010.122.206,00	3.840.598.305,00	(1.169.523.901,00)	76,66
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.605.700.139,00	2.058.419.908,00	(547.280.231,00)	79,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.404.422.067,00	1.782.178.397,00	(622.243.670,00)	74,12
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.563.714.201,40	0,00	(1.563.714.201,40)	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.265.987.770,40	0,00	(1.265.987.770,40)	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	297.726.431,00	0,00	(297.726.431,00)	0,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	588.681.708.501,30	519.751.971.720,44	(68.929.736.780,86)	88,29
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	343.342.004.103,90	301.611.732.202,00	(41.730.271.901,90)	87,85
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	292.787.896.631,70	253.709.652.809,00	(39.078.243.822,70)	86,65
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.554.107.472,20	47.902.079.393,00	(2.652.028.079,20)	94,75
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	14.728.823.984,00	13.482.817.577,00	(1.246.006.407,00)	91,54
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14.666.491.000,00	13.443.817.189,00	(1.222.673.811,00)	91,66
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	62.332.984,00	39.000.388,00	(23.332.596,00)	62,57
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	14.706.625.000,40	14.298.752.449,00	(407.872.551,40)	97,23
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	14.699.625.000,00	14.293.772.449,00	(405.852.551,00)	97,24
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	7.000.000,40	4.980.000,00	(2.020.000,40)	71,14
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.904.255.413,00	190.358.669.492,44	(25.545.585.920,56)	88,17

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	11.444.320,00	11.444.320,00	0,00	100,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	153.721.480,00	153.721.480,00	0,00	100,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	966.950,00	966.950,00	0,00	100,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	99.374.080,00	63.281.172,00	(36.092.908,00)	63,68
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	403.468.090,00	403.468.090,00	0,00	100,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	14.070.540,00	7.884.587,00	(6.185.953,00)	56,04
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	228.249.588,00	109.908.877,00	(118.340.711,00)	48,15
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.127.686.750,00	827.734.611,44	(299.952.138,56)	73,40
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	926.150.840,00	361.568.384,00	(564.582.456,00)	39,04
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.721.941.340,00	1.664.601.961,00	(57.339.379,00)	96,67
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.189.850.000,00	500.049.986,00	(689.800.014,00)	42,03
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.505.000.000,00	515.671.862,00	(989.328.138,00)	34,26
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	193.134.453.405,00	172.195.567.739,00	(20.938.885.666,00)	89,16
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.543.803.030,00	11.913.301.973,00	(630.501.057,00)	94,97
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.822.975.000,00	1.608.397.500,00	(1.214.577.500,00)	56,98
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.159.684.780,00	25.044.182.584,00	(1.115.502.196,00)	95,74
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	108.267.600,00	(32.293.800,00)	77,03
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	108.267.600,00	(32.293.800,00)	77,03
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.960.000,00	114.428.640,00	(60.531.360,00)	65,40
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.960.000,00	114.428.640,00	(60.531.360,00)	65,40
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00	100,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00	100,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.796.200,00	139.582.800,00	(44.213.400,00)	75,94
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.796.200,00	139.582.800,00	(44.213.400,00)	75,94
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00	0,00	(63.214.200,00)	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00	0,00	(63.214.200,00)	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	810.000.000,00	436.224.234,00	(373.775.766,00)	53,85
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	810.000.000,00	436.224.234,00	(373.775.766,00)	53,85
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	50.625.480,00	28.900,00	(50.596.580,00)	0,06
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	50.625.480,00	28.900,00	(50.596.580,00)	0,06
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.403.755.000,00	5.159.867.910,00	(243.887.090,00)	95,49
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	200.000.000,00	84.006.342,00	(115.993.658,00)	42,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	15.000.000,00	2.065.392,00	(12.934.608,00)	13,77
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	22.755.000,00	6.196.176,00	(16.558.824,00)	27,23
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.166.000.000,00	5.067.600.000,00	(98.400.000,00)	98,10
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00	6.617.400.000,00	(24.600.000,00)	99,63
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00	6.617.400.000,00	(24.600.000,00)	99,63
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.390.000,00	0,00	(222.390.000,00)	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.390.000,00	0,00	(222.390.000,00)	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.233.020.663,00	1.165.833.888,00	(1.067.186.775,00)	52,21
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000,00	42.900.000,00	(27.100.000,00)	61,29
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000,00	42.900.000,00	(27.100.000,00)	61,29
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00	4.326.000,00	(4.774.000,00)	47,54
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00	4.326.000,00	(4.774.000,00)	47,54
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	88.560.000,00	(16.440.000,00)	84,34
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	88.560.000,00	(16.440.000,00)	84,34
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.200.000,00	3.838.260,00	(7.361.740,00)	34,27
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.200.000,00	3.838.260,00	(7.361.740,00)	34,27
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	133.284.072,00	1.440.947,00	(131.843.125,00)	1,08
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	133.284.072,00	1.440.947,00	(131.843.125,00)	1,08

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.798.640,00	1.340,00	(7.797.300,00)	0,02
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.798.640,00	1.340,00	(7.797.300,00)	0,02
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.600.000,00	4.826.400,00	(14.773.600,00)	24,62
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.600.000,00	4.826.400,00	(14.773.600,00)	24,62
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.205.928,00	93.600,00	(1.112.328,00)	7,76
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.205.928,00	93.600,00	(1.112.328,00)	7,76
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00	280.800,00	(319.200,00)	46,80
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	600.000,00	280.800,00	(319.200,00)	46,80
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.875.232.023,00	1.019.566.541,00	(855.665.482,00)	54,37
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	38.430.370,00	38.430.370,00	0,00	100,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	241.738,00	241.738,00	0,00	100,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	26.442.463,00	13.066.153,00	(13.376.310,00)	49,41
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	100.867.023,00	100.867.023,00	0,00	100,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.150.000,00	3.047.500,00	(1.102.500,00)	73,43
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.517.636,00	1.265.693,00	(2.251.943,00)	35,98
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.059.305,00	22.732.227,00	(5.327.078,00)	81,01
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	309.817.143,00	216.173.781,00	(93.643.362,00)	69,77
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	246.199.745,00	82.164.883,00	(164.034.862,00)	33,37
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	508.631.600,00	311.582.338,00	(197.049.262,00)	61,26
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(],PKB],	282.750.000,00	94.244.835,00	(188.505.165,00)	33,33
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(],BBNKB],	325.000.000,00	134.625.000,00	(190.375.000,00)	41,42

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.192.120.000,00	1.192.110.000,00	(10.000,00)	100,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	799.000.000,00	798.990.000,00	(10.000,00)	100,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	799.000.000,00	798.990.000,00	(10.000,00)	100,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	(4.950.891.742,22)	95,81
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	(4.950.891.742,22)	95,81
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	118.077.972.415,00	113.127.080.672,78	(4.950.891.742,22)	95,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.979.321.942,31	834.930.090.186,19	(144.049.231.756,12)	85,29
5.1.02.01	Belanja Barang	154.720.537.078,09	135.538.250.799,00	(19.182.286.279,09)	87,60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	147.898.371.711,09	129.206.433.067,00	(18.691.938.644,09)	87,36
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.954.105.073,00	5.374.050.585,00	(580.054.488,00)	90,26
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.553.467.159,99	1.379.926.734,00	(173.540.425,99)	88,83
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.547.107.809,50	6.075.236.252,00	(1.471.871.557,50)	80,50
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	79.536.000,00	61.290.000,00	(18.246.000,00)	77,06
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.336.584.630,00	1.329.571.436,00	(7.013.194,00)	99,48
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	167.477.743,00	156.356.000,00	(11.121.743,00)	93,36
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.202.215.559,00	1.026.551.333,00	(175.664.226,00)	85,39
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	88.900.000,00	63.081.300,00	(25.818.700,00)	70,96
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.706.286,00	7.052.676,00	(653.610,00)	91,52
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	502.412.600,00	497.781.100,00	(4.631.500,00)	99,08
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.325.000,00	8.291.700,00	(33.300,00)	99,60
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.033.420.908,81	7.859.874.158,00	(1.173.546.750,81)	87,01
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.020.470.737,49	11.038.865.526,00	(1.981.605.211,49)	84,78
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.661.286.569,00	1.545.134.095,00	(116.152.474,00)	93,01
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.687.437.860,00	9.182.845.011,00	(504.592.849,00)	94,79
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	371.475.000,00	367.112.740,00	(4.362.260,00)	98,83
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.378.365.980,00	1.150.086.098,00	(228.279.882,00)	83,44
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.823.765.981,00	1.683.160.479,00	(140.605.502,00)	92,29
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.653.978.776,00	4.535.428.433,00	(118.550.343,00)	97,45
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.030.256.646,00	8.893.997.664,00	(136.258.982,00)	98,49

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.070.443.764,00	7.180.816.248,00	(889.627.516,00)	88,98
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	309.174.002,50	149.500.095,00	(159.673.907,50)	48,35
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.231.000,00	11.489.982,00	(741.018,00)	93,94
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	546.629.790,00	468.245.251,00	(78.384.539,00)	85,66
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.857.570.678,00	9.335.547.027,00	(1.522.023.651,00)	85,98
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	250.368.000,00	249.447.500,00	(920.500,00)	99,63
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.305.253.676,10	14.388.194.130,00	(4.917.059.546,10)	74,53
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.290.871.533,70	12.455.328.704,00	(1.835.542.829,70)	87,16
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	70.298.000,00	24.629.400,00	(45.668.600,00)	35,04
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.411.250,00	5.411.250,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	870.318.000,00	628.668.000,00	(241.650.000,00)	72,23
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.124.059.198,00	4.729.324.912,00	(1.394.734.286,00)	77,23
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	444.650.000,00	402.935.400,00	(41.714.600,00)	90,62
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.113.750.000,00	1.111.436.976,00	(2.313.024,00)	99,79
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	371.925.000,00	365.256.421,00	(6.668.579,00)	98,21
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	594.590.960,00	578.390.568,00	(16.200.392,00)	97,28
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.625.782.500,00	12.063.600.529,00	(562.181.971,00)	95,55
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	83.250.000,00	82.747.170,00	(502.830,00)	99,40
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	676.750.000,00	668.234.906,00	(8.515.094,00)	98,74
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	19.695.840,00	19.531.200,00	(164.640,00)	99,16
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	5.017.200,00	0,00	(5.017.200,00)	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	427.550.000,00	396.110.001,00	(31.439.999,00)	92,65
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	515.925.000,00	474.365.020,00	(41.559.980,00)	91,94
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.044.200.000,00	1.027.434.261,00	(16.765.739,00)	98,39
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	154.360.000,00	154.094.796,00	(265.204,00)	99,83
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.822.165.367,00	6.331.817.732,00	(490.347.635,00)	92,81

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.04.0012	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	6.597.936.420,00	6.130.500.000,00	(467.436.420,00)	92,92
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	202.293.547,00	181.417.652,00	(20.875.895,00)	89,68
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	21.935.400,00	19.900.080,00	(2.035.320,00)	90,72
5.1.02.02	Belanja Jasa	395.966.686.157,60	333.832.282.952,00	(62.134.403.205,60)	84,31
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	259.610.440.124,00	212.285.179.887,00	(47.325.260.237,00)	81,77
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.671.259.180,20	3.687.300.000,00	(1.983.959.180,20)	65,02
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.844.826.800,50	10.319.526.900,00	(2.525.299.900,50)	80,34
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	613.280.000,00	276.800.000,00	(336.480.000,00)	45,13
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	51.400.000,00	32.000.000,00	(19.400.000,00)	62,26
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	17.600.000,00	12.000.000,00	(5.600.000,00)	68,18
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.877.140.000,00	2.757.240.000,00	(119.900.000,00)	95,83
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	90.500.000,00	69.700.000,00	(20.800.000,00)	77,02
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.638.200.000,00	1.875.050.000,00	(763.150.000,00)	71,07
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.878.005.000,00	17.784.436.198,00	(7.093.568.802,00)	71,49
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	468.645.996,00	330.771.000,00	(137.874.996,00)	70,58
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	44.200.000,00	40.600.000,00	(3.600.000,00)	91,86
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.138.400.000,00	3.624.800.000,00	(513.600.000,00)	87,59
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	943.200.000,00	762.000.000,00	(181.200.000,00)	80,79
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.132.600.000,00	1.390.500.000,00	(742.100.000,00)	65,20
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.503.200.000,00	1.377.800.000,00	(125.400.000,00)	91,66
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	814.560.000,00	783.050.000,00	(31.510.000,00)	96,13
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	5.565.310.916,50	4.766.860.000,00	(798.450.916,50)	85,65
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.443.950.000,00	1.324.605.650,00	(119.344.350,00)	91,73
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.221.350.000,00	1.824.776.410,00	(396.573.590,00)	82,15

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.199.668.000,00	12.088.874.000,00	(3.110.794.000,00)	79,53
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.451.108.400,00	7.397.214.800,00	(2.053.893.600,00)	78,27
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.550.150.000,00	4.893.240.000,00	(656.910.000,00)	88,16
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	40.108.195.722,00	37.004.092.926,00	(3.104.102.796,00)	92,26
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.671.200.000,00	5.639.558.000,00	(1.031.642.000,00)	84,54
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.696.124.444,00	5.905.330.000,00	(1.790.794.444,00)	76,73
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	617.500.000,00	503.600.000,00	(113.900.000,00)	81,55
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.389.300.000,00	2.045.630.000,00	(1.343.670.000,00)	60,36
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	162.000.000,00	12.000.000,00	(150.000.000,00)	7,41
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	413.500.000,00	393.000.000,00	(20.500.000,00)	95,04
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	31.200.000,00	30.600.000,00	(600.000,00)	98,08
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	255.000.000,00	221.300.000,00	(33.700.000,00)	86,78
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	379.707.100,00	252.677.621,00	(127.029.479,00)	66,55
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	291.600.000,00	250.200.000,00	(41.400.000,00)	85,80
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	80.864.000,00	79.920.000,00	(944.000,00)	98,83
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.059.470.180,00	10.298.631.025,00	(760.839.155,00)	93,12
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	16.887.450.000,00	16.523.090.259,00	(364.359.741,00)	97,84
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	103.200.000,00	75.863.800,00	(27.336.200,00)	73,51
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	306.404.100,00	126.244.750,00	(180.159.350,00)	41,20
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	262.494.000,00	259.200.000,00	(3.294.000,00)	98,75
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	780.000,00	0,00	(780.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.081.965.000,00	7.844.877.691,00	(237.087.309,00)	97,07
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	380.490.293,00	151.867.596,00	(228.622.697,00)	39,91
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.913.943.535,00	3.101.292.590,00	(1.812.650.945,00)	63,11
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	36.332.055.496,00	26.453.948.852,00	(9.878.106.644,00)	72,81
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	224.222.400,00	201.234.400,00	(22.988.000,00)	89,75
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.817.833.031,00	11.403.653.069,00	(2.414.179.962,00)	82,53
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	107.865.000,00	4.730.268,00	(103.134.732,00)	4,39
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.564.665.272,00	1.843.714.667,00	(720.950.605,00)	71,89
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	194.240.640,00	180.301.879,00	(13.938.761,00)	92,82
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.916.048.311,80	2.101.422.636,00	(814.625.675,80)	72,06
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	218.700.000,00	69.392.900,00	(149.307.100,00)	31,73
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	417.867.306,00	322.660.000,00	(95.207.306,00)	77,22
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.310.346.106,00	66.132.608.137,00	(5.177.737.969,00)	92,74

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.061.078.240,00	4.853.453.050,00	(207.625.190,00)	95,90
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	48.636.352.800,00	44.806.403.100,00	(3.829.949.700,00)	92,13
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	588.000.000,00	253.153.700,00	(334.846.300,00)	43,05
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.853.505.200,00	6.580.776.575,00	(272.728.625,00)	96,02
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.704.374.155,00	6.465.479.466,90	(238.894.688,10)	96,44
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	836.892.011,00	760.693.996,10	(76.198.014,90)	90,90
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.630.143.700,00	2.412.648.249,00	(217.495.451,00)	91,73
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.303.028.700,00	9.108.934.227,00	(4.194.094.473,00)	68,47
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	57.960.000,00	24.660.000,00	(33.300.000,00)	42,55
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.375.881.200,00	5.830.816.567,00	(545.064.633,00)	91,45
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	79.200.000,00	42.900.000,00	(36.300.000,00)	54,17
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	205.500.000,00	82.600.000,00	(122.900.000,00)	40,19
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.639.555.500,00	1.461.650.900,00	(2.177.904.600,00)	40,16
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	457.167.000,00	222.748.000,00	(234.419.000,00)	48,72
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	475.060.000,00	225.143.760,00	(249.916.240,00)	47,39
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.336.590.000,00	604.055.000,00	(732.535.000,00)	45,19
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	52.000.000,00	34.250.000,00	(17.750.000,00)	65,87
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	587.115.000,00	580.110.000,00	(7.005.000,00)	98,81
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.206.596.750,00	5.854.414.820,00	(1.352.181.930,00)	81,24
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	175.200.000,00	144.575.000,00	(30.625.000,00)	82,52
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.422.194.000,00	1.012.864.000,00	(409.330.000,00)	71,22
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	499.480.000,00	395.402.000,00	(104.078.000,00)	79,16
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	299.175.000,00	171.495.000,00	(127.680.000,00)	57,32
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.629.547.750,00	3.105.078.820,00	(524.468.930,00)	85,55
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.181.000.000,00	1.025.000.000,00	(156.000.000,00)	86,79
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.751.666.127,60	25.797.204.431,00	(954.461.696,60)	96,43
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	164.971.000,00	164.786.700,00	(184.300,00)	99,89
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	530.000.000,00	484.350.889,00	(45.649.111,00)	91,39

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	19.600.000,00	19.243.515,00	(356.485,00)	98,18
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.594.765.400,00	1.500.475.400,00	(94.290.000,00)	94,09
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	156.977.183,90	151.453.395,00	(5.523.788,90)	96,48
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.841.543.799,60	3.716.971.600,00	(124.572.199,60)	96,76
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	10.368.989.233,00	9.957.779.194,00	(411.210.039,00)	96,03
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	158.241.600,00	158.241.600,00	0,00	100,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	5.196.356.570,00	5.115.217.270,00	(81.139.300,00)	98,44
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.658.214.100,00	1.619.286.628,00	(38.927.472,00)	97,65
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	140.376.760,00	140.211.870,00	(164.890,00)	99,88
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.014.395.381,10	917.623.610,00	(96.771.771,10)	90,46
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	621.015.600,00	574.258.260,00	(46.757.340,00)	92,47
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	294.372.000,00	294.372.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	476.007.500,00	474.907.500,00	(1.100.000,00)	99,77
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	10.640.000,00	6.345.000,00	(4.295.000,00)	59,63
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	505.200.000,00	501.680.000,00	(3.520.000,00)	99,30
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.946.746.600,00	3.313.494.750,00	(633.251.850,00)	83,96
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.955.312.600,00	1.425.776.900,00	(529.535.700,00)	72,92
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.900.414.000,00	1.796.725.600,00	(103.688.400,00)	94,54

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	91.020.000,00	90.992.250,00	(27.750,00)	99,97
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	647.200.000,00	611.500.000,00	(35.700.000,00)	94,48
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	484.900.000,00	484.900.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	162.300.000,00	126.600.000,00	(35.700.000,00)	78,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.190.661.750,00	10.728.946.700,00	(2.461.715.050,00)	81,34
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.828.939.000,00	9.979.206.800,00	(1.849.732.200,00)	84,36
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.361.722.750,00	749.739.900,00	(611.982.850,00)	55,06
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	104.644.846.356,92	86.439.913.665,59	(18.204.932.691,33)	82,60
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.865.682.327,00	24.006.875.582,00	(3.858.806.745,00)	86,15
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.953.415.510,00	1.757.011.863,00	(196.403.647,00)	89,95
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	527.139.529,00	391.382.170,00	(135.757.359,00)	74,25
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.607.352.608,00	18.502.130.594,00	(3.105.222.014,00)	85,63
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	226.560.000,00	15.570.361,00	(210.989.639,00)	6,87
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	406.108.000,00	395.732.200,00	(10.375.800,00)	97,45
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	443.330.000,00	422.704.650,00	(20.625.350,00)	95,35
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	115.833.000,00	115.722.000,00	(111.000,00)	99,90
5.1.02.03.02.0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	160.260.000,00	160.260.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	59.146.680,00	40.997.000,00	(18.149.680,00)	69,31
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.561.430.000,00	1.412.807.882,00	(148.622.118,00)	90,48

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	14.500.000,00	14.087.600,00	(412.400,00)	97,16
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	100.000.000,00	94.646.220,00	(5.353.780,00)	94,65
5.1.02.03.02.0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	41.388.850,00	41.388.850,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	51.132.150,00	51.060.000,00	(72.150,00)	99,86
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	147.286.000,00	146.353.500,00	(932.500,00)	99,37
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	100.000.000,00	99.821.792,00	(178.208,00)	99,82
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	100.000.000,00	99.278.400,00	(721.600,00)	99,28
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	250.800.000,00	245.920.500,00	(4.879.500,00)	98,05
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.147.096.809,92	14.666.582.350,60	(480.514.459,32)	96,83
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.957.911.809,92	14.477.822.010,60	(480.089.799,32)	96,79
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	104.185.000,00	104.185.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	85.000.000,00	84.575.340,00	(424.660,00)	99,50
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.546.262.358,00	47.682.262.232,99	(13.864.000.125,01)	77,47
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	33.919.013.988,00	22.954.586.132,99	(10.964.427.855,01)	67,67
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	27.229.472.050,00	24.330.338.800,00	(2.899.133.250,00)	89,35
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	397.776.320,00	397.337.300,00	(439.020,00)	99,89
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.804.862,00	84.193.500,00	(1.611.362,00)	98,12
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	85.804.862,00	84.193.500,00	(1.611.362,00)	98,12
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.852.329.230,10	84.944.164.715,00	(26.908.164.515,10)	75,94

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.738.673.230,10	84.858.306.915,00	(26.880.366.315,10)	75,94
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.758.541.983,45	64.244.202.024,00	(11.514.339.959,45)	84,80
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.980.131.246,65	20.614.104.891,00	(15.366.026.355,65)	57,29
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	113.656.000,00	85.857.800,00	(27.798.200,00)	75,54
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	113.656.000,00	85.857.800,00	(27.798.200,00)	75,54
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.899.891.072,00	12.559.020.733,00	(1.340.870.339,00)	90,35
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.294.891.072,00	11.954.020.733,00	(1.340.870.339,00)	89,91
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.705.395.000,00	3.454.821.197,00	(1.250.573.803,00)	73,42
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	8.589.496.072,00	8.499.199.536,00	(90.296.536,00)	98,95
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	66.854.596.833,00	66.759.329.833,00	(95.267.000,00)	99,86
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	66.854.596.833,00	66.759.329.833,00	(95.267.000,00)	99,86
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	65.073.733.533,00	64.978.466.533,00	(95.267.000,00)	99,85
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.780.863.300,00	1.780.863.300,00	0,00	100,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.984.964.004,00	1.238.891.164,00	(746.072.840,00)	62,41
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.984.964.004,00	1.238.891.164,00	(746.072.840,00)	62,41
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.984.964.004,00	1.238.891.164,00	(746.072.840,00)	62,41
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	(15.437.234.886,00)	88,04
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	(15.437.234.886,00)	88,04
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	129.055.471.210,60	113.618.236.324,60	(15.437.234.886,00)	88,04
5.1.05	Belanja Hibah	262.798.375.249,00	246.484.811.969,92	(16.313.563.279,08)	93,79
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.479.199.375,00	31.013.083.837,00	(1.466.115.538,00)	95,49
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	32.016.199.375,00	31.013.083.837,00	(1.003.115.538,00)	96,87
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	32.016.199.375,00	31.013.083.837,00	(1.003.115.538,00)	96,87
5.1.05.01.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05.01.03.0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.390.000.000,00	1.338.500.000,00	(51.500.000,00)	96,29
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.390.000.000,00	1.338.500.000,00	(51.500.000,00)	96,29
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.390.000.000,00	1.338.500.000,00	(51.500.000,00)	96,29
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	197.956.700.745,00	183.766.142.051,92	(14.190.558.693,08)	92,83
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	130.500.068.433,00	119.098.926.073,00	(11.401.142.360,00)	91,26
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.942.538.300,00	36.384.455.618,00	(1.558.082.682,00)	95,89
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	92.557.530.133,00	82.714.470.455,00	(9.843.059.678,00)	89,37
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.523.969.399,00	51.153.283.888,92	(2.370.685.510,08)	95,57
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.523.969.399,00	51.153.283.888,92	(2.370.685.510,08)	95,57
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.841.793.913,00	6.756.344.590,00	(85.449.323,00)	98,75
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.841.538.613,00	6.756.344.590,00	(85.194.023,00)	98,75
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.300,00	0,00	(255.300,00)	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	5.680.869.000,00	5.447.587.500,00	(233.281.500,00)	95,89
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	5.680.869.000,00	5.447.587.500,00	(233.281.500,00)	95,89
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.410.000.000,00	1.310.000.000,00	(100.000.000,00)	92,91
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.410.000.000,00	1.310.000.000,00	(100.000.000,00)	92,91
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.275.126.000,00	15.272.787.730,00	(2.338.270,00)	99,98
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.275.126.000,00	15.272.787.730,00	(2.338.270,00)	99,98

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.275.126.000,00	15.272.787.730,00	(2.338.270,00)	99,98
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	12.673.313.000,00	12.611.729.000,00	(61.584.000,00)	99,51
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	(60.768.000,00)	99,46
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.271.013.000,00	11.210.245.000,00	(60.768.000,00)	99,46
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	(816.000,00)	99,94
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.402.300.000,00	1.401.484.000,00	(816.000,00)	99,94
5.1.05.11	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro	3.024.036.129,00	2.482.569.351,00	(541.466.778,00)	82,09
5.1.05.11.01	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro	1.110.000.000,00	1.108.540.000,00	(1.460.000,00)	99,87
5.1.05.11.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro	1.110.000.000,00	1.108.540.000,00	(1.460.000,00)	99,87
5.1.05.11.02	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Mikro	1.914.036.129,00	1.374.029.351,00	(540.006.778,00)	71,79
5.1.05.11.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Mikro	1.914.036.129,00	1.374.029.351,00	(540.006.778,00)	71,79
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	78.068.692.000,00	56.468.348.310,00	(21.600.343.690,00)	72,33
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	52.758.692.000,00	31.168.348.310,00	(21.590.343.690,00)	59,08
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	52.305.900.000,00	30.724.525.000,00	(21.581.375.000,00)	58,74
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	52.305.900.000,00	30.724.525.000,00	(21.581.375.000,00)	58,74
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	452.792.000,00	443.823.310,00	(8.968.690,00)	98,02
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	452.792.000,00	443.823.310,00	(8.968.690,00)	98,02
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	25.310.000.000,00	25.300.000.000,00	(10.000.000,00)	99,96
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	25.310.000.000,00	25.300.000.000,00	(10.000.000,00)	99,96
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	25.310.000.000,00	25.300.000.000,00	(10.000.000,00)	99,96
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.925.697.036.935,88**	**2.597.270.659.087,33**	**(328.426.377.848,55)**	**88,77**
5.2	**BELANJA MODAL**	**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**(95.071.378.149,71)**	**88,66**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	(846.301.620,00)	57,62
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	(846.301.620,00)	57,62
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	976.073.350,00	929.771.730,00	(46.301.620,00)	95,26
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	94.590.400,00	49.084.200,00	(45.506.200,00)	51,89
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	54.761.850,00	54.761.850,00	0,00	100,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	826.721.100,00	825.925.680,00	(795.420,00)	99,90
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.020.712.400,00	220.712.400,00	(800.000.000,00)	21,62
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	890.132.000,00	90.132.000,00	(800.000.000,00)	10,13
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	130.580.400,00	130.580.400,00	0,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	(6.606.550.881,70)	94,24
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.684.492.982,00	2.539.463.345,00	(145.029.637,00)	94,60
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.949.675.040,00	1.843.710.000,00	(105.965.040,00)	94,56
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.949.675.040,00	1.843.710.000,00	(105.965.040,00)	94,56
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	734.817.942,00	695.753.345,00	(39.064.597,00)	94,68
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	550.000.000,00	525.001.495,00	(24.998.505,00)	95,45
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	184.817.942,00	170.751.850,00	(14.066.092,00)	92,39
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	22.372.352.397,00	21.467.474.838,00	(904.877.559,00)	95,96
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	22.256.795.757,00	21.352.251.838,00	(904.543.919,00)	95,94
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	83.769.147,00	66.960.000,00	(16.809.147,00)	79,93
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	7.039.600.000,00	6.904.700.000,00	(134.900.000,00)	98,08
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	954.995.250,00	855.000.000,00	(99.995.250,00)	89,53
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.383.531.360,00	1.358.427.985,00	(25.103.375,00)	98,19
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	943.000.000,00	896.185.003,00	(46.814.997,00)	95,04
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.851.900.000,00	11.270.978.850,00	(580.921.150,00)	95,10
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	100,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	100,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	15.000.000,00	14.990.000,00	(10.000,00)	99,93
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	15.000.000,00	14.990.000,00	(10.000,00)	99,93
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	85.571.640,00	85.248.000,00	(323.640,00)	99,62
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	85.571.640,00	85.248.000,00	(323.640,00)	99,62
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.059.611,00	18.408.655,00	(6.650.956,00)	73,46
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.650.000,00	665.000,00	(5.985.000,00)	10,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	6.650.000,00	665.000,00	(5.985.000,00)	10,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	18.409.611,00	17.743.655,00	(665.956,00)	96,38
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	798.490,00	788.655,00	(9.835,00)	98,77
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	16.955.000,00	16.955.000,00	0,00	100,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	656.121,00	0,00	(656.121,00)	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	146.470.000,00	143.778.940,00	(2.691.060,00)	98,16
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	146.470.000,00	143.778.940,00	(2.691.060,00)	98,16
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	67.980.000,00	67.856.500,00	(123.500,00)	99,82
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	32.277.000,00	30.820.000,00	(1.457.000,00)	95,49
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	46.213.000,00	45.102.440,00	(1.110.560,00)	97,60
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.235.490.849,74	30.085.181.031,61	(1.150.309.818,13)	96,32
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.478.036.711,36	1.432.074.199,38	(45.962.511,98)	96,89
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.478.036.711,36	1.432.074.199,38	(45.962.511,98)	96,89
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.977.837.519,38	24.200.690.077,23	(777.147.442,15)	96,89
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.092.039.351,21	18.506.515.637,50	(585.523.713,71)	96,93
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	239.523.000,00	238.800.000,00	(723.000,00)	99,70
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.176.107.583,00	1.152.494.473,52	(23.613.109,48)	97,99
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	724.237.178,00	686.767.032,00	(37.470.146,00)	94,83
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.669.634.473,17	3.544.897.860,21	(124.736.612,96)	96,60
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	76.295.934,00	71.215.074,00	(5.080.860,00)	93,34
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.779.616.619,00	4.452.416.755,00	(327.199.864,00)	93,15
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	929.567.760,00	865.209.347,00	(64.358.413,00)	93,08
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.631.460.034,00	1.480.050.044,00	(151.409.990,00)	90,72
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	998.358.003,00	922.626.086,00	(75.731.917,00)	92,41
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	639.585.000,00	637.843.390,00	(1.741.610,00)	99,73
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	580.645.822,00	546.687.888,00	(33.957.934,00)	94,15
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.322.683.941,00	6.008.333.996,84	(314.349.944,16)	95,03
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.946.742.759,00	3.769.431.951,84	(177.310.807,16)	95,51

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.883.617.886,00	1.877.919.300,00	(5.698.586,00)	99,70
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.991.710.373,00	1.827.586.153,44	(164.124.219,56)	91,76
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	41.089.500,00	34.511.498,40	(6.578.001,60)	83,99
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.325.000,00	29.415.000,00	(910.000,00)	97,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.275.377.402,00	2.140.977.845,00	(134.399.557,00)	94,09
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	52.355.402,00	52.352.850,00	(2.552,00)	100,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	42.760.000,00	41.625.000,00	(1.135.000,00)	97,35
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2.180.262.000,00	2.046.999.995,00	(133.262.005,00)	93,89
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	100.563.780,00	97.924.200,00	(2.639.580,00)	97,38
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	100.563.780,00	97.924.200,00	(2.639.580,00)	97,38
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.193.814.203,00	9.923.280.992,00	(270.533.211,00)	97,35
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.182.264.203,00	9.923.280.992,00	(258.983.211,00)	97,46
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.607.264.203,00	9.363.779.692,00	(243.484.511,00)	97,47
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	175.000.000,00	166.750.000,00	(8.250.000,00)	95,29
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	400.000.000,00	392.751.300,00	(7.248.700,00)	98,19
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	0,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.135.221.313,00	2.057.197.811,19	(78.023.501,81)	96,35
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.127.221.313,00	2.049.397.811,19	(77.823.501,81)	96,34
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	401.707.200,00	401.204.700,00	(502.500,00)	99,87
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.678.692.700,00	1.644.127.593,00	(34.565.107,00)	97,94
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	29.191.313,00	4.065.518,19	(25.125.794,81)	13,93
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.630.100,00	0,00	(17.630.100,00)	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00	7.800.000,00	(200.000,00)	97,50
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	8.000.000,00	7.800.000,00	(200.000,00)	97,50
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.080.473.526,54	14.435.011.675,86	(645.461.850,68)	95,72
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.323.658.188,26	10.872.043.472,55	(451.614.715,71)	96,01
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.239.879.577,40	7.837.939.750,21	(401.939.827,19)	95,12
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.083.778.610,86	3.034.103.722,34	(49.674.888,52)	98,39

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.756.815.338,28	3.562.968.203,31	(193.847.134,97)	94,84
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.273.036.009,00	1.230.277.268,00	(42.758.741,00)	96,64
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	630.664.935,00	594.898.883,13	(35.766.051,87)	94,33
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.853.114.394,28	1.737.792.052,18	(115.322.342,10)	93,78
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	39.008.000,00	38.034.999,00	(973.001,00)	97,51
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	39.008.000,00	38.034.999,00	(973.001,00)	97,51
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	39.008.000,00	38.034.999,00	(973.001,00)	97,51
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	12.610.544,00	0,00	(12.610.544,00)	0,00
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	12.610.544,00	0,00	(12.610.544,00)	0,00
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	12.610.544,00	0,00	(12.610.544,00)	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	110.522.687,00	109.517.150,00	(1.005.537,00)	99,09
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	50.582.687,00	49.577.150,00	(1.005.537,00)	98,01
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	40.637.087,00	39.657.150,00	(979.937,00)	97,59
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	9.945.600,00	9.920.000,00	(25.600,00)	99,74
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00	100,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00	100,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	0,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.449.353.200,00	1.420.105.585,00	(29.247.615,00)	97,98
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.449.353.200,00	1.420.105.585,00	(29.247.615,00)	97,98
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	499.500.000,00	496.944.780,00	(2.555.220,00)	99,49
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	854.393.200,00	838.321.285,00	(16.071.915,00)	98,12
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	95.460.000,00	84.839.520,00	(10.620.480,00)	88,87
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.879.675.920,00	1.673.766.867,08	(205.909.052,92)	89,05
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.879.675.920,00	1.673.766.867,08	(205.909.052,92)	89,05
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	747.156.000,00	745.955.967,08	(1.200.032,92)	99,84
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.132.519.920,00	927.810.900,00	(204.709.020,00)	81,92
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	10.061.637.943,00	10.017.214.994,00	(44.422.949,00)	99,56
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	10.061.637.943,00	10.017.214.994,00	(44.422.949,00)	99,56

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	10.018.563.943,00	9.974.140.994,00	(44.422.949,00)	99,56
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	43.074.000,00	43.074.000,00	0,00	100,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	(2.792.914.645,00)	74,55
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	(2.792.914.645,00)	74,55
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.972.692.273,00	8.179.777.628,00	(2.792.914.645,00)	74,55
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	(17.230.549.924,92)	87,80
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	133.162.093.375,00	121.409.472.082,34	(11.752.621.292,66)	91,17
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.247.146.325,00	111.029.378.032,34	(11.217.768.292,66)	90,82
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.940.321.831,00	27.647.871.762,00	(1.292.450.069,00)	95,53
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.326.332.800,00	9.575.771.376,00	(750.561.424,00)	92,73
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	26.141.750,00	0,00	(26.141.750,00)	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	252.500.000,00	198.493.000,00	(54.007.000,00)	78,61
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.207.536.051,00	33.132.606.350,00	(2.074.929.701,00)	94,11
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	621.112.450,00	565.440.250,00	(55.672.200,00)	91,04
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.375.088.193,00	39.411.832.344,34	(6.963.255.848,66)	84,98
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	498.113.250,00	497.362.950,00	(750.300,00)	99,85
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.914.947.050,00	10.380.094.050,00	(534.853.000,00)	95,10
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	(320.902.000,00)	93,32
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.113.866.250,00	5.899.915.250,00	(213.951.000,00)	96,50
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	847.904.350,00	846.183.507,74	(1.720.842,26)	99,80
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	847.904.350,00	846.183.507,74	(1.720.842,26)	99,80
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	87.017.000,00	86.695.407,74	(321.592,26)	99,63
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	590.734.350,00	589.365.100,00	(1.369.250,00)	99,77
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	170.153.000,00	170.123.000,00	(30.000,00)	99,98
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	(5.476.207.790,00)	23,91
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	(5.476.207.790,00)	23,91
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.197.218.135,00	1.721.010.345,00	(5.476.207.790,00)	23,91
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	(70.308.908.987,09)	87,42
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	514.661.340.173,89	446.796.535.676,80	(67.864.804.497,09)	86,81
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	472.047.861.543,00	419.339.259.676,80	(52.708.601.866,20)	88,83
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	402.359.449.834,00	351.283.390.643,80	(51.076.059.190,20)	87,31
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	69.688.411.709,00	68.055.869.033,00	(1.632.542.676,00)	97,66
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	42.613.478.630,89	27.457.276.000,00	(15.156.202.630,89)	64,43
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	32.221.291.827,00	21.734.561.450,00	(10.486.730.377,00)	67,45
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	(3.902.762.200,00)	49,69

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.635.010.803,89	1.868.300.750,00	(766.710.053,89)	70,90
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	28.274.717.510,00	26.221.866.815,00	(2.052.850.695,00)	92,74
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	313.000.000,00	308.288.000,00	(4.712.000,00)	98,49
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	313.000.000,00	308.288.000,00	(4.712.000,00)	98,49
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	(288.737.300,00)	87,01
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	(288.737.300,00)	87,01
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	25.738.515.460,00	23.979.114.065,00	(1.759.401.395,00)	93,16
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	25.738.515.460,00	23.979.114.065,00	(1.759.401.395,00)	93,16
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15.972.608.500,00	15.581.354.705,00	(391.253.795,00)	97,55
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	(70.588.000,00)	95,91
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	(70.588.000,00)	95,91
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	(320.665.795,00)	97,75
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	9.673.806.500,00	9.477.889.455,00	(195.917.045,00)	97,97
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.571.330.000,00	4.446.581.250,00	(124.748.750,00)	97,27
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	(61.902.429,00)	99,71
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	669.535.560,00	647.692.020,00	(21.843.540,00)	96,74
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	669.535.560,00	647.692.020,00	(21.843.540,00)	96,74
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	669.535.560,00	647.692.020,00	(21.843.540,00)	96,74
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	981.496.000,00	979.223.111,00	(2.272.889,00)	99,77
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	831.611.000,00	829.583.111,00	(2.027.889,00)	99,76

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	831.611.000,00	829.583.111,00	(2.027.889,00)	99,76
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	149.885.000,00	149.640.000,00	(245.000,00)	99,84
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	149.885.000,00	149.640.000,00	(245.000,00)	99,84
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	13.079.000,00	13.079.000,00	0,00	100,00
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	13.079.000,00	13.079.000,00	0,00	100,00
5.2.05.06.01.0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	13.079.000,00	13.079.000,00	0,00	100,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	19.452.359.293,00	19.414.573.293,00	(37.786.000,00)	99,81
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	19.452.359.293,00	19.414.573.293,00	(37.786.000,00)	99,81
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	18.826.296.593,00	18.788.510.593,00	(37.786.000,00)	99,80
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	626.062.700,00	626.062.700,00	0,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.393.177,00	79.228.870,00	(17.164.307,00)	82,19
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	96.393.177,00	79.228.870,00	(17.164.307,00)	82,19
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	96.393.177,00	79.228.870,00	(17.164.307,00)	82,19
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	75.754.947,00	74.448.870,00	(1.306.077,00)	98,28
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	20.638.230,00	4.780.000,00	(15.858.230,00)	23,16
	JUMLAH BELANJA MODAL	**838.048.630.214,17**	**742.977.252.064,46**	**(95.071.378.149,71)**	**88,66**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.442.284.504,55**	**2.766.488.804,00**	**(2.675.795.700,55)**	**50,83**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	(2.675.795.700,55)	50,83
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	(2.675.795.700,55)	50,83
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	(2.675.795.700,55)	50,83
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	(2.675.795.700,55)	50,83
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.442.284.504,55**	**2.766.488.804,00**	**(2.675.795.700,55)**	**50,83**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**544.652.123.254,00**	**528.350.989.472,00**	**(16.301.133.782,00)**	**97,01**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	(16.301.133.782,00)	97,01
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	(16.301.133.782,00)	97,01

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	(16.301.133.782,00)	97,01
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	(16.301.133.782,00)	97,01
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**544.652.123.254,00**	**528.350.989.472,00**	**(16.301.133.782,00)**	**97,01**
	JUMLAH BELANJA	**4.313.840.074.908,60**	**3.871.365.389.427,79**	**(442.474.685.480,81)**	**89,74**
	SURPLUS/DEFISIT	**(23.470.262.133,01)**	**96.798.779.481,72**	**120.269.041.614,73**	**(412,43)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**23.470.262.133,01**	**23.416.883.037,01**	**(53.379.096,00)**	**99,77**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**50.056.371.759,01**	**50.002.992.663,01**	**(53.379.096,00)**	**99,89**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.056.371.759,01	39.964.530.163,01	(10.091.841.596,00)	79,84
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	136.096.889,00	136.096.889,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	136.096.889,00	136.096.889,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	136.096.889,00	136.096.889,00	0,00	100,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.792.394.000,00	12.792.394.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.507.176.000,00	7.507.176.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.285.218.000,00	5.285.218.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03.03.0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	5.285.218.000,00	5.285.218.000,00	0,00	100,00
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.01.04.04.0006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	16.104.649.562,01	6.012.807.965,24	(10.091.841.596,77)	37,34
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	16.104.649.562,01	6.012.807.965,24	(10.091.841.596,77)	37,34
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	16.104.649.562,01	6.012.807.965,24	(10.091.841.596,77)	37,34
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	21.023.231.308,00	21.023.231.308,77	0,77	100,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.038.462.500,00	10.038.462.500,00	0,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	10.038.462.500,00	10.038.462.500,00	0,00
6.1.05.03.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	10.038.462.500,00	10.038.462.500,00	0,00
6.1.05.03.02.0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	10.038.462.500,00	10.038.462.500,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50.056.371.759,01**	**50.002.992.663,01**	**(53.379.096,00)**	**99,89**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**26.586.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**0,00**	**100,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	0,00	100,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	0,00	100,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	0,00	100,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**26.586.109.626,00**	**26.586.109.626,00**	**0,00**	**100,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**23.470.262.133,01**	**23.416.883.037,01**	**(53.379.096,00)**	**99,77**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**120.215.662.518,73**	**120.215.662.518,73**	

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

Lampiran XXVI : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TA 2025

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(1) Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	829.699.200,00	828.530.853,00	-	-	-	-	-	-	829.699.200,00	828.530.853,00	99,86
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	807.534.900,00	784.680.250,00	-	-	-	-	-	-	807.534.900,00	784.680.250,00	97,17
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	173.292.250,00	157.049.370,00	-	-	-	-	-	-	173.292.250,00	157.049.370,00	90,63
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	218.295.000,00	217.371.982,00	-	-	-	-	-	-	218.295.000,00	217.371.982,00	99,58
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	360.784.493,00	342.220.409,00	-	-	-	-	-	-	360.784.493,00	342.220.409,00	94,85
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	506.909.000,00	495.270.550,00	-	-	-	-	-	-	506.909.000,00	495.270.550,00	97,70
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	1.543.760.806,00	1.285.697.034,00	47.508.000,00	46.019.640,00	-	-	-	-	1.591.268.806,00	1.331.716.674,00	83,69
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	148.395.050,00	146.283.569,00	-	-	-	-	-	-	148.395.050,00	146.283.569,00	98,58
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	2.572.710.125,00	2.427.947.491,00	-	-	-	-	-	-	2.572.710.125,00	2.427.947.491,00	94,37
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	103.004.000,00	32.460.400,00	-	-	-	-	-	-	103.004.000,00	32.460.400,00	31,51
			Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	-	-	-	-	-	-	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	84,33
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	104.525.750,00	96.066.259,00	-	-	-	-	-	-	104.525.750,00	96.066.259,00	91,91
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	135.140.000,00	111.657.182,00	-	-	-	-	-	-	135.140.000,00	111.657.182,00	82,62
			Program Pengembangan UMKM;	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	-	-	-	-	-	-	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	96,77
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	116.512.500,00	56.312.780,00	-	-	-	-	-	-	116.512.500,00	56.312.780,00	48,33
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	11.481.689.207,00	11.141.342.420,00	1.989.675.040,00	1.883.710.000,00	-	-	-	-	13.471.364.247,00	13.025.052.420,00	96,69
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	27.517.000,00	14.735.000,00	-	-	-	-	-	-	27.517.000,00	14.735.000,00	53,55
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	27.517.000,00	14.735.000,00	-	-	-	-	-	-	27.517.000,00	14.735.000,00	53,55

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	431.274.000,00	301.272.317,00	-	-	-	-	-	-	431.274.000,00	301.272.317,00	69,86
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	395.609.000,00	285.272.181,00	-	-	-	-	-	-	395.609.000,00	285.272.181,00	72,11
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	354.658.500,00	269.132.427,00	-	-	-	-	-	-	354.658.500,00	269.132.427,00	75,88
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	206.928.959,00	199.306.730,00	-	-	-	-	-	-	206.928.959,00	199.306.730,00	96,32
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	64.473.300,00	31.356.570,00	-	-	-	-	-	-	64.473.300,00	31.356.570,00	48,63
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	47.268.000,00	43.181.124,00	-	-	-	-	-	-	47.268.000,00	43.181.124,00	91,35
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	855.466.950,00	834.839.432,00	27.100.000,00	26.516.790,00	-	-	-	-	882.566.950,00	861.356.222,00	97,60
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	247.357.000,00	244.392.880,00	-	-	-	-	-	-	247.357.000,00	244.392.880,00	98,80
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	150.131.000,00	125.735.428,00	621.112.450,00	565.440.250,00	-	-	-	-	771.243.450,00	691.175.678,00	89,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	62.326.000,00	47.677.200,00	-	-	-	-	-	-	62.326.000,00	47.677.200,00	76,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	70.186.505,00	48.472.966,00	-	-	-	-	-	-	70.186.505,00	48.472.966,00	69,06
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	103.101.230,33	98.611.385,00	54.312.300,00	47.100.000,00	-	-	-	-	157.413.530,33	145.711.385,00	92,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	83.637.189,50	74.833.000,00	-	-	-	-	-	-	83.637.189,50	74.833.000,00	89,47
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	-	-	-	-	-	-	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	77,97
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	-	-	-	-	-	-	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	88,22
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	-	-	-	-	-	-	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	86,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	86.274.000,00	84.553.900,00	-	-	-	-	-	-	86.274.000,00	84.553.900,00	98,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	77.892.000,00	23.948.200,00	-	-	-	-	-	-	77.892.000,00	23.948.200,00	30,75
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	124.110.500,00	96.151.500,00	-	-	-	-	-	-	124.110.500,00	96.151.500,00	77,47
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	329.405.625,00	325.749.236,00	147.885.900,00	140.701.150,00	-	-	-	-	477.291.525,00	466.450.386,00	97,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	522.055.030,50	506.683.312,00	3.041.190.821,00	2.921.364.875,00	-	-	-	-	3.563.245.851,50	3.428.048.187,00	96,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	457.183.657,00	396.305.150,00	120.706.173,00	117.700.000,00	-	-	-	-	577.889.830,00	514.005.150,00	88,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	354.720.000,00	354.578.400,00	69.469.000,00	69.082.000,00	-	-	-	-	424.189.000,00	423.660.400,00	99,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	-	-	24.628.680,00	22.115.000,00	-	-	-	-	24.628.680,00	22.115.000,00	89,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	523.895.600,00	423.930.818,00	-	-	-	-	-	-	523.895.600,00	423.930.818,00	80,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	1.556.032.018,00	995.024.867,00	-	-	-	-	-	-	1.556.032.018,00	995.024.867,00	63,95

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	2.557.569.349,00	2.195.571.818,00	-	-	-	-	-	-	2.557.569.349,00	2.195.571.818,00	85,85
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	146.350.000,00	135.896.055,00	49.987.400,00	49.902.350,00	-	-	-	-	196.337.400,00	185.798.405,00	94,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	766.393.200,00	582.189.156,00	-	-	-	-	-	-	766.393.200,00	582.189.156,00	75,96
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	358.401.500,00	234.001.186,00	7.407.520,00	7.407.520,00	-	-	-	-	365.809.020,00	241.408.706,00	65,99
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	47.417.000,00	23.494.300,00	-	-	-	-	-	-	47.417.000,00	23.494.300,00	49,55
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	1.513.169.050,00	1.291.347.356,00	200.000.000,00	198.493.000,00	-	-	-	-	1.713.169.050,00	1.489.840.356,00	86,96
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	8.287.278.791,00	8.131.639.296,00	-	-	-	-	-	-	8.287.278.791,00	8.131.639.296,00	98,12
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	82.999.500,00	82.993.529,00	-	-	-	-	-	-	82.999.500,00	82.993.529,00	99,99
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	9.545.964.376,00	7.637.669.710,00	-	-	-	-	-	-	9.545.964.376,00	7.637.669.710,00	80,01
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.984.947.750,00	2.974.209.557,00	-	-	-	-	-	-	3.984.947.750,00	2.974.209.557,00	74,64
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	17.565.000,00	15.199.000,00	-	-	-	-	-	-	17.565.000,00	15.199.000,00	86,53
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.576.508.540,00	3.248.237.967,00	37.800.000,00	35.115.000,00	-	-	-	-	3.614.308.540,00	3.283.352.967,00	90,84
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	2.771.673.142,00	2.763.446.753,00	9.945.600,00	9.920.000,00	-	-	-	-	2.781.618.742,00	2.773.366.753,00	99,70
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	-	-	-	-	-	-	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	67,89
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	-	-	-	-	-	-	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	90,33
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	950.073.362,50	827.327.532,00	435.334.492,00	343.516.350,00	-	-	-	-	1.385.407.854,50	1.170.843.882,00	84,51
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	69.851.000,00	15.674.500,00	-	-	-	-	-	-	69.851.000,00	15.674.500,00	22,44
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	35.667.000,00	6.842.500,00	-	-	-	-	-	-	35.667.000,00	6.842.500,00	19,18
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	245.431.378,00	161.666.700,00	-	-	-	-	-	-	245.431.378,00	161.666.700,00	65,87
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	1.190.081.000,00	843.468.510,00	-	-	-	-	-	-	1.190.081.000,00	843.468.510,00	70,87
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	395.431.400,00	392.654.897,00	-	-	-	-	-	-	395.431.400,00	392.654.897,00	99,30
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	24.491.000,00	8.102.300,00	-	-	-	-	-	-	24.491.000,00	8.102.300,00	33,08
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	835.894.000,00	596.662.550,00	-	-	-	-	-	-	835.894.000,00	596.662.550,00	71,38
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	198.404.040,00	118.998.800,00	-	-	-	-	-	-	198.404.040,00	118.998.800,00	59,98
3	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	(2) Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi melalui Peningkatan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	431.670.500,00	406.672.832,00	-	-	-	-	-	-	431.670.500,00	406.672.832,00	94,21
			Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	49.582.000,00	4.080.900,00	-	-	-	-	-	-	49.582.000,00	4.080.900,00	8,23
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	32.188.669.650,00	13.435.967.161,00	-	-	-	-	-	-	32.188.669.650,00	13.435.967.161,00	41,74

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	1.055.836.000,00	613.116.718,00	87.017.000,00	86.695.407,74	-	-	-	-	1.142.853.000,00	699.812.125,74	61,23
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.008.978.000,00	1.989.408.300,00	-	-	-	-	-	-	2.008.978.000,00	1.989.408.300,00	99,03
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	1.395.423.099,00	1.070.628.888,00	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	-	-	-	-	2.893.423.099,00	2.554.132.788,00	88,27
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	1.094.926.797,00	1.036.219.373,00	-	-	-	-	-	-	1.094.926.797,00	1.036.219.373,00	94,64
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	61.557.909.147,00	55.634.721.194,00	825.959.857,00	806.342.437,00	-	-	-	-	62.383.869.004,00	56.441.063.631,00	90,47
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	304.180.000,00	290.206.000,00	-	-	-	-	-	-	304.180.000,00	290.206.000,00	95,41
			Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	655.175.000,00	605.150.961,00	-	-	-	-	-	-	655.175.000,00	605.150.961,00	92,36
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	31.141.500,00	28.339.600,00	-	-	-	-	-	-	31.141.500,00	28.339.600,00	91,00
			Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	547.389.700,00	384.067.766,00	-	-	-	-	-	-	547.389.700,00	384.067.766,00	70,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	104.673.000,00	80.584.900,00	-	-	-	-	-	-	104.673.000,00	80.584.900,00	76,99
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	51.105.000,00	50.997.310,00	-	-	-	-	-	-	51.105.000,00	50.997.310,00	99,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	-	-	-	-	-	-	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	79,74
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	119.668.000,00	84.048.828,00	-	-	-	-	-	-	119.668.000,00	84.048.828,00	70,24
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	575.825.315,00	525.351.681,00	101.980.000,00	92.161.000,00	-	-	-	-	677.805.315,00	617.512.681,00	91,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	680.000,00	-	79.920.000,00	79.920.000,00	-	-	-	-	80.600.000,00	79.920.000,00	99,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.240.305.820,00	1.088.008.472,00	-	-	-	-	-	-	1.240.305.820,00	1.088.008.472,00	87,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.144.955.238,00	1.114.578.312,00	-	-	-	-	-	-	1.144.955.238,00	1.114.578.312,00	97,35
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	247.133.443.625,60	226.745.316.997,38	18.169.910.408,00	9.900.787.973,00	-	-	-	-	265.303.354.033,60	236.646.104.970,38	89,20
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	-	-	-	-	-	-	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	88,53
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	-	-	-	-	-	-	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	92,43
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(3) Meningkatkan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Konektivitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	-	-	-	-	-	-	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	92,46

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	77.472.047.863,00	69.789.179.190,00	19.461.187.100,00	18.478.914.350,00	-	-	-	-	96.933.234.963,00	88.268.093.540,00	91,06
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	18.761.306.700,00	18.516.311.614,00	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	-	-	-	-	19.926.238.650,00	19.681.243.564,00	98,77
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.141.172.200,00	1.040.668.200,00	25.439.509.210,00	23.703.670.300,00	-	-	-	-	26.580.681.410,00	24.744.338.500,00	93,09
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	16.479.516.000,00	14.278.754.450,00	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	-	-	-	-	18.206.988.000,00	15.935.638.450,00	87,52
			Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	45.507.000,00	44.800.989,00	-	-	-	-	-	-	45.507.000,00	44.800.989,00	98,45
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	821.121.053,60	774.107.202,00	160.950.000,00	159.726.000,00	-	-	-	-	982.071.053,60	933.833.202,00	95,09
			Program Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	48.020.000,00	47.163.218,00	-	-	-	-	-	-	48.020.000,00	47.163.218,00	98,22
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	30.574.025.075,00	27.424.533.386,00	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	-	-	-	-	32.797.227.125,00	29.358.998.136,00	89,52
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	857.570.350,00	802.584.650,00	-	-	-	-	-	-	857.570.350,00	802.584.650,00	93,59
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	-
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	50.000.000,00	1.520.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	1.520.000,00	3,04
			Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	385.000.000,00	301.900.000,00	6.113.866.250,00	5.899.915.250,00	-	-	-	-	6.498.866.250,00	6.201.815.250,00	95,43
			Program Pengembangan Perumahan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	31.949.750,00	15.600.000,00	-	-	-	-	-	-	31.949.750,00	15.600.000,00	48,83
			Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	74.092.000,00	74.092.000,00	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	-	-	-	-	4.875.172.800,00	4.554.270.800,00	93,42
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	904.994.174,00	748.108.292,00	142.857.000,00	141.852.450,00	-	-	-	-	1.047.851.174,00	889.960.742,00	84,93
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	3.454.965.958,00	3.365.842.000,00	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	-	-	-	-	70.645.251.607,00	68.931.565.400,00	97,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	85.360.479,80	46.985.908,00	-	-	-	-	-	-	85.360.479,80	46.985.908,00	55,04
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	96.373.250,00	30.250.000,00	-	-	-	-	-	-	96.373.250,00	30.250.000,00	31,39
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	65.389.500,00	52.344.957,00	-	-	-	-	-	-	65.389.500,00	52.344.957,00	80,05
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	-	-	-	-	-	-	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	94,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	-	-	-	-	-	-	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	84,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	175.484.000,00	106.690.000,00	-	-	-	-	-	-	175.484.000,00	106.690.000,00	60,80

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	150.000.000,00	134.843.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	134.843.000,00	89,90
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	478.813.101,49	422.911.756,00	1.397.213.468,00	1.392.819.200,00	-	-	-	-	1.876.026.569,49	1.815.730.956,00	96,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.060.436.900,00	834.635.114,00	280.000.000,00	272.533.305,00	-	-	-	-	1.340.436.900,00	1.107.168.419,00	82,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.494.665,00	1.400.000,00	306.903.200,00	305.852.030,00	-	-	-	-	308.397.865,00	307.252.030,00	99,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.448.332.800,00	1.441.850.976,00	819.290.000,00	815.012.000,00	-	-	-	-	2.267.622.800,00	2.256.862.976,00	99,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	17.799.557.346,00	11.595.333.585,00	-	-	-	-	-	-	17.799.557.346,00	11.595.333.585,00	65,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.434.836.200,00	1.086.244.502,00	-	-	-	-	-	-	1.434.836.200,00	1.086.244.502,00	75,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.894.338.620,00	1.754.931.269,00	-	-	-	-	-	-	1.894.338.620,00	1.754.931.269,00	92,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	906.155.320,00	418.983.345,00	2.777.440.000,00	2.777.103.450,00	-	-	-	-	3.683.595.320,00	3.196.086.795,00	86,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	98.614.614,00	89.646.860,00	-	-	-	-	-	-	98.614.614,00	89.646.860,00	90,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	92.295.000,00	86.013.155,00	-	-	-	-	-	-	92.295.000,00	86.013.155,00	93,19
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	55.672.247.595,82	41.266.512.437,99	438.820.591.664,89	375.685.877.543,80	-	-	-	-	494.492.839.260,71	416.952.389.981,79	84,32
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	11.782.455.700,00	9.355.138.371,00	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	-	-	-	-	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	89,44
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	881.212.000,00	419.125.584,00	1.265.533.200,00	1.247.020.065,00	-	-	-	-	2.146.745.200,00	1.666.145.649,00	77,61
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	3.724.050,00	3.628.000,00	2.689.350,00	2.400.000,00	-	-	-	-	6.413.400,00	6.028.000,00	93,99
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	272.570.161,00	253.487.456,00	-	-	-	-	-	-	272.570.161,00	253.487.456,00	93,00
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	951.952.701,00	921.233.471,00	95.460.000,00	84.839.520,00	-	-	-	-	1.047.412.701,00	1.006.072.991,00	96,05
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	161.308.720,00	141.608.186,00	3.442.378,00	-	-	-	-	-	164.751.098,00	141.608.186,00	85,95
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	39.440.000,00	25.260.000,00	-	-	-	-	-	-	39.440.000,00	25.260.000,00	64,05
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	3.335.167.650,00	3.152.436.250,00	-	-	-	-	-	-	3.335.167.650,00	3.152.436.250,00	94,52
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	971.728.000,00	868.902.100,00	-	-	-	-	-	-	971.728.000,00	868.902.100,00	89,42
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.581.172.000,00	1.445.290.126,00	-	-	-	-	-	-	1.581.172.000,00	1.445.290.126,00	91,41
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	54.760.000,00	11.274.000,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	-	-	-	-	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	92,27
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	-	-	-	-	-	-	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	99,50
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	24.476.000,00	10.483.800,00	-	-	-	-	-	-	24.476.000,00	10.483.800,00	42,83
5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	(4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	127.423.000,00	103.394.558,00	-	-	-	-	-	-	127.423.000,00	103.394.558,00	81,14

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	84.114.000,00	52.108.704,00	-	-	-	-	-	-	84.114.000,00	52.108.704,00	61,95
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	102.637.550,00	74.476.270,00	-	-	-	-	-	-	102.637.550,00	74.476.270,00	72,56
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.261.673.750,00	1.072.245.939,00	257.857.071,00	249.622.350,00	-	-	-	-	1.519.530.821,00	1.321.868.289,00	86,99
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.924.514.700,00	1.556.857.936,00	-	-	-	-	-	-	1.924.514.700,00	1.556.857.936,00	80,90
			Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	471.821.500,00	329.810.717,00	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	-	-	-	-	8.228.997.500,00	4.184.224.517,00	50,85
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	1.658.512.000,00	1.187.594.284,00	1.949.433.250,00	1.917.984.950,00	-	-	-	-	3.607.945.250,00	3.105.579.234,00	86,08
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	7.116.299.603,00	6.888.738.556,00	6.052.315.125,00	5.631.380.707,34	-	-	-	-	13.168.614.728,00	12.520.119.263,34	95,08
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	904.994.174,00	748.108.292,00	142.857.000,00	141.852.450,00	-	-	-	-	1.047.851.174,00	889.960.742,00	84,93
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	12.842.000,00	10.592.100,00	-	-	-	-	-	-	12.842.000,00	10.592.100,00	82,48
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	49.711.000,00	32.603.811,00	-	-	-	-	-	-	49.711.000,00	32.603.811,00	65,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	129.806.214,00	96.271.796,00	-	-	-	-	-	-	129.806.214,00	96.271.796,00	74,17
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	63.682.762,00	11.485.500,00	-	-	-	-	-	-	63.682.762,00	11.485.500,00	18,04
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	-	-	-	-	-	-	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	82,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	-	-	-	-	-	-	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	86,04
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	195.739.000,00	151.775.846,00	-	-	-	-	-	-	195.739.000,00	151.775.846,00	77,54
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	38.256.000,00	36.983.200,00	-	-	-	-	-	-	38.256.000,00	36.983.200,00	96,67
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	573.153.177,50	502.971.418,00	313.548.774,80	312.516.060,00	-	-	-	-	886.701.952,30	815.487.478,00	91,97
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	492.292.674,00	338.157.139,00	489.385.900,00	457.717.210,00	-	-	-	-	981.678.574,00	795.874.349,00	81,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.360.000,00	1.360.000,00	245.589.004,00	243.868.040,00	-	-	-	-	246.949.004,00	245.228.040,00	99,30
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	-	-	60.000.000,00	48.536.970,00	-	-	-	-	60.000.000,00	48.536.970,00	80,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	2.701.488.390,00	1.793.234.607,00	-	-	-	-	-	-	2.701.488.390,00	1.793.234.607,00	66,38
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	25.605.893.152,00	23.261.237.697,00	-	-	-	-	-	-	25.605.893.152,00	23.261.237.697,00	90,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.994.122.000,00	1.930.719.030,00	-	-	-	-	-	-	1.994.122.000,00	1.930.719.030,00	96,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	701.341.865,00	550.547.969,00	-	-	-	-	-	-	701.341.865,00	550.547.969,00	78,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	185.375.000,00	184.953.100,00	-	-	-	-	-	-	185.375.000,00	184.953.100,00	99,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	99.116.950,00	92.655.113,00	-	-	-	-	-	-	99.116.950,00	92.655.113,00	93,48
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	397.795.000,00	389.145.879,00	-	-	-	-	-	-	397.795.000,00	389.145.879,00	97,83

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemuda, pemuda dan penyandang disabilitas	(5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	165.655.000,00	110.002.091,00	-	-	-	-	-	-	165.655.000,00	110.002.091,00	66,40
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	11.388.000,00	9.605.000,00	-	-	-	-	-	-	11.388.000,00	9.605.000,00	84,34
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	-	-	-	-	-	-	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	87,19
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	286.397.500,00	278.225.521,00	-	-	-	-	-	-	286.397.500,00	278.225.521,00	97,15
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	-	-	-	-	-	-	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	97,50
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	156.038.586,00	153.717.042,00	-	-	-	-	-	-	156.038.586,00	153.717.042,00	98,51
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	71.504.000,00	68.667.742,00	-	-	-	-	-	-	71.504.000,00	68.667.742,00	96,03
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	39.240.000,00	39.113.547,00	-	-	-	-	-	-	39.240.000,00	39.113.547,00	99,68
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	41.539.000,00	41.505.155,00	-	-	-	-	-	-	41.539.000,00	41.505.155,00	99,92
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	114.488.040,00	104.311.969,00	-	-	-	-	-	-	114.488.040,00	104.311.969,00	91,11
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	23.421.000,00	8.360.000,00	-	-	-	-	-	-	23.421.000,00	8.360.000,00	35,69
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	381.819.890,00	243.381.606,00	-	-	-	-	-	-	381.819.890,00	243.381.606,00	63,74
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	220.562.054,00	189.903.261,00	181.263.460,00	180.754.570,00	-	-	-	-	401.825.514,00	370.657.831,00	92,24
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	1.545.841.660,00	1.350.129.786,00	84.292.051,00	63.758.400,00	-	-	-	-	1.630.133.711,00	1.413.888.186,00	86,73
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	343.150.000,00	342.635.650,00	-	-	-	-	-	-	343.150.000,00	342.635.650,00	99,85
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	128.060.450,00	122.254.977,00	-	-	-	-	-	-	128.060.450,00	122.254.977,00	95,47
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	206.948.461,00	204.939.036,00	-	-	-	-	-	-	206.948.461,00	204.939.036,00	99,03
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	14.863.324.200,00	14.677.982.999,00	39.313.774.334,00	37.208.922.129,00	-	-	-	-	54.177.098.534,00	51.886.905.128,00	95,77
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan un	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	61.557.909.147,00	55.634.721.194,00	825.959.857,00	806.342.437,00	-	-	-	-	62.383.869.004,00	56.441.063.631,00	90,47
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informasi	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	132.970.000,00	126.693.460,00	-	-	-	-	-	-	132.970.000,00	126.693.460,00	95,28
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kela	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	211.194.000,00	136.431.578,00	-	-	-	-	-	-	211.194.000,00	136.431.578,00	64,60
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan I	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	40.987.545,00	35.035.642,00	-	-	-	-	-	-	40.987.545,00	35.035.642,00	85,48
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah K	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig	2.07.0.00.5.06.10.0000	152.769.925,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	152.769.925,00	1.800.000,00	1,18

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig	2.07.0.00.5.06.10.0000	311.387.900,00	186.033.602,00	-	-	-	-	-	-	311.387.900,00	186.033.602,00	59,74
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna I	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig	2.07.0.00.5.06.10.0000	47.428.000,00	45.754.111,00	-	-	-	-	-	-	47.428.000,00	45.754.111,00	96,47
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	116.743.625,00	114.317.925,00	-	-	-	-	-	-	116.743.625,00	114.317.925,00	97,92
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	485.675.300,00	465.949.722,00	-	-	-	-	-	-	485.675.300,00	465.949.722,00	95,94
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keaman	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	163.727.019,00	136.593.249,00	-	-	-	-	-	-	163.727.019,00	136.593.249,00	83,43
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan P	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	-	-	-	-	-	-	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	99,96
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	63.687.903.886,00	62.881.738.645,00	50.857.919.444,00	49.451.692.070,50	-	-	-	-	114.545.823.330,00	112.333.430.715,50	98,07
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	40.810.172.047,00	39.166.165.521,00	25.646.055.843,00	25.215.912.721,00	-	-	-	-	66.456.227.890,00	64.382.078.242,00	96,88
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	19.277.152.500,00	19.113.735.222,92	1.053.440.000,00	1.052.288.092,08	-	-	-	-	20.330.592.500,00	20.166.023.315,00	99,19
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.783.493.000,00	1.756.857.766,00	31.363.900,00	30.660.420,00	-	-	-	-	1.814.856.900,00	1.787.518.186,00	98,49
			Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	185.466.000,00	182.512.000,00	229.885.000,00	229.560.000,00	-	-	-	-	415.351.000,00	412.072.000,00	99,21
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	99.387.200,00	61.180.378,00	-	-	-	-	-	-	99.387.200,00	61.180.378,00	61,56
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	19.305.229.023,00	17.873.999.983,00	24.974.440.500,00	19.348.928.500,00	-	-	-	-	44.279.669.523,00	37.222.928.483,00	84,06
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	19.305.229.023,00	17.873.999.983,00	24.974.440.500,00	19.348.928.500,00	-	-	-	-	44.279.669.523,00	37.222.928.483,00	84,06
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	11.117.181.250,00	9.394.894.192,00	55.470.000,00	-	-	-	-	-	11.172.651.250,00	9.394.894.192,00	84,09
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	28.586.098.300,00	27.048.384.929,00	-	-	-	-	-	-	28.586.098.300,00	27.048.384.929,00	94,62
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	1.397.829.839,00	1.331.168.993,00	-	-	-	-	-	-	1.397.829.839,00	1.331.168.993,00	95,23
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	667.150.500,00	498.619.006,00	-	-	-	-	-	-	667.150.500,00	498.619.006,00	74,74
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	237.526.000,00	179.928.918,00	-	-	-	-	-	-	237.526.000,00	179.928.918,00	75,75
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	-	-	-	-	-	-	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	96,82
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	171.004.000,00	166.880.400,00	-	-	-	-	-	-	171.004.000,00	166.880.400,00	97,59
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.833.138.825,00	4.746.902.333,00	199.100.000,00	197.932.425,00	-	-	-	-	5.032.238.825,00	4.944.834.758,00	98,26
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	123.364.900,00	119.108.224,00	-	-	-	-	-	-	123.364.900,00	119.108.224,00	96,55
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	-	-	-	-	-	-	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	99,19
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	1.107.555.000,00	1.095.099.272,00	200.000.000,00	199.395.000,00	-	-	-	-	1.307.555.000,00	1.294.494.272,00	99,00

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	734.681.692,00	488.346.321,00	-	-	-	-	-	-	734.681.692,00	488.346.321,00	66,47
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	194.217.000,00	158.460.900,00	1.540.000,00	-	-	-	-	-	195.757.000,00	158.460.900,00	80,95
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	1.221.258.700,00	1.188.123.414,00	-	-	-	-	-	-	1.221.258.700,00	1.188.123.414,00	97,29
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	19.980.000,00	19.577.358,00	-	-	-	-	-	-	19.980.000,00	19.577.358,00	97,98
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	252.755.000,00	101.592.980,00	-	-	-	-	-	-	252.755.000,00	101.592.980,00	40,19
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	993.743.000,00	744.935.233,00	-	-	-	-	-	-	993.743.000,00	744.935.233,00	74,96
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.021.742.513,00	818.876.296,00	37.947.737,00	37.257.150,00	-	-	-	-	1.059.690.250,00	856.133.446,00	80,79
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	343.355.140,00	292.443.515,00	-	-	-	-	-	-	343.355.140,00	292.443.515,00	85,17
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	-	-	-	-	-	-	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	99,19
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	123.749.850,00	112.497.850,00	-	-	-	-	-	-	123.749.850,00	112.497.850,00	90,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	169.255.510,00	127.053.949,00	-	-	-	-	-	-	169.255.510,00	127.053.949,00	75,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	11.592.000,00	-	-	-	-	-	-	-	11.592.000,00	-	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	-	-	-	-	-	-	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	91,56
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	-	-	-	-	-	-	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	96,17
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	-	-	-	-	-	-	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	90,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	97.385.000,00	78.796.900,00	-	-	-	-	-	-	97.385.000,00	78.796.900,00	80,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	100.355.000,00	85.700.000,00	-	-	-	-	-	-	100.355.000,00	85.700.000,00	85,40
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	46.575.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-	-	-	46.575.000,00	19.200.000,00	41,22
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	600.080.140,00	588.815.222,00	514.564.900,00	514.048.660,00	-	-	-	-	1.114.645.040,00	1.102.863.882,00	98,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	556.068.902,00	466.812.569,00	116.792.000,00	114.799.998,00	-	-	-	-	672.860.902,00	581.612.567,00	86,44
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	455.756.251,00	432.156.175,00	119.097.726,00	116.991.557,00	-	-	-	-	574.853.977,00	549.147.732,00	95,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	184.023.082,20	168.372.103,00	49.405.656,00	49.284.000,00	-	-	-	-	233.428.738,20	217.656.103,00	93,24
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	723.600.000,00	685.391.998,00	453.058.200,00	392.679.000,00	-	-	-	-	1.176.658.200,00	1.078.070.998,00	91,62

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	2.909.060,00	2.180.000,00	57.770.940,00	54.556.500,00	-	-	-	-	60.680.000,00	56.736.500,00	93,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	680.000,00	680.000,00	30.059.332,80	30.058.800,00	-	-	-	-	30.739.332,80	30.738.800,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	8.436.842.400,00	5.036.945.005,00	-	-	-	-	-	-	8.436.842.400,00	5.036.945.005,00	59,70
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	30.510.206.934,00	22.216.816.587,00	-	-	-	-	-	-	30.510.206.934,00	22.216.816.587,00	72,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	270.273.203,00	229.615.234,00	-	-	-	-	-	-	270.273.203,00	229.615.234,00	84,96
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.405.894.600,00	1.145.356.700,00	1.500.000.000,00	926.679.000,00	-	-	-	-	2.905.894.600,00	2.072.035.700,00	71,30
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.181.740.000,00	922.547.894,00	-	-	-	-	-	-	1.181.740.000,00	922.547.894,00	78,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	212.824.800,00	196.617.513,00	-	-	-	-	-	-	212.824.800,00	196.617.513,00	92,38
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	15.000.000,00	14.441.750,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	14.441.750,00	96,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	90.970.000,00	88.897.935,00	-	-	-	-	-	-	90.970.000,00	88.897.935,00	97,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	247.133.443.625,60	226.745.316.997,38	18.169.910.408,00	9.900.787.973,00	-	-	-	-	265.303.354.033,60	236.646.104.970,38	89,20
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	316.685.000,00	274.133.450,00	-	-	-	-	-	-	316.685.000,00	274.133.450,00	86,56
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	10.934.340,00	5.894.340,00	-	-	-	-	-	-	10.934.340,00	5.894.340,00	53,91
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	8.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.550.000,00	-	-
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	364.317.050,00	138.730.545,00	-	-	-	-	-	-	364.317.050,00	138.730.545,00	38,08
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	625.983.000,00	496.807.023,00	-	-	-	-	-	-	625.983.000,00	496.807.023,00	79,36
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	156.824.400,00	140.250.686,00	-	-	-	-	-	-	156.824.400,00	140.250.686,00	89,43
			Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	40.552.000,00	40.167.859,00	-	-	-	-	-	-	40.552.000,00	40.167.859,00	99,05
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	130.415.000,00	112.151.206,00	-	-	-	-	-	-	130.415.000,00	112.151.206,00	86,00
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	104.930.800,00	73.806.760,00	-	-	-	-	-	-	104.930.800,00	73.806.760,00	70,34
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	36.296.000,00	35.280.716,00	-	-	-	-	-	-	36.296.000,00	35.280.716,00	97,20
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	52.524.996,00	44.591.403,00	-	-	-	-	-	-	52.524.996,00	44.591.403,00	84,90
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	(6) Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Inovatif dan Melayani	Program Administrasi Pemerintahan Desa;	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	-	-	-	-	-	-	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	91,22

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	2.030.026.525,00	485.536.387,00	-	-	-	-	-	-	2.030.026.525,00	485.536.387,00	23,92
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.260.530.713,00	2.147.239.383,00	-	-	-	-	-	-	4.260.530.713,00	2.147.239.383,00	50,40
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pen	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	-	-	-	-	-	-	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	99,20
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	3.585.007.300,00	3.245.556.538,00	-	-	-	-	-	-	3.585.007.300,00	3.245.556.538,00	90,53
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	6.284.876.169,19	1.126.474.775,00	-	-	-	-	-	-	6.284.876.169,19	1.126.474.775,00	17,92
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	-	-	-	-	-	-	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	95,43
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	10.301.932.600,00	8.571.492.323,00	-	-	-	-	-	-	10.301.932.600,00	8.571.492.323,00	83,20
			Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	408.449.800,00	404.152.638,00	-	-	-	-	-	-	408.449.800,00	404.152.638,00	98,95
			Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	548.275.050,00	349.395.663,00	-	-	-	-	-	-	548.275.050,00	349.395.663,00	63,73
			Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.280.373.975,00	4.383.643.004,00	-	-	-	-	-	-	5.280.373.975,00	4.383.643.004,00	83,02
			Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	287.811.350,00	268.177.331,00	-	-	-	-	-	-	287.811.350,00	268.177.331,00	93,18
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	533.470.500,00	457.891.111,00	-	-	-	-	-	-	533.470.500,00	457.891.111,00	85,83
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	230.235.000,00	196.409.737,00	-	-	-	-	-	-	230.235.000,00	196.409.737,00	85,31
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	1.421.881.320,00	1.279.339.420,00	-	-	-	-	-	-	1.421.881.320,00	1.279.339.420,00	89,98
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	12.455.430,00	11.840.000,00	-	-	-	-	-	-	12.455.430,00	11.840.000,00	95,06
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	6.390.000,00	6.390.000,00	-	-	-	-	-	-	6.390.000,00	6.390.000,00	100,00
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.325.000,00	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-	5.325.000,00	1.425.000,00	26,76
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.650.000,00	7.475.000,00	-	-	-	-	-	-	7.650.000,00	7.475.000,00	97,71
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.206.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.206.000,00	3.500.000,00	48,57
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	4.500.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	4.200.000,00	93,33
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	10.850.000,00	10.730.000,00	-	-	-	-	-	-	10.850.000,00	10.730.000,00	98,89
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	8.400.000,00	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	5.250.000,00	62,50
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	6.880.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.880.000,00	6.000.000,00	87,21
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	15.240.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	15.240.000,00	13.500.000,00	88,58
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	-	-	-	-	-	-	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	95,72
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	-	-	-	-	-	-	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	87,63

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Babat	7.01.0.00.0.00.31.0000	647.076.672,00	249.531.410,00	-	-	-	-	-	-	647.076.672,00	249.531.410,00	38,56
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mangun Jaya	7.01.0.00.0.00.31.0000	673.945.648,38	249.539.239,00	-	-	-	-	-	-	673.945.648,38	249.539.239,00	37,03
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	691.732.971,00	671.201.985,00	7.281.600,00	7.261.600,00	-	-	-	-	699.014.571,00	678.463.585,00	97,06
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bayung Lencir Indah	7.01.0.00.0.00.38.0000	696.112.426,00	684.177.963,00	8.158.500,00	8.158.500,00	-	-	-	-	704.270.926,00	692.336.463,00	98,31
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	691.855.452,00	670.228.765,00	-	-	-	-	-	-	691.855.452,00	670.228.765,00	96,87
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Ngulak I	7.01.0.00.0.00.33.0000	676.823.459,00	675.661.605,00	30.747.000,00	30.525.000,00	-	-	-	-	707.570.459,00	706.186.605,00	99,80
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Ngulak I	7.01.0.00.0.00.33.0000	706.340.069,00	676.341.870,00	1.665.000,00	1.665.000,00	-	-	-	-	708.005.069,00	678.006.870,00	95,76
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Serasan Jaya	7.01.0.00.0.00.29.0000	504.014.061,00	493.169.765,00	-	-	-	-	-	-	504.014.061,00	493.169.765,00	97,85
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Soak Baru	7.01.0.00.0.00.29.0000	598.043.864,98	574.841.628,00	-	-	-	-	-	-	598.043.864,98	574.841.628,00	96,12
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Balai Agung	7.01.0.00.0.00.29.0000	194.186.167,00	175.300.548,00	352.077.920,00	341.583.640,00	-	-	-	-	546.264.087,00	516.884.188,00	94,62
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kayuara	7.01.0.00.0.00.29.0000	587.345.874,00	413.175.061,00	-	-	-	-	-	-	587.345.874,00	413.175.061,00	70,35
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	700.000.000,00	626.366.340,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	626.366.340,00	89,48
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	7.01.0.00.0.00.37.0000	700.000.000,00	617.561.052,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	617.561.052,00	88,22
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	66.780.000,00	56.872.000,00	-	-	-	-	-	-	66.780.000,00	56.872.000,00	85,16
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	11.475.000,00	11.475.000,00	-	-	-	-	-	-	11.475.000,00	11.475.000,00	100,00
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	4.470.000,00	4.350.000,00	-	-	-	-	-	-	4.470.000,00	4.350.000,00	97,32
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	18.923.499,00	18.671.615,00	-	-	-	-	-	-	18.923.499,00	18.671.615,00	98,67
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	11.840.000,00	8.200.000,00	-	-	-	-	-	-	11.840.000,00	8.200.000,00	69,26
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	6.700.000,00	4.940.000,00	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	4.940.000,00	73,73
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	11.340.000,00	6.705.000,00	-	-	-	-	-	-	11.340.000,00	6.705.000,00	59,13
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	12.982.500,00	12.885.000,00	-	-	-	-	-	-	12.982.500,00	12.885.000,00	99,25
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	13.630.000,00	13.020.000,00	-	-	-	-	-	-	13.630.000,00	13.020.000,00	95,52
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	44.240.000,00	42.490.000,00	-	-	-	-	-	-	44.240.000,00	42.490.000,00	96,04
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	13.770.000,00	11.250.000,00	-	-	-	-	-	-	13.770.000,00	11.250.000,00	81,70
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	13.760.000,00	5.700.000,00	-	-	-	-	-	-	13.760.000,00	5.700.000,00	41,42
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	14.160.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-	-	-	14.160.000,00	13.200.000,00	93,22
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	220.562.054,00	189.903.261,00	181.263.460,00	180.754.570,00	-	-	-	-	401.825.514,00	370.657.831,00	92,24
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	1.545.841.660,00	1.350.129.786,00	84.292.051,00	63.758.400,00	-	-	-	-	1.630.133.711,00	1.413.888.186,00	86,73
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.526.472.727,00	1.183.731.083,00	-	-	-	-	-	-	1.526.472.727,00	1.183.731.083,00	77,55
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	21.036.689.941,00	20.086.001.197,00	-	-	-	-	-	-	21.036.689.941,00	20.086.001.197,00	95,48
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	846.127.567,00	599.415.085,00	-	-	-	-	-	-	846.127.567,00	599.415.085,00	70,84
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	361.198.000,00	248.071.482,00	-	-	-	-	-	-	361.198.000,00	248.071.482,00	68,68

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	22.851.537,00	21.701.300,00	-	-	-	-	-	-	22.851.537,00	21.701.300,00	94,97
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	511.732.000,00	502.151.586,00	-	-	-	-	-	-	511.732.000,00	502.151.586,00	98,13
			Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	163.297.000,00	160.152.813,00	-	-	-	-	-	-	163.297.000,00	160.152.813,00	98,07
			Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	91.844.402,00	89.753.986,00	-	-	-	-	-	-	91.844.402,00	89.753.986,00	97,72
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	593.931.000,00	569.398.502,00	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	-	-	-	-	4.948.931.000,00	4.709.365.502,00	95,16
			Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	325.986.500,00	263.928.227,00	-	-	-	-	-	-	325.986.500,00	263.928.227,00	80,96
			Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	126.715.419,00	100.310.645,00	-	-	-	-	-	-	126.715.419,00	100.310.645,00	79,16
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	248.207.228,00	166.810.842,00	-	-	-	-	-	-	248.207.228,00	166.810.842,00	67,21
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	104.145.212,00	76.287.936,00	656.121,00	-	-	-	-	-	104.801.333,00	76.287.936,00	72,79
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	234.627.839,85	192.228.577,00	-	-	-	-	-	-	234.627.839,85	192.228.577,00	81,93
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	171.427.898,00	138.409.082,00	-	-	-	-	-	-	171.427.898,00	138.409.082,00	80,74
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	11.802.830.159,50	10.773.664.959,00	154.330.381,80	-	-	-	-	-	11.957.160.541,30	10.773.664.959,00	90,10
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	115.265.432,00	83.046.174,00	52.978.025,00	27.875.763,00	-	-	-	-	168.243.457,00	110.921.937,00	65,93
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	255.558.161,00	216.784.212,00	-	-	-	-	-	-	255.558.161,00	216.784.212,00	84,83
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	1.130.733.500,00	957.115.959,00	-	-	-	-	-	-	1.130.733.500,00	957.115.959,00	84,65
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	59.802.000,00	58.420.074,00	-	-	-	-	-	-	59.802.000,00	58.420.074,00	97,69
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	344.803.345,00	332.137.884,00	-	-	-	-	-	-	344.803.345,00	332.137.884,00	96,33
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	1.573.873.426,00	1.242.564.428,00	2.912.466.255,00	2.816.824.720,00	-	-	-	-	4.486.339.681,00	4.059.389.148,00	90,48
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	198.522.651,00	85.337.125,00	-	-	-	-	-	-	198.522.651,00	85.337.125,00	42,99
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	527.541.432,00	311.835.404,00	-	-	-	-	-	-	527.541.432,00	311.835.404,00	59,11
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	7.871.117.559,50	7.199.820.149,00	332.898.870,70	229.580.007,00	-	-	-	-	8.204.016.430,20	7.429.400.156,00	90,56
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	94.778.104,00	60.989.533,00	-	-	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	################	################	550.189.185.862,55	531.178.467.809,00	96,54
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	811.825.000,00	710.036.237,00	-	-	-	-	-	-	811.825.000,00	710.036.237,00	87,46
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	1.510.199.950,00	1.423.401.393,00	-	-	-	-	-	-	1.510.199.950,00	1.423.401.393,00	94,25
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	614.622.650,00	506.521.411,00	-	-	-	-	-	-	614.622.650,00	506.521.411,00	82,41
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	220.420.650,00	148.148.575,00	-	-	-	-	-	-	220.420.650,00	148.148.575,00	67,21
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	4.523.330.000,00	3.033.522.551,00	32.573.900,00	24.907.901,00	-	-	-	-	4.555.903.900,00	3.058.430.452,00	67,13
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	51.919.700,00	51.825.575,00	-	-	-	-	-	-	51.919.700,00	51.825.575,00	99,82
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	97.640.900,00	77.942.710,00	-	-	-	-	-	-	97.640.900,00	77.942.710,00	79,83
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.021.742.513,00	818.876.296,00	37.947.737,00	37.257.150,00	-	-	-	-	1.059.690.250,00	856.133.446,00	80,79

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	565.769.460,00	475.319.600,00	-	-	-	-	-	-	565.769.460,00	475.319.600,00	84,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	32.676.000,00	11.128.000,00	-	-	-	-	-	-	32.676.000,00	11.128.000,00	34,06
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	50.672.000,00	40.110.800,00	-	-	-	-	-	-	50.672.000,00	40.110.800,00	79,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	51.667.127,72	46.377.400,00	-	-	-	-	-	-	51.667.127,72	46.377.400,00	89,76
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	88.580.500,00	56.213.580,00	-	-	-	-	-	-	88.580.500,00	56.213.580,00	63,46
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	49.885.566,00	24.261.342,00	-	-	-	-	-	-	49.885.566,00	24.261.342,00	48,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	72.897.378,00	56.959.380,00	-	-	-	-	-	-	72.897.378,00	56.959.380,00	78,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	90.723.800,00	59.645.480,00	-	-	-	-	-	-	90.723.800,00	59.645.480,00	65,74
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	67.421.500,00	40.727.600,00	-	-	-	-	-	-	67.421.500,00	40.727.600,00	60,41
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	123.204.300,00	99.459.212,00	-	-	-	-	-	-	123.204.300,00	99.459.212,00	80,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	65.389.500,00	52.344.957,00	-	-	-	-	-	-	65.389.500,00	52.344.957,00	80,05
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	75.587.500,00	50.464.386,00	-	-	-	-	-	-	75.587.500,00	50.464.386,00	66,76
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	51.105.000,00	50.997.310,00	-	-	-	-	-	-	51.105.000,00	50.997.310,00	99,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	69.557.150,00	54.840.000,00	-	-	-	-	-	-	69.557.150,00	54.840.000,00	78,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	51.412.000,00	25.662.610,00	-	-	-	-	-	-	51.412.000,00	25.662.610,00	49,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	261.584.630,00	161.014.111,00	-	-	-	-	-	-	261.584.630,00	161.014.111,00	61,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	64.983.227,50	57.789.226,00	-	-	-	-	-	-	64.983.227,50	57.789.226,00	88,93
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	103.101.230,33	98.611.385,00	54.312.300,00	47.100.000,00	-	-	-	-	157.413.530,33	145.711.385,00	92,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	84.785.000,00	77.110.900,00	-	-	-	-	-	-	84.785.000,00	77.110.900,00	90,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	90.771.300,00	69.786.878,00	-	-	-	-	-	-	90.771.300,00	69.786.878,00	76,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	15.358.974,00	5.718.000,00	-	-	-	-	-	-	15.358.974,00	5.718.000,00	37,23
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	17.499.940,05	17.464.335,00	-	-	-	-	-	-	17.499.940,05	17.464.335,00	99,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.156.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	7.156.000,00	75.000,00	1,05
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	17.858.000,00	16.877.000,00	-	-	-	-	-	-	17.858.000,00	16.877.000,00	94,51

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	12.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.475.000,00	-	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	21.565.200,00	14.729.600,00	-	-	-	-	-	-	21.565.200,00	14.729.600,00	68,30
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	20.978.000,00	18.582.000,00	-	-	-	-	-	-	20.978.000,00	18.582.000,00	88,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.020.000,00	-	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	14.601.000,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-	-	14.601.000,00	4.900.000,00	33,56
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	13.995.000,00	13.875.000,00	-	-	-	-	-	-	13.995.000,00	13.875.000,00	99,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	15.706.000,00	14.118.000,00	-	-	-	-	-	-	15.706.000,00	14.118.000,00	89,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	8.630.000,00	8.314.000,00	-	-	-	-	-	-	8.630.000,00	8.314.000,00	96,34
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	3.552.000,00	3.552.000,00	-	-	-	-	-	-	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	3.495.047,00	3.485.500,00	-	-	-	-	-	-	3.495.047,00	3.485.500,00	99,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	101.472.000,00	48.410.856,00	-	-	-	-	-	-	101.472.000,00	48.410.856,00	47,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	71.478.894,50	68.228.209,00	-	-	-	-	-	-	71.478.894,50	68.228.209,00	95,45
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	35.447.950,00	34.950.300,00	-	-	-	-	-	-	35.447.950,00	34.950.300,00	98,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	-	-	-	-	-	-	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	85,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	-	-	-	-	-	-	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	86,11
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	-	-	-	-	-	-	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	82,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	-	-	-	-	-	-	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	89,83
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	-	-	-	-	-	-	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	72,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	-	-	-	-	-	-	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	86,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	-	-	-	-	-	-	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	88,65
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	-	-	-	-	-	-	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	82,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	7.688.530.587,00	6.843.938.862,00	-	-	-	-	-	-	7.688.530.587,00	6.843.938.862,00	89,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	-	-	-	-	-	-	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	76,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	-	-	-	-	-	-	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	84,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	-	-	-	-	-	-	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	90,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	-	-	-	-	-	-	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	88,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	-	-	-	-	-	-	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	86,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	-	-	-	-	-	-	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	85,77

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	-	-	-	-	-	-	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	84,90
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	-	-	-	-	-	-	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	86,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	-	-	-	-	-	-	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	80,76
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	-	-	-	-	-	-	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	86,93
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	-	-	-	-	-	-	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	80,49
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	-	-	-	-	-	-	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	79,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	-	-	-	-	-	-	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	93,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	-	-	-	-	-	-	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	70,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	-	-	-	-	-	-	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	85,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	-	-	-	-	-	-	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	75,33
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	-	-	-	-	-	-	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	78,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	-	-	-	-	-	-	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	70,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	-	-	-	-	-	-	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	90,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	-	-	-	-	-	-	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	77,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	-	-	-	-	-	-	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	86,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	-	-	-	-	-	-	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	91,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	-	-	-	-	-	-	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	82,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	-	-	-	-	-	-	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	81,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	-	-	-	-	-	-	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	89,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	-	-	-	-	-	-	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	85,65
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	-	-	-	-	-	-	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	81,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	46.282.500,00	42.729.250,00	-	-	-	-	-	-	46.282.500,00	42.729.250,00	92,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	36.902.500,00	36.902.500,00	-	-	-	-	-	-	36.902.500,00	36.902.500,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	122.582.000,00	111.620.062,00	-	-	-	-	-	-	122.582.000,00	111.620.062,00	91,06
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	91.622.000,00	90.392.315,00	-	-	-	-	-	-	91.622.000,00	90.392.315,00	98,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	40.730.000,00	38.965.150,00	-	-	-	-	-	-	40.730.000,00	38.965.150,00	95,67
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	43.925.000,00	43.319.240,00	-	-	-	-	-	-	43.925.000,00	43.319.240,00	98,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	52.728.750,00	51.901.008,00	-	-	-	-	-	-	52.728.750,00	51.901.008,00	98,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	68.734.750,00	66.945.720,00	-	-	-	-	-	-	68.734.750,00	66.945.720,00	97,40
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	52.371.000,00	52.225.275,00	-	-	-	-	-	-	52.371.000,00	52.225.275,00	99,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	52.440.000,00	50.977.800,00	-	-	-	-	-	-	52.440.000,00	50.977.800,00	97,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	88.191.250,00	88.051.331,00	-	-	-	-	-	-	88.191.250,00	88.051.331,00	99,84

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	89.316.500,00	76.033.124,00	-	-	-	-	-	-	89.316.500,00	76.033.124,00	85,13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	116.357.250,00	94.362.500,00	-	-	-	-	-	-	116.357.250,00	94.362.500,00	81,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	632.361.992,00	604.614.230,00	-	-	-	-	-	-	632.361.992,00	604.614.230,00	95,61
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	372.443.500,00	299.235.023,00	-	-	-	-	-	-	372.443.500,00	299.235.023,00	80,34
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	169.541.000,00	154.062.500,00	-	-	-	-	-	-	169.541.000,00	154.062.500,00	90,87
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	80.355.000,00	75.230.000,00	-	-	-	-	-	-	80.355.000,00	75.230.000,00	93,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	298.226.000,00	249.951.139,00	-	-	-	-	-	-	298.226.000,00	249.951.139,00	83,81
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	150.000.000,00	137.234.510,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	137.234.510,00	91,49
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	300.078.000,00	286.117.677,00	-	-	-	-	-	-	300.078.000,00	286.117.677,00	95,35
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	97.386.000,00	62.900.400,00	-	-	-	-	-	-	97.386.000,00	62.900.400,00	64,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	55.730.000,00	28.185.100,00	-	-	-	-	-	-	55.730.000,00	28.185.100,00	50,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	94.855.000,00	57.000.000,00	-	-	-	-	-	-	94.855.000,00	57.000.000,00	60,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	99.250.000,00	64.000.000,00	-	-	-	-	-	-	99.250.000,00	64.000.000,00	64,48
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	99.125.000,00	93.440.000,00	-	-	-	-	-	-	99.125.000,00	93.440.000,00	94,26
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	94.386.000,00	38.500.000,00	-	-	-	-	-	-	94.386.000,00	38.500.000,00	40,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	61.677.000,00	53.697.600,00	-	-	-	-	-	-	61.677.000,00	53.697.600,00	87,06
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	100.000.000,00	49.027.300,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	49.027.300,00	49,03
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	77.800.000,00	56.803.953,00	-	-	-	-	-	-	77.800.000,00	56.803.953,00	73,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	44.230.000,00	22.643.000,00	-	-	-	-	-	-	44.230.000,00	22.643.000,00	51,19
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	97.500.000,00	49.900.000,00	-	-	-	-	-	-	97.500.000,00	49.900.000,00	51,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	56.000.000,00	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-	56.000.000,00	54.000.000,00	96,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	581.971.000,00	479.829.642,00	-	-	-	-	-	-	581.971.000,00	479.829.642,00	82,45
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	46.762.000,00	15.403.000,00	-	-	-	-	-	-	46.762.000,00	15.403.000,00	32,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	47.355.000,00	34.000.000,00	-	-	-	-	-	-	47.355.000,00	34.000.000,00	71,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	46.623.000,00	21.998.000,00	-	-	-	-	-	-	46.623.000,00	21.998.000,00	47,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	40.460.000,00	40.286.000,00	-	-	-	-	-	-	40.460.000,00	40.286.000,00	99,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	67.845.000,00	48.816.000,00	-	-	-	-	-	-	67.845.000,00	48.816.000,00	71,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	20.538.000,00	20.538.000,00	-	-	-	-	-	-	20.538.000,00	20.538.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	57.638.000,00	55.246.000,00	-	-	-	-	-	-	57.638.000,00	55.246.000,00	95,85
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	35.000.000,00	34.500.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000.000,00	34.500.000,00	98,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	45.460.000,00	34.286.000,00	-	-	-	-	-	-	45.460.000,00	34.286.000,00	75,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	15.600.000,00	15.440.100,00	-	-	-	-	-	-	15.600.000,00	15.440.100,00	98,98

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	45.775.000,00	32.696.000,00	-	-	-	-	-	-	45.775.000,00	32.696.000,00	71,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	45.708.750,00	37.643.000,00	-	-	-	-	-	-	45.708.750,00	37.643.000,00	82,35
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	34.900.000,00	28.130.000,00	-	-	-	-	-	-	34.900.000,00	28.130.000,00	80,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	73.903.000,00	43.720.687,00	-	-	-	-	-	-	73.903.000,00	43.720.687,00	59,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.004.212.601,00	648.770.297,00	-	-	-	-	-	-	1.004.212.601,00	648.770.297,00	64,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	844.559.960,00	707.671.385,00	-	-	-	-	-	-	844.559.960,00	707.671.385,00	83,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	611.638.507,00	585.452.716,00	156.617.892,00	143.160.006,00	-	-	-	-	768.256.399,00	728.612.722,00	94,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	502.706.524,00	489.902.623,00	132.455.000,00	130.925.700,00	-	-	-	-	635.161.524,00	620.828.323,00	97,74
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	873.141.352,00	766.123.051,00	876.253.257,00	864.523.931,00	-	-	-	-	1.749.394.609,00	1.630.646.982,00	93,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	1.029.310.791,00	973.156.714,00	163.811.100,00	163.811.100,00	-	-	-	-	1.193.121.891,00	1.136.967.814,00	95,29
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	548.336.181,60	518.631.327,00	162.067.104,00	155.533.200,00	-	-	-	-	710.403.285,60	674.164.527,00	94,90
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	700.869.660,00	661.303.484,00	119.971.800,00	117.596.380,00	-	-	-	-	820.841.460,00	778.899.864,00	94,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	418.962.135,00	357.108.984,00	165.106.506,00	164.502.000,00	-	-	-	-	584.068.641,00	521.610.984,00	89,31
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	502.377.163,50	427.706.063,00	120.489.989,40	119.558.100,00	-	-	-	-	622.867.152,90	547.264.163,00	87,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	701.102.964,00	573.126.271,00	171.890.715,00	169.790.800,00	-	-	-	-	872.993.679,00	742.917.071,00	85,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	466.134.540,00	445.379.936,00	33.787.969,00	32.600.000,00	-	-	-	-	499.922.509,00	477.979.936,00	95,61
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	523.215.385,00	503.925.322,00	200.052.960,00	200.009.759,00	-	-	-	-	723.268.345,00	703.935.081,00	97,33
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	455.756.251,00	432.156.175,00	119.097.726,00	116.991.557,00	-	-	-	-	574.853.977,00	549.147.732,00	95,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	474.231.441,00	372.111.492,00	85.078.236,60	84.881.700,00	-	-	-	-	559.309.677,60	456.993.192,00	81,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	612.255.886,00	576.760.032,00	159.028.521,00	153.596.000,00	-	-	-	-	771.284.407,00	730.356.032,00	94,69
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	440.796.403,00	396.079.402,00	54.225.831,00	52.497.500,00	-	-	-	-	495.022.234,00	448.576.902,00	90,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	494.332.433,50	433.996.185,00	76.678.689,00	76.588.890,00	-	-	-	-	571.011.122,50	510.585.075,00	89,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	437.775.267,15	368.736.671,00	183.970.179,00	173.478.792,00	-	-	-	-	621.745.446,15	542.215.463,00	87,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	370.882.992,00	366.499.064,00	127.342.796,00	122.100.000,00	-	-	-	-	498.225.788,00	488.599.064,00	98,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	827.997.630,00	764.554.713,00	117.759.340,00	116.655.450,00	-	-	-	-	945.756.970,00	881.210.163,00	93,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	282.046.561,00	197.112.775,00	99.206.910,50	98.949.400,00	-	-	-	-	381.253.471,50	296.062.175,00	77,65
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	293.953.582,69	278.845.472,00	54.446.168,00	54.364.250,00	-	-	-	-	348.399.750,69	333.209.722,00	95,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	194.558.150,00	192.058.839,00	46.552.371,00	46.198.185,00	-	-	-	-	241.110.521,00	238.257.024,00	98,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	206.383.609,00	190.200.315,00	46.796.379,00	45.787.500,00	-	-	-	-	253.179.988,00	235.987.815,00	93,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	244.125.200,00	239.305.492,00	46.343.606,00	45.843.000,00	-	-	-	-	290.468.806,00	285.148.492,00	98,17
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	207.097.579,00	167.593.466,00	73.514.300,00	73.483.535,00	-	-	-	-	280.611.879,00	241.077.001,00	85,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	333.853.920,50	321.767.050,00	74.074.100,00	73.840.000,00	-	-	-	-	407.928.020,50	395.607.050,00	96,98
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	277.069.715,00	264.073.265,00	46.494.459,00	46.331.400,00	-	-	-	-	323.564.174,00	310.404.665,00	95,93
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	243.473.089,20	155.197.705,00	39.157.248,00	38.738.999,00	-	-	-	-	282.630.337,20	193.936.704,00	68,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	317.155.400,00	312.277.500,00	75.313.500,00	75.147.000,00	-	-	-	-	392.468.900,00	387.424.500,00	98,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	255.477.042,00	235.079.309,00	42.637.764,00	41.741.550,00	-	-	-	-	298.114.806,00	276.820.859,00	92,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	207.349.885,00	201.657.470,00	52.068.830,00	52.068.830,00	-	-	-	-	259.418.715,00	253.726.300,00	97,81
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	289.130.285,00	245.075.422,00	43.954.446,00	43.889.400,00	-	-	-	-	333.084.731,00	288.964.822,00	86,75
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	251.928.560,00	240.352.000,00	87.540.927,00	86.500.000,00	-	-	-	-	339.469.487,00	326.852.000,00	96,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	487.054.763,00	465.899.484,00	112.992.284,00	112.371.960,00	-	-	-	-	600.047.047,00	578.271.444,00	96,37
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	15.335.561.434,68	14.295.638.554,00	4.126.326.541,78	3.945.957.807,00	-	-	-	-	19.461.887.976,46	18.241.596.361,00	93,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	8.608.967.753,82	7.549.314.826,00	6.759.707.939,99	6.544.601.487,00	-	-	-	-	15.368.675.693,81	14.093.916.313,00	91,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	680.000,00	680.000,00	65.048.220,00	64.200.000,00	-	-	-	-	65.728.220,00	64.880.000,00	98,71

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	-	-	81.402.000,00	81.226.902,00	-	-	-	-	81.402.000,00	81.226.902,00	99,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	680.000,00	680.000,00	136.117.600,00	134.682.849,00	-	-	-	-	136.797.600,00	135.362.849,00	98,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	16.988.300,00	15.254.100,00	49.557.069,00	49.557.069,00	-	-	-	-	66.545.369,00	64.811.169,00	97,39
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	4.322.000,00	4.322.000,00	48.343.608,00	41.958.000,00	-	-	-	-	52.665.608,00	46.280.000,00	87,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	-	-	400.000.000,00	398.680.000,00	-	-	-	-	400.000.000,00	398.680.000,00	99,67
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	680.000,00	680.000,00	59.247.350,00	58.997.600,00	-	-	-	-	59.927.350,00	59.677.600,00	99,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	-	-	47.118.834,00	46.509.000,00	-	-	-	-	47.118.834,00	46.509.000,00	98,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	131.926.400,00	118.780.803,00	73.296.630,00	67.843.000,00	-	-	-	-	205.223.030,00	186.623.803,00	90,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	-	-	20.531.448,00	17.093.778,00	-	-	-	-	20.531.448,00	17.093.778,00	83,26
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.161.000,00	2.118.300,00	270.147.510,00	254.967.000,00	-	-	-	-	272.308.510,00	257.085.300,00	94,41
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	680.000,00	680.000,00	697.087.200,00	694.717.692,00	-	-	-	-	697.767.200,00	695.397.692,00	99,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	162.000.000,00	159.840.000,00	24.928.912,80	24.525.450,00	-	-	-	-	186.928.912,80	184.365.450,00	98,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	680.000,00	680.000,00	6.913.163,00	6.859.800,00	-	-	-	-	7.593.163,00	7.539.800,00	99,30
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	1.360.000,00	680.000,00	39.847.500,00	39.627.000,00	-	-	-	-	41.207.500,00	40.307.000,00	97,81
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	-	-	494.412.100,00	483.476.500,00	-	-	-	-	494.412.100,00	483.476.500,00	97,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	-	-	70.772.000,00	70.716.990,00	-	-	-	-	70.772.000,00	70.716.990,00	99,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	355.400.000,00	331.400.000,00	259.150.800,00	255.967.200,00	-	-	-	-	614.550.800,00	587.367.200,00	95,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	-	-	48.700.000,00	48.700.000,00	-	-	-	-	48.700.000,00	48.700.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	-	-	31.336.632,00	31.250.000,00	-	-	-	-	31.336.632,00	31.250.000,00	99,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	340.000,00	340.000,00	26.550.000,00	22.077.900,00	-	-	-	-	26.890.000,00	22.417.900,00	83,37
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	-	-	29.083.332,00	28.693.500,00	-	-	-	-	29.083.332,00	28.693.500,00	98,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	680.000,00	680.000,00	70.333.620,00	69.280.650,00	-	-	-	-	71.013.620,00	69.960.650,00	98,52
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	-	-	48.141.948,00	47.441.000,00	-	-	-	-	48.141.948,00	47.441.000,00	98,54
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	680.000,00	680.000,00	49.124.000,00	48.770.000,00	-	-	-	-	49.804.000,00	49.450.000,00	99,29

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	-	-	87.770.000,00	87.770.000,00	-	-	-	-	87.770.000,00	87.770.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	-	-	13.022.469,00	-	-	-	-	-	13.022.469,00	-	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	680.000,00	-	19.540.440,00	19.380.600,00	-	-	-	-	20.220.440,00	19.380.600,00	95,85
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	680.000,00	680.000,00	28.978.770,00	28.854.450,00	-	-	-	-	29.658.770,00	29.534.450,00	99,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	340.000,00	340.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	-	-	-	-	19.570.000,00	19.570.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	680.000,00	680.000,00	42.885.960,00	42.350.000,00	-	-	-	-	43.565.960,00	43.030.000,00	98,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	6.950.469.373,35	6.817.570.246,00	910.371.348,50	757.263.939,00	-	-	-	-	7.860.840.721,85	7.574.834.185,00	96,36
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	30.897.427,39	-	13.191.106.370,61	12.749.857.066,00	-	-	-	-	13.222.003.798,00	12.749.857.066,00	96,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	733.730.200,00	589.352.705,00	-	-	-	-	-	-	733.730.200,00	589.352.705,00	80,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	459.085.800,00	360.543.380,00	-	-	-	-	-	-	459.085.800,00	360.543.380,00	78,54
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	1.057.790.432,00	879.968.906,00	-	-	-	-	-	-	1.057.790.432,00	879.968.906,00	83,19
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	1.470.704.711,00	769.720.999,00	-	-	-	-	-	-	1.470.704.711,00	769.720.999,00	52,34
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	1.142.188.260,00	898.429.799,00	-	-	-	-	-	-	1.142.188.260,00	898.429.799,00	78,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	1.716.192.223,00	1.406.245.857,00	-	-	-	-	-	-	1.716.192.223,00	1.406.245.857,00	81,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	577.685.800,00	526.465.354,00	-	-	-	-	-	-	577.685.800,00	526.465.354,00	91,13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	1.519.426.660,00	1.377.278.932,00	-	-	-	-	-	-	1.519.426.660,00	1.377.278.932,00	90,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	749.720.996,00	518.799.912,00	-	-	-	-	-	-	749.720.996,00	518.799.912,00	69,20
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	393.755.564,00	310.219.385,00	-	-	-	-	-	-	393.755.564,00	310.219.385,00	78,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	4.602.620.472,00	3.395.975.441,00	-	-	-	-	-	-	4.602.620.472,00	3.395.975.441,00	73,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	569.811.625,00	358.291.553,00	-	-	-	-	-	-	569.811.625,00	358.291.553,00	62,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.164.755.563,00	2.064.451.874,00	-	-	-	-	-	-	2.164.755.563,00	2.064.451.874,00	95,37
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	1.083.845.121,00	940.988.147,00	-	-	-	-	-	-	1.083.845.121,00	940.988.147,00	86,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	1.518.449.667,00	1.178.982.311,00	-	-	-	-	-	-	1.518.449.667,00	1.178.982.311,00	77,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	564.591.850,00	546.667.863,00	-	-	-	-	-	-	564.591.850,00	546.667.863,00	96,83
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	4.055.607.367,00	3.636.982.797,00	-	-	-	-	-	-	4.055.607.367,00	3.636.982.797,00	89,68
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	667.789.901,00	547.617.835,00	-	-	-	-	-	-	667.789.901,00	547.617.835,00	82,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	920.289.856,00	568.258.231,00	-	-	-	-	-	-	920.289.856,00	568.258.231,00	61,75
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	346.126.943,00	287.298.650,00	-	-	-	-	-	-	346.126.943,00	287.298.650,00	83,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	465.541.600,00	422.968.729,00	-	-	-	-	-	-	465.541.600,00	422.968.729,00	90,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	279.202.167,00	235.554.878,00	-	-	-	-	-	-	279.202.167,00	235.554.878,00	84,37

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	349.093.800,00	347.607.748,00	-	-	-	-	-	-	349.093.800,00	347.607.748,00	99,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	287.069.689,00	238.629.411,00	-	-	-	-	-	-	287.069.689,00	238.629.411,00	83,13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	331.290.667,00	253.712.636,00	-	-	-	-	-	-	331.290.667,00	253.712.636,00	76,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	421.105.400,00	363.979.149,00	-	-	-	-	-	-	421.105.400,00	363.979.149,00	86,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	284.837.958,00	230.489.105,00	-	-	-	-	-	-	284.837.958,00	230.489.105,00	80,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	505.283.400,00	455.158.752,00	-	-	-	-	-	-	505.283.400,00	455.158.752,00	90,08
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	896.536.800,00	722.538.175,00	-	-	-	-	-	-	896.536.800,00	722.538.175,00	80,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	271.711.037,00	243.797.701,00	-	-	-	-	-	-	271.711.037,00	243.797.701,00	89,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	428.119.600,00	350.603.164,00	-	-	-	-	-	-	428.119.600,00	350.603.164,00	81,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	282.566.400,00	220.642.666,00	-	-	-	-	-	-	282.566.400,00	220.642.666,00	78,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.606.675.200,00	4.843.248.739,00	-	-	-	-	-	-	5.606.675.200,00	4.843.248.739,00	86,38
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	18.529.176.208,00	15.101.009.391,00	-	-	-	-	-	-	18.529.176.208,00	15.101.009.391,00	81,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	6.045.768.422,00	5.458.903.652,00	-	-	-	-	-	-	6.045.768.422,00	5.458.903.652,00	90,29
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	349.610.000,00	239.446.616,00	174.900.000,00	174.200.000,00	-	-	-	-	524.510.000,00	413.646.616,00	78,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	463.757.320,00	435.855.807,00	-	-	-	-	-	-	463.757.320,00	435.855.807,00	93,98
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	985.628.609,92	812.215.692,39	-	-	-	-	-	-	985.628.609,92	812.215.692,39	82,41
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	588.253.830,00	391.149.809,00	358.960.670,00	358.040.000,00	-	-	-	-	947.214.500,00	749.189.809,00	79,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	718.840.000,00	669.108.662,00	-	-	-	-	-	-	718.840.000,00	669.108.662,00	93,08
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	387.549.400,00	365.445.822,00	2.150.000.000,00	2.060.165.944,00	-	-	-	-	2.537.549.400,00	2.425.611.766,00	95,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	568.020.000,00	562.726.192,00	-	-	-	-	-	-	568.020.000,00	562.726.192,00	99,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	519.181.250,00	333.718.851,00	200.000.000,00	199.049.000,00	-	-	-	-	719.181.250,00	532.767.851,00	74,08
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	440.253.070,00	328.454.692,00	-	-	-	-	-	-	440.253.070,00	328.454.692,00	74,61
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	514.914.000,00	449.365.281,00	-	-	-	-	-	-	514.914.000,00	449.365.281,00	87,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	766.393.200,00	582.189.156,00	-	-	-	-	-	-	766.393.200,00	582.189.156,00	75,96
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	301.044.000,00	208.074.902,00	-	-	-	-	-	-	301.044.000,00	208.074.902,00	69,12
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	1.918.827.146,00	1.689.180.427,00	-	-	-	-	-	-	1.918.827.146,00	1.689.180.427,00	88,03
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	440.698.000,00	397.537.855,00	-	-	-	-	-	-	440.698.000,00	397.537.855,00	90,21

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	393.394.000,00	376.364.786,00	382.674.800,00	379.753.650,00	-	-	-	-	776.068.800,00	756.118.436,00	97,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	558.745.000,00	434.418.420,00	-	-	-	-	-	-	558.745.000,00	434.418.420,00	77,75
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	901.661.000,00	875.630.290,00	-	-	-	-	-	-	901.661.000,00	875.630.290,00	97,11
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	211.713.000,00	206.047.132,00	-	-	-	-	-	-	211.713.000,00	206.047.132,00	97,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	1.010.700.320,00	965.250.830,00	-	-	-	-	-	-	1.010.700.320,00	965.250.830,00	95,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	240.222.000,00	199.444.378,00	-	-	-	-	-	-	240.222.000,00	199.444.378,00	83,03
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	793.640.189,00	791.167.423,00	-	-	-	-	-	-	793.640.189,00	791.167.423,00	99,69
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	202.530.000,00	151.414.000,00	-	-	-	-	-	-	202.530.000,00	151.414.000,00	74,76
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	184.854.000,00	184.363.816,00	-	-	-	-	-	-	184.854.000,00	184.363.816,00	99,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	53.440.000,00	42.286.793,00	-	-	-	-	-	-	53.440.000,00	42.286.793,00	79,13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	174.940.000,00	161.185.108,00	-	-	-	-	-	-	174.940.000,00	161.185.108,00	92,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	136.733.000,00	61.909.650,00	-	-	-	-	-	-	136.733.000,00	61.909.650,00	45,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	202.193.950,00	191.174.875,00	-	-	-	-	-	-	202.193.950,00	191.174.875,00	94,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	162.420.000,00	99.192.626,00	166.714.348,00	166.714.348,00	-	-	-	-	329.134.348,00	265.906.974,00	80,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	233.434.790,00	217.329.725,00	-	-	-	-	-	-	233.434.790,00	217.329.725,00	93,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	209.118.880,00	182.547.789,00	-	-	-	-	-	-	209.118.880,00	182.547.789,00	87,29
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	206.462.000,00	190.779.868,00	-	-	-	-	-	-	206.462.000,00	190.779.868,00	92,40
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	235.659.638,00	213.920.174,00	-	-	-	-	-	-	235.659.638,00	213.920.174,00	90,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	885.550.000,00	751.343.352,21	-	-	-	-	-	-	885.550.000,00	751.343.352,21	84,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.345.944.862,00	949.681.422,00	198.079.500,00	197.047.000,00	-	-	-	-	1.544.024.362,00	1.146.728.422,00	74,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	12.574.310.760,00	11.756.205.963,00	-	-	-	-	-	-	12.574.310.760,00	11.756.205.963,00	93,49
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	2.055.582.000,00	1.861.270.944,00	4.323.450.863,00	4.005.522.926,00	-	-	-	-	6.379.032.863,00	5.866.793.870,00	91,97
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.916.868.640,00	1.634.612.747,00	-	-	-	-	-	-	1.916.868.640,00	1.634.612.747,00	85,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	7.082.650.278,00	6.947.737.491,00	1.752.891.670,00	1.672.561.243,00	-	-	-	-	8.835.541.948,00	8.620.298.734,00	97,56
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	10.793.655.855,00	10.590.076.904,00	-	-	-	-	-	-	10.793.655.855,00	10.590.076.904,00	98,11

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	27.846.554.780,00	26.608.739.560,00	-	-	-	-	-	-	27.846.554.780,00	26.608.739.560,00	95,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	6.479.285.385,69	6.055.556.916,00	-	-	-	-	-	-	6.479.285.385,69	6.055.556.916,00	93,46
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.535.905.702,50	1.380.869.582,00	-	-	-	-	-	-	1.535.905.702,50	1.380.869.582,00	89,91
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	272.570.161,00	253.487.456,00	-	-	-	-	-	-	272.570.161,00	253.487.456,00	93,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	465.577.000,00	384.445.600,00	-	-	-	-	-	-	465.577.000,00	384.445.600,00	82,57
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	581.963.000,00	569.712.083,00	-	-	-	-	-	-	581.963.000,00	569.712.083,00	97,89
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	449.177.000,00	216.700.000,00	-	-	-	-	-	-	449.177.000,00	216.700.000,00	48,24
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	479.347.000,00	479.335.500,00	-	-	-	-	-	-	479.347.000,00	479.335.500,00	100,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	461.925.000,00	360.406.000,00	-	-	-	-	-	-	461.925.000,00	360.406.000,00	78,02
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	371.918.000,00	332.008.971,00	-	-	-	-	-	-	371.918.000,00	332.008.971,00	89,27
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	511.436.200,00	200.403.500,00	-	-	-	-	-	-	511.436.200,00	200.403.500,00	39,18
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	378.580.000,00	361.928.000,00	-	-	-	-	-	-	378.580.000,00	361.928.000,00	95,60
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	366.549.095,10	228.294.400,00	-	-	-	-	-	-	366.549.095,10	228.294.400,00	62,28
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	303.095.000,00	153.119.700,00	-	-	-	-	-	-	303.095.000,00	153.119.700,00	50,52
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	289.023.400,00	146.476.000,00	-	-	-	-	-	-	289.023.400,00	146.476.000,00	50,68
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	410.310.000,00	130.988.834,00	-	-	-	-	-	-	410.310.000,00	130.988.834,00	31,92
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	406.945.000,00	380.075.000,00	-	-	-	-	-	-	406.945.000,00	380.075.000,00	93,40
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	333.076.000,00	324.875.000,00	-	-	-	-	-	-	333.076.000,00	324.875.000,00	97,54
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	33.099.200,00	18.615.200,00	-	-	-	-	-	-	33.099.200,00	18.615.200,00	56,24
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	2.750.552,25	2.739.480,00	-	-	-	-	-	-	2.750.552,25	2.739.480,00	99,60
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	4.265.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.265.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	14.591.364,00	14.328.750,00	-	-	-	-	-	-	14.591.364,00	14.328.750,00	98,20
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	9.515.500,00	4.185.000,00	-	-	-	-	-	-	9.515.500,00	4.185.000,00	43,98
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	16.978.000,00	2.553.000,00	-	-	-	-	-	-	16.978.000,00	2.553.000,00	15,04

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	17.380.000,00	17.250.000,00	-	-	-	-	-	-	17.380.000,00	17.250.000,00	99,25
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.510.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.138.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.138.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.976.000,00	5.658.000,00	-	-	-	-	-	-	5.976.000,00	5.658.000,00	94,68
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	8.143.850,00	5.850.000,00	73.785.483,00	72.216.600,00	-	-	-	-	81.929.333,00	78.066.600,00	95,29
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	8.215.000,00	8.215.000,00	-	-	-	-	-	-	8.215.000,00	8.215.000,00	100,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	122.057.211,00	106.855.613,00	10.957.143,00	10.905.750,00	-	-	-	-	133.014.354,00	117.761.363,00	88,53
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	7.01.0.00.0.00.37.0000	111.482.274,00	91.490.291,00	27.436.980,00	27.405.900,00	-	-	-	-	138.919.254,00	118.896.191,00	85,59
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	2.475.000,00	545.000,00	-	-	-	-	-	-	2.475.000,00	545.000,00	22,02
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	2.500.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	2.490.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.490.000,00	2.400.000,00	96,39
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	2.400.000,00	2.325.000,00	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	2.325.000,00	96,88
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	2.562.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.562.500,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	100,00

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.29.0.00.18.0000	1.246.227.661,00	780.532.187,00	306.502.447,00	244.792.030,00	-	-	-	-	1.552.730.108,00	1.025.324.217,69	66,03
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.29.0.00.18.0000	594.775.805,30	271.050.074,00	171.233.558,00	151.009.001,00	-	-	-	-	766.009.363,30	422.059.075,00	55,10
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Bibit Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	3.873.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.873.500,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Bibit Teman	7.01.0.00.0.00.31.0000	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Bintanghan Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	5.856.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	-	5.856.000,00	510.000,00	8,71
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	11.740.000,00	11.056.000,00	-	-	-	-	-	-	11.740.000,00	11.056.000,00	94,17
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	11.070.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-	11.070.000,00	10.800.000,00	97,56
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.060.000,00	5.459.000,00	-	-	-	-	-	-	7.060.000,00	5.459.000,00	77,35
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	10.260.000,00	10.230.000,00	-	-	-	-	-	-	10.260.000,00	10.230.000,00	99,71
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	8.400.000,00	7.770.000,00	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	7.770.000,00	92,50
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	16.800.000,00	16.687.500,00	-	-	-	-	-	-	16.800.000,00	16.687.500,00	99,33
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Serasi Perangkat Kepala Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	26.600.000,00	25.600.000,00	-	-	-	-	-	-	26.600.000,00	25.600.000,00	96,24
			Program: Perekonomian dan Pembangunan	Perkiraan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	316.669.000,00	298.163.542,00	-	-	-	-	-	-	316.669.000,00	298.163.542,00	94,16
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Perbincangan	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	472.647.000,00	410.113.765,00	-	-	-	-	-	-	472.647.000,00	410.113.765,00	86,77
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	589.159.975,00	470.030.490,00	-	-	-	-	-	-	589.159.975,00	470.030.490,00	79,78
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber D	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	630.836.000,00	520.549.854,00	-	-	-	-	-	-	630.836.000,00	520.549.854,00	82,52
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pen	Badan Perencanaan Pembangunan	5.01.5.05.0.00.44.0000	1.533.760.492,00	1.362.417.448,00	-	-	-	-	-	-	1.533.760.492,00	1.362.417.448,00	88,83
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pem	Badan Perencanaan Pembangunan	5.01.5.05.0.00.44.0000	64.943.050,00	56.402.450,00	-	-	-	-	-	-	64.943.050,00	56.402.450,00	86,85
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	300.656.250,00	241.402.052,00	-	-	-	-	-	-	300.656.250,00	241.402.052,00	80,29
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	62.497.375,20	56.834.864,00	-	-	-	-	-	-	62.497.375,20	56.834.864,00	90,94
			Program: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di B	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	152.723.959,00	145.904.703,00	-	-	-	-	-	-	152.723.959,00	145.904.703,00	95,53
			Program: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	1.196.360.550,00	1.093.468.452,00	-	-	-	-	-	-	1.196.360.550,00	1.093.468.452,00	91,42

2026

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran XXVII : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TA 2025

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	(4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	127.423.000,00	103.394.558,00	-	-	-	-	-	-	127.423.000,00	103.394.558,00	81,14
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	84.114.000,00	52.108.704,00	-	-	-	-	-	-	84.114.000,00	52.108.704,00	61,95
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	102.637.550,00	74.476.270,00	-	-	-	-	-	-	102.637.550,00	74.476.270,00	72,56
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.261.673.750,00	1.072.245.939,00	257.857.071,00	249.622.350,00	-	-	-	-	1.519.530.821,00	1.321.868.289,00	86,99
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.924.514.700,00	1.556.857.936,00	-	-	-	-	-	-	1.924.514.700,00	1.556.857.936,00	80,90
			Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	471.821.500,00	329.810.717,00	7.757.176.000,00	3.854.413.800,00	-	-	-	-	8.228.997.500,00	4.184.224.517,00	50,85
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	1.658.512.000,00	1.187.594.284,00	1.949.433.250,00	1.917.984.950,00	-	-	-	-	3.607.945.250,00	3.105.579.234,00	86,08
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	7.116.299.603,00	6.888.738.556,00	6.052.315.125,00	5.631.380.707,34	-	-	-	-	13.168.614.728,00	12.520.119.263,34	95,08
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	904.994.174,00	748.108.292,00	142.857.000,00	141.852.450,00	-	-	-	-	1.047.851.174,00	889.960.742,00	84,93
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	12.842.000,00	10.592.100,00	-	-	-	-	-	-	12.842.000,00	10.592.100,00	82,48
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	49.711.000,00	32.603.811,00	-	-	-	-	-	-	49.711.000,00	32.603.811,00	65,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	129.806.214,00	96.271.796,00	-	-	-	-	-	-	129.806.214,00	96.271.796,00	74,17
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	63.682.762,00	11.485.500,00	-	-	-	-	-	-	63.682.762,00	11.485.500,00	18,04
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	-	-	-	-	-	-	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	82,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	-	-	-	-	-	-	11.235.623.328,00	9.667.398.934,00	86,04
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	195.739.000,00	151.775.846,00	-	-	-	-	-	-	195.739.000,00	151.775.846,00	77,54
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	38.256.000,00	36.983.200,00	-	-	-	-	-	-	38.256.000,00	36.983.200,00	96,67
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	573.153.177,50	502.971.418,00	313.548.774,80	312.516.060,00	-	-	-	-	886.701.952,30	815.487.478,00	91,97
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	492.292.674,00	338.157.139,00	489.385.900,00	457.717.210,00	-	-	-	-	981.678.574,00	795.874.349,00	81,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.360.000,00	1.360.000,00	245.589.004,00	243.868.040,00	-	-	-	-	246.949.004,00	245.228.040,00	99,30
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	-	-	60.000.000,00	48.536.970,00	-	-	-	-	60.000.000,00	48.536.970,00	80,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	2.701.488.390,00	1.793.234.607,00	-	-	-	-	-	-	2.701.488.390,00	1.793.234.607,00	66,38
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	25.605.893.152,00	23.261.237.697,00	-	-	-	-	-	-	25.605.893.152,00	23.261.237.697,00	90,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	1.994.122.000,00	1.930.719.030,00	-	-	-	-	-	-	1.994.122.000,00	1.930.719.030,00	96,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	701.341.865,00	550.547.969,00	-	-	-	-	-	-	701.341.865,00	550.547.969,00	78,50

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	185.375.000,00	184.953.100,00	-	-	-	-	-	-	185.375.000,00	184.953.100,00	99,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	99.116.950,00	92.655.113,00	-	-	-	-	-	-	99.116.950,00	92.655.113,00	93,48
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	397.795.000,00	389.145.879,00	-	-	-	-	-	-	397.795.000,00	389.145.879,00	97,83
2	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	(3) Meningkatkan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Konektivitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	-	-	-	-	-	-	1.636.001.800,00	1.512.640.531,00	92,46
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	77.472.047.863,00	69.789.179.190,00	19.461.187.100,00	18.478.914.350,00	-	-	-	-	96.933.234.963,00	88.268.093.540,00	91,06
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	18.761.306.700,00	18.516.311.614,00	1.164.931.950,00	1.164.931.950,00	-	-	-	-	19.926.238.650,00	19.681.243.564,00	98,77
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.141.172.200,00	1.040.668.200,00	25.439.509.210,00	23.703.670.300,00	-	-	-	-	26.580.681.410,00	24.744.338.500,00	93,09
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	16.479.516.000,00	14.278.754.450,00	1.727.472.000,00	1.656.884.000,00	-	-	-	-	18.206.988.000,00	15.935.638.450,00	87,52
			Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	45.507.000,00	44.800.989,00	-	-	-	-	-	-	45.507.000,00	44.800.989,00	98,45
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	821.121.053,60	774.107.202,00	160.950.000,00	159.726.000,00	-	-	-	-	982.071.053,60	933.833.202,00	95,09
			Program Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	48.020.000,00	47.163.218,00	-	-	-	-	-	-	48.020.000,00	47.163.218,00	98,22
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	30.574.025.075,00	27.424.533.386,00	2.223.202.050,00	1.934.464.750,00	-	-	-	-	32.797.227.125,00	29.358.998.136,00	89,52
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	857.570.350,00	802.584.650,00	-	-	-	-	-	-	857.570.350,00	802.584.650,00	93,59
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	-
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	50.000.000,00	1.520.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	1.520.000,00	3,04
			Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	385.000.000,00	301.900.000,00	6.113.866.250,00	5.899.915.250,00	-	-	-	-	6.498.866.250,00	6.201.815.250,00	95,43
			Program Pengembangan Perumahan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	31.949.750,00	15.600.000,00	-	-	-	-	-	-	31.949.750,00	15.600.000,00	48,83
			Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	74.092.000,00	74.092.000,00	4.801.080.800,00	4.480.178.800,00	-	-	-	-	4.875.172.800,00	4.554.270.800,00	93,42
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.13.0000	904.994.174,00	748.108.292,00	142.857.000,00	141.852.450,00	-	-	-	-	1.047.851.174,00	889.960.742,00	84,93
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	3.454.965.958,00	3.365.842.000,00	67.190.285.649,00	65.565.723.400,00	-	-	-	-	70.645.251.607,00	68.931.565.400,00	97,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	85.360.479,80	46.985.908,00	-	-	-	-	-	-	85.360.479,80	46.985.908,00	55,04

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	96.373.250,00	30.250.000,00	-	-	-	-	-	-	96.373.250,00	30.250.000,00	31,39
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	65.389.500,00	52.344.957,00	-	-	-	-	-	-	65.389.500,00	52.344.957,00	80,05
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	-	-	-	-	-	-	16.321.623.503,60	15.428.371.423,00	94,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	-	-	-	-	-	-	9.630.489.745,00	8.142.722.800,00	84,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	175.484.000,00	106.690.000,00	-	-	-	-	-	-	175.484.000,00	106.690.000,00	60,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	150.000.000,00	134.843.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	134.843.000,00	89,90
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	478.813.101,49	422.911.756,00	1.397.213.468,00	1.392.819.200,00	-	-	-	-	1.876.026.569,49	1.815.730.956,00	96,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.060.436.900,00	834.635.114,00	280.000.000,00	272.533.305,00	-	-	-	-	1.340.436.900,00	1.107.168.419,00	82,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.494.665,00	1.400.000,00	306.903.200,00	305.852.030,00	-	-	-	-	308.397.865,00	307.252.030,00	99,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.448.332.800,00	1.441.850.976,00	819.290.000,00	815.012.000,00	-	-	-	-	2.267.622.800,00	2.256.862.976,00	99,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	17.799.557.346,00	11.595.333.585,00	-	-	-	-	-	-	17.799.557.346,00	11.595.333.585,00	65,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	1.434.836.200,00	1.086.244.502,00	-	-	-	-	-	-	1.434.836.200,00	1.086.244.502,00	75,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.894.338.620,00	1.754.931.269,00	-	-	-	-	-	-	1.894.338.620,00	1.754.931.269,00	92,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	906.155.320,00	418.983.345,00	2.777.440.000,00	2.777.103.450,00	-	-	-	-	3.683.595.320,00	3.196.086.795,00	86,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	98.614.614,00	89.646.860,00	-	-	-	-	-	-	98.614.614,00	89.646.860,00	90,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	92.295.000,00	86.013.155,00	-	-	-	-	-	-	92.295.000,00	86.013.155,00	93,19
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	55.672.247.595,82	41.266.512.437,99	438.820.591.664,89	375.685.877.543,80	-	-	-	-	494.492.839.260,71	416.952.389.981,79	84,32
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	11.782.455.700,00	9.355.138.371,00	14.245.136.500,00	13.924.470.705,00	-	-	-	-	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	89,44
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	881.212.000,00	419.125.584,00	1.265.533.200,00	1.247.020.065,00	-	-	-	-	2.146.745.200,00	1.666.145.649,00	77,61
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	3.724.050,00	3.628.000,00	2.689.350,00	2.400.000,00	-	-	-	-	6.413.400,00	6.028.000,00	93,99
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	272.570.161,00	253.487.456,00	-	-	-	-	-	-	272.570.161,00	253.487.456,00	93,00
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	951.952.701,00	921.233.471,00	95.460.000,00	84.839.520,00	-	-	-	-	1.047.412.701,00	1.006.072.991,00	96,05
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	161.308.720,00	141.608.186,00	3.442.378,00	-	-	-	-	-	164.751.098,00	141.608.186,00	85,95
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	39.440.000,00	25.260.000,00	-	-	-	-	-	-	39.440.000,00	25.260.000,00	64,05
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	3.335.167.650,00	3.152.436.250,00	-	-	-	-	-	-	3.335.167.650,00	3.152.436.250,00	94,52
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	971.728.000,00	868.902.100,00	-	-	-	-	-	-	971.728.000,00	868.902.100,00	89,42
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.2.15.0.00.04.0000	1.581.172.000,00	1.445.290.126,00	-	-	-	-	-	-	1.581.172.000,00	1.445.290.126,00	91,41
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	54.760.000,00	11.274.000,00	1.106.653.750,00	1.060.352.130,00	-	-	-	-	1.161.413.750,00	1.071.626.130,00	92,27

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.1.03.2.10.05.0000	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	-	-	-	-	-	-	25.934.904.000,00	25.805.050.000,00	99,50
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	24.476.000,00	10.483.800,00	-	-	-	-	-	-	24.476.000,00	10.483.800,00	42,83
3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	(1) Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	829.699.200,00	828.530.853,00	-	-	-	-	-	-	829.699.200,00	828.530.853,00	99,86
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	807.534.900,00	784.680.250,00	-	-	-	-	-	-	807.534.900,00	784.680.250,00	97,17
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	173.292.250,00	157.049.370,00	-	-	-	-	-	-	173.292.250,00	157.049.370,00	90,63
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	218.295.000,00	217.371.982,00	-	-	-	-	-	-	218.295.000,00	217.371.982,00	99,58
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	360.784.493,00	342.220.409,00	-	-	-	-	-	-	360.784.493,00	342.220.409,00	94,85
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	506.909.000,00	495.270.550,00	-	-	-	-	-	-	506.909.000,00	495.270.550,00	97,70
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	1.543.760.806,00	1.285.697.034,00	47.508.000,00	46.019.640,00	-	-	-	-	1.591.268.806,00	1.331.716.674,00	83,69
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	148.395.050,00	146.283.569,00	-	-	-	-	-	-	148.395.050,00	146.283.569,00	98,58
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	2.572.710.125,00	2.427.947.491,00	-	-	-	-	-	-	2.572.710.125,00	2.427.947.491,00	94,37
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	103.004.000,00	32.460.400,00	-	-	-	-	-	-	103.004.000,00	32.460.400,00	31,51
			Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	-	-	-	-	-	-	4.633.978.740,00	3.907.632.591,00	84,33
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	104.525.750,00	96.066.259,00	-	-	-	-	-	-	104.525.750,00	96.066.259,00	91,91
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	135.140.000,00	111.657.182,00	-	-	-	-	-	-	135.140.000,00	111.657.182,00	82,62
			Program Pengembangan UMKM;	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	-	-	-	-	-	-	7.298.631.425,00	7.063.230.603,00	96,77
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	116.512.500,00	56.312.780,00	-	-	-	-	-	-	116.512.500,00	56.312.780,00	48,33
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	11.481.689.207,00	11.141.342.420,00	1.989.675.040,00	1.883.710.000,00	-	-	-	-	13.471.364.247,00	13.025.052.420,00	96,69
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	27.517.000,00	14.735.000,00	-	-	-	-	-	-	27.517.000,00	14.735.000,00	53,55
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	27.517.000,00	14.735.000,00	-	-	-	-	-	-	27.517.000,00	14.735.000,00	53,55

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	431.274.000,00	301.272.317,00	-	-	-	-	-	-	431.274.000,00	301.272.317,00	69,86
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	395.609.000,00	285.272.181,00	-	-	-	-	-	-	395.609.000,00	285.272.181,00	72,11
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	354.658.500,00	269.132.427,00	-	-	-	-	-	-	354.658.500,00	269.132.427,00	75,88
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	206.928.959,00	199.306.730,00	-	-	-	-	-	-	206.928.959,00	199.306.730,00	96,32
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	64.473.300,00	31.356.570,00	-	-	-	-	-	-	64.473.300,00	31.356.570,00	48,63
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	47.268.000,00	43.181.124,00	-	-	-	-	-	-	47.268.000,00	43.181.124,00	91,35
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	855.466.950,00	834.839.432,00	27.100.000,00	26.516.790,00	-	-	-	-	882.566.950,00	861.356.222,00	97,60
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	247.357.000,00	244.392.880,00	-	-	-	-	-	-	247.357.000,00	244.392.880,00	98,80
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	150.131.000,00	125.735.428,00	621.112.450,00	565.440.250,00	-	-	-	-	771.243.450,00	691.175.678,00	89,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	62.326.000,00	47.677.200,00	-	-	-	-	-	-	62.326.000,00	47.677.200,00	76,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	70.186.505,00	48.472.966,00	-	-	-	-	-	-	70.186.505,00	48.472.966,00	69,06
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	103.101.230,33	98.611.385,00	54.312.300,00	47.100.000,00	-	-	-	-	157.413.530,33	145.711.385,00	92,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	83.637.189,50	74.833.000,00	-	-	-	-	-	-	83.637.189,50	74.833.000,00	89,47
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	-	-	-	-	-	-	5.473.626.142,00	4.267.695.430,00	77,97
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	-	-	-	-	-	-	10.508.528.008,00	9.270.105.758,00	88,22
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	-	-	-	-	-	-	10.177.083.129,00	8.795.133.937,00	86,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	86.274.000,00	84.553.900,00	-	-	-	-	-	-	86.274.000,00	84.553.900,00	98,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	77.892.000,00	23.948.200,00	-	-	-	-	-	-	77.892.000,00	23.948.200,00	30,75
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	124.110.500,00	96.151.500,00	-	-	-	-	-	-	124.110.500,00	96.151.500,00	77,47
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	329.405.625,00	325.749.236,00	147.885.900,00	140.701.150,00	-	-	-	-	477.291.525,00	466.450.386,00	97,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	522.055.030,50	506.683.312,00	3.041.190.821,00	2.921.364.875,00	-	-	-	-	3.563.245.851,50	3.428.048.187,00	96,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	457.183.657,00	396.305.150,00	120.706.173,00	117.700.000,00	-	-	-	-	577.889.830,00	514.005.150,00	88,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	354.720.000,00	354.578.400,00	69.469.000,00	69.082.000,00	-	-	-	-	424.189.000,00	423.660.400,00	99,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	-	-	24.628.680,00	22.115.000,00	-	-	-	-	24.628.680,00	22.115.000,00	89,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	523.895.600,00	423.930.818,00	-	-	-	-	-	-	523.895.600,00	423.930.818,00	80,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	1.556.032.018,00	995.024.867,00	-	-	-	-	-	-	1.556.032.018,00	995.024.867,00	63,95

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	2.557.569.349,00	2.195.571.818,00	-	-	-	-	-	-	2.557.569.349,00	2.195.571.818,00	85,85
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.0.00.0.00.19.0000	146.350.000,00	135.896.055,00	49.987.400,00	49.902.350,00	-	-	-	-	196.337.400,00	185.798.405,00	94,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	766.393.200,00	582.189.156,00	-	-	-	-	-	-	766.393.200,00	582.189.156,00	75,96
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	358.401.500,00	234.001.186,00	7.407.520,00	7.407.520,00	-	-	-	-	365.809.020,00	241.408.706,00	65,99
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	47.417.000,00	23.494.300,00	-	-	-	-	-	-	47.417.000,00	23.494.300,00	49,55
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	1.513.169.050,00	1.291.347.356,00	200.000.000,00	198.493.000,00	-	-	-	-	1.713.169.050,00	1.489.840.356,00	86,96
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	8.287.278.791,00	8.131.639.296,00	-	-	-	-	-	-	8.287.278.791,00	8.131.639.296,00	98,12
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	82.999.500,00	82.993.529,00	-	-	-	-	-	-	82.999.500,00	82.993.529,00	99,99
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	9.545.964.376,00	7.637.669.710,00	-	-	-	-	-	-	9.545.964.376,00	7.637.669.710,00	80,01
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	3.984.947.750,00	2.974.209.557,00	-	-	-	-	-	-	3.984.947.750,00	2.974.209.557,00	74,64
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	17.565.000,00	15.199.000,00	-	-	-	-	-	-	17.565.000,00	15.199.000,00	86,53
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.576.508.540,00	3.248.237.967,00	37.800.000,00	35.115.000,00	-	-	-	-	3.614.308.540,00	3.283.352.967,00	90,84
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	2.771.673.142,00	2.763.446.753,00	9.945.600,00	9.920.000,00	-	-	-	-	2.781.618.742,00	2.773.366.753,00	99,70
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	-	-	-	-	-	-	3.970.705.983,50	2.695.863.906,00	67,89
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	-	-	-	-	-	-	2.801.583.701,00	2.530.660.080,00	90,33
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	950.073.362,50	827.327.532,00	435.334.492,00	343.516.350,00	-	-	-	-	1.385.407.854,50	1.170.843.882,00	84,51
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	69.851.000,00	15.674.500,00	-	-	-	-	-	-	69.851.000,00	15.674.500,00	22,44
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	35.667.000,00	6.842.500,00	-	-	-	-	-	-	35.667.000,00	6.842.500,00	19,18
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	245.431.378,00	161.666.700,00	-	-	-	-	-	-	245.431.378,00	161.666.700,00	65,87
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	1.190.081.000,00	843.468.510,00	-	-	-	-	-	-	1.190.081.000,00	843.468.510,00	70,87
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	395.431.400,00	392.654.897,00	-	-	-	-	-	-	395.431.400,00	392.654.897,00	99,30
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	24.491.000,00	8.102.300,00	-	-	-	-	-	-	24.491.000,00	8.102.300,00	33,08
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	835.894.000,00	596.662.550,00	-	-	-	-	-	-	835.894.000,00	596.662.550,00	71,38
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.3.31.0.00.26.0000	198.404.040,00	118.998.800,00	-	-	-	-	-	-	198.404.040,00	118.998.800,00	59,98
		(2) Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi melalui Peningkatan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	431.670.500,00	406.672.832,00	-	-	-	-	-	-	431.670.500,00	406.672.832,00	94,21
			Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	49.582.000,00	4.080.900,00	-	-	-	-	-	-	49.582.000,00	4.080.900,00	8,23
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	32.188.669.650,00	13.435.967.161,00	-	-	-	-	-	-	32.188.669.650,00	13.435.967.161,00	41,74

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	1.055.836.000,00	613.116.718,00	87.017.000,00	86.695.407,74	-	-	-	-	1.142.853.000,00	699.812.125,74	61,23
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	2.008.978.000,00	1.989.408.300,00	-	-	-	-	-	-	2.008.978.000,00	1.989.408.300,00	99,03
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	1.395.423.099,00	1.070.628.888,00	1.498.000.000,00	1.483.503.900,00	-	-	-	-	2.893.423.099,00	2.554.132.788,00	88,27
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	1.094.926.797,00	1.036.219.373,00	-	-	-	-	-	-	1.094.926.797,00	1.036.219.373,00	94,64
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	61.557.909.147,00	55.634.721.194,00	825.959.857,00	806.342.437,00	-	-	-	-	62.383.869.004,00	56.441.063.631,00	90,47
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	304.180.000,00	290.206.000,00	-	-	-	-	-	-	304.180.000,00	290.206.000,00	95,41
			Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	655.175.000,00	605.150.961,00	-	-	-	-	-	-	655.175.000,00	605.150.961,00	92,36
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	31.141.500,00	28.339.600,00	-	-	-	-	-	-	31.141.500,00	28.339.600,00	91,00
			Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	547.389.700,00	384.067.766,00	-	-	-	-	-	-	547.389.700,00	384.067.766,00	70,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	104.673.000,00	80.584.900,00	-	-	-	-	-	-	104.673.000,00	80.584.900,00	76,99
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	51.105.000,00	50.997.310,00	-	-	-	-	-	-	51.105.000,00	50.997.310,00	99,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	-	-	-	-	-	-	7.957.740.069,00	6.345.191.759,00	79,74
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	119.668.000,00	84.048.828,00	-	-	-	-	-	-	119.668.000,00	84.048.828,00	70,24
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	575.825.315,00	525.351.681,00	101.980.000,00	92.161.000,00	-	-	-	-	677.805.315,00	617.512.681,00	91,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	680.000,00	-	79.920.000,00	79.920.000,00	-	-	-	-	80.600.000,00	79.920.000,00	99,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.240.305.820,00	1.088.008.472,00	-	-	-	-	-	-	1.240.305.820,00	1.088.008.472,00	87,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	1.144.955.238,00	1.114.578.312,00	-	-	-	-	-	-	1.144.955.238,00	1.114.578.312,00	97,35
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	247.133.443.625,60	226.745.316.997,38	18.169.910.408,00	9.900.787.973,00	-	-	-	-	265.303.354.033,60	236.646.104.970,38	89,20
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	-	-	-	-	-	-	30.583.867.825,00	27.076.380.387,00	88,53
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.09.0000	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	-	-	-	-	-	-	2.091.978.700,00	1.933.595.346,00	92,43
		(5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	165.655.000,00	110.002.091,00	-	-	-	-	-	-	165.655.000,00	110.002.091,00	66,40
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	11.388.000,00	9.605.000,00	-	-	-	-	-	-	11.388.000,00	9.605.000,00	84,34
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	-	-	-	-	-	-	4.506.892.000,00	3.929.650.844,00	87,19

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	286.397.500,00	278.225.521,00	-	-	-	-	-	-	286.397.500,00	278.225.521,00	97,15
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	-	-	-	-	-	-	2.148.770.800,00	2.095.104.372,00	97,50
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	156.038.586,00	153.717.042,00	-	-	-	-	-	-	156.038.586,00	153.717.042,00	98,51
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	71.504.000,00	68.667.742,00	-	-	-	-	-	-	71.504.000,00	68.667.742,00	96,03
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	39.240.000,00	39.113.547,00	-	-	-	-	-	-	39.240.000,00	39.113.547,00	99,68
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	41.539.000,00	41.505.155,00	-	-	-	-	-	-	41.539.000,00	41.505.155,00	99,92
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	114.488.040,00	104.311.969,00	-	-	-	-	-	-	114.488.040,00	104.311.969,00	91,11
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	23.421.000,00	8.360.000,00	-	-	-	-	-	-	23.421.000,00	8.360.000,00	35,69
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	381.819.890,00	243.381.606,00	-	-	-	-	-	-	381.819.890,00	243.381.606,00	63,74
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	220.562.054,00	189.903.261,00	181.263.460,00	180.754.570,00	-	-	-	-	401.825.514,00	370.657.831,00	92,24
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	1.545.841.660,00	1.350.129.786,00	84.292.051,00	63.758.400,00	-	-	-	-	1.630.133.711,00	1.413.888.186,00	86,73
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	343.150.000,00	342.635.650,00	-	-	-	-	-	-	343.150.000,00	342.635.650,00	99,85
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	128.060.450,00	122.254.977,00	-	-	-	-	-	-	128.060.450,00	122.254.977,00	95,47
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	206.948.461,00	204.939.036,00	-	-	-	-	-	-	206.948.461,00	204.939.036,00	99,03
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	14.863.324.200,00	14.677.982.999,00	39.313.774.334,00	37.208.922.129,00	-	-	-	-	54.177.098.534,00	51.886.905.128,00	95,77
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan ur	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	61.557.909.147,00	55.634.721.194,00	825.959.857,00	806.342.437,00	-	-	-	-	62.383.869.004,00	56.441.063.631,00	90,47
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informas	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	132.970.000,00	126.693.460,00	-	-	-	-	-	-	132.970.000,00	126.693.460,00	95,28
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kela	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	211.194.000,00	136.431.578,00	-	-	-	-	-	-	211.194.000,00	136.431.578,00	64,60
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan I	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	40.987.545,00	35.035.642,00	-	-	-	-	-	-	40.987.545,00	35.035.642,00	85,48
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah K	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig	2.07.0.00.5.06.10.0000	152.769.925,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	152.769.925,00	1.800.000,00	1,18
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig	2.07.0.00.5.06.10.0000	311.387.900,00	186.033.602,00	-	-	-	-	-	-	311.387.900,00	186.033.602,00	59,74
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna I	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig	2.07.0.00.5.06.10.0000	47.428.000,00	45.754.111,00	-	-	-	-	-	-	47.428.000,00	45.754.111,00	96,47
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	116.743.625,00	114.317.925,00	-	-	-	-	-	-	116.743.625,00	114.317.925,00	97,92

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	485.675.300,00	465.949.722,00	-	-	-	-	-	-	485.675.300,00	465.949.722,00	95,94
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keaman	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	163.727.019,00	136.593.249,00	-	-	-	-	-	-	163.727.019,00	136.593.249,00	83,43
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan P	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	-	-	-	-	-	-	8.771.193.000,00	8.767.754.965,00	99,96
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	63.687.903.886,00	62.881.738.645,00	50.857.919.444,00	49.451.692.070,50	-	-	-	-	114.545.823.330,00	112.333.430.715,50	98,07
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	40.810.172.047,00	39.166.165.521,00	25.646.055.843,00	25.215.912.721,00	-	-	-	-	66.456.227.890,00	64.382.078.242,00	96,88
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	19.277.152.500,00	19.113.735.222,92	1.053.440.000,00	1.052.288.092,08	-	-	-	-	20.330.592.500,00	20.166.023.315,00	99,19
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.783.493.000,00	1.756.857.766,00	31.363.900,00	30.660.420,00	-	-	-	-	1.814.856.900,00	1.787.518.186,00	98,49
			Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	185.466.000,00	182.512.000,00	229.885.000,00	229.560.000,00	-	-	-	-	415.351.000,00	412.072.000,00	99,21
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	99.387.200,00	61.180.378,00	-	-	-	-	-	-	99.387.200,00	61.180.378,00	61,56
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	19.305.229.023,00	17.873.999.983,00	24.974.440.500,00	19.348.928.500,00	-	-	-	-	44.279.669.523,00	37.222.928.483,00	84,06
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	19.305.229.023,00	17.873.999.983,00	24.974.440.500,00	19.348.928.500,00	-	-	-	-	44.279.669.523,00	37.222.928.483,00	84,06
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	11.117.181.250,00	9.394.894.192,00	55.470.000,00	-	-	-	-	-	11.172.651.250,00	9.394.894.192,00	84,09
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	28.586.098.300,00	27.048.384.929,00	-	-	-	-	-	-	28.586.098.300,00	27.048.384.929,00	94,62
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	1.397.829.839,00	1.331.168.993,00	-	-	-	-	-	-	1.397.829.839,00	1.331.168.993,00	95,23
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	667.150.500,00	498.619.006,00	-	-	-	-	-	-	667.150.500,00	498.619.006,00	74,74
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	237.526.000,00	179.928.918,00	-	-	-	-	-	-	237.526.000,00	179.928.918,00	75,75
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	-	-	-	-	-	-	3.181.772.150,00	3.080.528.438,00	96,82
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	171.004.000,00	166.880.400,00	-	-	-	-	-	-	171.004.000,00	166.880.400,00	97,59
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.833.138.825,00	4.746.902.333,00	199.100.000,00	197.932.425,00	-	-	-	-	5.032.238.825,00	4.944.834.758,00	98,26
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	123.364.900,00	119.108.224,00	-	-	-	-	-	-	123.364.900,00	119.108.224,00	96,55
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	-	-	-	-	-	-	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	99,19
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	1.107.555.000,00	1.095.099.272,00	200.000.000,00	199.395.000,00	-	-	-	-	1.307.555.000,00	1.294.494.272,00	99,00
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	734.681.692,00	488.346.321,00	-	-	-	-	-	-	734.681.692,00	488.346.321,00	66,47
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	194.217.000,00	158.460.900,00	1.540.000,00	-	-	-	-	-	195.757.000,00	158.460.900,00	80,95

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	1.221.258.700,00	1.188.123.414,00	-	-	-	-	-	-	1.221.258.700,00	1.188.123.414,00	97,29
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	19.980.000,00	19.577.358,00	-	-	-	-	-	-	19.980.000,00	19.577.358,00	97,98
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	252.755.000,00	101.592.980,00	-	-	-	-	-	-	252.755.000,00	101.592.980,00	40,19
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	993.743.000,00	744.935.233,00	-	-	-	-	-	-	993.743.000,00	744.935.233,00	74,96
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.021.742.513,00	818.876.296,00	37.947.737,00	37.257.150,00	-	-	-	-	1.059.690.250,00	856.133.446,00	80,79
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	343.355.140,00	292.443.515,00	-	-	-	-	-	-	343.355.140,00	292.443.515,00	85,17
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	-	-	-	-	-	-	1.742.217.170,00	1.728.073.545,00	99,19
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	123.749.850,00	112.497.850,00	-	-	-	-	-	-	123.749.850,00	112.497.850,00	90,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	169.255.510,00	127.053.949,00	-	-	-	-	-	-	169.255.510,00	127.053.949,00	75,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	11.592.000,00	-	-	-	-	-	-	-	11.592.000,00	-	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	-	-	-	-	-	-	772.564.354.246,00	707.323.157.249,00	91,56
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	-	-	-	-	-	-	268.274.333.909,00	258.009.354.734,00	96,17
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	-	-	-	-	-	-	3.546.976.571,00	3.212.461.039,00	90,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	97.385.000,00	78.796.900,00	-	-	-	-	-	-	97.385.000,00	78.796.900,00	80,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	100.355.000,00	85.700.000,00	-	-	-	-	-	-	100.355.000,00	85.700.000,00	85,40
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	46.575.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-	-	-	46.575.000,00	19.200.000,00	41,22
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	600.080.140,00	588.815.222,00	514.564.900,00	514.048.660,00	-	-	-	-	1.114.645.040,00	1.102.863.882,00	98,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	556.068.902,00	466.812.569,00	116.792.000,00	114.799.998,00	-	-	-	-	672.860.902,00	581.612.567,00	86,44
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	455.756.251,00	432.156.175,00	119.097.726,00	116.991.557,00	-	-	-	-	574.853.977,00	549.147.732,00	95,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	184.023.082,20	168.372.103,00	49.405.656,00	49.284.000,00	-	-	-	-	233.428.738,20	217.656.103,00	93,24
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	723.600.000,00	685.391.998,00	453.058.200,00	392.679.000,00	-	-	-	-	1.176.658.200,00	1.078.070.998,00	91,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	2.909.060,00	2.180.000,00	57.770.940,00	54.556.500,00	-	-	-	-	60.680.000,00	56.736.500,00	93,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	680.000,00	680.000,00	30.059.332,80	30.058.800,00	-	-	-	-	30.739.332,80	30.738.800,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	8.436.842.400,00	5.036.945.005,00	-	-	-	-	-	-	8.436.842.400,00	5.036.945.005,00	59,70
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	30.510.206.934,00	22.216.816.587,00	-	-	-	-	-	-	30.510.206.934,00	22.216.816.587,00	72,82

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	270.273.203,00	229.615.234,00	-	-	-	-	-	-	270.273.203,00	229.615.234,00	84,96
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.405.894.600,00	1.145.356.700,00	1.500.000.000,00	926.679.000,00	-	-	-	-	2.905.894.600,00	2.072.035.700,00	71,30
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.181.740.000,00	922.547.894,00	-	-	-	-	-	-	1.181.740.000,00	922.547.894,00	78,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	212.824.800,00	196.617.513,00	-	-	-	-	-	-	212.824.800,00	196.617.513,00	92,38
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	15.000.000,00	14.441.750,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	14.441.750,00	96,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	90.970.000,00	88.897.935,00	-	-	-	-	-	-	90.970.000,00	88.897.935,00	97,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	247.133.443.625,60	226.745.316.997,38	18.169.910.408,00	9.900.787.973,00	-	-	-	-	265.303.354.033,60	236.646.104.970,38	89,20
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	316.685.000,00	274.133.450,00	-	-	-	-	-	-	316.685.000,00	274.133.450,00	86,56
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	10.934.340,00	5.894.340,00	-	-	-	-	-	-	10.934.340,00	5.894.340,00	53,91
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lais	7.01.0.00.0.00.30.0000	8.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.550.000,00	-	-
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	364.317.050,00	138.730.545,00	-	-	-	-	-	-	364.317.050,00	138.730.545,00	38,08
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	625.983.000,00	496.807.023,00	-	-	-	-	-	-	625.983.000,00	496.807.023,00	79,36
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	156.824.400,00	140.250.686,00	-	-	-	-	-	-	156.824.400,00	140.250.686,00	89,43
			Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	40.552.000,00	40.167.859,00	-	-	-	-	-	-	40.552.000,00	40.167.859,00	99,05
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	130.415.000,00	112.151.206,00	-	-	-	-	-	-	130.415.000,00	112.151.206,00	86,00
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	104.930.800,00	73.806.760,00	-	-	-	-	-	-	104.930.800,00	73.806.760,00	70,34
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	36.296.000,00	35.280.716,00	-	-	-	-	-	-	36.296.000,00	35.280.716,00	97,20
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000	52.524.996,00	44.591.403,00	-	-	-	-	-	-	52.524.996,00	44.591.403,00	84,90
4	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	(6) Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Inovatif dan Melayani	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	-	-	-	-	-	-	6.154.538.513,00	5.614.283.526,00	91,22
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	2.030.026.525,00	485.536.387,00	-	-	-	-	-	-	2.030.026.525,00	485.536.387,00	23,92
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	4.260.530.713,00	2.147.239.383,00	-	-	-	-	-	-	4.260.530.713,00	2.147.239.383,00	50,40
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pen	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	-	-	-	-	-	-	1.495.369.654,00	1.483.336.489,00	99,20
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	3.585.007.300,00	3.245.556.538,00	-	-	-	-	-	-	3.585.007.300,00	3.245.556.538,00	90,53
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	6.284.876.169,19	1.126.474.775,00	-	-	-	-	-	-	6.284.876.169,19	1.126.474.775,00	17,92
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	-	-	-	-	-	-	1.571.160.000,00	1.499.306.495,00	95,43

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	10.301.932.600,00	8.571.492.323,00	-	-	-	-	-	-	10.301.932.600,00	8.571.492.323,00	83,20
			Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	408.449.800,00	404.152.638,00	-	-	-	-	-	-	408.449.800,00	404.152.638,00	98,95
			Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	548.275.050,00	349.395.663,00	-	-	-	-	-	-	548.275.050,00	349.395.663,00	63,73
			Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	5.280.373.975,00	4.383.643.004,00	-	-	-	-	-	-	5.280.373.975,00	4.383.643.004,00	83,02
			Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	287.811.350,00	268.177.331,00	-	-	-	-	-	-	287.811.350,00	268.177.331,00	93,18
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	533.470.500,00	457.891.111,00	-	-	-	-	-	-	533.470.500,00	457.891.111,00	85,83
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	230.235.000,00	196.409.737,00	-	-	-	-	-	-	230.235.000,00	196.409.737,00	85,31
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	1.421.881.320,00	1.279.339.420,00	-	-	-	-	-	-	1.421.881.320,00	1.279.339.420,00	89,98
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	12.455.430,00	11.840.000,00	-	-	-	-	-	-	12.455.430,00	11.840.000,00	95,06
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	6.390.000,00	6.390.000,00	-	-	-	-	-	-	6.390.000,00	6.390.000,00	100,00
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	5.325.000,00	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-	5.325.000,00	1.425.000,00	26,76
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.650.000,00	7.475.000,00	-	-	-	-	-	-	7.650.000,00	7.475.000,00	97,71
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.206.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.206.000,00	3.500.000,00	48,57
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	4.500.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	4.200.000,00	93,33
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	10.850.000,00	10.730.000,00	-	-	-	-	-	-	10.850.000,00	10.730.000,00	98,89
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	8.400.000,00	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	5.250.000,00	62,50
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	6.880.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.880.000,00	6.000.000,00	87,21
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	15.240.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	15.240.000,00	13.500.000,00	88,58
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	-	-	-	-	-	-	1.129.583.525,00	1.081.214.501,00	95,72
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	-	-	-	-	-	-	2.817.447.400,00	2.468.955.933,00	87,63
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Babat	7.01.0.00.0.00.31.0000	647.076.672,00	249.531.410,00	-	-	-	-	-	-	647.076.672,00	249.531.410,00	38,56
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mangun Jaya	7.01.0.00.0.00.31.0000	673.945.648,38	249.539.239,00	-	-	-	-	-	-	673.945.648,38	249.539.239,00	37,03
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	691.732.971,00	671.201.985,00	7.281.600,00	7.261.600,00	-	-	-	-	699.014.571,00	678.463.585,00	97,06
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bayung Lencir Indah	7.01.0.00.0.00.38.0000	696.112.426,00	684.177.963,00	8.158.500,00	8.158.500,00	-	-	-	-	704.270.926,00	692.336.463,00	98,31
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	691.855.452,00	670.228.765,00	-	-	-	-	-	-	691.855.452,00	670.228.765,00	96,87
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Ngulak I	7.01.0.00.0.00.33.0000	676.823.459,00	675.661.605,00	30.747.000,00	30.525.000,00	-	-	-	-	707.570.459,00	706.186.605,00	99,80
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Ngulak I	7.01.0.00.0.00.33.0000	706.340.069,00	676.341.870,00	1.665.000,00	1.665.000,00	-	-	-	-	708.005.069,00	678.006.870,00	95,76

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Serasan Jaya	7.01.0.00.0.00.29.0000	504.014.061,00	493.169.765,00	-	-	-	-	-	-	504.014.061,00	493.169.765,00	97,85
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Soak Baru	7.01.0.00.0.00.29.0000	598.043.864,98	574.841.628,00	-	-	-	-	-	-	598.043.864,98	574.841.628,00	96,12
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Balai Agung	7.01.0.00.0.00.29.0000	194.186.167,00	175.300.548,00	352.077.920,00	341.583.640,00	-	-	-	-	546.264.087,00	516.884.188,00	94,62
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kayuara	7.01.0.00.0.00.29.0000	587.345.874,00	413.175.061,00	-	-	-	-	-	-	587.345.874,00	413.175.061,00	70,35
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	700.000.000,00	626.366.340,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	626.366.340,00	89,48
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	7.01.0.00.0.00.37.0000	700.000.000,00	617.561.052,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	617.561.052,00	88,22
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	66.780.000,00	56.872.000,00	-	-	-	-	-	-	66.780.000,00	56.872.000,00	85,16
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	11.475.000,00	11.475.000,00	-	-	-	-	-	-	11.475.000,00	11.475.000,00	100,00
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	4.470.000,00	4.350.000,00	-	-	-	-	-	-	4.470.000,00	4.350.000,00	97,32
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	18.923.499,00	18.671.615,00	-	-	-	-	-	-	18.923.499,00	18.671.615,00	98,67
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	11.840.000,00	8.200.000,00	-	-	-	-	-	-	11.840.000,00	8.200.000,00	69,26
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	6.700.000,00	4.940.000,00	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	4.940.000,00	73,73
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	11.340.000,00	6.705.000,00	-	-	-	-	-	-	11.340.000,00	6.705.000,00	59,13
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	12.982.500,00	12.885.000,00	-	-	-	-	-	-	12.982.500,00	12.885.000,00	99,25
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	13.630.000,00	13.020.000,00	-	-	-	-	-	-	13.630.000,00	13.020.000,00	95,52
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	44.240.000,00	42.490.000,00	-	-	-	-	-	-	44.240.000,00	42.490.000,00	96,04
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	13.770.000,00	11.250.000,00	-	-	-	-	-	-	13.770.000,00	11.250.000,00	81,70
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	13.760.000,00	5.700.000,00	-	-	-	-	-	-	13.760.000,00	5.700.000,00	41,42
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	14.160.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-	-	-	14.160.000,00	13.200.000,00	93,22
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	220.562.054,00	189.903.261,00	181.263.460,00	180.754.570,00	-	-	-	-	401.825.514,00	370.657.831,00	92,24
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	1.545.841.660,00	1.350.129.786,00	84.292.051,00	63.758.400,00	-	-	-	-	1.630.133.711,00	1.413.888.186,00	86,73
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.526.472.727,00	1.183.731.083,00	-	-	-	-	-	-	1.526.472.727,00	1.183.731.083,00	77,55
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	21.036.689.941,00	20.086.001.197,00	-	-	-	-	-	-	21.036.689.941,00	20.086.001.197,00	95,48
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	846.127.567,00	599.415.085,00	-	-	-	-	-	-	846.127.567,00	599.415.085,00	70,84
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	361.198.000,00	248.071.482,00	-	-	-	-	-	-	361.198.000,00	248.071.482,00	68,68
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	22.851.537,00	21.701.300,00	-	-	-	-	-	-	22.851.537,00	21.701.300,00	94,97
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	511.732.000,00	502.151.586,00	-	-	-	-	-	-	511.732.000,00	502.151.586,00	98,13
			Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	163.297.000,00	160.152.813,00	-	-	-	-	-	-	163.297.000,00	160.152.813,00	98,07
			Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	91.844.402,00	89.753.986,00	-	-	-	-	-	-	91.844.402,00	89.753.986,00	97,72

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	593.931.000,00	569.398.502,00	4.355.000.000,00	4.139.967.000,00	-	-	-	-	4.948.931.000,00	4.709.365.502,00	95,16
			Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	325.986.500,00	263.928.227,00	-	-	-	-	-	-	325.986.500,00	263.928.227,00	80,96
			Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	126.715.419,00	100.310.645,00	-	-	-	-	-	-	126.715.419,00	100.310.645,00	79,16
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	248.207.228,00	166.810.842,00	-	-	-	-	-	-	248.207.228,00	166.810.842,00	67,21
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	104.145.212,00	76.287.936,00	656.121,00	-	-	-	-	-	104.801.333,00	76.287.936,00	72,79
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	234.627.839,85	192.228.577,00	-	-	-	-	-	-	234.627.839,85	192.228.577,00	81,93
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	171.427.898,00	138.409.082,00	-	-	-	-	-	-	171.427.898,00	138.409.082,00	80,74
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	11.802.830.159,50	10.773.664.959,00	154.330.381,80	-	-	-	-	-	11.957.160.541,30	10.773.664.959,00	90,10
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	115.265.432,00	83.046.174,00	52.978.025,00	27.875.763,00	-	-	-	-	168.243.457,00	110.921.937,00	65,93
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	255.558.161,00	216.784.212,00	-	-	-	-	-	-	255.558.161,00	216.784.212,00	84,83
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	1.130.733.500,00	957.115.959,00	-	-	-	-	-	-	1.130.733.500,00	957.115.959,00	84,65
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	59.802.000,00	58.420.074,00	-	-	-	-	-	-	59.802.000,00	58.420.074,00	97,69
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	344.803.345,00	332.137.884,00	-	-	-	-	-	-	344.803.345,00	332.137.884,00	96,33
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	1.573.873.426,00	1.242.564.428,00	2.912.466.255,00	2.816.824.720,00	-	-	-	-	4.486.339.681,00	4.059.389.148,00	90,48
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	198.522.651,00	85.337.125,00	-	-	-	-	-	-	198.522.651,00	85.337.125,00	42,99
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	527.541.432,00	311.835.404,00	-	-	-	-	-	-	527.541.432,00	311.835.404,00	59,11
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	7.871.117.559,50	7.199.820.149,00	332.898.870,70	229.580.007,00	-	-	-	-	8.204.016.430,20	7.429.400.156,00	90,56
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	94.778.104,00	60.989.533,00	-	-	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	###############	###############	550.189.185.862,55	531.178.467.809,00	96,54
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	811.825.000,00	710.036.237,00	-	-	-	-	-	-	811.825.000,00	710.036.237,00	87,46
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	1.510.199.950,00	1.423.401.393,00	-	-	-	-	-	-	1.510.199.950,00	1.423.401.393,00	94,25
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	614.622.650,00	506.521.411,00	-	-	-	-	-	-	614.622.650,00	506.521.411,00	82,41
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	220.420.650,00	148.148.575,00	-	-	-	-	-	-	220.420.650,00	148.148.575,00	67,21
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	4.523.330.000,00	3.033.522.551,00	32.573.900,00	24.907.901,00	-	-	-	-	4.555.903.900,00	3.058.430.452,00	67,13
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	51.919.700,00	51.825.575,00	-	-	-	-	-	-	51.919.700,00	51.825.575,00	99,82
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	97.640.900,00	77.942.710,00	-	-	-	-	-	-	97.640.900,00	77.942.710,00	79,83
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.021.742.513,00	818.876.296,00	37.947.737,00	37.257.150,00	-	-	-	-	1.059.690.250,00	856.133.446,00	80,79
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	565.769.460,00	475.319.600,00	-	-	-	-	-	-	565.769.460,00	475.319.600,00	84,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	32.676.000,00	11.128.000,00	-	-	-	-	-	-	32.676.000,00	11.128.000,00	34,06

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	50.672.000,00	40.110.800,00	-	-	-	-	-	-	50.672.000,00	40.110.800,00	79,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	51.667.127,72	46.377.400,00	-	-	-	-	-	-	51.667.127,72	46.377.400,00	89,76
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	88.580.500,00	56.213.580,00	-	-	-	-	-	-	88.580.500,00	56.213.580,00	63,46
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	49.885.566,00	24.261.342,00	-	-	-	-	-	-	49.885.566,00	24.261.342,00	48,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	72.897.378,00	56.959.380,00	-	-	-	-	-	-	72.897.378,00	56.959.380,00	78,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	90.723.800,00	59.645.480,00	-	-	-	-	-	-	90.723.800,00	59.645.480,00	65,74
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	67.421.500,00	40.727.600,00	-	-	-	-	-	-	67.421.500,00	40.727.600,00	60,41
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	123.204.300,00	99.459.212,00	-	-	-	-	-	-	123.204.300,00	99.459.212,00	80,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	65.389.500,00	52.344.957,00	-	-	-	-	-	-	65.389.500,00	52.344.957,00	80,05
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	75.587.500,00	50.464.386,00	-	-	-	-	-	-	75.587.500,00	50.464.386,00	66,76
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	51.105.000,00	50.997.310,00	-	-	-	-	-	-	51.105.000,00	50.997.310,00	99,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	69.557.150,00	54.840.000,00	-	-	-	-	-	-	69.557.150,00	54.840.000,00	78,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	51.412.000,00	25.662.610,00	-	-	-	-	-	-	51.412.000,00	25.662.610,00	49,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	261.584.630,00	161.014.111,00	-	-	-	-	-	-	261.584.630,00	161.014.111,00	61,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	64.983.227,50	57.789.226,00	-	-	-	-	-	-	64.983.227,50	57.789.226,00	88,93
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	103.101.230,33	98.611.385,00	54.312.300,00	47.100.000,00	-	-	-	-	157.413.530,33	145.711.385,00	92,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	84.785.000,00	77.110.900,00	-	-	-	-	-	-	84.785.000,00	77.110.900,00	90,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	90.771.300,00	69.786.878,00	-	-	-	-	-	-	90.771.300,00	69.786.878,00	76,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	15.358.974,00	5.718.000,00	-	-	-	-	-	-	15.358.974,00	5.718.000,00	37,23
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	17.499.940,05	17.464.335,00	-	-	-	-	-	-	17.499.940,05	17.464.335,00	99,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.156.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	7.156.000,00	75.000,00	1,05
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	17.858.000,00	16.877.000,00	-	-	-	-	-	-	17.858.000,00	16.877.000,00	94,51
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	12.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.475.000,00	-	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	21.565.200,00	14.729.600,00	-	-	-	-	-	-	21.565.200,00	14.729.600,00	68,30

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	20.978.000,00	18.582.000,00	-	-	-	-	-	-	20.978.000,00	18.582.000,00	88,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.020.000,00	-	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	14.601.000,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-	-	14.601.000,00	4.900.000,00	33,56
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	13.995.000,00	13.875.000,00	-	-	-	-	-	-	13.995.000,00	13.875.000,00	99,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	15.706.000,00	14.118.000,00	-	-	-	-	-	-	15.706.000,00	14.118.000,00	89,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	8.630.000,00	8.314.000,00	-	-	-	-	-	-	8.630.000,00	8.314.000,00	96,34
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	3.552.000,00	3.552.000,00	-	-	-	-	-	-	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	3.495.047,00	3.485.500,00	-	-	-	-	-	-	3.495.047,00	3.485.500,00	99,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	101.472.000,00	48.410.856,00	-	-	-	-	-	-	101.472.000,00	48.410.856,00	47,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	71.478.894,50	68.228.209,00	-	-	-	-	-	-	71.478.894,50	68.228.209,00	95,45
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	35.447.950,00	34.950.300,00	-	-	-	-	-	-	35.447.950,00	34.950.300,00	98,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	-	-	-	-	-	-	10.035.706.672,00	8.607.798.164,00	85,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	-	-	-	-	-	-	6.090.240.819,00	5.244.241.497,00	86,11
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.08.0000	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	-	-	-	-	-	-	7.501.912.693,70	6.204.915.856,00	82,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	-	-	-	-	-	-	12.455.866.618,05	11.189.248.078,00	89,83
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	-	-	-	-	-	-	29.664.788.265,00	21.505.855.370,44	72,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	-	-	-	-	-	-	13.311.622.748,00	11.573.971.256,00	86,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	-	-	-	-	-	-	10.598.617.187,00	9.395.341.213,00	88,65
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	-	-	-	-	-	-	6.280.357.133,00	5.166.903.803,00	82,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	7.688.530.587,00	6.843.938.862,00	-	-	-	-	-	-	7.688.530.587,00	6.843.938.862,00	89,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	-	-	-	-	-	-	6.102.962.376,00	4.674.287.623,00	76,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	-	-	-	-	-	-	6.069.903.639,00	5.133.056.640,00	84,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	-	-	-	-	-	-	9.423.530.076,00	8.549.813.622,00	90,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	-	-	-	-	-	-	9.617.299.460,00	8.488.962.073,00	88,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	-	-	-	-	-	-	8.358.875.877,00	7.196.042.691,00	86,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	-	-	-	-	-	-	7.602.201.103,00	6.520.441.550,00	85,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	-	-	-	-	-	-	9.276.486.946,00	7.875.649.120,00	84,90
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	-	-	-	-	-	-	7.476.594.326,00	6.454.024.589,00	86,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	-	-	-	-	-	-	26.528.357.893,02	21.425.153.738,00	80,76

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	-	-	-	-	-	-	7.766.652.740,00	6.751.893.083,00	86,93
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	-	-	-	-	-	-	21.648.192.108,00	17.425.440.205,00	80,49
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	-	-	-	-	-	-	2.613.214.200,50	2.078.747.858,00	79,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	-	-	-	-	-	-	4.535.273.045,00	4.260.706.374,00	93,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	-	-	-	-	-	-	2.881.959.957,00	2.034.093.163,00	70,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	-	-	-	-	-	-	3.661.782.065,00	3.141.970.430,00	85,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	-	-	-	-	-	-	2.314.686.608,00	1.743.736.066,00	75,33
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	-	-	-	-	-	-	3.774.985.451,00	2.960.294.409,00	78,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	-	-	-	-	-	-	3.391.844.367,00	2.402.258.314,00	70,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	-	-	-	-	-	-	3.250.582.148,00	2.951.633.190,00	90,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	-	-	-	-	-	-	2.927.734.895,70	2.276.920.190,00	77,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	-	-	-	-	-	-	4.030.848.576,00	3.499.637.188,00	86,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	-	-	-	-	-	-	8.353.190.629,00	7.643.258.915,00	91,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	-	-	-	-	-	-	4.127.883.854,00	3.392.316.922,00	82,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	-	-	-	-	-	-	3.026.789.605,00	2.466.822.362,00	81,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	-	-	-	-	-	-	23.399.622.621,00	21.009.396.196,00	89,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	-	-	-	-	-	-	34.652.564.015,00	29.680.627.981,00	85,65
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	-	-	-	-	-	-	9.935.827.448,00	8.106.396.489,00	81,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	46.282.500,00	42.729.250,00	-	-	-	-	-	-	46.282.500,00	42.729.250,00	92,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	36.902.500,00	36.902.500,00	-	-	-	-	-	-	36.902.500,00	36.902.500,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	122.582.000,00	111.620.062,00	-	-	-	-	-	-	122.582.000,00	111.620.062,00	91,06
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	91.622.000,00	90.392.315,00	-	-	-	-	-	-	91.622.000,00	90.392.315,00	98,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	40.730.000,00	38.965.150,00	-	-	-	-	-	-	40.730.000,00	38.965.150,00	95,67
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	43.925.000,00	43.319.240,00	-	-	-	-	-	-	43.925.000,00	43.319.240,00	98,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	52.728.750,00	51.901.008,00	-	-	-	-	-	-	52.728.750,00	51.901.008,00	98,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	68.734.750,00	66.945.720,00	-	-	-	-	-	-	68.734.750,00	66.945.720,00	97,40
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	52.371.000,00	52.225.275,00	-	-	-	-	-	-	52.371.000,00	52.225.275,00	99,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	52.440.000,00	50.977.800,00	-	-	-	-	-	-	52.440.000,00	50.977.800,00	97,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	88.191.250,00	88.051.331,00	-	-	-	-	-	-	88.191.250,00	88.051.331,00	99,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	89.316.500,00	76.033.124,00	-	-	-	-	-	-	89.316.500,00	76.033.124,00	85,13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	116.357.250,00	94.362.500,00	-	-	-	-	-	-	116.357.250,00	94.362.500,00	81,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	632.361.992,00	604.614.230,00	-	-	-	-	-	-	632.361.992,00	604.614.230,00	95,61

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	372.443.500,00	299.235.023,00	-	-	-	-	-	-	372.443.500,00	299.235.023,00	80,34
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	169.541.000,00	154.062.500,00	-	-	-	-	-	-	169.541.000,00	154.062.500,00	90,87
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	80.355.000,00	75.230.000,00	-	-	-	-	-	-	80.355.000,00	75.230.000,00	93,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	298.226.000,00	249.951.139,00	-	-	-	-	-	-	298.226.000,00	249.951.139,00	83,81
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	150.000.000,00	137.234.510,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	137.234.510,00	91,49
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	300.078.000,00	286.117.677,00	-	-	-	-	-	-	300.078.000,00	286.117.677,00	95,35
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	97.386.000,00	62.900.400,00	-	-	-	-	-	-	97.386.000,00	62.900.400,00	64,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	55.730.000,00	28.185.100,00	-	-	-	-	-	-	55.730.000,00	28.185.100,00	50,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	94.855.000,00	57.000.000,00	-	-	-	-	-	-	94.855.000,00	57.000.000,00	60,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	99.250.000,00	64.000.000,00	-	-	-	-	-	-	99.250.000,00	64.000.000,00	64,48
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	99.125.000,00	93.440.000,00	-	-	-	-	-	-	99.125.000,00	93.440.000,00	94,26
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	94.386.000,00	38.500.000,00	-	-	-	-	-	-	94.386.000,00	38.500.000,00	40,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	61.677.000,00	53.697.600,00	-	-	-	-	-	-	61.677.000,00	53.697.600,00	87,06
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	100.000.000,00	49.027.300,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	49.027.300,00	49,03
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	77.800.000,00	56.803.953,00	-	-	-	-	-	-	77.800.000,00	56.803.953,00	73,01
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	44.230.000,00	22.643.000,00	-	-	-	-	-	-	44.230.000,00	22.643.000,00	51,19
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	97.500.000,00	49.900.000,00	-	-	-	-	-	-	97.500.000,00	49.900.000,00	51,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	56.000.000,00	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-	56.000.000,00	54.000.000,00	96,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	581.971.000,00	479.829.642,00	-	-	-	-	-	-	581.971.000,00	479.829.642,00	82,45
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	46.762.000,00	15.403.000,00	-	-	-	-	-	-	46.762.000,00	15.403.000,00	32,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	47.355.000,00	34.000.000,00	-	-	-	-	-	-	47.355.000,00	34.000.000,00	71,80
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	46.623.000,00	21.998.000,00	-	-	-	-	-	-	46.623.000,00	21.998.000,00	47,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	40.460.000,00	40.286.000,00	-	-	-	-	-	-	40.460.000,00	40.286.000,00	99,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	67.845.000,00	48.816.000,00	-	-	-	-	-	-	67.845.000,00	48.816.000,00	71,95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	20.538.000,00	20.538.000,00	-	-	-	-	-	-	20.538.000,00	20.538.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	57.638.000,00	55.246.000,00	-	-	-	-	-	-	57.638.000,00	55.246.000,00	95,85
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	35.000.000,00	34.500.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000.000,00	34.500.000,00	98,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	45.460.000,00	34.286.000,00	-	-	-	-	-	-	45.460.000,00	34.286.000,00	75,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	15.600.000,00	15.440.100,00	-	-	-	-	-	-	15.600.000,00	15.440.100,00	98,98
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	45.775.000,00	32.696.000,00	-	-	-	-	-	-	45.775.000,00	32.696.000,00	71,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	45.708.750,00	37.643.000,00	-	-	-	-	-	-	45.708.750,00	37.643.000,00	82,35
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	34.900.000,00	28.130.000,00	-	-	-	-	-	-	34.900.000,00	28.130.000,00	80,60

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	73.903.000,00	43.720.687,00	-	-	-	-	-	-	73.903.000,00	43.720.687,00	59,16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.004.212.601,00	648.770.297,00	-	-	-	-	-	-	1.004.212.601,00	648.770.297,00	64,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	844.559.960,00	707.671.385,00	-	-	-	-	-	-	844.559.960,00	707.671.385,00	83,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	611.638.507,00	585.452.716,00	156.617.892,00	143.160.006,00	-	-	-	-	768.256.399,00	728.612.722,00	94,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	502.706.524,00	489.902.623,00	132.455.000,00	130.925.700,00	-	-	-	-	635.161.524,00	620.828.323,00	97,74
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	873.141.352,00	766.123.051,00	876.253.257,00	864.523.931,00	-	-	-	-	1.749.394.609,00	1.630.646.982,00	93,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	1.029.310.791,00	973.156.714,00	163.811.100,00	163.811.100,00	-	-	-	-	1.193.121.891,00	1.136.967.814,00	95,29
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	548.336.181,60	518.631.327,00	162.067.104,00	155.533.200,00	-	-	-	-	710.403.285,60	674.164.527,00	94,90
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	700.869.660,00	661.303.484,00	119.971.800,00	117.596.380,00	-	-	-	-	820.841.460,00	778.899.864,00	94,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	418.962.135,00	357.108.984,00	165.106.506,00	164.502.000,00	-	-	-	-	584.068.641,00	521.610.984,00	89,31
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	502.377.163,50	427.706.063,00	120.489.989,40	119.558.100,00	-	-	-	-	622.867.152,90	547.264.163,00	87,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	701.102.964,00	573.126.271,00	171.890.715,00	169.790.800,00	-	-	-	-	872.993.679,00	742.917.071,00	85,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	466.134.540,00	445.379.936,00	33.787.969,00	32.600.000,00	-	-	-	-	499.922.509,00	477.979.936,00	95,61
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	523.215.385,00	503.925.322,00	200.052.960,00	200.009.759,00	-	-	-	-	723.268.345,00	703.935.081,00	97,33
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	455.756.251,00	432.156.175,00	119.097.726,00	116.991.557,00	-	-	-	-	574.853.977,00	549.147.732,00	95,53
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	474.231.441,00	372.111.492,00	85.078.236,60	84.881.700,00	-	-	-	-	559.309.677,60	456.993.192,00	81,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	612.255.886,00	576.760.032,00	159.028.521,00	153.596.000,00	-	-	-	-	771.284.407,00	730.356.032,00	94,69
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	440.796.403,00	396.079.402,00	54.225.831,00	52.497.500,00	-	-	-	-	495.022.234,00	448.576.902,00	90,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	494.332.433,50	433.996.185,00	76.678.689,00	76.588.890,00	-	-	-	-	571.011.122,50	510.585.075,00	89,42
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	437.775.267,15	368.736.671,00	183.970.179,00	173.478.792,00	-	-	-	-	621.745.446,15	542.215.463,00	87,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	370.882.992,00	366.499.064,00	127.342.796,00	122.100.000,00	-	-	-	-	498.225.788,00	488.599.064,00	98,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	827.997.630,00	764.554.713,00	117.759.340,00	116.655.450,00	-	-	-	-	945.756.970,00	881.210.163,00	93,18
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	282.046.561,00	197.112.775,00	99.206.910,50	98.949.400,00	-	-	-	-	381.253.471,50	296.062.175,00	77,65
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	293.953.582,69	278.845.472,00	54.446.168,00	54.364.250,00	-	-	-	-	348.399.750,69	333.209.722,00	95,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	194.558.150,00	192.058.839,00	46.552.371,00	46.198.185,00	-	-	-	-	241.110.521,00	238.257.024,00	98,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	206.383.609,00	190.200.315,00	46.796.379,00	45.787.500,00	-	-	-	-	253.179.988,00	235.987.815,00	93,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	244.125.200,00	239.305.492,00	46.343.606,00	45.843.000,00	-	-	-	-	290.468.806,00	285.148.492,00	98,17
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	207.097.579,00	167.593.466,00	73.514.300,00	73.483.535,00	-	-	-	-	280.611.879,00	241.077.001,00	85,91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	333.853.920,50	321.767.050,00	74.074.100,00	73.840.000,00	-	-	-	-	407.928.020,50	395.607.050,00	96,98
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	277.069.715,00	264.073.265,00	46.494.459,00	46.331.400,00	-	-	-	-	323.564.174,00	310.404.665,00	95,93
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	243.473.089,20	155.197.705,00	39.157.248,00	38.738.999,00	-	-	-	-	282.630.337,20	193.936.704,00	68,62
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	317.155.400,00	312.277.500,00	75.313.500,00	75.147.000,00	-	-	-	-	392.468.900,00	387.424.500,00	98,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	255.477.042,00	235.079.309,00	42.637.764,00	41.741.550,00	-	-	-	-	298.114.806,00	276.820.859,00	92,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	207.349.885,00	201.657.470,00	52.068.830,00	52.068.830,00	-	-	-	-	259.418.715,00	253.726.300,00	97,81
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	289.130.285,00	245.075.422,00	43.954.446,00	43.889.400,00	-	-	-	-	333.084.731,00	288.964.822,00	86,75
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	251.928.560,00	240.352.000,00	87.540.927,00	86.500.000,00	-	-	-	-	339.469.487,00	326.852.000,00	96,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	487.054.763,00	465.899.484,00	112.992.284,00	112.371.960,00	-	-	-	-	600.047.047,00	578.271.444,00	96,37
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	15.335.561.434,68	14.295.638.554,00	4.126.326.541,78	3.945.957.807,00	-	-	-	-	19.461.887.976,46	18.241.596.361,00	93,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	8.608.967.753,82	7.549.314.826,00	6.759.707.939,99	6.544.601.487,00	-	-	-	-	15.368.675.693,81	14.093.916.313,00	91,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	680.000,00	680.000,00	65.048.220,00	64.200.000,00	-	-	-	-	65.728.220,00	64.880.000,00	98,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	-	-	81.402.000,00	81.226.902,00	-	-	-	-	81.402.000,00	81.226.902,00	99,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	680.000,00	680.000,00	136.117.600,00	134.682.849,00	-	-	-	-	136.797.600,00	135.362.849,00	98,95

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	16.988.300,00	15.254.100,00	49.557.069,00	49.557.069,00	-	-	-	-	66.545.369,00	64.811.169,00	97,39
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	4.322.000,00	4.322.000,00	48.343.608,00	41.958.000,00	-	-	-	-	52.665.608,00	46.280.000,00	87,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	-	-	400.000.000,00	398.680.000,00	-	-	-	-	400.000.000,00	398.680.000,00	99,67
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	680.000,00	680.000,00	59.247.350,00	58.997.600,00	-	-	-	-	59.927.350,00	59.677.600,00	99,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	-	-	47.118.834,00	46.509.000,00	-	-	-	-	47.118.834,00	46.509.000,00	98,71
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	131.926.400,00	118.780.803,00	73.296.630,00	67.843.000,00	-	-	-	-	205.223.030,00	186.623.803,00	90,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	-	-	20.531.448,00	17.093.778,00	-	-	-	-	20.531.448,00	17.093.778,00	83,26
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	2.161.000,00	2.118.300,00	270.147.510,00	254.967.000,00	-	-	-	-	272.308.510,00	257.085.300,00	94,41
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	680.000,00	680.000,00	697.087.200,00	694.717.692,00	-	-	-	-	697.767.200,00	695.397.692,00	99,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	162.000.000,00	159.840.000,00	24.928.912,80	24.525.450,00	-	-	-	-	186.928.912,80	184.365.450,00	98,63
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	680.000,00	680.000,00	6.913.163,00	6.859.800,00	-	-	-	-	7.593.163,00	7.539.800,00	99,30
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	1.360.000,00	680.000,00	39.847.500,00	39.627.000,00	-	-	-	-	41.207.500,00	40.307.000,00	97,81
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	-	-	494.412.100,00	483.476.500,00	-	-	-	-	494.412.100,00	483.476.500,00	97,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	-	-	70.772.000,00	70.716.990,00	-	-	-	-	70.772.000,00	70.716.990,00	99,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	355.400.000,00	331.400.000,00	259.150.800,00	255.967.200,00	-	-	-	-	614.550.800,00	587.367.200,00	95,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	-	-	48.700.000,00	48.700.000,00	-	-	-	-	48.700.000,00	48.700.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	-	-	31.336.632,00	31.250.000,00	-	-	-	-	31.336.632,00	31.250.000,00	99,72
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	340.000,00	340.000,00	26.550.000,00	22.077.900,00	-	-	-	-	26.890.000,00	22.417.900,00	83,37
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	-	-	29.083.332,00	28.693.500,00	-	-	-	-	29.083.332,00	28.693.500,00	98,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	680.000,00	680.000,00	70.333.620,00	69.280.650,00	-	-	-	-	71.013.620,00	69.960.650,00	98,52
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	-	-	48.141.948,00	47.441.000,00	-	-	-	-	48.141.948,00	47.441.000,00	98,54
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	680.000,00	680.000,00	49.124.000,00	48.770.000,00	-	-	-	-	49.804.000,00	49.450.000,00	99,29
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	-	-	87.770.000,00	87.770.000,00	-	-	-	-	87.770.000,00	87.770.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	-	-	13.022.469,00	-	-	-	-	-	13.022.469,00	-	-

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	680.000,00	-	19.540.440,00	19.380.600,00	-	-	-	-	20.220.440,00	19.380.600,00	95,85
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	680.000,00	680.000,00	28.978.770,00	28.854.450,00	-	-	-	-	29.658.770,00	29.534.450,00	99,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	340.000,00	340.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	-	-	-	-	19.570.000,00	19.570.000,00	100,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	680.000,00	680.000,00	42.885.960,00	42.350.000,00	-	-	-	-	43.565.960,00	43.030.000,00	98,77
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	6.950.469.373,35	6.817.570.246,00	910.371.348,50	757.263.939,00	-	-	-	-	7.860.840.721,85	7.574.834.185,00	96,36
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	30.897.427,39	-	13.191.106.370,61	12.749.857.066,00	-	-	-	-	13.222.003.798,00	12.749.857.066,00	96,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	733.730.200,00	589.352.705,00	-	-	-	-	-	-	733.730.200,00	589.352.705,00	80,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	459.085.800,00	360.543.380,00	-	-	-	-	-	-	459.085.800,00	360.543.380,00	78,54
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	1.057.790.432,00	879.968.906,00	-	-	-	-	-	-	1.057.790.432,00	879.968.906,00	83,19
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	1.470.704.711,00	769.720.999,00	-	-	-	-	-	-	1.470.704.711,00	769.720.999,00	52,34
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	1.142.188.260,00	898.429.799,00	-	-	-	-	-	-	1.142.188.260,00	898.429.799,00	78,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	1.716.192.223,00	1.406.245.857,00	-	-	-	-	-	-	1.716.192.223,00	1.406.245.857,00	81,94
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	577.685.800,00	526.465.354,00	-	-	-	-	-	-	577.685.800,00	526.465.354,00	91,13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	1.519.426.660,00	1.377.278.932,00	-	-	-	-	-	-	1.519.426.660,00	1.377.278.932,00	90,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	749.720.996,00	518.799.912,00	-	-	-	-	-	-	749.720.996,00	518.799.912,00	69,20
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.0.00.0.00.11.0000	393.755.564,00	310.219.385,00	-	-	-	-	-	-	393.755.564,00	310.219.385,00	78,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	4.602.620.472,00	3.395.975.441,00	-	-	-	-	-	-	4.602.620.472,00	3.395.975.441,00	73,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	569.811.625,00	358.291.553,00	-	-	-	-	-	-	569.811.625,00	358.291.553,00	62,88
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	2.164.755.563,00	2.064.451.874,00	-	-	-	-	-	-	2.164.755.563,00	2.064.451.874,00	95,37
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	1.083.845.121,00	940.988.147,00	-	-	-	-	-	-	1.083.845.121,00	940.988.147,00	86,82
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	1.518.449.667,00	1.178.982.311,00	-	-	-	-	-	-	1.518.449.667,00	1.178.982.311,00	77,64
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	564.591.850,00	546.667.863,00	-	-	-	-	-	-	564.591.850,00	546.667.863,00	96,83
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	4.055.607.367,00	3.636.982.797,00	-	-	-	-	-	-	4.055.607.367,00	3.636.982.797,00	89,68
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	667.789.901,00	547.617.835,00	-	-	-	-	-	-	667.789.901,00	547.617.835,00	82,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	920.289.856,00	568.258.231,00	-	-	-	-	-	-	920.289.856,00	568.258.231,00	61,75
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	346.126.943,00	287.298.650,00	-	-	-	-	-	-	346.126.943,00	287.298.650,00	83,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	465.541.600,00	422.968.729,00	-	-	-	-	-	-	465.541.600,00	422.968.729,00	90,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	279.202.167,00	235.554.878,00	-	-	-	-	-	-	279.202.167,00	235.554.878,00	84,37
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	349.093.800,00	347.607.748,00	-	-	-	-	-	-	349.093.800,00	347.607.748,00	99,57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	287.069.689,00	238.629.411,00	-	-	-	-	-	-	287.069.689,00	238.629.411,00	83,13

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	331.290.667,00	253.712.636,00	-	-	-	-	-	-	331.290.667,00	253.712.636,00	76,58
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	421.105.400,00	363.979.149,00	-	-	-	-	-	-	421.105.400,00	363.979.149,00	86,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	284.837.958,00	230.489.105,00	-	-	-	-	-	-	284.837.958,00	230.489.105,00	80,92
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	505.283.400,00	455.158.752,00	-	-	-	-	-	-	505.283.400,00	455.158.752,00	90,08
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	896.536.800,00	722.538.175,00	-	-	-	-	-	-	896.536.800,00	722.538.175,00	80,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	271.711.037,00	243.797.701,00	-	-	-	-	-	-	271.711.037,00	243.797.701,00	89,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	428.119.600,00	350.603.164,00	-	-	-	-	-	-	428.119.600,00	350.603.164,00	81,89
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	282.566.400,00	220.642.666,00	-	-	-	-	-	-	282.566.400,00	220.642.666,00	78,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	5.606.675.200,00	4.843.248.739,00	-	-	-	-	-	-	5.606.675.200,00	4.843.248.739,00	86,38
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	18.529.176.208,00	15.101.009.391,00	-	-	-	-	-	-	18.529.176.208,00	15.101.009.391,00	81,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	6.045.768.422,00	5.458.903.652,00	-	-	-	-	-	-	6.045.768.422,00	5.458.903.652,00	90,29
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.03.0.00.0.00.47.0000	349.610.000,00	239.446.616,00	174.900.000,00	174.200.000,00	-	-	-	-	524.510.000,00	413.646.616,00	78,86
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.8.01.0.00.06.0000	463.757.320,00	435.855.807,00	-	-	-	-	-	-	463.757.320,00	435.855.807,00	93,98
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.45.0000	985.628.609,92	812.215.692,39	-	-	-	-	-	-	985.628.609,92	812.215.692,39	82,41
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.0.00.0.00.46.0000	588.253.830,00	391.149.809,00	358.960.670,00	358.040.000,00	-	-	-	-	947.214.500,00	749.189.809,00	79,09
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	718.840.000,00	669.108.662,00	-	-	-	-	-	-	718.840.000,00	669.108.662,00	93,08
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.14.0000	387.549.400,00	365.445.822,00	2.150.000.000,00	2.060.165.944,00	-	-	-	-	2.537.549.400,00	2.425.611.766,00	95,59
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.12.0000	568.020.000,00	562.726.192,00	-	-	-	-	-	-	568.020.000,00	562.726.192,00	99,07
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	519.181.250,00	333.718.851,00	200.000.000,00	199.049.000,00	-	-	-	-	719.181.250,00	532.767.851,00	74,08
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.4.01.0.00.15.0000	440.253.070,00	328.454.692,00	-	-	-	-	-	-	440.253.070,00	328.454.692,00	74,61
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	2.19.3.26.0.00.21.0000	514.914.000,00	449.365.281,00	-	-	-	-	-	-	514.914.000,00	449.365.281,00	87,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.4.01.0.00.20.0000	766.393.200,00	582.189.156,00	-	-	-	-	-	-	766.393.200,00	582.189.156,00	75,96
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.14.0.00.0.00.16.0000	301.044.000,00	208.074.902,00	-	-	-	-	-	-	301.044.000,00	208.074.902,00	69,12
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	1.918.827.146,00	1.689.180.427,00	-	-	-	-	-	-	1.918.827.146,00	1.689.180.427,00	88,03
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.23.0000	440.698.000,00	397.537.855,00	-	-	-	-	-	-	440.698.000,00	397.537.855,00	90,21
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.25.0000	393.394.000,00	376.364.786,00	382.674.800,00	379.753.650,00	-	-	-	-	776.068.800,00	756.118.436,00	97,43
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.23.2.24.0.00.22.0000	558.745.000,00	434.418.420,00	-	-	-	-	-	-	558.745.000,00	434.418.420,00	77,75

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.27.0.00.0.00.24.0000	901.661.000,00	875.630.290,00	-	-	-	-	-	-	901.661.000,00	875.630.290,00	97,11
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.07.0.00.5.06.10.0000	211.713.000,00	206.047.132,00	-	-	-	-	-	-	211.713.000,00	206.047.132,00	97,32
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	1.010.700.320,00	965.250.830,00	-	-	-	-	-	-	1.010.700.320,00	965.250.830,00	95,50
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	240.222.000,00	199.444.378,00	-	-	-	-	-	-	240.222.000,00	199.444.378,00	83,03
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	793.640.189,00	791.167.423,00	-	-	-	-	-	-	793.640.189,00	791.167.423,00	99,69
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	202.530.000,00	151.414.000,00	-	-	-	-	-	-	202.530.000,00	151.414.000,00	74,76
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	184.854.000,00	184.363.816,00	-	-	-	-	-	-	184.854.000,00	184.363.816,00	99,73
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	53.440.000,00	42.286.793,00	-	-	-	-	-	-	53.440.000,00	42.286.793,00	79,13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	174.940.000,00	161.185.108,00	-	-	-	-	-	-	174.940.000,00	161.185.108,00	92,14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	136.733.000,00	61.909.650,00	-	-	-	-	-	-	136.733.000,00	61.909.650,00	45,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	202.193.950,00	191.174.875,00	-	-	-	-	-	-	202.193.950,00	191.174.875,00	94,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	162.420.000,00	99.192.626,00	166.714.348,00	166.714.348,00	-	-	-	-	329.134.348,00	265.906.974,00	80,79
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	233.434.790,00	217.329.725,00	-	-	-	-	-	-	233.434.790,00	217.329.725,00	93,10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	209.118.880,00	182.547.789,00	-	-	-	-	-	-	209.118.880,00	182.547.789,00	87,29
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	206.462.000,00	190.779.868,00	-	-	-	-	-	-	206.462.000,00	190.779.868,00	92,40
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	235.659.638,00	213.920.174,00	-	-	-	-	-	-	235.659.638,00	213.920.174,00	90,78
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	885.550.000,00	751.343.352,21	-	-	-	-	-	-	885.550.000,00	751.343.352,21	84,84
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.1.04.0.00.07.0000	1.345.944.862,00	949.681.422,00	198.079.500,00	197.047.000,00	-	-	-	-	1.544.024.362,00	1.146.728.422,00	74,27
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	12.574.310.760,00	11.756.205.963,00	-	-	-	-	-	-	12.574.310.760,00	11.756.205.963,00	93,49
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	2.055.582.000,00	1.861.270.944,00	4.323.450.863,00	4.005.522.926,00	-	-	-	-	6.379.032.863,00	5.866.793.870,00	91,97
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.916.868.640,00	1.634.612.747,00	-	-	-	-	-	-	1.916.868.640,00	1.634.612.747,00	85,28
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	7.082.650.278,00	6.947.737.491,00	1.752.891.670,00	1.672.561.243,00	-	-	-	-	8.835.541.948,00	8.620.298.734,00	97,56
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	10.793.655.855,00	10.590.076.904,00	-	-	-	-	-	-	10.793.655.855,00	10.590.076.904,00	98,11
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.28.0000	27.846.554.780,00	26.608.739.560,00	-	-	-	-	-	-	27.846.554.780,00	26.608.739.560,00	95,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	6.479.285.385,69	6.055.556.916,00	-	-	-	-	-	-	6.479.285.385,69	6.055.556.916,00	93,46
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	1.535.905.702,50	1.380.869.582,00	-	-	-	-	-	-	1.535.905.702,50	1.380.869.582,00	89,91

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.17.0000	272.570.161,00	253.487.456,00	-	-	-	-	-	-	272.570.161,00	253.487.456,00	93,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	465.577.000,00	384.445.600,00	-	-	-	-	-	-	465.577.000,00	384.445.600,00	82,57
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	581.963.000,00	569.712.083,00	-	-	-	-	-	-	581.963.000,00	569.712.083,00	97,89
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	449.177.000,00	216.700.000,00	-	-	-	-	-	-	449.177.000,00	216.700.000,00	48,24
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	479.347.000,00	479.335.500,00	-	-	-	-	-	-	479.347.000,00	479.335.500,00	100,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	461.925.000,00	360.406.000,00	-	-	-	-	-	-	461.925.000,00	360.406.000,00	78,02
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	371.918.000,00	332.008.971,00	-	-	-	-	-	-	371.918.000,00	332.008.971,00	89,27
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	511.436.200,00	200.403.500,00	-	-	-	-	-	-	511.436.200,00	200.403.500,00	39,18
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	378.580.000,00	361.928.000,00	-	-	-	-	-	-	378.580.000,00	361.928.000,00	95,60
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	366.549.095,10	228.294.400,00	-	-	-	-	-	-	366.549.095,10	228.294.400,00	62,28
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	303.095.000,00	153.119.700,00	-	-	-	-	-	-	303.095.000,00	153.119.700,00	50,52
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	289.023.400,00	146.476.000,00	-	-	-	-	-	-	289.023.400,00	146.476.000,00	50,68
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	410.310.000,00	130.988.834,00	-	-	-	-	-	-	410.310.000,00	130.988.834,00	31,92
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	406.945.000,00	380.075.000,00	-	-	-	-	-	-	406.945.000,00	380.075.000,00	93,40
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	333.076.000,00	324.875.000,00	-	-	-	-	-	-	333.076.000,00	324.875.000,00	97,54
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	33.099.200,00	18.615.200,00	-	-	-	-	-	-	33.099.200,00	18.615.200,00	56,24
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	2.750.552,25	2.739.480,00	-	-	-	-	-	-	2.750.552,25	2.739.480,00	99,60
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	4.265.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.265.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	14.591.364,00	14.328.750,00	-	-	-	-	-	-	14.591.364,00	14.328.750,00	98,20
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	9.515.500,00	4.185.000,00	-	-	-	-	-	-	9.515.500,00	4.185.000,00	43,98
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	16.978.000,00	2.553.000,00	-	-	-	-	-	-	16.978.000,00	2.553.000,00	15,04
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	17.380.000,00	17.250.000,00	-	-	-	-	-	-	17.380.000,00	17.250.000,00	99,25
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.510.000,00	-	-

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.138.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.138.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	5.976.000,00	5.658.000,00	-	-	-	-	-	-	5.976.000,00	5.658.000,00	94,68
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	8.143.850,00	5.850.000,00	73.785.483,00	72.216.600,00	-	-	-	-	81.929.333,00	78.066.600,00	95,29
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	8.215.000,00	8.215.000,00	-	-	-	-	-	-	8.215.000,00	8.215.000,00	100,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Sungai Lilin	7.01.0.00.0.00.37.0000	122.057.211,00	106.855.613,00	10.957.143,00	10.905.750,00	-	-	-	-	133.014.354,00	117.761.363,00	88,53
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	7.01.0.00.0.00.37.0000	111.482.274,00	91.490.291,00	27.436.980,00	27.405.900,00	-	-	-	-	138.919.254,00	118.896.191,00	85,59
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	2.475.000,00	545.000,00	-	-	-	-	-	-	2.475.000,00	545.000,00	22,02
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Batanghari Leko	7.01.0.00.0.00.35.0000	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bayung Lencir	7.01.0.00.0.00.38.0000	2.500.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	2.490.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.490.000,00	2.400.000,00	96,39
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	2.400.000,00	2.325.000,00	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	2.325.000,00	96,88
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	2.562.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.562.500,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sungai Keruh	7.01.0.00.0.00.36.0000	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	100,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tungkal Jaya	7.01.0.00.0.00.40.0000	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.150.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	2.342.915.500,00	2.030.724.093,00	-	-	-	-	-	-	2.342.915.500,00	2.030.724.093,00	86,68
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	1.246.227.661,00	780.532.187,00	306.502.447,00	244.792.030,00	-	-	-	-	1.552.730.108,00	1.025.324.217,00	66,03
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.0.00.18.0000	594.775.805,30	271.050.074,00	171.233.558,00	151.000.001,00	-	-	-	-	766.009.363,30	422.050.075,00	55,10
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Babat Supat	7.01.0.00.0.00.42.0000	3.873.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.873.500,00	-	-

No.	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Kode SKPD	OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER		TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI	Persentase Realisasi (%)
							Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Babat Toman	7.01.0.00.0.00.31.0000	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayunglincir Leko	7.01.0.00.9.00.35.0000	5.856.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	-	5.856.000,00	510.000,00	8,71
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayung Lencar	7.01.0.00.0.00.38.0000	11.740.000,00	11.056.000,00	-	-	-	-	-	-	11.740.000,00	11.056.000,00	94,17
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Jirak Jaya	7.01.0.00.0.00.43.0000	11.070.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-	11.070.000,00	10.800.000,00	97,56
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Keluang	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.060.000,00	5.480.000,00	-	-	-	-	-	-	7.060.000,00	5.480.000,00	77,75
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lalan	7.01.0.00.0.00.39.0000	10.260.000,00	10.230.000,00	-	-	-	-	-	-	10.260.000,00	10.230.000,00	99,71
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lawang Wetan	7.01.0.00.0.00.41.0000	8.400.000,00	7.770.000,00	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	7.770.000,00	92,50
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Plakat Tinggi	7.01.0.00.0.00.34.0000	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sanga Desa	7.01.0.00.0.00.33.0000	16.800.000,00	16.687.500,00	-	-	-	-	-	-	16.800.000,00	16.687.500,00	99,33
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sekayu	7.01.0.00.0.00.29.0000	26.600.000,00	25.600.000,00	-	-	-	-	-	-	26.600.000,00	25.600.000,00	96,24
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	316.669.000,00	298.163.542,00	-	-	-	-	-	-	316.669.000,00	298.163.542,00	94,16
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	472.647.000,00	410.113.765,00	-	-	-	-	-	-	472.647.000,00	410.113.765,00	86,77
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	589.159.975,00	470.030.490,00	-	-	-	-	-	-	589.159.975,00	470.030.490,00	79,78
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber D	Sekretariat Daerah	4.01.5.02.0.00.27.0000	630.836.000,00	520.549.854,00	-	-	-	-	-	-	630.836.000,00	520.549.854,00	82,52
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pen	Badan Perencanaan Pembangunan	5.01.5.05.0.00.44.0000	1.533.760.492,00	1.362.417.448,00	-	-	-	-	-	-	1.533.760.492,00	1.362.417.448,00	88,83
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemb	Badan Perencanaan Pembangunan	5.01.5.05.0.00.44.0000	64.943.050,00	56.402.450,00	-	-	-	-	-	-	64.943.050,00	56.402.450,00	86,85
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	300.656.250,00	241.402.052,00	-	-	-	-	-	-	300.656.250,00	241.402.052,00	80,28
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.44.0000	62.497.375,20	56.834.864,00	-	-	-	-	-	-	62.497.375,20	56.834.864,00	90,94
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pemantauan Kebijakan Teknis di B	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	152.723.950,00	145.904.703,00	-	-	-	-	-	-	152.723.950,00	145.904.703,00	95,53
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.44.0000	1.196.100.550,00	1.093.468.452,00	-	-	-	-	-	-	1.196.100.550,00	1.093.468.452,00	91,42

Sekayu, 2028

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. TRIMA

MUSI BANYUASIN

Lampiran XXVIII Perda Kab. Muba
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2025

No.		KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.		**Peningkatan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba**			
	1	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**	967.736.150	923.739.417,00	95,45%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	967.736.150	923.739.417,00	95,45%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	2	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	65.916.000,00	49.300.454,00	74,79%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	65.916.000,00	49.300.454,00	74,79%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	3	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**	75.879.000,00	58.214.833,00	76,72%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	75.879.000,00	58.214.833,00	76,72%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			

No.		KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	4	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	38.428.499,00	36.224.416,00	94,26%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	38.428.499,00	36.224.416,00	94,26%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	5	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	32.965.000,00	28.037.371,00	85,05%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	32.965.000,00	28.037.371,00	85,05%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	6	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	111.440.500,00	82.410.155,00	73,95%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	111.440.500,00	82.410.155,00	73,95%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	7	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**	-	-	0,00%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	-	-	0,00%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			

No.		KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	8	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	91,99%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	91,99%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	9	**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	289.782.128,00	201.194.019,00	69,43%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	289.782.128,00	201.194.019,00	69,43%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	10	**Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**	-	-	0,00%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	-	-	0,00%
		Belanja Hibah	-	-	0,00%
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	11	**Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota**	232.226.000,00	104.085.000,00	44,82%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	32.226.000,00	4.085.000,00	12,68%
		Belanja Hibah	200.000.000,00	100.000.000,00	
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			

No.		KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	12	**Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia**	-	-	0,00%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	-	-	0,00%
		Belanja Hibah	-	-	0,00%
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	13	**Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	139.380.000,00	129.052.900,00	92,59%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	139.380.000,00	129.052.900,00	92,59%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	14	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**	1.173.917.200,00	1.147.510.314,00	97,75%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	123.917.200,00	97.510.314,00	78,69%
		Belanja Hibah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	15	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	117.581.450,00	109.474.853,00	93,11%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	117.581.450,00	109.474.853,00	93,11%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			

No.		KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	16	**Penyediaan Data dan Informasi Keluarga**	72.309.700,00	72.309.700,00	100,00%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	72.309.700,00	72.309.700,00	100,00%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	17	**Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana**	85.233.000,00	77.062.735,00	90,41%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	85.233.000,00	77.062.735,00	90,41%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	18	**Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB**	62.005.500,00	58.372.228,00	94,14%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	62.005.500,00	58.372.228,00	94,14%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	19	**Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	64.342.249,00	33.909.897,00	52,70%
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa	64.342.249,00	33.909.897,00	52,70%
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			

No.		KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	20	**Pembinaan Terpadu Kampung KB**	42.073.500,00	28.706.652,00	68,23%
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial **Belanja Modal** Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin	42.073.500,00	28.706.652,00	68,23%
	21	**Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	-	-	0,00%
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial **Belanja Modal** Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%
	22	**Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**	-	-	0,00%
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial **Belanja Modal** Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%
2	**Optimalisasi Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Diversifikasi Ekonomi**				
	1	**Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	276.791.000,00	267.382.156,00	96,60%
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial **Belanja Modal** Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin	276.791.000,00	267.382.156,00	96,60%

No.	KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
3	**Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data muba**			
	1 **Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial**	34.628.150,00	30.031.166,00	86,72%
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial **Belanja Modal** Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin	34.628.150,00	30.031.166,00	86,72%

BUPATI MUSI BNYUASIN

H.M. TOHA

Lampiran XXIX : Perda Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.112.836.000,00	2.028.836.000,00	25,01%
2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	74.728.033.180,00	-	0,00%
3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.122.120.000,00	-	0,00%
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.863.645.200,00	697.859.000,00	11,90%
5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	265.951.800,00	43.526.800,00	16,37%
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.003.016.000,00	2.768.042.000,00	46,11%
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.985.804.901,00	596.741.000,00	14,97%
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.510.836.000,00	149.886.000,00	5,97%
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	397.663.000,00	397.663.000,00	100,00%
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.915.686.889,00	-	0,00%
11	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.227.871.850,00	394.272.000,00	32,11%
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.196.462.950,00	328.662.950,00	14,96%
13	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.859.400.000,00	-	0,00%
14	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.271.013.000,00	-	0,00%
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.695.142.000,00	595.142.000,00	35,11%
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	637.622.250,00	287.622.250,00	45,11%
17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.402.300.000,00	-	0,00%
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.771.974.276,00	26.464.000,00	1,49%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	241.341.000,00	117.575.000,00	48,72%
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	587.211.600,00	6.105.600,00	1,04%
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.319.000,00	32.067.405,00	28,30%
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.386.720.339,00	3.482.613,00	0,25%
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.965.000,00	3.894.016,00	11,81%
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33.016.000,00	1.192.960,00	3,61%
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.130.000,00	-	0,00%
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	492.086.000,00	2.662.800,00	0,54%
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	537.540.000,00	7.750.400,00	1,44%
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	35.430.000,00	14.162.413,00	39,97%
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	71.922.000,00	8.599.300,00	11,96%
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.207.126.974,00	1.160.000,00	0,03%
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	192.808.727,00	-	0,00%
32	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.370.508.757,00	52.111.823,00	2,20%
33	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.242.823.200,00	11.115.859.771,00	19,76%
34	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.627.753.200,00	481.095.000,00	29,56%
35	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.286.057.500,00	-	0,00%
36	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	993.954.650,00	592.098.850,00	59,57%
37	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	433.636.000,00	-	0,00%
38	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	423.934.350,00	-	0,00%
39	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	16.009.280.800,00	6.066.883.800,00	37,90%
40	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.197.707.200,00	-	0,00%
41	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	9.768.000,00	-	0,00%

No.	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
42	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00	51.875.614,00	10,86%
43	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	16.059.346.300,00	372.378.100,00	2,32%
44	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	158.241.600,00	158.241.600,00	100,00%
45	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.636.866.250,00	330.523.050,00	20,19%
46	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25.934.904.000,00	3.050.000.000,00	11,76%
47	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	70.628.476.982,00	6.856.583.450,00	9,71%
48	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	125.489.087,00	-	0,00%
49	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	556.432.000,00	161.976.000,00	29,11%
50	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	213.204.700,00	19.231.200,00	9,02%
51	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105.045.000,00	25.868.920,00	24,63%
52	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24.779.869.700,00	31.607.672,00	0,13%
53	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	826.290.950,00	148.430.198,00	17,96%
54	Penyediaan Permakanan	1.471.563.000,00	310.276.136,00	21,08%
55	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	220.415.700,00	35.093.600,00	15,92%
56	Pemberian Layanan Kedaruratan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
57	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	312.434.000,00	33.241.481,00	10,64%
58	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.271.433.825,00	12.187.695.082,00	40,26%
59	Pelayanan Dukungan Psikososial	304.180.000,00	289.526.000,00	95,18%
60	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.506.892.000,00	2.099.803.750,00	46,59%
61	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	152.769.925,00	-	0,00%
62	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	165.655.000,00	15.045.600,00	9,08%
63	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	88.196.000,00	-	0,00%
64	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	139.380.000,00	1.920.000,00	1,38%
65	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.173.917.200,00	5.309.540,00	0,45%
66	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.987.545,00	1.659.200,00	4,05%
67	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	47.839.500,00	17.000.000,00	35,54%
68	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	91.844.402,00	34.330.550,00	37,38%
69	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.377.950,00	2.250.000,00	5,86%
70	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	160.144.701,00	-	0,00%
71	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	358.448.800,00	55.056.609,00	15,36%
72	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	57.270.454,00	-	0,00%
73	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	51.919.700,00	-	0,00%
74	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	53.747.000,00	4.555.900,00	8,48%
75	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	145.701.198,00	11.533.900,00	7,92%
76	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	251.788.075,00	3.453.170,00	1,37%
77	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	143.434.000,00	6.523.900,00	4,55%
78	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	55.464.000,00	710.000,00	1,28%
79	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	152.736.225,00	2.816.700,00	1,84%

No.	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
96	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	289.343.762,00	-	0,00%
97	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	35.429.500,00	17.216.150,00	48,59%
98	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.497.423.940,00	8.477.300,00	0,57%
99	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	214.860.149,00	29.496.584,00	13,73%
100	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.758.635.268,00	27.805.665,00	1,58%
101	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	183.447.942,50	6.816.050,00	3,72%
	Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**472.921.518.964,10**	**58.273.990.534,00**	**12,32%**

Sekayu, 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M. TOHA

Lampiran XXX : perda Kab. Muba
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1	DINAS PERHUBUNGAN	742.020.000,00	4.628.647,00	0,62	-	-	-	Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/715/BPKAD/2023 Nomor : 139/SKY/PKS/II/2023
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.780.753.691,00	-	-	225.893.856,00	-	-	
3	BPBD	17.043.603.975,20	-	-	8.574.170.849,80	-	-	
	TOTAL	**20.566.377.666,20**	**4.628.647,00**	**0,02**	**8.800.064.705,80**	-	-	

Sekayu, 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M. TOHA

Lampiran XXXI : Perda Kab. Muba
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)MELALUI E-PURCHASING
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchesing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM - 5.03.0.00.0.00.47.0000	62.439.618.157,00	198.843.420,00	0,318457136	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	760.936.240,00	0,324255085	E-Katalog 6
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.05.8.01.0.00.06.0000	62.439.618.157,00	70.197.600,00	0,112424775	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	1.635.282.248,00	0,696837076	E-Katalog 6
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 1.05.0.00.0.00.08.0000	62.439.618.157,00	5.002.283.116,00	8,011392868	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	1.767.525.629,00	0,753189483	E-Katalog 6
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 5.02.0.00.0.00.45.0000	62.439.618.157,00	214.062.100,00	0,342830572	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	2.245.844.602,00	0,957013866	E-Katalog 6
5	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - 5.02.0.00.0.00.46.0000	62.439.618.157,00	-	0	Belum ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	965.525.575,00	0,411436019	E-Katalog 6
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - 5.01.5.05.0.00.44.0000	62.439.618.157,00	138.009.840,00	0,221029282	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	1.688.326.708,00	0,719440726	E-Katalog 6

NO.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchesing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.12.0.00.0.00.14.0000	62.439.618.157,00	312.351.350,00	0,500245452	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	5.149.430.174,00	2,19430858	E-Katalog 6
8	DINAS KESEHATAN - 1.02.0.00.0.00.02.0000	62.439.618.157,00	20.265.742.622,00	32,45654477	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	5.156.554.815,00	2,197344578	E-Katalog 6
9	DINAS KETAHANAN PANGAN - 2.09.0.00.0.00.12.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	825.541.689,00	0,351785178	E-Katalog 6
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2.16.2.20.0.00.18.0000	62.439.618.157,00	5.154.388.860,00	8,254997407	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	10.177.272.404,00	4,336805317	E-Katalog 6
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - 2.17.0.00.0.00.19.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	569.955.050,00	0,242872942	E-Katalog 6
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 2.11.0.00.0.00.13.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	11.758.088.859,00	5,010433076	E-Katalog 6
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 1.03.2.15.0.00.04.0000	62.439.618.157,00	6.205.190.000,00	9,937905104	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	11.449.745.733,00	4,879039903	E-Katalog 6
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.13.4.01.0.00.15.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	542.245.066,00	0,231064984	E-Katalog 6
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 2.08.0.00.0.00.11.0000	62.439.618.157,00	350.564.400,00	0,561445458	E-Katalog 5.0

NO.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchesing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
		234.672.106.798,00	347.604.226,00	0,148123367	E-Katalog 6
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA & PARIWISATA - 2.19.3.26.0.00.21.0000	62.439.618.157,00	660.696.000,00	1,058135875	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	13.496.661.667,00	5,751284996	E-Katalog 6
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - 2.18.4.01.0.00.20.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	3.618.729.048,00	1,542036289	E-Katalog 6
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - 1.01.2.22.0.00.01.0000	62.439.618.157,00	2.412.016.600,00	3,862958601	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	31.990.137.696,00	13,63184493	E-Katalog 6
19	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA - 2.14.0.00.0.00.16.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	3.983.153.357,00	1,697327139	E-Katalog 6
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN - 3.30.3.31.0.00.26.0000	62.439.618.157,00	65.715.500,00	0,10524648	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	4.486.807.369,00	1,911947453	E-Katalog 6
21	DINAS PERHUBUNGAN - 2.15.0.00.0.00.17.0000	62.439.618.157,00	197.500.000,00	0,316305586	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	3.334.717.105,00	1,421011278	E-Katalog 6
22	DINAS PERIKANAN - 3.25.0.00.0.00.23.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	4.763.004.728,00	2,029642463	E-Katalog 6
23	DINAS PERKEBUNAN - 3.27.0.00.0.00.25.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	18.261.337.056,00	7,781639371	E-Katalog 6

NO.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchesing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH - 2.23.2.24.0.00.22.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	1.173.785.453,00	0,500181069	E-Katalog 6
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 1.04.1.03.2.10.05.0000	62.439.618.157,00	186.360.100,00	0,298464509	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00		0	E-Katalog 6
26	DINAS SOSIAL - 1.06.0.00.0.00.09.0000	62.439.618.157,00	99.975.000,00	0,160114688	E-Katalog 6
		234.672.106.798,00	2.249.207.411,00	0,958446848	E-Katalog 6
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN - 3.27.0.00.0.00.24.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	11.647.945.993,00	4,963498284	E-Katalog 6
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - 2.07.0.00.5.06.10.0000	62.439.618.157,00	90.460.300,00	0,144876447	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	723.412.417,00	0,30826519	E-Katalog 6
29	INSPEKTORAT - 6.01.0.00.0.00.44.0000	62.439.618.157,00	330.720.000,00	0,529663713	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	964.153.987,00	0,410851549	E-Katalog 6
30	KECAMATAN BABAT SUPAT - 7.01.0.00.0.00.42.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	227.683.000,00	0,097021756	E-Katalog 6
31	KECAMATAN BABAT TOMAN - 7.01.0.00.0.00.31.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	181.712.250,00	0,077432402	E-Katalog 6
32	KECAMATAN BATANGHARI LEKO - 7.01.0.00.0.00.35.000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0

NO.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchesing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
		234.672.106.798,00	178.803.727,00	0,076193004	E-Katalog 6
33	KECAMATAN BAYUNG LENCIR - 7.01.0.00.0.00.38.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	258.327.417,00	0,110080154	E-Katalog 6
34	KECAMATAN JIRAK JAYA - 7.01.0.00.0.00.43.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	-	0	E-Katalog 6
35	KECAMATAN KELUANG - 7.01.0.00.0.00.32.0000	62.439.618.157,00	173.769.008,00	0,27829928	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	257.732.054,00	0,109826454	E-Katalog 6
36	KECAMATAN LAIS - 7.01.0.00.0.00.30.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	-	0	E-Katalog 6
37	KECAMATAN LALAN - 7.01.0.00.0.00.39.0000	62.439.618.157,00	270.297.050,00	0,432893503	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	56.443.500,00	0,02405207	E-Katalog 6
38	KECAMATAN LAWANG WETAN - 7.01.0.00.0.00.41.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	183.586.105,00	0,078230902	E-Katalog 6
39	KECAMATAN PLAKAT TINGGI - 7.01.0.00.0.00.34.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	-	0	E-Katalog 6
40	KECAMATAN SANGA DESA - 7.01.0.00.0.00.33.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	698.763.790,00	0,297761758	E-Katalog 6

NO.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchesing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
41	KECAMATAN SEKAYU - 7.01.0.00.0.00.29.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	1.981.131.915,00	0,844212779	E-Katalog 6
42	KECAMATAN SUNGAI KERUH - 7.01.0.00.0.00.36.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	-	0	E-Katalog 6
43	KECAMATAN SUNGAI LILIN - 7.01.0.00.0.00.37.0000	62.439.618.157,00	38.200.000,00	0,061179106	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	187.576.912,00	0,07993149	E-Katalog 6
44	KECAMATAN TUNGKAL JAYA - 7.01.0.00.0.00.40.0000	62.439.618.157,00	208.133.800,00	0,333336119	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	73.350.000,00	0,031256378	E-Katalog 6
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR - 1.02.0.00.0.00.02.0002	62.439.618.157,00	1.194.027.420,00	1,912291355	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	50.000.000,00	0,021306324	E-Katalog 6
46	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU - 1.02.0.00.0.00.02.0101	62.439.618.157,00	2.316.566.300,00	3,710090434	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	1.557.458.021,00	0,663674112	E-Katalog 6
47	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN - 1.02.0.00.0.00.02.0001	62.439.618.157,00	895.924.620,00	1,434865629	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	285.270.000,00	0,121561102	E-Katalog 6

NO.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchesing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 1.05.1.04.0.00.07.0000	62.439.618.157,00	-	0	tidak ada realisasi di e-katalog 5.0
		234.672.106.798,00	5.170.863.680,00	2,203441964	E-Katalog 6
49	SEKRETARIAT DAERAH - 4.01.5.02.0.00.27.0000	62.439.618.157,00	10.121.869.951,00	16,21065319	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	40.911.753.850,00	17,43358186	E-Katalog 6
50	SEKRETARIAT DPRD - 4.02.0.00.0.00.28.0000	62.439.618.157,00	5.265.753.200,00	8,433352662	E-Katalog 5.0
		234.672.106.798,00	22.073.612.784,00	9,406151027	E-Katalog 6

SEKAYU, 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.M. TOHA

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran,arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sekayu, 30 Mei 2026

Bupati Musi Banyuasin,

H. M. Toha

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 700/246/LHR-ITDA/2026
TANGGAL : 17 Maret 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jl. Kol. Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin
Telp. (0714) 321035 Fax (0714) 322535

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Kol. Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN Telp. (0714) 321035 Fax. (0714) 322535
http://inspektorat.mubakab.go.id

Sekayu, 17 Maret 2026

Nomor : 700/246/LHR-ITDA/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025

Kepada
Yth. Bupati Musi Banyuasin
di –
Sekayu

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Telah Direviu (PTD)

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah

dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Dasar Reviu

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
e. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
f. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3/KPTS-ITDA/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026;
g. Surat Tugas Inspektur Nomor B-700/211/ST/ITDA/2026, Tanggal 26 Februari 2026 tentang Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 02 s.d 06 Maret 2026 bertempat di Mess Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan Reviu atas LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.

Sasaran Reviu adalah Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan SPI atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP.

LKPD dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Dari hasil reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 meliputi penilaian atas sistem akuntansi pemerintah daerah dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, yaitu dihasilkan dari penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara ringkas komponen LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1) **Neraca**

Neraca terdiri dari :

Aset	:	Rp8.292.185.998.707,10
Aset lancar	:	Rp1.381.866.719.245,60
Investasi jangka panjang	:	Rp 668.353.067.679,97
Aset tetap	:	Rp6.276.601.924.373,78
Aset lainnya	:	Rp 269.656.274.410,39
Properti investasi	:	Rp 105.450.924.411,97
Jumlah aset	:	Rp8.701.928.910.121,71
Kewajiban		
Kewajiban jangka pendek	:	Rp 89.509.449.177,79
Kewajiban jangka panjang	:	Rp 171.041.598.407,76
Ekuitas		
Ekuitas	:	Rp8.530.887.311.713,95
Jumlah kewajiban + ekuitas	:	Rp8.701.928.910.121,71

2) **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

Pendapatan

Pendapaatan Asli Daerah	:	Rp 561.951.316.985,08
Pendapatan transfer		
- Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan	:	Rp 3.023.800.007.902,00
- Pendapatan transfer pemerintah Pusat lainnya	:	Rp 209.290.220.994,00
- Pendapatan transfer antar daerah	:	Rp 173.122.623.028,43
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	:	Rp 0,00
Jumlah pendapatan	:	Rp3.968.164.168.909,51

Belanja

Belanja operasi	:	Rp2.597.228.922.004,33
Belanja modal	:	Rp 742.977.252.064,46
Belanja tak terduga	:	Rp 2.766.488.804,00
Belanja transfer	:	Rp 528.350.989.472,00
Jumlah belanja	:	Rp3.871.323.652.344,75

Surplus/(Defisit)	:	Rp	96.840.516.564,72
Pembiayaan			
Pembiayaan			
- Penerimaan pembiayaan	:	Rp	50.002.992.663,01
- Pengeluaran pembiayaan	:	Rp	26.586.109.626,00
Pembiayaan netto	:	Rp	23.416.883.037,01
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	:	Rp	120.257.399.601,73

3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, terdiri dari :

Saldo anggaran lebih awal	:	Rp	40.017.909.259,01
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	:	Rp	50.002.992.663,01
Subtotal	:	Rp	(9.985.083.404,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA/SILPA)	:	Rp	120.257.399.601,73
Subtotal	:	Rp	110.272.316.197,73
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	:	Rp	(53.379.096,00)
Lain-lain	:	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	:	Rp	110.218.937.101,73,

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas, terdiri dari :

Ekuitas Awal	:	Rp	7.970.883.849.249,46
Surplus/defisit LO	:	Rp	1.122.072.075.260,65
Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar			
Koreksi nilai persediaan	:	Rp	(995.542.900,00)
Selisih revaluasi aset tetap	:	Rp	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	:	Rp	(561.073.069.896,16)
Ekuitas Akhir	:	Rp	8.530.887.311.713,95

5) Laporan Operasional

Laporan Operasional, terdiri dari :

Pendapatan

- Jumlah pendapatan Asli Daerah – LO	:	Rp 559.067.336.405,63
- Jumlah pendapatan transfer – dana Perimbangan	:	Rp4.076.863.373.902,00
- Jumlah pendapatan transfer Pemerintah pusat lainnya	:	Rp 0,00
- Jumlah Pendapatan transfer antar daerah	:	Rp 177.393.001.219,83
Jumlah pendapatan transfer	:	Rp4.254.256.375.121,83
- Lain-lain pendapatan yang sah	:	Rp 3.310.130.617,00
Jumlah pendapatan	:	Rp4.816.633.842.144,46

Beban Daerah

- Beban operasi	:	Rp2.477.338.576.945,15
- Beban penyusutan dan amortisasi	:	Rp 829.131.932.467,13
- Beban transfer	:	Rp 319.060.768.478,00
- Beban tak terduga	:	Rp 2.766.488.804,00
Jumlah beban	:	Rp3.628.297.766.694,28
Sufplus/Difisit dari operasi	:	Rp1.188.336.075.450,18
Surplus/Defisit dari kegiatan non Operasional		
- Surplus non operasional	:	Rp 462.101.200,00
- Defisit non operasional	:	Rp 66.726.101.389,53
Jumlah surplus/deficit dari non operasional	:	Rp 66.264.000.189.53
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	:	Rp1.122.072.075.260,65
Pos Luar Biasa	:	Rp
- Pendapata n luar biasa	:	Rp
- Beban luar biasa	:	Rp
Pos luar biasa	:	Rp 0,00
Surplus/Defisit LO	:	Rp1.122.072.075.260,65

6) **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas, terdiri dari :

Arus Kas Dari Aktivitasi Operasi		
Arus Masuk Kas	:	Rp 3.967.289.321.709,51
Arus Keluar Kas	:	Rp 3.128.346.400.280,33
Arus Kas Bersih dari AktiviasOperasi	:	Rp 838.942.921.429,18
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas	:	Rp 874.847.200,00
Arus Keluar Kas	:	Rp 769.563.361.690,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	:	Rp (768.688.514.490.46)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas	:	Rp 0,00
Arus Keluar Kas	:	Rp 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaaaan	:	Rp 0,00
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas	:	Rp 228.894.398.468,69
Arus Keluar Kas	:	Rp 228.857.307.654,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	:	Rp 37.090.814,00
Kenaikan/Penurunan Kas	:	Rp 70.291.497.752,72
Saldo Awal Kas	:	Rp 50.020.804.636,01
Saldo Akhir Kas	:	Rp 120.217.457.596,73

7) **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri dari penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun/pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 telah menyajikan informasi yang diharapkan bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja,

transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Selama pelaksanaan reviu oleh Tim APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025, terdapat koreksi-koreksi terhadap beberapa Akun/Pos yang belum sesuai, yaitu sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memadai dalam mendukung pengelolaan keuangan maupun aset secara baik, namun masih terdapat akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan akun Kas di Bendahara Penerimaan pada neraca yang belum sesuai ketentuan, sebagai berikut :

a) Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin yang belum disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp853.379.416,00;
b) Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin yang belum disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.000,00;
c) Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang belum disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.607.643,00;
d) Terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang belum disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.908.624,00;

Penelusuran Angka Komponen LKPD

LRA

a) Terdapat selisih penyajian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp36.894.000,00, pada LRA Pemda sebesar Rp221.828.935.874,35 sedang pada LRA Konsolidasi sebesar Rp221.792.041.874,35.
b) Terdapat selisih penyajian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp38.645.040,00 pada LRA Pemda sebesar Rp311.812.260.408,11 sedang pada LRA Konsolidasi sebesar Rp311.773.615.368,11.

Rekomendasi

BPKAD selaku tim penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

Hasil reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh tim penyusun LKPD tahun sebelumnya.

Plt. Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin,

Dian Marvita, S.H
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 19750320 199403 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Kol. Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya Sekayu
MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN Telp. (0714) 321035 Fax. (0714) 322535
http://inspektorat.mubakab.go.id

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang disebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Plt. Inspektur
Kabupaten Musi Banyuasin,

Dian Marvita, S.H
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 19750320 199403 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 11 /KPTS-DPRD/2026

NOMOR : 353 /KPTS-BPKAD/2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: B-900/710/BPKAD/2026 tanggal 17 Juni 2026 Perihal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sesuai hasil rapat paripurna dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 472 /KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 14 /KPTS-DPRD/2026

NOMOR : 414 /KPTS-BPKAD/2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 422/KPTS/BPKAD/2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukannya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Bupati Musi Banyuasin tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153;
3. Undang-Undang 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Bupati Musi Banyuasin tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

I. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang, meliputi:

A. Konsistensi

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Bayuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Memperhatikan jadwal penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan surat Bupati Musi Banyuasin Nomor B-900/710/ BPKAD/2026 tanggal 17 Juni 2026 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Juli 2026 sesuai dengan Berita Acara Nomor 11/KPTS-DPRD/2026 dan Nomor 353/KPTS-BPKAD/2026, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Permohonan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor B-900/850/BPKAD/2026 tanggal 14 Juli 2026 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Bupati Kabupaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.

4. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/2105/Keuda tanggal 21 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan:

1. Menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
2. Menjaga konsistensi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

C. Kebijakan

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi kebijakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.968.164.168.909,51 atau 92,49% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp4.290.369.812.775,59.

Gambaran anggaran dan realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
2021	3.613.690.337.116,00	3.510.691.709.632,75	97,15
2022	7.089.513.789.224,00	6.331.885.924.893,68	89,31
2023	4.078.146.093.777,00	3.807.803.712.928,72	93,37
2024	4.654.239.641.897,00	3.754.951.995.722,66	80,68
2025	4.290.369.812.775,59	3.968.164.168.909,51	92,49

Berdasarkan data tersebut, pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mencapai target dari yang dianggarkan. Realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.754.951.995.722,66 terdapat kenaikan sebesar 5,68%.

Tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah tersebut disebabkan antara lain:

1) Penetapan target pendapatan daerah yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kurang memperhitungkan data potensi pendapatan daerah, capaian realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan makroekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah; dan
2) Perhitungan dan penyusunan prognosis capaian pendapatan daerah 6 (enam) bulan ke depan yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama kurang akurat, sehingga target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terlalu tinggi sehingga menyebabkan tidak tercapainya realisasi.

Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp561.951.316.985,08 atau 95,67% dari yang dianggarakan sebesar Rp587.378.681.108,99.

Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
2021	369.082.120.000,00	377.346.398.574,74	102,24
2022	354.028.202.039,00	352.504.682.841,06	99,57
2023	407.152.294.811,00	369.446.323.693,72	90,74
2024	619.651.955.525,00	393.335.956.633,26	63,48
2025	587.378.681.108,99	561.951.316.985,08	95,67

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, penetapan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp587.378.681.108,99, lebih tinggi sebesar Rp194.042.724.475,73 atau 49,33%.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp168.615.360.351,82 atau 42.87%.

Peningkatan realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 tersebut di atas rata-rata realisasi PAD yang mengalami penurunan sebesar 13,01% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Kontribusi realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 14,16%, lebih tinggi dari Tahun Anggaran 2024 sebesar 10,48%.

Dengan demikian, sumber pendanaan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sangat rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelampauan target PAD tersebut disebabkan antara lain:

a) Perencanaan target PAD belum sepenuhnya memperhitungkan potensi PAD, kebijakan makroekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah; dan

b) Perhitungan dan penyusunan prognosis capaian pendapatan daerah 6 (enam) bulan ke depan dari PAD yang disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran semester pertama kurang akurat, sehingga target PAD dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih rendah, sehingga menyebabkan pelampauan realisasi.

Realisasi dan kontribusi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

a) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp221.828.935.874,35 atau 99,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.975.016.750,00;

b) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp9.914.556.645,00 atau 175,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp 5.660.787.000,00;

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp18.395.564.057,62 atau 61,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00; dan

d) Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp 311.812.260.408,11 atau 95,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp 327.742.877.358,99.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp221.828.935.874,35 atau 99,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.975.016.750,00.

Gambaran realisasi pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	84.083.474.000,00	79.317.427.865,00	94,33
2022	90.755.404.000,00	92.131.328.321,00	101,52
2023	103.810.475.000,00	86.526.896.700,00	83,35
2024	123.016.354.000,00	113.650.131.384,00	92,39
2025	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	99,04

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pendapatan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp221.828.935.874,35 terdapat peningkatan sebesar Rp108.178.804.490,35 atau 95,19%.

Penetapan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi sebesar Rp110.324.885.366,00 atau 97,07% dari realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp113.650.131.384,00.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024, maka realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp108.178.804.490,35 atau 95,19%. Realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut di atas rata-rata realisasi pendapatan pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar 34,15% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Kontribusi realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi pendapatan asli daerah

sebesar 39,47%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 28,89%. Sedangkan kontribusi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 5,59% lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,03%. Sumber pendanaan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari pajak daerah cukup berdampak pada proporsi kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan capaian realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), pelampauan target pajak daerah Tahun 2025 tersebut bersumber dari objek pajak daerah , antara lain:

(1) Pajak Air Tanah

Target Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp420.000.000,00 tercapai sebesar Rp494.109.277,35 atau 117,64% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp487.224.027,35 dan pembayaran piutang sebesar Rp6.885.250,00.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 sebesar Rp2.029.103.000,00 terealisasi sebesar Rp7.616.339.132,00 atau 375,35% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp7.581.442.069,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp34.897.063,00.

(3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 dianggarkan sebesar

Rp73.502.200.000,00 terealisasi sebesar Rp96.471.738.738,00 atau 131,25%.

(4) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp30.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp46.126.375.000,00 atau 153,75%.

Namun demikian, terdapat rincian objek pendapatan pajak daerah yang tidak memenuhi target, antara lain:

(1) Pajak Reklame

Target Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp2.729.859.000,00 terealisasi sebesar 1.966.095.017,00 atau 72,02% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.927.966.563,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp38.128.454,00.

(2) Pajak Sarang Burung Walet

Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp249.522.750,00 terealisasi sebesar Rp124.516.000,00 atau 49,90% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp122.466.000,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.050.000,00.

(3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 sebesar Rp29.904.394.000,00 terealisasi sebesar Rp29.645.996.684,00 atau 99,14% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp28.748.703.236 dan pembayaran piutang sebesar Rp897.293.448,00.

(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.139.938.000,00 terealisasi sebesar Rp7.529.732.798,00 atau 29,95% merupakan

realisasi pendapatan sebesar Rp7.231.672.318,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp298.060.480,00.

(5) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp60.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.854.033.228,00 atau 53,09%.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi masih belum mencapai target di Tahun Anggaran 2025.
2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan pajak belum cermat dalam melakukan penetapan target penerimaan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah tidak sepenuhnya didasarkan pada potensi penerimaan yang terkini dan belum melakukan *updating* data terhadap wajib pajak, calon wajib pajak dan potensi-potensi yang akan menjadi subjek dan objek pajak.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasi akan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah, antara lain:

(1) Menentukan dan menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah agar lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan potensi pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah serta memastikan apakah jenis potensi penerimaan daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menetapkan target pajak daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah. Perencanaan target pendapatan pajak daerah secara terukur menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Derah.

(3) *Updating* data potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan dengan pendataan wajib pajak, calon wajib pajak dan objek pajak.

(4) Pendataan potensi pendapatan daerah perlu didukung suatu kajian akademis sehingga potensi permasalahan dan langkah-langkah strategis pencapaian pendapatan lebih akurat.

(5) Menyusun laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah.

(6) Akan tetap mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka percepatan pemungutan pajak daerah untuk menjamin ketersedian sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena

kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan terhadap total Pendapatan Daerah cukup berdampak pada proporsi kemampuan keuangan daerah, antara lain:

(a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemungutan pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban membayar pajak;

(b) Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Musi Banyusin;

(c) Mengoptimalkan penerapan sistem pengelolaan pajak berbasis digital untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran, pelaporan, pemantauan status kewajiban pajak dan penerimaan bukti pembayaran secara real time, serta sebagai instrumen pemerintah daerah dalam peningkatan kepatuhan pajak dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran pajak, dengan memedomani antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan *Digitalisasi* Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan

(d) Penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi pajak seperti pengurangan dokumen yang dipersyaratkan atau pembuatan formulir yang mudah dipahami guna meningkatkan partisipasi dalam membayar pajak.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.914.556.645,00 atau 175,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.660.787.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	9.966.499.000,00	8.026.396.031,00	80,53
2022	6.411.138.000,00	4.931.450.592,75	76,92
2023	7.640.360.000,00	6.354.903.597,00	83,18
2024	6.713.287.000,00	6.626.027.122,00	98,7
2025	5.660.787.000,00	9.914.556.645,00	175,14

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi retribusi daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali Tahun Anggaran 2022. Penetapan target retibusi daerah Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.052.500.000,00 atau 15,68%. Selanjutnya, realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.288.529.523,00 atau 49,63%.

Kontribusi realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,76% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,68%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realiasi total pendapatan daerah sebesar 0,25% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 0,18%. Sumber pendanaan pengeluaran daerah dari retribusi daerah tidak cukup berdampak, namun demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memastikan ketersediaan

sumber dana untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan.

Adapun realisasi berdasarkan sub rincian objek pendapatan retribusi daerah yang melampaui target Tahun Anggaran 2025, antara lain:

(1) Dinas Lingkungan Hidup

a) Retribusi Pelayanan Persampahan dengan kode rekening 4.1.02.01.14.0001 terealisasi sebesar Rp1.072.001.000,00 atau 214,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00; dan

b) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dengan kode rekening 4.1.02.02.19.0001 terealisasi sebesar Rp1.169.330.000,00 atau 103,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.130.000.000,00.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan kode rekening 4.1.02.01.14.0002 terealisasi sebesar Rp65.785.000,00 atau 243,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00; dan

b) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar 5.089.771.255,00 atau 203,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00.

(3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan dengan kode rekening 4.1.02.02.14.0001 terealisasi sebesar Rp180.423.000,00 atau 120,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00.

(4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dengan kode rekening 4.1.02.02.15.0001 terealisasi Rp40.050.000,00

atau 100,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.

(5) Dinas Perhubungan

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dengan kode rekening 4.1.02.02.16.0001 terealisasi sebesar Rp5.150.000,00 atau 103, 00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

(6) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dengan kode rekening 4.1.02.02.17.0001 terealisasi sebesar Rp237.907.000,00 atau 167,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.427.000,00.

(7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp431.575.280,00 atau 200,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.000.000,00.

(8) Dinas Perkebunan

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan kode rekening 4.1.02.02.17.0001 terealisasi sebesar Rp705.183.360,00 atau 504,21% atau sebesar Rp139.860.000,00.

Namun demikian, terdapat realisasi berdasarkan sub rincian objek pendapatan retribusi daerah yang realisasinya tidak optimal, antara lain:

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian

  Retribusi Pelataran dengan kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp196.168.050,00 atau 98,058% dari yang dianggarkan sebesar Rp196.168.050,00%.

Memperhatikan data di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

(1) Dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memperhatikan perkiraan

pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:

(a) Kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

(b) Potensi Retribusi

(2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan retribusi daerah, dan

dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);

(3) Tetap mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka percepatan pemungutan pendapatan retribusi daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(4) Dalam penetapan target retribusi daerah khususnya terhadap retribusi izin memperkerjakan tenaga asing agar memperhatikan data dan timeline perizinan tenaga asing yang jatuh tempo pada tahun 2024; dan

(5) Mengoptimalkan penerapan transaksi berbasis elektronik dan melakukan percepatan serta perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.395.564.057,62 atau 61,31% dari nilai anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00.

Gambaran anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025):

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	18.068.805.000,00	17.206.508.321,84	95,23
2022	17.500.000.000,00	19.065.474.112,22	108,95
2023	28.000.000.000,00	28.082.895.564,79	100,30
2024	30.000.000.000,00	27.898.190.463,75	92,99
2025	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,32

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi 5 (lima) tahun terakhir atas pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai pada target hanya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 menurun sebesar Rp9.502.626.406,13 atau 34,06%. Realisasi tersebut merupakan jumlah dividen yang bersumber antara lain dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dividen di Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh penurunan laba audited Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024 dibandingkan dengan laba pada tahun buku 2023. Realisasi sebesar Rp18.395.564.057,62 di Tahun Anggaran 2025 merupakan jumlah dividen PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2025. Saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 91.582 lembar dengan jumlah dividen yang diterima Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp18.395.564.057,62 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 20 Juni 2025. sesuai dengan Surat Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 485/DIR/III/B/2025.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan

langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, antara lain:

(1) Menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

(2) Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya perusahaan yang belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

(3) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp311.812.260.408,11 atau 95,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp327.742.877.358,99.

Gambaran anggaran dan realisasi Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	256.963.342.000,00	272.660.616.882,73	106,11
2022	239.361.660.039,00	236.376.429.815,09	98,75
2023	267.701.459.811,00	248.485.877.831,93	92,82
2024	459.922.314.525,00	245.157.602.663,51	53,30
2025	327.742.877.358,99	311.812.260.408,00	95,14

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target.

Apabila realiasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp66.654.657.744,49 atau 27,19%. Kontribusi realisasi Lain-lain PAD yan Sah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi PAD sebesar 55,49%, lebih rendah dari kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar 62,33%. Sedangkan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah sebesar 7,86% mengalami kenaikan sebesar 1,33% dari kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,53%.

Jika dibandingkan dengan realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024, maka penetapan target lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp82.585.274.695,48 atau 33,70% dari realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024. Penetapan target tidak rasional dikarenakan:

(a) Penetapan target tidak didukung kajian empiris;

(b) Penetapan target tidak memperhatikan pencapaian realisasi 4 (empat) tahun terakhir; dan

(c) Penetapan target tidak berdasarkan potensi riil atas sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Adapun sub rincian objek realisasi lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan lain-lain PAD yang sah, antara lain:

1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

   Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp133.970.347.732,59 atau 95,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp140.000.000.000,00.

2) Puskesmas Cinta Karya

   Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp941.438.294,00 atau 78,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.914.951,00.

3) Puskesmas Lais

   Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp1.800.615.686,00 atau 64,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.783.134.500,00.

4) Dinas Perikanan

   Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya dengan kode rekening 4.1.04.01.05.0054 terealisasi sebesar Rp14.001.000,00 atau 40% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00.

Namun demikian, terdapat pendapatan lain-lain PAD yang sah yang realisasinya melampaui target dari yang ditetapkan, serta yang terealisasi namun tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah, antara lain;

1) Sekretariat Daerah

   Hasil Sewa BMD dengan kode rekening 4.1.04.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

2) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

   (a) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dengan kode rekening

4.1.04.01.02.0062 terealisasi sebesar Rp666.129.200,00 dari semula tidak dianggarkan;

(b) Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum terealisasi sebesar Rp171.642.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan;

(c) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya terealisasi sebesar Rp666.129.200,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

3) Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp34.504.914.879,00 atau130,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.500.000.000,00.

4) Puskesmas Lubuk Bintialo
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp615.821.301,00 atau 111,96 dari yang dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

(1) Dalam menetapkan target lain-lain PAD yang sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan lain-lain PAD yang sah Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Khusus penerimaan target jasa bunga, denda keterlambatan, dan penerimaan komisi potongan atau bentuk lain, TAPD perlu memperhatikan dan memperhitungkan, antara lain:

(a) Cashflow RKUD sebagaimana diatur dalam sistem pengendalian manajemen kas dan jadwal kegiatan;
(b) Tingkat pencapaian realisasi sebelumnya; dan
(c) Potensi riil atas sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah.

(3) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.406.212.851.924,43 atau 91,99% dari nilai anggaran sebesar Rp3.702.991.131.666,60.

Gambaran anggaran dan realiasasi pendapatan transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	3.146.828.564.116,00	3.025.394.578.711,00	96,14
2022	3.190.555.050.573,00	2.758.120.796.365,78	86,45
2023	3.668.811.786.966,00	3.436.298.411.805,00	93,66
2024	4.027.080.510.372,00	3.354.108.863.089,40	83,29
2025	3.702.991.131.666,60	3.406.212.851.924,43	91,99

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pendapatan transfer dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp3.406.212.851.924,43 atau 91,99% dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp3.702.991.131.666,60.

Kontribusi realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 85,84%, lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar 89,32%. Hal ini menunjukkan pendapatan daerah masih bergantung terhadap Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024, maka realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp52.103.988.835,03 atau 1,55% .

Tidak tercapainya target realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 tersebut dipengaruhi oleh realisasi pada sub rincian objek, antara lain:

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

   (a) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan kode rekening 4.2.01.08.02.0003 terealisasi sebesar Rp87.526.161.439,00 atau 58,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.680.806.000,00;

   (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dengan kode rekening 4.2.01.08.02.0004 terealisasi sebesar Rp33.027.465.000,00 atau 74,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.036.622.000,00;

   (c) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota dengan kode rekening 4.2.01.09.02.0033 terealisasi sebesar Rp5.028.850.665,00 atau 76,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.605.107.000,00;

   (d) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas dengan kode rekening 4.2.01.09.02.0035

terealisasi sebesar Rp6.670.431.485,00 atau 37,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.919.293.000,00; dan

(e) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan kode rekening 4.2.02.02.02.0001 terealisasi sebesar Rp35.864.097.966,60 atau 49,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.990.148.166,60.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah-langkah:

a) Berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH dan DAK;

b) Terhadap pelaksanaan Dak agar tetap melakukan upaya optimalisasi capaian realisasi antara lain:

(1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik secara berkala dalam Tahun Anggaran berjalan yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

(2) Melakukan pemantauan aspek keuangan yang dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah terhadap:

(a) Realiasasi penyerapan DAK Fisik tematik bidang/sub bidang

(b) Ketepatan waktu dalam penyampaian lapoaran penyerapan dana dan capaian keluaran; dan

(c) Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

(3) Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi DAK Fisik secara efektif dan relevan dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan.

c) Memastikan DAU yang ditentukan penggunaannya, digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang-bidang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Mengoptimalkan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya di setiap tahapan, dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta permohonan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya kepada Kementrian Keuangan dengan dilengkapi dokumen yang lengkap dan sah sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola DAK dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi dibandingkan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp7.507.176.000,00.

Berdasarkan data dan analisi terhadap anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Kontribusi realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 14,16%, mengalami peningkatan sebesar 3,69% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar 10,48%. Kontribusi PAD masih merupakan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang besar setelah pendapatan dana transfer;

2) Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap PAD yaitu 39,47%, mengalami peningkatan sebesar 10,58% dari kontribusi Tahun Anggaran 2024 sebesar 28,89%. Selanjutnya, kontribusi pajak daerah TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,59%, walaupun mengalami penurunan sebesar 2,56%% dari kontribusi pajak daerah TA 2024sebesar 3,03%;
3) Kontribusi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 terhadap total pendapatan daerah sebesar 85,84% dan mengalami penurunan sebesar 3,49% dibandingkan dengan kontribusi TA 2024 sebesar 89,33%. Hal ini menunjukkan masih bergantung pendanaan kepada Pemerintah Pusat; dan
4) Penetapan target lain-lain PAD yang sah khususnya jasa bunga, denda keterlambatan, dan komisi potongan atau bentuk lainnya tidak didukung suatu data/fakta terkait potensi yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan data, faktor-faktor yang mempengaruhi serta kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan potensi pendapatan dan faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.

   Selanjutnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

(a) Kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan

(b) Potensi Pajak dan Retribusi.

2) Dalam rangka memudahkan akses pembayaran pajak dan retribusi daerah dari masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan meningkatkan elektronifikasi dan memperluas kanal pembayaran dengan kerja sama pihak-pihak e-commerce atau penyedia Marketplace dan waralaba;

3) Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya dalam pelaksanaan pemungutan seperti pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, penagihan pajak dacrah dan retribusi daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi;

4) Optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan guna memperoleh kontribusi laba yang realistis atas penyertaan modal daerah;

5) Meningkatkan penyertaan modal daerah pada perusahaan yang berkinerja tinggi dan memiliki proyeksi perolehan laba yang tinggi, baik melalui penyertaan modal baru maupun hasil dari pelepasan investasi dari perusahaan yang kurang

dan/atau tidak memberikan kontribusi laba terhadap PAD;

6) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
7) Meningkatkan kualitas layanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang berbentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD;
8) Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menetapkan target setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek PAD secara terukur sesuai potensi yang ada berdasarkan analisis dan kajian yang matang, sehingga target seluruh jenis PAD dapat direalisasikan minimal sebesar target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9) Melakukan penyesuaian perencanaan target setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap Laporan Realisasi Anggaran semester pertama. Selanjutnya, diikuti dengan penyesuaian rencana kegiatan dan sub kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tentang Perubahan sesuai target Pendapatan Daerah;
10) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan PAD; dan
11) Meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan realisasi PAD.

b. BELANJA DAERAH

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja sebesar Rp4.750.926.224.507,58,00 dengan realisasi sebesar Rp3.811.670.043.170,23 atau 80,23% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja tersebut naik sebesar Rp188.630.132.806,21 atau 5,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.623.039.910.364,02, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	91,36
2022	3.556.246.375.776,00	3.259.813.882.099,83	91,66
2023	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	90,27
2024	4.750.926.224.507,58	3.811.670.043.170,23	80,23
2025	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	89,74

Anggaran dan realisasi belanja daerah dalam kelompok belanja daerah dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.597.270659.087,33 atau 88,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.925.697.036.935,88.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp742.977.252.064,46 atau 88,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp838.048.630.214,17.

3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.766.488.804,00 atau 50,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.442.284.504,55.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Aanggaran 2025 sebesar Rp528.350.989.472,00 atau 97,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.652.123.254,00.

Realisasi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.597.270659.087,33 atau 88,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.925.697.036.935,88.

Gambaran realisasi belanja operasi dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana

table berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	2.556.011.657.399,00	2.271.258.011.014,17	88,86
2022	2.391.938.878.243,00	2.173.313.722.360,86	90,86
2023	2.664.497.036.394,00	2.368.483.329.746,10	88,21
2024	2.977.667.797.595,18	2.507.571.123.568,16	84,21
2025	2.925.697.036.935,88	2.597.270.659.087,33	88,77

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja operasi tidak mencapai target dari yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan target belanja operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp418.125.913.367,72 atau 16,67% dari realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 89.699.535.519,17 3,58% dari realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024. Peningkatan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja operasi yang mengalami penurunan sebesar 3,14% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kenaikan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 terdapat pada jenis belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Porsi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 67,09%, lebih tinggi dari porsi Tahun Anggaran 2024 sebesar 65,79%.

Anggaran dan realisasi belanja operasi berdasarkan jenis belanja dapat diuraikan, antara lain:

a) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.459.387.408.621,22 atau 90,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.605.850.647.744,57.

Gambaran realisasi belanja pegawai dalam 5(lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.045.912.595.891,00	953.392.507.260,00	91,15
2022	1.106.894.363.722,00	999.547.471.827,50	90,3
2023	1.202.497.619.868,00	1.049.080.026.130,18	87,24
2024	1.368.661.726.364,58	1.199.348.281.960,91	87,63
2025	1.605.850.647.744,57	1.459.387.408.621,22	90,88

Berdasarksan data tersebut, capaian realisasi belanja pegawai tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.459.387.408.621,22 atau 90,88% dari yang dianggarakan sebesar Rp1.605.850.647.744,57. Penetapan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp406.502.365.783,66 dari realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 atau menglami peningkatan sebesar 33,89%.

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp260.369.126.660,31 atau 21,68%. Porsi realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 terhadap total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 37,70%.

Kenaikan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 terjadi pada objek belanja pegawai sebagai berikut:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp799.106.229.756,00, naik sebesar Rp157.309.638.386,00 atau 24,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp641.796.591.370,00;

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp519.751.971.720,44, naik sebesar Rp228.429.133.841,44 atau 78.41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp291.322.837.879,00.
(3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp25.044.182.584,00, naik sebesar Rp146.268.776,92 atau 0,59% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.897.913.807,08.
(4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp1.165.833.888,00, naik sebesar Rp368.811.396,00 atau 46,27% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp797.022.492,00.
(5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp1.192.110.000,00, naik sebesar Rp198.990.000,00 atau 20,04% atau Rp108.226.011.301,83 dari realisasi Tahun Anggaran 2024.
(6) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp113.127.080.672,78, naik sebesar Rp4.901.069.370,95 atau 4,53% dari Tahun Anggaran 2024.

Besarnya sisa anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 disebabkan rendahnya realisasi beberapa objek belanja pegawai, antara lain:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp1.165.833.888,00 atau 52,215 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.233.020.663,00; dan
(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp519.751.971.720,44 atau 88,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp588.681.708.501,30.

Porsi anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 terhadap total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 37,23%. Sementara,

porsi realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah sebesar 37,70%.

Selanjutnya, porsi belanja pegawai Tahun 2025 tersebut terhadap total belanja daerah melampaui ketentuan yang diamanatkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang akan menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan angaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran, dengan memperhitungkan, antara lain:

(1) Gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara, pemeberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima

persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kematiaan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(5) Pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(6) Data pegawai negeri yang akan memasuki masa pensiun.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp834.930.090.186,19 atau 85,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp978.979.321.942,31

Gambaran Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.452.515.316.479,00	1.269.485.693.192,17	87,4
2022	1.257.582.047.854,00	1.134.253.894.449,36	90,19
2023	1.347.412.961.344,00	1.204.877.864.227,92	89,42
2024	1.421.094.838.567,60	1.166.182.290.152,25	82,06
2025	978.979.321.942,31	834.930.090.186,19	85,29

Capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 relatif rendah, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Barang tersebut turun sebesar Rp38.695.574.075,67 atau 3,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.204.877.864.227,92.

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja barang dan jasa belum mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp834.930.090.186,19 atau 85,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp978.979.321.942,31. Penetapan anggaran belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp187.202.968.209,94 atau mengalami penurunan sebesar 16,05% dari realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024. Penurunan realisasi belanja barang jasa Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sebesar 9,01% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp331.252.199.966,06 atau 28,40%.

Kenaikan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 terjadi pada objek pajak belanja barang dan jasa sebagai berikut:

(1) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi terealisasi sebesar Rp6.331.817.732,00 atau 3.466,90% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.516.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terealisasi sebesar Rp25.797.204.431,00 atau 215,73% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.170.657.260,00; dan

(3) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terealisasi sebesar Rp3.313.494.750,00 atau 129,28% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.445.155.100,00.

Besarnya sisa anggaran belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 disebabkan rendahnya

realisasi beberapan objek belanja barang dan jasa , antara lain:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp9.108.934.227,00 atau 68,47 dari yang dianggarkan sebesar Rp13.303.028.700,00;

(2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp1.238.891.164,00 atau 62,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp62,41%;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terealisasi sebesar Rp85.857.800,00 atau 75,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp113.656.000,00; dan

(4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi Rp84.858.306.915,00 atau 75,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp111.738.673.230,10.

Porsi realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi belanja operasi sebesar 32,15% menurun sebesar 14,36% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar 46,51%.

Selanjutnya, porsi realisasi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 21,57%, menurun sebesar 9,03% dari porsi realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar 30,60%.

Pada beberapa SKPD masih terdapat capaian realisasi belanja barang dan jasa yang di bawah pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

(1) Dinas Pendidikan

(a) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.01.01.2.08.0002 terealisasi

sebesar Rp802.095.005,00 atau 28,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.810.542.400,00;

(b) Sub kegiatan penyelengaran proses belajar bagi peserta didik dengan kode rekening 1.01.02.2.02.0058 terealisasi sebesar Rp517.489.850,00 atau 42,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.227.871.850,00; dan

(c) Sub kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik dengan kode rekening 1.01.02.2.02.0067 terealisasi sebesar Rp3.050.000,00 atau 32,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.475.000,00;

(2) Dinas Kesehatan

(a) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0010 terealisasi sebesar Rp245.712.660,00 atau 49,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp492.086.000,00;

(b) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0011 terealisasi sebesar Rp301.366.350,00 atau 56,06%; dan

(c) Sub kegiatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan nasional dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0028 terealisasi sebesar Rp147.150.000,00 atau 33,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp436.284.500,00.

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(a) Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan kode rekening 1.03.01.2.05.0009

terealisasi sebesar Rp32.000.000,00 atau 32% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;

(b) Sub kegiatan normalisasi restorasi sungai dengan kode rekening 1.03.02.2.01.0093 terealisasi sebesar Rp19.857.554.950,00 atau 87,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.590.137.350,00; dan

(c) Sub kegiatan pembangunan jembatan dengan kode rekening 1.03.10.2.01.0040 terealisasi sebesar Rp47.400.600,00 atau 17,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp278.214.500,40;

(4) Sekretariat Daerah

(a) Sub kegiatan kordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup dengan kode rekening 4.01.03.2.04.0002 terealisasi sebesar Rp167.311.468,00 atau 73,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp227.217.000,00; dan

(b) Sub kegiatan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan kode rekening 4.01.01.2.05.0009 terealisasi sebesar Rp441.679.493,00 atau 65,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp670.622.000,00.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai realisasi belanja barang dan jasa, antara lain:

(1) Kurangnya pemahaman terhadap regulasi utamanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Perencanaan anggaran belanja barang dan jasa belum disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pencapaian output sub kegiatan.

(3) Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

(4) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang, dan

(5) Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan, dan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

(1) Mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada seluruh SKPD, dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien;

(2) Perencanaan anggaran belanja barang dan jasa belum disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pencapaian output sub kegiatan;

(3) Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;

(4) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang, dan

(5) Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan, dan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah, antara lain:

(1) Mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada seluruh SKPD, dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien;

(2) Melakukan percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa;

(3) Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada seluruh SKPD dalam percepatan pengadaan barang dan jasa melalui pembayaran mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh sub kegiatan serta pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD secara simultan;

(5) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien;

(6) Mendorong ASN pada lingkup SKPD untuk mengikuti peningkatan kapasitas terkait sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa;

(7) Mendorong pengadaan barang/jasa pada SKPD melalui e-purchasing yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah; dan

(8) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar teknis sesuai ketentuan peraturan harga perundang-undangan.

c) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp246.484.811.969,92, atau 93,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.798.375.249,00

Gambaran capaian realisasi belanja hibah selama 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	35.524.367.164,00	32.224.901.964,00	90,71
2022	15.971.784.200,00	28.132.557.225,00	176,14
2023	111.781.321.093,00	112.095.635.679,00	100,28
2024	167.145.566.663,00	136.655.551.455,00	81,76
2025	262.798.375.249,00	246.484.811.969,92	93,79

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja hibah tidak mencapai target dari yang sudah di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp246.484.811.969,92 atau 93,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.798.375.249,00.

Penetapan anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp 126.142.823.794,00 atau 92,31% dari realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2024 terdapat peningkatan sebesar Rp 109.829.260.514,92 atau 80,37%.

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja hibah yang mengalami peningkatan 97,01sebesar % dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi belanja operasi Tahun Angagran

202 sebesar 9,49%, terdapat kenaikan sebesar 4,04% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2024 sebesar 5,45%. Sedangkan porsi realisasi belanja hibah terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 6,37%, terdapat kenaikan sebesar 2,84% dibandingkan porsi Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,53%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar:

(1) Meningkatkan kualitas perencanaan belanja hibah, sehingga anggaran belanja hibah yang ditetapkan dapat di realisasikan secara optimal, dan apabila terdapat anggaran belanja hibah yang tidak dapat disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar dilakukan rasionalisasi sisa anggaran tersebut untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah; dan

(2) Memastikan pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain pada Dinas Pendidikan yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan kode rekening 1.01.02.2.01.0047 dengan realisasi belanja hibah sebesar Rp283.096.200,00 atau 94,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp299.395.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp78.068.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.468.348.310,00 atau

72,33% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut naik sebesar Rp51.083.348.310,00 atau 948,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.385.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya program unggulan baru dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Program Keluarga Maju (PKM) pada Dinas Sosial dan terdapat penambahan utang di Tahun 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam hal pemberian bantuan social, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp742.977.252.064,46 atau 88,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp838.048.630.214,17. Gambaran capaian realisasi belanja modal dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.172.223.769.142,00	1.097.177.454.687,31	93,6
2022	692.968.997.184,00	619.786.347.959,97	89,44
2023	819.927.010.107,00	756.123.871.417,92	92,22
2024	1.233.172.084.375,00	814.583.797.586,07	66,06
2025	838.048.630.214,17	742.977.252.064,46	88,66

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp742.977.252.064,46 atau 88,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp838.048.630.214,17. Penetapan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp23.464.832.628,10 atau 2,88% dari realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024.

Jika realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp71.606.545.521,61 atau 8,79%. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal yang mengalami penurunan sebesar 5,64% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Porsi realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total belanja daerah adalah sebesar 19,19%, mengalami penurunan sebesar 2,18% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 21,37%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi Belanja Modal, antara lain:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah dalam 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	13.822.257.376,00	0	0,00
2022	9.931.980.475,00	7.540.913.151,00	75,93
2023	24.244.723.000,00	14.994.980.293,00	61,85
2024	28.773.940.611,00	14.159.821.565,00	49,21
2025	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,62

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.150.484.130,00 atau 57,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.996.785.750,00.

Penetapan anggaran belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp12.163.035.815,00 atau 85,90% dari realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp13.009.337.435,00 atau 91,88%. Penurunan realisasi belanja modal tanah

Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja modal tanah yang mengalami penurunan sebesar 49,08% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 0,15%, sedangkan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,03%. Rendahnya realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 dapat disebabkan karena:

(1) Sebagian pengadaan lahan/tanah tidak terjadi kesepakatan antara pemilik tanah dengan beberapa SKPD/Unit SKPD dan kendala lainnya dalam pembebasan lahan sehingga sampai dengan tahun anggaran tidak dapat direalisasikan sesuai rencana yang ditetapkan;
(2) Belum dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh terkait program kegiatan pemerintah daerah provinsi yang berdampak pada dibutuhkannya lahan atau tanah milik masyarakat; dan
(3) Lahan atau tanah yang akan dibeli belum selesai dokumen legalitas kepemilikan lahan atau tanah sampai dengan akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan pembayaran.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal tanah antara lain:

(1) Memastikan ketersediaan tanah dan legalitas dokumen kepemilikan tanah yang akan diperoleh;
(2) Dalam hal pemerintah daerah provinsi sumatera selatan dalam pelaksanaan pembangunan mengharuskan adanya pembebasan lahan/tanah masyarakat maka terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat secara komprehensif terkait pembebasan lahan dalam rangka pembangunan; dan

(3) Sebelum dianggarkan dalam APBD, terlebih dahulu disepakati harga dan proses pembebasan tanah dengan masyarakat selaku pemilik tanah.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 sebenar 108.116.548.508,58atau 94,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.723.099.390,28.

Gambaran capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	207.559.625.287,00	0,00	0,00
2022	160.033.170.833,00	140.284.444.182,73	87,66
2023	144.897.284.230,00	127.634.008.214,00	88,09
2024	131.961.626.066,40	102.795.588.522,20	77,9
2025	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	94,24

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp108.116.548.508,58atau 94,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.723.099.390,28. Penetapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp11.927.510.868,08 atau 11,60% dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp5.320.959.986,38 atau 5,18%, kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang mengalami peningkatan sebesar 8,42% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal peralatan dan mesin terhadap realisasi belanja modal adalah sebesar 14,55%,

sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 2,79%.

Terdapat realisasi beberapa objek belanja modal peralatan dan mesin yang kurang optimal, antara lain:

(1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin terealiasi sebesar Rp665.000,00 atau 10% dari yang dianggarkan sebesar Rp 6.650.000,00;
(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terealisasi sebesar Rp8.179.777.628,00 atau 74,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.972.692.273,00; dan
(3) Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp1.673.766.867,08 atau 89,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.879.675.920,00.

Kurang optimalnya realisasi beberapa objek belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 dapat disebabkan, antara lain:

(1) Perencanaan anggaran belanja modal belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pencapaian output sub kegiatan;
(2) Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan, dan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang modal;
(3) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang;
(4) Kebijakan rasionalisasi atau efisiensi belanja modal peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan SKPD; dan
(5) Keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan, gagal lelang, penyelesaian administrasi pembayaran yang lambat dan keterlambatan pembayaran.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin, antara lain:

(1) Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;
(2) Agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi atau efisiensi untuk pencapaian output sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
(3) Perhitungan HPS sebagai clasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta stanclar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal peralatan dan mesin setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD; dan
(5) Melakukan percepatan pengaclaan barang modal peralatan mesin melalui pengadaan secara elektronik (e-purchasing), seperti katalog elektronik, toko daring, dan ritel daring.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal bangunan clan gedung TA 2024 sebesar 123.976.665.935,08 atau 87,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.207.215.860,00.

Gambaran capaian realisasi belanja modal bangunan dan gedung dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	347.819.645.698,00	84.083.474.000,00	24,17
2022	183.130.630.833,00	163.318.924.570,77	89,18
2023	176.960.192.426,00	165.490.547.392,58	93,52
2024	194.596.894.445,00	161.139.070.395,87	82,81
2025	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	87,79

Berdasarkan data di atas, capaian realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Aanggaran 2025 tidak mencapai target dari yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp123.976.665.935,08 atau 87,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.207.215.860,00.

Penetapan anggaran belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp 19.931.854.535,87 atau 12,37% dari realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2024, terdapat penurunan sebesar Rp 37.162.404.460,79 atau 23,06%. Penurunan realisasi belanja modal bangunan dan gedung TA 2024 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal bangunan dan gedung yang mengalami peningkatan sebesar 69,87% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 16,69%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 3,20%.

Belanja modal bangunan dan gedung yang realisasinya kurang optimal terdapat pada objek belanja modal bangunan dan gedung, antara lain:

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD yang terealisasi sebesar Rp1.721.010.345,00 atau 23,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp 7.197.218.135,00; dan

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang terealisasi sebesar Rp111.029.378.032,34 atau 90,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.247.146.325,00.

Kurang optimalnya realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 dapat disebabkan, antara lain:

(1) Keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan, penyelesaian administrasi pembayaran yang lambat dan keterlambatan pembayaran;
(2) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belum dilakukan secara cermat dengan berdasarkan pada antara lain harga pasar /harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal bangunan dan gedung antara lain:

(1) Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal bangunan dan gedung, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;
(2) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal bangunan dan gedung setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD;
(3) Melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum tahun anggaran dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Sebelum menganggarkan suatu pekerjaan pembangunan, agar dipastikan bahwa tempat atau lahan untuk pembangunan bangunan

dan gedung telah clean and clear secara legalitas kepemilikan;

(5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak pengadaan pekerjaan; dan

(6) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 488.599.757.196,80 atau 87,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp 558.908.666.183,89.

Gambaran capaian realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	588.678.748.284,00	9.966.499.000,00	1,69
2022	324.593.681.043,00	296.077.957.195,47	91,21
2023	460.715.165.634,00	434.337.839.983,34	94,27
2024	860.625.026.492,00	519.469.106.288,00	60,36
2025	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	87,42

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp488.599.757.196,80 atau 87,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp558.908.666.183,89.

Penetapan target belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp 39.439.559.895,89 atau 7,59% dari realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Tanggaran Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp 30.869.349.091,20 atau 5,94%. Penurunan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang mengalami peningkatan sebesar 735,74% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Porsi belanja modal jalan, irigasi danjaringan Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 65,76%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 12.62%.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang realisasinya kurang optimal terdapat pada objek belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, antara lain:

(1) Belanja Modal Jembatan yang terealisasi sebesar Rp27.457.276.000,00 atau 64,43 dari yang dianggarkan sebesar Rp42.613.478.630,89;
(2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku yang terealiasi sebesar Rp1.934.464.750,00 atau 87,01 dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.223.202.050,00; dan
(3) Belanja Modal Jalan yang terealisasi sebesar Rp 419.339.259.676,80 atau 88,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp 472.047.861.543,00.

Kurang optimalnya realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 dapat disebabkan, antara lain:

(1) Keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan, penyelesaian administrasi pembayaran yang lambat dan keterlambatan pembayaran; dan
(2) Hasil efisiensi belanja modal jalan, irigasi clan jaringan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan kualitas perencanaan dan

pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, antara lain:

(1) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal jalan, irigasi dan jaringan setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD;
(2) Melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum tahun anggaran dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil efisiensi untuk pencapaian output sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
(5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak pengadaan pekerjaan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.054.567.424,00 atau 99,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.116.469.853,00.

Gambaran capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	14.343.492.765,00	18.068.805.000,00	125,97
2022	15.279.534.000,00	12.564.108.860,00	82,23
2023	13.109.644.817,00	13.666.495.535,00	104,25
2024	17.199.706.111,00	17.020.210.815,00	98,96
2025	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	99,71

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp21.054.567.424,00 atau 99,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.116.469.853,00. Penetapan target belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp4.096.259.038,00 atau 24,07% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp4.034.356.609,00 atau 23,70%. Kenaikan realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang mengalami penurunan sebesar 21,87% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 2,83%, sedangkan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,54%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja aset tetap lainnya, antara lain:

(1) Sehubungan dengan terlampauinya anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS, TAPD bersama APIP clan SKPD yang membidangi urusan pendidikan agar lebih optimal dalam pembinaan clan pengawasan terhadap penyusunan clan pelaksanaan anggaran khususnya pada Satuan Pendidikan (Satdik);

(2) Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban clan pembayaran atas tagihan pengadaan

belanja modal aset tetap lainnya, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;

(3) Mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi untuk pencapaian output sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan clan kesejahteraan masyarakat;

(4) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal aset tetap lainnya setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD;

(5) Melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum Tahun Anggaran dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(6) Melakukan monitoring clan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang modal aset tetap lainnya setiap sub kegiatan.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp96.393.177,00 dan terealisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp79.228.870,00 atau 82,19% merupakan realisasi belanja sebesar Rp20.905.063.424,00 dan pembayaran utang sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tersebut naik sebesar Rp79.228.870,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang tidak terealisasi.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.766.488.804,00 atau 50,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.442.284.504,55. Gambaran capaian realisasi belanja transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.753.000.000,00	1.018.853.800,00	58,12
2022	4.485.000.000,00	2.347.728.430,00	52,35
2023	4.233.206.000,00	21.000.000,00	0,50
2024	5.435.810.272,00	2.155.951.800,00	39,66
2025	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja tak tarduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.766.488.804,00 atau 50,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.442.284.504,55. Penetapan target belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp 3.286.332.704,55 atau 152,43 % dari realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024.

Dibandingkan realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp 610.537.004,00 atau 28,32%. Kenaikan realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja tak terduga yang mengalami peningkatan sebesar 2.606,08% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi realisasi belanja tak terduga terhadap realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 0.07%, mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari porsi realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,06%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja tak terduga, antara lain:

(1) Mengkaji kembali tren penggunaan belanja tak terduga dalam beberapa tahun terakhir sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
(2) Menyesuaikan alokasi belanja tak terduga dengan tingkat risiko daerah, potensi bencana, dan kebutuhan darurat yang realistis;

(3) Menggunakan data historis realisasi belanja tak terduga sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(4) Menghindari penganggaran yang terlalu besar apabila kebutuhan darurat pada tahun-tahun sebelumnya relatif rendah;
(5) Melakukan monitoring terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan kebutuhan belanja tak terduga; dan
(6) Menyusun laporan evaluasi penggunaan belanja tak terduga secara triwulanan sebagai bahan pengambilan keputusan.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp528.350.989.472,00 atau 97,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.652.123.254,00.

Gambaran capaian realisasi belanja transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	469.074.917.412,00	467.003.286.509,00	99,56
2022	466.853.500.349,00	464.366.083.349,00	99,47
2023	525.070.099.600,00	498.411.709.200,00	94,92
2024	534.650.532.265,00	487.359.170.216,00	91,15
2025	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,01

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp528.350.989.472,00 atau 97,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.652.123.254,00. Penetapan target belanja transfer Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp57.292.953.038,00 atau 11,76% dari realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024.

Dibandingkan realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp 40.991.819.256,00 atau 8,41%. Kenaikan realisasi belanja transfer Tahun Anggran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja transfer yang mengalami penurunan sebesar 4,63% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi realisasi belanja transfer terhadap realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 13,65%, mengalami kenaikan sebesar 0,86% dari porsi realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar 0.86%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan untuk menjamin kepastian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada pemerintah kabupaten/kota/desa penerima bantuan keuangan.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan capaian realisasi belanja minimal 90,00%, realisasi belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 89,74% sehingga realisasi belanja tersebut belum sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2) Capaian realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 cukup optimal, dan telah mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,51%

dibandingkan dengan capaian realisasi total belanja daerah Tahun Angagran 2024 sebesar 80,23%;

3) Realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rpl. 59.695.346.257,56 atau 1,57% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
4) Kendala dan permasalahan pencapaianrealisasi belanja dapat berupa, antara lain:
   a) Perencanaan anggaran belanja pegawai serta barang dan jasa yang kurang efektif yang berdampak terhadap peningkatan sisa anggaran/hasil efisiensi belanja pegawai serta belanja barang dan Jasa;
   b) Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa sub kegiatan, sehingga tidak cukup waktu untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran;
   c) Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK belum dapat direalisasikan karena pelaksanaan pengangkatan PPPK yang tidak sesuai dengan rencana;
   d) Adanya kegagalan pengadaan barang/jasa dikarenakan tidak tersedia dalam katalog elektronik;
   e) Pembebasan lahan/tanah tidak dapat dilakukan sarnpai dengan akhir tahun dikarenakan belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah daerah dengan masyarakat selaku pemilik tanah dan/atau kendala pembebasan lainnya;
   f) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang;
   g) Keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah atas tagihan penyedia barang/jasa sesuai hasil pekerjaan, sehingga sampai dengan akhir tahun belum dapat direalisasikan; dan

h) Kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan yang masih kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan belanja daerah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan sumber pendanaan, dan mempertimbangkan:
   a) Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dalarn Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
   b) Kebutuhan infrastruktur untuk layanan masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian; dan
   c) Khususnya dalam perencanaan tanah, agar memastikan terlebih dahulu ketersediaan, kesepakatan harga dan legalitas dokumen kepemilikan tanah yang akan dibeli dari masyarakat sebagai dasar penganggaran, untuk menghindari tidak dapat direalisasikan.
2) Penyusunan anggaran belanja daerah harus berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS), Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, seperti belanja pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik. Pemenuhan alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan porsi belanja modal untuk pengadaan infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan publik;
4) Mengalokasikan anggaran secara efisien dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja dalam rangka pencapaian output setiap sub kegiatan yang ditetapkan;

5) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD;
7) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
   a) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DPA;
   b) Optimalisasi pengadaan melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring;
   c) Optimalisasi penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan; dan
   d) Mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak berupa bukti pembelian dan surat pesanan dalam pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana.
8) Menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
9) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa pada masing-masing SKPD secara

simultan dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan belanja barang/jasa yang tujuannya untuk menjamin:

a) Efektivitas pelaksanaan belanja barang/jasa, yaitu tercapainya tujuan/ sasaran program, output kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam AKPD dan SPD;
b) Efisiensi penggunaan anggaran, yaitu tercapainya tujuan/ sasaran program, output kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada setiap SKPD dengan penggunaan input yang seminimal mungkin;
c) Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, yaitu pelaksanaan belanja barang/jasa yang dilakukan secara tertib dan taat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
d) Optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran pengadaan barang/jasa untuk pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah.

10) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa pada masing-masing SKPD secara simultan dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan belanja barang/jasa yang tujuannya untuk menjamin:
    a) Efektivitas pelaksanaan belanja barang/jasa, yaitu tercapainya tujuan/ sasaran program, output kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam AKPD dan SPD;
    b) Efisiensi penggunaan anggaran, yaitu tercapainya tujuan/ sasaran program, output kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada setiap SKPD dengan penggunaan input yang seminimal mungkin;

c) Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, yaitu pelaksanaan belanja barang/jasa yang dilakukan secara tertib dan taat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan

d) Optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran pengadaan barang/jasa untuk pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah.

11) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa untuk menghindari pemutusan kontrak akibat kegagalan dalam pelaksanaan barang/jasa yang berdampak keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan;

12) Mematuhi pedoman penyusunan APED untuk tidak menganggarkan belanja modal pada perubahan APED, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran;

13) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APED;

14) TAPD bersama APIP, memastikan adanya keterpaduan antara sasaran atau hasil yang diharapkan dalam sub kegiatan dengan korelasi belanja yang diperlukan sehingga setiap rincian belanja mempunyai kemanfaatan atau benar-benar diperlukan untuk pencapaian output sehingga sasaran kinerja dapat tercapai seperti yang direncanakan;

15) Mengoptimalkan capaian realisasi dan kemanfaatan sub kegiatan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan supaya lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan cara menyediakan media pengaduan, pertanyaan dan saran melalui call center yang aktif 24 jam (whatsapp, SMS, dan Telepon) maupun melalui website; dan
16) Memperhatikan pelaksanaan transfer bagi hasil pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengantisipasi pembentukan hutang/kewajiban atas tunda salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota.

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.002.992.663,01% atau 99,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.056.371.759,01.

Gambaran capaian realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	826.727.227.696,00	819.314.146.595,48	99,1
2022	294.404.090.210,00	294.340.224.015,75	99,98
2023	63.371.679.556,00	62.401.787.597,88	98,47
2024	121.636.582.610,58	131.728.424.206,58	108,3
2025	50.056.371.759,01	50.002.992.663,01	99,89

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 belum optimal dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan target penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp81.672.052.447,57 atau turun sebesar 62,00% dari realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp81.725.431.543,57 atau 62,04%. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami peningkatan sebesar 79,00% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran penerimaan pembiayaan daerah yaitu perencanaan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara cermat dengan perhitungan yang akurat dan terukur untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penetapan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mengacu pada besaran SiLPA berdasarkan LHP BPK RI.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah TA 2024 sebesar Rp26.586.109.626,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp 26.586.109.626,00.

Gambaran capaian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	241.354.220.591,00	221.812.445.858,00	91,90
2022	283.088.251.046,00	192.415.108.046,00	67,97
2023	127.790.421.232,00	127.625.314.529,00	99,87
2024	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	100,00
2025	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp26.586.109.626,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.586.109.626,00.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran pembiayaan daerah dengan penetapan pagu anggaran serta pelaksanaan pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo agar memedomani Surat Perjanjian Utang Daerah.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp 120.215.662.518,73. Apabila dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.056.371.759,01 terdapat peningkatan sebesar Rp 70.159.290.759,72 atau 140,16%.

Porsi SiLPA Tahun Anggaran 2025 terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.313.840.074.908,60 adalah 2,79%.

Rasio SiLPA terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2025) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	SiLPA (Rp)	Porsi SILPA terhadap Total Anggaran Belania Daerah
2021	4.199.063.344.221,00	27.173.804.459,75	0,65
2022	3.556.246.375.776,00	63.371.679.556,76	1,78
2023	403.727.352.101,00	119.544.525.633,58	29,61
2024	4.750.926.224.507,58	50.056.371.759,01	1,05
2025	4.313.840.074.908,60	120.215.662.518,73	2,79

Berdasarkan data tersebut di atas, porsi SiLPA Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan porsi SiLPA Tahun Anggaran 2024. Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih besar dari jumlah kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp89.688.410.690,21, dengan demikian SiLPA tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek melalui pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah, antara lain:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pejabat pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan dan pembayaran belanja daerah, guna mendorong percepatan realisasi belanja daerah;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah; dan
5) Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan. Selanjutnya, SiLPA Tahun Anggaran 2025 tersebut diprioritaskan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp50.056.371.759,01. Apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp119.544.525.633,58, terdapat penurunan sebesar Rp69.488.153.874,57 atau 58,13%. Rasio SILPA Tahun Anggaran 2024 terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.750.926.224.507,58 adalah 1,05%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	3.288.741.915.922,40	675.605.322.695,48	20,54
2022	4.199.063.344.221,00	27.173.804.459,75	0,65
2023	3.556.246.375.776,00	63.371.679.556,76	1,78
2024	403.727.352.101,00	119.544.525.633,58	29,61
2025	4.750.926.224.507,58	50.056.371.759,01	1,05

Berdasarkan data tersebut di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 tersebut lebih kecil dari jumlah kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp480.364.344.320,22 namun demikian SILPA tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek melalui pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan sumber SILPA tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2) Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.399.050.654.370,86,

dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp773.453.114.298,24, mengalami kenaikan sebesar Rp 625.597.540.072,62 atau 80,88%. Aset Lancar Tahun 2025 tersebut, antara lain:

1) Kas dan Setara Kas sebesar Rp120.217.562.517,73;
2) Piutang sebesar Rp1.285.683.040.116,36;
3) Penyisihan Piutang sebesar Rp63.674.997.925,95;
4) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp3.857.716.699,47; dan
5) Persediaan sebesar Rp52.967.332.963,25.

Secara rinci Aset Lancar Tahun 2025 tersebut diuraikan, antara lain:

1) Kas dan Setara Kas sebesar Rp120.217.562.517,73, terdapat pada:
   a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.783.266.056,28;
   b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp898.697.059,00;
   c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp36.908.624,00;
   d) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp26.904.128.168,45;
   e) Kas Dana BOS sebesar Rp0,00;
   f) Kas Lainnya sebesar Rp1.899.999,00;
   g) Kas Dana BOSP sebesar Rp181.686.000,00; dan
   h) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp5.410.976.611,00

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat penempatan kas daerah pada beberapa bank. Oleh karena itu, pada tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah penertiban pengelolaan Kas Daerah, antara lain:

a) Memerintahkan seluruh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan penerimaan yang diterimanya

ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah pendapatan tersebut diterima sebagaimana amanat Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b) Memerintahkan seluruh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyetorkan sisa UP yang dikelolanya ke RKUD paling lambat per 31 Desember; dan

c) PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi kas secara periodik dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

2) Piutang

Saldo Nominal Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.285.683.040.116,36, berupa:

a) Piutang Pendapatan sebesar Rp 1.284.341.763.005,60 terdiri dari:
   (1) Piutang Pajak sebesar Rp104.788.440.583,11;
   (2) Piutang Retribusi sebesar Rp337.355.660,00;
   (3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp4.688.693.024,49;
   (4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.114.240.284.000,00;
   (5) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp 60.286 b) Piutang lainnya sebesar Rp 1.341.277.110,76.

b) Piutang lainnya sebesar Rp 1.341.277.110,76.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp63.674.997.925,95, terdiri dari:

a) Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp62.574.803.766,25;
b) Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp 337.355.660,00;
c) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp593.370.172,64; dan

d) Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp 169.468.327,06;

Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.222.008.042.190,41.

Berkenaan dengan piutang tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

3) Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.857.716.699,47, terdiri dari:

a) Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 1.476.473.484,65; dan
b) Belanja Premi Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp2.381.243.214,82.

4) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.967.332.963,25, antara lain:

a) Bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp3.496.000,00;
b) Bahan kimia sebesar Rp1.186.272.815,18;
c) Bahan bakar dan pelumas sebesar Rp4.875.000,00;
d) Bibit tanaman sebesar Rp234.067.836,00;
e) Isi tabung gas sebesar Rp20.315.178,00;
f) Bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp26.220.666,01;
g) Bahan lainnya sebesar Rp757.445.382,31;
h) Suku cadang alat kedokteran sebesar Rp918.496,00;
i) Alat tulis kantor sebesar Rp1.751.116.574,80;
j) Kertas dan cover sebesar Rp40.254.015,00;
k) Bahan cetak sebesar Rp649.021.194,89;
l) Benda pos sebesar Rp446.000,00;
m) Bahan komputer sebesar Rp134.976.336,06;

n) Perabot kantor sebesar Rp38.527.339,50;
o) Alat listrik sebesar Rp5.712.228.295,04;
p) Suvenir/cendera mata sebesar Rp234.095.800,00;
q) Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp207.049.123,50;
r) Obat sebesar Rp10.464.366.422,81;
s) Obat lainnya sebesar Rp5.870.424.312,96;
t) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya sebesar Rp11.671.450,00;
u) Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp500.804.137,44;
v) Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp24.727.529.650,00;
w) Natura sebesar Rp391.148.907,75; dan
x) Natura dan pakan lainnya sebesar Rp62.000,00.

Berkenaan dengan nilai persediaan di atas, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Terhadap persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan dan alat kesehatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, harus dilakukan pengendalian dan pengamanan terhadap pengelolaan persediaan dimaksud;
b) Meningkatkan pengendalian atas pengelolaan persediaan mengingat persediaan tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik serta merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
c) Akan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan persediaan yang dimulai dari peningkatan kompetensi SDM seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya, sampai dengan menyempurnakan sistem operasi dan prosedur,

sistem akuntansi serta kebijakan akuntansi dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat persediaan termasuk aset daerah; dan

d) Akan lebih cermat dalam merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b. ASET TIDAK LANCAR

a. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.540.671.670,97 mengalami peanurunan sebesar 4,60 % dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp703.954.597.087,50, terdiri atas:

a) PDAM Tirta Randik sebesar Rp312.420.985.551,20;
b) PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel sebesar Rp129.051.643.431,23;
c) PT Petro Muba Holding Rp219.409.770.231,54; dan
d) PT Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp10.658.272.457,00.

Berdasarkan data tersebut, investasi jangka panjang pada PDAM Tirta Randik, PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, PT Petro Muba Holding, PT Muba Energi Maju Berjaya yang telah memberikan kinerja positif dengan kontribusi laba, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap melakukan evaluasi secara berkala, membuat analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut antara lain mulai dari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan BUMD, efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/ atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.438.375.171.444,08 mengalami penurunan sebesar Rp 1.190.962.659.599,17 atau 17,97% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.629.337.831.043,25. Saldo aset tetap tersebut, antara lain:

a) Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp537.373.517.393,80 terjadi kenaikan sebesar Rp153.993.000,00 atau 0,03% dibandingkan Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 537.219.524.393,80;
b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.573.018.555.113,03 mengalami kenaikan sebesar Rp79.216.380.665,87atau 5,30% dibandingkan Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.493.802.174.447,16;
c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.486.082.218.783,01 mengalami kenaikan sebesar Rp88.473.966.398,68 atau 2,60% dibandingkan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.397.608.252.384,33;

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.345.578.746.315,61 mengalami kenaikan sebesar Rp170.110.828.105,63atau 1,67% dibandingkan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.175.467.918.209,98;
e) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 123.647.979.134,25 mengalami pengurangan sebesar Rp125.505.712.746,98 atau 20,14% dibandingkan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 102.918.522.672,25;
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp125.505.712.746,98 mengalami pengurangan sebesar Rp 8.843.331.052,19 atau 6,58% dibandingkan Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp134.349.043.799,18; dan
g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp10.752.831.558.042,60 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.540.803.953.179,15 atau 16,73% dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.212.027.604.863,45.

Berkenaan dengan nilai aset tetap dimaksud, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap mengingat aset tetap tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik serta merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Terkait penatausahaan aset tetap terutama terkait pencatatan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengaman aset tetap dan penerapan metode penyusutan aset tetap. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

f) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp94.986.960.240,90 mengalami kenaikan sebesar Rp41.371.610.548,97 atau 77,16% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.615.349.691,93; dan

g) Dana TDF sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.910.244.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.910.244.000,00.

d. Properti Investasi

Properti investasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.450.924.411,97, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tanah sebesar Rp105.264.710.786,97; dan

b) Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.213.625,00;

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyajian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur properti investasi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda Tanggal 5 April 2024 yang mengamanatkan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur properti investasi telah diklasifikasikan menjadi properti investasi tanah, properti investasi gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan properti investasi gedung dan bangunan dan akumulasi penyusutan properti investasi gedung dan bangunan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan hasil dari pemanfaatan BMD berupa tanah dan bangunan yang menjadi properti investasi.

c. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp171.220.559.920,21 yang terdiri Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp89.688.410.690,21 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp81.532.149.230,00. Apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 sebesar Rpl. 480.364.344.320,22, mengalami penurunan sebesar Rp 390.675.933.630,01 atau 81,33%.

Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025, terdiri atas:

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 1.899.999,00, merupakan PPN pada SD Negeri 2 Sekayu atas Belanja BOS tahun 2023 yang di setor ke kas negara pada tanggal 02 Maret 2026;
2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 81.116.609,66;
3) Utang Belanja sebesar Rp 77.338.720.081,55;

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81.532.149.230,00 turun sebesar Rp1.103.636.095,00 atau 1,34% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.635.785.325,00.

Berkenaan dengan Kewajiban Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah, antara lain:

1) Melakukan pelaksanaan pembayaran atas utang belanja seperti utang perhitungan pihak ketiga, utang belanja barang dan jasa, dan utang jangka pendek lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pokok hutang dan bunga atas pinjaman jangka panjang sesuai dengan perjanjian pinjaman daerah; dan
3) Segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

d. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.780.527.536.737,27,

apabila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp7.970.883.849.249,46 mengalami penurunan sebesar Rp190.356.312.512,19 atau 2,39%. Hal ini menggambarkan bahwa kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ekuitas ini menunjukkan adanya tekanan terhadap keuangan daerah, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan belanja daerah, penurunan pendapatan, atau adanya pembiayaan yang tidak seimbang. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal ini tetap menjadi perhatian penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Pemerintah Daerah akan meningkatkan upaya optimalisasi pendapatan serta pengelolaan belanja yang lebih efisien agar dapat memperkuat posisi ekuitas di masa mendatang. Selain itu, strategi pengelolaan aset dan liabilitas juga perlu terus dimonitor agar tidak berdampak negatif terhadap kekayaan bersih daerah. Dengan demikian, penurunan ekuitas ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan di masa mendatang agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang berkelanjutan.

3. Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.845.826.836.301,42. Pendapatan LO Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp559.249.723.665,59, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 587.378.681.108,99 atau 95,21%. Pendapatan Asli Daerah-LO tersebut terdiri dari:

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp219.429.211.366,89, lebih rendah

dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp223.975.016.750,00 atau 97,97%;

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.914.556.645,00, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.66..787.000,00 atau 175,14%;
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.395.564.057,60, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 61,32%; dan
4) Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp311.510.391.596,08, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp327.742.877.358,99.

b) Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.283.266.982.018,83 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.702.991.131.666,60 atau 115,67%. Pendapatan Transfer-LO tersebut, antara lain:
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.089.130.047.902,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aanggaran 2025 sebesar Rp3.505.400.983.500,00 atau 116,65%; dan
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp194.136.934.116,83 lebih

Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap berupaya dalam penertiban atas penatausahaan aset tetap, antara lain, peningkatan kompetensi SDM seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya, sampai dengan menyempurnakan Sistem Operasi dan Prosedur, Sistem Akuntansi serta Kebijakan Akuntansi dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 337.330.674.759,60 mengalami kenaikan sebesar Rp18.037.608.494,27 atau 5,65% dari saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 319.293.066.265,33, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tagihan Penjualan Angsuran Sebesar Rp501.428.296,00 sama besar dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp501.428.296,00;
b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp7.201.265.760,41 mengalami kenaikan sebesar Rp6.434.533.383,40 atau 839,22% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp766.732.377,01;
c) Aset Tak Berwujud sebesar Rp96.793.859.862,46 mengalami kenaikan sebesar Rp12.498.430.072,00 atau 14,83% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.295.429.790,46.
d) Aset Lain-lain sebesar Rp405.159.703.879,89 mengalami kenaikan sebesar Rp109.380.868.908,30 atau 36,98% dibandingkan nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp405.159.703.879,89;
e) Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp77.338.622.798,26 mengalami kenaikan sebesar Rp19.994.369.320,46 atau 34,87% dibandingkan dengan Amortisasi Aset Tidadk Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.344.253.477,80;

rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp197.590.148.166,60 atau 98,25%.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.310.130.617,00, tidak dianggarkan pada anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. Informasi Lainnya

a) Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024.

Fungsi	Komponen Perhitungan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Porsi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 4.313.840.074.908,60	1.101.321.078.282,35	1.015.893.689.481,50	92,24	25,53
Kesehatan (min. 20% dari Total Belanja Daerah diluar gaji ASN)	Total belanja diluar gaji ASN: 3.444.333.933.523,33	727.029.223.705,60	657.546.034.531,12	90,44	21,11
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja transfer	Total belanja diluar belanja transfer: 3.769.187.951.654,60	1.669.388.187.196,29	1.197.621.145.809,40	71,74	44,29

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan dialokasikan sebesar Rp1.101.321.078.282,35 dengan porsi 25,53% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.313.840.074.908,60. Hal tersebut telah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Anggaran Kesehatan dialokasikan sebesar Rp727.029.223.705,60 atau 21,11% dari total belanja daerah diluar gaji ASN. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan paling sedikit 10% (dua puluh persen) dari belanja daerah diluar gaji ASN sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp1.669.388.187.196,29 atau 44,29% dari total belanja daerah diluar belanja transfer.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik ditetapkan paling rendah 40% dari total Belanja Daerah, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah lain dan/atau desa.

b) Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial Tahun Anggaran 2025.

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	33.206.009.300,00	4.939.369.550,00	14,87
Kesehatan	5.357.493.215,00	215.357.207,00	4,02
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.133.226.650,00	7.571.693.514,00	19,86
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.530.816.000,00	330.523.050,00	5,06
Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.164.112.858,00	945.040.497,00	18,3
Sosial	2.396.158.700,00	1.034.895.736,00	43,19
Jumlah	90.787.816.723,00	15.036.879.554,00	16,56
Total Belanja APBD	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	89,74
Rasio	2,1	0,39	

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk seluruh bidang sebesar Rp90.787.816.723,00 dan terealisasi sebesar Rp15.036.879.554,00 atau 16,56%. Rasio anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah 2,10% dan terealisasi sebesar 0.90% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang akan tetap mengalokasikan anggaran belanja untuk pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perkim dan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya akan mengupayakan pencapaian output secara optimal untuk seluruh sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pemenuhan SPM untuk seluruh bidang.

c) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Peningkatan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba			
1. Pembinaan Kelembagaan dan Managemen PAUD	967.736.150,00	923.739.417,00	95,45
2. Pengeolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.916.000,00	49.300.454,00	74,79
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.879.000,00	58.214.833,00	76,72
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.428.499,00	36.224.416,00	94,26
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.965.000,00	28.037.371,00	85,05
6. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Gizi Masyarakat	111.440.500,00	82.410.155,00	73,95
7. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	91,99
8. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	289.782.128,00	201.194.019,00	69,43
9. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	232.226.000,00	104.085.000,00	44,82
Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10.Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	139.380.000,00	129.052.900,00	92,59
11.Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.173.917.200,00	1.147.510.314,00	97,75
12.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	117.581.450,00	109.474.853,00	93,11
13.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	72.309.700,00	72.309.700,00	100
14.Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	85.233.000,00	77.062.735,00	90,41
15.Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	62.005.500,00	58.372.228,00	94,14
16.Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	64.342.249,00	33.909.897,00	52,7
17.Pembinaan Terpadu Kampung KB	42.073.500,00	28.706.652,00	68,23
Optimalisasi Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Diversifikasi Ekonomi			
1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.791.000,00	267.382.156,00	

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data muba			
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	34.628.150,00	30.031.166,00	
TOTAL	60.125.458.226,00	55.174.882.108,00	
TOTAL BELANJA DAERAH	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	89,74
PORSI TERHADAP TOTAL	1,39	1,43	

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan stunting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.125.458.226,00 dan terealisasi sebesar Rp55.174.882.108,00 atau 86,72%. Porsi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan stunting terhadap anggaran total Belanja Daerah adalah sebesar 1,39 dan terealisasi sebesar 1,43% dari realisasi total Belanja Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasain, antara lain:

1) Meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
2) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting;
3) Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan stunting; dan
4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan stunting, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

d) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.112.836.000,00	2.028.836.000,00	25,01
2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	74.728.033.180,00	0,00	0
3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.122.120.000,00	0,00	0
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.863.645.200,00	697.859.000,00	11,9
5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	265.951.800,00	43.526.800,00	16,37
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.003.016.000,00	2.768.042.000,00	46,11
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.985.804.901,00	596.741.000,00	14,97
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.510.836.000,00	149.886.000,00	5,97
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	397.663.000,00	397.663.000,00	100
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.915.686.889,00	0,00	0
11	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.227.871.850,00	394.272.000,00	32,11
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.196.462.950,00	328.662.950,00	14,96
13	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.859.400.000,00	0,00	0
14	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.271.013.000,00	0,00	0
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	71.922.000	8.599.300	11,96
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.207.126.974	1.160.000	0,03
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang de	192.808.727	-	0
32	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	2.370.508.757	52.111.823	2,2
33	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyaraka	56.242.823.200	11.115.859.771	19,76
34	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali	1.627.753.200	481.095.000	29,56
35	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air	1.286.057.500	-	0
36	Pembangunan Embung dan Penampung Air	993.954.650	592.098.850	59,57
37	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi I	433.636.000	-	0
38	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	423.934.350	-	0
39	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minur	16.009.280.800	6.066.883.800	37,9
40	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minur	2.197.707.200	-	0
41	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	9.768.000	-	0
42	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelola	477.570.200	51.875.614	10,86
43	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Lim	16.059.346.300	372.378.100	2,32
44	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi d	158.241.600	158.241.600	100
45	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.636.866.250	330.523.050	20,19
46	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk	25.934.904.000	3.050.000.000	11,76
47	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	70.628.476.982	6.856.583.450	9,71
48	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edu	125.489.087	-	0
49	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korba	556.432.000	161.976.000	29,11
50	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Eval	213.204.700	19.231.200	9,02
51	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja S	105.045.000	25.868.920	24,63
52	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber K	24.779.869.700	31.607.672	0,13
53	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber K	826.290.950	148.430.198	17,96
54	Penyediaan Permakanan	1.471.563.000	310.276.136	21,08
55	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritu	220.415.700	35.093.600	15,92
56	Pemberian Layanan Kedaruratan	400.000.000	400.000.000	100
57	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Da	312.434.000	33.241.481	10,64
58	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Kel	30.271.433.825	12.187.695.082	40,26
59	Pelayanan Dukungan Psikososial	304.180.000	289.526.000	95,18
60	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatih	4.506.892.000	2.099.803.750	46,59
61	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas K	152.769.925	-	0
62	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi S	165.655.000	15.045.600	9,08
63	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	88.196.000	-	0
64	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah K	139.380.000	1.920.000	1,38
65	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganek	1.173.917.200	5.309.540	0,45
66	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Pe	40.987.545	1.659.200	4,05
67	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	47.839.500	17.000.000	35,54
68	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	91.844.402	34.330.550	37,38
69	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudu	38.377.950	2.250.000	5,86
70	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukk	160.144.701	-	0
71	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Adm	358.448.800	55.056.609	15,36
72	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat	57.270.454	-	0
73	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan	51.919.700	-	0
74	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab	53.747.000	4.555.900	8,48
75	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pen	145.701.198	11.533.900	7,92
76	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembar	251.788.075	3.453.170	1,37
77	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	143.434.000	6.523.900	4,55
78	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	55.464.000	710.000	1,28

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
79	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	152.736.225	2.816.700	1,84
80	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	926.689.817	65.801.300	7,1
81	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.566.000.000	-	0
82	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	553.013.054	15.794.878	2,86
83	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	213.719.500	3.195.000	1,49
84	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	185.137.500	20.626.366	11,14
85	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	7.278.631.425	2.966.687.500	40,76
86	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	105.856.050	2.667.100	2,52
87	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	42.539.000	9.661.700	22,71
88	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	499.824.000	464.215.000	92,88
89	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7.085.000	7.085.000	100
90	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.462.365.806	-	0
91	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.791.000	27.419.172	9,91
92	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	605.775.950	39.248.677	6,48
93	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.176.842.100	763.683.719	18,28
94	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	57.775.500	37.235.500	64,45
95	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.117.636.139	214.922.200	2,65
96	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	289.343.762	-	0
97	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	35.429.500	17.216.150	48,59
98	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.497.423.940	8.477.300	0,57
99	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	214.860.149	29.496.584	13,73
100	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.758.635.268	27.805.665	1,58
101	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	183.447.943	6.816.050	3,72
Total Belanja Kemiskinan Ekstrem		472.921.518.964	58.273.990.534	12,32
Total Belanja Kemiskinan Daerah		4.313.840.074.909	3.871.365.389.428	
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)		10,96	1,51	

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupen Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp472.921.518.964,10 dan terealisasi sebesar Rp58.273.990.534,00 atau 98,70%. Rasio belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terhadap anggaran total belanja daerah adalah sebesar 10,96% dan terealisasi sebesar 1,51% dari realisasi total belanja daerah.

Alokasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun

Anggaran 2025 tersebut perlu lebih ditingkatkan dalam rangka percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Musi Banyuasin.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang akan tetap melakukan langkah-langkah untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, antara lain:

1) Meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
3) Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

e) Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

No	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal		
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)
1	DINAS PERHUBUNGAN	742.020.000,00	4.628.647,00	0,62	-	-	-
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.780.753.691,00	-	-	225.893.856,00	-	-
3	BPBD	17.043.603.975,20	-	-	8.574.170.849,80	-	-
	TOTAL	20.566.377.666,20	4.628.647,00	0,02	8.800.064.705,80	-	-

Memperhatikan data tersebut, KKPD telah digunakan pada 3(tiga) OPD, sehingga realisasi belanja menggunakan KKPD masih sangat kecil. Adapun kendala penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

a. Kurangnya komitmen Kepala SKPD untuk menggunakan KKPD;

b. Kurangnya infrastruktur pendukung seperti mesin Electronic Data Capture (EDC) pada penyedia barang/jasa;
c. Dukungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan sebagai bank penempatan RKUD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk menerbit KKPD belum optimal dikarenakan BPD Sumatera Selatan belum mempunyai kewenangan untuk menerbitkan KKPD; dan
d. Bank kerja sama (co-branding) yang ditunjuk oleh BPD Sumatera Selatan sebagai penerbit KKPD belum dapat secara optimal mendukung penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan langkah-langkah:

1) Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku PA agar membangun komitmen bersama dengan jajaran untuk menggunakan KKPD dalam pengadaan barang/jasa;
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
3) BPD Sumatera Selatan bekerja sama dengan bank kerja sama (co-branding) untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur pendukung penggunaan KKPD di seluruh daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4) BPD Sumatera Selatan bekerja sama dengan bank kerja sama (co-branding) dalam memperluas jangkauan belanja daerah menggunakan KKPD baik belanja secara langsung, melalui e-katalog, toko daring dan pengadaan elektronik lainnya;
5) Meningkatkan keterlibatan UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah baik melalui e-katalog lokal maupun belanja secara langsung dan transaksi belanja dilakukan menggunakan KKPD;

6) Meningkatkan besaran Uang Persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD khususnya bagi OPD yang belum menerapkan guna percepatan perluasan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kata Nomor 900.1.15.2/433/SJ tanggal 24 Januari 2024 tentang Percepatan Penggunaan KKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penggunaan KKPD secara nasional berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan klasifikasi penganggaran yang tidak memadai mengakibatkan nilai realisasi belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
2. Realisasi Belanja Barang Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada 26 Satuan Pendidikan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembaayaran atas Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp583.893.034,00;
3. Belanja Honorarium pada 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja honorarium sebesar Rp887.328.575,00 dan Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebesar Rp66.315.000,00 membebani keuangan Daerah;
4. Pembayaran Biaya Langsung Personel atas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada empat SKPD tidak sesuai kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar pada 43 sekolah Rp1.610.753.829,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp158.555.062,00 atas pekerjaan jasa konsultansi;
5. Proses Perencanaan, Pengadaan, dan Pelaksanaan Belanja Umrah tidak memadai mengakibatkan prinsip pengadaan barang/jasa berpotensi tidak terpenuhi dan berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan memperoleh harga terbaik serta membebani keuangan daerah;
6. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi mutu atas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp900.286.407,65 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.174.067.558,06; dan

7. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum melaksanakan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya secara memadai mengakibatkan risiko salah saji pada Laporan Keuangan Pemkab Musi Banyuasin Tahun 2025.

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan:

a. Memerintahkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan cermat dan menginstruksikan masing-masing Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran (BA) mematuhi ketentuan klasifikasi penganggaran Belanja Daerah dalam dalam pelaksanaan penyusunan APBD;
b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa BOSP pada 26 sekolah sebesar Rp583.893.034,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.
c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.610.753.829,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp158.555.062,00 atas pekerjaan jasa konsultansi pada empat SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
d. Sekretaris Daerah lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Belanja Kontribusi Asosiasi Umrah serta menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa, lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, memeriksa hasil pekerjaan, dan merealisasikan kegiatan

Perjalanan Ibadah Umrah sesuai ketentuan perundang-undangan;

e. Memerintahkan Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas PUPR memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp900.286.407,65 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.174.067.558,06 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan

f. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemkab Musi Banyuasin dan melakukan langkah-langkah penatausahaan BMD sesuai ketentuan.

II. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK agar di tahun mendatang dapat dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Bupati bersama DPRD telah melakukan Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 akan segera ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

WAKIL KETUA I,

IRWIN ZULYANI, S.H.

WAKIL KETUA II,

AHMADI

WAKIL KETUA III,

EDI PRAMONO

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Musi Banyuasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur akan membatalkan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 JULI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 472 /KPTS/BPKAD/2026
TANGGAL : 30 JULI 2026

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang, meliputi:

A. KONSISTENSI :

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Bayuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. LEGALITAS :

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Memperhatikan jadwal penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan surat Bupati Musi Banyuasin Nomor B-900/710/ BPKAD/2026 tanggal 17 Juni 2026 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Juli 2026 sesuai dengan Berita Acara Nomor 11/KPTS-DPRD/2026 dan Nomor 353/KPTS-BPKAD/2026, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Permohonan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor B-900/850/BPKAD/2026 tanggal 14 Juli 2026 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Bupati Kabupaten tentang Penjabaran . Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.
4. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/ 2105/Keuda tanggal 21 April 2025 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar:

1. Menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
2. Menjaga konsistensi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

C. KEBIJAKAN :

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi kebijakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) :

   a. PENDAPATAN DAERAH :

      Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.968.164.168.909,51 atau 92,49% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp4.290.369.812.775,59.

      Gambaran anggaran dan realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	3.613.690.337.116,00	3.510.691.709.632,75	97,15
2022	7.089.513.789.224,00	6.331.885.924.893,68	89,31
2023	4.078.146.093.777,00	3.807.803.712.928,72	93,37
2024	4.654.239.641.897,00	3.754.951.995.722,66	80,68
2025	4.290.369.812.775,59	3.968.164.168.909,51	92,49

      Berdasarkan data tersebut, pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mencapai target dari yang dianggarkan. Realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.754.951.995.722,66 terdapat kenaikan sebesar 5,68%.

      Tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah tersebut disebabkan antara lain:

      1) Penetapan target pendapatan daerah yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kurang memperhitungkan data potensi pendapatan daerah, capaian realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan makroekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah; dan

      2) Perhitungan dan penyusunan prognosis capaian pendapatan daerah 6 (enam) bulan ke depan yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama kurang akurat, sehingga target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terlalu tinggi sehingga menyebabkan tidak tercapainya realisasi.

Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp561.951.316.985,08 atau 95,67% dari yang dianggarakan sebesar Rp587.378.681.108,99.

Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	369.082.120.000,00	377.346.398.574,74	102,24
2022	354.028.202.039,00	352.504.682.841,06	99,57
2023	407.152.294.811,00	369.446.323.693,72	90,74
2024	619.651.955.525,00	393.335.956.633,26	63,48
2025	587.378.681.108,99	561.951.316.985,08	95,67

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, penetapan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp587.378.681.108,99, lebih tinggi sebesar Rp194.042.724.475,73 atau 49,33%.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp168.615.360.351,82 atau 42.87%.

Peningkatan realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 tersebut di atas rata-rata realisasi PAD yang mengalami penurunan sebesar 13,01% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Kontribusi realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 14,16%, lebih tinggi dari Tahun Anggaran 2024 sebesar 10,48%.

Dengan demikian, sumber pendanaan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sangat rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelampauan target PAD tersebut disebabkan antara lain:

a) Perencanaan target PAD belum sepenuhnya memperhitungkan potensi PAD, kebijakan makroekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah; dan

b) Perhitungan dan penyusunan prognosis capaian pendapatan daerah 6 (enam) bulan ke depan dari PAD yang disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran semester pertama kurang akurat, sehingga target PAD dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih rendah, sehingga menyebabkan pelampauan realisasi.

Realisasi dan kontribusi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

a) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp221.828.935.874,35 atau 99,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.975.016.750,00;

b) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp9.914.556.645,00 atau 175,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp 5.660.787.000,00;

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp18.395.564.057,62 atau 61,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00; dan

d) Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp 311.812.260.408,11 atau 95,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp 327.742.877.358,99.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp221.828.935.874,35 atau 99,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.975.016.750,00.

Gambaran realisasi pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	84.083.474.000,00	79.317.427.865,00	94,33
2022	90.755.404.000,00	92.131.328.321,00	101,52
2023	103.810.475.000,00	86.526.896.700,00	83,35
2024	123.016.354.000,00	113.650.131.384,00	92,39
2025	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	99,04

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pendapatan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp221.828.935.874,35 terdapat peningkatan sebesar Rp108.178.804.490,35 atau 95,19%.

Penetapan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi sebesar Rp110.324.885.366,00 atau 97,07% dari realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp113.650.131.384,00.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024, maka realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp108.178.804.490,35 atau 95,19%. Realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut di atas rata-rata realisasi pendapatan pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar 34,15% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Kontribusi realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi pendapatan asli daerah sebesar 39,47%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 28,89%. Sedangkan kontribusi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 5,59% lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,03%. Sumber pendanaan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari pajak daerah cukup berdampak pada proporsi kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan capaian realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), pelampauan target pajak daerah Tahun 2025 tersebut bersumber dari objek pajak daerah , antara lain:

(1) Pajak Air Tanah :

Target Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp420.000.000,00 tercapai sebesar Rp494.109.277,35 atau 117,64% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp487.224.027,35 dan pembayaran piutang sebesar Rp6.885.250,00.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 sebesar Rp2.029.103.000,00 terealisasi sebesar Rp7.616.339.132,00 atau 375,35% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp7.581.442.069,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp34.897.063,00.

(3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) :

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp73.502.200.000,00 terealisasi sebesar Rp96.471.738.738,00 atau 131,25%.

(4) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

Opsen Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp30.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp46.126.375.000,00 atau 153,75%.

Namun demikian, terdapat rincian objek pendapan pajak daerah yang tidak memenuhi target, antara lain:

(1) Pajak Reklame :

Target Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp2.729.859.000,00 terealisasi sebesar 1.966.095.017,00 atau 72,02% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.927.966.563,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp38.128.454,00.

(2) Pajak Sarang Burung Walet :

Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp249.522.750,00 terealisasi sebesar Rp124.516.000,00 atau 49,90% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp122.466.000,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.050.000,00.

(3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :

Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 sebesar Rp29.904.394.000,00 terealisasi sebesar Rp29.645.996.684,00 atau 99,14% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp28.748.703.236 dan pembayaran piutang sebesar Rp897.293.448,00.

(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.139.938.000,00 terealisasi sebesar Rp7.529.732.798,00 atau 29,95% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp7.231.672.318,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp298.060.480,00.

(5) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

Target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp60.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.854.033.228,00 atau 53,09%.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

(1) Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi masih belum mencapai target di Tahun Anggaran 2025.

(2) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan pajak belum cermat dalam melakukan penetapan target penerimaan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah tidak sepenuhnya didasarkan pada potensi penerimaan yang terkini dan belum melakukan *updating* data terhadap wajib pajak, calon wajib pajak dan potensi-potensi yang akan menjadi subjek dan objek pajak.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah, antara lain:

(1) Menentukan dan menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah agar lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan potensi pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah serta memastikan apakah jenis potensi penerimaan daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menetapkan target pajak daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah. Perencanaan target pendapatan pajak daerah secara terukur menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Derah.

(3) *Updating* data potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan dengan pendataan wajib pajak, calon wajib pajak dan objek pajak.

(4) Pendataan potensi pendapatan daerah perlu didukung suatu kajian akademis sehingga potensi permasalahan dan langkah-langkah strategis pencapaian pendapatan lebih akurat.

(5) Menyusun laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah.

(6) Harus tetap mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka percepatan pemungutan pajak daerah untuk menjamin ketersedian sumber pendanaan pengeluaran daeerah yang ditetapkan dalam Anaggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan terhadap total Pendapatan Daerah cukup berdampak pada proporsi kemampuan keuangan daerah, antara lain:

   (a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemungutan pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban membayar pajak;

(b) Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Musi Banyusin;

(c) Mengoptimalkan penerapan sistem pengelolaan pajak berbasis digital untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran, pelaporan, pemantauan status kewajiban pajak dan penerimaan bukti pembayaran secara real time, serta sebagai instrumen pemerintah daerah dalam peningkatan kepatuhan pajak dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran pajak, dengan memedomani antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan *Digitalisasi* Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan

(d) Penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi pajak seperti pengurangan dokumen yang dipersyaratkan atau pembuatan formulir yang mudah dipahami guna meningkatkan partisipasi dalam membayar pajak.

b) Retribusi Daerah :

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.914.556.645,00 atau 175,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.660.787.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	9.966.499.000,00	8.026.396.031,00	80,53
2022	6.411.138.000,00	4.931.450.592,75	76,92
2023	7.640.360.000,00	6.354.903.597,00	83,18
2024	6.713.287.000,00	6.626.027.122,00	98,70
2025	5.660.787.000,00	9.914.556.645,00	175,14

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi retribusi daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali Tahun Anggaran 2022. Penetapan target retibusi daerah Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.052.500.000,00 atau 15,68%. Selanjutnya, realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.288.529.523,00 atau 49,63%.

Kontribusi realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,76% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,68%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap realiasi total pendapatan daerah sebesar 0,25% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 0,18%. Sumber pendanaan pengeluaran daerah dari retribusi daerah tidak cukup berdampak, namun demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memastikan ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan.

Adapun realisasi berdasarkan sub rincian objek pendapatan retribusi daerah yang melampaui target Tahun Anggaran 2025, antara lain:

(1) Dinas Lingkungan Hidup :

a) Retribusi Pelayanan Persampahan dengan kode rekening 4.1.02.01.14.0001 terealisasi sebesar Rp1.072.001.000,00 atau 214,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00; dan

b) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dengan kode rekening 4.1.02.02.19.0001 terealisasi sebesar Rp1.169.330.000,00 atau 103,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.130.000.000,00.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

a) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan kode rekening 4.1.02.01.14.0002 terealisasi sebesar Rp65.785.000,00 atau 243,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00; dan

b) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar 5.089.771.255;00 atau 203,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00.

(3) Perdagangan dan Perindustrian :

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan dengan kode rekening 4.1.02.02.14.0001 terealisasi sebesar Rp180.423.000,00 atau 120,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00.

(4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan :

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dengan kode rekening 4.1.02.02.15.0001 terealisasi Rp40.050.000,00 atau 100,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.

(5) Dinas Perhubungan :

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan dengan kode rekening 4.1.02.02.16.0001 terealisasi sebesar Rp5.150.000,00 atau 103, 00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

(6) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata :

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dengan kode rekening 4.1.02.02.17.0001 terealisasi sebesar Rp237.907.000,00 atau 167,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.427.000,00.

(7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp431.575.280,00 atau 200,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.000.000,00.

(8) Dinas Perkebunan :

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan kode rekening 4.1.02.02.17.0001 terealisasi sebesar Rp705.183.360,00 atau 504,21% atau sebesar Rp139.860.000,00.

Namun demikian, terdapat realisasi berdasarkan sub rincian objek pendapatan retribusi daerah yang realisasinya tidak optimal, antara lain:

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

Retribusi Pelataran dengan kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp196.168.050,00 atau 98,058% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.

Memperhatikan data di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

(1) Dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:

(a) Kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Penandapatan dan Belanja Negara; dan

(b) Potensi Retribusi.

(2) Menyusun dan menetapkan *prognosis* 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan retribusi daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);

(3) Tetap mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka percepatan pemungutan pendapatan retribusi daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(4) Dalam penetapan target retribusi daerah khususnya terhadap retribusi izin memperkerjakan tenaga asing agar memperhatikan data dan *timeline* perizinan tenaga asing yang jatuh tempo pada tahun 2024; dan

(5) Mengoptimalkan penerapan transaksi berbasis elektronik dan melakukan percepatan serta perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.395.564.057,62 atau 61,31% dari nilai anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00.

Gambaran anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025),

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	18.068.805.000,00	17.206.508.321,84	95,23
2022	17.500.000.000,00	19.065.474.112,22	108,95
2023	28.000.000.000,00	28.082.895.564,79	100,30
2024	30.000.000.000,00	27.898.190.463,75	92,99
2025	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,32

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi 5 (lima) tahun terakhir atas pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai pada target hanya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 menurun sebesar Rp9.502.626.406,13 atau 34,06%. Realisasi tersebut merupakan jumlah dividen yang bersumber antara lain dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung *dividen* di Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh penurunan laba *audited* Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024 dibandingkan dengan laba pada tahun buku 2023. Realisasi sebesar Rp18.395.564.057,62 di Tahun Anggaran 2025 merupakan jumlah dividen PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2025. Saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 91.582 lembar dengan jumlah dividen yang diterima Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp18.395.564.057,62 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 20 Juni 2025. sesuai dengan Surat Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 485/DIR/III/B/2025.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, antara lain:

(1) Menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

(2) Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya perusahaan yang belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

(3) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp311.812.260.408,11 atau 95,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp327.742.877.358,99.

Gambaran anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	256.963.342.000,00	272.660.616.882,73	106,11
2022	239.361.660.039,00	236.376.429.815,09	98,75
2023	267.701.459.811,00	248.485.877.831,93	92,82
2024	459.922.314.525,00	245.157.602.663,51	53,30
2025	327.742.877.358,99	311.812.260.408,00	95,14

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target.

Apabila realiasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp66.654.657.744,49 atau 27,19%. Kontribusi realisasi Lain-lain PAD yan Sah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi PAD sebesar 55,49%, lebih rendah dari kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar 62,33%. Sedangkan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total Pendapatan Daerah sebesar 7,86% mengalami kenaikan sebesar 1,33% dari kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,53%.

Jika dibandingkan dengan realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024, maka penetapan target lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp82.585.274.695,48 atau 33,69% dari realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024. Penetapan target tidak rasional dikarenakan:

(a) penetapan target tidak didukung kajian empiris;
(b) penetapan target tidak memperhatikan pencapaian realisasi 4 (empat) tahun terakhir; dan
(c) penetapan target tidak berdasarkan potensi riil atas sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Adapun sub rincian objek realisasi lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan lain-lain PAD yang sah, antara lain:

1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu :
   Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp133.970.347.732,59 atau 95,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp140.000.000.000,00.
2) Puskesmas Cinta Karya :
   Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp941.438.294,00 atau 78,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.914.951,00.
3) Puskesmas Lais :
   Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp1.800.615.686,00 atau 64,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.783.134.500,00.
4) Dinas Perikanan :
   Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya dengan kode rekening 4.1.04.01.05.0054 terealisasi sebesar Rp14.001.000,00 atau 40% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00.

Namun demikian, terdapat pendapatan lain-lain PAD yang sah yang realisasinya melampaui target dari yang ditetapkan, serta yang terealisasi namun tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah, antara lain;

1) Sekretariat Daerah :
   Hasil Sewa BMD dengan kode rekening 4.1.04.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan.
2) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah :
   (a) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dengan kode rekening 4.1.04.01.02.0062 terealisasi sebesar Rp666.129.200,00 dari semula tidak dianggarkan;
   (b) Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum terealisasi sebesar Rp171.642.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan;
3) Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir :
   Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp34.504.914.879,00 atau130,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.500.000.000,00.

4) Puskesmas Lubuk Bintialo :
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp615.821.301,00 atau 111,96 dari yang dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

(1) Dalam menetapkan target lain-lain PAD yang sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan lain-lain PAD yang sah Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Khusus penerimaan target jasa bunga, denda keterlambatan, dan penerimaan komisi potongan atau bentuk lain, TAPD perlu memperhatikan dan memperhitungkan, antara lain:
(a) *Cashflow* RKUD sebagaimana diatur dalam sistem pengendalian manajemen kas dan jadwal kegiatan;
(b) Tingkat pencapaian realisasi sebelumnya; dan
(c) Potensi riil atas sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah.

(3) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer :

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.406.212.851.924,43 atau 91,99% dari nilai anggaran sebesar Rp3.702.991.131.666,60.

Gambaran anggaran dan realiasasi pendapatan transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	3.146.828.564.116,00	3.025.394.578.711,00	96,14
2022	3.190.555.050.573,00	2.758.120.796.365,78	86,45
2023	3.668.811.786.966,00	3.436.298.411.805,00	93,66
2024	4.027.080.510.372,00	3.354.108.863.089,40	83,29
2025	3.702.991.131.666,60	3.406.212.851.924,43	91,99

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pendapatan transfer dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.406.212.851.924,43 atau 91,99% dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp3.702.991.131.666,60.

Kontribusi realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 85,84%, lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar 89,32%. Hal ini menunjukkan pendapatan daerah masih bergantung terhadap Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024, maka realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp52.103.988.835,03 atau 1,55% .

Tidak tercapainya target realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 tersebut dipengaruhi oleh realisasi pada sub rincian objek, antara lain:

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :
   (a) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan kode rekening 4.2.01.08.02.0003 terealisasi sebesar Rp87.526.161.439,00 atau 58,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.680.806.000,00;
   (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dengan kode rekening 4.2.01.08.02.0004 terealisasi sebesar Rp33.027.465.000,00 atau 74,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.036.622.000,00;
   (c) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota dengan kode rekening 4.2.01.09.02.0033 terealisasi sebesar Rp5.028.850.665,00 atau 76,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.605.107.000,00;
   (d) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas dengan kode rekening 4.2.01.09.02.0035 terealisasi sebesar Rp6.670.431.485,00 atau 37,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.919.293.000,00; dan
   (e) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan kode rekening 4.2.02.02.02.0001 terealisasi sebesar Rp35.864.097.966,60 atau 49,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.990.148.166,60.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

a) Berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH dan DAK;

b) Terhadap pelaksanaan DAK agar tetap melakukan upaya optimalisasi capaian realisasi antara lain:

   (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik secara berkala dalam Tahun Anggaran berjalan yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

   (2) Melakukan pemantauan aspek keuangan yang dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah terhadap:

      (a) Realiasasi penyerapan DAK Fisik tematik bidang/sub bidang;

      (b) Ketepatan waktu dalam penyampaian lapoaran penyerapan dana dan capaian keluaran; dan

      (c) Permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

   (3) Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi DAK Fisik secara efektif dan relevan dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan.

c) Memastikan DAU yang ditentukan penggunaannya, digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang-bidang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Mengoptimalkan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya di setiap tahapan, dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta permohonan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya kepada Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen yang lengkap dan sah sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola DAK dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp7.507.176.000,00.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Kontribusi realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 14,16%, mengalami peningkatan sebesar 3,69% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar 10,48%. Kontribusi PAD masih merupakan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang besar setelah pendapatan dana transfer;
2) Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap PAD yaitu 39,47%, mengalami peningkatan sebesar 10,58% dari kontribusi Tahun Anggaran 2024 sebesar 28,89%. Selanjutnya, kontribusi pajak daerah TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,59%, walaupun mengalami penurunan sebesar 2,56%% dari kontribusi pajak daerah TA 2024 sebesar 3,03%;
3) Kontribusi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 terhadap total pendapatan daerah sebesar 85,84% dan mengalami penurunan sebesar 3,49% dibandingkan dengan kontribusi Tahun Anggaran 2024 sebesar 89,33%. Hal ini menunjukkan masih bergantung pendanaan kepada Pemerintah Pusat; dan
4) Penetapan target lain-lain PAD yang sah khususnya jasa bunga, denda keterlambatan, dan komisi potongan atau bentuk lainnya tidak didukung suatu data/fakta terkait potensi yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan data, faktor-faktor yang mempengaruhi serta kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan potensi pendapatan dan faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.

   Selanjutnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

(a) Kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan

(b) Potensi Pajak dan Retribusi.

2) Dalam rangka memudahkan akses pembayaran pajak dan retribusi daerah dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar meningkatkan elektronifikasi dan memperluas kanal pembayaran dengan kerja sama pihak-pihak *e-commerce* atau penyedia *Marketplace* dan waralaba;

3) Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya dalam pelaksanaan pemungutan seperti pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, penagihan pajak dacrah dan retribusi daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi;

4) Optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan guna memperoleh kontribusi laba yang realistis atas penyertaan modal daerah;

5) Meningkatkan penyertaan modal daerah pada perusahaan yang berkinerja tinggi dan memiliki proyeksi perolehan laba yang tinggi, baik melalui penyertaan modal baru maupun hasil dari pelepasan investasi dari perusahaan yang kurang dan/atau tidak memberikan kontribusi laba terhadap PAD;

6) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;

7) Meningkatkan kualitas layanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang berbentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD;

8) Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menetapkan target setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek PAD secara terukur sesuai potensi yang ada berdasarkan analisis dan kajian yang matang, sehingga target seluruh jenis PAD dapat direalisasikan minimal sebesar target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9) Melakukan penyesuaian perencanaan target setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap Laporan Realisasi Anggaran semester pertama. Selanjutnya, diikuti dengan penyesuaian rencana kegiatan dan sub kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tentang Perubahan sesuai target Pendapatan Daerah;
10) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan PAD; dan
11) Meningkatkan komitmen seluruh *stakeholder* agar dapat terlaksananya strategi peningkatan realisasi PAD.

b. BELANJA DAERAH :

Realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.871.365.389.427,79 atau 89,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.313.840.074.908,60. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.811.670.043,23 terdapat kenaikan sebesar Rp59.695.346.257,56 atau 1,57%.

Gambaran anggaran dan realisasi total belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	91,36
2022	3.556.246.375.776,00	3.259.813.882.099,83	91,66
2023	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	90,27
2024	4.750.926.224.507,58	3.811.670.043.170,23	80,23
2025	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	89,74

Anggaran dan realisasi belanja daerah dalam kelompok belanja daerah dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Operasi :
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.597.270.659.087,33 atau 88,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.925.697.036.935,88.
2) Belanja Modal :
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp742.977.252.064,46 atau 88,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp838.048.630.214,17.
3) Belanja Tak Terduga :
Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.766.488.804,00 atau 50,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.442.284.504,55.
4) Belanja Transfer :
Realisasi Belanja Transfer Tahun Aanggaran 2025 sebesar Rp528.350.989.472,00 atau 97,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.652.123.254,00.

Realisasi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi :

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.597.270659.087,33 atau 88,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.925.697.036.935,88.

Gambaran realisasi belanja operasi dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	2.556.011.657.399,00	2.271.258.011.014,17	88,86
2022	2.391.938.878.243,00	2.173.313.722.360,86	90,86
2023	2.664.497.036.394,00	2.368.483.329.746,10	88,89
2024	2.977.667.797.595,18	2.507.571.123.568,16	84,21
2025	2.925.697.036.935,88	2.597.270.659.087,33	88,77

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja operasi tidak mencapai target dari yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan target belanja operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp418.125.913.367,72 atau 16,67% dari realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 89.699.535.519,17 atau 3,58% dari realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024. Peningkatan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja operasi yang mengalami penurunan sebesar 3.53% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kenaikan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 terdapat pada jenis belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Porsi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 67,09%, lebih tinggi dari porsi Tahun Anggaran 2024 sebesar 65,79%.

Anggaran dan realisasi belanja operasi berdasarkan jenis belanja dapat diuraikan, antara lain:

a) Belanja Pegawai :

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.459.387.408.621,22 atau 90,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.605.850.647.744,57.

Gambaran realisasi belanja pegawai dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.045.912.595.891,00	953.392.507.260,00	91,15
2022	1.106.894.363.722,00	999.547.471.827,50	90,30
2023	1.202.497.619.868,00	1.049.080.026.130,18	87,24
2024	1.368.661.726.364,58	1.199.348.281.960,91	87,63
2025	1.605.850.647.744,57	1.459.387.408.621,22	90,88

Berdasarksan data tersebut, capaian realisasi belanja pegawai tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.459.387.408.621,22 atau 90,88% dari yang dianggarakan sebesar Rp1.605.850.647.744,57.

Penetapan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp406.502.365.783,66 dari realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 atau menglami peningkatan sebesar 33,89%.

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp260.369.126.660,31 atau 21,68%. Porsi realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 terhadap total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 37,70%.

Kenaikan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 terjadi pada objek belanja pegawai sebagai berikut:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp799.106.229.756,00, naik sebesar Rp157.309.638.386,00 atau 24,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp641.796.591.370,00;

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp519.751.971.720,44, naik sebesar Rp228.429.133.841,44 atau 78.41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp291.322.837.879,00.

(3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp25.044.182.584,00, naik sebesar Rp146.268.776,92 atau 0,59% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.897.913.807,08.

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp1.165.833.888,00, naik sebesar Rp368.811.396,00 atau 46,27% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp797.022.492,00.

(5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH terealisasi sebesar Rp1.192.110.000,00, naik sebesar Rp198.990.000,00 atau 20,04% atau Rp108.226.011.301,83 dari realisasi Tahun Anggaran 2024.

(6) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp113.127.080.672,78, naik sebesar Rp4.901.069.370,95 atau 4,53% dari Tahun Anggaran 2024.

Besarnya sisa anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 disebabkan rendahnya realisasi beberapa objek belanja pegawai, antara lain:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp1.165.833.888,00 atau 52,215 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.233.020.663,00; dan

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp519.751.971.720,44 atau 88,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp588.681.708.501,30.

Porsi anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 terhadap total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 37,23%. Sementara, porsi realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah sebesar 37,70%.

Selanjutnya, porsi belanja pegawai Tahun 2025 tersebut terhadap total belanja daerah melampaui ketentuan yang diamanatkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang agar menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan angaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran, dengan memperhitungkan, antara lain:

(1) Gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara, pemeberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kematiaan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(5) Pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(6) Data pegawai negeri yang akan memasuki masa pensiun.

b) Belanja Barang dan Jasa :

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp834.930.090.186,19 atau 85,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp978.979.321.942,31.

Gambaran Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.452.515.316.479,00	1.269.485.693.192,17	87,40
2022	1.257.582.047.854,00	1.134.253.894.449,36	90,19
2023	1.347.412.961.344,00	1.204.877.864.227,92	89,42
2024	1.421.094.838.567,60	1.166.182.290.152,25	82,06
2025	978.979.321.942,31	834.930.090.186,19	85,29

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja barang dan jasa belum mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp834.930.090.186,19 atau 85,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp978.979.321.942,31. Penetapan anggaran belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp187.202.968.209,94 atau mengalami penurunan sebesar 16,05% dari realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024. Penurunan realisasi belanja barang jasa Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sebesar 12,12% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp331.252.199.966,06 atau 28,40%.

Kenaikan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 terjadi pada objek pajak belanja barang dan jasa sebagai berikut:

(1) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi naik sebesar Rp6.154.301.732,00 atau 3.466.90% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.516.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terealisasi sebesar Rp25.797.204.431,00 naik sebesar Rp17.626.547.171,00 atau 215,73 % dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.170.657.260,00; dan

(3) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terealisasi sebesar Rp3.313.494.750,00 naik sebesar Rp1.868.339.650,00 atau 129,28% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.445.155.100,00.

Besarnya sisa anggaran belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 disebabkan rendahnya realisasi beberapan objek belanja barang dan jasa, antara lain:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp9.108.934.227,00 atau 68,47 dari yang dianggarkan sebesar Rp13.303.028.700,00;

(2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp1.238.891.164,00 atau 62,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp62,41%;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terealisasi sebesar Rp85.857.800,00 atau 75,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp113.656.000,00; dan

(4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi Rp84.858.306.915,00 atau 75,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp111.738.673.230,10.

Porsi realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 terhadap realisasi belanja operasi sebesar 32,15% menurun sebesar 14,36% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar 46,51%.

Selanjutnya, porsi realisasi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 21,57%, menurun sebesar 9,03% dari porsi realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar 30,60%.

Pada beberapa SKPD masih terdapat capaian realisasi belanja barang dan jasa di bawah pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

(1) Dinas Pendidikan :

(a) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.01.01.2.08.0002 terealisasi sebesar Rp802.095.005,00 atau 28,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.810.542.400,00;

(b) Sub kegiatan penyelengaran proses belajar bagi peserta didik dengan kode rekening 1.01.02.2.02.0058 terealisasi sebesar Rp517.489.850,00 atau 42,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.227.871.850,00; dan

(c) Sub kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik dengan kode rekening 1.01.02.2.02.0067 terealisasi sebesar Rp3.050.000,00 atau 32,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.475.000,00;

(2) Dinas Kesehatan :

(a) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0010 terealisasi sebesar Rp245.712.660,00 atau 49,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp492.086.000,00;

(b) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0011 terealisasi sebesar Rp301.366.350,00 atau 56,06%; dan

(c) Sub kegiatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan nasional dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0028 terealisasi sebesar Rp147.150.000,00 atau 33,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp436.284.500,00.

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

(a) Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan kode rekening 1.03.01.2.05.0009 terealisasi sebesar Rp32.000.000,00 atau 32% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;

(b) Sub kegiatan normalisasi restorasi sungai dengan kode rekening 1.03.02.2.01.0093 terealisasi sebesar Rp19.857.554.950,00 atau 87,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.590.137.350,00; dan

(c) Sub kegiatan pembangunan jembatan dengan kode rekening 1.03.10.2.01.0040 terealisasi sebesar Rp47.400.600,00 atau 17,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp278.214.500,40;

(4) Sekretariat Daerah :

(a) Sub kegiatan kordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup dengan kode rekening 4.01.03.2.04.0002 terealisasi sebesar Rp167.311.468,00 atau 73,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp227.217.000,00; dan

(b) Sub kegiatan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan kode rekening 4.01.01.2.05.0009 terealisasi sebesar Rp441.679.493,00 atau 65,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp670.622.000,00.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai realisasi belanja barang dan jasa, antara lain:

(1) Kurangnya pemahaman terhadap regulasi utamanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(2) Perencanaan anggaran belanja barang dan jasa belum disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pencapaian output sub kegiatan;

(3) Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;

(4) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang; dan

(5) Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan, dan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

(1) Mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada seluruh SKPD, dengan melakukan perhitungan kebutuhan *riil* barang dan jasa untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien;

(2) Perencanaan anggaran belanja barang dan jasa belum disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pencapaian output sub kegiatan;

(3) Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;

(4) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang, dan

(5) Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan, dan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

(1) Mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada seluruh SKPD, dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien;

(2) Melakukan percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa;

(3) Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada seluruh SKPD dalam percepatan pengadaan barang dan jasa melalui pembayaran mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh sub kegiatan serta pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD secara simultan;

(5) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien;

(6) Mendorong ASN pada lingkup SKPD untuk mengikuti peningkatan kapasitas terkait sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa;

(7) Mendorong pengadaan barang/jasa pada SKPD melalui *e-purchasing* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah; dan

(8) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar teknis sesuai ketentuan peraturan harga perundang-undangan.

c) Belanja Hibah :

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp246.484.811.969,92, atau 93,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.798.375.249,00.

Gambaran capaian ealisasi belanja hibah selama 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	35.524.367.164,00	32.224.901.964,00	90,71
2022	15.971.784.200,00	28.132.557.225,00	176,14
2023	111.781.321.093,00	112.095.635.679,00	100,28
2024	167.145.566.663,00	136.655.551.455,00	81,76
2025	262.798.375.249,00	246.484.811.969,92	93,79

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja hibah tidak mencapai target dari yang sudah di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp246.484.811.969,92 atau 93,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.798.375.249,00. Penetapan anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp 126.142.823.794,00 atau 92,31% dari realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2024 terdapat peningkatan sebesar Rp 109.829.260.514,92 atau 80,37%.

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja hibah yang mengalami peningkatan 97,01sebesar % dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi belanja operasi sebesar 9,49%, terdapat kenaikan sebesar 4,04% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2024 sebesar 5,45%. Sedangkan porsi realisasi belanja hibah terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 6,37%, terdapat kenaikan sebesar 2,84% dibandingkan porsi Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,53%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar:

(1) Meningkatkan kualitas perencanaan belanja hibah, sehingga anggaran belanja hibah yang ditetapkan dapat di realisasikan secara optimal, dan apabila terdapat anggaran belanja hibah yang tidak dapat disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar dilakukan rasionalisasi sisa anggaran tersebut untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah; dan

(2) Memastikan pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi belanja hibah Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain pada Dinas Pendidikan yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan kode rekening 1.01.02.2.01.0047 dengan realisasi belanja hibah sebesar Rp283.096.200,00 atau 94,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp299.395.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial:

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp78.068.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.468.348.310,00 atau 72,33% dari nilai anggaran.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut naik sebesar Rp51.083.348.310,00 atau 948,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.385.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya program unggulan baru dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Program Keluarga Maju (PKM) pada Dinas Sosial dan terdapat penambahan utang di Tahun 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam hal pemberian bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Modal :

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp742.977.252.064,46 atau 88,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp838.048.630.214,17. Gambaran capaian realisasi belanja modal dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.172.223.769.142,00	1.097.177.454.687,31	93,60
2022	692.968.997.184,00	619.786.347.959,97	89,44
2023	819.927.010.107,00	756.123.871.417,92	92,22
2024	1.233.172.084.375,00	814.583.797.586,07	66,06
2025	838.048.630.214,17	742.977.252.064,46	88,66

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp742.977.252.064,46 atau 88,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp838.048.630.214,17. Penetapan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp23.464.832.628,10 atau 2,88% dari realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024.

Jika realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp71.606.545.521,61 atau 8,79%. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal yang mengalami penurunan sebesar 5,64% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Porsi realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 terhadap realisasi total belanja daerah adalah sebesar 19,19%, mengalami penurunan sebesar 2,18% dibandingkan dengan porsi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 21,37%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi Belanja Modal, antara lain:

a) Belanja Modal Tanah :

Realisasi Belanja Modal Tanah dalam 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	13.822.257.376,00	0,00	0,00
2022	9.931.980.475,00	7.540.913.151,00	75,93
2023	24.244.723.000,00	14.994.980.293,00	61,85
2024	28.773.940.611,00	14.159.821.565,00	49,21
2025	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,62

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.150.484.130,00 atau 57,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.996.785.750,00.

Penetapan anggaran belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp12.163.035.815,00 atau 85,90% dari realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp13.009.337.435,00 atau 91,88%. Penurunan realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja modal tanah yang mengalami penurunan sebesar 49,08% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 0,15%, sedangkan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,03%.

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal tanah antara lain:

(1) Memastikan ketersediaan tanah dan legalitas dokumen kepemilikan tanah yang akan diperoleh;

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pembangunan mengharuskan adanya pembebasan lahan/tanah masyarakat maka terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat secara komprehensif terkait pembebasan lahan dalam rangka pembangunan; dan

(3) Sebelum dianggarkan dalam APBD, terlebih dahulu disepakati harga dan proses pembebasan tanah dengan masyarakat selaku pemilik tanah.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 sebenar 108.116.548.508,58 atau 94,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.723.099.390,28.

Gambaran capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut;

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	207.559.625.287,00	0	0
2022	160.033.170.833,00	140.284.444.182,73	87,66
2023	144.897.284.230,00	127.634.008.214,00	88,09
2024	131.961.626.066,40	102.795.588.522,20	77,90
2025	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	94,24

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp108.116.548.508,58atau 94,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.723.099.390,28. Penetapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp11.927.510.868,08 atau 11,60% dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp5.320.959.986,38 atau 5,18%, kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang mengalami peningkatan sebesar 8,42% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal peralatan dan mesin terhadap realisasi belanja modal adalah sebesar 14,55%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 2,79%.

Terdapat realisasi beberapa objek belanja modal peralatan dan mesin yang kurang optimal, antara lain:

(1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin terealiasi sebesar Rp665.000,00 atau 10% dari yang dianggarkan sebesar Rp 6.650.000,00;

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terealisasi sebesar Rp8.179.777.628,00 atau 74,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.972.692.273,00; dan

(3) Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp1.673.766.867,08 atau 89,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.879.675.920,00.

Kurang optimalnya realisasi beberapa objek belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 dapat disebabkan, antara lain:

(1) Perencanaan anggaran belanja modal belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pencapaian *output* sub kegiatan;

(2) Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan, dan berdampak terhadap kurangnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan barang modal;

(3) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang;

(4) Kebijakan rasionalisasi atau efisiensi belanja modal peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan SKPD; dan

(5) Keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan, gagal lelang, penyelesaian administrasi pembayaran yang lambat dan keterlambatan pembayaran.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin, antara lain:

(1) Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;

(2) Agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi atau efisiensi untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

(3) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal peralatan dan mesin setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD; dan

(5) Melakukan percepatan pengadaan barang modal peralatan mesin melalui pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*), seperti katalog elektronik, toko daring, dan ritel daring.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

Realisasi belanja modal bangunan clan gedung Tahun Anggaran 2024 sebesar 123.976.665.935,08 atau 87,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.207.215.860,00.

Gambaran capaian realisasi belanja modal bangunan dan gedung dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	347.819.645.698,00	84.083.474.000,00	24,17
2022	183.130.630.833,00	163.318.924.570,77	89,18
2023	176.960.192.426,00	165.490.547.392,58	93,52
2024	194.596.894.445,00	161.139.070.395,87	82,81
2025	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	87,79

Berdasarkan data di atas, capaian realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target dari yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp123.976.665.935,08 atau 87,79%dari yang dianggarkan sebesar Rp141.207.215.860,00.

Penetapan anggaran belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp 19.931.854.535,87 atau 12,37% dari realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2024, terdapat penurunan sebesar Rp37.162.404.460,79 atau 23,06%. Penurunan realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran

2024 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal bangunan dan gedung yang mengalami peningkatan sebesar 69,87% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 16,69%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 3,20%.

Belanja modal bangunan dan gedung yang realisasinya kurang optimal terdapat pada objek belanja modal bangunan dan gedung, antara lain:

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD yang terealisasi sebesar Rp1.721.010.345,00 atau 23,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp 7.197.218.135,00; dan

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang terealisasi sebesar Rp111.029.378.032,34 atau 90,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.247.146.325,00.

Kurang optimalnya realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 dapat disebabkan, antara lain:

(1) Keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan, penyelesaian administrasi pembayaran yang lambat dan keterlambatan pembayaran;

(2) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belum dilakukan secara cermat dengan berdasarkan pada antara lain harga pasar /harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal bangunan dan gedung antara lain:

(1) Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal bangunan dan gedung, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;

(2) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal bangunan dan gedung setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD;

(3) Melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum tahun anggaran dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Sebelum menganggarkan suatu pekerjaan pembangunan, agar dipastikan bahwa tempat atau lahan untuk pembangunan bangunan dan gedung telah *clear and clean* secara legalitas kepemilikan;

(5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak pengadaan pekerjaan; dan

(6) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan :

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 488.599.757.196,80 atau 87,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp 558.908.666.183,89.

Gambaran capaian realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	588.678.748.284,00	9.966.499.000,00	1,69
2022	324.593.681.043,00	296.077.957.195,47	91,21
2023	460.715.165.634,00	434.337.839.983,34	94,27
2024	860.625.026.492,00	519.469.106.288,00	60,36
2025	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	87,42

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp488.599.757.196,80 atau 87,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp558.908.666.183,89.

Penetapan target belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp 39.439.559.895,89 atau 7,59% dari realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp 30.869.349.091,20 atau 5,94%. Penurunan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang mengalami peningkatan sebesar 735,74% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Porsi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 65,76%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 12.62%.

Belanja modal jalan, irigasi *clan* jaringan yang realisasinya kurang optimal terdapat pada objek belanja modal jalan, irigasi *clan* jaringan, antara lain:

(1) Belanja Modal Jembatan yang terealisasi sebesar Rp 27.457.276.000,00 atau 64,43 dari yang dianggarkan sebesar Rp 42.613.478.630,89;

(2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku yang terealiasi sebesar Rp1.934.464.750,00 atau 87,01 dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.223.202.050,00; dan

(3) Belanja Modal Jalan yang terealisasi sebesar Rp 419.339.259.676,80 atau 88,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp 472.047.861.543,00.

Kurang optimalnya realisasi belanja modal jalan, irigasi *clan* jaringan Tahun Anggaran 2024 dapat disebabkan, antara lain:

(1) Keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan, penyelesaian administrasi pembayaran yang lambat dan keterlambatan pembayaran; dan

(2) Hasil efisiensi belanja modal jalan, irigasi *clan* jaringan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, antara lain:

(1) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal jalan, irigasi dan jaringan setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD;

(2) Melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum tahun anggaran dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil efisiensi untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan

(5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak pengadaan pekerjaan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.054.567.424,00 atau 99,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.116.469.853,00.

Gambaran capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

**---- 66Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	14.343.492.765,00	18.068.805.000,00	125,97
2022	15.279.534.000,00	12.564.108.860,00	82,23
2023	13.109.644.817,00	13.666.495.535,00	104,25
2024	17.199.706.111,00	17.020.210.815,00	98,96
2024	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	99,71

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp21.054.567.424,00 atau 99,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.116.469.853,00.

Penetapan target belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp4.096.259.038,00 atau 24,07% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp 4.034.356.609,00 atau 23,70%. Kenaikan realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang mengalami penurunan sebesar 21,87% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 terhadap belanja modal adalah sebesar 2,83%, sedangkan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,54%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja aset tetap lainnya, antara lain:

(1) Sehubungan dengan terlampauinya anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS, TAPD bersama APIP *clan* SKPD yang membidangi urusan pendidikan agar lebih optimal dalam pembinaan clan pengawasan terhadap penyusunan *clan* pelaksanaan anggaran khususnya pada Satuan Pendidikan (Satdik);

(2) Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban clan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal aset tetap lainnya, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;

(3) Mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan clan kesejahteraan masyarakat;

(4) Meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan pengadaan barang modal aset tetap lainnya setiap sub kegiatan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam SPD;
(5) Melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum Tahun Anggaran dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(6) Melakukan monitoring clan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang modal aset tetap lainnya setiap sub kegiatan.

f) Belanja Modal Aset Lainnya :

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp96.393.177,00 dan terealisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp79.228.870,00 atau 82,19% merupakan realisasi belanja sebesar Rp20.905.063.424,00 dan pembayaran utang sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tersebut naik sebesar Rp79.228.870,00 dibandingkan dengan Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang tidak terealisasi.

3) Belanja Tak Terduga :

Realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.766.488.804,00 atau 50,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.442.284.504,55.

Gambaran capaian realisasi belanja transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	1.753.000.000,00	1.018.853.800,00	58,12
2022	4.485.000.000,00	2.347.728.430,00	52,35
2023	4.233.206.000,00	21.000.000,00	0,50
2024	5.435.810.272,00	2.155.951.800,00	39,66
2025	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.766.488.804,00 atau 50,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.442.284.504,55. Penetapan target belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp 3.286.332.704,55 atau 152,43 % dari realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024.

Dibandingkan realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp 610.537.004,00 atau 28,32%. Kenaikan realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi belanja tak terduga yang mengalami peningkatan sebesar 2.606,08% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi realisasi belanja tak terduga terhadap realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 0.07%, mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari porsi realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,06%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja tak terduga, antara lain:

(1) Mengkaji kembali tren penggunaan belanja tak terduga dalam beberapa tahun terakhir sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;

(2) Menyesuaikan alokasi belanja tak terduga dengan tingkat risiko daerah, potensi bencana, dan kebutuhan darurat yang realistis;

(3) Menggunakan data historis realisasi belanja tak terduga sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(4) Menghindari penganggaran yang terlalu besar apabila kebutuhan darurat pada tahun-tahun sebelumnya relatif rendah;

(5) Melakukan monitoring terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan kebutuhan belanja tak terduga; dan

(6) Menyusun laporan evaluasi penggunaan belanja tak terduga secara triwulanan sebagai bahan pengambilan keputusan.

4) Belanja Transfer :

Belanja transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp528.350.989.472,00 atau 97,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.652.123.254,00.

Gambaran capaian realisasi belanja transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	469.074.917.412,00	467.003.286.509,00	99,56
2022	466.853.500.349,00	464.366.083.349,00	99,47
2023	525.070.099.600,00	498.411.709.200,00	94,92
2024	534.650.532.265,00	487.359.170.216,00	91,15
2025	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,01

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp528.350.989.472,00 atau 97,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.652.123.254,00. Penetapan target belanja transfer Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi sebesar Rp57.292.953.038,00 atau 11,76% dari realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024.

Dibandingkan realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp 40.991.819.256,00 atau 8,41%. Kenaikan realisasi belanja transfer Tahun Anggran 2025 tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi belanja transfer yang mengalami penurunan sebesar 4,63% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Porsi realisasi belanja transfer terhadap realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar 13,65%, mengalami kenaikan sebesar 0,86% dari porsi realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar 0.86%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan *clan* pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan untuk menjamin kepastian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada pemerintah kabupaten/kota/desa penerima bantuan keuangan.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan capaian realisasi belanja minimal 90,00%, realisasi belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 89,74% sehingga realisasi belanja tersebut belum sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2) Capaian realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 cukup optimal, dan telah mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,51% dibandingkan dengan capaian realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 80,23%;
3) Realisasi total belanja daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.59.695.346.257,56 atau 1,57% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
4) Kendala dan permasalahan pencapaian realisasi belanja dapat berupa, antara lain:
    a) Perencanaan anggaran belanja pegawai serta barang dan jasa yang kurang efektif yang berdampak terhadap peningkatan sisa anggaran/hasil efisiensi belanja pegawai serta belanja barang dan Jasa;
    b) Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa sub kegiatan, sehingga tidak cukup waktu untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran;
    c) Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK belum dapat direalisasikan karena pelaksanaan pengangkatan PPPK yang tidak sesuai dengan rencana;
    d) Adanya kegagalan pengadaan barang/jasa dikarenakan tidak tersedia dalam katalog elektronik;
    e) Pembebasan lahan/tanah tidak dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun dikarenakan belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah daerah dengan masyarakat selaku pemilik tanah dan/atau kendala pembebasan lainnya;

f) Penghitungan HPS yang tidak cermat sehingga menyebabkan adanya selisih lelang;

g) Keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah atas tagihan penyedia barang/jasa sesuai hasil pekerjaan, sehingga sampai dengan akhir tahun belum dapat direalisasikan; dan

h) Kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan yang masih kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan belanja daerah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan sumber pendanaan, dan mempertimbangkan:
   a) Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
   b) Kebutuhan infrastruktur untuk layanan masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian; dan
   c) Khususnya dalam perencanaan tanah, agar memastikan terlebih dahulu ketersediaan, kesepakatan harga dan legalitas dokumen kepemilikan tanah yang akan dibeli dari masyarakat sebagai dasar penganggaran, untuk menghindari tidak dapat direalisasikan.
2) Penyusunan anggaran belanja daerah harus berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS), Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, seperti belanja pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik. Pemenuhan alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan porsi belanja modal untuk pengadaan infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan publik;
4) Mengalokasikan anggaran secara efisien dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja dalam rangka pencapaian output setiap sub kegiatan yang ditetapkan;
5) Perhitungan HPS sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar dilakukan lebih cermat dengan mendasarkan pada antara lain harga pasar/harga wajar atas pekerjaan sejenis serta standar harga teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD;
7) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DPA;

b) Optimalisasi pengadaan melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring;

c) Optimalisasi penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan; dan

d) Mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak berupa bukti pembelian dan surat pesanan dalam pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana.

8) Menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;

9) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa pada masing-masing SKPD secara simultan dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan belanja barang/jasa yang tujuannya untuk menjamin:

a) Efektivitas pelaksanaan belanja barang/jasa, yaitu tercapainya tujuan/ sasaran program, *output* kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam AKPD dan SPD;

b) Efisiensi penggunaan anggaran, yaitu tercapainya tujuan/ sasaran program, *output* kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada setiap SKPD dengan penggunaan input yang seminimal mungkin;

c) Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, yaitu pelaksanaan belanja barang/jasa yang dilakukan secara tertib dan taat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan

d) Optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran pengadaan barang/jasa untuk pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah.

10) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa pada masing-masing SKPD secara simultan dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan belanja barang/jasa yang tujuannya untuk menjamin:

a) Efektivitas pelaksanaan belanja barang/jasa, yaitu tercapainya tujuan/sasaran program, *output* kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam AKPD dan SPD;

b) Efisiensi penggunaan anggaran, yaitu tercapainya tujuan/ sasaran program, *output* kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada setiap SKPD dengan penggunaan input yang seminimal mungkin;

c) Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, yaitu pelaksanaan belanja barang/jasa yang dilakukan secara tertib dan taat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan

d) Optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran pengadaan barang/jasa untuk pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah.

11) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa untuk menghindari pemutusan kontrak akibat kegagalan dalam pelaksanaan barang/jasa yang berdampak keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan;

12) Mematuhi pedoman penyusunan APED untuk tidak menganggarkan belanja modal pada perubahan APED, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran;

13) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APED;

14) TAPD bersama APIP, memastikan adanya keterpaduan antara sasaran atau hasil yang diharapkan dalam sub kegiatan dengan korelasi belanja yang diperlukan sehingga setiap rincian belanja mempunyai kemanfaatan atau benar-benar diperlukan untuk pencapaian output sehingga sasaran kinerja dapat tercapai seperti yang direncanakan;

15) Mengoptimalkan capaian realisasi dan kemanfaatan sub kegiatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan supaya lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan cara menyediakan media pengaduan, pertanyaan dan saran melalui *call center* yang aktif 24 jam (*whatsapp*, SMS, dan Telepon) maupun melalui *website*; dan

16) Memperhatikan pelaksanaan transfer bagi hasil pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengantisipasi pembentukan hutang/kewajiban atas tunda salur bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota.

c. PEMBIAYAAN :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah :

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.002.992.663,01% atau 99,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.056.371.759,01.

Gambaran capaian realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	826.727.227.696,00	819.314.146.595,48	99,10
2022	294.404.090.210,00	294.340.224.015,75	99,98
2023	63.371.679.556,00	62.401.787.597,88	98,47
2024	121.636.582.610,58	131.728.424.206,58	108,30
2025	50.056.371.759,01	50.002.992.663,01	99,89

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 belum optimal dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan target penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp81.672.052.447,57 atau turun sebesar 62,00% dari realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan sebesar Rp81.725.431.543,57 atau 62,04%. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dari rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami peningkatan sebesar 79,00% dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran penerimaan pembiayaan daerah yaitu perencanaan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara cermat dengan perhitungan yang akurat dan terukur untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penetapan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mengacu pada besaran SiLPA berdasarkan LHP BPK RI.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.586.109.626,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp 26.586.109.626,00.

Gambaran capaian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	241.354.220.591,00	221.812.445.858,00	91,90
2022	283.088.251.046,00	192.415.108.046,00	67,97
2023	127.790.421.232,00	127.625.314.529,00	99,87
2024	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	100,00
2025	26.586.109.626,00	26.586.109.626,00	100,00

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp26.586.109.626,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.586.109.626,00.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran pembiayaan daerah dengan penetapan pagu anggaran serta pelaksanaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo agar memedomani Surat Perjanjian Utang Daerah.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 (SiLPA) :
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp 120.215.662.518,73. Apabila dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.056.371.759,01, terdapat peningkatan sebesar Rp 70.159.290.759,72 atau 140,16%.
Porsi SiLPA Tahun Anggaran 2025 terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.313.840.074.908,60 adalah 2,79%.
Rasio SiLPA terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2021 s.d. Tahun Anggaran 2025) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja (Rp)	SiLPA (Rp)	Porsi SILPA terhadap Total Anggaran Belania Daerah
2021	4.199.063.344.221,00	27.173.804.459,75	0,65
2022	3.556.246.375.776,00	63.371.679.556,76	1,78
2023	403.727.352.101,00	119.544.525.633,58	29,61
2024	4.750.926.224.507,58	50.056.371.759,01	1,05
2025	4.313.840.074.908,60	120.215.662.518,73	2,79

Berdasarkan data tersebut di atas, porsi SiLPA Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan porsi SiLPA Tahun Anggaran 2024.

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih besar dari jumlah kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp89.688.410.690,21, dengan demikian SiLPA tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek melalui pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pejabat pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan dan pembayaran belanja daerah, guna mendorong percepatan realisasi belanja daerah;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah; dan
5) Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan. Selanjutnya, SiLPA Tahun Anggaran 2025 tersebut diprioritaskan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. NERACA :

a. ASET LANCAR :

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.399.050.654.370,86, dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp773.453.114.298,24, mengalami kenaikan sebesar Rp 625.597.540.072,62 atau 80,88%. Aset Lancar Tahun 2025 tersebut, antara lain:

1) Kas dan Setara Kas sebesar Rp120.217.562.517,73;
2) Piutang sebesar Rp1.285.683.040.116,36;
3) Penyisihan Piutang sebesar Rp63.674.997.925,95;
4) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp3.857.716.699,47; dan
5) Persediaan sebesar Rp52.967.332.963,25.

Secara rinci Aset Lancar Tahun 2025 tersebut diuraikan, antara lain:

1) Kas dan Setara Kas sebesar Rp120.217.562.517,73, terdapat pada:
   a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.783.266.056,28;
   b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp898.697.059,00;
   c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp36.908.624,00;
   d) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp26.904.128.168,45;

e) Kas Dana BOS sebesar Rp0,00;

f) Kas Lainnya sebesar Rp1.899.999,00;

g) Kas Dana BOSP sebesar Rp181.686.000,00; dan

h) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp5.410.976.611,00

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat penempatan kas daerah pada beberapa bank. Oleh karena itu, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah penertiban pengelolaan Kas Daerah, antara lain:

a) Memerintahkan seluruh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan penerimaan yang diterimanya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah pendapatan tersebut diterima sebagaimana amanat Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b) Memerintahkan seluruh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyetorkan sisa UP yang dikelolanya ke RKUD paling lambat per 31 Desember; dan

c) PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi kas secara periodik dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

2) Piutang :

Saldo Nominal Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.285.683.040.116,36, berupa:

a) Piutang Pendapatan sebesar Rp 1.284.341.763.005,60 terdiri dari:

(1) Piutang Pajak sebesar Rp104.788.440.583,11;

(2) Piutang Retribusi sebesar Rp337.355.660,00;

(3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp4.688.693.024,49;

(4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.114.240.284.000,00;

(5) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp 60.286.989.738,00; dan

b) Piutang lainnya sebesar Rp 1.341.277.110,76.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp63.674.997.925,95, terdiri dari:

a) Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp62.574.803.766,25;

b) Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp 337.355.660,00;

c) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp593.370.172,64; dan

d) Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp 169.468.327,06;

Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.222.008.042.190,41.

Berkenaan dengan piutang tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

3) Beban Dibayar Dimuka :

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.857.716.699,47, terdiri dari:

a) Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 1.476.473.484,65; dan

b) Belanja Premi Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp2.381.243.214,82.

4) Persedian :

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.967.332.963,25, antara lain:

a) Bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp3.496.000,00;

b) Bahan kimia sebesar Rp1.186.272.815,18;

c) Bahan bakar dan pelumas sebesar Rp4.875.000,00;

d) Bibit tanaman sebesar Rp234.067.836,00;

e) Isi tabung gas sebesar Rp20.315.178,00;

f) Bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp26.220.666,01;

g) Bahan lainnya sebesar Rp757.445.382,31;

h) Suku cadang alat kedokteran sebesar Rp918.496,00;

i) Alat tulis kantor sebesar Rp1.751.116.574,80;

j) Kertas dan cover sebesar Rp40.254.015,00;

k) Bahan cetak sebesar Rp649.021.194,89;

l) Benda pos sebesar Rp446.000,00;

m) Bahan komputer sebesar Rp134.976.336,06;

n) Perabot kantor sebesar Rp38.527.339,50;

o) Alat listrik sebesar Rp5.712.228.295,04;

p) Suvenir/cendera mata sebesar Rp234.095.800,00;

q) Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp207.049.123,50;

r) Obat sebesar Rp10.464.366.422,81;

s) Obat lainnya sebesar Rp5.870.424.312,96;

t) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya sebesar Rp11.671.450,00;

u) Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp500.804.137,44;

v) Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp24.727.529.650,00;

w) Natura sebesar Rp391.148.907,75; dan

x) Natura dan pakan lainnya sebesar Rp62.000,00.

Berkenaan dengan nilai persediaan di atas, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Terhadap persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan dan alat kesehatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, harus dilakukan pengendalian dan pengamanan terhadap pengelolaan persediaan dimaksud;

b) Meningkatkan pengendalian atas pengelolaan persediaan mengingat persediaan tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik serta merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

c) Harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan persediaan yang dimulai dari peningkatan kompetensi SDM seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya, sampai dengan menyempurnakan sistem operasi dan prosedur, sistem akuntansi serta kebijakan akuntansi dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat persediaan termasuk aset daerah; dan

d) Harus cermat dalam merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b. ASET TIDAK LANCAR :

1) Investasi Jangka Panjang :

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp671.540.671.670,97 mengalami penurunan sebesar 4,60 % dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp703.954.597.087,50, terdiri atas:

a) PDAM Tirta Randik sebesar Rp312.420.985.551,20;

b) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel sebesar Rp129.051.643.431,23;

c) PT Petro Muba Holding Rp219.409.770.231,54; dan

d) PT Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp10.658.272.457,00.

Berdasarkan data tersebut, investasi jangka panjang pada PDAM Tirta Randik, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, PT. Petro Muba *Holding*, PT Muba Energi Maju Berjaya yang telah memberikan kinerja positif dengan kontribusi laba, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap melakukan evaluasi secara berkala, membuat analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan

investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut antara lain mulai dari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan BUMD, efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan *proses due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Aset Tetap :

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.438.375.171.444,08 mengalami penurunan sebesar Rp 1.190.962.659.599,17 atau 17,97% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.629.337.831.043,25. Saldo aset tetap tersebut, antara lain:

a) Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp537.373.517.393,80 terjadi kenaikan sebesar Rp153.993.000,00 atau 0,03% dibandingkan Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 537.219.524.393,80;

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.573.018.555.113,03 mengalami kenaikan sebesar Rp79.216.380.665,87atau 5,30% dibandingkan Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.493.802.174.447,16;

c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.486.082.218.783,01 mengalami kenaikan sebesar Rp88.473.966.398,68 atau 2,60% dibandingkan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.397.608.252.384,33;

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.345.578.746.315,61 mengalami kenaikan sebesar Rp170.110.828.105,63atau 1,67% dibandingkan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.175.467.918.209,98;

e) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 123.647.979.134,25 mengalami pengurangan sebesar Rp125.505.712.746,98 atau 20,14% dibandingkan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 102.918.522.672,25;

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp125.505.712.746,98 mengalami pengurangan sebesar Rp 8.843.331.052,19 atau 6,58% dibandingkan Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp134.349.043.799,18; dan

g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp10.752.831.558.042,60 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.540.803.953.179,15 atau 16,73% dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.212.027.604.863,45.

Berkenaan dengan nilai aset tetap dimaksud, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap mengingat aset tetap tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik serta merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Terkait penatausahaan aset tetap terutama terkait pencatatan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengaman aset tetap dan penerapan metode penyusutan aset tetap, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus tetap berupaya dalam penertiban atas penatausahaan aset tetap, antara lain, peningkatan kompetensi SDM seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya, sampai dengan menyempurnakan Sistem Operasi dan Prosedur, Sistem Akuntansi serta Kebijakan Akuntansi dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Aset Lainnya :

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 337.330.674.759,60 mengalami kenaikan sebesar Rp18.037.608.494,27 atau 5,65% dari saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 319.293.066.265,33, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tagihan Penjualan Angsuran Sebesar Rp501.428.296,00 sama besar dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp501.428.296,00;

b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp7.201.265.760,41 mengalami kenaikan sebesar Rp6.434.533.383,40 atau 839,22% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp766.732.377,01;

c) Aset Tak Berwujud sebesar Rp96.793.859.862,46 mengalami kenaikan sebesar Rp12.498.430.072,00 atau 14,83% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.295.429.790,46.

d) Aset Lain-lain sebesar Rp405.159.703.879,89 mengalami kenaikan sebesar Rp109.380.868.908,30 atau 36,98% dibandingkan nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp405.159.703.879,89;

e) Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp77.338.622.798,26 mengalami kenaikan sebesar Rp19.994.369.320,46 atau 34,87% dibandingkan dengan Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.344.253.477,80;

f) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp94.986.960.240,90 mengalami kenaikan sebesar Rp41.371.610.548,97 atau 77,16% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.615.349.691,93; dan

g) Dana TDF sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.910.244.000,00 atau 100% dibandingkan dengan *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.910.244.000,00.

4) Properti Investasi :

Properti investasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.450.924.411,97, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tanah sebesar Rp105.264.710.786,97; dan
b) Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.213.625,00;

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyajian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur properti investasi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda Tanggal 5 April 2024 yang mengamanatkan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur properti investasi telah diklasifikasikan menjadi properti investasi tanah, properti investasi gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan properti investasi gedung dan bangunan dan akumulasi penyusutan properti investasi gedung dan bangunan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan hasil dari pemanfaatan BMD berupa tanah dan bangunan yang menjadi properti investasi.

c. KEWAJIBAN :

Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp171.220.559.920,21 yang terdiri Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp89.688.410.690,21 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp81.532.149.230,00. Apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 sebesar Rpl.480.364.344.320,22, mengalami penurunan sebesar Rp 390.675.933.630,01 atau 81,33%.
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025, terdiri atas:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp 1.899.999,00, merupakan PPN pada SD Negeri 2 Sekayu atas Belanja BOS tahun 2023 yang di setor ke kas negara pada tanggal 02 Maret 2026;
2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 81.116.609,66;
3) Utang Belanja sebesar Rp 77.338.720.081,55; dan
4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp12.266.674.000,00.

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81.532.149.230,00 turun sebesar Rp1.103.636.095,00 atau 1,34% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.635.785.325,00.

Berkenaan dengan Kewajiban Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

1) Melakukan pelaksanaan pembayaran atas utang belanja seperti utang perhitungan pihak ketiga, utang belanja barang dan jasa, dan utang jangka pendek lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pokok hutang dan bunga atas pinjaman jangka panjang sesuai dengan perjanjian pinjaman daerah; dan
3) Segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2025, sesuai dengan ketentuan paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

d) EKUITAS :

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.780.527.536.737,27, apabila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp7.970.883.849.249,46, mengalami penurunan sebesar Rp190.356.312.512,19 atau 2,39%. Hal ini menggambarkan bahwa kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ekuitas ini menunjukkan adanya tekanan

terhadap keuangan daerah, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan belanja daerah, penurunan pendapatan, atau adanya pembiayaan yang tidak seimbang. Meskipun penurunan ini relatif kecil, hal ini tetap menjadi perhatian penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya optimalisasi pendapatan serta pengelolaan belanja yang lebih efisien agar dapat memperkuat posisi ekuitas di masa mendatang. Selain itu, strategi pengelolaan aset dan liabilitas juga perlu terus dimonitor agar tidak berdampak negatif terhadap kekayaan bersih daerah.

Dengan demikian, penurunan ekuitas ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan di masa mendatang agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang berkelanjutan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO) :

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.845.826.836.301,42. Pendapatan LO Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp559.249.723.665,59, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 587.378.681.108,99 atau 95,21%. Pendapatan Asli Daerah-LO tersebut terdiri dari:
   1) Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp219.429.211.366,89, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp223.975.016.750,00 atau 97,97%;
   2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.914.556.645,00, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp566.787.000,00 atau 175,14%;
   3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.395.564.057,60, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 61,32%; dan
   4) Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp311.510.391.596,08, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp327.742.877.358,99.

b) Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.283.266.982.018,83 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.702.991.131.666,60 atau 115,67%. Pendapatan Transfer-LO tersebut, antara lain:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.089.130.047.902,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.505.400.983.500,00 atau 116,65%; dan
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp194.136.934.116,83 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp197.590.148.166,60 atau 98,25%.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.310.130.617,00, tidak dianggarkan pada anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. INFORMASI LAINNYA :

a) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2025.

Fungsi	Komponen Perhitungan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Porsi %
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 4.313.840.074.908,60	1.101.321.078.282,35	1.015.893.689.481,50	92,24	25,53
Kesehatan (min. 20% dari Total Belanja Daerah diluar gaji ASN)	Total belanja diluar gaji ASN: - 3.444.333.933.523,33	727.029.223.705,60	657.546.034.531,12	90,44	21,11
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja transfer	Total belanja diluar belanja transfer: 3.769.187.951.654,60	1.669.388.187.196,29	1.197.621.145.809,40	71,74	44,29

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan dialokasikan sebesar Rp1.101.321.078.282,35 dengan porsi 25,53% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.313.840.074.908,60.
   Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Anggaran Kesehatan dialokasikan sebesar Rp727.029.223.705,60 atau 21,11% dari total belanja daerah diluar gaji ASN. dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.444.333.933.523,33. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari belanja daerah diluar gaji ASN sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp1.669.388.187.196,29 atau 44,29% dari total belanja daerah diluar belanja transfer, dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.769.187.951.654,60. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik ditetapkan paling rendah 40% dari total Belanja Daerah, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah lain dan/atau desa.

b) Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (*Trantibumlinmas*), dan Sosial Tahun Anggaran 2025.

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	33.206.009.300,00	4.939.369.550,00	14,87
Kesehatan	5.357.493.215,00	215.357.207,00	4,02
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.133.226.650,00	7.571.693.514,00	19,86
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.530.816.000,00	330.523.050,00	5,06
Ketentraman dan Ketertiban Um um	5.164.112.858,00	945.040.497,00	18,30
Sosial	2.396.158.700,00	1.034.895.736,00	43,19
Jumlah	90.787.816.723,00	15.036.879.554,00	16,56
Total Belanja APBD	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	89,74
Rasio	2,10	0,39	

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk seluruh bidang sebesar Rp90.787.816.723,00 dan terealisasi sebesar Rp15.036.879.554,00 atau 16,56%. Rasio anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah 2,10% dan terealisasi sebesar 0,90% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang agar tetap mengalokasikan anggaran belanja untuk pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perkim dan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar mengupayakan pencapaian *output* secara optimal untuk seluruh sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pemenuhan SPM untuk seluruh bidang.

c) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Kegiatan	Anggaramn (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Peningkatan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba			
1	Pembinaan Kelembagaan dan Managemen PAUD	967.736.150,00	923.739.417,00	95,45
2	Pengeolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.916.000,00	49.300.454,00	74,79
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.879.000,00	58.214.833,00	76,72
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.428.499,00	36.224.416,00	94,26
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.965.000,00	28.037.371,00	85,05
6	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Gizi Masyarakat	111.440.500,00	82.410.155,00	73,95
7	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.242.823.200,00	51.737.863.842,00	91,99
8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	289.782.128,00	201.194.019,00	69,43
9	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	232.226.000,00	104.085.000,00	44,82

	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	10.Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	139.380.000,00	129.052.900,00	92,59
11	11.Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.173.917.200,00	1.147.510.314,00	97,75
12	12.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	117.581.450,00	109.474.853,00	93,11
13	13.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	72.309.700,00	72.309.700,00	100,00
14	14.Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	85.233.000,00	77.062.735,00	90,41
16	15.Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	62.005.500,00	58.372.228,00	94,14
16	16.Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	64.342.249,00	33.909.897,00	52,70
18	17.Pembinaan Terpadu Kampung KB	42.073.500,00	28.706.652,00	68,23
	Optimalisasi Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Diversifikasi Ekonomi			
18	1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.791.000,00	267.382.156,00	96,60
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan Implementasi satu data muba			
19	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	34.628.150,00	30.031.166,00	86,72
	TOTAL	60.125.458.226,00	55.174.882.108,00	91,77
	TOTAL BELANJA DAERAH	4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	89,74
	PORSI TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)	1,39	1,43	

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan stunting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.125.458.226,00 dan terealisasi sebesar Rp55.174.882.108,00 atau 91,77%.

Porsi Belanja Daerah untuk percepatan penurun an stunting terhadap anggaran total Belanja Daerah adalah sebesar 1,39% dan terealisasi sebesar 1,43% dari realisasi total Belanja Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasain, antara lain:

1) Meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
2) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*;
3) Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan stunting; dan

4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

d) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.112.836.000,00	2.028.836.000,00	25,01
2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	74.728.033.180,00	0,00	0,00
3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.122.120.000,00	0,00	0,00
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.863.645.200,00	697.859.000,00	11,90
5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	265.951.800,00	43.526.800,00	16,37
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.003.016.000,00	2.768.042.000,00	46,11
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.985.804.901,00	596.741.000,00	14,97
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.510.836.000,00	149.886.000,00	5,97
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	397.663.000,00	397.663.000,00	100,00
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.915.686.889,00	0,00	0,00
11	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.227.871.850,00	394.272.000,00	32,11
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.196.462.950,00	328.662.950,00	14,96
13	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.859.400.000,00	0,00	0,00
14	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.271.013.000,00	0,00	0,00
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.695.142.000,00	595.142.000,00	35,11
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	637.622.250,00	287.622.250,00	45,11
17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.402.300.000,00	0,00	0,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.771.974.276,00	26.464.000,00	1,49
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	241.341.000,00	117.575.000,00	48,72
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	587.211.600,00	6.105.600,00	1,04
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.319.000,00	32.067.405,00	28,30
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.386.720.339,00	3.482.613,00	0,25
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.965.000,00	3.894.016,00	11,81
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33.016.000,00	1.192.960,00	3,61
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.130.000,00	0,00	0,00
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	492.086.000,00	2.662.800,00	0,54
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	537.540.000,00	7.750.400,00	1,44
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	35.430.000,00	14.162.413,00	39,97
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	71.922.000,00	8.599.300,00	11,96
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.207.126.974,00	1.160.000,00	0,03
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	192.808.727,00	0,00	0,00
32	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.370.508.757,00	52.111.823,00	2,20
33	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.242.823.200,00	11.115.859.771,00	19,76
34	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.627.753.200,00	481.095.000,00	29,56
35	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.286.057.500,00	0,00	0,00
36	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	993.954.650,00	592.098.850,00	59,57
37	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	433.636.000,00	0,00	0,00
38	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	423.934.350,00	0,00	0,00
39	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	16.009.280.800,00	6.066.883.800,00	37,90
40	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.197.707.200,00	0,00	0,00
41	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	9.768.000,00	0,00	0,00
42	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00	51.875.614,00	10,86
43	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	16.059.346.300,00	372.378.100,00	2,32
44	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	158.241.600,00	158.241.600,00	100,00

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
45	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.636.866.250,00	330.523.050,00	20,19
46	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25.934.904.000,00	3.050.000.000,00	11,76
47	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	70.628.476.982,00	6.856.583.450,00	9,71
48	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	125.489.087,00	0,00	0,00
49	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	556.432.000,00	161.976.000,00	29,11
50	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	213.204.700,00	19.231.200,00	9,02
51	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105.045.000,00	25.868.920,00	24,63
52	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24.779.869.700,00	31.607.672,00	0,13
53	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	826.290.950,00	148.430.198,00	17,96
54	Penyediaan Permakanan	1.471.563.000,00	310.276.136,00	21,08
55	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	220.415.700,00	35.093.600,00	15,92
56	Pemberian Layanan Kedaruratan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
57	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	312.434.000,00	33.241.481,00	10,64
58	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.271.433.825,00	12.187.695.082,00	40,26
59	Pelayanan Dukungan Psikososial	304.180.000,00	289.526.000,00	95,18
60	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.506.892.000,00	2.099.803.750,00	46,59
61	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	152.769.925,00	0,00	0,00
62	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	165.655.000,00	15.045.600,00	9,08
63	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	88.196.000,00	0,00	0,00
64	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	139.380.000,00	1.920.000,00	1,38
65	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.173.917.200,00	5.309.540,00	0,45
66	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.987.545,00	1.659.200,00	4,05
67	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	47.839.500,00	17.000.000,00	35,54
68	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	91.844.402,00	34.330.550,00	37,38
69	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.377.950,00	2.250.000,00	5,86
70	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	160.144.701,00	0,00	0,00
71	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	358.448.800,00	55.056.609,00	15,36
72	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	57.270.454,00	0,00	0,00
73	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	51.919.700,00	0,00	0,00
74	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	53.747.000,00	4.555.900,00	8,48
75	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	145.701.198,00	11.533.900,00	7,92
76	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	251.788.075,00	3.453.170,00	1,37
77	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	143.434.000,00	6.523.900,00	4,55
78	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	55.464.000,00	710.000,00	1,28
79	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	152.736.225,00	2.816.700,00	1,84
80	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	926.689.817,00	65.801.300,00	7,10
81	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.566.000.000,00	0,00	0,00
82	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	553.013.054,00	15.794.878,00	2,86
83	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	213.719.499,60	3.195.000,00	1,49
84	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	185.137.500,00	20.626.366,00	11,14

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
84	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	185.137.500,00	20.626.366,00	11,14
85	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	7.278.631.425,00	2.966.687.500,00	40,76
86	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	105.856.050,00	2.667.100,00	2,52
87	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	42.539.000,00	9.661.700,00	22,71
88	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	499.824.000,00	464.215.000,00	92,88
89	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7.085.000,00	7.085.000,00	100,00
90	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.462.365.806,00	0,00	0,00
91	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.791.000,00	27.419.172,00	9,91
92	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	605.775.950,00	39.248.677,00	6,48
93	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.176.842.100,00	763.683.719,00	18,28
94	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	57.775.500,00	37.235.500,00	64,45
95	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.117.636.139,00	214.922.200,00	2,65
96	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	289.343.762,00	0,00	0,00
97	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	35.429.500,00	17.216.150,00	48,59
98	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.497.423.940,00	8.477.300,00	0,57
99	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	214.860.149,00	29.496.584,00	13,73
100	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.758.635.268,00	27.805.665,00	1,58
101	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	183.447.942,50	6.816.050,00	3,72
Total Belanja Kemiskinan Ekstrem		472.921.518.964,10	58.273.990.534,00	12,32
Total Belanja Kemiskinan Daerah		4.313.840.074.908,60	3.871.365.389.427,79	
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)		10,96	1,51	

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp472.921.518.964,10 dan terealisasi sebesar Rp58.273.990.534,00 atau 12,32%. Rasio belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terhadap anggaran total belanja daerah adalah sebesar 10,96% dan terealisasi sebesar 1,51% dari realisasi total belanja daerah.

Alokasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2025 tersebut perlu lebih ditingkatkan dalam rangka percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Musi Banyuasin.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun-tahun mendatang agar tetap melakukan langkah-langkah untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, antara lain:

1) Meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
3) Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

e) Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

No	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal		
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)
1	DINAS PERHUBUNGAN	742.020.000,00	4.628.647,00	0,62	-	-	-
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.780.753.691,00	-	-	225.893.856,00	-	-
3	BPBD	17.043.603.975,20	-	-	8.574.170.849,80	-	-
	TOTAL	20.566.377.666,20	4.628.647,00	0,02	8.800.064.705,80	-	-

Memperhatikan data tersebut, KKPD telah digunakan pada 3 (tiga) OPD, sehingga realisasi belanja menggunakan KKPD masih sangat kecil. Adapun kendala penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

a. Kurangnya komitmen Kepala SKPD untuk menggunakan KKPD;
b. Kurangnya infrastruktur pendukung seperti mesin Elektronik Data *Capture* (EDC) pada penyedia barang/jasa;
c. Dukungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan sebagai bank penempatan RKUD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk menerbit KKPD belum optimal dikarenakan BPD Sumatera Selatan belum mempunyai kewenangan untuk menerbitkan KKPD; dan
d. Bank kerja sama (*co-branding*) yang ditunjuk oleh BPD Sumatera Selatan sebagai penerbit KKPD belum dapat secara optimal mendukung penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan langkah-langkah:

1) Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar membangun komitmen bersama dengan jajaran untuk menggunakan KKPD dalam pengadaan barang/jasa;
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui Uang Persediaan;

3) BPD Sumatera Selatan bekerja sama dengan bank kerja sama (*co-branding*) untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur pendukung penggunaan KKPD di seluruh daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4) BPD Sumatera Selatan bekerja sama dengan bank kerja sama (*co-branding*) dalam memperluas jangkauan belanja daerah menggunakan KKPD baik belanja secara langsung, melalui e-katalog, toko daring dan pengadaan elektronik lainnya;
5) Meningkatkan keterlibatan UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah baik melalui e-katalog lokal maupun belanja secara langsung dan transaksi belanja dilakukan menggunakan KKPD;
6) Meningkatkan besaran Uang Persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Bidang Perbendaharaan meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD khususnya bagi Perangkat Daerah yang belum menerapkan guna percepatan perluasan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kata Nomor 900.1.15.2/433/SJ tanggal 24 Januari 2024 tentang Percepatan Penggunaan KKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penggunaan KKPD secara nasional berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Basil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan klasifikasi penganggaran yang tidak memadai mengakibatkan nilai realisasi belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
2. Realisasi Belanja Barang Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada 26 Satuan Pendidikan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembaayaran atas Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp583.893.034,00;
3. Belanja Honorarium pada 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja honorarium sebesar Rp887.328.575,00 dan Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebesar Rp66.315.000,00 membebani keuangan Daerah;
4. Pembayaran Biaya Langsung Personel atas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada 4 (empat) SKPD tidak sesuai kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar pada 43 sekolah Rp1.610.753.829,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp158.555.062,00 atas pekerjaan jasa konsultansi;
5. Proses Perencanaan, Pengadaan, dan Pelaksanaan Belanja Umrah tidak memadai mengakibatkan prinsip pengadaan barang/jasa berpotensi tidak terpenuhi dan berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan memperoleh harga terbaik serta membebani keuangan daerah;
6. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi mutu atas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp900.286.407,65 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.174.067.558,06; dan
7. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum melaksanakan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya secara memadai mengakibatkan risiko salah saji pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar:

a. Memerintahkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan cermat dan menginstruksikan masing-masing Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) mematuhi ketentuan klasifikasi penganggaran Belanja Daerah dalam dalam pelaksanaan penyusunan APBD;
b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa BOSP pada 26 sekolah sebesar Rp583.893.034,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
c. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

d. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.610.753.829,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp158.555.062,00 atas pekerjaan jasa konsultansi pada empat SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;

e. Sekretaris Daerah lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Belanja Kontribusi Asosiasi Umrah serta menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa, lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, memeriksa hasil pekerjaan, dan merealisasikan kegiatan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai ketentuan perundang-undangan;

f. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp900.286.407,65 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.174.067.558,06 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan

g. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan langkah-langkah penatausahaan BMD sesuai ketentuan.

III. LAIN-LAIN :

Berkenaan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK agar di tahun mendatang dapat dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Bupati Musi Banyuasin tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	3.968.164.168.909,51			
b.	Belanja	Rp.	3.871.365.389.427,79	(-)		
	Surplus				Rp.	96.798.779.481,72
c.	Pembiayaan					
	- Penerimaan	Rp.	50.002.992.663,01			
	- Pengeluaran	Rp.	26.586.109.626,00	(-)		
	Pembiayaan netto				Rp.	23.416.883.037,01
d.	SILPA				Rp.	120.215.662.518,73

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui bersama dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan;

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, di dalam penjabarannya dibuat sesuai dengan hasil Pembahasan Badan Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini;

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA

WAKIL KETUA I,

IRWIN ZULYANI, S.H.

WAKIL KETUA II,

AHMADI

WAKIL KETUA III,

EDI PRAMONO